



Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi

PEMANTAPAN PERAN BAHASA
SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BANGSA

Departemen Pendidikan Nasional

Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi

PEMANTAPAN PERAN BAHASA
SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BANGSA



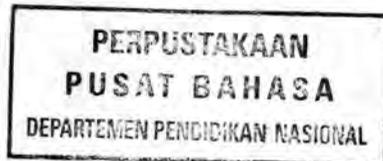
Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi

PEMANTAPAN PERAN BAHASA
SEBAGAI SARANA PEMBANGUNAN BANGSA

RISALAH KONGRES BAHASA INDONESIA VII

Penyunting

Hasan Alwi
Dendy Sugono
Abdul Rozak Zaidan



**Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional
Jakarta
2000**

Penyunting

Hasan Alwi, Dendy Sugono, Abdul Rozak Zaidan

Penyunting Pembantu

S. Amran Tasai, Siti Zahra Yundiafi,
Dedi Puryadi, Mustakim, Muh. Abdul Khak

Pewajah Kulit

Teguh Dewabrata

Pembantu Pelaksana

Djamari, Radiyo, Sukadi

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

Isi buku ini, baik sebagian maupun seluruhnya, dilarang diperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa seizin tertulis dari penerbit, kecuali dalam hal pengutipan untuk keperluan penulisan artikel atau karangan ilmiah.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

499 210 6

BAH

b

Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa/Penyunting Hasan Alwi, Dendy Sugono, dan Abdul Rozak Zaidan.--Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2000.--xiv + 954 hlm.; 24 cm.

ISBN 979 459 060 5

1. BAHASA INDONESIA-TEMU ILMIAH

KATA PENGANTAR

Buku *Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi: Pemantapan Peran Bahasa sebagai sarana Pembangunan Bangsa* ini menyetengahkan berbagai pikiran dan gagasan dalam Kongres Bahasa Indonesia VII 1998 yang diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26--30 Oktober 1998. Kongres ini dibuka oleh Prof. Dr. B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia, di Istana Negara, Jakarta pada tanggal 26 Oktober 1998, pukul 10.00. Peserta Kongres ini berjumlah 850 orang yang terdiri atas pakar dari berbagai bidang ilmu, cendekiawan, budayawan, sastrawan, pejabat pemerintah, dosen, guru, peminat bahasa dan sastra, dan wakil lembaga pendidikan tinggi, lembaga ilmiah, organisasi profesi, serta media massa dari dalam dan luar negeri.

Kongres yang bertujuan memantapkan peran bahasa sebagai sarana pembangunan bangsa ini mengambil tema "Pemantapan Peran Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi" yang merupakan pengembangan tema Kongres Bahasa Indonesia VI, yaitu Bahasa Indonesia Menyongsong Tahun 2000. Tema Kongres VII itu dijabarkan dalam empat pokok masalah, yaitu (1) Kedudukan Bahasa dan Era Globalisasi, (2) Pencendekiaan Bahasa, (3) Penciptaan, Pemahaman, dan Penghayatan Sastra, serta (4) Pemasarakat Bahasa dan Sastra.

Kongres Bahasa Indonesia VII yang berlangsung selama lima hari itu telah berhasil mempersatukan visi dan sikap terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam lima tahun mendatang. Visi dan sikap yang tercermin baik dalam makalah maupun dalam pembahasan kiranya perlu dimasyarakatkan dalam wujud buku seperti ini.

Dalam rangka Kongres itu telah diselenggarakan pula Pameran Buku dan Informasi Kebahasaan di Hotel Indonesia yang menyajikan 1.600 judul buku yang berkaitan dengan kongres bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda, bahasa dan sastra Indonesia, serta kamus berbagai bidang ilmu. Di samping itu, disajikan pula peragaan Uji Kemampuan Berbahasa Indonesia melalui komputer.

Pada kesempatan Kongres Bahasa Indonesia VII ini peserta tidak hanya terlibat dalam diskusi ilmiah yang melelahkan sepanjang hari, tetapi juga dihibur oleh adanya malam Pentas Sastra dan Seni yang menampilkan, antara lain, Rosihan Anwar, Rendra, Putu Wijaya, Sutardji Calzoum Bachri, Leon Agusta, dan Hamid Jabbar, serta Adi Kurdi dan Reni Djajusman. Selain itu, tampil juga Trio Bimbo, grup musik dari Bandung yang terkenal dengan lirik lagunya yang pantas. Pada malam Pentas Sastra dan Seni itu diumumkan pula penerima Penghargaan Sastra Tahun 1998 dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Semua putusan yang dicapai dalam Kongres Bahasa Indonesia VII menyangkut kepentingan segenap lapisan masyarakat, baik Pemerintah, swasta maupun masyarakat umum. Sesuai dengan pidato Prof. Dr. B.J. Habibie pada pembukaan Kongres, pada masa reformasi seperti sekarang ini hendaklah ditinggalkan kecenderungan memfeodalkan bahasa dan penggunaan eufemisme yang memanipulasi suatu kenyataan pahit karena kecenderungan itu menjadi pertanda tidak adanya transparansi dalam men-

jalankan roda pemerintahan. Cara-cara semacam itu justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehubungan dengan itu, Presiden meminta kepada semua pihak, terutama jajaran birokrasi pemerintahan, agar menggunakan bahasa secara lugas dan menjauhkan kecenderungan eufemisme. Oleh karena itu, pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII menghendaki peningkatan kerja sama yang erat antara Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat dalam upaya memantapkan kedudukan bahasa sebagai sarana pembangunan bangsa dalam era glosalisasi.

Penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VII dimungkinkan oleh adanya bantuan dari berbagai pihak dan biaya yang disalurkan melalui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Proyek Pembinaan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah-Pusat, serta bantuan dari berbagai pihak yang mempunyai kepedulian terhadap upaya pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Untuk itu, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memungkinkan penyelenggaraan kongres itu. Demikian juga kepada Proyek yang membiayai penerbitan ini dan para penyunting yang telah mempersiapkan buku ini kami sampaikan terima kasih.

Jakarta, 29 Februari 2000

PRAKATA

Kongres Bahasa Indonesia VII telah diselenggarakan di Hotel Indonesia, Jakarta pada tanggal 26--30 Oktober 1998. Kongres yang merupakan forum pertemuan kelompok profesional dari berbagai bidang dimaksudkan untuk memperoleh berbagai gagasan tentang pembinaan dan pengembangan bahasa berdasarkan tema "Pemantapan Peran Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi". Tema tersebut dikupas dalam makalah kunci yang berjudul "Kebinekaan Bahasa, Pembangunan Bangsa, dan Era Globalisasi. Makalah kunci itu dijabarkan ke dalam empat pokok masalah dan tiap pokok masalah dibahas dalam sejumlah makalah. *Pertama*, kedudukan bahasa Indonesia dalam era globalisasi dibahas dalam 20 makalah; *kedua*, pencendekiaan bahasa dibahas dalam 15 makalah; *ketiga*, penciptaan, pemahaman, dan penghayatan sastra dibahas dalam 7 makalah; *keempat*, pemasyarakatan bahasa dan sastra dibahas dalam 28 makalah. Selain itu, pembahasan tema utama Kongres digelar dalam empat diskusi panel yang menengahkan topik (1) Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara, (2) Kebijakan Bahasa Nasional, (3) Pemantapan Peran Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan, dan (4) Peran Media Massa dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra. Perlu dicatat di sini bahwa ada satu makalah yang tidak disajikan, yakni makalah Ayu Utami karena yang bersangkutan tidak hadir pada waktu sidang berlangsung.

Pembahasan pokok masalah pertama ditujukan pada upaya menyikapi berbagai tuntutan dan tantangan perkembangan sosial dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perkembangan teknologi informasi dalam kehidupan era globalisasi pada milenium ketiga. Pembahasan itu merupakan realisasi dari subtema pertama, yaitu "Memperkokuh Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi". Pemaparan gagasan dan diskusi mengenai kedudukan dan fungsi bahasa tersebut dapat disimak kembali pada bagian **I Kedudukan Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi** dalam buku ini.

Pembahasan pokok masalah kedua ditujukan pada upaya menyikapi tuntutan dan tantangan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di Indonesia dan di dalam pergaulan internasional. Untuk itu, Kongres telah membahas upaya peningkatan kualitas dan kemampuan daya ungkap serta penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara. Pembahasan itu merupakan perwujudan subtema kedua, yaitu "Meningkatkan Mutu Bahasa sebagai Sarana Komunikasi". Pengungkapan gagasan dan diskusi mengenai upaya itu dapat dilihat kembali pada bagian **II Pencendekiaan Bahasa**.

Pembahasan pokok masalah ketiga ditujukan pada upaya peningkatan penciptaan karya sastra untuk menjawab persoalan makin langkanya karya-karya sastra bermutu, baik untuk kepentingan dunia pengajaran maupun untuk keperluan masyarakat umum. Selain itu, telah dibahas pula upaya peningkatan apresiasi sastra mengingat kemampuan apresiasi sastra masyarakat pada umumnya belum menunjukkan sikap positif

terhadap karya sastra Indonesia ataupun daerah. Penelusuran kembali diskusi sastra tersebut dapat dilakukan dengan membaca bagian **III Penciptaan, Pemahaman, dan Penghayatan Sastra** dalam buku ini.

Berbagai gagasan yang merupakan hasil pembahasan pokok masalah pertama, kedua, dan ketiga tanpa dimasyarakatkan, gagasan-gagasan tersebut hanya akan menjadi dokumen para pakar dan pejabat. Untuk itulah, pokok masalah keempat telah mengupas berbagai upaya pemasyarakatan bahasa dan sastra serta berbagai upaya peningkatan mutu penggunaan bahasa dan apresiasi sastra baik melalui pendidikan bahasa dan sastra maupun melalui penyuluhan kepada masyarakat pengguna bahasa. Selain itu, pada pokok masalah ini juga dibicarakan ihwal penerjemahan dan perbukuan dalam upaya penyediaan sarana kebahasaan dan kesastraan untuk mengimbangi perkembangan perbukuan bahasa asing. Dalam menyikapi persaingan ketenagaan yang makin ketat, dalam pokok masalah keempat telah dibahas pengembangan ketenagaan dan peningkatan kerja sama, baik yang menangani bahasa maupun yang menangani sastra. Peranan Indonesia di dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting. Untuk itu, telah dibahas pula pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing (BIPA) yang mengungkapkan pelaksanaan BIPA di negara-negara penyelenggaraan BIPA. Berbagai gagasan dan pembahasan tersebut dapat ditengok kembali pada bagian **IV Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra** dalam buku ini.

Keseluruhan makalah dan catatan sidang dimuat di dalam buku ini dengan maksud agar pembaca dapat menelusuri kembali perbincangan di dalam Kongres VII ini. Di samping makalah, buku ini juga memuat Sambutan Presiden Republik Indonesia dan Laporan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara pembukaan, laporan Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI dan Laporan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada sidang pleno pertama. Pada bagian akhir buku ini juga dimuat Putusan Kongres, Sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada acara penutupan, Jadwal Sidang, Daftar Pemakalah, Peserta, dan Panitia. Untuk keperluan dokumentasi, buku ini juga menyertakan foto tokoh dan seniman serta suasana sidang Kongres Bahasa Indonesia VII.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dalam upaya meningkatkan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia pada masa-masa yang akan datang. Kepada semua pihak yang telah memungkinkan kemudahan pengemasan risalah Kongres Bahasa Indonesia VII dalam bentuk seperti ini, Tim Penyunting menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, 29 Februari 2000

Tim Penyunting

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	v
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI	ix
SAMBUTAN PRESIDEN	1
LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	5
LAPORAN PANITIA KERJA KONGRES BAHASA INDONESIA VI	7
LAPORAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI	10
KEBINEKAAN BAHASA, PEMBANGUNAN BANGSA, DAN ERA GLOBALISASI	17
<i>Juwono Sudarsono</i>	
I. KEDUDUKAN BAHASA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI	
✓ 1. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi	26
<i>Anton M. Moeliono</i>	
✓ 2. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi	34
<i>Zainuddin Taha</i>	
3. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia di dalam Era Globalisasi	48
<i>Asim Gunarwan</i>	
✓ 4. Pelestarian Bahasa Daerah	63
<i>Hasan Alwi</i>	
✓ 5. Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Pelajaran dalam Sistem Pendidikan	77
<i>M. Husni Mu'adz</i>	
✓ 6. Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan	94
<i>Soenjono Dardjowidjojo</i>	
7. Sumpah Pemuda dan Jati Diri Generasi Muda	111
<i>Agung Laksono</i>	
8. Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
✓ a. Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	119
<i>Agum Gumelar</i>	
- b. Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara: Perannya Menghadapi Globalisasi	129
<i>Alwi Dahlan</i>	

c.	Beberapa Catatan Mengenai Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Bernegara, dan Berbangsa	132
	<i>Mely G. Tan</i>	
d.	Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	139
	<i>T.A. Ridwan</i>	
9.	Kebijakan Bahasa Nasional	
a.	Kebijakan Bahasa Nasional: Pembinaan Sastra Daerah	155
	<i>Ajip Rosidi</i>	
b.	Kebijakan Bahasa Nasional: Pengajaran Bahasa Inggris di Sekolah	156
	<i>Ignas Kleden</i>	
c.	Beberapa Gagasan ke Arah Perumusan Kembali "Politik Bahasa"	157
	<i>Taufik Abdullah</i>	
d.	Melepaskan Diri dari Cengkeraman Bahasa Pers Orde Baru	163
	<i>Parakitri T. Simbolon</i>	
10.	Peningkatan Mutu dan Pemasarakan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Memperkukuh Jati Diri Bangsa dalam Era Globalisasi	172
	<i>Muradi Yuti</i>	
11.	Peraturan Perundangan-undangan tentang Bahasa	179
	<i>Yusril Ihza Mahendra</i>	
12.	Sastra dan Jati Diri Bangsa	188
	<i>Edi Sedyawati</i>	
13.	Kesusastraan Indonesia Lama sebagai Sumber Pembinaan Jati Diri Bangsa	195
	<i>Achadiati Ikram</i>	

II. PENCENDIKIAAN BAHASA

1.	Kata: Pemekaran Konsep, Pengembangan Makna	211
	<i>Harimurti Kridalaksana</i>	
2.	Pengembangan Istilah dalam Era Globalisasi	223
	<i>Adi Sunaryo dan Sri Sukesi Adiwimarta</i>	
3.	Struktur Kalimat Bahasa Indonesia: Penerapan dan Pemasarakatannya	232
	<i>Dendy Sugono</i>	
4.	Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan: Masa Kini dan Masa Depan	241
	<i>A. Latief</i>	
5.	Ragam Lisan Bahasa Indonesia	252
	<i>Amran Halim</i>	
6.	Lafal Bahasa Indonesia Baku	260
	<i>Hans Lapoliwa</i>	

7. Bahasa Indonesia, Iptek, dan Era Globalisasi	273
<i>Haryanto R. Putro dan Machmud Thohari</i>	
8. Bahasa Indonesia dalam Bidang Keilmuan	292
<i>Jan Hoesada</i>	
9. Bahasa Indonesia dalam Wacana Hukum	301
<i>H.A.S. Natabaya</i>	
10. Bahasa Politik dalam Bahasa Indonesia	312
<i>Hans E. Kawuluan</i>	
11. Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara	320
<i>Miftah Thoha</i>	
12. Peran Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Dakwah	332
<i>Komaruddin Hidayat</i>	
13. Bahasa Indonesia dalam Media Massa	343
<i>Atmakusumah Astraatmadja</i>	
14. Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu	351
<i>Yayah B. Lumintintang</i>	
15. Iklan sebagai Media Pembinaan Bahasa Indonesia	378
<i>Felicia N. Utorodewo</i>	

III. PENCIPTAAN, PEMAHAMAN, DAN PENGHAYATAN SASTRA

1. Mutu Sastra Kita	399
<i>Faruk</i>	
2. Sastra Indonesia di Forum Internasional	408
<i>Budi Darma</i>	
3. Pengaruh Asing dalam Sastra Indonesia	426
<i>Sapardi Djoko Damono</i>	
4. Sastra dan Industri Budaya dalam Era Reformasi	439
<i>Ikranagara</i>	
5. Kelisanan, Keberaksaraan, Juga Generasi yang Jadi Baur	461
<i>Ayu Utami</i>	
6. Pemberdayaan Komunitas Sastra Indonesia di Daerah	480
<i>Suripan Sadi Hutomo</i>	
7. Kebijakan Penghargaan Sastra	497
<i>Slamet Sukirnantanto</i>	

IV. PEMASYARAKATAN BAHASA DAN SASTRA

Pembinaan Bahasa dan Sastra

① Peningkatan Peran Instansi Pemerintah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	511
<i>Wardiman Djojonegoro</i>	
2. Peran Organisasi Profesi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	
a. Peran REI dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	530
<i>Lukman Purnomosidi</i>	

b.	Peran PPPI dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	546
	<i>Judy Uway</i>	
3.	Pemantapan Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Sastra Indonesia	
a.	Peran HPBI dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	553
	<i>Andi Mappi Sammeng</i>	
b.	Pemanfaatan Organisasi Profesi Kebahasaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia	557
	<i>Multamia RMT Lauder</i>	
c.	Peran Hiski dalam Reformasi Sastra	565
	<i>Mursal Esten</i>	
4.	Peran Media Massa dalam Pembinaan Bahasa dan Sastra	
a.	Pemanfaatan Media Radio dan Televisi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia	585
	<i>Sumita Tobing</i>	
b.	Peran Pers dalam Pemasarakatan Hasil Pembakuan Bahasa Indonesia	597
	<i>Parni Hadi</i>	
5.	Peran Media Massa dalam Pemasarakatan Hasil Pembakuan Bahasa	603
	<i>Abbas Mohd. Shariff</i>	
6.	Sastra Koran	620
	<i>Djadjat Sudradjat</i>	
7.	Pembinaan Minat Baca	627
	<i>Jimly Asshiddiqie</i>	
8.	Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Massa	640
	<i>Toeti Adhitama</i>	

Pendidikan Bahasa dan Sastra

1.	Mengkaji Ulang Pembelajaran Sastra di SMU Berdasarkan Kurikulum 1994: Studi Kasus Buku <i>Terampil Berbahasa Indonesia</i> Jilid I	652
	<i>B. Rahmanto</i>	
2.	Tentang Cara Menjadi Bangsa Rabun Sastra dan Lumpuh Menulis Pula sehingga Jelas di Dunia Kita Pakar Terkemuka	672
	<i>Taufiq Ismail</i>	
3.	Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah	687
	<i>Suparno</i>	
4.	Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia: Pendekatan Komunikatif	702
	<i>Bambang Kaswanti Purwo</i>	
5.	Pengajaran Bahasa Daerah di Sekolah	738
	<i>T. Fatimah Djajasudarma</i>	

5. Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah <i>Fuad Abdul Hamied</i>	753
<i>Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing</i>	
1. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing <i>A. Chaedar Alwasilah</i>	777
2. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Belanda <i>Hein Steinhauer</i>	795
3. Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing di Prancis <i>Henri Chambert-Loir</i>	812
4. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Italia <i>S. Faizah Soenoto Rivai</i>	822
5. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Thailand <i>Sumalee Nimmanupap</i>	837
6. Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia <i>Julia Read</i>	846
<i>Perbukuan dan Ketenagaan</i>	
1. Penerjemahan untuk Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia <i>Rahayu S. Hidayat</i>	865
2. Pengembangan Perbukuan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Kebahasaan dan Kesastraan <i>Ajip Rosidi</i>	878
3. Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia <i>S. Effendi</i>	890
4. Peningkatan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesastraan <i>Nafron Hasjim</i>	902
PUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VII	917
SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA UPACARA PENUTUPAN	924
LAMPIRAN	
1. Daftar Pemakalah Dalam dan Luar Negeri	926
2. Daftar Peserta Dalam dan Luar Negeri	928
3. Panitia Penyelenggara	947

**SAMBUTAN
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
PADA PEMBUKAAN KONGRES VII BAHASA INDONESIA
TANGGAL 26 OKTOBER 1998
DI ISTANA NEGARA**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera,

Hadirin yang saya muliakan,



Dalam beberapa hari ini Saudara-Saudara akan terlibat secara intensif dalam mengikuti Kongres Ke-7 Bahasa Indonesia. Saya sambut dengan gembira penyelenggaraan Kongres yang sangat penting ini. Sudah tentu Kongres ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan peranan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara kita. Kepada Saudara-Saudara para peserta, saya mengucapkan selamat mengikuti Kongres ini. Mudah-mudahan, selama mengikuti Kongres ini Saudara-Saudara akan berada dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti seluruh rangkaian acara yang telah diagendakan.

Sebagai bangsa yang terkenal karena kemajemukan suku bangsanya, kita patut merasa bersyukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa karena kita memiliki bahasa yang telah menyatukan kita semua. Jika

kita bandingkan dengan beberapa bangsa di benua Asia, kemajuan yang dicapai oleh bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun bahasa negara, sungguh luar biasa.

Masih banyak negara di benua Asia yang hingga sekarang masih dihadapkan pada masalah bahasa nasionalnya. Meskipun telah relatif lama merdeka, dan bahasa nasionalnya dicantumkan secara resmi di dalam undang-undang dasarnya, dalam ke-

nyataan bahasa itu belum benar-benar memasyarakat. Masih banyak rakyatnya, bahkan pemimpin-pemimpinnya, yang masih merasa asing dengan bahasa nasionalnya sendiri.

Sejak 70 tahun yang lalu--yakni sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928--bahasa Indonesia telah memainkan peranan yang sangat penting sebagai bahasa persatuan. Setelah kita merdeka, bahasa Indonesia dinyatakan oleh undang-undang dasar kita sebagai bahasa negara.

Sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia telah berhasil menumbuhkan dan menggalang semangat kebangsaan, jiwa persatuan, dan kesatuan serta rasa senasib sepenanggungan. Semangat itu menjadi modal yang sangat penting dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Bahasa persatuan itu pula yang kemudian mengantarkan bangsa kita ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Akhirnya, dengan bahasa persatuan itu pula, para pendahulu kita menyusun Naskah Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Sejak awal kemerdekaan, bahasa Indonesia telah digunakan sebagai bahasa resmi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat hingga ke daerah-daerah. Semua jenjang dan jenis pendidikan di tanah air kita juga menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bahasa Indonesia telah berkembang menjadi bahasa yang mampu untuk menuangkan gagasan-gagasan intelektual dan wacana ilmu pengetahuan. Tidak semua negara--terutama negara-negara yang baru merdeka dalam pertengahan abad ini--mampu melakukan hal yang sama dengan bahasa nasional mereka. Kita berharap pada masa-masa yang akan datang, bahasa Indonesia akan terus berkembang menjadi bahasa yang sejajar dengan bahasa-bahasa lain, yang dewasa ini mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Hadirin yang berbahagia,

Meskipun kita berhasil mencapai kemajuan-kemajuan yang besar dalam mengembangkan bahasa Indonesia, kita tetap menyadari adanya tantangan-tantangan besar yang terhampar di hadapan kita. Sebentar lagi umat manusia akan memasuki kurun milenium ketiga. Dalam kurun ini, tuntutan globalisasi akan makin meluas. Lalu lintas barang dan jasa serta lalu lintas manusia makin tidak terbendung. Dengan demikian, secara geokultural masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini akan makin tidak jelas di mana batas-batasnya. Bukan mustahil, suatu ketika nanti identitas manusia secara individu makin sukar untuk dikenali karena semuanya terlibat dalam satu masyarakat global. Dalam situasi seperti itu, bukan mustahil pula jika segala sesuatunya akan mengarah pada bentuk stereotip yang cenderung makin seragam. Akankah bangsa-bangsa kehilangan identitasnya?

Sebagai bangsa yang memegang teguh ajaran-ajaran agama, kita berkeyakinan bahwa sampai kapan pun kemajemukan di antara umat manusia itu akan tetap ada. Tuhan Yang Mahakuasa memang menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar mereka berkenalan dan berhubungan antara satu dengan yang lain. Jadi, meskipun kecenderungan globalisasi tidak dapat dibendung oleh siapa pun juga, kita tetap percaya bahwa bangsa-bangsa di muka bumi ini akan tetap ada. Bagaimana wujud hubungan antarbangsa dalam masyarakat global di masa yang akan datang itu

memang masih sukar untuk kita bayangkan.

Berdasarkan keyakinan di atas itulah, kita tidak perlu ragu untuk membangun bangsa, meskipun suatu ketika nanti kita akan memasuki era globalisasi. Membangun bangsa tidaklah semata-mata membangun kesejahteraan sosial dan ekonominya saja, tetapi juga membangun segi-segi kerohaniannya, termasuk memelihara identitas bangsa kita. Identitas bangsa kita mencakup pula bahasa dan budayanya.

Kita mengerti bahwa untuk memasuki masyarakat global kita perlu menguasai bahasa-bahasa lain, yang secara umum digunakan dalam pergaulan bangsa-bangsa. Namun, antara sesama kita, kita harus tetap mempertahankan penggunaan bahasa Indonesia. Jangan sampai terjadi antarsesama anggota masyarakat Indonesia, kita bertutur kata dalam bahasa asing. Gejala seperti ini ada di negara lain. Sebagai bangsa, kita harus berusaha mengembangkan diri agar suatu ketika bahasa Indonesia dapat berkembang menjadi bahasa yang berwibawa dan berpengaruh sehingga turut digunakan dalam pergaulan bangsa-bangsa.

Kongres Ke-7 Bahasa Indonesia ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif dalam menghadapi persoalan yang saya kemukakan di atas. Salah satu kunci untuk mengahadapinya ialah jika bangsa kita mampu berkembang menjadi bangsa yang maju, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki iman dan takwa yang kuat. Jika semua itu dapat kita capai, Insya Allah kita akan mampu mempertahankan identitas kebangsaan kita. Bahkan, lebih jauh bukan mustahil bahasa kita akan menarik minat untuk dipelajari oleh bangsa-bangsa lain sehingga turut memberikan sumbangan bagi kemajuan peradaban umat manusia.

Hadirin yang berbahagia,

Kongres Ke-7 Bahasa Indonesia ini diselenggarakan dalam suasana baru, yakni suasana reformasi. Reformasi pada umumnya dihubungkan dengan kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di dalam masyarakat kita. Mungkin akan muncul pertanyaan: apakah perlu dilakukan reformasi bahasa? Saya bukanlah pakar bahasa Indonesia meskipun setiap hari saya menggunakan bahasa Indonesia dalam berkomunikasi. Namun, pada hemat saya, bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran dan perasaan tidak perlu direformasi selama aturan tata bahasanya telah baku dan perbendaharaan kata berikut peristilahannya telah tersedia. Dalam kajian ilmiah, mungkin saja setiap saat akan muncul kata dan istilah baru yang sebelumnya tidak dikenal dalam percakapan sehari-hari.

Apa yang perlu direformasi sehubungan dengan bahasa Indonesia ialah perilaku pengguna bahasa itu sendiri. Ada kecenderungan dalam masyarakat--terutama dalam dunia birokrasi--untuk mengikuti penggunaan bahasa dari para pejabat yang lebih tinggi kedudukannya meskipun mereka menyadari bahwa cara berbahasa pejabat itu tidak tepat, bahkan menyimpang dari kaidah tata bahasa bahasa Indonesia. Di samping itu, terdapat pula kecenderungan untuk memfeodalkan bahasa Indonesia. Padahal, salah satu pertimbangan para pendahulu kita memilih bahasa Indonesia menjadi bahasa negara ialah karena bahasa Indonesia memenuhi syarat-syarat demokratis untuk dijadikan sebagai bahasa sebuah negara modern.

Selain kecenderungan memfeodalkan bahasa Indonesia, terdapat pula gejala "eufemisme", yakni melunakkan istilah untuk memanipulasi suatu kenyataan yang kurang menyenangkan di dalam masyarakat. Sekelompok masyarakat yang menderita kelaparan dimanipulasi sedemikian rupa sehingga dikatakan bahwa mereka hanya *kurang pangan*. Menaikkan tarif suatu jenis barang atau jasa diungkapkan dengan istilah *disesuaikan* dan lain-lain. Kecenderungan eufemisme menjadi pertanda dari tidak adanya transparansi dalam menjalankan roda pemerintahan.

Saya minta kepada semua pihak, terutama jajaran birokrasi pemerintahan, untuk menjauhkan kecenderungan eufemisme itu. Marilah kita menggunakan bahasa secara lugas. Tidak perlu menyembunyikan kenyataan pahit yang kita hadapi dengan cara membungkusnya dengan istilah-istilah yang dapat mengaburkan kenyataan. Cara-cara seperti itu justru tidak mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Kita akan menjadi bangsa yang kehilangan keberanian untuk mengakui kenyataan-kenyataan pahit yang ada di hadapan kita.

Hadirin yang berbahagia,

Demikianlah sambutan singkat saya dalam mengiringi pembukaan Kongres Ke-7 Bahasa Indonesia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan akan menjadi bahan pemikiran dan bahan renungan bagi kita semua.

Akhirnya, dengan memohon rida dari Allah swt., dengan ini saya nyatakan Kongres Ke-7 Bahasa Indonesia dibuka dengan resmi. Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 26 Oktober 1998

Prof. Dr. B.J. Habibie



LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PADA ACARA PEMBUKAAN KONGRES BAHASA INDONESIA VII DI ISTANA NEGARA

Bapak Presiden Republik Indonesia yang kami hormati,
para menko dan menteri Kabinet Reformasi Pembangunan,
serta para duta besar ASEAN dan negara sahabat,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,



Kongres Bahasa Indonesia merupakan forum untuk meninjau balik upaya-upaya pembinaan dan pengembangan bahasa guna memperoleh masukan yang akan dipedomani dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa selanjutnya. Pada Kongres ini para peserta diharuskan dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi bahasa Indonesia sehubungan dengan tuntutan yang ditimbulkan oleh kepesatan kemajuan teknologi informasi yang telah menghampiri semua bidang kehidupan kita, termasuk bidang pendidikan dan kebudayaan. Para peserta kongres juga diharapkan agar setelah permasalahan tersebut diidentifikasi, strategi dan pola tindak lanjut penanggulangannya tidak menyimpang dari semangat dan tekad untuk menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia, yang telah tertuang dalam Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Oleh karena itu, tema yang

dipilih untuk Kongres kali ini adalah "Pemantapan Peran Bahasa Indonesia sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi". Kami yakin bahwa bahasa Indonesia masih atau mampu berperan tidak saja sebagai simpul konvergensi dan kekuatan sinergis bagi keanekaragaman dan pengenalan ragam budaya, adat-istiadat, dan kebiasaan hidup masyarakat dan bangsa kita, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang andal dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, sosial, politik, dan budaya dalam pengertian yang seluas-luasnya.

Sebagaimana diketahui, kongres bahasa Indonesia untuk pertama kali diadakan tahun 1938 di Solo, yang kedua tahun 1954 di Medan. Sejak Kongres Ketiga tahun

1978 di Jakarta, kongres bahasa Indonesia secara teratur diadakan lima tahun sekali. Besarnya minat dan perhatian masyarakat terhadap kongres bahasa Indonesia sungguh amat menggembirakan. Jumlah peserta Kongres Bahasa Indonesia Pertama dan Kedua hanya berkisar antara 200 sampai dengan 300 orang. Jumlah peserta kongres itu terus meningkat dan mencapai sekitar 900 orang pada Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993. Bahkan, dalam situasi ekonomi yang sulit seperti ini pun masih tercatat tidak kurang dari 850 orang peserta Kongres Bahasa Indonesia VII. Sebenarnya masih banyak anggota masyarakat yang berminat mengikuti kongres ketujuh ini, tetapi dengan berat hati kami tidak dapat memenuhi keinginannya karena tempatnya dan dananya sangat terbatas.

Makalah yang akan disajikan berjumlah 70 buah. Pemakalahnya berasal dari dalam dan luar negeri. Tingginya minat dan perhatian masyarakat terhadap bahasa Indonesia juga terlihat pada banyaknya pandangan, saran, bahkan kritik yang dialamatkan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Kepada Bapak Presiden kami laporkan pula besarnya dukungan dari departemen-departemen lain, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang menyangkut upaya pembinaan bahasa. Departemen Dalam Negeri, misalnya, melalui Instruksi Mendagri No. 20 Tahun 1991 menegaskan perlunya pemasyarakatan bahasa Indonesia dalam rangka pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai akibat dari instruksi itu, semua daerah tingkat I di Indonesia telah membina kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk bersama-sama melakukan berbagai upaya pencermatan pemakaian bahasa Indonesia, khususnya, dan terutama bahasa Indonesia tulis. Di-harapkan pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat-tempat umum, yang diawali pada Hari Kebangkitan Nasional Tahun 1995, juga mendapat sambutan yang amat mengesankan. Dukungan departemen-departemen lain terhadap gerakan itu juga sangat menggembirakan. Kesadaran akan pentingnya bahasa Indonesia, baik sebagai jati diri maupun sebagai sarana komunikasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, makin memperteguh keyakinan bahwa kerja sama yang baik dan intensif antardepartemen perlu kita teruskan.

Bapak Habibie yang kami hormati, demikianlah laporan yang dapat dan perlu kami sampaikan sehubungan dengan Kongres Bahasa Indonesia VII yang akan berlangsung sampai dengan tanggal 30 Oktober 1998 di Hotel Indonesia, Jakarta.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Jakarta, 26 Oktober 1998

Prof. Dr. Juwono Sudarsono

LAPORAN PANITIA KERJA KONGRES BAHASA INDONESIA VI

1. Pendahuluan

Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI dibentuk oleh Kongres Bahasa Indonesia VI dengan tugas pokok untuk (memasyarakatkan Putusan Kongres dan) mengambil langkah-langkah persiapan yang diperlukan bagi penyusunan Undang-Undang Kebahasaan Indonesia dan pembentukan Lembaga Kebahasaan Indonesia. Undang-undang kebahasaan itu diharapkan berisi kebijaksanaan bahasa nasional yang dirumuskan secara berencana, terarah, terinci, terpadu, dan menyeluruh. Kebijaksanaan bahasa nasional itu pada hakikatnya merupakan seperangkat kebijaksanaan nasional di bidang kebahasaan yang menjadi dasar dalam menangani jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, dan (3) masalah pemanfaatan bahasa asing. Dalam hubungan itu, diharapkan bahwa kebijaksanaan bahasa nasional mencakupi batasan dan ketentuan mengenai

- (1) kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional, sesuai dengan Sumpah Pemuda 1928 maupun sebagai bahasa negara, sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945, serta pembinaan, pengembangan, dan pemasyarakatannya;
- (2) kedudukan dan fungsi bahasa daerah, baik sebagai unsur kebudayaan Indonesia yang hidup maupun sebagai pendukung kebudayaan daerah, serta pembinaan, pengembangan, pengajaran, dan pelestariannya; dan
- (3) kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia serta pengajaran dan/atau pemanfaatannya.

Untuk menangani masalah-masalah nasional di bidang kebahasaan itu, diperlukan suatu lembaga yang kuat dan berwibawa. Untuk itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu ditingkatkan menjadi lembaga nondepartemen dengan nama Lembaga Kebahasaan Indonesia yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia.

2. Upaya Pemasyarakatan Putusan Kongres di Kalangan Lembaga Pemerintah

- a. Upaya pemasyarakatan Putusan Kongres di kalangan lembaga pemerintah dalam rangka persiapan penyusunan Undang-Undang Kebahasaan dan pembentukan Lembaga Kebahasaan Indonesia dimulai dengan mengadakan pendekatan kepada lembaga-lembaga yang paling berkepentingan dengan urusan kebahasaan, yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk Direktorat Jenderal Kebudayaan.
- b. Upaya Panitia Kerja Kongres untuk meyakinkan para pengambil keputusan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengenai pentingnya mewujudkan

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI, khususnya yang menyangkut Undang-Undang Kebahasaan dan Lembaga Kebahasaan Indonesia terhenti karena kegiatan Pemilihan Umum 1997 yang disusul oleh gerakan reformasi, yang mengakibatkan perhatian para pengambil keputusan lebih terpusat pada tuntutan-tuntutan reformasi. Upaya Panitia Kerja Kongres itu makin tersendat lagi oleh krisis moneter yang melanda negeri tercinta ini.

3. Upaya Persiapan Penetapan Kebijakan Bahasa Nasional

Dengan menyadari bahwa upaya untuk mewujudkan Undang-Undang Kebahasaan Indonesia dan Lembaga Kebahasaan Indonesia tidak mungkin terlaksana dalam waktu dekat, anggota Panitia Kerja Kongres bersepakat untuk memusatkan perhatian pada upaya perumusan pokok-pokok kebijaksanaan di bidang kebahasaan yang dapat dimanfaatkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam perencanaan kegiatan pengembangan dan pembinaan bahasa di Indonesia. Untuk itu, Panitia Kerja Kongres telah mengadakan serangkaian kegiatan, antara lain, sebagai berikut.

a. Mengikuti Diskusi Kebahasaan

Serangkaian diskusi tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia, khususnya bahasa Inggris, telah berlangsung dalam berbagai forum. Dari diskusi-diskusi itu disepakati hal-hal berikut.

- (1) Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan sebagai bahasa negara perlu dikembangkan dan dibina terus agar dapat berfungsi secara optimal sebagai alat komunikasi masyarakat Indonesia yang modern dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam hubungan dengan pemodernan bahasa Indonesia, perlu diupayakan (a) pengembangan laras ilmiah, (b) pengembangan kosakata, khususnya kosakata teknis, (c) penyempurnaan pedoman-pedoman pemakaian bahasa, seperti kamus, tata bahasa, dan pedoman pembentukan istilah, serta (d) pembaharuan sistem pendidikan bahasa.
- (2) Bahasa-bahasa daerah sebagai kekayaan budaya Indonesia dan pendukung kebudayaan daerah perlu dilestarikan melalui upaya inventarisasi dan penelitian. Bahasa-bahasa daerah yang dipelihara masyarakat penuturnya perlu didukung.
- (3) Bahasa asing, terutama bahasa Inggris, mempunyai peranan yang sangat dominan di dalam era globalisasi. Ketidakmampuan menguasai bahasa Inggris akan sangat merugikan kita. Oleh karena itu, Indonesia perlu meninjau kembali sistem pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah, dengan tidak menempatkan bahasa Inggris di atas bahasa Indonesia dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Bahasa Inggris hendaklah dianggap sebagai suatu keperluan untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari era globalisasi. Dalam hubungan ini, Panitia Kerja Kongres berpendapat bahwa kebijaksanaan Pemerintah mengenai sulih suara film-film yang ditayangkan di televisi perlu ditinjau kembali. Kebijakan itu secara tidak langsung menempatkan kedudukan bahasa Inggris di atas bahasa Indonesia.
- (4) Panitia Kerja Kongres mengusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa segera dilengkapi dengan Badan Penasihat atau Badan Pertimbangan Bahasa,

yang anggota-anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh bahasa dan sastra serta tokoh-tokoh masyarakat umum.

b. Mengikuti Seminar Kebudayaan

Dalam rangka mengumpulkan pandangan masyarakat intelektual dan budayawan mengenai kaitan antara budaya dan bahasa, tiga anggota Panitia Kerja Kongres telah mengikuti seminar kebudayaan yang diselenggarakan oleh Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997.

c. Merencanakan Kongres Bahasa Indonesia VII

Panitia Kerja Kongres secara aktif ikut membantu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam merencanakan penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia VII dengan duduk sebagai anggota Panitia Pengarah. Sejalan dengan upaya perumusan kebijaksanaan nasional di bidang kebahasaan yang menjadi pusat perhatian Panitia Kerja Kongres, sejumlah topik mengenai bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dijadikan topik bahasan dalam kongres ini.

d. Mengusulkan Pembentukan Panitia Kerja Kongres

Kenyataan bahwa pokok-pokok kebijaksanaan nasional di bidang kebahasaan belum rampung dilaksanakan hingga sekarang ini, Panitia Kerja Kongres berpendapat bahwa upaya itu perlu dilanjutkan oleh panitia yang ditunjuk oleh Kongres Bahasa Indonesia VII.

4. Berita Duka

Salah seorang anggota Panitia Kerja Kongres, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Imam Sukarsono, S.H. telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 1994.

5. Penutup

Panitia Kerja Kongres menyatakan penghargaan dan terima kasih kepada semua pihak atas kehormatan, kepercayaan, dan dukungan yang diberikan kepadanya.

Jakarta, 26 Oktober 1998

Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI,

Amran Halim
Ketua

Hasan Alwi
Sekretaris

LAPORAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN KONGRES BAHASA INDONESIA VI



Kongres Bahasa Indonesia VII ini diselenggarakan dalam rangka menyediakan forum bagi para ahli dari berbagai disiplin ilmu, tokoh-tokoh dari berbagai lapangan profesi, serta para peminat bahasa lain, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, untuk bertukar informasi dan bertukar pikiran, khususnya mengenai hal-hal yang bertalian dengan usaha pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Kongres Bahasa Indonesia VII ini tidak terlepas dari kongres-kongres sebelumnya. Oleh karena itu, pada tempatnya-lah kalau saya, selaku Ketua Panitia Pelaksana, mengantarkan kegiatan persidangan kita dalam forum ini dengan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan keputusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang pemantauannya dibebankan kepada kami.

Kongres Bahasa Indonesia VI yang diselenggarakan di Jakarta pada tahun

1993 menyepakati 54 butir usul tindak lanjut keputusan Kongres. Ke-54 usul tindak lanjut itu mencakupi (1) Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa (14 butir); (2) Pengembangan Bahasa dan Sastra (12 butir); (3) Pembinaan Bahasa dan Sastra (15 butir); (4) Pengajaran Bahasa dan Sastra (7 butir); dan (5) Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri (6 butir).

1. Peran Bahasa dan Sastra dalam Pembangunan Bangsa

- (1) Untuk melihat seberapa jauh para penyelenggara negara dapat dijadikan anutan, telah dilaksanakan penelitian pendahuluan tentang mutu pemakaian bahasa Indonesia lisan para penyelenggara negara, termasuk pemuka masyarakatnya, di media elektronik televisi. Hasil penelitian ini masih merupakan data awal yang perlu diteliti lebih lanjut.
- (2) Sehubungan dengan ditetapkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, penelitian pemakaiannya di lingkungan administrasi kenegaraan telah dilaksanakan, antara lain, untuk mengetahui pemakaian bahasa Indonesia dalam surat dinas (negeri dan swasta), administrasi perkantoran, dan produk-produk hukum.
- (3) Kemampuan berbahasa Indonesia telah dijadikan salah satu syarat dalam penerimaan pegawai dan kenaikan pangkat/jabatan, khususnya di lingkungan Departemen.

temen Pendidikan dan Kebudayaan.

- (4) Sehubungan dengan upaya untuk mengetahui sikap bahasa guru nonbahasa Indonesia, telah dilaksanakan penelitian tentang pemakaian bahasa Indonesia ragam tulis baku (sebagai salah satu realisasi pernyataan sikap positif para guru semua bidang studi). Data itu akan dimanfaatkan untuk keperluan penyusunan buku rujukan, seperti tata bahasa sekolah.
- (5) Sehubungan dengan organisasi kepemudaan dan disiplin berbahasa, telah dilaksanakan penelitian tentang bahasa Indonesia yang digunakan oleh siswa SMU dalam lomba pidato tertulis tingkat nasional dalam rangka kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra.
- (6) Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 tentang Pemasarakan Bahasa Indonesia, salah satu kegiatan yang telah dilaksanakan ialah penyusunan Pedoman Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Surat Dinas.
- (7) Perumusan Seminar Politik Bahasa Nasional (1975) akan ditinjau kembali pada kesempatan Kongres kali ini.
- (8) Putusan Kongres terdahulu yang belum ditindaklanjuti telah dilaksanakan, antara lain, melalui penelitian pendahuluan tentang pengembangan laras bahasa, seperti laras bahasa sastra/seni vokal, laras bahasa hukum, laras bahasa mubalig, serta laras bahasa surat dinas, dan laporan teknis.
- (9) Untuk keperluan penertiban pemakaian bahasa asing pada nama dan kegiatan badan usaha, telah dilaksanakan penyusunan buku *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing* yang telah dijadikan bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam pemberian izin pemasangan papan nama, kain rentang, dan reklame di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

2. Pengembangan Bahasa dan Sastra

- (1) Peningkatan kegiatan penelitian, baik yang menyangkut jumlah maupun mutu, telah dilaksanakan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia yang tersedia.
- (2) Pengembangan laras bahasa keilmuan telah mulai dilakukan melalui penelitian bahasa dalam berbagai bidang ilmu.
- (3) Penyusunan daftar istilah dan kamus bidang ilmu untuk keperluan pemantapan laras bahasa keilmuan dan kemudahan pelaksanaan penerjemahan telah dilaksanakan secara bertahap. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menyusun 19 daftar istilah bidang ilmu dan 19 kamus bidang ilmu.
- (4) Penyusunan bahan ajar bahasa daerah sebagai muatan lokal sedang dikerjakan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- (5) Penyusunan buku bacaan anak-anak yang disadur dari karya sastra daerah Nusantara telah dilakukan secara bertahap. Pada saat ini sedang dilaksanakan penyusunan Buku Pintar Sastra Jawa. Selain itu, telah mulai dirintis penyusunan sketsa sastra daerah.
- (6) Perumusan tindakan operasional dalam kaitan dengan Penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 diharapkan dapat terwujud dalam Kongres Bahasa

Indonesia VII ini.

- (7) Penerjemahan, penerbitan, dan pemasaran karya sastra dan pustaka dunia yang terkenal belum dapat dilaksanakan karena memerlukan kerja sama dan koordinasi dengan lembaga lain.
- (8) Penerbitan majalah budaya dalam bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang secara khusus dikelola oleh Pemerintah belum dapat dilaksanakan. Akan tetapi, daerah yang memiliki Balai Penelitian Bahasa telah menerbitkan majalah budaya (Denpasar: *Aksara*, Yogyakarta: *Widyaparwa*, dan Ujung Pandang: *Saweri Gading*).
- (9) Pemanfaatan media elektronik dan cetak untuk keperluan penerjemahan, penyaduran, dan penerbitan sastra klasik Nusantara belum dapat dilaksanakan.

3. Pembinaan Bahasa dan Sastra

- (1) Peningkatan mutu dan jumlah tenaga penyuluh bahasa Indonesia di daerah dilakukan dengan mengadakan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi di daerah.
- (2) Pembinaan bahasa Indonesia melalui media elektronik telah dilakukan dalam kerja sama dengan RRI dan TVRI sejak tahun 1975. Akan tetapi, kerja sama secara khusus dengan media massa, khususnya dengan media massa cetak belum dapat terwujud secara menyeluruh.
- (3) Penyediaan sarana pembinaan telah dilakukan dengan penerbitan revisi buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, sedangkan penerbitan edisi revisi *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan kamus bidang ilmu dasar sedang dipersiapkan.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi para tenaga teknis di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk disiapkan menjadi calon penyunting, penyuluh, dan peneliti secara bertahap telah dilaksanakan dalam upaya memacu penerbitan karya-karya ilmiah, baik artikel maupun buku.
- (5) Penyusunan rencana kegiatan penyuluhan yang terarah dan terpadu telah dilaksanakan melalui kerja sama dengan pemerintah daerah yang sekaligus mengadakan evaluasi kegiatan penyuluhan tersebut untuk mewujudkan kegiatan penyuluhan yang lebih efektif dan efisien.
- (6) Strategi pemasyarakatan yang lebih tepat diharapkan dapat disusun dari berbagai masukan yang diusulkan pada Kongres kali ini.
- (7) Pertemuan berkala antara para guru sastra dan ahli sastra/sastrawan, khususnya dalam rangkaian kegiatan Bulan Bahasa dan Sastra, telah dilaksanakan.
- (8) Pertemuan ilmiah secara berkala dalam upaya meningkatkan kepakaran para anggotanya telah dilakukan melalui kerja sama dengan organisasi profesi.
- (9) Penyebarluasan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang berupa pedoman, daftar istilah, dan kamus istilah melalui toko-toko buku belum dapat dilaksanakan.

4. Pengajaran Bahasa dan Sastra

Tindak lanjut putusan Kongres yang berkenaan dengan pengajaran bahasa dan sastra tidak dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi dilakukan

oleh instansi lain, seperti Pusat Kurikulum dan Pusat Perbukuan.

5. Perkembangan Bahasa Indonesia di Luar Negeri

Dalam upaya meningkatkan kegiatan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing (BIPA), telah dilaksanakan beberapa forum sebagai berikut.

- 1) Konferensi Internasional Pengajaran BIPA I (Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga) tahun 1994
- 2) Kongres Internasional Pengajaran BIPA (Universitas Indonesia) tahun 1995
- 3) Simposium Internasional Bahasa Indonesia di Kawasan Timur Jauh (di Beijing) tahun 1995
- 4) Konferensi Internasional Pengajaran BIPA II (IKIP Padang) tahun 1996
- 5) Seminar Pengajaran BIPA di Jerman (Universitas Passau) tahun 1997

Jakarta, 26 Oktober 1998

Kepala Pusat Pembinaan
dan Pengembangan Bahasa
selaku Ketua Panitia Pelaksana
Kongres Bahasa Indonesia VII,

Hasan Alwi

I

*Kedudukan Bahasa Indonesia
dalam Era Global*

KEBINEKAAN BAHASA, PEMBANGUNAN BANGSA, DAN ERA GLOBALISASI

Juwono Sudarsono
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengantar

Adalah suatu hal yang sangat wajar jika saya menyatakan kegembiraan, baik sebagai pribadi maupun sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, menyambut hangat pelaksanaan Kongres Bahasa Indonesia VII ini, seraya menyampaikan penghargaan kepada seluruh jajaran Panitia dan para peserta yang hadir di sini. Saya yakin, hadirin setuju dengan pendapat saya bahwa Kongres ini merupakan wahana penting bagi pertukaran pikiran dan pendapat berkenaan dengan berbagai masalah kebahasaan dan kesastraan yang perlu mendapat perhatian kita bersama dalam upaya pembinaan dan pengembangan selanjutnya.

2. Landasan

Tujuh puluh tahun yang lalu para pemuda kita telah mengikrarkan Sumpah Pemuda yang salah satu di antaranya ialah "Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia". Ikrar itu bergema hingga saat ini. Hal itu terbukti dengan pesatnya perkembangan bahasa Indonesia yang dapat kita saksikan saat ini. Pernyataan itu telah mendudukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan atau bahasa nasional. Kita tak perlu ragu untuk menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang mampu berperan sebagai sarana komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan--politik, ekonomi, dan budaya--sarana penuangan estetika ekspresi dalam bentuk kesusastraan, dan sarana pendidikan dan pengajaran di berbagai jenjang pendidikan.

Kemantapan dan ketegaran bahasa Indonesia untuk terus maju dan berkembang ditunjang oleh dukungan konstitusional, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 36, yang menyatakan "Bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Pernyataan itu menempatkan bahasa Indonesia pada kedudukan sebagai bahasa negara. Hal itu mengisyaratkan bahwa bahasa Indonesia yang berkedudukan sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara itu harus dipelihara sebaik-baiknya, dalam arti harus dibina dan dikembangkan secara terus-menerus. Satu hal yang sangat penting kita sadari adalah bahwa dalam kedudukannya sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara, bahasa Indonesia perlu ditempatkan dalam hubungan dengan pencapaian tujuan negara yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu

"...melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial."

Berdasarkan hal itu, tujuan *mencerdaskan kehidupan bangsa* memperlihatkan kaitan yang erat dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Sehubungan dengan itu, bahasa Indonesia harus berperan sebagai alat komunikasi dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bahasa Daerah

Di samping bahasa Indonesia, di tanah air kita ini hidup dan berkembang pula ratusan bahasa daerah. Sesuai dengan penjelasan Pasal 36, UUD 1945, yang menyatakan bahwa bahasa daerah sebagai salah satu kebudayaan bangsa yang dipelihara dan digunakan oleh pemakainya dilindungi oleh negara. Hal itu mengisyaratkan bahwa bahasa-bahasa daerah itu perlu pula dipelihara dalam arti dibina dan dikembangkan. Jika dihubungkan dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah memberikan sumbangan yang berarti terhadap bahasa Indonesia, yaitu dalam hal pemerayaan kosakata. Sebaliknya, bahasa Indonesia pun memberikan sumbangan yang cukup pula terhadap kosakata bahasa daerah. Akan tetapi, perlu diingat bahwa hanya bahasa-bahasa daerah yang "kuat" yang banyak memberikan sumbangan terhadap bahasa Indonesia. "Kuatnya" satu bahasa daerah, antara lain, ditentukan oleh jumlah penuturnya, perannya sebagai sarana pendukung utama kebudayaan kelompok etnis yang bersangkutan, dan perannya sebagai sarana komunikasi secara tertulis. Walau bagaimanapun, bahasa daerah itu merupakan lambang jati diri dan lambang kebanggaan kelompok etnis pemakainya. Oleh karena itu, eksistensi bahasa daerah perlu dipertahankan.

4. Bahasa Asing

Sebagai akibat dari adanya hubungan dengan dunia luar, masyarakat kita mengenal pula bahasa asing. Perkenalan masyarakat kita dengan bahasa asing sudah terjadi sejak dahulu kala. Masuknya bahasa asing itu mempunyai dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat dan bahasa Indonesia. Dampak positif yang diperoleh adalah bertambahnya kosakata bahasa melalui penyerapan bahasa asing yang memang diperlukan karena kosakata itu belum ada dalam bahasa Indonesia. Dampak negatifnya terlihat, terutama dalam dasawarsa terakhir ini, pada sikap masyarakat yang merasa bangga menggunakan bahasa asing secara sepotong-sepotong alih-alih menggunakan bahasa Indonesia secara utuh dalam berkomunikasi dengan lawan bicaranya.

Agar dapat memasuki pergaulan dunia, kita harus menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Oleh karena itu, kurikulum pendidikan kita tetap mencantumkan mata pelajaran Bahasa Inggris. Walaupun hasilnya sampai saat ini belum memuaskan, mata pelajaran itu tetap ditempatkan sebagai pelajaran yang wajib ditempuh oleh peserta didik. Dengan modal yang sedikit itu diharapkan anak-anak kita dapat mengembangkannya sendiri. Pada masa yang akan datang kita akan mencoba memperbaiki sistem pendidikan bahasa asing itu secara bertahap. Jadi, pembicaraan tentang pengaruh negatif bahasa asing terhadap pemakai dan pemakaian bahasa Indonesia tadi tidak berarti bahasa asing itu tidak boleh atau dilarang digunakan. Kuasailah bahasa asing itu secara sempurna dan pakailah pada kesempatan yang tepat.

5. Kemampuan Bahasa Indonesia

Demikianlah keanekaragaman atau kebinekaan bahasa yang ada dan digunakan dalam masyarakat kita. Hal itulah sebenarnya yang menimbulkan jaringan permasalahan kebahasaan yang harus kita pecahkan. Pertanyaan yang perlu kita tanggapi adalah bagaimanakah kita menyikapi keadaan kebahasaan yang cukup rumit itu? Sehubungan dengan masalah sikap--jika dilihat dari segi bahasa Indonesia--, kita dapat menemukan sekurang-kurangnya tiga kelompok masyarakat.

Pertama, kelompok masyarakat yang menyangsikan kemampuan bahasa Indonesia. Kelompok itulah yang biasanya mengagung-agungkan bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam setiap kesempatan mereka pasti menggunakan kosakata bahasa asing walaupun mereka mengetahui bahwa kosakata itu ada dalam bahasa Indonesia. Mereka menganggap bahasa Indonesia miskin kosakatanya, tidak mampu melayani mereka dalam menuangkan pikiran dan perasaan. Kelompok ini merupakan kumpulan orang yang bersikap negatif terhadap bahasa Indonesia. Pada umumnya mereka adalah orang-orang pandai dan tidak jarang menduduki posisi penting dalam sebuah organisasi, perusahaan, atau bahkan seorang birokrat.

Kedua, kelompok orang yang menyadari kekurangmampuan bahasa Indonesia. Kelompok ini biasanya sangat tertarik terhadap permasalahan bahasa nasional itu sehingga bersedia diajak untuk melakukan pembenahan, misalnya, bergabung dalam penyusunan istilah suatu bidang ilmu, ikut serta dalam penyusunan kamus, bahkan "berkampanye" tentang penggunaan bahasa Indonesia. Biasanya mereka adalah akademisi yang berkemauan keras untuk memajukan bahasa Indonesia walaupun disiplin ilmu yang mereka tekuni bukanlah bidang bahasa.

Ketiga, kelompok orang yang meyakini kemampuan bahasa Indonesia. Kelompok inilah yang secara terus-menerus membina dan mengembangkan bahasa Indonesia. Mereka bukan hanya terdiri atas ahli-ahli bahasa, tetapi juga berasal dari berbagai disiplin ilmu. Mereka menyadari betul bahwa saat ini bahasa Indonesia masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Proses itu harus digerakkan oleh pemilih bahasa Indonesia, yaitu seluruh rakyat Indonesia, agar bahasa itu mampu berdiri sama tinggi dengan bahasa-bahasa lain di dunia. Pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia mustahil terjadi tanpa kerja keras dan tekad bangsa Indonesia sendiri. Bahasa Indonesia tidak akan tumbuh dan berkembang jika yang dilontarkan hanya keluhan dan ejekan. Adalah aib besar yang akan menimpa jika kita mengharapkan bangsa lain yang menumbuhkan dan mengembangkan bahasa Indonesia.

6. Peran Bahasa Indonesia

Saya berkeyakinan, apalagi dalam memasuki dunia global seperti sekarang ini, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersikap positif terhadap bahasa nasional dan bahasa negara kita itu, bahasa Indonesia. Beberapa alasan yang melandasi keyakinan saya itu dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Perikat Bangsa

Sejarah telah membuktikan bahwa paling tidak selama tujuh puluh tahun terakhir

ini bahasa Indonesia telah berperan dan mampu menjadi perekat bangsa. Beratus-ratus kelompok etnis di tanah air kita dapat bersatu dan dipersatukan, antara lain, dengan bahasa nasional kita itu. Dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya bahasa nasional itu tidak "dipaksakan" hadir oleh para pemuda kita pada tanggal 28 Oktober 1928. Berangkat dengan modal itulah kita mencoba selangkah demi selangkah membina dan mengembangkannya sehingga sekarang ini kita merasakan bahasa itu makin lengkap, makin sempurna, makin dapat melayani kita dalam pembangunan bangsa, pengembangan iptek, dan pembinaan budaya bangsa. Berdasarkan hal itu, sekarang ini kita harus mengembangkan bahasa Indonesia secara terus-menerus agar peranannya sebagai alat pemersatu masyarakat kita yang berbudaya ganda makin mengemuka dan kita harus mencegah pengembangan bahasa Indonesia yang mempertajam perbedaan dan kesenjangan dalam masyarakat, misalnya antara desa dan kota, antara cendekia dan awam, atau antara pusat dan daerah. Bahasa Indonesia harus menjadi sarana integrasi bangsa, bukan sumber disintegrasi masyarakat.

b. Bahasa Pengantar Pendidikan

Bahasa Indonesia telah berperan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan jauh sebelum kemerdekaan bangsa dapat kita raih. (Pada masa sebelum kemerdekaan nama bahasa Indonesia belum populer sehingga mata pelajarannya disebut Bahasa Melayu). Dunia pendidikan yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa ini dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya mempersiapkan sumber daya manusia yang potensial dan produktif. Dalam memasuki dunia kerja, hasil atau keluaran dunia pendidikan itu menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasinya. Dengan demikian, bahasa Indonesia berperan penting dalam rangka pembangunan bangsa. Sehubungan dengan itu, agar pembangunan mencapai hasil yang memadai, bahasa Indonesia yang dipakai sebagai sarana komunikasi itu perlu dikuasai secara mantap. Pada gilirannya, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai pembuka jalan untuk memasuki dunia kerja, tetapi penguasaan bahasa Indonesia juga akan menjadi penentu bagi seseorang untuk menjalankan bidang tugas yang diembankan kepadanya.

c. Bahasa Perhubungan Antarbangsa

Dalam berbagai kesempatan telah banyak dibicarakan masalah peran bahasa Indonesia dalam pembangunan bangsa, baik oleh pakar bahasa dan pakar bidang ilmu yang lain maupun oleh para birokrat. Bahkan, Pemimpin Negara pernah mencanangkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia secara cermat merupakan bagian dari disiplin nasional. Hasil langkah strategis itu sudah dapat kita rasakan bersama saat ini. Masyarakat kita makin menyadari arti penting bahasa nasional itu. Itu berarti upaya kita untuk membangun bahasa Indonesia demi kepentingan nasional sudah dapat dikatakan berhasil. Pertanyaan yang muncul adalah apakah yang dapat kita lakukan terhadap bahasa nasional kita itu dalam memasuki era globalisasi? Saya berpendapat bahwa era globalisasi, pada satu pihak, dapat dipandang sebagai

tantangan bagi upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk menghadapi tantangan itu sejak lama kita telah mempersiapkan diri, memasang kuda-kuda, membangun "benteng-benteng" melalui upaya pembinaan dan pengembangan. Upaya seperti itu tentu akan terus dijalankan demi pemertahanan bahasa nasional kita. Pada pihak lain, saya juga berpikir bahwa era globalisasi itu harus dimanfaatkan sebagai peluang untuk mengangkat bahasa Indonesia ke arena internasional. Saya melihat bahwa peluang itu sudah mulai terbuka. Kehadiran peserta dari luar negeri di forum ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia sudah hadir di negara lain. Peluang itu harus kita manfaatkan sedemikian rupa agar bahasa Indonesia tidak hanya dikenal dan dipelajari untuk kepentingan tertentu, tetapi bahasa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bahasa-bahasa internasional yang lain, sekurang-kurangnya di lingkungan negara-negara ASEAN, seperti yang sudah direncanakan oleh negara tetangga kita, Malaysia. Jadi, sementara kita tetap mempertahankan dan mengembangkan kehidupan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa dan memelihara bahasa daerah sebagai jati diri kelompok etnis yang bersangkutan, sudah saatnya pula kita mencoba mengikutsertakan bahasa Indonesia --sebagai bagian kebudayaan nasional-- dalam persaingan dunia pada masa era globalisasi ini. Kita harus berani mencoba untuk mengglobalisasikan bahasa Indonesia di arena dunia. Hal itu merupakan terapan dari apa yang disebut *global paradox* dalam bidang kebudayaan, khususnya bidang bahasa.

d. *Bahasa Kesastraan*

Kita mengetahui bahwa salah satu jenis seni yang erat hubungan dengan bahasa adalah kesusastraan. Pada awal tahun 20-an, sebelum diikrarkan Sumpah Pemuda, sudah banyak karya sastra yang diterbitkan dalam bahasa Melayu (tinggi). Bahasa Melayu yang digunakan di dalam karya sastra itu disebut oleh H.B. Jassin sebagai bahasa Melayu Balai Pustaka karena kebanyakan karya sastra ketika itu diterbitkan oleh Balai Pustaka. Dari sini dapat kita menarik benang merah antara kesusastraan dan bahasa nasional kita. Artinya, kesusastraan telah berperan penting dalam mengangkat bahasa nasional itu ke permukaan yang kemudian dimantapkan menjadi bahasa Indonesia melalui Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928. Sehubungan dengan itu, saya ingin menekankan bahwa selain membina dan mengembangkan bahasa, dengan usaha dan tekad yang sama kita harus pula membina dan mengembangkan sastra, baik sastra Indonesia maupun sastra daerah, baik modern maupun klasik.

7. Penutup

Demikianlah beberapa pokok pikiran yang dapat saya sampaikan dalam forum yang penting ini. Saya mengharapkan Kongres Bahasa Indonesia VII ini bukan sekadar peristiwa sepintas yang mudah dilupakan, melainkan suatu momentum yang padat energi untuk mendorong kita ke depan dengan tetap berpijak pada sejarah bangsa. Tantangan ke depan yang menyesak dada itu harus direnggut menjadi peluang-peluang yang menjanjikan bagi bangsa dan negara. Dengan optimisme tinggi seperti itu kita dapat melakukan pembangunan bahasa dan bangsa secara lebih terarah.

Kepada seluruh peserta kongres, saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas sumbangan yang diberikan dalam berbagai perbincangan di dalam Kongres ini.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 1
Hari, Tanggal, Pukul	: Senin, 26 Oktober 1998, 13.00--14.00
Judul Makalah	: Kebinekaan Bahasa, Pembangunan Bangsa, dan Era Globalisasi
Penyaji	: Juwono Sudarsono
Pemandu	: Hasan Alwi
Pencatat	: a. Junaiyah H.M. b. Buha Aritonang
Peserta	: 850 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Bapak tadi mengatakan bahwa anak-anak sekarang--terutama mahasiswa Bapak--kurang dapat mencerna bahan tertulis di surat kabar dan sebagainya. Menurut Bapak, salah satu sebabnya adalah banyaknya godaan sehingga mereka teralihkan pada godaan itu. Untuk itu, saya sependapat dengan Bapak. Akan tetapi, izinkan saya berbeda pendapat. Menurut saya, yang lebih besar pengaruhnya justru karena ketidakmampuan mencerna bahan ajar atau artikel. Dalam kaitan itu, penyebabnya ialah menurunnya mutu pendidikan. Yang bertanggung jawab tentu saja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebelum Bapak). Kalau apa yang saya katakan ini benar, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh Mendikbud agar mutu pendidikan ini meningkat? Bapak termasuk pemerhati iklan. Saya juga pemerhati dan bahkan saya mencermati iklan. Saya melihat banyak kesalahan bahasa iklan yang secara langsung ataupun tidak langsung menjadi model bahasa bagi anak-anak, misalnya *yang penting, rasanya bung*. Padahal, antara subjek dan predikat tidak berkoma. Kalau tanda koma dipasang karena *pause*, *pause* itu berapa lama? Satu detik? Lalu, kalau *pause* sehari, dipasang tanda apa atau berapa tanda komanya? Contoh lain masih banyak. Apakah upaya Bapak untuk menegur para pemasang iklan agar selain mencari uang mereka juga dapat mendidik?

b. Jawaban:

Upaya yang harus dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan adalah memberdayakan kesejahteraan dan kemampuan kreativitas dan juga penghargaan kepada guru. Untuk program darurat, jaringan sosial di bidang pendidikan adalah memberi penghargaan kepada guru yang berdedikasi tinggi. Itu satu-satunya yang dapat saya lakukan dalam kurun waktu satu tahun ini. Terpulang kepada kepala sekolah dan kelompok guru untuk memberi penilaian yang wajar dalam menentukan siapa di antara guru yang pantas menerima penghargaan.

Karena kita hidup dalam dunia yang bebas dari batas kenegaraan--dalam hal ini teknologi informasi--marilah kita tidak terlalu mau mengatur kemampuan penyusunan iklan untuk menggunakan bahasa. Bagaimanapun informasi iklan menarik bagi pendengar yang dilatari oleh ketidaktepatan kaidah tata bahasa. Kita tidak perlu terlalu menghukum atau menghakimi hal-hal yang keluar dari kendala-kendala yang wajar dan yang lazim dipakai. Saya mohon kepada para pakar bahasa agar sedikit memberikan keleluasaan atau sedikit bertoleransi terhadap hal-hal yang agak janggal, termasuk penggunaan bahasa dalam iklan.

2. Penanya: Mujiyanto, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Saya tertarik akan pernyataan Bapak tentang berbahasa terdidik dan berbudaya serta pernyataan Bapak Presiden kita tadi pagi, kita harus menghilangkan gejala eufemisme. Dalam hubungan itu, izinkan saya memberikan ilustrasi. Seorang pengarang lagu bertanya kepada saya, "*Mas, apakah boleh saya membuat judul lagu "Lidah Petaka?"*" Saya kira, lagu itu sudah dinyanyikan tanggal 5 Oktober yang lalu. Gejala pertanyaan itu, menurut saya, dilatarbelakangi ucapan-ucapan atau kata-kata yang didengar, terutama yang didengar dari mereka yang berpengaruh dalam berbicara. Kata-kata itu adalah kata-kata yang mengandung petaka dan kata-kata itu telah memunculkan judul lagu seperti itu. Padahal, justru saya melihat banyak ujaran tidak mendidik dan tidak mengindahkan etika atau tidak berbudaya. Bahkan, orang mengatakan bahwa sekarang ini kita terjebak dalam retorika walaupun kita yakin bahwa orang yang mengatakan itu belum tahu persis retorika. Saya menganggap orang yang terdidik dan berbudaya akan mengindahkan hal itu. Pertanyaan saya adalah apakah gejala yang bersifat nasional itu akan mendapat perhatian Bapak, terutama yang berkaitan dengan kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa karena Bapak bukan lagi pemerhati, melainkan pemegang kebijakan?

b. Jawaban:

Demokrasi harus kita kembangkan dalam pengembangan bahasa dan kosakata. Oleh karena itu, saya mohon pengertian, terutama pengertian pakar-pakar bahasa untuk hal-hal yang sifatnya terlalu formal (kenegaraan). Kita berupaya untuk memberi toleransi pada hal-hal yang sifatnya datang (bersumber) dari kreativitas masyarakat untuk tidak terlalu murni dalam mempertahankan kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang tepat.

3. Penanya: Fuad Abdul Hamied, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Dari segi kebijakan pengembangan bahasa, ternyata jangankan dua pertiga untuk memperhatikan bahasa dan guru bahasa; hanya sedikit perhatian atau kurang serius kita mencerdaskan kebudayaan bangsa. Bagaimana hal itu menurut Bapak?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

4. Penanya: Suryati B. Azharie, Universitas Tanjungpura, Pontianak

a. Pertanyaan:

Saya ingin mengetahui sikap Bapak selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai keragaman bahasa Indonesia. Sebagai contoh, sering kita lihat pencampuran pemakaian bahasa Indonesia dengan bahasa asing walaupun saya tahu bahwa mereka tahu hal itu tidak dapat dilakukan. Contoh yang paling mutakhir saya alami ketika mendaftar di hotel ini. Saya dilayani dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing sepotong-sepotong, tetapi saya berlagak tidak tahu. Contoh lain, bahwa guru sering mengatakan, "Perhatikan bahasa Indonesia yang biasa dipakai oleh media elektronik, misalnya TVRI." Akan tetapi, kemarin saya secara sepintas melihat dan mengamati acara olahraga di sebuah stasiun televisi. Pembawa acara menutup acara dengan ungkapan *thank you keras*. Lalu, saya ingat ungkapan kaum remaja *lapar keras*. Yang saya tanyakan adalah bagaimana sikap Bapak terhadap hal itu? Bagaimana hal itu apabila dikaitkan dengan pengajaran bahasa di sekolah-sekolah agar kami yang berada di lapangan tidak selalu dipojokkan oleh masyarakat.

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

5. Penanya: Amran Halim, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. Pertanyaan:

Dalam era globalisasi ini kita perlu meningkatkan kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Dalam kaitan itu, tampaknya kita berada di simpang jalan. Di satu simpang kita berhadapan dengan kenyataan bahwa penguasaan bahasa Indonesia seperti yang dikatakan oleh Bapak Soenjono masih *amburadul*, tetapi pada simpang yang lain penguasaan bahasa Inggris kita "tidak karuan". Pertanyaan saya ialah bagaimana kita mencari jalan keluar sehingga penguasaan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris dapat kita capai? Bagaimana pendapat Bapak mengenai sikap sebagian orang tua yang mengajarkan bahasa Inggris sebagai alat bermain di taman kanak-kanak dan sekolah dasar sehingga bahasa Indonesia sering tersisihkan? Apakah sebagai Menteri, Bapak memberikan peluang kepada rektor, dekan, atau direktur, akademi agar membentuk kelas pendahuluan, khusus mengenai bahasa Indonesia dan bahasa asing sebelum seorang mahasiswa mengikuti kegiatan akademik?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis)

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA INDONESIA DALAM ERA GLOBALISASI

Anton M. Moeliono
Universitas Indonesia

Kepulauan Indonesia merupakan kawasan geografis yang luasnya hampir sama dengan kawasan benua Eropa atau Amerika Utara. Tidak kurang dari 750 bahasa dan logat yang dipakai oleh penduduknya yang terdiri atas 250 suku bangsa lebih. Lagi pula, berbagai bahasa itu juga berbeda dalam muatan budayanya. Hanya bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional, yang mampu mendekatkan berbagai golongan penduduk sehingga warganya dapat berkomunikasi dengan lancar dalam kehidupan sehari-hari.

Masalah yang menarik perhatian para ahli sosiologi bahasa ialah kondisi apa yang memungkinkan bahasa Melayu, yang pada 1928 merupakan bahasa ibu golongan kecil (5%), menjadi bahasa kebangsaan. Penduduk Indonesia pada waktu itu sekitar 60 juta orang. Ada tiga alasan yang sering dikemukakan. Pertama, bahasa Melayu dalam berbagai ragamnya, sekurang-kurangnya sejak awal abad ini, berfungsi sebagai bahasa komunikasi luas (*lingua franca*) antarkelompok etnis. Kedua, walaupun jumlah penuturnya tidak sebanyak penutur bahasa terkemuka, seperti bahasa Jawa atau Sunda, bahasa Melayu, sebagai bahasa-kedua, memiliki daerah persebaran yang paling luas di antara bahasa Nusantara. Ketiga, bahasa Melayu masih berkerabat dengan bahasa Nusantara yang lain sehingga tidak dianggap bahasa asing. Di samping ketiga alasan di atas, agaknya patut dipertimbangkan alasan yang keempat yang sifatnya psikologis. Justru karena bahasa Melayu di Hindia Belanda merupakan bahasa ibu golongan yang kecil dan secara sosial budaya tidak dominan pada waktu itu, maka pemilihan bahasa Melayu menjadi bahasa persatuan tidak menimbulkan perasaan kalah terhadap golongan yang lebih kuat. Semua pihak secara merata berada di dalam keadaan yang secara psikologis “merugikan” karena taraf penguasaan bahasa Melayu peserta pertemuan bersejarah itu tidak setinggi taraf penguasaan bahasa ibunya masing-masing.

Menurut sensus BPS 1990, angka kemajuan pemakai bahasa Indonesia sangat mengesankan. Di antara penduduk yang berusia lima tahun ke atas terlihat tiga kelompok: (1) anggota masyarakat yang memakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari berjumlah kira-kira 24 juta atau 15 persen; (2) orang yang mengaku dapat berbahasa Indonesia, tetapi tidak memakainya sebagai alat komunikasi sehari-hari berjumlah 107 juta atau 68 persen; dan (3) orang yang belum paham bahasa Indonesia masih 27 juta atau 17 persen dari jumlah penduduk. Yang menarik dari angka statistik tersebut ialah kedekatan angka jumlah orang yang belum paham bahasa Indonesia dengan angka jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka statistik itu juga menunjukkan adanya korelasi antara kemahiran berbahasa dengan tingkat pendidikan angkatan kerja Indonesia. Perolehan bahasa Indonesia yang memadai tercapai lewat pendidikan formal. Makin tinggi tingkat pendidikan orang,

makin baik potensinya. Yang bersangkutan dapat mengungkapkan dirinya lewat bahasa Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. BPS menyajikan angka yang berikut sebagai hasil sensus 1990. Angkatan kerja umur sepuluh tahun ke atas yang pendidikannya maksimal SD berjumlah 78 persen, yang pendidikannya maksimal SLTP berjumlah 10,7 persen; yang pendidikannya maksimal SMU 9,7 persen; dan yang pernah duduk di perguruan tinggi berjumlah 1,6 persen.

Keniraksaraan (*illiteracy*) merupakan masalah kebahasaan yang genting bagi negara yang membangun. Proses pembangunan yang bergaris haluan partisipasi politik oleh lapisan masyarakat yang sebanyak-banyaknya, kadar lajunya sering bergantung pula pada taraf keberaksaraan penduduk. Penyampaian informasi pembangunan secara lisan semata-mata hanya berakhir dalam bentuk slogan dan semboyan yang berkali-kali dilafalkan sebagai pengganti karya pembangunan itu sendiri. Keberaksaraan orang yang harus dicapai bukan sekedar kepandaian membaca dan menulis, melainkan keberaksaraan yang fungsional. Keberaksaraan itu harus dianggap awal penyiapan orang bagi peningkatan perannya secara kemasyarakatan demi perbaikan taraf kehidupannya. Keberaksaraan itu harus menjadi tempat berpijak bagi perolehan mata pencarian, bagi peningkatan produksi, bagi keikutsertaan dalam kehidupan madani, dan bagi pemahaman dunia sekelilingnya dengan lebih baik.

Jika keberaksaraan dari sudut pandang politik juga bertujuan memperkuat kohesi nasional, usaha pemberaksaraan lewat bahasa nasional merupakan pilihan yang wajar. Selanjutnya, jika kemampuan berbahasa nasional menjadi pintu gerbang ke pasaran kerja yang lebih luas, dengan sendirinya bahasa Indonesialah yang harus dipilih. Pemberaksaraan di dalam bahasa ibu niraksarawan dapat dianggap langkah awal dalam proses peralihan dari keberaksaraan bahasa ibu ke keberaksaraan bahasa nasional.

Peningkatan tingkat keberaksaraan itu merupakan pelaksanaan salah satu komponen perencanaan bahasa. Di antara sejumlah rumusan hakikat perencanaan bahasa yang berikut ini dapat dianggap cocok untuk Indonesia. "Perencanaan bahasa men-capai berbagai upaya yang dimaksudkan untuk mempengaruhi perilaku orang yang berkenaan dengan pemerolehan dan bentuk atau korpus bahasa serta alokasi fungsional ragam bahasanya." Upaya perencanaan bahasa tidak perlu mengubah segala-galanya. Yang sudah baik dapat dipertahankan, yang belum baik harus disempurnakan. Perencanaan bahasa beserta pelaksanaannya, yang diusahakan pada taraf nasional, memerlukan dukungan nyata dari pihak pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. Jika, misalnya, pengembangan bahasa Indonesia dan penyebarannya ke segenap lapisan masyarakat lambat laun dapat mengurangi perasaan kesukuan yang kuat, kedua lembaga eksekutif dan legislatif akan mensponsori perencanaan itu.

Perencanaan bahasa di Indonesia yang merupakan masyarakat aneka-bahasa, memiliki tiga dimensi, yakni perencanaan yang menyangkut bahasa Indonesia, yang menyangkut bahasa daerah, dan yang menyangkut bahasa asing yang digunakan untuk tujuan tertentu. Makalah ini membatasi diri pada perencanaan bahasa Indonesia tanpa mengingkari jalinannya dengan perencanaan kedua kelompok bahasa lain yang disebutkan di atas.

Perencanaan bahasa Indonesia di era globalisasi dapat dibagi ke dalam tiga bidang yang besar: (1) perencanaan pemerolehan bahasa Indonesia, (2) perencanaan fungsi sosiolinguistiknya yang berupa alokasi fungsionalnya di dalam masyarakat aneka bahasa, dan (3) perencanaan pengembangan bentuk atau korpus bahasa.

Perencanaan perolehan bahasa Indonesia berkaitan dengan peningkatan penutur bahasa itu. Di atas telah disinggung angka 27 juta orang yang belum berbahasa Indonesia; di samping itu 78 persen angkatan kerja Indonesia nyaris belum mendapat pengajaran bahasa Indonesia yang memadai. Sudah jelas masalah kebahasaan seperti itu tidak dapat diatasi dengan “Paket Kejar” semata-mata. Jika kita benar-benar men-citakan masyarakat madani, maka prasyarat untuk menjadi warganya ialah kemahiran bahasa Indonesia yang fungsional.

Di samping itu, bangsa Indonesia mengalpakan suatu kewajiban, yakni promosi bahasa Indonesia di luar negeri. Berbeda dengan bangsa Inggris, Prancis, Jerman, Jepang, dan Rusia, yang masing-masing menyelenggarakan British Council, Alliance Française, Goethe Institut, Japan Foundation, dan Lembaga Kebudayaan Rusia, di Kedutaan Indonesia di luar negeri sekolah Indonesia hanya dimaksudkan untuk siswa Indonesia, dan di dalam perpustakaan (jika ada) warga masyarakat yang berminat tidak akan mendapat informasi yang memadai tentang bahasa dan budaya Indonesia. Rupanya, setelah 53 tahun merdeka, orang Indonesia masih tetap hanya sibuk dengan dirinya sendiri.

Bidang perencanaan kedua yang berhubungan dengan alokasi berbagai fungsi kemasyarakatan kepada bahasa Indonesia lebih banyak bercorak tata negara, politik, pendidikan, atau kebudayaan. Bahasa Indonesia, sebagai bahasa negara, menjadi bahasa resmi dalam urusan pemerintahan yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pengantar pendidikan pada semua taraf pendidikan yang mengajarkan dan mengembangkan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, bahasa Indonesia menjadi wahana ungkapan berbagai cabang seni, seperti seni suara, seni pentas, dan seni sastra.

Saluran yang penting bagi pelaksanaan perencanaan bahasa di dalam pendidikan ialah sistem pendidikan formal yang dapat memberikan pelatihan secara berencana dan teratur. Pengajaran bahasa Indonesia, menurut pendapat banyak orang, belum mencapai hasil yang memuaskan. Ada IKIP, kurikulum bahasa silih berganti, buku pelajaran bahasa disayembarakan; tetapi keluaran pendidikan bahasa Indonesia tetap dianggap di bawah mutu yang layak. Peningkatan demokratisasi politik dan partisipasi politik warga masyarakat bertumpu pada kemahiran orang mengungkapkan isi hatinya lewat bahasa yang runtut dan tertata. Pertanyaan apakah pengajaran bahasa Indonesia harus turun mesin, mungkin akan terjawab jika perencanaan bahasa pendidikan dirintis atas kerja sama berbagai pihak yang berkepentingan. Patut disayangkan, bahwa pihak yang berwenang, misalnya, tidak mampu merencanakan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama, bahasa kedua, dan bahasa asing. Padahal, kita hidup dalam masyarakat anekabahasa.

Kemahiran berbahasa Indonesia secara lisan dan tertulis akan memperkuat ketahanan budaya orang Indonesia menghadapi masuknya bahasa asing dalam era globali-

sasi. Pemakaian bahasa asing yang berlebih dewasa ini dianggap akibat arus globalisasi. Dengan kata lain, kita mengaku kalah sebelum bertarung.

Bidang perencanaan ketiga yang bertalian dengan bentuk dan sistem bahasa Indonesia sudah menunjukkan beberapa hasil yang mengembirakan. Ejaan bahasa Indonesia dibakukan untuk ketiga kalinya pada 1972; pedoman penjabarannya diterbitkan pada 1975. *Kamus Bahasa Indonesia* Poerwadarminta yang edisi pertamanya terbit 1952 kini masih dipakai orang. Buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* pada tahun 1998 dipasarkan dalam edisinya yang ketiga. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* telah mengalami dua edisi (1988, 1991) dan edisi ketiganya sedang disiapkan. Di samping itu, berpuluh-puluh buku tata bahasa, kamus umum, kamus ungkapan karangan perseorangan masuk pasar buku.

Perkembangan masyarakat di bidang ilmu dan teknologi mendorong usaha penerbitan berbagai kamus dan glosarium cabang ilmu dengan berbagai taraf kecanggihan. Di samping itu, berbilang ranah kehidupan yang baru, seperti pers, industri, niaga, manufaktur, produksi, rekayasa, profesi mandiri seperti pengacara, notaris, dan konsultan, mengembangkan bermacam laras bahasa dengan gaya khasnya masing-masing. Jika ranah tersebut mengenal suatu tradisi, biasanya tradisi Belanda, tradisi itu dilanjutkan dengan kemasan Indonesia. Jika ranah itu tidak mengenal tradisi di Indonesia, lazimnya tradisi bahasa Inggris kemudian diindonesiakan.

Ketiga bidang perencanaan bahasa itu tentu harus dilaksanakan oleh organisasi atau orang-seorang. Dewasa ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mengampu sebagian program perencanaan bahasa yang dimaksudkan, khususnya bidang perencanaan bentuk atau korpus bahasa. Untuk era globalisasi lembaga itu perlu direstrukturisasi dengan atau tanpa pengubahan nama, dengan atau tanpa pengubahan status organisasi pemerintahannya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu perlu mendapat mandat baru agar dapat memimpin dan menyelenggarakan perencanaan bahasa nasional yang dituntut oleh masa mendatang. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu harus menjadi suatu "*clearing house*", tempat mengumpulkan, mengolah segala informasi kebahasaan, dan menyebarkannya kepada semua pihak yang berkepentingan, termasuk berbagai direktorat jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Di samping itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bentuknya yang baru sebaiknya didampingi suatu badan penasihat yang anggotanya berasal dari kalangan yang berkepentingan kebahasaan.

Berikut ini dikemukakan sejumlah kegiatan yang dapat dilanjutkan, jika sudah ada, atau yang perlu dikembangkan:

1. pengumpulan data kebahasaan, termasuk kesusastraannya, yang bertalian dengan bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing di Indonesia;
2. perumusan garis haluan dan kebijakan nasional kebahasaan yang menyangkut ketiga golongan bahasa tersebut;
3. pelatihan kebahasaan profesional;
4. pemberian layanan kebahasaan;
5. penyelenggaraan konferensi dan lokakarya;
6. pengembangan bahan ajar untuk ketiga golongan bahasa tersebut;

7. pengaturan penerjemahan terbitan ilmiah dan profesional;
8. penyebaran hasil penelitian dan hasil pengembangan korpus bahasa ke pasar buku.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A2
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 14.20--15.10
Judul Makalah	: Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia dalam Era Globalisasi
Penyaji	: Anton M. Moeliono
Pemandu	: Soenardji
Pencatat	: a. Nengah Sukayana b. Sri Winarti
Peserta	: 150 orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** Herman Waluyo, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

a. **Saran:**

Guru SD perlu diundang dalam kongres bahasa Indonesia yang akan datang karena kedudukan mereka sangat penting sebagai ujung tombak pembelajaran bahasa Indonesia untuk anak yang pertama kali belajar bahasa Indonesia.

b. **Jawaban:**

(Jawaban ada pada nomor 7.)

2. **Penanya:** J.S. Badudu, Universitas Padjadjaran, Bandung

a. **Saran:**

Kita harus mencari jawab tentang kegagalan pengajaran bahasa Indonesia di sekolah kita. Untuk itu, diusulkan agar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengubah orientasi pengajaran bahasa Indonesia di sekolah dan melengkapi sekolah dengan perpustakaan yang memadai.

b. **Jawaban**

(Jawaban ada pada nomor 7.)

3. **Penanya:** Mutsyuhito Solihin, IKIP Medan

a. **Pertanyaan:**

Apakah 750 bahasa daerah menghambat pemberaksaraan masyarakat Indonesia? Apakah orang yang menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari itu lebih beraksara?

b. **Jawaban:**

(Jawaban ada pada nomor 7.)

4. Penanya: Liberty Sihombing, Universitas Indonesia**a. Pertanyaan:**

Kita harus memperbaiki kurikulum bahasa Indonesia. Akan tetapi, jika kurikulum harus diubah, perlu dipikirkan juga bagaimana mengisi dan menyebarkan kurikulum yang baru itu.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

5. Penanya: Achmad Tolla, IKIP Ujung Pandang**a. Saran:**

Buku pelajaran bahasa Indonesia untuk SD sulit dipahami oleh guru di daerah karena buku itu ditulis oleh orang Jakarta yang tidak banyak mengetahui kehidupan masyarakat di daerah. Selain itu, kebanyakan guru bahasa Indonesia di SD itu adalah guru umum yang tidak memahami ejaan dan struktur kalimat. Untuk itu, perlu diadakan penataran bahasa Indonesia untuk guru-guru SD itu. Perlu juga dipertimbangkan untuk merancang tata bahasa Indonesia tidak baku karena bahasa Indonesia itu bukan hanya bahasa formal.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

6. Penanya: (Penanya tidak menyebutkan namanya)**a. Pertanyaan/Saran:**

Pendidikan bahasa Indonesia mengalami kegagalan karena titik beratnya berada pada teori dan bukan pada keterampilan. Keterampilan berbahasa itu didukung teori bahasa, pengalaman berbahasa, dan latihan berbahasa dalam porsi yang seimbang.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

7. Penanya: Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta**a. Pertanyaan/Saran:**

Hasil penilaian terhadap buku pelajaran bahasa Indonesia dikatakan sangat buruk. Bagaimana dan siapa yang mampu memperbaiki buku pelajaran bahasa Indonesia yang sangat buruk itu?

b. Jawaban 1–7

Saya sepakat dengan Pak Badudu bahwa kita perlu merombak pengajaran bahasa Indonesia itu. Untuk itu, kita perlu belajar pada orang lain yang telah berhasil dalam pengajaran bahasanya. Saya juga ingin menegaskan bahwa arah pengajaran bahasa Indonesia itu adalah bagaimana mengajarkan keterampilan

berbahasa. Adanya 750 bahasa daerah itu tidak menghambat pemberaksaraan. Pengembangan cendekiawan Indonesia amat bergantung pada pemberaksaraan pengajaran bahasa Indonesia itu.



KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA DAERAH DALAM ERA GLOBALISASI

Zainuddin Taha
IKIP Ujung Pandang

1. Pendahuluan

Saling pengaruh antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing merupakan kenyataan kebahasaan yang telah, sedang, dan akan berlangsung secara terus-menerus seiring dengan perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang pada umumnya tergolong dwibahasawan dan multibahasawan. Seiring pula dengan bertambah majunya kesadaran akan pentingnya peranan bahasa-bahasa itu dalam usaha mencapai kemajuan di segala bidang serta bertambah mantapnya keyakinan kita bahwa perilaku kebahasaan seseorang atau masyarakat dapat diubah dan dipengaruhi maka semakin lama semakin meningkat pula usaha untuk menempuh berbagai cara agar kenyataan kebahasaan yang tidak mungkin ditiadakan itu dapat terkendali ke arah tujuan dan sasaran yang diinginkan bersama.

Untuk dapat mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendaki tersebut, salah satu di antara usaha yang telah dilakukan adalah melaksanakan Seminar Politik Bahasa Nasional. Seminar Politik Bahasa Nasional yang diselenggarakan pada bulan Februari 1975 telah berhasil dengan baik merumuskan suatu kerangka dasar bagi pengolahan masalah kebahasaan di Indonesia. Kerangka dasar atau yang lazim disebut *Politik Bahasa Nasional* adalah kebijaksanaan nasional yang berisi perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang perlu dipakai secara dinamis dan kreatif sebagai dasar bagi pengolahan keseluruhan masalah kebahasaan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik pada masa sekarang maupun pada masa yang akan datang. Perencanaan, pengarahan, dan ketentuan-ketentuan yang telah dirumuskan dalam seminar tersebut, antara lain, adalah rumusan bahwa masalah kebahasaan di Indonesia merupakan jaringan masalah yang dijalin oleh (1) masalah bahasa nasional, (2) masalah bahasa daerah, (3) dan masalah pemakaian dan pemanfaatan bahasa-bahasa asing tertentu di Indonesia. Kerangka dasar ini dilengkapi pula dengan rumusan pengertian bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing, serta masing-masing kedudukan dan fungsinya (Halim, 1980).

Bahasa daerah sebagai salah satu masalah kebahasaan di Indonesia, perlu ditangani secara serius dan sungguh-sungguh. Indonesia yang memiliki kekayaan bahasa daerah sekitar 289 buah dengan 13 buah bahasa daerah yang berpenutur di atas satu juta orang merupakan modal dasar dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah tersebut. Oleh karena itu, masalah yang penting dan mendesak dilakukan adalah bagaimana cara untuk menumbuhkembangkan fungsi bahasa nasional, bahasa daerah, dan bahasa asing secara sehat sesuai dengan kedudukan yang telah digariskan dalam Politik Bahasa Nasional?

Sehubungan dengan penanganan masalah bahasa daerah, uraian dalam makalah ini akan menjawab permasalahan (1) bagaimanakah kondisi kedudukan dan fungsi

bahasa daerah sekarang?, (2) kondisi yang bagaimana yang diharapkan sehubungan dengan butir (1), terutama dalam hubungannya dengan era globalisasi?, dan (3) strategi apa yang perlu dilakukan untuk mencapai kondisi yang diharapkan itu?

2. Kondisi Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah Sekarang

Ada beberapa landasan pemikiran yang dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kedudukan dan fungsi bahasa daerah sekarang ini, seperti yang berikut ini.

- 1) Penjelasan Pasal 36, Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Madura), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup”.
- 2) Rumusan Seminar Politik Bahasa Nasional pada bulan Februari 1975 mengenai kedudukan dan fungsi bahasa daerah, di dalam hubungannya dengan kedudukan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa seperti yang dikemukakan pada butir (1) berkedudukan sebagai bahasa daerah. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa daerah, bahasa-bahasa tersebut berfungsi sebagai (1) lambang kebanggaan daerah, (2) lambang identitas daerah, dan (3) alat perhubungan di dalam keluarga dan masyarakat daerah. Di dalam hubungannya dengan fungsi bahasa Indonesia, bahasa daerah berfungsi sebagai (1) pendukung bahasa nasional, (2) bahasa pengantar di sekolah dasar di daerah tertentu untuk memperlancar pengajaran bahasa Indonesia dan mata pelajaran lain, dan (3) alat pengembangan dan pendukung kebudayaan daerah (Halim, 1980). Dirumuskan pula bahwa usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah meliputi (1) inventarisasi dan (2) peningkatan mutu pemakaian.
- 3) Garis-Garis Besar Haluan Negara tahun 1993, butir 3f, menetapkan bahwa “Pembinaan bahasa daerah perlu terus dilanjutkan dalam rangka mengembangkan dan memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khasanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur jati diri dan kepribadian bangsa. Perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah serta penyebarannya melalui berbagai media massa.
- 4) Salah satu putusan hasil Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993, khususnya dalam pengajaran bahasa dan sastra adalah bahwa bahasa daerah di wilayah tertentu dapat diajarkan kepada peserta didik penuturnya tanpa menghambat pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Oleh karena itu, kurikulum, buku pelajaran, metode, dan sarana lain untuk pendidikan dan pengajaran bahasa daerah perlu dikembangkan.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut dan dari kenyataan yang terjadi, dapat ditarik suatu simpulan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa daerah sekarang ini cenderung kurang menggembirakan dan belum ditangani sebagaimana yang diharapkan. Kecenderungan itu dapat digambarkan seperti berikut ini.

- 1) Ada kecenderungan yang tampak di tengah masyarakat dewasa ini, terutama mereka yang bermukim di perkotaan dan di kalangan generasi muda, lebih tertarik

menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing (terutama bahasa Inggris) daripada bahasa daerah dalam kehidupannya sehari-hari. Jika benar proyeksi Biro Statistik (Abas, 1983) bahwa pada tahun 1981 seluruh penduduk Metropolitan Jakarta Raya sudah mampu berbahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari dan pada tahun 2041 seluruh penduduk Indonesia sudah mampu berbahasa Indonesia dalam pergaulannya sehari-hari, kecenderungan masyarakat yang demikian itu merupakan ancaman bagi kedudukan dan fungsi bahasa daerah sebagai alat perhubungan dalam keluarga dan masyarakat daerah tertentu.

- 2) Pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi seperti radio dan televisi, cenderung pula memusnahkan kehidupan seni dan sastra daerah yang merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam upaya pelestarian bahasa daerah sebagai lambang kebanggaan dan identitas daerah.
- 3) Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas permulaan pada sekolah dasar tertentu yang cenderung makin lama makin ditiadakan juga merupakan salah satu indikasi mengenai makin kurang berfungsinya bahasa daerah.
- 4) Kurangnya minat dan perhatian di kalangan generasi muda sekarang ini terhadap kebudayaan daerahnya merupakan hambatan yang belum dapat diatasi dalam rangka mewujudkan bahasa daerah dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia sebagai alat pendukung kebudayaan daerah.
- 5) Dalam kaitannya dengan fungsi bahasa daerah sebagai pendukung bahasa nasional, terlihat pula kecenderungan bahwa pemerayaan bahasa Indonesia sangat didominasi oleh bahasa-bahasa asing (terutama bahasa Inggris), sedangkan bahasa daerah yang justru harus lebih diprioritaskan malah terabaikan. Kenyataan yang terjadi adalah banyak kosakata bahasa Indonesia yang diserap masuk ke dalam bahasa daerah, tetapi jarang sekali terjadi kosakata bahasa daerah yang diserap masuk ke dalam bahasa Indonesia, kecuali bahasa-bahasa daerah tertentu saja, seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda.

3. Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah dalam Hubungannya dengan Era Globalisasi

Sebelum diuraikan bagaimana agar kondisi kedudukan dan fungsi bahasa daerah seperti yang digariskan dalam UUD 1945, Politik Bahasa Nasional 1975, GBHN 1993, dan Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI 1993, untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara sehat dalam era globalisasi pada abad ke-21, terlebih dahulu dikemukakan dan digambarkan bagaimana kondisi era globalisasi dan peluang yang dimiliki serta hambatan yang mungkin dihadapi bahasa daerah.

Indonesia, sebagai negara yang tidak terpisahkan dari negara lain di belahan bumi ini, mau tidak mau harus siap memasuki dan menghadapi era globalisasi dan era pasar bebas. Kondisi yang terjadi dalam era globalisasi dan kaitan dengan masalah kebahasaan, antara lain, dapat digambarkan seperti yang berikut ini.

- 1) Era globalisasi ditandai pula dengan era elektronika. Para pakar komunikasi modern banyak yang beranggapan bahwa era itu akan diwarnai oleh kemajuan komunikasi lisan di satu pihak dan kemunduran komunikasi tertulis di pihak lain.

- 2) Era globalisasi disebut pula sebagai era seni dan pariwisata. Orang-orang akan melancong dari suatu tempat ke tempat yang lain. Setiap bangsa dan setiap daerah akan terlibat dalam kompetisi yang sengit dalam menampilkan, memperkenalkan, dan mempromosikan produk seni dan budayanya.
- 3) Timbul pula suatu kecenderungan baru dalam dunia sosiolinguistik yang mengarah kepada penggalan aspek kultural dan kebahasaan (Fishman, 1972).
- 4) Mursal Esten (1997), dengan mengulas pendapat John Naisbitt, mengibaratkan paradoks era globalisasi dengan: "semakin kita menjadi universal, tindakan kita semakin bersifat kesukuan". Esten mencontohkan ketika bahasa Inggris menjadi bahasa kedua semua orang, bahasa pertama, bahasa ibu mereka menjadi lebih penting dan dipertahankan dengan lebih giat.

Dari kenyataan era globalisasi yang dipaparkan di atas, akan muncul pertanyaan "sejauh manakah kontribusi bahasa daerah terhadap era globalisasi sehubungan dengan kedudukan dan fungsinya sekarang ini?" Sesungguhnya dalam era yang akan datang sangat diharapkan bahasa daerah dapat saling mengisi dengan bahasa Indonesia, serta saling mendukung dalam pembentukan sumber daya manusia Indonesia yang modern yang mampu menjawab tantangan era globalisasi seperti yang telah digambarkan itu. Sumber daya manusia yang diharapkan itu adalah manusia Indonesia yang modern yang memiliki penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak kehilangan jati diri dan kepribadian sebagai bangsa Indonesia. Dalam kondisi seperti itulah, bahasa Indonesia dapat berperan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan bahasa daerah dapat berperan dalam pembentukan jati diri dan kepribadian bangsa.

Kondisi masa depan bahasa Indonesia dan bahasa daerah yang diinginkan itu, mungkin dapat pula dipandang sebagai suatu proses menuju kepada kenyataan kebahasaan yang pernah diramalkan Alisjahbana dalam Halim (1980). Menurutnya, proses saling pengaruh dan perpaduan bahasa Indonesia dan bahasa daerah di Indonesia sekarang dan dalam beberapa puluh tahun atau seratus tahun pada masa yang akan datang, bahasa-bahasa daerah yang serumpun itu lambat laun akan mengelilingi bahasa kesatuan dan bahasa resmi Indonesia sebagai dialek yang mengelilingi bahasa induknya.

Dalam era globalisasi nanti, bahasa daerah akan melakukan kontak dengan sejumlah bahasa asing dan tidak terkecuali dengan bahasa Indonesia dan sesama bahasa daerah. Dari situasi seperti itulah, diharapkan bahasa daerah dapat memainkan peranan sesuai dengan kedudukan dan fungsinya, juga tidak terlepas kaitannya dengan upaya mengantisipasi dampak negatif era globalisasi. Permasalahan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana cara agar keinginan itu dapat diwujudkan secara efektif dan efisien. Untuk itu, masalah yang perlu di jawab sekarang adalah bagaimana peluang yang dimiliki dan hambatan yang dihadapi dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah pada era globalisasi?

Peluang yang dimiliki berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dalam era globalisasi, antara lain, seperti yang berikut ini.

- 1) Adanya kepastian tentang garis haluan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah seperti yang ditetapkan dalam UUD 1945, Politik Bahasa Nasional 1975, GBHN

1993, dan Kongres Bahasa Indonesia VI 1993.

- 2) Bangsa Indonesia memiliki kekayaan bahasa daerah yang sangat mungkin untuk penyeleksian dan pemilihan dalam pengembangan dan pembinaannya pada era globalisasi.
- 3) Adanya anggapan bahwa pada era globalisasi, interaksi antarmanusia dan antarbangsa akan lebih memperlihatkan sikap “berpikir global, bertindak lokal” adalah peluang yang sangat berharga bagi bahasa daerah sebagai pemer kaya bahasa Indonesia yang mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa.
- 4) Berkaitan dengan butir 3 maka kecenderungan global seperti itu dapat digambarkan seperti berikut ini.
 - (1) Era elektronika yang membawa kecenderungan ke dalam komunikasi lisan merupakan peluang untuk masuknya unsur-unsur bahasa daerah yang umumnya bersifat lisan dalam penggunaan bahasa Indonesia lisan.
 - (2) Era seni dan pariwisata yang cenderung akan membangkitkan semangat kompetitif antarbangsa dan antardaerah yang semakin sengit dalam seni dan budaya merupakan pula peluang besar untuk menumbuhkan bahasa-bahasa daerah melalui kemasan seni dan budaya tersebut.
 - (3) Kecenderungan kajian sosiolinguistik ke arah kajian kultural atau semiotik sosial juga dapat memberikan peluang bagi penggalian unsur-unsur bahasa daerah bagi pemer kaya bahasa Indonesia sebagai bahasa modern yang tetap mencerminkan jati diri dan kepribadian bangsa Indonesia. Hal ini disokong pula oleh penancangan disiplin penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang pada prinsipnya untuk mencegah masuknya istilah-istilah asing secara berlebihan dan tak terarah ke dalam bahasa Indonesia.
- 5) Keberadaan unit pelaksana teknis Balai Penelitian Bahasa yang diprioritaskan khusus bagi penanganan masalah bahasa daerah adalah peluang yang baik bagi upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah, terutama untuk meningkatkan mutu pemakaian dalam masyarakat pendukungnya.
- 6) Dimasukkannya mata pelajaran bahasa daerah dalam kurikulum sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama dan masih digunakannya sebagai bahasa pengantar di kelas permulaan pada sekolah dasar di daerah-daerah tertentu.
- 7) Dukungan pemerintah dan perhatian pada pakar yang telah diperlihatkan selama ini.

Selain peluang yang dimiliki seperti yang dikemukakan di atas, kemungkinan hambatan yang dihadapi bagi pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dalam era globalisasi, antara lain, seperti yang berikut ini.

- 1) Adanya sikap dan anggapan sebagian masyarakat yang masih menomorsatukan bahasa asing (terutama bahasa Inggris) di bandingkan dengan bahasa Indonesia dan apalagi bahasa daerah. Jika dikaitkan dengan era globalisasi atau pasar bebas yang menghendaki penguasaan bahasa Inggris, sikap seperti itu sangatlah wajar sehingga motivasi masyarakat untuk menguasai bahasa Indonesia dan bahasa daerah makin rendah.
- 2) Minat mempelajari dan menguasai bahasa daerah di kalangan generasi muda tampaknya kurang menggembirakan karena hal itu berkaitan dengan anggapan bahwa

menguasai bahasa daerah belum dapat memberi-kepastian dan jaminan kerja sehingga animo dan minat masyarakat sangatlah minim.

- 3) Sistem pembinaan dan pengembangan yang cenderung kurang terkoordinasi dengan baik dan menyeluruh terhadap bahasa-bahasa daerah yang semestinya juga mendapat perhatian dan perlakuan yang sama. Hal ini terlihat, antara lain, dalam kenyataan penggarapan bahasa-bahasa daerah yang cenderung lebih bergantung kepada inisiatif dan usaha kelompok masyarakat bahasa daerah tertentu saja yang sudah mapan seperti bahasa Jawa, Sunda, dan Bali dan secara periodik melaksanakan kongres, seminar, penerbitan, dan sebagainya.
- 4) Dalam kaitannya dengan butir (2), terdapat pula hambatan berupa terbatasnya tenaga ahli. Keterbatasan tenaga ahli ini terkait pula dengan ketersediaan pusat-pusat kajian bagi bahasa-bahasa daerah tertentu. Selama ini hanya pusat kajian bahasa Jawa, Sunda, dan Bali yang kelihatannya lebih aktif dalam melaksanakan kajiannya sehingga bahasa-bahasa daerah tersebutlah yang kian mapan dan memiliki tenaga ahli yang profesional.

4. Strategi Pemantapan Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah dalam Menghadapi Era Globalisasi

Jika kita mengacu pada peluang yang dimiliki dan hambatan yang mungkin dihadapi bahasa daerah untuk lebih memantapkan kedudukan dan fungsinya dalam menghadapi era globalisasi, diperlukan strategi berupa upaya yang harus dilakukan agar pengaruh era globalisasi dapat diantisipasi. Berikut ini akan dikemukakan beberapa alternatif yang dapat ditempuh.

- 1) Balai Penelitian Bahasa sebagai unit pelaksana teknis dan merupakan perpanjangan tangan dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di daerah-daerah perlu diberi peluang yang lebih besar dan difungsikan semaksimal mungkin bagi usaha-usaha seperti:
 - a. pembinaan sikap positif terhadap bahasa daerah,
 - b. peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah, dan
 - c. pengembangan bahasa daerah berupa pembakuan ejaan, penyusunan kamus, pembakuan tata bahasa-bahasa daerah yang dianggap layak di lingkup kewenangan Balai Penelitian Bahasa yang bersangkutan.
- 2) Untuk mencapai hal tersebut (butir 1), dapat ditempuh alternatif sebagai berikut.
 - a. Balai Penelitian Bahasa dapat melakukan usaha tersebut dengan mengembangkan jaringan kerja sama dengan organisasi-organisasi profesi kebahasaan seperti Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Himpunan Sarjana Kesusasteraan Indonesia (Hiski), atau dengan perguruan tinggi yang terdapat di daerah yang bersangkutan. Kerja sama tersebut harus dikoordinasikan dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai induk organisasinya.
 - b. Pembinaan sikap positif terhadap bahasa daerah dan peningkatan mutu pemakaian bahasa daerah perlu direncanakan dan diupayakan melalui berbagai cara seperti penyuluhan bahasa daerah, penerbitan buku-buku pelajaran bahasa daerah.

atau penerbitan buku-buku pelajaran bahasa daerah, atau penerbitan media berbahasa daerah.

- c. Mata pelajaran bahasa daerah, selama ini hanya diajarkan di sekolah dasar dan kelas 1 sekolah lanjutan tingkat pertama, hendaknya diajarkan pula hingga ke tingkat sekolah menengah umum/khusus seperti layaknya mata pelajaran bahasa Inggris.
- d. Program studi bahasa daerah yang ada di perguruan tinggi hendaknya tetap dipertahankan sebab berkaitan erat dengan peningkatan mutu tenaga profesional bahasa daerah. Untuk memenuhi harapan itu, hendaknya pemerintah mengupayakan kemungkinan tersedianya lapangan kerja yang lebih banyak untuk menampung lulusan sarjana bahasa daerah. Jika itu terpenuhi, motivasi masyarakat terutama generasi muda untuk mempelajari dan mengajarkan bahasa daerah dapat semakin besar.
- e. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah perlu diarahkan ke dalam upaya-upaya pembinaan dan pengembangan budaya, kesenian, dan tradisi daerah baik pada tingkat lokal maupun nasional.

5. Penutup

Salah satu masalah kebahasaan yang perlu mendapat penanganan serius dan sungguh-sungguh dari semua pihak adalah bahasa daerah. Bangsa Indonesia yang memiliki beraneka bahasa daerah harus dipelihara, dijaga, dan dilestarikan sehingga tidak akan punah dan musnah. Sebagai pendukung bahasa Indonesia, kedudukan dan fungsi bahasa daerah seyogianya mendapat prioritas dalam pembinaan dan pengembangannya. Perbendaharaan kosakata bahasa Indonesia harus diutamakan diserap dari bahasa daerah, khususnya kosakata atau istilah budaya dan seni.

Era globalisasi atau pasar bebas yang sudah ada di depan mata yang oleh banyak kalangan dianggap merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup bahasa daerah sesungguhnya tidak perlu dikhawatirkan. Kedatangan era globalisasi hendaknya menjadi pendorong bagi masyarakat Indonesia untuk mempermantap dan memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa daerah sehingga jati diri dan kepribadian bangsa akan tetap terpelihara. Hal tersebut dapat dicapai bila masyarakat memiliki kesetiaan, kesadaran, dan kebanggaan terhadap bahasa daerahnya.

Kedudukan dan fungsi bahasa daerah dalam era globalisasi kian mantap jika mendapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat dan pemerintah. Masyarakat harus bersikap positif dan selalu meningkatkan mutu pemakaian bahasa daerahnya. Sementara itu, Pemerintah menyediakan fasilitas yang memadai seperti ketersediaan bahan bacaan dan media berbahasa daerah. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah memberi perhatian pada pendidikan dan pengajaran bahasa dan sastra daerah, serta peluang kesempatan kerja yang lebih besar. Melalui pendidikan dan pengajaran, diharapkan dapat dihasilkan tenaga ahli yang profesional dan model penutur ideal yang diinginkan (memiliki sikap setia, sadar, dan bangga) sehingga mereka dapat dijadikan ujung tombak dalam usaha pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

Daftar Pustaka

- Abas, Husen. 1983. "Angka Statistik sebagai Salah Satu Indikator Masalah Kebahasaan dengan Menampilkan Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Kasus Khusus". Makalah Kongres Bahasa Indonesia IV 1983. Jakarta.
- Alisjahbana, Sutan Takdir. 1975. "Politik Bahasa Nasional dan Pembinaan Bahasa Indonesia". Dalam Amran Halim (Ed.). 1980. *Politik Bahasa Nasional Jilid 1*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Tanpa Tahun. *Bahasa Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Esten, Mursal. 1997. "Bahasa, Sastra, dan Globalisasi". Dalam *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Makalah Seminar Nasional VII, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia. Medan
- Fachruddin A.E., 1994. *Dasar-Dasar Keterampilan Menulis*. Ujung Pandang: Badan Penerbit IKIP Ujung Pandang.
- Fishman, J.A. 1972. "The Sociology of Language". Dalam Pier Paolo Giglioli (Ed.). 1972. *Language and Social Context*. Harmondwort: Penguin Books Australia Ltd.
- Halim, Amran (Ed.). 1980. *Politik Bahasa Nasional, Jilid 2*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sibarani, Robert. 1997. "Upaya Pelestarian Bahasa Daerah (Kasus Bahasa Batak Toba)". Dalam *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Makalah Seminar Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, Medan, 7--9 Juli 1997.
- Taha, Zainuddin. 1985. "Suatu Wacana Dua Bahasa : Faktor-Faktor Sosiolinguistik Alih Kode Bahasa Bugis Bahasa Indonesia". Disertasi tidak dipublikasikan. Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang.
- , 1988. "Pembinaan Bahasa Indonesia Melalui Media Cetak". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V 1988, Jakarta.
- , 1991. "Pemakaian Bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan". Makalah Munas V dan Semlok I HPBI, tanggal 5--7 Agustus 1991, Padang.
- , dan Nasiruddin Sainu, 1998. "Variasi Bahasa Indonesia di Sulawesi Selatan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Fonologi". Makalah Simposium Internasional Kedua Ilmu Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia, Ujung Pandang.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A6
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.50–1540
Judul Makalah	: Kedudukan dan Fungsi Bahasa Daerah dalam Era Globalisasi
Penyaji	: Zainuddin Taha
Pemandu	: Djantera Kawi
Pencatat	: 1. Adnan Usmar 2. Hari Sulastri
Jumlah Peserta	: 80 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Mansoer Pateda, STKIP Gorontalo

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah bahasa daerah masih merupakan lambang kebanggaan daerah?
- 2) Bagaimana pendapat Bapak untuk mengembalikan citra bahasa daerah itu sebagai lambang kebanggaan daerah? Lalu, Bapak juga tadi mengatakan bahwa bahasa daerah yang masih *dipelihara* oleh penuturnya. Perlu dipersoalkan istilah *dipelihara* itu. Apakah pengertian *dipelihara* hanya dikaitkan dengan pemakai, pemakaian bahasa daerah, atau *dipelihara* harus dikaitkan dengan keterlibatan pemerintah daerah untuk mengembangkannya.

b. Jawaban:

- 1) Bahasa-bahasa daerah tertentu terutama bahasa-bahasa mayor/bahasa daerah besar yang menurut data Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ada tiga belas, saya rasa masih merupakan lambang kebanggaan daerah dan juga masih merupakan lambang jati diri bagi daerah yang bersangkutan. Oleh sebab itu, menurut saya, bahasa-bahasa daerah yang seperti itu, bahasa-bahasa daerah yang besar itu, saya kira adalah sewajarnya apabila terus memperoleh perhatian yang lebih besar untuk masa-masa yang akan datang. Kalau kita kembali pada Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 jelas bahwa yang berkewajiban utama, terutama untuk memelihara bahasa daerah itu, pertama-tama adalah masyarakat penuturnya sendiri, masyarakat pemakainya. Negara baru berkewajiban untuk menghormati dan memelihara juga bahasa-bahasa daerah itu apabila penutur/pemakai bahasa-bahasa daerah itu memang menunjukkan juga upaya/usaha-usaha untuk tetap memelihara dan menghormati bahasa daerahnya. Jadi, jangan kita terus meminta negara dulu yang terus melindungi/memelihara bahasa daerah ini, tetapi upaya dari masyarakat pemakai bahasa itu sendiri hanya bersifat pasif saja.

2. **Penanya:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Bapak pemakalah sebagai sosiolinguis dan juga selalu berkecimpung di dalam dunia pemertahanan bahasa, apakah Bapak sudah membaca dua artikel Fishman yang patut dibaca oleh siapa pun yang ingin mempertahankan bahasanya? Salah satu judulnya adalah *Reversing Language Shift* (Membalikkan Pergeseran Bahasa). Bahasa-bahasa di dunia ini banyak bergeser, terutama bahasa daerah apalagi dalam era globalisasi. Nah, karena itu, perlu diusahakan bagaimana caranya. Ternyata menurut teori Fishman ini pengajaran bahasa di sekolah tidak menjamin bahasa itu akan dipertahankan, adanya undang-undang tidak akan menjamin, adanya kebanggaan tidak akan menjamin, selama masyarakat yang bersangkutan terkena penyakit apa yang disebut dengan istilah dislokasi generasi. Dislokasi generasi itu terjadi jika satu generasi tidak lagi mengajarkan bahasa kepada anak cucunya. Nah, masalahnya adalah dalam rangka era globalisasi ini banyak orang yang selalu berpikir soal manfaat, seperti saya pelajari bahasa daerah, tidak membuat saya naik pangkat dengan bahasa daerah saya tidak menjadi pegawai negeri dan seterusnya. Jadi, apakah Bapak sependapat dengan saya bahwa seharusnya untuk mempertahankan bahasa daerah ini kita perlu membuat gerakan atau *movement* gerakan kampanye. Bukan kampanye Golkar, tetapi kampanye di keluarga-keluarga itu agar di rumah yang merupakan benteng pertahanan bahasa daerah ini terus digunakan bahasa daerah itu. Insya Allah ini barangkali bisa berjalan karena di situ lalu tidak terjadi dislokasi antargenerasi itu. Contohnya yang dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Penyahuda. Bahasa Ibrani di Palestina pada tahun 1948 sudah hampir punah, tetapi karena lebih giat gerakan yang dilakukan oleh Penyahuda ini, bahasa Ibrani menjadi langgeng lestari sampai sekarang. Jadi, yang saya usulkan perlu ada gerakan kita semua menjadi "yahudi-yahudi penyahuda". Jangan sampai kita bersikap *ben-ben wae*.

b. **Jawaban:**

Saya sependapat dengan Pak Asim Gunarwan kalau undang-undang saja memang tidak cukup untuk dapat menjamin pemertahanan bahasa daerah itu. Akan tetapi, undang-undang ini harus juga disertai upaya-upaya yang nyata dari masyarakat pemakai bahasa daerah itu sendiri. Dalam kaitan ini, saya setuju apabila masyarakat bahasa daerah yang bersangkutan, yang berkeinginan bahasa daerahnya itu tetap lestari, perlu mengadakan kampanye pemakaian bahasa daerah seperti yang dikemukakan ini. Satu contoh yang saya lihat seperti di Negeri Belanda. Satu-satunya mungkin bahasa daerah di Belanda, yaitu bahasa Friesland, dan itu hanya beberapa kilometer dari Amsterdam, sampai sekarang bahasa itu tetap bertahan walaupun dengan tekanan begitu kuat dari bahasa Belanda. Mengapa itu bisa terjadi? Menurut yang saya lihat ketika di sana, saya mengunjungi Akademi de Fries di Lawerden itu, ternyata masyarakat penutur bahasa Friesland itu memang

sangat sungguh-sungguh mengampanyekan penggunaan bahasa Friesland ini. Di mana-mana di kantor-kantor yang kami kunjungi stiker-stiker dipasang di situ, satu ajakan untuk menggunakan bahasa Fries. Pakailah bahasa Fries seperti juga stiker yang kita gunakan di sini, pakailah bahasa Indonesia.

Nah, apa salahnya kalau masyarakat pemakai bahasa daerah Bugis atau Makassar, masyarakat pemakai bahasa Bali untuk lingkungan daerahnya masing-masing melakukan gerakan atau kampanye seperti itu. Saya kira sekarang ini bukan lagi masanya untuk menuding gerakan-gerakan kebudayaan yang seperti itu sebagai gerakan separitis atau pemisahan, tidak, ini semata-mata suatu gerakan budaya untuk melestarikan nilai-nilai budaya kita yang sangat penting ini. Bahasa bisa dibuat, tetapi ternyata bahasa buatan itu bahasa *ativition*, terpisah dan bisa bertahan. Akan tetapi, bahasa-bahasa alami kalau satu yang punah, ini menurut saya, suatu kerugian ekologi kebudayaan yang sangat besar. Saya setuju apa yang dikatakan oleh Pak Asim Gunarwan.

3. Penanya: Achmad Tolla, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya pikir bahasa daerah kalau dikaitkan dengan era globalisasi tidak cukup dengan hanya sebagai alat pemersatu daerah itu. Akan tetapi, lebih jauh bahasa daerah sebagai alat untuk menanamkan jati diri. Ini yang saya kira sangat penting. Jati diri dalam arti sebagai etnis yang sesungguhnya, Jawa, Jawa yang sesungguhnya, Bugis, Bugis yang sesungguhnya dan seterusnya. Mengapa? Karena dikhawatirkan kalau tidak seperti itu, jangan-jangan nanti setelah kita berada pada gelombang globalisasi kita terlalu mudah tercerabut. Generasi kita akan mudah tercerabut dari budayanya, tetapi kalau kita tanamkan bahasa daerah itu dengan motivasi utama untuk menjadikan generasi kita memiliki jati diri yang sesungguhnya saya yakin itu bisa berhasil, dan kita tidak akan seperti ikan. Generasi kita seperti ikan di laut. Laut Mati yang kadar garamnya sangat tinggi, tetapi daging ikannya tidak pernah asin, saya kira begitu, Pak. Yang kedua, di daerah-daerah yang multietnis seperti di kota-kota besar perkawinan silang banyak terjadi. Ini yang menyebabkan terjadinya pengurangan-pengurangan minat generasi terhadap bahasa daerah. Kalau Bugis kawin dengan Jawa, bahasa apa yang digunakan oleh anaknya. Ini yang menyebabkan generasi kita sekarang yang tinggal di kota-kota cenderung tidak menguasai bahasa Bugisnya.

Sekarang, bagaimana solusinya ini, Pak? Sebab soal cinta tidak bisa diatur, itu soal pribadi bahkan sangat pribadi. Terima kasih, Pak.

b. Jawaban:

Saya setuju dengan apa yang dikemukakan oleh Achmad Tolla bahwa salah satu alat yang paling penting untuk dapat memperkuat jati diri suatu etnis itu adalah bahasa daerah, terutama dalam menghadapi era globalisasi itu dapat ditumbuhkan melalui penanaman/pembangkitan jati diri masing-masing

penutur bahasa daerah itu. Ini saya kira saya setuju. Kemudian, mengenai masyarakat perkotaan, bagaimana jika terjadi masyarakat perkotaan yang begitu kompleks dengan berbagai bahasa daerah apalagi dengan terjadinya perkawinan campuran seperti itu, saya kira upaya pelestarian bahasa daerah di daerah-daerah demikian itu mungkin satu-satunya jalan adalah melalui pendidikan di sekolah sebagai mata pelajaran di sekolah dan juga mungkin melalui terbitan-terbitan/majalah, mungkin juga dengan media-media yang dapat dibaca oleh masyarakat perkotaan itu. Untuk memaksakan bahasa daerah apa yang harus digunakan dalam satu rumah tangga, apa lagi dalam rumah tangga yang perkawinan campuran itu, adalah sepenuhnya merupakan hak rumah tangga itu masing-masing. Saya kira tidak bisa kita paksakan itu.

4. **Penanya:** Jafar Haruna, Universitas Mulawarman, Samarinda

a. **Pertanyaan:**

Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Peraturan Daerah sekarang di zaman reformasi ini banyak diprotes oleh daerah-daerah. Banyak daerah menginginkan bahwa undang-undang itu dicabut. Ini juga mengisyaratkan bahwa undang-undang itu mungkin dalam sidang umum nanti kita minta dicabut. Mungkin dicabutnya undang-undang itu sangat mempengaruhi situasi bahasa daerah di Kalimantan Timur, khususnya di daerah-daerah perkotaan, seperti Balikpapan dan Samarinda yang sangat heterogen.

Di sana tidak ada lagi bahasa daerah yang dapat dibanggakan, tidak ada lagi bahasa daerah yang bisa dijadikan identitas masyarakat pemakai bahasa di sana, tetapi bahasa daerah yang ada di sana adalah bahasa Jawa, bahasa Bugis, bahasa Batak, dan bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Kutai dan bahasa Dayak kurang lebih sama dengan ragam bahasa Melayu dan bahasa-bahasa Dayak, jauh terdesak ke pedalaman. Sekarang strategi apa yang ingin kita lakukan untuk pelestarian ini? Kalau itu dilakukan, menurut Pak Asim Gunarwan tadi, apa manfaatnya karena kita tidak bisa naik pangkat, tidak bisa memperoleh sembako dan sebagainya. Bahkan, Kalimantan Timur sekarang mengusulkan supaya berdiri sendiri seperti Brunei Darussalam. Terima kasih.

b. **Jawaban:**

Benar seperti apa yang Saudara kemukakan bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan di Daerah dan undang-undang ini sudah di dalam proses penggantian dengan undang-undang pemerintah yang baru yang akan memperluas otonomi dan desentralisasi itu. Saya kira mungkin juga ada baiknya apabila dalam upaya penggantian undang-undang ini atau mungkin penyempurnaan kalau bisa lebih lunak undang-undang itu mungkin otonomi daerah dan disentralisasi itu mungkin bisa juga disarankan untuk upaya-upaya tentang kebahasaan daerah intern. Jadi, bukan hanya mengatur bagaimana penggantian kepala daerah, bagaimana mengatur perangkat-perangkat pemerintahan di daerah, juga bagaimana memelihara

nilai-nilai budaya, termasuk bahasa daerah yang ada di daerah yang bersangkutan. Kemudian, hal ini saya kira kalau bisa dipenuhi dalam undang-undang yang baru nanti sebelum lahir undang-undang kebudayaan yang akan menjadi induk undang-undang kebahasaan yang kita usulkan dalam Kongres ini. Masyarakat daerah/penutur bahasa yang bersangkutan yang ada di Kalimantan Timur itu, misalnya, memperlihatkan upaya-upaya yang memang mau mempertahankan/mau melestarikan, memelihara, meningkatkan penggunaan bahasa daerah itu. Sekali lagi, Penjelasan UUD 1945, menurut pemahaman saya, mengatakan bahwa negara hanya berkewajiban untuk menghormati dan memeliharanya apabila pemakai/masyarakat penutur bahasa yang bersangkutan menunjukkan usaha dan upayanya untuk memelihara dan memakai bahasanya itu. Kalau tidak, ya, apa boleh buat bahasa itu nanti akan diserahkan pada perkembangan secara alami.

5. Penanya: Elfrida W.S. Sumampouw, Universitas Tadulako, Palu

a. Pertanyaan:

Ada anggapan bahwa bahasa pertama amat berpengaruh, bahkan sangat menentukan jati diri seseorang. Bapak mungkin bisa setuju dalam kaitan itu. Menurut Bapak, bagaimana jati diri Indonesia? Pada setiap anak Indonesia dapat terbentuk baik karena ternyata ada tiga kelompok anak yang sudah, yang sedang, yang akan dilahirkan. Dan, sekarang ini orang tua yang homogen, orang tua yang campuran bahasanya dari bapak dan ibu, ada orang tua yang tidak lagi memiliki/tidak lagi memelihara bahasa daerahnya.

Bagaimana kira-kira strategi untuk pembentukan jati diri Indonesia bagi anak-anak itu? Saya cenderung akan berpikir begini Pak, kalau anak-anak dari orang tua yang justru tidak lagi dibingungkan dengan bahasa daerah, kemungkinan besar barangkali dan itu juga harapan mereka itu benar-benar akan memiliki jati diri Indonesia karena dimulai dari dini memakai bahasa Indonesia. Bagaimana tanggapan Bapak?

b. Jawaban:

Sebagai bangsa Indonesia saya tentu menyatakan bahwa saya bangga lahir, besar, dan dewasa sebagai bangsa Indonesia yang hidup di bumi tanah air Indonesia dan berbahasa Indonesia. Akan tetapi, saya juga sebagai orang Indonesia yang lahir dari lingkungan etnis Bugis, saya akan mengatakan saya bangga sebagai orang Indonesia dan karena saya juga bangga sebagai orang Bugis, saya kira ini tidak perlu dipertentangkan. Oleh karena itu, kebanggaan etnis yang ada itu tidak perlu bertentangan secara diametral dengan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia.

UUD 1945 memang secara tegas mengatakan juga bahwa kebudayaan-kebudayaan daerah itu adalah bagian dari kebudayaan nasional yang hidup.

Dan karena itu, saya kira untuk menanamkan jati diri sebagai bangsa Indonesia, itu juga harus dimulai dengan jati diri kita sebagai orang yang dibesarkan dalam satu lingkungan tertentu.

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BAHASA ASING DI INDONESIA DI DALAM ERA GLOBALISASI

Asim Gunarwan

Universitas Indonesia/Sekretariat Negara

1. Pengantar

Karena belum adanya undang-undang yang menetapkan apa yang dimaksudkan dengan bahasa asing di Indonesia, kiranya kita dapat menggunakan asal-muasal bahasa sebagai dasar untuk menyebutkan apakah suatu bahasa itu asing atau bukan. Jika usulan ini diterima, suatu bahasa dikatakan sebagai bahasa asing jika menurut sejarah tertulis yang ada ia berasal dari luar bumi Nusantara, yakni bagian dunia yang meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Berdasarkan definisi operasional ini, bahasa-bahasa seperti bahasa Sanskerta, Arab, Mandarin, Belanda, dan Inggris, misalnya, adalah bahasa asing. Bahasa-bahasa ini mempunyai kedudukan atau status sebagai bahasa asing, lepas dari kenyataan bahwa ada di antara bahasa-bahasa itu yang dipakai secara luas di ranah-ranah tertentu di kalangan anggota masyarakat kita.

Untuk apa bahasa-bahasa itu dipakai, hal ini berkaitan dengan fungsi bahasa-bahasa itu di dalam berbagai peristiwa komunikasi. Bahasa Arab, misalnya, berfungsi sebagai pengemban wacana keagamaan di kalangan umat Islam; bahasa Belanda berfungsi sebagai pengemban wacana kerumahtanggaan di kalangan orang-orang tua terpelajar (yang berpendidikan Belanda); dan bahasa Inggris mempunyai fungsi resmi sebagai "(1) alat perhubungan antarbangsa, (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk pembangunan nasional" (Halim, 1976:146).

Makalah ini mencoba meninjau kembali kedudukan dan fungsi bahasa asing di Indonesia di dalam era globalisasi ini. Mengingat bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing yang pertama, sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 096/1967, 12 Desember 1967 (Kartono, 1976:121), fokus tinjauan ini berkisar pada kedudukan dan fungsi bahasa Inggris. Tinjauan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa asing yang lain dapat dianalogikan dari tinjauan mengenai kedudukan dan fungsi bahasa Inggris itu. Singkatnya, makalah ini mencoba melihat apakah kedudukan dan fungsi bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, di Indonesia berubah atau tidak karena pengaruh globalisasi itu. Di samping itu, ditinjau pula apa implikasinya jika pengaruh itu memang ada serta bagaimana strategi yang perlu diambil untuk menghadapinya.

2. Globalisasi: Pengaburan Batas Geografis

Rentangan masa menjelang milenium ketiga ini ditandai oleh fenomena penting yang disebut globalisasi. Menurut Waters (1995), istilah ini mengacu ke konsep yang populer pada dasawarsa 1990-an, menyusul istilah yang merujuk ke konsep populer yang lain, yakni pascamodernisme, yang menandai dasawarsa 1980-an. Walaupun demikian, lama sebelum itu kata *globalization* sudah muncul. Menurut Waters pula

(1995:2), kamus *Webster* adalah yang pertama memuat kata itu pada 1961 walaupun artinya dapat kita duga tidak seperti yang diacunya sebagai istilah yang sekarang dipahami orang.

Bahwa ada setengah orang yang mengartikan istilah itu sebagai merujuk ke bidang ekonomi saja tidaklah mengherankan. Hal ini karena yang mencolok pada masa akhir-akhir ini ialah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berbagai negara untuk mengglobalisasi ekonomi mereka, seperti yang dapat kita inferensi dari diadakannya Putaran Uruguay-GATT, WTO, NAFTA, AFTA, dan APEC. Bahkan, Bijlani (1994), seorang pakar, menulis buku mengenai globalisasi hanya dari perspektif ilmu ekonomi tanpa memberikan kesan bahwa istilah itu juga mengacu ke bidang-bidang lain yang juga cenderung mendunia.

Menurut Waters (1995:7), globalisasi itu dapat dirunut ke tiga arena kehidupan sosial, yaitu ekonomi, politik, dan kebudayaan. Globalisasi ekonomi mengacu ke pengaturan global produksi barang dan jasa, pertukarannya, pendistribusiannya, serta pengonsumsiannya. Globalisasi politik mengacu ke pengaturan global konsentrasi dan aplikasi kekuasaan serta transformasi yang melembaga dari praktik-praktik menjadi otoritas dan diplomasi, yang dapat mengakibatkan adanya kontrol atas populasi dan wilayah. Globalisasi kebudayaan merujuk ke pengaturan global produksi lambang-lambang yang mewakili fakta, afek, makna, kepercayaan, kesukaan, selera dan nilai, pertukarannya, serta pengungkapannya (1995:7-8). Di dalam ketiga hal ini, globalisasi itu dilihat sebagai proses, yakni *[a] social process in which the constraints of geography on social and cultural arrangements recede and in which people become increasingly aware that they are receding* (1995:3). Dengan perkataan lain, globalisasi itu adalah proses yang menyebabkan masyarakat negara-negara (atau bangsa-bangsa) menjadi semakin saling berhubungan di dalam aspek-aspek ekonomi, budaya, dan (implikasinya) politik mereka. Hal ini dimungkinkan oleh kaburnya batas-batas geografis akibat pesatnya kemajuan teknologi, khususnya teknologi informasi, transportasi, dan komunikasi.

Jika proses itu berhasil, yang kita jumpai adalah dunia yang terglobal sepenuhnya. Menurut Waters (1995:3), di dunia seperti itu akan terdapat satu saja masyarakat dan kebudayaan yang mungkin terpadu atau tidak terpadu secara harmonis. Yang dapat kita bayangkan dari masyarakat dunia terglobal seperti itu ialah bahwa dibandingkan dengan anggota-anggota yang lain masyarakat dunia terglobal itu, ada anggota-anggota tertentu yang dominan, bergengsi, menduduki tempat sentral, dan sebagainya. Sebaliknya, tentu ada anggota-anggota yang menjadi "pupuk bawang" saja.

Agar di dalam masyarakat yang terglobal itu kedudukan suatu bangsa tidak sebagai pelengkap saja, bangsa itu harus mempunyai daya saing yang tinggi. Keunggulan komparatif menjadi tidak penting; yang penting adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki bangsa itu, yaitu keunggulan yang memungkinkannya dapat bersaing dengan bangsa-bangsa lain, dan menang. Soalnya adalah bagaimana suatu bangsa dapat memiliki keunggulan kompetitif itu. Di dalam hal ini, tampaknya jalan yang paling logis ialah dengan mengembangkan sumber daya manusia selengkap-lengkapnyanya sehingga bangsa yang bersangkutan secara keseluruhan berkualitas sangat tinggi.

Bagaimana sumber daya manusia dikembangkan secara optimal sehingga bangsa itu mampu bersaing di dalam era globalisasi, hal ini tentu menjadi bagian pakar-pakar pendidikan untuk memikirkannya. Intinya adalah dengan mengubah perilaku bangsa yang bersangkutan sehingga berdaya saing tinggi. Tampaknya, satu hal yang tidak boleh diabaikan adalah perihal disiplin. Suatu bangsa tidak mungkin mampu bersaing secara global tanpa bangsa itu memiliki disiplin yang tinggi. Di samping itu, yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengembangkan sumber daya manusia agar secara keseluruhan bangsa yang bersangkutan memiliki apa yang oleh Kanter, seperti yang dikutip oleh Kristiadi (1997:52), disebut 3C, yaitu *concept*, *competence*, dan *connection* (*networking*).

3. Bahasa Indonesia sebagai BKL?

Di serantau Nusantara bahasa Indonesia (atau, tepatnya, bahasa Melayu ragam supranasional yang dipakai di Indonesia) dapat menjadi apa yang di dalam sociolinguistik disebut *language for wider communication* atau bahasa untuk komunikasi yang lebih luas (BKL) mengingat bahwa ia dapat dipahami oleh rakyat di kawasan ini. Namun, di luar daerah serantau ini bahasa kita ini tidak lagi dapat berfungsi sebagai BKL, setidaknya-tidaknya pada masa kini serta pada masa-masa yang akan datang yang dapat kita perkirakan.

Ada setengah pakar yang berpendapat bahwa menyebarnya bahasa Melayu ke seluruh Nusantara, dan kemudian diterima sebagai BKL oleh kelompok-kelompok etnis yang berbeda-beda itu, dimungkinkan oleh kenyataan, kata setengah pakar itu, bahwa bahasa Melayu adalah bahasa yang luwes. Yang patut dipertanyakan adalah apa dan bagaimana bahasa yang luwes itu. Lagi pula, sekiranya dugaan ini benar, patut dipertanyakan mengapa sekarang bahasa Melayu tidak lagi menyebar ke luar sempadan-sempadan yang ada sekarang, padahal bahasa ini tentunya masih tetap luwes, apa pun makna kata ini.

Menurut Brosnahan (1963), ada empat hal yang menyebabkan suatu bahasa keluar dari wilayah asalnya, dan kemudian dipakai di wilayah yang baru. Keempat hal itu ialah (1) pemaksaan untuk menggunakan bahasa itu dengan menggunakan kekuatan militer; (2) lamanya kekuasaan militer itu berlangsung; (3) adanya keanekaragaman bahasa di wilayah “jajahan” itu; dan (4) adanya manfaat materi yang dapat dinikmati oleh penduduk wilayah baru itu dengan menggunakan bahasa yang dahulu dipaksakan itu. Keempat hal tersebut berlaku di wilayah-wilayah yang dahulu menjadi bagian imperium Britania dengan bahasa Inggrisnya. Namun, ada juga contoh-contoh penyebaran bahasa yang tidak melalui pemaksaan dengan kekuatan senjata. Penyebaran bahasa Melayu ke seluruh Nusantara termasuk ke dalam contoh ini.

Pada masa sekarang, bahasa dapat dilihat sebagai barang manufaktur. Artinya, agar “dibeli” oleh orang (bangsa) lain, bahasa itu haruslah memiliki keunggulan kompetitif. Hal ini karena pada dasarnya manusia adalah *homo economicus*; sebelum memutuskan mempelajari bahasa ia akan bertanya: apa manfaat yang akan diperolehnya dengan menguasai bahasa itu alih-alih bahasa yang lain.

Pada zaman globalisasi ini yang tampaknya dapat membuat suatu bahasa berpe-

luang menjadi BKL (baru) adalah keunggulan kompetitifnya. Keunggulan kompetitif itu antara lain diukur, seperti yang disinggung di atas, dengan manfaat apa yang diperoleh seseorang dengan mempelajari dan kemudian menguasai bahasa itu, dan hal ini sedikit banyak berkaitan dengan kepadaan geolinguistik bahasa yang bersangkutan. Di samping kepadaan geolinguistik itu, yang mungkin juga menjadi pertimbangan suatu negara untuk memutuskan menggunakan bahasa itu tampaknya adalah kepadaan linguistik bahasa tersebut. Hal ini berkaitan dengan pertanyaan apakah bahasa itu sudah dapat dipakai sebagai sarana komunikasi modern, sebagai alat komunikasi berbagai topik dan bentuk wacana yang menjadi ciri-ciri negara modern. Ukuran objektifnya adalah apakah bahasa itu sudah memiliki dua ciri, yaitu (1) kemudahan mengungkapkan konsep-konsep modern dan (2) ketepatan atau presisi pengungkapannya.

Gunarwan (1997) membandingkan kepadaan linguistik dan kepadaan geolinguistik di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di dalam hal kemudahan dan ketepatan pengungkapan ada petunjuk yang mengisyaratkan bahwa bahasa Inggris lebih “memadai” daripada bahasa Indonesia, seperti yang terlihat pada contoh-contoh berikut, yang menunjukkan ketaksaan (di luar bidang pragmatik) di dalam bahasa Indonesia, tetapi tidak taksa di dalam bahasa Inggris.

- (1) (a) *the rich daughter of the former president*
(b) anak perempuan mantan presiden yang kaya itu
- (2) (a) *He loves the bird more than his wife does.*
(b) Ia mencintai burung itu lebih daripada istrinya.
- (3) (a) *Sunlight consists of an almost continuous spectrum of waves.*
(b) Cahaya matahari terdiri atas spektrum gelombang yang hampir berkesinambungan.
- (4) (a) *A diffraction grating is a small glass slide engraved with many narrow slits, through which light is made to pass.*
(b) Jeruji difraksi adalah slaid gelas kecil yang digores-goresi banyak celah sempit, dan melalui celah-celah itu cahaya dilewatkan.

Tentu saja, yang sebaliknya juga berlaku: apa yang dapat diungkapkan dengan mudah dan tepat di dalam bahasa Indonesia belum tentu dapat diungkapkan dengan mudah dan tepat pula di dalam bahasa Inggris. Namun, pada umumnya hal ini hanya berlaku pada ranah-ranah kebudayaan atau tradisional, bukan ranah ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Yang jelas, ada contoh-contoh (Gunarwan, 1997) yang menunjukkan bahwa bahasa Inggris lebih efisien daripada bahasa Indonesia berdasarkan jumlah suku kata. Untuk mengungkapkan perihal yang sama berikut ini, misalnya, bahasa Indonesia memerlukan 74 suku kata, sedangkan bahasa Inggris hanya memerlukan 33 suku kata, kurang dari setengahnya.

- (5) (a) *A translucent object lets some light through, but it scatters the rays so much that whatever is on the other side cannot be seen clearly.* (33 suku kata)

- (b) Benda yang tembus cahaya memungkinkan cahaya melaluinya, tetapi benda yang demikian itu menyemburkan berkas cahaya begitu banyak sehingga apa pun yang berada di balik benda itu tidak dapat dilihat dengan jelas. (74 suku kata)

Patut juga disebutkan di dalam contoh itu bahwa pepadanan *translucent* dengan *tembus cahaya* (ataupun *letus*, misalnya) tidaklah efektif. Di dalam bahasa Inggris, benda yang tembus cahaya dapat bersifat *transparent* atau *translucent*, dan keduanya tidak sama.

Dengan memanfaatkan konsep geolinguistik Mackey (1973), yang mengacu ke kekuasaan bahasa (*language power*), daya tarik bahasa (*language attraction*) dan daya tekan bahasa (*language pressure*), Gunarwan (1997) membandingkan kepadaan geolinguistik bahasa Inggris dengan kepadaan geolinguistik bahasa Indonesia. Ringkasan perbandingan itu disajikan di dalam Tabel 1 ini.

TABEL 1: PERBANDINGAN KEPADAAN GEOLINGUISTIS BAHASA INGGRIS DAN BAHASA INDONESIA

No.	Kekuatan Bahasa	Indikator	Bahasa Inggris	Bahasa Indonesia
1.	Kekuasaan Bahasa	a. Demografi b. Dispersi c. Mobilitas d. Ekonomi e. Ideologi f. Kebudayaan	+ + + + ? +	- - - - ? -
2.	Daya Tarik Bahasa	a. Daya Tarik Status b. Daya Tarik Teritorial c. Daya Tarik Interlingual	+ + ?	- - ?
3.	Daya Tekan Bahasa	a. Ciri-ciri Perilaku b. Akulturasi Konsep	- -	+ +

Menurut Mackey, kekuatan bahasa (*language force*) tertakluk kepada kekuasaan bahasa, daya tarik bahasa dan daya tekan bahasa, yang masing-masing mempunyai 6, 3, dan 2 indikator yang dapat dikuantifikasi. Indikator demografi diukur berdasarkan jumlah penutur (termasuk persebarannya), pendapatan per kepala dan tingkat teknologi negara-negara yang menggunakan bahasa yang bersangkutan.

Di dalam hal jumlah penutur, kita dapat mengatakan tanpa harus membuat ke-

salahan besar bahwa jumlah penutur bahasa Inggris jauh lebih besar daripada jumlah penutur bahasa Indonesia. Jika bahasa nasional kita ini kita sebut dengan namanya yang dahulu, yakni bahasa Melayu, lalu semua penutur bahasa Melayu kita jumlahkan, jumlahnya tidak dapat menyamai jumlah penutur bahasa Inggris.

Jika, sekali lagi, kita pakai istilah bahasa Melayu alih-alih bahasa Indonesia, pendapatan per kepala penutur bahasa Melayu tidaklah terlalu rendah terutama karena terangkat oleh pendapatan per kepala orang Brunei Darussalam, kita bandingkan ini dengan pendapatan per kepala warga negara-negara yang berbahasa Inggris, lebih besar kemungkinan benarnya daripada kemungkinan salahnya bahwa pendapatan per kepala penutur bahasa Melayu lebih rendah daripada pendapatan per kepala penutur bahasa Inggris.

Di bidang teknologi pun masih terdapat ketidaksetaraan. Kita sering berbicara tentang alih teknologi dari negara yang sudah maju ke negara yang sedang berkembang. Hal ini menyiratkan bahwa teknologi kita masih belum setinggi teknologi negara-negara berbahasa Inggris karena, kecuali Jepang, Jerman, dan Prancis, negara-negara yang sudah berhasil menciptakan teknologi adalah negara-negara yang berbahasa Inggris, terutama Amerika Serikat dan Britania.

Perbandingan produksi ekonomi tampaknya juga akan menghasilkan ketidaksetaraan di antara negara-negara berbahasa Melayu dan negara-negara berbahasa Inggris. Di dalam hal dispersi, bahasa Inggris juga “menang” dari bahasa Melayu. Wilayah bahasa Melayu memang luas, kira-kira seluas Eropa atau Amerika Serikat. Namun, kalau bahasa Inggris tersebar ke semua penjuru dunia (antara lain karena dulu ada imperium Britania), bahasa Melayu tidak banyak beringsut dari salah satu sudut Asia Tenggara.

Di dalam hal mobilitas dan ekonomi, penutur bahasa Indonesia pada umumnya, pada masa sekarang, juga menduduki peringkat yang belum setara dengan penutur bahasa Inggris pada umumnya. Demikian pula tampaknya jika kita membandingkan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris berdasarkan indikator kebudayaan. Sekadar contoh untuk indikator kebudayaan itu, berapa jumlah judul buku berbahasa Indonesia di Amerika Serikat dibandingkan dengan jumlah judul buku terbitan negara itu di negara kita?

Hanya berdasarkan indikator ideologi (yang pengertiannya terbatas mengacu ke bahasa liturgi) sajalah rupanya bahasa Indonesia tidak berada di bawah bahasa Inggris. Hal ini karena kedua-duanya, berbeda dengan bahasa Latin dan bahasa Arab, bukanlah bahasa liturgi.

Ada petunjuk yang mengisyaratkan bahwa daya tarik bahasa Inggris, berdasarkan indikator daya tarik status, lebih besar daripada daya tarik bahasa Indonesia, bahkan menurut orang Indonesia sendiri. Hal ini terungkap dari hasil survei atas 126 orang subjek dari Jakarta, Bandung, dan Palangkaraya (Gunarwan, 1993) dengan menggunakan teknik “samaran berbanding” (*matched guise*), seperti yang terlihat di dalam Tabel 2 ini.

TABEL 2: ANGKA-ANGKA RATA-RATA PENILAIAN SUBJEK (N=126) ATAS 11 CIRI-CIRI PENUTUR BAHASA INDONESIA DAN PENUTUR BAHASA INGGRIS

No.	Ciri	Penutur BI	Penutur BIng
1.	Kepandaian	3,02	3,91
2.	Kebijaksanaan	3,68	4,33
3.	Kejujuran	2,73	3,66
4.	Keterpelajaran	3,14	4,52
5.	Rasa humor	3,85	3,04
6.	Kepercayadirian	3,55	3,98
7.	Kedudukan	2,87	3,76
8.	Keramahan	4,03	3,12
9.	Kepemimpinan	3,26	3,94
10.	Disiplin	2,91	4,22
11.	Rasa tanggung jawab	3,41	3,87
Rata-Rata		3,31	3,85

(BI=bahasa Indonesia; BIng=bahasa Inggris)

Sumber: Gunarwan, 1993

Tampak di dalam Tabel 2 itu bahwa secara keseluruhan bahasa Inggris dinilai lebih tinggi daripada bahasa Indonesia: angka rata-rata untuk yang pertama adalah 3,85 dan untuk yang disebutkan belakangan 3,31.

Mengenai indikator daya tarik interlingual, tampaknya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mempunyai nilai “netral” karena mereka tidak sekerabat. Mengenai daya tarik teritorial, tampaknya pengaruh BKL yang berasal dari tempat yang jauh ini semakin besar saja di Indonesia. Hal ini karena, antara lain, sekarang bahasa Inggris sudah “boleh” diajarkan di sekolah dasar. Apakah daya tarik teritorial ini akan berubah menjadi daya tekan bahasa, marilah kita lihat kelak. Yang menggembirakan adalah bahwa, pada masa sekarang, daya tekan bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia adalah jauh lebih kecil daripada, misalnya, daya tekan BKL itu terhadap bahasa Melayu di Singapura. Yang juga menggembirakan adalah bahwa tampaknya ciri-ciri perilaku orang Indonesia pada umumnya tetap “dipengaruhi” oleh bahasa Indonesia alih-alih oleh bahasa Inggris. Demikian pula tampaknya dengan akulturasi konsep.

4. Implikasi

a. Pengembangan SDM

Era globalisasi menuntut agar kita ikut serta menjadi anggota masyarakat bangsa-bangsa di dalam satu komunitas yang begitu menyatu sehingga batas-batas ekonomi, politik, dan kebudayaan menjadi kabur. Ciri-ciri masyarakat global seperti itu, antara lain, adalah bahwa bangsa-bangsa yang menjadi anggotanya saling tergantung dan

bahwa kedudukan suatu bangsa di dalamnya sangatlah bergantung kepada keunggulan kompetitifnya. Ketergantungan satu bangsa kepada bangsa-bangsa yang lain menyiratkan diperlukannya BKL sebagai sarana komunikasi bangsa-bangsa yang terbabit. Tuntutan pemilikan keunggulan kompetitif juga menyiratkan diperlukannya, secara tidak langsung, suatu BKL yang dapat dipakai untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir.

Masalahnya adalah bahwa bahasa Indonesia belum dapat dipakai untuk menimba ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir itu karena amat terbatasnya buku berbahasa Indonesia tentang itu. Hal ini menyiratkan bahwa bahasa kita ini belum dapat dipakai untuk mengoptimalkan perkembangan sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Untuk meningkatkan disiplin bangsa, jelas bahasa Indonesia dapat dipakai--bahkan penggunaan bahasa dapat dikatakan tidak terlalu menentukan keberhasilannya. Untuk mencendekiakan bangsa pun kita dapat mengandalkan bahasa nasional kita. Namun, jika kita harus *mempertinggi kualitas* sumber daya manusia Indonesia, agar kita dapat menimba ilmu dan teknologi mutakhir secepat-cepatnya sehingga kita mampu bersaing kuat dengan bangsa-bangsa lain, tampaknya kita masih harus bergantung kepada penguasaan kita atas bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai BKL yang terkemuka.

Masalahnya tidaklah sesederhana itu. Pengembangan sumber daya manusia Indonesia sungguh menghadapi kendala yang sangat besar mengingat bahwa *human development index* (HDI) kita, seperti yang dilaporkan oleh UNDP pada tahun 1994, hanyalah 0,586, terendah di serantau ASEAN, dan menduduki tempat ke-105 di dunia (Mustopadidjaja, 1997:9). Rendahnya kualitas SDM ini memang dapat terangkat dengan naiknya pendapatan per kepala, usia harapan hidup, dan jumlah orang Indonesia yang tidak buta aksara. Namun, jika kita memang ingin berperan aktif di dalam masyarakat global, kenaikan kualitas SDM kita itu haruslah meloncat dengan tajam. Di dalam hal penguasaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, kualitasnya haruslah jauh lebih tinggi daripada kualitas penguasaan bahasa Inggris kita pada masa sekarang ini.

Tertakluk kepada hasil penelitian yang andal, pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah kita dapat dikatakan masih jauh dari hasil yang diharapkan. Jika dipakai tolok ukur kemampuan membaca efektif bahan-bahan bacaan bahasa Inggris yang sederhana saja, kita dapat bertanya berapa persen tamatan SMU yang mampu. Padahal, tidak kecil biaya yang kita belanjakan untuk program pengajaran bahasa asing, pendidikan guru, dan sebagainya. Jadi, di dalam era globalisasi ini, yang pertama kali harus kita jawab, dalam kaitannya dengan bahasa Inggris, adalah pertanyaan mengapa, pada umumnya, hasil pengajaran bahasa Inggris di SMTP dan di SMU masih jauh dari yang diharapkan. Perlu ada penelitian yang andal untuk menjawab pertanyaan itu. Mungkin ada faktor-faktor yang secara sinergistik menyebabkan kegagalan itu. Mungkin pula ada satu penyebab utama mengapa hasilnya masih rendah.

Ada orang yang berpendapat bahwa ketidakberhasilan pengajaran bahasa Inggris di sekolah-sekolah kita itu karena jumlah siswa per kelas terlalu besar. Kalau memang ini soalnya, untuk pelajaran bahasa Inggris itu kelas dapat dipecah menjadi kelompok-

kelompok yang lebih kecil, yang masing-masing diajar oleh seorang guru bahasa Inggris. Konsekuensinya adalah bahwa lebih banyak guru bahasa Inggris harus diangkat. Akan tetapi, ini memang risiko jika kita ingin bangsa kita mempunyai keunggulan kompetitif di tingkat global.

Jika strategi pemecahan kelas itu dianggap pemborosan, mungkin dapat ditetapkan strategi yang lain, yang menyangkut metode pengajaran. Menurut setengah pakar, metode pengajaran bahasa asing yang paling “sederhana” adalah metode terjemahan: murid diajar dan dilatih menerjemahkan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Penguasaan tata bahasa dapat dibatasi pada yang perlu-perlu saja, dan penekanan diletakkan pada penguasaan kosakata yang banyak. Yang penting murid dapat memahami bahan bacaan di dalam bahasa asing. Mereka tidak perlu belajar berbicara di dalam bahasa asing itu karena sasarannya adalah agar mereka mempunyai kemampuan menyimak yang baik. Jika mereka ingin belajar berbicara di dalam bahasa itu (dan ini sangat dianjurkan bagi yang berbakat unggul), mereka dapat belajar di kursus-kursus bahasa asing swasta di luar jam sekolah. Tenaga guru pun dapat “dihemat” dengan menggunakan metode terjemahan itu; guru bahasa asing tidak harus berpayah-payah mengajar dengan menggunakan pendekatan komunikatif, pendekatan dengar-bicara, dan sebagainya. Yang jelas, tugas koreksi guru memang menjadi lebih berat karena mereka harus mengoreksi lebih banyak pekerjaan murid. Namun, hal ini dapat diimbangi dengan memberikan honorarium koreksi kepada guru. Yang penting adalah agar murid-murid mengembangkan kemampuan dirinya dengan menimba ilmu dan teknologi dari buku-buku berbahasa asing (Inggris).

Jika hal itu tidak mungkin dilakukan, setidaknya-tidaknya untuk sementara waktu harus dilakukan penerjemahan buku secara besar-besaran ke dalam bahasa Indonesia, dan konsekuensinya perlu didirikan sekolah penerjemah di dalam waktu dekat ini.

Mengingat beratnya menaikkan kualitas sumber daya manusia kita, ditambah lagi dengan rendahnya kemampuan keuangan kita saat ini untuk keperluan itu, barangkali dapat ditempuh cara pengembangan sumber daya selektif. Hal ini terutama mempertimbangkan bahwa yang benar-benar akan bersaing secara global itu bukan seluruh bangsa Indonesia, melainkan orang-orang Indonesia tertentu yang memang berbakat unggul dan yang jumlahnya mencapai massa kritis. Keunggulan orang-orang inilah yang harus dikembangkan secara optimal. Caranya ialah dengan mengadakan penelusuran bakat, dan anak-anak yang berbakat itu dimasukkan ke jalur khusus SMTP dan SMU, dan penguasaan bahasa asing mereka dikembangkan secara khusus sedemikian rupa sehingga kelak mereka mampu bersaing secara global tanpa kendala bahasa. Tentu saja strategi ini mempunyai efek sampingan, yaitu kecenderungan terbentuknya orang-orang yang congkak. Namun, dengan bimbingan yang baik dari pakar-pakar ilmu jiwa, kemungkinan itu dapat ditekan menjadi seminim mungkin. Cara yang bertujuan menghasilkan *cream of the cream* ini dapat dilakukan secara sementara, dalam rangka mengejar ketertinggalan kita yang jauh ini. Jika kelak kita sudah mampu bersaing secara global, program sementara itu kita hapuskan, dan kita kembali ke demokratisasi di dalam pendidikan.

Salah satu alternatif agar generasi muda kita dapat lebih menguasai bahasa

Inggris adalah dengan mengubah sistem pendidikan kita dari ekabahasa menjadi dwibahasa. Artinya, untuk mata-mata pelajaran tertentu (misalnya matematika, fisika, biologi) dipakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya, sedangkan mata-mata pelajaran yang lain tetap diajar di dalam bahasa Indonesia. Namun, cara ini pada masa sekarang sukar sekali dilaksanakan, kecuali kita mau dan mampu mendatangkan guru-gurunya dari luar negeri.

Ada setengah orang yang berpendapat bahwa agar bahasa dapat dikuasai dengan baik, bahasa itu harus diajarkan kepada anak-anak sedini mungkin, yakni sebelum anak melampaui usia kritis. Lepas dari apakah kita setuju atau tidak dengan pendapat itu, yang perlu dipersoalkan adalah benarkah anak-anak lebih mudah belajar bahasa daripada orang dewasa? Di dalam arti *pemerolehan* (alih-alih *pembelajaran*) bahasa, mungkin hal tersebut benar. Yang jelas, pendapat yang masih kontroversial itu mendapat tanggapan yang positif dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang sekarang membolehkan bahasa Inggris diajarkan di sekolah dasar. Barangkali dengan demikian hasil pengajaran bahasa Inggris di Indonesia akan menjadi lebih baik sehingga kita dapat menjawab tantangan globalisasi dengan lebih baik pula. Namun, perlu pula kita pertimbangkan akibat sampingan dari pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu. Dari hal-hal yang praktis saja kita dapat mempertanyakan apakah kita sudah siap dengan pengadaan guru bahasa Inggris yang berkompentensi untuk itu dan apakah bahan-bahan pengajarannya sudah ada dan baik. Yang perlu kita hindari adalah jangan sampai pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu, seperti juga yang di tingkat lebih tinggi, dilaksanakan secara asal-asalan. Hal ini karena pengajaran yang sedemikian dapat menghasilkan penguasaan bahasa Inggris yang kacau-balau yang kelak justru akan lebih sukar diperbaiki, ibarat menguraikan benang yang sudah terlanjur kusut. Lagipula, pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar itu dapat menyebabkan adanya anak-anak yang merasa gagal terlalu dini jika mereka mendapat kesulitan di dalam mempelajari bahasa itu.

b. Pengembangan dan Pembinaan BI

Bahwa sandi bahasa Indonesia (BI) masih perlu terus dikembangkan adalah satu kenyataan. Di dalam era globalisasi, perlunya terus mengembangkan sandi BI itu menjadi lebih besar karena dua alasan. Pertama, BI adalah lambang kebangsaan Indonesia: BI yang kurang memadai mencerminkan bangsa Indonesia yang kurang memadai pula, dengan segala implikasinya. Kedua, dengan semakin menonjolnya peranan bangsa Indonesia di percaturan global (seperti yang pernah diperkirakan orang sebelum krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan ini), bukanlah tidak mungkin bahwa pada suatu masa kelak BI menjadi BKL. Untuk itu, kita perlu meningkatkan daya saing BI, antara lain dengan (1) mengefisienkan BI dan (2) memperkaya kosakata BI agar pengungkapan konsep (modern) dapat dilakukan setepat-tepatnya.

Untuk yang pertama itu, perlu ditetapkan "kaidah" baru, antara lain bahwa *ia* dan *mereka* dapat mengacu ke anteseden kata benda yang tidak bernyawa; bahwa kata *di mana* boleh dipakai untuk padanan bahasa Inggris *in which* (dan *melalui mana*

untuk padanan *through which*); bahwa akhiran *-ish* di dalam bahasa Inggris tidak perlu diberi padanan *ke + ... + ... + an* (misalnya *pinkish blue* tidak harus diterjemahkan menjadi *biru kemerahmuda-merahmudaan*). Ada orang yang mengatakan bahwa mengapa *di mana* tidak boleh dipakai sebagai padanan *in which* tersebut adalah karena di dalam bahasa Melayu tidak ada kaidah itu. Kepada orang-orang yang berpendapat seperti itu barangkali kita perlu mengatakan bahwa demi efisiensi bahasa (atas nama kemajuan) kita perlu mengutip kata-kata bijak Lebon, seperti yang dikutip Fishman (1974:89) "*to respect tradition is a condition of existence, to know how to disengage from it a condition of progress.*"

Di dalam era globalisasi, batas-batas geografis ekonomi, politik, dan budaya, seperti yang disinggung di atas, menjadi kabur. Implikasinya adalah bahwa batas-batas geografis bahasa pun menjadi kabur. Implikasi lebih jauh lagi adalah bahasa apa pun yang dipakai tidaklah penting asalkan bahasa itu memadai, bermanfaat, dan berdaya saing tinggi. Jika jalan pikiran ini benar, implikasi seterusnya adalah menurunnya peranan bahasa sebagai komponen nasionalisme. Daripada nasionalisme, orang akan lebih mementingkan nasionisme, yang mengacu ke efisiensi penyelenggaraan pemerintahan (Fasold, 1984:3). Jika paham nasionisme itu menjadi wujud di Indonesia, pembinaan bahasa Indonesia akan menjadi terkendala. Kendala terhadap pembinaan bahasa, dalam arti bagaimana mengusahakan agar orang berbahasa Indonesia yang baik dan benar, barangkali tidak terlalu besar di dalam alam globalisasi. Namun, kendala terhadap pembinaan pada tataran yang lebih sublim, yakni agar orang Indonesia mencintai bahasa nasionalnya, akan menjadi sangat berat. Apalagi jika pengajaran bahasa Inggris di sekolah dasar menjadi kebijakan yang tetap dan mengikat: pada usia yang dini anak-anak sudah diberi godaan untuk jatuh cinta kepada bahasa Inggris, yang cenderung dinilai lebih bergengsi oleh orang Indonesia, seperti yang tersirat dari Tabel 2 di atas.

5. Penutup

Era globalisasi mempunyai banyak implikasi bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah implikasi pada penguasaan kita atas bahasa asing, terutama bahasa Inggris.

Jika kita menggunakan patokan asal-muasal bahasa sebagai batasan apakah suatu bahasa itu asing atau bukan, kedudukan atau status bahasa Inggris, Arab, Mandarin, Belanda, dan lain-lain itu adalah tetap. Artinya, ada globalisasi atau tidak, bahasa-bahasa yang tidak berasal dari bumi Nusantara adalah bahasa-bahasa asing. Namun, batasan ini adalah berdasarkan "kesepakatan" saja--jika ia memang disepakati. Akan lebih baik jika kedudukan atau status bahasa-bahasa itu ditetapkan dengan undang-undang, seperti halnya kedudukan bahasa Indonesia ditetapkan oleh undang-undang, Undang-Undang Dasar. Salah satu ciri negara modern adalah bahwa semua kebijakan yang menyangkut negara dibuat berdasarkan undang-undang.

Di dalam kesimpulan, pendapat, dan usul Seminar Politik Bahasa Nasional disebutkan bahwa, seperti yang disebutkan sebelumnya, bahasa asing berfungsi sebagai (1) alat perhubungan antarbangsa; (2) alat pembantu pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa modern; dan (3) alat pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi

modern untuk pembangunan nasional. Di era globalisasi pada dasarnya fungsi-fungsi itu masih sama. Hanya saja, intensitasnya menjadi sangat berbeda, dan demikian pula kegunaan bahasa asing. Bahasa Inggris diperlukan bukan saja demi pembangunan nasional, melainkan demi keunggulan kompetitif bangsa Indonesia di seluruh dunia. Di dalam era globalisasi, bahasa asing di Indonesia tidak sekadar berfungsi sebagai alat perhubungan antarbangsa, tetapi sebagai alat untuk membekali warga agar memiliki daya saing yang tinggi. Bahasa asing, sepanjang bahasa Indonesia belum memungkinkan, berfungsi sebagai alat untuk menempa warga negara agar bangsa Indonesia memiliki apa yang oleh Kanter disebut 3C di atas, yakni *concept*, *competence* dan *connection (networking)*, dan hanya dengan memiliki ketiganyalah kita mampu bersaing kuat secara global. Istilah *networking* menyiratkan adanya sistem, komponen, dan pola hubungan, bukan sekadar hubungan yang insidental. Implikasinya, bangsa Indonesia dituntut menguasai bahasa Inggris dengan baik dan benar karena *networking* itu juga menyiratkan adanya hubungan aktif yang multilateral. Di dalam hal ini bahasa asing selain bahasa Inggris berperan sebagai alat perhubungan bilateral dan, yang lebih penting, sebagai penambah daya saing tersebut.

Implikasi dari lebih pentingnya fungsi bahasa Inggris di dalam era globalisasi adalah bahwa pengajaran bahasa Inggris di Indonesia perlu menghasilkan orang-orang yang mampu berbicara dan menulis di dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. Tujuan bahasa Inggris, seperti yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 96/1967, mungkin perlu ditinjau kembali atau, kalau tidak, pelaksanaan pengajarannya perlu dirancang kembali agar tujuan itu tercapai. Sekali lagi, masalahnya tidak sesederhana itu karena pelaksanaan pengajaran bahasa, bahasa asing atau bukan, berkaitan erat dengan biaya, tenaga, dan sarana. Apa lagi pengajaran bahasa asing itu di dalam era globalisasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sumber daya manusia Indonesia agar bangsa Indonesia menjadi anggota terhormat dari masyarakat bangsa-bangsa terglobal.

Sepanjang yang menyangkut bahasa Inggris, yang perlu segera dipikirkan adalah bagaimana, dengan segala keterbatasan kita, kita minimal dapat menciptakan massa kritis yang dapat berbahasa Inggris dengan baik dan benar dalam rangka menjawab tantangan era globalisasi. Mungkin perlu dibuat undang-undang yang menempatkan bahasa Inggris sebagai bahasa sekunder (*secondary language*, bukan bahasa kedua), yaitu setelah bahasa Indonesia karena kedudukannya adalah, dan tidak akan berubah, sebagai bahasa primer (*primary language*). Apakah akan dilaksanakan melalui pendidikan bilingual atau tidak, hal ini perlu dipertimbangkan masak-masak oleh pemerintah. Bagi banyak orang, ini adalah usulan yang mengundang sanggahan yang keras. Oleh karena itu, jika banyak yang tidak setuju, hal ini dapat dipahami. Soalnya, kita ini mau ikut globalisasi atau tidak, dan kalau mau ikut, kita ingin menjadi anggota yang sentral atau yang perifer?

Tanpa melongok terlalu jauh, yang perlu dipikirkan sekarang adalah bagaimana mengusahakan agar pengajaran bahasa Inggris dan bahasa Indonesia serta bahasa-bahasa yang lain berhasil dengan baik, yang dapat diukur berdasarkan kemampuan tenaga-tenaga terdidik kita untuk berpikir global dan bertindak lokal. Soalnya, era glo-

balisasi juga menuntut agar kita tetap menjadi tuan di rumah sendiri. Artinya, jangan sampai di Indonesia pun kita hanya menjadi sekadar "pelengkap penderita" di bidang ekonomi, misalnya, yang di dalam era globalisasi nanti akan menjadi *borderless world economy*. Warga negara mana pun boleh berusaha di sini. Yang perlu diingat adalah bahwa kata para pakar ekonomi, di dalam masyarakat terglobal nanti yang dominan adalah *knowledge economy*, bukan *product economy*. Di dalam masa itu kegiatan ekonomi di sektor jasa (misalnya bisnis dan pariwisata) akan menjadi lebih dominan daripada di sektor pertanian, misalnya. Mengingat bahwa pebisnis dan turis banyak berasal dari luar negeri, penguasaan kita atas bahasa asing perlu ditingkatkan.

Di dalam era globalisasi kita dituntut menjadi warga yang bilingual, yakni dwibahasawan bahasa Indonesia-bahasa Inggris. Hal ini karena bahasa Inggris menjadi jauh lebih penting dan bermultifungsi. Yang mendesak sekarang ini adalah membentuk panitia yang akan bertugas memikirkan bagaimana bilingualisme bahasa Indonesia-bahasa Inggris itu dapat tercapai. Visi ini perlu difokuskan, cetak biru untuk mencapai sasarnya perlu dibuat, agenda perlu disusun, dan rencana tindakan perlu ditetapkan, semuanya menurut teori dan praktik perencanaan yang baik.

Daftar Pustaka

- Bijlani, Hiru. 1994. *Globalisation: An Overview*. Singapore: Heinemann Asia.
- Brosnahan, L.F. 1963. "Some Historical Cases of Language Imposition." Dalam John Spencer (Ed.) *Language in Africa*. Cambridge: CUP. 7--24.
- Fasold, Ralph. 1984. *The Sociolinguistics of Society*. New York: Basil Blackwell.
- Fishman, Joshua A. 1974. "Language Modernization and Planning in Comparison with Other Types of National Modernization and Planning." Dalam Joshua A. Fishman (Ed.) *Advances in Language Planning*. The Hague: Mouton. 79--102.
- Gunarwan, Asim. 1997. "Kepadaan Relatif Bahasa Indonesia Menjelang Abad Ke-21." Makalah pada Seminar Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, Medan, 7--9 Juli.
- Gunarwan, Asim. 1993. "Bahasa Asing sebagai Kendala Pembinaan Bahasa Indonesia." Makalah pada Kongres VI Bahasa Indonesia, Jakarta, 28 Oktober--2 November.
- Halim, Amran (Ed.) 1976. *Politik Bahasa Nasional 2*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kartono, Giri, 1976. "Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di Indonesia." Dalam Amran Halim (Ed.) 117--125
- Kristiadi, J.B. 1997. "Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21" (*sic*). *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*. Vol. 1, No 2. 49--67.
- Mackey, William F. 1973. *Three Concepts for Geolinguistics*. Montreal: Centre International de Recherches sur le Bilinguisme.
- Mustopadidjaja, A.R. 1997. "Transformasi Manajemen Menghadapi Globalisasi Ekonomi." *Jurnal Administrasi dan Pembangunan*. Vol. 1, No 1. 28--46.
- Waters, Malcolm. 1995. *Globalization*. London dan New York: Routledge.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A4
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 16.30--17.20
Judul Makalah	: Kedudukan dan Fungsi Bahasa Asing di dalam Era Globalisasi
Penyaji	: Asim Gunarwan
Pemandu	: B. Karno Ekowardono
Pencatat	: a. Dameria Nainggolan b. Farida Dahlan
Peserta	: 45 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Achmad Tolla, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya menolak terjemahan yang Bapak kemukakan pada makalah Bapak yang terdapat pada halaman 51 karena terjemahan itu tidak benar. Pertama, Bapak telah membandingkan dua hal yang berbeda, bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris. Bapak mungkin lebih tahu bahwa Caplin telah membagi empat gaya retorika bahasa di dunia ini, yaitu retorika Anglo Saxon, Semitik, retorika tersamar di Asia, dan retorika berbunga-bunga di Spanyol. Oleh karena itu, hal ini terkait dengan bahasa yang Bapak jelaskan tadi. Bahasa Indonesia tidak bisa dibandingkan dengan gaya retorika yang lurus seperti dalam retorika Anglo Saxon. Begitu juga retorika Semitik yang dikenal dalam bahasa-bahasa Arab. Bahasa Arab mengenal banyak kalimat yang paralel yang tidak bisa dibandingkan dengan bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia tentu tumbuh dari budaya Indonesia.

Kedua, saya mengusulkan mengenai penggunaan istilah bahasa asing yang sampai sekarang masih rancu, belum seragam. Di Fakultas Sastra dan di FPBS, ada Jurusan Bahasa Inggris, Bahasa Arab, Bahasa Jerman, dan mungkin Bahasa Jepang. Akan tetapi, umumnya orang menyebut Jurusan Bahasa Inggris, sementara Jurusan Bahasa Arab, Jurusan Bahasa Jepang, dan Jurusan Bahasa Prancis dinamakan Jurusan Bahasa Asing. Oleh sebab itu, saya ingin mengusulkan melalui forum ini kiranya kita dapat membuat kesepakatan agar penyebutan jurusan di tiap fakultas, fakultas sastra, dan FPBS di IKIP itu seragam. Jurusan bahasa asing, apakah itu bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Arab, semuanya disebut Jurusan Bahasa Asing dan yang lain disebut Jurusan Bahasa Indonesia atau Jurusan Bahasa Daerah.

b. Jawaban:

Pak Achmad mengatakan bahwa terjemahan itu tidak benar. Tidak benarnya di mana, Pak? Yang pertama itu dapat saya ungkapkan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, ada masalahnya, yaitu apakah kita dapat mengungkapkan

dengan tepat dan mudah. Ini kriteria yang biasanya dipakai untuk mengukur apakah bahasa itu sudah dapat dipakai sebagai bahasa wacana modern dengan segala ratifikasinya. Bahasa dikatakan modern jika bahasa itu dapat dipakai sebagai wahana wacana modern, yaitu wacana yang dipakai di dalam negara-negara industri maju yang rinciannya sudah jelas. Mengenai usulan penggantian penamaan jurusan bahasa asing, itu bukan wewenang saya, melainkan wewenang dekan atau rektor.

2. Penanya: Abdul Wahab, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Saya tidak sepakat dengan kriteria perbandingan kepadatan geolinguistik bahasa Inggris dan kepadatan geolinguistik bahasa Indonesia. Kriteria yang kedua, yaitu kriteria yang disajikan oleh Mackey, barangkali kita bisa menciptakan kriteria kita sendiri yang jawabnya tentu tidak bisa dilakukan sekarang. Oleh karena itu, saya khawatir apa yang diutarakan oleh Pak Asim Gunarwan menjadikan ragu-ragu bagi kita, yaitu menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa yang mendunia.

b. Jawaban:

Mengenai ketaksaan, contoh saya dalam bahasa Indonesia, misalnya *anjing itu kelihatan lebih panjang daripada kucing* kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *The dog looks longer than the cat*. Arti yang pertama, anjing itu kelihatan lebih panjang. Arti yang kedua, anjing itu mampu melihat lebih lama daripada kucing. Tetapi, yang saya contohkan sekadar menunjukkan bahwa ada lubang-lubang yang menyebabkan kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia perlu diefisienkan agar ketaksaan itu menjadi hilang. Ketaksaan itu hanya ada dalam tataran makna semantik. Pada tataran pragmatik tidak ada karena konteksnya itu akan selalu menunjukkan bahwa yang dimaksud Mackey, Pak Wahab tidak mempunyainya. Itu hak setiap orang. Yang ada adalah kriteria Mackey yang diambil dari bukunya yang berjudul *Three Concepts for Gedinguistics*. Kenyataan menunjukkan bahwa pada saat ini saya kira orang yang mau 'membeli' bahasa Indonesia, dengan arti ingin mengadopsi bahasa Indonesia itu sebagai tambahan bahasa mereka, sangat kecil. Mengapa? Dasarnya manusia itu adalah manusia ekonomi. Untuk menguasai bahasa itu, mereka akan bertanya dulu, yang ditanyakan adalah soal manfaat. Dengan kata lain, apa manfaat yang saya peroleh jika saya menguasai bahasa Indonesia. Manfaat yang diperoleh kalau bisa berbahasa Inggris saya dapat pergi ke Singapura dan dapat berbicara di sana. Manfaat lain kalau saya dapat berbahasa Inggris, saya dapat menyampaikan makalah di luar negeri. Kalau kita tidak dapat menguasai bahasa asing hanya menguasai bahasa Indonesia manfaat apa yang dapat kita peroleh, terutama oleh orang lain, katakanlah oleh orang Muangthai. Andaikata orang Muangthai memutuskan bahasa Indonesia harus kita pelajari apa manfaat yang mereka peroleh.

PELESTARIAN BAHASA DAERAH

Hasan Alwi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pengantar

Dalam kehidupan manusia bahasa memainkan peran yang sangat vital dan menentukan. Dengan bahasa seseorang dapat berhubungan dengan orang lain atau bahkan dengan dirinya sendiri. Ketika digunakan untuk berhubungan dengan orang lain, bahasa berperan sebagai sarana komunikasi. Pada saat seseorang berhubungan dengan dirinya sendiri, bahasa tampil sebagai sarana berpikir. Sarana berpikir dan sarana komunikasi itu pada hakikatnya merupakan dua fungsi bahasa yang utama.

Sebagai sarana berpikir, bahasa digunakan dalam proses internalisasi dan konseptualisasi: mencerna gagasan, mematangkan konsep, dan menghubungkan pandangan yang satu dengan pandangan yang lain sehingga diperoleh sejumlah buah pikiran yang, menurut yang bersangkutan, pantas dan dapat disampaikan kepada orang lain, baik secara tertulis maupun lisan. Hal yang disebutkan terakhir ini memperlihatkan pemakaian bahasa sebagai sarana komunikasi.

Gambaran singkat mengenai fungsi bahasa itu berlaku untuk semua bahasa alami (*natural language*). Tinjauan terhadap bahasa daerah pada makalah ini juga berkenaan dengan kedua macam fungsinya seperti disebutkan di atas, terutama pemakaiannya sebagai sarana komunikasi.

2. Bahasa Daerah di Indonesia

Bahasa daerah di Indonesia, yang jumlahnya banyak sekali, digunakan oleh para penuturnya dalam lingkungan keluarga di rumah dan dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat. Bahasa daerah sebagai sarana komunikasi seperti itu menggambarkan ciri kehomogenan para pemakainya. Jika ciri itu tidak ada, pemakaian bahasa daerah dalam lingkungan keluarga menjadi tidak mungkin kalau, misalnya, suami-istri dalam keluarga yang bersangkutan tidak berasal dari kelompok etnis yang sama. Dalam kasus yang demikian, pertanyaan yang timbul berkenaan dengan pemilihan atau penentuan bahasa daerah yang akan digunakan, bahasa daerah si suami atau bahasa daerah si istri. Demikian pula halnya dengan pemakaian bahasa daerah dalam lingkungan masyarakat, ciri kehomogenan tersebut merupakan faktor yang menentukan.

Selain sebagai sarana komunikasi, bahasa daerah juga digunakan sebagai sarana ekspresi dalam bidang kesenian dan kebudayaan. Dalam hal ini bahasa-bahasa daerah di Indonesia memperlihatkan tradisi dan intensitas yang tidak sama. Ada bahasa-bahasa daerah yang sudah sejak lama mengenal budaya tulis. Budaya tulis bahasa daerah ini pada tahap-tahap awal pertumbuhannya menggunakan aksara daerah,¹ kemudian terus dipelihara dan dikembangkan dengan memanfaatkan aksara Latin. Dalam hal bahasa Melayu, sebelum menggunakan huruf Latin, tradisi tulisnya menggunakan aksara Jawi (yang sesungguhnya sama saja dengan huruf Arab).

Budaya atau tradisi tulis bahasa-bahasa daerah yang sangat menonjol terlihat dalam karya sastranya. Untuk bahasa-bahasa tertentu, misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Minangkabau, tradisi tulis itu bahkan juga makin dipelihara dan lebih dikembangkan melalui pemakaian bahasa daerah yang bersangkutan dalam media massa cetak dan elektronik. Ada surat kabar dan/atau majalah yang seluruhnya menggunakan bahasa daerah dan ada pula yang hanya menyediakan rubrik khusus untuk bahasa daerah. Sejumlah radio swasta bahkan ada yang secara khusus merancang acara-acara tertentu untuk memberikan peluang dan kesempatan bagi pemakaian bahasa daerah, dan hal itu biasanya dikaitkan dengan acara siaran lagu-lagu daerah yang bersangkutan.²

Perbedaan dalam hal tradisi dan intensitas penggunaan bahasa daerah itu juga tampak pada pelaksanaan upacara adat (misalnya upacara perkawinan) dan seni pertunjukan. Hal itu jelas menggambarkan peran bahasa daerah yang amat kuat sebagai sarana ekspresi.

Yang tidak kalah pentingnya ialah peran bahasa daerah dalam bidang pendidikan. Sudah diketahui secara meluas bahwa bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas-kelas permulaan sekolah dasar karena bahasa Indonesia belum dipahami atau dikuasai oleh murid. Selain itu, bahasa daerah juga diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran.³

Contoh-contoh pemakaian bahasa daerah, sebagaimana yang dikemukakan di atas, mengisyaratkan bahwa bahasa daerah memainkan peran yang amat menentukan sebagai sarana komunikasi dan sarana ekspresi (seni dan budaya) di kalangan kelompok masyarakat pemakainya.⁴ Karena bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok masyarakat yang perbedaannya ditentukan oleh jenis bahasa daerah yang digunakan oleh masing-masing kelompok masyarakat tersebut, maka pada hakikatnya bahasa daerah pun merupakan faktor yang amat penting dan menentukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. Bahasa Daerah dan Bahasa Indonesia

Ketika bahasa Indonesia (yang berasal dari Melayu) pada tahun 1928 diikrarkan sebagai bahasa persatuan yang harus "dijunjung", maka sesungguhnya pernyataan butir ketiga Sumpah Pemuda itu sangat erat kaitannya dan tidak dapat dipisahkan dari kenyataan kebahasaan yang amat majemuk sehubungan dengan keberadaan bahasa-bahasa daerah. Meskipun demikian, pada makalah ini tidak akan "dipersoalkan" mengapa yang diangkat menjadi bahasa persatuan itu bukanlah salah satu bahasa (daerah) yang jumlah penuturnya paling banyak.⁵

Pamor bahasa-bahasa daerah itu, dengan dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa negara (Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945), sepintas lalu tampaknya semakin pudar dan terdesak. Akan tetapi, jika benar-benar disimak apa yang tersurat dan tersirat dalam penjelasan pasal yang bersangkutan, kekhawatiran semacam itu sama sekali tidak beralasan karena keberadaan bahasa daerah, berikut peran yang diembannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, menjadi makin mantap atau makin kukuh karena telah memperoleh pengakuan formal.⁶

Kedua peristiwa yang amat bersejarah dalam kehidupan berbahasa tersebut di atas

merupakan fenomena linguistik dan kultural yang amat unik, menarik, dan strategis untuk dikaji lebih jauh, terutama dalam konteks masa depan kebahasaan di tanah air kita. Masa depan kebahasaan pada makalah ini pemahamannya dibatasi pada dua hal, yaitu bahasanya itu sendiri dan perilaku berbahasa masyarakat pemakainya. Yang disebutkan pertama bersangkutan paut dengan tingkat kemantapan bahasa sebagai sarana komunikasi dan ekspresi (dengan sendirinya juga menyangkut fungsi atau peran bahasa sebagai sarana internalisasi/konseptualisasi), sedangkan yang kedua berhubungan dengan perilaku berbahasa dari para pemakainya (termasuk di dalamnya sikap yang bersangkutan terhadap bahasa).

Jika kedua hal itu dikaitkan dengan bahasa daerah, maka pada saat yang sama sebenarnya keterkaitan itu juga memperikutkan bahasa Indonesia. Dengan perkataan lain, kita perlu senantiasa menyasati seberapa jauh hubungan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dalam mengungkap kedua hal itu. Artinya, tingkat kemantapan bahasa daerah dan perilaku berbahasa daerah tidak dapat dipisahkan--apalagi secara mutlak--dari komponen serupa yang menyangkut bahasa Indonesia. Korelasi di antara keduanya tidak dapat diukur secara pasti, tetapi dapat diamati.

Kemantapan suatu bahasa pada dasarnya ditentukan oleh dua faktor, yaitu (1) ketepatan serta kejelasan kaidah yang mengatur pemakaian bahasa yang bersangkutan dan (2) kelengkapan perbendaharaan kata serta peristilahannya. Selain itu, secara khusus patut dicatat bahwa kekayaan idiom atau ungkapan idiomatis juga merupakan faktor yang dapat memberikan corak tersendiri bagi kemantapan bahasa.

Kelengkapan perbendaharaan kata bahasa daerah berikut peristilahannya tampaknya merupakan faktor yang sangat menonjol dalam hal keterkaitan bahasa daerah dengan bahasa Indonesia. Apabila sering disebutkan bahwa kata dan istilah dalam bahasa Indonesia yang mengungkapkan konsep-konsep iptek modern boleh dikatakan hampir seluruhnya berasal dari kata dan istilah asing, maka dapatlah dikatakan secara analogis bahwa, untuk hal yang sama, bahasa daerah mengadopsinya dari atau lewat bahasa Indonesia.⁷

Hal yang sebaliknya juga terjadi. Untuk menyatakan konsep-konsep yang menyangkut budaya dan peri kehidupan tradisional, justru bahasa Indonesialah yang menerima masukan dari bahasa daerah. Dengan demikian, yang sebenarnya terjadi ialah bahasa daerah dan bahasa Indonesia sama-sama saling melengkapi dalam hal pemerikayaan perbendaharaan kata dan peristilahan.⁸

Perilaku berbahasa pada dasarnya mengandung makna tentang perilaku seseorang dalam menggunakan bahasa. Tolok ukurnya adalah perwujudan bahasa yang digunakannya. Jika perilaku berbahasa itu dikaitkan dengan atau dilihat dari tingkat kemantapan bahasanya itu sendiri, terutama sebagai sarana komunikasi dan ekspresi, maka perilaku berbahasa seseorang itu sebenarnya menggambarkan mutu pemakaian bahasa dari yang bersangkutan.

Perbedaan di antara kedua masalah pokok tersebut sering dirujuk secara terminologis dengan pembinaan dan pengembangan bahasa. Upaya pembinaan bermuara pada tujuan peningkatan mutu pemakaian atau, dengan kata lain, berhubungan dengan perilaku berbahasa. Adapun upaya pengembangan bersangkutan paut dengan kode bahasa

sebagai sarana komunikasi. Mengingat kontak bahasa antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia itu berlangsung dalam intensitas yang boleh dikatakan sangat tinggi, maka kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah hendaknya diupayakan sedemikian rupa sehingga dalam batas-batas tertentu "seiring dan sejalan" dengan kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Dalam pandangan dan pengertian yang demikian, pelestarian bahasa daerah, yang menjadi judul atau topik bahasan pada makalah ini, secara eksplisit hanya berkaitan dengan upaya yang perlu dilakukan agar bahasa daerah menjadi lestari.⁹ Bahasa yang lestari pasti berciri statis, padahal bahasa daerah di Indonesia pasti pula memperlihatkan ciri yang dinamis agar ia tetap mantap dapat digunakan oleh masyarakat pemakainya sebagai sarana komunikasi yang tingkat kemantapannya perlu dihubungkan dengan seberapa jauh bahasa daerah yang bersangkutan mampu "menyesuaikan diri" dengan laju kemajuan kehidupan yang amat pesat. Dengan demikian, pelestarian bahasa daerah itu perlu dilihat dari sisi yang dinamis atau dari pandangan yang positif. Selain itu, secara implisit pelestarian yang dinamis itu harus pula dihubungkan dengan apa yang pada paparan di atas dimaksudkan dengan perilaku berbahasa. Oleh karena itu, judul makalah ini perlu dipahami dalam konteks pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

4. Penjelasan Pasal 36 UUD 1945¹⁰

Kalau pelestarian bahasa daerah itu mengandung pengertian 'pembinaan dan pengembangan bahasa daerah', maka ada tiga pertanyaan yang perlu secara tepat dirumuskan jawabannya, yakni sebagai berikut.

- a. Mengapa pembinaan dan pengembangan bahasa daerah perlu dilakukan?
- b. Bagaimana pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu dilakukan?
- c. Siapa yang melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu?

Di dalam penjelasan Pasal 36 UUD 1945 terdapat beberapa kata kunci yang dapat dikembangkan untuk menjawab pertanyaan di atas: "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura, dan sebagainya), bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup" (lihat juga Catatan 6).

Kata-kata kunci yang dimaksudkan pada kutipan di atas ialah bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara, dan bahasa daerah yang merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Berdasarkan kata-kata kunci itu, dari ketiga pertanyaan di atas, hanya dua pertanyaan yang tersedia jawabannya, yaitu pertanyaan pertama dan ketiga.

- a. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah perlu dilakukan karena bahasa daerah itu merupakan bagian yang menyatu dan tidak terpisahkan dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Telah dikemukakan bahwa bahasa daerah berperan bukan saja sebagai sarana komunikasi di antara masyarakat pemakainya, melainkan juga sebagai sarana ekspresi dalam bidang kesenian dan kebudayaan.

- b. Yang melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah ialah rakyat yang memiliki bahasa daerah bersama-sama dengan negara. Rakyat yang memelihara dengan baik-baik bahasa daerahnya merupakan masyarakat pemakai, sedangkan negara berkewajiban memelihara dan menghormati bahasa daerah tersebut.

Jawaban kedua itu masih menimbulkan pertanyaan susulan sehubungan dengan amat banyaknya bahasa daerah yang memang dipelihara dengan baik-baik oleh rakyatnya,¹¹ padahal negara (dalam hal ini Pemerintah) tidak mungkin memberikan perhatian dalam porsi dan intensitas yang sama terhadap semua bahasa daerah yang memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tersebut. Dengan demikian, terutama mengingat masih amat terbatasnya sarana, tenaga (ahli), dan dana untuk melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang memenuhi kriteria itu, perlu dirumuskan secara lebih rinci bahasa daerah yang bagaimana yang perlu diprioritaskan "pemeliharaan dan penghormatan"-nya oleh negara.

Selain itu, pertanyaan kedua yang belum tergambar jawabannya di dalam Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 itu, yakni bagaimana pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dilakukan, juga perlu memperoleh perhatian yang memadai, baik dari pihak rakyat yang memiliki bahasa daerah yang bersangkutan maupun dari pihak negara atau Pemerintah.

5. Kemantapan Bahasa Daerah

Bahasa daerah yang dipelihara secara baik-baik oleh masyarakat pemakainya akan tetap mantap. Oleh karena itu, urutan prioritas yang perlu diperhatikan Pemerintah dalam membina dan mengembangkan bahasa daerah harus didasarkan pada tingkat kemantapan bahasa daerah yang bersangkutan. Makin tinggi tingkat kemantapan suatu bahasa daerah akan makin tinggi pula kewajiban negara untuk memelihara dan menghormatinya.¹²

Tingkat kemantapan bahasa daerah itu dapat diamati melalui beberapa faktor, misalnya (1) faktor jumlah penuturnya,¹³ (2) faktor budaya atau tradisi tulisnya, (3) faktor pemakaiannya dalam bidang pendidikan, dan (4) faktor peranannya sebagai sarana pendukung kebudayaan daerah yang bersangkutan (periksa juga Ajip Rosidi, 1976).

Yang perlu mendapat perhatian yang bersungguh-sungguh adalah faktor ketiga, yaitu bahasa daerah yang digunakan dalam bidang pendidikan. Di atas telah disebutkan bahwa bahasa daerah digunakan sebagai bahasa pengantar pada tahap awal pendidikan di sekolah dan juga digunakan sebagai salah satu mata pelajaran. Yang disebutkan terakhir ini dewasa ini memperlihatkan gejala yang memprihatinkan, sebagaimana terlihat, misalnya, pada makin menurunnya minat mahasiswa untuk memilih bahasa daerah sebagai bidang studinya. Selain itu, sering juga disampaikan keluhan tentang kurang memuaskannya pelaksanaan pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah sehingga diperlukan penataan kembali berbagai hal yang berkenaan dengan pengajaran bahasa daerah tersebut, seperti kurikulum, kualifikasi tenaga pengajar, mutu buku pelajaran, dan (yang tidak kalah penting dan strategisnya) lingkungan yang mendukung.

Masalah penataan kembali pengajaran bahasa daerah itu cukup mendesak untuk segera ditangani karena mutu pemakaian bahasa daerah di kalangan generasi muda terlihat makin menurun.¹⁴

6. Upaya yang Perlu Dilakukan

Upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah yang dilakukan hendaknya bermuara pada tujuan agar:

- a. bahasa daerah makin mantap dapat digunakan sebagai sarana komunikasi dan sarana ekspresi;
- b. mutu pemakaian bahasa daerah oleh para penuturnya makin meningkat;
- c. bahasa dan sastra daerah benar-benar merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan daerah dan juga menjadi bagian dari kebudayaan nasional; dan
- d. penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah makin giat dilakukan (lihat Alwi, 1993).

Untuk mencapai tujuan-tujuan itu, hal-hal berikut perlu mendapat perhatian.

- a. Bahasa daerah yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar hendaknya benar-benar efektif dan efisien dalam menyampaikan pesan atau isi mata pelajaran yang disajikan. Dalam hal ini, perlu dipertimbangkan bahwa untuk daerah atau sekolah tertentu, tersedia pengajar yang benar-benar menguasai bahasa daerah yang bersangkutan.
- b. Bahasa daerah yang digunakan sebagai salah satu mata pelajaran, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi, hendaknya merupakan bahasa yang tidak saja mencerminkan kekayaan budaya daerah yang bersangkutan, tetapi juga merupakan bahasa yang dapat dimanfaatkan untuk memperkaya khazanah bahasa dan budaya Indonesia pada umumnya.
- c. Untuk memantapkan kedudukan bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang dapat digunakan oleh para penuturnya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan semangat dan suasana "budaya"-nya, penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu dilakukan secara lebih giat, berencana, dan terarah.
- d. Kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah itu sekurang-kurangnya harus diarahkan pada dua keperluan yang cukup mendesak, yaitu disusunnya kamus dan (sketsa) tata bahasa dari bahasa daerah yang bersangkutan. Untuk kepentingan yang lebih luas, kamus itu hendaknya merupakan kamus dwibahasa (kamus bahasa Indonesia-bahasa daerah atau bahasa daerah-bahasa Indonesia).
- e. Untuk melaksanakan kegiatan yang disebutkan pada butir 3 dan 4 di atas, perlu ada koordinasi yang baik di antara berbagai pihak, misalnya perguruan tinggi, pusat/ lembaga penelitian, dan Pusat Bahasa/Balai Penelitian Bahasa.
- f. Kegiatan penerbitan dalam bahasa daerah, baik yang berupa buku, surat kabar, maupun majalah perlu mendapat dorongan yang layak (bila dianggap perlu bahkan memperoleh subsidi).
- g. Mengingat begitu banyak dan tersebarnya bahasa-bahasa daerah di Indonesia, adanya Balai Penelitian Bahasa di setiap propinsi merupakan keperluan yang

mendesak. (Sampai saat ini Balai Penelitian Bahasa baru ada di 3 propinsi, yaitu di DI Yogyakarta, Denpasar, dan Ujung Pandang.)

7. Penutup

Dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu harus merupakan upaya yang pada dasarnya akan mendukung keberadaan bahasa daerah agar mampu berperan dengan sebaik-baiknya sebagai sarana internalisasi/konseptualisasi, sarana komunikasi, dan sarana ekspresi.

Sementara itu, berbagai langkah perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah perlu disusun dengan tepat dan cermat agar diperoleh hasil yang berupa peningkatan, baik yang menyangkut kemantapan bahasanya itu sendiri, maupun yang berhubungan dengan mutu pemakaian yang dipergunakan oleh para pemakainya.

Bahasa daerah yang mantap dan pemakaiannya yang bermutu pada gilirannya akan memberikan dampak yang positif bagi perkembangan dan pengembangan kebudayaan nasional.

Catatan

1. Menurut sumber yang ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, di Indonesia terdapat sepuluh aksara daerah, yaitu aksara daerah untuk bahasa Bali, Jawa, Sunda, Bugis/Makassar, Karo, Mandailing, Lampung, Rejang, Toba, dan Kerinci.
2. Radio swasta yang beberapa acaranya menggunakan bahasa daerah itu terdapat di Jakarta. Kalau lokasinya di daerah, hal itu sudah biasa. Bahkan, RRI pun, kalau lokasinya di daerah, sering pula mengudarakan acara-acara dalam bahasa daerah.
3. Digunakannya bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan itu secara resmi tercantum dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab XI mengenai Bahasa Pengantar, Pasal 42, ayat (1): "Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan dan sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu".
4. Dalam konteks itu, kelompok masyarakat yang dimaksudkan sama dengan kelompok etnis.
5. Pada saat Sumpah Pemuda diikrarkan (1928), bahasa daerah yang paling banyak jumlah penuturnya ialah bahasa Jawa, tetapi bahasa mayoritas ini tidak diangkat menjadi bahasa persatuan. Untuk itu, Abdullah (1996:360) menyebutnya sebagai "proses kimia kebahasaan yang agak unik dalam sejarah perbandingan tentang proses pembentukan bangsa". Disebutnya unik karena bahasa Melayu bukan bahasa mayoritas, tetapi berhasil menjadi "bahasa nasional tanpa saingan, bahkan juga tanpa perdebatan".
6. Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 berkaitan dengan dua hal, yaitu (1) bahwa negara juga berkewajiban memelihara dan menghormati bahasa-bahasa daerah yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik, dan (2) bahwa bahasa-bahasa daerah tersebut merupakan bagian kebudayaan Indonesia yang hidup. Karena dikaitkan dengan ihwal kebudayaan, maka masalah bahasa daerah itu juga dapat dihubungkan dengan Pasal 32 UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia". Penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut. "Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia

terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

7. Sebelum tahun tujuh puluhan, kata dan istilah bahasa Indonesia yang menyangkut iptek modern itu diperoleh dari atau lewat bahasa Belanda meskipun secara etimologis kata/istilah tersebut sesungguhnya berasal dari bahasa asing yang bukan bahasa Belanda. Setelah kurun waktu itu, orientasi peristilahan dalam bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris.
8. Yang sering diperkatakan ialah bahwa bahasa daerah merupakan sumber yang dapat memperkaya khazanah kosakata bahasa Indonesia, tetapi hal yang sebaliknya, yaitu bahwa bahasa Indonesia juga memperkaya perbendaharaan kata bahasa daerah, jarang sekali diungkapkan secara eksplisit. Hal itu terlihat, misalnya, pada kesimpulan Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 yang salah satu butirnya menyebutkan bahwa bahasa daerah, dalam hubungannya dengan bahasa Indonesia, berfungsi sebagai pendukung bahasa nasional (lihat Halim <Ed.>, 1976:146).
9. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1997:588), *lestari* berarti 'tetap seperti keadaannya semula; tidak berubah; kekal'.
10. Salah satu butir rumusan Tindak Lanjut Kongres Bahasa Indonesia VI tahun 1993 untuk pokok bahasan "Pengembangan Bahasa dan Sastra" menyebutkan "penjelasan Pasal 36 UUD 1945 tentang *pemeliharaan bahasa daerah* perlu dirumuskan tindakan operasionalnya".
11. Mengenai jumlah bahasa daerah yang sebenarnya, belum ada angka yang pasti. Beberapa sumber menyebutkan angka yang berbeda. Akan tetapi, sering dikemukakan bahwa bahasa daerah di Indonesia di luar Irian Jaya jumlahnya berkisar antara 350 dan 400 buah, sedangkan di Irian Jaya jumlah bahasa daerah itu berkisar antara 200 dan 250 buah. Sehubungan dengan hal itu, jumlah bahasa daerah di Indonesia erat kaitannya dengan lokasi. Kecenderungannya ialah bahwa makin ke timur jumlah bahasa daerah makin banyak, tetapi jumlah penuturnya makin sedikit. Menurut informasi dari para peneliti Belanda yang tengah melakukan penelitian lapangan di Irian Jaya, ada beberapa bahasa daerah yang jumlah penuturnya kurang dari 10 orang.
12. Ada juga pihak yang berpandangan sebaliknya, yaitu bahwa yang perlu diperhatikan Pemerintah adalah bahasa-bahasa daerah yang kecil, yang lemah, yang jumlah penuturnya sedikit. Justru bahasa-bahasa daerah inilah yang perlu segera diselamatkan sebelum bahasa daerah tersebut musnah, misalnya karena tidak ada lagi kelompok masyarakat yang menggunakannya. Adapun bahasa-bahasa daerah yang sudah mantap, pembinaan dan pengembangannya cukup dipercayakan kepada kelompok masyarakat pemakainya saja.
13. Menurut Sensus Penduduk 1990 terdapat delapan besar bahasa daerah yang didasarkan pada jumlah penuturnya, yaitu berturut-turut bahasa Jawa (60.267.461 orang), bahasa Sunda (24.155.962 orang), bahasa Madura (6.792.447 orang), bahasa Minangkabau (3.527.726 orang), bahasa Bugis (3.228.742 orang), bahasa Batak (3.120.047 orang), bahasa Banjar (2.755.337 orang), dan bahasa Bali (2.589.256 orang). Patut disayangkan karena pemeringkatan bahasa daerah menurut Sensus Penduduk 1990 itu berhenti pada urutan kedelapan. Kalau pemeringkatan itu dilanjutkan sampai 20 besar, maka urutan 9--20 ditempati oleh bahasa-bahasa Aceh, Sasak, Lampung, Makasar, Rejang, Komerling, Sa'dan, Manggarai, Minahasa, Dayak Ngaju, Gorontalo, dan Bima (Wurm dan Shiro

Hattori, 1981).

14. Kalau Sensus 1980 dibandingkan dengan Sensus 1990, terlihat bahwa dari delapan besar bahasa daerah itu (lihat Catatan 13), hanya penutur bahasa Sunda dan bahasa Banjar yang memperlihatkan kenaikan. Sementara itu, enam bahasa daerah lainnya memperlihatkan penurunan, dan penurunan yang cukup drastis terlihat pada jumlah penutur bahasa Jawa: tahun 1980 jumlahnya 40,44% dan tahun 1990 berkurang menjadi 38,08% (dari jumlah seluruh penutur bahasa-bahasa di Indonesia).

Daftar Pustaka

- Abdulah, Taufik. 1996. "Situasi Kebahasaan Masa Kini: Kepungan Eksternal dalam Perkembangan Bahasa dan Wacana di Indonesia". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy (Ed.): 345--362. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Alwi, Hasan. 1993. "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Daerah". Makalah Simposium Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Jawa, Kaliurang, 26--27 Juli 1993.
- Halim, Amran (Ed.). 1976. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Rosidi, Ajip. 1976. "Pengembangan Bahasa Daerah". Dalam Amran Halim (Ed.): 103--115. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid 2. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Wurm, S.A. dan Shiro Hattori. 1981. *Language Atlas of the Pacific Area*. Canberra: The Australian Academy of the Humanities/The Japan Academy.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 7
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 9.30–10.30
Judul Makalah	: Pelestarian Bahasa Daerah
Penyaji	: Hasan Alwi
Pemandu	: Andi Mappi Sammeng
Pencatat	: a. Adi Triyono b. Wati Kurniawati
Peserta	: 500 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Masrurah Mochtar, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya pernah mengadakan penelitian di Sulawesi Selatan dengan mengambil sampel 4 daerah. Ternyata ada gejala-gejala pemusnahan. Saya katakan demikian karena penutur bahasa Bugis (± 4 juta) itu yang menggunakan bahasa daerah hanya yang status sosial orang tuanya menengah ke bawah. Akan tetapi, status sosial yang sudah menengah ke atas orang tuanya memberikan bahasa Indonesia kepada keluarganya. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa bahasa daerah perlu dilestarikan?

b. Jawaban:

Suatu bahasa daerah musnah, biarkanlah musnah, kalau itu secara alamiah, dan itu ditentukan oleh rakyatnya sendiri. Bagaimana memeliharanya, sudah saya sebutkan tadi. Pemerintah hanya mendorong dari belakang, jangan dipaksakan soal kelompok menengah ke bawah menggunakan bahasa daerah, kelompok menengah ke atas menggunakan bahasa Indonesia itu juga ada kaitannya dengan lingkungan, asal keluarga yang bersangkutan, yang saya sebutkan tadi, antara lain, berbeda kelompok etnisnya.

2. Penanya: Syafruddin Sulaiman, Universitas Andalas, Sumatera Barat

a. Pertanyaan:

Dalam rangka pelestarian bahasa daerah, saya mengusulkan agar alumni sastra daerah ini diangkat dan dapat dimanfaatkan dengan menambah akta IV sehingga dapat mengajar di SD atau SMP. Khusus alumni sastra daerah Minangkabau dapat diangkat menjadi pegawai di bidang kebudayaan. Dalam bahasa daerah perlu dikembangkan pelestarian seni, seperti seni suara (lagu). Sastra dan bahasa daerah dapat dikembangkan dalam seni lagu. Banyak lagu daerah yang tidak diminati lagi. Ada unsur lain dalam mengadaptasi lagu yang populer ke dalam bahasa Minangkabau, yaitu unsur negatif dan positif. Bagaimana

pendapat Bapak pelestarian bahasa daerah itu dalam aspek budaya, dalam hal adaptasi?

b. Jawaban:

Soal peluang kerja untuk alumni jurusan bahasa dan sastra daerah sudah saya singgung tadi. Siapa yang mau mengorbankan masa depannya dengan memasuki jurusan bahasa daerah, tetapi sekali lagi dengan melihat upaya-upaya yang saya lakukan dan tuntutan agar sarjana-sarjana itu kreatif, juga harus mampu keluar dari kemelut tertutupnya lapangan pekerjaan. Soal pemakaian bahasa daerah di dalam lagu-lagu secara implisit sudah disinggung karena dalam soal sarana ekspresi, seni, dan pertunjukan seni sastra, sudah tentu termasuk di dalamnya lagu-lagu daerah. Ada yang mengatakan bahwa mengajarkan suatu bahasa yang belum dikenal akan lebih mudah kalau diawali dengan mempelajari lagunya.

3. Penanya: Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta

a. Pertanyaan:

Saya lebih memperhatikan aspek yang kedua: bahasa daerah untuk sekolah yang kadang-kadang merupakan muatan lokal. Bagaimana di suatu daerah yang ada banyak sekali bahasa daerahnya. Misalnya, di tempat saya ada tiga bahasa daerah, lalu harus dipilih bahasa mana yang harus diajarkan di sekolah. Hal itu menjadi suatu masalah yang sangat besar? Jadi, mungkin pembinaan bahasa daerah itu harus dilakukan bukan lewat sekolah. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan membina bahasa Indonesia lewat tes-tes masuk untuk menjadi pegawai negeri di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan kita mengelompokkannya dalam 4 tes bahasa Indonesia, yaitu (1) pendidikan dasar 9 tahun untuk menjadi penjaga sekolah/menjadi pesuruh, (2) klasifikasi SMU dan sekolah kejuruan untuk menjadi tenaga administrasi, (3) D3 untuk bekerja di laboratorium, dan (4) S1 lebih umum. Kami selalu dipesan, hati-hati dengan wilayah jangan sampai orang Irian atau orang Nias tidak bisa menjadi pesuruh karena tidak lulus bahasa Indonesia. Ini menjadi masalah besar dan mohon diperhatikan. Tolong berikan kami landasan teori dan landasan pikir sehingga menghasilkan tata bahasa baku dan model seperti ini.

b. Jawaban:

Soal bahasa daerah sebagai muatan lokal mana yang dipilih? Sekarang di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan sedang disusun satu pelajaran terpadu untuk muatan lokal. Unsur di dalamnya adalah bahasa. Untuk tahap pertama dipilih dan ditentukan 4 bahasa, yaitu (1) bahasa Bugis, (2) bahasa Batak Toba, (3) bahasa Dayak Ngaju, dan (4) bahasa Aceh. Jadi, ada pertimbangan-pertimbangan tertentu yang ujung-ujungnya sampai pada pilihan bahasa keempat itu. Soal tes untuk keperluan yang berbeda-beda, pesuruh bahasa Indonesianya begini. Bahkan, barangkali untuk keperluan petugas di hotel lain lagi.

Unsur bahasa Inggrisnya mesti terlihat. Ini memang ada permintaan-permintaan tertentu. Misalnya, dikatakan untuk daerah Irian dan Nias jangan selalu dipersoalkan bahasa Indonesianya, demikian pula di Timtim. Saya kira penguasaan bahasa Indonesia itu amat rendah dan perlu diupayakan agar di dalam penyusunan yang telah kami lakukan untuk membuat bank data pertanyaan untuk UKBI (Uji Kemampuan Bahasa Indonesia) dapat diusulkan dan nanti apabila sudah lengkap dapat dimanfaatkan untuk keperluan-keperluan itu tadi.

4. Penanya: Kamsinah, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Menurut saya, wadah pelestarian bahasa daerah adalah pengajaran bahasa daerah yang dilaksanakan di sekolah-sekolah, tetapi sulit untuk diterapkan apabila hal itu terjadi di kota-kota besar yang dihuni berbagai etnis yang berbeda-beda. Bagaimana cara memecahkan masalah itu, dalam arti anak-anak yang berasal dari etnis yang berbeda dan bahasa daerah yang berbeda dapat mengenali dan mempelajari bahasa daerahnya di kota-kota besar.

b. Jawaban:

Pengajaran bahasa daerah di kota besar menghadapi berbagai kesukaran karena berbagai hal, terutama bagi masyarakat di kota besar sebagaimana dikatakan tadi. Kasus ini sama dengan kasus di Jabotabek. Menurut wilayah administratif, Bogor, Tangerang, dan Bekasi adalah wilayah Jawa Barat. Berdasarkan itu, Jawa Barat identik dengan habitat untuk orang-orang Sunda. Oleh karena itu, bahasa daerah yang diajarkan di Botabek itu bahasa Sunda. Kenyataan kemajuan yang ada sudah berubah sedemikian rupa sehingga wilayah administratif itu tidak lagi identik sesuai dengan wilayah linguistik. Wilayah linguistiknya memperlihatkan bahwa Botabek ini sudah menjadi wilayah linguistik bahasa Indonesia yang kurang diperhatikan.

5. Penanya: Rahman Hakim, IKIP Bandung

a. Tanggapan:

Saya hanya menanggapi pernyataan yang dilontarkan Bapak Hasan Alwi. Pertama, minat mahasiswa untuk mempelajari bahasa daerah itu sangat kurang. Saya kira bukan persoalan minatnya yang kurang, Pak. Akan tetapi, ini semua disebabkan oleh kebijakan atau penentu kebijakan, khususnya melihat alumni-alumni dari pendidikan bahasa daerah seperti kurang mendapat perhatian, di IKIP sudah selama 3 tahun pendidikan bahasa daerah dihapuskan. Saya akan memberikan solusi bahwa sebenarnya jurusan bahasa daerah atau alumni pendidikan bahasa daerah bisa dicarikan semacam cara atau solusi. Misalnya, sebagai mediator antara pemerintah dan rakyat, dalam hal ini rakyat yang kurang paham dalam bahasa Indonesia. Ini salah satu bentuk kegiatan yang bisa diberikan kepada alumni pendidikan bahasa daerah untuk mengaktualisasikan ide

mereka. Saya mengharapkan Bapak dapat mengimbuu perguruan-perguruan tinggi di Indonesia yang menghapus bahasa daerah bisa membuka kembali jurusan-jurusan bahasa daerah itu. Bahasa daerah akan memperkaya bahasa Indonesia. Kekhawatiran saya adalah jangan sampai terlalu banyak istilah bahasa asing, misalnya istilah Inggris, dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Saya khawatir bahasa Indonesia akan menjadi keinggris-inggrisan.

b. Jawaban:

Soal minat dan kebijaksanaan dari jurusan-jurusan bahasa daerah alumninya diminta agar menjadi mediator pemerintah dan rakyat. Seorang sarjana tidak boleh berhenti mencari pekerjaan. Seorang sarjana harus kreatif, termasuk di dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Saya tidak tahu bagaimana kiatnya, itu kurang lebih dapat dikaitkan dengan soal yang saya sebutkan tadi. Dalam konteks ini saya ingin menyebutkan bahwa di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan ada satu tenaga yang disebut SP3K (Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan Bidang Kebudayaan). Saya kira cocok sekali sarjana-sarjana bahasa daerah yang sudah mencari pekerjaan itu pada tahun ini atau tahun depan mencoba melamar ke Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menjadi SP3K itu.

6. Penanya: D. Edi Subroto, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

a. Pertanyaan:

Pengajaran bahasa Jawa di sekolah itu tidak bisa diharapkan terlalu banyak. Di SMP gurunya tidak memiliki potensi dan siswa itu sudah tidak ada perhatian yang baik. Saya kira forum untuk pembinaan bahasa itu yang paling bagus adalah rumah tangga. Itu benteng pertama yang paling bagus. Jadi, orang tua memiliki kesadaran untuk mendidik putra-putra berbahasa Jawa. Contoh, di Jawa Tengah yayasan-yayasan pembina bahasa Jawa itu sangat efektif lewat Permadani. Pada waktu gubernurnya Pak Ismail ada semacam imbuhan ke perangkat desa untuk kursus bahasa Jawa lewat Permadani dan itu sangat efektif sekali. Sekarang hampir semua kabupaten itu penuh dengan kegiatan itu. Selain itu, lewat sarana kebudayaan, yaitu ada radio berbahasa daerah. Itu sangat efektif untuk membina bahasa daerah. Terakhir, subsidi-subsidi bagi penerbitan-penerbitan majalah bahasa Jawa itu sangat perlu kalau pemerintah mau membantu seperti *Mekarsari* dan *Penyebur Semangat* supaya masih bertahan.

b. Jawaban:

Pak Edi, tanggapan atau masukan tidak perlu dijawab karena itu pernyataan masukan.

7. **Penanya:** Nur Alam, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Sebagaimana penjelasan pertama, kata *lestari* itu sendiri yang berarti tetap, kekal, seperti keadaan semula. Hal itu kurang cocok untuk makalah ini karena bahasa daerah itu tidak akan mungkin seperti itu selamanya atau kekal sebagaimana apa adanya. Bagaimana upaya pemerintah, dalam hal ini lembaga bahasa, dalam rangka meningkatkan minat generasi muda dalam mempelajari bahasa daerah. Melihat kondisi yang ada, khususnya di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin, jatah kursi sangat minim, hanya 9 kursi. Jadi, bagaimana kalau jatah kursi itu ditambah.

b. **Jawaban:**

Makna *lestari* tidak cocok untuk makalah ini. Kalau Bapak menyimak apa yang ada pada bagian awal, Bapak tidak akan menanyakan soal ini karena kata *lestari* yang menjadi judul ini saya katakan dalam pengertian dinamis. Terakhir, soal bahasa daerah di Universitas Hasanuddin Ujung Pandang, kurang, di sini saya kembalikan langsung kepada kontingen Ujung Pandang yang boleh dikatakan kontingen mayoritas pada Kongres Bahasa Indonesia VII ini. Ada dari IKIP, ada dari Universitas Hasanuddin. Silakan direnung-renungkan kembali agar sumber daya manusia, semuanya dari Makassar, itu juga memperlihatkan segi-segi yang positif, termasuk dalam pelestarian bahasa daerah karena bagi saya pelestarian bahasa daerah merupakan bunga yang tumbuh dan berkembang di taman Persada Indonesia.

BAHASA DAERAH SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DAN SEBAGAI MATA PELAJARAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN

M. Husni Mu'adz
Universitas Mataram

1. Pengantar

Judul di atas terdiri atas dua bagian, bagian pertama berkaitan dengan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, dan bagian kedua berkaitan dengan bahasa daerah sebagai mata pelajaran. Kedua bagian ini memiliki kaitan, tetapi substansinya berbeda. Jika kita amati sepintas, bagian pertama terkesan mengada-ada karena selama ini bahasa Indonesia (BI) telah mendapatkan tempat sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan nasional. Keluhan-keluhan yang berkaitan dengan penggunaan BI tidak muncul, baik dari para pendidik, anak didik, maupun masyarakat secara umum. Sementara itu, jika kita mengandaikan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar, paling tidak akan ada 670 bahasa daerah yang akan digunakan dalam pendidikan nasional. Penggunaan bahasa daerah sebagai medium pengajaran dalam pendidikan nasional ini akan berdampak sangat luas, misalnya secara ekonomis kita harus mempersiapkan puluhan ribu guru yang menguasai bahasa-bahasa lokal dan menyiapkan ratusan ribu buku dalam bahasa daerah.

Berkaitan dengan bahasa daerah sebagai mata pelajaran, sejauh ini telah dilaksanakan pengajaran bahasa daerah di beberapa wilayah di Indonesia. Namun, implementasinya masih banyak dihadapkan pada berbagai kendala. Salah satu kendala, misalnya, berkaitan dengan belum adanya lembaga pendidikan formal untuk mencetak guru bahasa daerah yang profesional untuk pendidikan dasar dan menengah. Kondisi ini mengakibatkan banyak sekolah mengalami kesulitan dalam pengadaan guru bahasa daerah. Pemecahan yang ada biasanya bersifat darurat dan sementara.

Makalah ini mencoba memberikan argumen tentang pentingnya bahasa daerah sebagai media pengajaran untuk menjamin tidak terjadinya gangguan perkembangan kognitif anak dalam menyerap dan mencerna konsep-konsep dasar ilmu pengetahuan sebelum BI dikuasai secara memadai. Dengan demikian, diharapkan dalam perkembangannya bahasa daerah dapat berguna bukan saja sebagai medium pemerolehan konsep dasar pengetahuan semesta (*universal*), melainkan juga sebagai medium pelestarian dan penanaman kesadaran berbudaya bagi pemakainya.

2. Kondisi Bahasa-Bahasa di Dunia

Krauss (1992) mengelompokkan bahasa-bahasa yang ada di dunia menjadi tiga kategori, yaitu (1) bahasa yang tidak dikuasai dan digunakan oleh anak-anak dari penutur suatu bahasa (*Moribund*), (2) bahasa yang dalam satu dua generasi tidak lagi dikuasai dan dipelajari oleh keturunan penutur suatu bahasa (*endangered*), dan (3) bahasa yang termasuk kategori aman (*safe*). Kategorisasi ini dibuat berdasarkan atas gejala-gejala umum yang terjadi pada bahasa-bahasa yang ada di dunia, seperti jumlah penuturnya, prestise sosio-kultural, dan dukungan pemerintah terhadap pemakaiannya.

Berdasarkan data-data kebahasaan yang dimiliki, Krauss menyimpulkan bahwa, dari \pm 6.000 bahasa-bahasa di dunia (Grimes, 1988), kira-kira 3.000 di antaranya termasuk dalam kategori *moribund*. Sebagai contoh, di daerah Alaska dan Soviet Utara dari 50 bahasa yang ada, 45 bahasa (90%) dinyatakan sebagai bahasa yang berstatus *moribund*; di daerah Amerika Serikat dan Kanada, dari 187 bahasa 149 (80%) berstatus *moribund*, dan di Amerika Tengah dan Selatan dari 700 bahasa 160 (23%) dinyatakan *moribund*. Secara keseluruhan, dari total 937 bahasa yang ada di benua Amerika, 354 (38%) di antaranya telah berstatus *moribund*. Hal yang sama terjadi juga di Australia. Dari 250 bahasa masyarakat Aborigin, 225 (90%) juga dinyatakan *moribund*.

Timbulnya bahasa dengan status *moribund* seperti yang terdapat di negara-negara tersebut di atas sebagian besar akibat dominasi bahasa tertentu, seperti bahasa Inggris. Contoh yang nyata adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat pada awal abad ke-20. Karena adanya ancaman perang dari Jerman, Presiden Theodore Roosevelt menggalakkan kampanye anti pemakaian dwibahasa di Amerika Serikat. Siapa pun yang bermigrasi ke Amerika Serikat harus belajar bahasa Inggris selama lima tahun. Jika tidak memenuhi persyaratan ini, mereka akan dideportasi kembali ke negara asal (Freeman dan Freeman, 1992). Kebijakan ini melahirkan suatu konsensus nasional yang dikenal dengan istilah *melting pot*. Intinya adalah siapa pun yang datang ke Amerika Serikat harus membaur menjadi satu dengan kebudayaan Amerika (yang notabene kebudayaan masyarakat berbahasa Inggris). Secara tidak disadari pemaksaan penggunaan satu bahasa ini menyebabkan banyak imigran di Amerika Serikat tercerabut dari akar budaya dan bahasa ibu mereka. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika data bahasa yang berkategori *moribund* di wilayah Amerika Serikat cukup banyak jumlahnya.

Selanjutnya, Krauss memprediksikan bahwa bahasa-bahasa yang ada di dunia sekarang ini terdapat \pm 2.400 bahasa yang masuk dalam kategori *endangered*. Tempat berlangsungnya bahasa yang berstatus *endangered* tersebut, antara lain, Papua Nugini yang memiliki bahasa lokal sebanyak 850, Indonesia 670, Nigeria 410, India 380, Kamerun 270, Australia 250, Meksiko 240, Zaire 210, dan Brazil 210. Jika kita amati dengan seksama, bahasa *endangered* ini umumnya berkembang di negara-negara multibahasa. Timbulnya fenomena bahasa *endangered* ini mirip dengan fenomena bahasa *moribund*. Bahasa daerah pelan-pelan terdesak keberadaannya karena diberlakukannya kebijakan pemakaian bahasa nasional menyeluruh pada perikehidupan masyarakat. Sekalipun tidak ada anjuran yang ekstrem seperti kasus kebijakan Roosevelt di atas, akibat yang ditimbulkan oleh kebijakan penggunaan bahasa nasional dalam segala perikehidupan masyarakat adalah kurang lebih sama. Pemakai bahasa daerah menjadi berkurang jumlahnya karena generasi penerusnya tidak lagi menguasai dan mempelajari bahasa ibu mereka.

Menurut Krauss, di dunia sekarang ini terdapat sekitar 600 bahasa yang masih dalam kategori aman (*safe language*), atau 10% dari total bahasa yang ada. Bahasa-bahasa tersebut diperkirakan akan terus bertahan karena berfungsi sebagai bahasa resmi dan memiliki penutur lebih seratus ribu.

a. Berfungsi sebagai bahasa resmi

Berdasarkan data tahun 1990, dari 170 negara merdeka di dunia, 45 negara menggunakan bahasa Inggris, 30 negara berbahasa Prancis, 20 negara berbahasa Spanyol, 20 negara berbahasa Arab, 5 negara berbahasa Portugis, dan 50 negara menggunakan bahasa-bahasa lain.

b. Berpenutur asli lebih 100 ribu

Diperkirakan bahwa dari 600 bahasa yang berkategori *safe* sekitar 200 hingga 250 memiliki penutur asli berjumlah di atas 1 juta orang.

Implikasi dari uraian di atas adalah dalam abad ke-21 mendatang kita akan kehilangan 5.400 bahasa di dunia, dan ini berarti kita akan kehilangan salah satu alat ekspresi kultural yang paling penting dalam peradaban manusia. Berkenaan dengan itu, Hale (1992:36) dengan sangat menyentuh memberikan komentar sebagai berikut.

"There is a certain tragedy for the human purpose. The loss of local languages and of cultural systems that they express, has meant irretrievable loss of diverse and interesting intellectual wealth, the priceless products of human mental industry. The process of language loss is ongoing. Many linguistic field workers have had and will continue to have, the experience of bearing witness to the loss, for all time, of a language and of the cultural products which the language served to express for the intellectual nourishment of its speakers".

Trend global seperti digambarkan di atas akan dialami juga oleh bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia jika tidak ada usaha-usaha yang serius dari semua pihak untuk mempertahankan keberlangsungan hidup bahasa-bahasa daerah.

3. Kondisi Bahasa Daerah di Indonesia

Dengan mencermati kondisi global keberlangsungan keberadaan bahasa-bahasa di atas, pertanyaannya adalah *bagaimanakah masa depan bahasa-bahasa daerah di Indonesia?* Bahasa-bahasa daerah di Indonesia terdapat sekitar 670 bahasa (lihat, misalnya Grimes. 1988) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Dari jumlah keseluruhan tersebut, diperkirakan sekitar 50 bahasa yang bisa dimasukkan ke dalam kategori *safe*, sedangkan sisanya 620 bahasa daerah, dalam satu atau dua generasi mendatang diperkirakan akan menjadi bahasa yang berada dalam kategori *endangered* karena memiliki penutur di bawah 100.000 orang. Berdasarkan statistik tahun 1990, ada delapan bahasa daerah yang memiliki penutur lebih dari 2 juta orang, sedangkan 660 bahasa lainnya (tidak termasuk BI) memiliki penutur sekitar 27 juta, dengan rata-rata penutur asli kira-kira 40 ribu orang. Jika diasumsikan 50 bahasa daerah yang memiliki penutur di atas 100 ribu (*safe, limit*), saat ini bahasa daerah yang berjumlah 620 bahasa tersebut sedang berada dalam keadaan terancam (*threatened*).

TABEL 1:
BAHASA-BAHASA DI INDONESIA
YANG BERPENUTUR DI ATAS 2 JUTA

No.	Nama Bahasa	Jumlah Penutur	%
1.	Jawa	60.267.461	38,08
2.	Sunda	24.155.962	15,26
3.	Indonesia	24.042.010	15,19
4.	Madura	6.792.447	4,29
5.	Minang	3.527.726	2,23
6.	Bugis	3.228.742	2,04
7.	Batak	3.120.047	1,97
8.	Bali	2.589.256	1,64
9.	Banjar	2.755.337	1,74
10.	Bahasa-bahasa lain	27.070.883	17,11
11.	Tak terjawab	712.629	0,4
12.	Jumlah	158.262.639	100

Sumber: BPS tahun 1990

Sampai sekarang belum ada informasi tentang adanya bahasa daerah di Indonesia yang *moribund*, tetapi perkembangan ke arah itu tidak bisa dibendung apabila tidak ada usaha-usaha serius yang diambil untuk mencegahnya. Ada beberapa gejala yang mengindikasikan ke arah ini.

Pertama, sebagian besar dari ke-600-an bahasa daerah ini memiliki penutur asli yang sangat kecil, dan mereka umumnya tinggal di tempat-tempat yang terpencil. Tempat tinggal mereka yang terpencil itu tidak akan berpengaruh terhadap proses penghilangan bahasa ibu mereka, tetapi sebagai dampak iringan dari pembangunan nasional, proses mobilisasi, urbanisasi, transmigrasi, reforestrasi, dan sebagainya yang terus berlangsung sehingga kehidupan mereka sebagai kelompok yang sudah kecil itu tidak bisa dijamin akan utuh lagi seperti sebelumnya. Untuk seterusnya mereka akan hidup dengan kelompok-kelompok lebih kecil, atau bersama dengan kelompok-kelompok dari etnik lain dan bahasa yang berbeda. Sementara anak-anak mereka yang telah mendapatkan pendidikan dan telah menguasai bahasa Indonesia akan ke kota untuk meneruskan pendidikannya, dan seterusnya mereka akan bekerja di sana atau di tempat lain. Jarang mereka mau pulang ke tempat asalnya, apalagi setelah mereka

mendapatkan pendidikan yang cukup tinggi. Karena pendidikan, mereka secara kultural dan linguistik telah berubah, dan sudah tidak lagi bisa tinggal dan bekerja bersama kelompoknya. Inilah awal dari proses *moribund*.

Kedua, berbeda dengan bahasa-bahasa daerah yang memiliki pendukung banyak dan memiliki sejarah yang panjang, seperti bahasa Sunda atau bahasa Jawa, sebagian besar, dari ke-600 lebih bahasa daerah ini tidak memiliki tradisi bahasa tulis dan tidak memiliki tradisi berkomunikasi dalam bentuk tertulis. Oleh karena itu, sejarah dan nilai-nilai budaya mereka hanya terekam melalui komunikasi lisan. Akibatnya, pemahaman dan apresiasi terhadap bahasa mereka sendiri bervariasi dari satu generasi ke generasi dan dari orang ke orang. Kondisi inilah, antara lain, yang membuat anak-anak mereka kurang memiliki kebanggaan terhadap kultur dan bahasanya. Sementara sekolah, karena medium pengajarannya adalah BI, tidak memiliki desain khusus, kecuali di daerah-daerah tertentu, untuk memberikan bekal kepada anak-anak agar mereka mampu memberikan apresiasi secukupnya terhadap bahasa dan kultur mereka. Akibatnya, tanpa disadari sekolah telah membuat mereka menjadi semakin terisolasi, baik dari lingkungan sosio-kulturalnya sendiri, maupun dari lingkungan *mainstream* kultur yang belum sepenuhnya mereka kuasai. Melalui sekolah, anak-anak menjadi sadar bahwa bahasa dan kulturenya lebih inferior dan lebih rendah daripada bahasa nasional dan kultur modern yang didapatkan melalui bangku sekolah. Tidak heran apabila setelah selesai sekolah dan mendapatkan pekerjaan, mereka lebih bangga menggunakan bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya dalam berkomunikasi informal dengan teman-temannya sesama satu daerah. Jadi, menarik untuk dicatat bahwa kelompok yang paling banyak yang meninggalkan pemakaian bahasa ibunya adalah mereka yang telah mendapatkan pendidikan dengan baik!

Ketiga, yang membuat eksistensi bahasa-bahasa daerah menjadi semakin terancam ialah karena adanya dominasi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Hampir semua jenis komunikasi resmi, terlebih komunikasi massa, baik lisan, tertulis maupun melalui audio-visual menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia digunakan sebagai satu-satunya medium pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Penggunaan BI sebagai satu-satunya bahasa pengantar di sekolah berdampak negatif yang sangat luas terhadap perkembangan bahasa daerah. Misalnya, fungsi bahasa daerah telah direduksi menjadi sekadar bahasa komunikasi anak di rumah. Akibatnya, anak kurang menghargai bahasa ibunya karena bahasa daerahnya bukan bahasa yang secara fungsional digunakan di sekolah. Dampak negatif ini tidak saja dialami oleh bahasa-bahasa daerah yang penuturnya relatif kecil, tetapi juga oleh bahasa Jawa yang penuturnya paling besar di Indonesia. Sudaryanto (1991), misalnya, menyayangkan bahwa hingga kini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terlalu berkonsentrasi pada pembinaan BI yang berlebihan sehingga menyebabkan pembinaan dan perkembangan bahasa daerah menjadi terabaikan. Bahkan, pengajaran bahasa daerah tidak lagi menjadi pelajaran wajib di sekolah. Jika kondisi ini dibiarkan terus berlangsung, bukan tidak mungkin penggunaan bahasa Indonesia akan berdampak sama dengan dominasi bahasa Inggris terhadap bahasa-bahasa lokal, baik yang di Australia maupun yang di Amerika, seperti yang telah disinggung di atas.

Di samping karena pendidikan, perkawinan antaretnis juga berpengaruh terhadap menurunnya penggunaan bahasa daerah. *Trend* perkawinan antaretnis memberi peluang yang besar kepada pasangan yang berbeda latar belakang bahasa dan budaya untuk memilih bahasa nasional sebagai medium berkomunikasi. Sekalipun dalam kenyataannya banyak pasangan dari etnis yang berbeda saling bertukar pengetahuan tentang bahasa daerah masing-masing, umumnya mereka lebih suka menggunakan bahasa nasional sebagai medium berkomunikasi dalam berumah tangga sehari-hari. Setelah memiliki keturunan, kecenderungan menggunakan bahasa nasional sebagai bahasa ibu bagi anak-anak mereka menjadi semakin dominan.

4. Perlunya Bahasa Daerah sebagai Medium Pengajaran di Sekolah

Pasal 36 UUD 1945 menyebutkan bahwa bahasa nasional adalah bahasa Indonesia. Penjelasan Pasal 36 UUD 1945 adalah sebagai berikut.

Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, Madura dan sebagainya) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara, bahasa-bahasa itu pun merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

Pasal 36 terkait dengan Pasal 32 yang berbunyi, "*Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia*" serta penjelasannya sebagai berikut.

Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan aslinya yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya dan persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia.

Yang perlu dicermati dari pasal-pasal di atas ialah bahwa bahasa-bahasa daerah, sebagaimana BI, dipelihara oleh negara dan bahasa-bahasa daerah tersebut yang berfungsi sebagai alat ekspresi budaya yang sangat penting adalah bagian integral dari kebudayaan bangsa.

Dewasa ini, bahasa pengantar di sekolah dalam sistem pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia (BI). BI yang memiliki penutur kira-kira 25% dari jumlah penduduk Indonesia adalah bahasa resmi negara (Pasal 36 UUD 1945). Itulah sebabnya BI dijadikan sebagai satu-satunya medium pendidikan di sekolah. Selama ini belum pernah terdengar keberatan akan hak eksklusif penggunaan BI sebagai satu-satunya medium pengajaran di sekolah, baik secara akademis maupun politis. Kebijakan ini telah lama diterima sebagai sesuatu yang semestinya dan, oleh karena itu, tidak dapat diubah. Kebijakan BI sebagai satu-satunya bahasa pengantar di sekolah dalam sistem pendidikan nasional, menurut hemat penulis, perlu dikaji ulang karena ternyata secara akademis atau politis kurang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sejalan dengan spirit dari pasal-pasal di atas. Berikut akan dikemukakan beberapa argumen yang

mengharuskan adanya perubahan ke arah yang lebih bisa dipertanggungjawabkan.

Akibat dari kebijakan bahwa BI adalah satu-satunya bahasa yang dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah: semua materi pelajaran, soal-soal ujian medium komunikasi dalam PBM dan lain-lain menggunakan BI. Persoalan tidak akan muncul andaikata semua peserta didik, terutama yang di sekolah dasar, adalah penutur-penutur asli BI. Justru sebagian besar peserta didik (75%) memiliki bahasa daerah sendiri sebagai bahasa ibu, sedangkan BI masih merupakan bahasa asing bagi mereka, sekalipun di tempat-tempat tertentu melalui pergaulan sehari-hari dan melalui media televisi, radio, mereka dijejali (*immersed*) oleh BI. Agar penguasaan BI mereka setara dengan peserta didik penutur asli BI (BI sebagai bahasa pertama), yaitu memiliki tingkat penguasaan yang memungkinkan mereka bisa dengan mudah menangkap konsep-konsep pengetahuan diperlukan waktu kira-kira 5 sampai 7 tahun (Collier, 1989; Ramirez, 1991). Ini artinya sebagian besar murid SD di Indonesia, terutama di kelas-kelas awal, mempelajari konsep-konsep tentang Agama, Matematika, PPKN, IPS dan lain-lain melalui medium bahasa yang belum mereka kuasai. Di sinilah penggunaan BI yang secara eksklusif digunakan sebagai bahasa pengantar dan sebagai bahasa tulis dalam buku-buku pelajaran telah memberikan pelayanan yang kurang tepat (*deservice*) terhadap peserta didik. Akibatnya, perkembangan kognitif dan akademik anak yang jumlahnya jutaan itu dihambat (untuk tidak mengatakan dirusak) oleh BI. Ongkos kerugian tentu luar biasa mahalnyanya. Setiap tahun kita mendengar laporan bahwa hasil NEM siswa SD di perkotaan selalu lebih baik daripada mereka yang SD-nya di luar perkotaan. Penyebabnya ialah, di samping sebab-sebab lainnya, murid-murid yang dari SD perkotaan adalah mereka penutur-penutur asli BI, atau setidaknya yang telah menjadi atau telah mendekati dwibahasawan. Perbedaan prestasi, betapapun mencoloknya dari kedua kelompok peserta didik ini tidaklah mengejutkan sebab kelompok yang satu setiap hari harus berjuang mempelajari BI dan pada saat yang sama mereka harus mempelajari materi pelajarannya, sedangkan kelompok yang lainnya tidak lagi disibukkan dengan mempelajari BI sehingga mereka dapat langsung mempelajari materi pelajarannya.

Beberapa hasil penelitian di bidang pemerolehan bahasa kedua merekomendasikan bahwa proses pembelajaran konsep pengetahuan seyogyanya dilaksanakan dalam bahasa ibu atau bahasa pertama. Bahasa ibu adalah bahasa yang paling ideal untuk membangun dasar-dasar konsep pengetahuan anak untuk mengenal pandangan dunia (*world view*). Jika fondasi konsep pengetahuan anak sudah terbentuk sedemikian kuat dalam bahasa pertama, maka pemahaman konsep yang sama yang terekspresikan dalam bahasa kedua akan lebih mudah mereka ikuti, dan ini justru mempermudah mereka mempelajari bahasa kedua (Cummins, 1989; Krashen and Biber, 1988). Oleh karena itu, bahasa pertama dianjurkan digunakan sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan sebelum bahasa kedua dikuasai dengan baik oleh siswa.

Berdasarkan temuan-temuan penelitian di bidang kedwibahasaan di Amerika Serikat, Freeman dan Freeman (1992) mendapati bahwa siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang secara ketat menerapkan bahasa Inggris (bahasa kedua) sebagai satu-satunya medium pengantar kegiatan belajar-mengajar di kelas, sering tertinggal dalam

mata pelajaran lain, seperti Matematika, IPS, IPA, dan sejenisnya. Sebaliknya, siswa yang belajar di sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar cenderung tidak mendapatkan kesulitan dalam mengikuti kegiatan akademis yang diberikan dalam bahasa Inggris. Sebuah studi *longitudinal* di Amerika (Ramirez, 1991) yang melibatkan 750 kelas dengan 2.000 siswa juga memberikan hasil yang sama. Dalam studi ini siswa dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar pembelajaran. Kelompok kedua menggunakan bahasa ibu (bukan bahasa Inggris) sebagai bahasa pengantar selama dua sampai tiga tahun, sebelum digunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar, sedangkan kelompok terakhir menggunakan bahasa ibu sampai enam tahun, sebelum diberikan pengajaran dengan menggunakan bahasa Inggris. Beberapa hasil menarik dari studi ini adalah sebagai berikut.

- a. Perkembangan penguasaan bahasa Inggris sebagai bahasa kedua tidak terhambat sekalipun medium pembelajaran menggunakan bahasa ibu.
- b. Penguasaan bahasa Inggris memakan waktu lebih dari 6 tahun oleh ketiga kelompok siswa di atas. Artinya, penguasaan bahasa Inggris secara fasih diperlukan waktu belajar yang sama (6 tahun lebih) oleh kelompok satu, dua, dan tiga.
- c. Kelompok yang menggunakan bahasa ibu sebagai medium pengajaran rata-rata berhasil dalam mata pelajaran mereka, tetapi akan mengalami kemunduran bila medium pengajarannya terlalu cepat menggunakan bahasa Inggris penuh.
- d. Siswa dari kelompok kedua dan ketiga menunjukkan kemajuan lebih tinggi dalam bidang bahasa Inggris, membaca, dan matematika, dibandingkan dengan siswa dari kelompok pertama, yaitu yang medium pengajarannya menggunakan bahasa Inggris penuh.
- e. Bila bahasa ibu digunakan sebagai medium pengajaran, orang tua siswa lebih banyak terlibat dalam membantu sekolah anaknya.

Berdasarkan informasi di atas, tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali menggunakan bahasa-bahasa daerah sebagai medium pembelajaran di sekolah-sekolah dasar, terutama pada 4 tahun pertama, sedangkan pada dua tahun berikutnya BI dan bahasa ibu digunakan secara bersama-sama. Sementara itu, BI digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah yang memiliki penutur asli BI, yang umumnya berada di perkotaan. Ini harus dilakukan untuk menyelamatkan perkembangan kognitif dan akademik peserta didik yang selama ini secara tidak disadari telah terhambat akibat pemaksaan penggunaan BI sebagai medium pembelajaran di semua sekolah, tanpa melihat latar bahasa ibu dari peserta didik. Yang perlu digarisbawahi adalah penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar di sekolah dasar, seperti ditunjukkan di atas, tidak akan menghambat penguasaan anak terhadap BI. Jadi, penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar sama sekali tidak akan mengancam posisi BI sebagai bahasa nasional yang harus dikuasai oleh setiap warga negara Indonesia.

Di samping alasan-alasan empiris, seperti yang telah disinggung di atas, ada beberapa alasan penting lain tentang perlunya bahasa-bahasa daerah digunakan sebagai medium pembelajaran di dalam sistem pendidikan nasional. *Pertama*, sebagai wahana pembentukan *self-image* yang positif bagi siswa penutur asli bahasa daerah. Dengan

digunakannya bahasa daerah siswa sebagai bahasa pengantar pengajaran di sekolahnya, akan muncul rasa kebanggaan dan kepercayaan diri anak. Mereka akan merasa bahwa bahasa dan budayanya dihargai di sekolah. Oleh karena itu, secara psikologis ia merasa aman berada di lingkungan sekolah. Munculnya rasa percaya diri akibat penghargaan yang diberikan terhadap bahasa dan budayanya merupakan salah satu syarat penting, kalau bukan yang terpenting, bagi siswa untuk mencapai kesuksesan akademik di sekolahnya. Lucas dkk. (1990) dalam studinya tentang enam SMA yang berprestasi yang memiliki program kedwibahasaan mencatat bahwa kesamaan yang paling menonjol dari ke-6 sekolah tersebut ialah adanya penghargaan yang tinggi terhadap bahasa ibu dan kultur anak didik. Para peneliti mencatat 8 cara sekolah tersebut memberikan perhatian terhadap bahasa dan kultur siswa:

- a. *treating students as individuals, not as members of a group;*
- b. *learning about students' cultures;*
- c. *learning students' languages;*
- d. *hiring bilingual staff similar cultural backgrounds to the students;*
- e. *encouraging students to develop their primary language skills;*
- f. *allowing students to speak their primary languages except when English development is the focus of instruction or interactions;*
- g. *offering advanced as well as lower division content courses in the students' primary languages;*
- h. *instituting extracurricular activities that will attract students.*

Sebaliknya, apabila sekolah tidak memberikan kebanggaan akan bahasa ibu dan kultur murid, anak mungkin akan kehilangan kepercayaan dirinya (Lucas, 1981). Hal ini terjadi karena ketika siswa memulai kegiatan akademik di sekolahnya, mereka tidak merasa memiliki persiapan sama sekali, baik secara akademik maupun kultural, sementara dalam waktu yang bersamaan mereka harus berjuang untuk memahami isi dari setiap mata pelajaran dengan bahasa yang belum mereka kuasai dengan baik. Keadaan ini membawa akibat pada munculnya keputusasaan karena beban yang terlalu berat secara akademis dan dalam waktu yang bersamaan mereka harus berjuang menguasai bahasa Indonesia.

Alasan lain pentingnya bahasa daerah harus dijadikan bahasa pengantar di sekolah adalah agar bahasa-bahasa daerah tidak mengalami kepunahan. Dengan digunakan sebagai bahasa pengantar, kosakata dari bahasa asing yang berkaitan dengan konsep-konsep serta terminologi dalam mata-mata pelajaran tertentu lambat laun akan diadopsi ke dalam bahasa daerah. Ini menyebabkan kosakata bahasa daerah menjadi kaya dan semakin mampu mengakomodasi konsep-konsep ilmu pengetahuan. Beberapa contoh yang dapat diketengahkan di sini adalah masuknya kosakata bahasa Arab seperti *haram, halal, subhat, nyalat jenazah, nikmat, berjemaah, telak seke', nikah, bersedekah, jekat* (bahasa Sasak), *Gusti Allah*, dan *kanjeng Nabi* (bahasa Jawa) ke dalam bahasa daerah sebagai akibat pengajaran agama dengan menggunakan bahasa daerah.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar akan membiasakan anak menggunakan bahasa daerah dalam mengomunikasikan berbagai masalah yang ber-

kaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (mata pelajaran mereka). Kebiasaan ini akan memudahkan proses pengadopsian berbagai istilah ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam bahasa daerah dan akan lebih mudah lagi apalagi mata pelajaran tersebut ditulis dalam bahasa daerah. Proses pengadopsian ini akan berlanjut terus ketika tingkat pendidikan mereka semakin tinggi karena mereka terbiasa dan tidak memiliki rasa canggung untuk menggunakan bahasa daerah.

Penggunaan bahasa daerah sebagai bahasa pengantar pengajaran akan memberi dampak pada munculnya apresiasi dan kebanggaan anak terhadap bahasa dan budayanya. Dengan demikian, mereka diharapkan akan semakin terdorong untuk mempelajari budayanya dengan lebih dalam sehingga mereka mengetahui berbagai keunikan, kearifan lokal yang dimiliki, dan nilai-nilai universal yang terkandung dalam budayanya. Pemahaman terhadap kultur lokalnya akan membantu mereka mempelajari kultur nasional karena mereka memiliki pijakan kultur yang kuat sehingga tidak tercerabut dari akar budayanya (*uprooted*).

5. Bahasa Daerah sebagai Mata Pelajaran

Sering kita dengar keluhan tentang banyaknya mata pelajaran di sekolah sehingga ada usul agar beberapa mata pelajaran yang kurang penting dihilangkan. Dengan demikian, para murid memiliki lebih banyak waktu untuk mempelajari mata pelajaran pokok. Apabila usul ini diterima, akan semakin kecil kemungkinan bahasa daerah diterima sebagai mata pelajaran, apalagi sebagai mata pelajaran pokok. Hingga kini belum banyak dikemukakan argumen tentang pentingnya bahasa daerah sebagai mata pelajaran yang dijadikan bahan masukan bagi pembuat kebijakan pendidikan. Oleh karena itu, argumen-argumen yang relevan perlu diinventarisasi terlebih dahulu sebelum kita berbicara tentang *apa* dan *bagaimana* dari bahasa daerah sebagai mata pelajaran. Berikut akan dikemukakan beberapa dari argumen tersebut.

Pengajaran bahasa daerah penting dan perlu karena beberapa alasan. Pertama, UUD menjamin keberlangsungan hidup dari bahasa-bahasa daerah. Bahasa daerah tanpa dijadikan mata pelajaran di sekolah akan mengalami nasib yang sama dengan bahasa-bahasa lokal yang ada di Amerika atau Australia, yang banyak mengalami *moribund* akibat dominasi bahasa Inggris. Para murid harus melihat bahasa daerah mereka sama pentingnya dengan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah harus menjadi mata pelajaran di sekolah. Jadi, dimasukkannya bahasa daerah sebagai mata pelajaran di sekolah harus dilihat sebagai realisasi dari jaminan yang diberikan oleh konstitusi. Kedua, motivasi siswa untuk mempelajari bahasa, sejarah, dan budaya lokal mereka diharapkan akan muncul dengan dimasukkannya bahasa mereka sebagai mata pelajaran di sekolah. Dengan memasukkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran (dan juga sebagai bahasa pengantar) berarti pemerintah telah mendekatkan institusi pendidikan ke dalam suasana kehidupan sosio-kultural anak didik, dan ini berarti secara formal sekolah memberikan pengakuan tentang pentingnya bahasa dan kultur anak didik. Diharapkan siswa-siswa tersebut nantinya bisa berfungsi sebagai agen penyelamat dan pengembang bahasa dan kultur mereka sendiri. Tanpa peran aktif dari mereka sebagai generasi penerus, kebijakan pengembangan bahasa-bahasa dan budaya

daerah sulit bisa berhasil dengan baik. Dengan kata lain, para siswa adalah aset dan *stakeholders* budaya daerah yang sangat penting.

Alasan ketiga berkaitan dengan klaim bahwa penguasaan baca tulis dengan baik dalam bahasa ibu mempercepat pertumbuhan kognisi dan intelektualitas anak. Swain dkk. (1990) melaporkan hasil studi yang membandingkan kemampuan dua kelompok dwibahasawan. Kelompok pertama adalah mereka yang belajar membaca dengan menggunakan bahasa ibu, sedangkan kelompok kedua belajar membaca dengan bahasa kedua. Ketika kedua kelompok dwibahasawan ini mempelajari bahasa ketiga, ternyata kelompok pertama yang belajar membaca dengan bahasa ibu lebih cepat belajar membaca dalam bahasa ketiga dibandingkan dengan kelompok kedua. Studi ini memberikan bukti empiris tentang pentingnya pengajaran bahasa daerah. Keberadaannya sebagai mata pelajaran membantu perkembangan intelektualitas anak didik.

Tujuan pengajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran perlu dirancang sedemikian rupa agar sesuai dengan alasan-alasan di atas. *Pertama*, pengajaran bahasa daerah bertujuan untuk meningkatkan penguasaan bahasa daerah anak didik, baik lisan maupun tulis. *Kedua*, pengajaran bahasa daerah harus dilihat sebagai pintu masuk bagi siswa untuk tujuan-tujuan yang lebih luas, yaitu untuk mempelajari sejarah dan budaya yang diekspresikan melalui bahasa daerah tersebut. Implikasinya ialah materi pengajaran bahasa daerah tidak saja berisikan informasi bahan-bahan kebahasaan, tetapi juga, dan ini yang lebih penting, berisikan materi/teks tentang sejarah dan budaya lokal. Semua keterampilan kebahasaan yang akan diajarkan, terutama membaca dan menulis haruslah merujuk secara ekstensif pada bahan-bahan lokal tersebut.

Dari penjelasan di atas, perlu dibedakan dua macam pengajaran bahasa daerah, yaitu pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa ibu atau sebagai bahasa pertama, dan pengajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua. Isi pelajaran dari kedua macam pengajaran tersebut berbeda antara satu dan lainnya. Sebagai bahasa ibu, isi pelajaran bahasa daerah tidak saja berkaitan dengan keterampilan berbahasa, tetapi juga berkaitan dengan pengajaran sejarah dan budaya setempat, sebagaimana telah disinggung di atas. Sementara itu, isi pelajaran pada bahasa kedua lebih difokuskan pada keterampilan menggunakan bahasa daerah untuk kegunaan praktis (komunikasi). Mata pelajaran bahasa daerah sebagai bahasa kedua umumnya cocok untuk sekolah-sekolah yang ada di perkotaan karena pada umumnya siswa yang ada di kota menggunakan BI atau bahasa daerah lain sebagai bahasa ibu. Dewasa ini penyajian mata pelajaran bahasa daerah sebagai muatan lokal di beberapa tempat belum mengacu pada perbedaan di atas. Materi pelajaran yang sama diberikan kepada semua siswa, tanpa melihat latar belakang bahasa ibu para siswa.

Bahasa daerah sebagai mata pelajaran tidak dimasukkan di dalam kurikulum 1994, berbeda dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, yang jumlah jam belajar per minggu hampir paling tinggi dibandingkan mata-mata pelajaran yang lainnya. Yang ada dalam kurikulum adalah muatan lokal yang berisi mata pelajaran sesuai dengan kebutuhan sekolah di provinsi masing-masing. Di beberapa daerah, muatan lokal diisi dengan mata pelajaran bahasa daerah. Jadi, dalam kurikulum 1994, peluang untuk memasukkan bahasa daerah sebagai mata pelajaran hanya bisa melalui muatan lokal yang

jam pelajarannya bervariasi sesuai dengan kelasnya. Untuk kelas 1 dan 2, jam pelajaran muatan lokal adalah 2 jam, sedangkan kelas 3 sebanyak 4 jam, kelas 4 sebanyak 5 jam, serta kelas 5 dan 6 masing-masing 7 jam. Pada pendidikan lanjutan pertama, pelajaran muatan lokal diberikan sebanyak 6 jam dalam seminggu mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 3. Dengan struktur kurikulum yang ada sekarang peluang satu-satunya kita miliki untuk pengajaran bahasa daerah sebagai mata pelajaran hanyalah melalui muatan lokal. Yang menjadi masalah ialah bagaimana agar semua sekolah di seluruh Indonesia mengisi pelajaran muatan lokal dengan pelajaran bahasa daerah.

6. Apa yang Harus Diperbuat?

Agar khazanah intelektual dan kultural daerah bisa dilestarikan, bahasa-bahasa daerah sebagai alat ekspresi utamanya perlu mendapat perhatian khusus. *Political will* dari pemerintah sudah ada, tetapi samar-samar. Hingga kini langkah-langkah serius ke arah itu belum ada, kecuali dalam bentuk retorika-retorika politis semata. Agaknya kebijakan kebudayaan, walaupun ada, sama dengan kebijakan-kebijakan yang ada di bidang politik dan ekonomi: *sentralisasi!*. Hak-hak dan otonomi daerah selalu dinomorduakan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan bahasa dan budaya daerah. Oleh karena itu, yang penting sekarang ini adalah langkah-langkah konkret baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Langkah-langkah awal yang bisa ditempuh, antara lain pembentukan semacam *multi-lingual program* yang terdiri dari para ahli bahasa, ahli sejarah lokal, budayawan, sastrawan, dan lainnya yang bertujuan untuk:

- a. mendokumentasikan sistem internal bahasa-bahasa daerah dan khazanah intelektual dan kultural yang ada;
- b. menyiapkan kurikulum (muatan lokal) bahasa daerah, baik bahasa daerah sebagai bahasa pertama maupun bahasa daerah sebagai bahasa kedua;
- c. mencari upaya untuk menumbuhkan kebanggaan terhadap bahasa dan kebudayaan daerah;
- d. membuat buku-buku bacaan (cerita, teks) dalam bahasa daerah untuk masyarakat luas, terutama untuk anak-anak; buku-buku tersebut berisi uraian tentang sejarah lokal, kearifan-kearifan lokal, dan keunikan-keunikan lainnya yang merupakan ciri kekayaan dan kebinekaan bangsa;
- e. memberi peluang siswa memahami buku-buku bacaan tersebut sebelum mereka berkenalan dengan *the mainstream cultures*, dan berfungsi untuk mempertahankan kontak dengan nilai-nilai dan tradisi masyarakatnya (*the best way to learn the best of the cultures*);
- f. mengangkat dan memperhatikan khazanah kultural yang memiliki nilai-nilai universal, seperti kejujuran, keagungan, keadilan, kebenaran, dan kerja keras, bukan nilai-nilai lokal yang feodalistis yang justru dapat merendahkan martabat orang atau kelompok lain;
- g. merancang cara menanamkan nilai-nilai di atas agar anak-anak mendapatkan yang terbaik dari kultur/budaya masyarakatnya sehingga tidak menjadi *uprooted* atau fanatik. Untuk itu, keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan.

Daftar Pustaka

- Biro Pusat Statistik. 1990. *Sensus Penduduk*. 1990. Jakarta.
- Brandt, Elizabeth, 1988. "Applied Linguistics Anthropology and American Indian Language Renewal". *Human Organization* 47.322--329.
- Collier, V. 1998. "How Long a Syntactic Research or Academic Achievement in a Second Long. *TESOL Quarterly*, V. 23:509--531.
- Craig, Colette, 1992. "A Constitutional Response to Language Endangerment: The Case of Nicaragua." *Language*, LXVIII. 1:17--24.
- Crowford. 1989. *Bilingual Education: History, Politics, Theory and Practice*. Trenton. New Jersey Crane.
- Cummins, J. 1981. "The Role of Primary Language Development in Promoting Educational Success for Language Minority Students in Schooling and Language Minority Students: a Theoretical Framework". 3--49. LA California: Evaluation, Dessimination and Assessment Center, Cal. State University.
- . 1989. "Empowering Minority Students Sacramento CABE; The Sanitized Curriculum: Educational Disempowerment in a Nation at Risk." In *Richness in Writing: Empowering ESL Students: D Junction and D Roen*. (Ed.). 19--38 NY. Longman.
- England. Nora C. 1992. "Doing Mayan linguistics in Guatemala". *Language*, LXVIII. 1:29--35.
- Freeman, Yvonne S and Freeman, David E. 1992. *Whole Language for Second Language Learners*. Portsmouth, NH: Heineman.
- Grimes, Barbara F. (Ed.). 1988. *Ethnologue: Languages of the World, 11th edn*. Dallas: Summer Institute of Linguistics.
- Hale, Kenneth. 1972. "Some Questions about Anthropological: The Role of Native Knowledge". *Reinventing Anthropology*. Im Dell Hymes (Ed.). 382--397. New York: Vantage Books.
- . 1992. "Language Endangerment and the Human Value of Linguistics Diversity". *Language*. LXVIII. 1:35--41.
- Jeanne, La Verne Masayeva. 1992. "An Institutional Response to Language Endangerment: A Proposal for a Native American Language Center". *Language*. LXVIII. 1:24--28.
- Kanwil Depdikbud Jawa Timur, 1996. *Kongres Bahasa Jawa II, 22--26 Oktober 1996 Batu, Malang, Jawa Timur; Buku II Makalah Bahasa*. Pemerintahan Prop. Dati I Jawa Timur, Surabaya: CV Perintis.
- Krauss, Michael, 1992. "The World's Languages in Crisis". *Language*. LXVIII. 1:4--10.
- Lucas, T, R. Hendze and R. Donato, 1990. "Promoting the Success of Latino Language Minority, Students: an Exploratory Study of 6 High Schools Harvard". *Education Review* LX. 3:315--340.
- O'Valley, J. Michael and Chamot, Anna Uhl. 1990. *Learning Strategies in Second*

- Language Acquisition*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Oxford, Rebecca L. 1990. *Language Learning Strategies*. Massachusetts: Heinle and Heinle Publishers.
- Ruhlen, Merritt. 1987. "A Guide to the World Languages" *Classification*. I. Stanford: Stanford University Press.
- Sudaryanto. 1991. "Bahasa Jawa: Prospeknya dalam Tegangan antara Pesimisme dan Optimisme". Dalam Sudaryanto (Ed.). 1991. *Prosiding Kongres Bahasa Jawa I 1991*. Surakarta: Harapan Masa.
- Swain, M., S. Lapkin., S Rowen and D. Hard. 1990. "The Role of Mother Tongue Literacy in Third Language Learning". *Language, Culture and Curriculum*. V. 3:65-81.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Watahomigie, Lucille J., and Akira Yamamoto. 1983. *Gigak Vo:jka (Walk strong!): Yuman Poetry with Morphological Analysis*. Banning, CA: Malki Museum Press.
- , 1987. "Linguistics in Action: The Hualapal Bilingual/Bicultural Education Program". *Collaborative research and social change: Applied Anthropology in action*. Dalam Donald D. Stull and Jean J. Sehensul. (Ed.). 71--98. Boulder. CO: Westview Press.
- , ---- (Peach Springs, Arizona) and Yamamoto, Akira Y. 1983. "Local Reaction to Perceived Language Decline". *Language*. LXVIII. 1:10--17.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A-10
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.50--1540
Judul Makalah	: Bahasa Daerah sebagai Bahasa Pengantar dan sebagai Mata Peajaran dalam Sistem Pendidikan
Penyaji	: Husni Mu'adz
Pemandu	: Mansoer Pateda
Pencatat	: a. Juhariah b. I Wayan Tama
Peserta	: 60 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: A. Chaedar Alwasillah, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Apa yang disampaikan Bapak itu memang baik, tetapi saya melihatnya dari kasus dalam pendidikan. Apabila gagasan itu dilaksanakan, kendalanya adalah (1) dalam penyebaran guru-guru kita kadang-kadang lulusan IKIP Bandung, misalnya ditempatkan di mana saja. Jadi, kesulitannya adalah bakal ditemukannya guru-guru yang tidak menguasai bahasa daerah; (2) ada kendala lain apabila kebijakan ini ditempuh, biayanya sangat mahal. Sekarang pengadaan buku ajar saja begitu repot. Dapat dibayangkan apabila kebijaksanaan ini akan didukung dan penyediaan buku ajar yang harus disampaikan menggunakan bahasa daerah masing-masing akan mahal sekali karena tidak efisien secara ekonomis. Kemudian, ada lagi satu fenomena ketika kebijaksanaan muatan lokal diajarkan, beberapa daerah tidak mau menerima. Kalau di Jawa Barat, itu ada sekolah yang menawarkan bahasa Sunda, tetapi tidak salah. Di Padang malah tidak ada mata pelajaran muatan lokal bahasa Minangkabau. Maaf kalau saya salah. Di Minang ini salah satu masalah yang tampak di lapangan. Memang yang Bapak sarankan itu sesuai dengan kebijakan para ahli perencana bahasa Unesco tahun 1950-an, tetapi itu dalam konteks lain. Di negara-negara lain bekas jajahan kolonial Prancis kurang lebih ke sana rujukannya, tetapi sekarang kalau diaplikasikan ke negara kita agak repot juga.

b. Jawaban

Pak Chaidar khawatir akan adanya biaya yang terlalu mahal, belum lagi dikaitkan dengan guru, dan sebagainya. Mana yang lebih mahal kita paksakan bahasa Indonesia diajarkan sebagai media pengajaran sekarang dan otak Indonesia terhambat. Dengan *cost psikologis* ke depan kita tidak tahu dan sekarang tidak tahu itu dosa. Kalau ini asumsi sebuah penelitian, cuma sekarang ini mengumpulkan sejumlah uang untuk menyediakan bahan-bahan seperti itu. Itu pun asumsinya kalau sekaligus berubah semua. Kita bisa buat

skala prioritas. Kita juga melihat mana bahasa-bahasa yang dianggap prioritas perlu menggunakan bahasa itu. Akan tetapi, kalau *status quo* seperti sekarang dan tidak tahu bahwa kita sedang merusak perkembangan intelektualitas anak karena terlalu awal kita paksakan menggunakan bahasa Indonesia yang belum mereka kuasai dan kita berdosa. Dan, kita di sini mengiakan itu sebagai rekomendasi. Makanya, untuk amannya mungkin perlu diadakan penelitian lebih saksama kalau memang secara akademis memang begitu. Kita tidak punya pilihan lain, apa pun konsekuensinya, tetapi yang kita bicarakan ini adalah generasi sebagian besar bangsa Indonesia juga terkait dengan itu. Itu bukan masalah bahasa Indonesia ini sehingga merusak perkembangan intelektual anak didik level pendidikan dasar. Hal itu coba bisa kita bayangkan, mereka yang bahasa ibunya bahasa Indonesia, begitu diajarkan konsep-konsep dalam mata pelajaran yang berbeda-beda, ia tidak lagi berpikir dalam bahasanya, ia langsung ke isinya. Sementara anak yang sama yang berbahasa ibunya lain di tempat lain, dua hal yang harus ia lakukan, yaitu berusaha menguasai bahasa Indonesia dan konsep mata pelajaran. Itu tidak adil sama sekali. Jadi, kalau kita mengatakan perlu menumbuhkan kebanggaan bahasa daerah dan kultur daerah, bukan dalam arti menghilangkan bahasa nasional. Untuk mereka lebih siap masuk media kultur nasional yang selama ini terlalu cepat, mereka kalau kembali ke kultur berbeda, kultur Indonesia sendiri tidak jelas. Selama 32 tahun hasil pembangunan ini, ya seperti ini. Belum banyak *wisdom* nasional yang kita miliki, yang banyak adalah *wisdom* lokal, dari pancaran, dan ini harus dihayati oleh anak melalui bahasa dan kulturnya. Jadi, ada yang kita miliki sebenarnya yang harus kita pertahankan dalam rangka memperkaya sarana nasional. Memang akan mahal, tetapi tidak akan semahal harga uang yang dipinjam oleh bank yang tidak bisa dikembalikan sekarang, yang 140 triliun itu.

2. **Penanya:** Sry Satria Tjatur Wisnu Sasangka, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Ada kasus yang menarik yang pernah saya amati di Kabupaten Brebes dan Indramayu. Di daerah itu ada dua bahasa yang dipakai, tetapi yang diajarkan di Brebes itu bahasa Jawa, padahal separuh wilayah berbahasa Sunda, sedangkan di Indramayu masyarakatnya kebanyakan berbahasa Jawa, tetapi pengajaran yang diberikan bahasa Sunda. Di Cirebon hal itu diserahkan kepada guru sehingga bahasa yang diajarkan "gado-gado". Sebagai akibatnya, materi yang diajarkan tidak kena. Bagaimana menurut Bapak?

b. **Jawaban**

Yang berkaitan dengan pertanyaan kedua mengenai pilihan mana tadi itu, harus dilihat secara spesifik tidak dapat dijawab secara umum. Kita juga belum tahu materinya apa yang di Cirebon, yang bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Mungkin

tingkat yang menilai itu harus pada tingkat yang lebih teknis untuk melihat mana yang dimaksud. Nah ini, saya presentasikan dengan agak emosional dengan nada sedemikian rupa sehingga jangan sampai kita terlalu lupa terbuai dengan pikiran-pikiran yang serba nasional, serta sentralistik dengan melupakan 70% bangsa kita ini terutama generasi mudanya terhambat secara tidak langsung oleh kampanye kita tentang bahasa Indonesia. Jadi, hal itu mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita semua.

3. Penanya: Elfrida W.S. Sumampouw, Universitas Tadulako, Palu

a. Pertanyaan:

Saya khawatir dengan ucapan Bapak, tetapi tentunya setuju juga. Bapak mengatakan bahwa kalau bahasa daerah itu tidak diajarkan dari mula, khawatir ada yang hilang. Memang kalau mengenai kebanggaan, barangkali, lebih baik, menurut saya, kalau kita membanggakan salah satu. Kalau kita mendidik anak-anak dengan menggunakan bahasa daerah, barangkali kita akan kehilangan kebanggaan bahasa Indonesia. Jadi, memang harus ada salah satu yang hilang, sedangkan pembangunan bangsa, bangsa Indonesia dengan bahasa Indonesia. Jadi, kalau memang bahasa daerah itu hilang, biarlah itu bergantung kepada penuturnya, jangan kita paksakan. Yang perlu kita paksakan adalah bahasa Indonesia karena hal itu merupakan pembangunan jangka panjang. Kita akan menuju ke nasional Indonesia, satu bahasa bahasa Indonesia, satu bangsa bangsa Indonesia. Bagaimana Bapak akan mempertanggungjawabkan hal itu kalau pada akhirnya bahasa daerah sudah maju, tetapi bahasa Indonesia dengan identitas diri Indonesia itu tenggelam?

b. Jawaban

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis)

BAHASA ASING SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DALAM SISTEM PENDIDIKAN

Soenjono Dardjowidjojo
Unika Atma Jaya

1. Pengantar

Dari segi sosiopolitik kehidupan bangsa kita, topik yang diminta oleh Panitia untuk saya tulis dalam Kongres ini sangat menarik karena adanya dua hal yang sangat penting: (a) topik seperti ini belum pernah dijadikan bahan kongres sejak Kongres pertama di Solo pada tahun 1938, dan (b) pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pengantar melanggar undang-undang pendidikan kita. Dari enam kongres yang kita selenggarakan (1938, 1954, 1978, 1983, 1988, dan 1993) topik mengenai pemakaian bahasa asing, apalagi sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kita, tidak pernah dipilih dan tentunya dengan alasan yang tepat, yakni bahwa sampai dengan waktu itu tidak pernah terpikir adanya kebutuhan untuk memakai bahasa asing sebagai bahasa pengantar. Perkembangan politik kebahasaan bahkan selalu diarahkan untuk lebih memperkuat bahasa Indonesia (BI) sebagai bahasa nasional yang sangat diperlukan untuk penyatuan dan kesatuan bangsa. Setelah BI berfungsi dengan baik, muncullah keputusan Mendikbud pada bulan Januari 1998 yang mengizinkan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dipakai sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.

Keputusan ini tentunya mempunyai alasan yang kuat karena di balik pemikiran itu sebenarnya ada undang-undang kita yang melarang pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan kita. Pada pasal 41, UU RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa "bahasa pengantar dalam pendidikan nasional adalah bahasa Indonesia." Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar "sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu" (Pasal 42). Dalam PP No. 30 tahun 1990 mengenai Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa pemakaian bahasa asing sebagai bahasa pengantar dibenarkan hanya pada jurusan bahasa asing.

Salah satu sebab dari "keberanian" untuk memakai bahasa asing sebagai bahasa pengantar ini tampaknya berkaitan dengan munculnya era globalisasi yang memerlukan suatu bahasa yang dapat dipakai sebagai wahana untuk berkomunikasi antarbangsa. Dari bahasa-bahasa modern yang ada, tidak dapat dimungkiri bahwa bahasa Inggris tampaknya akan "berlanjut menjadi bahasa komunikasi luas (*language of wider communication*) yang paling berguna" (Conrad, 1996:17) dan menjadi *lingua franca* dunia.

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap bahasa-bahasa lain, dalam makalah ini istilah bahasa asing adalah sinonim dengan bahasa Inggris (BIIng). Karena besarnya peran yang dimainkan oleh BIIng dalam percaturan kehidupan dunia, banyak negara yang dulu tidak sangat mengutamakan BIIng kini mulai berpikir kembali dan bahkan ada yang menginginkan agar penguasaan bahasa ini digalakkan. Fishman (1996:8) tidak berlebihan waktu dia mengatakan bahwa bahasa Inggris tampaknya perlu dikon-

sepsikan ulang, dari alat imperialis menjadi wahana multinasional.

Indonesia adalah salah satu negara yang ingin menggalakkan penguasaan BIng. Masalah yang segera muncul adalah apakah niat baik ini dapat direalisasikan mengingat bahwa dalam pertumbuhannya menjadi suatu bangsa, Indonesia tidak mempunyai tradisi yang berkaitan dengan bahasa Inggris seperti halnya dengan India, Malaysia, Singapura, dan Filipina.

Makalah ini membahas problema yang kita hadapi dalam upaya menjadikan BIng sebagai bahasa pengantar, khususnya pada pendidikan tinggi (PT) kita. Untuk itu, ada tiga topik utama yang perlu kita bahas: (1) peran BIng dalam kancah politik dunia, (2) sejarah BIng di beberapa negara tetangga kita, dan (3) sejarah BIng di negara kita. Makalah ini diakhiri dengan suatu simpulan yang berdasar pada (1--3) di atas.

2. Bahasa Inggris dalam Kancah Politik Dunia

Pada mulanya memang BIng merupakan peranti komunikasi yang dipakai oleh para kolonialis dengan warga koloninya. Dari sekitar seratus bekas koloni masa lalu, 56 adalah koloni Inggris dan 1 di bawah kekuasaan Amerika (Fishman, 1996:5). Namun, perkembangan sejarah telah menunjukkan bahwa bahasa ini akhirnya menjadi bahasa yang dipakai oleh banyak negara sehingga akhirnya memperoleh status sebagai bahasa internasional. BIng tidak lagi dapat dikaitkan pada kesamaan budaya masa lampau, identitas etnis, agama, ataupun ideologi "*one can be an anarchist, neo-Marxist, or Fascist in English as well as one can be a social democrat or post-industrial capitalist*" (Conrad, 1996:21).

Bahwa BIng merupakan bahasa internasional dilandasi oleh berbagai faktor: (1) bobot internal, (2) jumlah pemakai, (3) penyebaran geografis, (4) wahana komunikasi ilmu, teknologi, dan diplomasi, (5) dominasi ekonomi, dan (6) dominasi politik.

2.1 Bobot Internal Bahasa Inggris

Suatu bahasa dapat menjadi bahasa internasional apabila bahasa itu secara internal dapat mengemban beban yang diharapkan tidak hanya oleh para penutur asli, tetapi juga oleh para penutur nonasli yang memakai bahasa tersebut. Salah satu ukuran yang jelas tampak adalah jumlah kosakata. Jika dibandingkan dengan bahasa-bahasa modern lainnya, BIng mempunyai kosakata yang paling banyak. Tahun 1983 BIng diperkirakan memiliki sekitar 450.000 kata (Claireborn 1983; Webster, 1981), sedangkan bahasa Prancis 150.000 kata, dan bahasa Rusia 130.000 kata (Claireborn, 1983). *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1991) mencatat 72.000 butir masukan. Dari data ini saja tampak bahwa BIng memiliki jumlah kosakata yang paling banyak.

Di samping jumlah kata, struktur gramatikal BIng juga memungkinkan untuk terbentuknya konstruksi modifikasi frasa serta konstruksi kalimat yang rekursif. Fleksibilitas ini memungkinkan dibentuknya kalimat dengan jumlah proposisi yang relatif banyak serta macam proposisi yang kompleks. Dimungkinkannya kalimat-kalimat yang kompleks berarti pula bahwa jumlah kata yang dipakai untuk mengungkapkan ide dapat dihemat.

2.2 Jumlah Pemakai Bahasa Inggris

Kachru (1983;1992) membagi pemakai BIng ke dalam tiga kelompok --mereka yang termasuk ke dalam: (1) lingkaran dalam (*inner circle*)--Inggris, Amerika, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, (2) lingkaran luar (*outer circle*)--Singapura, Filipina, India, Ghana, dsb., dan (3) lingkaran perluasan (*expanding circle*)--Jepang, Meksiko, Mesir, Indonesia, dsb. Jumlah penutur lingkaran dalam memang tidak begitu banyak--diperkirakan sekitar 345 juta orang--tetapi penutur dari dua lingkaran yang lain membuat BIng menjadi bahasa dengan penutur sekitar 1,3 milyar orang.

Jumlah penutur bahasa Inggris lingkaran luar dan lingkaran perluasan juga makin besar. Data dari UNESCO 1992 (dalam Rubal-Lopez, 1992:41) menunjukkan adanya 1.168.075 mahasiswa yang belajar di luar negara mereka. Dari jumlah ini, 549.115 (47%) belajar di negara yang bahasanya adalah bahasa Inggris. Sembilan puluh persen dari jumlah ini berasal dari lingkaran perluasan. Dari seluruh jumlah pelajar yang belajar di negara asing, 44% berasal dari Asia, termasuk Indonesia.

2.3 Penyebaran Geografis

Faktor ketiga yang membuat BIng menjadi bahasa internasional adalah penyebaran geografis. Di samping negara-negara yang termasuk dalam lingkaran dalam, yakni Amerika, Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru, ada banyak negara yang memakai BIng sebagai bahasa setengah asli (*seminalive*). Kachru (1992) memberikan daftar berikut beserta jumlah penduduknya:

Bangladesh	-107.756.000	Pakistan	-109.434.000
Ghana	- 13.574.000	Filipina	- 58.723.000
India	-810.806.000	Singapura	- 2.641.000
Kenya	- 22.919.000	Sri Lanka	- 16.606.000
Malaysia	- 16.606.000	Tanzania	- 23.996.000
Nigeria	-112.258.000	Zambia	- 7.384.000

Pada negara-negara lingkaran perluasan di Asia (Cina, Indonesia, Jepang, Korea, dan sebagainya), di Afrika (Mesir, Afrika Selatan, Uganda, dan sebagainya), di Amerika Latin (Meksiko, Argentina, dan Brazilia), dan di Timur Tengah (Saudi Arabia, Israel, dan Irak) sebagian dari penduduknya juga dapat berbahasa Inggris dan memang memakai bahasa ini di mana diperlukan.

Penyebaran geografis yang luas seperti ini tentu saja membantu tercapainya status internasional bagi BIng.

2.4 Wahana Komunikasi Ilmu, Teknologi, dan Diplomasi

Ketiga faktor di atas belum cukup kuat untuk menjadikan BIng sebagai bahasa internasional tanpa perannya sebagai bahasa ilmu, teknologi, dan diplomasi. Tidak dapat dimungkiri bahwa dalam dunia ilmu pengetahuan dan teknologi sebagian besar literatur yang dipakai ditulis dalam BIng. Dari 102 judul buku yang terdaftar sebagai buku teks di program master dalam bidang manajemen di suatu perguruan tinggi di

Jakarta hanya ada dua buku yang ditulis dalam bahasa Indonesia--sisanya dalam BIng. Dalam bidang linguistik terapan tingkat magister, dari 59 judul buku yang tercantum semuanya adalah buku terbitan asing yang ditulis dalam BIng. Meskipun contoh ini hanya merupakan sampel, rasanya tidak salah apabila dikatakan bahwa untuk ilmu pengetahuan dan teknologi di atas jenjang sarjana stratum satu, paling tidak sebagian besar buku-buku teks yang dipakai ditulis dalam bahasa asing, khususnya bahasa Inggris.

Dalam kancah politik internasional, BIng memang hanya merupakan salah satu dari empat bahasa (Inggris, Prancis, Rusia, dan Cina) yang dipakai di Perserikatan Bangsa Bangsa. Akan tetapi, dalam hubungan diplomasi sehari-hari di luar PBB, BIng menjadi "*lingua franca*" antarpartisipan, apabila di antara para partisipan tersebut tidak ada kesamaan bahasa. Bahkan dalam ASEAN, di mana empat dari enam negara anggotanya dapat berbahasa Melayu, bahasa Inggrislah yang dipakai sebagai wahana komunikasinya. Perundingan ekonomi internasional, seperti perundingan antara IMF dengan Indonesia (dan mungkin pula dengan Thailand dan Korea), dilakukan pula dalam BIng meskipun bahasa asli wakil IMF, Michel Camdessus, adalah bahasa Prancis.

Pengaruh internet yang kini menyebar ke seluruh penjuru dunia makin menambah dominasi BIng karena sebagian besar berita dan informasi dalam internet dinyatakan dalam bahasa ini.

2.5 Dominasi Ekonomi dan Sosial

Dari segi ekonomi, negara-negara yang kini menguasai dan mengendalikan ekonomi dunia sebagian besarnya adalah negara-negara yang berbahasa Inggris. Dari tujuh anggota dalam kelompok G-7 (Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Prancis), misalnya, tiga di antaranya adalah negara yang berbahasa Inggris. Pengaruh negara maju seperti Amerika Serikat dalam organisasi internasional seperti PBB dan IMF mau tidak mau mempengaruhi penyebaran bahasa ini.

Di tingkat nasional dan lokal sering pula kita temukan iklan yang mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris untuk melamar pekerjaan. Tinjauan sekilas pada iklan di harian *Kompas* tanggal 12 Juli 1998 memberikan data yang menarik: (a) Dari 97 lowongan yang ditawarkan, 83 diiklankan dalam BIng dan hanya 14 yang dalam BI, (b) 54 dari 83 iklan dalam BIng secara eksplisit mensyaratkan kemampuan berbahasa Inggris, meskipun dapat diasumsikan bahwa kalau iklannya saja ditulis dalam bahasa Inggris maka mungkin sekali pengiklan juga mencari hanya pelamar yang dapat berbahasa Inggris, (c) dari 14 lowongan dalam iklan yang berbahasa Indonesia, satu mensyaratkan BING. Dari gambaran iklan satu hari ini saja tampak bahwa BIng rupanya telah menjadi salah satu kriteria utama dalam pemerolehan pekerjaan.

Kini telah mulai pula muncul syarat penguasaan bahasa Inggris bagi calon dosen perguruan tinggi, calon mahasiswa pascasarjana, dan bahkan sudah lama BIng merupakan salah satu mata ujian untuk masuk ke perguruan tinggi dalam banyak bidang ilmu. Di atas ini semua, film Barat, restoran peringkat atas (Planet Hollywood) dan peringkat rendah (MacDonald), piranti teknologi seperti komputer, dan pelbagai peranti teknologi yang lain telah membantu menyebarkan BIng bahkan di kalangan

masyarakat bawah.

2.6 Dominasi Politik

Faktor terakhir adalah dominasi politik. Tidak dapat dimungkiri bahwa politik dunia saat ini didominasi oleh negara Barat yang sebagian besarnya kebetulan berbahasa Inggris. Peran negara adikuasa seperti Amerika dalam percaturan politik dunia sangat menentukan gerak langkah negara lain. Dalam sejarah hanya Amerikalah, misalnya, yang dapat menyerbu negara lain untuk menangkap sang presiden. Hanya Amerika dengan sekutu-sekutunyalah yang dapat membentuk kekuatan politik untuk menentukan kuota penjualan minyak serta pembatasan wilayah terbang suatu negara lain.

Ketiga faktor terakhir inilah (wahana komunikasi, dominasi ekonomi sosial, dan dominasi politik) yang memicu linguis seperti Phillipson untuk mengatakan bahwa penyebaran BIng ke negara-negara non-Inggris sebenarnya merupakan imperialisme linguistik (dalam Fishman *et al.*, 1996:10)

3. Bahasa Inggris di Negara Tetangga

Ada lima negara Asia yang dalam sejarah pertumbuhannya berkaitan erat dengan kolonialisme, yaitu India, Malaysia, (yang kemudian pecah dengan) Singapura, Filipina, dan Indonesia. Ketiga negara yang pertama merupakan koloni Inggris, yang keempat koloni Amerika, dan yang kelima koloni Belanda. Tujuan semula para kolonialis ini adalah untuk menyadap sumber daya alam, tetapi kemudian mereka tidak dapat menghindarkan diri dari keterlibatan politik yang kemudian berubah menjadi dominasi politik.

Satu pola yang muncul adalah bahwa Belanda lebih tertarik pada penyadapan kekayaan sedangkan Inggris dan Amerika tertarik pula pada kesejahteraan rohani dari yang dijajah (Spear, 1965:123), khususnya dalam penyebaran bahasa mereka.

3.1 Bahasa Inggris di India

Perbedaan pandangan para kolonialis memunculkan akibat yang berdampak panjang. Pada tahun 1813, misalnya, Parlemen Inggris meratifikasi *East India Act* yang menyetujui pendidikan sistem Inggris di India. Enam belas tahun kemudian Lord William Bentinck, yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal India, menyatakan bahwa BIng adalah kunci segala kemajuan. Untuk menanamkan akar kecintaan yang lebih dalam pada bangsa Inggris, pada tahun 1835 Thomas Babington Macaulay sebagai Ketua Komisi Pendidikan Umum menulis memo yang menyatakan bahwa dia ingin melihat adanya kelompok di India yang "... India dalam darah dan warna kulit, tetapi Inggris dalam selera, pandangan, moral, dan intelek" (Ghosh, 1980:18).

Kehendak untuk meng-Inggris-kan orang India bukan tanpa tentangan; sebagian bahkan datang dari penguasa Inggris di India seperti Warren Hastings yang lebih menyukai pendidikan ala India. Tentangan ini diperkuat oleh rasa nasionalisme yang mulai muncul tahun 1893 ketika para nasionalis menginginkan Hindi, yang dipakai oleh sepertiga dari seluruh penduduk (Mehrotra, 1993:126), sebagai bahasa nasional. Keinginan ini tak terpenuhi waktu India memproklamasikan kemerdekaan pada tahun

1947–BIng masih tetap dipakai sebagai bahasa resmi.

Kukuhnya BIng di India diperkuat lagi oleh para nasionalis modern. Pemimpin seperti Nehru pernah mengatakan bahwa Hindi memang bahasa resmi, tetapi BIng akan terus dipakai selama orang non-Hindi menghendakinya. Dia juga menekankan, “*English is likely to remain in India for a long time*” dan “*English would be more widely known in the future than even now*” (Dua, 1996:566). Dorongan seperti ini berlanjut meskipun pada tahun 1956 hanya 1% dari seluruh penduduk India memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara adekuat (Bureau of Parliamentary Research, [Tanpa tahun]:18). Dalam *Official Language Amendment Bill* tahun 1967 dinyatakan bahwa pemakaian bahasa Inggris terus berlanjut sampai semua DPRD dan DPR memutuskan penghapusannya (Dua, 1996:567). Perluasan pendidikan dan penyebarluasan BIng dalam lima puluh tahun terakhir di India membuat sosiolinguis seperti Hans Raj Dua bertanya-tanya apakah penggantian BIng dengan bahasa lokal sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan bukan suatu hal yang mustahil (Dua, 1996:584).

3.2 Bahasa Inggris di Malay(si)a

Kebijakan Inggris di India sangat mirip dengan kebijakan di Malaya (Malaysia kini dan Singapura). Sejarawan Malaysia Hon-Chan Chai malah berpendapat bahwa apa yang dikatakan oleh Macaulay di India tentang selera, pandangan, moral, dan intelek Inggris “kelihatannya seperti ditujukan untuk Malaya” (Chai, 1964:27). Seperti halnya di India, usaha untuk membendung arus Inggris di Malaya juga gagal karena alasan-alasan sosial-ekonomi. Menjelang tahun 1900 seperlima dari seluruh siswa di Malaya bersekolah di sekolah Inggris (Chai, 1964:252--257).

Status bahasa Melayu sebagai bahasa nasional tampak tersingkirkan oleh kegunaan dan kepraktisan BIng. Begitu besar peran BIng sehingga pada saat diselenggarakan Kongres Asosiasi Melayu tahun 1940 BIng malah diputuskan untuk lebih dimasyarakatkan. Kini BIng memang hanya menduduki status “bahasa kedua penting dan diajar(kan) sebagai bahasa kedua yang utama di sekolah-sekolah di Malaysia”, tetapi keluarga terdidik “seringkali menggunakan dua bahasa apabila berkomunikasi di rumah, yakni bahasa ibunda dan bahasa Inggris” (Wahid, 1998:7--8).

Jumlah penutur BIng di Malaysia juga cukup tinggi sehingga kelanggengan bahasa ini dapat dipertahankan. Pada tahun 1991, dari 18.000.000 penduduk ada 5.890.000 (30%) yang dapat berbicara BIng (Omar, 1996:514). Keadaan ini tercapai karena sejak akhir abad ke delapan belas BIng memang sudah dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah yang dinamakan *the English School*. Pada tingkat universitas, meskipun bahasa Melayu seharusnya dipakai, sekitar 30% dari mata kuliah ilmu eksakta diberikan dalam BIng. Bahkan antara tahun 1989--1992, dari 597 tesis master dan doktor di Universiti Malaya, hanya 145 yang ditulis dalam bahasa Melayu; sisanya, 452, dalam BIng (Omar, 1996:513--518). Penggalakan penggunaan BIng sebagai bahasa pengantar juga didukung oleh sistem pendidikan yang mengizinkan adanya apa yang dinamakan *twinning program*--suatu program, yaitu mahasiswa belajar dua tahun di Malaysia dan selanjutnya di negara yang memakai BIng untuk mendapatkan gelar dari universitas asing tersebut. Program seperti ini memacu orang untuk lebih

menguasai BIng.

3.3 Bahasa Inggris di Filipina

Meskipun alasannya mungkin saja berbeda, tetap saja Amerika mem-Barat-kan Filipina dengan membuat BIng sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan dan komunikasi. Bahwa BIng memegang peran sangat penting dapat dilihat dari persaingan sampai kini antara bahasa ini dengan bahasa nasional mereka.

Seawal tahun 1897 para nasionalis seperti Emilio Aguinaldo telah membuat Tagalog sebagai bahasa resmi saat mereka menerima Konstitusi Sementara (Mahajani, 1971:73). Pada tahun 1936 Dewan Nasional Filipina menyatakan perlunya memiliki bahasa nasional. Pada tahun 1940 Presiden Quezon menginstruksikan penerbitan kamus dan buku-buku tata bahasa Tagalog (Pascasio, 1967:252), tetapi pada saat Filipina mengumumkan kemerdekaannya tahun 1946 BIng masih dipertahankan sebagai bahasa resmi. Pada tahun itu diperkirakan 6.934.712 orang (38.5%) dari seluruh penduduk yang berjumlah 18.024.365 adalah penutur BIng. Jumlah ini naik menjadi 52% pada tahun 1980 (Sibayan & Gonzalez, 1996:139).

Usaha untuk mengurangi peran BIng memang tampak dengan adanya kebijakan mengenai sistem pendidikan bilingual dan tumbuhnya rasa nasionalisme. Namun, alasan ekonomi dan motivasi instrumental lain membuat BIng terus bertahan pada kebanyakan orang Filipina bahkan lama setelah kolonialisme berakhir (Sibayan dan Gonzalez, 1996:147). Dalam survei yang dilaporkan oleh Gonzalez dan Sibayan tahun 1988 ditemukan bahwa bagi orang Filipina nasionalisme dan patriotisme tidak berkaitan dengan kompetensi berbahasa Inggris--tidak ada kontradiksi antara sikap nasionalistik dengan kemampuan memakai bahasa asing ini.

Masalah nasionalisme dan pemakaian BIng memang masih merupakan dilema di Filipina sampai saat ini. Di satu pihak, sebagian orang merasa bahwa *Wikang Pambansa* (bahasa nasional) harus digalakkan, tetapi di pihak lain BIng tetap saja dianggap sebagai bahasa keharusan demi kemajuan bangsa (Sibayan & Gonzalez, 1996).

3.4 Bahasa Inggris di Singapura

Sejak pemisahannya dari Malaysia tahun 1965, sebenarnya BIng di Singapura hanyalah salah satu dari empat bahasa resmi, yaitu Melayu, Tamil, Cina, dan Inggris dengan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional mereka. Meskipun survei 1975 menunjukkan bahwa jumlah orang yang dapat berkomunikasi dalam bahasa Melayu ada 61.3%, dalam bahasa Mandarin 59.4%, dan dalam bahasa Inggris 56.6% (Kuo dan Jernudd, 1993:4), dalam praktiknya orang Singapura sangat menekankan kepragmatisan sehingga BIng makin lama makin banyak dipakai orang.

Pada tahun 1972 22.2% warga Singapura yang berumur 15 tahun ke atas dapat berbahasa Inggris. Persentase ini naik menjadi 56.6% pada tahun 1975 (Kuo, 1977:11) dan terus meningkat menjadi 87.6% pada tahun 1989 (Ministry, 1990:7). Sensus 1990 juga menunjukkan bahwa seperlima dari seluruh populasi memakai BIng dalam segala aspek kehidupan sehari-hari (Tickoo, 1996:431).

Dalam bidang pendidikan Singapura merintis pemakaian BIng secara berlanjut.

Sejak orang Inggris menjadikan Singapura basis perdagangan pada tahun 1819 bahasa Inggris sebenarnya telah mulai ditanam. Penjajahan Inggris selama 140 tahun telah meninggalkan pengaruh yang sangat mendalam. Pada tahun 1960 warga Singapura diwajibkan belajar bahasa kedua di tingkat sekolah dasar. Enam tahun kemudian pembelajaran bahasa kedua di sekolah menengah juga diwajibkan dan pada tahun 1968 pelajaran ilmu eksakta diberikan dalam bahasa Inggris. Dulu, untuk masuk ke universitas calon diwajibkan menempuh ujian bahasa kedua. Kini syarat itu tidak diperlukan lagi karena pendidikan di perguruan tinggi semuanya diberikan dalam bahasa Inggris. Media massa cetak maupun elektronik juga banyak mengutamakan pemakaian BIng. Dari empat saluran televisi, misalnya, hanya satu yang dikhususkan untuk bahasa yang bukan BIng. Demikian pula siaran radio: dari tujuh pemancar, tiga memakai BIng.

Dalam upaya untuk terus menjadi negara yang paling maju di Asia Tenggara, Singapura memandang BIng sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, meskipun ada empat kelompok etnik utama di negara itu, apa yang oleh Kuo dan Jernudd (1993) dinamakan "*pragmatic multilingualism*" sebenarnya adalah "*English-based Bilingualism*" (Tickoo, 1996:438).

4. Bahasa Inggris di Indonesia

Seperti kita ketahui, Belanda, dan bukan Inggrislah, yang menjajah Indonesia. Penjajahan ini bermula pada tahun 1596 pada saat pedagang pertama Belanda mendarat di Banten. Pada tahun 1602 para pedagang ini membentuk perserikatan yang kemudian dikenal dengan nama VOC Karena adanya perlawanan dari raja-raja di Jawa ataupun di tempat-tempat lain, hubungan dagang ini akhirnya bergeser ke hubungan politik sehingga pada tahun 1799 VOC terpaksa diubah menjadi bentuk pemerintahan jajahan. Penjajahan ini berlangsung sampai tahun kemerdekaan, 1945.

Dalam hal pendidikan pada umumnya, Belanda tidak sangat antusias. Ilmuwan Belanda seperti Kern dan Hurgronje memang pernah mengusulkan pengajaran bahasa Belanda seawal tahun 1890, tetapi ide itu adalah untuk menciptakan rasa bangga yang akan memungkinkan orang Indonesia memahami apa yang bisa diperbuat oleh budaya Barat (van Niel, 1960:30). Bahkan, dengan motivasi seperti ini pun tanggapan pemerintah Belanda adalah kurang dari antusiasik.

Dengan berlandaskan pada apa yang dinamakan "politik etis" yang diciptakan tahun 1900, Belanda mulai "memperhatikan" pendidikan di Indonesia. Meskipun demikian, pendidikan Barat baru pada tahun 1907 diperkenalkan, yakni pada saat mereka mendirikan sekolah dasar, *Hollandsch-Inlandsche School*, HIS. Bahasa Inggris mulai diajarkan kepada warga Indonesia tahun 1914 waktu mereka mendirikan sekolah lanjutan pertama, *Meer Uitgebried Lager Onderwijs*, MULO. Sekolah lanjutan atas, *Algemeene Middlebare School*, AMS, baru diadakan pada tahun 1918 (van der Veur dan Lian, 1969:2).

Bahasa pengantar yang dipakai tergantung pada macam serta tingkat sekolahnya. Untuk mereka yang sekolah di "Sekolah Nomor Dua", yakni sekolah yang khusus untuk warga pribumi, bahasa pengantarnya adalah bahasa daerah setempat. Di HIS,

MULO, dan AMS serta sekolah “Barat” lainnya dipakai bahasa Belanda. Begitu pula bahasa pengantar di perguruan tinggi pertama di Indonesia, *School tot Opleiding van Inlandsche Artsen* (STOVIA, Dokter Jawa), adalah juga bahasa Belanda. BIng diajarkan hanya sebagai mata pelajaran. Di MULO BIng diajarkan empat jam per minggu pada dua tahun pertama dan tiga jam per minggu pada tahun ketiga (Komaria, 1998:7). Segera setelah Indonesia merdeka, bahasa asing yang dipilih untuk diajarkan sebagai mata pelajaran bukanlah bahasa Belanda, tetapi bahasa Inggris. Sampai dengan tahun 1996, BIng diberikan 3--4 jam di SLTP dan SMU per minggu. Sejak tahun itu, bahasa ini juga boleh diajarkan di sekolah dasar; bahkan ada pula TK yang memberikan pelajaran BIng (Komaria, 1998:35).

Dari gambaran di atas tampak bahwa sejak zaman kolonial sampai sekarang, BIng tidak pernah menduduki posisi sebagai bahasa resmi atau bahasa pendamping seperti di beberapa negara tetangga kita.

5. BIng sebagai Bahasa Pengantar dalam Pendidikan

Melihat peran BIng yang telah benar-benar menjadi *lingua franca* internasional, dan melihat pula kebijakan yang dianut oleh beberapa negara tetangga kita mengenai BIng, bisalah dimengerti mengapa mantan Mendikbud kita, Wardiman Djojonegoro, sekitar bulan awal tahun 1998 mengizinkan bahasa Inggris dipakai sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan kita, khususnya di tingkat perguruan tinggi. Kita lihat, misalnya, Malaysia yang sejak akhir tahun 1993 mengizinkan kembali BIng dipakai sebagai bahasa pengantar di perguruan tinggi; Singapura yang kini tidak lagi mensyaratkan calon mahasiswa menguasai bahasa lain kecuali Inggris; Filipina yang terus saja menggalakkan pemakaian BIng meskipun bahasa nasional Pilipino juga tetap dimajukan.

Di dalam negeri, keluhan mengenai kemampuan berbahasa Inggris mayoritas golongan intelektual kita tidak pernah berhenti: (a) Sadtono (1983) mengutarakan betapa rendahnya kemampuan BIng dosen kita, (b) Menlu Ali Alatas (*Jakarta Post*, 22 September, 1995) menyatakan betapa kurang mampunya diplomat kita dalam kancah internasional, (c) Sumardi mengungkapkan bahwa bahkan dosen BIng pun banyak yang belum cukup dewasa dalam memakai bahasa ini (*Jakarta Post*, 22 Januari, 1996). Kita memang harus prihatin bahwa dalam bandingannya dengan negara-negara tetangga kita, kemampuan kita berbahasa Inggris masih jauh tertinggal. Keprihatinan ini bertambah derajatnya mengingat bahwa dunia sudah mulai menjadi desa global dengan BIng sebagai wahana komunikasinya. Oleh karena itu, kehendak politik pemerintah untuk memakai BIng sebagai bahasa pengantar dalam perguruan tinggi patut disambut dengan sangat gembira karena pintu gerbang menuju ke kemajuan akhirnya dibuka juga. Seperti dipaparkan di atas, kita harus mengakui bahwa tanpa menguasai bahasa asing, khususnya BIng, kita mudah dan cepat ketinggalan. Perkembangan ilmu dan teknologi dalam segala bidang boleh dikatakan dituangkan dalam bahasa ini; begitu pula arus informasi sosial, ekonomi, dan politik.

Tiga masalah segera muncul: (1) kualifikasi dosen, (2) kecanggihan bahasa Inggris para dosen, dan (3) kemampuan mahasiswa memahami kuliah dalam BIng.

5.1 Kualifikasi Dosen

Dari statistik terakhir (*Ministry of Education*, 1997:79), Indonesia memiliki 157.695 dosen PT. Dari jumlah ini 5.691 (3.6%) bergelar doktor, 24.718 (15.6%) magister, dan 127.268 (80.7%) sarjana. Tampak di sini bahwa di perguruan tinggi (negeri dan swasta) kita, mayoritas dosennya, 80.7%, baru bergelar sarjana strata satu. Meskipun kualifikasi dosen memang tidak sepenuhnya berkorelasi dengan kemampuan berbahasa Inggris, mereka yang bergelar sarjana S-I kemungkinan besarnya belum pernah ikut kuliah dengan pengantar BIng, kecuali apabila bidang mereka adalah BIng. Sebaliknya, sebagian dari yang bergelar magister dan doktor mungkin telah pernah kuliah di luar negeri sehingga sedikit banyak pernah memakai bahasa asing secara aktif.

Statistik UNESCO tahun 1992 menunjukkan bahwa ada 1.168.075 mahasiswa di seluruh dunia yang belajar di lima puluh negara di luar negara mereka sendiri. Dari jumlah ini 549.115 (47%) belajar di enam negara yang berbahasa Inggris (Rubal-Lopez, 1996:41). Mengingat bahwa "saingan" yang cukup besar di luar negara BIng hanya Prancis, Jerman, Rusia, dan Jepang, maka mungkin tidak keliru kalau kita berkata bahwa persentase mahasiswa Indonesia yang belajar di enam negara BIng ini lebih besar. Namun, persentase keseluruhannya masih saja tetap sangat kecil.

5.2 Bahasa Inggris Dosen Kita

Penelitian yang telah dilakukan oleh Sadtono (1983), Hamied (1996), dan Ridwan *et al.* (1996) menunjukkan bahwa kemampuan BIng dosen kita belum memadai. Untuk melengkapi data ini, saya melakukan penghitungan-penghitungan kecil atas data yang dimiliki oleh Lembaga Bahasa Atma Jaya, LBA. Tahun 1997 dan 1998, LBA memberikan tes standar internasional yang dikenal dengan nama "TOEFL Prediction" kepada 35 dosen Atma Jaya dari pelbagai jurusan yang bukan BIng. Tes ini dapat dikonversikan untuk memperkirakan nilai TOEFL-nya berapa, kalau pengambil tes tadi mengambil TOEFL yang sebenarnya. Berikut adalah hasil yang kami peroleh:

- a. Rata-rata nilai TOEFL: 453
- b. *Listening* : 64%
- Structure* : 63%
- Reading Comp.* : 72%

Kalau kemampuan dosen Atma Jaya ini dipakai sebagai patokan gambaran kasar mengenai kemampuan bahasa Inggris dosen kita, maka akan tampak bahwa untuk penguasaan komprehensi saja nilai mereka masih jauh di bawah 500. Mengingat bahwa dalam bahasa produksi selalu lebih sukar daripada komprehensi, maka dapat diramalkan bahwa nilai produksinya pasti lebih rendah daripada 453. Kalau kita lihat rinciannya, para dosen kita sudah lumayan dalam memahami bacaan (72%), tetapi masih kurang dalam memahami ujaran dan dalam menguasai tata bahasanya (64% dan 63% masing-masing).

Calon dosen Atma Jaya juga diberi tes yang sama, dan dari 23 dosen yang dites kita dapatkan hasil berikut:

- a. Rata-rata nilai TOEFL : 456
- b. Listening : 63 %
- Structure : 67 %
- Reading Comp. : 73 %

Dari daftar di atas tampak bahwa nilai kedua kelompok ini boleh dikatakan sama: 456 berbanding 453.

5.3 Bahasa Inggris Mahasiswa Kita

Para mahasiswa dalam data ini adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi yang tergabung dalam suatu *conversation club*. Ini berarti bahwa para mahasiswa tadi dapat dipastikan mempunyai minat yang lebih besar terhadap BIng daripada kebanyakan mahasiswa yang lain ataupun dosen. Dengan demikian, nilai hasil tes mereka bisa diramalkan lebih tinggi daripada kebanyakan mahasiswa lainnya. Dan, ini terbukti benar karena nilai keseluruhan dari 31 mahasiswa ini adalah 479 lebih tinggi daripada nilai para dosennya. Berikut adalah rinciannya:

- a. Rata-rata nilai TOEFL : 479
- b. Listening : 67 %
- Structure : 70 %
- Reading Comp. : 76 %

Kalau kita memakai standar Amerika maka nilai TOEFL yang disyaratkan umumnya di atas 500 dan itu *untuk menjadi mahasiswa, bukan untuk menjadi dosen*. Syarat minimum untuk TOEFL di bidang Psikologi Perkembangan di University of Miami, misalnya, adalah 550; di bidang sosiologi di Boston University, 550; di bidang antropologi di American University, 600; dan di bidang ekonomi di Columbia University, 610 (Peterson's, 1997).

Memakai BIng secara aktif, apalagi untuk mengungkapkan konsep-konsep keilmuan, memerlukan tingkat kemampuan yang canggih. Tidak hanya jumlah kosakata yang banyak serta ketepatan makna tiap-tiap kata yang harus dipakai, tetapi sintaksisnya pun sering perlu diwujudkan dalam konstruksi yang kompleks. Apabila nilai TOEFL dosen dan mahasiswa, apalagi yang tergabung dalam *conversation club*, masih di bawah 500, rasanya akan sangat sulitlah untuk dosen menyatakan ilmu yang diajarkannya dalam BIng dengan baik dan akan sangat sulit pula untuk para mahasiswa mencernanya.

6. Kesimpulan

Kebijakan untuk memakai bahasa asing, yang dalam hal ini adalah bahasa Inggris, sebagai bahasa pengantar pada sistem pendidikan kita memang dilandasi oleh suatu itikad yang sangat baik dengan misi dan visi yang jauh ke depan. Alangkah baiknya kalau kehendak politik ini dapat dilaksanakan, mengingat bahwa masa depan dunia rasanya tidak akan mungkin terlepas dari dominasi negara maju yang sebagian besarnya berbahasa Inggris. Namun, rasanya sangat sulitlah untuk kita dapat "meniru"

India, Malaysia, Singapura, dan Filipina serta negara bekas koloni Inggris/Amerika yang lain.

Sejarah pertumbuhan bangsa kita menunjukkan bahwa kita tidak mewarisi tradisi serta budaya yang ada kaitannya dengan bahasa Inggris. Dengan demikian, bahasa ini tidak pernah menjadi bahasa pendamping, bahasa resmi, ataupun bahasa kedua di negara kita. Akibat selanjutnya adalah bahwa kemampuan berbahasa Inggris warga Indonesia, termasuk kaum intelektual dan mahasiswanya, sangat terbatas.

Dengan gambaran di atas tampaklah bahwa kemungkinan dosen memakai bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk mata kuliah di luar bidang Inggris adalah sangat kecil. Seandainya pun dosen mampu melakukannya, apakah para mahasiswanya akan dapat memahami apa yang dikuliahkan?

7. Saran

Mungkin orang akan bertanya, "Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi?" Rasanya pertanyaan ini keliru arah; yang lebih realistik adalah "Apakah kita memang memerlukan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar?" Apa sebenarnya yang kita inginkan dari kuliah dalam bahasa Inggris ini: (a) kita ingin meningkatkan mutu pendidikan kita, atau (b) kita ingin memajukan kemampuan berbahasa Inggris kita?

Mengingat sejarah kolonialisasi dan konsekuensinya setakat ini, peningkatan mutu pendidikan kita tidak terletak pada bahasa pengantar yang kita pakai. Memang benar bahwa wahana modernisasi sebagian besarnya adalah dalam bahasa Inggris. Namun, ini tidak berarti bahwa seluruh (atau mayoritas) warga kita harus dapat berbahasa Inggris. Dari segi wahana kebahasaan ini, cara yang lebih praktis untuk meningkatkan mutu pendidikan kita adalah dengan menerjemahkan sumber-sumber sarana modernisasi ke dalam bahasa kita—ilmunya tercerna oleh kita, jumlah bahasawan Inggrisnya tidak perlu jutaan orang, dan biayanya jauh lebih murah. Jepang, misalnya, adalah negara yang selalu mutakhir dalam iptek, tetapi pemutakhiran mereka melalui penerjemahan, tidak melalui penggalakan BIng sebagai bahasa pengantar. Dari segi di luar kebahasaan, peningkatan mutu pendidikan kita ditentukan oleh berbagai faktor seperti kualifikasi dosen, rasio dosen-mahasiswa, jumlah mahasiswa di kelas, dan kesejahteraan dosen.

Kalau yang kita inginkan adalah peningkatan kemampuan berbahasa Inggris warga kita, rasanya membuat bahasa ini bahasa pengantar--dengan kondisi yang kita miliki--bukanlah jawabannya. Pengajaran bahasa Inggris di Indonesia tidak berbeda dengan pengajaran bahasa asing di negara maju--sama-sama tidak berhasil. Kita tidak perlu cemas karena dari segi dana, fasilitas, dan prasarana lainnya pembenahan total hanyalah merupakan impian sang pungguk yang merindukan bulan. Bagaimana tidak? Pada tahun ajaran 1995/1996 ada 6.945.433 siswa SLTP/SLTA dengan ruang kelas sebanyak 171.219 buah (*Ministry of Education* 1997:72--73). Ini berarti rata-ratanya 41 murid per kelas. Seandainya hanya separuh saja dari jumlah ini yang dipecah menjadi 20 siswa per kelas, diperlukan tambahan ruang sebanyak 8.650 buah. Jumlah ruang yang bertambah memerlukan pula tambahan guru. Data tahun 1995/1996 menunjukkan adanya 913.316 guru SLTP dan SLTA di seluruh Indonesia. Kalau

8.650 ruang tambahan memerlukan tambahan 50% saja guru bahasa Inggris, maka diperlukan tambahan guru sebanyak 4.325 orang. Belum lagi kita bicara tentang kualifikasi, gaji, dan sebagainya.

Karena memang kita tidak bisa berbuat banyak, maka lebih baik pendidikan bahasa Inggris diteruskan saja seperti apa adanya saat ini dengan perbaikan tambal-sulam di sana sini. Penggantian metode dan penataran guru tidak banyak artinya karena letak permasalahan memang tidak di sana. Jalan yang bisa ditempuh untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris adalah melalui jalan keluar yang tidak formal, misalnya, (a) memberikan subsidi kepada mereka yang benar-benar berminat dan berbakat untuk mempelajarinya di luar pendidikan jalur formal; (b) mendukung tidak hanya secara moral, tetapi juga material kegiatan seperti *conversation clubs*; dan (c) ikut membiayai serta memberikan insentif yang menarik untuk kontes debat berbahasa Inggris seperti yang dilakukan mahasiswa UI bulan Agustus 1998.

Menuntut agar kaum intelektual kita dapat berbahasa Inggris seperti rekan di beberapa negara tetangga tidak hanya melupakan sejarah bangsa, tetapi juga membuat kita seperti *Cebol yang nggayuh lintang*.

Daftar Pustaka

- Bureau of Parliamentary Research. (Tanpa tahun). *Official Language Controversy: Set at Rest*. New Delhi: Bureau of Parliamentary Research.
- Conrad, Andrew W. 1996. "The International Role of English: The State of the Discussion." Dalam Fishman *et al.*, 1996.
- Claireborn, Robert. 1983. *The Life and Times of the English Language*. London: Bloomsbury.
- Crewe, William. (Ed.) 1977. *The English Language in Singapore*. Singapore: Eastern University Press SDN Bhd.
- Dardjowidjojo, Soenjono. 1996a. "The Socio-political Aspects of English in Indonesia." *TEFLIN Journal*, Vol. VIII, No. 1.
- . 1996b. "English Policies and Their Classroom Impact in Some ASEAN/Asian Countries." Dalam Jacobs, 1996.
- . 1996c. "The Role of English in Indonesia: A Dilemma." TEFLIN Seminar, Surabaya, 7-10 Oktober.
- . 1996d. "English Teaching: Where Do We Begin?" Seminar Universitas Trisakti, 20 November.
- . 1997. "Cultural Constraints in the Teaching of English in Indonesia." TEFLIN Seminar, Universitas Maranatha, Bandung, 4-6 Agustus.
- Dua, Hans Raj. 1996. "The Spread of English in India: Politics of Language Conflict and Language Power." Dalam Fishman *et al.*, 1996.
- Fishman, Joshua A. (Ed.) 1993. *The Earliest Stage of Language Planning*. Berlin: Mouton de Guyter.
- . 1996. "Introduction: Some Empirical and Theoretical Issues." Dalam Fishman

- et al., 1996.
- Fishman, Joshua A., Andrew W. Conrad. Alma. Rubal-Lopez. 1996. *Post Imperial English: Status Change in Former British and American Colonies, 1940–1990*. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Ghosh, R.N. 1980. "Indian Bilingualism and the Teaching of English." Dalam Lim, 1980.
- Hamied, Fuad A. 1996. "EFL Program Surveys in Indonesian Schools: Toward EFL Curriculum Implementation for Tomorrow." Dalam Jacobs, 1997.
- Chai, Hon-Chan, Chai. 1964. *The Development of British Malaya: 1896–1909*. London Oxford University Press.
- Jacobs, George M. (Ed.). 1997. *Language Classrooms of Tomorrow*. Singapore: SEAMEO Regional Language Center.
- Kachru, Braj. 1983. "Meaning in Deviation: Toward Understanding Non-native English." Dalam Noss, 1983.
- . 1992. "World Englishes: Approaches, Issues, and Resources." *Language Teaching*, Januari.
- Komaria, Omi. 1998. "The History of English Teaching in Indonesia." Jakarta: Tesis Magister, Universitas Katolik Atma Jaya.
- Kuo, Eddi C.Y. "The Status of English in Singapore: A Sociolinguistic Analysis." 1977. Dalam Crewe, 1977.
- Kuo, Eddi C.Y. dan Bjorn H. Jernudd. 1993. "Balancing Macro- and Micro-sociolinguistic Perspectives in Language Management: The Case of Singapore." *Language Problems & Language Planning*. Vol.17, No. 1, Spring 1993.
- Lim, Kiat Boey. (Ed.) 1980. *Bilingual Education*. Singapore: Singapore University Press.
- Mahajani, Usha. 1971. *Philippine Nationalism: External Challenge and Filipino Response*. Queensland: University of Queensland Press.
- Manuud, Antonio. (Ed.) 1967. *Brown Heritage: Essays on Philippine Cultural Tradition and Literature*.
- Mehrotra, R.N. 1993. "The First Congress of Hindi." Dalam Fishman, 1993.
- Ministry of Communications and Information. 1990. *Singapore 1990*. Singapore: Psychological Defense and Publicity Division.
- Ministry of Education and Culture. 1997. *Indonesia: Education Statistics in Brief: 1995–1996*. Jakarta: Ministry of Education and Culture.
- Noss, Richard B. (Ed.) 1982. *Language Teaching Issues in Multilingual Environments in Southeast Asia*. Singapore: Singapore University Press.
- Omar, Asmah Haji. 1996. "Post Imperial English in Malaysia." Dalam Fishman et al., 1996.
- Pascasio, Emy M. 1967. "The Language Situation in the Philippines from the Spanish Era to the Present." Dalam Manuud, 1967.
- Peterson's. 1997. *Graduate Programs in the Humanities, Arts, and Special Sciences*. Princeton: Peterson's Publishers.
- Philip B. Gove, Chief Editor. 1981. *Webster's Third New International Dictionary*.

1991. Chicago: Encyclopaedia Britannica, Inc.
- Ridwan, Evy C. Willy A. Renandya, dan Anita, Lie. 1996. "On Being Reflective: Survey of EFL Teachers in Indonesia." Disajikan di RELC Seminar, Singapura.
- Rubal-Lopez, Alma. 1996. "The Ongoing Spread of English: A Comparative Analysis of Former Anglo-American Colonies with Non-colonies." Dalam Fishman *et al.*, 1996.
- Sadtono, E. 1983. "Penguasaan Bahasa Inggris Dosen di Indonesia." Pidato Pengu-
kuan Gurubesar, IKIP Malang.
- Sibayan, Bonifacio P. dan Andrew Gonzales. 1996. "Post Imperial English in the
Philippines." Dalam Fishman *et al.* 1996.
- Spear, Percival. 1965. *A History of India*. Vol. 2. New York: A Penguin Book.
- Tickoo, Makhan L. 1996. "Fifty Years of English in Singapore: All Gains, (a) Few
Losses." Dalam Fishman *et al.*, 1996.
- Tim Penyusun Kamus, Pusat Bahasa. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta:
Balai Pustaka.
- van der Veur, Paul dan Lian. Thee. 1969. *Education and Social Change in Colonial
Indonesia*. Athens, Ohio: Papers in International Studies, Southeast Asia Series,
No. 12.
- van Niel, Robert. 1960. *The Emergence of Modern Indonesian Elite*. Chicago:
Quadrangle Books, Inc.
- Wahid, Puteri Rosalina Abdul. 1998. "Pemerolehan Bahasa Inggris sebagai Bahasa
Kedua oleh Kanak-kanak Prasekolah: Satu Kajian Bahasa Antara." Kuala
Lumpur: Disertasi Doktor.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A5
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Bahasa Asing sebagai Bahasa Pengantar dalam Sistem Pendidikan
Penyaji	: Soenjono Dardjowidjojo
Pemandu	: Nuril Huda
Pencatat	: a. Sri Winarti b. I Nengah Sukayana
Peserta	: 60 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Bakhrum Yunus, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

a. Pertanyaan:

Guru Bahasa Inggris saya di SMP belajar Bahasa Inggris pada zaman Belanda. Bahasa pengantar pada waktu itu adalah bahasa Belanda ditambah bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Mereka bisa menguasai tiga bahasa, yaitu Belanda, Inggris, dan Prancis. Mengapa sistem pendidikan saat itu dapat berhasil dengan baik?

Saya pernah membaca hasil penelitian Dr. Yusman Yusuf dalam majalah yang editornya Pak Diah, mantan Rektor Universitas Riau. Beliau mengatakan bahwa negara-negara yang tidak menggunakan bahasa nasional tidak akan maju ataupun kalau maju, berkembangnya lambat, seperti negara India dan Pakistan. Jadi, jika dikaitkan dengan pembangunan suatu negara, penggunaan bahasa nasional sebagai bahasa komunikasi akan mempercepat perkembangan negara itu.

b. Jawaban

(Jawaban ada pada nomor 2)

2. Penanya: Abdul Wahab, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Saya tidak berpretensi bahwa saya akan memberikan solusi apa yang dilemparkan Pak Soenjono. Rupanya Pak Soenjono sudah memberikan latar belakang dan sekaligus alternatif pemecahannya.

Ada tiga butir yang ingin saya sampaikan. Pertama, latar belakang hambatan itu adalah undang-undang dan peraturan. Barangkali undang-undang atau peraturan itu dapat ditinjau kembali. Oleh karena itu, apakah kongres ini dapat mengeluarkan semacam usulan untuk meninjau kembali undang-undang dan peraturan sebagaimana disebutkan Pak Soenjono tadi.

Kedua, seperti yang diutarakan Pak Bakhrum Yunus tadi, ayah saya berpendidikan MULO, tetapi bahasa Belanda dan Inggrisnya seperti penutur asli

(*native speakers*). Jadi, menurut saya, ada kesalahan dalam metode pengajaran. Saya melihat kuncinya adalah keseriusan di dalam melaksanakan tugas dalam mengajar.

Ketiga, sikap kita terhadap bahasa Inggris kurang positif. Kita mendengar selama dua hari ini bahasa Inggris dipersalahkan. Orang-orang yang memakai bahasa Inggris dihujat. Barangkali ada keterbukaan terhadap sikap bahasa itu.

b. Jawaban:

Pertama, saya akan menjawab pertanyaan Pak Bakhrum dan Pak Wahab sekaligus. Kita terlalu terpesona pada metode, kurikulum, dan sebagainya, tetapi kita melupakan faktor manusianya yang melaksanakan kurikulum atau yang memakai metode itu. Kalau metodenya hebat, tetapi gurunya tidak serius, seperti yang dikatakan Pak Wahab, saya berani taruhan bahwa pengajaran Bahasa Inggris tidak akan berhasil. Betul sekali apa yang dikatakan Pak Wahab bahwa keseriusan yang profesional, dalam arti kalau guru memberikan pekerjaan rumah, dibaca dulu, lalu dibahas di kelas. Saya kira, yang menjadi kunci adalah pelaku-pelakunya, pelaku dalam pengajaran Bahasa itu. Para pelaku atau mereka itu tidak serius karena ada kendala lain. Mengapa tamatan sekolah MULO, HIS, atau AMS berhasil? Mereka diajari dengan metode kuno. Mereka berhasil karena orang yang masuk MULO tidak sembarang orang, kelasnya tidak besar, bayaran gurunya cukup, ruangnya baik. Dengan demikian, pengajaran bahasa berhasil.

3. Penanya: Syahrudin Kaseng, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Sistem yang bagaimana yang paling tepat diberikan untuk pendidikan bahasa Inggris di perguruan tinggi?

b. Jawaban:

Menurut saya, bukan soal sistem, metode, atau kurikulum. Bapak mengajar di perguruan tinggi yang mahasiswanya, misalnya tujuh puluh orang, apa yang bisa diharapkan untuk mengajar satu kelas yang mahasiswanya sebanyak itu. Selama pelaksanaan pengajaran, baik dari segi jumlah murid maupun guru, belum berubah, selama itu pula pengajaran bahasa asing di Indonesia tidak akan bisa diperbaiki.

SUMPAH PEMUDA DAN JATI DIRI GENERASI MUDA

Agung Laksono
Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia

Pada kesempatan ini, saya diberi kehormatan untuk menyampaikan makalah dengan topik "**Sumpah Pemuda dan Jati Diri Generasi Muda**". Topik ini saya anggap sesuai dengan tantangan dan dinamika bangsa saat ini. Pada era negara tanpa batas ini benturan budaya semakin mengeras sehingga mengharuskan generasi muda untuk memperkuat ketahanan mental, termasuk peningkatan semangat nasionalisme dan rasa kebangsaan. Selain itu, pada masa transisi ini realitas lama dari kekuasaan pada masa lalu dan cita-cita ideal mengalami proses benturan. Untuk itu, diperlukan kesiapan generasi muda untuk memahami jati dirinya agar para pemuda mampu menjadi pelopor dalam menyelesaikan proses reformasi bangsa.

Substansi Sumpah Pemuda yang dicetuskan pada 28 Oktober tahun 1928 tersebut adalah nilai-nilai *kepeloporan, semangat kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa*. Jati diri semacam inilah yang harus mampu menjadi potret diri dari generasi muda di masa kini.

Kita berbesar hati bahwa semangat nasionalisme, rasa kebangsaan, dan nilai-nilai kepeloporan generasi muda, khususnya mahasiswa, masih tidak luntur, yang terbukti pada gerakan reformasi kemarin yang merupakan gerakan moral, mampu mengubah sistem kekuasaan otoriter yang tidak sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, menuju perubahan yang lebih demokratis dan berkesejahteraan sesuai dengan dinamika aspirasi rakyat Indonesia. Namun, perlu kita pertegas kembali variabel-variabel *sosiokultural*, termasuk budaya berbahasa yang mempengaruhi sistem kepribadian generasi muda dewasa ini. Melalui pemetaan tersebut, dapat kita tarik benang merah jati diri generasi muda saat ini sebagai potensi untuk menjawab tantangan bangsa pada masa kini dan masa yang akan datang.

Pada dasarnya, ada dua faktor eksternal dan internal yang berpengaruh terhadap pembentukan sistem budaya, termasuk jati diri pemuda, baik yang tak terlihat (*covert culture*), seperti norma, nilai dan adat istiadat, maupun yang terlihat (*overt culture*), seperti gaya berbahasa dan perilaku keseharian. Adapun faktor eksternal, antara lain, meliputi hal-hal berikut.

Pertama, tantangan yang bersifat eksternal berupa kemajuan teknologi informasi yang telah menyebabkan dunia tanpa batas (*borderless world*). Dalam proses benturan budaya pada dunia tanpa batas itu, termasuk pengaruh bahasa asing yang tidak bebas dari misi budaya asing, akan menembus batasan ruang dan geografis bangsa Indonesia. Proses pembudayaan semacam ini akan mempengaruhi persepsi dan pola pikir generasi muda.

Kedua, akibat dari liberalisasi perdagangan dan investasi, akan masuk berbagai barang impor, baik yang berteknologi tinggi, madya maupun yang berteknologi rendah, yang akan mempengaruhi perilaku konsumtif masyarakat, termasuk generasi

muda. Sementara itu, secara internal dapat kita identifikasi hal-hal sebagai berikut.

Pertama, tingkat pendidikan generasi muda dewasa ini pada umumnya mengalami peningkatan. Pola pikir dan perilaku generasi muda tentunya lebih rasional dewasa ini, termasuk dalam pengungkapan bahasa.

Kedua, sebagai bagian dari masyarakat, generasi muda tentunya juga terpengaruh dalam situasi sosio-kultural dari perilaku sentralisasi kekuasaan selama ini. Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan yang terpusat. Akibatnya, kebebasan berpikir dan berpendapat, serta bernalar sangat lemah. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan kembali upaya kemandirian, kebebasan mengungkapkan kreativitas dan inovasi dengan berorientasi pada penciptaan kader-kader bangsa.

Ketiga, euforia politik saat ini juga berpengaruh karena pada satu sisi, perilaku generasi muda menginginkan cita-cita ideal di tengah-tengah realitas lama sehingga jati diri pemuda, termasuk jargon-jargon bahasa dan retorik politik yang dikemukakan saat ini sesungguhnya masih berada pada masa transisi.

Keempat, terdapat fenomena ancaman luntarnya budaya di tengah-tengah gencarnya suguhan dan tontonan budaya asing melalui media cetak dan elektronik dewasa ini. Berbagai tindak kekerasan, perilaku alkoholik, dan *drug abuse* menggambarkan kelemahan ketahanan mental remaja Indonesia. Apresiasi terhadap sastra dan seni juga lemah karena kaum muda terlalu mengonsumsi budaya asing yang siap pakai. Memang, kita mengakui sastra memiliki nilai-nilai universal, tetapi hal tersebut jangan sampai mematikan kreativitas dan inovasi dari kaum muda.

Variabel-variabel di atas selain melahirkan sisi positif, misalnya semakin derasnya informasi yang diterima oleh generasi muda tidak hanya memperkaya khazanah pengetahuan kaum muda, tetapi juga melahirkan kecenderungan ancaman budaya negatif seperti berikut.

- a. Sangat pragmatis, utilitarian, dan mendekati sikap oportunistik, serta kurang berpandangan jauh ke depan. Kondisi semacam ini melemahkan etos kerja pemuda.
- b. Ingin mencapai segala sesuatu secara cepat dan mudah, konsumeris, dan tidak memperhatikan mutu. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap lemahnya kreativitas pemuda untuk menjadi yang terbaik.
- c. Kekurangan kreativitas budaya sebagai akibat dari pengonsumsiannya terlalu banyak budaya asing yang siap pakai.
- d. Individualis dan atomik, yakni mengalami kekaburan tentang nilai apa yang salah dan apa yang benar. Hal ini karena nilai-nilai baru yang muncul semakin menguat sementara nilai-nilai lama masih belum menghilang.
- e. Atomik, adalah kecenderungan untuk bekerja sendiri dengan kurang memperhatikan semangat bekerja secara berkelompok dan berorganisasi. Hal ini disebabkan perkembangan masyarakat, khususnya di perkotaan, lebih cenderung pada gaya kehidupan yang individualis.
- f. Konsekuensi dari penyeragaman dan tidak memberikan ruang perbedaan dalam pengungkapan akibat dari tekanan kekuasaan pada masa yang lalu telah menyebabkan kecenderungan budaya kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, termasuk bahasa sarkasme saat ini.

Karena munculnya ancaman kelunturan budaya pada generasi muda, termasuk nilai-nilai kepeloporan dan kebangsaan, jawaban kunci sesungguhnya terletak pada *penumbuhkembangan iklim demokrasi di kalangan kaum muda. Jadi, jati diri pemuda, seperti sikap kepeloporan dan kebangsaan, sesungguhnya segaris lurus dengan penciptaan iklim demokrasi.*

Hal ini disebabkan oleh hal-hal berikut.

Pertama, iklim demokrasi memberikan ruang bagi pemuda *berpartisipasi secara aktif* untuk ikut serta menentukan bentuk terbaik bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Di sini posisi pemuda bukan hanya objek, melainkan juga subjek bagi proses kelangsungan pembangunan nasional. Dengan demikian, *nilai-nilai kepeloporan, prakarsa, dan kreativitas akan semakin dinamis* di kalangan generasi muda.

Kedua, iklim demokrasi memberikan *ruang penyaluran perbedaan pendapat dan pandangan*. Di sini berlangsung proses kesadaran pemuda akan kebinekaan dan pluralitas bangsa. Dengan demikian, pada gilirannya hal itu akan mampu *meningkatkan rasa kebangsaan dan nasionalisme generasi muda.*

Ketiga, iklim demokrasi mendorong adanya rasa tanggung jawab terhadap generasi muda, yaitu mendorong generasi muda untuk memiliki moral pertanggungjawaban yang tinggi.

Keempat, iklim demokrasi berdiri di atas prinsip-prinsip keadilan, kebenaran dan kejujuran. Dengan demikian, iklim ini akan menumbuhkan *rasa saling percaya dan kohesi di antara kaum muda*, yang pada gilirannya akan mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

Kelima, demokrasi juga mensyaratkan *supremasi hukum* dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya-upaya pelurusan perwujudan pembangunan agar selalu sesuai dengan cita-cita *melalui konstitusi yang menjamin jalannya proses pembangunan dan kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa.*

Hari Sumpah Pemuda yang tiap tahun kita peringati sesungguhnya adalah upaya untuk mendorong kembali kepeloporan, semangat kebangsaan, persatuan, dan kesatuan, melalui demokratisasi di segala bidang, termasuk bahasa. Di samping itu, juga mengingat ancaman-ancaman budaya kekerasan, anarkis, dan disintegrasi yang muncul belakangan ini.

Dalam kaitan dengan bahasa Indonesia, perlu diwujudkan demokratisasi dalam berekspresi dan menghapuskan segala bentuk eufemisme bahasa sebagai akibat dari kekuasaan yang represif di masa yang lalu karena bertentangan dengan karakter bahasa Indonesia itu sendiri yang bersifat egaliter. Ungkapan para tokoh publik, khususnya birokrasi yang tidak transparan, misalnya *seorang yang salah*, dikatakan *kesalahan prosedural* demi melindungi pelaku, *hutang luar negeri* dikatakan sebagai *bantuan luar negeri*. Pengungkapan dengan bahasa yang tidak transparan tersebut, demi melindungi kekuasaan yang salah, harus dapat dihapuskan.

Saya yakin, upaya demokratisasi dalam segala bidang termasuk bahasa, justru akan memperkuat rasa kebangsaan dan jati diri generasi muda sebagaimana yang telah dimiliki oleh para pendahulunya.

Demikianlah, apa yang dapat saya kemukakan, terima kasih.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 3
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 08.00–09.00
Judul Makalah	: Sumpah Pemuda dan Jati Diri Generasi Muda Indonesia
Penyaji	: H.R. Agung Laksono (Menpora)
Pemandu	: Benny H. Hoed
Pencatat	: a. Ebah Suhaebah b. Puji Santosa
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Akhlan Husen, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

- 1) Eufemisme yang digunakan oleh golongan tua dipakai untuk memperpanjang kekuasaan. Bagaimana menurut pendapat Bapak?
- 2) Adakah upaya terpadu antarmenteri terkait untuk memikirkan kembali dalam mengarifi badai budaya Barat?

b. Jawaban:

Sejak awal, saya setuju bahwa eufemisme yang negatif harus kita hindarkan karena dalam pengertian tersebut terkandung makna yang sifatnya atau nuansanya tidak transparan atau ada yang disembunyikan, atau ada hal yang sifatnya ditutup-tutupi dari masyarakat. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir atau timbul rasa kekhawatiran yang berlebihan. Mengingat itu penting agar tidak melampaui batas sedemikian rupa sehingga tidak bisa dibedakan lagi oleh orang, mana yang betul dan mana yang tidak, mana yang ditutup-tutupi, mana yang transparan dan yang tidak transparan. Saya kira *warning* dari Bapak Presiden ada baiknya. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tahu bahwa ini sudah ada yang dihalus-haluskan dari yang sebenarnya. Akan tetapi, kalau kemudian Pak Anton atau tokoh-tokoh bahasa yang mengatakan bahwa dalam rangka penghalusan kalimat "mau ke toilet" menggantikan kalimat "mau kencing" dalam rangka sopan santun, saya sependapat. Akan tetapi, kalau dimaksudkan untuk menutupi sesuatu, untuk tujuan tertentu, apalagi kalau dikaitkan dengan usaha-usaha memperpanjang kekuasaan, untuk membenarkan tindakan-tindakan yang sebenarnya bertentangan dengan semangat demokratisasi sendiri, semangat Pancasila dan UUD 1945, lalu dilakukan membenaran-pembenaran, saya tidak setuju. Justifikasinya itu dilakukan dengan cara eufemisme, saya kira dalam konteks ini eufemisme harus kita hindarkan karena ini sama dengan membodohi atau membohongi masyarakat. Makanya, dulu seringkali kalau ada kenaikan harga bahan bakar minyak tidak disebutkan sebagai *kenaikan*, tetapi *disesuaikan*. Padahal, orang tahu penyesuaian tidak ke bawah, tetapi ke atas, yang sama juga dengan *dinaikkan*.

Terhadap hal-hal seperti ini, terus terang saja, apalagi dalam semangat keterbukaan, saya kira apa yang disampaikan Saudara Akhlan dan Saudara Fuad tidak berbeda semangatnya dengan yang saya kemukakan. Tidak berarti bahwa kita menggeneralisasi segala yang bersifat eufemisme itu negatif, tidak demikian. Akan tetapi, penggunaan penghalusan bahasa dalam pengertian negatif, saya kira Bapak-bapak dan Ibu-ibu, tidak sependapat karena tidak sesuai dengan pendidikan, termasuk pendidikan politik masyarakat kita, lebih-lebih generasi mudanya. Jadi, yang dikatakan tadi, saya kira, dalam makna itu sebab kalau eufemisme ini kemudian terlalu dibebaskan, bisa saja kita menerjemahkan undang-undang dengan penghalusan. Sekarang terang-terangan saja. Rantap MPR mendatang, masa periodisasi presiden, masa jabatan presiden hanya maksimum dua kali dan wakil presiden dua kali. Tidak ada terjemahan-terjemahan yang lain.

2. Penanya: Mayong Maman, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Ada dua fenomena yang sangat berpolaritas, yaitu eufemisme dari kalangan tua, khususnya pejabat di pihak pertama, dan ada fenomena sarkasme di kalangan kaum muda, di pihak lain. Keduanya merupakan hal yang bertentangan, seperti *bantuan versus utang luar negeri*. Akibatnya, kaum muda tidak menyadari negaranya berutang banyak. Perlu dipertimbangkan secara baik kebiasaan eufemisme di kalangan pejabat sehingga generasi muda mempunyai tanggung jawab terhadap utang-utang dan sebagainya itu. Begitu pula pemakaian kata *kami* yang menyiratkan suatu sikap enggan bertanggung jawab secara perorangan jika ada kesalahan dalam tindakan.

b. Jawaban:

Mengenai usaha-usaha dalam rangka menghadapi badai budaya, terutama yang berdampak negatif pada budaya kita, dalam hal ini oleh menteri yang terkait sudah dilakukan koordinasi yang sangat intens untuk menghadapi masa krisis sekarang. Kabinet Reformasi Pembangunan dan seluruh jajaran kabinet, dan instansi yang terkait langsung, melakukan upaya secara bersamaan dalam *crisis center* sehingga usaha-usaha itu terpadu. Usaha itu terutama dalam mewujudkan *social safety net* 'jaringan pengamanan sosial' agar masyarakat betul-betul dapat diringankan atau setidaknya-tidaknya dalam upaya memulihkan dampak negatif dari krisis ekonomi itu yang bebannya memukul hebat sebagian besar rakyat Indonesia. Tiba-tiba saja penduduk miskin dan masyarakat prasejahtera meningkat sekian persen dari 20 juta menjadi di atas 50 juta. Ini tentu saja merupakan suatu hal yang perlu mendapatkan perhatian. Dan, pemerintah memiliki program dalam rangka turut meringankan beban masyarakat agar jangan sampai menimbulkan masalah-masalah sosial di kemudian hari. Misalnya, ada satu generasi yang tidak sempat mengikuti pendidikan karena orang tuanya tidak mampu menyekolahkan karena tidak mempunyai uang. Uang itu lebih baik di-

pakai untuk berbelanja sembako. Oleh karena itu, lahir program-program beasiswa dan program kesehatan. Ini menunjukkan bahwa ada upaya terpadu yang dilakukan secara terkoordinasi antarsektor dan antarinstansi. Demikian pula dalam sektor budaya, upaya terpadu telah dilakukan dengan *leading* sektornya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

3. Penanya: Adi Sunaryo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah semangat demokratisasi itu tidak mengarah ke vulgarisme kalau tidak dilandasi oleh suatu keyakinan falsafah bangsa dan negara?
- 2) Bagaimana upaya pemimpin generasi muda untuk meningkatkan kualitas sikap mental kalau hanya ditekankan pada penumbuhkembangan iklim demokratisasi saja sehingga tidak jelas demokrasi yang mana?
- 3) Apakah lebih baik jika semua pertanggungjawaban dilandasi rasa memiliki?

b. Jawaban:

Mengenai demokratisasi yang kita jalankan, seperti tadi sudah saya katakan, salah satu kata kunci untuk memberdayakan pemuda kita agar jati dirinya tetap sama sebagaimana yang kita lihat pada awal abad 20, kelahiran kebangkitan nasional, kemudian Sumpah Pemuda, kemerdekaan adalah mengembangkan demokratisasi di kalangan kehidupan bangsa, terlebih-lebih lagi di kalangan generasi mudanya. Hal ini terasa sekali akan membentuk jati diri yang terlihat seperti kepeloporan dan keberanian mengemukakan pendapat. Itu tentu saja harus dilandasi falsafah Pancasila. Kita tidak ingin menjadi liberal sehingga demokratisasi akhirnya justru *counter productive* karena akan menimbulkan hal-hal yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kekhawatiran itu mungkin muncul apabila kita tidak disiplin dan tidak memegang teguh rambu-rambu yang ada, yaitu Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, merupakan kewajiban pemerintah, organisasi-organisasi kemasyarakatan, dan orsospol, untuk mengingatkan masyarakat, tokoh-tokoh, anggota, dan simpatisannya agar menjaga jangan sampai terjebak pada hal-hal yang menimbulkan perpecahan bangsa yang terlalu mahal harganya. Jadi, saya setuju bahwa demokratisasi yang dilakukan tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian, pengembangan ini akan memperkokoh jati diri pemuda sehingga akan ada kemampuan dari pemuda itu sendiri dalam mengekspresikan keinginan, pendapat, atau pemikiran-pemikirannya. Tidak ada penggerakan atau kecurigaan sebab pada masa-masa yang lalu pernah muncul kelompok pemuda atau kelompok masyarakat di luar pemerintah yang pernah bersuara berbeda dianggap pembangkangan dan dicurigai sehingga ada semacam sikap apriori. Reaksi dari masyarakat itu sendiri terhadap apa yang disampaikan pemerintah disikapi dengan apriori atau dianggap sesuatu yang tidak benar, dicurigai, hanya semata-mata untuk memperpanjang kekuasaan, untuk mempertahankan kekuasaan. Situasi yang tidak menguntungkan ini harus diakhiri. Dalam era reformasi ini kesempatan terbuka

untuk meletakkan hal-hal yang demikian secara proporsional. Untunglah bahwa semangat demokratisasi kita berpegang pada falsafah negara, Pancasila. Dengan demikian, kita tidak jauh melenceng sehingga akan merugikan sendi-sendi kehidupan kita bermasyarakat dan bernegara.

Saya sependapat bahwa semua pertanggungjawaban harus dilandasi rasa memiliki karena masalah pertanggungjawaban atau akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam kepemimpinan di masa mendatang yang berintikan pada memperkukuh landasan moral dan etika bangsa kita di kemudian hari, antara lain, adalah memperkukuh jati diri dengan masalah yang berkaitan dengan aspek moralitas. Moralitas yang baik akan turut membangun kepemimpinan yang baik. Pada gilirannya akan tercipta pemerintahan yang bersih, yang bebas dari KKN. Ini semua merupakan langkah berikutnya yang tentu merupakan hal yang positif sebagai akibat tumbuhnya nilai-nilai moral pada kepemimpinan bangsa Indonesia yang diawali oleh kepemimpinan pemuda-pemuda kita. Dengan demikian, demokratisasi tetap akan diletakkan pada posisi yang strategis dalam rangka membangun, memperkukuh jati diri pemuda kita. Saya akan beranggapan bahwa demokratisasi itu sangat penting. Rambu-rambu atau saran-saran tadi memang tepat, terutama yang berlandaskan Pancasila.

4. Penanya: Endang Lukito M., SLTPN 252 Jakarta

a. Pertanyaan:

Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi sebagian generasi muda yang sudah terpengaruh budaya asing siap pakai.

b. Jawaban:

Hal seperti itu merupakan tantangan bahwa ada masalah mendasar yang menjadikan pemuda kita sebagian seperti itu, tetapi itu generalisasi. Tidak semua pemuda kita begitu.

5. Penanya: Fuad Abdul Hamied, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

- 1) Ada kekhawatiran yang mencolok tentang penggunaan eufemisme. Permasalahannya, ini menjadi perhatian berbagai pihak. Menurut saya, eufemisme merupakan suatu gejala bahasa yang harus ada pada setiap bahasa, bukan sesuatu yang harus dihapuskan. Akan tetapi, penggunaannya harus wajar, bahasa tanpa eufemisme menjadi bahasa tidak berbudi. Oleh karena itu, yang menjadi persoalan adalah bagaimana orang memanfaatkan eufemisme, baik untuk mempertahankan kekuasaan maupun untuk mempertahankan posisi masing-masing dalam dirinya? Menurut hemat saya, eufemisme merupakan suatu kekuatan yang penting dalam bahasa sebagai alat komunikasi.
- 2) Bagaimana pandangan Bapak tentang harapan kita agar generasi muda juga mampu berbahasa sehingga mereka bisa berkibrah secara positif dalam era

globalisasi dalam kaitannya dengan kemampuan berbahasa asing dan jati diri dikaitkan dengan kemampuan berbahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Era globalisasi yang menuntut daya saing bangsa membutuhkan kemampuan kita untuk segera menyosialisasikan diri di lingkungan pergaulan internasional, terlebih-lebih lagi dalam rangka mewujudkan era perdagangan bebas, sebagaimana yang telah disepakati negara-negara di dunia, termasuk Indonesia. Konsekuensi dari hal ini adalah harus ada kemampuan kita untuk berkomunikasi dalam segala bidang, tidak saja dalam bidang ekonomi. Secara gencar kita telah mengingatkan dan meminta kepada segenap bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan jangan menggunakan istilah asing yang membingungkan, terutama pada forum-forum resmi. Kalau hanya digunakan dalam pergaulan sehari-hari sebagai usaha untuk mengadopsi bahasa asing bukan digunakan pada saluran-saluran formal, itu bisa diterima. Atau, secara bertahap, kita mengadopsi bahasa asing sehingga istilah-istilah asing itu digunakan sebagai sesuatu yang bisa kita mengerti. Akan tetapi, kalau sekadar bergaya-gaya saja, sekadar untuk menimbulkan kesan bahwa ia adalah kaum intelektual, kemudian mengacak-acak bahasa Indonesia maka penyelipan istilah-istilah asing memang harus kita hindarkan. Namun, kita tidak boleh lantas anti-pati atau tidak mengembangkan kemampuan kita berbahasa asing. Ini akan menyulitkan dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa kita. Demikian juga dengan semangat etos kerja. Baru-baru ini saya menyelenggarakan program kerja sama pemuda Indonesia dan Singapura untuk *operation release* di salah satu kepulauan di Riau, yaitu Pulau Batam yang dekat dengan Singapura. Kerja sama ini membutuhkan 200 orang pemuda, 100 dari Indonesia dan 100 dari Singapura. Sebanyak 100 orang dari Singapura perekrutannya dilakukan oleh pemerintah Singapura dengan mudah walaupun pemuda itu diseleksi dan harus membayar biaya sendiri. Untuk pemuda Indonesia, 100 orang itu sulit dicari walaupun tidak dikenakan pembayaran. Bahkan, ada bisik-bisik yang bertanya apakah ada honorinya. Semangat kerja pemuda-pemuda itu berbeda. Semangat kerja pemuda Singapura stabil dari awal, sedangkan semangat kerja pemuda Indonesia lambat, kemudian baru stabil.

Ini merupakan tantangan bahwa ada masalah-masalah mendasar yang menimbulkan pemuda kita, sebagian di antaranya, demikian. Akan tetapi, ini generalisasi. Tidak semua pemuda kita demikian. Ini tantangan kita semua, terutama pendidik, dalam rangka mengangkat etos kerja kita. Belum lagi masalah keseharian pemuda Singapura yang sudah biasa hidup di tempat yang terorganisasi dengan baik, kalau harus memperbaiki kampung sebagai upaya *back to nature* 'kembali ke alam' buat mereka sebagai sesuatu yang sangat luar biasa, sangat menarik. Namun, pemuda kita yang kesehariannya hidup miskin, memperbaiki kampung bukan sesuatu yang aneh. Inilah masalah mendasar yang harus kita perbaiki sehingga akan lahir pemuda yang siap membantu orang lain.

PERANAN BAHASA INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA

Agum Gumelar
Lembaga Ketahanan Nasional

Dengan rasa bahagia saya penuhi permohonan Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menjadi panelis pada Kongres Bahasa Indonesia VII tahun 1998 ini. Rasa bahagia tersebut sungguh saya rasakan karena saya akan berhadapan dengan para pemerhati, pembina, dan pengembang bahasa Indonesia. Saya menyadari bahwa tugas, peranan, dan misi yang diemban para pembina dan pengembang bahasa merupakan titik sentral dalam pola pembinaan bangsa. Pernyataan itu tidak berlebih karena melalui bahasa, kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina, dan dikembangkan serta dapat diturunkan kepada generasi mendatang. Dengan adanya bahasa sebagai alat komunikasi, semua yang berada di sekitar manusia: peristiwa, binatang, tumbuh-tumbuhan, hasil cipta karya manusia, dan sebagainya ditanggapi oleh pikiran manusia, kemudian disusun dan diungkapkan kembali kepada orang lain. Bahasa memungkinkan orang mengenal jati dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungannya, dan menjadi dewasa. Dengan kata lain, bahasa mempunyai aspek komunikatif, edukatif, dan koordinatif, sekaligus mempunyai peran dan fungsi yang khas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam membentuk dan mengembangkan kebudayaan itu sendiri. Selain itu, bahasa mempunyai fungsi dan peran tersendiri di samping fungsi dan perannya dalam kebahasaan. Secara historis, peran bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu amatlah besar dalam mempersatukan suku-suku bangsa di kepulauan Nusantara dan dalam mendukung proses pembentukan satu kesatuan bangsa menjadi satu kesatuan wilayah, ekonomi, politik, dan budaya.

Dengan bertolak dari pemikiran itulah, ingin saya sampaikan rasa gembira dan terima kasih kepada Panitia Penyelenggara, khususnya kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atas kesempatan yang diberikan sehingga saya berhadapan dengan Bapak, Ibu, Saudara-Saudari, peserta kongres yang mulia.

Hal yang penting yang ingin saya tekankan ialah bahwa makalah ini tidak bermaksud menggurui Bapak, Ibu, Saudara-Saudari peserta kongres yang tingkat keparakan juga dalam berbahasa Indonesia dan upaya pembinaan dan pengembangannya tidak diragukan lagi. Makalah ini hendaknya dianggap sebagai sejumput sumbangan kecil yang dipersembahkan kepada masyarakat bahasa dan dapat diterima sebagai peristiwa transaksi asah, asih, asuh yang dapat saling memperkaya kita.

Sebelum menyampaikan materi ceramah tentang peran bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan informasi tentang Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhannas, terutama dalam perkembangan saat ini.

Lemhannas dilahirkan pada tanggal 20 Mei 1965, pada masa itu disebut dengan

nama Lembaga Pertahanan Nasional. Lemhannas, yang dibentuk berdasarkan keputusan Presiden, semula merupakan lembaga yang langsung berada di bawah Presiden. Dalam perkembangan selanjutnya lembaga ini diletakkan di bawah pengelolaan Mabes ABRI. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 4 Tahun 1994 tanggal 1 Februari 1994, pengelolaan dialihkan ke Dephankam dengan nama Lembaga Ketahanan Nasional, yang bentuk singkatnya Lemhannas.

Beberapa tugas pokok Lemhannas, antara lain, sebagai berikut.

Pertama, melakukan pengkajian masalah strategis nasional secara komprehensif-integral atau utuh menyeluruh untuk disampaikan kepada Presiden sebagai saran dalam rangka penentuan kebijaksanaan nasional, khususnya yang berkaitan dengan ketahanan nasional.

Kedua, mengembangkan pemantapan kader pemimpin tingkat nasional yang integritatif, yang diselenggarakan melalui pola pendidikan atau kursus, baik yang bersifat reguler maupun yang singkat. Sampai saat ini Lemhannas telah berhasil menyelenggarakan 30 angkatan kursus reguler dan 6 angkatan kursus singkat, di samping berbagai kursus lain, seperti Kursus Calon Dosen Kewiraan (Susca-doswir), Kursus Kewaspadaan Nasional (Suspadnas), Kursus Pimpinan Migas (Suspimigas), dan Kursus Pimpinan Khusus Gabungan BUMN (Suspimsugab BUMN) dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait.

Ketiga, memasyarakatkan dan mengembangkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, sebagai doktrin dasar nasional.

Pada saat ini di Lemhannas sedang diselenggarakan Kursus Reguler Angkatan XXXI dengan peserta berjumlah 80 orang yang terdiri dari 39 peserta ABRI dan 41 peserta sipil. Peserta yang mengikuti kursus di Lemhannas tidak disebut sebagai siswa karena memang mereka tidak berstatus siswa. Mereka disebut sebagai peserta yang pada dasarnya merupakan peserta pengkajian. Nanti pada akhir kursus para peserta akan mengadakan seminar, yang hasilnya akan langsung disampaikan kepada Presiden.

Sebagai media komunikasi pada umumnya, bahasa harus mampu menjadi penghubung antara pemberi berita dan penerima berita sehingga pada kedua belah pihak terdapat pengertian bersama atau terbentuk saling pengertian. Kalau saling pengertian tersebut tidak juga terbentuk berarti komunikasi belum berfungsi sebagaimana mestinya. Sebagai media komunikasi di lingkungan bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sudah semestinya mampu membentuk saling pengertian antarsesama putra bangsa, yang secara keseluruhan memiliki kepentingan bersama, yaitu aman dan utuhnya Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berhasilnya pelaksanaan pembangunan nasional. Hal itu berarti bahwa setiap putra bangsa selayaknya mampu memahami penggunaan bahasa Indonesia dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam kehidupan bermasyarakat, pada dasarnya bahasa Indonesia berperan sebagai media pergaulan antarsesama warga, dalam kalangan profesi, pendidikan, organisasi sosial, dan sebagainya. Dalam pergaulan sesama warganya, dengan kedudukan yang setara antarpembicara, biasanya digunakan bahasa pergaulan dengan perkataan yang pada umumnya singkat dan padat, bahkan seringkali digunakan bahasa khusus yang dikenal dengan istilah "prokem" sehingga tercipta keakraban dalam pergaulan dan

keadaan inilah yang diharapkan. Di kalangan pendidikan sering digunakan jargon atau ungkapan tertentu yang sudah jelas dikenal maksudnya di samping perkataan dan simbol-simbol yang mudah dimengerti sehingga mempermudah penalaran dalam rangka memperluas pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan.

Sesuai dengan budaya yang pada umumnya berlaku di Indonesia, dalam masyarakat selalu terdapat pengaturan tingkat atau strata yang menempatkan kedudukan seseorang mulai dari golongan yang dipimpin sampai dengan tokoh yang memimpin. Dengan adanya strata kedudukan tersebut terjadi pula pengaturan penggunaan bahasa atau perkataan. Bahasa yang digunakan oleh golongan yang muda terhadap yang lebih tua atau oleh yang berkedudukan rendah terhadap yang lebih tinggi tidak sepenuhnya sama dengan bahasa yang digunakan dalam arah yang sebaliknya. Perbedaan ini semata-mata menggambarkan hadirnya sopan santun dalam kehidupan bermasyarakat yang perlu terus dipelihara. Pada kelanjutannya, adanya sopan santun menggugah kesadaran akan tanggung jawab kedua belah pihak. Bagi yang memimpin sudah selayaknya tergerak rasa untuk memperbaiki keadaan dari kelompok yang dipimpinnya sebagai balasan atas kehormatan yang diterimanya dan bagi yang dipimpin tertanam keikhlasan untuk mengikuti arahan dari pemimpinnya.

Selain adanya penggunaan bahasa secara setara dan hierarkis, dalam masyarakat Indonesia terdapat pula bentuk karya yang menampilkan keindahan yang bernilai seni dan memerlukan ragam bahasa Indonesia tersendiri. Hal itu menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia memiliki cita rasa dalam bahasa, yang mampu menampilkan perkataan indah secara tertulis ataupun lisan, yang keseluruhannya menggambarkan sebagian dari kekayaan budaya bangsa.

Dengan demikian, dalam perannya sebagai media pergaulan dalam masyarakat, bahasa Indonesia sudah selayaknya mampu mengembangkan keakraban yang mempererat hubungan antarputra bangsa. Bahasa Indonesia dapat digunakan untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kecerdasan bangsa, dapat digunakan untuk memelihara dan memantapkan rasa sopan santun yang membawa keluhuran budi pekerti, serta mampu menampilkan keindahan yang memperhalus cita dan mempertajam rasa.

Kita mengenal kata serangkai "budi-bahasa" gabungan kata yang saling memberikan makna. Budi pekerti seseorang akan tercermin dari bahasa yang digunakannya dan sebaliknya, bahasa yang merasuki jiwa seseorang akan mempengaruhi budi pekertinya. Apabila beberapa minggu yang lalu terpapar di hadapan kita pekerti yang kasar, kejam, bengis, bahkan gembira di atas kehancuran dan penderitaan orang lain, sebaiknya kita berpikir apakah hal itu juga terbawa oleh bahasa yang setiap kali terdengar di telinga kita, yang sering terkesan kasar dan kejam.

Selanjutnya, bagaimana ihwal peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa? Sejak Kongres Pemuda pada tahun 1928, bahasa Indonesia telah menjadi "bahasa bersama" dari ratusan suku yang mendiami wilayah Nusantara. Bahasa Indonesia telah menjadi perekat berbagai budaya daerah dan adat istiadat, yang berkembang dalam masyarakat. Dengan menyadari bahwa bahasa Indonesia menjadi sarana pemersatu dalam kehidupan berbangsa, ada tiga nuansa yang perlu kita pikirkan.

Pertama, bahasa Indonesia harus mampu menampung kosakata dari bahasa-bahasa

daerah yang ada di tanah air. Dengan digunakannya kosakata yang diambil dari bahasa daerah menjadi bahasa nasional, mereka merasa bersama-sama memilikinya. Sebagai contoh, kita mengenal gabungan kata "tiga tungku sejarangan" yang berasal dari daerah Minangkabau. Kosakata *sejarangan* dapat kita angkat dalam bahasa nasional yang berarti menyatu. Contoh lain, misalnya dipetik dari salah satu nyanyian daerah Maluku, yaitu "Pela Gandong". Kata *pela* yang dapat dipadankan dengan 'kerukunan' atau 'kekerabatan' dapat pula diangkat menjadi kosa kata bahasa nasional. Itulah sekadar contoh yang tentu dapat dikembangkan oleh para pakar bahasa.

Kedua, bahasa Indonesia yang diangkat sebagai bahasa nasional harus mudah diucapkan dan mudah dimengerti. Kita semua memahami bahwa ada lafal dari bahasa daerah yang sulit diucapkan secara tepat oleh mereka yang datang dari daerah lain karena terdiri dari jajaran dua atau tiga huruf hidup. Seperti kata *sieun* yang berarti 'takut' dari daerah Jawa Barat akan sulit diucapkan oleh orang yang berasal dari Jawa Tengah. Dengan memperhatikan kendala susunan huruf tersebut, seyogyanya kosakata bahasa daerah yang pengucapannya sulit oleh penduduk lain, tidak diangkat menjadi bahasa nasional agar tidak menimbulkan keraguan pengucapannya dan tidak menimbulkan kegelian bagi "pemilik bahasa".

Ketiga, dalam pembakuan kosakata bahasa Indonesia kata yang diangkat itu harus tidak berpengertian tabu dalam bahasa daerah. Di samping itu, tiap kata harus memiliki ketetapan atau kepastian arti. Kita ambil contoh, ada kata *pantek* yang dalam bahasa Jawa artinya 'pasak'. Namun, kata tersebut mempunyai arti lain dalam bahasa daerah Minangkabau sehingga tidak perlu diangkat menjadi bahasa nasional. Demikian pula, untuk kata yang sudah mempunyai kepastian arti dalam bahasa Indonesia, perlu dihindarkan pengangkatan kata dari bahasa daerah yang memiliki arti lain. Contoh, kata *tampar* dalam bahasa Indonesia berarti 'tempeleng' sedangkan arti *tampar* dari bahasa Jawa berarti 'tali'. Hal itu akan menimbulkan kerancuan apabila keduanya dijadikan bahasa Indonesia baku. Contoh lain, adalah kata *rawan*. Apabila digabungkan dengan kata *kecelakaan* menjadi *rawan kecelakaan* maka artinya akan lain apabila dihubungkan dengan kata *pangan* menjadi *rawan pangan*. Yang pertama diartikan 'banyak', 'sering', sedangkan yang kedua diartikan 'kekurangan' atau 'sedikit'. Contoh terakhir ini perlu mendapat perhatian dari pakar bahasa untuk menentukan kepastian maknanya. Alangkah baiknya jika diberlakukan dalam bahasa Indonesia, satu kata dengan satu pengertian. Dalam bahasa Jawa ada kata *gitik* dan *gebug* yang secara umum artinya sama, yaitu 'pukul'. Namun, dalam kedua kata tersebut terdapat perbedaan yang nyata bagaimana cara melakukan gerak memukul. Sebaliknya, kata *bisa* memiliki dua pengertian yaitu 'mampu' serta 'semacam zat yang menyertai sengatan serangga dan gigitan ular'. Kiranya pengertian pertama pantas digugurkan karena sudah diwakili kata *dapat* sehingga pengertian kedua saja yang diberlakukan.

Demikianlah beberapa nuansa yang perlu kita pikirkan agar peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dapat benar-benar menjadi sarana pemersatu.

Terbentuknya atau berdirinya suatu negara merupakan hasil suatu proses yang mendorong manusia yang hidup di suatu wilayah tertentu dan menghadapi nasib yang sama serta menyerahkan wewenang untuk menjamin nasib bersama tersebut kepada

suatu lembaga yang disebut negara. Dengan demikian, isi suatu negara adalah himpunan manusia yang merasa bernasib sama, dan selanjutnya warga negara tersebut menyerahkan pengaturan dirinya termasuk hak dan kewajibannya kepada negara. Penyerahan kewenangan pengaturan tersebut menimbulkan kekuasaan hukum yang dalam penyelenggaraannya dapat memenuhi harapan dan cita-citanya. Dalam rangka melakukan pengaturan inilah, peran bahasa Indonesia sangatlah penting mengingat negara Indonesia meliputi wilayah yang sangat luas, terdiri dari ribuan pulau, dengan jumlah penduduk yang cukup besar, serta menampung berbagai suku, agama, adat istiadat, dan sebagainya.

Oleh sebab itu, bahasa Indonesia sebagai alat pengatur dan sekaligus pengendali, haruslah dapat memberikan kepastian atau ketetapan yang jelas dan tidak mudah disalahartikan. Dengan kata lain, bahasa Indonesia harus lugas. Sebaiknya dihindarkan penggunaan kosakata atau istilah yang memiliki banyak arti seperti istilah "ditindak tegas", yang dapat diartikan dipukul, ditendang, dilumpuhkan, dimatikan, dan sebagainya. Mana yang dipilih?

Dipilihnya bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa Melayu Riau oleh para pemuda yang berikrar pada tanggal 28 Oktober 1928, sangatlah tepat karena bahasa ini, antara lain, tidak mengenal tingkatan-tingkatan seperti halnya dalam bahasa Jawa ataupun Sunda yang bagi suku bangsa lainnya menimbulkan kesulitan untuk mengidentifikasi dirinya dengan Indonesia. Pemberlakuan satu bahasa yang sama, ditinjau dari segi kegunaannya, memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena tidak seperti halnya di salah satu negara di Eropa yang menggunakan tiga bahasa sebagai bahasa nasionalnya sehingga setiap buku dan dokumen perlu ditulis dalam tiga bahasa tersebut. Di samping tuntutan untuk mudah dimengerti dan diingat, kosakata tertentu yang berfungsi sebagai pengatur dan sekaligus pengendali, serta rangkaian kata atau kalimat yang digunakan, hendaknya singkat. Namun, walaupun singkat, seyogyanya sudah menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan masalahnya, misalnya istilah *barang siapa* atau *semua orang*. Contohnya, *barang siapa yang memperdagangkan sesuatu barang keluar daerah harus membayar retribusi*. Kata *barang siapa* bermakna tidak membedakan siapa saja atau dari kalangan mana saja. Dengan demikian, tetap dapat dijamin kejelasan yang pada akhirnya memberikan kepastian tanpa harus mengaturnya dalam beberapa ketentuan.

Ketentuan yang dibuat singkat tersebut bertujuan untuk mudah diingat atau dimengerti oleh setiap orang, terutama warga negara Indonesia, mengingat adanya perbedaan tingkat pendidikan ataupun kecerdasan yang ada dalam masyarakat. Ketentuan yang dibuat dengan menggunakan bahasa yang sulit dimengerti, bahkan sulit diingat, akan menghambat proses pemasyarakatan atau sosialisasinya dan akhirnya akan mempengaruhi tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang ada. Apabila tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat rendah, keteraturan ataupun ketertiban yang diharapkan akan sulit dicapai.

Pengaruh terbesar yang diterima masyarakat dalam penggunaan bahasa datang melalui media massa, baik yang tercetak, yang auditif, maupun yang audiovisual. Hal itu dapat dimengerti karena melalui media massa itulah masyarakat memenuhi ke-

butuhnya akan informasi, hiburan, dan pengetahuan. Sebagaimana orang menerima bingkisan, yang mendapatkan perhatian bukan saja isinya, melainkan juga kemasannya. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan untuk mengemas informasi, hiburan, dan pengetahuan tersebut akan sangat berpengaruh terhadap penerimanya. Bahasa media massa akan selalu dianggap sebagai bahasa yang benar meskipun kadang-kadang mengandung cacat. Cobalah kita rasakan pernyataan yang ditampilkan pada bagian akhir warta berita dunia TVRI: "Berita terakhir diterima TVRI". Bandingkan dengan: "berita terakhir yang diterima TVRI". Dengan hilangnya kata '*yang*' yang hanya satu suku kata dan waktu seperlima detik untuk mengucapkannya, pernyataan tersebut menjadi terkesan kaku dan tidak menampilkan makna yang dimaksud. Pernyataan tersebut hanya menampilkan maksud bahwa ada berita yang diterima TVRI, tetapi belum menyentuh bagaimana gambaran tentang berita tersebut. Hendaknya dicegah pemberitaan yang menggunakan "bahasa cacat" karena hal itu dapat membuat mitra bicara menjadi enggan berkomunikasi. Barangkali cacat bahasa tersebut terbawa oleh pengaruh bahasa asing, melalui kebiasaan mencampuradukkan penggunaan bahasa asing dalam berbahasa Indonesia. Apabila penggunaan bahasa asing tersebut sekadar untuk mempermudah penyampaian gagasan yang belum terkemas dalam bahasa Indonesia, hal itu biasanya mudah diterima. Akan tetapi, apabila hal itu ditujukan untuk memamerkan kemampuan berbahasa asing, mitra bicara juga akan enggan untuk melanjutkan komunikasi.

Kadang-kadang terjadi hambatan dalam membangun keakraban sebagai akibat tidak digunakannya bahasa Indonesia dalam berkomunikasi di Indonesia. Dalam kehidupan sosial hal itu sebenarnya wajar saja karena di lingkungan bangsa Indonesia terdapat ratusan suku bangsa yang memiliki bahasa atau dialek sendiri. Namun, dalam alam kehidupan bangsa Indonesia besar sekali kemungkinan hadirnya seseorang dari luar lingkungan suatu etnik yang tentunya akan merasa tersisih dari keterlibatannya apabila pembicaraan yang berlangsung tidak dipahaminya.

Kendala lain terhadap penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa adalah luasnya wilayah Indonesia dan banyaknya masyarakat yang mendiami daerah terpencil yang membuat pembangunan sekolah belum mampu memenuhi harapan sehingga beberapa daerah belum terjangkau oleh pendidikan. Keadaan itu berakibat pada masih banyaknya masyarakat yang terbelenggu dalam ketidakkenalan akan aksara, serta terbatasnya komunikasi pada penggunaan bahasa lisan daerah. Jadi, dapat dimengerti kalau masyarakat semacam itu mengalami kesulitan dalam berkomunikasi dengan saudara sebangsanya yang berasal dari daerah lain. Kecuali keluarga hasil asimilasi, maka hampir semua anak Indonesia harus menempuh proses belajar agar mampu menguasai dan menggunakan bahasa Indonesia sebaik-baiknya untuk berkomunikasi. Tanpa hadirnya sekolah dengan guru-guru yang andal di segenap bagian tanah air, sulit untuk menghilangkan kendala terhadap penggunaan bahasa Indonesia sebagai media persatuan bangsa. Apalagi kalau siaran radio nasional juga tidak mampu mencapai daerah pelosok. Yang tidak kalah rumitnya adalah hambatan akibat kurangnya sirkulasi masyarakat Indonesia di seluruh wilayah tanah air, terutama di bagian timur, baik yang berkaitan dengan kegiatan di bidang politik, ekonomi, sosial-budaya,

maupun hankam. Terbatasnya sarana dan prasarana transportasi mengakibatkan jarang-nya kunjungan para pejabat pemerintah ke daerah pelosok sehingga jarang pula terjadi pertemuan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai media. Bahkan, sering terjadi pejabat daerah yang berasal dari daerah lain menggunakan bahasa daerah setempat untuk mempermudah komunikasi. Meskipun baik, hal itu sebenarnya kurang mendidik. Di bidang lain, sebagai akibat dari kurangnya produksi suatu daerah, perdagangan yang mempererat pergaulan warga sebangsa masih jauh dari harapan. Banyak lagi contoh yang mengemukakan bahwa kurangnya hubungan antardaerah mengakibatkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai perekat kehidupan berbangsa masih terhambat.

Sebagai bahasa yang "hidup" dan "tumbuh", bahasa Indonesia memerlukan banyak tambahan kosakata dari bahasa daerah, terutama istilah-istilah yang mengandung pengertian tertentu. Pemahaman istilah tersebut hendaknya dibantu oleh suatu penjelasan agar pemakai memiliki kesamaan pengertian. Dalam bernegara ada istilah *pamong praja* yang berasal dari bahasa Jawa. Tanpa memahami pengertiannya, orang yang memangku jabatan *pamong praja* belum tentu paham akan pesan yang terkandung dalam jabatan tersebut sehingga pantas diragukan bahwa pejabatnya akan menangani fungsinya sebagaimana yang diharapkan. Dalam menghadapi persoalan semacam itu, bahasa Indonesia perlu memberikan penjelasan yang luas. Dalam *Kamus Umum Bahasa Indonesia* susunan W.J.S. Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka tercantum pengertian *pamong praja*, yaitu 'pegawai yang mengurus pemerintahan negara'. Karena penjelasan yang begitu dangkal, tidak mustahil pejabatnya tanpa sadar beralih peran sebagai *pangreh praja*. Apabila terjadi demikian, kesalahan tersebut tidak terlepas dari tanggung jawab para pakar bahasa Indonesia.

Dalam meng-*emong* suatu *praja* sudah pada tempatnya apabila pihak yang memimpin menerbitkan aturan yang harus ditaati oleh pihak yang dipimpin. Sebaliknya, pihak yang dipimpin wajib memahami kehendak pihak yang memimpin melalui rumusan peraturannya. Namun, pada kenyataannya masih ditemui kata-kata "bersayap" yang dapat berpindah makna seperti *amankan si Amat* yang dapat berarti 'membuat si Amat dalam keadaan selamat', tetapi juga dapat berarti membuat si Amat tidak berdaya'. Barangkali penggunaan kata-kata tersebut bermaksud untuk menghaluskan makna seperti *rumahkan karyawan* atau isyarat seperti *lakukan kuningisasi*. Namun, secara keseluruhan, kata-kata tersebut tidak memberikan pemahaman yang objektif sehingga pelaksana dapat bersikap ragu-ragu atau, bahkan, berbuat salah.

Bahasa Indonesia sudah semestinya merupakan bahasa yang paling tepat untuk digunakan dalam bermasyarakat di Indonesia. Sifatnya yang elagiter membuat siapa pun tidak ragu-ragu menghadapi orang lain. Tidak ada persoalan yang dihadapi dalam memilih kata yang tepat karena untuk menyatakan hormat hanya diperlukan penambahan kata seperti *silakan*, *sudilah kiranya*, dan *hendaknya*. Jadi, dengan membiasakan diri menggunakan perkataan pemberi hormat, orang tidak perlu khawatir dituduh sebagai telah berlaku tidak sopan. Penggunaan kata-kata tersebut tidak berarti harus mengurangi suasana akrab yang terbawa oleh bahasa akrab yang pada umumnya dibentuk melalui pemendekan kata dasarnya, seperti *gimana*, *nggak*, dan *ngerti*. Untuk

menciptakan suasana akrab, kita tidak perlu harus meninggalkan sopan santun. Adanya sopan santun dalam berbahasa justru akan meningkatkan keakraban karena semua pihak yang terlibat saling menghormati. Selain itu, adanya sopan santun dalam berbahasa menunjukkan bahwa bangsa Indonesia berbudi pekerti tinggi dan hal itu berpengaruh lanjut terhadap perilaku bangsa. Untuk dapat bersopan santun dalam berbahasa, orang harus terlebih dahulu mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar.

Mengingat bahwa wahana yang paling berpengaruh terhadap masyarakat adalah media massa, penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar, sebagai langkah menuju kemampuan bersopan santun dalam berbahasa, harus ditekankan kepada media massa. Penyusun tulisan, siaran, dan tayangan dalam media massa tentunya mereka yang mendapatkan kemampuan berbahasa Indonesia melalui bangku sekolah. Mereka hanya akan mampu berbahasa Indonesia secara baik dan benar apabila guru-guru sekolah tempat mereka menuntut pengetahuan mengajarnya demikian. Jadi, yang menjadi pangkal dalam meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia adalah para guru, terutama guru bahasa Indonesia. Para guru tersebut dalam menyampaikan ajarannya kepada murid-muridnya, tentunya berdasarkan bimbingan dari para pembina bahasa Indonesia yang memang telah terhimpun dalam suatu organisasi. Secara rutin pembina bahasa Indonesia mengisi acara siaran RRI (*Aku Cinta Berbahasa Indonesia*) yang mampu mencapai seluruh wilayah Nusantara, tetapi (secara pribadi) terkesan bahwa siaran tersebut kurang terencana atau cenderung bersifat menunggu pertanyaan atau tanggapan dari pendengar. Di samping memperkenalkan kosakata baru, bimbingan tata bahasa Indonesia kiranya perlu terus-menerus dilakukan karena dari kerancuan penggunaan tata bahasa mengalirlah berbagai kesalahan dalam berbahasa Indonesia. Dibandingkan dengan tata bahasa asing, tata bahasa Indonesia boleh dikatakan sederhana. Namun, dalam kesederhanaan tersebut tersimpan beberapa kerumitan, misalnya dalam menghentikan aliran kata yang seharusnya diatur dengan tanda baca. Kalimat "Ibu-saya sakit" tentunya berbeda maknanya dengan "Ibu, saya sakit". Dengan adanya bimbingan tersebut yang membuat bahasa Indonesia tidak meyakini, bukan bangsa Indonesia yang beruntung, melainkan juga bangsa asing yang akhir-akhir ini menunjukkan peningkatan minat untuk mengenal dan memahami bahasa Indonesia.

Bagaimana agar bahasa Indonesia dapat menjadi perekat seluruh masyarakat yang mendiami wilayah dari Sabang hingga Merauke? Jawabnya mudah, yaitu "Jadikan bahasa Indonesia sebagai milik mereka!". Langkah yang perlu dilaksanakan di antaranya adalah dengan mengangkat kosakata dari berbagai bahasa daerah menjadi kosakata bahasa Indonesia. Dengan mengangkat kosakata dari bahasa suku-suku di Irian Jaya, dari Timor Timur, dan bahasa daerah lain sebanyak-banyaknya, mereka akan merasa satu sebagai bangsa Indonesia. Dengan menempatkan kosakata tersebut dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* lambat laun bahasa daerah tersebut akan makin populer digunakan dalam media komunikasi.

Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dipelajari oleh seluruh etnik di bumi Nusantara. Lebih dari 300 suku dengan bahasa daerahnya masing-masing harus belajar

bahasa Indonesia dari dasar. Oleh karena itu, sistem pendidikan bahasa Indonesia harus sistematis, baku, berpola, dan mudah diserap. Muatan buku-buku pelajaran bahasa Indonesia harus tertib, metode harus runtut dan tidak simpang siur. Sebagai contoh, untuk dapat merangkai suatu kalimat bahasa Indonesia, perlu diperkenalkan dahulu jenis-jenis kata, seperti kata benda, kata ganti, dan kata kerja. Kemudian, diperkenalkan pula cara merangkainya atau diberikan rangkaian kalimat secara langsung yang susunannya terdiri dari subjek-predikat-objek-keterangan. Kesimpangsiuran pola atau metode dalam memberikan pengertian dasar bahasa Indonesia akan mengakibatkan kerugian, baik yang bersifat material maupun yang tidak bersifat material. Penggunaan buku panduan menjadi beragam, sesuai dengan selera si pengarang, tetapi yang lebih merugikan lagi adalah timbulnya kebingungan yang dapat berlanjut menjadi ketidakpercayaan terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Hal itu dapat berdampak luas sehingga perlu diluruskan oleh para pakar pembina bahasa.

Pembinaan bahasa Indonesia lewat siaran RRI perlu digalakkan dan dipancarteruskan oleh seluruh pemancar radio di daerah. Hal itu bermanfaat untuk memberikan penjelasan. Kalau perlu, dengan bahasa daerah setempat dijelaskan istilah baru yang berasal dari daerah lain. Dengan memberikan penjelasan melalui bahasa daerah, akan diperoleh kepastian makna dari istilah tersebut.

Penyebarluasan dan penguasaan bahasa Indonesia merupakan langkah strategis karena banyak mengait pada sumber daya manusia. Apabila seluruh rakyat Indonesia memahami bahasa Indonesia dan dapat menggunakannya sebagai sarana komunikasi antarsuku yang berjumlah ratusan, maka beban untuk memajukan bangsa dan negara ini makin ringan. Program-program dan instruksi-instruksi pembangunan dapat langsung dicerna dan dilaksanakan. Prosedur dan aturan akan makin banyak dipahami yang pada akhirnya akan membuahkan keteraturan dan ketertiban. Undang-Undang Dasar 1945, sebagai hukum dasar tertulis yang sifatnya singkat dan luwes, masih memerlukan jabaran lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya. Penjabaran dan pengaturan lebih lanjut ini diharapkan akan mempermudah pelaksanaannya karena setiap jabaran yang dibuat sifatnya memperjelas ketentuan yang bersangkutan. Oleh karena itu, dalam membuat ketentuan dan penjabarannya harus dilakukan secara tertib, mengikuti kaidah-kaidah tertentu, seperti setiap undang-undang dibuat peraturan pelaksanaannya secara jelas dan lengkap sehingga di samping memberikan kepastian, juga tidak memberikan peluang bagi penafsiran yang bermacam-macam dalam pelaksanaannya. Kekurangjelasan dan kekuranglengkapan ketentuan itu akan mempersulit pelaksanaannya di lapangan sehingga tidak mustahil terjadi suatu ketentuan belum atau tidak dapat dilaksanakan selama ini hanya karena tidak dimengerti. Jadi, diperlukan rangkaian yang tertib agar selain mudah dimengerti, juga mudah dilaksanakan. Untuk itu, beberapa istilah seperti retribusi, eksekusi, eksepsi, dan yurisprudensi yang apabila tidak ada padanannya dalam bahasa daerah perlu ditingkatkan pemasyarakatannya sebagai kosa kata bahasa Indonesia.

Demikianlah pandangan saya tentang bahasa Indonesia yang pada dasarnya mengandung harapan agar penggunaannya dalam kehidupan bermasyarakat dapat mempererat keakraban, dalam kehidupan berbangsa dapat meningkatkan persatuan dan

kesatuan, serta dalam kehidupan bernegara dapat lebih memantapkan kepastian demi tegaknya peraturan perundang-undangan. Untuk menuju ke arah itu, diperlukan adanya bahasa yang menggambarkan sikap sopan santun dan saling menghormati. Begitu pula, untuk memperkaya perbendaharaan kata, agar setiap kata mempunyai satu makna saja, diperlukan pengambilan kosakata dari bahasa daerah sehingga setiap etnik merasa memiliki bahasa Indonesia. Dengan adanya kepastian makna pada setiap kata, hakikat tujuan peraturan perundang-undangan tidak dapat diubah atau digeser dan dengan demikian, masyarakat dapat menikmati kepastian hukum.

Sebagai media dan sarana, bahasa memberikan dampak yang sangat tergantung pada penggunaannya, terutama media massa, para pendidik, dan para pejabat. Sangat diharapkan bahwa para pengguna tersebut dapat memberikan contoh dalam penggunaan bahasa secara baik dan benar sebagai perwujudan dari kecintaan terhadap bangsa dan negara yang harus selalu dibina kesatuan dan keutuhannya.



BAHASA INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERNEGARA: PERANNYA MENGHADAPI GLOBALISASI

M. Alwi Dahlan

Badan Pembinaan Pendidikan

Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila

Tidak ada kehidupan bersama tanpa komunikasi, dan komunikasi hampir tidak mungkin tanpa bahasa¹ apalagi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, makin besar, makin kompleks, atau makin luas ruang lingkup kehidupan bersama itu, makin penting dan makin menentukan pula peranan yang dimainkan oleh bahasa. Komunikasi menghubungkan semua anggota atau unsur dalam sistem kehidupan bersama itu satu sama lain. Akan tetapi, bahasalah yang menjadi peranti yang mengikat hubungan itu dengan mencernakan realitas dan memberi makna mengenai kesamaan konsep, nilai, serta wawasan yang menentukan kehidupan sistem bagi semua anggotanya.

Peranan yang menentukan itu dimainkan oleh bahasa Indonesia sejak semula. Bahkan, berbeda dengan peranan bahasa lain, pada awalnya bahasa Indonesia menentukan lahirnya kehidupan berbangsa. Dapat dikatakan bahwa dalam kasus Indonesia, bahasa membentuk bangsa, yang kemudian baru membentuk negara. Bahasa Indonesia sudah tumbuh dan berkembang jauh lebih dahulu sebelum ada tekad untuk membangun suatu bangsa pada tahun 1928. Ketika kehidupan bermasyarakat masih terbatas pada kehidupan bersuku-suku dengan jarak fisik dan jarak sosial yang saling berjauhan, bahasa telah menanamkan konsep tentang persamaan antara berbagai suku yang hidup terpencar-pencar itu. Barangkali itulah sebabnya mengapa pada waktu Sumpah Pemuda dicanangkan, masyarakat dengan segera dapat menangkap makna 'satu bangsa' dan 'satu tanah air'; banyak sedikitnya mereka sudah memahami apa artinya konsep 'satu bahasa, bahasa Indonesia'.

Peran bahasa Indonesia berkembang bersama-sama dengan perkembangan kehidupan berbangsa. Pada awalnya dia membuka komunikasi antarsuku dan antardaerah. Kemudian, masuk lebih jauh ke dalam kehidupan bermasyarakat di daerah, menjadi alat komunikasi intern antara anggota masyarakat setempat. Pertama kali antara pendatang dan penduduk asli, lama-kelamaan juga dipakai antara semua anggota masyarakat tanpa kecuali dan, dengan begitu, berperan dalam membangun kehidupan berbangsa yang lebih kuat.

Peran bahasa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak selalu terlihat dengan jelas. Manifestasi wawasan kebangsaan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, menunjukkan peranannya yang tidak langsung, tetapi cukup penting bagi kehidupan bermasyarakat. Sebagai contoh, penggunaan bahasa baku yang sama dalam petunjuk barang dan iklan meningkatkan efisiensi serta produktivitas dalam perdagangan. Mobilitas penduduk dan tenaga kerja yang tinggi antardaerah terjadi karena orang tidak merasa cemas lagi untuk bepergian atau pindah tempat berkat peranti komunikasi yang sama. Perkawinan antarsuku atau antardaerah tidak

lagi menjadi soal; bahasa Indonesia telah menjadi 'bahasa ibu' dari kedua belah pihak.

Dalam perkembangan seterusnya, bahasa Indonesia mengalami perubahan peran yang tidak selalu menguntungkan bagi kehidupan bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara. Kemajuan pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, melahirkan kegiatan, profesi, bidang minat, stratifikasi, dan pengelompokan masyarakat yang makin kompleks. Setiap kelompok itu mempunyai kebutuhan komunikasi yang belum tentu sama dengan yang lain sehingga masing-masing dapat melahirkan lambang, sandi, ciri, ungkapan, dan cara penyampaian yang mungkin sangat berbeda satu sama lain. Ragam bahasa seperti itu merupakan perekat bagi kelompok atau bagian tertentu dari masyarakat yang bersifat mikro, tetapi dapat mengurangi integrasi dalam masyarakat yang lebih luas. Terlebih lagi karena ada ragam bahasa yang ditumbuhkan untuk menonjolkan jati diri atau identitas kelompok yang eksklusif dari kelompok masyarakat yang lain, misalnya ragam bahasa remaja, eksekutif, feodal, dan cendekiawan.

Khusus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, beberapa ragam bahasa memainkan peranan yang lebih menonjol. Tidak jarang ragam bahasa itu mempunyai pengaruh terhadap penggunaan bahasa yang baku, dan bukan sebaliknya. Ragam bahasa ini mencakup yang berikut.

a. Bahasa Politik

Ragam bahasa ini digunakan dalam kaitannya dengan percaturan kekuasaan (*power*) dan, karena itu, tidak selalu dipakai untuk kejernihan makna. Batasan suatu kata dapat berubah dan sangat berbeda dari bahasa sehari-hari; makna diberikan untuk keperluan tertentu dan sering tidak konsisten dengan pengertian umum. Ragam bahasa ini berkembang mengikuti siklus kegiatan politik, lebih keras dan tajam pada waktu tertentu (misalnya menghadapi pemilu), dipengaruhi oleh ragam bahasa yang dipakai pemimpin negara serta dinamika masyarakat.

b. Bahasa Birokrasi

Pada mulanya bahasa birokrasi sengaja dikembangkan untuk komunikasi pemerintahan yang lugas, tetapi belakangan ini sangat dipengaruhi oleh bahasa politik sehingga memberi peluang bagi pemakaian bahasa yang bersifat eufemistik. Ragam bahasa ini makin hari makin tidak efisien untuk penyelenggaraan pemerintahan, mungkin disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusia atau kurang efektifnya pengajaran bahasa di sekolah sehingga kemampuan berbahasa tidak memadai untuk mengartikulasikan pemikiran yang kompleks.

c. Bahasa Media

Bahasa ini berkembang dengan cepat mengikuti perubahan kondisi sosial politik. Karena persaingan dan suasana reformasi akhir ini, ragam bahasa media sangat kreatif, tetapi penuh dengan ungkapan yang kurang akurat, bermakna ganda, dramatis, dan sebagainya. Bahasa ini juga mempunyai pengaruh pada masyarakat banyak, baik dari segi gaya bahasa maupun pembentukan pengertian dan kerancuan.

d. Bahasa Militer

Bahasa militer (ABRI), yang mempunyai ciri tersendiri (kaku, akurat, aturan bahasa yang ketat, penggunaan akronim), mempunyai pengaruh terhadap bahasa birokrasi dan bahasa politik, khususnya bahasa "dwifungsi" yang sangat terstruktur.

Era globalisasi membawakan tantangan yang lebih kompleks. Dalam kehidupan bermasyarakat, interaksi antarbangsa mendorong timbulnya pengelompokan lintas batas atau lintas bangsa. Orang-orang dari suatu jenis kelompok yang sama (profesi, bidang minat, kelompok usia, kelamin, hobi, kepentingan, dan sebagainya) mempunyai afinitas yang dekat satu sama lain meskipun mereka tinggal di tempat atau negara yang berbeda. Tidak jarang seorang anggota kelompok global tersebut lebih dekat dengan sesama anggota yang di luar negeri daripada dengan tetangganya, tetapi berasal dari bidang lain. Makin kecil dan eksklusif serta makin khas jenisnya, makin tinggi pula afinitas global kelompok, misalnya antara para manajer dana (*fundmanager*) yang jumlahnya konon tidak lebih dari 200--300 orang di seluruh dunia.

Kemajuan teknologi mendorong arus informasi global yang deras dengan jumlah muatan yang sangat besar dan sangat cepat sehingga dapat langsung menjangkau masyarakat banyak tanpa melalui penyaringan (*filter*). Arus informasi ini dituangkan dalam bahasa asing dalam berbagai bentuk produk komunikasi (misalnya televisi, nyanyian, film, video, internet), baik yang memakai bahasa verbal maupun nonverbal. Pengaruhnya berupa kosakata baru yang lebih penting untuk menanamkan konsep, cara berpikir, nilai, dan sikap dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara ringkas, bahasa nasional mendapat tekanan dari bahasa asing serta ragam bahasa baru--baik nasional maupun global. Akibatnya sangat jauh, yakni dapat mempengaruhi perkembangan masyarakat, bangsa, dan negara ke masa depan. Untuk menghadapinya, pendidikan harus dapat membangun jati diri kebanggaan berbahasa Indonesia dan, dengan demikian, kebanggaan sebagai bangsa. Komunikasi global berlangsung ke segala arah secara interaktif--tidak hanya satu arah dari luar ke dalam negeri. Globalisasi dari produk informasi Indonesia dapat mendorong globalisasi bahasa Indonesia, paling tidak nilai dan konsep yang khas Indonesia. Itu akan membantu ketahanan bahasa Indonesia dalam era globalisasi.

Catatan:

1. Sebenarnya komunikasi dapat berlangsung tanpa bahasa. Komunikasi antarpribadi atau antarorang yang tidak menggunakan bahasa, secara nonverbal, sangat besar jumlahnya. Komunikasi yang dilakukan dengan memakai bahasa sekalipun sering harus ditunjang oleh lambang 'bahasa' nonverbal. Kendati demikian, pada komunikasi yang berlangsung bukan di antara manusia perorangan sebagaimana dalam kehidupan yang relatif melembaga--kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara--bahasa merupakan peranti yang mutlak. Dalam hal ini, lambang nonverbal hanya menjadi pelengkap dan tidak dapat berdiri sendiri meskipun perannya kadang-kadang juga penting sebagai lambang dengan bobot makna yang tinggi, misalnya tanda gambar pada kampanye pemilu.

BEBERAPA CATATAN MENGENAI PERAN BAHASA INDONESIA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERNEGARA, DAN BERBANGSA

Mely G. Tan

Ketua Lembaga Penelitian, Unika Atma Jaya

1. Kenyataan

Sejak tahun 1928, ketika pemuda Indonesia yang tergabung dalam berbagai organisasi berdasarkan suku bangsa mengikrarkan pernyataannya dalam Sumpah Pemuda bahwa Indonesia mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia, pernyataan tersebut merupakan keputusan visioner menyangkut masa depan Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat. Kemudian, terbukti bahasa Indonesia merupakan kekuatan integratif atau perekat yang amat ampuh dalam masyarakat Indonesia yang demikian beraneka-ragamnya. Namun, sekaligus harus diakui bahwa dalam kenyataan, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, bahasa orang kota, bahasa “orang sekolahan”. Data sensus 1980 mengungkapkan, seperti dikutip dalam tulisan Dede Oetomo dalam buku *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru* (suatu kumpulan tulisan dari cendekiawan terkenal, diterbitkan tahun 1996, yang merupakan analisis tajam dengan nada mengecam dengan amat kritis terhadap manipulasi bahasa oleh negara dan elit politik), bahwa hanya 12% atau 17,5 juta penduduk yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari walaupun keadaan ini terus mengalami perubahan pesat dengan bergesernya penggunaan bahasa daerah ke bahasa Indonesia, terutama di kota-kota dan antara orang-orang muda. Seperti juga dinyatakan oleh Taufik Abdullah dalam tulisannya dalam buku yang sama “Bagi sebagian sangat besar rakyat, sekitar 80%, bahasa Indonesia tidak didapatkan dari proses sosialisasi tradisional, tetapi merupakan hasil dari usaha yang didapatkan dalam belajar dan pergaulan luas” (1996:347).

Di bawah pemerintahan yang amat berkuasa yang mengatur keseluruhan kehidupan para warganya (*overarching role of government*), seperti terjadi di pemerintahan Orde Lama/Soekarno selama 20 tahun dan kemudian pemerintahan Orde Baru/Soeharto selama 32 tahun, bahasa digunakan dan dimanipulasi untuk kepentingan pemerintah dan elite berkuasa sehingga terjadilah rekayasa bahasa dan apa yang dinamakan hegemoni makna kata. Hal ini juga terlihat dalam ungkapan yang begitu netral seperti “kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Akan tetapi, benang merah yang terjalin dalam ungkapan ini adalah konsensus atau kesepakatan bersama, yang pada dasarnya berlandaskan kehendak pemerintah dan elite kekuasaan. Perwujudan kekuasaan dalam bahasa terlihat pula dalam penggunaan eufemisme atau pelunakan kata-kata, penggunaan akronim, yang semuanya dimaksud untuk disinformasi, misinformasi, atau membingungkan rakyat serta interpretasi tunggal dari konsep-konsep kunci dalam program pembangunan pemerintah, tanpa mentolerir deviasi atau makna alternatif.

2. Masalah

Uraian di atas menunjukkan pengaruh pemerintah dan aparatnya dalam segala segi kehidupan para warga, sampai ke ruang tidur, dengan program keluarga berencana, yang pada awalnya dituduh menggunakan pendekatan terhadap kaum perempuan yang kemudian diakui tidak manusiawi (sampai saat ini masih ada kelompok-kelompok perempuan yang menganggap cara-cara yang digunakan tetap melanggar hak asasi perempuan sebagai manusia). Pembahasan mengenai peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berarti bahwa kita memasuki wilayah hubungan antara bahasa dan politik atau bahasa dan kekuasaan. Sudah cukup banyak tulisan mengenai topik ini muncul dalam tahun-tahun terakhir ini, bahkan selama Soeharto masih amat berkuasa. Akan tetapi, segala kecaman itu tidak mengubah keadaan, sampai terjadi pergolakan dahsyat yang mengakhiri rezim Soeharto. Dalam konteks ini, sebagai suatu ilustrasi bagaimana kuatnya pemerintahan Soeharto dalam merekayasa bahasa, saya akan membicarakan dampaknya yang sangat luas dan mendalam terhadap suatu golongan dalam masyarakat yang sekarang kembali dinamakan keturunan atau etnis Tionghoa.

Dampak ini mencakup seluruh aspek kehidupan golongan ini, tetapi untuk mempertajam permasalahannya, saya akan membatasi diri pada aspek budaya, sosial, dan agama dan memfokuskannya kepada tiga permasalahan yang sifatnya mendasar: (1) penentuan oleh pemerintah sebutan apa yang harus dipakai untuk golongan minoritas ini; (2) konsep bangsa dan kebangsaan; (3) konsep pembauran. Dari permulaan Orde Baru/Soeharto penggunaan bahasa dengan maksud tertentu terlihat dengan sangat jelas. Tindakan pertama kebijakan pemerintah bertalian dengan nama yang diberikan kepada golongan keturunan asing ini, yang sudah bergenerasi bermukim di berbagai belahan bumi Indonesia. Dapat dipertanyakan, kalau selama Orde Baru/Soeharto oleh penguasa dan kemudian diikuti media dan masyarakat luas, untuk golongan ini digunakan sebutan "Orang Cina" atau "Cina" saja, mengapa sejak kira-kira bulan Juni 1998, sejak pemerintahan di bawah Presiden Habibie, diubah menjadi "orang Tionghoa" atau "keturunan Tionghoa"?

Pertama kali saya mendengar penggunaan kata itu adalah oleh Menteri Penerangan dalam suatu siaran berita di televisi, dan sekarang kita lihat, untuk sekian kalinya, tindakan dari pemerintah ini, diikuti oleh banyak pembesar dan masyarakat pada umumnya, termasuk Presiden Habibie. [Ketika bertemu dengan kelompok Masyarakat Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (yang sekarang menjadi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, penulis termasuk anggotanya) pada tanggal 15 Juli dan kemudian 22 Juli 1998].

Dengan menelusuri perubahan sebutan ini, kita melihat bahwa perubahan sebutan ke "Cina" ini bermula dengan adanya keputusan dalam suatu seminar tingkat tinggi ABRI yang diadakan di Bandung dari 25--31 Agustus 1966 (Suryadinata, 1978:121--122). Laporan mengenai keputusan itu menyatakan "... terutama untuk menghilangkan perasaan inferior pada orang kita, dan di lain pihak menghapus perasaan superior pada golongan yang bersangkutan dalam negara kita, maka adalah tepat untuk melapor bahwa seminar memutuskan untuk menggunakan lagi sebagai sebutan untuk Republik

Rakyat Tiongkok dan warganya 'Republik Rakyat Tjina' dan 'warga negara Tjina'. Hal ini dapat dibenarkan dari segi historis dan sosiologis".

Laporan ini dengan jelas menyebut bahwa sebutan "Cina" berlaku untuk RRC dan warga asing RRC, tetapi dalam kenyataannya istilah itu dipakai juga untuk mereka yang warga negara Indonesia keturunan Tionghoa.

Betapa berpengaruhnya keputusan seminar itu terlihat dari kenyataan bahwa kalau sampai akhir Agustus 1966 kebanyakan surat kabar, termasuk yang dikenal sebagai anti-Cina, masih menggunakan istilah Tionghoa, pada awal September hampir semuanya sudah memakai Cina, selain Suluh Marhaen yang bertahan. Namun, pada 25 Juli 1967, Presidium Kabinet menerima keputusan seminar ABRI Agustus 1966 itu dan secara resmi menentukan penggunaan istilah "Tjina" tanpa membedakan antara yang asing dan warga negara Indonesia. Patut dicatat di sini bahwa *Indonesia Raya* dari Mochtar Lubis, sejak terbit kembali pada tahun 1968 sampai dihentikan pada tahun 1974 secara konsisten selalu memakai istilah "Tionghoa".

Hal yang menarik dalam penggunaan kembali istilah "Tionghoa" sekarang ini adalah terjadinya kontroversi antara golongan Tionghoa sendiri, antara yang pro dan kontra penggunaan istilah tersebut. Antara orang muda keturunan Tionghoa ada yang tidak setuju dengan sebutan ini, dengan alasan bahwa istilah "Tionghoa" mengembalikan tekanan kepada asal-usul asing orang keturunan Tionghoa, di samping sudah terbiasanya menggunakan istilah "Cina". Di lain pihak, ada sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang muda, bernama Lius Sangkhurisma, seorang keturunan Tionghoa yang anggota KNPI dari unsur Buda, yang mendirikan partai dengan nama Partai Tionghoa Indonesia.

Pada hemat saya penggunaan istilah "Tionghoa" oleh pemerintah perlu dilihat sebagai suatu pernyataan politik yang merupakan semacam "rehabilitasi" golongan Tionghoa sebagai orang yang baik dan dapat dihormati. Sekaligus dapat dilihat sebagai suatu pengakuan secara implisit bahwa pada tahun 1966 penentuan penggunaan sebutan "Cina" mengandung konotasi menghina, merendahkan, suatu hal yang tidak pernah diakui secara eksplisit selama ini. Di lain pihak, dalam kehidupan sehari-hari, terserah kepada pribadi masing-masing untuk menggunakan istilah "Tionghoa" atau "Cina": yang merasa rikuh atau canggung menggunakan "Tionghoa" bisa saja terus menggunakan "Cina" atau "Cino", asal tidak digunakan sebagai suatu kata kebencian atau kata untuk memaki-maki. Sebaliknya, yang ingin menggunakan "Tionghoa", juga sah saja. Jadi, janganlah terjebak lagi dalam paksaan menggunakan salah satu istilah itu, dan harus dihindari menjadikannya sebagai suatu isu karena bisa membelokkan perhatian dari hal-hal substansial yang penting dan mendasar.

Salah satu konsep yang amat penting dan mendasar yang perlu diluruskan dan dijernihkan maknanya adalah konsep "bangsa" dan "kebangsaan", yang mendasari ungkapan "kehidupan berbangsa". Apa yang dimaksud dengan *bangsa*? Jika kita merujuk kepada pemikiran dan pernyataan Soekarno dalam pidatonya mengenai Lahirnya Pancasila yang diucapkan pada tanggal 1 Juni 1945, terlihat bahwa ia mengutip filsuf Prancis Ernest Renan, yang mengungkapkan bahwa persyaratan dari suatu *nasion* adalah keinginan untuk bersatu. Rakyat sendiri merasa bersatu dan ingin bersatu.

Maka, apa yang menjadi *nasion* adalah suatu kelompok manusia yang ingin bersatu, yang merasa bersatu. Soekarno juga mengutip dari Otto Bauer yang menyatakan bahwa suatu *nasion* adalah suatu komunitas-karakter yang tumbuh dari suatu komunitas dengan pengalaman yang sama (Feith dan Castles, 1970:40–41).

Definisi Soekarno mengenai *nasion* ini telah diikuti berbagai pemikir, antara lain, almarhum Harsya Bachtiar, profesor sosiologi di Universitas Indonesia dengan Ph.D. dari Harvard University, dan Harry Tjan Silalahi dari CSIS dan mantan anggota DPR dan DPA. Menurut Harry Tjan, definisi ini memperlihatkan bahwa nasion Indonesia bukan didasarkan atas suatu suku bangsa, kebudayaan, atau agama, tetapi atas dasar sejarah yang sama, penderitaan bersama, opresi yang dialami bersama, dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Definisi demikian merupakan landasan dan menetapkan hak mereka yang warga negara keturunan asing, termasuk keturunan Tionghoa, untuk menjadi bagian dari nasion Indonesia.

Dengan pengalaman selama Orde Baru/Soeharto, yang memberi perlakuan diskriminatif dan mengisolasi golongan etnis Tionghoa, serta peristiwa pertengahan bulan Mei 1998, yang jelas menjadikan orang dan milik etnis Tionghoa sebagai sasaran kekerasan yang amat dahsyat, dapat dipertanyakan apakah golongan ini sebagai warga Indonesia juga merupakan bagian dari bangsa Indonesia? Selama Indonesia merdeka, dapat dikatakan bahwa perlakuan diskriminatif yang paling jelas terjadi dalam rezim Orde Baru/Soeharto.

Hal ini berupa berbagai peraturan yang dimulai dengan menutup semua sekolah yang berbahasa Tionghoa (1966), walaupun dari 1968 sampai 1974 diperkenankan adanya Sekolah Nasional Proyek Khusus, yang kurikulumnya nasional, tapi diperbolehkan adanya mata pelajaran bahasa Tionghoa. Tujuan sekolah khusus ini adalah untuk menampung anak-anak dari sekolah berbahasa Tionghoa yang ditutup. Dalam tahun 1967 juga dilarang menggunakan aksara Tionghoa di tempat umum, seperti merek toko atau perusahaan, dilarang memasukkan buku, majalah, atau surat kabar dengan aksara Tionghoa. Tahun itu keluar pula peraturan yang menyeluruh mengenai agama, kepercayaan, dan tradisi Tionghoa. Peraturan ini menentukan bahwa segala bentuk dan perwujudan dari hal-hal yang berasal dari kebudayaan dan tradisi Tionghoa, seperti Tahun Baru Imlek (Tahun baru menurut perhitungan bulan, atau *lunar new year*, yang menunjukkan bahwa tahun baru ini tidak hanya dirayakan oleh orang Tionghoa, tetapi juga oleh orang Vietnam, Jepang), hanya boleh dirayakan di kalangan keluarga di dalam rumah atau di dalam kelenteng (Inpres No. 14, 1967; Tan, 1997:42,43).

Semua peraturan dan tindakan ini diberlakukan dengan alasan “demi mempercepat pembauran” dan menghilangkan sifat eksklusif dari golongan etnis Tionghoa. Apa yang dimaksud dengan pembauran? Bagi pemerintah, yang dimaksud dengan pembauran adalah hilangnya kelompok etnis Tionghoa sebagai suatu golongan kebudayaan yang khas. Keadaan demikian juga akan mengakhiri adanya “masalah Cina”. Apa yang dimaksud dengan masalah Cina? Dalam persepsi pemerintah dan masyarakat luas, “masalah Cina” adalah masalah suatu kelompok yang hanya merupakan 3–4% dari penduduk Indonesia, yang walaupun hampir semuanya warga negara Indonesia,

tetapi masih tetap oleh mayoritas orang etnis Indonesia, dianggap “bukan orang kita”, menguasai hampir 70% dari ekonomi sektor swasta (bukan dari seluruh ekonomi nasional, yang sering dikemukakan, mungkin dengan maksud menekankan betapa kuatnya, dan dengan demikian betapa tidak patutnya kekuasaan etnis Tionghoa, khususnya konglomerat etnis Tionghoa, dalam ekonomi Indonesia ini).

Sebenarnya, dari golongan etnis Tionghoa sendiri ada konsep dan definisi pembauran atau asimilasi. Pada tahun 1960 dimuat dalam majalah mingguan *Star Weekly* tanggal 26 Maret 1960 suatu pernyataan “asimilasi yang wajar” yang ditanda-tangani oleh sepuluh kaum intelektual peranakan Tionghoa, antara lain Ong Hok Ham (Onghokham), dan Drs. Lauwchuantho (sekarang H. Junus Jahya) (Lihat Lahirnya konsepsi asimilasi, 1977). Judul dari pernyataan ini adalah “Menuju Asimilasi yang Wajar”, dan ditekankan sifat sukarela dari pembauran, dan tidak membenarkan hambatan-hambatan *kunstmatig* (dibuat-buat) terhadap proses asimilasi, tetapi sebaliknya juga tidak dapat menyetujui tindakan-tindakan paksaan asimilasi tersebut (1977: 60—61).

Konsep asimilasi ini berkembang dan terbentuk Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LKB) di bawah naungan Departemen Dalam Negeri dan dipimpin oleh K. Sindhunata. Konsep asimilasi kelompok ini lebih menekankan proses agar golongan etnis Tionghoa yang hidup di daerah Jawa melebur dalam masyarakat Jawa, yang hidup di daerah Sunda melebur dalam masyarakat Sunda, yang di Ambon melebur dalam masyarakat Ambon dan sebagainya. LPKB di masa Orde Baru menjadi Bakom-PKB. Di samping itu, ada pemikiran dari Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang di bawah pimpinannya Siauw Giok Tjhan menganut konsep “integrasi” yang didefinisikan sebagai suatu keadaan yang menerima golongan etnis Tionghoa dalam nasion Indonesia sebagai salah satu suku, sama dengan suku lainnya (Coppel, 1983:43--51). Ada pula pemikiran dari Mr. Yap Thiam Hien yang didasarkan atas keyakinannya yang sangat mendalam mengenai peran agama Kristen, dan komitmen totalnya terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga ia menganjurkan suatu perubahan sikap menjadi “berorientasi Kristen” dan “dilahirkan kembali manusia dalam Jesus Kristus”. Pemikiran Yap yang sangat berpengaruh, terutama pada kaum juris muda, yang bertalian dengan pemikirannya mengenai HAM. Perkembangan terakhir adalah konsep Junus Jahya yang berkeyakinan bahwa masalah Cina dapat diselesaikan lewat agama, yaitu dengan diterimanya agama mayoritas, Islam, oleh kebanyakan orang etnis Tionghoa. Menurut Junus, saat ini ada kurang lebih 30.000 orang etnis Tionghoa yang beragama Islam (lihat Tan, 1991: 120--122).

Uraian di atas ini memperlihatkan dengan jelas betapa heterogenya golongan etnis Tionghoa ini. Sementara itu, pemerintah Orde Baru/Soeharto melanjutkan kebijakan pembaurannya dan memunculkan konsep SARA (suku, agama, ras, antar-golongan) yang ditujukan khusus kepada media agar tidak memberitakan hal-hal yang bertalian dengan masalah yang tercakup dalam konsep ini. Kita melihat bahwa dalam kenyataan, proses pembauran seperti didefinisikan dan diimplementasikan oleh pemerintah dan aparatnya serta elit kekuasaan, tidak menuju kepada kerukunan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya bertalian dengan golongan etnis

Tionghoa. Malahan yang terjadi adalah kebalikannya: selama 32 tahun Orde Baru/Soeharto telah terjadi suatu suasana eskalasi polarisasi dalam hubungan antara golongan etnis Tionghoa dan masyarakat luas yang secara sengaja atau tidak memupuk sentimen anti-Cina yang meledak dengan tindakan kekerasan yang dahsyat yang terjadi sekitar pertengahan Mei 1998, terutama di Jakarta, Solo dan sebelum dan sesudahnya, di beberapa tempat lain di seluruh Indonesia.

Pembahasan tiga hal, yaitu penentuan sebutan bagi golongan etnis Tionghoa, definisi dan implementasi konsep bangsa dan kebangsaan, serta konsep pembauran, dengan jelas merupakan ilustrasi dari hubungan antara bahasa dan politik atau bahasa dan kekuasaan, yang terwujud dalam penggunaan, manipulasi serta hegemoni makna kata, yang diterapkan kepada suatu golongan dalam masyarakat Indonesia. Ilustrasi ini sekaligus memperlihatkan dengan jelas peran bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang maknanya dan wujudnya ditentukan oleh pemerintah dan elit berkuasa sehingga dapat dipertanyakan apakah bahasa dalam hal ini merupakan kekuatan integratif/perekat atau justru sebaliknya.

Daftar Pustaka

- Anonim. 1977. *Lahirnya Konsepsi Asimilasi*. (Cetakan ke V). Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Bachtiar, Harsja W. 1992. "Integrasi Nasional Indonesia" Dalam *Wawasan Kebangsaan Indonesia: Gagasan dan Pemikiran Badan Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Bakom PKB Pusat.
- Coppel, Charles A., 1983. *Indonesian Chinese in Crisis*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Coppel, Charles A. dan Suryadinata, Leo, 1978. "The use of the terms 'Tjina' dan 'Tionghoa' in Indonesia: an historical survey" Dalam Leo Suryadinata. 1977. *The Chinese minority in Indonesia*. 7 Papers. Singapore: Chopmen enterprises. (Tulisan ini pertama kali dimuat dalam Papers on Far Eastern History (ANU). No. 2 September 1970).
- Feith, Herbert dan Lance Castles, 1970. *Indonesian Political Thinking, 1945--1965*. Ithaca: Cornell University Press.
- Heryanto, Ariel. 1989. "Berjangkitnya Bahasa-Bangsa di Indonesia" Dalam *Prisma*. No.1, tahun XVIII. Jakarta.
- Jahja, Junus. 1988. *Catatan Seorang WNI*. Otobiografi. Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa
- Suprpto, Riga Adiwoso. "Perubahan Sosial dan Perkembangan Bahasa". Dalam *Prisma*. No. 1, tahun XVIII, 1989.
- Suryadinata, Leo, 1979. *Political thinking of Indonesian Chinese 1900-1977. A Source Book*. Singapore: Singapore University Press.
- Suryadinata, Leo. 1985. *China and the Asean States: the Ethnic Chinese Dimension*. Singapore: Singapore University Press.

- Tan, Mely G., 1997. "The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues of Identity" Dalam Leo Suryadinata (Ed.) *Ethnic Chinese as Southeast Asians*. Singapore: Iseas.
- Tan, Mely G., 1998. "Agama dan Hubungan Antarkelompok Etnis di Indonesia". Makalah yang diberikan pada diskusi agama dan kerusuhan etnis di Indonesia (dan kemudian direvisi), yang diadakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat (LSAF) di Jakarta. 30 Juli 1998.
- Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. (Ed.) 1996. *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung. Penerbit Mizan.

**POKOK-POKOK PIKIRAN
MENGENAI PERAN BAHASA INDONESIA
DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA,
DAN BERNEGARA**

H. T.A. Ridwan
Universitas Sumatera Utara

1. Pendahuluan

Masyarakat bangsa sejagat, termasuk bangsa Indonesia, telah berada di pintu gerbang milenium ketiga yang bercirikan era globalisasi serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa Indonesia tidak boleh tertinggal atau ditinggalkan, dan bahasa Indonesia harus semakin berperan secara nyata yang karenanya harus dipersiapkan secara lebih matang untuk mampu berperan dalam menghadapi berbagai tantangan disebabkan semakin derasnya gelombang era kemajuan dan perubahan.

Kesiapan dan peran nyata bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara memerlukan penebalan dan pemantapan *rasa kecintaan terhadap serta rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia*. Salah satu pilar utama Sumpah Pemuda 1928, yaitu *menjunjung bahasa Indonesia*, harus semakin terwujud secara nyata sehingga, dengan demikian, bukan hanya semakin mantapnya peran bahasa Indonesia di bumi Indonesia, tetapi juga secara bertahap dan terprogram bahasa Indonesia dapat "dinobatkan" menjadi salah satu bahasa pergaulan resmi di dunia, setidaknya di kawasan ASEAN.

Kesiapan dan persiapan menuju tercapainya sasaran yang ingin dicapai memerlukan *pembinaan sikap bahasa*, khususnya di lingkungan penutur dan pemilik bahasa Indonesia. Pembinaan sikap bahasa terkait dengan *fungsi kebudayaan* yang dimiliki bahasa Indonesia yang mengacu pada perannya sebagai (a) sarana pengembangan budaya, (b) jalur pelestarian budaya, (c) pengatur dan pengikat masyarakat, (d) pola kebiasaan dan perilaku manusia, dan (e) alat komunikasi yang juga berfungsi sebagai pembentuk kerja sama, kelangsungan hidup, serta pemantapan kesatuan dan persatuan. Dengan demikian, pembinaan sikap bahasa perlu memperhitungkan, antara lain (a) bahasa dalam konteks sosial dan kebudayaan, (b) hubungan antara faktor, ciri, dan ragam bahasa dengan situasi dan faktor sosial budaya, dan (c) berbagai fungsi dalam penggunaan bahasa di tengah-tengah masyarakat.

Rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia terkait erat dengan pencerminan dan perwujudan cinta tanah air, cinta budaya Indonesia, serta cinta terhadap keseluruhan nilai dan norma kehidupan bermasyarakat dan berbangsa Indonesia. Selanjutnya, mempunyai kesadaran akan--dan pemahaman mengenai--*keterkaitan antara bahasa Indonesia dan pembangunan bangsa* yang diwarnai oleh peran yang diemban bahasa Indonesia dalam *pembinaan kejatidirian dan sistem nilai* yang merupakan *benteng pertahanan kebangsaan serta daya rekat kesatuan dan persatuan bangsa* yang ampuh. Oleh karena itu, *usaha pembinaan sikap bahasa* perlu diarahkan pada a. peningkatan dan pemantapan sikap berbahasa Indonesia;

- b. peningkatan dan pemantapan rasa kebanggaan memiliki bahasa Indonesia;
- c. peningkatan dan pemantapan kesadaran terhadap norma dan kaidah bahasa Indonesia sebagai kerangka acuan.

Dengan demikian, sikap bahasa *mengandung keterpaduan* antara sikap menghormati, memuliakan, berkhidmat secara nyata serta sikap taat pada kesepakatan bangsa mengenai peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Hal itu sekaligus akan searah-sejalan dan setara dengan peningkatan dan pemantapan *sikap kebersamaan* dalam membina, memelihara, dan mempertinggi harkat dan martabat bangsa dan negara Indonesia tercinta melalui idealisme bahasa Indonesia.

2. Peran Bahasa Indonesia

Upaya untuk mewujudkan peran bahasa Indonesia sebagaimana yang dicita-citakan dan diharapkan perlu dikaji secara transparan mengenai kenyataan sekarang ini. Kajian ini mencakupi peran dan fungsinya, ataupun kekeliruan dan permasalahan yang ada.

Merupakan suatu kenyataan yang patut dibanggakan bahwa bahasa Indonesia dari hari ke hari semakin berkembang, kaya, dan lengkap. Jika pada awal kemerdekaan baru berperan sebagai bahasa persatuan dan bahasa resmi dalam waktu relatif singkat telah berperan dan berkembang sebagai bahasa pendidikan, bahasa ilmu pengetahuan, bahasa perencanaan dan pembangunan, dan lainnya.

Bidang dan aspek kebahasaan yang terkait dengan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia secara baik dan benar telah, sedang, dan terus dilaksanakan. Umpamanya yang terkait dengan upaya pembakuan untuk dipedomani ketentuannya patut diikuti dan dilaksanakan. Upaya pembakuan ujaran sekalipun terus dikerjakan, diperkirakan memerlukan waktu yang cukup panjang karena bidang ini mempunyai cukup banyak permasalahan yang menyangkut kebiasaan berbahasa berperingkat dan berperangkat sosiolektis, dialektis, ataupun idiolektis.

Selain masalah seperti norma, kaidah, dan aturan kebahasaan yang masih harus diluruskan dan ditingkatkan kepatuhan dan kebiasaan penggunaannya terdapat pula permasalahan penggunaan bahasa menurut tempat, lingkungan, dan keperluan penggunaannya. Di Indonesia terdapat berbagai macam, jenis, dan pengelompokan bahasa, yang sesungguhnya dalam masyarakat modern tidak ada masyarakat yang benar-benar monolingual.

Di Indonesia terdapat *tiga kelompok bahasa*, yaitu bahasa kebangsaan, bahasa daerah, dan bahasa asing. Merupakan kenyataan masih terdapatnya kesimpangsiuran mengenai pemakaian yang kurang sesuai dengan tempat, kedudukan, dan lingkungan penggunaannya. Masalah kebahasaan ini menyangkut tanggung jawab dan kepentingan bersama seluruh kelompok dan golongan masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengatasinya.

Kedudukan *bahasa kebangsaan* ditempati oleh bahasa Indonesia sejak tahun 1928. Nama yang diberikan, yakni *bahasa persatuan*, bertalian erat dengan *pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa Indonesia*. Selain itu, bahasa Indonesia berfungsi untuk hubungan luas dalam komunikasi antardaerah, antarsuku bangsa dan masyarakat etnis, dan antarbudaya Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai *bahasa negara*

sesuai dengan Pasal 36 UUD-45, pemasyarakatannya haruslah sedini mungkin dengan dimulai dalam lingkungan keluarga. Sikap bahasa ini bukan hanya terkait dengan pembinaan sikap kebangsaan, pemantapan kesatuan dan persatuan bangsa, tetapi juga *secara khusus* bersasaran untuk *menghapuskan eksklusivisme* yang merupakan jurang pemisah antara sesama warga masyarakat bangsa Indonesia.

Bahasa daerah yang beratus-ratus jumlahnya merupakan bagian dan unsur dari kekayaan dan kebudayaan Indonesia. Sekalipun penggunaannya dibatasi dalam komunikasi bahasa dan budaya daerah terkait, perannya untuk *memperkaya bahasa Indonesia serta melestarikan unsur-unsur budaya bangsa* harus ditingkatkan. Yang harus dihindarkan adalah penggunaannya di lingkungan resmi, seperti kantor pemerintahan, lembaga kependidikan, dan lainnya karena bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa resmi, dan bahasa pergaulan harus digunakan.

Kedudukan dan fungsi *bahasa asing* dari *sudut pemanfaatannya* adalah untuk pergaulan dan komunikasi internasional, sedangkan dari *sudut pengajaran* adalah dalam rangka penyerapan ilmu pengetahuan dan alih teknologi. Dalam konsepsi dan konteks Indonesia, bahasa asing adalah bahasa yang mana pun yang berada atau berasal dari luar lingkungan atau wilayah bahasa-bahasa Nusantara. Bahasa Cina, umpamanya, apakah dialek Mandarin, Hokien, atau Kanton, sekalipun jumlah penuturnya cukup besar, tetap merupakan bahasa asing. Adanya pendapat yang berupaya mengategorikannya sebagai bahasa daerah kurang dapat diterima karena bahasa Cina tidak berasal dari sebuah daerah pun di Indonesia. Tidak ada sebuah pun ketentuan atau peraturan di Indonesia yang melarang penggunaan dan pembelajaran bahasa asing bahkan sangat membuka pintu terhadap pembelajaran dan penguasaan bahasa asing. Hanya penguasaan dan pembelajaran bahasa asing harus datang kemudian setelah menguasai dan membiasakan bahasa Indonesia. Hal ini perlu digarisbawahi karena di berbagai daerah di Indonesia terdapat kenyataan adanya warga masyarakat yang tidak dapat berbahasa Indonesia, tetapi lancar berbahasa asing (Cina) sekalipun KTP-nya bertuliskan warga negara Indonesia. Hal itu akan menyebabkan bahwa "orang menjadi asing di kampung halaman atau tanah airnya sendiri".

Upaya dan tanggung jawab bersama dalam mengatasi berbagai kekurangsempurnaan dengan dibekali *sikap positif* akan menjadikan bahasa Indonesia berjaya memenuhi fungsinya.

- a. *Fungsi komunikatif* membentuk *wawasan kebangsaan* melalui penggunaan bahasa Indonesia sebagai perekat kesatuan dan persatuan bangsa. Pembudayaan bahasa Indonesia oleh--dan dalam--lingkungan berbagai kelompok dan golongan masyarakat termasuk keluarga merupakan bukti nyata rasa cinta tanah air dan budaya bangsa, dan sekaligus akan dapat berperan untuk menghapuskan gejala sosial-kemasyarakatan yang negatif seperti kecemburuan sosial dan kesenjangan sosial.
- b. *Fungsi informatif* untuk membentuk dan membina *wawasan peradaban*. Kata *peradaban* secara etimologis berasal dari kata *adab* yang mengandung keterpaduan makna antara kebaikan budi pekerti dan akhlak. Dalam keterkaitan dengan sikap positif, *pemasyarakatan bahasa Indonesia* mempunyai ruang lingkup, antara lain sebagai berikut.

- 1) Tingkah laku bahasa untuk lebih meningkatkan dan memantapkan *kecendekiaan bahasa* akan sangat bermanfaat dalam mengisi persyaratan dan tuntutan era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa Indonesia harus berperan dalam upaya meningkatkan kualitas dan membekali masyarakat Indonesia dengan kecerdasan dan kemampuan dalam rangka memenuhi tuntutan kemajuan dan perubahan zaman.
- 2) Sekalipun perlu terus digalakkan peningkatan kualitasnya, manusia Indonesia harus tetap memiliki sikap bermasyarakat, sikap berbudaya, dan sikap insan yang beradab, sopan-santun dan bertata krama sesuai dengan pesan dalam ungkapan "bahasa menunjukkan bangsa". Bahasa Indonesia harus berperan dalam pembinaan sikap manusia Indonesia.

Upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia sudah cukup banyak dilaksanakan. Upaya ini sejalan pula dengan pelurusan norma, kaidah, aturan, dan pemerayaan kosakata bahasa Indonesia. Dari celah-celah upaya ini dan berbagai evaluasi serta pertemuan yang terus dilaksanakan secara terprogram diperoleh temuan-temuan mengenai kekeliruan dan kesalahan kebahasaan yang memerlukan perbaikan dan perhatian.

Dalam pemerayaan kosakata kadang-kadang perhatian orang pada bahasa asing (Inggris) menyebabkan orang itu lupa pada apa yang sesungguhnya terdapat pada akar bahasa Indonesia. Sering pula pinjaman yang dikategorikan dari bahasa asing tidak terdapat dalam bahasa yang dimaksud. Contoh, prefiks /a-/ tidak terdapat pada *a-moral* karena dalam bahasa Inggris terdapat bentuk *immoral*. Sesungguhnya pada bahasa Melayu, akar bahasa Indonesia, terdapat prefiks /dur-/ seperti dalam *dursila*, *durjana*, *durhaka*.

Terdapat pula *kekurangcermatan* pemakaian kata yang mempunyai kemiripan bentuk, tetapi sesungguhnya berbeda maknanya. Contoh, perbedaan antara *teknik* 'pengetahuan atau kemampuan membuat sesuatu' dengan *teknis* 'sesuatu yang bersifat atau mengenai teknik'. Lainnya: antara *hayat* 'hidup, nyawa' dengan *hayati* 'mengenai atau berhubungan dengan hidup'. Kekurangcermatan atau kuranghati-hatian mencakupi pula kelatahan bahasa, pemakaian istilah, penerjemahan, dan lainnya. *Bahasa surat* juga mempunyai beberapa *kekurangcermatan*, umpamanya, penggunaan *memutuskan* bersamaan dengan *menetapkan*. Sesungguhnya hal itu diwarisi dari pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Kata *memutuskan* (*heeft besloten*) dan *menetapkan* (*vast bestellen*) mempunyai kerancuan sintaksis dan semantik.

3. Situasi Bahasa di Indonesia

Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bahasa persatuan, sesuai dengan butir ke-3 Sumpah Pemuda 1928. Bahasa Indonesia adalah *bahasa negara*, sesuai dengan Pasal 36 UUD-45.

Bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara, terkait dengan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Bahasa Indonesia telah mempengaruhi tata bunyi, kosakata, dan struktur bahasa daerah. Dengan kemajuan media komunikasi, baik cetak maupun elektronik, yang telah menjangkau hampir seluruh

pelosok tanah air dan telah dapat dinikmati sebagian besar masyarakat, dapat diperkirakan hampir tidak ada bahasa daerah yang luput dari pengaruh bahasa Indonesia. Misalnya, kata-kata yang melambangkan konsep dan gagasan baru dalam kaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya tidak terdapat dalam bahasa daerah sekarang telah merupakan unsur baru bahasa daerah. Namun, sebaliknya pula telah dipengaruhi--telah diperkaya--oleh bahasa-bahasa daerah selain bahasa asing. Pengaruh atau sumbangan bahasa daerah ataupun bahasa asing demikian besar sehingga dalam pertumbuhan dan perkembangannya dari bahasa Melayu bahasa Indonesia yang dikenal masa ini atau akan dikenal pada masa mendatang akan *memiliki ciri-ciri tersendiri*.

Seperti dikatakan di atas, di Indonesia terdapat tiga kelompok bahasa, yaitu nasional, daerah, dan asing. Ketiga kelompok bahasa ini telah secara umum memiliki kedudukan dan fungsinya masing-masing sehingga tidak menyebabkan kemelut sosial budaya ataupun kemelut sosial politik yang diakibatkan "persaingan bahasa".

Bahasa-bahasa daerah tidak bersaing dengan bahasa Indonesia. *Bahasa asing* penempatannya dalam masyarakat sedemikian rupa sehingga tidak mengkhawatirkan kemungkinan keberadaannya akan melenyapkan bahasa Indonesia ataupun bahasa-bahasa daerah.

Dalam kedudukannya sebagai *bahasa nasional*, bahasa Indonesia telah menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya. Apa yang harus dilaksanakan adalah *peningkatan peran dan fungsi bahasa Indonesia*. Pertama, meningkatkan fungsinya sebagai *lambang kebanggaan dan lambang harga diri bangsa Indonesia*. Dengan fungsi ini bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya, nilai-nilai harga diri dan martabat bangsa, dan filsafat hidup yang menempatkan bangsa Indonesia dalam kedudukan yang sama dan sederajat dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai *lambang jati diri bangsa* yang akan menonjolkan ciri khas dan sekaligus membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Fungsi pertama dan kedua ini berkaitan erat dengan peningkatan *fungsi yang ketiga* dari bahasa Indonesia, yaitu sebagai *sarana pemersatu bangsa*. Fungsi ini memungkinkan dan memantapkan kehidupan sebagai *bangsa yang bersatu*, tetapi tidak sampai menghapuskan latar belakang sosial budaya dan bahasa daerah. Ketiga fungsi ini berkaitan pula dengan *fungsi keempat* bahasa Indonesia yang juga harus ditingkatkan, yaitu *bahasa nasional* dalam perannya sebagai *sarana perhubungan antardaerah dan antarbudaya*.

Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai *pendukung kebudayaan nasional* perlu pula diupayakan sehingga, dengan demikian, fungsinya tidak hanya sebagai *pendukung kesusastraan nasional*, tetapi juga mendorong dan menggalakkan *pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional*. Nilai-nilai moralitas yang dimilikinya akan membina sikap manusia Indonesia yang, sekalipun memiliki kemampuan ilmu pengetahuan, mempunyai pengaruh kuat dalam masyarakat, memiliki kekayaan atau menduduki jabatan yang tinggi, akan tetap berkepribadian yang sopan santun, tidak sombong dan tinggi hati. Cukup banyak ungkapan dalam khazanah bahasa Indonesia yang berisi *pesan-pesan moralitas* bagi manusia Indonesia yang berketuhanan serta

beradat-berbudaya.

Kenyataan memperlihatkan bahwa sekalipun masih terus memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, dalam kedudukannya sebagai *bahasa resmi kenegaraan* bahasa Indonesia telah terwujud secara nyata, baik lisan maupun tertulis, sebagai *sarana penyelenggaraan pemerintahan*, baik secara horizontal (antara instansi yang sederajat) maupun secara vertikal (seperti antara instansi pusat dan daerah). Sikap positif terhadap bahasa Indonesia harus terus ditingkatkan, antara lain, sebagai sarana komunikasi antara pemerintah dengan rakyat, dalam dunia usaha, kalangan media massa, dunia profesi, dan untuk semua kegiatan dalam masyarakat umum.

Dalam dunia kependidikan bahasa Indonesia sebagai *bahasa pengantar kependidikan* pada semua jenis dan jenjang kependidikan dapat dibanggakan. Bahasa Indonesia telah membuktikan kemampuannya bukan hanya sebagai bahasa pengantar kependidikan di tingkat lembaga kependidikan dasar dan menengah, tetapi juga sebagai sarana penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi serta sarana alih pengetahuan dan alih teknologi di tingkat lembaga kependidikan tinggi. Namun, terdapat catatan yang memerlukan pertimbangan. Di lembaga pendidikan tinggi karya ilmiah atau skripsi dari jurusan/program studi masih ditulis dalam bahasa asing yang sesuai dengan bidang studi. Memang terdapat berbagai argumentasi. Yang mempertahankan penulisan dalam bahasa asing beralasan sebagai ukuran keberhasilan dan kemahiran berbahasa asing pada akhir studi. Sebenarnya, ukuran ini dapat diteliti dari keberhasilan ujian mata kuliah, kemudian pula dari kegiatan kelas (*class performance*). Tulisan, kajian, temuan, dan analisis mengenai ilmu pengetahuan seharusnya dapat pula diketahui dan diminati secara meluas mencakupi mereka yang berada dalam jajaran nonbahasa asing. Sebagai bandingan, penulisan tesis S2 atau S3, di universitas-universitas di Australia dan Amerika Serikat sekalipun mengenai bahasa/kesusastraan Indonesia atau aspek/bidang keindonesiaan tetap harus disajikan dan ditulis dalam bahasa Inggris. Penulisan skripsi dalam bahasa asing memperlihatkan *sikap yang masih lemah* mengenai kemampuan bahasa Indonesia dalam penulisan karya ilmiah.

Fungsi bahasa Indonesia sebagai *sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi* menuntut perhatian khusus karena kepesatan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut *kehidupan bahasa Indonesia* terutama dalam kaitan dengan *pengembangan tata istilah keilmuan*. Kenyataan memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia telah memiliki kemampuan berfungsi bukan saja sebagai *sarana pengembangan*, melainkan juga sebagai *sarana pemsarakatan* ilmu pengetahuan dan teknologi, baik untuk *kepentingan ilmu secara an-sich* maupun *kepentingan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi*.

Di Indonesia *bahasa daerah* mempunyai fungsi tertentu. Pertama, bahasa daerah berfungsi sebagai *lambang kebanggaan budaya daerah* yang melambangkan *tata nilai budaya daerah*. Kedua, bahasa daerah berfungsi sebagai *lambang identitas masyarakat daerah*, yang membedakan masyarakat daerah bersangkutan dari masyarakat daerah lainnya, tetapi tetap berada dalam ruang lingkup persatuan dan kesatuan kebudayaan dan kebangsaan Indonesia. Ketiga, bahasa daerah berfungsi sebagai *sarana komunikasi di lingkungan keluarga dan di dalam masyarakat budaya dan pemakai bahasa daerah*

terkait. Kelima, bahasa daerah berfungsi sebagai *sumber kebahasaan* yang memiliki potensi untuk memperkaya bahasa Indonesia dalam perannya, baik sebagai bahasa nasional ataupun sebagai bahasa negara. Keadaan kebahasaan bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa daerah membuktikan kebinekaan atau ketunggalikaan, demikian pula kekayaan khazanah budaya bangsa Indonesia.

Situasi kebahasaan di Indonesia memperlihatkan pula keberadaan *bahasa asing* sekalipun tidak merupakan bagian kebudayaan bangsa Indonesia. Kenyataan membuktikan bahwa bahasa-bahasa asing digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain juga sebagai *sumber kebahasaan untuk memperkaya* bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia telah banyak menyerap unsur kebahasaan dari bahasa asing seperti bahasa Arab, Belanda, dan Inggris, terutama kosakata. Perlu diberikan catatan bahwa bahasa Inggris memiliki *kedudukan khusus* di Indonesia yaitu sebagai *bahasa asing utama* atau *bahasa asing pertama (first foreign language)*.

Dalam situasi kebahasaan ini bahasa Indonesia terus berkembang, semakin maju, dan semakin kaya. Diyakini bahasa Indonesia akan mampu mengisi persyaratan dan siap menghadapi berbagai tantangan era kemajuan ilmu pengetahuan di dunia yang semakin maju, tetapi tidak mungkin tidak akan mengalami perubahan dan pergeseran karena perubahan dan kemajuan zaman.

4. Optimalisasi Peran dan Kedudukan Bahasa Indonesia

Dalam menghadapi era globalisasi berbagai upaya dan kegiatan harus semakin digalakkan untuk mengoptimalkan peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Upaya dan kegiatan ini perlu mengkaji dan mengevaluasi beberapa aspek terkait, seperti permasalahan yang merupakan faktor penghambat. *Pemantapan sikap bahasa* merupakan faktor pendukung keberhasilan pencapaian sasaran yang dicita-citakan.

Terdapat berbagai faktor penghambat pemasyarakatan bahasa Indonesia secara optimal, baik yang bersifat kebahasaan maupun nonkebahasaan. Pertama, masih terdapatnya *faktor kemampuan berbahasa Indonesia yang masih rendah*. Hal ini disebabkan masih adanya anggapan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa sendiri sehingga dirasakan tidak perlu mempelajarinya. Anggapan dan sikap serupa ini akan menyebabkan tidak menggunakan dan tidak mengetahui kaidah dan aturan bahasa Indonesia secara baik dan benar dan, selain itu, juga tidak mengetahui dan tidak memahami hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia.

Kedua, *faktor kecenderungan menggunakan bahasa daerah* di tempat, lingkungan, atau situasi yang bertentangan dengan fungsi dan peran bahasa daerah. Hal ini kurang mendukung pemasyarakatan bahasa Indonesia. Selain itu, dapat pula menimbulkan "rasa curiga" atau kekurangharmonisan sesama warga masyarakat Indonesia yang kebetulan tidak mengetahui bahasa daerah dimaksud.

Ketiga, *faktor rasa lebih bergengsi berbahasa asing* karena terdapat individu atau kelompok masyarakat yang merasa lebih bergengsi atau lebih intelek apabila menggunakan bahasa asing sekalipun di luar batas peran, kedudukan, dan fungsi bahasa. Sikap dan kebiasaan serupa ini merupakan sikap yang tidak menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang terkait dengan sikap yang tidak ikut meningkatkan jati diri serta

harkat-martabat bangsa Indonesia.

Keempat, sikap *kekurangpedulian mempelajari bahasa Indonesia atau hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia menyebabkan kesalahan ataupun kekeliruan penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar*. Faktor kebahasaan yang harus terus dilaksanakan perbaikannya ini mencakupi unsur-unsur kebahasaan, seperti pemilihan kata, majas, eufemisme, dan struktur bahasa.

Pemasyarakatan bahasa Indonesia secara optimal perlu didasari *pemilikan cendekiawan bahasa* yang membina seseorang untuk tajam pikir, cerdas, serta cepat, dan tepat mengenai fungsi dan peran bahasa Indonesia. Pengelola, perancang, dan pekerja bahasa perlu pula dibekali kecendekiiaan dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya agar tugas itu dapat terlaksana dan terencana secara profesional.

Kedudukan dan peran kemasyarakatan bahasa daerah merupakan daya dukung dan daya dorong pembinaan sikap bahasa. Optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia yang merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh lapisan dan kelompok masyarakat bangsa Indonesia memerlukan pemahaman dan kesadaran mengenai *profil bahasa Indonesia*. Bahasa Indonesia yang pada awal Kemerdekaan Republik Indonesia berkedudukan sebagai bahasa resmi, bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara dalam perkembangannya telah membuktikan kemampuan dan perannya sebagai bahasa kependidikan, bahasa kebudayaan, bahasa ilmu pengetahuan, serta bahasa perencanaan dan pembangunan.

Bahasa merupakan bagian, malahan bagian terpenting, dari kebudayaan. Dari sudut pandang budaya *pembinaan sikap bahasa* mempunyai keterkaitan dengan beberapa faktor seperti:

- a. bahasa dalam konteks sosial dan budaya;
- b. hubungan antara berbagai faktor dan unsur kebahasaan dengan situasi dan faktor sosial budaya;
- c. berbagai fungsi sosial kemasyarakatan dalam penggunaan bahasa di Indonesia.

Peran dan kedudukan bahasa Indonesia harus dioptimalkan sehingga akan semakin nyata fungsinya sebagai:

- a. perekat kesatuan dan persatuan;
- b. media ekspresi sikap dan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab;
- c. media pembentuk kerja sama, saling memahami, dan mendukung, khususnya sesama warga masyarakat bangsa Indonesia.

Sikap bahasa yang merupakan faktor pendukung optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia perlu dimiliki dengan berbagai upaya yang mencakupi hal-hal berikut.

- a. *Meningkatkan rasa kebanggaan* memiliki dan menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan dan kemanfaatannya yang menjangkau seluruh lapisan, kelompok, dan golongan dalam masyarakat bangsa Indonesia.
- b. *Menghindari penggunaan bahasa asing secara berlebihan* atau di luar garis ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Penghindaran penggunaan bahasa asing secara berlebihan dapat disebabkan telah ada padanannya dalam bahasa Indonesia ataupun untuk menghindari gangguan terhadap kelancaran komuni-

kasi. Selain itu, penggunaan bahasa asing secara berlebihan atau di luar lingkungan dan keperluannya selain merupakan "pelecehan" terhadap peran dan kedudukan serta hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia, juga melemahkan pembinaan wawasan kebangsaan.

- c. *Meningkatkan frekuensi pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia* dalam segenap kesempatan dan aktivitas, baik resmi maupun tidak resmi. Dari sudut pandang psikologi pendidikan, suatu keberhasilan bukan hanya tercapai melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi lebih-lebih melalui pembiasaan penggunaan secara terus-menerus dalam lingkungan masyarakat dan di tengah-tengah keluarga.
- d. Dalam masyarakat Indonesia, pola anutan merupakan ciri-ciri budaya. Oleh karena itu, *para pemimpin masyarakat* (baik formal maupun nonformal) akan merupakan anutan yang diteladani sikapnya dalam menggunakan dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Oleh karena itu pula, para pemimpin masyarakat perlu memberikan contoh dan teladan penggunaan bahasa Indonesia baik dalam pergaulan, keberadaan di masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja dan kegiatan sehari-hari.

Sikap berbahasa Indonesia secara positif akan dapat menjadikan bahasa Indonesia semakin

- a. berperan secara nyata sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa;
- b. berperan dan bermanfaat dalam konteks integrasi masyarakat dengan budaya;
- c. berhasil guna dan berdaya guna dalam peran dan kedudukannya sebagai bahasa persatuan, bahasa nasional, bahasa negara, bahasa kebudayaan, bahasa kependidikan, bahasa ilmu pengetahuan, serta bahasa pembangunan dan perencanaan;
- d. ketinggian harkat dan martabatnya akan dapat meyakinkan kebermanfaatannya dan perannya untuk dapat "dinobatkan" sebagai salah satu bahasa pergaulan resmi di dunia atau antarbangsa.

Untuk mencapai peran dan kedudukan bahasa Indonesia sebagaimana yang di-cita-citakan, diperlukan *perencanaan bahasa*. Perencanaan bahasa yang mencakupi pembakuan, intelektualisasi, dan grafisasi akan bermanfaat untuk (a) memasyarakatkan dan menguasai bahasa Indonesia secara baik dan benar, (b) meningkatkan minat untuk mengetahui, memahami, dan memanfaatkan hasil-hasil pengembangan bahasa Indonesia, (c) meningkatkan kecendekiaan bahasa dengan kepatuhan dan kecermatan pada norma, kaidah, dan aturan bahasa Indonesia, serta (d) menggunakannya sebagai acuan dalam perencanaan program kegiatan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia secara konsisten dan berkesinambungan.

5. Penutup

Pembangunan dan penyempurnaan di Indonesia bukan hanya bersasaran pembangunan fisik dan ekonomi, melainkan juga *berupaya memantapkan kepribadian bangsa*. Kepribadian bangsa mencakupi *pembudayaan sikap kebahasaan bahasa Indonesia*. Melalui bahasa Indonesia akan dapat dibina kemesraan pergaulan sesama warga masyarakat bangsa Indonesia, dan akan semakin pupusnya jurang pemisah yang disebabkan faktor geografis, demografis, atau perbedaan latar belakang budaya, dan bahasa daerah.

Pembinaan sikap bahasa perlu didukung dan ditanggunggjawab oleh manusia-

manusia Indonesia secara keseluruhan dan terpadu. *Menjadi warga negara Indonesia* tidaklah cukup dengan telah memperoleh status kewarganegaraan, telah memperoleh kartu penduduk, atau telah mengubah nama yang bercirikan keindonesiaan. Yang lebih penting adalah bersikap budaya dan berbahasa Indonesia dalam hidup dan kehidupan, pergaulan maupun aktivitas sehari-hari, baik dalam lingkungan kerja, dalam masyarakat, maupun di lingkungan keluarga. Barangkali sudah waktunya kehidupan kebangsaan perlu dibekali atau dilengkapi semboyan "*Bangsa yang besar adalah bangsa yang menjunjung tinggi budaya dan bahasanya*".

Optimalisasi peran dan kedudukan bahasa Indonesia melalui upaya dan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia memerlukan pertimbangan mengenai dukungan secara kelembagaan. Yang perlu dipikirkan dan dipertimbangkan, antara lain, adalah sebagai berikut.

- a. Upaya dan usaha Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sebenarnya sudah cukup maksimum. Namun, dalam kenyataannya masih terdapat lembaga dan instansi yang berpendapat bahwa apa pun yang ditetapkan atau dianjurkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hanya berlaku untuk lingkungan departemen tempat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berada. Sudah waktunya Pusat Bahasa diangkat sebagai sebuah lembaga nondepartemental, umpamanya berada di bawah Sekretariat Negara, seperti Perpustakaan Nasional.
- b. Memang merupakan kenyataan belum terdapatnya Undang-Undang Kebahasaan disebabkan adanya perkiraan akan menyebabkan kendala dalam peluang yang diberikan untuk bahasa yang berkembang. Keperluan mengenai perundang-undangan ini sebenarnya adalah sebagai rambu pengatur kebijakan mengenai peran dan kedudukan bahasa-bahasa di Indonesia yang tidak akan merupakan hambatan bagi pembinaan dan pengembangan bahasa yang berkembang.
- c. Lembaga pemerintah dan kependidikan, termasuk perguruan tinggi dan manusia-manusia di dalamnya, perlu memberikan contoh penggunaan bahasa Indonesia pada masyarakat di lingkungannya, sebagai anutan masyarakat, bukan memberikan contoh yang tidak baik dengan ketidakpatuhannya pada norma, kaidah, dan aturan bahasa Indonesia. Selain itu, masyarakat perlu didorong untuk ikut serta dalam upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- d. Kerjasama dengan pemerintah daerah perlu dilanjutkan, bahkan semakin ditingkatkan. Pemerintah daerah diharapkan akan ikut mendorong kegiatan kebahasaan hingga daerah bawahan, demikian pula mendorong organisasi, lembaga, dan pemuka masyarakat karena keseluruhannya ini merupakan ujung tombak yang langsung berhadapan dengan masyarakat hingga lapis bawah. Dengan tanggung jawab dan kebersamaan ini upaya peningkatan peran dan kedudukan bahasa Indonesia akan dapat dioptimalkan.

Daftar Pustaka

- Atkinson, Martin *et.al.* 1982. *Foundation & General Linguistics*. London: George Allen & Unwin.
- Brown, H. Douglas. 1980. *Principles of Language Learning and Teaching*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Gardner, R.C. dan W.E. Lambert. 1972. *Attitudes and Motivation in Second-Language Learning*. Massachussetts: Newsburry House Publisher s.
- Halim, Amran. 1995. *Kedudukan dan Fungsi Bahasa Inggris di Indonesia*. Medan: STBA Harapan.
- Ridwan, T.A.R. 1987. *Bahasa dan Linguistik*. Medan: C.V. Fajar Rezeki.
- Ridwan, T.A.R. 1997. *Linguistika*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995-1998. "Catatan dari pertemuan dan rapat koordinasi bahasa dan kebahasaan".

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 8 (Diskusi Panel)
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 10.20--11.20
Topik	: Peran Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara ¹⁾
Panelis	: a. Sarwono b. Alwi Dahlan c. Mely G. Tan d. T.A. Ridwan
Pemandu	: Asim Gunarwan
Pencatat	: a. Junaiyah H.M. b. Buha Aritonang
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Miftahul, SMPN 11, Bandung

a. Pertanyaan:

Yang diperlukan oleh bangsa Indonesia sekarang bukan bagaimana memanggil atau mengganti nama Cina menjadi Cino atau Tionghoa, melainkan bagaimana bangsa Indonesia mampu mengubah orang Cina dan sebagainya agar mau berbuat banyak untuk bangsa Indonesia. Bagaimanakah tanggapan Ibu?

b. Jawaban:

Mely G. Tan

Saya kira, semua yang ada di sini sekarang sedang membicarakan bahasa, bukan mengenai apa yang Anda kemukakan.

2. Penanya: Zainuddin, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Kongres Pemuda tahun 1928 menghasilkan Sumpah Pemuda. Saya berasumsi bahwa lahirnya Sumpah Pemuda itu mengandung unsur politis. Itu asumsi saya. Bahasa Indonesia harus dikembalikan kepada tujuan semula. Bagaimana tanggapan Ibu?

b. Jawaban:

1) *Alwi Dahlan*

Saya bukan ahli bahasa. Pengembangan bahasa pemersatu bergantung kepada pemakai bahasa Indonesia, bukan kepada ahli bahasa.

2) *Mely G. Tan*

Sudah saya katakan bahwa kita mempunyai satu bahasa, yaitu bahasa Indo-

nesia. Pernyataan itu merupakan pernyataan visioner. Artinya, negara Indonesia adalah negara merdeka, berdaulat, dan berdimensi politik yang sangat kental.

3. **Penanya:** Husaini Yunus, STKIP Gorontalo

a. **Pertanyaan:**

Menurut pendapat Bapak, bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa Melayu, bahasa asing, dan bahasa daerah. Oleh sebab itu, saya simpulkan bahwa wajah bahasa Indonesia masa depan adalah bahasa gado-gado. Untuk itu, saya kurang setuju. Bagaimana pendapat Bapak Alwi Dahlan dan Bapak T.A. Ridwan?

b. **Jawaban:**

1) *Alwi Dahlan*

Bagi saya tidak ada masalah dari mana kata bahasa Indonesia itu, yang penting adalah kata itu diterima dan dapat kita pakai bersama sebagai alat komunikasi. Bahasa Indonesia masa depan itu bukan bahasa gado-gado karena bahasa selalu berkembang. Namun, alangkah baiknya jika kita tidak memberikan peranan yang menjatuhkan bahasa Indonesia yang diharapkan akan makin kaya itu.

2) *T.A. Ridwan*

Bahasa yang berkembang adalah bahasa yang hidup. Kalau dahulu kita mengayakan bahasa Indonesia dengan bahasa daerah karena bahasa daerah itu milik kita bersama. Jadi, kita jangan takut dengan bahasa gado-gado karena pengayaan berasal dari bahasa daerah dan bahasa asing.

4. **Penanya:** Hunggu Tadjuddin Usup, IKIP Manado

a. **Pertanyaan:**

Bapak Alwi Dahlan mengatakan bahwa bahasa nasional mendapat tekanan dari bahasa asing. Memang, di masyarakat sering terdengar penggunaan kata *mem-follow-up*, *mem-back-up*, dan yang paling populer adalah *era globalisasi*. Padahal, kita memiliki istilah *kurun kesejagatan*. Bagaimana tanggapan Bapak?

b. **Jawaban:**

1) *Alwi Dahlan*

Kalau kita mengambil kata-kata asing, haruslah dipertimbangkan apakah tidak ada lagi kosakata Indonesia yang sepadan untuk kata asing itu? Menurut pendapat saya, *globalisasi* itu lebih global daripada kata *sejagat*. Kata *global* itu mengandung makna untuk berbagai bidang, seperti *kecepatan*. Akan tetapi, jika semua kata atau istilah yang sudah kita miliki diganti dengan bahasa asing, lama-kelamaan bahasa Indonesia itu akan

hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, pendidikan bahasa kita harus lebih baik sehingga anak didik kita dapat mengaktualisasikan dirinya tanpa sebentar-sebentar pinjam bahasa asing.

2) *Sarwono*

Sebetulnya bahasa asing dapat dihindari apabila kita mengetahui betul bahasa daerah. Saya kira tidak menjadi sesuatu yang aib kalau kita meminjam kata daerah untuk dijadikan kata bahasa Indonesia. Hal itu dapat menjadi harapan pemakai bahasa daerah untuk memperkenalkan bahasanya untuk dijadikan bahasa Indonesia. Hal itu merupakan suatu upaya pengenalan, yang jika di dalam kenyataannya kata bahasa daerah itu kurang dikenal.

5. **Penanya:** Trisna Kumala Satya Dewi, Universitas Airlangga, Surabaya

a. **Pertanyaan:**

Bagaimana upaya kami para guru, terutama para guru sekolah etnis Cina, agar mereka memakai bahasa Indonesia dengan baik dan benar?

b. **Jawaban:**

Mely G. Tan

Saya bukan ahli bahasa. Barangkali kita perlu membedakan bahwa anak-anak mempunyai cara berbicara yang khas. Kalau di kelas, seharusnya kita mengajarkan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Akan tetapi, kalau dalam pergaulan mereka, biarkanlah mereka memakai bahasa mereka. Kita harus membedakan bahasa di kelas dan bahasa sehari-hari. Kalau menulis, kita harus mengikuti kaidah bahasa tulis yang berbeda dari bahasa sehari-hari. Kita memang harus mengajari anak-anak, termasuk anak-anak keturunan Tionghoa. Mereka pun harus bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

6. **Penanya:** Hamzah Mahmud, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Saya ingin berteori tentang *daripada*-nya Pak Harto. Mudah-mudahan teori itu didukung oleh para ahli fonetik, seperti Pak Amran Halim, Pak Anton M. Moeliono, dan Pak Hans Lapoliwa. Menurut saya, *daripada* itu merupakan keraguan dalam bertutur. Barangkali, daya pikir Pak Harto lebih cepat daripada organ bicaranya, maka beliau ber-*daripada* daripada ber-*anu-anu*, *e-e*, dan sebagainya.

b. **Jawaban:**

1) *Mely G. Tan*

Saya kira, kaidah bahasa berlaku untuk semua orang mulai presiden sampai pesuruh.

2) *Alwi Dahlan*

Kalau presiden berbicara dalam kedudukan resmi, penggunaan bahasa itu menjadi model. Akan tetapi, dalam bertutur sehari-hari jika terdapat kesalahan, itu tidak menjadi masalah. Sebenarnya, kesalahannya terletak pada para pendengar yang langsung meniru. Masalahnya, orang sudah tua itu sudah terbiasa; mungkin beliau tahu bahwa itu tidak tepat, tetapi sudah sulit mengubahnya.

7. **Penanya:** Fuad Abdul Hamied, IKIP Bandunga. **Pertanyaan:**

Tentang hubungan bahasa dengan kekuasaan, hal itu merupakan fenomena yang biasa terjadi di seluruh dunia karena orang yang berkuasa, termasuk juga yang ingin berkuasa, selalu memanipulasikan bahasanya. Bagaimana pendapat Anda?

b. **Jawaban:**1) *Mely G. Tan*

Saya tidak setuju dengan pandangan tersebut. Menurut saya, bahasa bukan untuk direkayasa oleh penguasa. Peran pemerintah yang berkuasa sebenarnya bukan untuk menekan masyarakat, melainkan untuk membantu masyarakat mencapai apa yang disebut masyarakat adil dan makmur. Itulah yang sebenarnya yang harus kita perhatikan.

2) *Alwi Dahlan*

Sebenarnya setiap pemakai bahasa sudah memanipulasi bahasanya. Buktinya ialah setiap kali berbicara, kita selalu memilih kata-kata yang sengaja kita *samarkan* atau yang sengaja kita *tonjolkan*. Sekarang ini pemakai bahasa yang menghujat juga memilih kata-kata tertentu untuk menyatakan hujatannya. Berkomunikasi adalah memakai bahasa dengan memanipulasi makna untuk tujuan masing-masing. Masalahnya adalah kita mempertanyakan apakah dengan menggunakan ragam tertentu pemakai bahasa sebenarnya telah menekan masyarakat?

3) *Sarwono*

Kalau ingin menghindari manipulasi bahasa, kita harus mampu menggunakan kata-kata yang tepat. Jadi, satu kata harus satu makna. Itulah yang selalu kita harapkan. Kalau makna kata itu meragukan, itulah yang membuat peluang terjadinya manipulasi. Misalnya, *puskesmas* (pusat kesehatan masyarakat) dapat menimbulkan keraguan apakah berarti 'pusat kesehatan bagi masyarakat' atau 'pusat masyarakat sehat' sehingga di situ masyarakat sehat semua. Jadi, manipulasi bahasa terjadi karena kekurangjelasan makna. Hal itu harus dihindarkan.

4) *T.A. Ridwan*

Pendapat saya berbeda. Menurut saya, penguasa harus membuat contoh penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar rakyat mengikutinya.

8. Penanya: Marida Siregar, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. **Pertanyaan:**

Apakah pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar harus mengikuti kaidah bahasa Indonesia ataukah terserah kepada pemakainya? Bagaimana pendapat Bapak Alwi Dahlan

b. **Jawaban:**

Alwi Dahlan

Tentu, kita sedapat mungkin berusaha memegang kaidah bahasa. Akan tetapi, permasalahannya adalah bahwa makna itu berkembang. Banyak hal yang tidak dapat dicakup oleh kosakata yang ada dan orang menggunakan kata yang sama untuk berbagai pengertian. Jadi, jika Pak Sarwono (Panelis) mengatakan bahwa satu kata satu makna, itu hampir tidak mungkin. Itulah perbedaan bahasa politik dan bahasa bukan politik. Kita mengembangkan arti sebab arti bersumber dari otak kita, bukan dari kamus. Misalnya, kita mendengar kata *acuh*, padahal, maksudnya *tidak acuh*.

Ajip Rosidi
Sastrawan

Sampai sekarang kalau kita berbicara tentang peranan bahasa daerah itu (yang sumbernya ada pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36), kita tentu akan berbicara tentang ketentuan yang isinya kira-kira sebagai berikut.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memelihara bahasa daerah yang dilakukan oleh suku bangsanya. Kewajiban ini tidak pernah dilaksanakan oleh Pemerintah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sampai sekarang hanya menggunakan bahasa daerah sebagai objek studi, tidak ada pengembangan terhadap bahasa atau sastra daerah yang dilakukan oleh lembaga tersebut. Dan, kalau kita membaca GBHN, saya tidak tahu GBHN yang mana, dalam GBHN itu kita temukan pernyataan yang mengatakan bahwa bahasa daerah itu hanya diperlakukan untuk memperkaya bahasa nasional, tidak pernah bahasa daerah dianggap sebagai subjek. Padahal, bahasa daerah di beberapa daerah masih merupakan bahasa yang hidup, yang menghasilkan karya sastra, menghasilkan buku-buku, dan lain-lain.

Seperti apa yang dikatakan oleh Taufik Abdullah tentang bahasa daerah, pembinaan dan pengembangan bahasa daerah itu makin lama makin menurun. Akan tetapi, alhamdulillah saya, misalnya, memprakarsai pemberian hadiah sastra untuk bahasa daerah, mula-mula untuk sastra Sunda saja, yaitu hadiah "*Rancage*" sepuluh tahun yang lalu. Kemudian, setelah lima tahun kami memberikan penghargaan atau hadiah untuk sastra Jawa. Dan, tahun ini kami dapat memberikan penghargaan atau hadiah untuk sastra Bali sehingga diharapkan kegiatan pemberian penghargaan dan hadiah itu makin lama makin berkembang. Harus saya katakan bahwa pemberian hadiah sastra di Indonesia biasanya tidak pernah bertahan lama, apalagi selama lima tahun berturut-turut, termasuk pemberian penghargaan atau hadiah yang diberikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu Wardiman Djojonegoro menjadi menteri mungkin satu kali beliau memberikan hadiah sastra, tahun-tahun yang lain mungkin beliau lupa. Akan tetapi, "*Rancage*" ini sudah memberikan hadiah sastra selama sepuluh tahun dan dilakukan pada setiap tahun. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa daerah itu betul-betul hasil dari pemakai itu sendiri. Pemerintah sendiri tidak pernah memberikan pembinaan yang jelas dan nyata terhadap perkembangan bahasa daerah. Tentu saja, hal ini tidak sesuai dengan pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 1945. Memang, sikap Undang-Undang Dasar 1945 dalam era reformasi ini dipersoalkan.

Mudah-mudahan dalam undang-undang dasar yang baru nanti peranan bahasa daerah juga tidak dihilangkan atau dilenyapkan. Kemudian, mudah-mudahan fungsinya tidak hanya dijadikan sumber pemerikaya bahasa nasional.

KEBIJAKAN BAHASA NASIONAL: PENGAJARAN BAHASA INGGRIS DI SEKOLAH

Ignas Kleden
LP3ES

Saya hendak melihat persoalan pengajaran bahasa Inggris di sekolah di negeri kita ini. Kini ada usaha untuk memberlakukan dan memasukkan pengajaran bahasa Inggris ke dalam kurikulum sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Tentu saja, hal ini termasuk juga tingkat sekolah dasar. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pemberian pelajaran bahasa Inggris pada masa berumur muda itu akan membuahkan hasil yang baik.

Bahasa Inggris diajarkan di negara lain, di Jepang, misalnya, bertujuan agar mereka mampu masuk ke pasar dunia internasional. Kemudian, pelajaran bahasa Inggris itu bertujuan agar terbentuk semacam elite penerjemah dan juru bahasa yang bisa membawa informasi internasional ke dalam negeri. Jadi, tujuannya cukup jelas menurut pendapat saya. Nah, pada negeri kita ini tujuannya tidak begitu jelas, apakah bahasa Inggris di sini seperti saya katakan tadi mau membawa kita, memungkinkan kita memasuki pasar metropolitan, pasar dunia, atau apakah bahasa Inggris itu hendak dijadikan sarana pembentuk suatu elite dan juru bahasa yang harus membawa masuk informasi-informasi dari dunia luar ke dalam bahasa Indonesia.

Tujuan itu sangat mempengaruhi seluruh proses pembelajaran bahasa Inggris itu sendiri.



BEBERAPA GAGASAN KE ARAH PERUMUSAN KEMBALI "POLITIK BAHASA"

Taufik Abdullah

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

1. Pendahuluan

Gagasan yang akan disampaikan ini tidak berasal dari penelitian dan pemikiran seorang ahli bahasa. Gagasan ini hanyalah beberapa bahan pertimbangan yang disampaikan oleh seorang *pemakai bahasa*. Sebagai pemakai, saya kadang-kadang memperhatikan adanya dinamika hubungan timbal balik bahasa dengan masyarakat pemakainya. Keduanya menurut dugaan saya saling mempengaruhi.

"Masyarakat" bukan saja pemakai bahasa, tetapi juga merupakan salah satu "realitas" yang dilukiskan oleh bahasa. Ketika "realitas" itu disampaikan oleh bahasa proses penafsiran pun terjadi. Dengan menafsirkan realitas lewat simbol-simbolnya, bahasa sebenarnya melakukan usaha "penciptaan" baru. Jadi, "realitas" sosial yang disampaikan oleh bahasa adalah juga sebuah konstruksi. Ketika hasil konstruksi ini dikembalikan kepada "masyarakat", maka dialog yang intens pun terjadi. Dalam proses ini keduanya terlibat dalam situasi "saling mencipta".

Dengan bertolak dari gagasan sederhana ini maka masalah "politik bahasa" tidak bisa dianggap dan diperlakukan sebagai wilayah monopoli ahli bahasa. Siapa pun mempunyai hak untuk membicarakannya. Bagaimanapun juga bahasa--dan, tentu saja termasuk unsur-unsur leksikal dan ketatabahasaannya--tidak bisa melepaskan diri dari masalah *representation* dari simbol-simbol yang disampaikannya. Kalau telaah ini yang dibicarakan, kitapun akan terlibat dalam berbagai corak masalah kebahasaan.

2. Politik Bahasa

"Politik bahasa" yang sampai kini, secara resmi, masih merupakan pegangan Pusat Bahasa, adalah hasil seminar yang diadakan pada tahun 1975; jadi, telah hampir seperempat abad. Dalam masa itu betapa banyak perubahan yang telah terjadi. Tahun 1970-an adalah awal dari berbagai perubahan struktural di banyak negara di dunia ini, termasuk Indonesia. Ketika seminar bahasa, yang merumuskan "politik bahasa" itu diadakan, kita baru saja mengakhiri "musim semi" suasana demokratis di negara kita. Dengan "Malari 1974" setahap demi setahap kita semakin dibawa ke dalam sistem kekuasaan dari "negara yang serakah", yang ingin menguasai legitimasi politik, sistem patronage ekonomi, dan terpenting, kesadaran bangsa. Dalam suasana inilah "hegemoni makna" dijalankan dan "penguasaan akan ingatan" dilakukan. Maka, bahasa pun menjadi alat kekuasaan dan sekaligus dijadikan korban, demi kestabilan dan pembangunan.

Tahun 1975 adalah pula awal dari Pelita II, ketika TVRI masih merupakan satu-satunya media elektronik (selain radio). Lebih penting lagi, jaringannya pun masih sangat terbatas. Ketika itu kemampuan berdwibahasa masih kurang dari 50% (pada tahun 1981 masih 30% bangsa kita yang sama sekali tidak tahu bahasa Indonesia).

Meskipun keadaan ekonomi setahap demi setahap telah menunjukkan perbaikan, ketakutan pada serangan dunia internasional telah mulai dirasakan. "*Multi national corporation*" telah mulai dirasakan sebagai momok. Barulah di akhir 1980-an kita menjadi semakin sadar bahwa masalah yang utama ialah konglomerasi dan monopoli dan kemungkinan adanya kolusi antara konglomerat (yang lama dan baru) dengan kekuasaan.

Kini, di tahun 1998. *lengser keprabon* telah terjadi, dengan meninggalkan sekian banyak persoalan seperti soal politik dan ekonomi. Soeharto pergi meninggalkan tampuk kekuasaan dengan meninggalkan bangsa yang terluka, pemerintahan yang labil, dan negara yang terancam disintegrasi. Namun, terlepas dari masih belum berakhirnya krisis politik dan ekonomi, "suara reformasi" telah mulai juga memberikan harapan baru ke arah penciptaan sistem demokrasi yang sehat dan masyarakat madani (*civil society*) yang kritis dan kreatif. Perusahaan multinasional tidak lagi dianggap sebagai ancaman, tetapi keterlibatan dalam proses globalisasi sekaligus terasa "menakutkan" dan "menjanjikan". Globalisasi informasi, moneter, dan teknologi, yang semula dianggap sebagai sebuah skenario di masa depan, ternyata kini tanpa mengetuk pintu telah berada di "kamar tidur" kita. Bulan madu yang dibayangkan pun menjadi impian yang menakutkan. Akan tetapi, bagaimanapun juga globalisasi adalah keharusan yang menantang dan menjanjikan.

Akibat langsung dari proses ini dalam realitas kebudayaan pun telah kelihatan. Kecenderungan homogenisasi kebudayaan populer telah semakin kelihatan. Semacam "*McDonaldization*" telah terjadi. Gejala ABG adalah sebuah contoh sederhana. Hibridisasi kultural pun telah semakin tampak.

Sementara itu, TVRI kini telah didampingi oleh lima studio televisi swasta dan jaringan televisi (untuk tidak menyebut radio) telah merembes ke hampir semua pelosok tanah air. Maka, tanpa bersekolah pun orang masih dimungkinkan untuk tahu bahasa Indonesia, sebagai bahasa nasional. Di tahun 1990 dikatakan bahwa hanya tinggal 17% yang tidak mengerti bahasa Indonesia. Di samping itu, tentu bisa juga dicatat bahwa pelajaran bahasa Indonesia di luar negeri telah semakin meluas. Menurut laporan, bahasa Indonesia telah menduduki tempat pertama atau kedua sebagai bahasa asing yang dipelajari di Australia.

Kini telah bisa dibayangkan bahwa tidak terlalu lama lagi bahasa Indonesia telah menjadi bahasa yang dipahami di mana pun juga dan pada golongan masyarakat mana pun juga di tanah air kita. *Bilinguality* atau kedwibahasaan dalam arti kemampuan berbahasa yang lebih dari satu semakin menyebar karena pelebaran jangkauan bahasa Indonesia dalam masyarakat harus dilakukan. Akan tetapi, sebaliknya, bukan tidak mungkin gejala *monolinguality* atau ketunggalan-bahasa, terutama di kota-kota besar, akan semakin merupakan kenyataan. Bahasa daerah bisa jadi akan semakin tersudut dan terhimpit oleh dominasi bahasa Indonesia. Mobilitas geografis yang semakin intens, sistim informasi nasional yang semakin menyebar, dan penetrasi birokrasi yang semakin jauh, akan mempercepat proses ke arah *monolinguality* yang baru ini.

Ancaman terhadap bahasa daerah bukan saja disebabkan oleh semakin dominannya bahasa nasional, tetapi juga karena semakin kuatnya corak kedwibahasaan yang

baru, karena semakin pentingnya peranan bahasa Inggris (dan pada tahap yang lebih rendah bahasa modern lain yang juga memainkan peranan dalam ekonomi global). Jadi, secara kebahasaan kita akan melihat bahwa pelebaran pemakaian bahasa nasional mungkin juga diiringi oleh merosotnya pengaruh bahasa daerah dan, sejalan dengan proses globalisasi, menaikinya peranan bahasa asing.

Bagaimanakah sebaiknya "politik bahasa"? Globalisasi adalah masa depan yang tidak terhindarkan. Akan tetapi, bukankah globalisasi adalah sebuah situasi "tanpa ingatan"? Karena itulah kita masih harus melihat kepada keutuhan bangsa. Dari sudut ini tentu bisa dikatakan bahwa bahasa nasional adalah bahasa persatuan dan bahkan juga boleh dikatakan bahasa perjuangan kita sebagai bangsa, sedangkan bahasa daerah memberikan kesadaran kontinuitas kultural.

3. Sasaran Politik Bahasa

Konsep "politik bahasa" semestinya harus diartikan sebagai bagian dari *proses nation-formation* dan *nation-building*. Sejarah pembentukan bangsa kita memang memperlihatkan bahwa kesamaan bahasa bukanlah merupakan syarat utama. Faktor-faktor historis lain tampaknya lebih berperan. Meskipun demikian "politik bahasa" bertolak dari praanggapan bahwa dalam proses intergrasi nasional dan *nation-building* bahwa bahasa nasional yang komunikatif adalah sebuah faktor yang tidak bisa diabaikan. Bahasa nasional yang teratur, tetapi sekaligus juga "terbuka" dan "dinamis" juga menjadi landasan utama dalam pengembangan pengetahuan, filsafat dan sastra. Barangkali tidak berlebih-lebihan kalau dikatakan bahwa "politik bahasa" yang baik dan strategis adalah sesungguhnya pelaksanaan dari keharusan ideologis dan konstitusional dari negara kita, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD, yaitu "mencerdaskan kehidupan bangsa".

Di samping merumuskan kebijaksanaan internal kebahasaan, "politik bahasa" sebaiknya juga mengarahkan perhatian kepada dinamika masyarakat dan pengaruh luar yang disebabkan oleh keterlibatan Indonesia dalam pergaulan internasional yang semakin bersifat global. Meskipun demikian, "politik bahasa" harus pula menjaga jangan sampai terjadi "pemiskinan kebudayaan"--ketika kebudayaan sendiri telah dilindas oleh kebudayaan asing--dan terbongkarnya orang dari akar budayanya.

Jika demikian, secara konseptual "politik bahasa" harus membedakan tiga wilayah sasaran, yaitu (a) pendidikan dan ilmu pengetahuan. (b) masyarakat umum (termasuk pers) dan (c) birokrasi.

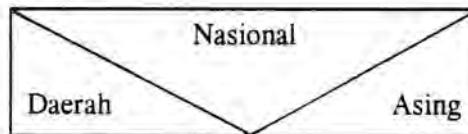
a. Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Masalah terpenting dalam pendidikan tentu saja penentuan prioritas pengajaran bahasa. Bagaimanakah perimbangan antara keharusan menjaga "kontinuitas kultural" (bahasa daerah), integrasi bangsa dan *nation-building* (bahasa nasional), dengan tantangan globalisasi (penguasaan bahasa asing) bisa didapatkan?

Sudah jelas bahwa masalah bahasa daerah tidak bisa dilakukan dengan main pukul rata, seperti yang dilakukan terhadap pemerintahan desa menurut UU No. 5/1979. Beberapa bahasa daerah masih sangat fungsional, bahkan juga masih meng-

hasilkan karya sastra. Akan tetapi, beberapa bahasa daerah lain telah terancam kepunahan. Ada bahasa daerah yang mempunyai keakraban leksikal dan struktur dengan bahasa Indonesia, tetapi ada juga yang tingkat keakrabannya sangat jauh. Dan begitulah selanjutnya. Akan tetapi, sebagai ancang-ancang baik juga dikatakan bahwa bahasa daerah ini sebaiknya diajarkan pada saat anak didik mulai menduduki bangku pelajaran. Pendidikan dimulai dengan bahasa yang akrab, sedangkan bahasa nasional dimulai pada tahun ke-2 atau ke-3 secara bertahap. Tahun-tahun selanjutnya bobot bahasa daerah makin mengecil, bahkan semakin hilang. Menjelang anak didik menyelesaikan keharusan belajar 9 tahun, bobot bahasa nasional telah semakin membesar. Bersamaan dengan mengecilnya bobot bahasa daerah, bahasa asing (khususnya Inggris) telah bisa pula diberikan. Menjelang akhir SMU bahasa Indonesia mengecil, bahasa asing membesar. Selanjutnya pelajaran bahasa nasional lebih diarahkan pada pendidikan penulisan kreatif.

Gambar idealnya kira-kira seperti tercantum di bawah.



Sudah jelas bahwa dalam lapangan pendidikan ini Pusat Bahasa tidak bisa bekerja sendiri. Masalah perimbangan pendidikan kebahasaan terkait erat dengan strategi pendidikan nasional secara umum. Akan tetapi, Pusat Bahasa dapat menggariskan usul kebijaksanaan dasar dalam hal kebahasaan.

Dalam lapangan ilmu pengetahuan dan teknologi Pusat Bahasa masih harus memainkan peranan dalam usaha pembakuan istilah teknis. Masalah tata tulis barangkali tidak perlu menjadi perhatian utama sebab biasanya setiap lembaga keilmuan mempunyai gaya masing-masing.

b. Masyarakat Umum

Dengan mudah bisa dikatakan bahwa masyarakat umum adalah wilayah kompetisi yang menentang segala corak hegemoni. Apabila Pusat Bahasa mencoba bermain "hegemoni", wibawanya akan mengalami kemerosotan. *Language engineering* hanya bisa dijalankan dalam suasana kompetitif--ketika kemampuan argumentasi, tanpa hegemoni, bisa dimenangkan. Perdebatan "golongan guru" (yang konon "membekukan bahasa") dengan "golongan pers" (yang konon "merusak bahasa") seperti yang terjadi dalam Kongres Bahasa 1954 praktis berakibat bahwa "golongan guru" dipertalakan sebagai pihak yang ketinggalan zaman.

Sebelum Perang Dunia II, menurut pengamatan amatiran saya, secara ekstrim bisa dibedakan tiga langgam atau gaya bahasa Melayu/ Indonesia. Pertama, *engineered*

language, seperti yang ditunjukkan oleh Balai Poestaka--rapi, "baik dan benar", tetapi cenderung puris, bergaya yang berbunga-bunga, dan agak membosankan. Kedua, Melayu-pasar, sebagaimana banyak diperlihatkan oleh koran dan majalah yang diterbitkan oleh golongan nonpri "terpolusi kata-kata asing", agak kikuk, tetapi langsung meyentuh masalah. Ketiga, gaya "roman picisan Medan", yang spontan, "kota", dan nasionalistik. Gaya bahasa para tokoh pergerakan kita bisa dimasukkan ke dalam salah satu gaya yang ekstrim ini.

Dalam perkembangan selanjutnya "Melayu pasar" kehilangan tempat, sedangkan kerapian "Balai Poestaka" hanyalah laku setelah terkena gaya "roman picisan". Tempo adalah salah satu contoh yang berhasil yang menggabungkan "ketertiban" dan "kelincahan" ini.

Dengan kata lain, masyarakat umum adalah wilayah tempat terjadinya inovasi bahasa. Kebebasan relatif dalam berbahasa yang dimiliki pers dan sastra seakan-akan memberikan kemungkinan yang tanpa batas. Dalam wilayah masyarakat inilah *langue/language/bahasa*, kalau Saussure bisa diikuti, memberikan kemungkinan yang luas bagi terciptanya bentuk-bentuk *parole/speech/ucapan* yang baru.

Dalam situasi yang kompetitif dan inovatif ini peranan Pusat Bahasa haruslah terutama bersifat fasilitator dan pemberi peringatan ketika kemungkinan anarki telah terbayang. Di satu pihak Pusat Bahasa adalah "pemantau cuaca kebahasaan", tetapi di pihak lain adalah "biro penasihat" bagi siapa pun yang memerlukan. Bukanlah *tut wuri handayani*, tidak pula *ing ngarso sung tulodo*, tetapi *ing madya mangun karso*, peranan Pusat Bahasa--kalau boleh dipakai gaya Taman Siswa, yang dielus-elus oleh Orde Baru.

Peranan "politik bahasa" yang sesungguhnya terhadap masyarakat akan sangat terasa pada usaha Pusat Bahasa yang diarahkan pada birokrasi.

c. Birokrasi

Karena berbagai kritik kebahasaan tentang Orde Baru telah pernah saya sampaikan dan telah dimuat dalam buku *Bahasa dan Kekuasaan* (1995) saya hanya akan menyebut beberapa hal saja. Pertama, hegemoni makna--yaitu penguasaan arti kata dan konsep--dijalankan oleh pemerintahan Orde Baru dengan menjalankan kekuatan yang ekstralinguistik. Ketika penguasaan arti yang bercorak opresif ini semakin cenderung bercorak obskurantis maka kita pun mengalami polusi makna yang serius. Masih ingatkah kita pada perdebatan saat-saat awal gerakan reformasi? Betapa polusi yang obskurantis ini telah menghambat dialog dan tragedi pun terjadi. Kedua, "paradigma konsensual" (yang hegemonik) terpantul jelas dengan kebiasaan untuk memakaikan kata dan ungkapan yang "esoteris" seakan-akan sebagai *magic formula*. Perumusan GBHN adalah sebuah contoh. Bahasa politik yang bercorak polisemi pun sesungguhnya adalah strategi kekuasaan. Siapa pun dimungkinkan untuk menemukan arti yang diinginkannya. Hanya saja kalau pelaksanaan yang ditanyakan, ketika itulah hegemoni makna, yang ekstralinguistik, berbicara.

Representation adalah masalah utama dari bahasa birokrasi dan kekuasaan. Apakah yang diucapkan itu adalah "wakil" yang otentik dari "subjek yang dikatakan"? Hal

ini menjadi pertanyaan karena Orde Baru telah menjadikan hubungan kata dan subjek itu sebuah problematik. Empat corak pengaburan semantik dan *representation* telah dijalankan. Pertama, eufemisme yang berlebihan, yang malah memancing untuk terjadinya reifikasi, yaitu ketika konsep telah diidentikkan dengan realitas. Kedua, kramanisasi kata, pembedaan kata yang diadakan untuk hal yang sama, tetapi dipakaikan pada orang yang berbeda. "Saudara ketua menyampaikan pidato sambutan", "Menteri memberi pengarahan", "Presiden berkenan memberi petunjuk". Ketiga, Sanskritisasi nama dan konsep. Seakan-akan dengan menjalankan proses ini sebuah suasana magis bisa diciptakan. Kita lihat saja nama ruang-ruang gedung DPR atau lambang-lambang angkatan dan sebagainya. Kata telah menjadi mantra dalam dunia yang profan. Keempat, penyembunyian arti di belakang kata baru: *pelacur* menjadi *WTS*, *kelaparan* menjadi *kurang gizi*, *ditangkap* atau *dibunuh* menjadi *diamankan*.

Sebagai cacatan sampingan tentu bisa juga dilihat kebiasaan para pejabat untuk meniru kebiasaan idiosinkretik berbahasa Presiden. Maka orang pun beramai-ramai, dengan rasa bangga, bisa berkata, "Kemarin saya memancing *daripada* ikan".

Politik bahasa haruslah bisa mengembalikan sifat bahasa Indonesia yang egaliter. Kramanisasi harus diakhiri. Polusi bahasa atau penyembunyian realitas di belakang kata baru harus dihapus. Masalah makna harus diselesaikan secara linguistik, bukan dengan ekstra-linguistik. Gaya bahasa yang esoterik harus diganti menjadi gaya yang konkrit dan rasional. Sanskritisasi harus dibatasi. Pusat Bahasa tidak perlu lagi menyediakan diri untuk melihat-lihat kamus bahasa Sanskerta untuk memenuhi permintaan lembaga-lembaga birokrasi.

Pembenahan bahasa birokrasi bukan saja merupakan "reformasi bahasa politik dan kekuasaan", tetapi juga sesungguhnya menjadikan bahasa kembali merupakan simbol dari realitas yang komunikatif.

4. Penutup

Akhirnya, kalau saja hal-hal di atas bisa dipertimbangkan, maka Pusat Bahasa perlu juga mempertimbangkan sistem kerja dan sumber daya manusia yang dimiliki. Saya tidak bisa berbicara tentang sistem kerja ini karena memang tidak mengetahui dengan baik apa yang kini dijalankan. Akan tetapi, dari segi SDM ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian.

Kalau dugaan saya ada benarnya bahwa "politik bahasa" harus menghadapkan diri pada struktur hari ini, kemungkinan hari depan, dan keharusan menjaga kontinuitas kultural, maka Pusat Bahasa tidak bisa tidak harus melihat perbendaharaan SDM-nya. Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak bisa hanya terdiri dari para ahli bahasa dan sastera. Pusat Bahasa harus juga merekrut--atau bekerja sama dengan--para ahli ilmu sosial, baik sosiologi, ilmu politik, sejarah, dan sebagainya.

MELEPASKAN DIRI DARI CENGERAN BAHASA PERS ORDE BARU

Parakriti T. Simbolon
Harian Umum *Kompas*

1. Pendahuluan

Yang akan dipaparkan di bawah ini berkisar pada mutu bahasa pers Indonesia yang rendah sebagai alat komunikasi selama 32 tahun kekuasaan Orde Baru. Rendahnya mutu bahasa pers terlihat jelas pada *berita-berita pers Indonesia yang pada umumnya tanpa peristiwa, dan kalau ada peristiwa, tanpa jalan cerita*. Selama 32 tahun ini, isi media massa lebih banyak berupa pidato, rencana, janji, lelucon, nasihat, komentar, pemerintah, ancaman, indoktrinasi, pendeknya omongan! Kebanyakan peristiwa, termasuk yang sangat penting, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme, penculikan, pembunuhan, belum jelas duduk perkaranya sampai detik ini, sekalipun tiap hari disiarkan sebagai berita besar.

Keadaan ini jauh lebih parah daripada kekurangan yang biasa dikeluhkan, seperti pemakaian yang keliru atas kata, kalimat, atau tanda baca, bahkan daripada manipulasi fakta dengan penghalusan (*euphemism*). Mengapa? Karena *berita tanpa peristiwa, dan peristiwa tanpa jalan cerita* sesungguhnya telah merupakan pengkhianatan terhadap tugas pokok pers. Bukankah tugas pokok pers melaporkan kejadian sebagaimana adanya dengan bahasa yang teratur, sederhana, hemat, jelas, dan menarik?

Ada pendapat yang mengatakan bahwa keadaan itu sebagian besar disebabkan oleh kekuasaan negara yang terlalu terpusat atau otoriter, dan media massa lebih banyak sebagai korban daripada sekutu. Ada benarnya, tetapi pers Indonesia tetap tidak bisa menghindari tanggung jawab di dalamnya. Oleh karena itu, setelah rezim Orde Baru resmi berakhir, yang patut memohon maaf kepada bangsa Indonesia mestinya tidak hanya Golkar atau ABRI, tetapi juga pers Indonesia. Agaknya setelah masyarakat pers menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya, barulah dapat melanjutkan upaya untuk melepaskan diri dari cengkeraman bahasa pers Orde Baru.

2. Kebijakan Bahasa

Sejak dicanangkan pada Kongres Bahasa Indonesia III, 28 Oktober--3 November 1978, hingga sekarang, Politik Bahasa Nasional membebankan pada bahasa Indonesia jauh lebih banyak fungsi daripada sekedar alat komunikasi. Secara eksplisit sering disebut lima fungsi lain, yaitu sarana pendidikan, sarana pemerintahan, alat pengembangan kesenian, wahana ilmu pengetahuan dan teknologi, serta yang utama alat persatuan nasional. Walaupun demikian, sukar dihindari kesan negatif bahwa semakin berat dan mulia beban yang dipikul, semakin sedikit dan sepele hasil yang dicapai. Sama sekali bukan maksudnya bahwa bahasa Indonesia tidak berkembang di bidang fonologi, morfologi, sintaksis, ataupun idiom. Harus diakui bahwa di bidang-bidang tersebut perkembangan selama 20 tahun terakhir sangatlah pesat. J.S. Badudu berulang-ulang menegaskan bahwa bahasa Indonesia sekarang benar-benar sudah lepas dari bahasa asal, bahasa Melayu, karena lebih dari separo kata-kata bahasa Indonesia

yang sekarang bukan lagi berasal dari bahasa Melayu, melainkan dari berbagai bahasa daerah dan bahasa asing.

Yang tidak menggembirakan adalah kemampuan bahasa Indonesia itu, khususnya dalam pers nasional, untuk menyatakan perasaan, maksud, dan pikiran, secara teratur, sederhana, hemat, jelas, dan menarik. Dalam rumusan yang berbeda, masalahnya terletak dalam fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, lebih daripada fungsi-fungsinya yang lain itu. Namun, sekalipun hanya menyangkut satu dari enam fungsi yang dituntut, masalah itu tidak berarti kecil, malah sebaliknya menjadi jauh lebih besar karena hanya sesudah dapat melaksanakan fungsi komunikasi dengan baik, suatu bahasa bisa diharapkan mampu menunaikan fungsi-fungsi lain tadi. Kebijakan nasional di bidang bahasa agaknya sulit berhasil jika tidak lebih dahulu meningkatkan mutu bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi.

3. Bahasa Pers

Sebagai media komunikasi, pers suka menganggap diri, dan juga dianggap oleh masyarakat, sebagai sumber penting bagi perkembangan bahasa. Kodrat pers sebagai media komunikasi juga dianggap demikian rupa sehingga bahasa yang digunakan harus betul-betul teratur, sederhana, hemat, jelas, dan menarik. Kenyataannya tidak demikian. Bahasa pers Indonesia lebih sering kacau, rumit, boros, kabur, dan membosankan.

Betapa kacau, rumit, boros, kabur, dan membosankan bahasa pers kita secara langsung dirasakan oleh staf penyunting pada kebanyakan surat kabar. Dari pengolah yang aktif, mereka telah lama berubah menjadi petugas yang pasif, kalau tidak putus asa, karena tiap hari gagal menulis ulang naskah berita para wartawan. Hampir seluruh naskah seharusnya ditulis ulang. Kalaupun para penyunting mau dan mampu melakukannya, waktu yang diperlukan untuk itu begitu banyak sehingga koran praktis tidak akan mungkin terbit.

Jangankan sederhana, hemat, apalagi jelas dan menarik, keteraturan sebagai syarat minimum tata bahasa pun sering diabaikan oleh bahasa pers kita, terlebih akhir-akhir ini. Pengabaian itu meliputi hampir seluruh bagian bahasa, sejak dari pemakaian bunyi (fonologi) sampai struktur kata (morfologi) dan struktur kalimat (sintaksis).

a. *Teratur*

Teratur tentulah merupakan syarat minimum dalam berbahasa karena teratur berarti sesuai dengan tata bahasa. Kutipan J.S. Badudu dari suatu surat kabar, yang dimuat dalam bukunya, *Cakrawala Bahasa Indonesia II* (Jakarta: Gramedia, 1992, halaman 74), sudah hampir menjadi contoh klasik dari bahasa pers yang tidak teratur, yang kacau berikut.

Dalam menunggu berbuka puasa, masyarakat Bandung dan sekitarnya banyak mempergunakannya dengan berbagai cara. Bila kita tengok sekitar Taman Makam Pahlawan Cikutra di waktu sore, nampak dipadati pengunjung dari berbagai kalangan [...].

Suasana makam tidak mengganggu mereka dalam bermain-main di sini, bahkan ada juga yang mempergunakan kesempatan tersebut untuk berpacaran. Tak dapat dipungkiri, ketika sepasang sejoli kepergok Mang Piket sedang bermesraan di daerah "keramat" itu.

Mungkin orang mengira berita seperti itu hanya ada 10 atau 15 tahun yang lalu, apalagi dimuat di surat kabar daerah. Berikut ini beberapa berita yang dimuat di dalam suatu surat kabar Jakarta, termasuk salah satu yang besar dan terbilang masih baru.

Satu berita merupakan keterangan gambar Presiden B.J. Habibie dan istri yang duduk di kursi contoh dalam Pameran Produk Ekspor Indonesia ke-13 di arena Pekan Raya Jakarta. Ditulis begini (huruf tebal dari PTS), "[...] **Pada pameran ini menampilkan** berbagai produk di antaranya produk makanan,"

Berita kedua mengenai hilangnya kesempatan RI untuk memperoleh 51 persen saham di PT Freeport Indonesia sesuai dengan pasal-pasal Kontrak Karya II dan PP No. 17/1992. Di dalam berita itu terdapat kalimat, "[...] Di situ secara otomatis **menjelaskan** bahwa aturan di PP itu lebih ringan ketimbang KK II."

Berita ketiga menyangkut kekacauan yang hampir telah menjadi mode. Setelah kutipan ucapan sumber berita, surat kabar makin terbiasa menggunakan kata sifat sebagai kata kerja tanpa memenuhi syarat pembentukan yang disepakati, seperti **tegasnya, jelasnya, terangnya**.

Sekadar contoh, "Pancasila itu lebih merupakan perjanjian bersama untuk membentuk negara, ketimbang sebuah ideologi, **terangnya** dalam bedah buku *Mencari Makna Kebangsaan*, karya Franz Magnis Suseno, kemarin di Kampus Universitas Indonesia Depok."

Yang paling tidak masuk akal adalah kebiasaan baru untuk memperlakukan kata benda jamak sebagai tunggal, misalnya, "**suatu usaha-usaha**". Memang kebiasaan itu sering timbul di kalangan pejabat pemerintah, termasuk yang paling tinggi. Namun, tidak kurang sering hal itu terjadi pada wartawan, bahkan para peneliti bergelar S3 dari instansi penelitian milik pemerintah yang menulis buku atau artikel di koran. Coba lihat contoh di bawah ini.

"Studi mengenai peran politik militer pada umumnya dan ABRI pada khususnya, merupakan **sebuah kegiatan-kegiatan** yang menarik."

b. *Sederhana*

Sederhana merupakan syarat bahasa pers karena pembacanya umum. Kalimat-kalimat rumit dan panjang harus dihindari sama seperti istilah-istilah yang sulit. Empat belas tahun yang lalu suatu surat kabar besar Jakarta memulai satu beritanya begini,

"Desakan tokoh konsultan Indonesia Prof. Ir. Rooseno agar pemerintah Indonesia menyusun rencana induk kehutanan, didukung sepenuhnya oleh Dr. Ir. Achmad Soemitro. Ketua Jurusan Ekonomi Hutan Universitas Gajah Mada ini menegaskan Kamis kemarin, rencana induk semacam itu memang mutlak. [...]"

Bahasa berita ini cukup teratur, sesuai dengan tata bahasa, tetapi tidak sederhana karena kalimatnya panjang-panjang. Bandingkan dengan yang sudah diubah

"Prof. Ir. Rooseno mendapat dukungan dalam mendesak pemerintah agar segera menyusun rencana induk kehutanan. Dukungan diberikan oleh Ketua Jurusan Ekonomi Hutan, UGM, Dr. Ir. Achmad Soemitro, ketika dihubungi di kantornya kemarin,"

Coba baca berita ini

Peralatan hydrocracker pada kilang minyak di Dumia yang diresmikan Presiden belum lama ini, sampai sekarang, belum bisa beroperasi secara normal. Hydrocracker adalah peralatan proses yang digunakan memecah rantai atom C (carbon) pada LSWR (Low Sulphure Waxy Residue) sehingga diperoleh bahan bakar yang nilai ekonomisnya lebih tinggi.

Dewasa ini, Indonesia menyedot 1,3--1,5 juta barrel minyak bumi setiap harinya. Sekitar 500.000 barrel di antaranya diolah dalam negeri, sisanya dijual ke luar negeri. Dari 500.000 barrel yang diolah, kira-kira 300.000 barrel berasal dari Minas (Riau).

Berapa banyakkah pembaca yang mengerti hydrocracker, sekali pun sudah dijelaskan sebagai alat pemecah atom C pada LSWR? Bagi mereka apa artinya produksi minyak bumi sebanyak 1,3--1,5 juta barrel per hari?

Berita tersebut layaklah ditulis kembali kira-kira begini.

Kilang pengolah sisa minyak (hydrocracker) Dumia, yang diresmikan oleh Presiden Februari lalu, belum beroperasi secara normal. Kilang ini, yang bisa mengolah separo lebih atau 500.000 barrel sisa minyak kotor Indonesia yang mubazir selama ini, seharusnya bisa menghemat pengeluaran negara sebanyak dua trilyun setahun.

c. *Jelas*

Jika berita yang teratur, sederhana, dan yang hemat sudah susah didapat, tentu lebih susah lagi menemukan berita yang jelas, apalagi menarik, di dalam pers Indonesia. Jauh lebih gampang menemukan berita yang menggemparkan, tetapi sekaligus yang kabur, samar-samar, meragukan.

Kebetulan beberapa hari terakhir ini muncul dengan gencar berita semacam itu, berkaitan dengan ucapan seorang menteri yang menimbulkan kemarahan penganut suatu agama. Dalam suatu surat kabar Jakarta, Rabu 21 Oktober 1998, menteri itu, minta maaf kepada masyarakat atas ucapannya pada 14 Oktober. Pers menyiarkan ucapannya itu dengan jelas. Konon menteri itu berkata tentang seorang tokoh politik, "Dia kan agamanya [Anu]. Saya [Ano]. Relakah rakyat Indonesia presidennya beragama [Anu]?"

Walaupun demikian, permintaan maaf itu ditulis oleh surat kabar tadi begini, "[Menteri] Minta Maaf: Saya Tak Melecehkan Agama Lain". Menurut surat kabar ini, menteri tersebut menjelaskan, sebagai seorang terpelajar, intelektual, dan demokrat, dirinya tidak pernah berbuat melecehkan agama lain yang ada di Indonesia atau yang ada di dunia. Lalu, ucapannya dikutip begini, "Sebagai seorang demokrat, saya paham betul bahwa agama yang saya anut tidak pernah mengajarkan melecehkan agama lain. Jadi, sangat tidak mungkin seorang [nama menteri itu] harus melecehkan agama lain untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu bukan tipe [nama menteri itu]. Akan tetapi, kalau memang terucapkan oleh saya, sesungguhnya itu bukan berasal dari hati saya. Saya minta maaf untuk itu kalau itu terucapkan." Tidak lupa surat kabar tersebut menambahkan, ucapannya ini ditimpali dengan mengatakan bahwa mungkin ucapannya ditafsirkan lain.

Kalau diperhatikan bahasa menteri itu, terasa sekali logikanya macet. Ia mengaku tidak mungkin melecehkan agama lain karena dia seorang terpelajar, intelektual, dan penganut suatu agama yang tidak mengajarkan melecehkan agama lain. Sejak kapan atribut seperti itu dapat menjadi jaminan bagi seseorang untuk tidak bertindak salah, termasuk menghina agama lain? Tidakkah penghinaan, bahkan pemusnahan manusia lain, justru tidak jarang dilakukan oleh orang-orang seperti menteri itu, yaitu orang yang terpelajar, intelektual, dan penganut agama yang taat?

Perhatikan juga, susunan kalimatnya yang kacau itu, khususnya yang mengandung kata "harus". Juga dengan tambahan berita bahwa sang menteri mengira ucapannya mungkin ditafsirkan lain, berita menjadi kabur, apakah dia betul-betul minta maaf atau tidak. Bukankah menteri itu yakin seyakin-yakinnya bahwa dirinya "sangat tidak mungkin [...] harus melecehkan agama lain untuk tujuan-tujuan tertentu?" Bukankah menteri itu mengajukan syarat, "Saya minta maaf untuk itu kalau itu terucapkan"?

Apa susahnya bagi surat kabar tersebut untuk memuat kembali ucapan sang menteri yang telah dianggap menghina agama lain tadi agar pembaca dapat menilai sendiri? Juga apa sulitnya bagi wartawan surat kabar itu untuk meminta ketegasan kepada sang menteri mengenai betul tidaknya ucapannya itu?

4. Bahasa Cermin Berpikir

Sudah banyak usaha untuk menjelaskan mengapa bahasa surat kabar di suatu negara cenderung tidak jelas, kabur, meragukan, seperti contoh kita di atas. Para ahli bahasa memiliki satu penjelasan yang terkadang dibesar-besarkan, seperti yang diajukan oleh Herder (1744--1803) dan Wilhelm von Humboldt (1767--1835). Herder mengatakan, terdapat hubungan erat antara bahasa dan watak bangsa. Penjelasannya ini dilanjutkan oleh, von Humboldt bahwa setiap bahasa memiliki struktur sendiri yang mencerminkan cara berpikir dan cara berbahasa seseorang. Penjelasan lain, yang diusahakan sekelompok orang lagi, menegaskan bahwa kekuasaan cenderung memanipulasi bahasa untuk kepentingannya sendiri.

Tentu sangat menarik membicarakan berbagai penjelasan itu, tetapi dilihat dari keperluan diskusi kita ini, yaitu menyusun "Kebijaksanaan Bahasa Nasional", penjelasan itu terlalu jauh untuk dapat dijadikan "kebijaksanaan". Sekalipun berbagai pen-

jelasan tersebut di atas itu betul, baik watak bangsa, cara berpikir, maupun kekuasaan, teramat besar untuk dibenahi sebelum bahasa nasional dapat dikembangkan dengan baik. Bukan tidak mungkin hubungan tersebut terbalik. Dengan mengembangkan bahasa secara lebih memadai boleh jadi watak bangsa, cara berpikir, maupun kekuasaan, akan dapat diperbaiki.

5. Penutup

Apa pun yang menjadi sebabnya, selama 32 tahun Orde Baru, bahasa pers Indonesia nyata-nyata berfungsi bukan sebagai alat komunikasi, melainkan cuma sekadar **melansir berita tanpa peristiwa, dan kalau ada peristiwa, peristiwa itu tanpa jalan cerita**. Boleh jadi sulit dan berbahaya bagi pers selama Orde Baru untuk mengusut suatu peristiwa sampai jalan ceritanya jelas. Namun, setelah 32 tahun terbiasa, sekarang pun pers tidak serta-merta mau, dan mampu, melakukan itu. Itulah sebabnya banyak peristiwa akhir-akhir ini diberitakan tanpa kejelasan, seperti pembunuhan berkedok dukun santet di Banyuwangi, dugaan KKN di Freeport, atau penyelesaian peristiwa Mei 1998. Oleh karena itu, jika selama Orde Baru, setiap orang Indonesia mengira dapat melakukan apa saja tanpa harus khawatir akan menanggung akibatnya, termasuk bekerja sebagai wartawan, maka mulai sekarang, setiap orang harus lebih dulu belajar mahir melakukan pekerjaan masing-masing. Untuk itu, Lembaga Pers Nasional patut mendorong terbentuknya pelatihan-pelatihan jurnalistik yang tangguh, dan melaporkan kemajuan-kemajuan di bidang itu setiap tahun. Termasuk dalam wewenang lembaga ini, mendorong terbentuknya gugus tugas di setiap penerbitan pers yang khusus membina dan memantau keterampilan wartawan.

Diskusi ini tentu dapat juga membicarakan berbagai pola lembaga dan tindakan yang dapat mendorong peningkatan mutu pers sebagai media komunikasi massa.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 5 (Panel 1)
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 10.35--12.05
Topik	: Kebijakan Bahasa Nasional
Panelis	: a. Ajip Rosidi b. Ignas Kleden c. Taufik Abdullah d. Parakitri T.S.
Pemandu	: Amran Halim
Pencatat	: a. Maini Trisna Jayawati b. Maryanto
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Sri Rahayu Prihatmi, Universitas Diponegoro, Semarang

a. Pertanyaan:

- 1) Para panelis yang saya hormati, saya sangat sedih karena pengindonesiaan nama pada papan reklame menyinggung penyebutan nama diri. Mengapa hal itu sampai terjadi?
- 2) Saya kira, media elektronik harus meminta maaf kepada masyarakat karena dalam setiap wawancara yang diselenggarakan oleh media elektronik tersebut kata *kita* selalu disebutkan dan tidak pernah menggunakan *saya* untuk mengacu pada lembaga atau pribadi.

b. Jawaban:

Karena pertanyaan ditujukan kepada Panitia, hal itu tidak saya jawab dan akan dicatat oleh Panitia.

2. Penanya: Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Pak Ignas, saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa istilah dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* sulit dicerna oleh murid. Bagaimana cara membangun minat membaca murid sehingga murid dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana pula penyajian pelajaran Bahasa Indonesia yang baik?

b. Jawaban:

Salah satu contoh yang dapat dilakukan adalah bahwa guru harus memberikan waktu lebih banyak untuk pekerjaan rumah kepada murid. Misalnya, ujian diberikan dalam bentuk pilihan ganda atau menjodohkan? Saya kira, ujian bahasa seperti itu memudahkan guru dan menyulitkan murid karena murid tidak

belajar. Kalau disuruh menulis sebuah esai pendek dalam ujian, saya kira, murid itu diberi kesempatan untuk menciptakan bahasa pada tingkatnya dan guru harus bekerja lebih banyak. Saya kira, yang sekarang terjadi adalah bentuk ujian itu memudahkan guru, tetapi tidak membantu murid karena ujian itu selalu dalam bentuk pilihan ganda atau menjodohkan.

3. Penanya: Haryanto, Institut Pertanian Bogor

a. Pertanyaan:

Ketika kita menghadapi era globalisasi, apakah bahasa Indonesia akan kita pertahankan eksistensinya sebagai bahasa global seperti tahun 1928? Apakah kita perlu menyepakati bahasa persatuan yang baru? Pertanyaan ini saya tujukan kepada Pak Taufik.

b. Jawaban:

Bahasa Indonesia harus dipertahankan karena bahasa nasional kita bukan bahasa yang datang begitu saja. Bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan. Di satu pihak, dalam Sumpah Pemuda bahasa Indonesia adalah konfirmasi. Di pihak lain, bahasa Indonesia merupakan janji untuk dikembangkan. Jangan lupa bahwa bahasa Indonesia mempunyai tingkat komunikatif yang paling tinggi di Asia Tenggara. Di seluruh Asia Tenggara bahasa Indonesia sudah digunakan oleh kira-kira 250 juta penutur. Menurut berita, akhir-akhir ini bahasa Indonesia adalah bahasa paling populer yang dipelajari sebagai alat komunikasi dan sebagai bahasa asing di Australia. Jadi, saya kira, masa depan bahasa Indonesia lebih cerah daripada masa depan reformasi.

4. Penanya: Husain Yunus, STKIP Gorontalo

a. Pertanyaan:

Pak Ignas, saya sangat setuju dengan pendapat Bapak bahwa mutu pendidikan bahasa Indonesia sekarang memang merosot. Hal itu disebabkan oleh perubahan kurikulum selama empat kali untuk mencari pendekatan yang dijadikan pedoman untuk meningkatkan keterampilan berbahasa yang baik dan benar. Pendekatan apa yang paling tepat dilakukan untuk pengajaran Bahasa Indonesia dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Pertama-tama, ingin saya sampaikan bahwa saya bukan guru bahasa. Saya berbicara berdasarkan pengamatan dari luar. Yang perlu dikembangkan di sekolah menengah adalah bahasa yang digunakan dalam ilmu dan teknologi. Saya kira, bahasa sebagai ekspresi seni sudah jauh berkembang. Akan tetapi, bahasa Indonesia sebagai pembentuk konsep-konsep ilmu pengetahuan masih sangat lemah. Hal itu bisa diajarkan di kalangan murid, tidak hanya melalui tulisan, tetapi juga secara lisan. Misalnya, cara mengajarkan bahasa seperti yang dilakukan di Jerman. Setiap anak selama lima menit pada hari pertama sekolah diminta untuk

menceritakan apa yang mereka lakukan pada akhir pekan. Dengan cara itu, mereka dilatih untuk menyusun pikirannya dalam bahasa lisan yang bagus. Saya kira, hal ini tidak pernah dibuat sebagai bahan latihan dalam sekolah-sekolah kita sekarang.

5. Penanya: Masruroh Mukhtar, Universitas Muslimin Indonesia, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Pertanyaan ini saya sampaikan kepada Bapak Taufik Abdullah. Mengapa kosakata yang masuk ke dalam bahasa Indonesia banyak yang berasal dari bahasa Jawa?

b. Jawaban:

Sebenarnya hal itu dimaksud agar kosakata bahasa daerah dapat memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Pengayaan kosakata menjadi keharusan. Yang menjadi masalah sesungguhnya adalah hubungan bahasa dengan kekuasaan. Bahasa dipakai sebagai alat kekuasaan dan kekuasaan menguasai bahasa sehingga terjadi polusi makna kata dalam bahasa. Itu yang menjadi problem. Dalam situasi seperti ini dialog tidak terjadi, monolog pun menimbulkan salah pengertian. Untuk itu, tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa adalah mempengaruhi pemegang kekuasaan itu sendiri dalam berbahasa.

6. Penanya: Andi Hasanuddin, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya bertanya kepada Pak Ajip dan Pak Parakitri, apa tanggapan Bapak terhadap kekhawatiran generasi muda tentang hilangnya bahasa Indonesia di era globalisasi?

b. Jawaban:

Saya tidak khawatir bahasa Indonesia akan hilang di era globalisasi.

PENINGKATAN MUTU DAN PEMASYARAKATAN PENGUNAAN BAHASA INDONESIA UNTUK MEMPERKUKUH JATI DIRI BANGSA DALAM ERA GLOBALISASI

Muradi Juti
Departemen Dalam Negeri

1. Pendahuluan

Era globalisasi adalah era manusia hidup pada zaman dunia tanpa batas (*borderless world*). Meskipun dikatakan dunia tanpa batas, apakah lintas seluruh aspek kehidupan manusia politik, ekonomi, dan budaya akan menjadi homogen. Tidak, dan tidak akan mungkin. Apakah jika bahasa Inggris dipakai 85% dalam seluruh percakapan telepon internasional, lalu orang tidak merasa rindu kepada bahasa ibunya? (Naisbit. 1994:26). Era globalisasi tidak akan dapat menghapus kekhususan suatu bangsa, bahkan justru hal sebaliknya akan terjadi yaitu pada era globalisasi kekhususan akan semakin mengental. Dalam era globalisasi semua orang di dunia menegaskan kemerdekaannya, kedaulatannya, dan kekhususannya (Naisbit. 1994:11). Salah satu kekhususan pada bangsa adalah bahasa. Jadi, bahasa adalah jati diri bangsa. Bahasa adalah *national identity* kekhususan bangsa.

Jati diri bangsa bisa melemah bisa menguat. Bahkan, bangsa sendiri bisa hilang bisa muncul, begitu pula negara bangsa. Negara bangsa sudah menjurus menjadi sebuah khayalan nostalgia, kata Kenichi Ohmae (1995:12). Setiap bangsa akan tetap berupaya memperkuat jati diri bangsa, tidak terkecuali bangsa Indonesia. Sebagai bangsa dengan penduduk 202 juta jiwa, sebagai pengguna bahasa bangsa dalam keanekaragaman bahasa daerah yang sangat kaya, kita sulit membayangkan bahwa bahasa Indonesia akan pudar dalam kehidupan bangsa. Akan tetapi, yang menjadi masalah adalah mutunya bagaimana agar bangsa ini secara utuh mencintai bahasa bangsa melebihi bahasa asing apa pun jua.

2. Upaya-Upaya Peningkatan Mutu dan Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia

Upaya meningkatkan mutu dan pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia belum menjadi prioritas. Prioritas pembangunan nasional selama pemerintah Orde Baru adalah bidang ekonomi, pertama-tama mengisi perut bangsa. Target itu tercapai, tetapi kini bangsa bergumul kembali pada kebutuhan pokok itu, entah kapan bisa selesai. Namun, makalah ini ingin mengemukakan upaya-upaya kecil yang dilakukan bangsa dalam meningkatkan mutu dan pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia untuk memperkuat jati diri bangsa dalam era globalisasi, terutama sekali yang berkaitan dengan tugas Departemen Dalam Negeri. Era globalisasi telah membawa dampak penggunaan bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, secara besar-besaran dalam penamaan kegiatan usaha seperti hotel, perusahaan *real estate*, toko-toko, badan sosial, papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame/iklan.

Di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Medan, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Ujung Pandang penggunaan itu sangat mencolok sehingga dikhawatirkan dapat memperlemah jati diri bangsa. Hal yang sama tidak terjadi di Malaysia, Thailand, Korea, dan Jepang meskipun sama-sama hidup dalam era globalisasi. Di sini tampak kelemahan kita dalam mempertahankan jati diri bangsa. Negara-negara yang disebut di atas selalu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa bangsa dan bahasa Inggris, tidak seperti di hotel-hotel bertaraf internasional di Indonesia yang cuma memakai bahasa Inggris.

Kondisi seperti itu memprihatinkan, maka melalui Surat Menteri Dalam Negeri No. 434/1021/SJ tanggal 16 Maret 1995, diinstruksikan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I, Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II seluruh Indonesia untuk menertibkan penggunaan bahasa asing pada nama lingkungan perumahan dan pemukiman, kompleks atau rumah susun, badan usaha, badan sosial, papan nama, papan petunjuk, kain rentang, dan reklame/iklan, sekaligus supaya menempatkan bahasa asing sebagai padanan. Instruksi ini merupakan gebrakan pertama dan diterbitkan dalam rangka menyambut momentum 50 tahun kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai gerakan memperkuat kepribadian bangsa.

Setelah berjalan satu tahun, ternyata respons terhadap instruksi itu belum seperti yang diharapkan maka disusul dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 434/1201/SJ tanggal 18 April 1996 dengan petunjuk supaya dilakukan operasi penertiban jangka pendek pada jalan-jalan protokol dan tempat-tempat kunjungan umum yang dilaksanakan dari tanggal 20 Mei 1996 sampai dengan 16 Agustus 1996, sehingga diharapkan pada tanggal 17 Agustus 1996 di tempat-tempat tersebut *pengutamaan* pemakaian bahasa Indonesia telah terwujud.

Daerah-daerah supaya membentuk Tim Koordinasi penertiban dengan mengikut sertakan instansi-instansi terkait. Daerah juga diminta untuk menertibkan Peraturan Daerah tentang Penertiban Penggunaan Bahasa Asing. Hasil operasi hanya dapat dinilai sebagai cukup memadai, sedang upaya menertibkan Perda boleh dikatakan kurang berhasil.

Gerakan selanjutnya ditujukan pada penertiban hotel, restoran, serta pusat-pusat perbelanjaan (plaza, mal, dan lain-lain). Melalui Surat Menteri Dalam Negeri No. 434/1864/SJ tanggal 20 Juni 1997 diinstruksikan kembali kepada Gubernur/Kdh Tingkat I, Bupati/Walikota/Kdh. Tingkat II seluruh Indonesia supaya menertibkan penggunaan bahasa asing khususnya di hotel-hotel, restoran, dan pusat-pusat perbelanjaan. Dari sasaran-sasaran yang dimaksud, perubahan yang cukup memadai baru dapat dilihat di beberapa hotel-hotel besar, sedangkan restoran dan tempat-tempat perbelanjaan seperti belum tersentuh.

Dari kegiatan operasi yang sudah dilakukan dapat dikemukakan hasil yang dicapai sebagai berikut.

- a) Penertiban pada jalan-jalan protokol di ibu kota propinsi telah dilaksanakan dan dinilai baru mencapai sekitar 60% dari sasaran.
- b) Hasil terbaik di Daerah Tingkat II Kotamadya Binjai (Sumatera Utara), Kotamadya Salatiga (Jawa Tengah), Kotamadya Balikpapan (Kalimantan Timur), dan

- Kotamadya Administratif Prabumulih (Sumatera Selatan).
- c) Perubahan-perubahan nama pada bank, hotel, dan restoran diperkirakan baru mencapai 70%. Dapat dikemukakan contoh, misalnya *Lippo Bank* menjadi *Bank Lippo*, *Sahid Jaya Hotel* menjadi *Hotel Sahid Jaya*, *Citra Land* menjadi *Hotel Ciputra*, dan *Summer Palace Restaurant* menjadi *Restoran Istana*.
 - d) Penggunaan petunjuk dalam hotel dinilai lebih kurang 90% masih menggunakan bahasa Inggris tanpa menampilkan bahasa Indonesia. Hotel-hotel yang telah secara baik menempatkan bahasa Indonesia dalam kedudukan terhormat dan menempatkan bahasa Inggris sebagai padanan, antara lain, *Hotel Polonia* (Medan), *Hotel Sahid Jaya*, *Hotel Indonesia*, dan *Hotel Sari Pasific* (Jakarta), *Hotel Ciputra* (Semarang), *Hotel Sahid* (Surabaya), *Hotel Garuda* (Yogyakarta), *Hotel Putri Bali* (Nusa Dua, Bali), dan *Hotel Tepian* (Samarinda).

Seluruh kegiatan Depdagri yang berkaitan dengan penertiban bahasa asing ini dilakukan bersama dengan instansi terkait, khususnya Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Pariwisata. Kerja sama ini sudah sejak lama berjalan dengan baik, tetapi kemudian terputus karena adanya krisis ekonomi.

Faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi pelaksanaan tugas-tugas ini, antara lain, adalah sebagai berikut:

- a) terbatasnya dana, baik di pusat maupun di daerah, sehingga program yang ada masih sangat selektif dan tidak berkelanjutan;
- b) masih ada perbedaan persepsi, baik antarinstansi maupun dalam kelompok-kelompok masyarakat sehingga gerakan penertiban itu belum mendapat dukungan secara menyeluruh;
- c) tidak ada pengawasan secara berkesinambungan sehingga penyimpangan-penyimpangan baru muncul lagi dengan bebas.

Faktor penunjang, antara lain:

- a) sudah ada perangkat lunak;
- b) sudah ada hasil yang dicapai;
- c) sebagian masyarakat mulai menyadari pentingnya hal tersebut;
- d) di daerah tertentu, seperti DKI Jakarta, fasilitas dana, sarana, dan faktor penunjang lainnya sangat memadai.

Sekarang kondisi sudah berubah. Era reformasi sudah lahir. Reformasi lebih bernuansa kebebasan, diperkirakan akan terjadi kebebasan ekspresi, dalam segala hal termasuk penggunaan bahasa asing. Jika itu muncul, tantangan atas upaya memperkuat jati diri bangsa lewat kecintaan pada bahasa bangsa bisa semakin kuat.

3. Strategi Baru

Gerakan penertiban penggunaan bahasa asing tidak boleh mengendor, bahkan harus terus-menerus ditingkatkan sampai terwujud jati diri bangsa secara utuh dan disiplin nasional yang kukuh. Harus dicari upaya-upaya yang sedikit mungkin menggunakan

dana karena situasi krisis moneter dewasa ini. Dalam hal ini jalur sekolah sangat efektif. Bagaimana membangun kecintaan para pelajar pada bahasa bangsa, menempatkan bahasa bangsa secara terhormat, dan memakai bahasa asing sebagai padanan. Harus ada gerakan di sekolah. Jika perlu gerakan ke luar sekolah, dan pelajar ikut menjadi bagian dari kontrol sosial dalam bidang bahasa.

Harus sebanyak mungkin media massa dimanfaatkan, khususnya televisi/radio dalam menggalakkan upaya penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

4. Penutup

Era globalisasi dalam hal apa pun harus menguntungkan suatu bangsa. Sangat rugi jika dalam era globalisasi terjadi erosi jati diri bangsa. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat harus menyadari pentingnya memperkuat jati diri bangsa dalam era globalisasi. Mari kita semua berbuat sesuatu.

Daftar Pustaka

- Naisbit, John. 1994. *Global Paradoc*. New York: Willian Worrow and Company. Inc.
- Ohmae, Kenichi. 1995. *The End the Nation State*. The Frees.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B1
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 13.30--14.20
Judul Makalah	: Peningkatan Mutu dan Pemasyarakatan Penggunaan Bahasa Indonesia untuk Memperkukuh Jati Diri Bangsa dalam Era Globalisasi
Penyaji	: Muradi Juti
Pemandu	: M. Diah
Pencatat	: a. Wati Kurniawati b. Adi Triono
Peserta	: 60 Orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Mahmudah, Universitas Muhammadiyah Makassar

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah tidak ada sanksi yang diberikan kepada para pelanggar yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar?
- 2) Langkah-langkah apa yang dilakukan, selain unjuk rasa?

b. Jawaban:

- 1) Di DKI Jaya sanksi keras yang diterapkan pada perusahaan yang tidak mau mengganti namanya ialah perpanjangan izin usahanya tidak akan diberikan. Dengan demikian, penertiban di jalan protokol dapat segera diselesaikan.
- 2) Tim penertiban di Ujung Pandang harus mengingatkan terus-menerus sasaran yang belum melakukan penertiban.

2. Penanya: Arifin Usman, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan/Saran:

Sikap berbahasa kita perlu diperbaiki karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sikap berbahasa masyarakat kita masih rendah. Hal ini terbukti dengan adanya penyelenggaraan penyuluhan bahasa Indonesia yang sedikit pesertanya. Oleh karena itu, pemerintah harus bersikap keras untuk mengatasi hal itu.

b. Jawaban/Tanggapan:

Kecintaan kita kepada bahasa Indonesia masih lebih rendah daripada kecintaan masyarakat Malaysia, Thailand, dan Jepang kepada bahasanya. Oleh karena itu, kita memerlukan pembinaan terus-menerus untuk mencapai hasil yang optimal. Pada prinsipnya pemakalah setuju dengan sikap tegas Pemerintah.

3. Penanya: M.M. Yamilah, IKIP Jakarta

a. Pertanyaan/Saran

- 1) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak hanya melakukan penelitian bahasa daerah.
- 2) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa hendaknya mengikutsertakan mahasiswa untuk memantau penertiban penggunaan bahasa asing.
- 3) Pemerintah perlu memberikan selebaran yang berisi istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang perlu diketahui turis di bandara.
- 4) Hotel dan restoran yang masih menggunakan bahasa asing diberi peringatan bertahap dan jika perlu dicabut izinnnya.

b. Tanggapan:

Sanksi terhadap hotel telah dilakukan oleh Departemen Pariwisata dengan cara tidak menaikkan jumlah bintang. Akan tetapi, pelaksanaannya belum tampak secara tegas.

4. Penanya: H.M.E. Suhendar, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Bagaimana caranya meningkatkan sikap positif penutur bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Dalam era globalisasi penutur perlu menguasai bahasa Inggris, seperti yang terjadi di Malaysia. Semua jajaran harus bergerak jangan sampai setengah-setengah. Pernyataan politik diperlukan untuk membangun kemauan politik berbahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Penanya: Syukri Hamzah, Universitas Bengkulu

a. Pertanyaan/Saran:

- 1) Masyarakat Bengkulu masih banyak yang tidak mau peduli terhadap bahasa Indonesia.
- 2) Tim penertiban kurang kompak karena tidak semua departemen mendukung gagasan itu dan belum ada format dari pusat yang baku.
- 3) Kepedulian Pemda terhadap bahasa Indonesia masih terbatas pada instruksi, belum ada kecintaan pada tanah air, termasuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- 4) Sanksi itu harus bersifat edukatif, bukan sifat keras.
- 5) Pendidik seyogyanya di samping mengajarkan cinta berbahasa, juga mengajarkan cinta tanah air.

b. Jawaban:

Saya setuju dengan penerapan sanksi keras yang edukatif. Khususnya di Bali, perlu diberikan sanksi yang keras. Adanya penggunaan bahasa Inggris di hotel yang berfungsi sebagai penunjuk menimbulkan kesan sebagai berikut:

- 1) bagi turis asing, seakan-akan tidak ada bahasa kebangsaan, dan bagi turis domestik sering menjadi masalah;
- 2) seolah-olah tidak menjunjung tinggi bahasa, bangsa, dan negara;
- 3) sikap mental rendah diri;
- 4) tidak cinta tanah air;
- 5) tidak memasyarakat budaya bangsa di era globalisasi;
- 6) tidak patuh pada pemerintah;
- 7) turis asing tidak antusias terhadap budaya setempat.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG BAHASA

Yusril Ihza Mahendra

Universitas Indonesia/Sekretariat Negara

Apakah kita perlu membuat peraturan perundang-undangan tentang bahasa ataukah tidak? Itulah yang akan menjadi topik dalam pembahasan kita pada sesi ini. Sejak kita merdeka sampai sekarang, sepengetahuan saya, memang belum ada peraturan perundang-undangan tentang bahasa. Kalau kita katakan peraturan perundang-undangan, yang dimaksud adalah suatu aturan normatif yang diciptakan oleh negara sebagai sebuah lembaga, baik dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, maupun berbagai jenis perundang-undangan yang berlaku di negara kita ini.

Sepengetahuan saya, satu-satunya ketentuan mengenai bahasa, hanya terdapat dalam undang-undang dasar kita yang mengatakan "bahasa negara ialah bahasa Indonesia". Jika dilihat dari sudut teori hukum, ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar bukanlah peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah dari undang-undang ke bawah. Yang lebih tinggi dari undang-undang, katakanlah ketetapan MPR atau ketentuan-ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar, tidak tergolong dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan-ketentuan itu biasa disebut ketentuan-ketentuan dasar atau *ground rule* atau *grund geschah*, sedangkan yang lebih rendah bersifat normatif dan dapat mencantumkan sanksi. Tentu peraturan perundang-undangan atau hukum itu tidak selalu mencantumkan sanksi. Sanksi hanya dapat diberikan pada tingkat undang-undang ke bawah.

Pada tingkat ketentuan dasar yang diatur adalah ketentuan-ketentuan pokok yang biasanya menyangkut ketentuan-ketentuan di bidang hukum ketatanegaraan. Pada tingkat itu sanksi dapat diberikan. Kalaupun diberi sanksi, sanksinya adalah di bidang ketatanegaraan, sanksi yang bersifat politik, bukan sanksi yang bersifat pidana atau sanksi yang bersifat perdata, ganti rugi, dan lain-lain.

Perlu atau tidak perlunya bahasa itu diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sebenarnya lebih banyak menyangkut kepentingan, saran, atau pendapat yang diberikan oleh pakar di bidang bahasa sendiri. Kadang-kadang fungsi dari seorang perumus undang-undang tidak lebih daripada menuangkan gagasan, harapan, dan keinginan dari sekelompok orang atau sekelompok pakar yang--setelah berdiskusi membahas masalah ini--mengatakan ini perlu dibuat peraturan perundang-undangannya. Dengan itulah kemudian seorang perancang undang-undang, perancang peraturan perundang-undangan, dapat menuangkan apa yang diinginkan oleh kelompok tersebut yang kemudian merumuskannya dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, hal itu tidak bergantung pada ahli hukum, tetapi lebih banyak bergantung pada inisiatif mereka yang mendalami bidang-bidang tersebut. Katakanlah peraturan perundang-undangan di bidang kedokteran, mungkin ahli hukum tidak mengerti apakah memang ada aspek-aspek tertentu di bidang kedokteran yang perlu dituangkan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak. Inisiatif itu harus datang dari kalangan para dokter atau pakar di bidang medis, dan mereka yang bekerja di bidang ini. Jadi, kerja sama

antara para dokter dan para ahli hukum, yang kemudian juga mengembangkan hukum kedokteran, misalnya, memungkinkan dirumuskannya berbagai peraturan perundang-undangan di bidang hukum kedokteran. Demikian juga di bidang bahasa. Saya merasa tidak begitu ahli dalam bidang bahasa sehingga saya tidak dapat mengetahui lebih mendalam tentang apakah memang ada aspek-aspek tertentu dalam bidang bahasa ini yang perlu dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Kalau kita melihat ke negara-negara lain, memang ada suatu negara yang menuangkan peraturan tentang bahasa itu ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan karena mereka rasakan hal itu perlu; karena bahasa nasionalnya, bahasa negaranya menghadapi masalah. Saya dapat memberikan contoh kasus yang terjadi di Pakistan. Ketika Pakistan akan membentuk/menjadi negara sendiri, yaitu ketika India dibagi dua menjadi India dan Pakistan pada tahun 1947, salah satu masalah besar yang dihadapi Pakistan adalah masalah bahasa. Di Pakistan Barat terdapat lima suku bangsa dengan bahasa utama, yaitu bahasa Hindi, bahasa Punjabi, bahasa Baluhi, dan dua lagi saya tidak ingat. Di timur ada satu bahasa yang dominan, yaitu bahasa Benggali, yang digunakan oleh suku Benggali yang ada di Banglades. Perdebatan bahasa itu menjadi sangat sengit di majelis konstituante Pakistan, yaitu mengenai bahasa apa yang harus dijadikan sebagai bahasa resmi Pakistan. Orang Pakistan Timur mengatakan bahasa yang mayoritas adalah bahasa Benggali karena di timur penduduknya lebih banyak bila dibandingkan dengan Pakistan barat. Di Pakistan barat ada lima bahasa utama dan di timur ada satu bahasa. Lalu banyak usulan supaya bahasa Urdu dijadikan sebagai bahasa nasional, bahasa negara Pakistan. Usulan itu diterima. Namun, ada satu hal yang kelihatannya lucu, yaitu Bapak pendiri negeri itu, Muhammad Ali Jinnah, tidak mengerti bahasa Urdu. Muhammad Ali Jinnah dalam berpidato selalu menggunakan bahasa Inggris yang tidak dimengerti oleh rakyat Pakistan sendiri. Masalah kebahasaan ini berlarut-larut hingga sekitar tahun 1970-an ketika bahasa Urdu pada masa pemerintahan Zulfikar Ali Bhuto mulai disosialisasikan sebagai bahasa negara, bahasa resmi pemerintah, dan bahasa dunia akademik. Pada waktu itu memang ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang bahasa negara Republik Islam Pakistan, yaitu bahasa Urdu. Akan tetapi, pada tingkat daerah tetap saja mereka menuliskan pengumuman-pengumuman resmi dalam bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Benggali di timur dan bahasa Punjabi atau Hindi. Pakistan Timur kemudian menjadi negara Banglades.

Berdasarkan contoh tersebut, ada atau tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah kebahasaan sangat bergantung kepada perlu atau tidaknya masalah itu dituangkan ke dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Kalau itu menjadi masalah, perlu dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat imperatif. Artinya, ketentuan undang-undang itu bersifat memaksa dan ada ancaman-ancaman sanksinya. Seperti apa sanksinya? Hal itu perlu didiskusikan antara ahli hukum dan pakar bahasa. Apakah sanksinya administratif, pidana, atau perdata, itu sangat bergantung kepada kebutuhan kita sebab sanksi itu tidak selalu bersifat pidana. Orang awam memahaminya, jika itu hukum, nanti harus dihukum, seperti dipenjara, dikurung, dan membayar denda. Dapat juga dilakukan sanksi administratif,

misalnya diturunkan jabatannya.

Problem yang dihadapi oleh Pakistan tampaknya tidak dihadapi oleh Indonesia. Problem yang dihadapi oleh Malaysia juga tidak dihadapi oleh Indonesia. Kita menyadari bahwa Undang-Undang Dasar Malaysia menyatakan bahwa bahasa negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Singapura juga Undang-Undang Dasar-nya mengatakan demikian. Akan tetapi, dalam praktiknya rakyat Singapura lebih banyak menggunakan bahasa Inggris daripada menggunakan bahasa Melayu. Konstitusi Singapura mencantumkan bahasa Melayu sebagai bahasa negara dan lagu kebangsaan Singapura pun dinyanyikan dalam bahasa Melayu. Akan tetapi, saya menjumpai beberapa pejabat tinggi Pemerintah Singapura yang tidak pandai berbahasa Melayu. Sampai hari ini Pemerintah Singapura atau Parlemen Singapura belum merasa perlu untuk membuat undang-undang tentang bahasa, misalnya pejabat Singapura—kalau berpidato tidak menggunakan bahasa negara—dapat diberi sanksi. Jadi, semuanya berkembang menurut konvensi. Walaupun secara resmi dikatakan bahwa bahasa resmi Singapura adalah bahasa Melayu, dalam praktiknya rakyatnya lebih banyak menggunakan bahasa Inggris. Pengumuman-pengumuman yang dikeluarkan oleh Pemerintah Singapura dapat ditulis dalam tiga atau empat bahasa, yaitu Inggris, Melayu, Cina, dan Tamil.

Di Malaysia pun kita melihat hal yang sama dengan di Singapura. Di negeri jiran ini bahasa resmi negara adalah bahasa Melayu. Akan tetapi, mungkin karena pengaruh penjajahan sangat terasa pada kalangan intelektual Melayu dan juga karena ada tiga etnis utama di Semenanjung Melayu, yaitu Melayu, Cina, dan India, bahasa Inggris lebih banyak digunakan. Sampai sekarang pun beberapa fakultas di universitas-universitas Malaysia ada yang belum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam berkomunikasi di kampus, terutama dalam pembahasan wacana akademik, seperti di fakultas kedokteran dan fakultas manajemen. Kedua fakultas itu masih menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Meskipun demikian, Pemerintah Malaysia terus mengkampanyekan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa negara atau sebagai bahasa kebangsaan. Di mana-mana di wilayah Malaysia sering kita jumpai papan nama atau spanduk bertuliskan "Pergunakanlah Bahasa Melayu". Akan tetapi, sampai sekarang, sepengetahuan saya, belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan bahasa di Malaysia tersebut yang mencantumkan sanksi apabila dalam kasus-kasus tertentu—misalnya dalam rapat-rapat di Parlemen Malaysia atau pidato seorang pejabat Malaysia—tidak menggunakan bahasa Melayu. Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan tentang hal itu.

Kalau saya mendengar seorang menteri Singapura Samy Wie Lou, Ketua *Malaysian Indian Congres*, yang menjadi anggota Kabinet Malaysia, atau Ling Kai Yek, yang baru-baru ini banyak disebut-sebut namanya di sini, Ketua *Malaysian Chinese Assosiation* (MCA), dalam memberikan keterangan pers atau menjawab pertanyaan wartawan, kadang-kadang dia menjawab dengan bahasa Inggris, tidak dengan bahasa Melayu. Meskipun demikian, tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengancam dengan sanksi jika ada pejabat pemerintah Malaysia dalam acara-acara resmi atau dalam memberikan keterangan pers tidak menggunakan bahasa Melayu.

Negara kita sejak tahun 1928 telah mengakui adanya bahasa persatuan bahasa Indonesia, dan itu adalah ikrar Sumpah Pemuda. Kalau dilihat dari segi hukum, ikrar tersebut tidak bisa dicabut walaupun nanti ada Sumpah Pemuda pada tahun 2008. Bisakah dia mencabut ikrar Sumpah Pemuda tahun 1928? Ini diperdebatkan secara akademis dari segi hukum ataupun segi sejarah. Akan tetapi, saya berpendapat bahwa ikrar itu sangat kuat kedudukannya, tidak dalam suatu bentuk ketentuan hukum, tetapi sebagai suatu ikrar, Sumpah Pemuda diakui mengikat dan disepakati oleh seluruh bangsa sampai sekarang ini. Baru pada saat kita merdeka pada tahun 1945, Undang-Undang Dasar mencantumkan bahasa Indonesia adalah bahasa negara.

Sejak awal kita merdeka, bahkan sebelum kita merdeka, dalam sidang-sidang BPUPKI, ketika membahas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, telah digunakan bahasa Indonesia. Sejak itu, bahasa Indonesia betul-betul menjadi bahasa untuk menjalankan roda pemerintahan. Bahasa Indonesia juga digunakan dalam setiap kegiatan resmi sehingga saya tidak melihat ada masalah seperti halnya di Pakistan atau di Malaysia.

Saya pribadi berpendapat, apakah perlu ada undang-undang kebahasaan yang mencantumkan sanksi. Saya cenderung mengatakan tidak perlu. Sanksi tidak selalu bersifat sanksi hukum. Sanksi dapat juga bersifat sanksi moral, misalnya ada kontrol yang jelas dari masyarakat. Kalau seorang pejabat pemerintahan atau seorang dosen tiba-tiba masuk ke ruang kuliah memberikan kuliah tidak dalam bahasa Indonesia dengan baik dan benar, ia tidak perlu diberi sanksi, cukup dikritik saja, dan mudah-mudahan secara moral kemudian tumbuh kesadaran untuk memperbaiki bahasa itu.

Kalau presiden kita yang lama ataupun presiden yang sebelumnya--jika kita dengarkan pidatonya--salah dari segi tata bahasa, apalagi mungkin mantan Presiden Soeharto, ketika masih menjadi presiden, kalau berbahasa lisan sangat sulit dimengerti apa yang diucapkannya--karena banyak berpikir tidak dengan menggunakan bahasa Indonesia, tetapi berpikir dengan struktur bahasa Jawa--hal itu sangat sulit diberi sanksi. Saya beri contoh yang lain, misalnya "Alumi obatnya sakit mag". Jadi, "kalau seseorang sedang alumi, ia diobati dengan sakit mag". Contoh lagi, "Sumiati istrinya Tajudin". Siapa yang istri siapa? Mungkin dalam struktur bahasa Jawa hal itu benar, tetapi berpikir dalam struktur Jawa dan diungkapkan dalam bahasa Indonesia dapat menimbulkan kesalahan tata bahasa. Begitu juga bila mengucapkan kata-kata bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Kata-katanya Jepang, tetapi tata bahasanya bahasa Indonesia, struktur berpikirnya bahasa Indonesia, sehingga akan menimbulkan kekacauan. Akan tetapi, apakah perlu hal seperti itu diberi sanksi? Sanksinya sangat sulit. Walaupun ada sanksi, penerapannya akan sulit sehingga yang harus dilakukan adalah kontrol atau imbauan terhadap pengguna bahasa agar bahasa yang digunakan, baik secara lisan maupun tulis, memenuhi kaidah-kaidah tata bahasa yang berlaku sehingga bahasa itu menjadi komunikatif--dapat dipahami oleh masyarakat--dan tidak menimbulkan kerancuan.

Pada akhirnya, saya ingin mengutip apa yang dikemukakan oleh Raja Ali Haji bin Haji Ahmad dalam *Kitab Pelajaran Bahasa*, yaitu bahwa "Bahasa itu menunjukkan bangsa" sehingga bahasa yang kacau menunjukkan bangsa yang kacau pula.

LAPORAN SIDANG

Jenis Sidang	: Pleno 10
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 8.00--09.00
Judul Makalah	: Peraturan Perundang-undangan tentang Bahasa
Penyaji	: Yusril Ihza Mahendra
Pemandu	: Koesnadi Hardjasoemantri
Pencatat	: a. Ebah Suhaebah b. Puji Santosa
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Mujianto, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Pernyataan Bapak tentang tidak perlunya peraturan perundang-undangan penggunaan bahasa mengundang saya untuk mengajukan sejumlah pertanyaan. Saya melihat bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia ini belum mampu membentuk sikap budaya sadar hukum sehingga orang masih bebas melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Sementara itu, bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan itu hanya digunakan sebagai senjata di dalam pelaksanaan peradilan.

Jika Bapak menganggap bahwa bahasa sebagai masalah yang sepele sehingga tidak memerlukan peraturan perundang-undangan, juga sanksi dan ancaman, saya melihat justru perlu karena sanksi itu tidak harus terbatas pada sanksi hukum, tetapi setidaknya-tidaknya dapat berupa sanksi lain, misalnya sanksi akademis, sanksi administratif, sanksi moral, dan sanksi sosial.

Jika seorang pejabat mengatakan, "Pembangunan daripada seluruh keinginan rakyat" ini tidak malu, lalu bagaimana dengan rakyatnya? Oleh karena itu, rasanya perlu sekali dituangkannya peraturan perundang-undangan tentang kebahasaan untuk menertibkan para pengguna bahasa agar menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dengan undang-undang itu diharapkan dapat dibentuk budaya berbahasa yang sadar akan kaidah bahasa. Bagaimana tanggapan Bapak?

b. Jawaban:

Peraturan perundang-undangan di Indonesia selalu dihadapkan pada persoalan kesadaran hukum masyarakat, persoalan peraturannya itu sendiri, dan persoalan penegakan hukum, termasuk aparat penegak hukum di negara kita. Tentu saja suatu norma hukum harus disosialisasikan terlebih dahulu, dikenal oleh masyarakat, dan kemudian dipatuhi oleh masyarakat sehingga nantinya pelanggaran peraturan tersebut dapat ditindak. Akan tetapi, yang lebih baik adalah jika norma-norma hukum itu diangkat dari kesadaran hukum yang tumbuh di masyarakat itu sendiri, kecuali di dalam bidang peraturan administrasi yang

memang merupakan salah satu kebijakan dari atas dan bukan dari bawah.

Peraturan yang sebaik-baiknya tentu harus kita tangkap dari kesadaran yang tumbuh di dalam masyarakat. Hal itu kadang-kadang perlu dituangkan dalam peraturan yang berbentuk hukum. Namun, hal itu juga kadang-kadang tidak perlu. Sanksi moral tidak dapat diumumkan dalam suatu hukum. Suatu hal yang aneh juga terdapat pada Departemen Dalam Negeri yang akan menyusun undang-undang etika politik. Apa maksudnya hal itu? Kalau yang dimaksudkan norma etika, yang didasarkan pada norma-norma itu sendiri, secara universalnya mungkin dapat dirumuskan dalam suatu peraturan tertentu.

Norma moral adalah norma yang berlaku secara universal yang tentu tidak dapat dilakukan kapan ditetapkan dan kapan dicabut. Kalau dicabut, norma ini akan merusak sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat. "Dilarang mencuri", misalnya, ada dalam *Ten Commandemen* (sepuluh perintah Tuhan) pada Nabi Musa, dalam dasasila agama Budha, dalam Al-Quran, dan dalam kitab-kitab agama yang lain. Hal itu kita terima sebagai norma moral yang berlaku secara universal. Kalau norma itu diangkat menjadi norma hukum perlu adanya sanksi hukum sehingga norma moral berubah menjadi norma hukum.

Kalau dalam masyarakat kita, hal itu hanya diberi sanksi moral, misalnya seorang pejabat yang salah dalam menggunakan bahasa Indonesia, terus dibuatkan sebuah karikatur di surat kabar atau majalah dan dikritik. Inilah wujud dari sanksi masal. Kalau sanksi administratif, misalnya, pejabat itu diturunkan pangkatnya atau dimutasikan ke tempat lain. Dapat juga dilakukan sanksi denda, misalnya, dia salah berbahasa, kemudian disuruh membayar Rp50.000,00; itu namanya sanksi denda. Sebaliknya, jika pejabat itu dipenjara, itu namanya sanksi pidana. Jadi, sebaiknya memang ahli bahasalah yang menentukan sanksi-sanksi itu. Inginnya seperti apa? Nanti ahli hukum yang akan menentukan dalam bahasa perundang-undangan.

2. Penanya: Tini Martini, Kantor Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara (Wasbangpan), Jakarta

a. Pertanyaan:

Sampai diadakannya Kongres Bahasa Indonesia ini belum ada peraturan perundang-undangan tentang bahasa Indonesia. Apakah ada kriteria tertentu dari para pakar hukum untuk membentuk peraturan perundangan-undangan tentang bahasa. Padahal, menurut saya, sudah ada peraturan-peraturan dari menteri, misalnya Keputusan Menteri Penerangan Nomor 71, tentang Pedoman Tata Persuratan Dinas, yang mengatur tentang penggunaan bahasa surat dinas. Bagaimana komentar Bapak?

b. Jawaban:

Sudah ada peraturan perundang-undangan yang berupa keputusan-keputusan menteri atau perda-perda tentang pengaturan bahasa. Namun, saya kira, tidak secara spesifik mengatur tentang pemakaian bahasa. Perda Pemerintah DKI

tentang papan iklan, reklame, atau nama yang digunakan oleh notaris untuk membuat perseroan terbatas, dan lain-lain, dianjurkan supaya menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar. Sebenarnya peraturan perundang-undangan itu bukan tentang bahasa, melainkan tentang aspek-aspek tertentu di luar bidang bahasa. Perda tentang penertiban iklan yang menggunakan bahasa asing, misalnya, di mana-mana masih ada tulisan *laundry* dan macam-macam sehingga mengganggu. Iklan yang berbahasa asing itu tidak efektif sehingga Pemerintah Daerah DKI perlu mengeluarkan perda tentang hal itu. Demikian juga untuk *real estate* yang menggunakan nama asing itu perlu ditertibkan, seperti *regency*, dan *country city*. Ada imbauan untuk mengubah nama-nama itu dengan bahasa Indonesia karena nama itu berada di Indonesia, bukan di luar negeri. Kalau demikian, saya setuju. Artinya, pada aspek-aspek tertentu ada ketentuan yang menyangkut bahasa.

Pada tahun-tahun yang akan datang ini, kebijakan pemerintah memberikan kesempatan kepada universitas di negara lain untuk membuka cabangnya di Indonesia. Tentu di sini akan terjadi peraturan, apakah boleh menggunakan bahasa asing atau harus berbahasa Indonesia, kecuali pada sekolah khusus, misalnya sekolah Jepang boleh menggunakan bahasa Jepang dan yang boleh sekolah di situ hanya warga negara Jepang. Itu bukan peraturan perundang-undangan tentang kebahasaan, melainkan peraturan perundang-undangan tentang dunia pendidikan yang diselenggarakan pihak asing di Indonesia dan di dalamnya ada ketentuan tentang bahasa.

Iklan, misalnya, boleh menggunakan yang bukan istilah Indonesia, mungkin itu diperlukan peraturan perundang-undangannya. Kalau, misalnya, ada papan nama atau papan iklan, iklan mobil atau iklan kosmetik, yang menggunakan bahasa Inggris itu bisa didenda. Akan tetapi, jika presiden menggunakan bahasa Indonesia yang salah tata bahasanya, apakah dia bisa dikurung? Agak susah itu. Jadi, dalam aspek ini kalau ada, misalnya Universitas Pelita Harapan bekerja sama dengan Universitas Sidney menggunakan bahasa Inggris, apakah itu harus diberi sanksi. Bagaimana kebijakan kita mengenai hal ini? Ini perlu dirumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan supaya tegas sikap kita mengenai masalah ini.

3. Penanya: Suparno, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Sudah ada empat Pemda Tingkat I yang mengeluarkan peraturan daerah (Perda) dalam rangka mengatur penggunaan bahasa asing pada papan nama dan di tempat-tempat umum. Perda itu sangat membantu dalam pelaksanaan penertiban penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum. Akan tetapi, yang berkembang kemudian adalah perbedaan isi perda. Di samping itu, juga terdapat perbedaan-perbedaan kesepakatan pandangan pemerintah daerah tentang perlu atau tidaknya perda tersebut. Akibatnya, pemerintah daerah tertentu ada yang usulan perdanya lancar dan ada pula yang tersendat-sendat. Akhirnya, sekarang ini,

ya, hanya empat daerah tingkat I yang telah berhasil menerbitkan peraturan daerah tentang penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum. Sekarang yang menjadi pertanyaan saya adalah

- 1) bagaimana kedudukan perda tentang penggunaan bahasa asing di tempat-tempat umum itu dilihat dari segi hukum?
- 2) apakah mungkin perda ini ditingkatkan kedudukannya menjadi peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang?

b. Jawaban:

Memang ada perda-perda yang bukan perda tentang kebahasaan, melainkan perda mengenai petunjuk pemakaian bahasa di tempat-tempat umum. Belum lama ini juga Departemen Pariwisata membenarkan penggunaan bahasa dan aksara Cina pada menu di restoran atau di hotel-hotel. Akan tetapi, dulu ada peraturan yang melarang penggunaan huruf Cina, tulisan, dan bacaan Cina pada toko-toko (di Glodok sekitar tahun 1960-an). Ini pun mesti jelas peraturannya. Sekarang, tulisan Cina tidak dilarang, restoran-restoran menggunakan tulisan Jepang, restoran Korea menggunakan tulisan Korea, (di Kebayoran Baru banyak restoran Korea yang menggunakan tulisan Korea). Apakah harus dilarang semua? Apakah nanti masjid dilarang menggunakan tulisan Arab, seperti yang sudah diberlakukan terhadap kelenteng yang tidak boleh lagi menggunakan tulisan Cina di depannya. Ini menimbulkan masalah juga. Saya kira, ini lebih banyak menyangkut kebijakan dan pada tingkat tertentu perlu dibuat peraturan-peraturannya. Akan tetapi, jangan diatur sampai detil dalam bentuk peraturan tertulis yang akhirnya menyulitkan karena konvensi-konvensi yang berlaku juga dianggap sebagai peraturan atau norma-norma hukum yang tidak tertulis. Katakanlah, misalnya, kecenderungan menggunakan bahasa Sanskerta di kalangan ABRI. Kita melihat semuanya dalam ABRI itu menggunakan bahasa Sanskerta. Kalau kita masuk ke Gedung DPR, nama ruang semua ditulis dengan bahasa Sanskerta, misalnya *Loka Saba* dan *Griya Smiti* yang tidak diketahui artinya oleh umum.

Saya pernah mengusulkan kepada pimpinan DPR alangkah baiknya jika gedung baru di sebelah gedung DPR itu diberi nama tokoh-tokoh yang pernah menjadi ketua DPR, katakanlah gedung Kasman Singodimejo, Ruang Mr. Sartono, Ruang Harmoko, atau mantan-mantan ketua DPR untuk mengenang aspek-aspek sejarah. Saya bisa memaklumi apabila orang-orang Eropa, seperti Italia, Prancis, Jerman, dan Inggris, menulis simbol dalam bahasa Latin karena bahasa Latin merupakan induk dari bahasa Eropa modern. Akan tetapi, mengapa kita orang Indonesia menggunakan bahasa Sanskerta yang bukan merupakan induk bahasa Indonesia.

Yang memopulerkan bahasa Sanskerta ini adalah Moh. Yamin, orang Talawi, Minangkabau. Orang Talawi ini yang membuat kacau, bukan orang Jawa. Sampai-sampai istilah Pancasila pun menurut Bung Karno dikatakan atas petunjuk ahli bahasa. Rupanya yang dimaksudnya adalah Moh. Yamin. Sejak

itu, bahasa Sanskerta selalu digunakan.

Saya sepenuhnya tidak begitu bahagia melihat penggunaan bahasa Sanskerta yang begitu banyak dalam bentuk simbol. Kalau kita membaca Undang-Undang 1945, tidak ada bahasa Sanskerta di dalamnya. Akan tetapi, simbol-simbol militer oleh Pemerintah digunakan secara aneh. Kebijakan apa yang melatar-belakangi penggunaan bahasa Sanskerta itu untuk dijadikan sebagai simbol. Ungkapan *Eka Prasetya Pancakarsa* atau *Bintang Naraya*, dan sebagainya, mengapa harus dengan bahasa Sanskerta dan bukan dengan bahasa Latin. Barangkali Bapak-Bapaklah yang dapat menjelaskan hal itu.



SASTRA DAN JATI DIRI BANGSA

Edi Sedyawati

Direktur Jenderal Kebudayaan

1. Jati Diri Bangsa

Jati diri bangsa adalah pengertian yang abstrak dan di samping itu juga dapat mengalami perubahan-perubahan substansi mengikuti kejadian-kejadian sejarah berkenaan dengan bangsa yang bersangkutan. Batasan "jati diri bangsa" tidak dapat ditentukan dengan mendaftarkan ciri-ciri pengenal abadi yang tidak pernah berubah sepanjang zaman. Namun, walaupun sulit dibatasi bentuk *wadag*-nya, berikut ini akan dicoba untuk meninjau ramuan-ramuan yang membentuk jati diri suatu bangsa tersebut. Pengertian "jati diri bangsa" ini lebih dahulu juga harus ditegaskan artinya sebagai identik dengan "sosok budaya suatu bangsa". Suatu kesatuan bangsa, per definisi, pada dasarnya ditandai oleh kesatuan budaya, betapapun kesatuan itu membentuk keutuhan yang berada pada kisaran antara yang amat kokoh dan yang amat lemah.

Secara *wadag* atau *kasatmata* (terlihat) jati diri suatu bangsa dapat tampak pada adat busana yang dimiliki dan dijunjungnya. Kadang-kadang ciri-ciri rasial tertentu juga menandai suatu bangsa, tetapi ciri ini seringkali juga dapat menyesatkan karena manusia dengan ciri-ciri ras yang sama dapat terpisah dan tersebar di berbagai penjuru dunia, membentuk sejarahnya sendiri dan dengan demikian membentuk kebudayaannya masing-masing. Ketidakpastian ciri rasial sebagai penanda bangsa ditambah lagi dengan faktor percampuran biologis antarras, yang dalam kasus-kasus historis tertentu terjadi dalam skala besar.

Penanda *wadag* lain, yang tidak bersifat stasioner, tetapi berlalu dalam waktu, adalah adat tingkah laku. Dalam setiap kebudayaan terdapat nilai-nilai yang dijadikan acuan umum berkenaan dengan tindak-tanduk yang dianggap pantas dan tidak pantas, yang dianggap terpuji dan tercela. Sejumlah aturan tidak tertulis mengenai itu diajarkan dari generasi ke generasi. Aturan-aturan itu berkenaan dengan tingkah laku, baik dalam lingkungan domestik maupun publik. Termasuk ke dalam tata tingkah laku itu adalah ketentuan-ketentuan mengenai tutur kata yang pantas dan tidak pantas, atau tepat dan tidak tepat, untuk diutarakan pada masing-masing situasi khusus. Kaidah-kaidah seperti ini besar kemungkinannya untuk melintas atau teracu di dalam karya-karya sastra.

Adapun penanda budaya yang bersifat sama sekali non-*wadag* adalah konsep-konsep, atau pengertian-pengertian, yang abstrak, yaitu tidak dapat direpresentasikan secara penuh oleh benda ataupun tindakan tertentu. Sebagai contoh dapat disebutkan pengertian-pengertian seperti *rukun*, *eling*, *siri*, *jengah*, *rantau*, *pepesisir*, dan *marsipature hutanabe*. Yang telah disebutkan ini adalah contoh-contoh dari kebudayaan daerah. Dari kebudayaan nasional dapat disebutkan pengertian-pengertian seperti *pancasila*, *wawasan nusantara*, *kerukunan antarumat beragama*, *marhaen (isme)*, *tridarma perguruan tinggi*, *dwifungsi ABRI*, dan *mitra seajar*.

Salah satu pembentuk jati diri bangsa adalah warisan budayanya, baik yang *wadag*

maupun non-*wadag*. Yang disebut warisan budaya ini berasal dari generasi-generasi terdahulu, baik yang sinambung hingga kini maupun yang telah terputus atau kesinambungannya tidak jelas, seperti yang berasal dari masa prasejarah. Namun, jati diri bangsa itu tidaklah *semata-mata* dibentuk oleh warisan budaya masa lalu, tetapi juga oleh sikap suatu bangsa dalam menghadapi tantangan-tantangan masa kininya dan merancang masa depannya. Perubahan-perubahan sikap, bahkan perubahan-perubahan nilai dapat membawa kepada sosok jati diri yang baru dan aktual.

Batas-batas kebangsaan yang bergeser telah terjadi dalam perjalanan sejarah bangsa. Aneka bangsa atau kelompok etnik telah terbentuk dan mengembangkan diri sejak masa yang jauh silam di wilayah Indonesia yang sekarang ini. Di samping hidup dalam satuan budaya, mereka semula masing-masing hidup dalam kesatuan politiknya sendiri pula. Pada waktu-waktu tertentu terbentuk kesatuan-kesatuan politik baru yang terdiri dari gabungan dua atau lebih kelompok etnik, tetapi pada waktu-waktu lain terjadi pula keterpisahan satu kelompok etnik menjadi dua atau lebih kesatuan politik. Perubahan-perubahan tersebut senantiasa ada pengaruhnya terhadap kebudayaan dan pada gilirannya juga dapat tersirat pada sastranya.

Dalam kesatuan negara bangsa Indonesia dewasa ini, jati diri bangsa diwujudkan dalam format multikulturalitas. Di satu sisi ada situasi multikultural, yaitu terdapatnya secara berdampingan banyak ragam kebudayaan etnik dalam tubuh bangsa yang menyatu ini. Di sisi lain, ada kemungkinan pertumbuhan sikap multikultural pada setiap individu warga negara RI dalam mengaktualisasikan orientasi kepada lebih dari satu kebudayaan, atau sekurang-kurangnya dalam mengapresiasi dan menyerap unsur-unsur budaya tertentu dari suku bangsa lain. Sikap budaya ini pun dapat menjadi penanda jati diri bangsa.

2. Sastra

Sastra adalah salah satu perwujudan kemampuan simbolik manusia. Dalam sastra, bahasa merupakan sarana ekspresi, yang melampaui tugas-tugas primernya sebagai sarana pembentukan konsep dan sarana komunikasi. Oleh karena itu, di dalam sastra simbolisasi tidak hanya berada pada tataran penerangan konsep-konsep sebagaimana dituangkan ke dalam kata-kata, pembentukan kata, dan susunan kalimat, tetapi lebih dari itu. Sastra memungkinkan simbolisasi yang bertingkat-tingkat, dengan menarik pula ke dalamnya peluang menggunakan asosiasi-asosiasi. Sebagian asosiasi itu membutuhkan latar pengetahuan yang lebih luas, baik pada si pencipta maupun si penikmat, sedangkan sebagian lagi memberikan peluang kebebasan interpretasi.

Sastra pada umumnya, lebih-lebih pada zaman ini, dikenal terutama sebagai sastra tulis. Keberaksaraan di dunia ini telah terbukti menumbuhkan tradisi-tradisi besar karena tulisan itu membantu memori manusia dalam melakukan penerusan budaya antargenerasi, dan bahkan melintasi batas-batas geografi. Dengan keberaksaraan, volume substansi yang ditransfer dapat lebih besar daripada yang lazimnya dapat dilakukan melalui sarana lisan. Di samping itu, acuan sumber tradisi menjadi lebih kukuh karena tertulis yang sewaktu-waktu dapat dibaca kembali ataupun disalin. Jika di satu sisi sastra tertulis mempunyai efek pembentukan standar-standar yang keberlakuannya

dapat senantiasa semakin meluas, di sisi lain di dunia ini terdapat ribuan wujud sastra lisan yang didukung oleh tradisi kecil.

Dengan adanya keterkaitan tradisi besar dengan keberaksaraan, serta tradisi kecil dengan kelisanan, tidaklah berarti bahwa kelisanan menjadi tidak berarti dalam perkembangan suatu tradisi besar. Dalam kenyataan, pada tradisi-tradisi besar pun, aktualisasi sastra dilakukan dengan berbagai cara secara berdampingan. Sastra dapat dibaca di dalam hati, tetapi seringkali akan dirasa lebih aktual apabila dibaca dengan bersuara. Bahkan, jenis-jenis puisi tertentu mempersyaratkan pembacaan dengan bersuara, misalnya pada kakawin dan kidung. Dalam banyak suku bangsa Indonesia dikenal pula sastra yang tidak sekadar dilagukan sebagai metrum, melainkan yang benar-benar dimasukkan ke dalam sajian musik yang menggunakan instrumen (-instrumen) musik. Namun, aktualisasi dalam musik tradisi ini kadang-kadang hanya mengambil penggalan-penggalan dari karya sastra. Berbeda dengan itu adalah suatu perkembangan dalam sastra Indonesia, berupa interpretasi puisi selengkapnya ke dalam ekspresi musikal, atau yang biasa disebut "musikalisasi puisi". Secara utuh karya sastra juga dapat diwujudkan melalui permainan teater. Khususnya dalam pertunjukan wayang, dalang adalah juga seorang sastrawan di samping seorang manipulator media pentas yang lain.

3. Jati Diri Bangsa dan Sastra

Kandungan jati diri dalam sastra Indonesia sudah barang tentu dapat muncul, baik pada skala individu maupun skala bangsa. Jati diri pribadi pengarang adalah sebuah unikum. Ia adalah fungsi dari pengalaman hidup setiap pengarang, baik berupa hasil belajarnya maupun tanggapannya yang khas terhadap fakta-fakta kehidupan. Namun, setiap pengarang adalah juga seseorang yang hidup dan tumbuh dalam lingkup budaya tertentu, di dalam masyarakat tertentu. Dapat diharapkan bahwa di dalam dirinya terdapat dialog yang terus-menerus antara bekal budaya asalnya dengan hasil-hasil serapannya terhadap kebudayaan-kebudayaan lain. Dengan kata lain, sangat mungkin terjadi bahwa seorang pengarang adalah wahana dari dinamika saling sentuh antara kelokalan dan kemondialan dalam orientasi budayanya. Meski bagaimanapun keterbukaan cakrawalanya, pengarang-pengarang dari suatu bangsa tetap dapat memiliki jati diri bersama yang merupakan penanda bangsanya, yaitu paling sedikit dalam kesamaan bahasa. Di samping itu, sejumlah konsep, imaji, serta nilai-nilai yang khas bagi bangsanya dapat pula memberikan warna kuat pada karya-karyanya.

Karya-karya sastra memang seringkali dapat *mencerminkan* jati diri bangsanya. Sebaliknya, dapat pula jati diri suatu bangsa *ditentukan* oleh, antara lain, karya-karya sastra bangsanya jika karya-karya sastra tersebut benar-benar dihargai secara mendalam oleh khalayak sebangsanya. Dalam hal ini terlihatlah betapa keberdayaan khalayak untuk menjadi apresiator sastra sangat menentukan taraf kekuatan sastra sebagai pemberi jati diri kepada bangsanya. Apabila sebagian terbesar dari suatu bangsa tak acuh terhadap sastra karya bangsanya, sastra tidak akan dirasakan sebagai milik bangsa yang penting dan, dengan demikian, tidak memberi sumbangan kepada jati diri bangsa. Sebaliknya, apabila sebagian besar rakyat Indonesia menghargai dan mampu

menikmati karya-karya sastra unggul bangsanya, sastra dapat benar-benar menjadi penanda bangsa.

Pemberdayaan khalayak apresiator memerlukan usaha yang terprogram untuk itu, baik melalui saluran pendidikan (formal dan nonformal) maupun media massa. Metode pembinaan apresiasi itu harus lebih ditekankan pada tujuan penikmatan daripada perolehan pengetahuan semata. Sudah tentu kita semua tahu bahwa untuk mencapai tingkat *rasika* artinya berkemampuan mendapatkan atau merasakan esensi keindahan—dalam hal ini keindahan sastra—diperlukan kesiapan akal-budi. Kesiapan itu akan terbentuk secara berangsur setelah dilatih, antara lain melalui pemahaman dan penghayatan konsep-konsep estetik yang merupakan sarana penciptaan sastra, menurut jenis sastranya masing-masing.

Sastra (berbahasa) Indonesia sendiri dapat dipilah-pilah ke dalam aneka jenis dan langgam. Di samping itu, karya-karya sastra warisan budaya dari masa-masa lalu dari berbagai suku bangsa pun dapat dihitung sebagai khazanah sastra bangsa Indonesia seluruhnya. Kemampuan menyerap dan menikmatinya pada gilirannya akan dapat memberikan pengayaan batin tersendiri, serta dalam pada itu memberikan pula penghayatan akan dimensi waktu dari pacuan sepanjang zaman untuk menuju keindahan sastra.

4. Penutup

Sebagai penutup kiranya perlu disimpulkan bahwa masih diperlukan lebih banyak kajian mengenai sastra: baik mengenai sastra Indonesia maupun sastra daerah; baik mengenai permasalahannya pada masa kini maupun sejarahnya pada masa lalu; baik mengenai ketertulisannya maupun kelisanannya; serta baik berupa kajian struktur maupun dinamika eksternalnya. Pengamalan pengetahuan yang dihimpun melalui kajian-kajian itulah yang dapat disumbangkan kepada masyarakat luas agar sastra lebih nyata menjadi milik bangsa yang dikenal dan digemari.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 4
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 09.00--10.00
Judul Makalah	: Sastra dan Jati Diri Bangsa
Penyaji	: Edi Sedyawati
Pemandu	: Tuti Herati Noerhadi
Pencatat	: a. Non Martis b. Syamsul Arifin
Peserta	: 600 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suroso, IKIP Yogyakarta

a. Pertanyaan:

Berdasarkan survei tahun 1980-an ternyata penikmat atau pembaca sastra kita sangat kurang. Sebagai Dirjen Kebudayaan (1) apakah program kerja Ibu dalam mengomunikasikan karya-karya sastra kita, (2) siapa yang Ibu tugasi, dan (3) berapa biayanya.

b. Jawaban:

Anda mengambil data tahun 1980-an dan membuktikan bahwa pembaca sastra kita sangat kurang. Jika sekarang dilakukan penelitian yang sama, tentu hasilnya jauh lebih merosot. Kita tidak dapat mengambil simpulan-simpulan penelitian dari buku-buku sastra yang terjual karena buku itu itu dibaca juga oleh saudara-saudaranya sehingga satu buku bisa dibaca oleh lebih dari satu orang. Kalau ukurannya hanya dari buku, penilaian itu juga kurang tepat karena karya-karya sastra juga muncul di media harian dan harian itu banyak sekali dibeli orang. Jadi, kita mengetahui apakah karya-karya itu dibaca atau tidak. Selain itu, kita jangan lupa bahwa media televisi juga berkompetensi menyangkan apresiasi sastra. Jadi, bagaimana minat kita agar televisi juga menyodorkan apresiasi sastra. Jika ini adalah tugas Dirjen Kebudayaan, tugas itu sangat berat karena kami diserbu dari berbagai arah, seorang Dirjen Kebudayaan saja tidak berdaya menghadapi dunia industri. Kita harus juga terima usul dari Departemen Perindustrian, Departemen Penerangan, dan lain-lain. Jadi, terlalu besar harganya jika hanya Dirjen Kebudayaan yang diharapkan mengerjakan semuanya sendiri kecuali kalau diberi dana yang besar. Harapan saya yakinlah bahwa Dirjen Kebudayaan beserta aparat dan pusat-pusatnya berupaya menghasilkan pemahaman budaya secara umum kepada masyarakat luas.

2. **Penanya:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Apakah nilai-nilai budaya universal ini perlu direformasi? Kalau memang perlu, visinya seperti apa dan cetak birunya seperti apa?

b. **Jawaban:**

Saya kira memang perlu direformasi nilai-nilai budaya kita, tetapi kalau ditanyakan bagaimana cetak birunya, itu sudah tentu tidak bergantung kepada Dirjen Kebudayaan. Kita tentu harus bersama-sama. Sekarang citra bangsa Indonesia yang ditampilkan di media massa adalah cepat naik darah dan mudah dihasut. Citra itulah yang akan kita pegang terus? Tentu tidak, bukan? Jadi, marilah kita sama-sama belajar dan mengambil nilai-nilai yang baik untuk kita pertahankan.

3. **Penanya:** Hamzah Machmoed, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

- 1) Sejauh mana usaha Ibu untuk memunculkan kembali sastra kita yang terbelenggu itu?
- 2) Kapan sastra Indonesia mengalami *best seller*?

b. **Jawaban:**

Saya mengerti maksud sastra terbelenggu yang Anda kemukakan, yakni pelarangan terhadap karya Pramudya dan pementasan "Marsinah". Oleh karena itu, Anda berkesimpulan bahwa selama ini tidak ada kreativitas sama sekali. Anda jangan terlalu gusar menghadapinya. Dalam dua tahun belakangan ini banyak sekali pementasan yang muncul. Jadi, hal itu Anda jadikan untuk mengidentifikasi situasi seolah-olah seluruh penciptaan sastra dan teater mati. Kasus Pramudya adalah kasus politik dan "Marsinah" adalah kasus tertentu.

4. **Penanya:** Ratna Muharini, Universitas Jenderal A. Yani, Bandung

Pertanyaan:

Apakah kecerdasan emosional kita sudah mulai menurun?

Jawaban:

Mengenai kecerdasan emosional yang mulai berkurang dan maksud berusaha mungkin itu berkorelasi, tetapi harus ada penelitian terlebih dahulu. Hal ini juga mungkin berkorelasi dengan berkurangnya sarana pengesahan hati nurani.

5. **Penanya:** Sayama Malabar, STKIP Gorontalo

a. **Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana caranya agar bangsa kita ini secara utuh mencintai sastra daerah?
- 2) Apa nama-nama yang Ibu gunakan agar generasi muda kita bersemangat

dalam mengapresiasi sastra daerah?

- 3) Bagaimana kebijakan Ibu sebagai Dirjen Kebudayaan terhadap pemberlakuan sastra lisan untuk mendukung jati diri bangsa?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)



KESUSASTRAAN INDONESIA LAMA SEBAGAI SUMBER PEMBINAAN JATI DIRI BANGSA

Achadiati Ikram
Universitas Indonesia

1. Khazanah Sastra dalam Bentuk Tulisan

Sebagian besar orang Indonesia yang terpelajar mengetahui bahwa bangsa Indonesia memiliki peninggalan budaya yang kaya. Hal itu berkali-kali didengung-dengungkan oleh para pejabat yang terkait dan iklan-iklan melalui media massa. Selain pariwisata alam, warisan budaya itu juga menjadi andalan dalam menggalang berlanjutnya pariwisata sebagai sumber devisa negara. Secara umum, dapat kita lihat bahwa untuk keperluan itu, budaya material yang berupa bangunan dan unsur lain yang lebih kasat mata, seperti tarian, mendapat tempat dan perhatian khusus. Karena adanya kerangka pemikiran seperti itu, warisan budaya yang ideal masih dipandang dengan sebelah mata.

Di antara sekian banyak kelompok etnik Nusantara, yang masing-masing memiliki bentuk sastra, ada sejumlah etnik yang meninggalkan sastranya dalam bentuk tertulis karena dari zaman yang dini telah menguasai kiat menulis.

Keberaksaraan yang terdapat pada kelompok tertentu itu berasal dari dua jalur sistem tulisan yang sebenarnya dapat dikembalikan kepada satu jalur besar, juga yang ujung-ujungnya bersumber pada sistem tulisan di Mesopotamia kuno. Kedua sistem tulisan itu sampai di Indonesia dalam bentuk aksara India dan aksara Arab, melalui dua gelombang pengaruh budaya.

Munculnya sistem tulisan India dalam bentuk Pallawa Awal pada kira-kira tahun 400 Masehi di Kutai merupakan hasil perkembangan sistem India, yang bercorak khas setempat karena dalam perbandingan terlihat bahwa di berbagai tempat di Asia Tenggara aksara Pallawa muncul dalam berbagai variasi. Kreativitas lokal atau *local genius* tampak dalam berbagai transformasi dari zaman ke zaman di tempat yang berbeda-beda dari Pallawa Awal, Pallawa Akhir, Kawi Awal, Kawi Akhir, dan seterusnya sampai yang kini kita kenal sebagai tulisan Sunda, Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Bagi penutur suatu bahasa yang mendapatkan keberaksaraan, terbuka kemungkinan-kemungkinan yang amat penting dan bervariasi, jauh melebihi apa yang mereka kenal sebelum keberaksaraan.

Dalam hubungan itu, perlu diketahui bahwa sangat boleh jadi tulisan India bukan yang pertama yang pernah dikenal di daerah Nusantara. Dikatakan bahwa mungkin sisa-sisanya masih dapat ditemukan dalam beberapa sistem tulisan Nusantara, tetapi tersamar oleh pengaruh sistem tulisan India dan Arab.

Kemungkinan yang diberikan oleh keberaksaraan sebagai piranti mnemonik adalah pencatatan gagasan yang dapat ditransmisikan dengan melintasi waktu, kepada orang atau masyarakat yang pada saat perekaman tidak ada, yaitu generasi berikutnya dan kelompok yang ada di luar batas kelisanan. Kalau pada awalnya hanya komunikasi dan informasi yang mempunyai kepentingan politik yang direkam, antara lain, pada

prasasti, dengan meningkatnya kecanggihan teknologi penulisan, penggunaannya yang lebih intensif menjadi lebih dimungkinkan. Mulailah karya sastra dituliskan dan disalin.

2. Arti Keberaksaraan bagi Perkembangan Budaya

Bukti-bukti menunjukkan bahwa keberaksaraan tidak terbatas pada lingkungan keraton atau golongan bangsawan, sebagaimana yang sering dikemukakan. Memang dapat terjadi, seperti halnya huruf hieroglif di Mesir, bahwa ada sekelompok orang, dalam hal ini para pendeta, dengan cermat menjaga agar pengenalan huruf dan keterampilan menulis tidak menyebar ke luar kalangannya. Usaha itu dilakukan karena dengan demikian, mereka dapat menguasai golongan lain. Berbeda dengan keadaan di atas, dari keadaan di Nusantara kita melihat bahwa selain sastra yang digubah untuk pujian dan pujaan kepada raja oleh pujangga keraton, banyak karya tulis lain yang lahir di luar kalangan istana. Memang tidak dapat dimungkiri bahwa raja dan kerajaan mempunyai peran penting dalam kehidupan tradisi tulis. Dalam sastra Jawa Kuna, misalnya, penciptaan epik-epik yang termasyhur seperti *Arjunawiwaha*, *Ramayana*, dan *Bharatayudha* tidak lepas dari peran raja seperti dapat kita baca dalam teksnya sendiri. *Nagarakertagama* atau *Decawarnana*, suatu gambaran negeri, juga dipersembahkan kepada raja. *Sejarah Melayu* dan *Tuhfat al-Nafis* meskipun tidak memuja-muji raja, dekat dengan kalangan istana karena ditulis oleh kerabat raja dan pembesar kerajaan. Kebanyakan karya sastra sejarah, seperti *Babad Tanah Jawi*, *Sejarah Banten*, *Hikayat Raja-Raja Pasai*, *Hikayat Merong Mahawangsa*, *Babad Buleleng*, dan *Babad Selaparang* mengisahkan sebagian sejarah kerajaan dengan berfokus pada dinasti yang bersangkutan. Ada pula teks seperti *Sivaratrikalpa* yang menyebut nama raja, tetapi berisi cerita yang bernilai keagamaan. Peran kerajaan yang lain dan amat penting adalah dalam segi pelestarian teks, yaitu penyimpanan naskah dan penyalinan teks yang dikandungnya. Pelembagaan skriptorium memastikan tempat penyimpanan dan kegiatan untuk memelihara khazanah istana secara terus-menerus dan dengan demikian, menjaga kelangsungan tradisi teks.

Berbeda dengan tradisi pernaskahan di kalangan istana, perkembangan penulisan karya sastra di luar istana tidak bergantung kepada raja, tetapi pada pusat-pusat budaya atau kelompok keagamaan. Di samping itu, penggunaan tulisan secara lebih intensif dalam kehidupan sehari-hari membuatnya bagian dari lingkungan pedesaan, seperti yang kita lihat di Bali, penulisan di atas lontar dalam ukuran dan kualitas yang bervariasi digunakan untuk catatan harian, surat-surat, administrasi pedesaan, dan kegunaan praktis lainnya (Rubinstein dalam Kumar, 1996:131). Tersimpannya catatan *primbon* tulisan Jawa juga menunjukkan bahwa keberaksaraan cukup meluas sehingga digunakan untuk mencatat hal-hal mengenai kearifan esoteris yang juga disebut *ngelmu* yang berfungsi dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat Bali dan Jawa.

Pusat penulisan yang juga menghasilkan naskah-naskah, khususnya yang bernuansa agama adalah *mandala*, *kabuyutan*, dan *pesantren*, yaitu pusat keagamaan Hindu dan Islam di Jawa, Pasundan, Aceh, Riau, dan tempat-tempat lain. Sastra keagamaan Islam di Nusantara merupakan bagian dari alur ilmu pengetahuan keislam-

an dunia yang kemudian mengalami penerjemahan dalam berbagai bahasa setempat. Karya-karya mengenai ajaran agama yang digunakan secara internasional di lembaga-lembaga pendidikan Islam disalin dan ada yang diterjemahkan. Hikayat Nabi Yusuf, misalnya, yang berasal dari Surat Yusuf dalam Alquran diterjemahkan dalam hampir semua bahasa Nusantara yang memiliki tulisan (kecuali Bali) dan dibacakan di Jawa Timur, Lombok, dan Madura sampai saat ini (Arps dalam Kumar, 1996:174).

Dengan menyebarnya keberaksaraan bukanlah berarti bahwa kelisanan lenyap ataupun surut. Kreativitas kelisanan yang selama ini menjadi tumpuan rasa estetis rakyat menjadi sumber kreativitas tulis dan sebaliknya, naskah merupakan stimulus untuk aktivitas lisan dan pelisanan naskah. Maka, terjadilah berbagai variasi fungsi naskah dalam pembawaan sastra lisan. Pembawaan tersebut dapat berupa pembacaan berganti berkeliling sambil berdendang seperti dalam *basimalin* di daerah Sumatra Barat (Suryadi, segera terbit). Tidak dijelaskan berapa orang dan berapa naskah yang terlibat dalam resitasi itu. Di Banyuwangi suatu versi puisi dari cerita Yusuf ditembangkan semalam suntuk untuk tujuan khusus (Aps dalam Kumar, 1996:174). Pembawaan yang berbeda terjadi pada *mababasan* di Bali dan *hikayat* di Lombok. Di Bali dan Lombok teks yang berbahasa "asing", yaitu Jawa Kuno dan Melayu dibacakan oleh seorang tukang cerita, kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan oleh orang lain dalam bahasa sehari-hari.

Di samping sastra yang benar-benar lisan (digubah saat dibawakan), resitasi naskah, seperti yang digambarkan di atas, masih dilakukan walaupun makin berkurang. Menurut Suryadi masyarakat Sumatra Barat lebih berminat terhadap kelisanan ketimbang penulisan sehingga di daerah itu penulisan karya sastra tidak berkembang seperti di daerah Aceh atau Riau meskipun agama Islam di daerah lain merupakan pembawa keberaksaraan dan mempunyai kedudukan kuat dalam masyarakat Minangkabau. Walau demikian, adanya naskah-naskah *basimalin* menandakan adanya keinginan untuk merekam suatu teks dan kemudian membawakannya dengan berpegang pada teks.

Bagi banyak bangsa di dunia keberaksaraan telah menyebabkan suatu revolusi dahsyat di segala bidang. Demikian juga bagi bangsa-bangsa di Nusantara keberaksaraan telah memungkinkan akulturasi dalam skala besar. Pertama, akulturasi dengan budaya India dan kemudian dengan budaya Islam. Yang kita lihat sekarang adalah bahwa aksara Arab dengan bahasa Melayu sebagai pendukungnya tersebar dari Aceh sampai Maluku. Kedua, gelombang budaya besar itu dapat berpenetrasi ke dalam kehidupan spiritual manusia Indonesia karena adanya keberaksaraan. Berkat kemampuan itu, juga pengetahuan, seni sastra dan sejarah dapat berkembang sehingga menghasilkan benda-benda budaya yang lebih lestari.

3. Khazanah Naskah Nusantara

Suatu deskripsi mengenai keanekaragaman tradisi tulis Nusantara yang boleh dikatakan lengkap terdapat dalam buku *Illuminations, the Writing Traditions of Indonesia* yang dikumpulkan oleh Ann Kumar dan John McGlynn (1996). Suatu sorotan yang khusus mengenai keindahan salah satu bagiannya diberikan oleh Annabel Teh Gallop dalam

buku *Golden Letters* yang dalam tahun 1991 menyertai pameran surat-surat itu.

Pujian kekaguman yang dilontarkan terhadap budaya Indonesia datang dari hampir semua peneliti yang mengenalnya dan mempelajarinya. Perjalanan sejarah telah membawa naskah-naskah ini ke berbagai tempat dengan nasib yang berbeda-beda. Kita dapat menapak kisahnya untuk mengetahui bagaimana keadaan duta bahasa-bahasa Nusantara dari masa lampau pada saat ini.

Naskah-naskah Aceh yang kini ada di Perpustakaan Nasional berasal dari hasil rampasan perang sewaktu Belanda menjalankan salah satu perang kolonialnya yang paling dahsyat, yaitu Perang Aceh. Ditambah dengan hibah warisan mendiang Prof. Hoesein Djajadiningrat, koleksi itu merupakan kumpulan manuskrip Aceh yang terbesar kedua. Di dalamnya terdapat sejumlah naskah yang mengharukan, yaitu kitab doa atau surat Alquran tertentu yang diambil dari tubuh prajurit pejuang yang gugur. Naskah berupa hikayat yang indah adalah *Hikayat Pocut Muhammad*, sebuah kisah penuh keteladanan seorang yang berhati mulia (Drewes, 1979). Naskah-naskah Alquran yang berhias juga merupakan bagian dari koleksi ini. Kelompok naskah Aceh yang terbesar (kira-kira 800 teks) disimpan di Perpustakaan Universitas Leiden, hasil hibah ataupun warisan dari Snouck Hurgronje, ahli bahasa sastra dan budaya Aceh serta pakar Islam, dan H.T. Damste seorang pejabat pemerintah kolonial yang pada awal abad ke-20 ditempatkan di Aceh. Selain kumpulan naskah kecil yang tersebar di Belanda, Paris, London, dan Antwerpen, ada pula di koleksi Museum Aceh dan Universitas Syiah Kuala yang jumlahnya terus bertambah. Pemerolehan naskah yang kini disimpan dalam lembaga-lembaga ilmu pengetahuan di Eropa, selain melalui pembelian dan "rampasan resmi" perang, juga dengan jalan menyuruh salin. Semua naskah Aceh ditulis dengan aksara Arab dan banyak di antaranya digubah dalam bentuk puisi atau *sanjak*. Perlu juga diketahui bahwa daerah Aceh tidak hanya telah menghasilkan karya sastra dalam bahasa Aceh, tetapi juga sebagian dikarang dalam bahasa Melayu, khususnya karya sastra sejarah, misalnya *Hikayat Aceh* dan sastra keagamaan seperti karya Ar-Raniri dan Abdul-Rauf Singkel.

Naskah Batak merupakan kekayaan yang unik karena bentuk dan bahannya yang khas, terutama karena aksaranya yang tidak mirip dengan aksara dalam kedua kelompok sistem tulisan yang besar, India dan Arab. Meskipun kini telah diterima bahwa tulisan Batak diturunkan dari tulisan Kawi, karena bentuknya yang terdiri atas garis-garis pendek dan bulatan, pernah menimbulkan berbagai spekulasi tentang asal-usulnya. Bentuk aksara yang paling dekat dengannya adalah tulisan Sumatra Selatan, yaitu Lampung, Kerinci, dan Rejang.

Suatu bentuk naskah Batak yang banyak tersimpan adalah *pustaha* atau *pustaka*, buku dari kulit kayu yang dilipat sebagai harmonika. Isinya, antara lain, ilmu tentang upacara, ramalan, dan pengobatan yang dilakukan oleh "dukun". Bukan kulit kayu saja sarana tulis yang telah melestarikan teks-teks Batak: bambu dan tulang juga ditulisi dan digambari, antara lain, dengan penanggalan untuk menunjukkan hari baik dan buruk. Masyarakat Batak kaya akan kesusastraan, baik prosa maupun puisi, tetapi tidak ada yang terekam dalam tulisan; semuanya terdapat dalam bentuk lisan.

Telah disinggung di muka tentang kekerabatan tulisan Batak dengan tulisan-

tulisan di Sumatra Selatan. Voorhoeve mengajukan teori bahwa keduanya berasal dari tulisan Proto Sumatra, yang seasal dengan tulisan Jawa, yaitu sistem tulisan India (Voorhoeve, 1955:3). Sarwit Sarwono yang menyebut jenis tulisan ini dengan Melayu Tengah mengemukakan bahwa sistem tulisan yang disebut *Ka-Ga-Nga* mencakup bahasa-bahasa Pasemah, Serawai, Kaur, Semendo, Mekakan, Lembak Bliti, Lembak, Lembak Sendang, Ogan, Lematang, dan Musi (Sarwono, 1993:1) dan seluruh naskahnya berjumlah kurang lebih tiga ratus; disimpan di Perpustakaan Museum Bengkulu, tetapi sebagian besar di Perpustakaan Nasional, Jakarta, di Leiden, dan di Amsterdam. Bahan alas tulis pun mirip dengan alas tulis di daerah Batak, antara lain bambu dan kulit kayu. Naskah berbentuk harmonika juga ada. Perpustakaan Nasional juga memiliki naskah yang bertulisan Rencong dan Arab pada satu manuskrip.

Kekhasan tulisan kita dapat pula pada naskah-naskah Bugis dan Makassar yang hingga kini masih kurang diteliti. Tulisan dalam naskah itu memperlihatkan bahwa asal-usulnya dari India dan hal itu telah diyakini oleh para pakar, tetapi bagaimana tepatnya silsilah perkembangannya masih memerlukan penelitian, begitu juga hubungan antara kedua sistem tulisan tersebut. Pada saat ini tercatat tiga ribuan naskah yang telah didata dalam daftar yang disusun oleh Dr. Mukhlis Paeni (segera terbit) dan akan diterbitkan sebagai katalog naskah Bugis yang masih ada di daerah Sulawesi Selatan dan telah dibuat mikro filmnya dalam usaha pelestarian teksnya. Selain di tempat asalnya, naskah-naskah Sulawesi Selatan sudah pula disimpan di Leiden, Jakarta, London, dan tentunya Ujung Pandang. Yang di luar negeri merupakan salinan yang dipesan oleh para pejabat kolonial antara 1850--1950 yaitu Raffles, Cense, dan Matthes. Banyak di antaranya berisi rekaman peristiwa-peristiwa sejarah yang penting.

Nurhayati Rahman (1998) dalam disertasinya "Perjalanan Sawerigading ke Negeri Cina" menggambarkan kesulitan bacaan tulisan Bugis yang disebabkan oleh minimnya tanda fonem sehingga dapat dibaca bervariasi, dan menuntut pengetahuan bahasa yang tinggi. Tol menyebutkan bahwa secara teoretis, satu aksara dapat diinterpretasikan dengan sembilan cara (Tol dalam Kumar, 1996:216). Nurhayati Rahman (1998:6) menampilkan satu jenis sastra yang oleh orang Bugis dijunjung tinggi serta diwakili dalam sejumlah besar naskah, yaitu mitos epik "La Galigo" yang merupakan cerita yang paling panjang di dunia, yaitu kira-kira 1.000 halaman folio. Teksnya merupakan acuan bagi perilaku budaya yang saat ini sadar atau tak sadar masih dianut oleh masyarakatnya. Di samping "La Galigo" dan kronika sejarah, naskah Sulawesi Selatan memiliki keanekaragaman serta kualitas yang tinggi dari segi informasi yang dapat dipetik; di dalam karya sastranya seperti "toloq" dan juga "La Galigo" seni sastranya mencapai taraf keindahan yang tinggi.

Sekelompok naskah yang sangat penting adalah naskah dalam bahasa Melayu. Pentingnya kelompok ini dibandingkan dengan naskah dalam bahasa lain adalah karena persebarannya yang luas di Nusantara, seperti yang sudah disinggung di atas, dari Aceh hingga Maluku. Di samping kedudukannya sebagai bahasa pergaulan, sebagai bahasa sastra, dan administratif serta bahasa keagamaan, bahasa Melayu diterima di kalangan dan wilayah geografis yang luas. Naskah-naskah Melayu dengan kandungan sejarah ditemukan di Ambon, Ternate, Bima, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur,

dan Kalimantan Utara, Sumatera Selatan sampai Sumatra Utara, dan di daerah-daerah yang bahasa ibunya bukan Melayu. Karya-karya seperti *Hikayat Aceh*, *Hikayat Banjar*, *Hikayat Tanah Hitu*, *Hikayat Raja-Raja Pasai* dan naskah sejarah lainnya ditemukan di luar Tanah Melayu. Bahasa Melayu mempunyai peran penting sebagai pendukung penyebaran Islam. Di Aceh, setelah pandai mengaji Alquran, setiap orang dituntut memiliki tingkat keberaksaraan dalam membaca Melayu berhuruf Jawi karena semua tulisan bukan puisi menggunakan bahasa Melayu, yang kini digantikan oleh penerusnya, yaitu bahasa Indonesia. Karya keagamaan yang harus dipelajari secara tradisional diberikan dari buku-buku berbahasa Melayu. Hal yang sama terjadi di Lombok. Di pesantren di daerah itu posisi bahasa Melayu sedikit demi sedikit digantikan oleh bahasa Indonesia dan bahasa Arab sebagai media pengajaran. Namun, dalam khazanah naskah kita peran bahasa Melayu di masa lampau masih bisa ditelusuri berkat pelestariannya dalam tulisan.

Pada saat ini naskah-naskah Melayu tersimpan terutama di Indonesia, Belanda, Inggris, dan Malaysia, negeri yang melanjutkan tradisi Melayu. Seperti juga di daerah-daerah lain yang pernah mengalami masa kemakmuran dan perkembangan budaya khazanah naskah Melayu amat beragam, mulai dari hikayat, sejarah, dan syair keagamaan sampai ramalan, semuanya terdapat di sana (Sutaarga 1972), berasal dari berbagai penjuru Nusantara. Kegiatan penyalinan pernah diusahakan oleh Pemerintah Kolonial dan banyak naskah yang kini tersimpan di berbagai museum adalah hasil usaha tersebut (Mujizah dan Rukmi, segera terbit).

Bahasa Melayu sebagai pendukung penyebaran agama Kristen perlu juga disebut, tetapi hasil terjemahan Injil tidak terdapat dalam bentuk manuskrip karena pada saat penerbitannya teknik percetakan sudah sampai dan berkembang di Nusantara.

Satu jenis naskah yang biasanya dilupakan, tetapi perlu juga disebut dalam hubungannya dengan bahasa Melayu adalah naskah yang berisi teks yang berasal dari masyarakat Cina dan ditulis dalam aksara Arab dan Jawa. Teks-teks itu merupakan karangan asli dan berkembang di Jakarta dan Yogyakarta. Pada masa kemudian muncul terjemahan dari bahasa Cina. Contoh yang menarik adalah cerita Sampek Ing Tai yang hingga kini secara luas direproduksi dan ditransformasi dalam seni-seni lain seperti drama modern. Di Bali dikenal *Geguritan Sampik* yang beberapa kali digubah dalam bahasa Bali dengan adaptasi-adaptasi yang khas (Sancaya, 1994). Khazanah naskah Melayu Cina tersimpan di Perpustakaan Nasional dan di Leiden, selain di Sonobudoyo (Salmon, 1981).

Naskah-naskah Sunda menurut Edi Ekajati pada saat ini diperkirakan tinggal 1.500 buah, yang selain disimpan di daerah asalnya, juga disimpan terutama di Perpustakaan Nasional dan Perpustakaan Universitas Leiden (Ekajati, 1980). Kita ketahui bahwa salah satu prasasti yang terdini dari kira-kira tahun 450 Masehi ditemukan di Ciaruteun, Jawa Barat. Hal itu menandakan bahwa pada masa itu tulisan Pallawa Awal sudah dikenal di daerah Sunda. Naskah dari kurun waktu kuno (sampai abad ke-17) ditulis di atas daun nipah atau lontar dalam aksara Sunda Kuno dalam bahasa Sunda Kuno yang oleh orang Sunda masa kini tidak dipahami lagi. Sebagian juga ditulis dalam bahasa Jawa Kuno dengan tulisan Kawi. Kedua sistem tulisan tersebut merupakan

keturunan dari tulisan Pallawa. Salah satu naskah adalah "Sanghyang Siksakandang Karesian" yang merupakan sumber acuan budaya Sunda guna mencapai kebahagiaan hidup. Dari kurun waktu itu ada satu naskah yang memiliki segi historis, yaitu "Carita Parahiyangan" yang memberikan kisah raja-raja Sunda. Dalam periode berikut Islam berpengaruh dalam berbagai jenis karya sastra dan lambat laun tulisan Sunda pun tergeser oleh tulisan Arab. Islamisasi juga membawa pengaruh kepada bahasa Jawa, yang menjadi lebih kuat pada awal abad ke-17 karena dominasi Mataram. Dalam tahap berikutnya diciptakan *cacarakan*, yaitu suatu adaptasi dari tulisan Jawa.

Dalam periode kuno, kabuyutan atau mandala merupakan skriptarium, tempat para pendeta atau pertapa menghasilkan naskah. Salah satu naskah yang penting adalah "Srimanganti di Lereng Gunung Cikuray" (Ekajati dalam Kumar, 1996:101).

Sehubungan dengan pembicaraan ini, perlu disebut bahwa ada jenis sastra lisan yang khas Sunda, yaitu *pantun* yang pada masa modern dituangkan menjadi naskah. Pantun adalah cerita pahlawan yang dihubungkan dengan sebuah kerajaan kuno pra-Islam, di antaranya *Mundinglaya di Kusuma*, *Ciung Wanara*, dan *Lutung Kasarung*. Dengan surutnya kegiatan kelisanan *pantun*, kita masih bersyukur bahwa teks-teks berharga itu telah terekam.

Lombok yang memiliki kekayaan tradisi lisan yang melimpah telah pula mengembangkan keberaksaraannya dalam tradisi naskah yang sangat khas. Ada tradisi yang mengatakan bahwa Lombok diislamkan oleh salah seorang wali dari Jawa. Teks-teks Lombok yang berbahasa Jawa memiliki persamaan dengan teks Jawa Pasisiran, antara lain *Serat Jatiswara* yang mengisahkan petualangan seorang santri dalam pencarian saudaranya, yang oleh Florida disebut kisah "*Santri Lelana*" (Behrend, 1995:13) atau santri pengembara. Sejumlah besar teks berbahasa Jawa merupakan karangan asli orang Lombok. Di samping itu, tersimpan naskah-naskah berbahasa Sasak, di antaranya yang amat terkenal adalah *Tutur Monyeh*, *Rengganis*, dan *Cilinaya*. Kekayaan naskah Lombok tersimpan terutama di Museum Nusa Tenggara Barat di Mataram; lembaga lain penyimpan naskah adalah Gedung Kirtya yang isinya kini mungkin sudah dipindahkan ke Denpasar, Perpustakaan Nasional, dan Perpustakaan Universitas Leiden.

Naskah-naskah Jawa merupakan tradisi yang dari segi jumlah, keanekaan, dan usia melebihi koleksi yang berbahasa lain. Hal itu disebabkan oleh adanya perpustakaan-perpustakaan keraton di Yogyakarta dan Solo yang berfungsi sebagai penyimpan khazanah tersebut dan tidak terusik oleh peperangan yang telah mencerai-beraikan perpustakaan-perpustakaan istana lainnya. Yang tersimpan di Indonesia sebagian sudah terdaftar dalam Seri Katalog Induk Naskah-Naskah Nusantara, yaitu dari Museum Sonobudoyo, Keraton Yogyakarta, dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia, semuanya terdiri atas empat jilid yang masing-masing kira-kira 600 halaman. Di luar itu naskah Jawa terdapat di Perpustakaan Keraton Surakarta, Perpustakaan Nasional, dan di beberapa tempat di Eropa. Seperti halnya dengan naskah-naskah Sunda, teks-teks naskah Jawa tertulis dalam dua jenis aksara, yaitu Jawa dan Arab atau pegon.

Tradisi tulis di Bali, berbeda dengan daerah lain, masih hidup meskipun sebagai kegiatan tulis tangan makin berkurang. Dari segi fungsi, naskah Bali yang berupa

lontar tetap terpelihara dalam kegiatan *mababasan* atau *pepaosan*, yaitu pembacaan dan pemahaman bersama dan tentu dalam berbagai peristiwa upacara yang melibatkan teks yang terkandung di dalamnya. Adanya fungsi ini menjadi dasar kelangsungan hidup tradisi. Apabila fungsi itu bergeser, karena kemajuan teknologi yang didukung oleh sarana yang tidak lagi mengandalkan tulis tangan, teks-teks akan tetap hidup, sedangkan penurunan dan penggandaan akan dilakukan dengan alat-alat reproduksi modern. Di samping naskah-naskah berbahasa Bali yang amat kaya, perlu disebut suatu jenis sastra yang diadopsi dan dilestarikan oleh masyarakat Bali sehingga telah menyatu dengan sastra berbahasa Bali, yaitu sastra Jawa Kuno yang dari segi ilmu pengetahuan merupakan kelompok naskah yang paling banyak diminati dan diteliti mulai awal abad ke-20. Dengan penemuan kumpulan naskah Jawa Kuno di lereng Merbabu, dimungkinkan adanya studi perbandingan dalam perkembangan bahasa dan sastra dalam kedua kumpulan teks di atas.

Teks-teks berbahasa Bali mencakup sastra esoteris untuk para ahli keagamaan, pengobatan, sejarah keturunan golongan tertentu, termasuk babad, cerita didaktik dan romantis, dan berbagai genre lainnya. Sebagian besar naskahnya di Bali, di Perpustakaan Nasional, dan di Belanda.

4. Mengapa dan untuk Apa Khazanah Naskah Harus Dipelihara?

Meskipun pada saat ini oleh Pemerintah Indonesia sudah dilakukan usaha ke arah pemeliharaan naskah lama, dan dengan demikian telah diakui kepentingannya, secara umum usaha tersebut masih jauh daripada apa yang seharusnya dikerjakan. Hingga kini kerja serius yang telah dilakukan di bidang naskah dan pemeliharannya sebagian besar didukung oleh dana lembaga asing dari negeri-negeri yang telah memiliki infrastruktur penanganan warisan nasional yang memadai. Mengingat bahwa dana dan usaha yang diperlukan tidak sedikit dan masalah ini merupakan keprihatinan nasional, sudah saatnya masyarakat ikut menyumbangkan dana dan daya untuk menunjang penyelamatan khazanah budaya itu.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kekayaan naskah Nusantara pantas diselamatkan. Mungkin kekurangannya ialah bahwa isinya dan nilainya masih kurang diketahui karena kurangnya informasi yang meyakinkan.

Berikut akan dikemukakan serba sedikit tentang manfaat yang dapat dipetik dari pengetahuan yang tersimpan dalam naskah-naskah yang sebagian terbesar terletak di bidang budaya dan tataran spiritual. Apabila bangsa atau kelompok masyarakat kita umpamakan sebagai manusia, kekayaan masa lampau khususnya teks sebagai hasil dari piranti mnemonik yang berupa tulisan diumpamakan sebagai kekayaan pengalaman yang tersimpan dalam batinnya. Berbagai pengalaman, termasuk pembelajaran, masing-masing meninggalkan hikmahnya yang dapat dirujuk tiap kali ia membutuhkan. Dengan demikian, ia tidak hadir di dunia sebagai orang yang harus mulai dengan nol; ia sudah punya bekal. Bekal itulah yang harus direbut dari pengalamannya agar disadari hikmahnya. Bangsa tanpa pemahaman milik spiritualnya adalah ibarat manusia yang menderita hilang ingatan atau amnesia.

Suatu alasan yang kiranya cukup kuat untuk memelihara dan menelitinya adalah

pentingnya sebagai sumber sejarah. Apabila kita membaca buku-buku sejarah Indonesia, nyatalah bahwa sejarah daerah-daerah hanya muncul secara fragmentaris, sedangkan untuk kepentingan daerah itu sendiri dan penduduknya pengetahuan itu amat penting sebagai sumber kesadaran jati diri. Kajian-kajian daerah tertentu yang dilakukan oleh pakar sejarah dapat dilengkapi dengan menggunakan sumber-sumber naskah, dengan bahan-bahan perbandingan seperti dikemukakan oleh Hoesein Djajadiningrat dalam tulisannya mengenai sejarah lokal (Soedjatmoko, 1965:12). Hasil penulisan sejarah lokal dengan konsep dan gaya tersendiri telah menjadi sumber usaha pemahaman tentang kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah perkembangan Islam yang lebih terinci akan dapat digali dari naskah-naskah Islam yang terdapat dalam berbagai bahasa Nusantara dan masih merupakan khazanah yang sebagian terbesar belum terungkap.

Naskah-naskah dapat pula kita lihat sebagai suatu milik yang indah dan sumber inspirasi kreativitas. Sebagai benda material, banyak naskah dilukis dan dihias dengan keindahan yang luar biasa, terutama naskah Bali dan Jawa. Pola-pola hias dengan rincian-rincian yang diambil dari berbagai sumber budaya, Hindu, Islam, dan Eropa berpadu menjadi bingkai yang dramatis untuk menyajikan sebuah teks. Segi ini dari naskah sama sekali belum diteliti dan diungkapkan seperti halnya pola dan ragam pribumi yang terdapat dalam tekstil Indonesia, seperti batik dan songket.

Keindahan verbal kita temukan dalam teks-teks prosa dan puisi, juga kearifan hidup yang sangat tinggi nilainya. Sebagai contoh beberapa bait di bawah ini, yang telah diterjemahkan bebas, membuktikan hal itu.

Yang telah waspada tentang tindakannya
 Mengupayakan tujuan dengan cerdas
 Akhirnya inti jiwanya
 Berkilau tanpa penghalang
 Yang menghalangi ditelitinya
 Maka rasa terbuka gamblang
 Terlihatlah segala masa
 Terhampar tanpa tepi
 Itulah yang disebut tapa mengikuti Hyang Sukma

Demikianlah manusia utama
 Ia biasa berakar dalam sunyi
 Setia saat
 Melatih dan mengasah budi
 Pada luhurnya ia memenuhi
 Tugasnya sebagai kesatria
 Halus budi bahasa dan rendah hati

Pandai mengambil hati sesamanya
Inilah yang dinamakan orang utama yang mengikuti agama

(*Serat Wedhatama* alih aksara oleh S.O. Robson)

Di bawah ini gambaran negeri yang sedang kacau karena perebutan kekuasaan, agak cocok untuk situasi Indonesia. Negara rusak dan kacau, istana menjadi hutan, medan menjadi rimba, mesjid besar rusak, negara terkena bencana.

Karena ada dua raja
Perampok berlaku bebas
Pencuri tidak dihalangi
Karena ada dua raja
Orang melihat kekalutan di mana-mana
Dan berkata, Aceh negeri tidak bertuan

(Hikayat Pocut Muhammad dari terjemahan G.W.J. Drewes)

Nukilan teks "La Galigo" menggambarkan keberangkatan Sawerigading dilihat oleh orang tuanya dengan penuh kesedihan. Putera mereka dibuang karena melanggar adat.

Maka dipasanglah
Alat Perlengkapan
perahu Welenreng Aju Bettaong
Bettawangnge telah bertiup
bayu disambut
semilir angin, semua telah lengkap
alat perlengkapan
Welenreng
Bagaikan burung-burung
beterbangan perahu ditopang layar
dibawa arus diiringi angin
diantar angin semilir
Bagaikan hendak putus desakan
nafas Oponna Luwuq
suami istri menyaksikan
layar pujaan hatinya
semua saling menggenggam
jari atas kepergian Sawerigading
serentak semua berlinang
air mata kerinduannya
memandang kepergian perahu

tumpangan lelaki
yang merajuk

(Sompeqna Sawerigading Lao ri Tana Cina, diterjemahkan oleh Nurhayati Rahman)

Daftar Pustaka

- Bekrend, T.F. 1995. *Serat Jatiswara: Struktur dan Perubahan dalam Puisi Jawa 1600--1930*. Jakarta: INIS.
- Drewes, G.W.J. 1979. *Hikajat Potjut Muhamat: An Acehnese Epic*. Edited and Translated. The Haque: Nijhoff.
- Ekajati, Edi S. 1980. *Naskah Sunda Lama*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kumar, Arm dan John Mc Glynn. 1996. *Illuminations: Writing Traditions of Indonesia*. Jakarta: The Lontar Foundation.
- Mujizah dan Maria Indra Rukmi. 1998. *Penelusuran Penyalinan Naskah-Naskah Riau Abad XIX: Kajian Filologi*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Rahman, Nurhayati. 1998. "Sompeqna Sawerigading Lao ri Tana Cina". Disertasi Doktor, Universitas Indonesia.
- Robson, Stuart. 1990. *The Wedhatama: An English Translation*. KITLV.
- Salmon, Claudine. 1981. "Literature in Malay by the Chinese of Indonesia: A Provisional Annotated Bibliography" dalam *Archipel* 3.
- Sancaya, IDG Windhu. 1994. "Geguritan Sampik". Tesis Magister, Universitas Indonesia.
- Sarwono, Sarwit. 1993. "Juarian Beringin: Suntingan Naskah dan Tinjauan Bentuk." Tesis Magister, Universitas Indonesia.
- Soedjatmoko. (Ed.) 1965. *An Introduction to Indonesian Historiography*. New York: Cornell University Press.
- Suryadi. "Naskah Tradisi Basimalin: Pengantar Teks dan Transliterasi." Hasil Penelitian, Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sutarga, Amir *et al.* 1972. *Katalogus Koleksi Naskah Melayu Museum Pusat*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Voorhoeve, P. 1955. "Critical Survey of Studies of The Languages of Sumatra". *KITLV*. Bibliographical Series: The Hague, Nijhoff.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C3
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 15.30--16.20
Judul Makalah	: Kesusastraan Indonesia Lama Sebagai Sumber Pembinaan Jati Diri Bangsa
Penyaji	: Achadiati Ikram
Pemandu	: Edwar Djamaris
Pencatat	: a. Nikmah Sunardjo b. Amran Purba
Peserta	: 70 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Titin, Universitas Padjadjaran, Bandung

a. Pertanyaan:

Saya mohon komentar Ibu tentang naskah *Tadjussalatin*. Ada di antara versinya dalam metrum Arab, tetapi terjemahannya dalam bahasa Melayu. Di pesantren ada naskah dari Arab dan Persia yang terjemahannya berbahasa daerah dan bertulisan Arab. Apakah ada kaitannya dengan pantun?

b. Jawaban:

Tadjussalatin adalah suatu sastra ajaran yang tersebar luas. Bahasa Arab dengan agama Islam bisa memasuki ilmu pengetahuan Indonesia dan mengalami perkembangan. Hal itu dapat dilihat dalam khazanah naskah di Perpustakaan Nasional. Adanya terjemahan naskah itu menunjukkan perkembangan tulisan dan terjemahan bahasa Arab dalam bahasa Melayu. Pertanyaan Ibu tentang pantun, menurut pendapat saya, pantun itu khas Melayu. Jika dilihat dari berbagai segi, pantun dan karya Arab tersebut tidak ada keterkaitannya.

2. Penanya: Wan Saifuddin, Universitas Sumatera Utara, Medan

a. Pertanyaan:

Di tempat kami saat ini lebih banyak dosen daripada mahasiswa sehingga perhatian kepada naskah sangat sedikit. Dalam mata kuliah telaah naskah ini belum tahu apa materinya. Apakah itu sudah ada kurikulumnya secara nasional?

- 1) Sampai mana target yang ingin dicapai dalam mata kuliah itu?
- 2) Dari beberapa naskah yang terkumpul, di mana naskah "Hikayat Deli" itu disimpan?

b. Jawaban:

Di Universitas Sumatera Utara dosen lebih banyak daripada mahasiswa sehingga tugas dosenlah untuk menarik perhatian mahasiswa karena sastra Melayu amat kaya bahannya. Kalau memang Saudara seorang dosen, dalam kurikulum

inti filologi tidak disebut, tetapi di universitas-universitas yang memiliki latar belakang sastra tertulis bisa dimasukkan dalam kurikulum. Hal itu merupakan pengembangan pengajar lokal. Tidak semua daerah mempunyai sastra tertulis, bisa juga sastra lisan. Jadi, harus dikembangkan kurikulumnya oleh dosen-dosen sastra. Kalau memang diperlukan kurikulum tertentu, kita bisa saling memberi informasi tentang teori, materi, dan metode dalam katalog-katalog yang ada. "Hikayat Deli" dapat diperoleh informasinya dalam katalog di Perpustakaan Nasional.

3. **Penanya:** Budi Suryadikara, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. **Pertanyaan:**

Saya ingin mengaitkan naskah *Hikayat Banjar* dan *Sejarah Melayu*. Dari mana asal-usul orang Banjar itu? Ditemukan batu bersurat di Marga Sari yang sama dengan yang ada di Palembang. Selain itu, di sana ada juga patung Budha. Apakah ada migrasi dari tanah Melayu (Palembang) ke Banjar? Misalnya, ditemukan kata yang hampir sama maknanya.

hanan (Palembang) = *halan* (Banjar)

Bagaimana pendapat Ibu tentang orang Melayu yang pindah dari Riau ke Tanah Malaka?

b. **Jawaban:**

Puncak-puncak perkembangan di suatu daerah itu tidak sama. Kita tidak bisa memberikan sejarah perkembangan bahasa Melayu yang kontinyu. Misalnya, di daerah Jambi berkembang suatu jenis sastra, tetapi ketika daerah itu dikalahkan, perkembangannya terhenti dan di tempat lain muncul. Akan tetapi, hal ini belum tentu mempunyai kontinuitas hubungan. Apakah itu bisa dikatakan berasal dari suatu tempat. Mungkin hal itu terjadi jauh sebelumnya, seperti dalam prasasti-prasasti yang Bapak kemukakan. Menurut Nard Boover, bahasa di Banjar itu merupakan pengaruh dari Melayu.

4. **Penanya:** A. Samin Siregar, Universitas Sumatera Utara, Medan

a. **Pertanyaan:**

Pada halaman 6 makalah Ibu terdapat istilah naskah Batak. Istilah itu akan diluruskan. Batak sekarang ini hanya untuk suku Toba, tetapi suku lain (5 suku) tidak mau disebut Batak. Pernyataan Ibu tentang hasil kesusastraan Batak yang kaya, sebenarnya dalam kesusastraan itu terdapat puisi bambu yang digunakan untuk menentang penjajahan. Mengenai puisi bambu ini sudah dijadikan disertasi oleh Uli Kosoh, orang Jerman yang sekarang ada di Selandia Baru. Salah satu naskah suku Angkola Mandailing ialah turi-turian dalam surat pustaha.

b. **Jawaban:**

Memang yang saya maksud dengan Batak adalah seluruh Tapanuli. Sebagai-

mana yang dikatakan Uli Kosoh itu, memang ada satu karya yang timbul pada masa penjajahan karena sudah ada kelompok yang tidak puas dengan penjajah. Tentang puisi bambu yang ditulis pada bambu, saya baru tahu.

II

Pencendekiaan Bahasa

KATA: PEMEKARAN KONSEP, PENGEMBANGAN MAKNA

Harimurti Kridalaksana
Universitas Indonesia

1. Pengantar

Angka, jumlah, atau kuantitas tampaknya selalu menjadi pokok pembicaraan antara orang awam dan pekerja dalam leksikologi dan leksikografi. Setiap kali kita selesai menyusun kamus, bertanyalah orang, "Berapa jumlah kata dalam kamus Anda itu?" Orang lain akan bertanya, dalam kamus yang lengkap, misalnya kamus standar dalam bahasa lain seperti kamus Oxford, Littré, van Dale, atau Brockhaus, berapa jumlah kata yang dimuatnya. Para guru akan bertanya tentang berapa besar kosakata yang harus dikuasai oleh siswa sekolah dasar, dan berapa pula oleh siswa tingkat pendidikan lain. Ternyata pertanyaan-pertanyaan itu sering diajukan juga oleh sesama ahli linguistik yang bidangnya bukan leksikologi atau leksikografi. Kiranya inilah kesempatan terbaik untuk meluruskan masalah-masalah itu.

Sebagai orang yang menekuni kedua bidang itu, rasanya tidak cukup apabila kita hanya menjawab bahwa jumlah entri dalam kamus adalah hasil akhir kerja kita, dan bahwa ketika menyusun kamus bukan angka yang dikejar, melainkan apakah kamus yang dirancangan itu sudah memenuhi kriteria bagi segala sesuatu yang akan dimuat dan apakah seluruh matriksnya sudah terpenuhi. Kiranya perlu juga kepada teman-teman sejawat itu dijelaskan beberapa konsep yang digunakan dalam penyusunan kamus, dan yang ada implikasinya dengan topik makalah ini, yang lebih menyangkut pengembangan bahasa daripada kerja praktis yang bersangkutan dengan penyusunan kamus.

Apabila orang awam bertanya tentang berapa jumlah kata dalam kamus, jelas ia mengacaukan istilah *kata* dengan *leksem*, *lema*, dan *entri*. Secara teknis *leksem* adalah satuan dasar leksikon atau kosakata; *kata* adalah satuan dasar gramatika, yang terjadi setelah leksem mengalami proses morfologis; *lema* atau *kata kepala* adalah satuan bahasa yang dijelaskan dalam kamus atau daftar kata; *entri* adalah keseluruhan lema dan penjelasannya dalam kamus.

Kalau orang awam menyebutkan jumlah kata dalam kamus, tentulah secara teknis yang dimaksud ialah jumlah lema dan/atau entri. Dan apabila seorang guru menyebutkan jumlah kata dalam perbendaharaan kata yang dikuasai oleh seorang anak, yang dimaksud tentulah jumlah leksem.

Apabila kita berbicara tentang jumlah lema dalam kamus, masuklah kita ke bidang metode dan teknik leksikografi, khususnya ke bidang yang disebut lematisasi (tentang metode dan teknik leksikografi lihat Svensen, 1993). Yang dimaksud dengan lematisasi ialah proses atau prosedur penentuan lema berdasarkan korpus bahasa yang telah disediakan. Korpus itu bisa berupa korpus bahasa yang berasal dari pelbagai jenis teks (yang diperoleh dengan kerja raksasa melalui pencuplikan dari konkordansi yang sekarang ini dilakukan dengan komputerisasi), atau berupa teks seorang penulis, sebuah dialek, atau suatu periode bahasa tertentu, atau berupa materi yang diperoleh

dari penelitian lapangan. Lema-lema mana yang dipilih dan bagaimana menyusun entrinya pada akhirnya hanyalah merupakan kebijakan redaksi semata-mata. Misalnya, salah satu kamus standar bahasa Inggris yang cukup populer (yang dimaksud dengan kamus standar ialah kamus yang dianggap mewakili penggunaan bahasa pada satu periode tertentu, yang kemutakhirannya dijamin dengan merevisinya setiap 20--25 tahun), yakni *The American Heritage Dictionary of the English Language*, edisi ketiga, 1996, dinyatakan mengandung 350.000 lema, dan *The Oxford Dictionary of the English Language*, edisi tahun 1996, konon mengandung lebih dari 500.000 lema. Pembaca tidak boleh lupa bahwa dalam kedua kamus itu termuat juga nama-nama tokoh (tokoh nasional Inggris dan Amerika, serta tokoh internasional, kontemporer dan historis, termasuk *Soeharto*), nama-nama geografis (lokal dan internasional, termasuk *Jakarta* dan *Bali*), dan ungkapan-ungkapan asing; belum lagi cara menyajikan satuan bahasa di dalamnya: sudah menjadi tradisi perkamusan Inggris memperlakukan idiom, kata majemuk, dan kata jadian lain sebagai lema. Itulah sebabnya, mengapa kamus Inggris standar begitu tebal-tebal. Ini berlainan dengan tradisi perkamusan Indonesia; kita ambil contoh *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, 1991, yang tidak memuat nama tokoh, nama geografis (kecuali bila merupakan kata biasa), sedangkan semua kata jadian tidak pernah menjadi entri, melainkan menjadi subentri.

Apabila hal-hal terakhir itu dimuat, jumlah lema kamus kita itu akan lebih dari 200.000 (dan bukannya sebesar 80.000 seperti sekarang ini). Memang inilah bagian dari kebijaksanaan redaksi. Redaksi harus lebih dahulu menentukan matriks ruang lingkup kamusnya: apa saja variasi bahasa yang akan dimuat, apakah akan memuat tokoh-tokoh (apa kriterianya), bagaimana dengan nama-nama geografis (bagaimana pula kriterianya), bagaimana pula dengan satuan bahasa, seperti leksem tunggal, kata majemuk, idiom, dsb. yang akan disajikannya, dan masih banyak soal lain yang harus ditetapkan sebelum terjun ke dalam penyusunannya. Yang penting bagi peserta Kongres Bahasa Indonesia ini ialah bahwa mereka tidak boleh bersikap rendah diri melihat kecilnya kamus besar kita itu. Dengan penuh kesederhanaan dan segala keterbatasan, serta dengan biaya yang sangat rendah, kita bisa menghasilkan kamus yang cukup memenuhi standar leksikografi internasional. Harus diakui bahwa sekarang ini yang harus kita lakukan ialah penyelenggaraan proyek perkamusan yang jelas kebijaksanaanannya dan rapi organisasinya, sebagaimana yang pernah diusulkan oleh penulis pada tahun 1974.

Masalah jumlah kosakata yang dikuasai oleh siswa pun merupakan kontroversi. Sudah lazim para guru dan orang awam mempersoalkan berapa jumlah kata yang sudah atau harus dikuasai oleh seorang anak pada tingkat pendidikan tertentu. Beberapa proyek telah dilancarkan untuk mendaftar kata (maksudnya leksem) yang harus dikuasai siswa sekolah dasar, siswa sekolah lanjutan, dan sebagainya. Bahkan, penulis makalah ini pada tahun 1970-an pernah membuat inventarisasi kata-kata yang diperkirakan secara pasif dikuasai siswa kelas 3 sekolah dasar. Upaya untuk mendalami masalah ini secara tuntas dirasakan sampai kini gagal, dan sulit dipertanggungjawabkan secara linguistik. Kita hanya diingatkan oleh Crystal, sebagai berikut.

"Averages, then, mean very little. Such figures 10-12000 (for someone who has just left school) and 20-25000 (for college graduate) are often cited in the media-- but are totally lacking in research credibility" (1995:123).

Ada tiga hal yang berhubungan dengan pengembangan kosakata yang sedikit banyak merupakan konsensus para penyelidik leksikologi, yakni sebagai berikut.

- (1) Kosakata aktif dan kosakata pasif harus dibedakan.
- (2) Kebiasaan sehari-hari seseorang mempengaruhi jumlah kata yang dikuasainya.
- (3) Penguasaan kosakata dapat dikembangkan dengan pelbagai cara, misalnya banyak membaca, menulis, dan berdiskusi.

Dengan meluruskan pelbagai paham itu, kiranya kita dapat masuk ke dalam topik makalah ini.

Adalah tesis makalah ini bahwa leksikon atau kosakata merupakan perbendaharaan rohani suatu bangsa, dan bahwa perbendaharaan itu tidak bersifat statis, melainkan dinamis dan dalam pembinaan bahasa dapat dilaksanakan program untuk mengembangkannya. Pengembangan kosakata adalah suatu keharusan bagi upaya memperkaya kebudayaan. Butir-butir kosakata itu tentu saja leksem, tetapi leksem itu sebenarnya hanyalah wujud yang mewakili konsep penutur bahasa tentang dirinya dan alam sekitarnya yang tersimpan dalam akal budinya. Jadi, kekayaan konsep adalah kekayaan budaya suatu bangsa.

Tiga program disarankan di sini sebagai upaya untuk mengembangkan kosakata dalam bahasa Indonesia, yakni:

- 1) pengembangan leksem menjadi kata melalui gramatikalisasi,
- 2) penajaman konsep melalui sistem semantis,
- 3) perluasan konsep melalui pertemuan dengan kebudayaan lain.

2. Program Gramatikalisasi

Setiap bahasa mempunyai piranti bahasa untuk mengembangkan konsep, yakni pembentukan kata. Dalam proses pembentukan kata, leksem sebagai unsur leksikon diolah menjadi kata melalui proses morfologis berikut:

- i. derivasi zero
- ii. afiksasi
- iii. reduplikasi
- iv. komposisi
- v. abreviasi
- vi. derivasi balik
- vii. metanalisis
- ix. kombinasi proses

Kesembilan proses itu, dengan pelbagai tingkat keproduktifan, banyak kasusnya dalam bahasa Indonesia. Terserahlah, apakah semuanya akan diakui sebagai bagian dari proses morfologis "resmi" dalam bahasa kita. Yang pasti, kesembilan proses itu dapat menjelaskan terjadinya kata secara alamiah dalam bahasa kita. Lebih daripada itu, proses pembentukan kata dalam bahasa kita merupakan siklus sehingga leksem

yang sudah mengalami gramatikalisasi, setelah menjadi kata, dapat masuk kembali ke leksikon, melalui proses leksikalisasi. Lebih lagi daripada itu, frasa yang merupakan gabungan kata, bukan sekadar gabungan leksem (karena telah mengalami proses itu) bisa mengalami proses pembentukan kata juga. Singkatnya, proses pembentukan dalam bahasa kita--dengan rumpang di sana sini--merupakan sistem yang terpadu.

Walaupun telah secara mendalam dipaparkan dalam karya penulis (1996), sebagai usaha untuk mengingatkan peserta Kongres Bahasa ini, uraian singkat tentang kesembilan proses itu mungkin ada gunanya.

Derivasi zero mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Afiksasi mengubah leksem menjadi kata setelah mendapat afiks, yang dalam bahasa kita cukup banyak jumlahnya. Reduplikasi mengubah leksem menjadi kata setelah mengalami reduplikasi, entah dwipurwa, entah dwilingga, entah dwilingga salin suara, entah dwiwasana. Komposisi atau pemajemukan mengubah gabungan leksem menjadi satu kata, yakni kata majemuk (dengan demikian, jelaslah mana frasa yang merupakan gabungan kata dan mana kata majemuk yang merupakan satu kata). Abreviasi mengubah leksem atau gabungan leksem menjadi kependekan (ada proses pemendekan, pemenggalan, akronimi, kontraksi, dan lambang huruf). Derivasi balik merupakan proses yang dapat menjelaskan mengapa ada bentuk *dipungkiri* yang seharusnya *dimungkiri*. Metanalisis merupakan proses yang dapat menjelaskan bentuk-bentuk dengan *pramu-* dalam *pramugari*, *pramusiwi*, atau dapat menjelaskan bentuk yang secara historis "salah" seperti bentuk *kembara*, yang seharusnya *embara*, dan sebagainya. Semua proses itu dapat berkombinasi sehingga ada bentuk seperti *perkeretaapian*, *kemurahan hati*, *di-KEPRES-kan*, *ditilang*, dan sebagainya. Lebih daripada itu, proses pembentukan kata juga dapat dialami oleh frasa; maka terjadilah bentuk seperti *ketidakadilan*, *dipulau-burukan*, dan sebagainya.

Pembentukan kata dalam bahasa kita merupakan sistem alamiah yang telah berhasil untuk mengembangkan makna leksem; dengan demikian, pembentukan kata itu telah memekarkan konsep penutur bahasa mengenai dirinya dan alam sekitarnya. Hal itu terserahkan kepada peserta Kongres ini untuk memanfaatkannya dalam pembinaan bahasa kita (lihat juga pengamatan Teeuw, 1998).

3. Program Semantik

Ada tiga aspek semantik yang relevan dalam program ini, yakni konteks, relasi, dan konfigurasi. Konteks tampak dalam polisemi, denotasi, tabu, dan sebagainya; relasi terdapat pada sinonimi, homonimi, dan sebagainya; konfigurasi terdapat pada medan makna, hierarki, dan sebagainya.

Setiap pengguna kamus pasti melihat bahwa penjelasan makna bagi lema sebagian besar tidak hanya satu. Secara teknis, dinyatakan bahwa leksem yang disajikan sebagai lema itu mengandung polisemi. Adanya polisemi itu menyiratkan bahwa leksem itu mewujudkan makna melalui konteks. Jadi, tiap konteks menyumbangkan satu bagian makna. Leksem *berat* dan *jalan* merupakan contoh leksem yang cukup lumayan poliseminya. Leksem *daya*, *selamat*, dan *tukang* merupakan leksem yang sangat produktif karena dapat bergabung dengan leksem lain. Kedua kasus itu memperlihatkan

bahwa konteks menonjolkan aspek makna yang merupakan juga aspek konsep.

Di samping konteks yang memberi aspek makna, leksem sendiri dapat berkembang karena adanya perbedaan denotasi dan konotasi, adanya pengembangan makna melalui metafora, adanya tabu dan eufemisme, adanya makna takzim dan akrab, dan sebagainya.

Para peneliti semantik mencatat bahwa leksem dalam suatu leksikon tidaklah berdiri sendiri, tetapi ada dalam relasi dengan leksem-leksem lain. Leksikon dianggap sebagai suatu sistem yang terjadi dari banyak subsistem. Dalam tiap subsistem itu leksem dihubungkan satu sama lain dengan relasi makna. Sesuatu yang kurang disadari banyak orang ialah bahwa relasi makna itu merupakan refleksi relasi konsep yang disimpan oleh penutur bahasa dalam sistem sarafnya. Penyadaran akan peran relasi makna merupakan juga upaya memperkaya konsep.

Relasi makna yang bisa bersifat sintagmatis, seperti kolokasi, atau paradigmatis, seperti sinonimi, kosokbali, kelengkapan, antonimi juga menunjukkan bahwa leksem mempunyai aspek makna yang apabila dipahami penutur bahasa, dapat memperkaya perbendaharaannya. Belum lagi konfigurasi makna, seperti medan makna, hierarki, taksonomi, dan metonimi (lihat tentang semua konsep itu dalam Cruse, 1986 dan Lyons, 1996).

Pengembangan konteks semantis, relasi semantis, dan konfigurasi semantis dapat dilaksanakan dengan penyusunan buku referensi seperti kamus sinonimi atau tesaurus. Dewasa ini dalam dunia bahasa Inggris diterbitkan buku rujukan lain yang berjudul *Word Menu* atau *The Order of Things* yang menyajikan medan makna, taksonomi, hierarki, dan metonimi pelbagai aspek kehidupan. Sudah saatnya kantor seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merancang buku-buku rujukan semacam itu untuk mendukung pengembangan kosakata bahasa kita.

4. Program Kontak Budaya

Bahwasanya kontak budaya, khususnya melalui proses peminjaman, telah memperkaya kosakata bahasa Indonesia, kiranya tidak perlu ditekankan lagi. Lepas dari fakta bahwa peminjaman menyumbangkan peningkatan kuantitas kosakata kita, perlu juga diteliti perubahan-perubahan konstelasi makna leksem yang diakibatkannya, yaitu apakah ada penyempitan atau perluasan makna, perubahan nilai yang terjadi, dan sebagainya baik pada yang meminjamkan maupun pada yang meminjami. Kita sudah menggunakan kata *kepercayaan* (yang nota bene leksemnya juga merupakan pinjaman); kemudian masuklah kata *kredibilitas* dan *bonafiditas*. Tentu, terjadilah perubahan pada relasi makna *kepercayaan* dengan leksem atau kata lain. Beberapa tahun yang lalu masuklah kata *hostes* dalam bahasa kita; pembaca tahu bahwa nilai makna kata itu berlainan dari nilai makna kata asalnya *hostess*. Banyak orang Indonesia yang menggunakan kata Inggris *you* dalam berbahasa Indonesia, tetapi pasti yang bersangkutan tidak akan menggunakannya untuk menyapa ayah ibunya. Maka, terjadilah perubahan konfigurasi makna tutur sapa yang digunakan orang itu.

5. Penutup

Pengkajian tentang pengaruh kontak budaya dalam kosakata bukan hanya akan memberi gambaran tentang proses pengayaan kosakata kita, melainkan juga dapat menunjukkan bagaimana pelbagai dimensi makna mendinamisasi perbendaharaan konsep dalam kebudayaan kita.

Daftar Pustaka

- The American Heritage Dictionary of the English Language*. 1996. Edisi ketiga. Boston: Houghton Mifflin.
- Cruse, D.A. 1986. *Lexical Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, David. 1995. *The Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*. 1991. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Kridalaksana, Harimurti. 1974. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Peranannya dalam Pengembangan Bahasa Indonesia" *Bahasa dan Sastra 1:1*.
- , 1996 [1989]. *Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Gramedia.
- Lyons, John. 1996. *Linguistic Semantics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Svensen, Bo. 1993. *Practical Lexicography: Principles and Methods of Dictionary Making*. Oxford: Oxford University Press.
- Teeuw, A. 1998. "De Ontwikkeling van een Woordenschat: het Indonesisch 1945-1995". Amsterdam: Koninklijke Nederland Akademie van Wetenschappen.

LAPORAN SIDANG

Jenis Sidang	: Kelompok B2
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 14.20–15.00
Judul Makalah	: Kata: Pemekaran Konsep, Pengembangan Makna
Penyaji	: Harimurti Kridalaksana
Pemandu	: Agustiar Syah Nur
Pencatat	: a. K. Biskoyo b. Marida G. Siregar
Peserta	: 160 orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** D. Edi Subroto, Universitas Sebelas Maret, Surakarta

a. **Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana kita menentukan lema kalau kita menghadapi semacam peribahasa, misalnya *besar pasak daripada tiang* atau ekspresi tetap seperti *sekali merdeka tetap merdeka*.
- 2) Saya meminta kejelasan dari Pak Hari tentang leksem. Dalam buku Pak Hari ada *menulis, ditulis, penulis, tulisan* semuanya dibentuk dari leksem *tulis* berkaitan dengan *inflectional and derivational morphology* yang dikemukakan Matthews.

b. **Jawaban**

- 1) Mengenai peribahasa, kamus memang tidak akan memuat peribahasa sebagai lema karena kamus, secara teknis, merupakan catatan kekayaan kata. Jadi, satuan bahasa berupa peribahasa itu tidak dimasukkan ke dalam kamus. Akan tetapi, dalam tradisi perkamusan Indonesia yang diawali oleh Poerwadarminta peribahasa digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan lema. Oleh karena itu, kamus itu agak tebal dan membantu orang untuk memahami peribahasa. Jadi, tidak perlu dibuat daftar peribahasa khusus. Saya cenderung akan memisahkan peribahasa sebagai *appendiks* dari kamus itu. Jika kita memasukkan peribahasa dalam kamus, entri mana yang kita gunakan? "Orang kamus" tentu ingin memasukkan semua kata dan peribahasa itu ke dalam kamus. Dengan kata lain, kita tidak hanya memasukkan kata "penting" dalam kamus itu. Hal itu merupakan salah satu kesulitan karena termuatnya peribahasa dalam kamus itu menjadi sangat subjektif. Misalnya, peribahasa *ada gula ada semut*, harus dimasukkan ke dalam entri apa? Peribahasa itu boleh dimasukkan ke dalam entri *ada*, boleh ke dalam entri *gula* dan boleh pula entri *semut*. Itulah kesulitan kalau kita memasukkan peribahasa ke dalam kamus. Oleh karena itu, peribahasa dimuat sebagai contoh pemakaian kata. Kamus Peribahasa sebaiknya dibuat tersendiri, seperti kumpulan peribahasa Sutan Pamuncak atau

peribahasa Minangkabau. Yang penting adalah bahwa setiap kata yang terdapat dalam peribahasa itu harus ada dalam entri.

- 2) Mengenai leksem, saya tidak melihat adanya infleksi dan derivasi. Tampaknya dalam bahasa tidak ada bedanya morfem derivatif dan morfem inflektif. Kini setelah bertahun-tahun, saya mendapat dukungan dari morfologi generatif. Mark Aronof dalam bukunya terakhir *Morphology by Itself* mengatakan bahwa tidak perlu dibedakan karena *derivational morphology* dan *inflectional morphology* itu merupakan satu kesatuan. Saya tidak perlu membedakan macam-macam leksem seperti yang dikemukakan oleh Matthews. Leksem adalah satuan dasar dari leksikon dan satuan dasar inilah yang masuk ke dalam gramatika, diolah dalam sistem morfologi, dan jadilah kata. Gambaran ini lebih sederhana daripada gambaran Matthews. Pendirian saya ini masih terbuka untuk diperdebatkan.

2. Penanya: Ikhwan M. Said, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

- 1) Patokan apa yang dipakai untuk menyusun kosakata dalam kamus?
- 2) Patokan apa pula yang dipakai untuk menyusun deskripsi entri? Antara jenis kamus yang satu dan kamus yang lain deskripsinya berbeda-beda baik pada tataran entri maupun pada tataran subentri?

b. Jawaban

- 1) Patokan yang dapat digunakan untuk menyusun kosakata dalam kamus bergantung kepada jenis kamus tersebut. Kamus disusun dengan berorientasi pada pengguna. Siapa yang akan menggunakan daftar kosakata itu: anak sekolah dasar, guru, mahasiswa, atau sarjana? Terlebih dahulu kita tentukan penggunanya itu. Setelah itu, baru kita membuat semacam parameter. Oleh pengguna kamus itu akan dipakai untuk apa? Buatlah semacam daftar ciri-ciri kamus dan ciri-ciri kosakata itu. Ciri-ciri itu dipakai sebagai pegangan untuk memilih kata-kata yang akan kita masukkan di dalam perbendaharaan kata atau dalam kamus yang akan kita susun. Jadi, persiapan penyusunan kosakata cukup berat. Jangan kita langsung membuat susunan alfabetis dari kata-kata yang kita susun, tetapi kita pastikan dahulu parameter yang akan dijadikan pegangan kita.
- 2) Kemudian, uraian tentang patokan penyusunan entri cukup panjang. Ada sebuah buku yang dapat Bapak-Ibu lihat, yaitu yang saya sebut dalam daftar pustaka ini *Practical Lexicography*, sebuah buku yang praktis untuk menyusun kamus. Buku ini adalah buku yang agak mutakhir, tahun 1996. Juga harus kita pastikan kamus yang akan kita buat, kamus monolingual atau kamus bilingual. Kamus monolingual lebih sulit daripada kamus bilingual. Kesulitan pendeskripsian pun sangat tergantung pada lemannya. Jika kata itu kata biasa, seperti *berjalan, lari, tidur*, itu pendeskripsiananya lebih sulit. Kini ada pedomannya. Dalam teknik leksikografi sekarang, sebelum

kita menyusun kamus kita harus menyusun lebih dahulu *defining vocabulary* (kosakata yang dipakai untuk membuat definisi) agar kita tidak membuat definisi yang berputar-putar. *Defining vocabulary* dapat dipakai untuk memotong sirkulasi definisi. Pendeskripsian kata-teknis, nama tokoh, nama geografis akan lebih mudah dilakukan daripada kata biasa.

3. **Penanya:** Masrurah Mohtar, Universitas Muslim Indonesia (UMI), Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Strategi apa yang dapat kita lakukan agar kita dapat memasyarakatkan kata, seperti *sangkal* dan *mangkus* agar kata itu dapat diterima dalam masyarakat?

b. **Jawaban**

Ibu Masrurah, mengenai pemasyarakatan kata *sangkal* dan *mangkus* tidak perlu dirisaukan karena kata-kata itu sudah ada dalam kamus. Minggu lalu ada wawancara Sudjoko dengan *Kompas*. Beliau menyayangkan penolakan kehadiran kata *sangkal* dan *mangkus*. Seingat saya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak pernah menolak pemakaian kata itu karena kata-kata itu ada dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Kamus merupakan perbendaharaan kata. Seberapa populernya kata itu untuk mengganti *efisien* dan *efektif*, itu soal lain. Memang ini termasuk selera budaya sekarang ini. Orientasi kita harus kita arahkan ke mana, ke masa lampau atau ke masa depan? Saya sebagai orang kamus, saya akan bersikap netral.

4. **Pertanyaan:** K.M.A.M. Usop, Universitas Palangkaraya

a. **Pertanyaan:**

- 1) Pada saat memasukkan konsep/arti sebuah kata, akan terjadi perdebatan mengenai makna-makna yang disetujui dan yang tidak. Konsep kata *mantan*, misalnya, tidak jelas karena di samping dipakai untuk hal-hal yang menghormati, juga dipakai untuk hal-hal yang negatif. Mohon tanggapan Bapak.
- 2) Adakah hubungan antara konsep dan aksara kata-kata dalam bahasa Jepang. Maksudnya, apakah orang dapat mengetahui konsep sebuah kata melalui bentuk aksara dalam bahasa Jepang?

b. **Jawaban:**

- 1) Kata *mantan* memang muncul dalam bahasa kita untuk mengganti kata *bekas*. Pada suatu tulisan seorang mahasiswa Sumatera Selatan yang dimuat dalam majalah *Pembinaan Bahasa Indonesia* terbitan HPBI diusulkan supaya kata *bekas* jangan dipakai lagi karena kata itu lazim dipadankan dengan kata *mantan* dalam dialek-dialek di Sumatera Selatan. Tiba-tiba, kata *mantan* muncul pada sidang DPR. Dan, atas dukungan anggota DPR yang mengatakan bahwa kata itu baik kita gunakan, muncullah kata *mantan* dalam banyak pemakaian sehari-hari. Pada bahasa-bahasa daerah lain

ada yang hampir serupa dengan kata *mantan*. Yang perlu diingat adalah penutur lebih pintar daripada bahasa. Penutur mempunyai kebebasan mutlak atas miliknya, yaitu bahasa. Jadi, kita sebagai penutur dapat membuat apa pun mengenai bahasa termasuk pengembangan makna. Sebenarnya, kata *mantan* ini pertama kali dipakai khusus untuk pejabat kalau kita melihat penggunaannya dalam bahasa-bahasa daerah itu. Akan tetapi, karena orang Indonesia sangat kreatif maka digunakanlah kata *mantan* untuk *mantan istri*, *mantan pacar* dan segala macam yang sejenis itu. Lalu, di mana tugas ahli kamus? Kita sebagai ahli kamus tentu mencatat "apa adanya", tetapi ada sebagian orang yang tidak setuju karena orang membuat kamus itu harus sedikit preskriptif. Baik tidak baik, senang tidak senang kalau itu merupakan bagian dari kekayaan kita, catatlah itu. Kita harus memandangnya secara humanistis pula.

- 2) Mengenai aksara dalam bahasa Jepang, apa aksara itu bisa mengungkapkan konsep? Hubungan antara aksara (terutama yang sifatnya morfemis, seperti aksara Cina, dan yang bersifat silabis, seperti huruf Jepang) dengan konsep dengan makna sudah pernah diteliti. Ada orang yang mengatakan bahwa memang ada hubungan. Linguistik sekarang mempelajari bahasa sebagai fenomena auditif. Kalau kita bicara mengenai morfem, hal itu auditif sifatnya, leksem auditif pula. Akan tetapi, kita harus memahami pula konsep orang yang memandang morfem secara visual. Jadi, morfem dalam bahasa Cina itu morfem visual. Mengenai morfem visual pernah dibicarakan oleh Bolinger dalam salah satu bukunya. Akan tetapi, dalam tradisi linguistik kita, hal itu tidak pernah dikembangkan. Apabila Ibu dan Bapak sekalian belajar bahasa Cina atau bahasa yang menggunakan aksara-aksara khas itu, Ibu dan Bapak akan bisa menerima bahwa ada yang namanya morfem visual di samping morfem auditif.

5. Pertanyaan: Hajah Noresah binti Baharom, Dewan Bahasa dan Pustaka
Malaysia, Kuala Lumpur

a. Pertanyaan:

Ada sistem kamus yang tidak memasukkan idiom atau kata yang berafiks sebagai lema, dan sebagainya yang tidak berlaku. Apakah implikasinya kalau kita mengikuti jejak yang begitu.

b. Jawaban:

Jika metode dan teknik yang digunakan dalam kamus bahasa Inggris dipakai untuk menyusun kamus kita, maka akan terjadi perubahan besar. Kita mengetahui bahwa memahami pembentukan kata dalam bahasa kita agak berlainan dengan pembentukan kata dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris jumlah prefiksnya terbatas, lebih banyak sufiks yang apabila disusun secara alfabetis tidak akan menyulitkan bagi pengguna kamus. Akan tetapi, dalam bahasa kita banyak prefiks, banyak sufiks, banyak konfiks sehingga jika masing-masing

dijadikan lema, akan terjadi kekacauan di dalam susunannya. Menurut hemat saya, kata majemuk harus keluar dan harus menjadi lema. Idiom juga bisa dijadikan lema, tetapi kata berimbuhan tetap menjadi sublema dan menjadi sub-entri karena jika digunakan sebagai lema akan terjadi kekacauan dalam susunannya.

6. Pertanyaan: Kosmansyah, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. Pertanyaan:

- 1) Berapa batas minimal jumlah entri dan subentri sebuah kamus--terutama kamus dwibahasa--termasuk juga "kamus besar" dan "kamus kecil". Leksikon yang ditawarkan lebih banyak daripada kamus sehingga saya bingung, apakah yang saya buat ini leksikon atau kamus.
- 2) Apakah Bapak menulis kamus singkatan atau akronim karena saya lihat akronim tumbuh subur, seperti kata Pak Muradi ada *Sah Mendagri* dan baru saya tahu itu adalah singkatan dari *staf ahli menteri dalam negeri*. Dulu ada kamus singkatan yang dibuat oleh Amirzar.

b. Jawaban:

- 1) Pak Kosmansyah, mengenai batas minimum jumlah entri dan segala macam tadi sudah saya katakan bahwa hal itu bersangkut paut dengan parameter yang kita tetapkan. Jadi, lebih dahulu kita menentukan parameter, baru kita dapat menentukan berapa besar leksikon atau kamus yang akan kita susun. Kita jangan melihat aspek lahiriahnya dan jangan melihat aspek kuantitas karena keduanya merupakan hasil akhir, tetapi yang penting kita lihat adalah bagaimana rancangan kita itu. Kemudian, mengenai istilah *leksikon*. Leksikon dalam bahasa Jerman maknanya lebih luas daripada leksikon dalam bahasa Inggris. Jadi, leksikon dalam bahasa Jerman dapat ribuan halaman dan berjilid-jilid. Karena kita banyak menggunakan perbendaharaan dari bahasa Inggris, kita menganut prinsip leksikon dari Inggris dalam arti kamus dalam bentuk terbatas.
- 2) Mengenai singkatan, saya memang tidak pernah membuat konsep singkatan, tetapi ada dua kamus singkatan/akronim yang sekarang ini beredar, yaitu karangan Agata Parsidi, dan yang kedua karangan Winarno. Keduanya membuat kamus singkatan akronim yang lengkap dalam bahasa Indonesia mutakhir ini. Memang, masalah akronim dan singkatan satu hal yang sangat menarik. Hal itu merupakan suatu upaya juga untuk mengembangkan kosakata karena kita tidak bisa membuat kosakata yang sangat baru sekarang.

7. Pertanyaan: Sumarsono, Universitas Udayana, Singaraja

a. Pertanyaan:

Dalam menyusun kamus bagaimana Bapak Harimurti menyikapi konsep motivasi dari Stephen-Ullman?

b. Jawaban:

Memang, Stephen-Ullman berbicara tentang kontak budaya, etimologi. Apa yang dikemukakan oleh Pak Sumarsono itu benar bahwa etimologi diperhatikan. Kami di Universitas Indonesia sedang membuat kamus etimologi. Mudah-mudahan pertengahan tahun depan selesai, tetapi baru satu bagian, yaitu kata-kata pinjaman dari luar. Setelah itu, kami akan menyusun kamus kata pinjaman dari dalam (pengaruh Jawa, Sunda, Minangkabau). Setelah itu, kata-katanya diteliti tentang apa yang disebut "asli". Yang penting adalah bahwa pengetahuan tentang asal-muasal kata dipahami bagaimana bahasa kita berkembang, bagaimana alam kita berkembang dan perkembangan yang terjadi karena ditantang dari luar. Mengenai motivasi, hal itu juga merupakan bagian dari kajian mengenai kata.

PENGEMBANGAN ISTILAH DALAM ERA GLOBALISASI

Adi Sunaryo dan Sri Sukei Adiwimarta
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Kondisi Kebahasaan

Perkembangan bahasa Indonesia setakat ini memperlihatkan pertumbuhan yang pesat. Kosakata dari berbagai disiplin ilmu cukup mewarnai corak fungsi bahasa Indonesia sebagai pendukung perkembangan ilmu dan teknologi. Konsep dan gagasan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangannya dapat diungkapkan dalam bahasa Indonesia walaupun kita tidak dapat mengingkari bahwa pertumbuhan kosakata Indonesia dipengaruhi oleh pertumbuhan konsep dan gagasan ilmu dan teknologi modern yang hidup dalam percaturan internasional. Keadaan semacam itu wajar terjadi di dalam pertumbuhan semua bahasa akibat terjadinya kontak antarbahasa dan budaya. Namun, dalam hal itu penerapan kaidah penyerapan yang dituangkan di dalam dua buku pedoman umum tentang ejaan dan istilah harus dilakukan secara baik dan konsisten sesuai dengan hakikat dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Satu hal yang sangat menggembirakan kita adalah terciptanya istilah *sasrabahu* (oleh Ir. Sudiyatmo) untuk konstruksi bangunan jalan layang dan *pondasi cakar ayam* (oleh Ir. Cokorde Raka Sukawati) untuk konstruksi bangunan bertingkat yang merupakan hasil pemikiran asli putra Indonesia. Kondisi kebahasaan semacam itu mencerminkan kemantapan fungsi dan kemampuan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi ilmiah. Hal itu menunjukkan kepada kita bahwa pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) sangat bergantung pada peran dan mutu bahasa sebagai prasarana dan sarana pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Tanpa bahasa dalam fungsinya sebagai sarana komunikasi, gagasan dan konsep istilah baru yang muncul di dalam pertumbuhan iptek tidak mungkin dapat merambah dan menyebar luas ke dalam kehidupan masyarakat ilmiah. Perkembangan iptek dan bahasa itu menunjukkan kesejajaran yang saling mendukung. Jadi, perkembangan bahasa Indonesia itu selalu sejalan dengan perkembangan iptek. Dalam pada itu, secara implisit terlihat bahwa bahasa Indonesia mampu mengemban tugas sebagai sarana pembangunan bangsa (Sunaryo, 1993; 1994). Di samping itu, bahasa Indonesia sebagai produk budaya yang berfungsi sebagai sarana komunikasi juga berfungsi sebagai sarana pendukung pertumbuhan dan perkembangan produk-produk budaya (Sunaryo, 1987).

2. Kondisi Peristilahan

Peristilahan di Indonesia, sesuai dengan pertumbuhan ilmu dan teknologi, berkembang sangat pesat. Hal itu ditandai oleh munculnya berbagai istilah dalam berbagai disiplin ilmu yang diikuti pula oleh terbitnya berbagai kamus dan daftar istilah ilmu dasar (biologi, kimia, fisika, dan matematika) dan disiplin ilmu lain (botani, kehutanan, pertanian, linguistik, pariwisata, administrasi, ekonomi, akuntan, manajemen, dan sebagainya).

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan bahasa, khususnya dalam pemba-

kuan istilah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menjalin kerja sama dengan pakar berbagai bidang ilmu, baik di lingkungan perguruan tinggi maupun di lembaga lain, kerja sama kebahasaan antarlembaga, perusahaan nasional ataupun swasta, dan bahkan kerja sama antarnegara. Kerja sama antarnegara yang berbahasa serumpun, yaitu bahasa rumpun Melayu, telah dirintis sejak tahun 1972. Kerja sama itu diawali oleh kerja sama antara negara Indonesia dan negara Malaysia dalam wadah *Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia* (selanjutnya disingkat *MBIM*). Pada tahun 1985 negara Brunei Darussalam secara resmi ikut bergabung dalam kerja sama kebahasaan itu sehingga nama wadah kerja sama itu diubah menjadi *Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia* (selanjutnya disingkat *Mabbim*). Ketiga negara anggota itu sepakat mengadakan persidangan sekali setahun di negara anggota secara bergiliran. Hasil *Mabbim* antara lain adalah dua buku pedoman, yaitu *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (secara resmi diberlakukan pada tahun 1975 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Agustus 1975 Nomor 0196/U/1975). Buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan* itu kemudian disempurnakan lagi pada tahun 1987 dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 9 September 1987 Nomor 0543a/U/1987 dan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah* pada tanggal 11 Agustus 1988 Nomor 0389/U/1988. Selain kedua buku pedoman umum itu, telah dihasilkan pula glosarium dan kamus bidang ilmu. Pada tahun 1993 berhasil diterbitkan glosarium ilmu dasar (fisika, matematika, kimia, dan biologi) yang mencakup ± 50.000 istilah. Hingga kini istilah yang telah disahkan dalam Sidang *Mabbim* sebanyak 204.078 istilah dari 107 bidang ilmu, sedangkan jumlah kamus yang telah dihasilkan sebanyak 40 kamus bidang ilmu.

3. Tantangan dalam Era Globalisasi

Arus globalisasi melaju cepat melanda berbagai negara di dunia. Kecepatan arus itu diikuti dengan munculnya berbagai konsep dan gagasan baru yang pasti akan menyentuh dan merambah kehidupan iptek, termasuk di Indonesia. Pertumbuhan iptek erat kaitannya dengan perkembangan bahasa yang berfungsi sebagai sarana pendukung pertumbuhan iptek. Arus pasar bebas akan berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Kosakata dan istilah niaga dan teknologi canggih serta kosakata bahasa asing akan membanjiri kehidupan pemakaian bahasa, termasuk pemakaian bahasa Indonesia. Dampak kehidupan pasar bebas akan melanda pertumbuhan bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, arah perkembangan bahasa Indonesia dalam era globalisasi itu harus diantisipasi dan diarahkan kepada pertumbuhan kecendekiaan bahasa, yaitu pemodernan bahasa Indonesia. Pemodernan bahasa mencakup pemekaran kosakata dan pengembangan laras bahasa serta bentuk wacana (Moeliono, 1985). Ciri kemodernan bahasa itu ditandai oleh sifat terbuka dan bersistem dalam menerima pengaruh dari luar, cermat dan efisien dalam penggunaan kata dan istilah, mantap dalam konsep makna, tidak bersifat taksa, serta cermat dalam pemanfaatan kata dan maknanya sesuai dengan konteks dan pemakaiannya. Untuk itu, pemakai bahasa Indonesia harus mampu mengantisipasi dan memperkuat jati diri dengan menyediakan perangkat rambu-

rambu kaidah, khususnya tentang penyerapan kosakata dan istilah asing dan daerah dalam titian perkembangan dan pengembangan serta pembinaan bahasa Indonesia di era globalisasi.

4. Bahasa Indonesia Menatap Masa Depan

Hakikat bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu tumbuh dan berkembang dalam kontak bahasa dan budaya lain sehingga tidak dapat diingkari bahwa kosakata asing dan daerah juga ikut mewarnai perwujudan bahasa Indonesia, baik sebagai sarana komunikasi nasional dan regional maupun sebagai bahasa resmi negara. Keberadaan bahasa Indonesia yang serupa itu harus betul-betul disadari pemakainya sehingga laju perkembangan dan pertumbuhan bahasa Indonesia dalam era globalisasi tidak terbentur oleh riak-riak kecil yang menghambat pertumbuhan bahasa Indonesia menjadi sarana komunikasi internasional. Pemakai bahasa Indonesia harus mampu melihat peluang pasar dalam dunia komunikasi dengan tidak mengorbankan jati diri bahasa dan martabat bangsa Indonesia. Untuk itu, perlu adanya kesepakatan niat dan tekad melakukan pembenahan diri dengan menyiapkan kemasan yang apik dan menarik bagi konsumen. Masa lalu adalah cermin bagi masa kini untuk menatap dan mencapai masa depan yang lebih baik.

Tantangan dan benturan dalam perkembangan bahasa Indonesia, khususnya dalam peristilahan, harus dijadikan pelajaran dalam menetapkan garis haluan kebhasaan di Indonesia. Membanjirnya kosakata asing dan daerah sempat meresahkan pengguna bahasa Indonesia sehingga hasil pengindonesian istilah asing dan munculnya istilah baru dari bahasa daerah dirasakan lebih asing dari bahasa asing atau bahasa Indonesia. Kenyataan semacam itu dapat dimengerti jika kita memahami cara dan tingkat berpikir pemakai bahasa. Namun, bagaimanapun juga pemakai bahasa Indonesia harus berupaya mencerdaskan diri dengan meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Pemunculan kosakata baru dari para cendekiawan atau dari siapa pun yang memunculkannya/menyumbangkannya selalu dilandasi oleh pemikiran yang positif untuk memberikan yang terbaik dalam pengembangan bahasa. Oleh karena itu, masyarakat pemakai bahasa Indonesia tidak perlu cemas karena pada akhirnya masyarakat pemakai bahasa jualah yang memegang peran dalam pemyarakatan kosakata dan istilah baru itu. Sebagai contoh, kata *kiat*, *sangkal*, dan *mangkus* yang pernah dimunculkan dan dipasarkan sebagai pengganti kata *seni* (bahasa Inggris *arts*), *efisien*, dan *efektif* ternyata kurang berterima di hati masyarakat pemakai bahasa. Sebaliknya, kata *canggih* sebagai padanan kata Inggris *sophisticated* dapat berterima di hati masyarakat pengguna bahasa Indonesia, bahkan terjadi pula pengembangan makna seperti pada pemakaian kalimat "*Wah, canggih lho pacarnya!*" Selain itu, ada pula kata yang berterima di masyarakat, yaitu *implisit*, tetapi pengembangan maknanya tidak tepat seperti yang terlihat pada kalimat "*Dua remaja sejoli itu berpacaran secara implisit di balik semak di Ancol*". Pengembangan makna kata seperti pada kata *implisit* itu justru tidak menunjang keberhasilan pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Hal yang serupa itu terjadi pula pada pilihan kata yang tidak tepat dalam tata persuratan dinas dan acara seremonial seperti pada contoh pemakaian

kalimat berikut ini.

1. Bersama ini kami beri tahukan bahwa Saudara X, Staf Bidang Saudara, telah melahirkan dengan bayinya meninggal dunia.
2. Demikian, harap maklum hendaknya.
3. Demikian, atas perhatiannya diucapkan banyak-banyak terima kasih.
4. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.
5. Sambutan berikutnya akan diberikan oleh Bapak Gubernur.
 - a. Waktu dan tempat kami serahkan.
 - b. Waktu dan tempat kami persilahkan.

Kesalahan itu terjadi akibat dari kekurangcermatan dalam berbahasa, berpikir, dan bernalar. Kecermatan dan penalaran yang baik diperlukan dalam upaya pemodernan bahasa. Namun, pada kesempatan ini, saya membatasi diri pada pengembangan istilah dalam era globalisasi. Dalam pemekaran istilah ada dua hal yang terkait, yaitu (1) sumber pemungutan kata/istilah baru dan (2) cara pembentukan unsur baru dan pemaduannya dengan kosakata yang sudah ada (Moeliono, 1985).

Bahan istilah dapat diambil dari tiga bahasa sumber dengan urutan prioritas sebagai berikut:

- (1) kosakata bahasa Indonesia,
- (2) kosakata bahasa serumpun atau bahasa daerah, dan
- (3) kosakata bahasa asing.

Istilah dapat berupa kata umum yang diberi makna baru atau makna khusus dengan jalan menyempitkan atau meluaskan makna asalnya. Misalnya, *berumah dua*, *pejabat teras*, *roda-gila*, *peka*, *garam*, dan *garam dapur* (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997). Kosakata yang sudah tidak lazim (bersifat arkais) dapat pula diambil sebagai istilah, seperti kata *pantau*, *gerai*, *waskita*, *telik* ('awas'), dan imbuhan *-wati*.

Kosakata yang berasal dari bahasa serumpun atau bahasa daerah dapat dipakai, seperti *senarai*, *madani*, *panti*, *werda*, *gelar*, *jompo*, *loyo*, dan *pasok*.

Kosakata bahasa asing dapat digunakan sebagai bahan istilah Indonesia melalui proses berikut:

- (a) penyerapan dengan penyesuaian ejaan dan lafal (*management* → manajemen; *imagination* → imajinasi);
- (b) penyerapan secara utuh tanpa penyesuaian lafal (*atom* → atom; *laser* → laser; *atrium* → atrium);
- (c) penyerapan sekaligus penerjemahan (*infrared* → inframerah; *bound morphem* → morfem terikat; *subdivision* → subbagian; *quasi-equilibrium* → kuasiimbang; *semiconductor* → semipenghantar);
- (d) penyerapan secara utuh istilah yang ejaannya bertahan dalam banyak bahasa yang dipakai juga di Indonesia dengan syarat diberi garis bawah tunggal atau dicetak miring (*allegro moderato* 'dengan kecepatan irama sedang'; *in vitro* 'di dalam tabung; melalui percobaan laboratorium; *ceteris paribus* 'jika hal-hal lain tetap tidak berubah'; *status quo* 'keadaan yang sekarang');
- (e) penyerapan melalui penerjemahan (*samenwerking* → kerja sama; *balance budget*

→ anggaran berimbang).

5. Pengembangan Kosakata dan Istilah

Dalam era globalisasi, membanjirnya konsep dan gagasan asing di dalam kehidupan pasar bebas, yang secara perlahan-lahan tetapi pasti, akan mempengaruhi pertumbuhan kosakata dan istilah bahasa Indonesia. Untuk itu, pemakai bahasa Indonesia harus secepatnya menetapkan garis haluan kebahasaan, terutama yang berkenaan dengan penyerapan kata dan pengembangan peristilahan dalam berbagai disiplin ilmu. Untuk itu, berikut disampaikan kaidah penyerapan kata dan istilah asing.

a. Prinsip efisiensi

Penyerapan kata asing yang singkat dan mudah pelafalannya dapat dilakukan dengan menyerap melalui penyesuaian ejaan atau menyerap secara utuh atau menyerap bentuk dasar untuk keperluan istilah bersistem.

Contoh untuk istilah bersistem:

sinergi	→	bersinergi; tersinergi; kesinergian; persinergian
konglomerat	→	berkonglomerat; kekonglomeratan

b. Prinsip intranslatabilitas (ketersalinan antarbahasa)

Prinsip ini akan memudahkan para pengguna bahasa, yaitu dengan mudah dapat dirunut bentuk asalnya dan dikenali kembali istilah aslinya beserta makna konsepnya. Untuk kata yang sukar pelafalannya diterjemahkan dengan memprioritaskan sumber pertama bahasa Indonesia, baik yang masih lazim dipakai maupun yang sudah tidak lazim digunakan.

Misalnya: <i>gauge</i>	→	tolok ukur
<i>maintenance</i>	→	pemeliharaan
<i>circle</i>	→	daur ulang

Selain itu, dengan tidak perlu menaruh rasa kekhawatiran akan mengurangi dan menghilangkan identitas bahasa dan bangsa, bahasa serumpun/daerah dapat dijadikan sumber istilah dengan mempertimbangkan keberterimaan dan sifat komunikatif serta informatif kata/istilah hasil pengembangan di kalangan pengguna bahasa Indonesia.

Atas dasar pemikiran itu serta keikutsertaan segenap pengguna bahasa dalam mengantisipasi pertumbuhan bahasa Indonesia di era globalisasi, bahasa Indonesia akan mampu menjadi bahasa modern yang sejajar dengan bahasa-bahasa besar di dunia. Keyakinan itu ditambah dengan makin banyaknya penutur bahasa asing, baik di Indonesia maupun di mancanegara, yang ingin dan berusaha menguasai penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Hal itu merupakan tengara masa depan yang lebih baik bagi bahasa dan bangsa Indonesia pada masa yang akan datang.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Pedoman Umum Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1997. *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Halim, Amran. (Ed). 1984. *Politik Bahasa Nasional*. Jilid I dan II. Jakarta: Balai Pustaka.
- Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI). 1987. *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Kumpulan makalah Seminar Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, Medan, 7—9 Juli 1997. Jakarta: HPBI.
- , 1988. *Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai Pesona Seni dan Budaya dalam Pariwisata Indonesia*. Kumpulan makalah Seminar Nasional VIII Bahasa dan Sastra Indonesia, Semarang, 21—23 Juli 1998. Jakarta: HPBI.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Moerdiono. 1989. *Menyambut Tantangan dan Peluang Masa Depan*. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Nasoetion, Andi Hakim. 1985. *Daun-Daun Berserakan: Percikan Pemikiran Mengenai Ilmu Pengetahuan dan Pendidikan*. Jakarta: PT Inti Sarana Aksara.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1978. *Sejarah dan Perkembangan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Salim, Emil. 1988. "Menyambut Tantangan dan Peluang Masa Depan". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Sunaryo, Adi. 1993. "Bahasa di dalam Strategi Kebudayaan". Di dalam Majalah *Kebudayaan*. Nomor 5 Tahun III 1993/1994. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunaryo, Adi. 1993. "Konsep dan Gagasan dalam Perencanaan Bahasa". Di dalam Majalah *Kebudayaan*. Nomor 6 Tahun III 1993/1994. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sunaryo, Adi. 1994. "Kamus Bahasa Pembangunan: Sarana dan Prasarana Penyatuan Nalar dan Penalaran Pesan-Pesan Pembangunan". Di dalam majalah *Kebudayaan* No. 7, Th. IV, 1994/1995. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Teeuw, A. 1998. *De Ontwikkeling van een Woordenschat: Het Indonesisch 1945—1995*. Amsterdam: Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B4
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 16.30--17.20
Judul Makalah	: Pengembangan Istilah dalam Era Globalisasi
Penyaji	: Adi Sunaryo dan Sri Sukei Adiwimarta
Pemandu	: Mien A. Rifai
Pencatat	: a. Widada b. Alma Evita Almanar
Peserta	: 80 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Sunarti, SLTP Negeri 256 Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Berkaitan dengan masalah pengembangan istilah dalam era globalisasi, ada beberapa hal yang telah dicanangkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terutama dalam penyerapan istilah asing. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dan perlu tanggapan Bapak, di antaranya penyerapan unsur asing yang didasarkan pada penyesuaian ejaan atau penerjemahan dan penyesuaian lafal. Ada beberapa kata yang dalam bahasa aslinya memiliki kategori atau jenis kata yang berbeda dengan bahasa Indonesia sehingga pemakai bahasa kadang-kadang salah dalam penggunaannya. Misalnya, *acceptable* yang dalam bahasa asalnya berkelas kata adjektiva, kemudian diindonesiakan menjadi *berterima* dan berkelas verba. Apakah jenis kata dari bahasa asing itu juga ikut dipertimbangkan dalam pengembangan kosakata dalam era globalisasi? Apakah medan makna juga turut dipertimbangkan dalam pengembangan istilah itu?
- 2) Dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa saya harapkan ada sosialisasi hasil penyerapan istilah asing itu karena masyarakat pada umumnya tidak cermat mengikuti perkembangan bahasa. Mereka akan tetap menggunakan istilah asing karena mereka tidak tahu tentang penyerapan atau penyesuaian dalam bahasa Indonesia.

b. Jawaban:

Kita harus mempertimbangkan masalah jenis kata dalam penerjemahan. Kalau nomina, terjemahannya harus nomina, begitu juga verba terjemahannya harus verba. Akan tetapi, tentang *acceptable* terjemahannya adalah 'keberterimaan', bukan *berterima*, sehingga kelasnya nomina. Sosialisasi sudah kami lakukan dalam bentuk pengindonesiaan kata asing ke dalam bahasa Indonesia dan bukunya sudah ada serta sudah disebar. Buku itu pertama kali diterbitkan dan diberikan secara cuma-cuma. Setelah itu, buku tersebut dijual, tetapi pembelinya kurang banyak sehingga pemasyarakatan pengindonesiaan tersebut tidak lancar.

Letak kesalahannya tidak tahu, apakah daya beli atau minat untuk memiliki bagi masyarakat Indonesia kurang. Bukunya dijual di Balai Pustaka. Berkaitan dengan medan makna, medan makna memang belum kita perhatikan di dalam peristilahan karena seharusnya istilah itu bersifat monosemantis, tidak mendua. Di mana pun, kapan pun, siapa pun yang menggunakannya, ya itulah maknanya. Jadi, tidak usah ragu-ragu, tidak ada dua makna dalam peristilahan, misalnya, istilah *morfologi* digunakan dalam bidang linguistik, biologi, dan juga bidang geografi. Bahasa yang ada di sana, kapan pun dan di mana pun, tetap sama. Akan tetapi, tidak berarti bahwa batasan yang ada dalam bidang bahasa sama dengan yang ada dalam bidang biologi.

2. Penanya: J. Djoko S. Passandaran, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Suatu kata yang berkembang menjadi istilah, apakah dilakukan dengan cara penerjemahan atau penyerapan dengan mengubah ejaan? Hal itu tentu juga mempunyai syarat keberterimaan. Masalah yang ingin saya tanyakan, sampai berapa kali suatu istilah itu diterima sebagai istilah baru.

b. Jawaban:

Soal keberterimaan harus dilihat dari konsepnya. Artinya, yang membuat istilah itu bukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, melainkan pakar-pakar bidang ilmu yang bersangkutan. Misalnya, kata *canggih* langsung diterima untuk menggantikan *sophisticated*. Setelah itu, perkembangan selanjutnya bergantung pada pakar itu sendiri yang menggunakannya. Berapa kali sebuah istilah diterima tidak dapat ditentukan.

3. Penanya: Liberty Sihombing, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Ahli-ahli kita dalam menciptakan istilah itu sebenarnya luar biasa tekunnya dan kerja kerasnya. Yang saya sayangkan ada dua hal, yaitu

- 1) kelambatannya sehingga kalah bersaing dengan stasiun televisi;
- 2) distribusinya, seperti *Lembar Komunikasi* ini terlambat sampai di tangan kami.

Saya ingin menganjurkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat bekerja sama dengan wartawan media cetak ataupun media elektronik, karena mereka lebih cepat mencapai atau menjangkau masyarakat pemakainya.

b. Jawaban:

Mohon maaf atas keterlambatan itu. Ada beberapa hal yang menyebabkan *Lembar Komunikasi* itu terlambat dan tidak saya kemukakan di sini. Itu urusan dapur Pusat Bahasa. Yang jelas, kami telah memberikan yang terbaik. Itulah yang dapat kami sampaikan. Penerbitan yang tidak terlambat, terutama pada

waktu Bulan Bahasa, begitu datang langsung kami sebar ke seluruh provinsi dan kandep. Akhirnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kehabisan. Kerja sama sudah kami lakukan dan selalu mencoba untuk melaksanakan dan memperoleh tanggapan yang cukup baik, hanya hasilnya yang masih belum memuaskan.

STRUKTUR KALIMAT BAHASA INDONESIA: PENERAPAN DAN PEMASYARAKATANNYA

Dendy Sugono

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

I. Pengantar

Pembicaraan tentang struktur kalimat bahasa Indonesia telah lama dilakukan para ahli bahasa, bahkan sejak awal abad ke-20. Perkembangan ilmu bahasa pun ikut mewarnai percaturan tentang struktur kalimat bahasa Indonesia. Orang memusatkan perhatian pada analisis kalimat atas unsur-unsur yang lebih kecil, kalimat dipandang sebagai sentral dan otonom (Kaswanti Purwo, 1987:45-46). Kalimat dianalisis atas dua konstituen langsung dan dari teori itu pula diperkenalkan kalimat dasar bahasa Indonesia (Samsuri, 1985) yang terdiri atas satuan-satuan kategori kata. Ada pula analisis kalimat yang menempatkan verba sebagai sentral dan menentukan kehadiran nomina dalam struktur kalimat bahasa Indonesia (Tampubolon, 1979; Risakotta, 1998). Analisis kalimat akhirnya menempatkan kalimat dalam hierarki gramatikal bahwa kalimat berada di bawah paragraf dan di atas klausa. Kalimat terbentuk dari klausa; fungsi sintaktik, peran semantik, dan kelas (kategori) merupakan alat teropong analisis klausa (Sugono, 1995; Alwi *et al.* 1998). Analisis fungsi sintaktik menyebut subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan sebagai slot. Analisis peran semantik menyebut pelaku, pengalami, sasaran, alat, dan sebagainya. Fungsi dan peran itu diisi oleh kategori atau kelas nomina, verba, adjektiva, dan sebagainya. Fungsi subjek, predikat, objek, pelengkap, dan keterangan serta peran pelaku, sasaran, alat, dan sebagainya beserta nomina, verba, adjektiva, dan sebagainya itu menjadi sarana pemahaman terhadap struktur kalimat bahasa Indonesia. Analisis kalimat seperti itu merupakan analisis intern kalimat. Kodifikasi kaidah kalimat itu telah dimuat dalam buku *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* edisi ketiga (1998).

Masalahnya ialah bagaimana tingkat pemahaman masyarakat terhadap kaidah tersebut. Apakah kaidah itu berlaku mutlak pada semua jenis penggunaan bahasa? Bagaimana struktur kalimat ragam bahasa lisan? Bagaimana struktur kalimat laras bahasa keilmuan? Bagaimana pula dengan laras bahasa jurnalistik (media cetak dan elektronik)?

Di antara beberapa permasalahan itu, makalah ini akan menyoroti kalimat bahasa Indonesia dalam laras bahasa keilmuan dan laras bahasa jurnalistik. Penggunaan bahasa pada bidang keilmuan mengindikasikan tingkat pemahaman masyarakat terpelajar terhadap kaidah kalimat bahasa Indonesia. Sementara itu, penggunaan bahasa pada surat kabar dan majalah serta radio dan televisi memperlihatkan tingkat pemahaman masyarakat umum terhadap kaidah bahasa Indonesia. Kalau laras bahasa keilmuan hanya terjangkau oleh kalangan terpelajar atau kaum cendekia, laras bahasa jurnalistik dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Maka, pengaruh laras bahasa keilmuan itu akan mengenai kalangan terpelajar yang mempunyai pengaruh terhadap arah masa depan bangsa ini, sedangkan laras bahasa jurnalistik mempunyai

pengaruh yang amat besar pada masyarakat umum. Untuk itulah, makalah ini akan menyeroi struktur kalimat dalam kedua laras bahasa itu.

2. Laras Bahasa Keilmuan

Laras bahasa keilmuan memiliki ciri kecendekiaan. Bentuk kalimatnya mencerminkan ketelitian penalaran yang objektif, hubungan antarkalimat logis dan eksplisit (Moeliono, 1998). Keeksplisitan hubungan itu, antara lain, terlihat pada penggunaan penghubung. Di dalam tulisan-tulisan ilmiah terdapat kalimat seperti di bawah ini.

- (1) Ditinjau dari psikologi belajar, minat dan motivasi merupakan faktor penting dalam memilih jurusan.

Hubungan antara klausa subordinatif dan klausa utama dalam kalimat (1) itu tidak eksplisit, tidak digunakan penghubung. Akibatnya, pembaca harus menafsirkan sendiri hubungan kedua klausa itu. Dalam kalimat (1) itu hubungan kedua klausa itu masih mudah ditafsirkan, yaitu hubungan persyaratan (*jika, kalau*). Meskipun demikian, hubungan itu perlu dieksplisitkan.

Di dalam kalimat (2) ini hubungan antara klausa subordinatif dan klausa utama dapat ditafsirkan lebih dari satu.

- (2) Mengingat betapa besar peranan jantung dalam tubuh, perlu dipahami cara pemeliharannya.

Ada dua hal yang bertalian dengan ciri bahasa keilmuan dalam kalimat (2) itu. *Pertama*, hubungan klausa subordinatif terhadap klausa utama dapat ditafsirkan hubungan sebab (*karena*), cara (*dengan*), atau syarat (*kalau*).

- (2) a. $\left\{ \begin{array}{l} \text{Karena} \\ \text{Dengan} \\ \text{Kalau} \end{array} \right\}$ mengingat betapa besar peranan jantung

Kedua, subjek klausa subordinatif tidak eksplisit; kalau subjek itu lesap, di mana acuan subjek yang lesap itu. Bentuk klausa subordinatif seperti itu mensyaratkan klausa utama bersubjek yang sama dengan subjek klausa subordinatif.

- (2) b. Karena mengingat betapa besar peranan jantung dalam tubuh, kita perlu memahami cara pemeliharannya.

Keeksplisitan hubungan antarklausa memang dipersyaratkan dalam laras bahasa keilmuan, tetapi penggunaan penghubung tidak perlu berlebih. Penghubung yang berlebih dapat menyebabkan hubungan yang tidak logis.

- (3) *Walaupun* sering menghadapi berbagai kendala, *tetapi* pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Penggunaan penghubung *walaupun* mengisyaratkan bahwa klausa yang menyertainya merupakan klausa subordinatif dan informasi di dalamnya bukan merupakan gagasan inti. Sementara itu, penggunaan kata *tetapi* mengisyaratkan bahwa klausa yang menyertainya merupakan klausa yang memiliki hubungan koordinatif dengan klausa yang mendahuluinya dan informasi di dalam kedua klausa itu merupakan gagasan inti. Dengan demikian, terdapat ketaksaan di dalam kalimat (3) itu. Apakah pernyataan pada klausa pertama bukan sebagai inti (*walaupun*); pernyataan inti hanya terdapat pada klausa kedua (tanpa *tetapi*). Atau, kedua pernyataan itu merupakan gagasan inti semua sehingga terbentuk hubungan koordinatif (*tetapi*).

- (3) a. *Walaupun* sering menghadapi berbagai kendala, pihak yang bersengketa lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan.
- (3) b. Pihak yang bersengketa sering menghadapi berbagai kendala, *tetapi* mereka lebih memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Di dalam laras bahasa keilmuan fungsi sintaktik (subjek, predikat, keterangan) harus nyata batas dan hubungannya (Kaswanti Purwo, 1994; Sugono, 1997). Di dalam contoh di bawah ini batas antara subjek dan keterangan tidak jelas. Unsur di depan predikat (4) *harus memiliki* dan (5) *memerlukan* tidak jelas sebagai keterangan (ada kata depan) atau sebagai subjek (terletak di depan predikat verba transitif).

- (4) Sebagai ilmuwan harus memiliki wawasan akademik yang luas.
- (5) Dalam penyelesaian sengketa perdata memerlukan data selengkap-lengkapnyanya.

Ketidakjelasan itu tidak terjadi jika kata depan *sebagai* dan *dalam* pada kalimat di atas tidak digunakan.

Kenyataan bentuk-bentuk kalimat dalam bidang keilmuan sebagaimana dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kaidah kalimat bahasa Indonesia belum sepenuhnya memasyarakat.

3. Laras Bahasa Jurnalistik

Surat kabar dan majalah menjangkau masyarakat dari berbagai lapisan. Begitu juga, radio dan televisi mempunyai daya jangkau ke seluruh wilayah Indonesia. Baik surat kabar dan majalah maupun radio dan televisi memiliki daya jangkau, selain luas, ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk generasi muda. Oleh karena itulah, media cetak dan elektronik itu mempunyai pengaruh yang besar kepada masyarakat pengguna bahasa Indonesia. Orang sering tidak menyadari bahwa bahasa yang digunakan dalam media tersebut adalah bahasa Indonesia laras jurnalistik yang memiliki kekhasan,

khususnya dalam struktur kalimat. Bentuk partisipial, misalnya, digunakan dalam laras bahasa jurnalistik, tetapi tidak dalam laras bahasa ilmu.

- (6) *Menjawab pertanyaan wartawan*, tokoh reformasi itu mengatakan bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat harus mendapat prioritas pertama.

Bentuk seperti itu sudah lama digunakan, tetapi tidak perlu dipertukarkan tempatnya, misalnya, di bagian akhir kalimat karena bentuk itu sebetulnya digunakan untuk menarik perhatian pembaca sebagai titik pemberangkatan informasi.

Berbeda halnya dengan struktur kalimat langsung dan kalimat taklangsung. Dalam bahasa jurnalistik ada penggantian penghubung *bahwa* dengan tanda koma dalam kalimat taklangsung.

- (7) Pejabat itu menegaskan, para pelaku kerusuhan akan ditindak tegas.

Bentuk itu juga sudah cukup lama digunakan dalam surat kabar. Namun, penggunaan kalimat seperti itu tidak dibenarkan dalam laras bahasa keilmuan.

Berbeda halnya dengan penggunaan penghubung *sedangkan* dan *sehingga* pada awal kalimat yang banyak ditemukan dalam bahasa jurnalistik. Penggunaan kedua kata itu pada awal kalimat berarti bahwa kedua kata itu digunakan sebagai penghubung antarkalimat. Bahwa dua kalimat memiliki hubungan perlawanan atau akibat itu betul. Akan tetapi, penghubung yang digunakan berbeda.

- (8) Di Jakarta muncul komentar yang mendukung gagasan agar pemerintah bekerja sama dengan mafia Hongkong. *Sedangkan* di luar negeri pemerintah negara yang diduga menjadi tujuan Eddy dikabarkan telah turut membantu Indonesia melacak koruptor kakap tersebut.
- (9) Di antara sekian teman yang menderita harus dipilih yang paling menderita. *Sehingga* di meja saksi pengadilan mau tak mau harus saya katakan, "Kalau ini masalahnya, yang mestinya diadili adalah saya dan teman saya."

Kata *sedangkan* dan *sehingga* seharusnya digunakan untuk penghubung antarklausa di dalam kalimat, sedangkan *sebaliknya*, *akan tetapi*, *namun*, *sementara itu*, *adapun* (menyatakan perlawanan) digunakan sebagai penghubung antarkalimat. Demikian juga, *akibatnya*, *oleh karena itu*, *dengan demikian* digunakan sebagai penghubung antarkalimat. Kedua contoh yang terakhir itu bukan ciri khas laras bahasa jurnalistik, melainkan ketidaktepatan penggunaan penghubung. Bentuk seperti itu perlu diperbaiki agar tidak menyebar ke berbagai laras bahasa yang lain.

Dari bahasa jurnalistik ada struktur frasa nominal yang menarik. Frasa nominal itu berfungsi sebagai subjek yang sekaligus sebagai peranti kohesi dengan kalimat sebelumnya, disebut penyulihan (Sugono, 1995)

- (10) a. Fatma terpaksa pulang ke kampung halamannya setelah tiga bulan menganggur di Jakarta karena terkena PHK dari tempat kerjanya.
 b. *Anak pertama dari lima bersaudara itu* harus memulai lembaran hidup baru di kampungnya.

Frasa *anak pertama dari lima bersaudara* berisi informasi baru. Kata *itu* menuntun acuan frasa nominal itu pada *Fatma* dalam kalimat pertama dan frasa itu berfungsi sebagai pengikat dengan kalimat pertama. Padahal, biasanya peranti kohesi yang digunakan ialah kata ganti (*dia*). Jika dilihat dari fungsi sintaktiknya, frasa nominal itu mengisi fungsi subjek pada kalimat kedua. Struktur frasa itu bukan baru, tetapi informasi yang termuat dalam frasa itu baru sehingga penataan informasi itu dapat disebut sebagai upaya penghematan daripada harus menyebut informasi baru itu dalam satu kalimat di antara kalimat a dan d.

- (10) a. Fatma terpaksa pulang ke kampung halamannya setelah tiga bulan menganggur karena terkena PHK dari tempat kerjanya.
 c. *Fatma adalah anak pertama dari lima bersaudara.*
 d. Dia harus memulai lembaran hidup baru di kampungnya.

Dalam acara pemberitaan di televisi terdapat bentuk kalimat aktif transitif tanpa objek dan biasanya kalimat itu muncul pada akhir atau penutup berita yang dilaporkan.

- (11) a. Tim reporter RCTI *melaporkan*.
 b. Lintang Andita *melaporkan dari Denpasar*.

Bentuk kata *melapor* berbeda dari kata *melaporkan*. Verba *melapor* sebagai predikat hanya memerlukan subjek (*saya sudah melapor*). Berbeda halnya dengan verba *melaporkan*, verba itu sebagai predikat memerlukan sesuatu di belakangnya. Maka, orang menambahkan keterangan *dari Denpasar* pada contoh (9b) tersebut. Adanya kekurangan pada struktur (9a) sebetulnya telah terasakan oleh penyusun berita, tetapi sayangnya pengisian kekurangan itu bukan yang dituntut oleh struktur. Dalam struktur kalimat itu yang wajib menyertai verba *melaporkan*, selain subjek, ialah objek. Karena yang menjadi objek sudah disebutkan sebelumnya, dapat ditempuh pengulangan atau penggunaan kata ganti *-nya*.

- (11) a. Tim reporter RCTI *melaporkan* $\left. \begin{array}{l} \text{berita itu.} \\ \text{-nya.} \end{array} \right\}$

- b. Lintang Andita *melaporkan* $\left. \begin{array}{l} \text{berita itu} \\ \text{-nya} \end{array} \right\}$ dari Denpasar.

Kenyataan penggunaan bahasa dalam pemberitaan itu memberikan isyarat bahwa kaidah-kaidah struktur bahasa Indonesia belum seluruhnya memasyarakat di kalangan wartawan televisi. Karena televisi memiliki jangkauan sasaran ke berbagai lapisan masyarakat, bahasa berita sebaiknya memperhatikan kaidah-kaidah bahasa Indonesia.

4. Upaya Pemasyarakatan Kaidah Struktur Kalimat

Penataan bahasa yang digunakan dalam bidang keilmuan dan jurnalistik perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kerja sama antara lembaga penyelenggara pendidikan tinggi dan media cetak serta elektronik. Untuk pendidikan tinggi, mata kuliah bahasa Indonesia (selain fakultas sastra dan fakultas pendidikan bahasa dan seni) perlu diarahkan pada penguasaan dan kemampuan penggunaan laras bahasa keilmuan. Para pembimbing skripsi, tesis, disertasi hendaknya memperhatikan bahasa Indonesia yang digunakan di dalam karya tulis ilmiah tersebut.

Pada pihak penerbitan buku, penyiapan naskah harus dilakukan dengan sungguh-sungguh melalui penyuntingan secara profesional sebelum naskah diterbitkan sehingga buku yang beredar di masyarakat tidak diwarnai oleh kesalahan bahasa. Untuk itu, diperlukan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan penyuntingan dalam penggunaan laras bahasa dalam berbagai bidang ilmu.

Pada pihak media massa perlu ditingkatkan pemeriksaan bahasa sebelum berita diturunkan pada surat kabar dan majalah serta sebelum dibacakan di radio atau televisi. Untuk itu, perlu ditingkatkan kerja sama pihak pengelola media massa cetak dan elektronik dengan lembaga atau perseorangan yang menangani masalah bahasa.

Pada pihak lembaga atau perseorangan yang menangani masalah kebahasaan, pemasyarakatan kaidah struktur kalimat perlu dilakukan secara cermat dengan menggunakan pendekatan laras bahasa. Kaidah struktur kalimat dasar memang telah mantap. Namun, penerapannya dalam berbagai macam laras bahasa belum tertangani secara mantap. Penerapan kaidah struktur kalimat itu harus dilakukan secara luwes sehingga berbagai kepentingan pengguna bahasa dapat ditampung dalam pengembangan laras bahasa. Untuk itu, perlu ditingkatkan penelitian penggunaan bahasa dalam bermacam bidang ilmu dan disusun bermacam buku pegangan penggunaan bahasa dalam berbagai bidang keilmuan.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. *et al.* 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1994. Dalam "Menata Kata dan Kalimat: Meningkatkan Keterampilan Menulis". Dalam Soenjono Dardjowidjojo (Peny.). *Mengiring Rekan Sejati*. Jakarta: Lembaga Bahasa Universitas Katolik Atma Jaya.

- Moeliono, Anton M. 1998. "Pengembangan Laras Bahasa dalam Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Modern". Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, dan S.R.H. Sitanggang (Peny.). *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Risakotta, Irene. 1998. "Penerapan Teori Valensi Bahasa Jerman pada Verba Bahasa Indonesia untuk Pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing". Disertasi IKIP Jakarta.
- Sihombing, Liberty P. *et al.* 1998. *Bahasawan Cendekia*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarjanto. 1983. *Predikat-Objek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Jambatan.
- Sugono, Dendy. 1994. "Tipe Klausa Bahasa Indonesia". Dalam Liberty P. Sihombing *et al.* (Peny.). *Bahasawan Cendekia*. Jakarta: Universitas Indonersia.
- , 1995. *Pelesapan Subjek dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1997. *Berbahasa Indonesia dengan Benar*. Jakarta: Puspa Swara.
- Wimmer, Roger D. dan Joseph R. Dominick. 1994. *Mass Media Research an Introduction*. Belmont, California: Wadsworth Publishing Company.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B10
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Pemantapan Struktur Kalimat Bahasa Indonesia
Penyaji	: Dendy Sugono
Pemandu	: Abdul Wahab
Pencatat	: a. K. Biskoyo b. Marida G. Siregar
Peserta	: 80 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Apakah pengertian laras bahasa yang dimaksud Bapak itu adalah register dalam pengertian sociolinguistik? Karena dalam sociolinguistik tidak ada laras bahasa ilmu, yang ada hanya bidang ilmu, cara, dan tenor (formal-nonformal)

b. Jawaban:

Saya setuju dengan pernyataan Bapak. Yang saya maksud dengan laras pada pernyataan itu mengacu pada laras bahasa dalam bidang ilmu yang berbeda dari laras bahasa sastra ataupun jurnalistik.

2. Penanya: Untung, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Bagaimana pemakaian konstruksi partisipial dalam konteks berikut.

(1) Bertolak dari pendapat itu, saya dapat menyimpulkan

(2) Melihat masalah yang sedang berkembang, saya khawatir

b. Jawaban:

Jika Saudara sedang meneliti data bahasa Indonesia, catat temuan konstruksi itu dalam laras bahasa apa saja. Saya menemukan konstruksi itu dalam laras bahasa jurnalistik, bahkan pada Kongres Bahasa Indonesia III 1978 oleh Benny H. Hoed dikatakan sebagai pengaruh bahasa Inggris. Saya menelusuri naskah sastra lama, ternyata konstruksi itu saya temukan dalam naskah tersebut. Jadi, konstruksi itu sudah ada sebelum bahasa Indonesia diikrarkan tahun 1928. Konstruksi itu kini telah berkembang dalam ragam bahasa lisan, misalnya *Berbicara tentang ...*,

Analisisnya bergantung kepada teori yang digunakan. Jika digunakan teori bahwa klausa adalah konstruksi yang mengandung predikat, konstruksi partisipial itu adalah klausa subordinatif atau anak kalimat. Namun, anak kalimat itu tidak memiliki mobilitas seperti anak kalimat yang berkonjungsi.

Contoh berikut memperjelas hal itu.

- (1) Bertolak dari pendapat itu, saya dapat menyimpulkan ...
 - a. Bertolak dari pendapat itu, saya dapat menyimpulkan ...
 - b. Saya dapat menyimpulkan ... bertolak dari pendapat itu.
 - c. *Dengan* bertolak dari pendapat itu, saya dapat menyimpulkan ...
 - d. Saya dapat menyimpulkan ... *dengan* bertolak dari pendapat itu.
- (2) a. Melihat masalah yang sedang berkembang, saya khawatir ...
- (3) b. Saya khawatir ... melihat masalah yang sedang berkembang.
 - c. Kalau melihat masalah yang sedang berkembang, saya khawatir ...
 - d. Saya khawatir ... kalau melihat masalah yang sedang berkembang.

Pembahasan lebih lanjut konstruksi partisipial ini dapat dibaca hasil penelitian saya tentang pelesapan subjek dalam bahasa Indonesia yang tertera pada Daftar Pustaka makalah ini.

EJAJAN BAHASA INDONESIA YANG DISEMPURNAKAN: MASA KINI DAN MASA DEPAN

A. Latief

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pengantar

Pembakuan ejaan bahasa Indonesia yang dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (EYD) pada tahun 1972 dapat dianggap sebagai suatu langkah Pemerintah yang berani karena pada saat itu cukup banyak anggota masyarakat yang menentang usaha tersebut, di samping yang tidak mendukung. Sikap yang demikian itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang aneh karena perubahan itu akan membawa perubahan total pada kebiasaan mereka yang sudah mendarah daging dalam hal tulis-menulis. Hal inilah sebenarnya yang ditentang mereka; bukan perubahan ejaan itu sendiri.

Jika dilihat dari segi bahasa, perubahan itu merupakan suatu langkah maju dan suatu keharusan karena melalui perubahan ejaan itulah masyarakat diharapkan akan memiliki tingkat kesadaran berbahasa Indonesia yang lebih baik. Seperti kita ketahui, perkembangan bahasa Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia sangat pesat dan EYD itu diharapkan dapat mencerminkan hasil dan arah perkembangan bahasa Indonesia selama lebih kurang 27 tahun itu.

Sekarang kita berada pada akhir abad ke-20 yang banyak disebut sebagai era globalisasi dan reformasi. Era ini ditandai, antara lain, oleh perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat canggih sehingga batas negara atau wilayah hampir-hampir tidak diperhitungkan lagi. Sejalan dengan itu, bahasa Indonesia pun sebagai sarana komunikasi dan informasi tentu mengalami perkembangan yang pesat pula, terutama jika kita mempertimbangkan kurun waktu yang cukup panjang sejak dibakukannya EYD. Oleh karena itu, tampaknya cukup wajar jika EYD yang berlaku hingga saat ini dipertanyakan keefektifannya sebagai acuan dalam kegiatan tulis-menulis, lebih-lebih untuk waktu yang akan datang.

Pembahasan tentang keefektifan EYD dapat dilakukan dari berbagai sudut, tetapi makalah ini hanya akan membahas beberapa aspek tertentu yang dianggap paling erat kaitannya dengan keefektifan EYD itu, yaitu sikap bahasa, pemasyarakatan EYD, dan kaidah EYD itu sendiri. Tercakup pula di dalam ketiga aspek ini ialah kebijakan, strategi, dan perencanaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (Pusat Bahasa). Khusus mengenai kaidah EYD, makalah ini sepenuhnya akan mengacu kepada buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (PUE)*

2. Masa Kini

Pengertian **masa kini** dalam makalah ini ialah keadaan atau situasi pemakaian EYD atau yang berkaitan dengan itu, mulai dari saat pencanangan berlakunya EYD sampai saat ini. Segala kejadian atau peristiwa yang berkenaan dengan EYD seharusnya tercakup dalam pembahasan. Akan tetapi, mengingat waktu yang tersedia untuk pemba-

hasan ini sangat terbatas maka pembahasannya dibatasi pada tiga faktor utama, yaitu sikap bahasa, pemasyarakatan EYD, dan kaidah EYD.

a. Sikap Bahasa

Rentang waktu antara saat peresmian berlakunya EYD sampai sekarang merupakan kurun waktu yang cukup panjang, yaitu lebih dari seperempat abad. Selama masa itu Pusat Bahasa telah banyak melaksanakan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia, termasuk EYD, seperti penyelenggaraan bulan bahasa, kongres bahasa, dan siaran bahasa Indonesia melalui Televisi Republik Indonesia (TVRI).

Tujuan kegiatan pemasyarakatan bahasa Indonesia itu, antara lain, mungkin untuk menanggulangi atau sekurang-kurangnya meredakan sikap kelompok masyarakat yang menentang perubahan ejaan itu, seperti yang dikemukakan pada awal makalah ini. Walaupun demikian, tampaknya harus diakui bahwa upaya itu belum sepenuhnya berhasil karena ternyata sebagian besar warga negara Indonesia masih bersikap acuh tak acuh terhadap ketentuan EYD itu. Keadaan yang demikian itu tentu dapat diartikan sebagai kurangberhasilan Pusat Bahasa dalam mengubah sikap bahasa masyarakat dari yang negatif menjadi positif. Sebagai akibat dari keadaan itu, mungkin dapat disimpulkan bahwa belum semua warga masyarakat memiliki sikap bahasa yang baik atau dengan kata lain masyarakat belum memiliki kesadaran berbahasa Indonesia yang tinggi.

Kalau kita mengikuti dengan cermat pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari di dalam berbagai ranah kehidupan masyarakat Indonesia, dengan mudah kita dapat menyimpulkan bahwa tingkat kesadaran berbahasa mereka masih jauh dari yang diharapkan. Ada warga masyarakat Indonesia yang *tidak menggunakan bahasa Indonesia* dalam kegiatan berkomunikasinya, ada yang hampir *selalu menggunakan ragam tabaku*, dan cukup banyak yang *cenderung "mengutamakan" kata-kata bahasa Inggris* (terutama di kota-kota besar), serta ada juga yang *kurang memahami kaidah bahasa Indonesia baku*.

Pemakaian bahasa Indonesia seperti yang dikemukakan di atas memberikan informasi kepada kita bahwa mutu pemakaian bahasa Indonesia, termasuk EYD, masih jauh dari yang diharapkan. Di samping masalah tersebut, masih ada segi lain yang perlu diperhatikan, yaitu keterampilan berbahasa. Seperti diketahui, kebiasaan yang kurang baik dalam mempergunakan ragam bahasa lisan sering berdampak negatif terhadap keterampilannya berbahasa dalam ragam tulis. Oleh karena itu, pemahaman seseorang mengenai konsep-konsep dasar kebahasaan, seperti bahasa nasional, bahasa negara, ragam bahasa, bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta bahasa sebagai lambang jati diri bangsa akan sangat membantu atau mempercepat terwujudnya tingkat kesadaran berbahasa Indonesia yang tinggi. Kesadaran berbahasa yang tinggi ini pada gilirannya akan meningkatkan kegairahan seseorang untuk mempelajari, memahami, dan memakai dengan baik kaidah bahasa Indonesia, termasuk kaidah ejaan. Apabila keadaan yang demikian itu tercipta, pastilah kelompok warga masyarakat itu akan memiliki sikap bahasa yang baik/positif atau sekurang-kurangnya lebih baik dari sebelumnya. Kita semua harus berjuang menciptakan situasi seperti ini, terutama dalam

manghadapi era globalisasi.

Sekiranya pernyataan di atas itu dapat diterima, yaitu kesadaran berbahasa merupakan dasar terwujudnya sikap bahasa yang positif, masalah sikap bahasa ini semakin penting artinya bagi mereka yang tergolong atau dianggap sebagai pemimpin, seperti para wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat, tokoh masyarakat, birokrat, teknokrat, dan guru/dosen. Hal ini semakin penting lagi bagi mereka mengingat bahwa mereka itu menjadi “tokoh” atau “pemimpin” dalam suatu masyarakat majemuk yang paternalistik.

Seerti diketahui bahwa dalam masyarakat yang paternalistik tidak jarang terjadi ucapan, tulisan, atau perbuatan seorang pemimpin akan langsung dijadikan contoh, teladan, atau bahkan pedoman hidup oleh anggota masyarakat karena menurut anggapan mereka apa pun yang dikatakan atau diperbuat oleh pemimpin atau tokoh mereka pasti baik. Oleh karena itu, jika para pemimpin atau anutan masyarakat itu dapat memberikan teladan atau contoh yang baik dalam kegiatan berbahasanya, sebagai perwujudan kesadaran dan sikap berbahasa yang baik, maka pastilah masalah sikap bahasa yang negatif/kurang positif seperti yang kita hadapi sekarang tidak akan ada lagi atau walaupun ada tentu tidak akan “sehebat” yang sekarang. Sebaliknya, jika para pemimpin itu tidak dapat memberikan teladan yang baik atau bahkan memberikan contoh yang salah dalam kegiatan berbahasa, tentu dapat dibayangkan bagaimana parahnya sikap dan perilaku berbahasa para anggota masyarakatnya.

Berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa kemantapan pemakaian EYD dalam masyarakat akan sangat sulit terwujud selama segi kesadaran berbahasa, khususnya sikap berbahasa yang positif dari warga masyarakatnya, belum berhasil dibina dengan baik. Oleh karena itu, Pusat Bahasa tampaknya tidak mempunyai pilihan lagi selain harus memberikan prioritas utama kepada upaya/program peningkatan kesadaran berbahasa, sekaligus sikap berbahasa yang positif jika masih tetap ingin melihat pemakaian kaidah EYD yang mantap. Bagaimana wujud program tersebut, tidak akan bicarakan di sini karena ruang lingkungnya terlalu luas.

Dengan belajar dari pengalaman masa lalu dan masa kini, Pusat Bahasa sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut agar program peningkatan kesadaran dan sikap berbahasa itu dapat berhasil dengan baik.

- 1) Upayakan agar perubahan ejaan itu diperkenalkan kepada masyarakat sedikit demi sedikit; bukan keseluruhannya sekaligus seperti pada waktu EYD.
- 2) Usahakan agar media massa dapat berperan sebagai sarana utama dalam pemasyarakatan perubahan ejaan dan juga dalam program peningkatan kesadaran berbahasa.
- 3) Gunakan publikasi dan sarana komunikasi lain yang dimiliki Pusat Bahasa sebagai media utama pemasyarakatan/pembinaan pemakai bahasa, alih-alih penyuluhan langsung.
- 4) Tingkatkan peran Balai Penelitian Bahasa, perguruan tinggi setempat, pemerintah daerah dan para koordinator bahasa, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan pemasyarakatan ejaan dan peningkatan sikap bahasa di daerah .

b. Pemasyarakatan Ejaan (EYD)

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, upaya pemasyarakatan EYD selama ini kurang berhasil, antara lain, karena tidak tersedianya program khusus untuk meningkatkan kesadaran dan sikap berbahasa para pemakai bahasa Indonesia secara menyeluruh. Selain itu, program pemasyarakatan EYD yang tersedia selama ini lebih ditekankan pada aspek pengetahuan/keterampilan daripada aspek sikap. Lebih jauh lagi, program pemasyarakatan EYD yang ada pada umumnya bersifat “baku”, baik dilihat dari segi waktu maupun materi. Program inilah yang dikenal dengan nama paket penyuluhan (sekian) jam.

Program paket tersebut sebenarnya sangat baik jika situasi penyuluhan itu ideal. Artinya, jika peubah tertentu, seperti motivasi, latar belakang pendidikan, kebutuhan, dan jumlah peserta tidak merupakan kendala terhadap keberhasilan, tentulah paket-paket penyuluhan itu akan memberikan hasil yang sangat memuaskan. Akan tetapi, keadaan di lapangan justru menunjukkan hal yang sangat berbeda kalau tidak boleh dikatakan sangat bertolak belakang. Peubah lain yang tidak kalah pentingnya dalam penentuan keberhasilan pemasyarakatan EYD ialah penyuluh, materi, panitia penyelenggara, dan atasan langsung para peserta.

Selain program paket tersebut di atas, pemasyarakatan EYD juga dilakukan melalui berbagai sarana dan program kegiatan. Salah satu sarana pemasyarakatan EYD, sebagai bagian dari pemasyarakatan bahasa Indonesia, ialah Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indonesia (RRI).

Bagaimana hasil pemasyarakatan EYD selama ini yang dilakukan melalui berbagai program kegiatan dan sarana itu, tidak seorang pun dapat menjawab dengan pasti karena sampai saat ini belum pernah dilakukan penelitian/survei yang terencana.

Sehubungan dengan uraian di atas, mungkin ada baiknya kalau Pusat Bahasa mempertimbangkan butir-butir berikut.

- 1) Perlu ada “bagian” di Pusat Bahasa dan Balai Bahasa yang uraian tugasnya, antara lain, memantau dan mengevaluasi keberhasilan pemasyarakatan EYD sebagai bagian dari program pemasyarakatan bahasa Indonesia atau membentuk kelompok evaluasi yang (a) seluruh anggotanya karyawan Pusat Bahasa/Balai Bahasa, atau (b) seluruh anggotanya orang luar Pusat Bahasa/Balai Bahasa, atau (c) anggotanya terdiri atas orang Pusat Bahasa/Balai Bahasa dan orang luar.
- 2) Perlu ada gambaran menyeluruh mengenai populasi sasaran dari setiap program pemasyarakatan, termasuk pemasyarakatan EYD.
- 3) Harus ada kebijakan dan strategi yang jelas untuk menjangkau populasi sasaran.
- 4) Perlu dikembangkan paket-paket materi pemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran yang telah diidentifikasi.
- 5) Perlu direncanakan secara mantap penyiapan tenaga penyuluh “profesional”, baik dari dalam maupun dari luar Pusat Bahasa/Balai Bahasa.
- 6) Perlu dikembangkan program pemasyarakatan EYD yang harus dilaksanakan secara proaktif
- 7) Perlu diupayakan sungguh-sungguh agar keserasian antara materi pemasyarakatan

dan buku acuan lain, seperti *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* tetap terjaga.

c. Kaidah Ejaan (EYD)

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, satu-satunya buku acuan yang akan digunakan dalam membahas kaidah ejaan ini ialah buku *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*. Buku ini tebalnya 68 halaman, terdiri atas 5 bab, memuat 174 butir kaidah, 15 buah perian, dan 49 buah catatan/keterangan. Kalau perian dan catatan itu juga dihitung sebagai kaidah maka jumlah seluruh kaidah dalam buku tersebut adalah 238 butir, tidak termasuk catatan/keterangan yang tidak berlabel.

Secara umum dapat dikatakan bahwa kaidah yang tercantum dalam PUE itu cukup baik meskipun di sana-sini masih timbul tanda tanya. Dari 238 butir kaidah itu hanya 12 butir saja yang perlu dipertanyakan, dipersoalkan, atau dibahas terutama jika dilihat dari segi kemudahan pemahaman dan pemakaiannya. Kejelasan rumusan kaidah dan ketepatan/kecermatan contoh tentu akan sangat membantu pemakai untuk memahaminya dan sekaligus akan sangat mempermudah yang bersangkutan untuk menerapkannya dalam penulisan.

Berikut ini adalah kaidah yang “dianggap” bermasalah.

1) Bab I, Bagian F, Kaidah 3

“Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan *salah satu* unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalan dapat dilakukan (1) di antara unsur-unsur itu *atau* (2) pada unsur gabungan itu sesuai dengan kaidah 1a, 1b, 1c, dan 1d di atas.”

*Penggunaan *salah satu* dan *atau* pada rumusan di atas agak membingungkan mengingat contoh yang diberikan (biografi, fotografi, kilogram, dsb.) justru tidak mendukung rumusan itu.

2) Bab II, Bagian A, Kaidah 5

“Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang *tertentu*, nama instansi, atau nama tempat.”

*Bagaimana kata *tertentu* pada *pengganti nama orang tertentu* itu harus ditafsirkan?

*Bagaimana dengan kalimat “Dalam sambutannya Menteri menerangkan”?

3) Bab II, Bagian A, Kaidah 9

“Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi.”

“Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai nama jenis.”

* Benarkah penulisan “Dia lahir di *pulau* Lombok”?

* Yang benar “tari jawa” atau “tari Jawa”?

- 4) Bab II, Bagian A, Kaidah 13
 “Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan.”
 *Apakah Dt., St. dan T. sebagai singkatan gelar Datuk, Sutan, dan Tengku termasuk dalam kaidah ini atautkah hanya untuk gelar akademik?
 * Bagaimana kedudukan dr. sebagai singkatan gelar dokter?
- 5) Bab II, Bagian B, Kaidah 3
 “Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya.”
 *Bagaimana seharusnya menuliskan *Bhinneka Tunggal Ika*, *Marching Band*, dll.?
- 6) Bab III, Bagian B, Kaidah 3
 “Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai.”
 * Apakah bentuk seperti *kedutaan besar* dianggap salah?
- 7) Bab III, Bagian B, Kaidah 4
 “Jika *salah satu* unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, gabungan kata itu ditulis serangkai.”
 *Apakah anumerta dan dasawarsa yang dipakai sebagai contoh memenuhi ketentuan tersebut?
 *Benarkah penulisan *Sapta Prasetya Korpri* ini?
- 8) Bab III, Bagian F
 “Kata depan *di*, *ke*, dan *dari* ditulis terpisah dari yang mengikutinya kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti *kepada* dan *daripada*.”
 * Bagaimana tulisan yang benar untuk *diantara*?
- 9) Bab III, Bagian I, Kaidah 2
 “Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang *diperlakukan sebagai kata*.”
 *Apakah *GN-OTA* termasuk akronim?
- 10) Bab III, Bagian J, Kaidah 8
 “Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf kecuali ...”
 * Manakah yang lebih baik jika dilihat dari segi keterbacaan?
 “Ayah memesan tiga ratus ekor ayam.” atau
 Ayah memesan 300 ekor ayam.

- * Bagaimana jika dilihat dari segi efisiensi?
- * Apa manfaat yang diperoleh dengan mengharuskan penulisan seperti itu?

11) Bab IV

*Manakah kaidah yang harus diterapkan untuk menyerap kata seperti yang berikut?

pager, mild, (king) size, fresh, sale, fair, rally, range, game

12) Bab V, Bagian E, Kaidah 1

“Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris.”

“Suku kata yang berupa satu vokal tidak ditempatkan pada ujung baris atau *pangkal baris*.”

(Contoh yang salah)

“Walaupun sakit, mereka tetap tidak ma-
u beranjak....”

*Wajarkah kaidah dan contoh tersebut? Bukankah tempat untuk tanda hubung pada ujung baris itu dapat dipakai oleh huruf yang ada pada pangkal baris tersebut?

(* = Komentar atau ulasan pemakalah)

3. Masa Depan

Berangkat dari keadaan masa kini seperti yang tergambar pada bagian sebelumnya, kita songsong masa depan yang penuh tantangan dengan penuh rasa percaya diri. Rasa percaya diri ini perlu disertai persiapan yang memadai kalau kita sebagai bangsa mau berperan serta dalam era globalisasi tersebut.

Bahasa sebagai salah satu lambang jati diri bangsa perlu ditata serapi mungkin agar bahasa sebagai sistem dan sekaligus sebagai sarana komunikasi dan pemersatu bangsa dapat berfungsi dengan baik. EYD sebagai sarana vital dalam komunikasi tertulis tidak akan pernah berkurang perannya dalam era apa pun. Oleh karena itu, adalah tugas kita bersama untuk memantapkan perannya sebagai sarana utama dalam komunikasi tertulis. Untuk itulah kita perlu memantapkan kaidah EYD itu sendiri terlebih dahulu.

Perlu dicatat bahwa betapa pun hebatnya kaidah EYD itu kalau pemakainya tidak bergairah untuk menggunakannya, atau tidak berdisiplin ketika menggunakannya dalam komunikasi pastilah kaidah yang hebat itu tidak ada artinya. Oleh sebab itulah, mulai saat ini program peningkatan kesadaran dan sikap berbahasa harus dimulai secara terarah, terencana, dan terpadu.

Ketiga kata kunci itu sangat penting untuk dipedomani dalam membuat program karena kata kunci yang pertama (terarah) menuntut dan menuntun kita dalam mengidentifikasi dan menetapkan sasaran. Kata kunci kedua (terencana) mengingatkan kita agar selalu memperhatikan tahap-tahap yang harus dilalui dan memperhitungkan pula ketersediaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam melaksanakan dan meng-

evaluasi program. Yang ketiga (terpadu) mengingatkan kita agar selalu memperhitungkan pihak-pihak yang terlibat langsung dan pihak terkait sehingga keterlaksanaan program akan lebih terjamin. Dengan kata lain, unsur manajemen juga akan sangat menentukan tingkat keberhasilan program, terutama dalam era globalisasi yang akan datang.

a. Sikap Bahasa

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian “Masa Kini” di atas, pemantapan kaidah EYD memprasyaratkan terwujudnya sikap bahasa yang positif dari para pemakai bahasa Indonesia melalui gerakan kesadaran berbahasa. Jika keadaan seperti itu dapat terwujud, pasti kegiatan membaca dan menulis akan sangat meningkat; dan hal yang demikian itu memang merupakan ciri masyarakat modern, lebih-lebih dalam era informasi yang penuh tantangan ini.

Pada waktu mendatang diharapkan tidak akan terjadi pengulangan sejarah perombakan ejaan. Dengan demikian, antipati terhadap perubahan ejaan tidak akan ada lagi. Jika keadaan yang seperti itu dapat terwujud, tentu pembinaan kesadaran berbahasa akan jauh lebih mudah serta upaya menumbuhkan dan meningkatkan sikap berbahasa yang positif akan lebih cepat berhasil.

Dengan tidak bermaksud mendiskreditkan siapa pun, upaya menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran/sikap berbahasa yang baik pada waktu yang akan datang harus merupakan upaya bersama dari semua pihak, baik di tingkat Pusat maupun daerah. Selain itu, dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat, upaya pemasyarakatan kesadaran/sikap berbahasa yang positif sebaiknya bertumpu pada pemanfaatan media massa.

b. Pemasyarakatan Ejaan

Pemasyarakatan ejaan (EYD) dilakukan dengan maksud agar ejaan itu dipahami oleh masyarakat luas dan akhirnya mau serta dapat digunakan oleh mereka dengan baik. Kalau hal ini terjadi, otomatis kaidah ejaan itu akan semakin mantap. Sebaliknya, jika masyarakat tidak mengetahui adanya kaidah ejaan, terutama yang baru, tentu saja kaidah tersebut tidak akan pernah dipakai dan akhirnya kaidah itu termasuk kategori yang tidak mantap.

Sehubungan dengan kemungkinan terjadinya situasi yang demikian itu, maka pemasyarakatan ejaan harus menggunakan sarana yang ampuh agar dapat menjangkau masyarakat banyak. Hingga saat ini, sarana yang dianggap paling ampuh untuk menjangkau masyarakat luas adalah media massa.

Pemanfaatan jalur yang tepat dalam kegiatan pemasyarakatan ejaan, di samping dapat mencegah timbulnya situasi yang tidak diinginkan, jalur itu juga dapat berfungsi sebagai faktor pendorong keberhasilan usaha. Oleh karena itu, memanfaatkan dunia pendidikan sebagai salah satu jalur pemasyarakatan ejaan merupakan pilihan yang tepat, efisien, dan efektif. Jalur lain yang perlu dipertimbangkan untuk dimanfaatkan, antara lain, ialah dunia usaha, birokrasi, organisasi profesi, dan organisasi masyarakat.

Sisi lain yang penting untuk diperhatikan dalam upaya pemasyarakatan ejaan ialah jumlah dan mutu informasi yang akan disampaikan. Idealnya, makin sedikit dan bermutu informasi yang disampaikan setiap kali akan makin mudah memasyarakatkannya, makin baik hasilnya, dan makin murah biayanya. Untuk memungkinkan hal tersebut terjadi, pemasyarakatan ejaan di masa depan harus dikelola berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern.

c. Kaidah Ejaan

Jika dilihat dari segi kaidah EYD yang berjumlah lebih dari 200 butir seperti yang terdapat dalam PUE, sebenarnya 12 butir kaidah yang dipertanyakan tersebut merupakan jumlah yang relatif kecil. Walaupun demikian, demi kelancaran komunikasi masa depan kaidah-kaidah itu perlu dibahas secara mendalam dan tuntas.

Makalah ini sengaja tidak mengusulkan bentuk perbaikannya karena pertimbangan berikut.

- 1) Tidak ingin memberikan kesan mempengaruhi apalagi menggurui.
- 2) Memberikan kesempatan untuk berdiskusi secara bebas tanpa beban.
- 3) Berharap menerima masukan berupa alternatif yang jumlahnya cukup banyak.

Mengingat bahwa pengaruh bahasa Inggris terhadap bahasa Indonesia makin lama makin terasa, lebih-lebih pada era globalisasi ini, tampaknya kaidah penyerapan yang berlaku saat ini perlu dikaji lagi dengan seksama. Mungkinkah dan bijaksanakah kita bertahan pada kaidah yang ada? Hal ini adalah tantangan bagi kita semua untuk memecahkannya secara arif.

4. Simpulan

- a. Tingkat kemantapan kaidah EYD dalam PUE berbeda-beda.
- b. Penyebab ketidakmantapan bisa bersumber dari kaidah itu sendiri, bisa berasal dari sikap pemakai, dan bisa juga karena upaya pemasyarakatan yang kurang berhasil.
- c. Jika dilihat dari segi waktu berlakunya EYD, perkembangan bahasa Indonesia selama ini, dan juga tantangan dalam era globalisasi tampaknya perlu dipertimbangkan kemungkinan adanya revisi PUE.
- d. upaya pematapan kaidah ejaan seperti yang diusulkan dalam makalah ini perlu dikaji lebih lanjut.
- e. Pemasyarakatan EYD secara bertahap perlu mulai direncanakan.
- f. Manajemen modern perlu segera diterapkan dalam upaya pemasyarakatan EYD.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B9
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 15.30--16.20
Judul Makalah	: Ejaan yang Disempurnakan, Masa Kini dan Masa Depan
Penyaji	: A. Latief
Pemandu	: Basuki Suhardi
Pencatat	: a. Isdiarto b. Hani'ah
Peserta	: 80 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suryati, Universitas Tanjungpura, Pontianak

a. Pertanyaan:

Di dalam buku seri penyuluhan EYD ada kata *dianjurkan*, *dihindari*, dan *digunakan* dalam contoh-contoh kaidah EYD. Saya bingung dengan maksud kata-kata dalam buku seri penyuluhan itu. Bagaimanakah menurut Bapak tentang hal yang saya kemukakan tersebut atau apa maksud kata-kata di dalam contoh-contoh kaidah EYD tersebut.

b. Jawaban:

Di dalam lapangan saat kita memberikan penyuluhan kata-kata di dalam contoh-contoh kaidah EYD tersebut dapat kita jelaskan dengan kemampuan kita menafsirkan kata-kata tersebut dengan benar.

2. Penanya: Sudradjat, Universitas Lampung, Bandar Lampung

a. Pertanyaan:

Kita memerlukan kaidah EYD yang mengatur penulisan nama diri sehingga masyarakat tidak sekadar asal-asalan menuliskan nama dirinya tanpa memperhatikan kaidah EYD. Contoh: Sunaryo atau Sunarjo.

b. Jawaban:

Kita tidak memiliki hak mengatur nama diri seseorang. Pertanyaan itu cocok pada tahun 1960--1970 sebelum adanya EYD.

3. Penanya: Ahmad Hamzah, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Bagaimanakah pemakaian tanda koma di dalam sebuah kalimat jika anak kalimat mendahului induk kalimat? Apakah kata *bahwa* di dalam sebuah kalimat perlu ditandai dengan tanda koma? Hal itu saya tanyakan karena kata *bahwa* merupakan penanda anak kalimat.

b. Jawaban:

Pertanyaan Bapak tidak relevan dengan topik makalah saya. Pertanyaan tersebut lebih tepat disampaikan di dalam bidang sintaksis.

4. Penanya: I Wayan Bawa, Universitas Udayana, Denpasar**a. Pertanyaan:**

Bagaimanakah mengatasi polemik yang terjadi sekarang tentang penulisan *dr.* (dokter) dan *Dr.* (dokter)?

b. Jawaban:

Penulisan gelar *dr.* dan *Dr.* bukan urusan kita, itu merupakan wewenang/urusan yang memiliki gelar, yaitu IDI.

RAGAM LISAN BAHASA INDONESIA

Amran Halim
Universitas Sriwijaya

Pokok bahasan yang diberikan kepada saya adalah mengenai ragam bahasa Indonesia lisan. Dalam hati saya berpikir-pikir bahwa mestinya ragam lisan bahasa Indonesia. Sejak Kongres Bahasa Indonesia I sampai VII ini ragam lisan bahasa Indonesia hampir-hampir tidak tersentuh.

Dalam waktu dua puluh tahun, sesudah disertasi saya, baru muncul lagi disertasi Pak Suparno tahun 1991. Mengapa demikian? Kalau kita berbicara tentang pembakuan bahasa Indonesia, hampir 100% perhatian kita tertuju kepada pembakuan bahasa Indonesia ragam tulis: tentang ejaannya, pilihan katanya, struktur kalimatnya, dan lain-lain sehingga ragam lisan hampir-hampir tidak tersentuh. Menurut dugaan saya, salah satu penyebabnya adalah karena ragam lisan dapat kita umpamakan sebagai seekor belut, begitu licin, dipegang kepalanya ekornya melenting sehingga lepas, dipegang ekornya kepalanya lepas. Kalau kita berbicara tentang ejaan, misalnya, kita dengan mudah dapat berbicara tentang pembakuan ejaan. Kita beli sebuah mesin ketik, semua orang memakai mesin ketik yang sama, maka huruf kita akan sama. Akan tetapi, kalau kita menggunakan ragam lisan, ceritanya tidak sama. Tuhan itu Mahakaya. Bukan hanya sidik jari yang berbeda, melainkan juga alat bicara. Di Indonesia ini ada 250 juta orang, maka ada 250 juta perangkat alat bicara yang menyebabkan tiap-tiap orang, kata Pike, mempunyai ciri identitasnya sendiri.

Kalau kita perhatikan ragam lisan bahasa Indonesia, kita tidak bisa melepaskan diri dari kaitan antara ragam lisan dan ragam tulis. Dari tahun 1960-an dikatakan bahwa ragam lisan adalah primer (*speech is primary*), sedangkan ragam tulis adalah sekunder. Selama ini yang kita bicarakan adalah ragam tulis sebelum ragam tulis kita melalui proses pelambangan. Akan tetapi, di sini kita tidak berbicara tentang proses pelambangan di sini karena hal itu mempunyai tersendiri.

Pertanyaan kita adalah ragam lisan itu apa? Apakah merupakan sesuatu yang sederhana? Kalau kita berbicara tentang ragam lisan bahasa Indonesia, ada *ragam lisan nasional* yang ciri-cirinya belum pernah kita rumuskan, tetapi hal itu seperti si bisu: terasa ada, terkatakan tidak. Di samping itu, ada ragam lisan yang kita akui, yaitu ragam lisan Jawa, Minang, Medan, Sunda, dan lain-lain dengan cirinya masing-masing. Ragam lisan yang terakhir ini disebut *ragam lisan regional*.

Ragam lisan nasional terdiri atas ragam lisan nasional resmi dan ragam lisan nasional tak resmi. Di antaranya ada ragam lisan resmi yang dijadikan ragam lisan tak resmi dan ada ragam lisan tak resmi yang dijadikan ragam lisan resmi, misalnya ragam lisan dalam iklan. Ragam lisan resmi dapat kita dengarkan, misalnya, dalam warta berita—yang ragam lisannya kita anggap baik. Jadi, ragam lisan resmi tidak ditentukan oleh pembicaranya, tetapi ditentukan oleh ciri-ciri ragam nasionalnya. Jadi, ukurannya bukan orangnya, melainkan lafalnya. Ragam lisan takresmi kita jumpai di

dalam pertemuan seperti kongres ini ketika berlangsung tanya jawab yang tidak diatur oleh pihak lain (pemandu). Di pihak lain, ragam lisan regional dapat dipecah-pecah menjadi *ragam lokal* (seperti ragam regional Sunda dibagi atas ragam regional Sumedang, Cirebon, Sukabumi, Tasikmalaya, dan lain-lain). Ragam lisan lokal itu tidak diketahui secara pasti jumlahnya.

Kalau berbicara tentang ragam lisan, pada umumnya kita hanya memperhatikan lafalnya. Sebenarnya ragam lisan itu ditandai oleh tata bunyi, lafal, bentuk kata, pilihan kata, sintaksis, paragraf, dan wacana. Tata bunyi ditandai oleh kualitas vokal dan kualitas konsonan. Misalnya *i* pada suku tertutup di akhir kata. Pengucapannya tidak sama. Contoh: [titik] atau [titek]. Tentang bentuk kata, apakah kita ucapkan, misalnya, [himbau] atau [imbau], [mengantuk] atau [ngantuk].

Tentang pilihan kata, dalam karya ilmiah kita berusaha menjadikan karya kita seilmiah mungkin dengan kata-kata sepanjang mungkin dan sesukar mungkin, sedangkan dalam ragam lisan kita berusaha agar apa yang dikatakan itu tertangkap dengan cepat.

Selama ini masalah sintaksis juga belum banyak dikelola dengan ciri-ciri tekannya. Paragraf juga belum banyak dikemukakan ragam lisannya. Wacana juga demikian. Contoh, apabila orang berdoa, kita belum tahu kapan berakhirnya, tetapi begitu membaca *Robbana atina fiddunya*, kita tahu bahwa doa itu akan segera berakhir karena wacana itu merupakan tanda akan berakhirnya wacana doa. Tata bunyi biasanya hanya berkisar pada soal vokal, diftong, dan konsonan.

Yang belum banyak dibicarakan adalah soal suprasegmental yang mencakup tekanan dan lagu atau intonasi. Mengenai tekanan, kita belum melakukan penelitian yang meyakinkan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pernah memulainya dengan membentuk laboratorium fonetik, tetapi tidak berhasil karena berbagai alasan. Dengan kata lain, penelitian mengenai ciri-ciri prosodi atau ciri unsur suprasegmental ragam lisan bahasa Indonesia masih merupakan lapangan yang belum tersentuh.

LAPORAN SIDANG

Jenis Sidang	: Kelompok B6
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 14.50--15.40
Judul Makalah	: Ragam Lisan Bahasa Indonesia
Penyaji	: Amran Halim
Pemandu	: Hans Lapoliwa
Pencatat	: a. Amran Purba b. Nikmah Sunardjo
Peserta	: 150 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Sutedja Sumadipura, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Setiap pembelajar bahasa akan mulai belajar bahasa, apakah bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing, dari ragam bahasa lisan. Bapak memberi contoh kata *saya*, kalau tidak salah, dalam konteks jawaban atas pertanyaan, "Siapa di luar?" Secara lengkap, jawaban kalimat itu, misalnya, "*Saya yang ada di luar.*"

Ada orang yang bertanya kepada saya, "Kalau begitu, belajar ragam bahasa lisan lebih mudah daripada ragam bahasa tulis?" Juga ada yang bertanya, "Apakah perlu setiap pembelajar bahasa itu belajar bahasa tulis juga?" Saya pernah belajar bahasa Jawa. Sampai sekarang saya tidak bisa menulis dalam bahasa Jawa, tetapi secara lisan saya mengerti.

b. Jawaban:

Pertama, menurut pandangan saya, ragam bahasa lisan itu jauh lebih rumit daripada ragam bahasa tulis karena seperti telah saya katakan bahwa dari sebuah kalimat yang terdiri atas lima kata, kita dapat membolak-balik susunan katanya. Misalnya,

*Dia makan nasi di dapur kemarin.
Kemarin dia makan nasi di dapur.
Makan nasi dia di dapur kemarin.
Di dapur dia makan nasi kemarin.*

Selain itu, potongan-potongannya dapat dilakukan sebagai berikut.

*Dia makan nasi di dapur/kemarin
Dia makan nasi/di dapur kemarin
Dia/makan nasi di dapur kemarin*

Pernyataan *Sudah tapi takut!* tidak sama dengan *Sudah! Tapi takut*. Kedua pernyataan itu tidak dapat dikelola dengan pelambangan. Pernyataan itu sukar dilambangkan. Di dalam naskahnya paling tertulis, *Sudah, tapi takut*. Bagaimana pernyataan, "*Sudah, tapi takut*," itu diucapkan? Itulah yang merupakan ciri atau kaidah ragam bahasa lisan yang lebih rumit itu. Kalau dalam ragam tulis, kita boleh memotong-motong bagian kalimat, misalnya dalam dua buah kalimat yang pokok kalimatnya sama, pokok kalimat yang kedua dapat kita buang. Misalnya, *Dia membeli buku. Dia membaca buku itu*. Kedua kalimat itu dapat kita katakan *Dia membeli buku itu, lalu membacanya*, tidak lagi kita sebutkan *Dia membeli buku itu, lalu dia membaca buku itu*.

Dalam ragam lisan, semua yang sama boleh kita buang karena maksudnya masih terungkap. Contoh yang hampir sama saya berikan kepada mahasiswa saya.

Kalau ada dua orang muda-mudi ingin membina rumah tangga, lalu yang meminang pihak laki-laki. Pihak laki-laki datang kepada keluarga pihak perempuan. Pihak laki-laki mengatakan, "Kami punya anak laki-laki, Bapak punya anak perempuan, kami ingin meminangnya." Lalu, bapak anak perempuan pergi ke dalam dan berkata kepada anak gadisnya. "*Tu, orang tua si Teja udah datang, tu*. Si anak gadis yang duduk ini kalau dia memakai jilbab, ujung jilbabnya diplintir-plintir, sambil menunduk. "Dia, katanya, menginginkan kamu untuk dikawinkan dengan si Teja." Si gadis tidak juga memberikan jawaban. "Kamu bilang, kalau kamu setuju, kami juga setuju." katanya. Lalu, bapak anak gadis itu keluar menemui bapak si Teja. Katanya, "Alhamdulillah, anak kami setuju." Dari mana ayah gadis itu mendapat simpulan seperti itu?

Kalau sebagai pegawai negeri golongan III/a, kita dipanggil oleh induk semang kita, katanya, "Mulai minggu depan Anda pindah ke urusan kendaraan." Kita diam. Apakah sang Bos berkata, "Alhamdulillah." Tentu tidak karena diam dalam hal itu berarti 'Jangan Pak!' Kalau kita setuju, kita katakan, "Siap Pak! Sebagai pegawai negeri saya siap bertugas di mana saja." Jadi, dalam ragam bahasa lisan itu, tanpa kata pun makna terungkap. Menurut pandangan saya, ragam bahasa lisan itu jauh lebih rumit.

2. Penanya: Sugiyono, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Di atas kertas kita memang bisa meramalkan bahwa lafal lisan baku itu nanti ada. Nah, nantinya itu kira-kira kapan, Pak? Apakah menunggu para politikus itu misalnya harus ahli bahasa semua sehingga bisa kita contoh bahasanya atau menunggu apa? Jadi, kira-kira prediksinya itu setelah kapan lafal baku ini bisa terwujud?

b. Jawaban:

Pertanyaan Anda baik sekali. Kalau kita lihat negara, salah satu negara yang

telah mencoba merumuskan ragam bahasa lisan bakunya itu adalah Inggris. Samuel Jonson menyusun *Pronouncing English Dictionary*. Buku itu dijadikan pegangan untuk ragam lisan Inggris yang disebut *received pronunciation* (RP). Itu adalah ragam baku bahasa Inggris, Inggris yang ibu kotanya London. Nah, kalau kita pergi ke London dan kebetulan penyiarnya itu orang dari Scotlandia, misalnya dari Edenberg, saya pernah mengalaminya. Dia menyiarkan berita di BBS dengan langgam, lagak, dan lagu seperti yang ada dalam *Pronouncing English Dictionary* itu dengan lagu keraton Inggris. Akan tetapi, setelah mikrofonnya dimatikan, dia keluar dan jika bertemu dengan kita, dia akan mengatakan, "Good morning, how are you? Its a raining, isn't." R-nya menggetar lebih hebat dari R kita, padahal tadinya pada waktu menyiarkan berita itu dia tidak mengatakan seperti itu. Dia mengatakan, "The Queen is no walking in the rain. The bird is plying."

Tidak ada *bird*, tetapi begitu mikrofonnya mati, dia akan keluar menemui kita dan berkata, "Good morning. It's a raining, isn't?" Jadi, bunyi [R] yang asli itu yang menjadi topik pembicaraan. Jadi, kalau ditanya kapan kita memiliki bahasa baku yang dapat kita susun dalam bentuk buku dengan judul, misalnya, *Tata Bahasa Lisan Baku Bahasa Indonesia*, saya tidak berani menerka-nerkanya, Pak.

Pada tahap awal saya harapkan paling lambat dalam 10 tahun lagi kita sudah dapat menghasilkan kamus lafal bahasa Indonesia sehingga apa yang dikhawatirkan oleh Bapak Ajip Rosidi kemarin tidak perlu menjadi bahan pikiran kita lagi. Bahwa yang betul itu [macut] bukan [macet], nanti akan kelihatan dari kamus lafal itu. Kamus lagu atau tata bahasa Indonesia di dunia ini belum pernah saya lihat. Di Amerika Serikat, misalnya, tokoh-tokoh seperti Kenneth L. Pike yang banyak menyibukkan diri dengan soal ragam bahasa lisan, intonasi, termasuk fonemiknya, banyak pengaruhnya di Indonesia. Charles Fries (1950-an) juga banyak bicara tentang ragam lisan Amerika Serikat, tetapi buku pegangan tentang lagu bahasa Inggris Amerika Serikat tidak pernah terbit. Jadi, di Amerika Serikat mereka tidak berbicara tentang *received pronunciation*, lafal yang berterima, tetapi berbicara tentang *general American English*. Nah, itu artinya tidak tahu batasannya, apakah batasannya melalui proses eliminasi yang bukan *general English* itu tidak standar? Ketika Presiden F.X. Kennedy berbicara, dia tidak menggunakan *general American* karena dia datang dari negara bagian timur laut, yaitu New England Manssance yang lafal bahasa Inggrisnya sama dengan lafal bahasa Inggris di England. Jadi, bukan *general American*. Kemudian digantikan oleh Jhonson yang datang dari bagian Texas yang lafalnya juga bukan *general American*. Dia memakai apa yang di Indonesia disebut *cowboy English*.

Di Indonesia pada tahap awal, menurut pandangan saya, perjuangan kita adalah menyusun kamus lafal, kemudian memantapkan kaidah umum mengenai di mana letaknya tekanan kata, tekanan kalimat yang lazim digunakan dalam ragam resmi. Ragam tidak resmi sangat sulit diatur. Kita boleh ber-

tanya, apakah iklan yang mengatakan *Sekarang/kurang baik* atau mestinya *Sekarang kurang baik*. Ini yang kita persoalkan dalam waktu 10 tahun yang akan datang. Kalau juga Pak Suparno ini berhasil mendidik, mendorong, merangsang, dan menjewer mahasiswanya, saya gagal melakukan hal itu, alias tak berhasil. Oleh karena itu, nanti ada lagi yang menyusun disertasi tentang lafal ini.

3. Penanya: Ahmad Badrun, Universitas Mataram, Lombok

a. Pertanyaan:

- 1) Saya mengamati gejala yang terjadi selama ini bahwa kadang-kadang atau seringkali kita menghakimi ragam bahasa lisan yang digunakan seseorang dengan kriteria ragam bahasa tulis, baik dalam hal lafal, struktur kalimat maupun morfologinya. Oleh sebab itu, bagaimana pendapat Bapak tentang penghakiman ragam bahasa lisan dengan kriteria atau kaidah ragam bahasa tulis?
- 2) Tadi Bapak membuka ceramah ini dengan mengatakan, "*Saya minta maaf, makalahnya tidak siap.*" Apakah fungsi-nya dalam konteks itu mewakili orang lain atau mewakili Bapak pribadi? Apakah kalimat yang Bapak gunakan itu bisa dibenarkan secara ragam bahasa lisan atau tidak?

b. Jawaban:

- 1) Jawabannya tidak. Tadi sudah saya gambarkan bahwa ragam bahasa lisan itu berdiri sendiri, punya kaidah sendiri, terkait dengan ragam tulis, tetapi kaitannya itu dalam proses pelambangan. Bagaimana [a] dituliskan, bagaimana pertanyaan dituliskan? Hal itu berkaitan dengan pelambangan saja. Jadi, apa yang ditulis tidak dapat diukur dengan ragam lisan dan sebaliknya, apa yang dilisankan tidak dapat diukur dengan apa dituliskan. Jadi, kedua ragam itu masing-masing berdiri sendiri. Bayangkan kalau kita karus mengucapkan, "Tergesa-gesa," dan kita betul-betul dikejar waktu, apakah sempat kita mengatakan /tergesa-gesa/, justru/tegesa-gesa/ yang diucapkan. Jadi, yang pertama, jawabnya, "Tidak."
- 2) Yang saya gunakan dalam wacana pembuka sidang ini adalah ragam lisan. Kalau mau dilengkapi, kalimatnya adalah, "Saya mohon maaf." Oleh karena itu, tidak disebut demikian. Dalam kalimat *Saya minta maaf makalahnya belum siap*, fungsi -nya di sana adalah -nya baku. Bentuk -nya di sana bukan sebagai pengganti orang ketiga, tetapi satu-satunya pilihan. Soalnya adalah -nya itu bukan soal siapa-siapa, dalam bahasa Inggrisnya adalah *the* yang ditekan. *The problem is... That's the question*. Itulah soalnya. Bentuk -nya di sini bukan *berarti* 'dia'. Jadi, penggunaan -nya di sana, menurut ukuran saya, sudah betul.

4. **Penanya:** Soenjono Dardjowidjojo, Universitas Atma Jaya, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Saya tidak seoptimis Pak Amran untuk mempunyai suatu ragam bahasa lisan yang baku karena kalau kita berbicara masalah bahasa lisan, *pronunciation* dan sebagainya mau tidak mau harus berurutan dengan neorogis kita, otak kita, *input* yang masuk, dan sebagainya sehingga macam bahasa yang keluar itu dipengaruhi besar sekali oleh *input* yang masuk sehingga akan sangat sukar bagi kita untuk membakukan bahasa lisan. Saya bayangkan, misalnya, jika kebakuan lafal itu mensyaratkan orang Bali untuk berkata [toko] dan bukan [toko], orang Batak untuk berkata [lemper] dan bukan [lEmpEr], dan sebagainya. Saya sadari bahwa memang di satu pihak kita bisa mengubah *pronunciation* kita dan sebagai buktinya kita bisa berbahasa Inggris dan dimengerti oleh orang Inggris, padahal sistem bunyi bahasa Inggris itu banyak berbeda dengan sistem bunyi bahasa Indonesia. Akan tetapi, hal itu memerlukan *special effect* dari kita. Menurut Pak Amran, apakah kita akan bisa membuat orang-orang dari berbagai suku bangsa lain di Indonesia ini untuk memberikan *special effect* tersebut sehingga orang Bali nanti tidak akan berkata [ke toko beli batu], misalnya, untuk mencapai suatu *common call* dari bahasa lisan baku itu?

b. **Jawaban:**

Sebelum Pak Njono masuk, sayangnya Pak Njono terlambat, tadi dimulai dengan, "Kalau kita perhatikan dan kita duduk menung-menung sambil mendengarkan orang berbicara, saya tidak tahu entah namanya naluri atau intuisi, kita mempunyai perasaan bahwa bahasa pembicara itu baik, lafalnya baik, lagunya baik, macam-macamnya baik. Kalau kita ditanya mengapa baik? baru kita tertegun. Mengapa baik? Akan tetapi, ada kesan bahwa bahasa Pak Harto itu kurang baik, bahasa Pak Habibie lumayan. Sampai pengucapan kata *ekonomi*, ketika beliau mengatakan, misalnya, "... masalah ekonomi," kita katakan ala...Pak Habibie. Jadi, dalam hati kita mempunyai pandangan atau penilaian seperti itu. Itulah yang saya maksudkan tadi. Demikian juga halnya kalau kita pergi ke Amerika. Jika kita tanyai orang Amerika, apakah bahasa seseorang yang kita dengarkan itu baik? Mereka dapat mengatakan *It's from Texas*. Saya katakan *No, that is your Chicago*. Ragam lisan yang paling baik adalah gaya Mid Wester. Jadi, begitu juga di Indonesia. Jadi, dalam waktu 10 tahun harapan saya--mudah-mudahan saya masih sempat melihatnya--atau mendengarnya. Sekurang-kurangnya tata bunyi bahasa Indonesia dapat kita sepakati mana yang dianggap baku dan mana yang tidak baku. Kita harus mengakui bahwa [toko] itu baku dan [toko] itu baku juga. Jadi, bakunya secara regional. Tadi saya menayangkan ragam bahasa lisan yang baku itu adalah ragam bahasa lisan yang tingkat kebakuannya berskala nasional. Kita tidak perlu mengetahui atau membedakan apakah dia orang Jawa, orang Irian, ataupun orang Ambon dan mengapa bahasa Indonesianya begitu baik. Kita

tidak perlu tahu hal itu. Sama halnya kalau kita pergi ke Amerika, lalu kita tanyakan apa ciri-ciri bahasa Inggris lisan yang baik di Amerika itu. Apakah bahasa lisan Bill Clinton itu baik? Belum tentu semua orang Amerika dapat menjawabnya. Akan tetapi, kalau ada orang New England berbicara, orang akan mengetahui perbedaannya. Jadi, dalam waktu 20 tahun insya Allah kita dapat menyepakati kaidah-kaidah umum, ragam bahasa Indonesia lisan yang kebakuannya secara nasional. Yang tingkat kebakuannya bersifat regional perlu kita berikan prioritas kedua. Yang dapat kita usahakan adalah pemantapan kesepakatan secara nasional. Hal itu, barangkali, memerlukan waktu 10 tahunan. Apakah dalam bahasa Indonesia itu ada 6 vokal atau 9 vokal perlu kita sepakati, dan saya hampir-hampir yakin bahwa dalam waktu 10 tahun ini akan dapat kita capai kalau orang-orang seperti Pak Suparno, lalu siapa lagi yang berminat mempelajari ragam bahasa Indonesia lisan ini dapat membangun generasi baru sebab mencari orang-orang seperti kita ini sudah terlewat untuk mulai lagi pikiran kita mempelajari bahasa lisan itu bukan hal yang mudah. Jadi, optimisme saya itu memang bukan optimisme yang berciri pada satu saat kita akan memiliki ragam lisan baku nasional yang utuh 100% karena tidak mungkin, panjang leher kita tidak sama, ukuran bibir kita tidak sama, tebal tipisnya tidak sama, panjang-pendeknya tidak sama, ada orang yang bibir atasnya ke depan, bibir bawahnya ke belakang, ada yang bibir bawahnya ke depan, ada yang dagunya panjang, dan sebagainya. Ini semua mempengaruhi kualitas bunyi yang kita ucapkan. Lubang hidung kita memang dua, tetapi ada yang kecil dan ada yang besar. Ada yang menunduk sehingga kalau dia berdiri, lubang hidungnya tidak kelihatan, ada yang kelihatan separuh, ada yang lubang hidungnya seperti lampu mobil. Ini mempengaruhi kualitas bunyi yang diucapkannya. Jadi, bagaimana kita mau mengusahakan atau memperjuangkan adanya lafal baku 100% itu karena tiap-tiap orang mempunyai identitas dirinya sendiri.

LAFAL BAHASA INDONESIA BAKU

Hans Lapoliwa

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pengantar

Sebagai bahasa yang hidup, bahasa Indonesia telah dan akan terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan masyarakat pemakainya. Luasnya wilayah pemakaian bahasa Indonesia dan keanekaragaman penuturnya serta cepatnya perkembangan masyarakat telah mendorong berkembangnya berbagai ragam bahasa Indonesia dewasa ini. Kenyataan bahwa bahasa Indonesia digunakan oleh kelompok-kelompok masyarakat penutur yang berbeda latar belakangnya, baik dari segi geografis maupun dari segi sosial, menyebabkan munculnya berbagai ragam kedaerahan (ragam regional) dan sejumlah ragam sosial.

Salah satu jenis ragam sosial yang bertalian dengan pokok bahasan makalah ini adalah ragam bahasa Indonesia yang lazim digunakan oleh kelompok yang menganggap dirinya terpelajar. Ragam ini diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah. Oleh karena itu, ragam ini lazim juga disebut ragam bahasa (Indonesia) sekolah. Ragam ini juga disebut ragam (bahasa) tinggi. Dalam kaitan ini patut dicatat bahwa bahasa Melayu yang diikrarkan sebagai bahasa Indonesia pada tanggal 28 Oktober 1928 tentulah ragam bahasa Melayu Tinggi pada waktu itu. Ragam bahasa kaum terpelajar itu biasanya dianggap sebagai tolok untuk pemakaian bahasa yang benar. Oleh karena itulah, ragam bahasa sekolah itu disebut juga (ragam) bahasa baku (lihat Alwi *et al.* 1998). Mengingat ragam bahasa baku itu digunakan untuk keperluan berbagai bidang kehidupan yang penting, seperti penyelenggaraan negara dan pemerintahan, penyusunan undang-undang, persidangan di pengadilan, persidangan di DPR dan MPR, penyiaran berita melalui media elektronik dan media cetak, pidato di depan umum, dan, tentu saja, penyelenggaraan pendidikan, maka ragam bahasa baku cenderung dikaitkan dengan situasi pemakaian yang resmi. Dengan kata lain, penggunaan ragam baku menuntut penggunaan gaya bahasa yang formal.

Dalam hubungan dengan gaya itu, perlu dicatat perbedaan ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Dari segi gaya, ragam bahasa tulis cenderung kata-katanya lebih terpilih dan kalimat-kalimatnya lebih panjang-panjang, tetapi lebih tertata rapi. Dengan kata lain, persoalan lafal yang menjadi persoalan pokok makalah ini tidak berkaitan langsung dengan perbedaan ragam bahasa Indonesia lisan dan ragam bahasa Indonesia tulis. Lafal bahasa Indonesia yang dipersoalkan dalam makalah ini adalah lafal (baku) yang dianggap baik untuk digunakan ketika berbahasa Indonesia baku dengan memakai bunyi sebagai sarannya, baik dengan cara berbicara maupun dengan cara membaca.

Atas dasar uraian singkat di atas pembicaraan dalam makalah ini akan meliputi pokok-pokok sebagai berikut:

- (1) ciri-ciri lafal baku bahasa Indonesia,
- (2) fungsi lafal baku bahasa Indonesia,

- (3) faktor penunjang dan penghambat pertumbuhan lafal baku, dan
 (4) upaya pembakuan lafal bahasa Indonesia

2. Ciri-Ciri Lafal Baku Bahasa Indonesia

Di atas telah disinggung bahwa bahasa baku baik ragam lisan maupun tulis selalu dikaitkan dengan bahasa sekolah yang juga disebut ragam tinggi. Ragam bahasa tinggi ini lazim digunakan oleh mereka yang menganggap dirinya terpelajar. Salah satu ciri yang menonjol bahasa kaum terpelajar ini, yang menyangkut lafal, adalah bahwa sistem bunyinya lebih kompleks jika dibandingkan dengan sistem bunyi yang dimiliki kaum tak-terpelajar. Bahasa kaum terpelajar cenderung mempunyai khazanah bunyi yang lebih banyak. Oleh karena itu, kaum terpelajar cenderung membedakan kata *seni* dari *zeni*, kata *pak* dari *vak*, kata *sarat* dari *syarat*, kata *kas* dari *khas*, dan kata *teras* (rumah) dari *teras* (dalam arti inti), sedangkan kaum tidak terpelajar cenderung tidak membedakan pasangan-pasangan kata itu dalam berbicara.

Bahasa kaum terpelajar juga cenderung mempunyai kaidah fonotaktis yang lebih rumit. Kaum terpelajar akan mengacu kumpulan bangunan sejenis di suatu tempat sebagai *kompleks*, aksi-aksi mahasiswa yang menuntut reformasi sebagai *demonstrasi*, dan olahraga konglomerat yang dilakukan di padang-padang bekas kebun teh dan sawah rakyat sebagai *golf*, sementara kelompok tidak terpelajar cenderung akan mengacunya masing-masing sebagai *komplek*, *demontrasi*, dan *golop* paling tidak dalam berbahasa lisan.

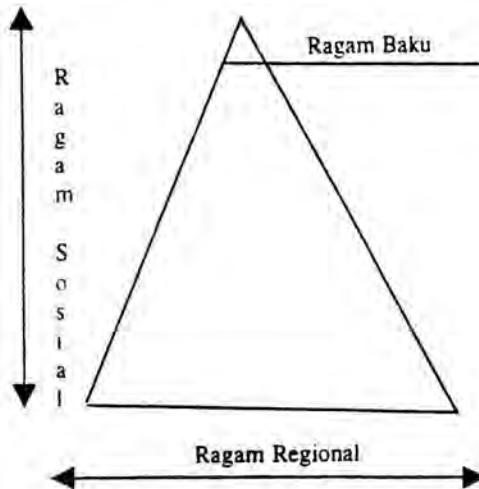
Selain khazanah bunyi yang lebih banyak dan kaidah fonotaktis yang menyatakan kombinasi-kombinasi bunyi yang lebih kompleks, bahasa kaum terpelajar cenderung juga berbeda dari bahasa kaum tak-terpelajar dalam hal kaidah pemberian tekanan pada kata. Bahasa kaum terpelajar cenderung memperlihatkan kaidah tekanan yang lebih teratur dan lebih berdasar daripada bahasa kaum tak-terpelajar. Perbedaan lafal akibat perbedaan kaidah penempatan tekanan antara kedua kelompok penutur bahasa Indonesia itu akan lebih tajam apabila kata-kata itu berada dalam untaian kalimat. Bandingkan kolom A dan B berikut (suku kata yang mendapat tekanan dinyatakan dengan kapital).

	A	B
(1)	memBAca membraCAkan membacaKANnya	memBAca memBAcakan memBAcakannya; membaCAkannya
(2)	terBANG menerBANGkan menerbangKANnya	TERbang meNERbangkan meNERbangkannya; menerBANGkannya

Pada contoh di atas tampak bahwa kaum terpelajar secara taat asas menempatkan tekanan pada suku kata kedua dari akhir (Kolom A) kecuali apabila suku kata kedua itu mengandung vokal *e* pepet (/ə/), sedangkan kelompok tak-terpelajar cenderung me-

nempatkan tekanan pada bentuk dasar pada suku yang tetap atau pada suku ketiga dari akhir (Kolom B), tanpa memperdulikan apakah suku tersebut mengandung *e* pepet atau tidak.

Pada umumnya aspek-aspek bunyi dan tekanan yang membedakan ragam bahasa baku (ragam bahasa kaum terpelajar) dengan ragam bahasa tak-baku (ragam bahasa kaum tak-terpelajar) bersumber pada perbedaan sistem bunyi bahasa Indonesia dengan bahasa ibu para penutur yang cenderung menghasilkan ragam regional bahasa Indonesia yang lazim disebut *logat* atau *aksen*. Sejalan dengan itu, Abercrombie (1956) menulis bahwa ragam bahasa baku adalah ragam bahasa yang paling sedikit memperlihatkan ciri kedaerahan. Hubungan antara ragam kedaerahan dengan ragam baku, termasuk lafalnya, digambarkan oleh Trudgill (1975) seperti berikut.



Gambar itu memperlihatkan bahwa ragam baku (termasuk lafal baku) termasuk ragam sosial yang tinggi. Makin tinggi pendidikan seseorang cenderung akan meningkatkan status sosial seseorang--termasuk meningkatkan mutu bahasanya.

Khazanah bunyi beserta kaidah-kaidah yang mengatur distribusi bunyi-bunyi itu, termasuk kombinasi-kombinasi bunyi dalam kata yang diperbolehkan oleh kaidah fonotaktik, dan kaidah penempatan tekanan pada kata-kata bahasa Indonesia ragam baku dapat dilihat di dalam Alwi *et al.* (1998).

3. Fungsi Lafal Baku Bahasa Indonesia

Lafal merupakan perwujudan kata-kata dalam bentuk untaian-untaian bunyi. Lafal merupakan aspek utama penggunaan bahasa secara lisan. Dalam hubungan itu, lafal

baku dapat dipandang sebagai perwujudan ragam bahasa baku dalam bentuk untaian bunyi ketika berlangsung komunikasi verbal secara lisan yang menuntut penggunaan ragam baku. Persoalannya adalah peristiwa komunikasi lisan apa saja yang menuntut penggunaan ragam baku. Kridalaksana (1975) mencatat empat fungsi bahasa yang menuntut penggunaan ragam baku, yaitu (1) komunikasi resmi, (2) wacana teknis, (3) pembicaraan di depan umum, dan (4) pembicaraan dengan orang yang dihormati. Dari empat fungsi bahasa yang menuntut ragam baku itu, hanya dua yang terakhir yang langsung berkaitan dengan komunikasi verbal secara lisan. Dengan kata lain, lafal baku perlu digunakan dalam pembicaraan di depan umum, seperti kuliah, ceramah, khotbah, dan pidato, atau dalam pembicaraan dengan orang yang dihormati seperti pembicaraan dengan atasan, dengan guru, dan dengan orang yang baru dikenal.

Di atas telah kita lihat bahwa ragam bahasa baku dianggap sebagai ragam bahasa yang baik yang cocok untuk keperluan komunikasi verbal yang penting, yang menjadi tolok untuk pemakaian bahasa yang benar, dan yang bergengsi serta berwibawa. Dalam hubungan dengan fungsi sosial bahasa baku itu, Moeliono (1975) mencatat empat fungsi pokok, yaitu (1) fungsi pemersatu, (2) fungsi penanda kepribadian, (3) fungsi penanda wibawa, dan (4) fungsi sebagai kerangka acuan. Dengan demikian, lafal baku--sebagai perwujudan bahasa baku secara fonetis--mempunyai fungsi sosial sebagai (1) pemersatu, (2) penanda kepribadian, (3) penanda wibawa, dan (4) sebagai kerangka acuan.

Pengikraran bahasa Melayu (tinggi) sebagai bahasa Indonesia 70 tahun lalu merupakan peristiwa bersejarah yang sangat penting dalam proses perkembangan bangsa Indonesia yang bersatu. Sulit untuk dibayangkan apa yang akan terjadi dengan bangsa Indonesia yang terdiri atas ratusan suku bangsa dengan latar belakang kebahasaan yang ratusan pula dan menyebar di kepulauan Nusantara yang luas ini jika tidak ada satu bahasa sebagai alat komunikasi antara satu dengan lain. Kehadiran suatu lafal baku yang perlu digunakan sebagai tolok dalam berbahasa lisan pada peristiwa-peristiwa tutur resmi yang melibatkan pendengar dari berbagai kelompok suku tentulah merupakan suatu keharusan.

Fungsi kepribadian lafal baku akan tampak apabila kita terlibat dalam pergaulan antarbangsa. Melalui bahasa lisan seseorang, kita dapat mengenal apakah dia menggunakan logat asing ataukah logat baku. Orang asing yang belajar bahasa Indonesia dapat saja mencapai penguasaan bahasa Indonesia yang sangat baik. Namun, itu biasanya terbatas pada bahasa tulis. Atau, kemungkinan lain, dapat saja kita terlibat dalam percakapan dengan bangsa serumpun, misalnya dengan orang Malaysia atau Brunei Darussalam. Dari segi perawakan tentu sulit untuk membedakan satu sama lain, tetapi melalui logat/dialek yang digunakan kita dapat mengenal apakah seseorang termasuk bangsa Indonesia atau tidak.

Fungsi penanda wibawa lafal baku merupakan suatu fungsi yang mempunyai nilai sosial yang tinggi dalam suatu masyarakat. Kemampuan seseorang dalam menggunakan lafal baku cenderung akan ditafsirkan bahwa orang itu adalah orang terpelajar dan karena itu patut disegani. Kewibawaan lafal baku tampak jelas dalam pergaulan sehari-hari. Dalam senda gurau tidak pernah kita mendengar lafal baku dijadikan

bahan olok-olok. Pada umumnya yang kita dengar adalah logat (lafal) yang bersifat kedaerahan.

Fungsi lafal baku sebagai kerangka acuan berarti bahwa lafal baku dengan perangkat kaidahnya menjadi ukuran atau patokan dalam berbahasa Indonesia secara lisan pada situasi-situasi komunikasi yang resmi.

4. Faktor Penunjang dan Penghambat Pertumbuhan Lafal Baku

Dengan faktor pendukung pertumbuhan lafal baku di sini dimaksudkan semua faktor yang dianggap memberikan dampak positif terhadap kehadiran lafal baku bahasa Indonesia. Sebaliknya, faktor penghambat pertumbuhan lafal baku adalah semua faktor yang dianggap memberikan dampak negatif terhadap pertumbuhan/kehadiran lafal baku bahasa Indonesia. Oleh karena itu, pembicaraan pada seksi ini akan mencoba mengidentifikasi beberapa isu atau masalah yang bertalian dengan lafal baku kemudian melihat apa segi positifnya dan apa segi negatifnya. Masalah yang bertalian dengan lafal baku yang akan disorot dalam hubungan ini meliputi (1) isu persatuan dan kesatuan, (2) isu pendidikan, (3) isu kesempatan kerja, (4) isu keunggulan bahasa baku, dan (5) isu demokrasi dalam bahasa.

a. Isu Persatuan dan Kesatuan

Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan yang dihuni oleh ratusan suku bangsa dengan bahasa yang berbeda-beda jelas merupakan tantangan berat dalam rangka mempersatukan bangsa Indonesia ini. Adanya satu bahasa sebagai alat untuk mempersatukan bangsa Indonesia yang bineka itu merupakan suatu keharusan. Hal ini disadari benar oleh para pemuda yang hadir dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Melalui Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Melayu diikrarkan sebagai bahasa persatuan dengan nama bahasa Indonesia. Walaupun tidak ada catatan yang menyebutkan secara eksplisit ragam bahasa Melayu mana yang dinobatkan sebagai bahasa Indonesia itu, dapat dipastikan bahwa bukan ragam bahasa Melayu pasar. Ragam bahasa Melayu yang dinobatkan sebagai bahasa persatuan melalui Sumpah Pemuda itu tentulah ragam bahasa Melayu Tinggi karena ragam inilah yang diajarkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah-sekolah kebangsaan. Bersamaan dengan pengikraran ragam bahasa Melayu Tinggi sebagai bahasa Indonesia, Sumpah Pemuda itu juga secara sertamerta menobatkan lafal bahasa Melayu Tinggi sebagai lafal baku.

Fungsi bahasa Indonesia baku, termasuk lafalnya, sebagai alat pemersatu bangsa secara umum dapat dikatakan telah berjalan dengan baik. Hampir sebagian besar bangsa Indonesia telah dapat mengerti bahasa Indonesia. Namun, di sisi lain penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah pula mengakibatkan sebagian masyarakat yang belum menguasai atau dianggap belum mahir berbahasa Indonesia secara tidak sadar telah menciptakan pengotak-ngotakan masyarakat bangsa ini atas yang mahir berbahasa Indonesia dan yang tidak mahir berbahasa Indonesia. Upaya untuk mengendalikan pertumbuhan bahasa melalui perencanaan bahasa sesungguhnya merupakan upaya perencanaan perbedaan antara yang mahir dan yang kurang mahir

berbahasa Indonesia termasuk lafalnya.

b. *Isu Pendidikan*

Salah satu alasan yang sering dikemukakan dalam hubungan dengan upaya penetapan suatu ragam bahasa baku adalah pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah tentulah menuntut adanya bahasa pengantar yang dikuasai oleh guru dan murid. Pengembangan bahan-bahan ajar tentulah memerlukan satu bahasa demi penghematan. Adalah tidak ekonomis untuk menyediakan buku yang berbeda-beda dari segi bahasa bagi kelompok-kelompok yang berbeda bahasa seperti Indonesia. Ini tidak hanya mahal dari segi finansial, tetapi juga mahal dari segi ketenagaan. Dalam hubungan dengan penyelenggaraan pendidikan ini, peranan lafal baku sangat penting karena ragam bahasa yang digunakan sebagian besar adalah ragam lisan. Kegagalan seseorang menguasai lafal baku cenderung akan berakibat kegagalan dalam mencapai manfaat pendidikan di sekolah yang optimal.

Isu pendidikan berkenaan dengan lafal baku itu baru akan menjadi persoalan apabila sekolah memang menuntut penggunaan lafal baku. Murid yang tidak mahir menggunakan lafal baku cenderung akan dinilai "kurang berhasil" dalam mengikuti pendidikan. Kekurangberhasilan murid itu akan tampak menonjol dalam hal-hal yang menuntut penggunaan bahasa lisan seperti bercakap-cakap, menjawab pertanyaan secara lisan, menerangkan sesuatu, dan membaca bersuara.

c. *Isu Kesempatan Kerja*

Alasan lain yang biasa dikemukakan dalam usaha penetapan suatu bahasa baku termasuk lafal baku bertalian dengan kesempatan kerja. Prof. Emil Salim (1983) melaporkan bahwa hasil Sensus 1980 menunjukkan adanya hubungan positif antara penguasaan bahasa Indonesia dengan kesempatan kerja. Pendapatan per kapita rata-rata (GNP) yang menguasai bahasa Indonesia lebih tinggi daripada GNP kelompok masyarakat yang kurang menguasai bahasa Indonesia. Rendahnya GNP kelompok yang kurang menguasai bahasa Indonesia itu pastilah tidak berkaitan langsung dengan kemampuan intelektual atau keterampilan mereka. Kemungkinan besar perbedaan GNP itu lebih banyak ditentukan oleh kesan pertama yang didapatkan oleh para penyaring calon pekerja melalui lamaran tertulis dan/atau wawancara dengan pencari kerja tersebut. Ketidاكلancaran komunikasi antara calon pekerja dan penyaring calon pekerja cenderung ditafsirkan sebagai ketidakmampuan tenaga pencari kerja tersebut untuk melaksanakan beban kerja lowongan yang ada.

Di sini lagi-lagi isu bahasa baku, termasuk lafal baku, dapat menjadi masalah jika ragam bahasa baku itu dijadikan sebagai suatu prasyarat untuk bisa diterima sebagai tenaga kerja dalam suatu lembaga atau perusahaan. Buruh-buruh di suatu pabrik atau perkebunan serta pesuruh, tukang kebun, dan tenaga administrasi rendahan di kantor-kantor tidak perlu dipersyaratkan menguasai bahasa Indonesia baku secara lisan dan tertulis sama baik dengan mandor atau kepala bagian di kantor-kantor.

d. Isu Keunggulan Bahasa Baku

Di atas telah disinggung bahwa ragam bahasa baku cenderung dinilai sebagai bahasa yang bergengsi yang lebih baik daripada ragam lain atau ragam kedaerahan. Sentimen sosial yang melekat pada ragam baku itu cenderung ditafsirkan bahwa ragam bahasa baku lebih unggul daripada ragam kedaerahan dalam hal daya ungkapannya. Ragam bahasa baku (ragam tinggi) dianggap mampu mengungkapkan berbagai konsep ilmu pengetahuan dan teknologi modern, sedangkan ragam kedaerahan tidak.

Dalam hal-hal tertentu anggapan itu memang benar, tetapi itu terjadi karena ragam baku memang sengaja dikembangkan secara khusus untuk keperluan itu, terutama dalam hal peristilahannya. Secara teoretis, ragam apa pun yang digunakan asal tersedia perangkat istilah untuk bidang-bidang yang dipercakapkan tentulah bisa. Para ahli ilmu bahasa sudah sejak lama menerima pandangan bahwa semua bahasa di dunia ini sama baiknya. Apa yang bisa diungkapkan dalam satu bahasa pastilah dapat diungkapkan dalam bahasa lain walaupun dengan cara yang lebih panjang. Dalam kaitan ini, pandangan bahwa ragam bahasa baku lebih unggul dari ragam kedaerahan terletak pada kehematan dalam pengungkapan saja.

e. Isu Demokrasi dalam Bahasa

Penilaian ragam bahasa baku sebagai ragam yang berwibawa dan bergengsi dengan segala konotasinya telah menjadi salah satu alasan mengapa perlu ada ragam baku dan bahwa setiap warga negara perlu diberi kesempatan yang sama untuk mempelajari dan menguasai ragam bahasa baku, termasuk lafal baku itu.

Dalam negara seperti Indonesia yang warganya terdiri atas ratusan kelompok etnis dengan bahasa daerah yang beratus pula tentulah keinginan untuk memberi kesempatan yang sama untuk menguasai bahasa Indonesia (baku) merupakan suatu keharusan. Masalah yang timbul berkaitan dengan isu demokrasi dalam bahasa ini adalah bahwa tidak jarang murid mendapat hambatan dalam menggapai kemajuan dalam pendidikannya akibat ragam bahasa Indonesia baku yang belum dikuasainya dengan baik. Acapkali dapat terjadi seseorang menjadi segan, dan mungkin berkembang menjadi benci, berbicara karena dikritik atau diperolok-olokkan baik oleh guru maupun oleh teman-temannya. Apabila tekanan-tekanan psikologis seperti itu dialami oleh murid, maka dapat dipastikan bahwa dia tidak akan mencapai hasil yang memuaskan di dalam pendidikannya. Untuk menghindari tekanan-tekanan psikologis yang bisa diakibatkan oleh ketidakmampuan menguasai ragam bahasa baku itu, maka murid dapat pula menuntut hak bahasa lainnya, yaitu untuk belajar di dalam dialeknya sendiri sebagaimana disuarakan oleh UNESCO belakangan ini walaupun konsekuensinya jauh lebih tidak menguntungkan dilihat dari kepentingan bangsa.

5. Upaya Pembakuan Lafal Bahasa Indonesia

Adanya ragam baku, termasuk lafal baku, untuk bahasa Indonesia merupakan tuntutan Sumpah Pemuda dan UUD 1945. Pengikraran bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dengan nama "bahasa Indonesia" menuntut setiap orang Indonesia untuk bisa berkomunikasi satu sama lain, baik secara lisan maupun secara tertulis, dalam bahasa

persatuan. Penetapan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berarti bahwa segala bentuk kegiatan dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan dalam bahasa Indonesia. Semua kegiatan komunikasi verbal dalam bahasa Indonesia itu, secara lisan atau secara tertulis, hanya akan mencapai hasil yang baik jika ada semacam rujukan yang dimiliki bersama--dalam hal ini ragam baku bahasa Indonesia. Untuk keperluan berbahasa lisan tentu saja dibutuhkan lafal baku.

Upaya pembakuan lafal bahasa Indonesia pada dasarnya dapat dilaksanakan dengan dua jalur (1) jalur sekolah dan (2) jalur luar sekolah.

a. Pembakuan Lafal melalui Jalur Sekolah

Upaya pembakuan lafal bahasa Indonesia sebenarnya telah dimulai jauh sebelum bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan 70 tahun lalu. Upaya pembakuan itu dimulai di sekolah-sekolah yang mengajarkan atau memakai bahasa Melayu. Kehadiran Ejaan van Ophuijsen tahun 1901 telah meletakkan dasar yang kukuh bagi pertumbuhan lafal bahasa Melayu Tinggi yang kemudian dinobatkan sebagai bahasa Indonesia oleh Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Melalui tulisan yang diajarkan di sekolah-sekolah, murid-murid mulai membentuk lafal baku. Melalui tulisan yang mereka pelajari, mereka belajar mengucapkan kata-kata tertulis seperti *ada*, *apa*, dan *mana*, sebagaimana dituliskan dan bukan sebagai [adə], [apə], dan [manə] seperti kita dengar dalam bahasa Melayu Riau hingga dewasa ini.

Pembakuan lafal melalui sekolah pada umumnya dilakukan secara pasif. Guru tidak secara khusus melatih para murid untuk menggunakan lafal baku. Murid belajar lafal baku melalui apa yang didengarnya dari guru dan, pada tahap tertentu, dari sesama murid. Melalui pelajaran baca-tulis, murid dapat mengetahui nilai (fonetis) untaian huruf yang digunakan untuk menuliskan kata-kata Indonesia. Peranan guru dalam upaya pembinaan lafal bahasa baku sangatlah besar. Untuk dapat melaksanakan upaya pembinaan lafal baku itu guru hendaklah mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memperhatikan hal-hal berikut.

- (1) Guru haruslah menyadari bahwa lafalnya merupakan model atau kerangka acuan bagi murid-muridnya. Oleh karena itu, hendaklah guru mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Pengetahuan fonologi akan banyak membantu tugasnya.
- (2) Guru perlu mengetahui aspek-aspek fonologi yang khas di daerah tempatnya mengajar agar dapat mengetahui bunyi-bunyi yang sukar bagi murid-muridnya. Di daerah Tapanuli dan sebagian besar Indonesia bagian timur, vokal /ə/ cenderung diganti dengan /e/. Di Aceh, Jawa, dan Bali bunyi /t/ cenderung diganti dengan bunyi retrofleks /t̚/.
- (3) Guru hendaklah menyadari bahwa (ragam) bahasa menjadi lambang kelompok sosial. Oleh karena itu, guru perlu menghargai logat murid-muridnya. Apabila murid merasa direndahkan karena ketidakmampuannya berbahasa Indonesia dengan lafal baku sebagai akibat pengaruh logat/bahasa ibunya, ia cenderung menolak apa saja yang berbau lafal bahasa Indonesia baku.

b. *Pembakuan Lafal melalui Jalur Luar Sekolah*

Di atas telah disinggung bahwa lafal baku sebagai perwujudan ragam bahasa baku mempunyai nilai sosial yang tinggi. Oleh karena itu, di banyak tempat di dunia itu acapkali ragam bahasa para penutur dari kalangan kelas sosial atas dijadikan acuan atau model. Hal ini terlihat jelas di Indonesia. Ketika presiden sering terdengar mengucapkan *-kan* sebagai [kən] maka banyak orang yang latah ikut-ikutan mengucapkan [-kən] walaupun mereka bukan dari suku Jawa. Untuk bisa memberikan model lafal yang baik kepada masyarakat perlu diperhatikan hal-hal berikut.

- (1) Setiap pemimpin dan tokoh masyarakat yang biasa dalam tugasnya berhadapan langsung dengan rakyat perlu berusaha menggunakan lafal baku.
- (2) Para penyiar radio dan televisi hendaklah memberikan model yang baik bagi para pendengar khususnya dalam pembicaraan yang bersifat resmi, seperti pembacaan berita atau wawancara resmi dengan tokoh-tokoh masyarakat. Peranan televisi dan radio itu sangat besar dalam pembentukan lafal bahasa Indonesia yang ada dewasa ini.

6. Penutup

Pada seksi 4 di atas telah disinggung sejumlah aspek positif dan aspek negatif kehadiran ragam baku, termasuk lafal baku. Perdebatan itu mungkin hanya relevan bagi masyarakat yang monolingual atau paling tidak jumlah bahasanya sedikit. Bagi Indonesia yang penduduknya menggunakan ratusan bahasa daerah dan tersebar di ribuan kepulauan, kehadiran suatu bahasa baku, termasuk lafal baku bukan hanya perlu, tetapi suatu keharusan. Upaya untuk menentang pembakuan bahasa Indonesia sama artinya mengkhianati Sumpah Pemuda yang telah mengikrarkan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Persatuan yang kuat hanya bisa tercipta kalau ada bahasa yang digunakan bersama dengan pemahaman yang sama. Meskipun begitu, upaya pembakuan lafal hendaklah dilakukan secara hati-hati karena lafal lebih peka terhadap sentimen sosial. Upaya pembakuan lafal selama ini dapat dipertahankan. Yang perlu ditingkatkan adalah kesadaran kita sebagai pemodel lafal.

Daftar Pustaka

- Abercrombie, David. 1956. *Problems and Principles Studies in the Teaching of English as a Second Language*. London: Longman.
- Alwi, Hasan, Soenjono Dardjowidjojo, Hans Lapoliwa, Anton M. Moeliono. 1998. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* (edisi ketiga). Jakarta: Balai Pustaka.
- Kridalaksana, Harimurti. 1975. "Tata Cara Standardisasi dan Pengembangan Bahasa Nasional" Dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. No. 3:7--14. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Moeliono, Anton M. 1975. "Ciri-Ciri Bahasa Indonesia yang Baku" dalam *Pengajaran Bahasa dan Sastra*. No. 3:2--6. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Salim, Emil. 1983. "Membangun Bahasa Pembangunan". Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia IV.
- Tollefson, James W. 1991. *Planning Language, Planning Inequality*. London: Longman.
- Trudgill, Peter. 1975. *Accent Dialect and The School*. London: Edwar Arnold Ltd.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B8
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.50--17.40
Judul Makalah	: Lafal Bahasa Indonesia Baku
Penyaji	: Hans Lapoliwa
Pemandu	: George Bawole
Pencatat	: a. Juhriah b. I Wayan Tama
Peserta	: 100 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Rostina Tayib, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

a. Pertanyaan:

Kira-kira lafal siapa, Pak, yang bisa dijadikan pedoman untuk pembakuan lafal karena tidak satu pun dari pakar bahasa Indonesia yang bisa dijadikan pedoman untuk pembakuan lafal ini. Orang Makassar berbicara, saya tahu bahwa itu orang Makassar, artinya masih menunjukkan kedaerahannya, begitu juga yang lain. Jadi, menurut Bapak siapa kira-kira yang bisa dijadikan pedoman untuk lafal baku?

b. Jawaban:

Saya tidak bisa merekomendasikan terhadap orang tertentu. Yang menjadi pedoman Anda adalah rasa bahasa. Kalau Anda merasa bahwa bahasa yang diucapkan termasuk bahasa yang wajar atau tidak aneh itulah kira-kira ukurannya. Secara umum, tokoh-tokoh yang dapat diteladani adalah penyiar-penyiar di televisi terutama yang membaca berita.

2. Penanya: Sugiyono, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Saya ingin menginformasikan hasil penelitian saya, yang terakhir saya lakukan terhadap orang Sunda, yaitu yang mencoba meneliti bagaimana mereka melafalkan misalnya bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada dalam bahasa Sunda. Hasilnya menunjukkan bahwa pendidikan tidak mempengaruhi lafal tersebut karena terbukti bahwa ada orang yang pendidikannya tinggi, tetapi tidak bisa mengucapkan bunyi [f]. Kata *aktivitas*, misalnya, suku yang di depan diucapkan betul, tetapi suku yang di belakang diucapkan salah. Yang paling menentukan ternyata generasi. Saya berasumsi bahwa kalau generasi kita ini sudah habis, lafal baku itu akan ada, 25 tahun ke atas sebagai generasi tua dan 25 tahun ke bawah generasi muda. Nyatanya generasi muda ini bisa melafalkan secara benar. Selain itu, yang sangat berpengaruh adalah keseringan pemakai-

an. Jadi, kita ukur secara statistik formant-formant dari bunyi tertentu formannya sekian. Bagaimana pendapat Bapak?

b. Jawaban:

Pendidikan sebagai faktor yang mempengaruhi bahasa ragam baku, itu yang berlaku di luar, apakah demikian di Indonesia? Anda buktikan melalui penelitian buktinya ternyata tidak. Akan tetapi, saya kira pada umumnya mereka yang melalui pendidikan cukup lama di sekolah cenderung ada semacam tuntutan penggunaan ragam baku. Apakah generasi yang sekarang ini akan bisa mencapai lafal baku, saya agak khawatir. Barangkali generasi yang sekarang ini bisa melafalkan dengan mendekati lafal baku, tetapi dari segi fonotaktis acapkali mereka susah. Kata *golf*, misalnya, cenderung dilafalkan [golop]. Cukup lama kita mencapai kebakuan yang cukup luas. Soal ukuran baku secara akustis itu bisa saja kalau kita ukur. Apakah betul apabila saya ganti formant itu lalu menjadi baku, yang ada itu di mesin pendengaran kita yang amat terbatas.

3. Penanya: Akundani, IKIP Manado

a. Pertanyaan:

Saya kurang sependapat dengan Pak Hans yang terlalu pesimistis. Saya lebih optimistis. Sebenarnya pembakuan lafal ini bisa kita capai, saya ambil contoh, misalnya dialek Semarang. Di dalam dialek itu ada macam-macam, itulah dialek. Untuk lafal yang ada dalam bahasa ini kita bisa bertolak dari sana. Untuk menentukan lafal baku, kita bisa melakukannya dari dialek-dialek yang memiliki kesamaan. Kita harus memiliki keberanian untuk melemparkan ke masyarakat.

b. Jawaban:

Usaha membakukan itu jauh-jauh sebelumnya sudah dilakukan melalui sekolah. Ejaan van Ophuijsen itu secara tidak langsung membuat semacam kesamaan untuk lafal Indonesia yang umum. Sampai terwujudnya dalam tata bahasa baku, tetapi dalam praktik bisa terwujud dalam 10--20 tahun, saya tidak yakin. Untuk satu generasi 25 tahun ke bawah pun itu juga belum.

4. Penanya: Butar-Butar, IKIP Medan

a. Pertanyaan:

Kalau kita mencari lafal baku, sebenarnya, sudah salah karena lafal baku sudah ada. Sekarang kita hanya menilai lafal yang mana? Rasanya perlu dicari kelompok model lafal baku. Menteri kita, misalnya, bisa kita pakai contoh, juga penyiar televisi dan radio. Walaupun masih banyak yang salah, pada umumnya kita bisa mengucapkan atau melafalkan bahasa Indonesia itu seperti apa yang dilakukan oleh penyiar televisi dan radio itu.

b. Jawaban:

Kalau kita mau betul-betul ada lafal baku, harus ada rekaman nilai-nilai yang umum yang disajikan.

5. Penanya: Nangsari Ahmad, Universitas Sriwijaya, Palembang**a. Pertanyaan:**

Barangkali harus ada model-model. Pembelajaran bahasa asing supaya ada pedoman.

b. Jawaban:

BIPA harus memiliki rekaman model-model karena ragam baku jangkauannya lebih luas daripada ragam-ragam lokal. Paling tidak hal itu menjadi kesan yang baik bagi orang dari luar negeri.

6. Penanya: Purwadi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta**a. Pertanyaan:**

- 1) Guru tidak harus melafalkan bunyi-bunyi pada siswanya, yang sulit adalah masalah interferensi kebiasaan.
- 2) Menghargai kelompok minoritas *bis* --> *bus*, kelompok mayoritas menyatakan *bis*, minoritas *bus*.

b. Jawaban:

Kebiasaan bahasa ibu mempengaruhi proses pembentukan bahasa Indonesia. Inilah yang paling menonjol dalam pelafalan. Dalam hal ini saya menyerahkan kepada guru, tetapi guru harus bisa menjadi model. Soal *bus* dan *bis* bukan soal lafal dan ejaan, tetapi menyangkut soal kebijakan adaptasi bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia.

7. Penanya: Arifin, Universitas Hasannuddin, Ujung Pandang**a. Pertanyaan:**

- 1) Bagaimana cara melafalkan kata *energi* ada *enerhi*, *enerji*, *energi*. Yang benar adalah *energi* sesuai dengan wujud bunyi itu, apakah benar ini, Pak?
- 2) Idiolek tidak bisa dibakukan, apakah itu benar?

b. Jawaban:

Penjelasan Bapak, *energi* diucapkan sesuai dengan tulisannya, itulah memang aturannya. Tekanan harus digeser ke suku terakhir.

empat --> *empat*

Sebagai langkah awal perlu lafal bahasa Indonesia baku dicantumkan dalam kamus.

BAHASA INDONESIA, IPTEK, DAN ERA GLOBALISASI

Haryanto R. Putro dan Machmud Thohari
Institut Pertanian Bogor

1. Pendahuluan

Globalisasi diibaratkan sebagai kompresi ruang dan waktu, yang bukan secara fisik, melainkan terbentuknya suatu masyarakat yang tidak memiliki batas ruang dan waktu akibat dari berkembangnya suatu sistem komunikasi supermodern yang memungkinkan terjadinya akses individu informasi global. Berkembangnya teknologi internet telah mewujudkan ruang maya (*cyberspace*) yang memungkinkan terbentuknya sistem komunikasi global yang melibatkan masyarakat dari berbagai negara dan menggunakan multibahasa. Salah satu faktor kuat yang mendorong globalisasi adalah perkembangan iptek dan implementasinya dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

Dalam menghadapi kekuatan besar dan berjalan cepat tersebut, masyarakat, bangsa, dan negara harus mempersiapkan diri, tidak saja untuk tetap sintas (*survive*) dalam kehidupan global yang penuh dengan persaingan, tetapi harus berpikir juga bagaimana mengembangkan jati diri bangsa Indonesia agar eksis sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Dalam konteks ini, peran bahasa Indonesia menjadi sangat penting jika dipandang dari sisi (1) sebagai pemersatu lebih kurang 350 suku bangsa atau kelompok etnik yang memiliki keanekaragaman bahasa daerah yang sangat tinggi (665 bahasa); (2) sebagai alat komunikasi pembangunan yang mampu mengakomodasikan perkembangan iptek dan implementasinya di berbagai bidang; (3) sebagai alat komunikasi yang diakui oleh dunia internasional.

Makalah ini mengkaji peran bahasa Indonesia dalam perkembangan iptek di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi oleh berbagai pihak terkait, khususnya para pakar dan aktor pembangunan lainnya. Selain itu, dalam makalah ini juga dikemukakan berbagai indikator kemantapan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi global. Kerangka pikir utama yang melandasi penulisan makalah ini adalah sebagai berikut.

- a. Pengembangan iptek disebut berhasil apabila implementasinya mengakar kuat di kelompok-kelompok masyarakat yang relevan. Untuk itu, dibutuhkan kemantapan bahasa yang secara komunikatif mampu mengakomodasikan proses adopsi dan sosialisasinya.
- b. Bahasa Indonesia dipandang mantap dalam menghadapi era globalisasi bila bahasa tersebut secara efektif mampu memanfaatkan teknologi komunikasi modern untuk peningkatan dan mobilisasi kapasitas sumber daya manusia.

2. Peran Bahasa Indonesia dalam Perkembangan Iptek

Sasaran umum pembangunan jangka panjang (PJP) II di bidang iptek adalah tercapainya kemampuan nasional dalam pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek, serta peningkatan daya saing bangsa untuk memacu pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Dalam era globalisasi, perkembangan iptek harus dapat mendukung pembangunan sektor-sektor produktif nasional. Pengembangan iptek yang

berorientasi pada tercapainya tujuan pembangunan nasional hanya dapat diwujudkan dengan dukungan inovasi yang kuat dan mapan melalui penanganan dan pendayagunaan iptek secara optimal dan terencana.

Laras bahasa yang merupakan sarana utama bagi perekaman penemuan cara baru di bidang teknologi dan di dalam pengambilan keputusan manajemen akan menjadi bahasa yang paling banyak mengalami perluasan kosakata. Demi kelancaran komunikasi, proses pembangunan itu menjurus ke pembakuan bahasa pembangunan pada taraf nasional. Proses pembakuan itu menceminkan proses pengintegrasian yang dapat diperlamban oleh kegemaran beberapa teknokrat di Indonesia yang menaburi ujaran dan tulisannya mengenai pembangunan dengan kata dan ungkapan asing. Akibatnya ialah bahwa pemikirannya, yang boleh jadi sangat berguna, sulit dipahami di kalangan masyarakat luas yang justru diharapkan partisipasinya (Moeliono, 1997).

Peran normatif bahasa Indonesia dalam perkembangan iptek dapat dikaji dari beberapa pokok pikiran berikut.

- a. Bahasa Indonesia harus mampu menerjemahkan iptek dari bahasa sumbernya, baik bahasa asing (khususnya bahasa Inggris) maupun bahasa daerah, khususnya apabila iptek dikembangkan atas dasar pemuliaan nilai-nilai kearifan tradisional.
- b. Bahasa Indonesia harus secara efektif dapat digunakan sebagai alat komunikasi iptek di kalangan masyarakat ilmiah dan alat sosialisasi iptek dari masyarakat ilmiah kepada para aktor pembangunan di berbagai bidang, baik para pelaksana pemerintahan, masyarakat bisnis, aktivis LSM maupun masyarakat umum.

Hingga saat ini, banyak skripsi, tesis, disertasi, hasil penelitian, dan publikasi ilmiah yang masih mengandung istilah asing dan/atau padanannya ke dalam bahasa Indonesia yang belum dibakukan. Di kalangan masyarakat ilmiah masih dijumpai perbedaan-perbedaan penggunaan istilah untuk konsep yang sama. Efektivitas dan komunikasi di antara pakar dalam mengadopsi iptek dari bahasa sumbernya serta penyebarluasannya melalui dunia pendidikan akan menghadapi kendala apabila tidak tersedia istilah baku yang pengertian atau konsepnya disepakati bersama. Dari indikator-indikator itu, dapat dipahami bahwa upaya untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang berwibawa dan mapan belum menunjukkan hasil yang diharapkan.

Dalam sosialisasi dan implementasi iptek untuk mendukung pembangunan nasional, kendala tersebut semakin besar sebagai akibat dari keanekaragaman bahasa daerah. Para aktor pembangunan yang secara langsung berhadapan dengan masyarakat yang sehari-harinya menggunakan bahasa daerah (lihat Tabel 1) dan sebagian tidak memahami bahasa Indonesia (lihat Tabel 2) akan sulit mengomunikasikan program-program pembangunan yang direncanakannya. Sintesis mengenai hal ini telah dikaji oleh beberapa peneliti bahasa Indonesia (Suardi, 1995; Alwasilah, 1995; Lumintang, 1995). Sangat disadari bahwa tingkat keberaksaraan masyarakat sangat berpengaruh pada laju perubahan kebahasaan. Keberaksaraan, yang mendasari pertumbuhan ragam tulisan, makin tinggi tarafnya makin terasa pengaruhnya pada pelambatan perubahan bahasa. Laju perubahan bahasa Indonesia yang cepat dapat diartikan sebagai kurangnya pengaruh ragam bahasa tulis terhadap perilaku kebahasaan seseorang

(Moeliono, 1997). Dari indikator-indikator tersebut, upaya mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan yang berwawasan iptek masih jauh dari harapan.

TABEL 1
JUMLAH PENUTUR BAHASA DAERAH SEBAGAI BAHASA IBU

Bahasa Ibu	Jumlah Penutur
Bali	2.829.683
Banjar	2.775.009
Batak	3.518.924
Bugis	3.481.212
Jawa	62.407.379
Minang	3.735.090
Madura	6.847.662
Sunda	24.954.952
Lainnya	27.108.785
Jumlah	137.457.696

Sumber: Hasil Sensus Penduduk 1990 *dalam* Lumintintang (1995)

TABEL 2
PENDUDUK INDONESIA USIA 5 TAHUN KE ATAS
MENURUT BAHASA YANG DIPAKAI SEHARI-HARI

Wilayah	Ber-BI Sehari- hari	Bukan Ber-BI Sehari-hari	
		Bisa Ber-BI	Tidak Bisa Ber-BI
Perdesaan	5.738.408	79.150.926	23.786.075
Perkotaan	18.303.148	27.913.645	3.366.164
Jumlah	42.041.556	107.064.571	27.152.239

Sumber: Lumintintang (1995)

3. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Ilmu

Substansi iptek akan dapat diadopsi dan disebarluaskan secara cepat melalui proses pendidikan, baik formal maupun informal, apabila tersedia bahasa ilmiah baku yang mampu mengejawantahkan konsep-konsep iptek tersebut. Hal ini telah lama disadari oleh para pengembang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu yang bekerja sama dalam wadah "Majelis Bahasa Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia (Mabbim)". Sejak Sidang Mabbim Ke-7 hingga sekarang telah dilakukan pemadanan istilah dari berbagai bidang ilmu. Sejak Sidang ke-7 hingga ke-31, Mabbim telah menghasilkan 129.584 istilah dari 88 kategori bidang/subilmu. Sebagai upaya penyebarannya, hingga tahun 1992, Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menerbitkan 21 kamus istilah Mabbim sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3 (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1993).

TABEL 3
KAMUS-KAMUS ISTILAH MABBIM YANG SUDAH TERBIT
HINGGA TAHUN 1992

No.	Nama Kamus	Tahun Terbit
1.	Matematika Dasar	1998
2.	Fisika (Mekanika	1987
3.	Fisika (Bahang dan Termodinamika)	1987
4.	Fisika (Elektromagnetika)	1998
5.	Fisika Modern	1988
6.	Fisika (Akustika dan Optika)	1989
7.	Fisika Atom	1992
8.	Fisika dan Teknologi Nuklir	1992
9.	Biologi (Seri Pelajar)	1985
10.	Biologi (Anatomi-Morfologi-Taksonomi Botani)	1987
11.	Biologi (Bioteknologi)	1987
12.	Biologi (Mikrobiologi)	1992
13.	Kimia Umum	1988

LANJUTAN TABEL 3

No.	Nama Kamus	Tahun Terbit
14.	Kimia (Organik)	1989
15.	Kimia (Anorganik dan Geokimia)	1989
16.	Kimia (Inti dan Radio)	1990
17.	Kimia (Analitik)	1980
18.	Kimia (Biokimia)	1987
19.	Kimia Terapan: Kimia Lingkungan dan Kimia Industri	1992
20.	Kamus Hidrogeologi ¹⁾	1985
21.	Kamus Hidrologi ¹⁾	1987
¹⁾ Disusun melalui kerja sama Mabbim dengan UNESCO		

Sumber: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (1993)

Ketersediaan kamus istilah bidang ilmu baru merupakan tahap awal perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu. Sosialisasi istilah melalui penerbitan kamus istilah dan pengajaran di sekolah-sekolah formal, mulai tingkat dasar hingga perguruan tinggi, merupakan langkah penting yang harus ditempuh untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang mapan dan berwibawa. Untuk kepentingan tersebut, guru, dosen, dan para peneliti merupakan sumber daya utama yang harus dimobilisasi kapasitasnya.

Di luar skema yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, melalui mekanisme pasar, berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengembangan istilah berbagai bidang ilmu juga cukup banyak ditemukan. Berbagai kamus istilah telah diterbitkan, baik yang dikordinasi dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun tanpa koordinasi dengan lembaga tersebut, serta bersifat komersial maupun nirkomersial. Pada tahun 1993 saja telah diterbitkan 80 judul kamus dan 324 judul kategori bahasa (Ikapi, 1993).

Peran Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi) yang selalu menggalakkan minat baca masyarakat melalui pameran buku, penerbitan berkala Daftar Buku dan Berita Buku, dipandang sangat strategis. Tabel 4 menunjukkan jumlah terbitan dan penerbit menurut Ikapi. Dari tabel tersebut, dapat diketahui bahwa puncak penerbitan buku di Indonesia terjadi pada tahun 1995 dengan jumlah terbitan 10.965 judul dan 143 penerbit serta

tahun 1997 dengan jumlah terbitan 10.920 judul dan 210 penerbit. Meskipun tidak diperoleh data menyeluruh mengenai jumlah terbitan yang berkaitan langsung dengan iptek dan/atau implementasinya, dari Daftar Buku 1993 diketahui bahwa sekitar 50% judul terbitan dapat dikategorikan sebagai terbitan ilmiah yang mendukung perkembangan iptek di Indonesia (Ikapi, 1993).

TABEL 4
JUMLAH TERBITAN DAN PENERBIT MENURUT IKAPI
TAHUN 1945-1997

No.	Tahun Terbit	Jumlah Terbitan (Buku)	Jumlah Penerbit
1.	1945-1965 ¹⁾	12.000	?
2.	1987-1988 ²⁾	7.710	77
3.	1989-1990	?	?
4.	1991 ³⁾	1.598	52
5.	1992	?	?
6.	1993 ³⁾	8.479	98
7.	1994 ³⁾	9.738	143
8.	1995 ³⁾	10.965	143
9.	1996 ³⁾	8.299	102
	1997 ³⁾	10.920	210

Keterangan: ? = tidak ditemukan data

Sumber:

1) Wicaksono, H. 1998 (Publikasi Internet)

2) Ikapi, 1991. Daftar Buku 1991.

3) Ikapi, 1998, Komunikasi Pribadi

Bahasa yang digunakan penerbit seyogianya adalah bahasa baku, bahasa tertib, bahasa yang mengikuti kaidah-kaidah bahasa baku sedekat mungkin (Koen, 1997). Dalam kenyataannya, penerbit sering menggunakan atau menawarkan istilah yang belum dibakukan sebagai akibat dari berbagai kemungkinan. Tabel 5 menyajikan beberapa contoh judul buku yang diterbitkan pada tahun 1990-an, yang dipandang memiliki cacat bahasa.

TABEL 5
CACAT BAHASA PADA JUDUL BUKU YANG DITERBITKAN
TAHUN 1990-AN

No.	Jenis Cacat Bahasa	Judul Buku ¹⁾
1.	Bahasa campuran Indonesia-asing	a. Pengembangan Udang Galah Dalam <u>Hatchery</u> dan Budidaya b. <u>Bank Auditing</u> : Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank c. Bahasa Inggris-Dialek, Ragam, Jargon, <u>Slank</u> (?), <u>Blends</u> , <u>Clipped Word</u> d. Kunci Sukses <u>Bank Marketing</u> e. <u>Marketing</u> Masa Kini f. Bagaimana Mengatasi <u>Stress</u>
2.	Tidak taat asas dalam pepadaman istilah	a. <u>Analisa</u> Laporan Keuangan Untuk Perbankan b. <u>Mickey Mouse's Picnic</u> - <u>Miki</u> Tikus Piknik c. <u>Generator</u> Angin d. Beberapa Aspek Menarik Dalam Bahasa Indonesia, Malaysia dan <u>Filipino</u> e. Seks Remaja <u>Isyu</u> dan <u>Tip</u> (?) f. <u>Swa Usaha</u> g. Listrik <u>Maknit</u>
3.	Tidak konsisten	a. Bertanam <u>Cabai</u> , bandingkan dengan judul berikut: Bertanam <u>Cabe</u> b. Himpunan Keputusan <u>Merk</u> Dagang, bandingkan dengan judul berikut: Undang-undang <u>Merek</u> Baru c. Garis-garis Besar <u>Tatabahasa</u> Baku Bahasa Indonesia, bandingkan dengan judul berikut: Garis-garis <u>Tata Niaga</u> Umum di Indonesia
4.	Tidak lengkap	a. Budidaya Bawang Putih, <u>Merah</u> dan <u>Bombay</u> b. <u>Hormon</u> Tanaman dan Ternak c. Memelihara Ikan <u>Bersama</u> Ayam
5.	Kesalahan konsep atau lainnya	d. <u>Silent Spring</u> - <u>Musim Bunga</u> yang Bisu e. <u>Financial Management And Policy</u> - Keuangan Perusahaan dan <u>Kebijaksanaan</u> Keuangan Perusahaan

No.	Jenis Cacat Bahasa	Judul Buku ¹⁾
		f. Himpunan Peraturan <u>Perundangan</u> Tentang Kearsipan g. <i>Development Project As Policy Experiments-Proyek Pembangunan Sebagai <u>Manajemen Terpadu</u></i> h. <i>Operational Research And Its Management Aplication-Operasional Riset Dan Aplikasinya Dalam Manajemen</i> i. <i>Economic Development-Ekonomi Pembangunan</i>

¹⁾ Kata bergaris bawah menunjukkan cacat bahasa yang dimaksud

Sumber: Ikapi (1991); Ikapi (1993)

Selain penerbit, peran pustakawan juga sangat penting, khususnya dalam pengawasan dan organisasi bibliografi. Dalam arti luas organisasi bibliografi meliputi semua kegiatan kepastakaan, yaitu sebagai berikut.

- mencatat eksistensi dan identitas semua jenis dokumen, baik yang dicetak maupun bentuk lainnya;
- mengumpulkan secara sistematis dokumen-dokumen ini di perpustakaan, pusat informasi dan dokumentasi, serta lembaga-lembaga sejenis;
- memungkinkan akses ke dokumen-dokumen tersebut melalui nama pengarang, judul, dan subjek;
- mendapatkan kopi dokumen-dokumen tersebut melalui katalog-katalog yang menunjukkan koleksi milik berbagai perpustakaan, pusat informasi dan dokumentasi (Wicaksono, 1998).

Dalam kaitannya dengan peningkatan peran bahasa Indonesia dalam perkembangan iptek, selain melalui Panitia Kerja Sama Kebahasaan, Ikapi, PDII, berbagai perpustakaan, perguruan tinggi, pihak terkait lainnya, semestinya dikembangkan jaringan kerja pemantauan dan pengembangan istilah ilmiah baru dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pembentukan jaringan kerja akan sangat efektif dan efisien apabila dilakukan dengan memanfaatkan teknologi internet; dalam hal ini dengan membangun suratn berantai (*mailing list*) bertopik istilah baku. Dalam surat berantai tersebut, setiap anggota dapat menanyakan, mengusulkan, dan mendiskusikan istilah-istilah ilmiah baru. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertindak sebagai pengurus (*administrator*), pemandu, dan narasumber dalam surat berantai tersebut.

4. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Pembangunan

Dengan ditetapkannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia harus mampu mengidentifikasi dirinya sebagai bahasa pembangunan yang berwawasan iptek. Untuk memenuhi tuntutan ini, peran media massa, baik media cetak, audio maupun audio-

visual dipandang sangat penting untuk menyosialisasikan bahasa Indonesia baku, khususnya bahasa ilmu, kepada para pelaku pembangunan dan masyarakat. Dukungan berbagai pihak untuk meningkatkan taraf keberaksaraan masyarakat perlu digalakkan agar masyarakat tidak melakukan rekacipta sepihak. Walaupun masih terasa sangat penting, secara perlahan budaya dengar-ucap harus digeser ke budaya tulis-baca untuk menginternalkan wawasan iptek ke dalam proses pembangunan nasional.

Pendidikan memegang peranan sangat strategis untuk mempersiapkan aktor-aktor pembangunan yang mampu berpikir kritis, efektif, efisien serta memiliki kemampuan manajerial dan produktivitas tinggi. Batasan "melek huruf" yang cenderung diartikan sebagai "bebas buta huruf" (Alwasilah, 1995) bukanlah misi pendidikan yang tepat. Perombakan misi pendidikan, yang didukung dengan penyediaan akses terhadap informasi yang transparan dan terpercaya, dapat melipatgandakan laju pembangunan nasional sebagai akibat dari terciptanya kendali sosial terhadap program-program pembangunan yang dicanangkan Pemerintah.

Dalam jangka panjang, upaya untuk menggalang kelembagaan pendidikan yang lebih partisipatif dan mengutamakan pemuliaan nilai-nilai kearifan tradisional dipandang lebih kondusif untuk merangsang daya kreatif masyarakat dalam pengembangan iptek nasional. Kapasitas LSM perlu ditingkatkan dan dimobilisasi untuk membantu proses sosialisasi iptek di tingkat akar rumput (*grassroot*). Transfer teknologi harus disaring melalui penelitian adaptif yang ketat dan secara sosial budaya memiliki keberterimaan yang tinggi agar dapat diimplementasikan secara berhasil. Pengembangan teknologi tinggi hanya dibenarkan sepanjang mampu memberikan jaminan terhadap kemanfaatan dan keadilan sosial, baik intragenerasi (*intragenerational equity*) maupun antargenerasi (*intergenerational equity*), serta kelestarian sumber daya dan lingkungan.

5. Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Global

Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang digunakan sebagai bahasa resmi oleh lebih dari 180 juta orang yang berasal dari 350 suku bangsa. Pada tahun 2030 pengguna bahasa Indonesia akan mencapai 307 juta orang dan akan menjadi dua kali lipat pada tahun 2050. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, baik sumber daya fisik maupun hayati. Ketersediaan tenaga kerja dan kekayaan sumber daya alam tersebut akan menarik perhatian bangsa lain untuk mengembangkan investasinya di Indonesia. Walaupun kendala aksara dan bahasa sedang diteliti untuk dihilangkan dalam teknologi komunikasi global (Noor, 1998), eksistensi bahasa Indonesia dalam komunikasi global tetap diperlukan untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.

Pada saat ini, walaupun penjasa (*provider*) internet cukup tersebar di berbagai kota di Indonesia, informasi berbahasa Indonesia yang dapat diakses oleh masyarakat ruang maya masih sangat jarang. Hasil survei internet yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa proporsi kata kunci berbahasa Indonesia yang dapat ditemukan oleh mesin pelacak informasi internet sangat kecil (secara umum kurang dari 1%) jika dibandingkan kata kunci yang sama dalam bahasa Inggris. Jika dilihat dari nisbah kata kunci negatif-positif, seperti *telanjang/teknologi* yang dibandingkan dengan *nudet*

ehnology, dapat diketahui bahwa bahasa Indonesia cenderung memiliki proporsi lebih kecil daripada bahasa Inggris. Namun, pada beberapa mesin pelacak, yaitu Altavista (*News Group*), Hotbot, Infoseek (*New Group*) dan Yahoo, bahasa Indonesia memiliki proporsi lebih besar daripada bahasa Inggris (lihat Tabel 6). Data tersebut memberikan indikasi bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa global masih jauh dari efisien.

TABEL 6
HASIL SURVEI INTERNET TERHADAP BEBERAPA KATA KUNCI
SEBAGAI INDIKATOR GLOBALISASI BAHASA INDONESIA

MESIN PELACAK	KATA KUNCI										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Altavista (Web)	1189480	3195	197410	23474203	35805	17884840	15107	8445050	450	846	5510330
Altavista (News Group)	57690	46	645	320720	927	440620	572	420340	55	172	45780
Excite	129739	876	12500	1905225	4078	1446533	2108	1176562	28	144	105671
Hotbot	222801	2974	34696	5836121	835	1944904	1342	2789343	85	422	439522
Infoseek (Web)	372906	409	8981	12385493	2573	10086661	1107	5754363	386	102	876398
Infoseek (News Group)	14026	9	607	163100	94	147313	171	82302	4	31	13164
Magellan	6155	10	591	90210	77	68492	25	55709	3	4	5003
Webcrawler	5190	13	265	98032	79	62186	17	40624	2	5	11282
Yahoo (kategori)	943	513	35	645	1	1428	539	1587	15	37	857

TABEL 6 LANJUTAN

MESIN PELACAK	PERSENTASE ANTAR KATA KUNCI									
	3/41	5/6	7/8	10/11	10/3	11/4	10/5	11/6	10/8	11/9
Altavista (Web)	0.84	0.20	0.18	0.02	0.43	23.47	2.36	30.81	5.60	65.25
Altavista (News Group)	0.20	0.21	0.14	0.38	26.67	14.27	18.55	10.39	30.07	10.89
Excite	0.66	0.28	0.18	0.14	1.15	5.55	3.53	7.31	6.83	8.98
Hotbot	0.59	0.04	0.05	0.10	1.22	7.53	50.54	22.60	31.45	15.76
Infoseek (Web)	0.07	0.03	0.02	0.01	1.14	7.08	3.96	8.69	9.21	15.23
Infoseek (News Group)	0.37	0.06	0.21	0.24	5.11	8.07	32.98	8.94	18.13	15.99
Magellan	0.66	0.11	0.04	0.08	0.68	5.55	5.19	7.30	16.00	8.98
Webcrawler	0.27	0.13	0.04	0.04	1.89	11.51	6.33	18.14	29.41	27.77
Yahoo (kategori)	5.43	0.07	33.96	4.32	105.51	132.87	3700.00	60.01	6.86	54.00

Hasil survei internet juga menunjukkan bahwa pada saat ini terdapat lebih dari 234 surat berantai dan setidaknya sejumlah media massa telah menyediakan akses berita berbahasa Indonesia di internet, antara lain yang berikut.

1. Akcaya Online (Kalimantan Barat)
2. Antara: Lembaga Kantor Berita Nasional
3. *Bintang Online*: magazine for stars, celebrity, etc.
4. Surat kabar *Bisnis Indonesia*
5. Tabloid *Mahasiswa Boulevard*
6. Majalah *Chip*: Komputer Media Online
7. Majalah *Dimensi* (Teknik Mesin ITS).
8. Economic & Business Review Indonesia
9. *Eksekutif Magazine*
10. *Forum Keadilan*
11. *Gatra*: Majalah berita mingguan. Previously available at Gatra page.
12. Tabloid *Go*
13. Hidayatullah Online
14. Indonesian DEEP Digest; Daily Executive's Economics & Politics Digest
15. *Indonesian Observer*
16. *The Indonesia Times*
17. *InfoAsia*
18. *InfoKomputer*: Computer, Internet
19. Inside Indonesia (*new*)
20. *KITLV* daily report.
21. *Jawa Pos Online*
22. *Kompas* On-Line.
23. Majalah *Laras*
24. Netkafe Online
25. News & Views Indonesia (published by the Embassy of Republic Indonesia, Washington DC, in cooperation with the Ministry for Foreign Affairs, Directorate of Information)
26. *Nuansa Online*: "Jurnal dua bulanan sebagai wahana untuk mengkaji dan menganalisa pemikiran keislaman."
27. *Perspektif Online* (new location), and old *Perspektif Online* location and its mirror in Yogya
28. *Pikiran Rakyat*
29. RCTI
30. *Republika* (daily newspaper) and its mirror
31. *Riau Pos Online* (Riau)
32. SCTV
33. *Suara Independen*
34. *Suara Merdeka* (Semarang, Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia)
35. *Suara Pembaruan*
36. *Surabaya Post* (Surabaya)

37. *Swasembada*
38. *Tempo interactive*
39. *Tiara*
40. *Tips Online*: computer magazine (*new*)
41. *Tiras Online*
42. *TVRI Text*
43. *UMMAT Online*
44. *Warta Ekonomi*
45. *Waspada* (Medan)
46. *Waterfall*

Dari seluruh pengguna (*user*) pada penjasa Indonet yang memiliki jaringan penjasa di 16 kota di seluruh Indonesia diketahui bahwa sebagian besar pengguna berpendidikan sarjana (80%). Jika dilihat dari latar belakang pekerjaannya, sebagian besar pengguna adalah profesional (41%) di berbagai bidang (lihat Tabel 7). Sebagian besar pengguna Indonet yang berdomisili di Jakarta lebih berorientasi pada kepentingan bisnis, sedangkan pengguna di Bogor lebih berorientasi pada penelitian dan iptek (komunikasi pribadi, 1998). Data tersebut memberikan indikasi bahwa penggunaan internet masih didominasi oleh "kelompok elit" (sarjana ke atas) dan sangat terkait dengan karakteristik masyarakat di kota tertentu.

TABEL 7
PROFIL PENGGUNA DI PENJASA INDONET BERDASARKAN TINGKAT
PENDIDIKAN DAN JENIS PEKERJAAN

Menurut Tingkat Pendidikan	Menurut Jenis Pekerjaan
S1 : 54%	Profesional : 41%
S2 : 21%	Keuangan : 17%
Diploma : 12%	Tek. Informasi : 13%
SMA : 8%	Pemasaran : 11%
S3 : 5%	Pelajar : 5%
	Wiraswasta : 2%
	Lain-lain : 11%

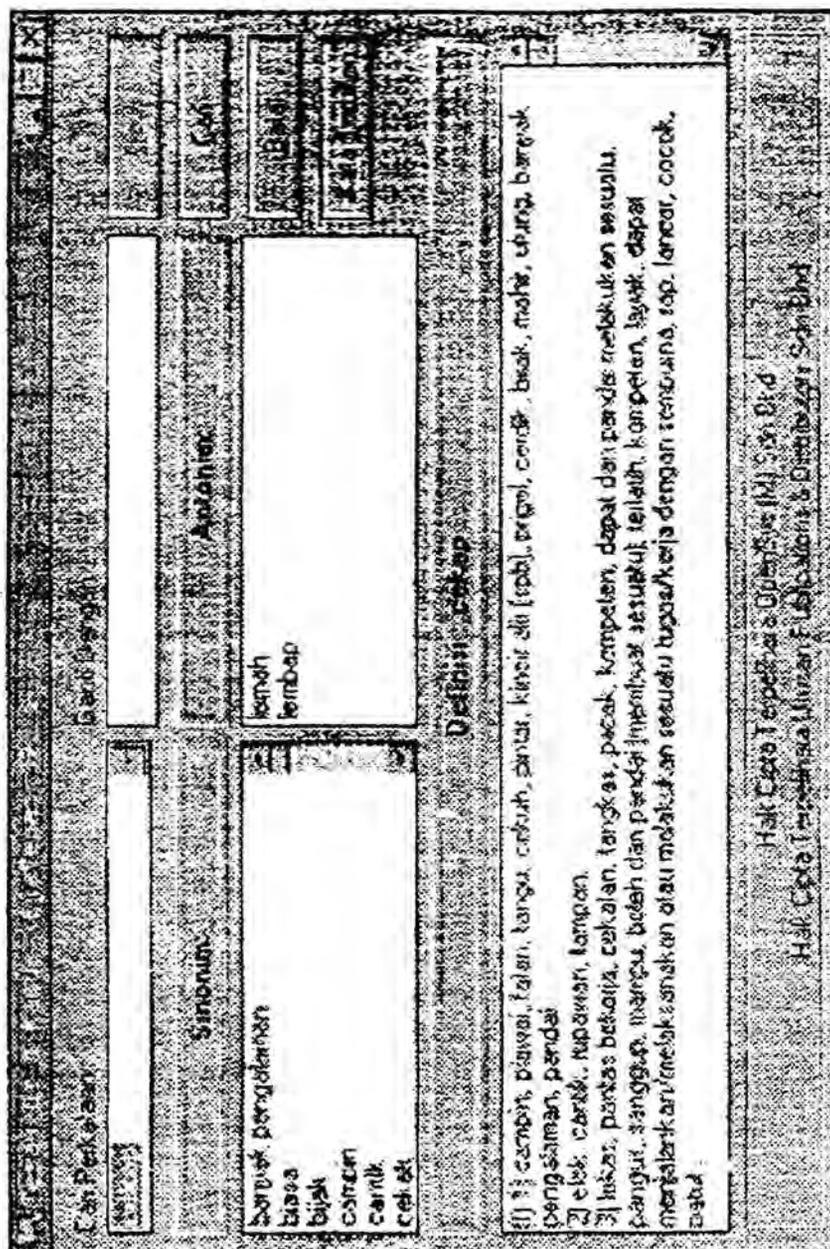
Sumber: Komunikasi Pribadi (1998)

Pengakuan global terhadap eksistensi bahasa Indonesia juga telah diperoleh dari beberapa bukti berikut.

- a. Bahasa Indonesia telah dimasukkan dalam pilihan menu bahasa pada program "Microsoft Word 97". Meskipun demikian, menu ini belum dilengkapi dengan tesaurus.
- b. Terdapat warga negara asing yang mengikuti surat berantai berbahasa Indonesia.

- c. Terdapat warga negara asing yang mengakses tapak jaring (*web site*) berbahasa Indonesia.

Jika dibandingkan dengan bahasa Melayu (Malaysia), bahasa Indonesia tertinggal beberapa langkah, terutama jika ditinjau dari segi ketersediaan tesaurus dan pengembangan program komputer mengenai kamus bahasa. Bahasa Melayu telah memiliki program "Eja Tepat 97", yaitu program tritunggal (*three in one*) mengenai pemeriksa istilah (*spellchecker*), tesaurus dan kamus elektronik, yang merupakan hasil kerja sama antara OpenSys(M) Sdn Bhd dengan Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd. Program tersebut menyediakan satu juta ditambah 20.000 ungkapan (*phrases*) lama dan baru serta 500.000 sinonim dan antonim yang berbasis pada *Kamus Besar Bahasa Melayu*. Gambar 1 menunjukkan tampilan program tersebut.



Gambar 1. Tampilan Program Ejaan Tepat 97 yang diproduksi oleh OpenSys(M) Sdn Bhd, bekerja sama dengan Utusan Publication & Distribution Sdn Bhd, Malaysia

Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa global, dibutuhkan pengembangan tesaurus bahasa Indonesia sebagaimana telah disarankan oleh Rifai (1988) dan program-program kamus elektronik yang dapat mendukung kepentingan pendidikan, pembangunan nasional, dan kebutuhan dunia internasional. Selain itu, upaya untuk merangsang penggunaan internet bagi dunia pendidikan dasar dan menengah perlu segera dimulai dengan melibatkan partisipasi aktif orang murid melalui BP3. Pengembangan wawasan masyarakat untuk secara komersial mampu menghargai informasi perlu dilakukan untuk meningkatkan budaya baca-tulis yang berwawasan iptek.

Selain itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebaiknya segera mengembangkan layanan aktif (*online service*) melalui publikasi tapak jaring yang dapat diakses oleh semua pihak. Mekanisme ini akan merangsang minat pengguna teknologi internet untuk memahami dan mendalami bahasa Indonesia serta memberikan umpan balik bagi pengembangannya. Mekanisme ini juga akan mempercepat pemasyarakatan dan eksistensi bahasa Indonesia di dunia global.

6. Penutup

Makalah ini ditulis dengan memanfaatkan data yang sumbernya relatif terbatas. Pendekatan yang sama dengan intensitas pengumpulan data yang lebih tinggi akan memberikan hasil yang lebih sah untuk menarik simpulan mengenai peran bahasa Indonesia dalam perkembangan iptek dan era globalisasi. Dari pembahasan dalam makalah ini beberapa simpulan dan/atau saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

- a. Perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu perlu didukung oleh peningkatan kecepatan kerja Pakersa dalam pemadanan, pengembangan, dan pemasyarakatan istilah bidang ilmu, serta pelibatan berbagai pihak terkait dengan membangun surat berantai.
- b. Perwujudan bahasa Indonesia sebagai bahasa pembangunan membutuhkan investasi dalam bentuk pendidikan yang mengemban misi pengembangan daya kreatif, sikap kritis kemampuan berpikir efektif dan efisien serta kemampuan manajerial dan produktivitas tinggi bagi masyarakat.
- c. Bahasa Indonesia mempunyai peluang untuk menjadi bahasa global yang mapan apabila memiliki tesaurus dan didukung oleh pengembangan program kamus elektronik.
- d. Disarankan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa segera membuka layanan aktif melalui publikasi tapak jaring yang dapat diakses oleh berbagai pihak terkait.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A.C. 1995. "Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Perdesaan." Dalam *Prosiding Seminar Kebahasaan, Mabbim*, 20--21 Mac 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Sosok Pokok Tokoh: Dua Dasawarsa Kerja Kebahasaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Ikapi. 1988. Daftar Buku 1987--1988.
- Ikapi. 1991. Daftar Buku 1991.
- Ikapi. 1993. Daftar Buku 1993.
- Koen, W. 1997. "Memasyarakatkan Naskah IPTEK Ditinjau dari Segi Lema Kamus." Dalam *Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Iptek*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Lumintintang, Y.B. 1995. "Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Perdesaan." Dalam *Prosiding Seminar Kebahasaan. Mabbim*, 20--21 Mac 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Moeliono, A. M. 1997. "Pembakuan Istilah dalam Pemodernan Bahasa." Dalam *Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Iptek*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Noo, R. 1998. *Komputer Aksara dan Bahasa Bukan Lagi Kendala*. Jakarta: Publikasi Internet.
- Rifai, M. A. 1997. "Desiderata Indonesiana: Sebuah Tesaurus untuk Bahasa Bangsa Tercinta." Dalam *Peranan Bahasa Kebangsaan dalam Pengembangan Iptek*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Suhardi, B. 1995. "Pengembangan Bahasa Indonesia di Daerah Perdesaan." Dalam *Prosiding Seminar Kebahasaan. Mabbim* 20--21 Mac 1995. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Wicaksono, H. 1998. *Pengawasan Bibliografi Nasional untuk Kamus di Indonesia*. Jakarta: Publikasi Internet.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A1
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 13.00--14.20
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia, Iptek, dan Era Globalisasi
Penyaji	: Haryanto R. Putro dan A. Machmud Thohari
Pemandu	: Mujiono Wirjotinojo
Pencatat	: a. Nantje Harijatiwidjaja b. I Made Purwa
Peserta	: 200 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Durdje Durasid, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. Pertanyaan:

Sebagai alat komunikasi, bahasa dapat menghubungkan pembicara atau penulis dengan pendengar atau pembaca. Artinya adalah bahwa bahasa berfungsi sebagai penyampai pesan. Dalam ragam tulis, bahasa dapat berupa kata, kalimat, atau wacana. Sebagai bahasa ilmiah, bahasa Indonesia belum mampu menyepadankan bahasa sumber ke dalam bahasa Indonesia. Sehubungan dengan itu, diperlukan suatu tim untuk membuat kamus. Akan tetapi, tentunya hal itu tidak terlalu mudah.

b. Jawaban:

Tim yang Bapak maksud sudah dibentuk dan sudah berhasil memadankan lebih dari 129 ribu istilah. Pemasarakatan istilah itulah yang terasa masih lambat. Untuk itu, dapat dibentuk suatu diskusi melalui forum internet yang disebut dengan *surat berantai*. Dengan cara itu, semua pihak dapat bergabung dalam diskusi tersebut. Pengungkapan ide dan penyampaian tanggapan dari anggota diskusi dapat dilakukan melalui *surat berantai* itu. Dengan demikian, tidak hanya pengembangan istilah yang kita peroleh, tetapi juga pemasarakatannya.

2. Penanya: Sutedja Sumadipura, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Kami, pengajar perguruan tinggi, masih bingung dalam pepadanan istilah. Dalam kamus yang ada, belum tampak keseragaman dalam penjelasan makna istilah sehingga kadang-kadang kami terpaksa menggunakan istilah asingnya. Mungkin Bapak dapat mengupayakan jalan keluarnya agar kesulitan kami dapat teratasi.

b. Jawaban:

Salah satu cara untuk mengatasi kesulitan itu adalah mempercepat pemasyarakatan istilah tersebut, baik melalui penerbit pemerintah maupun swasta.

3. Penanya: Adi Sunaryo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

- 1) Saya mohon penjelasan tentang pernyataan yang menyatakan bahwa untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional atau bahasa dunia, perlu ditunjang oleh kamus elektronik.
- 2) Untuk mengarah ke bahasa internasional, apakah kita perlu mencari sumber dari bahasa Indonesia, bahasa Melayu, bahasa daerah, seperti yang ditetapkan dalam *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*. Atau, apakah gagasan yang sudah dimiliki itu perlu diubah?

b. Jawaban:

- 1) Kamus elektronika itu diperlukan karena semua pengguna komputer di dunia memanfaatkan program kamus elektronik untuk membantu pengguna itu memahami bahasa lain. Selain itu, kamus elektronik dapat membuat bahasa Indonesia menjadi *eksis* di dalam percaturan dunia yang menuju ke penggunaan komputer sebagai alat komunikasi.
- 2) Kedua pendekatan itu dapat kita gunakan dan setiap pendekatan mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kita dapat menggunakan bahasa Melayu, kemudian konsepnya kita sesuaikan dengan konsep bahasa Indonesia. Selain itu, kita juga dapat menyerap langsung bahasa asing. Kami, koordinator pepadanan istilah kehutanan, menggunakan pendekatan dua arah itu. Jadi, kita harus mengakomodasikannya, yaitu penyerapan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia tidak menimbulkan permasalahan dalam konteks perkembangan bahasa itu sendiri. Demikian juga, pepadanan bahasa daerah ke dalam bahasa Indonesia tidak mudah dilakukan. Yang penting, bagaimana cara memobilisasikan kepastian lokal dan nilai-nilai kearifan tradisional untuk menjadi suatu ilmu dan teknologi yang berbasis pada kita sendiri.

4. Penanya: Elfrida W.S. Sumampouw, Universitas Tadulako, Palu

a. Pertanyaan:

Dari survei yang Bapak lakukan, kemunculan kata *telanjang* lebih banyak jika dibandingkan dengan kata *teknologi*. Sehubungan dengan itu, Bapak menyimpulkan bahwa orang Indonesia lebih menyenangi pornografi. Saya rasa, simpulan itu terlalu cepat karena kata *telanjang* tidak selalu berkaitan dengan hal pornografi, misalkan kata *telanjang* pada kalimat ini, *Kawat telanjang itu dapat menyebabkan orang terkena setrum*.

b. Tanggapan:

Terima kasih, Ibu. Saran Ibu tidak perlu saya jawab, tetapi perlu Ibu ketahui bahwa simpulan itu belum terlalu valid.

5. Penanya: Achmad Tolla, IKIP Ujung Pandang**a. Pertanyaan:**

- 1) Sebatas mana Bapak dapat mengatakan bahwa bahasa Indonesia belum menjadi bahasa ilmiah.
- 2) Bagaimana definisi bahasa internasional menurut Bapak?

b. Jawaban:

- 1) Ciri bahasa ilmiah adalah mempunyai konsep yang dapat disepakati oleh ahlinya. Jika saya mengatakan *solealeprosola* (bahasa Latin), semua orang di seluruh dunia akan mengetahui bahwa *solealeprosola* itu adalah 'meranti merah'. Sebaliknya, jika saya menyebutkan 'meranti merah' dalam tulisan saya, semua orang tidak akan percaya bahwa itu hanya *solealeprosola*. Hal itu menggambarkan kondisi bahasa kita yang memiliki keterbatasan sehingga kita belum sampai pada bahasa ilmiah yang mapan.
- 2) Yang saya sebutkan bukan bahasa internasional, melainkan bahasa global. *Internasional* dapat diartikan bilateral, sedangkan *global* ada konsepnya, yaitu globalisasi diibaratkan sebagai suatu kompresi ruang dan waktu tanpa kendala bahasa. Jadi, setiap orang mengakses komunikasi itu kemudian membandingkannya untuk bisa memahami bahasa siapa pun. Saya belum mengetahui sudah ada atau belum definisi bahasa internasional ini dari para pakar bahasa. Istilah itu adalah istilah yang saya bayangkan sebagai ahli kehutanan.

6. Penanya: Endang Lukito M., SLTPN 252, Jakarta Timur**a. Pertanyaan:**

Apakah ada batasan unsur serapan untuk siswa SLTP?

b. Jawaban:

Ibu dapat menanyakan hal itu pada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena lembaga itu telah menerbitkan *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*.

BAHASA INDONESIA DALAM BIDANG KEILMUAN

Jan Hoesada
Akuntan Publik

1. Pendahuluan

Bidang keilmuan mulai dirintis saat SLTA melalui pilihan jurusan, direalisasikan oleh calon mahasiswa ketika memilih fakultas atau bidang ilmu di perguruan tinggi. Sub-bidang ilmu dipilih lagi pada perjalanan studi, dalam bentuk pilihan jurusan pada suatu fakultas. Jenis pembelajaran terutama untuk peningkatan keterampilan-intelektual, konsep dan kaidah, di samping pembelajaran pemecahan masalah, strategi kognitif, informasi verbal, keterampilan motorik, dan pembelajaran sikap. Isu terkait bahasa Indonesia dalam bidang keilmuan adalah

- a. kosakata bidang ilmu, kamus bidang ilmu, dan penyebarannya;
- b. laras bahasa bidang keilmuan dan metode pengajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi; dan
- c. penggunaan bahasa Indonesia bidang keilmuan dalam masyarakat.

2. Kosakata Bidang Ilmu, Kamus Bidang Ilmu, dan Penyebarannya

Kosakata bidang ilmu yang dikembangkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan proyek nasional terpenting untuk memperluas peran bahasa Indonesia dari bahasa nasional yang resmi, bahasa pemersatu, bahasa komunikasi dan bersosialisasi, dan sekarang berperan sebagai bahasa keilmuan.

Penyebarannya dapat dilakukan dengan cara yang berikut:

- a. mewajibkan sekolah dan perguruan tinggi menggunakan kamus bidang ilmu dan daftar istilah bidang ilmu yang diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
- b. mewajibkan karya tulis ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi menggunakan kamus dan daftar istilah resmi tersebut;
- c. mewajibkan jurnal, majalah, dan publikasi ilmiah merujuk pada daftar istilah dan kamus tersebut; dan
- d. mewajibkan para pengajar menggunakan kamus dan daftar istilah sebagai buku pegangan mengajar.

3. Laras Bahasa Bidang Keilmuan dan Metode Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi

Tugas pengajar dan siswa menempa kesadaran berbahasa dan menggunakannya sebagai alat utama dalam membentuk pemahaman ilmu. Ciri suatu bidang ilmu adalah disiplin berlogika secara khusus karena itu memerlukan kaidah, formula, dan istilah yang dirancang bukan untuk keperluan umum, dengan gaya pengungkapan khas dalam kalimat selaras bidang ilmu tersebut. Maka, perkembangan istilah dan kamus khusus bidang ilmu suatu bangsa, membiaskan kedalaman penguasaan teknologi atau bidang ilmu tertentu.

Salah satu metode pengajaran yang kita kenal adalah metode audiolingual yang diciptakan Prof. Nelson Brooks tahun 1964, yang pada pokoknya bersasaran mencapai internalisasi bahasa sebagai kebiasaan, pengakuan bahwa bahasa berbeda-beda dan beragam, pemisahan keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, serta mengutamakan praktik, aneka latihan, dialog, dan laboratorium bahasa.

Kita dapat menggunakan metode tersebut dengan beberapa perubahan, seperti tak perlu ditekankan pada struktur, tak perlu bergaya seperti penutur asli bahasa tersebut, membaca-menulis-berbicara dikembangkan serentak saja, bahasa lisan diperlukan secara lebih longgar tanpa tuntutan akurasi sempurna sepanjang efisien-efektif-afektif, dengan tekanan bahasa kontekstual ke bidang ilmu.

Ilmuwan meningkatkan produktivitasnya pada kegiatan persepsi, penyimpanan, pengolahan, dan pengungkapan ilmunya, apabila ditunjang kemampuan berbahasa. Hubungan itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Kemampuan berbahasa adalah jala persepsi bagi ilmu pengetahuan baru.
- b. Penguasaan kosakata umum, kosakata bidang ilmu, dan struktur meningkatkan kualitas pengolahan ilmu yang bernilai tambah. Pengolahan menjadi lebih efektif dan efisien.
- c. Ahli bahasa mampu memampatkan suatu paparan menjadi suatu esensi mudah simpan di benak dan mudah diingat kembali ketika dibutuhkan. Ahli bahasa menjadi tampak lebih cerdas.
- d. Yang terakhir adalah kemampuan pengungkapan, baik lisan maupun tertulis, amat membutuhkan kemampuan berbahasa. Daya ungkap adalah daya pancar keilmuan, menggunakan kalimat efektif dan efisien padat kosakata bidang ilmu, tertata dalam harmoni dan terasa selaras menyatu dengan kosakata umum dalam kalimat yang mampat, padat makna, tetapi terasa plastis indah enak diresapi. Beberapa jenis ilmu, misalnya yang terkait pada kesehatan, seni tari, seni sulap, dan olahraga membutuhkan pendekatan tanggapan fisik atau respon fisik, yaitu bahwa sesuatu istilah dikenal dan diperagakan secara fisik oleh siswa. Sementara itu, kemampuan berbahasa lisan ditandai kemampuan menyimak dan memahami (tekanan pembelajaran audiolingual), kemampuan kognitif (pendekatan kognitif) dan afeksi (pendekatan alamiah), kemampuan berkomunikasi (pendekatan alamiah) yang telah dibina pada tingkat SLTA ke bawah.

4. Usulan Metode Pengajaran Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi

Laras bahasa bidang keilmuan sering disebut laras bahasa untuk keperluan khusus. Pada hemat saya pengajarannya dapat menggunakan berbagai metode yang telah dikenal, seperti simulasi peran (drama, sugestopedia), menerjemahkan karangan ilmiah bidang ilmu tertentu ke bahasa Indonesia, dialog, melaksanakan instruksi tertentu (responsi fisik), pemecahan masalah bersama, pertukaran informasi, improvisasi, tanya jawab, latihan berantai-berjenjang, metode membaca, pembelajar menjadi pelatih atau pengajar pelajar lain, latihan menafsir atau membuat interpretasi, observasi dan menonton contoh yang salah atau benar, latihan meliputi peristiwa atau persidangan, meringkas suatu bab buku teks, perlombaan pidato tanpa teks dan perlombaan karya tulis.

Pengajaran Bahasa Indonesia di perguruan tinggi sekurang-kurangnya dilakukan sebagai berikut.

- a. Kuliah umum Bahasa Indonesia dilakukan pada awal perkuliahan. Para pengajar adalah semua pengajar mata ajaran ditambah pakar bahasa Indonesia. Hindari silabus leksiko-gramatikal tradisional yang menekankan tata bahasa dan ketepatan gramatikal.
- b. Ancangan pengajaran menggunakan metode dua arah, pelatihan langsung atau praktek, dengan pendahuluan minimum mengenai struktur (yaitu kesatuan-kesatuan fonologis, gramatikal, operasi-operasi gramatikal, dan butir-butir leksikal), fungsi dan keterampilan komunikatif (yaitu dimensi semantik dan komunikatif) dan interaksi (bahasa sebagai wahana hubungan dan transaksi sosial) sekadar untuk penyegaran.

Pelatihan yang dilakukan sebagai berikut.

- 1) Pelatihan menangkap makna secara tertulis dan ringkas-padat dari suatu penjelasan lisan.
 - 2) Pelatihan mengungkapkan secara lisan dan meringkas suatu uraian tertulis.
 - 3) Teknik menyunting dilakukan dengan mengganti uraian panjang dengan kosakata bidang ilmu tersebut; untuk meningkatkan efektivitas pesan, menghapus bias makna dan lain-lain; meningkatkan efisiensi kalimat dan menghapus bagian yang tak bernilai tambah; meningkatkan plastis bahasa agar lebih nikmat ketika ilmu diserap; menulis ulang kalimat yang salah struktur; menyederhanakan bentuk induk-anak-cucu kalimat agar ilmu lebih mudah diserap.
 - 4) Pelatihan membedakan bahasa lisan dan tulisan.
 - 5) Pelatihan membedakan kalimat ilmiah dan kalimat populer.
 - 6) Pelatihan membuat esai, kritik, atau karangan lain.
- c. Sepanjang proses belajar-mengajar, para pengajar mata ajaran apa pun menyisipkan pelajaran Bahasa Indonesia kontekstual yang terkait pada topik yang sedang dibahas. Tekanan pengajaran adalah penggunaan sebanyak mungkin kosakata bidang ilmu pada setiap ungkapan, diramu harmonis dengan kosakata yang berlaku umum secara efektif, efisien, dan plastis. Pertanyaan dan pembentukan kalimat jawaban dalam pekerjaan rumah dan ujian tertulis, memerlukan pelatihan tersisip pada perkuliahan setiap mata ajaran.
 - d. Pada awal tugas penyusunan skripsi, tesis, atau disertasi, pengajaran Bahasa Indonesia tersisip pada kuliah umum penyusunan karya ilmiah dan penelitian.
 - e. Metode konseling sepanjang penyusunan karya akhir tersebut, dilakukan oleh pembimbing karya akhir. Pembimbing jangan menjadi penyunting. Di samping pembimbing, perguruan tinggi dapat menyediakan Penjamin Mutu Bahasa dan Penjamin Mutu Metode Statistik.

Masalah utama pengajar adalah membangun kesadaran berbahasa Indonesia para siswa, khususnya membangkitkan kesadaran akan kelemahan berbahasa, kesadaran agar memperhatikan secara terus-menerus bentuk bahasa, ujaran sendiri,

makna yang tepat, dan membangkitkan kemauan keras dan keinginan berlatih atau berpraktik sambil mengurangi ketakutan berbuat salah pada saat berlatih.

Membangun kesadaran tersebut dimulai dengan tawaran manfaat; pengajar menunjukkan hubungan kuat penguasaan bahasa dan penguasaan bidang ilmu tertentu. Pengajar menunjukkan korelasi kuat bahwa kemampuan berbahasa meningkatkan secara langsung daya persepsi, daya simpan di benak, daya olah, dan daya unguap para siswa.

5. Kondisi Ideal Bahasa Indonesia yang Digunakan dalam Bidang Keilmuan

Kondisi ideal, antara lain, tampak pada gejala-gejala sebagai berikut.

- a. Seluruh publikasi ilmiah menggunakan kosakata bidang ilmu masing-masing secara setia. Untuk pertama kali dalam publikasi, padanan bahasa Inggris atau asing lain disandingkan dalam kurung, untuk membiasakan para pembaca dengan istilah baru. Apabila semua publikasi menggunakan istilah yang sama sebagai konvensi (kesepakatan), terjadilah pengenalan serempak di segala penjuru tanah air akan istilah baru bidang ilmu tertentu.
- b. Sebuah karya ilmiah dapat diserap secara efektif dan efisien oleh pakar lain dalam bidang ilmu yang sama. Peningkatan pendalaman ilmu secara nasional menjadi lebih seragam dan mudah.
- c. Pengajaran bahasa Indonesia kontekstual bidang ilmu, menjadi makin seragam bila berlandaskan pada daftar istilah dan kamus bidang ilmu yang berterima umum.
- d. Hubungan lisan antarpakar makin efektif dan efisien.
- e. Karangan ilmiah dan buku teks bidang ilmu dalam bahasa Indonesia mempunyai dasar berpijak untuk penyempurnaan tanpa henti pada masa yang akan datang. Karangan dan buku teks tersebut ramah pembaca, mudah dipahami pembaca atau siswa, tak memboroskan waktu persepsi ilmu pengetahuan baru.
- f. Munculnya generasi baru ilmuwan Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia tanpa hambatan dalam mengungkapkan gagasan, konsep, dan teori.
- g. Tak terjadi kesenjangan bahasa antara para ilmuwan dan masyarakat luas karena penjelasan keilmuan dilakukan dalam bahasa Indonesia. Penyebaran ilmu pengetahuan menjadi terakselerasi dalam kehidupan sehari-hari, merupakan pengejawantahan upaya mencerdaskan bangsa bersama-sama.
- h. Terjadi transformasi penggunaan bahasa sebagai sarana bersosialisasi menjadi bahasa intelektual yang berterima umum. Terjadi transformasi masyarakat menjadi masyarakat yang sadar ilmu, teknologi, dan cerdas.
- i. Pada akhirnya daya saing bangsa di arena global makin meningkat tanpa perlu syarat penguasaan bahasa asing untuk penyebarluasan ilmu pengetahuan.

6. Strategi Pengajaran di Perguruan Tinggi Menuju Kondisi Ideal

Stern (1975) menguraikan berbagai strategi pengajaran dan pembelajaran bahasa yang meliputi strategi perencanaan, strategi aktif, strategi empatik, strategi formal, strategi eksperimental, strategi semantik, strategi praktis, strategi komunikasi, strategi peman-tauan, dan strategi internalisasi. Strategi tersebut dapat diterapkan pada bidang

keilmuan, dengan pendekatan sebagai berikut.

- a. Strategi perencanaan hendaknya menggunakan ancangan bingkai waktu yang masuk akal karena kemampuan berbahasa merupakan perpaduan antara pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan estetika pengguna bahasa tersebut. Ancangan peningkatan kemampuan secara serta-merta, sering menghasilkan kekecewaan. Gaya pembelajaran juga dilakukan secara pribadi, tak dapat dilakukan pukul rata karena aspek kelemahan-kemahiran tiap siswa itu berbeda.
- b. Strategi mengaktifkan siswa hanya dapat dilakukan dengan membangkitkan komitmen semua pihak terkait. Kegagalan membangun kemampuan berbahasa Indonesia kontekstual bidang ilmu ditekuni disebabkan pembelajar kurang berkemauan keras, kemampuan dan perhatian pengajar kurang memadai, silabus dan metode kurang tepat, organisasi administrasi-pemantau--penilai kurang memadai, dan keterbatasan dana serta alokasi waktu.
- c. Strategi empatik adalah upaya membangkitkan rasa suka pada program dengan menunjukkan aspek-aspek manfaat, keindahan, dan kemudahan yang diperoleh akibat penguasaan bahasa tanpa memaksa. Kesadaran dibangkitkan, nilai keindahan ditarik keluar dari dalam kepermukaan kesadaran, kreativitas diberanikan, bukan dipaksakan melalui program belajar-mengajar yang ramah.
- d. Strategi eksperimental dengan ancangan metode yang diterapkan secara luwes beradaptasi dengan kemajuan siswa, tanpa tekanan pada ancangan benar-salah yang berakibat menurunnya selera coba-coba.
- e. Strategi praktis adalah dorongan pada siswa untuk menggunakan hasil-hasil eksperimen ke dalam pekerjaan nyata, misalnya pada pembuatan pekerjaan rumah, karya tulis, dan jawaban ujian.
- f. Strategi semantik memperdalam cita rasa bidang ilmu yang ditekuni, dengan membahas nuansa makna antaristilah yang mirip atau tumpang tindih. Pengajar membangkitkan intuisi kepakaran dengan selalu mempertanyakan ketepatan penggunaan istilah dalam suatu ungkapan.
- g. Strategi komunikasi mendorong penggunaan bahasa lisan padat istilah bidang ilmu dan kalimat berciri khas bidang ilmu tersebut. Pengajar memberi tahu bentuk-bentuk kalimat terbaik yang diucapkan para siswa selama diskusi untuk apresiasi dan menyemangati.
- h. Strategi pemantauan sendiri selalu diingatkan pengajar kepada para siswa agar selalu sadar akan aspek bahasa dalam setiap aktivitasnya, melalui kontemplasi (perenungan) agar memantau sendiri kemajuan berbahasa kontekstual dari hari ke hari.
- i. Pada akhirnya strategi pemantauan sendiri akan menghasilkan internalisasi, suatu perasaan bahwa kemampuan berbahasa telah menyatu dalam dirinya. Bahasa telah menjadi seperangkat kebiasaan. Kaidah berbahasa digunakan secara wajar bahkan tanpa sadar, secara amat memuaskan dalam kehidupan sehari-hari.

7. Penutup

Pengajaran bahasa Indonesia disesuaikan dengan bidang ilmu terkait sehingga tak dapat menggunakan ancangan, pola, dan metode pengajaran yang seragam. Di dalam-

nya termaktub perencanaan strategis, ancangan, dan metode terpilih, penyusunan silabus, penyisipan pelajaran berbahasa pada pengajaran ilmu-ilmu, dan program membangun kesadaran dan komitmen antarpengajar dan siswa akan unsur bahasa sebagai bagian mutlak dari ilmu. Gabungan beberapa strategi dan beberapa metode pengajaran sangat disarankan.

Daftar Pustaka

- Ahmadi, Muksin. 1990. *Strategi Belajar-Mengajar, Keterampilan Berbahasa dan Apresiasi Sastra*. Cetakan I, Edisi 1 Malang: Yayasan Asih Asah Asuh.
- Arifin, E. Zaenal dan S. Amran Tasai. 1987. *Cermat Berbahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi*, Cetakan 1, Edisi 2, Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa.
- Arifin, Syamsir. 1990. *Kamus Tata Bahasa Lengkap dengan Contoh*. Cetakan Ke-1. Padang: Angkasa Raya.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1990. *Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa*. Jakarta.
- Komaruddin. 1998. *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*. Edisi Kedua. Bandung: Angkasa.
- Moeliono, Anton M. 1991. *Santun Bahasa*, Cetakan Ketiga. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nasution, S. dan Thomas. 1994. *Buku Penuntun Membuat Tesis, Skripsi, Disertasi, Makalah*. Cetakan Pertama, Edisi Pertama. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ngafenan, Mohammad. 1989. *Kamus Homonim Bahasa Indonesia*, Cetakan Pertama. Semarang: Dahara Prize.
- Pateda, Mansoer. dan Yennie P. Pulubuhu. 1987. *Unsur Serapan dalam Bahasa Indonesia dan Pengajarannya*. Cetakan I, Flores: Nusa Indah.
- Suhendar, Pien, Supinah. 1992. *Seri Materi Kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) Bahasa Indonesia, Pengajaran dan Ujian Keterampilan Menyimak dan Keterampilan Berbicara*. Cetakan Pertama. Bandung: Pionir Jaya
- . 1993. *Seri Materi Kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) Ilmu Budaya Dasar Suatu Studi dan Aplikasi*. Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya.
- . 1994. *Seri Materi Kuliah MKDS (Mata Kuliah Bidang Studi) Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia*. Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya.
- . 1992. *Seri Materi Kuliah MKDU (Mata Kuliah Dasar Umum) Bahasa Indonesia (Kebahasaan)*, Cetakan Pertama, Bandung: Pionir Jaya.
- Sudarsa, Caca. 1984. *Penggunaan Bahasa Indonesia Ragam Tulis dalam Penyusunan Karya Ilmiah*. Jakarta: Priastu.
- Tarigan, Henry Guntur. 1991. *Metodologi Pengajaran Bahasa I*. Edisis Ke-1. Bandung: Angkasa.
- Widyamartaya, A., 1992. *Seni Menggayakan Kalimat*. Cetakan Kedua, Yogyakarta: Kanisius.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B11
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 16.40--17.30
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dalam Bahasa Keilmuan
Penyaji	: Jan Hoesada
Pemandu	: Hamzah A. Machmoed
Pencatat	: a. Junaiyah H.M. b. Buha Aritonang
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Apakah ciri-ciri itu berlaku juga bagi bahasa keilmuan populer? Hal ini saya tanyakan sebab yang saya tangkap itu adalah ciri keilmuan pekat (murni). Padahal, keilmuan itu dapat murni dapat pula populer.

b. Jawaban:

Yang Bapak katakan itu benar. Itulah kekurangan makalah saya; saya tidak membahas secara khusus keilmuan populer itu.

2. Penanya: J. Djoko S. Pasasandaran, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Dari visi apa Bapak memandang bahasa ilmiah populer dan bahasa ilmiah serius. Menurut saya, ilmiah populer itu lebih tinggi daripada ilmiah serius. Padahal, biasanya apa yang bersifat populer itu lebih rendah daripada yang serius. Saya melihatnya dari manfaatnya. Bagaimana pandangan Bapak?

b. Jawaban:

Saya setuju dengan pendapat bahwa dasarnya ialah asas manfaat. Ilmiah populer lebih bermanfaat karena lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya daripada ilmiah murni yang hanya dapat dibaca atau diterapkan oleh kalangan akademis yang terbatas. Ilmiah populer lebih merakyat dan lebih dapat dimanfaatkan oleh 202 juta rakyat Indonesia atau oleh saudara-saudara kita yang tidak sempat menikmati pendidikan di perguruan tinggi.

3. Penanya: Liberty Sihombing, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Seorang guru bahasa Indonesia harus berkualifikasi seperti apa dan berapa jam diperlukan untuk pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi?

b. Jawaban:

Pertama-tama prinsipnya ialah pengajaran khusus bahasa Indonesia di perguruan tinggi; kedua ialah pengajaran bahasa Indonesia yang tersisip dalam setiap kuliah bidang ilmu. Jadi, bahasa Indonesia tidak hanya diajarkan oleh dosen bahasa Indonesia, tetapi juga diajarkan oleh semua dosen bidang ilmu lain.

4. Penanya: A. Syukur Ghazali, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Apakah Bapak mempunyai kiat untuk menerapkan konsep yang padat makna untuk mewakili kalimat yang bertele-tele?

b. Jawaban:

Untuk penulisan tesis (S-2) atau disertasi (S-3) seorang mahasiswa harus membaca minimum dua puluh pustaka bukan terjemahan (harus buku asli dan sumber asal) serta artikel (tanpa batas banyaknya). Saya (sebagai dosen) menanyai mahasiswa, apa yang mereka baca melalui apa yang mereka presentasikan. Mahasiswa tersebut tidak boleh meneruskan tulisannya sebelum saya yakin benar bahwa dia telah memahami apa yang dibacanya; sampai-sampai bacaan itu telah diinternalisasikannya. Jangan dibiarkan seorang mahasiswa meneruskan tulisannya sebelum bab teori itu betul-betul sudah dikuasainya. Jangan sampai terjadi bahwa bab teori itu hanya berisi cuplikan-cuplikan teori a s.d. z, tetapi teori itu sama sekali tidak dipahami. Teori itu adalah teori yang lepas-lepas apalagi kalau sama sekali tidak berkaitan dengan apa-apa yang harus diteliti. Dengan pemahaman internal itu, mahasiswa akan menemukan kata yang padat makna.

5. Penanya: Siti Mariam, STIKP Surya Kencana, Cianjur

a. Pertanyaan:

Saya khawatir para guru bidang lain hanya akan mengajarkan bidangnya, bukan juga mengajarkan bahasa.

b. Jawaban:

Ya, memang sulit bagi guru bidang lain untuk mengajarkan bahasa Indonesia secara tersisip. Akan tetapi, jika mereka mau berlatih dan para pengelola sekolah/perguruan tinggi mau menugasi mereka sedikit demi sedikit saya yakin mereka pun bisa. Pada prinsipnya berilah mereka kesempatan belajar dan mencari pengetahuan tentang bahasa Indonesia. Jika mereka tidak menguasai bahasa Indonesia, tentu mereka akan terjebak pada keadaan bahwa mereka hanya mengajarkan bidang ilmu saja.

6. Penanya: Suherli, STKIP Galuh, Ciamis

a. Pertanyaan:

Bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan saya bahwa mahasiswa yang menguasai bahasa laras ilmu akan takut menulis?

b. Jawaban:

Ini memang problem yang menarik. Orang yang mengecap pendidikan dari SD sampai perguruan tinggi selalu diuji, ditanya, dan diberi tugas pengetahuan oleh gurunya. Ketika harus menulis skripsi atau karya ilmiah, ternyata ia sulit bertanya, menguji, atau menugasi dirinya sendiri. Ia juga sulit untuk menjawab pertanyaannya sendiri itu dan akhirnya ia tidak berani menulis. Oleh karena itu, dosen pembimbing ataupun siapa saja yang bertugas membimbing harus mau menolongnya dengan cara dan sikap yang lunak, tetapi harus keras dan tegas dalam penyelesaian karya ilmiah itu. Prinsipnya, harus keras dalam menjaga mutu, tetapi harus lunak dalam cara dan sikap menghadapinya. Berilah pujian terhadap kemajuan walaupun untuk satu kemajuan yang amat kecil.

BAHASA INDONESIA DALAM WACANA HUKUM

H. A.S. Natabaya

Badan Pembinaan Hukum Nasional

1. Pengantar

Saya menyambut baik permintaan panitia untuk berpartisipasi dalam kongres ini dan menghargai "Bahasa Indonesia dalam Wacana Hukum" dipilih sebagai salah satu pokok bahasan. Pembahasan topik ini saya nilai penting karena itu diharapkan dapat bermanfaat, baik bagi usaha pembinaan bahasa Indonesia maupun pembangunan hukum nasional yang kini kita laksanakan. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam wacana hukum dapat ditemukan baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Bentuk tertulis dapat berupa, antara lain, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, keputusan pemerintah, surat dakwaan, surat pembelaan, dan akta notaris. Untuk dapat memenuhi arahan yang diberikan panitia agar saya membahas mutu bahasa Indonesia yang digunakan dalam wacana hukum, tulisan ini melihat hal tersebut dalam bentuknya yang tertulis dari isinya yang bersifat normatif.

2. Hukum dan Bahasa

Hukum sebagai suatu gejala kemasyarakatan yang berfungsi mengatur segala dimensi kehidupan masyarakat senantiasa berhubungan secara timbal balik dengan gejala kemasyarakatan lainnya, termasuk bahasa. Keterkaitan bahasa terlihat tidak saja ketika hukum merumuskan tingkah laku dan tata hubungan di dalam kehidupan masyarakat, tetapi juga pada saat hukum menjalankan fungsinya menuju pada pencapaian dan pemeliharaan ketertiban. Proses pembentukan dan penegakan hukum dapat dilihat sebagai proses bekerjanya informasi, dan dalam proses ini bahasa sebagai media komunikasi memegang peranan kunci dalam menuntun, mengarahkan, dan mengorganisasikan keseluruhan gagasan substantif yang menjadi muatan materi hukum.

Dalam hukum peranan bahasa tidak harus berarti terbatas pada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa nontulis pun mempunyai makna penting dalam hukum. Dalam kehidupan ketatanegaraan, kita mengenal aturan dasar tidak tertulis yang disebut sebagai konvensi, yaitu aturan yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara.¹ Hukum adat yang berlaku di dalam masyarakat juga dicirikan oleh sifatnya yang tidak tertulis. Sikap diam seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan perkara mempunyai makna tertentu dalam hukum.

Mengenai pentingnya bahasa bagi hukum ditegaskan oleh Mahadi (1979:36). Dikatakan bahwa bahasa memegang peranan amat penting demi tercipta dan terlaksananya hukum dalam masyarakat. Hanyalah dengan bantuan bahasa manusia dapat dan mampu memahami serta menegakkan dan mempertahankan hukum dalam lingkungan suatu masyarakat.

Pemikiran konseptual sebagaimana dikemukakan di atas menggambarkan adanya keserasian antara gagasan substantif dan bahasa yang digunakan oleh hukum. Namun, dalam kenyataan tidak jarang kita jumpai kesenjangan antara keduanya. Bahasa yang

digunakan dalam hukum, seperti dikemukakan oleh Fred Rodell,² "*often creates a smoke screen in which logic is lost and meaning mangled. As a result, legal language may cause disputes and provoke lawsuits, instead of preventing them*". Sebaliknya, kesenjangan juga bisa datang dari ketidaksempurnaan gagasan yang menjadi muatan materi hukum. Apabila kesenjangan ini tidak dilakukan perbaikan, pada gilirannya sampai pada keadaan yang sering dikeluhkan, tidak ada kepastian hukum. Namun, perlu segera dikemukakan bahwa dalam keseluruhan proses pembentukan dan bekerjanya hukum banyak faktor yang terkait: ekonomi, politik, sosial, sumber daya manusia, dan budaya hukum masyarakat.

3. Karakteristik Penggunaan Bahasa

Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam hukum adalah bahasa resmi/baku, sama seperti ragam bahasa resmi/baku yang digunakan pada bidang-bidang lainnya. Oleh karena itu, penggunaan bahasa dalam hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan antara penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum dan bahasa yang digunakan dalam disiplin ilmu lainnya. Perbedaannya terletak pada fungsinya yang mempunyai karakteristik tersendiri sehingga bahasa Indonesia yang digunakan dalam hukum dikatakan mempunyai ciri yang khas, terutama terlihat pada kekhususan istilah, komposisi, serta gaya bahasa yang digunakan.³ Kekhasan penggunaan bahasa dalam hukum terkait dengan fungsinya dalam menuangkan gagasan substantif yang bersifat normatif dalam arti mengandung norma hukum (*rechtsnorm*) untuk menggariskan tingkah laku serta hubungan di antara masyarakat.

Kendati mempunyai karakteristik tersendiri, tidak lantas berarti bahasa yang digunakan hukum hanya dapat dimengerti oleh ahli hukum atau oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang hukum. Oleh karena itu, secara tepat dikatakan bahwa bahasa dalam hukum tidak semata-mata milik ahli hukum saja, tetapi juga milik seluruh masyarakat. Setiap profesi, begitu kata Ronald dan James, (1982:XIII) memiliki *gibberish* dan *jargon* tersendiri yang dapat dipahami secara baik oleh para anggotanya. Begitu pula profesi hukum. Namun, masyarakat mempunyai kepentingan bahkan kewajiban untuk memahami bahasa yang ditulis ahli hukum. Apabila pernyataan ini diteruskan, dapat dikatakan bahwa dalam negara hukum yang demokratis masyarakat mempunyai hak untuk memahami bahasa yang dipergunakan oleh hukum yang mengatur mereka. Untuk itu, bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam hukum harus menggunakan bahasa yang umum dipergunakan oleh masyarakat, begitu pula arti yang terkandung di dalamnya hendaknya sesuai dengan makna yang dipahami oleh masyarakat, dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar serta baku.

Hukum menuntut kecermatan dan ketelitian lebih dalam penggunaan bahasa; suatu tuntutan yang tidak terlepas dari sifat hukum sendiri. Hukum sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang bertujuan mencapai ketertiban dalam masyarakat mengharuskan adanya ketegasan, kejelasan, dan ketepatan, baik dalam pemilihan kata, ungkapan, frasa maupun dalam penyusunan kalimat. Di samping itu, dituntut pula

adanya konsistensi. Semua itu dimaksudkan untuk mencegah agar perumusan norma hukum tidak menimbulkan kemagnagandaan (*ambiguity*) dan kesamaran (*vagueness*) sehingga menjamin adanya kepastian hukum.

Konsistensi dalam penggunaan kata atau istilah, misalnya, dapat dilakukan dengan menghindari apa yang disebut Ogden dan Richards, sebagai "trik manasuka (*utraqustic subterfuge*)", yaitu penggunaan pengertian yang berbeda-beda untuk menyatakan gagasan yang sama. Begitu pula sebaliknya menghindari penggunaan kata atau istilah yang sama untuk lebih dari satu pengertian, yang oleh Fowler disebut "variasi anggun (*elegant variation*)".⁶⁾ Singkatnya, gagasan yang sama harus diungkapkan secara sama dan gagasan yang berbeda harus diungkapkan secara berbeda pula. Apabila hukum dilihat sebagai suatu sistem, asas konsistensi ini berlaku tidak hanya di dalam satu peraturan hukum, tetapi juga dalam kaitannya dengan peraturan hukum yang lain. Selanjutnya, sebagai pembulatan beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa dalam hukum, dapat dikemukakan pendapat ahli bahasa dan ahli hukum sebagai berikut.

- a. Moeliono (1974) mengemukakan bahwa ciri bahasa keilmuan, termasuk bahasa hukum, adalah
 - 1) bahasa keilmuan lugas dan eksak karena menghindari kesamaran dan ketaksaan;
 - 2) bahasa keilmuan objektif dan menekan prasangka pribadi;
 - 3) bahasa keilmuan memberikan definisi yang cermat tentang nama, sifat, dan kategori yang diselidikinya untuk menghindari kesimpangsiuran;
 - 4) bahasa keilmuan tidak beremosi dan menjauhi tafsiran yang bersensasi;
 - 5) bahasa keilmuan cenderung membakukan makna kata-katanya, ungkapannya, dan gaya paparannya berdasarkan konvensi;
 - 6) gaya bahasa keilmuan bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai; dan
 - 7) bentuk, makna, dan fungsi kata ilmiah lebih mantap dan stabil daripada yang dimiliki kata biasa.

- b. Manan (1995:29) mengemukakan bahwa dalam menyusun peraturan perundang-undangan perlu diperhatikan hal-hal berikut.
 - 1) Kata atau ungkapan yang digunakan harus baku.
 - 2) Kata atau ungkapan harus digunakan secara konsisten.
 - 3) Kata atau bahasa yang digunakan harus mudah dimengerti secara umum oleh masyarakat, tanpa mengurangi sifat kebakuan bahasa atau kata tertentu.
 - 4) Kata atau bahasa digunakan dalam satu arti, tidak boleh mengandung berbagai penafsiran atau pengertian.
 - 5) Susunan kalimat diupayakan sederhana dan pendek.

4. Praktik Penggunaan Bahasa

Apabila di atas dikemukakan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum harus tunduk pada kaidah-kaidah bahasa Indonesia, hal ini sudah semestinya. Kedudukan ba-

hasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara secara konstitusional telah mendapatkan dasar hukumnya yang kukuh baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Undang-Undang Dasar yang pernah berlaku. Sebagai bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai kegiatan kenegaraan dan pemerintahan, termasuk bidang hukum.

Persoalannya kini mengenai kaidah bahasa Indonesia yang harus dipenuhi. Jika dilihat dari segi ini, bahasa Indonesia yang digunakan dalam hukum dapat dikatakan belum seluruhnya sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi perkembangan 25 tahun penggunaan bahasa hukum yang dilakukan oleh Tim Kerja Badan Pembinaan Hukum Nasional, masih dijumpai kesalahan-kesalahan kaidah bahasa dalam wacana hukum yang menjadi objek bahasan.⁵

Mutu bahasa Indonesia dalam wacana hukum, sebagaimana sering dikatakan orang, ibarat mutu air produk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), banyak dikeluarkan, tetapi tidak banyak dilakukan perbaikan. Seorang ahli bahasa secara kritis dapat mempersoalkan ketepatan kaidah bahasa dalam kalimat hukum berikut.

"Akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap-penghadap, saksi-saksi dan Saya, Notaris".

"Jika terjadi pemindahan saham karena warisan atau menjadi milik beberapa orang karena sebab lain, pemilik bersama tersebut wajib menunjuk seseorang atau orang lain sebagai wakil mereka dan hanya dia yang berhak menggunakan hak diberikan oleh hukum kepada saham tersebut"

"Menghukum penggugat untuk kasasi akan membayar biaya per-kara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp650,00 (enam ratus lima puluh rupiah)" (Keputusan M.A. Reg.51.KIAG11980).

"Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dibuat dan atau dirakit di dalam negeri serta diimpor, harus sesuai dengan peruntukan dan kelas jalan yang akan dilaluinya serta wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan" (Pasal 12 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan).

"Saksi diminta menjadi saksi-saksi perkawinan antara Nurdiani dengan Aris Sutarto, oleh Sutarto, saksi adalah mahasiswa di Bumington, AS, teman-teman lainnya juga diberitahu oleh Aris Sutarto diminta menjadi saksi-saksi" (Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.1751/P/1989).

Kalimat sederhana yang masih dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum di atas, tanpa mengubah makna yang dikehendaki, sebenarnya dapat diperbaiki agar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi tidak dilakukan. Diabaikannya kaidah bahasa yang baik dan benar sebagaimana ditunjukkan dalam ketetapan pengadilan agama di atas menyebabkan susunan kalimat tersebut tampak berbelit-belit. Kekurangcermatan dalam pemilihan kata seperti ditunjukkan dalam kalimat

ketiga, meskipun merupakan suatu kemustahilan, penggugat untuk kasasi dilihat dari kata yang digunakan tidak perlu memenuhi putusan? Begitu pula penggunaan bahasa dalam kalimat lainnya. Kita tidak segera dengan mudah dapat menangkap makna yang dimaksud ketentuan tersebut.

Mengenai ketidaktaatan dalam menerapkan asas konsistensi dapat ditemukan, misalnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 585/Menkes/ Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik. Dalam peraturan ini, persetujuan tindakan medik telah digunakan sebagai suatu pengertian, tetapi dalam batang tubuh peraturan tersebut pengertian ini digunakan secara tidak konsisten. Sulit dipahami, pembentuk undang-undang memberikan makna yang berbeda-beda pada saat menjelaskan apa yang dimaksud dengan perusahaan. Hal ini terlihat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Konsistensi penggunaan batasan dari suatu pengertian adakalanya tidak dipertahankan ketika dihubungkan dengan materi yang diatur dalam batang tubuh dalam suatu peraturan hukum. Contoh mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Pasal 1 butir 7 menentukan:

"Informasi atau Fakta Material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut".

Pasal 80 ayat (1) menentukan:

"Jika pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran memuat informasi yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat informasi tentang Fakta Material sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya sehingga informasi dimaksud menyesatkan, maka"

Meskipun dari kaidah bahasa mungkin tidak terdapat kesalahan, orang dapat mempersoalkan penggunaan pengertian pegawai negeri dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jika dibandingkan dengan pengertian pegawai negeri yang digunakan dalam Undang-Undang Kepegawaian. Menurut Undang-Undang yang disebut pertama, yang dimaksud dengan pegawai negeri adalah "*meliputi juga setiap orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau upah dari suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah atau badan lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat*". Rumusan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah konsistensi, tetapi menyangkut pula dengan penggunaan konsep yang sangat luas.

Kekurangcermatan dalam pemilihan kata dapat menimbulkan penafsiran yang

berbeda-beda atas suatu ketentuan hukum. Contoh yang dapat ditunjuk mengenai hal ini, yaitu ketika orang mempersoalkan dapat-tidaknya Mahkamah Agung menggunakan wewenangnya melakukan hak uji terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, tanpa melalui proses Ketentuan Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menentukan "*putusan tentang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang-undangan tersebut dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan dalam tingkat kasasi*".

Semua peraturan hukum, apa pun jenisnya bersifat normatif dalam arti mengandung norma hukum (*rechtsnorm*). Kaidah hukum tersebut dapat berupa perintah, larangan, kebolehan, serta kewenangan hukum. Kalimat hukum yang bersifat normatif merupakan ciri bahasa yang digunakan dalam hukum. Namun, dalam praktik masih sering dijumpai rumusan kalimat-kalimat dalam peraturan hukum hanya bersifat pernyataan yang sebenarnya tidak diperlukan. Di samping itu, penggunaan bahasa dalam peraturan hukum masih ditemukan tidak terlalu memperlihatkan seperti bahasa Indonesia dalam strukturnya. Hal ini terutama terlihat pada peraturan hukum yang berasal dari masa kolonial yang kini masih berlaku dan bahasa yang digunakan dalam akta notaris. Pengaruh struktur bahasa terjemahan ini di masa-masa mendatang tampaknya akan berkurang, antara lain terlihat dalam konsep Rancangan Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 282 ayat (1) KUHP:

"Barang siapa yang menyiarkan, mempertunjukkan kepada umum, menempelkan, atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum, membuat, memasukkan ke dalam negeri, mengirim terus di dalam negeri, mengeluarkan dari negeri atau menyimpan, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan menawarkan tidak atas permintaan orang, atau menunjukkan bahwa boleh didapat; tulisan yang diketahuinya isinya, atau gambar atau barang yang dikenalnya, melanggar kesusilaan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ribu rupiah"

Kalimat di atas selain terlalu panjang, susunan kalimatnya tidak benar ketika sampai pada frasa "... atau untuk disiarkan, dipertunjukkan kepada umum..." jika dikaitkan dengan subjek kalimat (*barangsiapa*). Dalam RUU KUHP baru rumusan tersebut diperbaiki sehingga menjadi, sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Kategori III, setiap orang yang:

- a. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan, gambar atau benda sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang isinya melanggar kesusilaan;
- b. membuat atau mempunyai persediaan tulisan, gambar, atau benda dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan sehingga terlihat oleh umum atau membuat atau mempunyai persediaan rekaman dengan maksud untuk diperdengarkan sehingga terdengar oleh umum, yang isinya me-

- langgar kesusilaan;
- c. secara terang-terangan atau dengan kehendak sendiri mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan untuk dapat memperoleh tulisan, gambar, benda, atau rekaman, yang isinya melanggar kesusilaan; atau
 - d. melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, atau c, jika ada alasan yang kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar, benda atau rekaman tersebut melanggar kesusilaan.

Pengaruh penggunaan bahasa asing dalam peraturan hukum terutama menyangkut peristilahan diperkirakan akan semakin dirasakan pada masa-masa mendatang sejalan dengan semakin terbukanya masyarakat kita dalam pergaulan global. Praktik yang kini sudah berjalan, yang dilakukan dengan mencari padanannya dalam bahasa Indonesia atau apabila masih terdapat keraguan atas ketepatannya, baik bahasa asing maupun padanannya sama-sama dicantumkan dan penulisan bahasa asing yang ditempatkan dalam kurung, kiranya dapat terus dilanjutkan. Begitu pula usaha-usaha pembakuan istilah hukum perlu dilanjutkan untuk dapat mengikuti perkembangan hukum yang ada.

5. Penutup

Bahasa Indonesia yang dipergunakan dalam wacana hukum, meskipun mempunyai ciri-ciri tersendiri, harus tetap tunduk pada kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Dilihat dari aspek ini, praktik penggunaan bahasa Indonesia dalam hukum belum seluruhnya sejalan dengan persyaratan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Peningkatan nyata kualitas peraturan hukum hanya dapat diharapkan apabila semua pihak yang terlibat dan bertanggung jawab mempersiapkan serta membuat peraturan hukum menyadari bahwa setiap tahap dalam proses penyiapan muatan materi hukum dan penuangannya ke dalam bahasa sama pentingnya, dan dalam setiap proses tersebut harus melibatkan ahli.

Bahasa yang digunakan dalam peraturan hukum harus dapat dipahami oleh masyarakat luas, untuk itu kalimat yang dipergunakan harus sederhana. Namun, karena muatan materi hukum adakalanya sangat kompleks persyaratan tersebut tidak selalu mudah dipenuhi. Oleh karena itu, peranan penyuluhan hukum memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Catatan

1. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Dikutip oleh Ronald L. Goldfarb dan James C. Raymond, *Clear Understandings: A Guide to Legal Writing*, Random House NY, 1982, hlm. ix.
3. Simposium Bahasa dan Hukum, Medan, 1974.
4. Dikutip oleh Reed Dickerson, *The Fundamentals of Legal Drafting*, Boston-Toronto, 1965, hlm. 11.
5. Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum, BPHN Dep. Kehakiman, 1995.

Daftar Pustaka

- Attamimi, A. Hamid S. 1990. "*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.*" Disertasi.
- BPHN, Departemen Kehakiman. 1995. *Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum.*
- Dickerson, Reed. 1965. *The Fundamentals of Legal Drafting.* Boston-Toronto.
- Goldfal, Ronald L. dan James C. Raymond. 1982. *Clear Understandings: A Guide to Legal Writing.* New York: Random House.
- Mahadi dan Sabaruddin Ahmad. 1979. *Pembinaan Bahasa Hukum Indonesia.* Bandung: Bina Cipta.
- Manan, H. Bagir. 1992. *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia.* Jakarta: Ind-Hill.
- , 1995. Bahasa Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan, dalam Analisis dan Evaluasi tentang Perkembangan 25 Tahun Penggunaan Bahasa Hukum, BPHN, Departemen Kehakiran.
- Simposium Bahasa dan Hukum di Medan. 1974. Asas dan Kaidah Umum Bahasa Indonesia dan Bahasa Hukum, Simposium Bahasa dan Hukum, Medan.
- Sugono, Dendy. 1997. *Berbahasa Indonesia dengan Benar.* Jakarta: Puspa Swara.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B.3
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 15.30--16.20
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dalam Wacana Hukum
Penyaji	: H.A.S. Natabaya
Pemandu	: Sumarsono
Pencatat	: a. Cormentyna Sitanggang b. Mustamin Basran
Peserta	: 100 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Sugirah Wahid, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan

Kita sama-sama menyadari bahwa hukum mengatur semua manusia sebelum lahir, setelah lahir, dan sesudah mati. Oleh karena itu, kita semua berpendapat bahwa bahasa yang digunakan dalam bahasa hukum harus jelas sehingga tidak menimbulkan beberapa interpretasi. Tadi Bapak mengutarakan beberapa hal yang mendasar. Dalam UUD 1945 kita lihat ada satu pasal yang berhubungan dengan penggunaan bahasa yang mengatakan bahwa kekuasaan presiden *tidak tak terbatas*, mengapa tidak dikatakan saja *terbatas*. Salah satu pasal yang lain mengatakan bahwa yang bisa menjadi presiden adalah *orang Indonesia asli*. Yang mana yang *asli* dan *tidak asli* tidak dijelaskan dengan tegas. Sekarang apa yang dapat kita lakukan agar bahasa hukum ini tidak menimbulkan banyak interpretasi?

b. Jawaban:

Penggunaan kata *tidak tak terbatas* itu tidak salah. Istilah itu adalah terjemahan istilah bahasa Inggris *not un limited*. Jadi, penegasan negatif dengan negatif menjadi positif, itu gaya bahasa. Jadi, hal itu tidak jadi persoalan kalau Ibu lihat dalam bahasa asing. Mengenai kata *asli* memang pada waktu itu orang membuat rumusan seperti itu. Lalu, timbul pengetahuan kata *asli*, yang mana yang *asli* itu? Itu masalah lain, tetapi tidak jadi salah dan kita perlu mencari apa makna kata *asli* itu. Jadi, apakah *asli* itu *asli* orang Indonesia atau *asli* yang mana. Jadi, hukum itu harus ditafsirkan, bukan tidak boleh ditafsirkan, sebab ada sesuatu yang tidak jelas. Hanya saja banyak cara penafsiran. Ada cara penafsiran yang namanya trilogis, tujuannya apa? Peraturan itu barangkali dengan bantuan gramatika ini dapat ditafsirkan, baik secara hukumnya maupun sejarah undang-undangnya. Jadi, harus ditafsirkan sebab hukum itu atau undang-undang itu tidak pernah lengkap, sedangkan hakim tidak boleh menolak suatu perkara yang dihadapkan kepadanya dengan alasan undang-undang tidak mengatur, tidak

lengkap atau kabur, tetapi cara penafsirannya itu sudah ada. Yang menjadi persoalan adalah soal bahasa ini. Penggunaan kata dalam bahasa itu jangan sampai *interpretable*, kita harus konsisten dalam penggunaan kata ini sebab kata itu ada yang mempunyai dua arti ada yang mempunyai satu arti. Kita harus menyusun undang-undang itu dengan hanya satu pengertian. Pasal 37 memang bisa diubah. Yang mengatakan tidak bisa diubah itu kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan itu pun kadang-kadang merusak bahasa. Jadi, kekuasaan politik menjadikan kita eufemisme di dalam berbahasa, misalnya *lapar*, dikatakan, *panen tidak berhasil*. Tidak boleh dikatakan *adanya kelaparan*, tetapi *rawan pangan*. Kalau ada *harga naik*, dikatakan itu *penyesuaian*. Jadi, bahasa mempunyai suatu kekuatan yang dahsyat. Oleh karena itu, jika kita membaca tajuk surat kabar, isinya itu bermacam-macam. Anda dapat melihat penggunaan kata-katanya itu, apalagi zaman Gestapu dulu. Jika kita membaca surat kabar *Bintang Timur*, kita akan melihat bahwa segala macam istilah yang digunakannya berbeda dengan istilah yang digunakan oleh surat kabar yang "lurus". Jadi, penggunaan istilah itu juga merupakan suatu *psychological counter attack*.

2. Penanya: Faris Kusnandi, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Apa yang Bapak katakan saya pun berpendapat demikian. Namun, yang menjadi masalah bagi saya adalah kata *atau*. Kata *atau* dalam bahasa Indonesia memiliki makna pemilihan, salah satu di antaranya. Dalam hal ini kata *atau* berlaku untuk banyak hal dalam bahasa hukum sehingga membingungkan kita. Seharusnya kata *atau* itu pada kesempatan tertentu barangkali bisa diganti dengan kata *dan*. Misalnya, dalam suatu kalimat *Pengendara sepeda motor apabila dia menabrak dan yang ditabrak meninggal di tempat dia akan dipenjara. Akan dikenakan hukuman selama 3 tahun atau didenda*. Penggunaan kata *atau* dan kebetulan pengalaman saya juga pernah menjalani hukuman, tetapi bukan persoalan korupsi sehingga menurut saya kata *atau* itu bisa memilih satu di antaranya.

b. Jawaban:

Kata *atau* ini memang suatu pilihan. Dihukum tiga puluh tahun atau didenda ini pilihan. Mengapa ada penggantian hukuman dengan uang? Memang, uang itu berfungsi sebagai pengganti hukuman harus didenda dengan apa kalau bukan dengan uang?

3. Penanya: Joko Pasandaran, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Saya sudah mencermati makalah Bapak dan saya setuju dengan makalah ini. Kemudian, saya teringat pada Kongres Bahasa Indonesia V ada makalah yang bagus yang ditulis oleh Pak Ismail Saleh, yang waktu itu juga sudah mengumumkan bahwa kita sudah memiliki *Kamus Istilah Hukum*. Hanya sekarang pemasyarakatannya bagaimana Pak, ini yang saya tanyakan. Selama ini upaya

untuk membenahan bahasa Indonesia hukum bagaimana? Barangkali kerja sama boleh dilakukan dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan justru saya sudah menyarankan agar dilakukan penyuluhan bahasa Indonesia bagi para profesional hukum, jaksa, pengacara, notaris, polisi, dan sebagainya. Saya pernah mengajar di sekolah pendidikan hukum. Mahasiswa saya sepakat bahwa bahasa hukum harus resmi seperti juga makalah Bapak. Akan tetapi, ketika mahasiswa berhadapan dengan dosen hukum pidana dengan berbagai hukum/dalih dikatakan bahwa bahasa yang saya ajarkan pada mereka itu tidak berlaku karena secara hukum itu tidak benar.

b. Jawaban:

Memang perbaikan sering kita usahakan dengan beberapa macam usaha dengan mengadakan pelatihan di dalam kader *drafting*, dengan membuat kamus hukum. Kata-kata itu belum tentu ada sekarang kita membuat pedomannya bagaimana cara menerjemahkan kata-kata asing itu. Sekarang sudah ada petunjuk dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu dan sekarang hasilnya sudah ada. Sekarang soal pemasaraktannya terus terang memang di Badan Pembinaan Hukum Nasional itu terbatas kepada dana. Kita hanya mencetak sejumlah yang mendapat dana dari Pemerintah dan kita bagikan dan terbatas tidak bisa dijual, dan kalau dijual harus izin dari Menteri Keuangan pasti birokrasi yang sulit.



BAHASA POLITIK DALAM BAHASA INDONESIA

Hans E. Kawuluan

Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

1. Pengantar

Dalam bahasa Indonesia istilah dan kontroversi tentang "bahasa politik" baru muncul pada era Orde Baru. Pada waktu itu diskusi dan perdebatan tentang bahasa politik cukup ramai. Ada yang membenarkan dan ada pula yang tidak membenarkan eksistensi bahasa yang disebut bahasa politik. Yang membenarkan eksistensi itu mengatakan bahwa bahasa politik ada dalam semua bahasa, dan bahasa politik adalah bahasa yang digunakan oleh mereka yang menggeluti masalah politik. Orang yang tidak ikut dalam percaturan politik tidak akan mengerti tentang bahasa yang digunakan. Yang tidak membenarkan eksistensi itu mengatakan bahwa bahasa politik tidak ada; istilah itu hanya dibuat-buat.

Yang kita ketahui pada zaman Orde Baru itu ialah bahwa bahasa politik yang umum digunakan adalah bahasa yang bisa dipakai untuk mengelak atau "lari" apabila ada serangan. Dalam percaturan dan pergumulan politik, terutama pada era Orde Baru, orang politik, khususnya Pemerintah, tidak boleh mengaku kalah. Dengan kata lain, bahasa politik adalah bahasa kemenangan, bahasa yang menjamin pemakainya tidak akan pernah terpojokkan. Untuk menghindari dari tuduhan 'menaikkan tarif.' Pemerintah menggunakan istilah 'menyesuaikan tarif'. Untuk mengelak dari tuduhan melakukan pelanggaran, dikatakan 'kesalahan prosedur'. Permainan "kucing-kucingan" dalam hal ini juga terjadi di MPR beberapa waktu yang lalu, yaitu dalam kasus 'interupsi', yang timbul karena pada waktu pembahasan dalam sidang kelompok digunakan istilah lain dari apa yang disampaikan dalam laporan pada sidang umum.

2. Bahasa Menunjukkan Bangsa

Dari bahasa yang digunakan seseorang kita bisa menebak budayanya, nilai yang dianutnya. Dari bahasa yang dia gunakan, kita bisa mengetahui apakah orang itu sopan atau tidak, terbuka atau tidak, demokratis atau tidak, egois atau tidak, dan sebagainya. Bahasa dan budaya bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kejujuran seseorang akan terlihat dalam bahasa yang di gunakannya, orang yang mau menang sendiri juga akan memeplihatkan sifatnya itu pada bahasa yang di gunakannya. Nilai-nilai yang dianut pembicara akan turut mewarnai bahasa yang di gunakannya.

3. Tiga Tahapan Pertumbuhan Bahasa Indonesia

Istilah Bahasa Indonesia menjadi resmi pada saat dikumandangkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang kita peringati dengan Kongres Bahasa VII ini. Pada saat itu rakyat Indonesia tidak hanya menyatakan kebangsaannya dan tanah airnya, tetapi juga menyatakan bahasanya. Pada saat itu secara resmi dicanangkan oleh seluruh rakyat Indonesia tentang kesatuan bangsa dan tanah air Indonesia dengan ba-

hasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan.

Bahasa Melayu dipilih tidak hanya karena bahasa tersebut pada waktu itu adalah *lingua franca* di seluruh tanah air Indonesia, tetapi juga karena bahasa Melayu yang digunakan di Indonesia adalah demokratis, tidak feodalistik. Hampir semua bahasa daerah yang ada di Indonesia tidak demokratis karena masyarakat dan budayanya adalah feodalistik. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai Bahasa Persatuan pada waktu itu adalah bahasa, yang dapat digunakan oleh semua orang.

Pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan diterimanya Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, maka peran bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan ditambah lagi dengan peran sebagai bahasa negara. Bangsa Indonesia boleh bangga dan bahagia karena jika dibanding dengan bangsa-bangsa lain yang mendapat kemerdekaannya, Negara Indonesia yang begitu luas daerahnya dan besar jumlah penduduknya dapat langsung memiliki satu bahasa untuk menyelenggarakan semua kegiatan negaranya.

Dalam mengisi kemerdekaannya, yaitu dalam menyelenggarakan pembangunan di segala bidang kehidupan nasional, bangsa Indonesia menyatakan keinginannya yang diwujudkan di dalam ketetapan MPR, yaitu dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Dalam GBHN itu bangsa Indonesia menyatakan keinginannya untuk mewujudkan amanat UUD 1945, yaitu membangun kebudayaan nasional Indonesia, kebudayaan bangsa atau kebudayaan Indonesia, melalui pembangunan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional.

4. Bahasa Indonesia Sebagai Bahasa Nasional

Bahasa Indonesia yang berturut-turut berkedudukan sebagai bahasa persatuan, dan bahasa negara, secara alami telah mengikuti proses pertumbuhan yang benar karena dengan statusnya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara, bahasa Indonesia akan memantapkan jati diri bangsa Indonesia. Dengan jati diri itu, bangsa Indonesia akan bertumbuh dan berkembang di atas suatu landasan yang kukuh, yaitu di atas kebudayaan Indonesia yang nilai-nilainya disepakati serta dianut oleh seluruh rakyat di segenap wilayah tanah air Indonesia.

Dengan terbentuknya bahasa nasional itu, komunikasi antarrakyat Indonesia akan berlangsung dalam suasana saling pengertian yang baik karena sudah dilandasi oleh budaya nasional yang sama. Dalam penyelenggaraan negara, seluruh komunikasi dalam bahasa negara akan dimengertikan dengan makna yang sama di seluruh Indonesia. Ini adalah suatu keadaan yang dicita-citakan oleh para pemuda pada tahun 1928, oleh para pencetus dan pendiri negara Indonesia pada tahun 1945. Kita juga ingin melihat bangsa Indonesia bertumbuh dan berkembang menjadi satu bangsa yang memiliki satu kebudayaan nasional Indonesia, bukan kebudayaan nasional yang dipaksakan oleh suatu kebudayaan daerah yang ingin mendominasi yang lainnya. Suasana dalam era Orde Baru, seperti yang dirasakan oleh sebagian anggota masyarakat, adalah suasana yang tidak begitu enak karena sering bisa ditemukan bahasa yang tidak mudah dimengerti. Apa yang dikatakan belum tentu sama dengan apa yang dilakukan. Mengapa terjadi demikian? Kemungkinan jawabannya, budaya!

5. Bahasa Politik Tumbuh dari Budaya Politik

Bahasa nasional adalah bahasa yang mencerminkan budaya bangsa dan telah menyatu dengan budaya bangsa pemakai bahasa itu. Dengan terbentuknya bahasa nasional dengan basis budaya bangsa, dapat diharapkan akan timbul karya-karya sastra nasional Indonesia yang dapat dinikmati dan dihayati oleh bangsa yang bersangkutan. Sastrawan besar yang dimiliki bangsa-bangsa di dunia dapat menghasilkan karya besarnya dalam bahasanya sehingga mendapat hadiah Nobel. Sejarah telah memperlihatkan sastrawan dari bangsa-bangsa di dunia seperti India, Jepang, dan Meksiko yang menghasilkan karya sastra dunia. Sastrawan itu berkarya dan menulis dalam bahasa nasionalnya yaitu bahasa yang dijiwai oleh sistem nilai yang dianut dalam budaya yang hidup di dalam masyarakatnya.

Dengan menggunakan patokan itu, menilai karya sastrawan Indonesia sebagai karya sastra nasional memang tidak mudah. Dalam diskusi di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pernah ada pertanyaan, apakah sudah ada karya sastra Indonesia. Bukankah karya itu adalah karya sastra bahasa daerah penulisnya? Pertanyaan ini keluar karena sampai saat ini belum ada kesepakatan nasional tentang telah atau belum terbentuknya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa yang dewasa ini digunakan dalam masyarakat belum diterima oleh semua orang sebagai bahasa yang mencerminkan budaya nasional.

Sampai sekarang bangsa Indonesia belum mempunyai pengertian yang sama tentang istilah-istilah dalam UUD 1945 seperti 'kebudayaan nasional Indonesia' dan 'puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah'. Kongres Bahasa ini sebaiknya membahas permasalahan ini secara serius karena di sinilah terletak salah satu faktor yang penting yang akan turut menentukan apakah landasan Negara Indonesia sebagai negara kesatuan adalah kukuh dan kuat atau tidak.

Bahasa politik adalah bahasa yang mencerminkan budaya politik di dalam masyarakat. Kalau budaya masyarakat diwarnai dan didominasi oleh kebudayaan sesuatu daerah tertentu, budaya itu tentu saja akan ditolak oleh sebagian anggota masyarakat. Bagi bangsa Indonesia yang dilandasi oleh falsafah Bhinneka Tunggal Ika, kehidupan budaya yang demikian akan menghasilkan masyarakat yang rapuh, tidak stabil, dan tidak kuat, khususnya di dalam menghadapi tantangan dalam lingkungan global yang sudah sangat terbuka seperti sekarang ini yang akan makin menjadi-jadi di masa-masa yang akan datang.

Bahasa politik yang ingin kita hidupkan dalam masyarakat bangsa dan Negara Indonesia adalah bahasa yang mampu menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk mewujudkan sistem dan mekanisme dalam kehidupan politik nasional yang mantap agar bangsa dan negara Indonesia yang dilandasi wawasan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa memasuki hari depan yang adil dan makmur, sejahtera, dan sentosa, secara lahir dan batin, dalam tanah air Indonesia. Kalau bahasa nasional tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, maka hari depan bangsa dan Negara Indonesia akan menjadi gelap. Saat ini adalah saat yang paling tepat bagi kita untuk menghayati tantangan serta risiko yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia di masa depan: *disintegrasi!*

6. Bahasa Politik yang Hendaknya Dibangun di Indonesia

Bahasa politik sesuatu bangsa dapat dibentuk oleh bangsa itu sendiri. Bahasa politik bukan hal yang *'given'* tetapi sesuatu yang tumbuh dan berproses. Yang pertama, harus dijaga bahwa bahasa politik harus tetap merupakan bagian dari bahasa yang hidup di dalam masyarakatnya dan tidak boleh dilanggar kaidah-kaidahnya. Kedua, bahasa politik harus dijiwai oleh tata nilai yang dianut dan dihayati oleh seluruh masyarakatnya. Ketiga, bahasa politik harus diwarnai oleh panduan dasar yang ditetapkan oleh masyarakat tentang negara yang ingin diwujudkan dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Dengan berpegang pada patokan di atas, bagi bangsa Indonesia, bahasa politik itu harus menaati semua aturan dan kaidah bahasa Indonesia agar semua orang mengerti dengan betul apa yang dimaksudkan dalam setiap pernyataan politik dan tidak perlu ada orang tertentu yang berhak menginterpretasikannya. Aturan ini penting untuk dihayati karena bahasa politik bukan bahasa yang bermain dengan kata-kata, bukan suatu bahasa yang dipakai untuk memperlmainkan rakyat.

Bahasa politik juga harus menjawab hal-hal seperti berikut. Apakah bahasa politik itu demokratis, terbuka, lugas, jujur, manusiawi, berperikeadilan, dan sebagainya, ataukah bahasa politik itu membuka peluang bagi seseorang untuk berbuat licik, berbuat bohong, mau menang sendiri, *xenofobia*, *sauvinistik*, feodalistik, dan seterusnya. Bagian-bagian yang terakhir ini mengingatkan kita pada era Orde Baru yang baru lalu. Kesemua ini adalah ciri-ciri dari suatu kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, yang juga perlu kita tentukan ialah, sistem nilai budaya yang bagaimana yang ingin kita tumbuhkan di dalam kebudayaan nasional Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika ini.

Yang terakhir, bahasa politik di Indonesia harus berakar pada dasar-dasar yang sudah disepakati dalam melihat negara yang akan dikembangkan, yaitu Pancasila yang mendasari terbentuknya susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Bahasa politik yang tidak berorientasi pada gagasan dasar ini pasti akan gagal menjadi bahasa yang mampu menggerakkan dinamika rakyat, masyarakat, dan bangsa Indonesia untuk menuju cita-cita tentang negara yang diidam-idamkan oleh seluruh rakyat.

Bahasa Indonesia, terutama pada zaman sekarang, sedang menghadapi tantangan berat, tetapi juga mendapatkan peluang yang sangat indah untuk berkembang. Tantangannya adalah sebagai berikut. Apakah bahasa Indonesia bisa mengembangkan bahasa politik yang mantap, tangguh, dan ampuh sehingga bangsa dan masyarakat Indonesia bisa memasuki dekade, abad, atau milenium yang akan datang dalam keadaan yang kompak untuk mewujudkan cita-cita luhurnya. Kemudian, apakah bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa modern dan digunakan oleh setidaknya ASEAN karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang demokratik dan mudah dipelajari. Kongres Bahasa VII inilah yang harus menjawab tantangan ini. Terima kasih!

LAPORAN SIDANG

Jenis Sidang	: Kelompok A7
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.00--16.50
Judul Makalah	: Bahasa Politik dalam Bahasa Indonesia
Penyaji	: Hans Kawulusan
Pemandu	: Aron Meko Mbetse
Pencatat	: a. Ebah Suhaebah b. Puji Santoso
Peserta	: 100 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: M. Jafar Haruna, Universitas Mulawarman, Samarinda

a. Pertanyaan:

Bahasa politik sebaiknya dipahami oleh masyarakat pemakainya, tetapi bahasa politik yang digunakan oleh elite politik saat ini banyak yang tidak dipahami oleh rakyat. Kita mengetahui bahwa rakyatlah yang banyak menjadi konsumsi politik ini. Rakyat merasa dibodohi oleh elite-elite politik tadi karena tidak memahami bahasa yang digunakan. Bagaimana menurut Bapak?

b. Jawaban:

Saya setuju dengan Anda bahwa bahasa politik para elite politik yang ada sekarang dari Orde Baru itu membodohi rakyat. Itu yang perlu kita bicarakan.

2. Penanya: Masrurah Mohtar, Universitas Muslim Indonesia, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Setujukah Bapak jika saya mengatakan bahwa bahasa politik dapat menciptakan pertentangan terhadap ungkapan yang menyatakan bahwa "Bahasa menunjukkan jati diri bangsa"? Apakah tepat jika kita menggunakan istilah (bahasa) politik di dalam dunia kampus, seperti *kenaikan SPP disesuaikan* dikatakan *SPP disesuaikan* untuk menghindari demonstrasi?

b. Jawaban:

Saya kira jawabannya sudah diberikan oleh Pak Habibie bahwa birokrasi ini seharusnya menggunakan bahasa-bahasa yang jelas. Kita harus berani mengatakan "tidak benar" apabila birokrasi menggunakan bahasa yang tidak jelas.

3. Penanya: Hunggu Tadjuddin Usup, IKIP Manado

a. Pertanyaan:

Di dalam politik ada *kredo* yang bunyinya, "Tidak ada persahabatan yang abadi dan tidak ada persengketaan yang abadi, yang ada hanyalah kepentingan yang

abadi." Bagaimana menjadikan bahasa Indonesia sebagai suatu kepentingan yang abadi?

b. Jawaban:

Saya sarankan Kongres ini yang menjawab. Akan tetapi, saya kira hal ini sebagai *exercise* yang bagus untuk kita bahas lagi. Kalau boleh, mungkin ada alternatif jawaban dari Pak Usup.

4. Penanya: Abdul Wahab, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Saya ingin mengatakan bahwa peserta dan pembicara harus tidak terperangkap oleh judul. Sebenarnya bahasa politik itu tidak ada, yang ada adalah jargon atau register yang sudah dibahas dalam sociolinguistik. Adapun bahasa yang dipakai oleh kaum politikus itu memang bahasa yang mengandung makna ganda yang digunakan untuk mencari "selamat". Seperti yang dikatakan oleh Presiden Habibie bahwa dalam politik memang eufemisme itu sering dipakai. Sekarang tidak lagi eufemisme, tetapi *dieufemisme* untuk menghujat, mengeraskan. Jadi, sekali lagi saya berpendapat bahwa bahasa politik itu tidak ada. Pemakainya yang memang mengeksploitasi bahasa untuk kepentingannya.

b. Jawaban:

Saya kira Pak Wahab adalah penganut yang menganggap tidak ada bahasa politik. Usahakan supaya bahasa politik itu hilang dari perbendaharaan kata kita. Akan tetapi, ada orang lain yang memakainya. Jika tadi dikatakan bahwa bahasa politik untuk mencari "selamat", apakah itu bahasa politik? Hal itu yang tadi dikatakan membodohi rakyat. Mengapa kita tidak berani terang-terangan? Kita menginginkan agar kita dapat berdiri secara terbuka.

5. Penanya: Durdje Durasid, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. Pertanyaan:

Saya kira, senada dengan pernyataan-pertanyaan sebelumnya, sebenarnya bahasa politik adalah bahasa yang munafik.

b. Jawaban:

Masalah ini hanya menambah istilah kita di dalam mengidentifikasi bahasa politik yang kita kenal.

6. Penanya: Sondang Naule Pulungan, ABA Pertiwi, Jakarta

a. Pertanyaan:

Apakah istilah bahasa politik yang disebut sebagai bahasa topeng itu merupakan tantangan atau merupakan gejala kematian bahasa? Sebenarnya, kita harus berusaha, bagaimana caranya agar bahasa kita dapat menjadi bagus dan dapat dipakai di kawasan ASEAN.

b. Jawaban:

Bahasa topeng, bahasa yang munafik, sama juga. Saya setuju dengan istilah-istilah yang mengidentifikasi bahasa politik ini. Adalah gejala yang tidak baik apabila kita main topeng-topengan terus. Kita harus terbuka sedikit. Mengapa harus memakai topeng?

7. Penanya: Syamsul Sadiq, IKIP Surabaya**a. Pertanyaan:**

Bahasa politik era Soekarno berciri sarkastis. Di era Soeharto bahasa politik berciri eufemisme, feodal, dan obskurantisme. Pertanyaan saya adalah sebagai berikut.

- 1) Apakah benar bahwa fenomena bahasa politik dimulai di era Orde Baru?
- 2) Bagaimana karakteristik ideal bahasa politik di masa depan?

b. Jawaban:

- 1) Saya mempunyai pengalaman ketika kami merumuskan hasil-hasil pemikiran yang dibahas oleh begitu banyak orang di Dewan Hankamnas sebelum ada rumusan final. Pengalaman saya itu adalah bahwa setiap hasil pemikiran itu mempunyai rumusan tertentu. Kita tidak tahu mengapa harus ada rumusan tertentu? Ini jawabannya adalah bahasa politik.
- 2) Bahasa politik, apakah itu yang topeng-topengan atau membohongi rakyat, saya kira di era mendatang akan terbuka bagi semua orang. Kita harus lebih terang-terangan, tidak boleh sembunyi-sembunyi. Katakan, "orang itu mau mati" jangan katakan "orang itu kekurangan gizi". Menurut pendapat saya, Anda turut menentukan apakah bahasa politik yang akan datang, yaitu 20–30 tahun yang akan datang, masih berwajah seperti sekarang atau tidak. Saya usulkan agar kita hentikan mulai sekarang bahasa politik. Berperanlah kita dalam membentuk bahasa politik.

8. Penanya: Ukun Suryaman, Universitas Parahiyangan, Bandung**a. Pertanyaan:**

Bagaimana yang dimaksud dengan politik bahasa yang harus berakar pada dasar Pancasila sesuai dengan apa yang Bapak kemukakan?

b. Jawaban:

Bahasa politik berbicara tentang politik, orientasinya politik, dan hukumnya politik. Kalau bahasa politik hendak mengobrak-abrik Pancasila, saya kira kita tidak akan berbicara dengan bahasa politik itu karena setiap orang tidak ingin berbicara karena kita mendirikan negara ini berdasarkan Pancasila. Saya tidak mengatakan bahwa kita harus satu asas. Asal, kita sepakat bahwa Pancasila itu harus dijaga. Sampai saat ini pengertian Pancasila itu belum disepakati secara nasional. Hal ini harus kita bicarakan karena kalau Pancasila itu tidak akan dipakai lagi maka orang akan menyatakan bahwa "Pancasila ini berada di mana".

Hal ini yang menimbulkan disintegrasi. Kita harus menyatakan secara terang-terangan bahwa kalau Pancasila diganggu gugat, akan timbul disintegrasi. Oleh karena itu, bahasa politik kita pun harus berdasarkan ini. Jadi, kalau bahasa politik mengarah pada konsep yang lain, bangsa ini akan tetap bertanya pula, politik apa yang akan kita kembangkan.

BAHASA INDONESIA
DALAM PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI NEGARA

Miftah Thoha

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

1. Pengantar

Memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam sistem dan proses administrasi negara kita tidaklah semudah yang diperkirakan banyak kalangan. Sistem dan proses administrasi negara kita bukanlah suatu sistem orisinal yang tumbuh dan berkembang dari suatu negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Ia merupakan sistem yang ditularkan dan diadopsi melalui waktu panjang dari pelbagai sistem yang dianggap memadai bagi jalannya pemerintah dan kenegaraan kita. Selain itu, sistem administrasi negara kita sangat diwarnai oleh gaya dan kebijaksanaan yang dikembangkan oleh pimpinan atau kepala negara. Kita baru mempunyai tiga kepala negara. Dua kepala negara sebelumnya memerintah dan mengelola administrasi negara kita sangat lama, sedangkan yang ketiga baru beberapa bulan sehingga pengaruhnya terhadap penggunaan bahasa Indonesia di dalam administrasi negara belum tampak.

Pada periode awal, sistem administrasi negara kita banyak meniru dan memakai sistem administrasi negara Kerajaan Belanda. Setelah banyak mahasiswa belajar ke Amerika Serikat, mereka pulang mengenalkan sistem administrasi negara dari negara tersebut. Akhir-akhir ini karena pengaruh global, sistem administrasi negara yang bercirikan global juga mengintervensi sistem administrasi negara kita. Dengan demikian, dalam sistem administrasi negara kita telah banyak diketahui adanya pelbagai pengaruh sistem administrasi dari negara-negara tertentu. Hal itu akan membawa akibat bahwa bahasa administrasinya akan dipengaruhi dan pelbagai istilah yang berasal dari negara-negara tersebut mulai dikenalkan. Bahkan, bukan hanya istilah yang diadopsi, melainkan sistem dan cara penulisan bentuk surat dinas pun menyerupai dan meniru bentuk dari negara-negara tertentu. Sebagai contoh, dahulu nomor surat, hal, dan lampiran diletakkan di pojok kiri atas, sedangkan penulisan alamat yang dituju diletakkan di pojok kanan atas. Kemudian, salam pembuka, biasanya *Dengan hormat*, diberi tanda koma, dan kalimat pembuka ditulis menekuk sekian hentakan ke dalam. Pada bagian akhir surat dinas tersebut nama kantor atau instansi pengirim yang tertera di kop surat ditulis kembali disertai jabatan yang menandatangani surat dinas tersebut. Bentuk surat dinas seperti itu kita kenal pada masa awal penataan sistem persuratan dinas dalam administrasi negara kita. Konon bentuk itu masih banyak dipengaruhi sistem administrasi kolonial Belanda. Setelah kita mengenal sistem persuratan Amerika Serikat, banyak dipergunakan sistem lurus dan alamat yang dituju diletakkan di pojok kiri atas, sedangkan nomor surat dinas, lampiran, dan hal tidak banyak lagi dipakai. Dalam bentuk surat dinas seperti itu efisiensi kalimat berpengaruh sekali dan pada awal dipergunakannya sistem itu belum banyak memperhitungkan efisiensi kalimat.

2. Administrasi Negara Kita

Sebelum menguraikan kondisi bahasa Indonesia dalam penyelenggaraan administrasi negara agar pemahaman dan persepsi kita sama, ada baiknya saya uraikan pengertian tentang administrasi negara ini. Konsep administrasi negara sejak kelahirannya (akhir abad ke-19) sampai sekarang belum banyak berubah. Perubahannya hanya berkisar pada perhatian wilayah kajiannya. Perubahan tersebut ibarat gerakan pendulum yang bergerak dari sisi wilayah politik dan sisi lainnya yang bergerak pada ranah administrasi. Pada gerakan tertentu administrasi diartikan sebagai suatu proses yang menyentuh wilayah kajian politik, yakni upaya yang memasukkan kegiatan membuat keputusan politik sebagai wilayah administrasi negara. Dengan demikian, penyelenggaraan administrasi negara amat luas, sejak diambilnya kebijaksanaan politik sampai dengan tercapainya kebijaksanaan tersebut. Gerakan pendulum yang menuju ke sisi ranah administrasi menekankan bahwa administrasi negara itu sebaiknya hanya meliputi upaya menyelenggarakan kebijaksanaan politik yang telah dibuat di arena politik tersebut. Kedua gerakan pendulum ini acapkali disebut dikotomi antara politik dan administrasi (Henry, 1980).

Sementara itu, pemahaman administrasi negara sering dipertukarkan dengan pemahaman birokrasi pemerintahan. Istilah birokrasi pemerintahan kadang-kadang tidak ada salahnya jika dipergunakan untuk memberi nama lain dari administrasi negara (Larry B Hill, 1992. Judith E. Gruber, 1987; Michael Barzelay, 1992). Bahasa birokrasi mempunyai karakteristik tersendiri, yakni suatu bahasa yang banyak diwarnai dengan penggunaan kekuasaan. Max Weber menyatakan bahwa kekuasaan yang dipamerkan dalam birokrasi dapat bersumber pada kekuasaan tradisional, kekuasaan keahlian, dan kekuasaan karismatik karena ketiga kekuasaan itu dapat menjelma dalam segala aktivitas birokrasi. Salah satu aktivitas birokrasi ialah penggunaan bahasa dalam berkomunikasi. Aktivitas komunikasi itu senantiasa memperlihatkan adanya kekuasaan. Dengan kata lain, bahasa birokrasi adalah bahasa kekuasaan. Sebagai contoh, jika seorang atasan berkomunikasi dengan bawahan atau masyarakat luas, bahasa yang dipilihnya ialah bahasa yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pejabat atasan. Ia tidak memperhitungkan apakah bahasa yang dipergunakan itu memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik. Di dalam lembar disposisi yang menyertai sehelai surat dinas, istilah *tindak lanjuti*, *pertimbangkan*, *cek*, *konsultasikan kepada saya*, *harap lapor*, *selesaikan dalam waktu satu hari*, dan lain-lain lebih merupakan ungkapan kekuasaan daripada tatakrama bahasa yang baik.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat ditarik simpulan bahwa administrasi negara dalam hal tertentu dapat dikatakan sebagai suatu sistem dan proses yang lokusnya berada dalam wilayah politik dan dalam hal lain sistem dan proses yang lokusnya berada dalam pelaksanaan kebijaksanaan, dan dapat pula diartikan sebagai birokrasi pemerintah. Sangat sulit bagi saya untuk mengemukakan penggunaan bahasa Indonesia dengan mengikuti pembatasan administrasi negara seperti itu.

3. Dokumen Administrasi Negara

Informasi yang tertulis, terekam, dan tergambar dinamakan *warkat*. Semua warkat

yang disimpan sebagai bahan dalam proses penyelenggaraan kegiatan suatu organisasi dan dalam proses pembuatan kebijaksanaan oleh pimpinan dinamakan *dokumen*. Dokumen yang termasuk dalam administrasi negara ialah semua bahan informasi yang menjadi warkat yang tersimpan dan dipergunakan untuk proses penyelenggaraan administrasi negara. Dalam kegiatan sehari-hari semua surat dinas, terbitan, brosur, perundang-undangan, surat keputusan, rekaman, gambar, lukisan dan sejenisnya yang dibuat oleh pejabat dan instansi pemerintah dinamakan dokumen administrasi negara.

Pengertian seperti itu hanya terbatas pada kegiatan dokumentasi. Dalam proses administrasi negara hanya ditampilkan salah satu aspek dari pengertian administrasi negara. Akan tetapi, hampir seluruh aktivitas administrasi negara tidak dapat dilepaskan dari aspek dokumen tersebut. Oleh karena itu, pembahasan aspek lain dalam administrasi negara dengan sendirinya akan menampilkan pula aspek dokumen tersebut. Aspek dokumen ini dalam keseluruhan kegiatan dan proses administrasi negara disebut aspek kegiatan ketatausahaan.

Dalam makalah ini saya ingin memberikan batas penggunaan bahasa Indonesia pada bagian yang menonjol dan yang memudahkan bagi saya untuk mengenalinya. Di bidang proses penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintahan, penggunaan bahasa Indonesia yang mudah dikenali, antara lain, meliputi usaha pengaturan (*organizing*) dan kepemimpinan (*leadership dan management*). Dengan demikian, dari dua dokumen unsur usaha dalam proses penyelenggaraan kebijaksanaan pemerintahan itu akan dikaitkan dan dibahas penggunaan bahasa Indonesianya. Proses pengaturan dan pengorganisasian di bidang administrasi negara merupakan proses yang sering dilakukan dan mengambil sebagian besar kegiatan administrasi negara. Sementara itu, proses kepemimpinan merupakan unsur yang sangat sentral dalam administrasi negara dan menjadi penentu dari corak proses kegiatan berikutnya. Selain itu, dari dua unsur ini sangat mudah untuk melihat aplikasi bahasa Indonesia dengan mengamati beberapa dokumen yang ada.

4. Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Upaya Pengorganisasian Administrasi Negara

Pengorganisasian dapat diartikan sebagai pengaturan (dalam arti dinamis), yang meliputi upaya menata pembagian kerja (*division of labor*), menata kelembagaan pemerintahan, menetapkan jabatan pemerintah, dan menetapkan otoritas dan kewajiban tiap-tiap lembaga dan pejabatnya. Sesuai dengan batasan itu, mari kita lihat bagaimana bahasa Indonesia dipergunakan.

Pada bagian ini saya menilai bahwa bahasa Indonesia belum dipergunakan sebagaimana mustinya. Masih banyak digunakan istilah asing dan kurang disertai upaya penggalan istilah dari bahasa sendiri. Tidak jarang istilah-istilah itu memberikan arti yang membingungkan, tidak adanya kesatuan tafsir, cenderung bombastis, dan disingkat semaunya. Misalnya istilah *kabinet*, *kabinet reformasi*, *departemen*, *deputi*, *wakil ketua*, *asisten menteri*, *pembantu asisten (banas)*, *pembantu rektor*, *asisten pembantu rektor*, *pembantu gubernur*, *asisten sekretaris wilayah dan daerah*, dan *eselon*.

Ada jabatan *wakil ketua* dan ada pula *deputi*, seperti yang ada di Bappenas. Ada

pembantu asisten, tetapi ada juga *asisten pembantu*, seperti yang ada di beberapa kementerian negara dan perguruan tinggi. Belum lagi istilah-istilah itu banyak yang disingkat sehingga kadang-kadang tidak dapat dipahami dengan cepat. Contoh, ada sebutan singkatan *Menko Ekuin*, *Menko Wasbang dan Pan*, ada *Baperjanas* dan *Baperjakat*, ada lagi *Mensesneg*, *Mentamben*, *Dirjen Diklusepora*, *Balibang*, dan *Ditdikgutenis*.

Istilah dan singkatan seperti itu tersebar di pelbagai macam dokumen administrasi negara, baik surat keputusan, Inpres, maupun warkat-warkat lainnya dan sudah dianggap biasa sehingga kadang-kadang tidak dipahami lagi apakah istilah itu merupakan singkatan atau bukan singkatan karena bentuk itu sudah dirasakan bukan singkatan lagi. Pedoman penyingkatan kata/istilah tampaknya juga belum ada atau, kalau ada, belum dapat dipenuhi secara menyeluruh. Kadang-kadang ada singkatan yang terdiri dari huruf awal kata, seperti DPA (Dewan Pertimbangan Agung), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dan DT H (Daerah Tingkat H). Ada pula singkatan yang terdiri atas suku pertama dari kata-kata yang disingkatnya dan ditulis seperti *kapolda* (kepala polisi daerah), *menko* (menteri kordinator), *Baperjanas* (Badan Pertimbangan Jabatan Nasional), *dirjen* (direktur jenderal), dan *parpol* (partai politik). Ada juga singkatan yang acak, campuran beberapa unsur kata bagian awal, tengah, atau akhir kata, seperti *Mentamben* (Menteri Pertambangan dan Energi), *Bappenas* (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional), *Diklusepora* (pendidikan luar sekolah dan olah raga), dan Pusdiklat (pusat pendidikan dan pelatihan).

Singkatan memang dirasakan perlu untuk mempermudah ucapan dan ingatan, terutama untuk menghemat pengeluaran tenaga dalam pengetikan warkat atau dokumentasi administrasi pemerintahan. Akan tetapi, jika bahasa komunikasi administrasi di antara para pejabat senantiasa berbentuk singkatan, dikhawatirkan adanya kesalahpahaman oleh penerima informasi. William Scott (1984) mengatakan bahwa jika bahasa yang dipergunakan tidak jelas dimengerti oleh penerima berita dalam suatu organisasi, komunikasi administrasi bisa gagal. Tampaknya, singkatan ini sulit dihindari. Dalam disposisi surat dinas dari pejabat/pimpinan kepada pejabat yang dituju selalu dijumpai singkatan kata *acc* atau *stj*, yaitu bentuk singkat dari kata *accord* atau *setuju*. Oleh karena itu, ada baiknya diterbitkan kamus singkatan administrasi negara untuk membantu pemahaman singkatan tersebut. Kamus itu diharapkan dapat memberikan panduan atau pedoman cara menyingkat bahasa administrasi pemerintahan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kiranya berkewajiban mengupayakan penerbitan kamus singkatan administrasi negara tersebut.

5. Kepemimpinan

Di bidang kepemimpinan penggunaan bahasa Indonesia banyak diwarnai oleh gaya dan kebijaksanaan pimpinan administrasi negara yang kesemuanya bersumber dari kepala negara. Selama ini administrasi negara kita dipimpin oleh dua kepala negara yang berbeda gaya kebijaksanaannya dan dalam waktu yang cukup lama. Tulisan ini akan menyoroti penggunaan bahasa Indonesia dalam masa kepemimpinan dua presiden tersebut.

Ketika negara kita baru saja merdeka sampai kurang lebih tahun 1959, sistem pemerintahan masih banyak dipengaruhi oleh sistem pemerintahan kolonial Belanda. Pengungkapan kebijaksanaan publik melalui bahasa Indonesia masih banyak bercampur dengan istilah dari bahasa Belanda. Bahasa dalam perundangan-undangan, surat keputusan, surat dinas, akte, dan memo, bercampur dengan bahasa Belanda. Bentuk surat dinas yang menggunakan bentuk takuk, surat keputusan yang merujuk pada pertimbangan dan ingatan legalistik, atau surat perjanjian/kontrak yang kalimatnya baku dan panjang, kesemuanya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh sistem sebelumnya, yakni sistem administrasi penjajahan Belanda.

Ketika Presiden Soekarno mengumumkan kembali ke UUD 45 (tahun 1959), mulai saat itu sampai kurang lebih tahun 1965 pada masa pemerintahannya harus berakhir, bahasa administrasi pemerintahannya khas mengungkapkan pemujaan individu (*kultus individu*). Sentral aktor republik saat itu ialah Bung Karno. Istilah sehari-hari dalam bahasa administrasi tidak lepas dari pemujaan. Dilembagakanlah penggunaan *Yang Mulia* dalam bahasa administrasi negara kita. Kesemuanya itu disebabkan oleh sistem feodal dan kolonial Belanda yang masih hangat mempengaruhi sikap, perilaku, dan sistem administrasi negara kita. Sebagai akibatnya, ungkapan-ungkapan bahasanya pun banyak terpengaruh oleh ungkapan Belanda tersebut.

Ketika pemerintahan Republik Indonesia di bawah Orde Baru, sistem yang dikenalkan oleh Presiden Soeharto kurang lebih sama dengan pendahulunya. Sama-sama terpusat pada aktor yang tunggal, yaitu Soekarno, kemudian Suharto, sama-sama sentralistik, yakni meletakkan peranan pemerintahan nasional lebih dominan terhadap pemerintahan di daerah. Bedanya terletak pada kebijaksanaan masing-masing. Presiden Soekarno memusatkan perhatian pada pembentukan jiwa nasional, sebagai bangsa yang bersatu (*nation building*). Kepemimpinan Bung Karno lebih mengarahkan pada pemimpin yang menonjolkan sifat *solidarity maker* dan pembakaran semangat persatuan melawan musuh revolusi pada bangsa ini. Pada masa kepemimpinan Sukarno, bangsa ini dibakar oleh semangat perjuangan yang selalu digelorakan setiap saat untuk meneruskan revolusi yang belum selesai. Metafora bahasa yang dipergunakan mengungkapkan jiwa perjuangan bangsa yang keras dan selalu mencari musuh. *Ganyang antirevolusi, subversip, Nekolim, antek-antek, setan kota dan setan desa, kontrarevolusi, komunis to phobi, manipol, go to hell with your aid, berdikari, usdek*, dan lain-lain adalah sejumlah istilah yang selalu mewarnai perjalanan administrasi negara kita.

Pada zaman Orde Baru, di bawah Presiden Soeharto, kebijaksanaan yang dibawakan ialah kemakmuran bangsa dengan melakukan pembangunan nasional sebagai titik berat pemerintahan untuk menumbuhkan perekonomian bangsa ini. Akan tetapi, karena sifat administrasi pemerintahannya yang sangat sentralistik dan pendekatan kekuasaan yang dipergunakan sangat kuat, bahasa administrasinya mencerminkan penonjolan kekuasaan tersebut. Di dalam tata persuratan dinas yang dipergunakan oleh pejabat pada hirarki bawah yang ditujukan pada pejabat di atasnya, selalu dipergunakan istilah *mohon petunjuk* atau *mohon pengarahan*. Demikian juga jika bawahan mau bertemu atasannya kata-kata *mohon menghadap* dan kata-kata *berkenan* selalu tidak ketinggalan. Tanpa kata-kata itu ada rasa ketakutan dari pejabat di hierarki ba-

wah terhadap kekuasaan atasannya. Permohonannya, kebijaksanaannya, kewajibannya dan semua hal yang menjadi kebutuhannya dapat ditolak oleh atasannya jika tidak mempergunakan kata sakti tersebut. Selain itu, kata-kata *diamankan*, *ditangkal*, *dicekal*, *digebuk*, *top down*, *sentralisasi*, *penguasa tunggal*, *mayoritas tunggal* (*single majority*), *konglomerat*, *penjarahan*, dan kata lain yang sejenis banyak dipergunakan dalam pidato, tata persuratan, surat keputusan, perundang-undangan, dan administrasi negara yang mencerminkan penonjolan kekuasaan tersebut.

Sementara itu, penggunaan kata yang menurut tata bahasa Indonesia salah, tetapi pejabat administrasi negara tidak mengindahkannya, merupakan bentuk perwujudan penonjolan kekuasaan. Penggunaan kata *daripada*, akhiran *ken*, dan ungkapan penghalus (*eufemisme*) yang bertujuan memperhalus arti seperti ungkapan *penyesuaian harga* sebagai penghalus *kenaikan harga*, kata *diamankan* sebagai penghalus *ditangkal*, kata *kebocoran anggaran* sebagai penghalus *korupsi*, ungkapan *kesalahan prosedur* sebagai penghalus *penembakan demonstran*, kata *klarifikasi* sebagai penghalus *diperiksa*, dan *belum berhasil* sebagai penghalus *gagal*, merupakan penonjolan kekuasaan dari pejabat atau pemimpin administrasi negara.

Kalimat yang dipergunakan dalam tata persuratan dinas acapkali terlalu panjang sehingga menyulitkan pemahamannya. Contoh:

- (a) Menunjuk surat Saudara, Nomor 1744/C14.1/K-P/1998, tanggal 11 Agustus 1998, perihal seperti pada pokok surat di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat Ketua LAN kepada Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Agustus 1998, Nomor 188/Ket/VIII/F98, tentang pengusulan calon Widyaiswara, bahwa pada prinsipnya LAN masih menunggu kesepakatan di lingkungan intern Depdikbud antara Ditjen Dikdasmen, Ditjen Dikti, Biro Kepegawaian, dan Pusdiklat.
- (b) Memperhatikan Surat Kepala Pusdiklat Pegawai Depdikbud Nomor 156a/A9/KP/1998, tanggal 24 Februari 1998, perihal Pelaksanaan tes seleksi calon peserta Diklat ADUM dan Diklat SPAMA tahun 1998/1999. Sehubungan dengan hal tersebut di atas bersama ini kami mohon untuk dapatnya diberikan prioritas mengikuti Diklat Spama tahun 1998/1999, sdr. Dra. SRI SURJANI, Msi. Peserta testing Diklat Spama dari Universitas Jember, karena yang bersangkutan adalah calon Kepala Bagian Tata Usaha Program Studi MIPA Univ. Jember.
- (c) Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa dalam rangka pelaksanaan Intruksi Presiden Nomor 2 Tahun 1994 tentang peningkatan Penataran P-4 khususnya bagi Pegawai Republik Indonesia, maka BP-7 Pusat akan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk memantapkan persiapan penyelenggaraan Penataran P-4 bagi Pegawai Republik Indonesia di lingkungan Instansi Pemerintah Tingkat Pusat, yang dilaksanakan pada:

Tiga contoh dokumen surat dinas seperti di atas baru dikutipkan dari kalimat pembukanya saja. Jika'dibaca sampai selesai diperlukan waktu yang panjang, ketelitian, dan kesabaran. Bentuk kalimat yang panjang seperti yang dikutipkan di atas banyak dijumpai dalam surat-surat dinas. Selain itu, pemakaian singkatan, dan kata-kata asing yang sudah ada terjemahan atau padanan katanya dalam bahasa Indonesia juga banyak dijumpai. Hal itu terdapat juga pada surat keputusan seperti pada surat

keputusan di bawah ini.

(d) Surat Keputusan Pengurus Unit Korpri sebagai berikut:

Membaca: Surat Ketua Pengurus Sub Unit KORPRI Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 143/SUK-Setjen/VIII/F/98, tanggal 13 Agustus 1998 perihal Penyempurnaan Kepengurusan Sub Unit KORPRI Sekretariat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Selain itu, kalimat panjang dapat kita jumpai di pelbagai surat dinas dan dokumen administrasi yang lain.

Sebaiknya penggunaan bahasa Indonesia dalam salah satu aspek kepemimpinan itu harus mengikuti laras bahasa Indonesia yang sesuai. Aspek kekuasaan yang disandang dalam posisinya sebaiknya tidak dipergunakan untuk mengacaukan penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Artinya adalah bahwa seorang pejabat harus tunduk pada aturan yang dikembangkan dalam tatakrama bahasa Indonesia yang baik. Bukannya penggunaan bahasa Indonesia harus tunduk kepada kekuasaannya, atau pejabat tidak lagi menghiraukan aturan bahasa Indonesia yang baik. Naskah pidato yang dikemukakan pejabat, sebelum dipidatokan hendaknya disunting atau diedit oleh tim penyunting dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

6. Penutup

Demikianlah pokok-pokok pemikiran saya tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan administrasi negara. Secara keseluruhan, penggunaan bahasa Indonesia dalam praktik administrasi pemerintahan masih banyak dipengaruhi oleh kekuasaan yang dipancarkan dari jabatan atau posisi seorang pejabat. Dengan kata lain, struktur jabatan yang ada dalam tatanan birokrasi pemerintahan itu sangat berpengaruh terhadap sikap, perilaku, dan pikiran pejabat. Dengan demikian, jika pikiran yang dipergunakan menggagas suatu kebijaksanaan, kemudian gagasan itu dikeluarkan melalui bahasa, yang dipergunakan itu sangat diwarnai oleh kekuasaan yang ada pada jabatannya tersebut.

Aturan bahasa Indonesia yang baik barangkali tidak diingat lagi. Apalagi jika pendidikan dan pengetahuan tentang bahasa Indonesia yang baik sangat sempit diketahuinya. Maka, yang terjadi ialah bahwa kebijaksanaan itu harus segera dikeluarkan dan diketahui oleh staf yang akan melaksanakan kebijaksanaan itu sehingga tidak perlu lagi belajar atau memperhatikan bahasa Indonesia yang baik itu.

Bahasa birokrasi tampaknya sangat sulit dipisahkan dari hierarki kekuasaan yang ada. Makin tinggi jabatan struktural pemegang birokrasi itu, makin besar kekuasaannya. Makin rendah struktur jabatan dalam birokrasi, makin kecil pula kekuasaannya. Ada asumsi bahwa makin tinggi struktur jabatan pemegang birokrasi, makin besar kekuasaannya, maka makin besar pula pelanggaran terhadap susunan bahasa Indonesia yang baik. Asumsi itu tidak secara otomatis membenarkan bahwa makin rendah jabatan struktural pemegang birokrasi dan makin kecil kekuasaannya, maka makin kecil pelanggaran terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik. Akan tetapi, dalam kenyataannya kesempatan dan keberanian untuk tidak memenuhi aturan bahasa Indonesia yang baik banyak dijumpai pada dokumentasi yang ditandatangani oleh

pejabat birokrasi pada susunan struktur birokrasi di atas. Selain itu, pejabat tinggi mempunyai kesempatan bicara yang lebih banyak daripada pejabat di tingkat bawah. Oleh karena itu, kesalahan bahasa lebih banyak dijumpai pada bahasa pejabat di atas daripada bahasa bawahannya.

Ada baiknya dalam birokrasi publik diperbantukan editor bahasa Indonesia yang dapat membantu perbaikan koreksi dan perbaikan bahasa Indonesia. Selain itu, ceramah bahasa Indonesia yang baik hendaknya lebih sering diberikan kepada pejabat birokrasi publik.

Daftar Pustaka

- Barzelay, Michael. 1992. *Breaking Through Bureaucracy*, LA: University Berkeley Press.
- Gruber, Judith E. 1987. *Controlling Bureaucracy, Dilemma in Democratic Government*. CA: University Berkeley Press.
- Henry, Nicholas. 1980. *Public Administration and Public Affairs.*, Englewood Cliffs, N.Y.: Prentice Hall, Inc.
- Hill, Larry B. 1992. *The State of Public Bureaucracy*. Armonk, NY.: M.E. Sharpe, Inc.
- Scott, William. 1984. *Human relation in Management*. Englewood Cliffs, CA: Prentice Hall, Inc.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A12
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 16.50--17.40
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Administrasi Negara
Penyaji	: Miftah Thoha
Pemandu	: Abdul Djunaedi
Pencatat	: a. Hari Sulastri b. Adnan Usmar
Peserta	: 100 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Taufik, Departemen Sosial, Jakarta

a. Pertanyaan:

Saya ditugasi di bidang kebijakan yang melahirkan surat keputusan dan sambutan menteri. Apakah Bapak bisa memberikan solusi atau cara pemecahannya dalam rangka meningkatkan peran bahasa Indonesia dalam era globalisasi? Ketika saya baru dipindahkan dari Aceh ke Jakarta, sempat ada bisik-bisik yang tidak enak karena saya ditugasi di bidang permutasian pegawai yang berkaitan dengan penerbitan surat putusan, sambutan menteri, dirjen, atau irjen. Saya menoba melaksanakan tugas itu dengan pengetahuan bahasa yang ada dan pedoman yang ada. (1) Bagaimana sikap kita terhadap aparat pemerintahan ataupun administrasi negara yang seperti itu, yang pemakaian bahasanya tidak sesuai dengan kaidah? (2) Selama ini tampaknya pedoman tentang persuratdinasan tidak dipatuhi oleh instansi. Bagaimana peran Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa? Saya sependapat dengan Bapak bahwa harus ada redaktur di semua jajaran pemerintahan. Saya kira itu perlu dipikirkan karena semakin hari semakin tidak konsekuen sikap Pemerintah dalam penggunaan bahasa yang baik dan benar itu.

b. Jawaban

(Jawaban ada pada nomor 3)

2. Penanya: Tini, Kantor Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara, Jakarta

a. Pertanyaan:

Saya sependapat dengan Pak Miftah bahwa penggunaan bahasa yang bisa dijadikan acuan adalah pada strata pertama. Saya tidak begitu sependapat dengan pernyataan bahwa yang harus dibina itu sebenarnya adalah eselon satu. Memang yang selama ini saya ketahui di setiap instansi pemerintah sudah ada editor untuk penggunaan bahasa yang baik dan benar, malahan ini sudah dimulai oleh

Setneg dengan mengadakan kursus-kursus bahasa Indonesia. Namun, hal itu kembali kepada adanya kekuasaan negara yang berada di tingkat atasnya itu. Walaupun mereka mempunyai editor yang sangat baik, beliau tetap berpegang pada kebiasaan bahasa yang beliau pegang, terutama dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang harus kita siapkan, seperti naskah yang harus diserahkan ke Setneg. Walaupun kita sudah menyerahkan konsep dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar beliau ubah lagi. Saya kira editor tidak cukup tanpa ada *good will* dari pemegang kekuasaan.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 3)

3. Penanya: Sutedja Sumadipura, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Lembaga Administrasi Negara (LAN) mempunyai tiga Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA), yaitu LAN RI kampus Jakarta, Bandung, dan Ujung Pandang. Karena mahasiswanya berasal dari ABRI ataupun non-ABRI, bahan yang diberikan sekitar menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Bahan apa yang sebaiknya diberikan, yang bisa menjadi bekal mereka setelah mereka kembali ke instansi masing-masing karena pada praktiknya ada bahan-bahan yang membingungkan yang diberikan oleh pengajar.

b. Jawaban: 1–3

Bagaimana sikap kita dalam menghadapi bahasa birokrasi? Sebagaimana yang telah saya ceritakan, apalagi Saudara bertugas menyusun pidato menteri, sikap kita adalah sebagai berikut. Kalau kita mengakui Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu satu-satunya pusat yang berwenang membina bahasa Indonesia yang baik, kita mengacu ke situ, berpedoman di situ. Jadi, jangan menyimpang dari situ. Penggunaan kata *daripada* tidak boleh diteruskan, seperti pada kalimat *Saya pulang daripada hotel HI*. Jadi, kalau ada yang mengatakan seperti itu, segera direm bahwa itu tidak benar. Saudara, sebagai orang yang bertugas membuat pidato menteri, jangan menterinya itu disalahkan. Pidato menteri itu kadang-kadang merupakan pendapat melalui mulut menteri itu. Jadi, sebenarnya Saudara yang berdosa lebih banyak kalau Saudara tidak mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Sikap yang baik ialah mengikuti pedoman bahasa Indonesia atau Saudara harus mengikuti ujian bahasa Indonesia dahulu. Lulus atau tidak, yang menguji Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sekarang, kita maunya begitu. Diklat pegawai negeri tidak ada yang lain, kecuali LAN. Oleh karena itu, kita tunduk aturan dari LAN karena kita itu birokratif. Sistemnya adalah aturan. Jadi, ini sikap menurut saya. Kalau perlu, di tiap-tiap lembaga atau instansi, ada editor yang telah lulus tes bahasa Indonesia yang baik dengan nilai yang baik, nilai tertinggi. Lalu, ini kebetulan berhadapan dengan orang Wasbangpan. Dalam makalah saya dinyatakan bahwa

istilah yang dibuat oleh Menpan yang dahulu sangat rancu. Ada istilah *asisten pembantu* yang sebenarnya *pembantu asisten*. Istilah ini digunakan eselon II atau eselon lainnya yang disahkan oleh birokrasi kita dan pejabatnya mendapat honorarium uang negara. Istilah itu mohon diperiksa. Saya masih ragu-ragu dengan istilah *pembantu rektor* dan *asisten pembantu rektor*. Di Universitas Gadjah Mada ada istilah khusus tentang itu. Jadi, istilah-istilah ini keluaran Menkopan atau Menkowsabangpan. Mohon Ibu sampaikan kepada menteri. Pemakaian istilah itu perlu direformasi. Sekarang singkatan-singkatan itu bukan main banyaknya di dalam birokrasi kita. Mungkin hal itu bermula dari ABRI atau tentara karena banyak dipakai di kalangan ABRI seperti singkatan *Menkoekuin*, *Menkowsabangpan*, dan *Baperjanas*. Tidak semua orang tahu kepanjangan *Baperjanas*, *Baperjakat*, *Diklusepora*, *Balitbang*, *Pusdiklat*, dan *Dikutentis*. Di dalam birokrasi kita, singkatan itu direstui oleh Menteri Wasbang. Saudara Sutedja bertanya tentang bahan diklat yang baik dalam bahasa Indonesia. Menurut hemat saya, bahan bahasa Indonesia yang baik dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ini. Kalau perlu di tempat saya di Pusdiklat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ada ahli bahasa yang menjadi widyaiswara; namanya Bapak A. Latief. Jadi, Pak Latief ini bertugas menjaga penggunaan bahasa di Diklat ini; mungkin di LAN harus ada widyaiswara yang paham bahasa Indonesia, yang bisa memberi pengajaran dan mengerem bahasa birokrasi yang kebablasan.

4. Penanya: Abdullah Faridan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

a. Pertanyaan:

Dari pembicaraan permulaan sampai akhir kita mengeluh tentang penggunaan bahasa Indonesia pejabat negara. Sebetulnya pejabat negara ini dibatasi gerakannya oleh siapa? Ini yang penting kita perhatikan sehingga kalau ada kesalahan berbahasa, dia dapat kita tegur. Mengenai kesalahan berbahasa Indonesia pejabat, siapa yang dapat menegur presiden atau menteri. Barangkali kalau disebut DPA, maunya orang yang duduk di DPA itu orang-orang ahli bahasa Indonesia. Bagaimana usaha kita menonjolkan salah seorang tokoh pakar bahasa Indonesia yang bisa menegur presiden atau menteri dalam penggunaan kata-kata seperti itu. Selanjutnya, tentang adanya singkatan dan akronim, di satu pihak kita tidak setuju, tetapi sudah terbit bukunya. Hal itu berarti boleh dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa diam-diam saja untuk itu. Bagaimana kita menegur Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, kalau boleh jangan lagi menyetujui keluarnya kamus akronim, kamus singkatan, dan sebagainya.

b. Jawaban

(Jawaban ada pada nomor 5)

5. Penanya: Sudradjat, Universitas Lampung, Bandar Lampung

a. Pertanyaan:

Apa untung ruginya dalam pelaksanaan administrasi negara apabila bahasa Indonesia digunakan oleh para penguasa yang Bapak gambarkan seperti itu?

b. Jawaban: 4–5

Apa untung ruginya bagi bahasa Indonesia itu kalau bahasa Indonesia dipakai oleh pejabat seperti itu tadi. Saya kembalikan hal itu kepada Pusat Bahasa. Presidennya jalan terus, pejabatnya berbicara terus seperti itu. Jadi, tidak ada untung ruginya, barangkali kalau itu dilihat untung rugi dalam arti materi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa masih jalan terus. Masalahnya sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Abdullah, yang saya kira bagus sekali. Siapa yang harus menegur kalau presiden atau menteri mengucapkan bahasa Indonesia yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar? Sebenarnya hal itu sudah dijawab oleh Pak Abdullah. Jawabannya adalah bahwa orang yang berkuasa di dalam pembinaan bahasa ialah orang yang mempunyai keahlian di bidang itu. Jadi, kalau Pak Anton M. Moeliono, Pak Hasan Alwi, Pak A. Latief, Pak S. Effendi, dan lain-lain itu menyampaikan sarannya, mereka harus melihat waktunya. Kalau pukul 13.00 mereka memberikan saran, situasinya kurang tepat, mungkin sehabis subuh atau sesudah makan pagi adalah waktu yang baik. Jadi, saya pikir, orang-orang yang ahli bahasa Indonesia ini, yang berkumpul di universitas ataupun di Pusat Bahasa berhak mempunyai moral yang tinggi untuk meluruskan bahasa Indonesia yang baik, sebagaimana saya lakukan karena saya tahu tentang bagaimana ilmu administrasi negara dan birokrasi. Setiap saat saya bebas mengarahkan aturan administrasi negara yang baik. Ketika Presiden Soeharto mau membentuk Kabinet Pembangunan III, saya menulis di koran--karena tidak ada saluran lain, kecuali koran--tentang cara membuat kabinet yang baru. Ketika Menteri Negara Urusan Pangan (Mempangan) dipisah dari Kepala Badan Urusan Logistik (Kabulog), sementara itu ada menteri yang merangkap jabatan-jabatan lain, saya pun menulis di majalah-majalah tentang hal itu. Ketika birokrasi kita terkooptasi oleh partisan partai politik, saya berbicara di dalam Kongres Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-Ilmu Sosial (HIPIS) di Yogyakarta bahwa birokrasi harus netral dari kekuatan sosial politik negara. Saya berani mengatakan seperti itu karena ilmu dan bahasa saya, demikian juga harapan saya untuk meluruskan yang salah sehingga menjadi benar.

PERAN BAHASA INDONESIA DALAM KEGIATAN DAKWAH

Komaruddin Hidayat
IAIN Hidayatullah

1. Pendahuluan

Sejarah pembentukan dan perkembangan negara kesatuan Republik Indonesia ini secara historis-politis tidak bisa dipisahkan dari jasa dan peran bahasa Indonesia serta penyebaran agama, khususnya Islam, yang merasuki hampir seluruh pelosok Nusantara. Meskipun jarang diungkapkan, dua dari sekian faktor lain yang mendukung dan mengikat serta memelihara kesatuan Nusantara ini ialah adanya kenyataan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan kenyataan bahwa bahasa Melayu (Indonesia) telah disepakati sebagai bahasa nasional. Pada masa prakemerdekaan, penyebaran dakwah Islam yang dilakukan, terutama oleh para pedagang, telah mendorong munculnya kota-kota pantai menjadi pusat perdagangan dan sekaligus pusat Islam serta pusat komunitas berbahasa Indonesia. Itulah sebabnya mengapa khazanah kata bahasa Indonesia banyak sekali yang berasal dari bahasa agama (Arab). Secara politis-sosiologis, di kota-kota pantai inilah muncul beberapa kerajaan Islam yang kemudian berperan menjadi tonggak atau pilar-pilar ekonomi dan budaya yang menyangga dan menghubungkan jalur perdagangan dan komunikasi dakwah ke seluruh Nusantara sehingga kesamaan agama dan bahasa secara sangat signifikan ikut memupuk dan melestarikan solidaritas nasional.

Untuk lebih memudahkan kita dalam mengapresiasi peran bahasa Indonesia dalam kegiatan dakwah, kita dapat membayangkan kalau saja bukan bahasa Melayu--katakan saja bahasa Jawa--yang menjadi bahasa nasional, bagaimana jadinya bangsa kita ini? Sejak ratusan tahun sebelum era kemerdekaan, Pulau Jawa merupakan pusat kekuasaan politik, ekonomi, dan budaya sehingga posisi bahasa Jawa sangat sentral dan sangat berpengaruh. Sebagaimana bahasa-bahasa yang lain, bahasa Jawa memiliki keunikan dan kelebihan tertentu yang tidak ditemukan dalam bahasa Melayu. Kecanggihan dan kemapanan bahasa Jawa itu didukung oleh tradisi serta kekuatan politik kraton sehingga berbagai warisan luhur, khususnya karya sastra dan filsafat, kesemuanya tertuangkan dalam bahasa Jawa. Walaupun begitu, mengapa akhirnya yang disepakati sebagai bahasa nasional bukan bahasa Jawa, melainkan bahasa rumpun Melayu yang dipakai oleh kelompok minoritas? Lalu, apa implikasinya bagi dakwah agama (Islam)? Karakter bahasa Melayu yang lebih egaliter daripada bahasa Jawa tentu saja lebih dekat dengan semangat Islam dan perilaku pedagang daripada karakter bahasa dan budaya Jawa yang mengenal hierarki secara tegas. Dengan kata lain, bahasa Jawa lebih dekat dengan tradisi Hindu-Budha yang mengenal ajaran kasta, sementara ajaran Islam yang tidak mengenal kasta, lebih dekat dengan karakter bahasa Melayu yang umumnya dipakai oleh penduduk pantai dengan sifatnya yang lebih dinamis dan egaliter jika dibandingkan dengan tradisi penduduk pedalaman yang lekat dengan warisan Hindu-Budha. Kalau kita mengatakan bahwa salah satu karakter bahasa Indonesia adalah egaliter, hal itu tidak secara otomatis bahwa pengguna bahasa Indonesia

lalu menjadi demokratis dan egaliter dan, sebaliknya, tidak berarti pengguna bahasa Jawa pasti feodalistik. Dalam perilaku berbahasa ataupun perilaku sosial, sering kita menemukan fenomena manipulasi bahasa Indonesia yang pada dasarnya egaliter, tetapi digunakan dengan semangat feodalistik dengan cara mengembangkan apa yang disebut *euphemism* atau pelembutan ungkapan. Hanya saja, bagaimanapun juga karakter suatu bahasa akan memiliki hubungan timbal balik dengan perilaku orang yang tumbuh dalam tradisi bahasa itu mengingat apa yang disebut bahasa bukan sekadar ungkapan bunyi yang bermakna, melainkan lebih dalam lagi, yaitu pola pikir dan perasaan (*mental language*) yang berada di balik ungkapan verbal. Dengan kata lain, keberadaan bahasa mirip fenomena gunung es, yang kelihatan di permukaan hanyalah sebagian kecilnya saja.

2. Bahasa Dakwah

Semua agama, terlebih-lebih Kristen dan Islam, pada dasarnya memiliki karakter sebagai gerakan missionaris, yaitu penyebaran berita gembira berupa kabar keselamatan di dunia dan akhirat melalui iman pada Tuhan serta menjalankan berbagai perintahnya dan menjauhi berbagai larangannya. Dengan demikian, semua agama besar dunia sangat konsisten memelihara tradisi lisan dan tulisan dalam mengembangkan kegiatan dakwahnya.

Tradisi dakwah lisan yang menggunakan bahasa Indonesia makin berkembang dengan masuknya mimbar agama dalam acara televisi, sedangkan tradisi tulis-baca akhir-akhir ini juga berkembang pesat yang ditandai dengan banyaknya penerbit yang memilih tema-tema keagamaan dalam bisnis mereka. Perlu ditambah lagi dalam hal penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan dakwah mengingat banyak penceramah agama yang kegiatannya melintasi batas wilayah etnis dan pulau sehingga mau tidak mau para penceramah itu harus menggunakan bahasa Indonesia. Tiga hal itu menarik untuk kita telaah satu per satu untuk melihat seberapa jauh peranan dakwah dalam penggunaan dan peningkatan kualitas bahasa Indonesia.

3. Bahasa Dakwah dalam Mimbar Televisi

Kehadiran televisi makin mengukuhkan dominasi bahasa Indonesia atas bahasa-bahasa daerah. Secara perlahan, ruang gerak bahasa daerah makin menyempit oleh perkembangan bahasa Indonesia. Mimbar dakwah di televisi, misalnya, secara bersamaan telah ikut serta memperkuat bahasa Indonesia sebagai media dakwah yang paling efektif yang dapat diterima secara luas. Jika dibandingkan dengan bahasa dakwah di mimbar masjid ataupun ceramah umum, bahasa Indonesia yang digunakan melalui mimbar televisi kualitas tata bahasanya dan pilihan katanya jauh lebih bermutu. Karena televisi memiliki standar bahasa yang relatif ketat, yaitu benar, baik, dan efisien, siapa pun yang berceramah di mimbar televisi mau tidak mau harus membiasakan diri dengan standar yang diminta. Hal itu lebih dimungkinkan karena pada umumnya penceramah mimbar agama di televisi memiliki latar belakang pendidikan sarjana dan mereka sudah terbiasa menggunakan tata bahasa yang benar serta terlatih berbicara secara efisien.

Tentu saja dakwah yang terlalu terikat dengan kaidah gramatika dan disampaikan dengan gaya ilmiah kadang-kadang kurang memikat pemirsa karena dakwah itu dirasakan kering dan kaku sehingga kurang memikat hati pemirsa. Meskipun begitu, ada beberapa penceramah yang cukup berhasil memadukan tradisi lisan yang dirasakan santai dan penuh humor, dengan penggunaan tata bahasa yang baik dan benar. Dengan demikian, isi dan gaya dakwahnya memikat dan terasa akrab, tanpa harus merusak keindahan dan kebenaran tata bahasa.

4. Bahasa Dakwah dalam Masyarakat

Berbeda dari bahasa dakwah yang ditampilkan dalam mimbar televisi, bahasa dakwah dalam masyarakat umum cenderung longgar dan tidak begitu terikat dengan kaidah tata bahasa yang baik dan benar karena dalam komunikasi dakwah, sang pembicara langsung dapat mengekspresikan gagasannya dengan bantuan bahasa tubuh (*body language*) yang sangat diperlukan untuk menarik perhatian pendengarnya, kontak emosi dan gaya teatral menjadi sangat penting, di samping penyampaian materi yang bersifat substantifrasional. Terlebih-lebih jika dakwah dituntut sebagai "penghibur" hati di tengah kegalauan masyarakat yang tengah berlangsung saat ini, gaya, bahasa, dan materi dakwah yang dituntut adalah yang lebih menyentuh perasaan, baik yang menimbulkan rasa humor maupun rasa khuyuk (syahdu dan haru). Dalam konteks ini biasanya sang pembicara menghadirkan istilah yang akrab dengan kehidupan sehari-hari, baik yang diambil dari bahasa iklan, ekspresi kedaerahan maupun istilah baru yang diciptakan sendiri oleh pembicara.

Juru dakwah yang populer biasanya selalu kreatif menciptakan istilah dan idiom baru meskipun kadang-kadang tidak sejalan dengan kaidah tata bahasa Indonesia. Fenomena ini juga mudah kita temukan dalam bahasa komedi. Penggunaan bahasa Indonesia dalam dakwah juga dipengaruhi oleh pertimbangan apakah forum yang dihadapi relatif sedikit ataukah bersifat pasif. Pada forum terbuka, retorika dan humor sangat diperlukan sehingga substansinya kadang-kadang seimbang atau bahkan dikalahkan oleh ungkapan yang menghibur dan memikat perhatian massa. Berbagai banyol, sindiran, dan sedikit kata umpatan yang dibungkus dengan humor sering kita temukan dalam bahasa dakwah. Sebagai akibatnya, kaidah gramatika sering ditinggalkan. Namun, justru itulah kekhasan bahasa dakwah secara lisan yang muncul secara spontan dan isinya sering tidak terfokus atau tidak terarah. Kalau kegiatan dakwah direkam, lalu ditranskrip, akan sangat mudah bagi kita untuk menilai kualitas bahasanya serta alur ceritanya. Banyak ungkapan yang tidak benar menurut kaidah tata bahasa, seperti pengulangan kata dan kalimat serta sisipan kata yang khas. Dengan demikian, kapasitas intelektual juru dakwah serta perbedaan forum akan mempengaruhi pemilihan gaya, tata bahasa, dan materi yang akan disampaikan.

5. Dakwah Melalui Bahasa Tulis

Di samping melalui komunikasi lisan, kekuatan penyebaran Islam terletak pada tradisi dakwah melalui media tulisan. Bahkan, sejak masa pewahyuan Alquran yang disampaikan oleh Jibril kepada Muhammad, Rasulullah telah mengangkat seorang sekretaris

(Zaib bin Tsabit) untuk mencatatnya. Begitu rapi dan *mutawatir* (disaksikan oleh orang banyak sehingga terhindar dari manipulasi) proses pencatatan dan transmisi wahyu dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, baik secara lisan maupun tulisan sehingga kitab Alquran bagi umat Islam dan bagi kalangan sejarawan diyakini otentik, tidak berubah, dari masa Rasulullah Muhammad hingga kini. Tradisi tulis-baca bagi umat Islam diperkuat lagi oleh banyaknya warisan kitab hadis, yaitu catatan mengenai ucapan, perilaku dan kesaksian sahabat Nabi Muhammad yang kemudian dibukukan dan diabadikan hingga kini. Dari kedua sumber itu lalu muncul ribuan buku ilmu keagamaan dalam Islam yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa cabang ilmu Islam tradisional, seperti Ilmu Kalam (Teologi), Ilmu Fiqih (Jurisprudensi), dan Ilmu Tasawuf (Mistik).

Perkembangan dakwah di Indonesia sejak dua dekade terakhir ini telah diperkaya oleh banyaknya penerbitan buku keagamaan, baik berupa terjemahan dari bahasa asing (khususnya yang berasal dari bahasa Inggris dan Arab) maupun karangan para intelektual Indonesia. Dari sekian banyak buku terjemahan, terdapat buku yang sangat filosofis yang tidak mudah dipahami baik dalam bahasa aslinya maupun edisi Indonesianya. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan dua buah catatan.

Pertama, memang terdapat istilah asing yang sulit diterjemahkan secara literer. Banyak ungkapan yang terdapat dalam Alquran ataupun karya asing yang tidak tepat padanannya dalam bahasa Indonesia. Khususnya bahasa Alquran yang begitu luas cakupan maknanya, ketika diterjemahkan, telah terjadi distorsi makna dan pesan sehingga jumlah halaman edisi terjemahannya dalam bahasa Indonesia selalu lebih tebal daripada jumlah halaman karya aslinya. Hal itu juga disebabkan, antara lain, oleh karakter bahasa Indonesia yang tidak membedakan kata kerja yang berkaitan dengan waktu atau faktor kultural, mengingat setiap bahasa akan selalu berkaitan dengan kultur lokal. Misalnya, ungkapan bahasa Arab mengenai *unta* jumlahnya belasan, sebagaimana halnya kata *salju* bagi orang Eskimo, yang keduanya tidak dimiliki oleh bahasa Indonesia. Dengan demikian, kita akan menemukan distorsi dan penyimpangan makna ketika suatu buku atau karya tertulis diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Kedua, meskipun bahasa Indonesia memiliki kekurangan dan keunikan, ketika dibandingkan dengan bahasa lain, ada hal yang menggembirakan ialah bahwa bahasa Indonesia mampu mewedahi gagasan dan konsep yang dianggap fundamental dari pemikiran keagamaan. Hal itu terlihat dari makin banyaknya buku keagamaan yang memiliki bobot keilmuan yang tinggi, baik berupa karya terjemahan maupun karya asli. Buku dan majalah keagamaan justru makin lama makin berkembang. Buku terbitan *Mizan* dan *Paramadina*, misalnya, merupakan contoh dan bukti nyata yang menunjukkan prestasi bahasa Indonesia dalam mengomunikasikan pemikiran ilmiah dan filosofis dengan kadar dan standar keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan.

6. Penutup

Sebagaimana halnya masyarakat yang selalu tumbuh berkembang, bahasa pun demikian. Ada bahasa yang terus tumbuh, berkembang dan berkembang sehingga mendominasi sebuah area, tetapi ada juga rumpun bahasa tertentu yang tergeser dan ter-

gencet pertumbuhannya oleh yang lain. Di Indonesia, bahasa Indonesia tampaknya semakin menggeser pertumbuhan bahasa daerah, sementara dalam konteks regional dan internasional harus siap bersaing, bersanding dan sekali waktu berkompromi dengan bahasa-bahasa yang lain. Jika makin banyak ilmuwan di Indonesia dan mengekspresikan pikirannya dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia akan sekaligus mengangkat martabat dan prestasi bangsa. Akan tetapi, jika bahasa Indonesia lebih banyak digunakan untuk mengekspresikan pemerkosaan serta korupsi, martabat bangsa juga akan jatuh karenanya.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D4
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.00.--17.30
Judul Makalah	: Peran Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Dakwah
Penyaji	: Komaruddin Hidayat
Pemandu	: Nafron Hasjim
Pencatat	: a. Syamsul Arifin b. Non Martis
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suparno, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Apakah penggunaan bahasa Indonesia dalam dakwah itu sudah baik? Kalau penggunaan bahasa itu sudah baik, pada tingkat mana bahasa yang sudah baik itu? Kalau penggunaan bahasa itu belum baik, di mana letak kekurangannya?

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

2. Penanya: Mujianto, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

1) Dakwah sebagai wacana dapat memperkaya bahasa Indonesia. Mohon dapat diilustrasikan lebih lanjut tentang memperkaya bahasa Indonesia itu dalam wacana dakwah, baik dari segi isi maupun bahasa. Apakah konsep-konsep yang dikemukakan dalam bahasa Indonesia itu konsep religius ataukah konsep budaya? Apakah bahasa Indonesia sudah mampu mengungkapkan konsep religius?

2) Dari segi paparan atau komposisi yang saya dengar dapat ditentukan apakah itu paparan dakwah atau bukan dakwah. Yang selalu dikorelasikan dengan retorika yang disinggung-singgung memanfaatkan budaya lokal dengan ekspresi-ekspresi daerah. Pertanyaan itu harap dijawab dengan ilustrasi.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

3. Penanya: Djoko Saryono, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

1) Apakah perlu dibedakan laras bahasa dakwah dengan laras bahasa agama?

2) Seberapa jauh kita boleh mengindonesiakan kata-kata Arab dalam kegiatan

dakwah. Apakah hal itu tidak mengubah substansi? Seberapa jauh toleransi Islam dalam menerima kata-kata daerah untuk kepentingan dakwah? Seberapa jauh toleransi Islam menggunakan kata-kata Hindu untuk kepentingan dakwah Islam? Misalnya, *sembahyang* yang berasal dari *sembah* dan *hyang* yang mengandung ajaran Hindu.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

4. Penanya: Abdul Gaffar Ruskhan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Pak Komaruddin mengatakan bahwa bahasa Indonesia miskin. Pada bagian akhir penyajian dikemukakan bahwa bahasa Indonesia telah mampu digunakan dalam hal dakwah. Kita sadar bahwa bahasa Indonesia diperkaya oleh bahasa lain, termasuk bahasa Arab. Bahasa Inggris pun, yang dianggap mapan, 58% kosakatanya merupakan kata pungutan. Salah satu bagian dari bahasa dakwah ialah ayat Alquran yang diterjemahkan. Apakah terjemahan Alquran dalam bahasa Indonesia mampu mengungkapkan nuansa makna yang terdapat dalam Alquran? Apakah bahasa Indonesia diragukan?

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

5. Penanya: Faisal, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Bahasa Arab mempunyai kaidah tertentu. Bapak mungkin sudah mengenal lebih jauh bahwa dalam kalimat *syahadat* itu ada *jamak mutakallim*. Kalau terjadi meminjaman bahasa, tentu ada perbedaan nuansa makna. Bagaimana media dakwah mengantisipasi bahasa Arab yang sesuai dengan kalimat tauhid itu dalam bahasa Indonesia.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

6. Penanya: Sutrisna Wibawa, IKIP Semarang

a. Pertanyaan:

Seperti kita ketahui, budaya Jawa dimanfaatkan para wali sebagai media dakwah, misalnya dalam acara *sekatèn*. Apakah hal itu tidak menyebabkan terjadinya perbenturan budaya? *Allah* atau *Allah* yang betul.

b. Jawaban:

(Jawaban ada pada nomor 7.)

7. **Penanya:** Masrurah, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Dalam berdakwah, apakah kita sebaiknya menggunakan bahasa baku atau non-baku? Bahasa nonbaku tampaknya lebih efektif. Misalnya, bahasa dakwah yang digunakan Zainuddin M.Z. yang diselingi humor lebih menarik daripada bahasa dakwah Kosim Nurseha atau Quraisy Shihab yang kurang humor. Bagaimana kita mengantisipasi agar dakwah tetap efektif, tetapi tidak menyimpang dari kaidah bahasa Indonesia?

b. **Jawaban: 1–7**

Laras bahasa agama, laras bahasa dakwah, dan laras bahasa kitab suci bisa kita bedakan. Laras bahasa agama adalah laras bahasa yang digunakan dalam wacana keagamaan, bahasa apa saja, apakah bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Akan tetapi, jika bahasa agama digunakan untuk mengekspresikan sikap keberagamaan atau ekspresi keagamaan, ada bahasa yang baku, yaitu bahasa Arab bagi orang Islam. Akan tetapi, ada bahasa-bahasa lokal yang telah digunakan sebagai lokus medium untuk membangun epistemologi ekspresi bahasa. Jika Anda berkunjung ke Iran, Anda akan mendapatkan puisi agamis, tetapi dalam bahasa Persi, puisi itu telah digubah dengan rasa lokal. Orang Persi dapat berdoa (sampai menangis) lebih khushyuk daripada dengan bahasa Arabnya karena doanya itu dalam bahasa ibu mereka. Dalam bahasa Turki juga banyak puisi agamis. Di Indonesia belum banyak. Dulu sudah ada yang merintis, yaitu Pak Z. Mutaqin almarhum. Kalau ia berdoa, doanya luar biasa.

Zainuddin M.Z. memanfaatkan humor sebagai media dakwah. Dalam dakwahnya, isinya 30%, yang lain itu metode dan retorika. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mungkin untuk para akademisi dan sebagainya, hal itu kering.

Dakwah untuk orang Arab, dakwah untuk kalangan eksklusif, dakwah tertulis, dan dakwah lewat radio, berbeda-beda. Dakwah di televisi menuntut persyaratan tertentu, misalnya wajah pendakwah. Dakwah di radio tidak mensyaratkan itu. Di radio wajah tidak diperhitungkan, tetapi imajinasi dan suara penting sehingga banyak pendengar yang jatuh cinta kepada penyiar ketika mendengar suaranya, tetapi setelah bertemu, mereka tidak tertarik.

Bahasa tulis juga begitu. Di dalam hermeneutika dinyatakan sebagai berikut. Sebuah buku memiliki tiga dunia. Pertama pengarangnya (*the world of author*), kedua isi teksnya (*the world of text*), ketiga pembacanya (*the world of reader*).

Ada kalanya sebuah buku tidak diketahui pengarangnya sebab kalau tahu pengarangnya, mungkin pembaca tidak tertarik. Ada buku yang isinya bagus sekali. Judulnya *Religious Experience*. Begitu saya baca kata pengantarnya, ada ucapan terima kasih kepada anaknya yang lahir di luar nikah. Saya tidak jadi membaca buku itu. Buku itu berbicara tentang agama, tetapi ada ucapan terima kasih kepada anak di luar nikah. Bagi pengarangnya hal itu tidak menjadi prob-

lem karena terjadi di masyarakat Barat, tetapi dalam masyarakat kita dapat mengganggu emosi. Lebih baik ucapan seperti itu tidak dimasukkan. Jadi, pengetahuan tentang pengarang menutupi mutiara yang ada dalam buku.

Pengayaan istilah dalam dakwah dapat terjadi melalui ekspresi bahasa lokal, dengan menggunakan media kritik atau hiburan. Zainuddin M.Z. kalau berdakwah di kantor, kadang-kadang menyindir pemimpin proyek. Misalnya jangan lupa *operannya*, artinya komisi-komisinya, dan sebagainya. Dalam hal ini, bahasa jalanan juga dapat digunakan untuk kritik, misalnya. Itu pengayaan metode, bukan pengayaan bahasa. Kadang-kadang karena diucapkan dalam konteks dakwah, terjadi pembelokan makna. Misalnya, istilah *jahannam*, mula-mula merupakan istilah agama, lalu menjadi bahasa umpatan. Tentang kata *rob* ini sulit. Dalam bahasa Inggris ada persamaannya, yaitu *Lord*; karena *ilah* itu *God*, tetapi dalam bahasa Indonesia *Tuan*, *Tuhan*. Padahal, dalam bahasa Arab kata *ilah* itu artinya 'yang memelihara' atau 'yang melindungi'. Dalam bahasa Indonesia ada ungkapan *Tuhan seru sekalian alam*. Contoh yang lain *kita panjatkan doa*. Padahal, yang dimaksud itu mungkin *kita munajatkan doa kepada Tuhan* karena *munajat* itu 'membisikkan kata yang halus', kemudian menjadi *panjat*. Banyak pengayaan, tetapi dapat dipahami dalam konteks.

Ada sebuah buku *Language Game*. Ketika saya main catur, ada sebuah pion yang hilang, yang diganti kuda. Ketika bermain, kuda pengganti itu mengikuti aturan main spion, kalau selesai main, ya sudah.

Ketika membaca buku, suatu bentuk bahasa akan menjadi tanda. Tanda-tanda itu berbeda-beda fungsinya. Yang membedakannya ialah *rule of the game*. *Rule of the game* membedakan makna dan peran. Jadi, makna suatu kata ditentukan oleh konteks. Dalam bahasa dakwah memuat konteks pesan, artinya bahasa agama dapat diungkapkan dalam bahasa lokal. Kemudian, ketika menyangkut hal yang baku timbul problem. Misalnya *Allah* diucapkan *Allah* sehingga timbul kesan bahwa yang mengucapkan seorang yang beragama Kristen. Di Timur Tengah orang Kristen melafalkan *Allah* dan *Alhamdulillah* lafal sebutan orang Islam.

Contoh lain *natalan* termasuk istilah dalam agama Kristen, bahasa Islamnya *maulid*. Di Yogyakarta, tetangga saya, kalau natalan pakai istilah *maulid*. Di IAIN, kalau ulang tahun, digunakan *dies natalis*. Selanjutnya, kita harus membedakan *bahasa*, *konsep*, dan *substansi*. Dalam beragama kita kadang-kadang ribut soal istilah, padahal substansinya sama. Misalnya, nama Tuhan itu banyak atau satu. Tuhan banyak nama atau banyak nama Tuhan yang berarti 'banyak Tuhan'. Jangan-jangan satu Tuhan banyak nama. Misalnya, Anda mengatakan Allah di antara [$>$], Allah [\wedge], tetapi sebelum Islam datang, sudah ada Allah [$>$], misalnya ayah Nabi Muhammad itu Abdullah. Jadi, Allah [\cdot] itu tidak spesifik milik orang Islam. Oleh karena itu, dalam bahasa dakwah sekarang kita mengarah pada substansi. Nah, kalau mengarah pada substansi, bahasa apa pun sah. Jadi, ada sakralisasi bahasa.

Ada anekdot ketika orang Indonesia naik haji. Ketika melihat koran-koran di pinggir jalan, mereka memungutinya, dikhawatirkan itu Alquran, padahal itu hanya koran. Sekarang ini ada asosiasi atau bahasa Arab dan agama Islam sehingga ketika ada pelajaran bahasa Arab di televisi, beberapa kiai kecewa karena yang diajarkan laras bahasa rekreasi, bahasa bisnis, bahasa di hotel, dan sebagainya. Dulu orang mengira bahwa bahasa Arab hanya digunakan untuk kepentingan dakwah Islam ternyata tidak demikian. Lebih-lebih ketika Timur Tengah itu berkembang. Kalau ada mimbar di televisi, bisa terjadi subversi budaya. Bayangkan kalau mimbar agama Kristen di televisi dimulai dengan *Assalamu 'alaikum wr. wb., alhamdulillah wa syukurillah* itu biasa. Jadi, di sini ada retorik, ada politik bahasa, gaya bahasa, tetapi kemudian ada substansi makna. Kita belum bisa membedakan bahasa sebagai lokus dengan makna yang ada di situ, dan dalam Islam, reptonya, mungkin kekhasannya, firman Tuhan hadir dalam bentuk tulisan sehingga terjadi pembakuan, maka terjadi sakralisasi. Misalnya, kalau orang Kristen menyebut *Assalamu 'alaikum*, orang Islam merasa senang atau keberatan? Kalau senang, apa alasannya, kalau keberatan, siapa punya hak paten? Ada politik bahasa (*sense of language*) yang dipakai di Timur Tengah. Jadi, mungkin terjadi distorsi, termasuk terjemahan.

Ada beberapa kata yang sulit diterjemahkan, maka dalam agama ada ilmu tafsir. Di Mesir ada universitas tafsir. Ahli tafsir di Indonesia ialah Quraisy Shihab. Mengapa Alquran atau hadis perlu ditafsirkan? Karena tidak dipahami kalau tidak ditafsirkan. Yang namanya terjemahan Alquran itu adalah tafsir Alquran terpendek karena ketika menerjemahkan, Anda telah menafsirkan. Coba ketika dikembalikan ke bahasa aslinya, tampak bahwa itu tafsiran. Misalnya, kata *zarrah* dalam konteks *Kalau Anda berbuat dosa sekecil zarrah*, artinya 'sekecil biji sawi'. Terjemahan modernnya ialah 'walaupun sekecil atom'. Yang menjadi masalah, kalau kitab suci tidak dapat diterjemahkan berarti diskriminatif. Untuk apa kitab suci itu kalau kita tidak bisa memahaminya. Sebaliknya, kalau diterjemahkan terjadi distorsi.

Pemanfaatan budaya lokal dalam berdakwah banyak sekali, tetapi ketika suatu agama menjadi budaya lokal atau sebaliknya, setelah dipahami dan diperjuangkan, sebetulnya telah menjadi budaya. Kita beragama tidak melalui Malaikat Jibril. Kita ini beragama melalui orang tua dan sudah ada paket-paket budaya. Maka, sesungguhnya agama itu juga fenomena budaya. Ketika seseorang lahir, secara biologis, ia anak kandung ayah ibunya walaupun anak sekarang mulai meragukan untuk memeriksakan NA-nya. Akan tetapi, lebih dari itu kita anak kandung budaya. Bahkan, agama hadir kepada kita dengan jubah budaya. Jadi, di sini agama dan budaya tidak dapat dipisahkan. Spirit agama yang memasuki wilayah budaya, tetapi ada juga budaya yang diagamakan yang secara formal simbolik, tetapi isinya bukan lagi agama. Misalnya *gafura* itu dari (bahasa Arab) artinya 'minta ampun', *sekaten* dari *sahadatain*. Contoh lain, Petruk, Bagong, Semar, dan Gareng berasal dari bahasa Arab (*fatruhil bagha samir nalal-chair*). Bahasa dalam dakwah mengandung unsur hiburan. Oleh karena

itu, kalau pulang dari mendengarkan dakwah, orang hanya bisa mengatakan seru. Dalam ilmu psikologi dikatakan

aku mendengar aku lupa
aku membaca aku mengingat-ingat
aku mengalami maka aku memahami
aku mengulang-ulang aku mencintai

Sekarang yang laku lawak dicampur dakwah. Di dalam dakwah, makin baik bahasa yang digunakan, makin tidak baik/tidak menarik, makin agak kacau makin berhasil karena ada kekonyolan, humor, dan sebagainya. Dalam dakwah para dai sering membuat *plesetan*. Misalnya, *haji tomat* --> pergi haji tobat, pulang kumat.

BAHASA INDONESIA DALAM MEDIA MASSA

Atmakusumah Astraatmadja
Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta

Dalam Seminar Kebahasaan yang diselenggarakan oleh Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia di Brunei Darussalam, 3--4 Maret 1997, saya memberikan gambaran selintas bahwa penggunaan singkatan dan akronim dalam sajian berita dan ulasan pada media pers di Indonesia masih merajalela. Media pers cetak dan media massa yang lain di Indonesia sering tidak mempedulikan upaya mencantumkan kelengkapan atau kepanjangan banyak sekali akronim. Umpamanya, *kodam, kodim, pangdam, pangkostrad, pangkopkamtib, menghankam, depdikbud, mendikbud, dan mentamben*. Atau: *kamtib, sikon, pungli, tramtib, ipoleksosbud, hankamrata, iptek dan imtak, juklak dan juknis, amdal dan semdal, pimpro pelatnas* (bolavoli) *Sea Games*, dan sebagainya. Malahan, di kalangan para pelajar, dikenal akronim "mas adam yang berdasi" (masyarakat adil dan makmur yang berdasarkan pancasila).

Seorang peserta seminar, Dr. Md. Dhari Othman dari Universiti Kebangsaan Malaysia, dalam tanggapannya mengatakan, "Walaupun Pak Atma tidak bimbang dengan keadaan bahasa pers di Indonesia (karena pers, bagaimanapun, lebih banyak menyumbang pada kemajuan bahasa Indonesia daripada merusaknya), sebenarnya beliau pasti risau. Dengan contoh-contoh akronim yang diberikan, saya seolah-olah mendengar bahasa Vietnam" Seminar selama dua hari di Brunei Darussalam itu membahas tema "Peranan Media Massa dalam Peningkatan Mutu Penggunaan Bahasa Melayu/Indonesia."

Kerisauan terhadap perkembangan penggunaan bahasa Melayu (dan, tentunya juga, bahasa Indonesia) dalam media massa, kemudian, diungkapkan oleh Dato Paduka Haji Alidin bin Haji Othman, pengerusi Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Brunei Darussalam (JKTBMBD), *counterpart* Dr. Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di Indonesia, ketika menulis prakata untuk buku *Prosiding Seminar Kebahasaan* tersebut.

"Tema ini tepat pada masanya, kerana kebimbangan kita akan kedudukan bahasa Melayu dalam media elektronik[,] khususnya penyiaran, di mana hampir setiap rancangan yang mempunyai tarikan [,] khususnya rancangan berbentuk hiburan[,] mengeneipkan bahasa yang baik dan benar, sebaliknya atas nama komersil dan mengekalkan 'rating', lebih banyak bahasa cacat marba, bercampur-aduk dengan bahasa Inggeris[,] diketengahkan dengan alasan lebih mudah difahami. Bahayanya ialah masyarakat hari ini malas membaca buku. Mereka lebih gemar menonton televisyen, mendengar radio dan membaca akhbar harian. Oleh sebab itu[,] media massa mempunyai pengaruh yang kuat dalam menyalurkan ilmu kepada masyarakat. Di sinilah letaknya peranan organisasi media[:] selain daripada tanggung jawab ilmunya dan tuntutan komersil harus juga mendukung citra budaya bangsa dengan tidak mengesampingkan bahasa Melayu dalam erti kata bahasa yang baik dan benar."¹

Jauh sebelum itu, 15 tahun yang lampau, Toeti Adhitama, pengelola media pers dan mantan penyiar radio dan televisi, juga pernah mengingatkan dalam Kongres Bahasa III: "... media massa umumnya, termasuk media elektronik, banyak mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat. Mutu kebudayaan (umumnya) dapat ditingkatkan atau sebaliknya dirusak olehnya. Dalam hal penggunaan bahasa, ragam lisan yang tidak terbina atau yang cacat dapat dengan mudah ditiru. Maka, selain muatannya, yang perlu diperhatikan bukan hanya agar bahasa itu jelas dan mudah ditangkap, tetapi juga agar bahasa itu sopan dan tidak menyimpang dari tata bahasa. Siapa pun yang berbicara lewat media elektronik hendaknya memperhatikan [baik] struktur bahasa, pola ucapan, maupun artikulasinya.

Imbauan serupa tentunya juga tertuju pada para pengelola media cetak. "Dari pengamatan sepintas, tampaknya terjadi perusakan dalam ragam lisan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh sebagian penutur di media elektronik, baik perusakan struktur bahasa maupun ucapannya."²

Bagaimanakah keadaan pemakaian bahasa Indonesia di media massa sekarang, hampir dua tahun setelah seminar kebahasaan di Brunei Darussalam atau 15 tahun sesudah diingatkan oleh Toeti Adhitama? Apakah mutu bahasa Indonesia, khususnya laras bahasa jurnalistik, yang digunakan media massa kita telah semakin baik?

Kerisauan banyak pengamat bahasa, ternyata, belum berakhir. Akronim masih tetap merajalela. Para reporter dan para redaktur beralih bahwa ini adalah "demi ekonomi kata" dan, dengan demikian, "demi efisiensi", mengingat mahalnnya ruangan kolom media pers cetak dan waktu siaran radio dan televisi. Atau, karena alasan lain, bahwa pembaca, pendengar, dan penonton--kata mereka--lebih mengenal dan lebih memahami akronim daripada kepanjangannya (yang maknanya, sesungguhnya, jauh lebih jelas).

Kita rupanya sudah melupakan pendapat seorang psikolog puluhan tahun yang lalu bahwa kegemaran menggunakan akronim mencerminkan penderitaan sizofrenia, semacam penyakit jiwa yang ditandai oleh ketidakacuhan dan halusinasi. Inilah, kata psikolog itu, penyakit jiwa yang diderita orang-orang Jerman pada masa pemerintahan Nazi Hitler, sebelum dan selama Perang Dunia Kedua, yang gemar menggunakan akronim dalam percakapan dan karya tulis mereka.

"Demi ekonomi kata", yang berarti penghematan, dan "demi efisiensi" pula, banyak kata dalam bahasa lisan dan laras bahasa jurnalistik dipenggal dari dua menjadi hanya satu kata, walaupun kedua kata itu sudah padu atau idiomatik menurut ketentuan bahasa baku. Misalnya, "*sesuai dengan*", "*berhubung dengan*", "*sehubungan dengan*", dan "*baik...maupun*" menjadi "*sesuai*", "*berhubung*", "*sehubungan*", dan "*maupun*" saja. Kerancuan berbahasa ini, tentu saja, juga menjalar ke kalangan birokrasi dan masyarakat luas pada umumnya.

Membanjirnya acara wawancara dan perbincangan tanpa menggunakan teks dalam siaran televisi dan radio, atau *talkshow*, selama beberapa bulan terakhir setelah mantan Presiden Soeharto mengundurkan diri pertengahan Mei yang lalu, ikut menyumbang pada kekacauan penggunaan bahasa Indonesia. Terutama para pakar, selain para pemandu dan pewawancara siaran radio dan televisi, amat sering menyelipkan

kata-kata asing dalam kalimat mereka. Bahkan, ada pakar yang tidak bisa menggunakan padanan bahasa Indonesia dalam hampir setiap kalimatnya. Atau, mungkin, sengaja berbuat demikian karena pemakaian kata-kata asing dianggap lebih komunikatif dan lebih efektif?

Dua tahun yang lalu, Prof. Dr. Benny Hoedoro Hoed, guru besar linguistik Universitas Indonesia, mengamati terjadinya pengalihan struktur sejumlah konstruksi bahasa Inggris ke bahasa Indonesia "yang cenderung menjadi baku dalam penulisan berita, dan kemudian merembet ke tulisan ilmiah." Umpamanya:

* *Menjawab pertanyaan wartawan*, Menteri menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menuntut yang bersangkutan ke pengadilan. (Seharusnya: *Ketika menjawab pertanyaan...*)

* *Ditanya mengenai masalah tersebut*, Menteri menjelaskan bahwa pihaknya tidak akan menuntut yang bersangkutan ke pengadilan. (Seharusnya: *Ketika ditanya mengenai...*)

Kedua konstruksi itu, kata Prof. Benny Hoed, tidak ada dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris konstruksi semacam itu termasuk dalam bentuk yang mengandung *-ing* dan *-ed*. Misalnya:

* *Answering* journalists' questions, the Minister...

* *Asked* about the matter, the Minister...³

Prof. Benny Hoed mengatakan bahwa sikap terbuka memang perlu dalam penyerapan kata-kata asing yang masuk, tetapi sikap seperti itu harus dihindari dalam tata bahasa. Pengembangan di bidang leksikal dapat mengakibatkan pemerayaan dan pencendekiaan bahasa Indonesia, sedangkan dalam tata bahasa penjiplakan dan pelanggaran atas struktur yang baku bisa mengakibatkan gangguan pada pengacuan tatanan yang sudah ada.⁴

Untuk memperbaiki mutu pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa dan masyarakat, Prof. Benny Hoed menganjurkan agar media massa, khususnya media pers cetak, menyediakan rubrik khusus mengenai bahasa Indonesia.⁵ Selain itu, juga sudah sering dianjurkan, baik oleh pakar bahasa maupun oleh pakar jurnalistik, agar setiap media massa memiliki pengasuh, pakar atau redaktur bahasa Indonesia agar mutu bahasa dalam setiap sajian media tetap terpelihara dengan baik.

Anjuran itu tetap anjuran, sampai sekarang. Saya tidak melihat sambutan yang luas terhadap seruan untuk mengadakan rubrik bahasa Indonesia. Mengenai penggunaan pengasuh bahasa, sejauh yang dapat saya amati, sampai sekarang sedikit sekali antara sekitar 300 media pers cetak dan ratusan lagi media siaran yang berkesadaran atau mampu mengangkat khusus redaktur bahasa Indonesia. Pada umumnya, para pengelola media massa di Indonesia masih tetap mengharapkan penggabungan keterampilan jurnalistik dengan kemahiran berbahasa di tangan setiap reporter dan redaktur.

Sebagai penutup, baiklah dikutip di sini beberapa sajian bahasa Indonesia dalam sejumlah surat kabar dan majalah di daerah dan di ibu kota (sebagaimana adanya, termasuk kesalahan ejaan dan tata bahasa, penggunaan kata-kata bahasa percakapan dalam bahasa tulis, serta kekeliruan makna dan kekacauan susunan kalimat).

* Gadis kakak beradik yang malang ini tak berdaya karena diancam akan diusir jika tidak mau melayani nafsu bejat YS. "Sebelum digituin saya diajak nonton video porno bersama pak YS dan ibu Ham di dalam kamar," ucap Lin polos Sesampai ditempat tersebut, korban langsung diterlentang secara paksa dan celananya juga dilepas paksa oleh kedua pelaku. Ditempat ini jugalah secara bergantian korban digarap dua kali. Mulutnya disumbat celana dalamnya....

* *Judul: Berkurangnya bantuan militer AS bagi RI bukan karena HAM. Teras (alinea awal berita):* Berkurangnya bantuan militer AS bukan semata-mata masalah hak asasi manusia (HAM), tetapi juga karena situasi internasional yang berubah, ungkap Atase Militer untuk Program Pertahanan Kedubes AS, Kolonel Karl F. Eickemeyer, di sini kemarin.

* Selain itu, Presiden Soeharto juga menginstruksikan untuk segera menindak mereka yang jelas melakukan kegiatan yang bersifat kriminal seperti penjarahan dan perampokan sesuai dengan UU yang berlaku.

* Sementara itu, kakak tiri Anwar [Ibrahim], Sukma Dermawan, telah ditangkap polisi Minggu.

* Sedangkan Fashion Cafe, menurut Manajer Even dan Promosi Hotma Tobing, menyediakan artis dan perlengkapannya....Soal iklan bagi TVRI maupun RRI, masih belum bisa disentuh....Sebagai media penyiaran sudah saatnya baik TVRI maupun RRI membenahi diri sesuai tuntutan zaman.

* ...ketika itu dia termasuk salah seorang yang ikut menjaga kawasan kuburan yang diperkirakan mencapai ratusan kerangka jenazah tersebut.

* Para perusuh juga melakukan penjarahan berupa peralatan AC, karpet yang ada dirobek-robek dan isi ruangan lainnya. Demikian juga ruang sidang masing-masing fraksi diporak-porandakan. Dari kerusuhan yang terjadi itu, sedikitnya 27 orang perusuh ditahan di Mapolres Lombok Barat, 10 orang di antaranya luka ringan dan satu orang luka serius atas nama Rukiah (16), warga Bagik Polak, Labuapi, Lombok Barat.

* Jasad tersangka perampok hingga Sabtu (22/8) masih berada di ruang instalasi jenazah bagian kehakiman Rumah Sakit dr. Pirngadi menunggu pihak keluarganya dan visum dokter kehakiman.

* Kendati sudah dipastikan sebagai jenazah Hindoro, keluarga dekatnya, Leni Lim Kristi dan Indah Halim, sejak disemayamkan di rumah duka RS Atmajaya, sampai kemarin, belum sekali pun menengok.

Catatan:

1. Hanafiah bin Awang Haji Zaini dan Mohd. Azurin bin Othman (penyunting); *Prosiding Seminar Kebahasaan, Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia, 3-4 Mac 1997, Brunei Darussalam*; Dewan Bahasa dan Pustaka; Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan; Brunei Darussalam, 1997.
2. Toeti Adhitama, "Bahasa dan Media Massa"; Bulan Bahasa dan Sastra 1996, Seminar Sehari "Peran Media Massa Cetak dalam Pembinaan Bahasa Indonesia", Jakarta, 15 Oktober 1996; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
3. Benny H. Hoed, "Pakar Bahasa, Media Massa Cetak, dan Pembinaan Bahasa Media"; Seminar Sehari Peran Media Massa Cetak dalam Pembinaan Bahasa Indonesia dalam rangka "Bulan Bahasa dan Sastra 1996"; Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa; Jakarta, 15 Oktober 1996; dan Benny H. Hoed, "Antara Nasionalisme dan Pengembangan Bahasa Media"; Seminar tentang Upaya Pemasyarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar; Surya Citra Televisi (SCTV); Surabaya, 29 Oktober 1996.
4. *ibid.*
5. *ibid.*

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok B7
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.00--16.50
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dalam Media Massa
Penyaji	: Atmakusumah Astraatmaja
Pemandu	: Butar-butur
Pencatat	: a. Syamsul Arifin b. Non Martis
Jumlah Peserta	: 35 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Chaedar Alwasilah, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Kurikulum apa yang Bapak kembangkan untuk mengobati penyakit (kesalahan berbahasa) itu. Ini penting karena tidak semua wartawan masuk dalam lembaga Bapak. Hal itu (kesalahan berbahasa) juga saya temukan pada tulisan mahasiswa pascasarjana yang baru masuk. Ternyata, kerancuan masih ada.

b. Jawaban:

Kami memberikan bahasa Indonesia, hampir-hampir bahasa Indonesia yang bersifat dasar. Walaupun yang menjadi calon wartawan itu lulusan S1, kami belum mempercayai mereka. Untuk setiap calon wartawan kami mengujikan bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum.

2. Penanya: Tadjuddin, Universitas Padjadjaran, Bandung

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah dalam menyampaikan materi diberikan tata bahasa atautkah membahas masalah-masalah seperti contoh-contoh itu (kesalahan)?
- 2) Apakah hasil tes calon wartawan itu juga dikontrol?

b. Jawaban:

- 1) Masalah bahasa Indonesia yang diberikan dititikberatkan pada contoh, baru kemudian disesuaikan dengan tata bahasa.
- 2) Yang perlu dikontrol ialah calon wartawan yang bahasa Indonesianya tidak kacau betul, tetapi jalan pikirannya baik.

3. Penanya: Agraditya, Majalah Femina, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Saya akui bahwa para wartawan sering melakukan kesalahan dan sering memuat akronim dalam berita-beritanya. Akan tetapi, akronim itu dikutip dari pejabat-pejabat. Yang paling hobi membuat akronim bukan wartawan,

melainkan instansi yang mempunyai akronim itu. Ada instansi yang menyingkat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan singkatan A. Buktinya AMD, A-nya adalah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi, hal itu bukan kesalahan wartawan.

- 2) Berkaitan dengan kurangnya rasa kebahasaan (kesalahan, kerancuan) dapat saya komentari sebagai berikut. Orang-orang yang bekerja di surat kabar memang bekerja dengan sangat ketat. Berita harus turun pukul 11.00, sedangkan berita itu baru ditulis pukul 10.55 (sebelas kurang lima). Berbeda dengan kerja di majalah, kerja di majalah mengalami dua saringan. Jadi, bukan wartawan (surat kabar) yang salah, melainkan waktulah yang tidak berkompromi. Selain itu, dia adalah lulusan sekolah. Jadi, yang tolol ialah pendidikan sebelumnya. Bagaimana Pak Atma memberikan sedikit pengetahuan kepada para wartawan itu?
- 3) Yang satu ini ingin saya tujukan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
 - (1) Kalau saya menanyakan sesuatu ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, pertanyaan saya itu tidak cepat dijawab.
 - (2) *Kamus Besar Bahasa Indonesia* kadang-kadang tidak dapat memberikan jawaban bagi kata yang kita perlukan.
 - (3) Sangat diperlukan adanya jalur *hot line* untuk layanan informasi kebahasaan bagi kami pengguna bahasa.

b. Jawaban:

Usaha wartawan untuk berbahasa Indonesia dengan baik perlu ditekankan karena pengaruh bahasa media massa terhadap pemakaian bahasa masyarakat besar sekali. Usaha media massa harus ditekankan.

Pendidikan kita mengenai bahasa Indonesia kurang berhasil. Menurut penelitian Taufiq Ismail dalam enam tahun terakhir siswa tidak pernah diwajibkan membaca buku sastra dan membahasnya. Hal ini sangat menyedihkan. Di negara lain siswa diwajibkan membaca buku cukup banyak. Hal ini (pendidikan di Indonesia) harus diperbaiki.

Wartawan tidak boleh begitu saja mengikuti pejabat-pejabat (narasumber). Wartawan harus memperbaikinya. Jangan hanya singkatan yang diperbaiki. Jika ada pernyataan yang tidak jelas, pertanyaan itu harus diperjelas. Filosofi di kalangan wartawan adalah bahwa suatu informasi yang tidak jelas lebih baik tidak dimuat.

Waktu tidak boleh dipersalahkan. Yang penting ialah kebiasaan menggunakan bahasa yang benar. Soal kerancuan bahasa mungkin soal waktu. Akan tetapi, kesalahan ejaan bukan soal waktu. Saya ingin mengusulkan dua hal berikut.

- (1) Karena pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa cenderung diikuti oleh masyarakat luas, pemakaian bahasa Indonesia dalam media massa perlu ditingkatkan kualitasnya.

- (2) Karena pemakaian bahasa Indonesia oleh para wartawan merupakan refleksi mutu pendidikan, pendidikan keterampilan berbahasa Indonesia dengan baik dan benar di sekolah-sekolah perlu ditingkatkan.

BAHASA INDONESIA DALAM LIRIK LAGU

Yayah B. Mugnisjah Lumintaintang
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pendahuluan

Bahasa Indonesia dalam wacana lagu di Indonesia dapat dikatakan sudah menjadi *tuan rumah di negerinya sendiri*. Ini ditandai oleh kenyataan bahwa dunia musik vokal kita cenderung didominasi oleh lagu-lagu yang ber lirik bahasa Indonesia. Semoga forum Sidang Kelompok Kongres Bahasa Indonesia VII ini menyepakati pernyataan saya itu. Namun, dapatkah kesepakatan kita ini menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Panitia Penyelenggara Kongres Bahasa Indonesia VII berikut?

- (1) Jika dilihat dari segi mutunya, bagaimanakah mutu bahasa Indonesia dalam lirik lagu-lagu Indonesia?
- (2) Bahasa Indonesia yang bagaimana, yang seharusnya digunakan dalam lirik lagu-lagu Indonesia?
- (3) Upaya apakah yang dilakukan agar hal-hal yang berhubungan dengan bahasa Indonesia dalam lirik lagu Indonesia meningkat mutunya?

Sejalan pula dengan tema Kongres Bahasa Indonesia VII, tahun 1998, yakni "Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi", khususnya untuk salah satu subtema yang berbunyi, "Meningkatkan Daya Cipta dan Apresiasi Sastra", fokus perhatian saya arahkan kepada lirik lagu Indonesia populer. Pembatasan ini dilakukan dengan mempertimbangkan makna istilah *lagu populer* itu sendiri. Menurut KBBI (1993:528), *lagu populer* bermakna melodi, nyanyian/ragam nyanyi yang dikenal dan disukai oleh orang banyak; dalam pengertian umum disebut lagu yang mudah diterima dan disukai oleh kebanyakan orang. Kata *lirik* bermakna karya sastra (puisi) yang berisi curahan perasaan pribadi; susunan kata sebuah nyanyian (KBBI, 1993:528). Kata *nyanyian* mengandung makna lirik dan lagu. Singkatnya, yang dimaksud dengan lirik lagu Indonesia populer adalah nyanyian berbahasa Indonesia yang sangat dikenal dan disukai oleh masyarakat banyak.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan Panitia Kongres di atas, saya memanfaatkan metode pemercontohan acak bertujuan (*random sampling purposive*) untuk memperoleh percontohnya. Atas dasar itu, beberapa kaset video musik terpopuler pada masanya, yang diproduksi oleh, antara lain, beberapa studio musik berikut, saya pilih sebagai data yang dianalisis. Dari data tersebut diperoleh sejumlah 253 lirik lagu, antara lain, dari *PT Musica Studio's*, yang memproduksi *Puspa Ragam* serta *Exclusive 4 (20 Exclusive Hit's Terpopuler 1998)*, *PT Suara Sentral Sejati*, *PT RIS Musik Wijaya*, *PT Gema Nada Pertiwi dan PT Remaco*, *PT Cipta Daya Prakasa*, *PT Aquarius Musi-kinde*, *PT Metro Tama Musik Nusantara*, *PT Cipta Daya Prestasi*, *PT Gema Record*, serta *Blackboard Ind.*

Berbagai studio tersebut, antara lain, memproduksi lagu-lagu Indonesia populer gubahan Titiek Puspa, Ebiet G. Ade, Guruh Soekarno Putra, Katon Bagaskara, A. Riyanto, Sam Bimbo/Taufiq Ismail, Rinto Harahap, Obbie Messakh, Indra Lesmana,

Johandi Yahya, Loka Manya, Kahitna, Yopie W., Elfa S., Dedy Dores, Deddy Dhukun, Chossy Pratama, Harry Tasman, Base J./Adon, Capung, Dadang S. Manaf, M. Sani, Wayang, Jhody, Dwiki D./Eddy D.I., George L./A. Bessy, Adi/Ipey, Kidern, Richard Kyoto, S. Amri, Dhenda/La Ode, serta M. Nasir/S. Amin/ Adit. Seperti diketahui, karya para pencipta lagu tersebut cenderung melejit dan populer berkat suara merdu, seperti Titiek Puspa dan Ebiet G. Ade (keduanya menyanyikan gubahan mereka sendiri), Broery, Kelompok Bimbo, Vina Panduwinata, Denada, Trio Libels, Dewi Yull, Indra Lesmana, Dessy Ratnasari, Yuni Shara, Ruth Sahanaya, Harvey M., Nicky Astria, Memes, Reza, serta ME.

Data lirik lagu percontoh secara deskriptif dianalisis dengan teknik analisis pada tingkat wacana, dengan kaimat (sebagai satuan wacana terkecil) menjadi sasaran utama. Bahasa Indonesia yang dikaji adalah bahasa dalam lirik lagu atau bahasa dalam seni suara. Dengan demikian, bahasa yang dikaji merupakan laras bahasa susastra. Oleh karena itu, kajian terhadap bahasa dalam lirik lagu populer ini cenderung dilihat dari segi gaya bahasanya (*style*), termasuk kadarnya. Moeliono (1989) menyatakan bahwa kadar gaya bahasa dapat ditentukan oleh (1) pilihan pola bunyi dan irama, (2) pilihan kata menurut bentuk dan sifatnya, (3) pilihan jenis majas, dan (4) pilihan ragam kalimatnya. Yang terakhir saya sebut itu (pilihan ragam kalimat) dikaji secara khusus dalam kerangka menjawab pertanyaan Panitia Penyelenggara tentang mutu lirik lagu, khususnya tentang kerapian struktur kalimatnya.

Majas (*figure of speech*) merupakan kata yang mengandung makna tambahan, mengandung berbagai perasaan atau nilai rasa tertentu (makna konotatif). Untuk keperluan analisis data, beberapa pendapat pakar bahasa dan produknya saya jadikan pedoman kerja, seperti Keraf (1989), Moeliono (1989), dan Alwi *et al.* Begitu pula, temuan para pemerhati bahasa (seperti musikolog Pranadjaja, dalam Halim dan Lumintang 1978) serta peneliti bahasa lagu seperti (Saptarini, 1996 dan Badru, 1997) saya perhatikan. Di samping itu, berbagai konsep yang diperlukan untuk kajian ini, seperti kedwibahasaan, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, serta sikap bahasa, dikaji, antara lain, dari Ferguson (1959), Weinreich (1970), Halim (1976), serta Fishman (1976). Atas dasar itu semua, gambaran bahasa Indonesia dalam lirik lagu, khususnya lagu Indonesia populer, adalah sebagai berikut.

2. Gambaran Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu

Jika gambaran yang ingin diperoleh itu berkaitan dengan peran bahasa Indonesia di dalam lirik lagu, khususnya lirik lagu populer, tanpa ragu saya nyatakan, "Bahasa Indonesia sudah membuktikan kemampuannya." Seperti kita ketahui, baik bahasa maupun lagu (musik) Indonesia termasuk ke dalam seni ekspresi. Keduanya (bahasa dan lagu itu) telah mampu berfungsi sebagai pengungkap buah pikiran atau perasaan penggubahnya kepada orang lain, dalam hal ini penikmat atau pendengarnya. Nama-nama yang saya sajikan sebagai percontoh kajian ini telah membuktikan diri mereka sebagai penggubah lirik/lagu Indonesia. Bahkan, beberapa di antara mereka sangat terkenal sebagai penyabet piala lomba lirik/lagu, baik di tingkat nasional maupun global.

Jika gambaran yang ingin diketahui itu berkaitan dengan lirik-lirik lagunya, ter-

utama gaya bahasanya, hasil kajian memperlihatkan bahwa sebagai salah satu laras bahasa susastra, lirik lagu populer cenderung diungkapkan melalui strategi pemakaian majas, baik majas perbandingan, pertentangan maupun pertautan. Dengan kata lain, mereka memanfaatkan majas sebagai kekuatan diksi/pilihan kata mereka. Dari kelompok majas perbandingan, majas personifikasi mendominasi pilihan kata penggubah lirik lagu di atas majas metafora ataupun perumpamaan. Namun, majas pertentangan pun disukai mereka, khususnya majas hiperbola. Akan tetapi, itu tidak berarti bahwa majas-majas yang lainnya tidak dipilih; majas litotes dan ironi, misalnya, oleh penggubah seperti Ebiet G. Ade, sangat digemari.

Sesuai dengan bentuk dan sifat lagunya, tampilnya majas-majas itu kadang-kadang sangat kuat, lancar, melambung-lambung, dan memikat, tetapi ada juga yang tampil lemah, tersendat-sendat, lugas, dan menjemukan. Berikut ini (contoh 1) saya sajikan secara utuh sebuah wacana lagu populer berbahasa Indonesia, berjudul "*Renjana*" (gubahan Guruh Soekarno Putra), yang dipetik dari album "Puspa Ragam", produksi PT Studio Musika's. Lirik lagu berikut, menurut hemat saya, bernada sedih yang ditandai pula oleh penggunaan kata-kata yang sedih, yang diungkapkan penggubahnya dalam aneka majas, baik personifikasi maupun metafora.

(1)

Renjana

Di malam hening tertegun kumerenung
menanti fajar tak kunjung datang
Sukmaku bergetar digenggam halimun dingin
Terkungkung langit nan kelam

Pagi pun datang meremang
cah'ya rawan
seakan segan menyongsong siang
Hatiku merintih, ditindih derita beku, merana berkawan sunyi

Tetesan embun mengusik mimpi
kuterjaga kumeronta kutinggalkan mimpi hampa
Angin kembara menebar wangi bunga
menepis mendung mengusap embun
Hasratku menderu menuju dataran hijau
Tempat bersemi hayatku
hayatku (GSP/Ftr/GSP)

Kata *halimun* dalam petikan lirik di atas diberikan gambaran oleh penggubahnya seakan-akan mempunyai sifat dan tingkah laku seperti insan/manusia (personifikasi), yang dapat melakukan suatu perbuatan, yaitu menggenggam. Begitu pula halnya dengan kata *sukma*, yang dipersonifikasikan bisa gemetar; *cah'ya* (*cahaya*) tampak rawan; *hati* bisa merintih, merana, dan punya kawan; *derita* dapat menindih, di samping

dimetaforakan sebagai es yang beku. Demikian pula halnya dengan *tetes* *embun* yang dipersonifikasikan suka mengusik, *angin* yang bisa menepis dan mengusap, di samping kata *hasrat* yang dimetaforakan laksana angin yang bisa menderu dan *hayat* yang bisa bersemi.

Gambaran di atas tampak pula pada contoh (2) dan (3) berikut. Penggubahnya menggambarkan sikap dirinya sebagai orang miskin dengan majas litotes. Sebaliknya, contoh (3) penggubahnya memberikan gambaran yang melebih-lebihkan (*overstatement*) mengenai perasaannya dengan majas hiperbola. Namun, contoh (4) kembali memberikan gambaran majas metafora hati yang bisa tercabik seakan sama dengan kain; personifikasi *hati* yang bisa meronta; *gairah* yang bisa dirajam (bukan *direjam*); *cinta* yang bisa mengemis, dan *sepi* yang bisa diusir. Berikut ini adalah petikan liriknya.

- (2) *Jangankan emas permata
sesen pun aku tak punya
tapi jangan kau sangka
aku 'tak 'kan gembira
walau semua itu 'tak ada (Tp/HuC/TP)*
- (3) *Kau malam ini hadir lagi
membawa sejuta rasa yang dulu telah ada
(KBgs/Dd/Kbgs.)*
- (4) *... Tercabik hati ingin meronta
Jangan kaurejam gairah yang ada
Haruskah aku mengemis cinta
... Siapa yang akan mengusir sepi
di saat kusendiri (CH/Asm/DR)*

3. Mutu Bahasa Indonesia dalam Lagu

Jika mutu yang dipertanyakan, hasil kajian memperlihatkan bahwa bahasa Indonesia dalam lirik lagu populer masih memperlihatkan adanya (1) ketidaksesuaian antara tekanan kata dan irama lagu, (2) pengaruh ucapan orang/bahasa asing, (3) bentuk dan pilihan kata yang kurang tepat, (4) struktur kalimat yang kurang rapi, yang kadang-kadang tampil melalui struktur kalimat yang rancu atau karena lesapnya kata tugas, termasuk ketidaktepatan pemakaiannya di dalam konteks kalimat, dan (5) ketidaksejajaran antara bentukan kata dan makna dalam kalimat. Berikut ini adalah bahasannya.

a. Kesesuaian Tekanan Kata dengan Tekanan/Irama Lagu

Unsur tekanan kata dalam lirik lagu Indonesia populer tampaknya kurang mendapat perhatian para penggubah lagu. Seperti diketahui, dalam bahasa Indonesia tekanan kata biasanya ditempatkan pada suku kata sebelum yang terakhir; misalnya *be'la*, *pembela'an*; *ta'man*, *taman-ta'man*. Namun, jika suku kata sebelum yang terakhir

itu mengandung bunyi e (pepet), tekanan itu akan ditempatkan pada suku akhir; misalnya, *belah'*, *bekerja'*, *terang'*, *empat'* (Alwi *et al.*, Editor, 1993:87).

Demikian pula halnya dengan lagu. Alunan irama lagu ditentukan oleh jatuhnya tekanan pada waktu-waktu tertentu. Nada-nada yang mendapat tekanan itu ditandai oleh garis birama (matra), yang dituliskan di depan nada tersebut. Pranadaja (dalam Halim dan Lumintang, Editor, 1978:403) mempertimbangkan bahwa hanya terdapat lima macam kaki matra dalam pengaturan tekanan (*yambe: sedih'*, *mesra'*; *trokheus: ka'mi, su'lit; anapest: cemeti'*, *sedekah'*; *daktilus: kur'nia, ma'rilah; amphibrakhis: sempur'na, bela'jar*). Ini didasari oleh kenyataan bahwa kata-kata dalam bahasa Indonesia (sebelum mendapat awalan dan akhiran) terdiri atas dua atau tiga suku kata. Namun, Pranadaja juga tidak mengingkari bahwa di dalam kenyataannya, semua jenis kaki matra itu dikalahkan oleh suatu kesamaan/keumuman, yaitu tekanan terletak pada suku kedua dari akhir sehingga semua perkataan akan mengalami perubahan tekanan, kecuali pada *yambe: sedih'*, *mesra'*.

Atas dasar ketentuan yang dikemukakan di atas, saya mencoba menganalisis sejauh mana penggubah lagu Indonesia memperhatikan sistem tekanan kata tersebut. Adakah kesesuaian antara tekanan kata dengan tekanan/irama lagunya. Tampaknya, tidak mudah mengkaji unsur ini. Bahkan, masih diperlukan kajian yang mendalam untuk topik ini selanjutnya. Namun, untuk jawaban pendahuluan, berikut ini saya sampaikan sebuah lagu yang (baik lirik maupun melodinya) sangat sederhana, tetapi gayanya sangat memikat, lancar, dan lugas, bahkan hubungan antara melodi dan liriknya (menurut hemat saya) juga serasi: nada-nada gembira diungkapkan penggubahnya dalam kata-kata yang gembira pula. Untuk kajian tentang tekanan kata dan irama, lagu ini sangatlah relevan. Ini buah karya ME yang berjudul "Inikah Cinta", petikan dari album *Popular Songs*.

(5)

INIKAH CINTA

Saa't kujum'pa diri'nya di sua'tu suasa'na
Terasa geta'ran da'lam da'da
Kucoba' mendekati'nya, mengha'dap diri'nya
Oh dia sung'guh mem'peso'na

Ingin daku menyapa'nya', menyapa diri'nya
bercanda tawa' de'ngan diri'nya
dan sungguh daku mera'sa'; aku tak kua'sa
Aku tak tahu' ha'rus berka'ta apa'

Inikah' na'manya cin'ta'; i'nikah cin'ta'
cinta pada' jum'pa perta'ma
Inikah' ra'sanya cin'ta'; oh, i'nikah cin'ta'
Terasa baha'gia sa'at jum'pa dengan' di'rinya

*Kujumpa' dia berikut'nya, suasa'na berbe'da
Getaran i'tu ma'sih a'da
Aku deka'ti diri'nya; ku'tatap wajah'nya
Oh dia te'tap mem'peso'na*

*Ingin' daku' menyapa'nya', menyapa diri'nya
bercanda tawa' de'ngan diri'nya
dan sungguh daku mera'sa; aku' tak kua'sa
aku tak tahu ha'rus berka'ta apa'*

*Oooh, inikah' ra'sanya cin'ta'
Oh, inikah' cin'ta'; cinta pada' jum'pa perta'ma
Inikah' ra'sanya cin'ta'; oh, i'nikah cin'ta'
terasa baha'gia sa'at jum'pa dengan' di'rinya*

*Rin'du tera'sa'
di' kala di'ri i'ni i'ngin jumpa'
ingin sla'lu ber'sama
ber'sama da'lam se'gala' suasa'na*

*Oooh, Inikah' na'manya cin'ta'
Oh, i'nikah cin'ta'; cinta pada' jum'pa perta'ma
Inikah' ra'sanya cin'ta'; oh, i'nikah' cin'ta'
terasa baha'gia sa'at jum'pa dengan' di'rinya'*

*Oooh, Inikah' na'manya cin'ta'
Oh, i'nikah cin'ta'; cinta pada' jum'pa perta'ma
Inikah' ra'sanya cin'ta'; oh, i'nikah cin'ta'
terasa baha'gia sa'at jum'pa dengan' di'rinya'*

*Oooh, Inikah' na'manya cin'ta'
Oh, i'nikah cin'ta'; cinta pada' jum'pa perta'ma
Inikah' ra'sanya cin'ta'; oh, inikah' cin'ta'
terasa baha'gia sa'at jum'pa dengan' di'rinya'
dengan' di'rinya (ME)*

Seperti telah saya sampaikan, tidak mudah mengkaji masalah tekanan, sekaligus irama lagu. Namun, atas dasar data yang kita dengar, tanda-tanda yang sederhana itu dapat menunjukkan bahwa memang tekanan kata dan irama lagu belum menyatu. Jika kita simak, wacana lagu tersebut mengandung sejumlah kata yang ditampilkan dengan gaya repetisi, yang pilihannya sebagai berikut:

- (1) yang hanya satu suku kata terdapat empat buah, yaitu *di* (2x), *dan* (2x), *'tak* (4x), dan *Oh* (15x);
- (2) yang bersuku kata dua terdapat 23 buah, yaitu *cinta* (25x), *jumpa* (13x), *saat* (6x), *aku* (5x), *dalam* (2x), *dada* (1x), *daku* (4x), *ingin* (4x), *tetap* (2 x) *tahu* (2x), *pada* (5x), *sungguh* (3x), *masih* (1x), *diri*(1x), *rindu* (1x), *apa* (2x), *ada* (1x), *dengan* (8x), *dia* (3x), *itu* (1x), *tawa* (2x), *harus* (2x), dan *kala* (1x);
- (3) yang bersuku kata tiga hanya dua buah (*kuasa dan segala*), tetapi menjadi 23 buah dengan kata yang lainnya yang memperoleh imbuhan, yaitu *inikah* (21x), *namanya* (4x); *kuasa* (2x), *rasanya* (6x), *berbeda* (1x), *kujumpa* (2x), *bercanda* (2 x), *menyapa* (4x), *dirinya* (13x), *wajahnya* (1x), *kucoba* (1x), *dekati* (1x), *menghadap* (1x), *terasa* (7x), *selalu* (1x), *getaran* (2x), *bersama* (2x), *berbeda* (1x), *merasa* (2x), *pertama* (5x), *kutatap* (1x), *suatu* (1x), dan *berkata* (2x), *segala* (1x);
- (4) yang bersuku kata empat sebanyak tiga buah dan menjadi enam buah dengan yang berimbuhan, (termasuk yang menjadi bersuku kata lima buah), yaitu *bahagia* (5x), *menyapanya* (2x), *berikutnya* (1x), *mempesona* (2x), *mendekatinya* (1x), dan *suasana* (2x).

Dari sejumlah kata/perkataan yang dipilih penggubah lagu itu jelas bahwa unsur tekanan kata tampaknya belum mendapat perhatian secara khusus. Sekedar contoh, data menunjukkan bahwa dari 25 kali kata *cinta*, yang bersuku kata dua itu, didendangkan penyanyinya, irama lagunya *belum seluruhnya sejalan/menyatu* dengan tekanan kata menurut kaidah bahasa kita. Ada yang diberikan pada suku kata yang pertama, ada juga pada yang kedua, bahkan ada pula yang tidak diberi tekanan (mendatar), di samping yang diberi tekanan keduanya. Sementara itu, menurut kaidah, tekanan kata pada kata *cinta* harus diberikan pada suku kata yang pertama. Demikian pula halnya dengan kata yang bersuku dua yang lainnya: kata *rasa*, *rindu*, *saat*, *dia*, *dada*, *harus*, *daku/aku*, *sungguh*, *dengan*, *diri*, *tahu*, *tawa*, *jumpa*, *itu*, *ingin*, *ada*; menurut kaidah, tekanannya harus diberikan pada suku yang pertama. Namun, untuk kata-kata yang mengandung e (pepet) pada suku kata yang pertama (*tetap*, *dekat*, *dengan*), tekanan kata itu harus diberikan pada suku kata yang kedua.

Pada kata-kata yang bersuku tiga, baik yang asli maupun akibat pengimbuhan, juga tidak berbeda halnya; penggubah lagu tersebut belum memberikan tekanan yang sama: tekanan kata pada *dirinya*, *namanya*, *rasanya*, *wajahnya*, *berbeda*, *bercanda*, *berkata*, *bersama*, *pertama*, *menyapa*, *menghadap*, *merasa*, *suatu*, *kutatap*, *kucoba*, *suatu*, *kuasa*, *selalu*, *dekati*, dan *inikah*, yang rata-rata muncul lebih dari satu kali itu, ada yang diletakkan pada suku kata yang pertama, ada pada yang kedua, bahkan ada pada keduanya; ada pula pada yang ketiga, bahkan ada yang tidak diberi tekanan. Sementara itu, menurut ketentuan, tekanan itu harus diletakkan pada suku kata kedua. Kasus ini tampak pula pada data pemakaian kata yang terdiri dari empat suku kata (baik yang asli maupun akibat pengimbuhan): *mempesona*, *bahagia*, *suasana*, *menyapanya*, *berikutnya*, dan *mendekatinya*; ada yang diletakkan pada suku kata yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat/kelima, bahkan ada yang tidak diberi tekanan (mendatar). Sementara itu, ketentuan mengharuskan bahwa tekanannya diberi-

kan pada suku kata kedua dari akhir.

Data pendahuluan tersebut mengisyaratkan bahwa tekanan kata dalam lirik lagu "Inikah Cinta" belum mendapat perhatian penggubahnya. Bahkan, terkesan laksana *tanah lempung* yang dapat dibentuk aneka jenis gerabah sesuka hati. Oleh karena itu pula, dapat dikatakan bahwa tekanan kata dalam lirik ini belum sepenuhnya sejalan atau menyatu dengan tekanan/irama dalam melodinya.

Tidaklah tuntas menurut hemat saya jika masalah tekanan kata dan tekanan/irama lagu tidak ditautkan dengan masalah kausa matra. Seperti pada umumnya lirik-lirik lagu kita, khususnya lagu Indonesia populer, kata-kata dalam lirik lagu "Inikah Cinta" termasuk yang memperlihatkan kausa matra. Tekanan lagu yang terdengar menyatu dengan tekanan kata pada larik ... *Kujumpa dia berikutnya; suasana berbeda*, misalnya, sebenarnya melesapkan kata tugas *dalam: dalam suasana berbeda*. Begitu pula, terdapat pelesapan imbuhan *ter-* pada kata ... *bercanda tawa ---> bercanda*, tertawa (karena terdiri dari dua bentuk kata). Asumsinya adalah bahwa melodi lagu ini disediakan terlebih dahulu oleh penggubahnya daripada liriknya sehingga cukup banyak kata yang tidak tampil yang menyebabkan tekanan kata tidak menyatu dengan tekanan lagunya.

Sehubungan dengan masalah tersebut, Pranadjaja beranggapan bahwa bukanlah masalah mengubah melodi terlebih dahulu, kemudian lirik, asalkan serasi. Namun, ia sangat menganjurkan kesepakatan semua ahli musik dari segala zaman yang mengemukakan bahwa dalam musik vokal/nyanyian (*vocal music*), *nada-nada itu tidak lebih daripada hanya sekedar wahana untuk menyampaikan kata-kata* (musik mengabdikan pada kata-kata). Dengan kata lain, lirik/syair hendaknya terlebih dahulu digubah, baru kemudian lagu.

b. Pengucapan

Di samping masalah tekanan kata dalam lirik lagu, sepiantas lalu ingin pula saya sampaikan ihwal ucapan para penyanyi kita. Dari pita kaset rekaman tadi tampaknya kita tidak mungkin menutup telinga bahwa pengucapan penyanyi tadi kurang jelas. Kita hampir tidak dapat menangkap kata apa yang ada setelah *di suatu* pada larik *Saat kujumpa dirinya di suatu (saat, pesta, ... suasana?)*. Apalagi, penyanyi ini juga mengandalkan sengau dan desah sehingga makin mengganggu kejelasan pengucapannya.

Selain pengucapan yang tidak jelas dari lagu tersebut, banyak penyanyi kita yang "memanja-manjakan" suaranya sehingga pengucapan mereka menjadi terganggu (tidak jelas). Yang sangat mencolok juga adalah adanya ucapan yang kebarat-baratan (yang meniru pola ucapan orang/bahasa Barat). Ini sering tampil melalui penyanyi yang diharapkan dapat menjadi model yang baik bagi generasi penerusnya.

Banyak alasan untuk menangkis masalah tersebut. Konon, itu menjadi gaya/ karakter perseorangan penyanyi. Namun, pada hemat saya, hal itu tidaklah menguntungkan jika ditinjau dari kacamata pendidikan. Di samping itu, kita cenderung merasa terganggu memahami isi/pesan lagu tersebut sehingga komunikasi yang ingin disampaikan lewat lagu itu (misi lagu) menjadi terganggu (kurang efektif).

Beberapa penyanyi ternama memiliki ucapan yang khas. Pengucuan nama-nama

berikut semata-mata karena gengsi dan gema nama mereka yang begitu tinggi dan karena rasa bangga saya memiliki mereka. Broery, misalnya, sangat khas jika mengucapkan huruf l. Kata apa pun yang mengandung huruf l (lateral), terutama pada posisi tengah, senantiasa dilafalkan dengan *tasydid* (seperti dalam sistem bahasa Arab): dua bunyi huruf l. Contohnya lafal huruf l pada kata *lalu* dalam larik ... *lupakan saja yang terjadi, anggaphlah angin lalu*, dari lagu "Mungkinkah") dan *dalam* pada larik ... *di dalam hati ini, Sayang, hanya kamu*, dari lagu "Aku Cinta Padamu", atau dalam larik *Di dalam tidur, di dalam doa, di dalam mimpi* dari lagu I "Aku Begini Engkau Begitu".

Selain contoh yang dikemukakan di atas, tidaklah sedikit bunyi vokal atau konsonan akhir larik lagu Broery yang ditambah dengan bunyi konsonan yang asing dari ucapan bahasa Indonesia: misalnya, ucapan kata *dalam* itu, di samping mendapat dua l, juga mendapat tambahan bunyi h: *dallahh; padamu* menjadi *padamuh; mungkin* menjadi *mungkinneh; Sayang* menjadi *Sayangh; bertiup angin lalu* menjadi *bertiupeh, angin, lalluh; dapat* menjadi *dapac* atau *dapaceh*.

Demikian pula halnya dengan Titiek Puspa; selain karena warna suaranya yang khas, konsonan t (alveolar), terutama yang terdapat pada posisi awal dan tengah, cenderung diucapkan menjadi c (palatal); misalnya, pada lirik *jatuh cinta berjuta rasanya* dilafalkan *jacuh cinca berjuca rasanya*. Begitu pula, pada lirik-lirik lagu (6) "Bing" berikut.

- (6) *Siang itu surya berapi sinarnya*---> *siang icu*
tiba-tiba redup langit gelap ----> *ciba-ciba*
hati yang bahagia terhenyak s'ketika---> *haci,*
cerhenyak, s'kecika
malapetaka seakan me'nyelinap -----> *malapecaka*
 ...
Tiada hari seindah dahulu lagi----> *ciada*
tiada mungkin kembali ----> *ciada*
tiada nama seharum namamu lagi-----> *ciada*
tiada, tiada Bing lagi -----> *ciada, ciada*
 (TP/TP/TP)

Lebih mencolok lagi jika dia mendendangkan lirik/lagunya yang berjudul "Hujan"; (7) "*Tik, tik, tik, hujan rincik-rincik*" diucapkan menjadi *cik, cik, cik, hujan rincik-rincik*.

Semua yang saya kemukakan di atas merupakan salah satu kenyataan yang setiap hari/malam kita dengar, baik melalui media elektronik radio, kaset video, maupun televisi. Idealnya adalah bahwa para penyanyi, baik yang sudah sangat ternama dan yang ternama maupun yang dalam perjalanan menuju ternama/sangat ternama, peduli terhadap masalah pengucapan ini; selain karena warna suaranya yang khas, seyogianya lafal kata para penyanyi itu jelas, benar, dan wajar. *Percaya dirilah bahwa ucapan lirik lagu Indonesia merupakan ucapan bahasa Indonesia; ucapan bahasa Indonesia adalah ucapan bangsa Indonesia.*

c. Ketidaktepatan Bentuk dan Pilihan Kata

Lirik lagu populer berbahasa Indonesia juga menunjukkan bahwa terdapat pemakaian bentuk kata yang belum benar atau belum sesuai dengan sistem pembentukan kata bahasa kita. Petikan lirik (9) berikut ini adalah contohnya.

- (8) *Ada yang benci dirinya*
Ada yang butuh dirinya
Ada yang berlutut menyintanya dirinya
Ada pula yang kejam menyiksa dirinya (TP/KKM/TP)

Menurut kaidah, semua huruf *c* yang terdapat pada posisi awal kata, jika mendapat awalan *men-*, tidak mengalami peluluhan: *Kucing kadang-kadang mencakar lin* (bukan *menyakar*). *Yan mencukur kumisnya* (bukan *menyukur*). *Rudy mencuri hatiku* (bukan *menyuri*); *warna gaunnya mencolok mata* (bukan *menyolok mata*). Jadi, jika taat asas dengan kaidah, larik itu berbunyi, "*Ada yang (dengan) berlutut mencinta dirinya.*"

Selain contoh di atas, masalah pelepasan imbuhan cukup tinggi dalam lirik lagu kita. Kata yang seharusnya memperoleh imbuhan tidak diberi imbuhan; sebaliknya, yang tidak memerlukan imbuhan (dipaksa) diberi imbuhan. Pada konteks contoh (9) berikut, bentuk kata *bebaskan* memerlukan awalan *mem-* (membebaskan); pada contoh (10) kata *gelora* memerlukan awalan *ber-* (*bergelora*); *padukan* memerlukan awalan *mem-* (*memadukan*); kata *akhir* memerlukan awalan *ber-* (*berakhir*). Sebaliknya, dalam konteks contoh (11), *ditabur* tidak memerlukan awalan *di-* (*kau tabur di jalanan*).

- (9) *Seorang sederhana, luhur, dan dihormati*
T'lah mendapat amanat bebaskan manusia
 (JkTI/Bm/JkTI)
- (10) *Biar cinta gelora di dada*
biar cinta padukan kita, uwowowo
cerita cinta pertama kurasa
jangan pernah akhir cerita cinta kita
 (YW/CC/Kht)
- (11) ... *Bunga di genggamanku*
kau ditabur di jalanan (TS/SA/DR)

Selanjutnya, masalah pilihan kata (diksi). Di atas telah ditunjukkan bahwa penggunaan majas dalam lirik lagu sangat strategis karena majas sangat potensial bagi pilihan kata dan ungkapan: majas dapat memperkuat pilihan kata dan pilihan kata dapat memperkuat gaya bahasa. Dalam konteks contoh (12) berikut, makna kata *begini* dan *begitu* dianggap sama, padahal tidak sama. Jadi, pada hemat saya, gaya bahasa seperti ini lemah sebagai akibat pilihan kata yang kurang apik.

- (12) *Engkau begini, aku begitu, biarkanlah
Engkau begini aku begitu, sama saja
RH/ABEB/Br.)*

Masih tentang pilihan kata, dalam konteks contoh (13) berikut tampak pilihan kata yang tidak bersanding (*memendam rindu yang kerap tercipta*). Pada hemat saya, rasa rindu itu tidak dapat direkayasa (cenderung melanda secara alamiah). Jadi, sanding kata *rindu yang kerap tercipta* bukanlah sanding kata yang harmonis. Sama halnya dengan konteks contoh (14) *kau ada pemiliknya*; rasa bahasa penutur pada umumnya mengatakan *kau ada yang punya*; *Siapa pemilik buku ini?* Begitu pula konteks contoh (15) *kukemas air mata di pipi*; lazimnya sanding kata *air mata* itu *dihapus*; *kuhapus air mata di pipi*; dugaan keras air mata itu turut dikemas karena yang empunya akan berkemas pergi. Berikut ini kutipan liriknya.

- (13) *Sesungguhnya, 'ku tak mau lagi
memendam rindu yang kerap tercipta
Tapi 'ku takut 'tuk mengakui*
- (14) *Sejak jumpa kita pertama
kulangsung jatuh cinta
meski kutahu kau ada pemiliknya (GSP/KCM/CH)*
- (15) *Sendiri kukemas air mata di pipi
tak percaya 'ku yang t'lah terjadi
cintamu kini telah terbagi
haruskah cinta aku akhiri hanya sampai di sini
(Ch/Asm/NK/)*

4. Kerapian Struktur Kalimat

Data tentang struktur kalimat lagu-lagu Indonesia populer juga masih memperlihatkan bagian-bagian yang kurang rapi di dalamnya, terutama dengan munculnya konstruksi yang rancu dan kurang cermatnya penggunaan kata tugas. Berikut ini bahasannya.

a. Pemakaian Kalimat Rancu

Dalam konteks contoh (16) berikut tampak pemakaian kata tugas (dalam hal ini kata hubung) *namun*, yang tidak diperlukan dalam konstruksi. Bahkan, kehadirannya menyebabkan struktur kalimat itu menjadi rancu.

- (16) *Sejak jumpa kita pertama
kulangsung jatuh cinta
Meski kutahu 'kau ada pemiliknya
namun 'ku tak dapat
membohongi hati nurani*

tak mampu menghindari gejala cinta ini
(GSP/KCM/Chrisye)

Contoh di atas berstruktur kalimat majemuk bertingkat dengan pola urutan anak kalimat (AK) yang diikuti induk kalimat (IK). Pemakaian kata hubung *namun* sebelum IK itu mengakibatkan struktur kalimat tersebut rancu (tidak gramatikal). Gaya penyusunan lirik seperti ini tidak sedikit dalam lagu populer kita, seperti tampak pula pada contoh (17) berikut. Pemilihan gaya repetisi pada pola AK yang diikuti IK itu menjadi berkurang keindahannya karena hadirnya kata tugas (*tetapi*) sebelum IK-nya. Lain pula halnya dengan contoh (18). Entah apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh pengubah lagu ini; salah satu kemungkinannya: *kaulah yang (men)dinginkanku dalam mimpiku; (me)nerbangkan khayal(an)ku (menjadi/hingga) sadarku.*

- (17) *Dia jelajahi jagat raya ini dengan telanjang kaki
dan tubuh penuh daki
Meskipun dia lebih lapar dari siapa pun
meskipun dia lebih sakit dari siapa pun
dia menempuh lebih jauh dari siapa pun
Meskipun dia lebih miskin dari siapa pun
meskipun dia lebih nista dari siapa pun
tetapi ternyata dia lebih tegak dari siapa pun*
(EGA/NPIDH/EGA)

- (18) *Kaulah yang dinginkan aku dari mimpiku
Coba terbangkan khayalku dari sadarku (GG/GG/GG)*

b. Pemakaian Kata Tugas yang Kurang Tepat

Pada petikan lirik lagu berikut, contoh (19) memperlihatkan adanya ketidaktepatan pemakaian kata tugas, yang mengakibatkan struktur kalimat tidak rapi/apik. Kata tugas *pada* menandai hubungan makna tempat atau waktu, yang sama sekali tidak diperlukan dalam konteks itu: bukan *tertusuk pada cinta*, melainkan *tertusuk cinta*. Kalaupun diinginkan kata tugas hadir dalam contoh tersebut, kata *oleh*-lah yang dapat dipasang karena kata *oleh* menandai hubungan pelaku atau yang dianggap pelaku: *tertusuk oleh cinta*.

Lain pula halnya dengan contoh (20). Kata tugas *pada* dalam konteks itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah *untuk*, *bagi*, atau *demi* karena ketiganya menandai hubungan peruntukan. Untuk petikan lirik (21), pemakaian kata tugas *pada* (*manusia*) seyogianya *kepada* (*manusia*) karena konteksnya menandai hubungan arah/menju satu arah. Berikut ini petikannya.

- (19) ... *Memang berat rasanya
tertusuk pada cinta* (GSP/KCM/CH)

- (20) *Tiada Tuhan selain Allah,
dan Muhammad utusan-Nya
...Pada Allah mati kami
Dialah mata air kami (JkTI/BNM/JkTI)*
- (21) *Seorang sederhana, luhur, dan dihormati
T'lah mendapat amanat bebaskan manusia
Dua puluh tiga tahun dia menyeru
tauhid, takwa, dan ibadah pada manusia
(JkTI/Bb/JkTI)*

Contoh (22) berikut tampaknya menampilkan pemakaian kata tugas yang tertukar. Kata depan *dari* tepatnya dipakai untuk larik *seputih apa yang kaudamba(kan) dari cintaku* karena maknanya menandai hubungan milik; dan kata depan *di*-tepatnya dipakai pada larik *semurni apa (yang) kaucari di hatiku* karena konteks maknanya menandai hubungan tempat; *bunga dalam genggamanku* (bukan *di genggamanku*) karena kata *dalam* menandai hubungan makna ruang. Pada contoh (23) diperlukan kata tugas *dengan* (*dulu dengan segenggam emas kaupinang aku*) karena konteks contoh itu menandai hubungan makna *cara*. Berikut ini petikan liriknya.

- (22) *Seputih apa yang kaudamba di cintaku
Semurni apa kaucari dari hatiku
... Bunga di genggamanku
(TS/SA/DR)*
- (23) *Dulu segenggam emas kaupinang aku (OM/HT/IS)
Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang
(EGA/BKK/EGA)*

Masih tentang ketidakrapian struktur kalimat; dalam contoh (24) berikut ini tampak pemakaian kata tugas (kata hubung) *di mana*, yang tidak tepat. Dalam bahasa Indonesia kata *di mana* menandai hubungan makna tempat berada: *Di mana Anda tinggal?* Jadi, dalam konteks larik ini, yang diperlukan adalah kata tempat (Tuhan, tempat aku berteduh, *tempat aku mengeluh dengan segala keluh, tempat aku memuja dengan segala doa*. Data lirik (25) ... *di mana aku mengeluh ... di mana aku memuja?* Jawabannya bisa di mesjid, di atas syajadah, di relung hati terdalam, di kalbu, atau di mana saja, termasuk di atas tempat tidur agar memperoleh mimpi yang indah.

Satu lagi contohnya; lirik (25) memperlihatkan pemakaian kata hubung yang kurang apik; dalam konteks ini diperlukan kata hubung *jika* karena konteksnya menuntun hubungan makna syarat; kata hubung *bila* menandai hubungan makna waktu. Berikut ini adalah petikan liriknya.

- (24) *Tuhan, tempat aku berteduh
di mana aku mengeluh dengan segala keluh
Tuhan, Tuhan Yang Maha Esa
Di mana aku memuja dengan segala doa
(Bmb/Bmb/Bmb)*
- (25) *... Bila hatimu tak sayang padaku
jangan katakan
Bila hatimu tak sudi , oh Sayang,
jangan katakan (Rhar/AJCP/Bry)*

c. *Pemakaian Bentuk yang Tidak Sejajar*

Data juga memperlihatkan bahwa ketidaksejajaran mewarnai wacana lirik lagu kita, terutama dalam pembentukan kata. Contohnya adalah lirik (26) berikut; dalam konteks ini tampak bahwa dua larik pertama tidak mencantumkan awalan *me-* pada kata *benci*, sedangkan pada dua larik selanjutnya memanfaatkan awalan *me-* sebelum kata *cinta* dan *siksa*. Jadi, secara keseluruhan bagian wacana ini tidak memperlihatkan kesejajaran. Pada hemat saya, alangkah padunya jika larik itu semua menggunakan atau sebaliknya tidak menggunakan awalan agar bentuk kata itu menjadi sejajar. Kasus ini tampak pula pada contoh (21) yang dikemukakan di atas; bahkan ketidaksejajaran dalam konteks lirik (21) itu, bukan hanya terjadi pada pembentukan katanya saja melainkan juga pada maknanya.

- (26) *Ada yang benci dirinya
Ada yang butuh dirinya
Ada yang berlutut menyinta dirinya
Ada pula yang kejam menyiksa dirinya(TP/KKM/TP)*

5. Kedwibahasaan dan Diglosia yang Belum Mantap: Pengaruh Bahasa Daerah/Dialek

Sejalan dengan gambaran kependudukan bangsa Indonesia, yang majemuk, antara lain, dari segi etnik, bahasa, dan budaya, termasuk agama, ini tampil mencoraki latar pemilihan kata (diksi) lirik lagu-lagu populer Indonesia. Bahasa ibu, bahasa daerah setempat, bahkan lingkungan bahasa berdomisili, dialek-dialeknya, tampak mewarnai lirik lagu populer ini. Begitu pula, belum mantapnya diglosia serta kedwibahasaan pada penutur berbahasa Indonesia, termasuk para penggubah lagu, terekam juga. Ini ditandai oleh terdengarnya pemakaian diksi yang mengandung gejala interferensi (*interference*) serta alih kode (*code-switching*) dan campur kode (*code-mixing*) untuk lagu-lagu bertema dan bersifat tertentu (tidak formal), termasuk di dalam yang berkonteks dan situasi formal. Berikut ini adalah contoh-contohnya.

- (27) *...Sekarang lagi zaman anak muda suka ngeceng
Anak-anak pada ngeceng ke tempat-tempat perngecengan Kalau mau*

*ngeceng ikut sama kita
ke tempat perngecengan
Kalau nggak mau ngeceng, ngeliat aja orang ngeceng
orang ngeceng (GSP/JJS/DM)*

Petikan lirik lagu di atas sekurang-kurangnya mengandung tiga masalah kebahasaan: (1) masalah pembentukan kata *ngeceng dan perngecengan*, (2) masalah penggunaan kata tugas *pada* dalam konstruksi *Anak-anak pada ngeceng*, dan (3) pemakaian kata *kita*. *Keceng* (menurut *KBBI*, 1997:459) bermakna 'dalam keadaan tertutup sebelah mata. Jika mendapat awalan *me-*, seperti halnya pada kata-kata lain yang mengandung huruf pertama *k*, ia harus mengalami peluluhan. Jadi, *keceng* menurut kaidah bahasa kita menjadi *menceceng* 'memejamkan mata sebelah'; bukan *ngeceng*). Pemakaian kata *ngeceng* dalam struktur lirik (27) itu terpengaruh oleh sistem pembentukan kata dalam bahasa daerah (bahasa Jawa atau bahasa Sunda); dalam kedua bahasa daerah tersebut terdapat bentuk kata *ngepel* (mengepel), *ngobrol* (mengobrol), dan *ngelap* (mengelap).

Sebagaimana berlaku pada kata-kata yang berawal dengan huruf *k* lainnya, huruf *k* pada kata *keceng*, jika mendapat imbuhan *per-...-an*, tidak mengalami peluluhan: *perkecengan*, bukan *perngecengan*. (Bandingkan dengan *perkantoran*, *perkataan*, atau *perkelahian*!) Di samping terdapat penyimpangan kaidah pembentukan kata, dalam larik itu juga terdapat penyimpangan kaidah struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia, kita tidak memiliki kata tugas *pada* seperti yang terdapat dalam larik *Anak-anak pada ngeceng ke tempat-tempat perngecengan*. Pemakaian kata *pada* seperti ini merupakan pengaruh struktur kalimat bahasa daerah Jawa. Dalam bahasa Indonesia kata tugas *pada* menandai hubungan makna tempat atau waktu. Demikian pula halnya dengan kata *kita* dalam larik tersebut: *Kalau mau ngeceng ikut sama kita/ Kalau (kamu) mau menceceng ikut(i)lah kami*. Dalam konteks kalimat ini kata *kita* yang dipakai adalah *kita* dialek Jakarta (bahasa Betawi), bukan *kita* bahasa Indonesia, yang berkategori pronomina persona jamak, bersifat eksklusif (yang dalam konteks ini mencakupi penggubah, penyanyi, dan penikmat lagu atau masyarakat pendengarnya).

Kasus sejenis kalimat di atas tampak pula pada contoh (28) dan (29) berikut.

(28) ... *Ternyata aku makin cinta
cinta sama kamu hanya kamu seorang, Kasih
'Ku 'tak mau yang lain, hanya sama kamu
(LkM/AMC/VP)*

(29) *kaulah yang diinginkan aku
dari mimpiku (GG/GG/GG)*

Kata *sama* pada struktur larik *Aku makin cinta sama kamu ...* tersebut bukanlah kata *sama* dalam konteks kalimat bahasa Indonesia; itu juga struktur kalimat dialek Jakarta.

Dalam bahasa Indonesia, padanannya, ... *aku makin cinta kepadamu; ... hanya kepadamu; atau aku makin mencintaimu*. Demikian pula, konstruksi kalimat *kaulah yang diinginkan aku* merupakan pengaruh bahasa daerah (Sunda). Dalam bahasa Indonesia, padanannya, adalah *Kaulah yang kuinginkan*.

Berikut ini masih sekadar contoh bahwa keetnikan mewarnai bahasa Indonesia wacana lagu kita. Contoh (30) dan (31) merupakan lirik yang mengandung interferensi unsur leksikal bahasa daerah (antara lain, bahasa Jawa).

- (30) ... *Ini bukan hukuman
hanya satu isyarat bahwa kita
mesti banyak **bebenah** (EGA/KDK/EGA)*
- (31) ... *Kaudengar segenap rasa tertumpah
mengalun dalam gitaku
ngelangutkan jiwa (Bgs/DD/Bgs)*

Kata *bebenah* di atas merupakan kata bahasa Jawa yang padanannya dalam bahasa Indonesia 'berbenah'. Begitu pula, kata *ngelangutkan* bukan kata bahasa Indonesia, melainkan kata yang berasal dari bahasa Jawa juga, yang maknanya konon berpadanan dengan kata *hampa/kosong* dalam bahasa Indonesia. Untuk makna (31) saya sangat sependapat jika itu dianggap tidak mengganggu pemahaman informasi/perasaan yang ingin disampaikan oleh penggubahnya. Maklum kata *bebenah* itu bukan monopoli bahasa Jawa (dalam bahasa Sunda dan dialek Jakarta juga ada). Namun, contoh (32), yang mengandung kata *ngelangutkan*, menurut hemat saya, kadar komunikasinya secara nasional kurang.

Bagi sementara orang, tidak terkecuali pencipta lagu, domisili di kota Jakarta merupakan kebanggaan tersendiri atau mempunyai gengsi sosial tersendiri. Betapa tidak, DKI Jakarta adalah ibukota negara bangsa kita, kota metropolitan. Dialek Jakarta, atau yang beken dengan nama bahasa Betawi, adalah jati diri etnik Betawi. Oleh karena itu, tidaklah mengagetkan pula jika unsur keetnikan Betawi menghiasi wacana lagu kita (seperti tampak pada petikan (32) dan (33). Bahkan, bukanlah itu semata faktornya; masalah kedwibahasaan kembali menjadi salah satunya. Konon, seseorang yang dwibahasawan lumrah sekali melakukan peralihan bahasa/kode (*code-switching*) jika situasi berbahasa menuntutnya. Dari data berikut, tampaknya, faktor emosilah yang dapat ditautkan sebagai faktor yang dominan terhadap penampilan *code-switching* dari bahasa Indonesia ke dialek Jakarta berikut.

- (33) ... *Semilir angin menerpa nurani
membuat diri ini semakin hampa
tak mengerti lagi mesti bagaimana
Gue ingin malam ini lu ada di sini*

*temani gue yang goyah serasa tak berati
gue ingin lu rasakan galau hati ini
hingga gue dapat nikmati indahnya hidup ini
(Jh/GI/SB)*

Gejala peralihan kode/bahasa sebagai akibat sejenis faktor dikemukakan di atas (emosional) dapat kita kenali lewat lirik/lagu "Minggat", yang dinyanyikan oleh penyanyi muda ternama **Denada** dengan irama yang seronok bagi yang sedang kecewa (*rapping*). Berikut ini sekedar contohnya:

- (34) *Duduk bengong sendirian di dalam kamar
hati mangkel kesel rasanya terbakar
yang begini ini kejadian hampir tiap hari
lama-lama nggak kuat lagi, kepingin lari
kemarin sore dimaki abis sama bokap
gara-gara pulang sekolah nyampe terlambat
... (Balt/Mgt/Dnd)*

Lain halnya dengan gejala peralihan kode/bahasa pada petikan lirik berikut (35). Perubahan pemakaian kata *beta* yang menyulih kata *aku* atau *saya* (*beta 'kan setia padamu*), yang kemudian menjadi *janjiku* (bukan *janji beta*) tampaknya memberikan nuansa khusus terhadap keseluruhan wacana lagu ini: salah satunya adalah ikatan rasa sebangsa, persatuan/nasionalisme yang kokoh. Amat disadari juga oleh penggubahnya bahwa sejarah telah mengukirnya dengan tinta emas bahwa *janji* atau *sumpah* itu telah dinyatakan secara bersama-sama (kini sudah 70 tahun: Oktober 1928--Oktober 1988) bukan hanya oleh masyarakat yang menggunakan kata ganti persona pertama *beta* melainkan juga oleh *orang Indonesia* yang mengacu dirinya, antara lain, dengan kata *dalem/kulo/aku; abdi/kuring/uing/aing* (yang tergolong Jong Java); *ambo, aden* (*Jong Sumatra*) atau yang dalam bahasa Indonesia berpadanan dengan *saya, aku: janji saya* —> *janjiku* (bukan *janji beta; janji dalem/janji kulo/janji aku; janji abdi/janji kuring/janji uing/janji aing*; bukan pula *janji ambo, janji den*). Tepatnya, salah satu *janji* atau *sumpah* itu berupa kebulatan sikap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan/nasional. Oleh karena itu, *janji* atau *sumpah* dalam konteks lirik tersebut bukan hanya monopoli *masyarakat beta*, melainkan masyarakat tingkat nasional, yang tampil dengan diksi *janjiku*. Berikut ini adalah petikannya.

- (35) *Cinta, cinta, cinta Indonesia
padamu beta t'lah menyatu
padamu beta 'kan setia membela
Oh, tanah tumpah darah, suci mulia
inilah janjiku padamu*

*Oh, tanah tumpah darah nan suci mulia
inilah janjiku padamu Indonesia
(GSP/CI/Gln)*

6. Faktor yang Kurang Mendukung

Jika saya diminta memberikan gambaran tentang faktor-faktor yang diduga kurang mendukung mutu bahasa Indonesia dalam lirik lagu, kecenderungan jawaban saya adalah sebagai berikut: (1) faktor kedwibahasaan dan diglosia yang belum mantap, (2) faktor miskinnya tema lagu yang berkorelasi dengan perbendaharaan kata dalam lagu, (3) masalah kausa matra, serta (4) kurangnya penguasaan konsep.

Faktor yang pertama, yakni masalah kedwibahasaan (*bilingualisme*), erat kaitannya dengan dwibahasawannya (*bilingual*), serta kemampuan/penguasaannya terhadap sistem-sistem bahasa yang dipakainya ketika berkomunikasi (*bilinguality*); ini merupakan akibat dari kontak bahasa (*language contact*) pada diri si penutur yang bilingual itu. Ihlwal tersebut merupakan faktor yang sangat penting jika kita menyoroti permasalahan mutu bahasa. Ini bukan saja dalam konteks lirik lagu (laras/register lagu) melainkan juga dalam berbagai laras bahasa lain yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai mediana, apa pun latar belakang etnik atau bahasa ibu penulis/pembicaranya: temuan menunjukkan masih ada pemakaian unsur-unsur bahasa yang belum sesuai dengan konsep baik dan benar.

Temuan penelitian tentang kedwibahasaan di Indonesia pada umumnya menunjukkan *tidak imbangnya penguasaan bahasa* si bilingual terhadap sistem-sistem bahasa yang dipakainya. Sebagai akibat dari kontak bahasa, timbul berbagai gejala penyimpangan norma bahasa: norma bahasa yang dikuasainya dengan baik mempengaruhi bahasa yang belum dikuasai normanya dengan baik. Pengucapan para penyanyi merupakan salah satu produk yang kita hadapi. Seyogianyalah bahwa para penyanyi yang akan membawakan lirik/lagu itu mempelajarinya terlebih dahulu secara mendalam, baik dari segi makna, tekanan kata, dan pengucapan.

Selain kedwibahasaan, yang belum mantap itu juga kedaan diglosia. Secara kasat mata, kita masih melihat dan mendengar tumpang tindihnya pemakaian bahasa Indonesia ragam formal dan nonformal, bahkan dengan bahasa daerah atau dialeknya, tidak terkecuali dalam laras bahasa seni vokal. Tampaknya, pembagian fungsi bahasa-bahasa ini belum sepenuhnya mantap/stabil. Namun, saya sangat yakin jika kecintaan, kesetiaan, serta kebanggaan akan jati diri, baik kebangsaan maupun kedaerahan, meningkat setiap saat, keadaan diglosia, termasuk kedwibahasannya, akan menjadi mantap/stabil. Bangsa kita memang sedang menuju ke arah masyarakat yang dwibahasawan dan diglosia yang stabil. Semoga.

Faktor yang kedua berkaitan dengan tema lagu. Berdasarkan data, dari 253 buah wacana lagu Indonesia yang dikaji, 172 buah (69,98%) di antaranya cenderung berbicara tentang cinta (antara pria dan wanita), 34 (13,44%) bertema keagamaan, 12 (4,74%) cinta saudara, 9 (3,55%) cinta tanah air/negara, dan 8 (3,16%) cinta alam (laut, udara, daratan, dan dataran). Data ini memberikan kesan bahwa perbendaharaan kata/istilah kurang bervariasi dalam wacana lagu. Tampaknya, ini menjadi salah satu

tuntutan bagi penggubah lagu untuk berimprovisasi lebih jauh dengan variasi tema yang luas. Faktor yang ketiga berupa kausa matra; dalam lirik lagu tampil melalui pemakaian kata yang dilesapkan sebuah hurufnya atau sebuah suku katanya. Contohnya tampak pada petikan lirik (35) serta petikan lirik-lirik yang saya sajikan dalam makalah ini, seperti *'kan* (dari *akan*), *'ku* (dari *aku*), *t'lah* (dari *telah*), *s'lalu* (dari *selalu*), *s'lamanya* (dari *selamanya*), *s'ketika* (dari *seketika*), *p'ragawati* (dari *peragawati*) serta *tuk* (dari *untuk*). Demikian pula halnya dengan pelesapan, penambahan, serta penyulihan imbuhan; pelesapan, penambahan, atau pertukaran kata tugas/kata hubung, serta pemakaian kalimat yang tidak apik, seperti tampak pada pemakaian kalimat yang rancu atau yang tidak selari dari segi bentuk dan makna kata.

Faktor yang keempat adalah kurangnya penguasaan terhadap konsep, yang ditandai oleh salah satu peristiwa sosial yang bertautan dengan wacana lagu. Pada tanggal 12 September 1998 pukul 9.50, melalui saluran Indosiar, tampil Sekjen MUI beserta penggubah lirik lagu *Takdir*, Chossy Pratama, beserta penyanyinya, Desy Ratnasari. Momentum itu juga dimanfaatkan penggubah lagu untuk menyampaikan pemberitahuan kepada masyarakat pendengar bahwa lagu tersebut diganti liriknya: tidak menggunakan kata *takdir* sama sekali. Chossy dan Desy meminta maaf kepada masyarakat Indonesia karena menurut Sekjen MUI, lagu tersebut mengandung kata/istilah *takdir* yang jika ditinjau dari agama Islam memberikan gambaran tidak sesuai dengan konsep dan konteks pemakaiannya. Dalam wacana lagu itu, takdir diberi gambaran kejam. Padahal, Allah SWT, pemilik konsep tersebut bersifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini berarti bahwa diksi yang dipilih oleh penggubah lagu tersebut menimbulkan masalah bagi masyarakat penikmat/pendengar lagu. Berikut ini adalah petikan liriknya.

(36) *Memang kita berbeda
aku orang biasa
mungkin takdir enggan menyapa
akhirnya cintaku kandas juga*

*Takdir memang kejam
tak mengenal perasaan
bersimpuh kugenggam
harapan yang jadi arang*

*Takdir memang kejam
tak dapatkah kaurasakan
getar cinta yang menyatukan
rindu dan asa ho ... ooo (Chs/Tkd/DR)*

Tidak kepalang seriusnya sikap masyarakat menanggapi lagu tersebut. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, misalnya, menyelenggarakan seminar tentang "Takdir dari Perspektif Teologis". Saya diminta menanggapi lirik lagu itu dari segi bahasa. Seperti pada umumnya lagu-lagu populer, pilihan katanya (diksinya) diungkap-

kan melalui majas. Seperti tampak pada petikan lirik, majas perbandingan, khususnya personifikasi dan metafora, mendominasi gaya bahasa penggubah tersebut. Mulai dari majas (1) *mungkin takdir enggan menyapa (majas personifikasi)*, (2) *cintaku kandas (majas metafor)*, (3) *takdir memang kejam dan (4) (takdir) tak mengenal perasaan (majas personifikasi)*; (5) *bersimpuh kugenggam harapan (personifikasi)*; (*harapan yang jadi arang (metafor)*); dst. Singkatnya, wacana lagu ini menampilkan pemakaian majas. Namun, majas yang tidak mengena adalah memberikan personifikasi untuk kata *takdir*. *Pemilihan majas personifikasi (penginsanan) terhadap Allah inilah menurut hemat saya yang tidak benar.*

Contoh yang senada sebenarnya ditemukan juga dalam petikan lagu berikut, yang tampil muwakil merepresentasikan karakter spesifik penyanyi lagu-lagu cengeng (37): *mengapa hujan turun ke bumi*. Bahkan, lirik (38) secara gamblang mempersonifikasikan Tuhan: *mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita* Namun, kita amat yakin bahwa takdir jualah yang menentukan kedua penyanyi atau penggubah lirik lagu ini tidak dituntut untuk berhujat (memberikan argumentasi) dalam seminar, seperti yang dialami *Takdir (Ch/DR)*.

(37) Jangan kautanya lagi
mengapa memerah mataku ini
 coba, coba jawab sendiri
mengapa hujan turun ke bumi
 (OM/ND/OM)

(38) *Sesampainya di laut, kukabarkan semuanya*
kepada karang, kepada ombak, kepada matahari
Tetapi, semua diam; tetapi semua bisu
tinggal aku sendiri terpaku menatap langit
Barangkali di sana ada jawabnya
mengapa di tanahku terjadi bencana
mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah kita yang
selalu salah dan bangga dengan dosa atau
alam mulai enggan bersahabat dengan kita
 (EGA/BKK/EGA)

7. Upaya Peningkatan Kualitas: Penguasaan Kosakata dan Kekayaan Tema

Sebelum menanggapi upaya apa yang seyogianya dilakukan terhadap peningkatan kualitas lirik lagu, terlebih dulu saya ingin menggambarkan strategi para penggubah lirik/lagu yang tampak dalam produk mereka. Beberapa penggubah lirik lagu telah membuktikan bahwa bahasa Indonesia telah mampu menjadi sarana seni ekspresi. Guruh Soekarno Poetra, misalnya, telah memperlihatkan kepada kita semua bahwa betapa kayanya kosakata bahasa Indonesia yang mampu mewakili aneka nuansa rasa kita, bangsa Indonesia, melalui aneka gaya bahasanya. Ia telah membuktikan bahwa penguasaan, sekaligus pemanfaatannya secara cermat di dalam konteks wacana lagu,

terhadap kosakata yang bersinonim merupakan salah satu strategi yang jitu di dalam penciptaan lirik lagu yang indah dan berkualitas.

Seperti apa upaya konkret Guruh dalam mengembangkan pemakaian kosakata yang bersinonim tersebut dapat dilihat dari 21 buah karyanya yang dijadikan percontoh kajian untuk tulisan ini. Ia langka mengulang pemakaian sebuah kata pada sebuah wacana yang sama: kata *suka* cenderung disulih dengan sinonimnya yang bernuansa sama, seperti *cita, ria, riang, gembira, senang, ceria, atau bahagia*. Sebaliknya, nuansa *duka* kerap ditukarnya dengan *nestapa, derita, lara, sedih, murung, haru, sendu, atau rawan*. Demikian pula, kata *gelisah* sering diseleng dengan kata *resah, galau, gundah, atau gulana*; kata *sepi* diselang dengan *sunyi, hening, atau hampa*; kata *merana* diganti dengan kata *menderita, merintih, tak berdaya, ditindih derita, ditindih haru, atau terkungkung derita*, yang ditautkan dengan gambaran *hati*, yang juga cenderung disinonimkan dengan *kalbu* atau *lubuk terdalam*, bahkan dengan *di dada* atau dengan *sukma* yang kerap disulih pula dengan *jiwa*. Begitu pula, gambaran *punah*, cenderung disinonimkan dengan kata *musnah, hilang, atau lenyap*. Setiap kosakata tersebut Guruh untai untuk keperluan konteks wacana yang menuntut kehadiran lapisan anak usia *muda*, yang kerap diselang dengan kata *belia* atau *remaja*, bahkan *budak* untuk konteks tertentu. Kata-kata tersebut tampil bertautan dengan gambaran tentang hierarki generasi usia, mulai anak *dara* (yang disinonimkan dengan kata *perawan* atau *gadis*, yang dihubungkan pula dengan *paras* atau *wajah* mereka yang *jelita* yang tidak jarang pula disinonimkan dengan kata *cantik, elok, atau rupawan*), termasuk gambaran tentang *orang tua*. Bahkan, Guruh tak alang; sentuhan emosinya terhadap keetnikan serta budaya bangsa ini, yang ditampilkan lewat latar kedwibahasaan serta situasinya yang diglosia.

Memang, tampak jelas bahwa tema lagu berkorelasi sangat kuat dengan pemilihan kata (menurut bentuk dan sifatnya), pilihan jenis majas, atau pilihan ragam kalimatnya. Guruh secara jelas menunjukkan hal ini. Kekayaan akan tema lagu menjadi salah satu fakta akan kekayaan kosakata liriknya. Ia sangat piawai berbicara tentang tema cinta, baik cinta antara pria dan wanita maupun cinta terhadap suasana *alam* (yang sesekali diungkapkannya dengan kata *alam semesta, dunia*, bahkan menjadi khusus *per-sada/tanah Ibu Pertiwi*, atau menjadi *zamrud khatulistiwa* jika gengsi nasionalisnya merasuki jiwanya). Ia nyatakan semua itu dengan berbagai suasana serta nuansanya, termasuk ketika perasaan bangga dan syukur kepada *Yang Maha Pencipta, Yang Mahakuasa, Yang Maha Penyayang, atau Tuhan* mewarnainya. Ia berkomunikasi lewat lirik lagunya, mulai *dini hari, ufuk timur, cahaya remang, fajar menyingsing* (yang kadang-kadang dilukiskan berhalimun atau berkabut, atau bermandikan cahaya mentari, yang acap disulihnya pula dengan kata *matahari* atau *sang surya*), *pagi* (yang kerap digambarkan berembun), *siang, sore, senja*, sampai dengan *malam* atau *tengah malam*, yang acap ditautkan dengan *langit* atau *cakrawala* bertemukan *bulan* atau *rembulan* dan *bintang*. Kadang-kadang pula keadaannya dilukiskan *berawan*, tetapi tidak jarang dinyatakan *mendung*, kemudian *hujan*. Konon, semua itu ada yang merupakan *mimpi, khayalan, atau bayangan*, yang kerap membuatnya *terlena* atau *terjaga*, lalu *termenung, tercenung, tertegun*, bahkan *terpaku* karena langka dalam

kenyataan.

Selain suasana yang saya kemukakan di atas, pencipta lagu tersebut tidak ragu ber-celoteh tentang tema *laut* atau *samudera*, yang acap ditautkan dengan *riak*, *ombak*, *gelombang*, *gelora*, atau *badainya*, bahkan *bayu* atau *anginnya*. *Dataran* (dengan tumbuhannya: *rumpun hijau*, *bunga*, dan *bambu*), *daratan*, serta *pulau* tak terlepas dari amatannya. Semua itu mencoraki lirik-lirik lagunya, yang cenderung tampil dengan gaya bahasa yang kuat, lancar, kadang-kadang melambung, dan amat memikat, baik dalam majas perbandingan (tertinggi dalam bentuk personifikasi) maupun dalam majas pertentangan (terkerap dalam bentuk hiperbola) untuk mengungkapkan perasaan serta pikirannya terhadap kehidupan secara menyeluruh.

Strategi yang saya kemukakan di atas tampak pula pada pencipta lagu ternama seperti Ebiet G. Ade serta Titiek Puspa. Kita karib dengan Ebiet berkat baladanya yang kaya akan tema serta gaya bahasanya yang bervariasi dalam rentangan ironis, litotes, serta personifikasi. Itu sebabnya pula, kita terpana dengan majas-majas yang dipilihnya, yang dikomunikasikan, antara lain, melalui dua puluh lagu yang dipasarkan melalui Blackboard pada tahun delapan puluhan. Data lirik-liriknya menunjukkan betapa tinggi kesadarannya terhadap bervariasinya kehidupan ini yang diberikan Sang Pencipta kepada makhluk-Nya. Ini tampak jelas dalam aneka kepedulian yang didendangkannya: mulai dari kondisi alam, kondisi manusia dalam aneka stratanya, kondisi cintanya, baik cinta terhadap dirinya, kekasihnya, atau kepada sesama maupun cinta kepada alam dengan aneka konteks isinya, sampai kepada Tuhannya. Seperti halnya Guruh, dengan segala kekhasannya, sentuhan emosi etnik juga melatari lirik-liriknya. Singkatnya, Ebiet kaya akan perbendaharaan kata dan sekaligus mampu memanfaatkan secara cermat perbendaharaan bahasanya dalam aneka wacana lagunya yang bermutu itu.

Sebagaimana Guruh dan Ebiet, pada hemat saya, Titiek Puspa juga merupakan salah seorang penggubah lirik dan lagu yang sangat kreatif dan andal. Dari kepekaannya yang sangat dalam terhadap lingkungannya, terlahir berbagai tema lagu memikat, yang dua puluh wacana di antaranya dijadikan percontoh kajian. Seperti pada umumnya penggubah lagu, tema cinta juga menjadi salah satu yang dominan pada Titiek: cinta kepada tanah tumpah darahnya (Indonesia), kepada pahlawan, kekasih, ayah, mama, adinda, gadis, kawan, dan sahabatnya (khususnya Bing Slamet). Bahkan, hewan (seperti "si Hitam") tidak terlepas dari amatannya. Dekatnya dengan aneka situasi sosial terbukti melalui "Kupu-Kupu Malam"-nya yang sarat dengan personifikasi. Bahkan, citraannya tentang budaya desa dan kota (termasuk perubahan perilaku yang ditokohnya), tentang mimpi-mimpinya (termasuk mimpi dalam mimpinya) dikomunikasikannya dengan sangat kreatif. Ia sangat mampu mengungkapkan aneka nuansa dan suasana sesuai dengan sifat lagu yang digubahnya: riang, gembira, ceria, manja, serta sendu, sedih, merana, menderita, merintih (tetapi tidak terkesan cengeng), termasuk yang menggebu dan bergelora. Semua itu dengan amat kaya tampil di dalam perbendaharaan kata yang menjadi tiang lirik-lirik lagunya, yang indah dan bernas.

Kita juga memiliki kader muda berbakat, yang produktif dengan lagu-lagu bertema

cinta, antara lain, Loka Manya dan Meisje. Lirik lagu mereka sarat oleh gaya bahasa yang lancar, lugas, dan memikat, yang tampil kadang-kadang dengan majas hiperbola (yang mencoraki gaya anak muda); ini dapat kita tangkap, antara lain, dari lariknya yang berbunyi, "*Ternyata aku makin cinta, cinta sama kamu, hanya kamu seorang kasih, hanya sama kamu, kamu yang terakhir yang kucinta.*" Lirik lagu mereka melejit lewat suara penyanyi ternama yang ekspresif, yang memiliki emosi dalam, Vina Panduwinata. Rentang waktu dan usia, atau jumlah jam terbanglah tampaknya yang mengurangi tampilnya tema lagu mereka yang kurang bervariasi.

Atas dasar data yang saya uraikan di atas, upaya mengatasi beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab adanya gambaran ketidakrapian pada unsur bahasa/gaya bahasa lirik lagu, saya ingin menganjurkan, sekaligus menyarankan ihwal berikut.

- (1) Tema lagu hendaknya ditingkatkan jenisnya karena tema yang bervariasi sangat menjanjikan pemanfaatan diksi/kosakata, termasuk istilah, yang bervariasi pula. Untuk ini, peranan kamus bahasa sangat tinggi, terutama dalam upaya meningkatkan ketajaman kita atas konsep-konsep yang kita pilih; bersahabat dengan kamus menjamin kita kaya akan perbendaharaan kata, sekaligus cermat dan tepat dalam penggunaannya.
- (2) Bagaimanapun, dalam berkarya, seorang penggubah lagu tidak akan terlepas dari dua faktor utama, yaitu *melodi* dan *lirik* dengan segala normanya. Salah satu faktor ketidaksinkronan antara tekanan kata dan irama lagu dapat dikatakan bertautan dengan penguasaan bahasa. Oleh karena itu, untuk menjadi penggubah lagu yang andal, sekurang-kurangnya, ilmu komposisi sudah di tangannya. Di samping itu, penggubah lagu juga seyogianya memiliki kepekaan yang dalam terhadap lingkungan sosial; bukankah mereka itu yang menjadi sumber inspirasi dan improvisasi. Pengetahuan yang luas, banyak membaca berbagai aspek kehidupan, termasuk memahami serta menghayatinya, tampaknya merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan penggubah lagu agar tidak terjebak pada komunikasi yang tersendat. Bahkan, musyawarah atau dialog melalui pertemuan atau seminar antarsesama penggubah dan penyanyi atau tokoh/pakar yang relevan untuk peningkatan mutu lirik/lagu mengapa mustahil. Pengadaan bengkel seni musik vokal pun mengapa tidak; bukankah kita sudah memiliki wadahnya?
- (3) Kepedulian yang tinggi terhadap keadaan kebahasaan masyarakat kita yang multilingual dan diglosik merupakan tuntutan yang harus dipenuhi oleh para penggubah lagu. Ini perlu dipertajam agar gejala yang tampil lewat percampuran serta peralihan kode, termasuk interferensinya, betul-betul sesuai dengan konteks, bentuk, dan sifat lagu/musiknya. Musik vokal tidaklah berfungsi menghibur semata; fungsi kependidikan yang lainnya, khususnya berbahasa dengan baik dan benar, dapat diperoleh melalui jalur ini.

8. Penutup

Bahasa Indonesia dalam lirik lagu-lagu Indonesia, khususnya lagu-lagu populer, sudah memenuhi fungsinya sebagai sarana seni ekspresi. Persyaratan yang diperlukan oleh pencipta lagu, seperti kalimat, bentuk dan pilihan kata, serta perbendaharaan kata,

termasuk tekanan katanya, telah tersedia dalam bahasa Indonesia. Bahkan, tidaklah berlebihan jika saya katakan bahwa unsur-unsur bahasa Indonesia tersebut telah memberikan layanan yang istimewa terhadap para pencipta lirik lagu dengan aneka jenis musiknya. Unsur perbendaharaan katanya, misalnya, sangat mampu menuangkan ekspresi para penggubah lagu dalam aneka gaya bahasa mereka, khususnya dengan majas sebagai salah satu strateginya. Oleh karena itu, dari segi fungsinya, dapat dikatakan bahwa bahasa Indonesia dalam lirik lagu telah menjadi "*tuan rumah di negerinya sendiri*". Sejalan dengan kenyataan ini, keikutsertaan negara Indonesia di dalam percaturan lomba seni musik vokal pada tingkat global seyogianya dilakukan melalui jati diri sendiri, yakni lirik berbahasa Indonesia.

Segi mutu masih perlu diupayakan peningkatannya. Ini ditandai oleh kenyataan masih banyaknya lirik lagu yang menampilkan bentuk dan pilihan kata, termasuk istilah yang belum tepat dalam konteksnya. Begitu pula kerapian struktur kalimatnya. Bahkan, unsur tekanan kata dengan tekanan/irama lagu belum menyatu. Unsur yang satu ini, (tekanan kata) bukanlah monopoli para penyiar media radio dan televisi atau guru melainkan juga media seni musik vokal, yang di dalamnya terlibat peran para penyanyi. Oleh karena itu, agar misi penggubah lagu tidak luncas, penyanyi pun wajib terlebih dahulu mempelajari secara mendalam lagu yang akan dinyanyikannya: bukan hanya melodinya melainkan juga liriknya (termasuk makna, tekanan kata, bahkan pengucapan setiap katanya).

Kedwibahasaan serta keadaan yang diglosik masyarakat Indonesia hendaknya semakin disadari oleh para penggubah lagu, termasuk penggubah lagu Indonesia populer. Walau laras bahasa yang satu ini terlindung oleh *licentia poetica*, gengsi sosial serta tuah bahasa Indonesia sebagai salah satu lambang jati diri bangsa Indonesia termasuk tanggung jawab moral penggubah lirik lagu. Bagaimanapun seorang penggubah lagu adalah seorang penulis lagu. Dalam berkarya dia tidak dapat melepaskan diri dari dua faktor utama: melodi dan lirik dengan segala normanya. Oleh karena itu, penguasaan terhadap ilmu komposisi seyogianya menjadi salah satu bagian keterampilannya.

Segi tema, tampaknya, juga perlu mendapat perhatian: lagu-lagu kita agak miskin tema. Jika selama ini kita dengar bahwa para penggubah lagu "dikondisikan" oleh pasar, sudah waktunya kini pasarlah yang "dikondisikan" oleh para penggubah lagu. *Insyallah. Selamat berjuang!*

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan *et al.* 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- , 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Balai Pustaka.
- Bachtiar, Harsja W. 1987. "Kebudayaan Pendidikan: Bersatulah". Dalam Muhadjir *et al.* (Ed.). *Evaluasi Kebudayaan*. Depok: FSUI.
- Badru, Sjahidin. 1994. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Syair Lagu Indonesia

- Populer". Proyek Penelitian Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cetakan Keempat. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ferguson, Ch.A. 1971. "Diglossia". Dalam Anwar S. Dill. (Ed.). *Language Structure and Language Use*. Stanford: Stanford University Press.
- Hasan, Fuad. 1987. "Catatan Perihal Konsepsi dan Strategi Pengembangan Kebudayaan". Dalam Muhadjir *et al.* (Edi.). *Evaluasi dan Strategi Kebudayaan*. Depok: FSUI.
- Keraf, Gorys. 1981. *Diksi dan Gaya Bahasa: Komposisi Lanjutan I*. Ende: Nusa Indah.
- Lumintang, Yayah B. 1997. "Bahasa dalam Lirik Lagu Indonesia: Antara Kenyataan dan Harapan". Dalam Majalah *Bahasa dan Sastra*. Tahun XV, Nomor 3.
- , 1990. "Pemakaian Bahasa dalam Lirik Lagu Kanak-Kanak". Dalam Muhadjir. Editor. *Lembaran Sastra: Bilingualisme dan Variasi Bahasa*. Seri Penerbitan Ilmiah, Fakultas Sastra Universitas Indonesia. 11/12.
- , 1988. "Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Lagu (1, 2, dan 3)". Makalah untuk Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di Televisi Republik Indonesia Stasiun Jakarta, pada tanggal 2, 9, dan 16 Januari.
- , 1998. "Pertimbangan Diglosia secara Dini dalam Lirik Lagu Wajib Tingkat Sekolah Dasar". Kertas Kerja dalam Seminar Nasional VIII Bahasa dan Sastra Indonesia, yang Diselenggarakan oleh Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), di Semarang, pada tanggal 21--23 Juli.
- , 1998. "Nuansa *Takdir* dari Segi Bahasa". Bahan Seminar Sehari tentang *Takdir* dalam Perspektif Teologis, yang Diselenggarakan oleh Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, di Jakarta, pada tanggal 3 Oktober.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Seri ILDEP. Jakarta: Djambatan.
- , 1989. *Kembara Bahasa: Kumpulan Karangan Tersebar*. Jakarta: Gramedia.
- Pranadjaja. 1978. "Pemakaian Bahasa dalam Lagu-Lagu Modern". Dalam Halim dan Lumintang. (Ed.). *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Saptarini, Tri. 1995. "Kualitas Kalimat dalam Lirik Lagu Pop Dangdut". Laporan Penelitian Rutin Mandiri, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta.
- Weinreich, Uriel. 1970. *Languages in Contact: Findings and Problems*. The Hague: Mouton.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D10
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.50--15.40
Judul Makalah	: Bahasa Indonesia dalam Lirik Lagu
Penyaji	: Yayah B. Lumintaintang
Pemandu	: Wawan Hermawan
Pencatat	: a. Non Martis b. Syamsul Arifin
Peserta	: 60 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Eko Wardono, IKIP Semarang

a. Pertanyaan:

Apa sebenarnya yang akan dikaji dalam makalah ini? Jika kita berbicara tentang bahasa Indonesia dalam lirik lagu atau dalam puisi, tentu saja kita tidak bisa mengukur salah atau benar dari segi ragam bahasa karena lagu mempunyai kaidah tersendiri.

b. Jawaban:

Seperti yang saya katakan pada awal pertemuan ini, saya tidak yakin bahwa Anda tidak membacanya. Jadi, ini adalah laras bahasa sastra, bukan kajian normatif. Dari awal saya sudah mengatakan bahwa bahasa lagu ini adalah bahasa ragam sastra. Di sana banyak dimunculkan majas-majas personifikasi dan hiperbola. Saya tidak mengatakan bahwa ada kata-kata yang salah dalam lagu, tetapi ada pemakaian kata yang kurang tepat. Ketika saya ditanya oleh Panitia, bagaimana halnya dari segi mutu? Kita harus berbahasa yang baik dan benar.

Jika kita berbicara tentang konsep yang baik dari segi mutu, tentu tidak akan ada kata *di mana* dalam lirik lagu seperti berikut ini.

*di mana aku mengeluh
dengan segala keluh*

Kata *di mana* itu untuk apa? Yang benar adalah *tempat aku mengeluh*. Kita menggunakan diksi yang kurang tepat karena kita mementingkan keindahan. Contoh lain yang mirip hal tersebut adalah sebagai berikut.

Bila hatimu tak sayang

Konjungsi *bila* itu sudah benar atau belum? Atau, konjungsi *jika* yang benar?

2. Penanya: Suherli, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah sudah ada penelitian yang berkaitan dengan lagu?
- 2) Berapa persen bahasa dalam lagu itu yang benar dan berapa persen yang tidak benar?

- 3) Apakah lagu-lagu yang menggunakan bahasa Indonesia yang benar itu tiba-tiba tidak laris?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

3. Penanya: Mursal Esten, Universitas Bung Hatta, Padang

a. Pertanyaan:

- 1) Seberapa jauh para pencipta lagu sebagaimana para penyair atau pengarang memiliki *licentia poetica*?
- 2) Seberapa jauh pakar bahasa dapat memahami dan memberikan toleransi terhadap hal itu?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

4. Penanya: Reni Jayusman, artis

a. Pertanyaan:

Saya tidak bisa berbahasa Indonesia yang baik, tetapi berusaha untuk berbahasa yang baik. Menurut saya, Ibu Yayah terlalu menghakimi bahasa lagu itu. Mengapa kata *di mana* tidak boleh dipakai, padahal kata itu mengandung multi-makna? Bagi saya lagu adalah sebuah kehormatan, yang penting komunikatif dan disukai pendengarnya. Kita tidak boleh membuat pendengar menjadi bodoh dan hanya mempunyai satu pikiran. Kita harus memancing pendengar, memancing imajinasinya, dan memancing penghayatannya. Saya harus mengakui bahwa saya adalah orang yang paling susah menyukai lagu-lagu Indonesia karena liriknya terlalu *amburadul*, kecuali ada satu lirik, yaitu *dunia ini panggung sandiwara* karya Taufiq Ismail.

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

5. Penanya: Taufiq Ismail, Seniman

a. Pertanyaan:

Barangkali ada satu *licentia* (kebebasan). Akan tetapi, jika kita berbicara tentang hal itu, kita akan terus berdebat. Saya dapat memberikan sebuah anekdot tentang lagu-lagu cinta. Saya sangat benci pada lagu itu, tetapi anak saya sangat menyukainya. Akhirnya, saya menyadari bahwa jarak saya dengan anak saya 45 tahun. Saya katakan kepadanya, "Jika itu bagus menurut kamu, *oke* bagus."

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

IKLAN SEBAGAI MEDIA PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

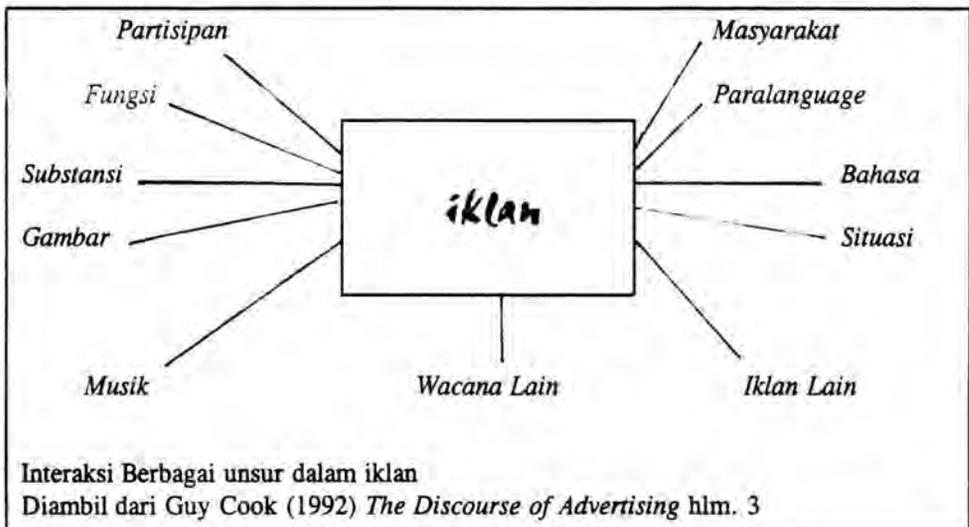
Felicia N. Utorodewo
Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Membahas masalah penggunaan bahasa dalam periklanan bukan pekerjaan yang mudah. Bahasa dalam iklan merupakan laras bahasa tersendiri yang belum banyak diteliti oleh para pemerhati bahasa. Jika saya mengatakan “belum banyak dibahas”, tidak berarti bahwa masalah ini belum pernah diperbincangkan. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1992) pernah meneliti pemakaian bahasa dalam iklan. Di Fakultas Sastra UI, sudah ada beberapa skripsi yang menggunakan iklan sebagai data penelitian mereka¹. Pertemuan antara para ahli bahasa dan praktisi periklanan juga sudah sering diadakan. Akan tetapi, masih saja muncul pertanyaan, “Bagaimana mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam periklanan dan bahasa Indonesia yang bagaimana yang seharusnya digunakan dalam periklanan?”

Pada dasarnya, periklanan adalah usaha komunikasi yang efektif dan efisien². Iklan berfungsi untuk memperkenalkan dan menjual sebuah gagasan atau produk. Iklan berfungsi untuk membentuk pola pikiran di benak masyarakat mengenai suatu gagasan atau produk. Mengapa dikatakan gagasan dan produk? Karena, sekarang, iklan tidak hanya berfungsi untuk memasarkan atau menjual produk, melainkan juga untuk memasarkan atau memperkenalkan suatu gagasan. Iklan seperti ini disebut iklan layanan masyarakat, misalnya iklan Gemar Membaca, iklan Persatuan Indonesia.

Sebuah wacana iklan dibangun oleh beberapa unsur. Bahasa hanya merupakan salah satu unsur di antara beberapa unsur yang membangun wacana iklan.



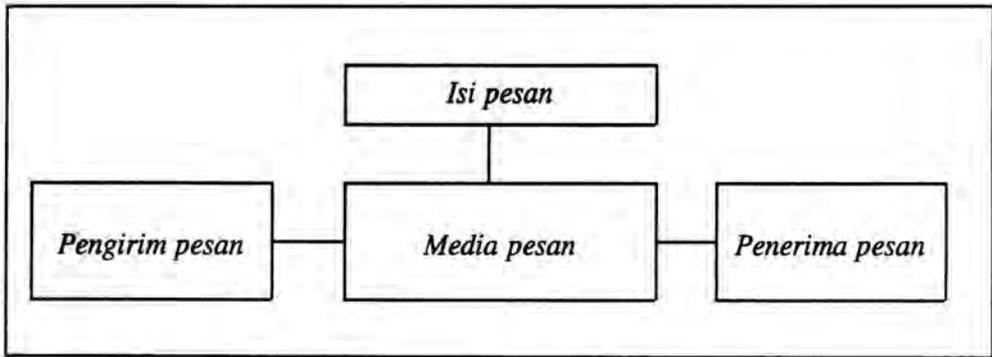
Bagian iklan yang dapat diteliti secara linguistis hanyalah unsur teksnya³⁾. Padahal, keutuhan wacana iklan, seperti kita lihat bersama, tidak hanya dibangun oleh bahasa. Sering bahasa hanya merupakan unsur penunjang. Di lain pihak, sebuah iklan merupakan hasil kerja tim yang, seharusnya, dilandasi oleh suatu hasil riset⁴⁾. Ada riset pasar; ada riset perilaku konsumen; ada riset media. Hasil akhir yang sampai kepada pembaca atau penonton iklan adalah hasil perumusan dan kerja panjang. Hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa dalam proses itu bahasa tetap memegang peranan penting.

Di sinilah kita dapat menekankan peran penting dari penguasaan bahasa yang baik dan benar. Iklan merupakan sebuah usaha komunikasi. Iklan merupakan hasil manipulasi bahasa untuk mencapai tujuan tertentu. Iklan merupakan usaha persuasi. Makin terbatas jumlah kata yang digunakan dalam sebuah iklan makin tinggi kepentingan penggunaan bahasa yang baik dan benar. Kita hanya dapat bermain dengan bahasa atau memanipulasi bahasa jika penguasaan bahasa kita sudah baik. Bahasa menjadi alat bagi kita untuk mencapai tujuan kita.

2. Laras Bahasa Iklan

Bahasa Indonesia yang bagaimana yang harus digunakan dalam periklanan? jawabnya adalah bahasa Indonesia yang komunikatif atau bahasa Indonesia laras iklan. Seperti apakah bahasa Indonesia laras iklan? Pertanyaan itu sulit dijawab sebelum ada penelitian yang menyeluruh mengenai penggunaan bahasa Indonesia dalam laras iklan. Tanpa penelitian yang menyeluruh kita belum dapat mengetahui perilaku bahasa dalam laras iklan. Akan tetapi, kita dapat kembali kepada moto yang sering kita dengar. "Gunakanlah bahasa Indonesia dengan baik dan benar". Banyak orang, terutama masyarakat awam, mengira bahwa moto itu menekankan penggunaan bahasa Indonesia yang formal. Akibatnya, banyak orang melecehkan atau mengabaikan moto tersebut dan menganggapnya sebagai moto yang tidak fleksibel, moto yang kaku, moto yang tidak menarik. Padahal, moto itu tidak hanya menekankan penggunaan bahasa formal, tetap juga penggunaan bahasa yang komunikatif.

Penggunaan bahasa dengan baik menekankan *aspek komunikatif* bahasa. Hal itu berarti bahwa kita harus memperhatikan sasaran bahasa kita. Kita harus memperhatikan kepada siapa kita menyampaikan bahasa kita. Oleh sebab itu, unsur-unsur seperti pendidikan, agama, penghasilan, lingkungan sosial, dan sudut pandang dari sasaran komunikasi kita tidak boleh kita abaikan. Cara kita berbahasa kepada anak kecil dengan cara kita berbahasa kepada orang dewasa tentu berbeda. Penggunaan bahasa untuk lingkungan yang berpendidikan tinggi dan berpendidikan rendah tentu tidak dapat disamakan. Lebih lanjut lagi, karena berkaitan dengan aspek komunikasi, maka unsur-unsur komunikasi menjadi penting, yakni *pengirim pesan, isi pesan, media penyampaian pesan, dan penerima pesan*.



Penggunaan bahasa yang benar berkaitan dengan pemahaman dan penggunaan aspek kaidah, yakni peraturan bahasa. Dalam hal ini ada empat hal yang harus diperhatikan, yaitu masalah tata bahasa, pilihan kata, tanda baca, dan ejaan. Pengetahuan atas tata bahasa dan pilihan kata harus dimiliki dalam penggunaan bahasa lisan dan tulisan, sedangkan pengetahuan atas tanda baca dan ejaan harus dimiliki dalam penggunaan bahasa tulisan.

Benny H. Hoed⁵ mengatakan, "Sebaiknya, kekayaan bahasa Indonesia dari berbagai ragam, sosiolek, dan dialek yang ada dalam masyarakat perlu dimanfaatkan untuk menciptakan iklan yang segar dan tidak selalu harus bertumpu pada ragam baku." Jika ada anggapan bahwa penggunaan bahasa dengan baik dan benar akan menghalangi kebebasan berbahasa atau menghalangi kreativitas berbahasa, sebenarnya pendapat itu salah. Berdasarkan uraian tadi terlihat bahwa berbahasa dengan baik dan benar tidak hanya menekankan kebenaran dalam hal tata bahasa, melainkan juga memperhatikan aspek komunikatif. Bahasa yang komunikatif tidak selalu harus merupakan bahasa formal. Sebaliknya, penggunaan bahasa formal tidak selalu berarti bahwa bahasa itu baik dan benar.

Mari kita bahas beberapa contoh. Dalam sebuah iklan rokok (lampiran 1) terdapat frasa "Pria Punya Selera". Frasa tersebut mengangkat dialek Indonesia Timur, seperti *ngana pe rumah* 'kamu punya rumah'. Dalam dialek Jawa, frasa kepemilikan seperti itu akan muncul dalam bentuk *griyanipun panjenengan* 'rumahnya kamu'. Dalam bahasa Indonesia, frasa kepemilikan dinyatakan dalam bentuk *rumah kamu*. Jika kita terapkan pembahasan kita mengenai penggunaan ragam, sosiolek, dan dialek bahasa pada frasa "pria punya selera", secara kaidah tata bahasa, frasa tersebut seharusnya berbunyi "selera pria" atau "selera laki-laki". Frasa ini berlaku baik dalam laras bahasa lisan maupun tulisan, ragam baku maupun nonbaku. Jadi, jika kita memandangnya dari sudut penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, frasa "selera pria" lebih berterima dibandingkan frasa "pria punya selera". Dari segi komunikasi pun frasa ini tetap mudah dimengerti. Jika kita memandangnya dari segi periklanan, frasa itu lebih singkat (bahasa iklan selalu mempermasalahakan *space* atau tempat), tidak memihak pada kelompok etnis tertentu, dan dengan sendirinya daya jangkau khalayak sasarannya lebih luas.

Contoh berikutnya diambil dari iklan lampu, "Terus terang, philip terang terus".

Dalam kalimat ini terjadi permainan bahasa yang menunjukkan bahwa penulis iklan tersebut dengan sadar memperlakukan letak kata *terus* dan *terang*. Kalimat ini menggunakan ragam baku yang sama sekali tidak mengganggu kelancaran penyampaian pesan. Permainan katanya begitu menarik dan mudah diingat oleh khalayak sasaran.

Contoh ketiga adalah iklan kopi (lampiran 2), "Pelan-pelan? Kita 'kan belum setua itu, Bo." Penggunaan tanda baca dalam iklan ini sangat cermat. Ragam bahasa yang digunakan dalam iklan ini jelas merupakan ragam nonformal yang sering digunakan oleh remaja Jakarta. Akan tetapi, meskipun bahasa yang digunakan merupakan ragam nonformal, kalimat itu sama sekali tidak menyalahi kaidah tata bahasa. Melalui ragam bahasa yang digunakan, jelas bahwa khalayak sasaran iklan tersebut adalah kaum remaja. Akan tetapi, seperti contoh pertama, dengan digunakannya ragam nonformal, khalayak sasaran menjadi lebih terfokus atau terbatas, yakni kaum remaja di lingkungan kota besar, terutama Jakarta. Iklan tersebut juga hanya berlaku atau dikenali dalam kurun waktu tertentu saja, karena *slang* "Bo" hanya populer digunakan pada saat tertentu saja. Kini pun sudah jarang kita mendengar ungkapan itu dipakai dalam percakapan kaum remaja. Masanya sudah berlalu.

Hal yang perlu ditandai dalam laras iklan adalah bahwa kita tidak perlu selalu menggunakan kalimat lengkap. Artinya, tidak selalu dibutuhkan kalimat yang mengandung subjek, predikat, dan objek atau pelengkap. Hal yang penting dalam laras iklan adalah keutuhan wacana. Jadi, misalnya, dalam iklan kopi, kita melihat adanya urutan kalimat tidak lengkap, *Tunggu? Hati-hati? Lebih pelan?* Kalimat-kalimat yang tidak lengkap ini tidak mengganggu penyampaian pesan. Masalah yang harus dikuasai oleh seorang penulis iklan adalah cara penggunaan kalimat tidak lengkap yang tidak melanggar kebenaran kaidah. Dalam hal ini, ketidaklengkapan kalimat menjadi permainan bahasa, misalnya untuk membangun klimaks dalam teks iklan. Jadi, memang, kita tidak boleh bersikap kaku dalam menghadapi laras iklan sebagai suatu sarana penggunaan bahasa yang dinamis. Akan tetapi, kita tetap perlu memperhatikan aspek penggunaan *bahasa yang baik dan benar* dalam laras iklan. Gunakanlah bahasa yang komunikatif dengan tetap memperhatikan ketaatan pada kaidah dan asas ejaan dan tanda baca sebagai laras iklan.

3. Mutu Bahasa Iklan

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mutu bahasa Indonesia yang digunakan dalam periklanan? Mutu bahasa Indonesia dalam laras iklan sekarang sudah jauh lebih baik. Sudah banyak iklan yang dengan sadar memperhatikan penggunaan bahasanya.

Malam Citra Pariwisata, yakni acara pemberian penghargaan kepada iklan terbaik, yang mulai diselenggarakan pada tahun 1988⁶, mendorong perusahaan iklan untuk menghasilkan iklan yang bermutu. Dalam hal ini, unsur bahasa tidak mereka abaikan. Ada penghargaan khusus untuk iklan yang berbahasa Indonesia terbaik, yaitu penghargaan Citra Parikrama. Dalam tim juri diikutsertakan juri dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pemberian penghargaan ini merupakan usaha dunia periklanan untuk memberi lebih banyak perhatian kepada penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa iklan-iklan yang ditangani oleh

perusahaan iklan yang ternama sangat memperhatikan penggunaan bahasa Indonesia dalam iklan mereka. Di lain pihak, masih dapat ditemukan iklan-iklan yang mengandung kesalahan berbahasa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam bukunya *Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan Reklame* (1992) sudah mendaftarkan berbagai kesalahan yang dapat ditemukan dalam laras iklan. Masalahnya, tidak semua penulis iklan atau *copywriter* memiliki penguasaan atas bahasa Indonesia yang baik dan benar. Akibatnya, iklan yang dihasilkannya tidak merupakan hasil kerja maksimal dari kemampuan berbahasa sang penulis iklan. Kesalahan itu mencakup kesalahan punctuation dan ejaan sampai dengan kesalahan tata bahasa dan pilihan kata. Contoh-contoh yang diuraikan dalam pembahasan ini lebih mengarah pada kesalahan bahasa yang ditemukan pada iklan media cetak.

a. Kesalahan Ejaan dan Punctuation

Masih sering dapat ditemukan iklan-iklan yang mengandung kesalahan ejaan dan punctuation. Kesalahan ini terlihat jelas pada tajuk iklan atau *headline* iklan. Sering jawaban yang diberikan atas perbaikan yang diusulkan adalah keterbatasan ruang. Akan tetapi, dalam kenyataannya, ketiadaan tanda baca lebih sering terjadi karena kurangnya pengetahuan penulis akan fungsi dan tempat tanda baca itu.

Jika kita bandingkan iklan kopi (lampiran 2) yang sudah dibahas di atas dengan sebuah iklan layanan masyarakat mengenai lingkungan (lampiran 3), tajuk dalam iklan layanan masyarakat itu sudah mengandung beberapa kesalahan punctuation.

Indonesia Bolehkah Aku Bertanya
Kemana Perginya Hutan & Satwa Mu?

Perhatikan bahwa penggunaan ejaan dan tanda baca dalam iklan kopi sangat diperhatikan. Kata-kata seru dan fatis diletakkan di antara tanda koma. Penggunaan kata fatis *Iho* pada moto ditulis dengan huruf miring. Sebaliknya, dalam tajuk iklan layanan masyarakat di atas, kita akan menemukan dua kesalahan punctuation dan tiga kesalahan ejaan. Penggunaan *Mu* dalam iklan itu salah karena hanya klitik *mu-* yang merujuk kepada Tuhan sajalah yang dieja dengan huruf besar. Kata *dan* dalam iklan tersebut sebaiknya tidak diwakili oleh lambang &. Lagipula, tidak ada alasan untuk menggunakan lambang itu, karena ruang untuk mengeja kata *dan* cukup luas. Perbaikan bagi tajuk iklan tersebut adalah sebagai berikut.

Indonesia, Bolehkah Aku Bertanya:
"Ke mana Perginya Hutan dan Satwamu?"

b. Kesalahan Tata Bahasa dan Pilihan Kata

Mari kita perhatikan iklan KIA berikut ini (lampiran 4). Iklan ini disusun dalam bentuk badan iklan (*bodycopy*) yang panjang. Di samping kesalahan punctuation dan ejaan, iklan ini mengandung beberapa kesalahan pilihan kata dan kesalahan tata bahasa. Mari kita lihat kalimat-kalimat yang mengandung kesalahan.

Kalimat pertama yang mengandung kesalahan adalah *Kebutuhan air bersih dengan cepat meningkat terus sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk bumi, padahal cadangan air bersih kian hari kian menipis*. Kesalahan terletak pada penggunaan frasa *dengan cepat*. Frasa keterangan yang didahului oleh preposisi *dengan* menerangkan cara sebuah verba dilaksanakan atau alat yang digunakan untuk melakukan verba. Keterangan yang diawali oleh preposisi *dengan* tidak pernah mengikuti sebuah nomina kecuali jika keterangan itu merupakan keterangan penyerta (contoh: *Foto yang diterima hanya foto yang menggambarkan seorang bayi dengan ibunya*). Sebaiknya, bagian kalimat itu diperbaiki menjadi "*Kebutuhan yang tinggi (atau yang cepat) akan air bersih ...*".

Kalimat kedua adalah *Alangkah baiknya bila penghematan air mulai diterapkan dalam keluarga Anda sendiri*. Dalam kalimat tersebut ada dua kesalahan bahasa, yakni kekurangan penguasaan dan kesalahan penggunaan kata. Setelah frasa *alangkah baiknya* seharusnya ada tanda baca koma. Kata *bila* digunakan secara salah dalam kalimat tersebut. Kata *bila* merupakan interogativa yang menanyakan waktu. Kalimat yang sedang dibahas ini, merupakan kalimat yang mengandung persyaratan. Dalam hal ini, konjungsi yang seharusnya digunakan adalah konjungsi yang menyatakan syarat, seperti *apabila, jika, atau jikalau*. Konjungsi *apabila* dan *jikalau* mungkin terlalu panjang untuk laras iklan, maka konjungsi yang tepat dan sesuai bagi laras iklan adalah konjungsi *jika*.

Kalimat ketiga yang mengandung kesalahan adalah *Bayangkan, dari satu keluarga dengan anggota 4 orang dan memiliki 1 kamar mandi maka setiap tahunnya bisa dihemat air sebanyak 20 ribu hingga 25 ribu liter*. Logika kalimat ini kacau karena penggunaan konjungsi *dan* serta konjungsi *maka* yang salah. Konjungsi *dan* seharusnya menghubungkan dua bagian kalimat yang koordinatif dan paralel sifatnya, sedangkan dalam kalimat ini tidak jelas bagian kalimat yang dihubungkan dengan kata *dan* itu. Konjungsi *maka* adalah konjungsi yang menyatakan akibat. Dalam kalimat itu, tidak jelas bagian kalimat yang berlaku sebagai sebab. Kalimat itu dapat diperbaiki menjadi *Bayangkan, setiap tahunnya, sebuah keluarga, yang terdiri atas 4 orang dan memiliki 1 kamar mandi, dapat menghemat 20 ribu hingga 25 ribu liter air*. Kalimat menjadi lebih jelas dan jumlah kata yang dikandung dalam kalimat perbaikan lebih sedikit.

Kalimat berikutnya yang mengandung kesalahan adalah *Sedangkan untuk hotel dengan 300 kamar, penghematan air akan mencapai 2 juta liter per tahun, bila menggunakan kloset 6 liter*. Konjungsi *sedangkan* tidak boleh diletakkan di awal kalimat. Penggunaan konjungsi *bila* dalam kalimat ini juga salah, seperti telah diuraikan di atas. Selain itu, hubungan persyaratannya tidak jelas. Dengan menghilangkan preposisi *untuk* kita dapat memperbaiki kalimat tersebut menjadi *Hotel dengan 300 kamar akan menghemat 2 juta liter air per tahun jika menggunakan kloset 6 liter*. Sekali lagi kalimat yang jelas dengan jumlah kata yang lebih sedikit daripada kalimat sebelumnya.

Dalam iklan bedak bayi (lampiran 5), kita lihat ada kesalahan berbahasa pada tajuk iklan. *Baru. Bedak Pigeon dengan Jojoba Agar Bayi Terhindar Siksa Lecet*. Kalimat ini kekurangan preposisi. Seharusnya berbunyi *Baru. Bedak Pigeon dengan*

Jojoba Agar Bayi Terhindar dari Siksa(an) Lecet. Tidak ada alasan untuk menghilangkan preposisi dalam kalimat tersebut karena ada banyak sisa tempat dalam iklan tersebut.

c. Pemenggalan Jeda dalam Kalimat

Seperti terlihat dalam iklan layanan masyarakat gemar membaca (lampiran 6) iklan ini dipasang dalam majalah *Bobo*. Itu berarti bahwa pembaca iklan ini adalah anak-anak yang duduk di sekolah dasar. Pemenggalan-pemenggalan kalimat dalam iklan ini akan menyebabkan anak memperoleh pengertian yang salah mengenai pesan yang ingin disampaikan melalui iklan itu. Jika kita melihat bentuk iklan itu, secara teliti sebenarnya pemenggalan itu masih dapat diatur lebih lanjut sehingga iklan itu menjadi seperti terlihat di lampiran 6. Rasanya, pemenggalan seperti itu terjadi bukan dengan sengaja, tetapi lebih banyak berdasarkan ketidaktahuan penulis iklan akan kaidah frasa, pengelompokan frasa yang membentuk subjek, predikat, dan seterusnya. Ketidaktahuan inilah yang harus kita atasi bersama.

4. Penggunaan Bahasa dalam Iklan Media Elektronik

Pada dasarnya, permasalahan dalam penggunaan bahasa yang dicakup dalam iklan radio dan televisi tidak jauh berbeda dari permasalahan yang diuraikan di atas. Akan tetapi, tentunya, ejaan dan pengtuasi tidak relevan untuk dibahas dalam kedua jenis iklan ini. Masalah yang dapat dibahas sehubungan dengan jenis iklan ini adalah pelafalan. Misalnya perbedaan pelafalan antara /ide/ dengan /idd/; antara /peka/ dan /pɔka/ dan sebagainya. Pembuat iklan harus memperhatikan pelafalan narator iklan agar pesan dapat sampai dengan jelas⁷⁾. Perhatikan letak jeda dalam kalimat. Perhatikan pula penekanan dalam kalimat. Ujaran harus jelas, jangan menggumam. Angka, simbol, singkatan atau akronim harus dieja dan dilafalkan dengan baik.

Selain masalah pelafalan, kita juga perlu memperhatikan masalah intonasi. Sebenarnya, intonasi dapat mewakili suasana hati pembicara. Jadi, perlu kita perhatikan intonasi yang menyatakan keheranan, ketakutan, kegembiraan, kesedihan, atau keprihatinan. Iklan radio mengenai produk-produk Unilever menggunakan intonasi yang baik sekali. Kita dapat membayangkan suasana tertentu melalui suara tokoh-tokoh dalam iklan, seperti kelompok kecoa yang terpaksa pindah karena obat pel VIM BIRU. Kita juga dapat menangkap nada keprihatinan seorang bos yang membicarakan penurunan keuntungan perusahaan dalam iklan Telepon Ratelindo.

Sebaiknya, sedapat mungkin, kita berusaha agar dalam iklan radio atau televisi penggunaan kata-kata yang kasar, seperti *berengsek*, *sialan*, dihindari. Masalahnya, kata-kata tersebut sangat mudah melekat di benak anak-anak hingga mereka akan terbawa berbahasa kasar. Hal yang juga perlu dihindari adalah penggunaan kata-kata yang terlalu menjurus atau yang dapat menimbulkan asosiasi tertentu, seperti *Ini kancangku* yang dibawakan oleh suara wanita atau *Pas susunya* yang dibawakan oleh suara pria. Memang, sering kita dijawab dengan bantahan bahwa penulis iklan tidak bertanggung jawab atas asosiasi yang timbul di benak khalayak sasaran sebagai akibat dari bahasa yang digunakan dalam iklan. Lebih jauh lagi, penulis iklan akan menga-

takan bahwa inilah kreativitas dalam penulisan iklan. Akan tetapi, jika kita kaji lebih jauh, justru, kreativitas yang membangkitkan asosiasi yang dangkal bukanlah kreativitas dalam arti yang sebenar-benarnya. Iklan juga tidak boleh sampai menjadi vulgar atau terjerumus menjadi iklan murahan. Perhatikan pula bahwa iklan-iklan yang memperoleh hadiah Adiprima Citra Pariwisata, bukanlah iklan-iklan yang bergaya asosiatif seperti itu. Kreativitas yang dituntut adalah kreativitas yang menggugah imajinasi secara positif dan yang menggelitik intelektualitas seseorang. Kita tidak boleh melupakan bahwa sebuah iklan merupakan sebuah bentuk penyajian fakta yang bersifat logis.

Dalam buku-buku petunjuk penulisan iklan yang ditulis oleh Schwab (1962) dan Lewis (1988) dikatakan bahwa di balik semua permainan kata, jangan lupa untuk menyajikan fakta yang dirangkai secara logis dan menarik kepada sasaran iklan. Iklan yang dangkal tidak akan menarik minat beli khalayak sasaran. Mungkin saja khalayak sasaran ingat terhadap iklan sebuah produk, tetapi mereka tidak tertarik untuk membeli produknya.

5. Dampak Iklan terhadap Perilaku Berbahasa Masyarakat

Sebuah strategi periklanan (Kleppner, 1972), selain bertujuan untuk menjual sebuah produk atau suatu gagasan, bertujuan untuk membangun atau membina kesadaran (*awareness*) masyarakat atas produk atau gagasan tertentu. Oleh karena itu, sebuah iklan akan ditayangkan berkali-kali, baik secara cetak di media cetak maupun secara audio-visual di media elektronik. Khalayak sasaran: tua muda, besar kecil, akan terdedah oleh iklan itu terus-menerus, berkali-kali dalam satu hari.

Proses pendedahan atau penubian seperti itu menyebabkan iklan sebuah produk atau gagasan dapat menetap dalam benak khalayak sasaran. Dengan sendirinya, proses tersebut akan mempengaruhi perilaku berbahasa masyarakat. Iklan menjadi sarana termudah bagi seseorang untuk memperluas kognisinya. Orang dapat menambah pengetahuannya dengan membaca iklan. Misalnya, pada iklan bedak bayi (lampiran 5), kita bertemu dengan istilah *Jojoba*. Apakah itu *jojoba*? Orang yang belum tahu arti *jojoba* dapat mempelajari arti kata itu dari badan iklannya *Jojoba adalah bahan alami semacam lilin cair yang efektif menjaga kelembaban kulit serta memiliki sifat pelumasan dan juga dapat melindungi kulit dari lecet akibat gesekan*. Informasi seperti ini akan memperkaya khazanah pengetahuan khalayak sasaran dan akan membentuk pula gaya berbicaranya.

Penggunaan tanda baca dan ejaan yang tepat dan teliti sangat penting untuk iklan, terutama dalam penulisan tajuk iklan. Kepentingan itu tidak hanya terbatas pada kebutuhan produsen agar pesan sampai dengan baik atau agar citra yang baik terhadap produk terbentuk di benak khalayak sasaran, melainkan, lebih jauh lagi, berkaitan dengan proses pendidikan anak-anak di bangku taman kanak-kanak dan sekolah dasar. Setiap anak dalam proses belajar membaca akan tertarik pada tulisan yang besar dan jelas. Ia akan menguji kemampuannya membaca dengan menggunakan tajuk iklan sebagai bahan ujinya. Penggunaan tanda baca yang cermat dalam iklan akan membentuk kebiasaan berdisiplin dalam menulis. Ketepatan tanda baca akan melatih anak untuk membaca dengan baik, menangkap informasi dengan baik. Jika tidak ada orang tua

yang mendampingi anak membaca, ia akan melakukan rujuk silang dengan iklan yang didengarnya dan dilihatnya di radio dan televisi. Dengan demikian, jelas tergambar keterkaitan antara sebuah strategi periklanan dengan perkembangan khazanah pengetahuan khalayak sasaran, terutama anak kecil.

Tidak ada rambu-rambu yang menuntut kita untuk menulis iklan dengan baik. Tidak ada sangsi yang dijatuhkan jika kita tidak memperhatikan penggunaan tanda baca dan ejaan. Hanya kesadaran dan rasa tanggung jawab kitalah yang akan membimbing kita untuk menulis sebuah iklan dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa yang baik akan membentuk perilaku berbahasa yang baik pula. Seberapa seringkah kita mendengar anak-anak kita menjawab kita dengan "Iya, ya" seperti pelafalan yang terdapat dalam sebuah iklan obat atau "wes-ewes-ewes, bablas anginne"?

6. Strategi dan Upaya dalam Mengembangkan Bahasa Laras Iklan

- a. Langkah-langkah yang diambil dalam penyusunan strategi sebaiknya melibatkan praktisi periklanan, pemerhati bahasa, atau kaum akademisi.
- b. Perlu dilaksanakan suatu penelitian yang tidak hanya akan menghasilkan suatu deskripsi mengenai bahasa iklan, melainkan lebih jauh lagi akan dapat memberikan gambaran mengenai bangun iklan dan bahasa yang terkait di dalamnya.
- c. Para calon peneliti harus memperoleh masukan terlebih dahulu mengenai prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang ada dalam dunia periklanan. Mereka harus mempelajari tata cara dan prosedur pembuatan sebuah iklan, baik iklan cetak maupun iklan media elektronik. Peneliti harus mengetahui terlebih dahulu berbagai format iklan dan keterkaitannya dengan penggunaan bahasa.
- d. Para peneliti kemudian melakukan abstraksi atas analisis yang telah mereka lakukan sehingga, setidaknya, kita memperoleh penanda atau ciri-ciri laras iklan.
- e. Para praktisi periklanan sebaiknya juga membaca buku-buku yang menjelaskan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Langkah berikutnya mencari bentuk bahasa yang dapat dijadikan pedoman dalam penulisan iklan.
- f. Langkah yang perlu dipikirkan adalah penyusunan kurikulum yang baku bagi sekolah atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan periklanan. Di dalam kurikulum tersebut pengajaran bahasa Indonesia perlu mendapatkan porsi yang banyak dan dipentingkan. Sebaiknya, dipikirkan kurikulum yang langsung menjurus kepada kegiatan pengajaran penulisan iklan yang kreatif dan baik.
- g. Perluasan pengetahuan di kedua belah pihak perlu dilakukan. Pihak pemerhati bahasa harus jeli dan waspada terhadap perkembangan bahasa yang terjadi dalam laras iklan, sedangkan pihak praktisi iklan harus memperdalam pengetahuan mereka mengenai bahasa Indonesia agar mereka menjadi terampil dalam menggunakan bahasa sesuai dengan kebutuhan mereka.

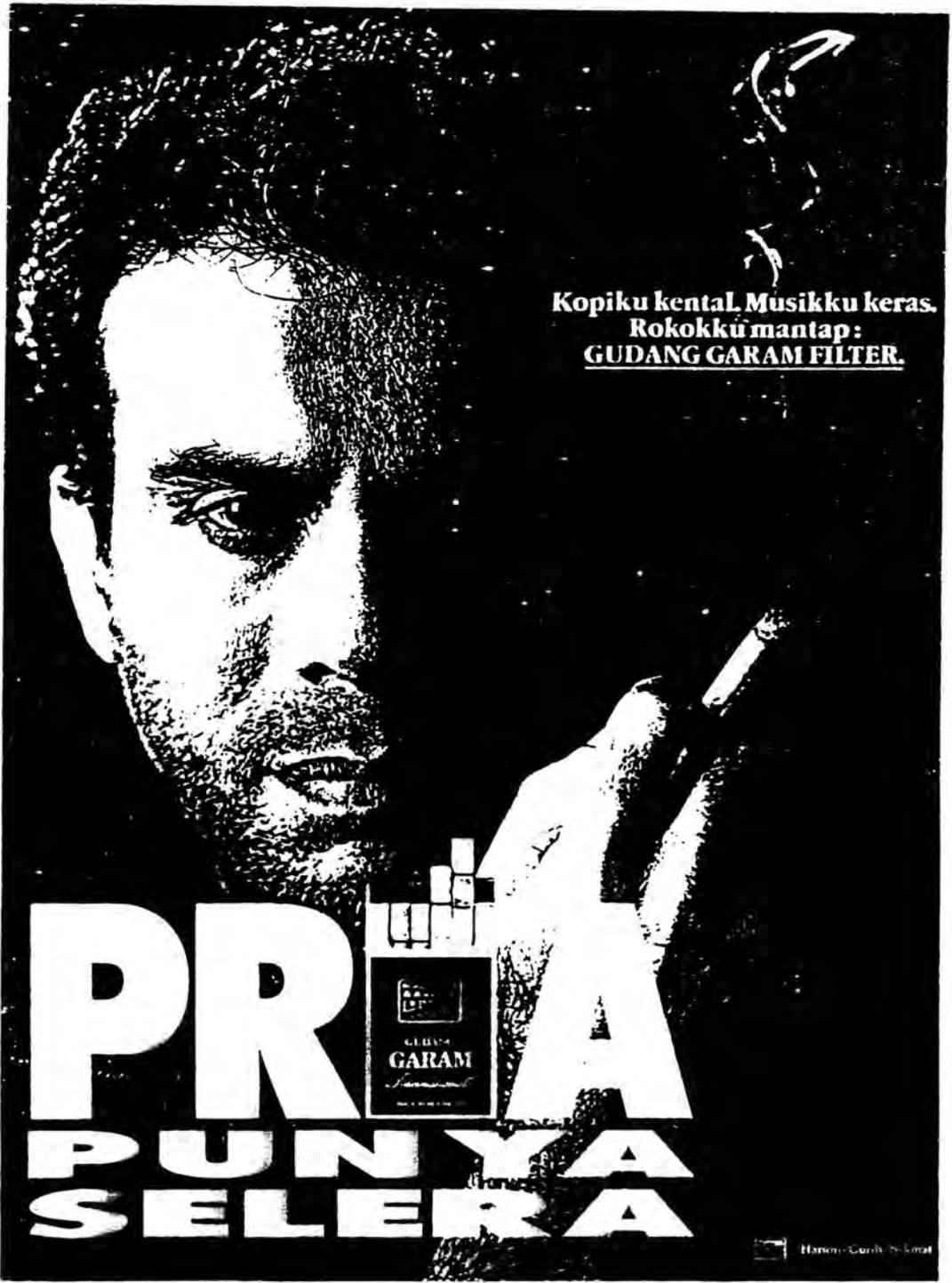
Catatan:

1. Felicia N. Utorodewo (1981), Indra Julfiansyah (1992), Nurul Fathia (1991).
2. Otto Kleppner, *Advertising Procedure*, New Jersey: Prentice-hall, inc., hlm. 23

3. Guy Cook, *The Discourse of Advertising*, London dan New York: Routledge, 1992, hlm. 1
4. Rhenald Kasali, *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Jakarta: Grafiti, 1992, hlm. 81-82.
5. "Bahasa dalam Iklan sebagai Perwujudan Transformasi Budaya" dalam *Transformasi Budaya seperti Tercermin dalam Perkembangan Bahasa-bahasa di Indonesia*, peny. Muhadjir dkk., Jakarta: Fakultas Sastra UI, 1992, hlm. 1-23.
6. *Cakram*, Majalah Periklanan, Kehumasan, dan Komunikasi Bisnis, Oktober 1998.
7. Herschell Gordon Lewis, *On The Art of Writing Copy*, New Jersey: Prentice-Hall, hlm. 405.

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan, dkk. 1993. *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Arifin, E. Zaenal, Zulkarnain, dan Jumariam. 1992. *Pemakaian Bahasa dalam Iklan Berita dan Papan Reklame*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Cakram*. Majalah Periklanan, Kehumasan, dan Komunikasi Bisnis, Oktober 1998.
- Cook, Guy. 1992. *The Discourse of Advertising*. London dan New York: Routledge.
- Crompton, Alastair. 1979. *The Craft of Copywriting*. Communica-Europa: Business Books.
- Djulfiansyah, Indra. 1992. "Fungsi Ekspresif Bahasa Tajuk Iklan". Skripsi Sarjana di Fakultas Sastra UI, Depok.
- Fathia, Nurul. 1993. "Slogan Bank: Sebuah Analisis Struktural dan Sociolinguistik". Skripsi Sarjana di Fakultas Sastra UI, Depok.
- Kasali, Rhenald. 1992. *Manajemen Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Kleppner, Otto. 1979. *Advertising Procedure*. New Jersey: Prentice-Hall Inc.
- Kridalaksana, Harimurti. 1994. *Kelas Kata dalam Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lewis, Herschell Gordon. 1988. *On The Art of Writing Copy*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Muhadjir dkk. (Peny.) 1992. *Transformasi Budaya Seperti Tercermin dalam Perkembangan Bahasa-bahasa di Indonesia*. Depok: Fakultas Sastra UI.
- Schwab, Victor O. 1962. *How to Write A Good Advertisement*. California: Wilshire Book Company.
- Utorodewo, Felicia N. 1981. "Intonasi Iklan Radio". Skripsi Sarjana di Fakultas Sastra UI, Depok.



**Kopiku kental. Musikku keras.
Rokokku mantap:
GUDANG GARAM FILTER.**

PRAYA
PUNYA
SELERA

Hansen-Carlson & Co.



"Pelan-pelan?
Kita
'kan
belum
setua
itu,
Bo."

Tunggu? Hati-hati? Lebih pelan?
Aduh! Kayaknya lagi ngomong sama
generasi lain, deh! Soalnya, semua
sekarang sudah nggak begitu lagi.
Semua sudah cara Nescafé 3 in 1. Kopi,
krim, gula dalam satu sachet. Tinggal
tambah air hangat sip. Heboh, Bo.

NESCAFÉ

Kopi Kita Nescafé, Lho!

INDONESIA BOLEHKAH AKU BERTANYA, KEMANA PERGINYA HUTAN & SATWA MU?

Satu persatu mereka pergi...
terbang mencari rumah baru,
tempat yang nyaman
'tuk beranak cucu

Mereka memang harus pergi...
Sebab di sini tiada lagi
pohon rindang 'tuk berteduh
tempat bercanda berihuh niuh
Pohon dan hutan t'lah binasa
ulah tangan tak beradab

Satu persatu mereka pergi
membawa serta ceria pagi...
Dan satu persatu mereka
binasa tanpa daya...



**"Keluarga kami bisa hemat 25.000 liter air per tahun."
(Cepat atau lambat, setiap keluarga Anda pasti harus melakukannya.)**

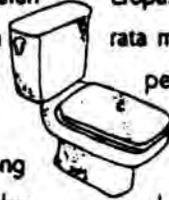


Hamilton

Air bersih yang tidak asin (fresh water) memang telah menjadi masalah serius. Kebutuhan air bersih dengan cepat meningkat terus sejalan dengan semakin bertambahnya penduduk bumi, padahal cadangan air bersih kian hari kian menipis.

Di dunia, setiap hari sekitar 25 ribu orang meninggal akibat penyakit yang disebabkan air tercemar dan setiap tahun ada 4 juta anak-anak meninggal akibat diare karena minum air tercemar (sumber: Kompas). Karenanya hemat air bersih adalah tindakan yang harus kita lakukan demi kelangsungan hidup kita sendiri dan keturunan kita.

Alangkah baiknya bila penghematan air mulai diterapkan dalam keluarga Anda sendiri. Salah satu caranya adalah melalui perangkat saniter yang Anda gunakan. Untuk saniter yang hemat air, American Standard



Concord



Aero

adalah kampiunnnya. Produk yang kami tampilkan di sini diakui keunggulannya, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa. Jika produk lain rata-rata memerlukan 10 liter air untuk sekali

pembilasan, toilet KIA Standard tipe Hamilton, Aero, Concord, Granada, Amora dan Primavera hanya memerlukan 6 liter air saja. Bayangkan, dari satu

keluarga dengan anggota 4 orang dan memiliki 1 kamar mandi maka setiap tahunnya bisa di hemat air sebanyak 20 ribu hingga 25 ribu liter. Sedangkan untuk hotel dengan 300 kamar, penghematan air akan mencapai 2 juta liter per tahun, bila menggunakan kloset 6 liter.

Suatu jumlah yang sangat besar.

Sebelum terlambat, ajaklah keluarga Anda berpartisipasi menyelamatkan lingkungan melalui efisiensi penggunaan air.



Aero



Primavera

**Kia
Standard**
LUXURY BY DESIGN®



Baru. Bedak Pigeon dengan Jojoba Agar Bayi Terhindar Siksa Lecet.

Pigeon memperkenalkan: Bedak Bayi dengan Jojoba. Jojoba adalah bahan alami semacam lilin cair. Efektif menjaga kelembaban kulit serta memiliki sifat pelumasan. Minyak jojoba dapat melindungi kulit dari lecet akibat gesekan. Minyak jojoba juga mampu mengikat partikel yang sangat halus, sehingga saat ditaburkan debu bedak tidak beterbangan, aman untuk pernafasan bayi.

Juga tersedia perawatan serius kulit bayi lainnya: *Baby Shampoo*, *Baby Cologne* dan *Baby Oil*.



Sahabat Pertama Bayi Terdekat

Selalu Kesehatan Better!

PIGEON 

Informasi dan pembelian hubungi Sales Pigeon dengan telepon 0471-6471637, Jakarta 10164.

KECIL GEMAR MEMBACA, DEWASA KIAN BIJAKSANA



Kegiatan membaca bila dilakukan sejak usia dini akan berkembang menjadi kebiasaan hingga dewasa.

Membaca tak hanya akan memperluas cakrawala ilmu dan pengetahuan, namun dapat mengasah nalar dan budi pekerti pula.

Membaca akan menghantar putra-putri kita ke gerbang kemajuan dan kearifan di masa depan.

Tanamkan kebiasaan membaca sejak dini pada putra-putri Anda. Pilihlah bacaan sehat untuk mereka.

Dusampaikan oleh
Persatuan Perusahaannya Periklanan Indonesia (PPPI)
bersama dengan Strategi Advertising dan Majalah
Bobo atau kalender parentingnya kegemaran membaca
sejak usia dini

LAPORAN SIDANG

Sidang	:	Kelompok B5
Hari, Tanggal, Pukul	:	Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	:	Iklan sebagai Media Pembinaan Bahasa Indonesia
Penyaji	:	Felicia Utorodewo
Pemandu	:	Sugiyono
Pencatat	:	a. Marida G. Siregar b. K. Biskoyo
Peserta	:	70 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Joko Pasandaran, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Jelaskan tentang perilaku masyarakat terhadap pemakaian bahasa iklan. Kini banyak iklan yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris (ada campuran ejaan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia). Bagaimana menurut pendapat Ibu?

b. Jawaban:

Sebenarnya bahasa iklan mengalami peningkatan sejak tahun 1988 karena sejak itu ada penghargaan untuk insan periklanan yang disebut *Citra Pariwara* dengan piala *Adicitra Pariwara*. Piala itu diberikan kepada biro periklanan yang menggunakan bahasa Indonesia dengan baik. Penilaian baik atau tidaknya bahasa iklan itu terletak pada tim juri. Akan tetapi, sampai sekarang masih ada iklan yang tidak baik bahasanya. Iklan itulah yang perlu diwaspadai karena dapat membentuk perilaku masyarakat. Biasanya yang tidak baik itulah yang melekat pada masyarakat.

2. Penanya: Ahmad Badrun, Universitas Mataram

a. Pertanyaan:

Apakah iklan itu merupakan karya seni atau bukan? Misalnya, iklan rokok Sampoerna *Bukan basa-basi* adalah suatu iklan yang kurang baik apabila dibandingkan dengan iklan *Dancow*.

b. Jawaban:

Saya berpendapat bahwa iklan adalah karya seni. Karya seni harus diikuti oleh kemampuan berkreasi, seperti iklan yang berbentuk puisi. Akan tetapi, jangan dipakai kebebasan seni itu untuk tempat berlindung sehingga mengacau-balaukan aturan dan norma bahasa. Misalnya, tulisan atau logo yang berbahasa asing harus dicetak miring, jangan ditulis biasa, atau jangan ditulis dengan huruf besar. Iklan Sampoerna, *Bukan basa-basi*, hanya mengikuti kesuksesan Marlboro.

3. Penanya: Supriyadi, Universitas Sriwijaya, Palembang**a. Pertanyaan:**

Seberapa jauh peranan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pembinaan bahasa iklan? Misalnya, iklan *macho* dan iklan pembalut wanita itu sangat memprihatinkan.

b. Jawaban:

Iklan adalah penyampaian dan bujukan yang persuasif dengan menggunakan bahasa yang logis. Iklan yang baik bukan iklan yang seperti itu, sensasi yang murahan dan gampang. Iklan yang baik adalah iklan yang menggugah khayal sehingga khalayak itu menjadi cerdas.

4. Penanya: Hobir Abdullah, IKIP Bandung**a. Pertanyaan:**

Apa saran atau strategi yang dapat diterapkan dalam penerjemahan iklan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Penerjemahan iklan harus melalui penerjemahan lengkap. Maksudnya, perlu ada pemahaman yang utuh. Unsur budaya yang terkandung di dalam bahasa sasaran harus dikomunikasikan.

5. Penanya: Helen Michel, Konsultan Pengembangan Kurikulum**a. Pertanyaan:**

Apakah pelanggaran kaidah bahasa Indonesia dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu seperti iklan dalam bahasa Inggris?

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis).

III

Penciptaan, Pemahaman, dan Penghayatan Sastra

MUTU SASTRA KITA

Faruk

Universitas Gadjah Mada

1. Pendahuluan

Dalam beberapa kesempatan akhir-akhir ini saya sudah mengatakan bahwa karya sastra terutama sekali harus ditempatkan sebagai karya seni. Karena karya seni merupakan sebuah objek estetik, asas paling dasar dari segala yang estetis berlaku pula bagi karya sastra. Asas itu adalah bahwa segala sesuatu dapat dikatakan indah apabila dapat memberikan kenikmatan rasa (*sense*), mengikat diri orang pada partikularitas objek yang bersangkutan. Dalam hal yang kemudian inilah karya sastra terbedakan dari aneka objek yang membawa orang kepada segala yang universal, baik yang berupa berbagai tatanan yang bersifat kolektif maupun yang berupa pemahaman ilmiah.

2. Partikularitas Sastra

Konsep mengenai partikularitas karya sastra di atas mengimplikasikan banyak hal yang juga dipertautkan dengan karya itu. *Pertama*, bahasa karya sastra tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai aktualisasi yang sepenuhnya setia kepada sistem norma kebahasaan yang bersifat kolektif, universal, melainkan harus pula diperlakukan sebagai wacana yang berdiri sendiri, unik. Selain itu, bahasa karya itu pun tidak pula dapat dipahami hanya sebagai media dari suatu pesan-abstrak, melainkan juga sebagai sesuatu yang menuntut perhatian pada dirinya sendiri. Bahasa karya sastra tidak hanya menuntut pemahaman akan makna yang ada di baliknya, tetapi membangkitkan pengalaman konsumennya akan keterlibatan konsumsi itu dalam dirinya.

Kedua, partikularitas karya sastra di atas juga menyatakan dirinya pada bangunan dunia imajiner yang terkandung di dalamnya. Makna yang terkandung di dalam karya sastra tidak terutama membentuk pengertian abstrak, tetapi merangkai diri menjadi sebuah dunia pengalaman konkret, terdiri dari berbagai citra tubuh, baik perilaku, pikiran, perasaan, objek-objek alamiah maupun buatan, peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, dan sebagainya. Kenyataan demikian merupakan penegasan kembali bahwa di hadapan konsumennya karya sastra memang hadir untuk membawa manusia ke dalam situasi dan kondisi partikular "kini-di sini", bukan ke pengertian mengenai aturan-aturan atau hukum-hukum kehidupan yang universal, "kapan-di mana pun".

Di dalam dunia pengalaman yang partikular tersebut kehidupan menjadi heterogen, kompleks, tidak sepenuhnya takluk pada homogenitas dan simplisitas kehidupan sebagaimana yang dipahami oleh cara pandang kolektif atau universal. Bahasa pun menjadi sebuah komposisi suara ataupun gambar yang memikat, yang membangkitkan gairah sensasional. Bersamaan dengan itu, terbangun kemungkinan-kemungkinan makna baru yang juga lebih heterogen, kompleks, jika dibandingkan dengan kemungkinan-kemungkinan makna yang disediakan oleh sistem norma bahasa yang berlaku. Namun, konsep mengenai partikularitas di atas merupakan kondisi ideal dari karya sastra. Pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat dipisahkan dari yang universal ataupun kolektif.

Sebagai aktivitas dan hasil aktivitas kebahasaan, karya sastra selalu terikat pada sistem norma kebahasaan yang bersifat kolektif. Selain itu, ia tentu saja juga terikat pada muatan makna yang melekat pada setiap satuan bahasa atas dasar sistem norma yang bersifat kolektif tersebut. Oleh karena itu, dalam usahanya membangun kesan mengenai partikularitas bahasa karya sastra selalu terjaring dalam permainan semiotik dengan sistem norma yang universal di atas.

Kecenderungan yang sama berlaku pula bagi bangunan dunia kehidupan dalam karya sastra. Setiap manusia ditakdirkan untuk tidak akan pernah dapat menangkap substansi kehidupan dalam partikularitasnya yang paling murni. *Pertama*, ia selalu terikat pada ruang, pada posisi tertentu dalam ruang, yang membuatnya selalu menangkap kehidupan dari segi atau sudut pandang tertentu. *Kedua*, ia pun selalu terikat pada sebuah cara pandang tertentu terhadap kehidupan, sebuah cara pandang yang dihasilkan oleh lingkungan sosio-budaya yang bersifat kolektif tempatnya hidup. Dengan demikian, partikularitas dunia kehidupan dalam karya sastra juga selalu terjaring dalam permainan ideologis dengan cara pandang kolektif mengenai kehidupan.

Dalam dua jaring permainan di atas yang partikular dapat berubah menjadi yang universal, bahasa dan bangunan dunia karya sastra pada suatu ruang dan suatu waktu dapat menjadi dan terintegrasi dalam sistem norma bahasa dan cara pandang kolektif mengenai kehidupan pada suatu tempat dan suatu saat yang lain. Dalam situasi yang demikian menjadi tantangan bagi karya-karya sastra yang baru untuk menemukan dan menghadirkan kembali partikularitas, baik linguistik maupun ideologis. Mutu sebuah karya sastra akan amat ditentukan oleh sejauh mana karya itu mampu menyerap kembali pembaca atau pendengarnya ke dalam sebuah dunia pengalaman yang partikular itu.

Dalam pengertian yang sudah menyejarah, sastra Indonesia diawali dengan karya-karya yang dipahami sebagai sebuah penemuan kembali realitas yang tidak pernah dilihat oleh karya-karya sastra yang disebut tradisional. Apabila karya-karya sastra sebelumnya dikuasai oleh cerita mengenai raja-raja, kehidupan istana yang serba gemerlap, dan yang selalu sama dari satu karya ke karya yang lain, dalam bahasa yang penuh dengan ungkapan stereotipe, karya-karya awal sastra Indonesia mengajak pembacanya melihat kehidupan keseharian masyarakat dalam bahasa yang relatif lugas, prosaik. Apabila kehidupan luar-sastra terjaring dalam kerangka pemahaman kolektif, dalam apa yang disebut sebagai "adat-istiadat", kehidupan yang dihadirkan dalam karya sastra cenderung dibebaskan dari cara pandang kolektif tersebut.

Azab dan Sengsara, misalnya, menghadirkan kompleksitas kehidupan ketika kehidupan itu dipahami sebagai sesuatu yang tidak lagi dapat sepenuhnya dicakup oleh struktur linguistik, literer, dan ideologis yang berlaku sebelumnya. Lingkungan kehidupan pedesaan dan perkotaan beserta manusia-manusia yang hidup di dalamnya tidak dapat lagi diungkapkan dengan cara ekspresi tradisional sehingga bahasa yang digunakan cenderung menjadi prosaik, mendekati bahasa reportasi jurnalistik atau ilmu pengetahuan. Manusia-manusia yang hidup di dalamnya pun tidak lagi dapat didikte oleh oposisi antara yang kaya dan yang miskin, yang berbangsa dan yang tidak berbangsa, dan sebagainya. Bersamaan dengan itu, ditampilkan pula realitas kehidupan

partikular yang tidak dapat dibingkai hanya oleh sistem kodifikasi hukum formal masyarakat modern, oleh cara pandang masyarakat kota mengenai kehidupan, dengan menampilkan cara hidup masyarakat desa yang dianggap lebih lugu, jujur, alamiah, dan spontan. Namun, dalam konteks kolektivitas yang lebih luas, apa yang ditampilkan oleh karya-karya awal sastra Indonesia tersebut sebenarnya sudah terjaring ke dalam sistem kodifikasi bahasa, sastra, dan ideologis yang sudah baku, yang universal sehingga tidak lagi mampu secara intens membawa pembacanya kepada partikularitas kehidupan.

Pertama, kedekatan bahasanya dengan kehidupan keseharian kalah besar dibandingkan dengan kedekatan bahasa karya-karya sastra Peranakan Eropa dan Tionghoa yang terbit pada waktu yang justru relatif jauh sebelumnya. Bahasa karya-karya itu masih tergolong ke dalam "bahasa sastra" yang sudah terbakukan dan sekaligus merupakan hasil rekayasa akademik yang bekerja dengan asas-asas universalitas dan ketertiban penuturan dan makna. Berbeda halnya dengan bahasa karya-karya sastra sebelumnya yang lebih dekat dengan dinamika kehidupan, yang terbuka bagi berbagai kemungkinan penuturan dan pemaknaan, sesuatu yang dalam pengertian tertentu disebut sebagai bahasa yang "lebih hidup".

Kedua, citra-citra kehidupan yang tergambar di dalam karya-karya sastra Indonesia yang awal itu pun cenderung sudah terbakukan. Karya-karya itu banyak menimba bangunan citra-citranya dari khazanah tidak hanya karya-karya sastra Peranakan yang ada sebelumnya, melainkan juga karya-karya sastra modern Barat yang juga sudah terbakukan, yaitu karya-karya sastra modern Barat yang sudah tergolong klasik dan bahkan sudah menjadi sekedar "bacaan remaja" atau "bacaan anak-anak". Beberapa citra kehidupan dalam novel *Siti Nurbaya*, umpamanya, telah muncul dalam *Nyi Painan* dari tradisi sastra Peranakan yang terbit pada tahun 1900, *Putri Salju* yang sudah menjadi bacaan anak-anak di seluruh dunia, *Gembala Domba* yang sekedar menjadi bacaan remaja di Belanda, dan *Monte Cristo* yang menjadi karya sastra populer dunia dan menjadi karya terjemahan yang sudah populer di Indonesia sejak akhir abad XIX.

Ketiga, cara pandang yang digunakan karya-karya sastra modern Indonesia yang awal itu pun bukanlah suatu cara pandang yang sepenuhnya baru, yang dapat membawa pembacanya ke dalam partikularitas dunia kehidupan. Cara pandang yang dominan di dalamnya adalah cara pandang romantik yang di dalam wacana sastra dan kebudayaan Barat telah muncul sejak pertengahan kedua abad XVIII. Dengan demikian, dalam konteks yang kolektivitas yang lebih luas itu, karya-karya sastra modern Indonesia yang awal di atas, dapat dipastikan ketinggalan selama satu abad.

Hal yang sama berlaku pula bagi karya-karya sastra, terutama puisi, yang muncul pada periode berikutnya, yaitu periode Pujangga Baru pada tahun 1930-an. Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum, puisi-puisi pada periode ini cenderung berpedoman pada cara ekspresi dan cara pandang Angkatan 80-an di Belanda mengenai kehidupan. Bahkan, pedoman itu pun sebenarnya tidak dipahami dan direalisasikan secara sempurna. Sebagian besar karya-karya puisi para penyair Pujangga Baru justru masih memperlihatkan keterikatannya yang teramat kuat pada pola-pola perpuisian

tradisional, terutama pantun dan syair. Oleh karena itu, ketika Chairil Anwar dapat menggunakan pedoman itu secara lebih baik, dia dapat mendekatkan diri pada bahasa yang lebih keseharian. Karya-karyanya tampak memberikan kesegaran, mampu menarik pembacanya ke dalam keterpikatan dengan dunia pengalaman, itu banyak bersumber pada karya-karya penyair Belanda dalam generasi yang sama pula. Artinya, dalam konteks yang lebih luas, Chairil Anwar pun dapat dikatakan ketinggalan meskipun dalam rentang waktu yang relatif pendek, lebih pendek dari sastrawan-sastrawan modern Indonesia yang hidup di masa sebelumnya. Dalam transisi antara sastrawan sebelumnya dengan Chairil Anwar ini terdapat *Belunggu* karya Armijn Pane yang ternyata amat dekat dengan *Madame Bovary* yang terbit di Prancis pada pertengahan abad XIX.

Kecenderungan serupa itu terjadi pula bahkan ketika para sastrawan Indonesia ingin melakukan gerak kembali kepada lingkungan hidupnya sendiri, pada berbagai kemungkinan wacana yang disediakan oleh tradisi, sebagai salah satu langkah untuk dapat menarik kembali perhatian pembaca pada partikularitas dunia kehidupan. Dendang-dendang pedesaan puisi Rendra ternyata memperlihatkan pertalian yang kuat dengan Lorca. Pada waktu Sutardji menyatakan dirinya untuk kembali pada mantera sebagai usaha pembebasan kata dari jajahan makna, dalam pernyataannya itu bergaung cara pandang kaum simbolik Prancis dan kaum futuris Rusia. Bahkan, dalam cara pengekspresianya, beberapa puisi Sutardji memperlihatkan pertalian yang eksplisit dengan Apollinaire.

Karena perkembangan yang pesat dalam teknologi informasi dan transportasi dunia akhir-akhir ini, para sastrawan Indonesia dapat lebih cepat menyerap berbagai cara pandang dan cara representasi mengenai kehidupan yang muncul di seluruh pelosok dunia, terutama Barat. Oleh karena itu, temuan-temuan cara representasi seperti penggunaan bahasa dalam karya-karya Amerika Latin, peleburan antara wacana sastra tinggi dengan sastra populer, sastra dengan politik, cara pandang mengenai kehidupan seperti postmodernisme, dalam waktu kurang lebih satu dekade saja, telah dapat diterima dan didiskusikan di Indonesia. Cerpen-cerpen Seno memperlihatkan kecenderungan demikian. Begitu pula puisi-puisi Afrizal Malna dan novel Ayu Utami. Semua itu, meskipun demikian, hanya menegaskan sekali lagi bahwa dalam konteks kolektivitas yang lebih luas, berbagai kebaruan dalam karya-karya sastra Indonesia tidak akan pernah berhasil membuat pembacanya terpukau ke dalam partikularitas dunia kehidupan karena cara pandang dan cara ekspresinya sudah terkodifikasikan sebelumnya.

Jika terpukau atau tersihir oleh karya-karya sastra di atas, pembaca sastra modern Indonesia terseret ke dalam dunia kehidupan yang ditampilkan di dalamnya. Maka, dibuat terjaring dalam keharusan untuk mempertimbangkan kembali cara pandang kolektifnya yang sudah terkodifikasikan mengenai kehidupan, mungkin sekali hal-hal tersebut terjadi akibat pembaca itu memang tergolong orang-orang yang latar belakang kulturalnya lebih "terbelakang" daripada para sastrawan pencipta karya-karya sastra itu. Dengan kata lain, perbincangan mengenai mutu sastra Indonesia tidak dapat ditempatkan semata-mata dalam konteks-konteks kolektivitas yang lebih luas di atas, tetapi juga dan bahkan terutama dalam konteks kolektivitas masyarakat dan kebudaya-

an Indonesia sendiri.

Para sastrawan Indonesia pada masa awal kelahirannya dapat dikatakan termasuk dalam sekelompok kecil anggota masyarakat Indonesia yang berhasil memperoleh pendidikan modern pada tingkat katakanlah menengah. Karena para pembaca karya-karya mereka, sebagaimana yang memang dimaksudkan dan dikerjakan oleh Balai Pustaka, adalah orang-orang yang berpendidikan lebih rendah, baik yang berada di lingkungan perkotaan maupun pedesaan, karya-karya yang dibuahkan oleh para sastrawan tersebut dapat memberikan cara pandang dan cara representasi baru mengenai kehidupan bagi pembacanya tersebut. Bagaimanapun, misalnya, para pembaca karya-karya itu tidak menguasai bahasa asing, terutama bahasa Belanda sehingga tidak dapat mengakses karya-karya sastra Barat yang menjadi pedoman karya-karya sastrawan di atas. Oleh karena itu, bagi mereka mungkin saja karya-karya itu menakjubkan, membawa ke sebuah partikularitas dunia pengalaman yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya karena pembatasan dari cara pandang dan cara representasi tradisional mereka mengenai kehidupan itu.

Kecenderungan yang sama berlaku bagi segala usaha dan hasil usaha pembaruan dalam cara pandang dan cara representasi kehidupan dari para sastrawan dalam masa-masa yang lebih kemudian. Puisi-puisi Chairil Anwar, Goenawan Mohamad, Sapardi Djoko Damono, dan Sutardji; cerpen-cerpen Umar Kayam, Budi Darma, Danarto, Putu Wijaya, dan Seno Gumirno Djidarma; novel-novel Mochtar Lubis, Iwan Simatupang, Budi Darma, dan Ayu Utami merupakan karya-karya yang benar-benar baru, menakjubkan, menawarkan cara pandang dan cara representasi baru mengenai kehidupan dalam konteks sebagian besar pembaca sastra Indonesia sendiri. Akan tetapi, dalam konteks kolektivitas yang lebih luas, sebutlah konteks dunia, karya-karya tersebut mungkin sekali tidak memberikan dampak apa pun karena telah menjadi cara pandang dan cara representasi kehidupan yang sebenarnya telah terkodifikasi. Ketika misalnya pembaca sastra modern Indonesia mulai dapat mengakses ke dalam sastra modern Barat yang menjadi pedoman dari karya-karya itu, dengan terlambat ia pun segera mengetahui bahwa apa yang disangkanya sebagai barang baru itu ternyata cuma barang basi.

Banyak bukti yang menunjukkan kecenderungan ke arah yang demikian. Di tahun 1950-an, misalnya, orang dengan terlambat baru mengetahui betapa karya-karya Hamka amat kuat terpengaruh oleh karya-karya pengarang romantik Prancis yang dibaca pengarangnya melalui bahasa Arab. Pada periode yang sama segera diketahui pula betapa banyak karya puisi Chairil Anwar yang ternyata tidak lebih dari sekedar terjemahan atau saduran puisi-puisi asing yang sudah muncul dalam waktu yang jauh sebelumnya. Baru di tahun 1980-an orang mulai mengetahui bahwa soneta Pujangga Baru sebenarnya bukan soneta sebagaimana yang terdapat dalam karya-karya sastra modern Barat. Pada masa yang sama diketahui pula bahwa ternyata novel *Atheis* memperlihatkan pengaruh yang mendalam tidak hanya dari *Max Havelaar* karya Mulatuli, melainkan *Ayah dan Anak* karya Turgenev. Begitu *Nyonya Bovary* diterjemahkan, segera diketahui betapa kuatnya pengaruh karya itu terhadap *Belenggu*. Bahwa kredo Sutardji yang menghebohkan itu telah pernah muncul di awal abad XX di Prancis dan

Rusia pun baru diketahui pada masa yang terlambat sekitar 20 tahun.

Kejelian seorang sastrawan dalam menemukan sumber-sumber asing yang efektif bagi pembaruan cara pandang dan cara representasi kehidupan merupakan sumbangan yang berharga tidak hanya bagi dinamika sastra Indonesia itu sendiri, melainkan bagi kematangan diri pembacanya dalam memahami dan mengalami kembali kehidupan. Meskipun demikian, cara-cara serupa itu dapat membuat karya-karya sastra modern Indonesia tidak mempunyai gaung yang berarti dalam konteks kolektivitas yang lebih luas, tidak memberikan cara pandang dan cara representasi baru mengenai kehidupan umat manusia. Selama ini, menurut kesan saya, penghargaan dunia terhadap sastra modern Indonesia cenderung orientalistis. Artinya, penghargaan itu lebih diarahkan untuk mengenal masyarakat dan kebudayaan Indonesia secara lebih baik, bukan untuk mengenal kehidupan umat manusia secara keseluruhan, termasuk kehidupan masyarakat dan kebudayaan Barat. Usaha menawarkan cara pandang dan cara representasi baru mengenai kehidupan dalam skala kolektivitas yang lebih luas itu tentu saja, tidak harus diartikan sebagai usaha membuat karya-karya sastra dengan latar dan tokoh-tokoh dunia.

3. Penutup

Tampaknya, sudah saatnya sastrawan Indonesia menempatkan dirinya tidak hanya dalam konteks masyarakat dan kebudayaan Indonesia, melainkan dalam konteks masyarakat dan kebudayaan dunia. Meskipun telah lama kita menyatakan diri sebagai "warga sastra dunia", kewargaan kita itu hendaknya tidak terkesan semata-mata sekadar sebagai "anak bawang" yang tidak menawarkan apapun kecuali mengulang apa yang sudah dikatakan orang. Keadaannya akan lebih parah apabila tentunya kita hanya bisa mengulang kembali apa yang orang-orang Indonesia sendiri ucapkan, apalagi mengulang kembali apa yang diucapkan oleh diri sendiri.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C1
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 13.30--14.20
Judul Makalah	: Mutu Karya Sastra
Penyaji	: Faruk H.T.
Pemandu	: Maidar Arsyad
Pencatat	: a. Nikmah Sunardjo b. Amran Purba
Peserta	: 165 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Subagio, Universitas Tarumanegara, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah sekarang sudah ada perubahan nilai dalam melihat mutu karya sastra, misalnya, dalam melihat karya Ayu Utami yang berjudul *Saman* yang banyak menggunakan kata-kata yang transparan yang membuat saya mual?
- 2) Apakah karya sastra itu harus terlepas dari nilai-nilai moral atau tidak?

b. Jawaban:

Sebelum menjawab, saya akan bertanya moralitas yang mana? Orang yang melanggar moral suatu komunitas itu bukan berarti dia tidak bermoral, tetapi berbeda pandangan moralnya. Hal itu berarti bahwa dalam melihat karya jangan menggunakan ukuran moral masyarakat di luar karya itu. Karya sastra bermutu apabila dapat membawa pembacanya kepada kehidupan, kesadaran akan kehidupan.

2. Penanya: Paris Kusnadi, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

- 1) Karena setiap orang mempunyai nilai rasa yang berbeda, seberapa jauh ukuran penilaian karya sastra yang Bapak terapkan?
- 2) Mutu karya sastra selama ini cukup baik. Siapa yang memproduksi karya sastra yang baik itu bagaimana pandangan Bapak?

b. Jawaban:

- 1) Memang ada relativisme kriteria dalam menilai karya sastra itu apabila kita melihat pada konteks kultural Indonesia. Jadi, kriteria itu terikat pada konteks kultural tertentu. Kita tidak melihat sudut pandang kriteria itu secara sepihak, tetapi kita melihat dari sejarah sastra Indonesia yang mempunyai komunitas karya sastra Indonesia: bahwa sastra Indonesia mempunyai satu komunitas yang membaca, yang menilai, yang menulis atau membaca kembali, dan sebagainya. Komunitas itu mempunyai nilai-nilai yang sama dan terbagi bersama yang dilakukan oleh para kritikus, peneliti, sarjana sastra,

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang mempunyai respons yang sama terhadap karya sastra tertentu. Kalau ada kelompok sosial yang berbeda tentu melahirkan komunitas yang akan memberikan respons yang berbeda pula.

3. **Penanya:** Ahmad Badrun, Universitas Mataram

a. **Pertanyaan:**

Pengalaman yang dihasilkan proses membaca itu sangat pribadi. Dari sudut mana Anda melihat hal itu? Dari golongan pembaca mana yang menimbulkan proses pengalaman berbeda-beda? Oleh karena itu, kriteria itu harus dilihat sudut pandangnya masing-masing karena pandangan akademikus akan berbeda dengan pandangan awam. Mohon Anda jelaskan hal itu?

b. **Jawaban:**

Kita bukan melihat sudut pandang kriteria itu, melainkan melihat dari sejarah sastra Indonesia. Bahwa sastra Indonesia mempunyai satu komunitas yang membaca, yang menilai, yang membaca/menilai kembali, dan sebagainya yang dilakukan oleh para kritikus, peneliti, dan Pusat Pengembangan Bahasa Bahasa yang mempunyai respons yang sama terhadap karya sastra tertentu yang mungkin mempunyai apresiasi sastra. Itulah yang disebut komunitas sastra Indonesia. Kalau kita berbicara tentang komunitas sastra Indonesia, hal itu tidaklah bersifat pribadi. Setiap kelompok yang berbeda latar belakang kultural dan ideologisnya akan memberikan respons yang berbeda. Jadi, efek kemampuan suatu karya sastra menciptakan pengalaman bagi suatu kelompok yang berbeda dengan kelompok yang lain. Misalnya, berkaitan dengan karya Ayu Utami ada kelompok yang mempunyai pengalaman yang berbeda dari kelompok yang lain dalam membacanya.

4. **Penanya:** Wan Saifuddin, Universitas Sumatera Utara, Medan

a. **Pertanyaan:**

Sejauh mana relevansi kriteria itu dengan karya-karya yang muncul dari daerah karena semua karya sastra Indonesia berangkat dari karya sastra lokal yang berakar pada sastra etnis?

b. **Jawaban:**

Satu hal yang bisa mengaitkan kriteria dengan sastra lokal itu ialah sastra "tradisional". Bisa dikatakan kebiasaan mengungkapkan hal-hal yang tidak terbiasa adalah yang terbaik dan bukan pelanggaran. Sastra tradisi berbicara dengan contoh adalah sesuatu yang konkret. Misalnya, pada masyarakat lisan seperti dalam bahasa Jawa *ngelmu iki ngelakoni kanthi laku*. Artinya, ilmu itu didapatkan berkat mengalami, misalnya pemain ketoprak. Kalau kita ingin mengetahui kehidupan ketoprak, kita harus mau menjadi pemain ketoprak. Hal itu merupakan tuntutan budaya tradisi lisan.

5. **Penanya:** Putu Wijaya, Dewan Kesenian Jakarta

b. Pertanyaan:

- 1) Ukuran-ukuran yang dikemukakan adalah ukuran yang bagus, tetapi ukuran itu tidak bertentangan dengan tradisi. Tradisi sastra Bali sangat kasar dan bebas, misalnya, untuk menyebut *klentit* atau *kontol* (kemaluan wanita dan laki-laki), tetapi orang yang baru mempunyai ukuran lain. Selain itu, tradisi itu apa? Menurut tradisi lama, hal-hal seperti itu biasa.
- 2) Sebetulnya sastra kita melihat pengalaman baru, dalam karya sastra itu belum tentu benar. Misalnya, Sutardji Chalzoum Bachri yang mempunyai mantra belum tentu mencontek ke Barat. Relevansi kritikus itu banyak ke Barat sehingga referensi-referensi kritikus kita harus beralih kepada Indonesia, seperti Jawa dan Minang. Buatlah referensi-referensi Indonesia. Jangan sampai Barat mencuri dari kita.

b. Jawaban:

Saya menilai karya sastra tidak dari Barat, tetapi dari Indonesia sehingga saya tidak terkecoh oleh pengarang. Saya merasa kritikus itu referensinya kurang Barat. Tidaklah menjadi soal apakah karya sastra Indonesia itu mengacu pada Barat; yang penting apakah karya sastra itu membawa pembaca kepada pengalaman yang baru. Masalahnya kita hanya membaca referensi-referensi Barat karena yang dianut para sastrawan itu akrab dengan Barat. Akan tetapi, kritikus itu kurang membaca referensi-referensi Barat. Misalnya, Sutardji Chalzoum Bachri dalam "Membebaskan Sastra dari Kata-Kata". Bagaimana kita menempatkan karya sastra kita dalam dunia global sehingga karya sastra Indonesia menyumbang cara baru dalam karya sastra dunia atau orientalis ingin melihat orang Indonesia dalam karya sastra Indonesia.

6. **Penanya:** Fachruddin Ambo Enre, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Karya sastra banyak menyimpang dari kriteria sehari-hari sehingga banyak kemungkinan penilaian dan penyajiannya. Gabungan antara isi dan bentuk dapat dinilai secara keseluruhan, baik dari segi pembaca maupun pangarangnya. Bagaimana dalam pembinaan karya sastra yang menimbulkan komunitas sastra?

b. Jawaban:

Cara pandang dunia, termasuk isi, dapat dilihat dalam popularitas. Saya tidak mengatakan bahwa yang tidak bermoral berarti bermoral, tetapi setiap karya sastra itu mempunyai pasangan yang berlawanan atau berada dalam keberpihakan. Jika kita berbicara tentang moralitas Indonesia, seperti kata Putu Wijaya, karya sastra *Saman* itu sangat bermoral dari karya sastra Indonesia sejak dahulu.

Budi Darma
FPBS IKIP Surabaya

1. Kopral Jono dan Sersan Mayor

Pada awal tahun 1950-an ada sebuah lagu terkenal, *Kopral Jono*, mungkin ciptaan Ismail Marzuki. Mungkin lagu ini mulai terkenal pada akhir tahun 1940-an, dan terus terkenal, atau mungkin menjadi terkenal lagi, pada awal tahun 1950-an. Penyanyi lagu ini adalah Kak Nien, seorang penyanyi terkenal pada tahun 1950-an, sebelum akhirnya kawin dengan Jack Lesmana, salah seorang pemula musik jazz di Indonesia. Setelah tahun 1950-an berlalu, *Kopral Jono* masih sering disiarkan oleh sekian banyak pemancar radio, khususnya RRI. *Kopral Jono* paling tepat dinyanyikan oleh wanita karena lirik lagu ini mengungkapkan kekaguman seorang wanita terhadap seorang tentara berpangkat kopral.

Kopral Jono bukan satu-satunya lagu mengenai kekaguman seorang wanita terhadap seorang tentara. Ada lagi lagu lain, *Sersan Mayorku*, ciptaan Ismail Marzuki, mengenai kekaguman seorang wanita terhadap seorang tentara Angkatan Udara tanpa nama, berpangkat sersan mayor. Kegagahan dan ketampanan sersan mayor ini benar-benar memukau apalagi dia memakai topi miring. Pada tahun 1970-an lagu ini menjadi terkenal kembali melalui kelompok *Pretty Sisters*. Kadang-kadang, sampai sekarang, *Sersan Mayorku* masih disiarkan oleh sekian banyak stasiun radio, antara lain, Radio Nederland di Hilversum, Seksi Indonesia.

Baik *Kopral Jono* maupun *Sersan Mayorku* mungkin menjadi terkenal, antara lain, karena kadar nasionalisme kita pada waktu itu tinggi. Ismail Marzuki menciptakan sekian banyak lagu pada saat revolusi sedang berjalan dan revolusi itu memang tidak lepas dari peran rakyat dan tentara. Maka, pada waktu itu, tentara menjadi idaman.

Kalau memang tentara menjadi idaman, lalu, tentara dari lapisan mana? Dari lapisan bintang, yaitu kopral dan sersan mayor, dua pangkat yang sebetulnya, untuk ukuran sekarang, sama sekali tidak tinggi. Akan tetapi, pada waktu itu, memang, tentara berpangkat tinggi benar-benar amat jarang sekali. Untuk ukuran pada waktu itu, pada umumnya, kopral dan sersan mayor memang pangkat yang benar-benar hebat. Maka, kekaguman terhadap kopral dan sersan mayor, pada waktu itu, benar-benar masuk akal.

Sejak tahun 1970-an, sementara itu, jumlah perwira makin banyak. Lepas dari perkembangan politik yang menyebabkan tentara ikut tampil dalam berbagai segi pemerintahan, sejak tahun 1980-an, hampir setiap hari, kita membaca di koran mengenai jenderal, dan jumlahnya bukan main banyak. Kopral dan sersan mayor, dengan demikian, kehilangan makna.

Meski tentara dan sarjana berbeda, sementara itu, keduanya mempunyai kesamaan. Sampai dengan awal tahun 1970-an, jumlah sarjana masih sangat kecil. Oleh karena itu, pada tahun 1950-an, masih ada suami-isteri muda yang tanpa lelah berdoa agar

anak laki-laki mereka kelak menjadi mahasiswa. Harap ingat, menjadi mahasiswa bukan menjadi sarjana. Menjadi mahasiswa tanpa menjadi sarjana, bagi mereka, sudah cukup memberi kepuasan dan kebanggaan. Untuk ukuran waktu itu, doa dan harapan mereka memang tidak mengherankan.

Dalam dunia mahasiswa wanita, sementara itu, sampai dengan awal tahun 1970-an masih berlaku *pameo* terkenal, yaitu menjadi mahasiswa tidak untuk menjadi *to be*, tetapi *to get*. Menjadi mahasiswa tidak perlu lulus menjadi sarjana, pokoknya mendapat jodoh sesama mahasiswa. Untunglah kalau jodoh ini di kelak kemudian hari menjadi sarjana.

Hukum alam, mau tidak mau, berlaku juga pada idealisme. Kalau jenderal sudah banyak, tentu saja kopral dan sersan mayor tidak diidealkan. Demikian pula, kalau sarjana sudah banyak, mengapa cukup puas hanya menjadi mahasiswa tanpa menjadi sarjana? Dan, sejak tahun 1990-an, sementara itu, ada anggapan bagi beberapa pihak, bahwa gelar sarjana hanyalah sebuah terminal. Bagi beberapa pihak, harus ada kelanjutan dari sebuah terminal, yaitu gelar doktor.

Kopral, sersan mayor, sarjana, dan lain-lain tidak lain adalah standar idealisme. Sesuai dengan perkembangan zaman, standar idealisme dapat berubah. Perubahan terjadi, antara lain, karena kesadaran kita lebih terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru

2. Sastra: Tidak Otonom

Kita tahu, sementara itu, bahwa sastra sama sekali tidak monolitik, dan sastra sama sekali tidak otonom. Aliran-aliran atau gagasan-gagasan penting dalam sastra, misalnya, lahir bukan karena sastra sendiri, tetapi karena perubahan-perubahan berbagai aspek kehidupan di luar sastra. Sulit bagi kita untuk membayangkan, misalnya, bagaimana romantisme dalam sastra bisa lahir seandainya Revolusi Prancis tidak pernah ada. Juga sulit bagi kita untuk membayangkan, bagaimana mungkin sastra Amerika akan turun mutunya, seandainya kemakmuran tidak pernah datang di Amerika semenjak berakhirnya Perang Dunia II. Angkatan 1945 dalam sastra Indonesia mungkin juga tidak akan ada, seandainya Revolusi Kemerdekaan di Indonesia juga tidak ada. Demikianlah, sastra tidak otonom, tetapi tergantung pada faktor-faktor di luar sastra. Sementara itu, sastra sebagai sebuah sosok juga tidak otonom. Sastra sebagai sebuah sosok juga ikut dibentuk oleh unsur-unsur sastra sebelumnya dan juga oleh sastra dari wilayah-wilayah lain.

Sebagaimana halnya sastra bangsa-bangsa lain dari dunia ketiga, sastra Indonesia modern juga terbentuk dari unsur-unsur sastra Barat. Lihatlah, misalnya, kehadiran novel pada tahun 1920-an.¹ Unsur-unsur lokal pada waktu itu, misalnya syair, pantun, pepatah-petitih memang ada. Namun, tanpa pengaruh sastra Barat, agaknya sulit bagi sastra Indonesia untuk melahirkan novel. Angkatan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 1945, dan sekian banyak napas dalam sastra Indonesia sampai sekarang pun tidak terlepas dari perkembangan sastra lain, khususnya sastra Barat.

Pengaruh sastra Barat bukan hanya terjadi pada karya sastra sendiri, tetapi juga pada pemikiran di balik karya sastra. Yang dimaksud "karya sastra" di sini, antara

lain, adalah genre (novel, cerita pendek, puisi naratif, dan lain-lain), tema (antara lain kesendirian atau alienasi), cara penyampaian gagasan (antara lain anti-plot dan anti-hero), dan lain-lain. Pemikiran di balik karya sastra, sementara itu, antara lain, mencakup pemikiran para tokoh filsafat dan sastra.

Untuk mengetahui betapa besar pengaruh pemikiran para tokoh filsafat dan sastra Barat terhadap Angkatan 1945, misalnya, kita dapat melihat kembali majalah-majalah sastra dan kebudayaan pada tahun-tahun 1940-an dan 1950-an, sebagaimana misalnya majalah *Siasat* dengan lembar kebudayaannya "Gelanggalang," dan majalah *Mimbar Indonesia* dengan lembaran kebudayaannya pula. Oleh karena itu, jangan heran manakala nama Croce, Nietzsche, Bergson, dan lain-lain sering disebut-sebut. Pemikiran mereka belum tentu masuk ke dalam karya sastra, tetapi hadir dalam pemikiran sastra, khususnya dalam esai, debat, dan diskusi.

Pengaruh-pengaruh pemikiran lain, yang tidak langsung masuk ke dalam karya sastra, sampai sekarang, masih banyak. Untuk melihat betapa banyak pengaruh itu, kita dapat menyimak kembali sekian banyak artikel baik dalam koran maupun majalah, khususnya ruang-ruang sastra dan kebudayaan koran dan majalah tersebut. Kita juga dapat membongkar kembali sekian banyak makalah dalam sekian banyak forum.

Baik langsung ke dalam karya sastra maupun di luar karya sastra, pengaruh-pengaruh tersebut mau tidak mau membentuk cara berpikir. Cara berpikir ini sebetulnya tidak hanya terdapat dalam sastra, tetapi juga dalam sekian banyak segi kehidupan. Pembuatan jalan-jalan tol, asuransi kesehatan, sistem pendidikan, dan sekian banyak segi kehidupan lain, tidak lain mencerminkan pengaruh-pengaruh tersebut.

Apakah pengaruh, baik terhadap berbagai segi kehidupan maupun terhadap karya sastra dan pemikiran sastra hanya terdapat di Indonesia? Tidak. Semua negara dalam dunia ketiga, pada hakikatnya, tidak lepas dari sekian banyak jangkauan pengaruh tersebut.

Mengapa? Jawaban yang bersifat permukaan karena negara-negara dalam dunia ketiga adalah bekas jajahan negara-negara Barat. Namun, jawaban lain yang lebih hakiki karena tradisi pemikiran Barat jauh lebih tua, lebih kokoh, dan lebih teruji oleh berbagai macam pergolakan politik, sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Sebetulnya, di satu pihak, Barat bukan hanya satu, tetapi banyak. Oleh karena itu, di Barat ada sekian banyak negara, sekian banyak bangsa, sekian banyak bahasa, sekian banyak tradisi, dan entah apa lagi. Peta negara-negara Barat juga berubah-ubah sehingga ada sebuah negara yang kemudian lenyap karena masuk ke dalam negara lain (misalnya, Prusia ke dalam negara Jerman), ada negara yang kemudian pecah menjadi beberapa negara (misalnya Yugoslavia), ada pula beberapa negara yang kemudian bergabung menjadi satu negara (misalnya Jerman Barat dan Jerman Timur). Sekian banyak perubahan peta ini mau tidak mau mempengaruhi konsep nasionalisme, sistem pemerintahan, dan perilaku kehidupan sehari-hari.

Demikianlah, Barat sebetulnya tidak satu, tetapi banyak dan tidak permanen, serta sering mengalami perubahan. Namun, di lain pihak, pada hakikatnya Barat hanyalah satu. Oleh karena itulah, kendati Barat itu banyak dan sering mengalami perubahan, sementara itu kebudayaannya sendiri juga tidak pernah *mandeg*, seluruh negara dan

bangsa Barat, pada hakikatnya, terikat oleh satu aspirasi kebudayaan.

Sebagai sebuah kesatuan, seluruh kebudayaan Barat terikat oleh satu aspirasi kebudayaan, yaitu Yunani dan Romawi Kuno, Yidisme, dan Kristenisme.² Oleh karena itulah, mereka diikat oleh satu mitologi yang berlaku di mana pun di Barat. Begitu sebuah pemikiran, konsep, atau tindakan mereka dikembalikan kepada mitologi mereka, katakanlah mitologi mengenai kotak Pandora, mereka semua cepat menangkap, merasakan, dan menghayatinya.

Sajak-sajak Yeats, penyair Irlandia yang menulis dalam bahasa Inggris, misalnya, dapat cepat ditangkap maknanya oleh khalayak sastra dan pemikir Barat begitu sajak-sajak itu diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa Barat karena acuan sajak-sajak itu adalah mitologi mereka bersama. Begitu dalam sajak "*Leda and the Swan*" dia berbicara mengenai angsa penjelmaan Zeus, Leda, dan Perang Troya, seluruh khalayak sastra dan pemikir Barat langsung dapat menghayati sajak tersebut. Yang memisahkan khalayak berbagai negara, bangsa, dan bahasa Barat dalam sajak ini hanyalah bahasa, dan karena itu, begitu bahasa sajak ini diterjemahkan, hambatan untuk memahami sajak ini boleh dikatakan hilang.³

Bukan hanya itu. Lihat juga, misalnya, musik klasik Barat termasuk opera-operanya. Di mana pun di Barat musik dan opera itu dimainkan, seluruh khalayak musik dan pemikir Barat, lepas dari bangsa dan bahasa mereka, dapat menghayati musik dan opera tersebut. Ikatan kemampuan penghayatan, dengan sendirinya, tidak lain berasal dari ikatan aspirasi satu kebudayaan besar bersama.⁴

3. Penjajahan

Ingat, kita berbicara mengenai masalah kebudayaan, yang tercermin antara lain, dalam mitologi, sastra, dan pemikiran. Kita tidak berbicara mengenai masalah otot, kekuatan jasmani, atau kekuatan militer. Pasti kita tahu bahwa kekuatan otot, kekuatan jasmani, atau kekuatan militer amat penting. Tanpa kekuatan tersebut, sebuah kebudayaan akan hancur. Namun, dari sejarah umat manusia kita tahu bahwa pemikiran lebih penting daripada kekuatan apa pun, termasuk kekuatan militer. Sparta membanggakan dirinya dengan disiplin militer, akhirnya runtuh tanpa meninggalkan bekas. Yunani Kuno, sebaliknya, tetap dikenang karena pemikir-pemikir besarnya. Titik-berat Yunani Kuno bukanlah kekuatan otot, melainkan kekuatan pemikiran.⁵ Penjajahan dengan sendirinya terjadi karena kekuatan militer. Namun, kekuatan militer itu sendiri tidak akan mampu berbuat apa-apa apabila di belakang kekuatan militer tidak ada kekuatan pemikiran. Itulah yang telah terjadi pada penjajahan negara-negara Barat di masa lalu terhadap negara-negara yang sekarang dikelompokkan ke dalam dunia ketiga.

Dengan sendirinya, penjajahan masa kini bukan lagi penjajahan jasmani atas wilayah-wilayah tertentu, tetapi penjajahan dalam bentuk lain. Ketergantungan ekonomi adalah sebuah bentuk penjajahan, yaitu penjajahan masa kini. Sebagaimana sudah sering kita dengar melalui berbagai forum, hampir seluruh dunia sekarang dijajah oleh Jepang karena hampir seluruh dunia sekarang tergantung pada produk otomotif dan elektronik dari Jepang.

Juga, dari berbagai forum kita sudah sering mendengar bahwa kebudayaan pop,

yaitu kebudayaan yang menguasai dunia sejak tahun 1970-an, tidak lain adalah penjajahan kebudayaan Barat. Melalui mode-mode pakaian, selera makan makanan-cepat, nafsu untuk memiliki penampilan gaya kelas mapan, konon adalah hasil rekayasa para pemilik modal besar untuk menciptakan ketergantungan ekonomi dunia ketiga. Kekuatan untuk menciptakan ketergantungan ini, sebagaimana halnya yang sudah sering kita dengar dari berbagai forum pula, datangnya tidak lain juga dari Barat.

Begitu kita berpikir mengenai pengaruh, mengenai ketergantungan, mengenai penjajahan baik dalam bentuk jasmani maupun tidak, pada hakikatnya kita berpikir mengenai dunia pemikiran, dan tradisi dunia pemikiran itu sendiri. Barat, sekali lagi, sudah mempunyai tradisi pemikiran yang lama, kukuh, dan terjamin oleh kesamaan aspirasi. Tradisi pemikiran ini, dengan sendirinya, juga melahirkan tradisi kekuatan militer.

Mengenai tradisi pemikiran, kalau kita kembali ke sastra lagi, lihatlah, misalnya, banjir teori-teori sastra dari Barat. Teori-teori tersebut telah membentuk pikiran dan sikap sementara khalayak sastra kita sejak tahun 1970-an, dan akan berlangsung entah sampai kapan. Keinginan untuk menciptakan teori sastra sendiri, yang memang sesuai dengan sastra kita sendiri, ternyata tidak pernah mencapai kenyataan.⁶ Lalu, mengenai kekuatan militer, kita juga tahu bahwa persenjataan militer kita tidak lain adalah buatan Barat pula. Pendidikan militer kita juga sebagian datang dari Barat. Maka, betapa pun hebat kekuatan militer kita, rahasia kekuatan kita sebetulnya dengan mudah terpantau oleh mereka yang membuat senjata dan mereka yang melatih kita.

4. Tradisi Kita: Lokal

Standar idealisme kita, dan juga di negara-negara dunia ketiga, tentunya, sudah naik. Kopral, sersan mayor, dan kesederhanaan hidup tahun-tahun 1940-an dan 1950-an karena perkembangan zaman, sudah lama kita tinggalkan. Lepas dari kemiskinan di sana-sini, kita, dan juga negara-negara dunia ketiga, sudah sering menyaksikan kehidupan yang enak dan penuh kemudahan.

Dalam sastra, sekali lagi, pengaruh Barat terus berkelanjutan. Namun, sebetulnya, pihak Barat pun, semenjak sekitar tahun 1950-an, sudah merasa jenuh terhadap ke-Barat-an mereka. Oleh karena itu, misalnya, the Beatles, pada tahun 1950-an, belajar musik India dari Ravi Shankar. Sebelum itu, Pablo Picasso menggali seni primitif Afrika untuk bahan inspirasinya. Namun, berpalingnya orang-orang Barat ke dunia ketiga ternyata juga menciptakan ironi baru. Kita ingat, betapa rendah martabat musik India di mata khalayak musik kita, sebelum the Beatles belajar dari Ravi Shankar. Juga, kita ingat, betapa rendah martabat seni primitif Afrika di mata khalayak seni rupa dunia, sebelum Picasso mengangkatnya dalam lukisan-lukisannya. Kita baru sadar bahwa ternyata musik India adalah musik kelas tinggi, demikian juga seni primitif Afrika, setelah mata kesadaran kita dibuka oleh orang-orang Barat.

Ironi serupa juga terjadi dalam perilaku kita mengejar ilmu. Untuk melaksanakan studi mengenai berbagai segi kehidupan di Indonesia, termasuk sastra Indonesia, kita berpaling ke Barat. Untuk mencari data-data lama mengenai diri kita sendiri, kita pergi ke Barat dan untuk mencari data-data baru yang sudah diolah, kita pergi ke Barat.

Demikian pula, cara kita mengolah data, baik teori maupun metodologinya.

Tradisi pemikiran di Barat, yang sudah begitu lama mengakar dan kukuh, mau tidak mau telah lama pula melahirkan tradisi berpikir analitis. Oleh karena itulah, teori-teori lahir di sana, termasuk pula teori sastra. Maka, mau tidak mau, bagaikan berhadapan dengan teknologi, kita lebih banyak bertindak sebagai pemakai, dan bukan pencipta.

Dalam berhadapan dengan diri sendiri mau tidak mau kita merasakan bahwa ikatan kebudayaan kita sebetulnya terlalu longgar. Dengan demikian, rasanya, seolah kita tidak memiliki tempat berpijak bersama yang kukuh, dan juga payung bersama yang besar dan kukuh pula. Mungkin, karena itu pulalah, kesenian tradisional kita dengan cepat luntur.

Jepang, sementara itu, relatif homogen. Sesama orang Jepang, dengan demikian, boleh dikatakan memiliki tempat berpijak bersama yang kukuh, dan juga payung bersama yang besar dan kukuh pula. Seni tradisional mereka, lepas dari kepentingan komersial untuk wisatawan, dengan berbagai penyesuaian dapat hidup berkelanjutan.

Bukan hanya itu, di daerah mana pun seni tradisional mereka dipertunjukkan, sesama orang Jepang, pada umumnya, dapat menghayati seni tradisional mereka. Pijakan dan payung mereka, tidak lain dan tidak bukan adalah sama.

Kesamaan aspirasi kebudayaan di Barat, sekali lagi, lepas dari adanya sekian banyak negara, bangsa, dan bahasa, pada hakikatnya juga satu. Seni tradisi mereka, dengan demikian, dengan berbagai ragam penyesuaian, dapat juga hidup berkelanjutan. Di kawasan mana pun di Barat seni itu dipertunjukkan, sekali lagi, sesama orang Barat akan sanggup menghayati seni mereka. Lalu, marilah kita ambil satu contoh seni tradisional kita, katakanlah ludruk. Begitu sering masalah ludruk diseminarkan dengan maksud untuk dilestarikan, tetapi ludruk tetap cenderung untuk mati. Berbagai kiat untuk menyesuaikan ludruk dengan perkembangan zaman telah dilakukan, tetapi khilaf tetap tidak menghendaki ludruk.

Bukan hanya itu, bayangkanlah, andaikata ludruk tidak hampir-hampir mati seperti sekarang. Lalu, misalnya, ludruk dipertunjukkan di Aceh, Irian, atau, kalau perlu, Yogyakarta, dan Solo. Di Aceh dan Irian ludruk tidak akan dapat dimengerti, sedangkan di Yogyakarta dan Solo, mungkin ludruk dihindari karena ludruk dianggap kasar dan kampung. Seni tradisional kita yang lain pada hakikatnya sama. Masing-masing seni tradisional, pada hakikatnya hanyalah lokal, dan karena itu, kurang dapat dihayati di kawasan di luar lokalnya masing-masing.

Salah satu kendala untuk menciptakan sastra Indonesia yang kompak dan padat, bagaikan sastra Barat dan sastra Jepang, tidak lain, adalah karena longgarnya makna "bhineka tunggal ika" kita. Bahasa Indonesia memang menjadi perekat yang sangat kukuh dan ampuh. Namun, dalam memasuki wajah Indonesia baru, sekian banyak tradisi dengan segala simpulnya cepat mati. Sekian banyak tradisi daerah, sekian banyak bahasa daerah, sekian banyak cerita rakyat daerah, dan lain-lain, tidak sanggup berhadapan dengan wajah baru Indonesia.

Dengan mempergunakan bahasa Indonesia sebagai basis kekuatan bersama, memang, bangsa Indonesia sebagai sebuah kesatuan telah berhasil menciptakan sastra

Indonesia. Heterogenisme di Indonesia, sementara itu, sejak tahun 1970-an, boleh dikatakan justru memperkaya sastra Indonesia, dan bukan menghambatnya. Sub-subkebudayaan dalam *bhineka tunggal ika*, sejak tahun 1970-an, telah melahirkan sastra Indonesia dengan nuansa sub-subkebudayaan tersebut. Melalui Linus Suryadi A.G., Y.B. Mangunwijaya, dan Umar Kayam, misalnya, kita melihat sastra Indonesia dengan nuansa kebudayaan Jawa. Lalu, melalui Khairul Harun dan Darman Moenir, kita dapat menyaksikan sastra Indonesia dengan nuansa kebudayaan Minang. Dan, melalui Korrie Layun Rampan, kita dapat menyaksikan sastra Indonesia dengan nuansa kebudayaan Kalimantan.⁷

Di satu pihak, kita melihat betapa penting peran sub-subkebudayaan kita dalam membentuk sastra Indonesia. Namun, di lain pihak, ternyata, nuansa sub-subkebudayaan tersebut juga menciptakan kesulitan. Dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara di Ujung Pandang pada pertengahan tahun 1980-an, misalnya, tercetus sekian banyak keluhan terhadap novel-novel Y.B. Mangunwijaya karena novel-novel ini agaknya hanya sanggup berbicara kepada subkebudayaan tertentu, khususnya Jawa, dan karena itu kurang dapat dihayati oleh sub-subkebudayaan lain. Keluhan terhadap karya Linus Suryadi AG, dengan alasan sama, juga pernah dicetuskan dalam berbagai forum, antara lain, dalam salah satu pertemuan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pada awal tahun 1990-an.⁸

Bukan hanya itu, kita sudah sering menyaksikan sekian banyak usaha dari sekian banyak pihak untuk, dengan istilah klisenya, melestarikan kebudayaan tradisional, menggali kebudayaan nasional, dan hal-hal semacam itu agar kebudayaan nasional dalam wajah Indonesia baru tidak terlepas dari nilai-nilai lama yang, dengan istilah klise lagi, luhur. Usaha ini, antara lain, muncul dengan menghidupkan kembali kosakata bahasa Sansekerta. Lalu, kita juga melihat sekian banyak penelitian telah dilakukan. Direktorat Kesenian Direktorat Jenderal Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya, telah banyak melakukan inventarisasi dan penelitian kesenian tradisional. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, juga sudah melakukan banyak inventarisasi dan penelitian bahasa-bahasa daerah dan cerita-cerita rakyat. Dari hasil sekian banyak inventarisasi dan penelitian agaknya tampak bahwa, sekali lagi, tradisi dengan berbagai simpulnya tidak tahan dalam berhadapan dengan wajah Indonesia baru. Tradisi dengan sekian banyak simpulnya, dengan demikian, terpaksa mati. Maka, titikberat inventarisasi dan penelitian bergeser hanya menjadi sekedar inventarisasi.⁹

Sekian banyak forum juga pernah diselenggarakan, dengan tujuan untuk mencari hubungan antara sastra lama dan sastra baru.¹⁰ Tampaknya, sekian banyak usaha ini tidak benar-benar berhasil untuk membuktikan bahwa sastra modern kita adalah sambungan sastra lama kita. Dengan demikian, sastra lama dan sastra baru merupakan dua dunia yang benar-benar terpisah.

Meskipun manusia Indonesia lama dan manusia Indonesia baru terpisah, dan sastra lama dan sastra modern juga terpisah dan karena itu berdiri sendiri-sendiri, pada hakikatnya para pemikir, pengarang, dan praktisi tetap tidak bisa melepaskan diri dari subkebudayaannya masing-masing. Oleh karena itulah, dalam kepemimpinan, misal-

nya, kita mengenal adanya kepemimpinan gaya Jawa. Dalam sastra, sementara itu, sekali lagi, kita juga mengenal sastra Indonesia dengan nuansa sub-subkebudayaan.

5. Polarisasi

Semenjak tahun 1970-an, memang, polarisasi sastra merupakan gejala umum dalam sastra di seluruh dunia. Sastra Indonesia, sekali lagi, menghadirkan sastra subkebudayaan. Lalu, sejak tahun 1970-an juga, sastra Indonesia tampil dengan sastra pop yang kuat.

Sastra pop memang berjalan terus. Namun, agaknya ada anggapan bahwa sastra pop adalah sastra rutin, dan karena itu tidak memerlukan ledakan-ledakan. Setelah tahun 1970-an berlalu, pengamatan dan perbincangan mengenai sastra pop tidak pernah meledak-ledak lagi.

Polarisasi sastra di negara-negara Barat juga memunculkan sastra-sastra lain. Sastra etnik dan sastra wanita, misalnya, muncul. Tentu saja, sebelumnya, sastra etnik dan sastra wanita sudah ada, tetapi kurang diperhitungkan. Lalu, lahirlah sastra baru, yaitu sastra multikultural. Masih ada lagi, yaitu sastra Asia di Barat, yang sebelumnya sebetulnya juga sudah ada, tetapi tidak diperhitungkan. Semua sastra ini, di Barat, sejak akhir tahun 1970-an, benar-benar diperhitungkan.

Sebagaimana halnya perubahan dan perkembangan sastra pada umumnya, polarisasi sastra, juga tidak bisa dilepaskan dari perubahan dan perkembangan berbagai segi kehidupan. Sastra etnik di Amerika, misalnya, muncul karena dalam konstelasi heterogenitas, masyarakat Amerika menuntut adanya entitas-entitas kecil. Orang-orang kulit hitam, misalnya, merasa tidak diwakili oleh sastra Amerika klasik, katakanlah, sastra Hemingway, Fitzgerald, Mark Twain, dan lain-lain. Mereka, dengan demikian, merasa mempunyai hak untuk memiliki sastra sendiri, dan juga merasa mempunyai hak bahwa sastra mereka adalah sastra kanon. Sastra etnik lain, sebagaimana misalnya sastra Indian dan sastra Chicano, muncul dengan alasan sama.

Sastra wanita juga makin banyak diperhatikan karena kedudukan wanita di masyarakat, di seluruh dunia, makin kuat. Dengan demikian, begitu banyak segi kehidupan tidak lagi semata dikuasai oleh laki-laki. Wanita juga merasa perlu menyuarkan aspirasinya lewat sastra, dan ternyata memang mereka mampu. Tentu saja, sejak dulu wanita memang telah mempunyai kesempatan untuk menyuarkan aspirasi mereka lewat sastra. Oleh karena itu, sudah sejak dulu, sebetulnya, mereka sudah ikut membentuk kanon sastra. Namun, kanon sastra dahulu adalah kanon yang tidak mengacu pada aspirasi wanita. Dengan adanya tuntutan untuk memiliki sastra sendiri, maka wanita pun berjuang untuk menciptakan kanon sastra sendiri.¹¹

Lalu, sebagai akibat adanya migrasi orang-orang dunia ketiga ke negeri-negeri Barat, muncullah sastra multikultural. Migrasi dengan sendirinya menciptakan berbagai masalah, antara lain, benturan antara budaya pendatang dan budaya setempat. Para pengarang yang merasakan kepedihan benturan ini, khususnya dalam masalah jati diri, kemudian menciptakan sastra multikultural.

Ada pula, sementara itu, pengarang yang tidak merasa, atau tidak ambil peduli terhadap benturan budaya. Mereka menulis bukan lagi sebagai pendatang, tetapi se-

bagai orang dalam. Para pengarang inilah yang kemudian melahirkan sastra Asia, dan juga sastra Afrika, dalam sastra Barat. Dalam ke-Afrika-an atau ke-Asia-an mereka, bagaikan pengarang Barat lain, mereka sanggup menyatu dengan budaya Barat. Maka, sastra Afrika dan sastra Asia pun, hadir sebagai bagian polarisasi sastra.

Di satu pihak, polarisasi sastra dapat memperkaya sastra. Dengan adanya polarisasi, tidak ada lagi sastra tunggal, tetapi sastra dengan berbagai ragam. Namun, di lain pihak, polarisasi menciptakan fragmentarisasi.

Jauh sebelum terjadinya polarisasi sastra, sebetulnya fragmentarisasi sastra sudah terjadi. Karena kehidupan makin kompleks, tidak mungkin sastra menyuarakan seluruh segi kehidupan. Sastra hanyalah fragmen, dan inilah yang terjadi sejak abad ke-19. *Divina Comedia* di Barat dan *Mahabarata* di Timur, sebaliknya, dapat mencerminkan filsafat, moral, ketatanegaraan, dan lain-lain. Bahkan, sampai dengan awal abad ke-19, beberapa karya sastra masih kaya dengan berbagai segi kehidupan.

Dengan adanya polarisasi sastra sebagai akibat dari makin banyaknya entitas dalam kehidupan, sekali lagi, sastra menjadi lebih fragmentaris. Kemampuan sastra untuk menampung kekompleksan kehidupan, dengan demikian, makin berkurang. Masing-masing entitas mempunyai kecenderungan untuk menengok ke dalam kehidupannya sendiri, dan karena itu tidak mempunyai ketajaman untuk menengok di dunia di luar entitasnya sendiri.

6. Tanpa Acuan Pokok

Polarisasi, sekali lagi, cenderung menghilangkan sastra yang tunggal. Kanon sastra yang pokok, atau *mainstream literature* dalam arti sesungguhnya, dengan demikian, cenderung hilang. Kanon menjadi begitu banyak, sebagaimana kanon sastra etnik, kanon sastra wanita, kanon sastra multikultural, dan sebagainya. Dan ingat, masing-masing kanon ini boleh dibilang hidup sendiri-sendiri. Mana yang dianggap sebagai kanon dalam arti yang sesungguhnya, dan mana sebetulnya yang dapat dianggap sebagai *mainstream literature*, dengan demikian, menjadi kabur. Karena sastra mana yang dianggap sebagai pokok menjadi kabur, boleh dikatakan, acuan pokok sastra tidak ada.

Sastra Barat sendiri, sementara itu, keadaannya sudah berbeda dengan keadaan pada saat Picasso menggali seni primitif Afrika dan The Beatles belajar musik dari India. Sikap Picasso dan The Beatles, dan juga para pemikir Barat yang lain pada waktu itu, masih bersikap selingan. Mereka hanya sekedar mencari nuansa baru, sementara semangat, aspirasi, dan acuan pokok mereka sendiri, pada hakikatnya tetap Barat.

Sejak sekitar akhir tahun 1970-an, keadaan sudah berubah. Sikap para pemikir Barat terhadap dunia ketiga sudah bukan lagi selingan, tetapi mendasar. Para pemikir bukan saja merasa jenuh terhadap Barat sendiri, tetapi juga, dan inilah yang penting, mereka menganggap bahwa Barat pada hakikatnya sudah habis.¹²

Memang, sejak akhir tahun 1970-an, dominasi pengarang Barat di Barat sendiri agak berkurang. Sebagian dominasi sastra, kemudian, dipegang oleh pengarang-pengarang pendatang, baik pengarang multikultural maupun pengarang sastra Afrika dan sastra Asia di Barat. Nama-nama non-Barat dalam sastra Barat, dengan demikian, ber-

munculan.

Pengertian "sastra Asia" dalam sastra Amerika dan Inggris, sementara itu, juga tidak memasukkan Indonesia. "Sastra Asia" dalam sastra Amerika dan sastra Inggris, tidak lain adalah sastra Cina, sastra Jepang, dan sastra India yang masuk ke dalam sastra Amerika dan sastra Inggris. Sebabnya, tidak lain karena sastra Cina, Jepang, dan India dianggap bagus, dan mempunyai pengaruh luas. Dan, kita tahu bahwa sastra Cina, Jepang, dan India, berbeda dengan sastra Indonesia, sudah mempunyai tradisi yang amat lama dan akar yang amat kuat.

7. Di Luar Sistem

Kita sadar, dengan demikian, kedudukan sastra Indonesia dalam konstelasi sastra dunia. Pada saat acuan pokok sastra dunia adalah sastra Barat, sastra Indonesia dianggap tidak mempunyai sumbangan terhadap sastra dunia. Lalu, pada saat sastra Barat sebagai acuan pokok sastra dunia guncang kedudukannya, dan karena itu sastra Barat menengok ke dunia ketiga, sastra Indonesia juga tidak ikut ditengok.

Demikianlah, baik dulu maupun sekarang, dalam jajaran sastra dunia, sastra Indonesia berada di luar sistem. Sastra Indonesia, dalam jajaran sastra dunia, berfungsi sebagai pengguna, dan bukan pemberi. Oleh karena itu, sastra Indonesia banyak dipengaruhi, tetapi tidak mempengaruhi.

Kita tahu, sementara itu, bahwa standar idealisme sekarang bukan lagi koprak dan bukan lagi sersan major. Dalam berbagai segi kehidupan, khususnya sejak tahun 1980-an, acuan standar idealisme kita sudah mengacu pada nilai-nilai internasional. Bangsa Indonesia, sebagaimana halnya bangsa-bangsa lain, benar-benar ingin menjadi warga dunia.

Kadang-kadang, dalam arus lalu lintas dunia, kita tidak puas manakala kita sekadar menjadi peserta. Maka, kadang-kadang kita ingin memimpin, atau katakanlah, ikut memimpin. Oleh karena itu, beberapa kali kita berusaha agar orang-orang Indonesia duduk sebagai pimpinan dalam organisasi-organisasi internasional, sebagaimana misalnya dalam OPEC, organisasi real estat internasional, dan paguyuban antaragama internasional. Bukan hanya itu. Kita juga menginginkan adanya orang-orang Indonesia yang mendapat penghargaan internasional. Namun, ingat, dan sekali lagi ingat, bahwa keinginan untuk menjadi warga dunia, dan juga keinginan untuk memimpin atau ikut memimpin lalu lintas dunia tidak hanya dimiliki oleh Indonesia. Idealisme seluruh bangsa sudah berubah, sudah bukan lagi dunia koprak atau sersan mayor. Oleh karena itu, Indonesia tidak sendirian, dan karena itu pula, persaingan di seluruh dunia pun pada hakikatnya makin hebat.

8. Bahasa dan Terjemahan

Sebagaimana kita ketahui, bahasa Indonesia benar-benar berhasil menjadi perekat persatuan dan kesatuan Indonesia. Berkat bahasa Indonesia, berbagai segi kehidupan di Indonesia, termasuk sastra, telah mencapai kemandirian. Melalui bahasa Indonesia, kita juga sudah berhasil menyerap berbagai ilmu dari luar.

Pembinaan bahasa Indonesia secara berkesinambungan untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa modern, juga sudah banyak dilaksanakan, dan sudah banyak hasilnya. Lembaga-lembaga yang mengajarkan bahasa dan kebudayaan Indonesia di luar negeri juga sudah ada, kendati jumlahnya masih kecil. Sejalan dengan pengertian "sastra Asia" di negara-negara Barat, lembaga-lembaga bahasa di luar negeri masih lebih menyukai bahasa dan sastra Jepang dan Cina, serta kebudayaan India.

Dalam berbagai forum, sementara itu, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu sering dibangga-banggakan karena berbagai sebab. Salah satu sebab adalah kenyataan bahwa penutur bahasa Indonesia dan bahasa Melayu cukup banyak, yaitu sekitar 300 juta. Lalu, sebab lain, karena wilayah penggunaan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu amat luas. Juga ada sebab lain, yaitu karena bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu, mempunyai akar yang cukup lama. Bahasa Melayu sudah dipergunakan pada kerajaan-kerajaan lama, dan sudah menghasilkan hikayat-hikayat besar.

Lepas dari kebesaran bahasa Indonesia dan bahasa Melayu dengan berbagai sebab dan alasannya, ternyata, kita juga mafhum bahwa untuk jajaran internasional, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu boleh dikatakan tidak berperan. Lalu lintas berbagai segi kehidupan, termasuk perdagangan dan ilmu pengetahuan, ternyata, tidak mempergunakan bahasa Indonesia. Untuk dapat dipahami oleh dunia internasional, sastra Indonesia juga memerlukan jembatan berupa terjemahan.

Melalui terjemahan, ternyata sastra Indonesia tidak diterima sebagai sastra titik, tetapi sastra dengan embel-embel. Sastra Indonesia dimasukkan ke dalam kelompok sastra Asean, atau sastra Asia, atau sastra dunia ketiga, atau sastra negara berkembang. Sementara itu, sekali lagi, pengertian "sastra Asia" pada umumnya, sekali lagi, biasanya terbatas pada sastra Jepang, Cina, dan India.

Bukan hanya itu. Penerjemah asing ternyata lebih suka sastra Indonesia yang kental warna lokalnya. Tentu saja, kekentalan warna lokal tidak selamanya berkaitan dengan mutu. Namun, mereka membaca sastra kita bukan karena sastranya, melainkan karena eksotismenya. Sebaliknya, kita membaca sastra dunia, tidak lain karena sastranya.

Kecuali tertarik pada sastra Indonesia yang menawarkan eksotisme, penerjemah asing juga tertarik pada sastra Indonesia yang kontroversial. Sebagaimana halnya kekentalan warna lokal, kekontroversialan juga tidak selamanya menurunkan mutu. Namun, mereka juga lebih tertarik pada kekontroversialannya, dan bukan pada sastranya sendiri.

Demikianlah, dalam terjemahan pun, sebetulnya kita dalam keadaan dijajah. Kita dijajah oleh orang-orang yang ingin melihat kita tidak berkembang dan karena itu selalu tradisional, dan tidak perlu menjadi modern. Juga, kita dijajah oleh orang-orang yang seolah tidak ingin melihat kita hidup dalam keadaan tenang dan damai. Lalu, marilah kita perhatikan kata-kata Ali Audah, sastrawan dan juga penerjemah, dalam sebuah percakapan tidak resmi dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara, Desember 1997, di Padang. Dia mengatakan bahwa kalau sastra kita diterjemahkan oleh orang luar, kita hanya mengangguk. Karya sastra apa pun yang dipilih oleh orang luar untuk di-

terjemahkan, terserah. Namun, kata Ali Audah pula, andaikata kita diminta untuk memilih karya sastra mana yang selayaknya diterjemahkan ke dalam bahasa asing, pasti kita akan banyak berdebat, dan tidak mencapai kesepakatan. Salah satu alasan, mungkin karena kita tidak memiliki kesepakatan yang tepat mengenai karya sastra mana yang benar-benar dapat dianggap mewakili sastra Indonesia. Kesulitan semacam inilah, yang mungkin dialami oleh seorang mahasiswa Indonesia di luar negeri dalam cerpen Putu Wijaya,¹³ ketika mahasiswa ini harus menari dalam acara malam kesenian internasional.

9. Simpulan

a. *Warga Dunia: Mungkin atau Tidak?*

Sesuai dengan perkembangan zaman, sejak tahun 1980-an, seluruh bangsa di dunia ketiga, termasuk bangsa Indonesia, memiliki hasrat untuk bangkit menjadi warga dunia. Dalam hasrat mereka tersirat, hendaknya semua bangsa, di seluruh dunia, diikat oleh kesamaan harkat, derajat, dan martabat. Dengan demikian, suasana duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, dalam semua segi kehidupan, termasuk sastra, dapat benar-benar terlaksana.

Hasrat untuk bangkit menjadi warga dunia, dan untuk memasukkan sastra Indonesia ke dalam jajaran sastra dunia, tidak lain merupakan pertanda bahwa bangsa Indonesia, sebagaimana pula halnya bangsa-bangsa lain di dunia ketiga, telah memasuki tahap baru. Dalam memasuki tahap baru, dengan sendirinya, tidak mungkin kita hanya bermodalkan hasrat dan semangat. Di balik hasrat dan semangat ada pertanyaan hakiki, yaitu mengapa, sejak dulu sampai sekarang, kita masuk dalam jajaran dunia ketiga. Dalam bentuk jasmani, kita masuk dalam jajaran dunia ketiga tidak lain karena dulu kita dijajah, dan memerlukan waktu lebih dari tiga abad untuk membebaskan diri dari penjajahan. Sekarang pun, penjajahan dalam bentuk lain, yaitu ketergantungan ekonomi kita terhadap Barat dan Jepang, masih tetap berlangsung.

Dahulu, pada saat penjajahan jasmani masih berlangsung, penjajahan terjadi tidak lain karena kita berhadapan dengan kekuatan senjata penjajah yang jauh lebih hebat daripada kekuatan senjata kita sendiri. Namun, dibalik kekuatan senjata ada kekuatan lain yang lebih hakiki, yaitu kukuhnya tradisi pemikiran. Kekuatan senjata tidak akan ada, atau hanya ada sementara, manakala kekuatan pemikiran di balik kekuatan senjata itu tidak ada.

Untuk mengetahui betapa penting kekuatan pemikiran dibanding dengan kekuatan senjata, mungkin kita dapat menengok kembali sejarah Sparta dan sejarah Athena. Bagi umat manusia, ternyata Sparta boleh dikatakan tidak memberi sumbangan apa-apa, sementara Athena sanggup mewariskan filsafat, seni, dan ilmu pengetahuan yang sampai sekarang tetap bermanfaat. Selama ini kita menjadi jajahan dalam segala bentuk, tidak lain karena tradisi pemikiran kita pada dasarnya lemah.

Kenyataan bahwa sastra modern kita, bahkan sampai sekarang, tidak pernah bisa lepas dari pemikiran Barat, tidak lain merupakan pertanda pula, bahwa tradisi pemikiran kita, termasuk tradisi sastra kita, berada jauh di belakang tradisi pemikiran Barat. Karena dalam tradisi pemikiran kita selalu berada pada kedudukan menerima

dan bukan memberi, kerangka pemikiran kita tidak bisa lepas dari kerangka pemikiran Barat pula. Maka, usaha kita untuk menciptakan sastra yang lebih mantap, teori sastra sendiri yang lepas dari teori Barat, dan juga standar estetika sendiri yang juga lepas dari standar estetika Barat, sulit terwujud.

Sastra Barat sendiri, sementara itu, sedang mengalami perubahan besar, antara lain, pendangkalan mutu, bersimharajalelanya begitu banyak polarisasi, dan kejenuhan terhadap nilai-nilai Barat sendiri. Dalam keadaan seperti ini, sastra Barat berpaling ke nilai-nilai dan sastra-sastra lain, yaitu sastra Asia dan sastra Afrika. Namun, sastra Asia di sini hanya mencakup sastra yang sudah mempunyai tradisi pemikiran dan tradisi sastra yang kukuh, yaitu Cina, Jepang, dan India.¹⁴ Oleh karena itu, sekali lagi, sastra Indonesia tetap berada di luar sistem. Bahkan, setelah diterjemahkan karena kekentalan warna lokalnya atau karena kekontroversialannya, sastra Indonesia tetap tidak tampak.

Tradisi pemikiran Barat bisa menjadi kuat, antara lain, lepas dari beragamnya peta negara, peta bangsa, dan peta bahasa yang begitu banyak, pada hakikatnya seluruh dunia Barat berada di bawah satu payung kebudayaan besar, yaitu Yunani dan Romawi Kuno, Yidishiisme, dan Kristenisme. Dengan demikian, mereka semua, pada hakikatnya, diikat oleh satu mitologi, oleh satu ketidaksadaran bersama. Seni tradisi mereka, dengan demikian, sanggup memiliki umur panjang, dan dapat dihayati dengan mudah oleh sesama orang Barat, lepas dari batas negara, bangsa, dan bahasa.

Makna bhineka tunggal ika kita, sebaliknya, terlalu longgar. Oleh karena itu, kita tidak diikat oleh satu payung budaya. Kita juga tidak diikat oleh satu mitologi, dan karena itu kita tidak diikat oleh satu ketidaksadaran bersama. Seni tradisi kita, sebagai akibatnya, tidak sanggup berumur panjang, dan hanya bersifat lokal, tanpa bisa dihayati oleh orang-orang lain dari lokal-lokal lain.

Terjemahan, dengan sendirinya, merupakan salah satu jalan untuk memperkenalkan sastra kita ke dalam jajaran sastra dunia. Namun, lagi-lagi karena tradisi pemikiran kita kurang kuat, terjemahan sastra kita ke dalam bahasa asing tetap bukan dianggap sastra dalam pengertian sebenarnya, tetapi sastra dengan embel-embel, katakanlah, sastra Asia Tenggara, sastra dunia ketiga, sastra negara berkembang, dan embel-embel lain semacam itu. Selera terjemahan pun ditentukan oleh sikap Barat terhadap dunia ketiga, yaitu bahwa dunia ketiga harus tradisional dan, karena itu, sastranya harus membawakan warna lokal yang kental, dan dunia ketiga tidak perlu tenang dan damai. Oleh karena itu, sastranya harus kontroversial.

b. Politik Pengembangan Sastra Nasional Indonesia

Sikap realistis, dalam menghadapi apa pun, mungkin lebih baik daripada sikap menyenang-nyenangkan diri dengan melarikan diri dari kenyataan-kenyataan pahit. Memang, dalam menghadapi hasrat untuk memasukkan sastra Indonesia ke dalam jajaran sastra dunia, kita melihat lebih banyak kendalanya jika dibanding dengan kemudah-kemudahannya.

Kenyataan bahwa sastra Indonesia tidak masuk dalam jajaran sastra dunia, dan kenyataan bahwa sastra Indonesia akan menghadapi banyak kendala dalam hasratnya

untuk ikut masuk dalam jajaran sastra dunia, sebetulnya merupakan masalah pemikiran. Karena kita tidak mempunyai tradisi pemikiran yang kuat, kita tidak mampu memberi sumbangan terhadap sastra dunia. Tradisi pemikiran, tidak lain, adalah masalah kebudayaan. Sementara itu, kebudayaan tidak mungkin dibiarkan menggelinding dengan sendirinya. Apabila kebudayaan dibiarkan menggelinding dengan sendirinya, kebudayaan yang lemah akan terus terlindas oleh kebudayaan yang lebih kuat, dan jati diri pemikiran kita dengan sendirinya juga akan lenyap. Agar kita mempunyai kendali terhadap kebudayaan, kita memerlukan kemauan politik, demikian pula apabila kita ingin mengendalikan perkembangan sastra.

Kita juga sadar, sementara itu, bahwa meningkatkan mutu pemikiran, memperbaiki mutu sastra, memberi peluang yang lebih luas bagi sastra untuk mewarnai berbagai segi kehidupan, dan lain-lain, tidak perlu semata didasarkan pada hasrat untuk menjadikan sastra Indonesia masuk ke dalam jajaran sastra dunia. Sejarah sastra sekian bangsa telah menunjukkan bahwa sastra tidak sama dengan olahraga. Boleh saja pembinaan olahraga mengacu pada target untuk memecahkan rekor-rekor tertentu, untuk menjadi juara umum dalam SEAG, untuk masuk dalam sepuluh besar Olimpiade, dan lain-lain. Namun, sastra tidak demikian. Sastra kita akan dengan sendirinya masuk ke dalam jajaran sastra dunia, manakala sastra kita memang dapat ditingkatkan mutunya, dan dipasarkan dengan baik di dalam dan di luar negeri. Namun, agar sastra dapat dipasarkan dengan baik, sastra tidak bisa berdiri di atas kaki sendiri. Keberadaan sastra sebuah bangsa dapat diakui, bukan semata karena sastranya bagus, melainkan juga karena bangsa itu memiliki kekuatan sosial, politik, dan ekonomi. Beberapa karya sastra kita, sebenarnya, mempunyai mutu internasional. Namun, dalam percaturan internasional, karya sastra tersebut terabaikan karena dalam jajaran internasional bangsa dan negara kita belum memiliki kharisma.

Kemauan politik dalam kebudayaan, dengan demikian, tidak lain merupakan kemauan untuk membenahi berbagai segi kehidupan agar kita menjadi negara yang secara keseluruhan maju, dan mempunyai kharisma di kalangan internasional. Kendati sastra tidak dapat berdiri di atas kaki sendiri, tidak berarti bahwa kita tidak memerlukan kemauan politik untuk mengembangkan sastra kita. Tanpa kemauan politik, sastra kita juga akan menggelinding dengan sendirinya, dan kita akan makin tergodanya untuk memenuhi selera pasar dan bukan selera pemikiran.

Sebagai kesimpulan, mau tidak mau kita perlu memikirkan adanya politik pengembangan sastra nasional Indonesia.¹⁵ Dalam politik pengembangan ini, berbagai strategi pengembangan dapat digariskan dan, karena itu, mempunyai kekuatan politik untuk dilaksanakan. Politik pengembangan sastra nasional ini menyangkut, antara lain, pendidikan sastra, penciptaan suasana yang menguntungkan untuk penciptaan sastra, usaha menjadikan sastra bagian dalam dunia pemikiran, penerjemahan karya sastra, penyebaran sastra baik ke dalam negeri maupun ke kalangan internasional, dan lain-lain.

c. Penutup

Sebagai penutup, Kongres Bahasa Indonesia VII ini dapat memberi rekomendasi ke-

pada semua pihak yang berwenang agar Indonesia segera melahirkan Politik Pengembangan Sastra Nasional Indonesia.

Catatan:

1. Pernah saya kemukakan dalam makalah untuk seminar di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia, menjelang akhir tahun 1980-an, kemudian makalah tersebut dimuat di jurnal *Tenggara*, Malaysia (saya lupa judul makalah saya, tanggal, bulan dan tahun seminar, serta nomor *Tenggara* dan halamannya).
2. Dari berbagai sumber, pernah saya kemukakan dalam Seminar Pekan Seni W.R. Supratman di Dewan Kesenian Surabaya bersama Subagio Sastrowardoyo, Sapardi Djoko Damono, dan Nirwan Dewanto, awal tahun 1990-an (saya lupa judul makalah saya dan tanggal, bulan, serta tahun seminar).
3. Idem catatan 2
4. Pernah saya kemukakan dalam forum diskusi Guru Besar IKIP Surabaya awal tahun 1990-an (saya lupa judul makalah saya dan waktu pelaksanaan diskusinya).
5. Ceramah Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, IKIP Surabaya, akhir tahun 1980-an.
6. Keinginan untuk memiliki teori sastra khas Indonesia sering dibicarakan, antara lain di harian *Kompas* (pertengahan tahun 1980-an) oleh Satyagraha Hoerip, dan seminar di Universitas Bung Hatta, Padang, pertengahan tahun 1980-an (semua makalah seminar, termasuk makalah saya, sudah dibukukan, penerbit Angkasa Bandung- saya lupa judul makalah saya dan juga judul buku kumpulan makalah tersebut).
7. Pernah saya kemukakan dalam berbagai kesempatan, antara lain, artikel "Novel Indonesia Sekarang, I, II, II." *Basis*, Oktober 1998, hal. 389-394; November 1998, hal. 425-433; Desember 1998, hal. 485-465, dalam "Sastra Kita Menjelang Akhir Abad," (seminar ulang tahun ke-32 majalah *Horison*, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, 25 Juli 1998; beritanya dimuat di harian *Kompas*, 27 Juli 1998, hal. 10, "Sastra Subkultur, Sastra Masa Depan; kemudian makalah saya tersebut dimuat di *Horison*, September-Oktober 1998, hal. 14-25).
8. Dalam Pertemuan Sastrawan Nusantara (melibatkan peserta dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam) di Ujung Pandang, keluhan, antara lain, datang dari Sinarsari Ecip (saya lupa judul makalahnya), dan dalam pertemuan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa keluhan datang, antara lain, dari Mursal Esten.
9. Dikemukakan oleh Saini K.M. dalam sebuah seminar Dewan Kesenian Jakarta, di Taman Ismail, awal tahun 1980-an
10. Antara lain dalam Seminar Kesusastraan I MASTERA (Majelis Sastra Asia Tenggara) (melibatkan pembicara dari Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 16-17 Februari 1998.
11. Contoh, antara lain, saya tulis dalam "Canon Formation in Indonesian Literature," Seminar "The Canon in South East Asian Literature." SOAS, The University of London, 5-7 April 1995.
12. Sering dikemukakan oleh berbagai pemikir dan pengarang Barat, antara lain, dikutip oleh Nirwan Dewanto, "Dalam Bayangan Kanon Sastra," harian *Kompas*, 29 Januari 1996, hal. 17.
13. Diterjemahkan oleh Jeanette Lingard menjadi "Typical," dalam *Diverse Lives*, translated and Introduced by Jeanette Lingard (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1995), hal. 93-98.
14. Lihat, antara lain, Sau-ling Cynthia Wong. *Reading Asian American Literature*. 1993.

Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

15. Saya kemukakan, antara lain, dalam "Sastra Kita: Menghadapi Masa Depan," Seminar Mastera I," 16--17 Februari 1998, lihat catatan 10, kemudian diberitakan harian *Kompas*, "Dibutuhkan Kemauan Politik Untuk Hadapi Sastra Masa Depan," 18 Februari 1998, hal. 10.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C6
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.50--15.40
Judul Makalah	: Sastra Indonesia di Forum Internasional
Penyaji	: Budi Darma
Pemandu	: Fachruddin Ambo Enre
Pencatat	: a. Isdiarto b. Hani'ah
Peserta	: 230 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Mujianto, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Apakah persyaratan substansi berpijak pada mitologi yang kuat yang utama agar sastra Indonesia dapat mendunia?

b. Jawaban:

Agar sastra kita dapat mendunia, diperlukan aspirasi ikatan antarbudaya yang kuat. Selama ini sastra kita hanya berbicara di luar dirinya, seperti sastra etnis berbicara tentang etnis saja.

2. Penanya: A. Syukur Ghazali, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Penerjemahan sastra Indonesia ke dalam bahasa Inggris ternyata tidak diikuti oleh pertimbangan mutu sastra itu. Menurut keterangan Bapak Harry Aveling, di Australia sembilan puluh persen sastra Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dipakai sebagai bahan mata kuliah. Jadi, pertimbangan mutu sastra tidak diperhatikan. Bagaimana pendapat Bapak mengenai hal itu?.

b. Jawaban:

Memang benar apa yang dikemukakan Bapak Syukur Ghazali bahwa sastra kita diterjemahkan ke dalam sastra lain bukan karena pertimbangan mutu. Sastra Indonesia terlalu banyak berbicara di luar dirinya sehingga mutunya menjadi rendah.

3. Penanya: Nur Indrayani, IKIP Surabaya

a. Pertanyaan:

Bagaimana menciptakan suasana sastra yang menguntungkan?

b. Jawaban:

Di dalam waktu yang sempit ini, saya tidak dapat menjawab secara mendetail

atas pertanyaan Ibu. Penciptaan suasana sastra yang menguntungkan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kita harus memikirkan bagaimana caranya agar sastra kita dapat berbicara di percaturan dunia.

4. Penanya: Ikranagara (sastrawan), Majalah *Horison*

a. Pertanyaan/Tanggapan:

Saya mendukung apa yang dikemukakan oleh Bapak Budi Darma. Kita sekarang ini memerlukan politik pengembangan sastra nasional Indonesia yang selama 32 tahun dipertolkan dalam berpikir, tidak ada kebebasan dalam berkreasi. Sekarang ini dalam era reformasi politik, pengembangan sastra kita rombak. Jika perlu, kita buat undang-undang kebebasan berkreasi. Polisi dapat kita tangkap juga jika polisi itu membelenggu kreativitas kita.

b. Jawaban:

Terima kasih saya ucapkan pada Bapak Ikranagara atas dukungannya terhadap pemikiran saya bahwa kita memerlukan adanya Politik Pengembangan Sastra Nasional Indonesia.

5. Penanya: Nazurty, Universitas Jambi

a. Pertanyaan:

Bagaimanakan menurut pendapat Bapak cara meningkatkan pengajaran sastra kita?

b. Jawaban:

Saya kira pertanyaan Ibu akan terjawab oleh pemakalah lain berikutnya, yakni Bapak Taufiq Ismail, yang akan berbicara tentang masalah kita menjadi bangsa yang rabun sastra dan lumpuh menulis.

PENGARUH ASING DALAM SASTRA INDONESIA

Sapardi Djoko Damono
Universitas Indonesia

Any one who surveys the field of Malay literature will be struck by the amazing abundance of its foreign flora and fauna and the rarity of indigenous growth.

(Richard Windstedt)

1. Pendahuluan

Pembicaraan mengenai pengaruh asing merupakan bagian dari studi sastra bandingan. Menurut François Jost, kegiatan penting dalam studi itu dapat dikelompokkan menjadi pembicaraan tentang masalah pengaruh dan analogi; gerakan dan kecenderungan; jenis dan bentuk; serta motif, tipe, dan tema. Dalam pelaksanaannya, telaah mengenai pengaruh dan analogi paling banyak menarik perhatian pengamat sastra sebab memang dalam kenyataannya segala studi dalam lingkungan pengetahuan manusia boleh dikatakan dapat diciutkan menjadi pengaruh dan analogi. Pengamat sastra tentu saja dapat menganalisis gerakan, *genre*, atau motif untuk memahami keterkaitan antarsastra.

Dalam studi ini, pengamat dapat memusatkan perhatian pada persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih kesusastraan, karya, atau pengarang. Kita dapat juga menelaah peran seorang sastrawan dalam pengalihan berbagai doktrin atau teknik sastra. Sumber suatu pengaruh tentu saja dapat dianggap sebagai bahan studi yang menarik. Dalam hal ini, kita berusaha mencari sesuatu yang menjadi ilham atau sumber informasi bagi sastra yang dipengaruhi. Kita juga dapat membuat studi mengenai nasib suatu karya sastra di negeri lain, yakni segala sesuatu yang berkaitan dengan dampak atau tanggapan atau keberhasilan suatu karya sastra di negeri lain. Gagasan mengenai citra suatu bangsa terhadap sastra lain juga bisa menjadi perhatian kita dalam studi ini. Tentu saja kemiripan antara sastra dan kesenian lain juga bisa menjadi bahan kajian dalam kelompok studi pengaruh dan analogi ini.

Pengaruh-mempengaruhi dalam kesusastraan mungkin sekali terjadi antara dua pengarang, tetapi dapat juga terjadi antara sekelompok pengarang terhadap seorang pengarang atau terhadap sekelompok pengarang di negeri lain. Kita bisa mengawali telaah semacam ini dari pengarang yang mempengaruhi atau yang dipengaruhi. Banyak hal yang dapat dilakukan dalam telaah semacam ini: kita dapat mengungkapkan perbandingan antara gaya atau tema, *genre* atau gagasan, dapat juga secara khusus membicarakan persamaan dalam struktur atau stilistika.

Pengaruh dapat terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini kita dapat membicarakan secara khusus masalah perantara, yakni sastrawan yang membawa pengaruh itu ke dalam kesusastraannya. Perantara ini bisa pengarang besar, bisa juga pengarang yang tidak begitu dikenal, dalam hal ini yang penting bukan perantaranya, melainkan apa yang diantarakannya. Dalam sejarah kesusastraan dunia, peran para pengarang besar sebagai perantara sangat penting. Mereka tidak hanya me-

nyebarluaskan pengaruh, tetapi juga menyerap pengaruh dari luar yang memungkinkan kesusastraannya berkembang.

Dalam studi sastra bandingan terjemahan bisa menjadi pusat perhatian kita juga. Pengarang suka menerjemahkan karya sastra yang disenanginya atau yang dianggapnya bermanfaat bagi perkembangan sastra negerinya. Dalam situasi tertentu, pengarang juga mendapatkan nafkahnya dengan menjadi penerjemah. Apa pun yang dilakukannya dalam pekerjaan menerjemahkan itu, besar kemungkinan secara sadar atau tidak, dia ikut menanamkan pengaruh asing terhadap sastra negerinya. Ia sendiri bahkan bisa menumbuhkan gagasan atau gaya baru lewat terjemahannya itu, sementara pembaca di negerinya bisa mendapatkan ilham dari terjemahannya itu.

Sejauh ini, yang kita bicarakan adalah kemungkinan adanya hubungan pengaruh-mempengaruhi antara dua kesusastraan atau lebih. Dalam kenyataannya, mungkin saja kemiripan terjadi antara dua kesusastraan yang sama sekali tidak pernah bersentuhan. Ini terutama terjadi pada tradisi lisan, tetapi dapat juga terjadi dalam tradisi tulis. Perkembangan tematik dan stilistik kesusastraan tentu saja tidak hanya bergantung kepada pengaruh luar, tetapi juga pada faktor-faktor sastra dan nonsastra, seperti faktor sosial dan psikologis, yang menjadi lingkungannya.

Karangan ringkas ini mencoba untuk mengungkapkan masalah pengaruh asing dalam sastra Indonesia dengan mempergunakan beberapa konsep yang sudah disebutkan itu. Sebagian besar pembicaraan mengenai masalah yang sangat umum, satu dua kasus akan dibicarakan secara khusus. Gagasan yang mendasari karangan ini adalah bahwa sastra, sebagai bagian dari kebudayaan suatu bangsa, tidak akan bisa diselenggarakan dengan sebaik-baiknya tanpa benturan dan sentuhan dengan sastra, dan tentu saja kebudayaan lain.

2. Pengaruh Sastra Asing

Dalam perkembangan informasi yang sangat cepat ini, salah satu masalah yang sering kita anggap mendesak adalah ancaman kebudayaan asing. Masyarakat kita ini terbuka, dan sejak dahulu memang sudah bersinggungan dengan kebudayaan-kebudayaan lain, baik yang datang kepada kita maupun yang kita datangi. Nilai-nilai, tindakan, dan benda-benda budaya yang kita miliki menunjukkan bahwa kita, sebagai suatu masyarakat yang terbuka, tidak bisa melepaskan diri dari lingkungan kita. Topik yang sering dibicarakan dalam kaitannya dengan ancaman kebudayaan asing adalah pengaruh Barat.

Rupanya kita ini sekarang memang berorientasi ke Barat; oleh orang Barat kita diberi label Timur, dan kemudian kita merasa tenteram dengan menganggap diri kita orang Timur. Barat mula-mula berarti Eropa, tetapi sekarang tentunya mencakupi Amerika dan Australia--cara lain untuk mengatakan bangsa berkulit putih. Bagi nenek-moyang kita dahulu, Barat berarti India, negerinya kaum Bharata yang memang terletak di sebelah barat. Kita tahu bahwa pada zaman lampau, salah satu kebudayaan yang kuat yang pernah bersinggungan dengan kebudayaan kita adalah kebudayaan India, dan bahkan sekarang kita sebenarnya tidak bisa membayangkan suatu kebudayaan Indonesia tanpa pengaruh India.

Beberapa jenis aksara yang ada di Indonesia, seperti aksara Sunda, Jawa, dan Bali berasal dari India. Mitologi dan falsafah kita sebagian juga berasal dari *Mahabharata* dan *Ramayana*; demikian pula sastra klasik kita. Bahkan, boleh dikatakan sebagian besar hasil sastra klasik kita merupakan saduran belaka dari sastra yang berasal dari India. Dalam catatan Hooykaas, misalnya, kita ketahui bahwa dari anak Benua Asia itu kita telah mengimpor *Ramayana* dan *Mahabharata*, yang kita terjemahkan, kita sadur, atau kita sebar luaskan secara lisan. Di samping dua karya sastra agung yang selama ini sudah kita kembangkan menjadi berbagai *genre* dan jenis kesenian, di tengah-tengah masyarakat kita juga sudah sejak lama dikenal berbagai cerita yang, antara lain, kita catat dalam *Hikayat Pancatantra* dan *Hikayat Bayan Budiman*. Ini tidak bisa dipisahkan dari pergaulan antarbangsa pada masa lampau, yang mencakup kegiatan ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, militer, dan keagamaan.

Sehabis masa kejayaan kebudayaan pengaruh India, muncullah gelombang baru yang juga berasal dari Barat bahkan lebih jauh lagi ke barat, yakni Islam. Ini pun merupakan hasil dari pergaulan antara bangsa-bangsa di Nusantara ini dengan berbagai bangsa di sebelah barat anak Benua Asia serta negara-negara Arab lain di Asia ataupun Afrika. Dalam kaitan dengan pergaulan itu, nenek moyang kita kemudian meminjam atau mencuri aksara dari bangsa Arab, yang di negeri Melayu dikenal sebagai aksara Jawi dan di Jawa dikenal sebagai Pegon. Kata Hooykaas, kaum terpelajar Islam yang pertama telah membuka dunia baru bagi orang Melayu. Mereka berkenalan dengan penguasa dunia, Iskandar Zulkarnain yang berasal dari 1.000 tahun sebelum Nabi Muhammad, dan kemudian menyusun sejumlah besar cerita yang indah-indah mengenai tokoh legendaris itu. Mereka tentu saja juga mendengar kisah-kisah mengenai paman Nabi Muhammad, Amir Hamzah, dan menyadur cerita yang sangat panjang. *Hikayat Bakhtiar* dan *Ahmad Muhammad* adalah dua contoh saja dari sejumlah besar hikayat yang disusun nenek moyang kita, di samping kitab-kitab agama dan suluk yang disadur, diterjemahkan, dan dikumpulkan dalam berbagai bunga rampai.

Mengenai hal itu ada baiknya kita membaca semacam simpulan yang ditarik oleh seorang pakar sastra Melayu klasik, Sir Richard Winstedt dalam pengantarnya tentang sastra Melayu klasik, *A History of Classical Malay Literature*. Katanya, siapa pun yang mengamati taman sastra Melayu klasik akan dikejutkan oleh melimpahruahnya flora dan fauna asing serta langkanya tanaman asli. Yang dimaksudkan Winstedt adalah bahwa sastra Melayu ternyata diperkaya oleh pengaruh asing dan bahkan jarang sekali yang merupakan ciptaan asli, tidak saja dari segi tema tetapi juga bahasanya. Bahasa Melayu diperkaya oleh kosakata dari bahasa-bahasa di Asia Barat, Tengah, dan Selatan; asal-usul beberapa pengarang awal sastra Melayu zaman lampau pun ada kaitannya dengan negeri-negeri tersebut. Sebagaimana halnya yang terjadi dalam bahasa Inggris, pengaruh asing itulah ternyata yang telah memperkuat bahasa Melayu.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa bangsa kita ini ternyata senantiasa terbuka terhadap pengaruh asing dan sama sekali tidak menunjukkan sikap khawatir atau rendah diri menghadapinya. Bangsa kita bahkan sengaja mengambil unsur kebudayaan asing tersebut dan mengembangkannya sesuai dengan keperluannya sendiri. Kita seka-

rang tentunya tidak akan mengatakan bahwa bangsa kita telah kehilangan kebudayaannya, telah digusur, dan dikuasai oleh kebudayaan asing. Kebudayaan mana pun di dunia ini mengalami hal yang serupa. Kita mengetahui bahwa kebudayaan Korea dan Jepang bersumber pada kebudayaan Cina, tetapi sekarang kita dengan mudah bisa membedakan ketiga kebudayaan tersebut. Sastra serta aksara Jepang dan Korea klasik bersumber pada sastra dan aksara Cina, tetapi ketiganya sekarang masing-masing mengembangkan sastra modern yang mau tidak mau telah bersinggungan dengan sastra Barat. Dan, jika kita berbicara mengenai sastra Inggris, misalnya, kita boleh menanyakan naskah drama Shakespeare yang mana gerangan yang benar-benar bebas dari pengaruh asing?

3. Perkembangan Bentuk Tulis Sastra Indonesia

Mungkin sekali memang ada kaitan antara peminjaman aksara dan pengaruh kebudayaan yang memiliki aksara tersebut. Ketika kita menciptakan aksara Jawa dengan meminjam dari kebudayaan India, aksara itu juga sekaligus berfungsi sebagai wahana penyaluran kebudayaan India ke Jawa. Demikian juga halnya ketika kita meminjam aksara Arab yang kemudian kita "ubah" menjadi Jawi. Pandangan ini tentu didasarkan pada perkiraan bahwa pengaruh asing itu masuk melalui tradisi tulis. Ada juga tentu kemungkinan bahwa pengaruh asing itu masuk melalui tradisi lisan; berbagai cerita dibawa oleh para pedagang yang masuk ke negeri kita atau mungkin juga oleh pedagang kita yang berkelana ke negeri asing.

Yang pasti adalah bahwa dalam tradisi tulis, banyak bentuk puisi yang merupakan pinjaman dari kebudayaan asing. Syair, nazam, rubai, masnawi, gurindam, gazal, dan seloka adalah beberapa contoh saja. Dalam zaman yang lebih kemudian kita mendapatkan istilah-istilah dari Barat juga: puisi, prosa, drama, dan fiksi. Drama kadangkala kita "terjemahkan" menjadi *lakon* atau *sandiwara* (kedua istilah itu pun tentu berasal dari bahasa asing) dan fiksi kita sebut juga cerita rekaan. Dalam puisi kita kenal lirik, balada, dan dramatik; sementara itu kita kenal juga esai dan sebagainya. Dalam bahasa aslinya, istilah-istilah itu memiliki pengertian tertentu, dan tentu sedikit banyak pengertian itu kita terapkan juga dalam kesusastraan kita.

Ketika pada akhir abad yang lalu dan awal abad ini sastra kita mulai menyadari keberadaannya sebagai sastra modern dan mencoba melepaskan diri dari ikatan sastra lama, kita pada dasarnya menyatakan kebosanan terhadap berbagai bentuk tetap yang bersumber pada tradisi lisan kita sendiri, seperti pantun dan tradisi tulis yang berasal dari kebudayaan lain, seperti syair dan gurindam. Tentu berkat pendidikan Barat yang mulai berkembang pada masa itu, pada sekitar tahun 1920-an kita disodori lagi dengan suatu bentuk tetap yang kemudian sangat digemari oleh penyair kita, yakni soneta--suatu bentuk tetap yang di negeri asalnya sudah ratusan tahun umurnya.

Pantun adalah bentuk tetap dalam tradisi lisan kita yang bisa bertahan sampai sekarang; dalam pantun kita bisa mendapatkan keasyikan bermain kata dan makna yang tidak bisa didapatkan dalam kebudayaan lain. Kegemaran penyair kita terhadap soneta mungkin ada hubungannya dengan sifat pantun, meskipun soneta tidak menyaratkan secara tegas perbedaan antara sampiran dan isi. Dalam rangkaian sajaknya, M.

Yamin menggunakan soneta dengan bersemangat. Masuknya soneta ke dalam sastra kita ada kaitannya, atau setidaknya semasa, dengan dicetuskannya gagasan romantik oleh sekelompok pujangga muda. Seni adalah luapan perasaan, perhatian terhadap reformasi sosial, kesenduan, minat terhadap yang jauh dan eksotik, dan gagasan tentang kebebasan. Semua itu merupakan ciri-ciri yang pada tahun 1930-an memenuhi kegiatan kesusastraan kita, terutama sekali yang berkembang di sekitar majalah *Pujangga Baru*. Itulah sebabnya sering dikatakan bahwa sastra kita masa itu dipengaruhi oleh Angkatan 80-an di Negeri Belanda.

Pada masa itu juga muncul kegemaran menggunakan bentuk prosa liris. Hal itu rupanya harus kita kaitkan dengan munculnya seorang penyair India, Rabindranath Tagore, sebagai salah seorang tokoh sastra dunia yang amat disegani. Penyair Benggali itu adalah orang Asia pertama yang mendapatkan Hadiah Nobel untuk kesusastraan pada tahun 1913. Setidaknya selama tiga puluh tahun sesudah itu gema karya Tagore, terutama puisi--terutama sekali *Gitanjali* dan *Tukang Kebun*--terdengar sangat jelas di Barat dan, tentunya, juga Timur. Beberapa tahun sesudah penerimaan Hadiah Nobel itu, di berbagai majalah di Hindia Belanda muncul sajak-sajak yang bergaya Tagore. *Tukang Kebun* diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dan pada tahun 1919 seorang Jawa yang suka menulis puisi dalam bahasa Belanda, Noto Soeroto, menerjemahkan *Tukang Kebun* versi bahasa Belanda itu ke dalam bahasa Jawa. Tidak mengherankan jika sajak-sajak Noto Soeroto mendapat pengaruh yang sangat kuat dari Tagore. Beberapa prosa liriknya kemudian diterjemahkan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu oleh Muh. Yamin. Sejak itu beberapa penyair kita tahun 1920-an dan 1930-an suka menulis prosa liris yang sangat berbau Tagore.

Puncak minat terhadap gaya penulisan Tagore di Indonesia terjadi pada tahun 1930-an dan 1940-an. Amir Hamzah, Sanusi Pane, dan Aoh K. Hadimadja, misalnya, menulis sejumlah prosa liris yang mengingatkan kita pada gaya penulisan *Gitanjali* dan *Tukang Kebun*. Sajak-sajak Amir Hamzah seperti "Doa" dan "Memuji Dikau"; sajak-sajak Sanusi Pane seperti "Di Tepi Jamuna," "Ke Dwarawati," dan "Pujangga"; serta untaian sajak Aoh K. Hadimadja "Pecahan Ratna" adalah beberapa di antara sejumlah besar sajak dua dekade itu yang mengingatkan kita pada gaya penulisan Tagore. Kecenderungan pada mistik dan, terutama pada sajak-sajak Sanusi Pane, acuan ke mitologi India merupakan ciri utama prosa liris tersebut. Beberapa sajak, seperti "Doa" Amir Hamzah, sangat tinggi nilainya dan bukan sekedar tiruan pucat dari puisi Tagore.

4. Sumbangan Sastra Melayu Cina

Sejak awal perkembangan sastra Indonesia, masyarakat keturunan Cina sudah memberikan sumbangan yang sangat berharga. Dalam berbagai penelitian diungkapkan bahwa perhatian istimewa masyarakat keturunan Cina terhadap usaha percetakan dan penerbitan telah mendorong perkembangan sastra yang disebut "Melayu Tionghoa" atau "Melayu Cina", sebagaimana terjadi pada sastra Melayu yang sudah disinggung sebelumnya. Pengaruh sastra asing--terutama sastra Cina--merupakan faktor penggerak yang sangat penting. Sastra Melayu Cina terutama ditujukan kepada masyarakat ke-

turunan Cina yang tidak lagi menguasai bahasa Cina; untuk mereka itu para pengarang keturunan Cina banyak menerjemahkan karya asing, baik dari bahasa Cina maupun bahasa-bahasa Barat.

Suatu jenis cerita rekaan yang kemudian berkembang sampai hari ini di Indonesia adalah cerita silat. Menurut Leo Suryadinata, pada mulanya cerita silat itu merupakan terjemahan dari novel sejarah Tiongkok. Kemudian, setelah banyak cerita silat bermunculan di koran-koran di Cina, penerjemahan dialihkan ke cerita silat itu. Perkembangan cerita silat di Indonesia erat kaitannya dengan maraknya penerbitan koran masyarakat keturunan Cina. Bahkan, pada tahun 1930-an terbit secara teratur bulanan yang khusus memuat cerita silat. Minat terhadap cerita silat itu berkembang sampai sekarang dan ditulis tidak hanya oleh pengarang keturunan Cina. Ceritanya pun kemudian banyak diilhami oleh, antara lain, Babad Tanah Jawa atau sama sekali rekaan dengan latar Jawa.

Sampai hari ini, berbagai cerita bersambung di beberapa harian di Indonesia, di samping beberapa cerita bergambar yang beberapa di antaranya kemudian dijadikan sinetron, pada dasarnya adalah cerita silat. Asmaraman Kho Ping Hoo adalah salah satu tokoh yang perlu dibicarakan secara ringkas. Meskipun sebagian karyanya, yang jumlahnya sekitar 120 judul, berlatar negeri Cina, ternyata ia tidak pandai berbahasa Cina dan mengaku hanya satu yang merupakan saduran, bukan dari bahasa Cina tetapi dari bahasa Inggris. Karya-karyanya yang lain adalah karangannya sendiri yang tentu saja direka-reka berdasarkan pengetahuannya mengenai sejarah Jawa dan negeri Cina.

Cerita silat tidak hanya menarik minat pengarang keturunan Cina. Beberapa pengarang pribumi seperti Arswendo Atmowiloto dan S.H. Mintardja telah menghasilkan sejumlah cerita silat yang sangat populer. Arswendo menciptakan tokoh Senopati Pamungkas dalam beberapa jilid bukunya, sedangkan S.H. Mintardja setiap hari dalam beberapa puluh tahun lamanya secara teratur dalam sebuah koran di Yogya menciptakan berbagai tokoh rekaan yang diilhami oleh sejarah Jawa. *Nogo Sosro Sabuk Inten* adalah cerita silat ciptaannya yang sangat populer, yang mendapat pengaruh kuat dari cara berkisah cerita silat Cina.

Sebelum Perang Dunia II, pengarang keturunan Cina yang banyak mendapat perhatian, antara lain, adalah Lie Kim Hok. Pengarang ini sejak awal tertarik menerjemahkan dari berbagai sumber Barat ataupun Timur. Karena masyarakatnya merindukan kebudayaan leluhur, pada awal kariernya dia banyak menerjemahkan dan menyadur karya sastra Cina. Karena pergaulannya dengan bangsa Belanda, ia mulai tertarik juga kepada sastra Barat, terutama sekali kisah-kisah petualangan seperti yang ditulis oleh Alexandre Dumas. Namun, yang penting kita ketahui mengenai pengarang ini adalah sebuah syairnya yang populer pada masa itu, yakni *Syair Cerita Siti Akbari* (1884) yang disadurnya dari *Syair Abdul Muluk*.

Dalam penelitian Monique Zaini-Lajoubert diungkapkan bahwa syair ini pernah dicetak tiga kali, yakni tahun 1884, 1913, dan 1922. Karangan Lie Kim Hok ini selain didasarkan pada *Syair Abdul Muluk* juga diilhami oleh versi Abdul Muluk dalam bahasa Sunda yang berjudul *Siti Rapiah*. Syair itu begitu terkenal sehingga pada tahun 1937 Tan's Film mengangkatnya ke layar putih dengan pemeran Roekiah, Rd.

Mochtar, dan Rd. Kosasih. Syair ini secara khusus perlu disebut sebab proses penciptaannya melibatkan berbagai jenis pengaruh asing. *Syair Siti Akbari* mendapat pengaruh dari *Syair Abdul Muluk*, cerita Melayu, *Siti Rapih* dan cerita Sunda. *Syair Abdul Muluk* itu sendiri sebenarnya merupakan saduran dari karya sastra asing yang berasal dari anak Benua Asia. Ini merupakan contoh dari nasib karya sastra di negeri lain.

5. Aliran dan Terjemahan Sastra

Jika pada tahun 1920-an dan 1930-an pengaruh romantisme sangat kuat dalam kesusasteraan Indonesia, selama sekitar dua dasawarsa sesudah Proklamasi, kita menyaksikan "kesemrawutan" pengaruh asing. Untuk pertama kali dalam perkembangannya, sastra kita berkenalan dengan berbagai gerakan, aliran, kecenderungan, dan motif dari berbagai negeri dan berbagai zaman. Banyak esai ditulis, juga banyak terjemahan dilakukan, tentang Shakespeare sampai T.S. Eliot, Li Bai sampai Lu Xun, Franz Kafka, John Steinbeck, Ernest Hemingway, Maxim Gorky, Anton Cekov, Nikolai Gogol, Haiku, Emille Zola, Guy de Maupassant, Taufik el-Hakim, dan sederet panjang lagi. Realisme, romantisme, ekspresionisme, modernisme, dan eksistensialisme menjadi bahan pembicaraan dalam berbagai esai. Di satu pihak kita mendapatkan karya Pramoedya Ananta Toer yang cenderung ke realisme, di pihak lain kita mendapatkan cerpen yang menyalurkan filsafat eksistensialisme dengan gaya Kafka seperti yang ditulis oleh Basuki Gunawan. Kita mendapatkan drama pendek Utuy Tatang Sontani yang realistik, di samping drama Iwan Simatupang yang eksistensialistik.

Dalam hal ini Chairil Anwar dapat dijadikan contoh bagaimana pengaruh asing diterima, bahkan direbut oleh sastrawan kita dan dijadikan tenaga yang luar biasa kuatnya untuk menciptakan kesusasteraan baru. Untuk maksud itu, saya akan mencuplik saja bagian dari esai yang saya sampaikan dalam kongres bahasa yang lalu. Dalam sejarah sastra kita tercatat sejumlah besar pengarang yang menaruh minat terhadap penerjemahan. Salah seorang yang dengan sadar dan sungguh-sungguh mengaitkan penerjemahan dan proses kreatifnya sebagai pengarang adalah Chairil Anwar. Penyair yang oleh banyak pengamat dianggap sebagai pelopor puisi modern Indonesia ini menjadi matang, antara lain, karena menerjemahkan. Dalam menerjemahkan, seorang pengarang dipaksa menciptakan bahasa yang setepat-tepatnya untuk mengalihkan pengalaman unik yang ada dalam sastra sumber, yang sangat mungkin tidak pernah dihayatinya. Paksaan semacam itulah tentunya yang telah menjadikannya penyair, yang dalam hidupnya yang singkat itu terus-menerus berusaha menajamkan kepekaannya dalam berbahasa. Hasilnya adalah bahasa Indonesia yang boleh dikatakan sama sekali baru, yang jauh melewati orang-orang sezamannya, yang--seperti tampak dalam beberapa sajaknya--sampai sekarang pun masih kita rasakan sebagai pembaruan. Tentu harus ada semacam ikatan batin antara penerjemah dan karya sastra yang diterjemhkannya; yang terjadi bukan semata-mata terjemahan, tetapi semacam tiruan. Si penerjemah, yang berasal dari kebudayaan dan, mungkin, zaman lain harus merasakan suatu keperluan untuk meniru karya sastra asli ke karya sastra sasaran demi keperluan yang berbeda, sesuai dengan zamannya.

Chairil Anwar adalah tokoh yang unik dalam sejarah sastra kita; ia dianggap

pelopor suatu pembaruan sastra sekaligus dituduh penyair yang suka mencuri karya penyair asing. Saya akan menunjukkan beberapa cara yang ditempuh penyair yang meninggal pada usia 26 tahun itu untuk mengalihkan sastra sumber ke sastra sasaran. Salah satu sajak yang diterjemahkannya adalah karya John Cornford yang dalam terjemahan diberi judul "*Huesca*." Terjemahan Chairil Anwar ini termasuk yang setia kepada aslinya; penyair kita itu tidak mencuri atau meminjam larik-larik sajak asing untuk kepentingan kreatifnya sendiri, seperti yang tampak dalam sejumlah sajaknya. Konon terjemahan itu suka diibaratkan bahwa yang setia itu tidak cantik, yang tidak setia yang cantik. Sajak terjemahan Chairil Anwar ini pernah populer di kalangan anak-anak muda yang giat dalam kesenian tahun 1950-an, ketika di beberapa kota mulai muncul kegemaran berdeklamasi. Terjemahan Chairil Anwar itu disusun dalam irama dan bunyi yang enak dibaca; di samping itu tentunya faktor yang berkaitan dengan tema juga menentukan popularitasnya. Tahun 1950-an belum begitu jauh jaraknya dari masa perjuangan fisik, dan tema sajak terjemahan itu memang sesuai dengan suasana zaman.

"*Huesca*" adalah salah satu terjemahan yang cantik. Jadi, adakah ia setia kepada aslinya? Di antara terjemahan Chairil Anwar, sajak ini termasuk yang setia--tetapi seberapa jauh? Jika kita uraikan dengan agak cermat, ternyata ada beberapa catatan yang bisa kita buat. "*Heart*" diterjemahkan menjadi "jiwa" dan bukan "jantung" atau "hati." Jika kita mengingat frasa "*dear heart*" yang mungkin lebih setia jika diterjemahkan menjadi "jantung hati," maka mestinya "*heart*" diterjemahkan "hati." Pada larik pertama juga, "*heartless*" diterjemahkan menjadi "hilang jiwa," suatu terjemahan yang agak aneh sebab "*heartless*" berarti "*cruel, unkind, has no sympathy for anyone or anything*".

Makna dalam bahasa aslinya itu sesuai dengan tema sajak yang berkaitan dengan perang. Dalam bahasa kita, "hilang jiwa" merupakan ungkapan yang tidak sejelas bahasa sumbernya; Chairil Anwar telah menciptakan ungkapan yang baru, setidaknya makna yang baru bagi ungkapan itu, yang sama sekali tidak membayangkan adanya faktor kekejaman dan ketiadaan belas kasihan seperti yang jelas tampak pada bahasa sumbernya. Pada larik kedua, "*dear heart*" diterjemahkannya menjadi "jiwa sayang," bukan "kekasihku" atau "jantung hatiku." Pengulangan kata "*heart*" dalam sajak sumber dipertahankan dengan cara mengulang kata "jiwa," meskipun hal itu mengakibatkan ketidaksetiaan. Di sini Chairil Anwar setia mengikuti teknik pengulangan, tetapi "terpaksa" tidak setia mengikuti maknanya. Pada bait kedua, "*I am afraid*" diterjemahkan menjadi "aku cemas" yang jelas lebih ekspresif dari "aku takut" atau bahkan "aku khawatir." Dua larik terakhir sajak ini juga menunjukkan akal Chairil Anwar dalam menerjemahkan; dalam sajak sumbernya terdapat paralelisme makna dengan menggunakan kata "*remember*" dan "*don't forget*," dalam terjemahannya dua larik terakhir itu dirangkaikan oleh kata "ingatlah." Sementara itu, pada "*my love*" ditambahkan "yang kekal"--mungkin sekali untuk memburu rima dengan larik kedua bait terakhir itu.

Pengkhianatan yang "lebih jauh" lagi dilakukan oleh Chairil Anwar dalam sajaknya yang berjudul "Krawang Bekasi." Oleh beberapa pengamat, sajak itu dianggap

plagiat dari sajak Archibald MacLeish yang berjudul "The Young Dead Soldiers." Sajak Chairil Anwar itu dianggap plagiat sebab ia tidak mencantumkan nama MacLeish. Jika kita membandingkan kedua sajak itu agak cermat, tampak jelas bahwa sebenarnya Chairil Anwar telah menciptakan sajak yang baru, dengan meminjam dan sekaligus diilhami oleh beberapa larik sajak MacLeish. Sajak MacLeish memuat nilai-nilai yang bisa diterima di mana saja; para prajurit muda yang mati dalam sajak itu tidak terikat oleh waktu dan tempat. Mereka bukan prajurit yang merebut kemerdekaan dari bangsa lain, mereka juga tidak menyebut-nyebut musuh. Mereka itu mungkin saja prajurit Jepang, Amerika, Italia, Jerman, atau Australia yang meninggal dalam sebuah perang entah kapan dan di mana. Sajak ini diterbitkam selepas Perang Dunia II, dan mungkin memang mengacu ke perang besar tersebut.

Sebaliknya, sajak Chairil Anwar jelas terikat tempat, yakni Krawang-Bekasi; dan tentunya juga terikat waktu, yakni zaman perjuangan fisik. Para prajurit yang mati dalam "Krawang-Bekasi" jelas mempunyai musuh, yakni penjajah; perjuangan mereka jelas, yakni merebut kemerdekaan. Dengan demikian sajak ini tidak mengandung nilai-nilai yang dengan mudah bisa diterima di mana dan kapan saja; ia terikat pada sejarah. Nada yang tersirat dalam sajak Chairil Anwar itu pun jelas berbeda dari "The Young Dead Soldiers." Sajak Chairil Anwar mengobarkan semangat perjuangan, sajak Archibald MacLeish memimpikan perdamaian. Penyair kita itu boleh dikatakan telah mempengaruhi sajak yang diterjemahkannya. Proses kreatif seperti yang dilakukan Chairil Anwar itu merupakan satu contoh kasus saja dari proses pengaruh asing dalam sastra kita, yang telah berlangsung sejak nenek moyang kita dahulu pertama kali menyadur *Mahabharata* sampai Y.B. Mangunwijaya menulis *Durga Umayi* beberapa tahun yang lalu.

6. Penutup

Pada masa lalu, ketika jaringan komunikasi tidak secanggih masa kini, nenek moyang kita tentu dengan susah payah berusaha mencari, bahkan merebut, pengaruh asing agar kesusastraan miliknya tetap bisa berkembang dengan sehat. Pada zaman sekarang ini ketika jaringan komunikasi menembus sampai ke kamar kerja kita tidak akan mungkin kesusastraan berkembang sendiri tanpa bersinggungan dengan kebudayaan lain. Apa yang terjadi di New York atau Paris atau Tokyo hari ini kita ketahui hari ini juga. Meskipun demikian, tidak jarang juga kita masih ketinggalan dari bangsa lain dalam memahami berbagai konsep baru di bidang kesusastraan. Seperti yang dinyatakan oleh Hooykaas, dengan adanya kaum terpelajar Islam yang pertama terbukalah dunia baru bagi orang Melayu. Pernyataan ini menggarisbawahi kenyataan bahwa hanya jika suatu masyarakat memiliki kaum terpelajar, masyarakat itu akan bisa berkembang dengan sehat. Bahkan, seandainya kaum terpelajar itu terpaksa harus hidup di bawah tekanan penguasa yang tidak menginginkan perubahan, mereka pasti akan berusaha mencuri-curi kesempatan untuk mendapatkan sesuatu dari kebudayaan asing.

Berbagai bentuk dan jenis sastra yang berasal dari (arah) Barat telah dimanfaatkan oleh kaum terpelajar kita sejak zaman para empu. Orang-orang cerdas seperti Hamzah Fansuri dan Raja Ali Haji telah membawa kebaruan bagi sastra klasik Melayu

dengan cara menerjemahkan dan menyadur. Anggota-anggota yang cerdas dari kelompok intelektual masyarakat keturunan Cina, seperti Lie Kim Hok dan Kwee Tek Hoay, menghidupkan kebudayaannya dengan menyalurkan pengaruh asing ke dalam karya sastra mereka. Agar bisa menjadi perantara yang baik, sastrawan memang harus benar-benar cerdas, seperti Armijn Pane, Chairil Anwar, atau Goenawan Mohamad.

Di tengah-tengah perkembangan sastra didaktis yang populer, Armijn Pane berhasil mengolah cara pandang dan berkisah modern dari Barat dalam *Belenggu* meskipun tidak sedikit, bahkan kaum intelektual seangkatannya tidak bisa menerimanya. Pada awal perkembangan bahasa Indonesia Chairil Anwar berhasil membuat berbagai percobaan kebahasaan dengan bantuan karya sastra asing yang diterjemahkan dan disadurnya. Hasilnya adalah bahasa Indonesia yang sama sekali berbeda dari yang pernah dipergunakan oleh para sastrawan sebelumnya. Dengan berguru, antara lain, pada cara pengucapan puisi Emily Dickinson dan versi Inggris puisi Boris Pasternak, Goenawan Mohamad telah menghasilkan sejumlah sajak yang sangat rapat pengucapannya sehingga oleh sementara pengamat dianggap sebagai puisi yang sangat sulit dipahami. Untunglah kita bahwa jumlah kaum cerdik pandai seperti mereka itu tetap ada sampai sekarang, masih tetap aktif dan arif memilih segala sesuatu yang terkandung dalam kesusastraan asing yang bisa dimanfaatkan untuk menjaga agar kesusastraan kita tetap sehat.

Daftar Pustaka

- Andangdjaja, Hartojo. 1990. "Tagore bagi Kita" kata pengantar untuk terjemahan karya Rabindranath Tagore, *Tukang Kebun* (terjemahan Hartojo Andangdjaja). Jakarta: Pustaka Jaya.
- Bassnett, Susan. 1993. *Comparative Literature. A Critical Introduction*. Oxford: Blackwell.
- Damono, Sapardi Djoko. 1993. "Pengembangan Sastra Melalui Terjemahan." Makalah Kongres Bahasa VI. Jakarta.
- . 1996. "Kebudayaan (di Sekitar) Kita." Makalah dibacakan dalam rangka penerimaan Mataram Award. Mataram, Lombok.
- . 1997. "Rabindranath Tagore, India, dan Kita." Makalah untuk Peringatan 100 Tahun Tagore. Denpasar, Bali.
- Holus, Robert C. 1989. *Reception Theory. A Critical Introduction*. London: Routledge.
- Hooykaas, C. *Perintis Sastra*. 1977. Kuala Lumpur: Fajar Bhakti.
- Johns, A.H. 1979. *Cultural Options and the Role of Tradition: A Collection of Essays on Modern Indonesian and Malaysian Literature*. Canberra: ANU Press.
- Jost, François. 1974. *Introduction to Comparative Literature*. New York: Pegassus.
- Mohammad, Mohammad Daud (Ed.) 1987. *Tokoh-Tokoh Sastra Melayu Klasik*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Salmon, Claudine. 1996. "Asal-usul Roman Melayu Modern: Tjhit Liap Seng (Bin-

- tang Tujuh) Karangan Lie Kim Hok” dalam *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Ed. Leo Suryadinata). Jakarta: Grasindo.
- Suryadinata, Leo. 1996. “Cerita Silat Tionghoa di Indonesia: Ulasan Ringkas” dalam *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Ed. Leo Suryadinata). Jakarta: Grasindo.
- Teeuw, A. 1979. *Modern Indonesian Literature I, II*. The Hague: Martinus Nijhoff.
- Winstedt, Richard. 1972. *A History of Classical Malay Literature*. Kuala Lumpur: Oxford University Press.
- Zaini-Lajoubert, Monique. 1996. “Syair Cerita Siti Akbari Karya Lie Kim Hok (1884) Penjelmaan Syair Abdul Muluk (1846)” dalam *Sastra Peranakan Tionghoa Indonesia* (Ed. Leo Suryadinata). Jakarta: Grasindo.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C5
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Pengaruh Asing dalam Sastra Indonesia
Penyaji	: Sapardi Djoko Damono
Pemandu	: Yus Rusyana
Pencatat	: a. Maryanto b. Maini Trisna Jayawati
Peserta	: 120 Orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** Rachmat Djoko Pradopo, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

a. **Pertanyaan:**

Ada dua jenis sastra, yaitu soneta dan balada. Mengapa balada tidak begitu diterima pada zaman Pujangga Baru dan baru dimasukkan lagi oleh W.S. Rendra?

b. **Jawaban:**

Syair-syair yang berkembang pada zaman Pujangga Baru bersifat naratif. Pada waktu itu balada hanya dikembangkan oleh Amir Hamzah ketika ia menulis "Hang Tuah" dan "Batu Belah". Setelah itu, syair naratif itu dilupakan, dan baru kemudian Rendra menyalahkan kita dengan *Balada Orang-Orang Ter-cinta*-nya. Salah satu alasan adalah puisi Indonesia pada waktu itu betul-betul semrawut karena ditulis oleh orang-orang yang tidak menguasai bahasa Indonesia. Jadi, orang Jawa, Sunda, dan Bali yang baru belajar bahasa Indonesia menulis puisi awur-awuran. Saya setuju dengan pernyataan bahwa pada zaman Pujangga Baru adalah zaman perasaan karena pengaruh romantik sangat kuat.

2. **Penanya:** Th. Sri Rahayu Prihatmi, Universitas Diponegoro, Semarang

a. **Pertanyaan:**

Dalam situasi sekarang ini adakah sastra yang kita anggap asli? Bagaimana teori sastranya? Selama ini sarjana sastra selalu didesak untuk menciptakan teori sastra sendiri yang khas Indonesia.

b. **Jawaban:**

Kalau saya boleh usul, tidak usahlah kita menciptakan teori sastra sendiri itu. Bagaimana kita bisa menciptakan teori sendiri kalau genre-genre yang kita kembangkan itu semua pinjaman. Yang namanya drama, puisi, dan prosa itu konsep Barat. Untuk meneliti konsep itu, diperlukan teori yang dikembangkan dari negeri tempat konsep itu dikembangkan. Boleh-boleh saja upaya penciptaan teori, tetapi jangan sukar-sukar.

3. Penanya: Totok Priyadi, Universitas Tanjungpura, Pontianak**a. Pertanyaan:**

Sejauh mana karya sastra dikatakan bermutu dan tidak bermutu jika dikaitkan dengan hal pengaruh dan mempengaruhi? Karya sastra yang bermutu adalah karya yang mengandung pengalaman. Jadi, karya yang sudah dipengaruhi tergolong karya yang tidak bermutu.

b. Jawaban:

Untuk menentukan apakah karya terjemahan itu bermutu atau tidak, saya tidak menggunakan ukuran itu. Kalau itu ukurannya, runtuhlah semua keagungan karya sastra klasik kita karena semuanya terjemahan dan saduran. Syair-syair yang indah semuanya pinjaman juga. Yang menjadi prinsip penting di dalam sastra terjemahan/bandingan adalah begitu sastra itu diterjemahkan atau disadur ke bahasa sasaran, sastra itu otomatis menjadi bagian yang sah dalam bahasa sasaran itu. Jika karya sastra Shakespeare diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, terjemahannya itu bagian dari sastra berbahasa Indonesia, bukan sastra berbahasa Inggris.

4. Penanya: Djoko Saryono, IKIP Malang**a. Pertanyaan:**

Apakah pengaruh yang kita bicarakan sekarang ini merupakan suatu bentuk budaya kecacatan sastra kita atau sesuatu yang wajar dan yang kita butuhkan?

b. Jawaban:

Terjemahan dianggap sebagai bagian yang sah. Sastra terjemahan perlu dipelajari di sekolah. Pengaruh tidak perlu diresahkan, tidak apa-apa, justru menambah khazanah sastra kita.

SASTRA DAN INDUSTRI BUDAYA DALAM ERA REFORMASI

Ikranagara
Sastrawan

1. Pembuka

Sampai sekarang pun, di negeri kita, penggunaan istilah ataupun frasa masih banyak yang perlu dibakukan, agar kesimpangsiuran dalam menangkap maksud ketika kita merepresentasikan pikiran-pikiran dengan menggunakan bahasa diskursif tidak berterusan. Selain itu, meskipun sudah banyak pula yang telah dibakukan, tampaknya masih belum berhasil dalam memasyarakatkannya sehingga juga berakibat berlanjutan kejadian salah tangkap dalam urusan maksud tadi. Kita ambil contoh tema Kongres Bahasa Indonesia VII yang sedang kita lakoni sekarang ini, "Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi". Harap diperhatikan frasa "era globalisasi". Tentulah yang dimaksudkan adalah zaman terkini kita ini, dan sekaligus diasumsikan bahwa zaman yang akan kita masuki, yaitu Abad 21, adalah juga termasuk ke dalam "era globalisasi" itu.

Kalau kita tanyakan, kapan "era globalisasi" itu awalnya, akan kita peroleh jawaban yang beragam, sama halnya dengan apakah Abad 21 nanti masih bisa disebut "era globalisasi" juga, jawabnya akan beraneka dalam bentuk hepotesis ataupun prediksi-prediksi belaka. Apalagi kalau "globalisasi" itu sendiri memang bisa dimaknai sebagai gerak menyebar dari suatu "pusat" tertentu ke banyak "pinggiran", dan yang ada di "pusat" itu adalah suatu *Grand Narrative*, yang terjadi pada zaman (penyebaran) Hindu sebagaimana tercatat dalam sejarah kita pun bisa disebut sebuah "era globalisasi". Demikian juga halnya dengan yang terjadi pada zaman (penyebaran) Islam, lalu zaman penjelajahan (oleh Barat) yang dilanjutkan dengan zaman penjajahan (oleh Barat) yang biasa juga disebut zaman kolonial, dan seterusnya. Apakah zaman kebangkitan bangsa terjajah atau yang juga bisa disebut zaman pascakolonial itu masih bisa dipandang sebagai gerak dari suatu "pusat" ke "pinggiran". Padahal, yang terjadi justru geraknya merupakan arus balik menolak "pusat" (*baca*: negeri penjajah) dan lahirnya banyak "pusat" baru (*baca*: negara kebangsaan baru) di tempat yang dulunya diposisikan sebagai "pinggiran" itu (Gandhi, 1998). Dengan kata lain, yang terakhir ini bisa diistilahkan sebagai gerak "antiglobalisasi", karena di dalam frasa "Pasca-kolonial" itu terkandung konotasi oposisi sehingga yang terjadi sebenarnya adalah peristiwa "*Decentering*", pinjam istilah dari wacana *Postmodern* (Rosenau, 1992).

Akhirnya, pengertian yang kita gunakan sekarang ini, di zaman terkini kita, menjelang memasuki Abad 21, boleh jadi berawal dari sejak runtuhnya Tembok Berlin, atau dalam bahasa ekonominya: runtuhnya sistem ekonomi komunis dan unggulnya sistem ekonomi kapitalis. Artinya, yang diglobalisasikan adalah sistem pasar bebas ekonomi kapitalis itu, dengan perangkatnya antara lain GATT dan WTO, (Mander dan Edward Goldsmith, 1996). Dan kalau kita percaya kepada Fukuyama (1992), sistem sosial politiknya juga jelas: demokrasi liberal.⁴ Ini semua tampaknya disepakati dengan yakin sebagai yang tak terelakkan menimpa seluruh bagian planet kita ini. Sebuah

gerak globalisasi mutakhir telah diamini terjadinya.

Mengingat sudah terjadi gerak globalisasi beberapa kali di dalam sejarah kita, ada baiknya kalau yang mutakhir ini kita sebut saja sebagai “neoglobalisasi”, atau diper-tegas menjadi “neokolonalisasi” untuk membedakannya dengan gerak globalisasi pada zaman Kolonial, dengan catatan zaman Perang Dingin termasuk bagian di dalam zaman pascakolonial. Jadi, setelah membaca surat dari Panitia Kongres Bahasa VII kepada saya, saya pun berkesimpulan bahwa memang ada kaitannya antara pengertian yang dikandung dalam globalisasi **sistem ekonomi** dan **sosialpolitik** seperti yang diyakini itu dengan maksud yang dikandung di dalam topik yang dimintakan kepada saya untuk membahasnya dalam kongres ini: industri budaya. Selengkapnya surat Panitia itu mengungkapkan agar saya menggarap topik “Karya Sastra dalam Pengembangan Industri Budaya”: (1) Bagaimana kondisi karya sastra dalam pengembangan industri budaya sekarang? (2) Kondisi yang bagaimana yang diharapkan sehubungan dengan butir kondisi sastra itu? (3) Strategi yang bagaimana yang perlu ditempuh untuk mencapai kondisi yang diharapkan itu? Selain ketiga pertanyaan tersebut, dalam menjawab ketiga pertanyaan itu, kepada saya juga diminta untuk mempertimbangkan tiga hal ini: (a) pemanfaatan karya sastra dalam pengembangan industri budaya; (b) faktor penghambat dan penunjang pemanfaatan karya sastra dalam pengembangan industri budaya; (c) upaya yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan karya sastra dalam pengembangan industri budaya.

2. Dunia seni

Frasa “dunia seni” (*artworld*) bisa mempunyai dua pengertian, yang filosofis dan yang sosial. Yang filosofis membatasi dirinya pada masalah estetikanya saja sehingga seni dipandang sebagai sebuah produk dari kegiatan yang khusus dan dilakukan juga oleh orang-orang yang memiliki bakat khusus sehingga benar-benar dipandang sebagai sebuah dunia yang memiliki otonomi dan kebebasan yang asasi. Mungkin sekali ungkapan Chairil Anwar yang sudah sama kita kenal bahwa *yang bukan penyair tidak ikut ambil bagian* itu dimaksudkan mendukung pengertian “dunia seni” sebagai dunia yang memiliki otonomi ini. Atau, ucapan Andre Malraux “karya seni itu tidak punya fungsi lain kecuali sebagai karya seni saja,” sedangkan pengertian yang satunya lagi, yang sosial, melihat dunia seni itu tidak bisa otonom karena bagaimanapun dalam kenyataan hidupnya sang seniman melakukan interaksi dengan lingkungannya dan tergambar pula dalam karya-karyanya sehingga membawa konsekuensi, misalnya karya seni itu punya fungsi di dalam masyarakat, ataupun berlawanan dengan motto Chairil Anwar tadi sehingga bisa dirumuskan motto yang lain seperti *yang bukan penyair boleh saja ambil bagian*. Sudah tentu kedua kubu ini masing-masing dalam posisi ekstrem. Yang mungkin keluar sebagai kebenaran boleh jadi sebuah hasil pendekatan jalan tengah atau sama sekali meninggalkan keduanya sebagai yang tidak valid lalu melahirkan sebuah rumusan baru di luar keduanya.

3. Perang Dingin

Saya tunda dulu perdebatan apakah “dunia seni” itu otonom atau tidak. Marilah kita langsung saja mengamati praktiknya sebagaimana yang tercatat dalam sejarah. Pada lembaran sejarah Perang Dingin dapat kita baca bagaimana kubu kapitalis-demokrasi liberal memperlakukan “dunia seni” itu secara berbeda dibandingkan dengan yang dilakukan oleh kubu komunis-diktator proletariat. Juga perlu kita simak bagaimana perilaku pemerintah Orde Baru dalam mengurus “dunia seni” kita.

Pemerintah komunis-diktator proletariat tegas-tegas menjalankan kontrol terhadap karya seni yang ditampilkan ke depan publik, selain juga melakukan kontrol indoktriner ideologis baik terhadap pikiran/sikap mental para seniman maupun proses kreatif mereka dalam kegiatan memproduksi karyanya. Yang paling populer adalah doktrin kesenian realisme sosialis yang dalam praktiknya di Uni Sovyet (dahulu) sejak Stalin berkuasa benar-benar menggunakan tangan besi berlumur darah. Pelarangan terhadap suatu karya seni selalu diikuti dengan pengebosan ke dalam penjara di tempat terpencil bagi senimannya secara semena-mena. Bahkan, tidak jarang juga dengan penculikan dan pembunuhan tersembunyi. Hanya seniman yang mengikuti garis doktrin ideologi pemerintah dan partai sajalah yang boleh berkarya dan karyanya itu diizinkan untuk ditampilkan ke depan publik.

Dalam hal ini jelas sekali bahwa pemerintah komunis-diktator proletariat menganut paham seni itu punya fungsi, yaitu sebagai kepanjangan ideologi partai dan pemerintah komunis.

Pemerintah kapitalis-demokrasi liberal memberikan kebebasan kepada seniman untuk mengekspresikan dirinya sebebaskan-bebasnya. Apakah seni itu otonom atau berfungsi menjadi tidak penting, asalkan semua itu dilakukan tidak dengan paksaan dan kekerasan. Kebebasan kreatif dilindungi, baik oleh undang-undang maupun konvensi yang hidup di dalam masyarakat. Memang, kadangkala muncul konflik, seperti pernah terjadi di Amerika Serikat sendiri, gara-gara protes sekelompok anggota masyarakat terhadap suatu karya yang dinilai tidak sejalan dengan tatanan nilai moral masyarakat umumnya. Yang saya maksudkan adalah sebuah pameran fotografi yang menampilkan dunia kaum homoseks, terutama sekali foto yang memasukkan lambang suci agama Katolik berupa patung Yesus disalib diletakkan di lubang WC-duduk. Masalahnya, senimannya mendapat dana subsidi dari pemerintah, artinya itu adalah uang dari pembayar pajak. Nah, pembayar pajak inilah yang protes dan menolak pameran tersebut. Contoh lain adalah kenekadan seorang pemuda yang marah kepada John Lenon karena penyanyi kondang itu pernah dulu mengatakan dirinya lebih populer jika dibandingkan dengan Yesus menyebabkan sang pemuda itu menarik pelatuk senjata dan pelurunya membunuh John Lenon. Tentu saja sang pembunuh dituntut sebagai terdakwa tindak pidana pembunuhan. Namun, ada bahaya yang muncul dari kubu kapitalis-demokrasi liberal ini, yaitu kontrol yang berasal dari kapital (baca: duit) itu sendiri: komersialisme. Seorang pengusaha bisa saja menyewa seorang seniman untuk membuat karya yang di dalamnya terkandung unsur yang bisa menguntungkan perusahaannya atau barang jualannya. Cara lain adalah seorang seniman sengaja mengikuti selera dan tuntutan masyarakat berduit dalam mengolah karyanya. Artinya, targetnya adalah

membuat karya seni yang bertujuan bisa laku keras atau laku mahal meskipun dia tahu karyanya itu sebenarnya tidak sesuai dengan ukuran nilai-nilai yang diyakininya, baik secara estetika maupun moral. Pola-pola lain tentu masih ada, tetapi pada prinsipnya seniman semacam ini biasanya diejek sebagai telah “melacur”, “terbeli”, atau sebagai “penjilat” dan “mata duitan”. Karya semacam itu hanya tergolong hasil kerajinan (*craft*), dan bukan seni sejati (*fine art*).

Berkaitan dengan sastra (baca: seni sejati) dan fungsinya, di dalam budaya komunis-diktator proletariat seni itu difungsikan sebagai alat atau bagian dari kekuatan ideologi politik, sedangkan di dalam budaya kapitalis-demokrasi liberal sastra itu, antara lain, sebagai alat untuk mencari duit.

Dalam era globalisasi mutakhir, tampaknya kita tidak perlu lagi memperhitungkan kubu komunis-diktator proletariat itu karena kubu itu sudah rontok. Memang, RRC, Kuba, dan Korea Utara masih bertahan. Namun, RRC sendiri sekarang sudah membuka sejumlah zone perdagangan pasar bebas kapitalis, selain Hong Kong yang diambil kembali dari Inggris baru-baru ini. Untuk membuka kurikulum ekonomi kapitalis di universitasnya, RRC sengaja mengundang ahlinya dari Amerika Serikat, antara lain Prof. Bruce Glassburner. Oleh karena itu, tinggal menunggu waktu yang tepat saja reformasi di bidang politik akan disesuaikan dengan yang terjadi di bidang ekonominya itu. Demikian juga halnya dengan Korea Utara dan Kuba: tinggal tunggu waktu saja.

Yang terjadi di zaman Orde Baru di Indonesia tampaknya merupakan kombinasi dari kedua kubu itu. Komersialisasi memang terjadi, tetapi juga pelarangan terhadap penampilan karya seni untuk publik sampai penjeblosan seniman ke dalam penjara juga ada. Penculikan dan pembunuhan terhadap seniman memang tidak terjadi. Selain itu, kita juga berkiperah di bidang seni sejati yang berposisi otonom itu.

Jika kembali ke negara kapitalis-demokrasi liberal, cukuplah saya tampilkan Amerika Serikat sebagai contohnya karena memang negeri itulah yang lebih banyak saya tahu daripada negeri kapitalis lainnya. Di Amerika Serikat, produk industri budaya di bidang sastra memang tinggi. Namun, yang terbesar volume produktivitasnya adalah novel populer yang kebanyakan dijual di pasar swalayan. Jenis inilah yang oleh penulisnya dan produsernya diniatkan untuk menjadi barang dagangan yang diharapkan bisa laku keras. Ternyata peminatnya memang besar. Dari pengamatan saya, umumnya pembacanya menyatakan sekadar mengisi waktu kosong untuk bersantai, tidak berbeda dengan menonton serial televisi, yang juga tergolong seni populer. Jadi, kalau kita jumpai penumpang kereta listrik bawah tanah atau bus kota tampak asyik membaca buku novel, hampir dapat dipastikan yang dibaca itu novel populer. Demikian juga kalau mereka sedang bersantai di pantai berjemur badan, atau duduk-duduk di bawah rindang pohon di taman, di bangku halte bus, dan semacamnya, buku yang dibaca itu juga biasanya buku novel populer. Selesai dibaca, buku itu lalu mereka lupakan, dan dibuang begitu saja. Kalau bersih-bersih rumah atau apartemen, semua barang tidak berguna mereka kumpulkan, lalu dibuang, dan yang dibuang itu termasuk beberapa buah buku novel populer tadi, mungkin ditambah dengan sejumlah buku komik, majalah pornografi dan semacamnya. Produk “industri budaya” semacam itu

tentulah terutama sekali memperhitungkan untung-ruginya secara dagang.

Itulah sebabnya Adorno (1984) menolak produk “industri budaya” untuk dikategorikan sebagai produk kesenian. Dan Adorno memang termasuk salah seorang pemikir estetika modern yang berpendirian bahwa “dunia seni” itu memiliki otonomi dan kebebasan yang asasi. Selain dia, salah seorang pemberi dasar kepada wacana *The New Criticism* di Amerika, Beardsley, pada dasarnya sependapat bahwa “dunia seni” itu memang otonom (Cooper, (1995). Pandangan pemikir yang terakhir inilah sebenarnya yang banyak mempengaruhi kenapa pandangan bahwa “dunia seni” itu otonom dipertahankan sampai sekarang. Bahkan, di Amerika Serikat jelas sekali perbedaan antara sastra “klasik” (baca: sastra sejati) dengan novel populer, dan pemahamannya tidak terbatas kepada elit tertentu saja, tetapi sampai ke masyarakat awam. Jadi, alasan utama yang selalu dikemukakan sebagai legitimasi untuk memproduksi “seni massa” (baca: novel populer) berupa tujuan untuk membuat agar kesenian tidak terasingkan dari masyarakatnya, tidaklah bisa diterima. Pembedaannya tetap dipertahankan. Misalnya saja, toko buku “City Light” di San Francisco itu tidak pernah menjual novel populer sebab tempat novel seperti itu biasanya di pasar swalayan dan bukan di toko bergengsi budaya tinggi.

Agar seni sejati itu tidak terasingkan dari masyarakatnya, pendidikan untuk mengapresiasi kesenian di Amerika Serikat dilakukan lewat jalur pendidikan dari SD sampai ke tingkat universitas. Sudah tentu untuk kepentingan program apresiasi itu disediakan buku-buku penuntun untuk tumbuhnya apresiasi itu. Misalnya saja, untuk siswa SD klas 3, disediakan buku-buku tipis bahkan bergambar tentang kehidupan dan karya para sastrawan yang tergolong “klasik” di negeri itu.

Kalau kita ingin menerapkan program semacam itu di Indonesia, bisa diterbitkan buku tipis dihiasi gambar tentang Amir Hamzah, Hamka, Sutan Takdir Alisyahbana, Chairil Anwar, Idrus, dan lain lain bahkan juga untuk yang masih hidup seperti Asrul Sani. Tentu saja isi dan bahasa buku tipis yang dihiasi gambar-gambar itu disesuaikan dengan kemampuan berbahasa dan daya tangkap siswa yang dijadikan target untuk program apresiasi ini. Buku tentang sastrawan yang sama harus dibedakan antara yang untuk siswa SD dengan siswa SMP ataupun SMA. Buku-buku semacam ini bisa digolongkan ke dalam produk industri budaya. Termasuk rubrik khusus *Kakilangit* yang merupakan sisipan tetap Majalah Sastra *Horison* untuk program apresiasi siswa tingkat SMA. Program Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa khususnya untuk SMA dengan mengirim tim yang mengikutsertakan seniman ke sekolah-sekolah, misalnya, sungguh sangat berguna untuk meningkatkan apresiasi. Peningkatan apresiasi ini tentu akan bermanfaat juga bagi pengembangan pangsa pasar bagi buku-buku sastra kita. Seyogyanyalah pihak penerbit buku sastra diikutkan dalam kegiatan-kegiatan sejenis ini.

Jika kembali kepada isi surat Panitia Kongres Bahasa VII tadi, saya akan mempertimbangkan tiga hal ini: (a) pemanfaatan karya sastra dalam pengembangan industri budaya; (b) faktor penghambat dan penunjang pemanfaatan karya sastra dalam pengembangan industri budaya; (c) upaya yang perlu dilakukan untuk memanfaatkan karya sastra dalam pengembangan industri budaya, tidak mungkin lagi saya jawab

secara positif sebab, yang perlu dimanfaatkan itu bukan karya sastra untuk pengembangan industri budaya, tetapi sebaliknya industri budaya itulah yang harus bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan apresiasi sastra di masyarakat luas. Sebagai contoh sudah saya ungkapkan bagaimana industri budaya menerbitkan buku-buku untuk kepentingan apresiasi sastra di sekolah-sekolah, dari tingkat SD sampai dengan universitas. Ini salah satunya sebab masih banyak yang bisa kita pikirkan dan kemudian kita usulkan untuk diprogramkan, selain lewat jalur pendidikan formal. Lewat media massa seperti koran-koran, majalah hiburan, televisi, radio, dan sebagainya, bisa juga disalurkan usaha peningkatan apresiasi itu. Tentu tidak bisa kita buat model yang bisa dipakai untuk semua media itu, tetapi hendaknya disesuaikan dengan watak dan kekuatan masing-masing media. Bentuknya tentulah bisa bermacam-macam, antara lain, berupa lomba menulis tentang suatu karya seni tertentu yang dibuka untuk kategori yang berbeda-beda, lengkap dengan hadiah yang bermanfaat dan bergengsi, selain didukung oleh sponsor-sponsor yang kuat. Singkat kata, program aksi yang serba praktis ini bisa dipikirkan lebih jauh lagi.

4. Dua Masalah

Seniman itu dalam berkarya hendaknya memiliki otonomi dan kebebasan kreatif, tidak terganggu oleh *iming-iming* komersialisasi ataupun ketakutan oleh pemasangan kreativitas. Dengan kata lain, seorang seniman dalam melahirkan karya sastra sejati haruslah berorientasi kepada kualitas estetisnya (*quality oriented*), dan tidak berorientasi kepada pasar (*market oriented*). Di Taman Ismail Marzuki, prinsip inilah yang menjadi pegangan kebijakan pengelolaan kesenian oleh Dewan Kesenian Jakarta, dan saya kira juga dewan kesenian di kota-kota lain. Oleh karena itu, adalah tugas Pusat Kesenian Jakarta untuk menyediakan sarana dan perangkat pemasarannya sehingga penonton bisa datang dan mau membeli tiket untuk acara yang dipilih oleh Dewan Kesenian Jakarta. Dewan Kesenian Jakarta sama sekali tidak punya hak mencampuri proses kreatif seniman, bahkan juga bagaimana cara seniman menampilkannya di pentas TIM. Demikian juga halnya dengan pihak manajemen Pusat Kesenian Jakarta, tidak punya hak mengganggu otonomi seniman tersebut. Penataan aturan main sehubungan dengan hak dan kewajiban semacam inilah yang bisa menumbuhkan situasi dan kondisi normal di lingkungan Taman Ismail Marzuki. Baru terjadi ketidaknormalan ketika ada intervensi dari pemerintah, misalnya terjadinya pelarangan yang kita kategorikan sebagai tindak pemasangan kreativitas itu. Dan, seniman Jakarta selalu beraksi terhadap intervensi semacam itu, bahkan mengajukan tuntutan-tuntutan ke Kabinet ataupun ke DPR, tetapi intervensi masih berlanjut di zaman Orde Baru yang lalu.

Jadi, dapatlah disimpulkan di sini bahwa ada dua masalah penting yang perlu kita bahas di sini, yaitu (1) yang menyangkut masalah otonomi “dunia seni” atau kebebasan kreatif dan (2) yang menyangkut masalah ekonomi. Kedua-duanya sama penting, karenanya bisa dibolak-balik mana yang didahulukan, *toh* yang penting harus kita sadari bahwa kedua masalah ini memang jalin-menjalin.

Sebenarnya masalah ini sudah sempat muncul di dalam grup diskusi yang kami selenggarakan secara berkala di Tebet yang diikuti sejumlah budayawan dan seniman

yang punya waktu, dan menghasilkan beberapa simpulan tertulis. (Perlu dicatat bahwa semangat dalam Rembug Budaya Terkini ini merupakan kelanjutan *Forum Jakarta Untuk Reformasi Kesenian* yang dilakukan di TIM pada Mei–Juli 1998.) Yang segera akan saya ungkapkan di sini, karenanya, merupakan sebagian dari hasil rembugan kami dalam Rembug Budaya Terkini itu. Sebagian dari kesimpulan tertulis itu saya manfaatkan untuk menyusun kata pengantar untuk kumpulan puisi *Pukat 14* (Kansas, 1998).¹ Dari pengantar itulah saya kutip sebagian di sini.

... Tentulah acara kesenian [*Rembug Apresiasi Jemberana Bali Barat Purnamaning Kapat 1998*] selama empat hari [3 s/d 6 Oktober 1998] di kota Negara itu tidak bisa dibandingkan dengan *Art Summit 1998* yang berlangsung di Jakarta selama sebulan (September–Oktober 1998). Mungkin karena adanya ikatan batin dengan kota kelahiran saya itu, terus terang saja di mata saya peristiwa budaya di Negara itu jauh lebih bermakna dibandingkan dengan yang di Jakarta. Tapi mungkin juga karena ada permasalahan yang sekarang ini sedang mengganggu saya. Yaitu persoalan ketimpangan penggunaan dana hasil pembangunan untuk Daerah dan Pusat, yang menurut penilaian saya dan penilaian banyak pihak sudah tergolong sama sekali tidak adil! Jadi, saya hanya menghadiri acara pembukaan *Art Summit* saja, selebihnya tak punya minat untuk menonton pertunjukan yang dari dalam maupun dari luar yang disajikan, meskipun saya sedang berada di Jakarta. Seandainya saja saya punya waktu pada saat berlangsungnya acara di Negara itu, pastilah saya akan memilih datang ke sana ketimbang ke *Art Summit*. Sungguh, saya tidak bermaksud melebih-lebihkan ekspresi saya di sini, tetapi inilah yang saya rasakan sekarang.

Itulah sebabnya maka tadi saya katakan reaksi saya terhadap penyelenggaraan acara kesenian di Negara itu mengharukan saya, apalagi setelah mengetahui betapa kecil dana yang tersedia untuk itu. Dana sekecil itu, untuk ukuran Jakarta (baca: Pusat), tidak ada artinya sama sekali. Honorarium satu orang sutradara teater, atau satu orang pemain sinetron saja bisa lebih dari itu. Dari sini saja kita bisa langsung melihat betapa ketimpangan itu memang nyata! Itulah sebabnya maka saya sangat mendukung dibuangnya sistem sentralisasi yang ada sekarang ini, dan menggantinya dengan sistem otonomi total dalam segala bidang bagi 27 propinsi kita, termasuk bidang ekonomi, segera, secara bersungguh-sungguh dan bukan sekedar basa-basi, dan tidak direcoki oleh peraturan dan keputusan presiden yang berwatak karet dan bisa dimanipulasi pelaksanaannya di lapangan. Tentu, hal ini harus kita perjuangkan bersama lewat berbagai lembaga dan forum yang tepat.

Yang pertama tentu saja kita harus mendeteksi problem-problemnya. Hasil pantauan saya dan sejumlah teman-teman di Jakarta menyimpulkan bahwa problem yang dihadapi budayawan dan seniman Indonesia bisa dilihat sebagai dua problem besar:

- (a) yang berkaitan dengan hak ekspresi;
- (b) yang menyangkut manajemen/ekonomi.

Maka, hak kebebasan ekspresi, hak menampilkan karya di depan publik, hak publik untuk menikmati karya seni, haruslah dilindungi dengan undang-undang yang mengacu kepada Pasal 28 UUD 45, Pasal 27 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan Pasal 15 Perjanjian Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, sedangkan problem manajemen/ekonomi, ini menyangkut sektor produksinya (termasuk modal kerjanya), metode kerja (termasuk proses kreatif) dan pemasaran (termasuk upah dan keuntungan), yang jelas memang ada kaitannya dengan masalah dana dan sarana, selain SDM-nya. Karenanya tidak bisa tidak juga menyangkut sistem ekonomi macam apa yang bisa menguntungkan seniman.

Singkatnya, kita hendaknya mampu melahirkan konsep dan sekaligus model-model yang bisa dimanfaatkan oleh seniman perorangan ataupun komunitasnya agar seniman atau komunitasnya memiliki kekuatan dalam arti kreativitas ataupun ekonomi.

Yang saya ungkapkan ini tentulah baru garis besarnya saja. Program aksinya untuk ide-ide ini nanti bagaimana, masih harus kita pikirkan bersama sehingga tujuan utama kita bisa tercapai. Saya bersama sejumlah teman-teman di Jakarta menyimpulkan adanya tujuh tujuan utama:

- a. tumbuhnya kreativitas yang bebas di segala bidang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,
- b. maraknya hak kebebasan berekspresi secara artistik ataupun intelektual,
- c. desakralisasi dalam hal persepsi terhadap semua urusan duniawi manusia di bidang estetis dan intelektual, dengan tetap menjadikan landasan moral religius sebagai yang sakral dan ilahiat,
- d. perlindungan atas hak seniman dan budayawan untuk menampilkan karya estetis dan intelektual di depan publik,
- e. perlindungan atas hak publik untuk menikmati karya estetis dan intelektual,
- f. perlindungan atas hak cipta karya estetis dan intelektual,
- g. perlindungan atas hak ekonomi seniman dan budayawan agar bisa diperhatikan semaksimal mungkin untuk menopang kebutuhan hidupnya.

Sekali lagi, semua cita-cita luhur itu tidak akan menjadi kenyataan jika kita tidak bersatu dalam memperjuangkannya. Hendaknya kita senantiasa ingat, setidaknya ada tiga tujuan kenapa Negara Republik Indonesia ini didirikan sebagaimana diamanatkan dalam Mukadimah UUD 45:

- 1) mencerdaskan kehidupan bangsa,
- 2) mewujudkan kehidupan berbangsa yang menjamin kebebasan,
- 3) mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Jadi, kalau sampai Rendra tanpa basa-basi memuji pertunjukan teater dari Negara, maka dapatlah dipastikan bahwa karya yang disaksikannya itu mengandung kebebasan ekspresi. Suatu karya yang tidak mengandung atau tidak berangkat dari kebebasan ekspresi sudah bisa diperkirakan akan mati sejak masa embrionalnya. Dengan kata lain, seniman teater dari kota kecil Negara yang tampil di Banyuwangi itu sudah berada pada pijakan yang benar. (Penerimaan terhadap penilaian oleh Rendra ini bukan karena dia seniman dari Pusat, melainkan karena dia seniman yang punya integritas dalam hal ini. Tentu, masih terbuka bagi pendapat yang lain.)

Seringkali terjadi sebuah karya seni yang diunggulkan sebagai mewakili suatu daerah tertentu di forum nasional di Jakarta, ternyata hanyalah hasil rekayasa manipulatif dari Pemerintah Daerah. Yang tampil itu biasanya bukan seniman yang memang berkiprah di bidangnya secara serius, melainkan sekedar comotan mendadak atas dasar famili-isme, konco-isme, dan yang paling penting: atas dasar demi keamanan dan kepentingan politik pemerintah dan golongan tertentu belaka. Hasilnya? Sungguh mengecewakan!

Dalam era reformasi ini, perilaku negatif tersebut tidak boleh lagi terjadi. Dan, kalau itu dilakukan, Pemerintah Daerah yang bersangkutan hendaknya bisa dituntut sebagai pelanggar undang-undang. (Nah, undang-undang yang melindungi kebebasan ekspresi inilah yang harus kita lahirkan!) Akan tetapi, akibat ulah negatif semacam itu sudah terlanjur menyebarkan aroma tak sedap berupa kesimpulan (baca: fitnah) bahwa di daerah tersebut tidak ada senimannya yang benar! Ini jelas telah melecehkan kemampuan daerah dan sekaligus meninggikan "martabat" Pusat sehingga mau tidak mau kita pun bertanya-tanya: apakah ini bagian dari politik legitimasi Pusat dalam menjalankan politik kebudayaannya atas Daerah?

5. Ekonomi Kita

Tak seorang pun sekarang ini, bukan hanya bangsa kita yang sedang ditimpa krisis ekonomi berat saja, tetapi seluruh dunia, yang bisa melepaskan pikirannya dari masalah ekonomi. Ekonomi merupakan tema terpenting dalam wacana modernisme. Bahkan, hampir saja kita mengalami kiamat akibat perang nuklir jika saja perang dingin benar-benar meningkat menjadi perang terbuka. Dan, kita semua tahu inti perbedaan tajam kedua kubu yang saling berhadapan di zaman Perang Dingin itu adalah dalam wacana dan praktik paham ekonomi mereka, sedangkan wacana dan praktik bidang sosial-politiknya, dan lain-lain, merupakan konsekuensi logis dari paham itu.

Dalam pengantar untuk *Pukat 14* itu dipertanyakan juga "... sistem ekonomi macam apa yang bisa menguntungkan seniman". Masalahnya adalah bagaimana kita bisa melahirkan "... konsep dan sekaligus model-model yang bisa dimanfaatkan oleh seniman perorangan atau pun komunitasnya, agar seniman atau komunitasnya memiliki kekuatan dalam arti kreativitas ataupun ekonomi."

Untuk menanggapi masalah ini, izinkanlah saya mengutip dari esai Ekonomi Kita (Ikranagara, 1998)² yang saya bacakan di TIM dalam memperingati Hari Kemerdekaan Ke-53 yang lalu, untuk kembali kita simak bersama.

Yang pertama saya ungkapkan di sini adalah sistem yang saya tolak.

... Ekonomi Global yang dijadikan panutan Orde Baru dalam membangun ekonomi bangsa kita ini mengandalkan kepada ekonomi pertumbuhan, dan menjanjikan terjadinya ekonomi pemerataan lewat proses yang biasa dipropagandakan sebagai *trickle down*. Namun, sampai pun pada detik sebelum terjadinya krisis ekonomi menimpa kita, hal itu tidak terjadi. Gunawan Mohamad tidaklah mengada-ada ketika menyatakan bahwa pada detik itu hasil pembangunan ekonomi Orde Baru hanyalah memperkaya-roya 2% jumlah penduduk kita, sedangkan lainnya tetap hanya mendapatkan remahnya saja. Dengan kata lain *trickle down* itu memang hanya menghasilkan tetesan-tetesan belaka yang tidak

mampu bahkan sekedar menghapus haus penduduk yang jumlahnya 98%. Tercatat bahwa pada saat itu 20% masih hidup di bawah garis kemiskinan. (Penduduk Indonesia berjumlah 200 juta jiwa!) Hasil pembangunan ekonomi Orde Baru pada detik sebelum krisis ekonomi melanda kita adalah berupa kesenjangan sosial yang cukup fantastik!

... Demikianlah, bagi saya jelas sekali kaitan antara bencana yang menimpa kita ini dengan kehadiran ekonomi global. Karena itu pulalah, jelas bagi saya, apa yang sedang dikerjakan oleh para ahli ekonomi kita sekarang ini, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang berada di luarnya, adalah tak lain hanya akan mengulang kembali sejarah yang kita mulai sejak tahun 1968 itu! Ekonomi pertumbuhan akan menjadi acuan kembali, dan tidak mustahil mungkin saja akan berhasil memperbaiki perekonomian kita sebagaimana yang telah terjadi di Zaman Orde Baru. Namun, sebagaimana yang terjadi di zaman itu, kesenjangan sosial ekonomi akan berkelanjutan karena teori *trickle down* itu hanyalah janji omong kosong untuk menina-bobokkan rakyat banyak. Ekonomi pemerataan yang menjadi amanat bangsa Indonesia tidak akan pernah menjadi kenyataan. Karena *trickle down* itu pada dasarnya sistem *top-down* yang jelas-jelas tidak sesuai dengan asas demokrasi. Hanya dengan sistem *bottom-up* sajalah demokrasi akan menjadi kenyataan dan ruang publik (*public space*) akan terbuka, artinya rakyat ikut berpartisipasi dalam menentukan langkah kebijakan di segala bidang, termasuk di bidang ekonomi. Dan, kalau kebijakan ekonomi yang lama akan diulang kembali di negeri kita ini, bencana yang sama juga bisa diprediksikan sedang menunggu kita di depan itu nanti.

Atau, kalau pun bencana itu tidak terjadi, artinya ekonomi pertumbuhan akan berjalan mulus berdampingan dengan kesenjangan sosial ekonominya, kesuksesan semacam itu justru yang perlu kita takutkan, lebih menakutkan dibandingkan kegagalannya. Kenapa? Kesuksesan itu berarti kekayaan alam kita akan dikuras lebih keras lagi untuk kepentingan ekonomi pertumbuhan yang bergantung kepada tuntutan produktivitas dan pasar ekonomi global. Dalam kenyataannya itu berarti hanya akan memperkaya raya segelintir makhluk saja di negeri kita ini maupun di tingkat transnasional. Dengan kekuatan ekonomi mereka, pemerintah negara mana pun, tak terkecuali juga pemerintahan kita, akan tak berdaya menghadapi mereka, atau justru malah menjalin kerja sama organis dengan mereka, antara lain, dengan menggaungkan slogan atau palu godam "pertumbuhan ekonomi membutuhkan stabilitas politik" sehingga kebijakan ekonomi, politik, dan hukumnya akan selalu menguntungkan mereka yang kaya raya dan berkuasa itu.

Bagi mereka jelas sekali praktik-praktik demokrasi *bottom-up* haruslah dihindari (seperti yang terjadi di zaman Orde Baru). Ruang partisipasi publik bukannya dibuka menjadi lebih luas, melainkan sebaliknya dibatasi sampai sesempit mungkin. Transparansi dan *accountability* tidak lagi dimungkinkan dan semua keputusan dikerjakan secara rahasia dan penuh dengan rekayasa-rekayasa "lempar batu sembunyi tangan". Kalau pun harus ada pemilihan umum, pelaksanaannya haruslah memiliki pintu-pintu rahasia yang bisa disusupi dengan rekayasa untuk memenangkan golongan yang menguntungkan mereka. Yang menangi ini haruslah yang bisa mereka percaya untuk mematuhi perangkat-perangkat ekonomi global seperti GATT, WTO, dan lain-lain. Untuk melestarikan *status quo* yang menangi itu, kalau perlu, dijalankan politik uang (*money politics*) dan politik kekerasan (teror-hasut-keroyokan massal-bakar dan culik-siksa-bunuh). Cara-cara biadab ini ditujukan terhadap mereka yang tidak mau mendukung *status quo* yang mereka gariskan. Pelaksananya adalah kekuatan sipil (termasuk kalangan kriminal) yang terlatih dan terorganisasi, tetapi juga terutama efektif sekali ketika dilakukan oleh kalangan

militer, apalagi kalau tergolong pasukan para komando yang bekerja sama dengan kekuatan intelijen, sedangkan rakyat kecil yang ikut ambil bagian, misalnya, dalam kerusuhan sosial itu disebabkan oleh frustrasi sosial-ekonomi dan karenanya mudah dihasut. Pola ini lumrah terjadi di mana-mana, bukan hanya di negeri kita.

Demikianlah, eksekutif global pun hadir secara *de facto* dalam bentuk kebijakan maupun rekayasa (yang dibuat oleh pemerintah negeri penerima bantuan) yang memberikan legitimasi konstitusional kepada mereka yang kuat ekonominya itu, baik yang di tingkat nasional maupun yang transnasional sebagai pemegang hak untuk menjarah kekayaan alam kita. Singkat kata, korporit nasional kita itu pada hakekatnya merupakan bagian saja, kalau bukan malah kaki tangan, dari korporit transnasional. Lalu, anak cucu kita nanti akan dapat apa jika harta kekayaan alam kita sudah dijarah oleh korporit nasional dan transnasional? Nah, itulah sebabnya saya katakan, bahwa keberhasilannya justru akan jauh lebih berbahaya lagi.

Jadi, bencana yang sekarang akhirnya menggulung negeri kita ini bagaikan badai menggulung sebuah kapal besar di lautan luas, seyogianyalah bisa dibaca sebagai peringatan kepada kita umat manusia agar segera mencari bentuk atau sistem ekonomi yang tidak bergantung kepada ekonomi global yang dikuasai oleh korporit transnasional yang bekerja sama dengan korporit nasional itu.

6. Ekonomi Alternatif

Dalam esai saya itu juga diungkapkan harapan atau contoh sistem ekonomi alternatif, jadi bukan sekadar melakukan penolakan atau negatif saja. Hanya saja bagian yang positif dalam esai saya itu bersumber dari esai Innosanto Nagara berjudul *Mencari Sitem Ekonomi Alternatif* (dikirimkan lewat a-mail, 1998).³ Oleh karena itu, saya kutip saja langsung dari esai itu, untuk kita simak bersama di sini.

... Inkwork, tempat saya bekerja, bisa dilihat sebagai sebuah eksperimen "*democracy in the workplace*", yang bertujuan untuk menghilangkan dinding pemisah antara kepentingan perusahaan dengan kepentingan pekerjanya, dan sebagai eksistensi juga dengan kepentingan komunitas/masyarakat yang lebih luas karena pekerjanya tinggal di sekitar perusahaan. Di Inkwork, setiap pekerja adalah pemilik, karenanya di sini berlaku sistem *one person one vote*, dan tidak menggunakan sistem perwakilan melainkan langsung. Kepemilikan bersama ini tidak berarti para pekerja adalah pemegang saham, sedangkan penanaman modal juga tidak ada, gaji pekerja berdasarkan jumlah jam kerja masing-masing. Keuntungan perusahaan dimasukkan kembali ke perusahaan atau disalurkan ke masyarakat sebagai sumbangan semacam zakat. Dengan sistem ini maka tidak ada karyawan yang kaya sendiri, sedangkan masyarakat, termasuk konsumen, tempat perusahaan ini hidup juga mendapatkan manfaatnya secara nyata.

Akan tetapi, itu mungkin yang paling radikal. Selain itu, juga banyak model yang bisa dilihat. Di AS, yang banyak sekarang ini yang dinamakan ESOP (*Employee Stock Option Plan*), di situ pekerjanya diberi 51% saham perusahaan, dan wakil pekerjalahan yang mengambil keputusan terakhir di *Board of Directors*. Contohnya United Airlines dan Avis Car Rentals. Tapi di situ masih banyak masalah yang bisa timbul, misalnya saja saham yang 51% itu sebetulnya belum bisa menjadi "*controlling interest*", karena seringkali keputusan masih merupakan kepentingan *stockholder* luar, dan bukan pekerja atau konsumen. Namun demikian, setidak-tidaknya kalau keuntungannya tinggi untuk

suatu tahun fiskal, maka pekerja juga ikut mendapatkan keuntungan, dan kapital flight terbatas. Masalah lain, misalnya kalau pekerja tidak kompak 100%, padahal *stock controll* itu baru menjadi mayoritas kalau semua pemegang sahamnya kompak bersatu 100%! Kalau terjadi perpecahan dalam badan pekerja, faksi yang bergabung dengan *stockholder* interest luar pasti menang. Jadi, 51% itu tidak cukup untuk bisa selalu diandalkan sebagai kontrol riil di lapangan. Tapi bagaimana pun kenyataan ini patut disyukuri karena sistem ini sudah diterapkan di banyak perusahaan yang tergolong "*mainstream*" di AS, yang menunjukkan bahwa investor tidak takut untuk ikut.

Tapi koperasi di Indonesia sekarang ini tampaknya sedang dirundung citra yang buruk, penuh dengan sarang laba-laba KKN. Hal ini disebabkan pelaksanaan birokrasi pemerintah di bidang koperasi di Indonesia selama Orde Baru, antara lain dengan masuknya sistem favoritisme, monopoli dan tidak adanya transparansi, ditambah lagi secara konstitusional yang negatif ini didukung dengan pembuatan berbagai keppres dan peraturan pemerintah sampai ke tingkat terbawah. Praktik di lapangan, sampai ke desa-desa, pun tidak lepas dari KKN!

Koperasi memang juga sebuah bentuk perusahaan. Dia bisa untung bisa rugi, tapi bedanya dengan yang bukan koperasi adalah bahwa koperasi memiliki tujuan mulia yaitu untuk kesejahteraan semua yang terlibat dalam usaha itu, baik pekerjanya maupun anggotanya, dan juga untuk kesejahteraan komunitas/masyarakat yang lebih luas. Jadi, penekannya bukan kepada memperkaya individu, melainkan komunitas/masyarakat. Tapi citra ini sudah dirusak oleh praktik di zaman Orde Baru sehingga tampaknya masyarakat di Indonesia kehilangan kepercayaan, bahkan sinis, kepada koperasi.

Tidak demikian halnya yang terjadi di Spanyol. Koperasi Mondragon yang ada di Spanyol merupakan sebuah kisah sukses sebuah sistem ekonomi alternatif. Sistem mereka itu merupakan sistem koperasi yang ekstensif dan tidak dikontrol oleh pemerintah.

Mondragon sekarang ini berhasil menjadi grup bisnis No. 3 terkuat di Spanyol, terbentuk dari sekitar 800 usaha yang mencakup hampir semua bidang, antara lain, industri berat, teknologi, perbankan, supermarket, pendidikan, dan seterusnya. Dan, sistem mereka itu telah berhasil memperkaya lokal Basque secara luar biasa sehingga tak pernah terpengaruh oleh resesi dan tidak bergantung kepada investasi dari luar! Resesi yang pernah melanda Spanyol dan menyebabkan angka pengangguran tinggi (di Spanyol Utara saja mencapai angka 25%) itu, tidak terjadi di daerah Basque. Mondragon pada waktu itu tidak mem-PHK seorang pun pekerjanya!

Memang, seperti halnya semua sistem, Mondragon juga belumlah sempurna. Mereka memakai sistem *representative democracy* yang mengandalkan kepada "*social council*" untuk mewakili pekerjanya, dan "*social council*" ini masih tergolong simbolik belaka sehingga lembaga manajemen masih terlalu kuat dibandingkan pekerjanya. Tetapi, ini merupakan detail yang masih bisa diatur bagaimana baiknya. Jika ada yang mau menerapkan model Mondragon ini di Indonesia, banyak elemen-elemennya yang harus diubah disesuaikan dengan kepentingan dan kondisi lokalnya agar bisa cukup pas. Betapa pun, sistem Mondragon ini memang menarik, terutama karena terbukti telah berhasil baik di Spanyol.

Sistem Italia memanfaatkan bantuan pemerintah, yang mendirikan bank dengan tujuan memasyarakatkan sistem koperasi. Dengan diatur dengan hukum, maka 8% dari semua keuntungan yang dihasilkan oleh setiap koperasi industri di Italia harus dimasukkan kembali ke bank ini, sebagai *seed investment motor* untuk membentuk perusahaan baru dengan struktur yang sama, demokratis, dan keuntungan masuk kembali

ke tangan pekerjanya atau untuk *growth* sehingga industri bisa berkembang tanpa tergantung kepada investor luar, dan kapital tidak bisa kabur ke tempat jauh. Maka, ekonomi di lokal tersebut tetap sehat.

Sistem Italia ini tentunya paling cocok untuk ekonomi yang dibawa oleh industri. Dengan kata lain, untuk daerah yang bukan industri, misalnya yang agrikultura atau pertanian, kemungkinan tidak cocok. Dan kita tahu daerah di Indonesia itu luas dan berbeda satu dengan lainnya. Oleh karena itu, haruslah dicari model yang betul-betul cocok. Misalnya untuk daerah yang agrikultura mungkin bisa diterapkan model yang ada di Midwest AS, tetapi tetap dengan disesuaikan kepada keadaan lingkungan lokal tertentu yang ada di Indonesia itu. Sistem di Midwest itu hanya cocok dan menguntungkan petani kelas kakap saja, sedangkan petani Indonesia umumnya tidak tergolong demikian. Juga tanamannya di Midwest sedikit sekali variasinya, sedangkan di Indonesia justru kaya aneka ragamnya. Semua detil ini haruslah diperhitungkan masak-masak agar tidak asal main terap seenaknya saja! Janganlah kita bersikap seperti dagang obat di pinggir jalan: "Satu obat untuk seribu satu penyakit!" Sebab, kalau salah pilih, bisa-bisa malah merugikan pekerjanya sendiri. Padahal, tujuannya justru untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya kepada para pekerja, bukan?

Model-model lain dalam bentuk praktik ataupun teori masih banyak tersedia untuk bisa dipelajari dan masih terus dicoba dilahirkan. Hal ini bukan hanya penting untuk Indonesia, melainkan untuk seluruh dunia, yang ternyata tidak satu ini.

Model-model yang diterapkan di Indonesia juga perlu dikaji ulang, apakah sudah cocok atau belum, apakah bisa menguntungkan pekerja dan komunitas/masyarakat atau belum. Semua haruslah diperhitungkan kecocokannya dengan lingkungan setempat, dan hendaknya jangan bersikap seperti pedagang obat di pinggir jalan itu. Ini membutuhkan waktu dan pemikiran yang serius, tetapi yang terpenting adalah kebiasaan membuat kebijakan yang berasal dari satu pusat itu (sehingga otoriter dan main gampang) sudah harus ditinggalkan.

Sungguh menggembirakan bahwa akhirnya buku-buku Bung Hatta sekarang ini diterbitkan semua. Beliau adalah tokoh koperasi Indonesia. Oleh karena itu, pikiran-pikiran beliau perlu dipelajari dan dipertimbangkan untuk kemudian dicocokkan dengan kebutuhan di lapangan. Tentu masih ada pemikir-pemikir bidang ini yang patut diperhatikan.

Coba kita lihat contoh sebuah proyek Bank Dunia, yaitu proyek pembangunan listrik dengan tenaga air. Bendungannya dibuat dengan menggusur (menjarah?) kawasan milik rakyat pedesaan. Padahal, listrik yang dihasilkan itu untuk kepentingan orang kota! Maka urbanisasi tak terhindarkan dan banyaklah mereka yang gagal hidup di habitatnya yang baru, yaitu kota, akhirnya menjadi penghuni kolong jembatan dan daerah kumuh. Proyek semacam itu tidak menyejahterakan rakyat banyak, hanya memperkaya dan menyenangkan segelintir orang, sedangkan yang rakyat banyak jadi korban. Kesenjangan sosial ekonomi ini bukan hanya menyedihkan, tetapi juga merupakan bom waktu sosial. Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa Bank Dunia memang harus ikut bertanggung jawab terhadap gejolak dan kerusakan sosial-ekonomi yang terjadi di mana-mana, termasuk yang di Jakarta dan Solo pada pertengahan Mei yang lalu.

Dalam era globalisasi (mutakhir) ini, persoalan terpenting adalah bagaimana caranya agar modal yang beredar tidak dikontrol hanya oleh segelintir orang saja, yang suka dengan seenaknya memindahkan modal ke tempat yang hanya menguntungkan dirinya sendiri, sedangkan manusia lain yang ditinggalkan dan jumlahnya banyak itu jatuh

melarat oleh ulah mereka yang segelintir itu. Memang, menurut IMF itu tak terelakkan, artinya korban itu “sudah nasib” karena semua haruslah diserahkan secara “pasrah” kepada pasar bebas. Padahal, banyak contoh model *sustainable development* yang lebih regional, yang memberdayakan kekuatan lokalnya sendiri. Jadi, tidak harus selalu memfotokopi “*structural adjustment*” yang diformulasikan oleh IMF!

Sekarang ini, menurut saya, merupakan masa yang tepat bagi Indonesia untuk melakukan pilihan alternatif demi masa depan 30--40 tahun mendatang dan segera berpaling dari ketergantungan kepada IMF. Selama beberapa tahun terakhir ini perhatian terhadap mencari alternatif amatlah gencar dilakukan di AS sendiri, dan saya ikut berpartisipasi untuk lokal Northwest, yang mempromosikan “*democratic enterprises*”. Tahun lalu telah diselenggarakan beberapa konferensi di California dan Oregon membahas alternatif ini agar tercipta model-model ekonomi yang demokratis, regional, dan kuat. Di kawasan Northwest, semuanya dimulai dengan eksperimen, seperti halnya yang dilakukan di tempat saya bekerja, Inkworks.

Memang tidak mudah melakukannya di AS selama pemerintah Amerika Serikat masih tetap meyakini persepsi dirinya sebagai negeri yang sudah adil makmur. Saya katakan persepsi karena kenyataan yang sedang berlangsung di AS sekarang adalah makin hari makin banyak jumlah orang yang tidak makmur atau miskin! Maka, akibatnya yang bisa dilakukan di AS sekarang adalah pada taraf membuat model-model yang dipraktikkan di lokal-lokal tertentu terlebih dahulu. Dengan demikian, bisa terhimpun pengalaman praktis sehingga suatu saat nanti bisa ditawarkan sebagai sistem alternatif setelah sistem yang sekarang berkuasa ini runtuh. Ya, sistem yang berkuasa sekarang ini pasti runtuh karena *stock market* tidak mungkin bisa naik terus, tetapi suatu saat tidak bisa tidak pasti jatuh seperti yang tercatat dalam sejarah AS tahun 1929.

Akan tetapi, untuk Indonesia seharusnya sekaranglah masa itu. Bukankah sekarang adalah masa kejatuhan yang di AS justru suatu masa yang sedang ditunggu-tunggu? Kejatuhan di Indonesia boleh jadi sebuah *blessing in disguise!* Atau lumrahnya di Indonesia dikatakan, “kita cari hikmahnya”. Paling tidak, “nasib” Indonesia itu bisa kita olah menjadi seperti itu. Inilah masanya untuk mempraktikkan model-model yang tepat untuk lokal masing-masing di Indonesia.

7. Penutup

Dari esai Innosanto itu dapat kita ketahui adanya usaha yang telah melahirkan buahnya dalam mencari sistem ekonomi alternatif, yang pada dasarnya itulah ekonomi kerakyatan yang sejati. Ekonomi global pada hakikatnya bertentangan dengan ekonomi kerakyatan sebab ekonomi global itu hanya melahirkan sejumlah kecil orang yang diperkaya-raja lewat aktivitas ekonominya sehingga bisa kita sebut sebagai ekonomi konglomerat.

Hanya saja, dari contoh-contoh yang ada itu, yang manakah yang mungkin diadaptasikan untuk kepentingan “industri budaya” kita yang bisa menguntungkan seniman, masih merupakan tanda tanya besar. Tentulah jawaban akan bisa diperoleh jika ada ahli ekonomi (atau ahli koperasi?) yang betul-betul menekuni permasalahan ini sehingga tujuh tujuan utama yang saya kutip dari kata pengantar untuk *Pukat 14* itu bisa menjadi kenyataan, antara lain butir ke-7 “perlindungan atas hak ekonomi seniman dan budayawan agar bisa diperhitungkan semaksimal mungkin untuk menopang ke-

butuhan hidupnya".

Tentulah keenam butir lainnya juga sama pentingnya dengan yang ke-7 itu. Hanya apabila ketujuh tujuan utama itu bisa jadi kenyataanlah maka cita-cita luhur bangsa kita bisa tercapai: (1) mencerdaskan kehidupan bangsa, (2) mewujudkan kehidupan berbangsa yang menjamin kebebasan, (3) mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana kita baca dalam Mukadimah UUD 45.

Ada berita yang menurut saya harus disambut dengan gembira, yaitu terbitnya kumpulan karangan Mohamad Hatta yang direncanakan beberapa jilid itu. Tokoh kita itu terkenal sebagai Bapak Koperasi. Maka, bukunya itu patut dijadikan rujukan dalam usaha mencari sistem ekonomi alternatif. Memang, di kabinet ada Departemen Koperasi, tetapi apakah dari Menteri Adi Sasono bisa kita harapkan konsep dan praktik koperasi yang benar-benar bisa menyelamatkan bangsa kita dari krisis ekonomi ini sebab kesannya sistem koperasi yang dipraktikkan di negeri kita ini amatiran, malah sepertinya sekadar menjadi batu loncatan untuk menjadi pengusaha besar lalu memasuki ekonomi kapitalis (baca: ekonomi global). Mungkin itulah sebabnya koperasi itu dijadikan satu dengan bidang pengusaha kecil dan menengah. Padahal, koperasi itu bisa besar aset dan volume pasarnya, koperasi yang hidup di Spanyol dan Italia seperti yang dicontohkan Innosanto dalam bagian esainya yang saya kutip tadi.

Selain itu, kalau kita simak langkah pemimpin (baca: para ekonom) kita di era reformasi ini, baik yang ada di pemerintahan maupun yang di luarnya masih saja memuja ekonomi global dengan semua perangkatnya itu, maka apa yang pernah menimpa kita di zaman Orde Baru itu, saya khawatir, akan terulang kembali.

Kalau zaman itu kembali lagi setelah pesta demokrasi era reformasi ini usai (*Berapa sih umurnya pesta kita ini nanti?*) maka kita akan kembali melihat pemasangan kreativitas menjadi praktik sehari-hari dan seniman pun diam-diam melakukan *self-censorship*. Dan, itu berarti tujuh tujuan utama berkaitan dengan "dunia seni" kita itu sebagaimana saya ungkapkan tadi tidak akan pernah menjadi kenyataan.

Ketika menyelesaikan tulisan ini, saya sempat mendengar dari RRI berita tentang kerja sama antara Pemerintah Italia dan Pemerintah RI yang diwakili oleh Menteri Adi Sasono. Berita itu terlalu singkat sehingga tidak begitu jelas apa inti kerja sama itu. Mudah-mudahan saja hasil kerja sama itu nanti bisa memberikan harapan kepada kita. Amien!

Catatan:

1. Nanoq Da Kansas (ed.), *Pukat 14 - puisi-puisi bali barat*, manuskrip dalam proses penerbitan di Bali, 1998.
2. Cuplikan dari esai Ikranagara *Ekonomi Kita* yang dibacakan pada 16 Agustus 1998 di TIM untuk memperingati Hari Kemerdekaan R.I. ke-53.
3. Innosanto Nagara *Mencari Sistem Ekonomi Alternatif*, dikirimkan kepada saya lewat e-mail, 1998.

Daftar Pustaka

- Adorno, T.W. 1972. *Aesthetic Theory*. London & New York: Routledge & Kegan Paul.
- Beardsley, Monroe C. dan W.K. Wimsatt. 1995. "*The International Fallacy*". Dalam David E. Cooper. *A Companion to Aesthetics*. Cambridge, Mass: Blackwell Publishers Inc.
- Fukuyama, Francis. 1992. *The End of History and The Last Man*. New York: The Free Press.
- Gandhi, Leela. 1998. *Postcolonial Theory*. New York: Columbia University Press.
- Ikranagara. 1998. "Ekonomi Kita". Makalah untuk Pidato Kebudayaan di TIM untuk memperingati Hari Kemerdekaan RI ke-53.
- Kansas, Nanoq Da. 1998. "Pukat 14-Puisi-Puisi Bali Barat". Manuskap dalam proses penerbitan. Bali.
- Mander, Jerry dan Edwar Goldsmith (Ed.). 1996. *The Case Against the Global Economy and For A Turn Toward The Local*. San Franscisco: Sierra Club Books.
- Rosenau, Pauline Marie. 1992. *Post Modernism And The Social Science*. Princeton, N.J.: Prenceton University Press.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok 6
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Sastra dan Industri Budaya dalam Era Reformasi
Penyaji	: Ikranagara
Pemandu	: Riris K. Toha Sarumpaet
Pencatat	: a. Sri Sayekti b. Muhamad Fanani
Peserta	: 80 Orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Rizal Abbas, Departemen Keuangan

a. Pertanyaan:

- 1) Perdebatan *market oriented* dan *quality oriented* merupakan perdebatan yang lama. Apabila nanti kita bisa melepaskan sastra atau kesenian menjadi sesuatu yang betul-betul otonom, lepas dari persoalan ekonomi atau politik, baru kita dapatkan *quality oriented*. Di sini kita berbicara tentang pelaku, yaitu orangnya. Kalau, misalnya, kita melihat bahwa pelakunya atau orangnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan kemampuan atau kelayakan dalam hidup, dia pasti akan mempunyai kesempatan untuk berkompromi dengan kondisinya. Pernah saya tanyakan kepada Ratna Riantiarno, pemimpin Teater Koma, mengapa teaternya setiap tahun bisa pentas? Apakah itu bukan komoditi kesenian? Mbak Ratna mengatakan, "Tidak! Siapa bilang. Kalau komoditi kesenian, dalam satu tahun saya bisa berpentas tiga kali, sedangkan teater koma bisa berpentas cuma satu kali." Barangkali di sini, yang dinamakan moral dan etika itu bisa terpenuhi, tetapi kalau kita lihat persoalannya sekarang adalah, misalnya, ada adopsi atau adaptasi dari karya sastra, apakah itu novel atau cerpen, yang kemudian dijadikan skenario. Kemudian, hal itu dijadikan tontonan di media televisi. Menurut Bung Ikra, apakah ini tidak menjadi satu penurunan mutu ketika kenikmatan kita membaca atau mutu yang didapat pembaca dengan yang menonton karena mediumnya sudah berbeda.
- 2) Apakah memang dalam situasi seperti sekarang ini seni atau sastra bisa dibebaskan betul-betul dari persoalan-persoalan eksternal karena mengingat di situ banyak pelaku-pelakunya.

b. Jawaban

- 1) Jika kita menyinggung soal televisi, menurut pendapat saya, tidak apa-apa, seperti novel Iwan Simatupang sudah difilmkan atau sekarang ada satu novel *Telegram* yang sedang dalam proses penyelesaian oleh Slamet Rahardjo dan

itu nanti akan menjadi satu karya. Jika ditinjau dari sudut film, saya tidak tahu apakah film itu bagus atau jelek. Akan tetapi, paling tidak kalau film itu bagus nanti itu akan menyebabkan orang diharapkan ingin membaca novel itu. Mungkin tradisi ini tidak ada di Indonesia, tetapi kalau di luar negeri ada novel yang difilmkan, orang ramai-ramai membeli novel itu. Jadi, film justru membuat novel menjadi laris, seperti novel Herman alexy, orang Indian Amerika. Cerpen dan novelnya tiba-tiba meledak setelah difilmkan. Judulnya *Smaxsith I*, filmnya bagus sekali dan ternyata orang-orang tertarik pada novelnya dan bukunya dicetak ulang dengan *luks* yang dulu tidak diperhatikan orang. Di Indonesia apakah hal seperti itu terjadi, misalnya, andaikata novel Putu ini diputar di layar perak, apakah penerbit akan menerbitkan novel *Telegram* dengan terbitan *luks*. Apakah masyarakat akan mau tergila-gila membeli novel itu. Tampaknya, di Indonesia itu belum menjadi tradisi karena saya kira di Indonesia lebih kuat tradisi *performace*, tradisi oralnya, daripada tradisi baca, sampai-sampai Leon kesal terhadap puisinya. Puisi kita tidak dibaca, tetapi dibacakan. Jadi, hati kita sedih sekali, menurut Leon. Isi buku-buku itu baru dimengerti setelah dibacakan, tetapi para pendengar itu tidak bertanya di mana bisa dibeli buku itu. Memang ini menyangkut tradisi kita, kebiasaan kita. Bagaimana kita bisa mengubah tradisi ini dengan memanfaatkan industri budaya ini untuk kepentingan apresiasi. Film misalnya *Smax it No* di Amerika menyebabkan buku Alex ini sulit dibeli. Saya saja hanya dapat membeli dua buah buku dari empat bukunya yang penting karena sudah habis.

- 2) Masalah pengaruh eksternal dengan otonom dan sebagainya harus diakui memang ada dalam karya sastra, seperti dalam buku Tolstoy. Ada sejarah, psikologi, dan sebagainya seperti ensiklopedi kehidupan bangsa Rusia. Semua itu diambil dari sana sini. Tosltoy meramunya menjadi novel sebagai karya seni bermutu. Buku ditinjau dari sosiologinya buku dari sudut sejarahnya, tetapi sebagai karya dari filsafatnya dalam hal ini sudut estetika.

2. Penanya: Siti Maryam, STKIP Cianjur

a. Pertanyaan:

Tadi Bapak mengatakan bahwa untuk meningkatkan apresiasi sastra kita harus memanfaatkan industri budaya. Pada pernyataan lain Bapak menyatakan bahwa industri budaya itu lebih menitikberatkan soal ekonomi yang notabene berorientasi kepada kapitalis yang tidak bermoral dan tidak memperhatikan etika. Apakah Bapak tidak khawatir dengan adanya kontradiksi, di satu pihak kita harus memanfaatkan industri budaya itu, sementara di pihak lain industri budaya memerlukan unsur-unsur kapitalisme yang tidak bermoral dan tidak beretika.

b. Jawaban

Masalah apakah saya tidak khawatir kalau memanfaatkan industri budaya untuk

pengembangan budaya atau sastra, saya kira jawab saya sama dengan jawaban pada pertanyaan pertama tadi

3. **Penanya:** I Made Suastika, Universitas Udayana, Bali

a. Pertanyaan:

- 1) Ada dua butir pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Pertama, ada tujuh kriteria yang Bapak sebutkan dalam mencapai tujuan reformasi, dan yang terpenting butir 4, 5, dan 6, yang berkaitan dengan perlindungan terhadap hasil karya. Saya berikan ilustrasi tentang seniman-seniman Bali dalam berkarya. Di satu sisi mereka memang mengaktualisasikan idenya sebagai karya seni yang bermutu, tetapi di pihak lain ada pengaruh global yang begitu keras. Akhirnya, apa yang terjadi? Karya perajin pada awalnya hanyalah sebagai produk rumah tangga yang begitu indah, tetapi kemudian diproduksi secara besar-besaran. Itulah masalahnya. Ini suatu kenyataan yang pahit. Seniman ini dimanipulasi, terutama hak patennya. Garuda yang memang anggun dan unggul yang kreativitasnya tinggi, tetapi hak patennya ada di Amerika. Bagaimana masalahnya dan lembaga mana yang bertanggung jawab terhadap pengembalian identitas bangsa ini? Itu sebagai satu ilustrasi. Di satu sisi memang kreativitas maju, tetapi di pihak lain muncullah etika moral yang hampir-hampir dilupakan.
- 2) Untuk bangsa yang heterogen begini, pemikiran kita di satu sisi memang selalu berorientasi pada budaya lokal, tetapi pemikiran berorientasi secara global. Namun, di sisi lain kita lupa dengan masalah industri yang tercerabut dari akarnya. Sehubungan dengan itu, bisa-bisa resep Bapak yang ideal tidak lama bertahan. Kemudian, secara global pemikiran seperti itu juga tidak begitu menyentuh sampai ke budaya nilai itu. Oleh karena itu, kira-kira resep mana yang paling tepat? Kita ambil jalan tengah, yang berkaitan dengan peluang. Di satu sisi kreativitas harus masuk, mohon bandingan dengan konsep Bapak yang cukup lama tinggal di negeri Paman Sam dan bagaimana jalan tengah kita supaya "kita hidup lama"?

b. Jawaban:

- 1) Memang masalah seni di Bali itu rumit sejak dulu karena di satu pihak *fine art* di sana luar biasa, seniman-seniman kreatifnya luar biasa keseriusannya juga menurut saya mengagumkan. Banyak dari seniman, bahkan guru topeng saya, yaitu Pak I Made Pasek Tempo itu, orang Bali dan sederhana sekali dan dia tidak terlibat industri budaya. Jadi, saya belajar dari dia. Jadi, masih ada seniman-seniman yang tidak terlibat pada industri budaya yang namanya pariwisata di sana walaupun pariwisata sana disebut sebagai pariwisata budaya. Akan tetapi, pariwisata itu sendiri banyak merusak industri budaya. Orang Bali saya kira lebih tahu seberapa jauh rusaknya karya-karya seni yang disampaikan untuk kepentingan turis. Akan tetapi, *behind the seen*, *seen* itu maksudnya <siin> di balik yang dilihat, yang kelihatan sebagai

industri budaya, toh orang-orang Bali tetap menampilkan karya-karya seni yang serius, misalnya, di dalam odalan-odalan mereka kalau ada upacara-upacara, baik yang bersifat sosial maupun ritual keagamaan. Mereka tetap melakukannya dengan kesetiaan dengan suatu keseriusan seorang seniman yang betul-betul baik. Ada juga seniman yang bisa mondar-mandir, di satu pihak dia berkiprah di industri budaya, di satu pihak dia berkiprah di seni yang serius. Di Bali itu fakta-faktanya perlu dipelajari oleh para ahli. Jadi, kalau Anda mau tanya resep saya bagaimana melakukannya, itu saya kira sulit sekali memberikan resep kepada sana karena lagi-lagi saya percaya bahwa setiap orang itu walaupun dia tidak lepas dari pengaruh lingkungan atau tuntutan-tuntutan ekonomi sosial dan lainnya, seorang seniman sejati tetap ingin mempertahankan kesejatiannya. Yang saya maksud di sini, tadi saya mengatakan bahwa ada dua pandangan, di satu pihak segi sosiologis, yang satu pihak bersifat filosofis. Yang saya maksud adalah bahwa kalau menilai karya seni, memang kita tidak bisa hanya melihat secara sosiologis. Dia harus dilihat secara filosofis. Soal nanti apakah pada karya seni dibicarakan aspek-aspek sosiologisnya bahwa manusia itu tidak bebas dari lingkungan dan sebagainya. Bahkan, dalam karya seninya itu bukan hanya si aku saja yang ada, melainkan mereka, kamu, kita, dan sebagainya ada dalam karya seni itu. Akan tetapi, ketika kita melakukan penilaian, kita tetap melakukan pendekatan filosofis, dalam hal ini filsafat estetika. Kalau kita melakukan penilaian sebagai karya seni. Soal fungsinya bisa bermacam-macam, tetapi selama karya seni itu hakikatnya tidak tergoyahkan boleh saja fungsinya di mana-mana tidak menjadi soal. Bahkan, dipakai untuk turisme juga tidak apa-apa selama hakikat dan jati dirinya. Artinya, secara filosofis dalam arti estetika ini bisa dipertanggungjawabkan bagi saya tidak menjadi soal. Yang menjadi soal apabila terjadi kompromi-kompromi itu atau kerusakan-kerusakan itu dan kita lihat di Bali banyak sekali yang begitu.

- 2) Di Amerika Serikat, seperti Anda ketahui, yang mencapai sukses dalam dunia perfilman itu adalah Hollywood. Apa sebenarnya yang dilakukan Hollywood. Hollywood melakukan "kompromi". Mereka ini menampilkan sesuatu yang sudah *pakem*. Artinya, ada satu genre tertentu dengan plot tertentu yang akan diulang-ulang. Yang diulang-ulang itu adalah hal yang sama sehingga kegiatan itu telah memanfaatkan satu genre tertentu. Akan tetapi, yang tergolong *fine art* bagi mereka adalah isi yang hendak disampaikan. Padahal, sebenarnya kalau dilihat dari plot, pengulangan saja yang ada. Di satu pihak yang namanya pola-pola yang dipakai dalam genre hiburan dimanfaatkan, tetapi dengan pengisian yang sangat serius, yaitu bobot-bobot yang betul-betul diisi dengan baik sehingga di sini terjadi ada suatu "pengkompromian" antara hiburan di satu pihak dan keseriusan seni sejati di satu pihak. Konon inilah pola kesenian *posmo*. Saya tidak tahu betul, tetapi sering di Indonesia lalu ada orang yang mengatakan bahwa *posmo* mengesahkan saja, hiburan itu sebagai satu kesenian. Sebenarnya

tidak hanya genrenya yang dimanfaatkan. Ini juga satu cara memanfaatkan aspek industri dari budaya dalam hal ini genre hiburan dengan memberikan pengisian yang kuat. Ini sebetulnya satu pola yang tidak asing di Indonesia. Kalau kita pelajari kembali, apa yang dilakukan oleh para wali di dalam memanfaatkan wayang di Jawa yang rumusnya adalah *tut wuri hangi seni*, kita dapat mengikuti saja apa yang sesuai dengan keinginan genre yang sudah tertanam di masyarakat, yaitu pola-pola wayang itu. Namun, isinya dipakai dengan ajaran-ajaran yang sesuai dengan kehendak wali dalam hal ini Islam. Jadi, ada satu prinsip yang sebenarnya dipakai di Hollywood, yang sebenarnya sudah dipakai lama sekali di Jawa, yaitu prinsip *tut wuri hangi seni*. Nah, ini ada persamaan-persamaan dalam hal itu.

4. **Penanya:** Indiyah Imron, Universitas Trisakti

a. **Pertanyaan:**

Tadi Bapak berbicara tentang industri budaya dalam globalisasi. Apakah bisa dikatakan bahwa industri budaya berada dalam budaya industri karena menurut pendapat saya industri budaya seperti yang dimaksudkan itu memang memenuhi persyaratan sebagai budaya industri, misalnya, produksi massal, nilai ekonomis yang tinggi, dan waktu. Yang termasuk industri budaya adalah wayang. Wayang yang dimainkan selama tiga jam biasanya itu untuk industri budaya, sedangkan yang dimainkan semalam suntuk berguna untuk *fine art*-nya. Industri budaya tidak ada buruknya walaupun mutunya turun. Menurut pendapat saya, industri budaya itu ada dalam budaya industri dan itu harus didorong untuk maju karena pelaku budayanya menjadi banyak, sudah seni murni itu peminatnya sedikit. Jadi, keduanya mempunyai pasar tersendiri.

b. **Jawaban:**

Soal industri budaya dalam budaya industri, saya kira memang betul begitu. Saya tidak ingin industri budaya itu habis, tetapi saya ingin industri budaya itu justru dapat dimanfaatkan, hanya siapa yang mengolah. Jangan minta kepada saya karena saya tidak bergerak di bidang industri budaya. Jadi, saya hanya ingin melahirkan karya-karya seni sejati atau yang disebut *fine art* itu.

5. **Penanya:** Emy Agustina, Universitas Bengkulu

a. **Pertanyaan:**

- 1) Bapak tadi menjelaskan bahwa dalam makalah Bapak masih ada ide-ide yang berbentuk abstrak yang akan dilakukan pada masa reformasi seperti ini. Jadi, aksi nyata seperti apa agar ada perubahan dari masa Orde Baru dulu.
- 2) Pada waktu Bu Edy berbicara tentang masalah teater yang dicekal, misalnya "Marsinah", itu dilakukan berdasarkan pertimbangan bahwa kasusnya belum diputus oleh pengadilan sehingga dampaknya dikhawatirkan berimbas ke masyarakat jika dipentaskan. Bagaimana pendapat Bapak sebagai pelaku langsung dari pementasan yang demikian?

b. Jawaban:

- 1) Memang makalah saya ada ide-ide yang masih abstrak, tetapi saya sudah menggariskan tujuan-tujuannya, yaitu yang jumlahnya tujuh di halaman 446. Bagaimana caranya? Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun rancangan undang-undang yang dapat melindungi kebebasan berekspresi.
- 2) Soal "Marsinah" saya tidak berada di pihak Bu Edi, tetapi saya berada di pihak Ratna Sarumpaet.

6. Penanya: Trisna Kumala, Universitas Airlangga, Surabaya**a. Pertanyaan:**

Seni tradisional mempunyai kantung-kantung di daerah. Bagaimanakah nasib seni tradisional ini, khususnya pada era global ini? Apakah seni tradisional itu cukup hanya kita lihat sebagai pentas saja? Sebagai seniman, bagaimana sikap Bapak mengenai hal itu?

b. Jawaban:

Sebagai seniman, saya juga menggauli seni tradisi, tetapi tujuan saya bukan untuk menjadi seniman tradisional. Saya ingin melakukan pendekatan kreatif agar seni tradisional itu tetap lestari. Pendekatan ini saya lakukan setelah melalui pendekatan akademis yang bertujuan untuk pelestarian, yang mestinya hal itu dilakukan oleh kampus-kampus. Sementara itu, seniman akan melakukan pendekatan kreatif, yaitu melahirkan suatu karya kontemporer yang diangkat dari pola-pola yang tradisional.

KELISANAN, KEBERAKSARAAN, JUGA GENERASI YANG JADI BAUR

Ayu Utami
Sastrawan

1. Pengantar

Sebuah dikotomi, juga kategori, tak pernah menyenangkan saya, meski kerap memudahkan. Di sini, ketika saya mesti bicara tentang sastra dan “jati diri” “generasi muda” kita (dua kategori yang problematis), segeralah gagasan itu membentur saya sendiri. Pastilah saya, dalam usia ini, telah canggung untuk mengidentifikasi diri sebagai bagian dari sebuah generasi, apalagi sebuah angkatan muda. Akan tetapi, kita tahu kita tak mudah melepaskan diri dari identitas yang didesakkan orang lain. Misalnya, cap kemudaan yang (pernah) ditempelkan pada saya oleh *Kompas* sehingga terasumsikan bahwa ada garis pemisah antara karya dari generasi yang tua dan yang muda, sesuatu yang berbeda karena usia. Memang, sikap ini bukan tak wajar jika kita ingat pola memahami sastra yang diajarkan di sekolah, yang lebih senang menjelaskan kesusastraan Indonesia dari periodisasi ketimbang mengajak murid mengapresiasinya. Tentu saja ada problem dari pendekatan semacam ini, meskipun cara ini memberi kita jejak-jejak yang gampang untuk melihat kesusastraan yang berserakan dalam suatu rentang waktu. Ia memberi kita kejelasan tentang sesuatu yang sesungguhnya baur. Dan, dibuatnya kita menjadi lega karena merasa sanggup mencerpap sesuatu. Ia juga dapat memberi si seniman kebanggaan karena menjadi bagian utama dari penggerak sejarah: sebuah angkatan adalah sebuah bukti peran, seperti sebuah titel kehormatan.

2. Generasi Kesusastraan: Kategori Penuh Asumsi

Kita ingat bahwa sebetulnya “angkatan” kesusastraan tak pernah muncul sendirian. Ia selalu berhubungan (atau dihubungkan) dengan semangat politik pada masanya. “Angkatan” ditentukan oleh suatu gairah yang ekstrasastra. Memang, ada juga semacam “roh zaman” yang menyatukan perkembangan sastra dan nonsastra. Bukanlah kebetulan jika Kongres Pemuda pada Oktober 1928 menghembuskan napas yang sama dengan Pujangga Baru di tahun 30-an: sebuah penundaan (kalau bukan penolakan) pada kampung halaman serta penautan diri pada suatu masyarakat baru, yang modern. Indonesia, sebagai sebuah *nation* yang dibayangkan.¹ Akan tetapi, semangat zaman bukanlah sesuatu dengan siklus rutin, apalagi datang dengan hitungan desimal, dan tidak serta merta melahirkan sebuah angkatan. Sejarah perdebatan kesusastraan menunjukkan kepada kita bahwa perbedaan pemikiran kebudayaan sejak, katakanlah, *Polemik Kebudayaan* yang dihimpun Achdiat Kartamihardja, tidak menunjukkan perbantahan yang sama sekali baru.² Zaman yang satu sesungguhnya tidak mempunyai perbedaan yang hakiki lagi dengan yang lain. Maka, jika sebuah angkatan kesusastraan lahir, ia ditentukan oleh suatu politik di luar kesusastraan. Menamai dan memberi ciri sebuah angkatan dari sebuah zaman akan menjadi persoalan representasi, yang mengasingkan hal-hal yang lain meski berasal dari masa yang sama. Dengan mengandaikan adanya secara alamiah sebuah “angkatan zaman”, bagaimana kita menerangkan sekelompok

seniman yang mencetuskan Manifes Kebudayaan dalam suatu kecenderungan realisme sosialis ala Lekra dan LKN? Dari sudut lain, menamai sebuah angkatan dari idenya juga sia-sia, sebab ide yang sama bisa muncul pada masa yang berbeda. Bukankah, meski dengan materi yang berbeda, pendekatan Sutan Takdir Alisjahbana dengan Pramoedyana Ananta Toer terhadap novel tidak jauh berbeda?

Bahkan generasi kesusastraan pun merupakan sebuah kategori yang penuh asumsi, selain penuh penyederhanaan, juga mudah meleset. Bagaimanakah kita merumuskan sastrawan seperti Goenawan Mohamad atau Sapardi Djoko Damono yang tetap berkarya sejak mereka mulai menulis di usia muda mereka di awal 60-an? Bagaimana dengan Sutardji Calzoum Bachri yang senantiasa berubah, melontarkan puisi mantra pada tahun 70-an dan kembali kepada kata-kata pada masa ini? Di mana pula Rendra akan diletakkan?

Kita tidak bisa merumuskan generasi, yang tua maupun yang muda, dalam sejarah kesusastraan sebab orang-orang yang muda itu kelak akan menjadi tua dan mati. Kita tidak bisa memakai kategori sinkronis dalam bentangan diakronis, atau sebaliknya. Maka, sebetulnya sulit bicara apa-apa tentang sastra generasi muda. Pada hemat saya, mempertanyakan sikap generasi muda terhadap kesusastraan adalah sama dengan mempertanyakannya pada kita semua. Oleh karena itu, di sini saya ingin menggeser fokus dari generasi muda sebagai penghasil sastra menjadi sebaliknya, sastra untuk generasi muda. Di suatu masa, keduanya bisa saling berkaitan, dan bisa juga tidak. Sebagai contoh adalah Hilman Hariwijaya, Arswendo Atmowiloto, Yudhistira A.N.M. Massardi. Ketiganya mulai menulis pada usia lepas remaja, banyak mengenai anak muda, dan kita masih bisa menemukan karya terbaru mereka belakangan ini, yang tetap ditujukan bagi kaum muda. Ini pun menimbulkan masalah.

Di sini saya memang bergantung pada asumsi si pengarang dan penerbit. Pada kenyataannya, kita berhadapan dengan sesuatu yang baur, seperti topografi sebelum menjadi peta. Potret tanpa lintang, bujur, ataupun koordinat. Di sana saya bisa merasa melihat daun-daun hijau segar dari pohon muda. Dan, itu datang dari asumsi bahwa daun hijau segar berasal dari pohon muda. Tapi, tentu saja, tanpa asumsi apa-apa barangkali saya tak bisa mengerti apa-apa. Karena itu pulalah, saya pun terpaksa membatasi pembicaraan ini pada teks-teks yang diasumsikan oleh pembuatnya sebagai konsumsi kaum muda. Barangkali ini batas yang kabur, tetapi batas yang nyata pastilah maya. Atau, pura-pura tepat. Dalam kapitalisme cetak, sebuah teks, meski ditujukan kepada kelompok tertentu, bisa dijangkau siapapun dan dibaca dengan caranya masing-masing. Kita tak pernah bisa sungguh-sungguh membatasi sesuatu. Pun sastra tulisan selalu bekerja bagi pembaca yang dibayangkan, audiens imajiner belaka.

3. Diglosia antara Lisan dan Tulisan

Sastra juga tidak berdiri sendiri. Ia bukan sesuatu yang terbatas oleh wilayah lain. Apalagi ia adalah bahasa, suatu mekanisme yang menguasai manusia secara luar biasa. Saya tidak tahu, seberapa banyakkah kita memiliki kesadaran di luar bahasa?

Sejarah bahasa Indonesia menciptakan pula suatu masalah yang khas bagi kita: diglosia antara lisan dan tulisan. Pada masa sekarang, setiap anak yang berurat-akar

di Nusantara akan mengerti bahwa ia memiliki dua bahasa di negara ini: bahasa Indonesia, sedikitnya seperti yang diajarkan di sekolah, yang ia tulis dalam surat lamaran kerja jika bahasa Inggris tidak dibutuhkan, yang seolah-olah “menjadi” pada saat Sum-pah Pemuda disyahadatkan; serta bahasa yang ia pakai sehari-hari, yang sering berasal dari ibu atau kampungnya, yang dipandang oleh guru bahasa normatif sebagai sejenis dialek liar yang tak layak diucapkan di tempat-tempat formal—setidaknya tidak dibacakan penyiar TVRI dan RRI. Bahasa tempat ia bercanda dan memaki.

Ketika menjadi wartawan, saya dilibat betul oleh persoalan ini: keberbedaan bahasa Indonesia lisan dan tulisan, bahasa Indonesia yang cenderung “resmi” dan “tak resmi”. Salah satu masalah teknis utama editor media massa adalah menerjemahkan--ya, menerjemahkan--kutipan lisan menjadi tulisan. Jamak bagi wartawan Indonesia menemukan komentar seorang narasumber dalam sebuah wawancara bersama menjadi berbeda-beda dari satu surat kabar dengan yang lain--sesuatu yang tak terlalu lazim setidaknya dalam masyarakat bahasa Inggris. Sering pekerjaan mengedit tidak hanya membuang yang bertele-tele dan mempertahankan yang penting, tetapi menerjemahkan seluruh pernyataan. Ini adalah akibat begitu berbedanya kedua bahasa itu. Susunan kalimat lisan, kerap kali, tetap tidak layak ditulis dalam kutipan langsung sekalipun; dikurung dalam tanda kutip sekalipun. Ia tak pantas ditransformasi menjadi bahasa tulis. Persoalannya pun bukan cuma kontekstualitas yang tak tertangkap dalam tulisan, tetapi bahwa ada ukuran kesadaran dan kepantasan yang berlainan.

Contoh sederhana, yang barangkali telah menjadi klise, adalah konjungsi “dari-pada” atau “yang mana”, yang terlontar berulang-ulang dalam cakap mantan presiden kita, Soeharto. Saya yakin, jika seorang wartawan menuliskan kalimat dengan kata-kata itu apa adanya, ia bukan dihargai sebagai akurat. Malahan dianggap kurang sopan. Atau, tidak menguasai bahasa Indonesia cukup baik dan benar. Bukankah pidato kenegaraan yang dibacakan setiap 17 Agustus tidak menggunakannya? Jadi, seorang wartawan sebetulnya sadar, mawas diri atau tidak, bahwa ia harus mengetikkan wawancara ke dalam bahasa tulis, bukan cuma menuliskan wawancaranya. Ia bukan sekadar mentranskrip bunyi ke dalam huruf, tetapi mentranslasi dua bahasa yang berbeda. Ini berlaku untuk narasumber siapa pun, bukan cuma pejabat atau pengusaha yang kuasa, sejauh rubrik atau artikel itu dianggap serius. Tentu saja, selebriti biasanya tidak dihitung dalam “aturan kesopanan” ini.³ Dalam rubrik semacam “pokok dan tokoh” *Tempo* atau “pot pouri” *D&R* atau “pesona” *Forum*, *parole* dari masing-masing bintang itu biasanya dipertahankan, justru untuk menambah keriang dan keringanan cerita. Karena, sekali lagi, ini adalah rubrik dengan tema yang tidak serius. Ini senang-senang. Mempertahankan bahasa lisan ke dalam tulisan hanya dilakukan dengan sengaja, jika ada maksud tertentu, bukan sebuah kewajaran.

Tampaklah bagi kita dua kutub bahasa Indonesia: bahasa tulisan-formal di satu ujung, bahasa lisan-informal di ujung lain. Diglosia ini jugalah yang saya kira menyebabkan sering janggalnya bahasa dalam film-film Indonesia, terutama sinetron yang sebagian merupakan tiruan telenovela Amerika Latin. Saya mendapat kesan bahwa banyak penulis skrip film teve bekerja dengan kesadaran bahasa tulis: bahasa yang, karena dikodratkan untuk kehilangan situasi pembicaraan, menjadi terbebani untuk

menjelaskan konteks. Maka, film Indonesia jadi cenderung verbal. Saya baru saja menyaksikan adegan dalam sebuah sinetron di TPI: seorang pria menunggu di sebuah jalan, menoleh kanan kiri, lalu berkata sendiri kira-kira begini: “saya sudah menunggu lama sekali.” Atau, skrip berikut:

Agus tidak melayani, meneruskan langkah ke luar dan menghilang di balik kusen pintu. Anis tambah jengkel karena tidak dihiraukan.

ANIS: Kalau aku ngomong nggak pernah didengar...⁴

Sebuah kalimat mesti menerangkan kejadian, seolah peristiwa tidak bisa berbicara atas namanya sendiri.

Selain dalam sejumlah kecil film, seperti serial Si Doel, kita juga menemukan bahasa yang tidak ada dalam percakapan sehari-hari. Misalnya, potongan percakapan yang kerap berikut: “Apakah kau mengenal orang (di foto) ini?” - “Maaf, aku kira tidak.” Dalam kehidupan nyata, dialog itu mungkin akan berbunyi seperti ini: “Kenal ini enggak?” - “Mm... enggak tuh.” Banyak penulis skrip kita masih berada dalam taraf guru bahasa normatif, bukan seorang sosiolinguis. Sering saya menduga, akting aktor sinetron kita menjadi kaku, atau malah teatrical, bukan sepenuhnya karena bakat atau ketekunan yang kurang. Tapi, lantaran ia sadar bahwa naskah yang ia ucapkan bukanlah yang ia percakapkan dalam hidup sebenarnya. Kalimat-kalimat itu hanya ada dalam tulisan, atau drama, atau teater, yang tak bisa diperankan ke dalam adegan yang realistis.

Kita tahu, kesadaran lisan berbeda dengan kesadaran tulisan. Suara hanya gelombang bunyi yang tak melampaui dimensi waktu. Ia memungkinkan alibi begitu gelombang itu usai. Tinta adalah bukti, yang mengikat suatu tanda dengan dimensi ruang dan memungkinkannya memiliki bidang waktu yang jauh lebih panjang. Dokumentasi yang baik membolehkannya abadi. Ia membuat memori kita lebih berdurasi, memberi kita jarak ruang dan waktu untuk suatu sikap analitis. Saya setuju bahwa perkembangan canggih pemikiran maupun teknologi hanya dimungkinkan oleh masyarakat beraksara.

Sejarah bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan membuat persoalan kita menjadi khusus. Bahkan, hal itu berlaku bagi sejarah kita sebagai satu bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Saya ingin kembali sebentar pada sinetron kita, yang membayangkan pasar siarannya tak lain pasar nasional. Berulang-ulang kita mendengar *jingle* “TVRI menjalin persatuan dan kesatuan”. Hal yang senada juga disuarakan oleh televisi swasta. Iklan “RCTI Oke” menampilkan barisan dengan baju tradisional 27 provinsi (tak peduli bahwa pakaian adat yang ada tak cuma itu): imaji kebangsaan yang dibangun sejak saya kecil. Menu acara semua televisi swasta juga dibacakan secara bergantian oleh “wakil-wakil” daerah. Dalam televisi kita tahu bahwa kita mempunyai beban, atau kesadaran yang begitu mencengkeram, untuk *bhineka tunggal ika*. Dalam kesadaran ini, produser, sutradara, ataupun penulis skrip merasa dibebani tugas untuk berbicara kepada mereka, pasar kepulauan Indonesia sehingga pilihan jatuh pada bahasa pemersatu; bahasa yang dimengerti hampir semua warga negeri ini, tetapi sekaligus bahasa yang tak sepenuhnya diucapkan sehari-hari. Film kita adalah film berbicara, yang mau menjelas-jelaskan, bukan film cerita. Dan, bahasa Indonesia

adalah godaan besar bagi kita yang ingin dimengerti bangsa ini. Ini barangkali adalah ekses persatuan.

4. Dari Kecemasan Kolonial ke Semangat Nasional dan Modernisme

Proses pembentukan bahasa persatuan Indonesia tidaklah amat natural. Barangkali samasekali tidak. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dirancang. Ia adalah proyek. Ia adalah konstruksi. Semula ia adalah rancangan kolonial, yang merasa perlu berkomunikasi dengan pribumi dengan bahasa lokal. Kolonial, yang cemas karena warga mereka yang telah menetap lama di aripelago--sebagian lelakinya mengambil nyai dan mempunyai keturunan indo--mulai bicara dan berlaku mirip pribumi: mengalami "*indiesization*" atau "penghindiaan".⁵ Sekalipun Melayu dianggap sebagai *lingua franca*, kita tahu ada "persaingan" antara bahasa Melayu dan Jawa sebagai kandidat bahasa administrasi kolonial. Kisah tutupnya jurusan bahasa Jawa di Akademi Kerajaan Delft merupakan bagian kegagalan bahasa Jawa sebagai medium persatuan. Dipilihlah bahasa Melayu. Standardisasi, terutama pada bahasa lisan, oleh ahli-ahli Belanda pun tak terhindarkan, yang kerap jauh dari Melayu yang dikenal penggunaannya. Melayu Tinggi, yang diajarkan pada pegawai-pegawai Kompeni, agaknya berasal dari sebuah manuskrip di Riau, yang dianggap jantung tanah Melayu, yang ditemukan oleh Leijdecker.⁶ Ini bahasa, yang tidak digunakan sehari-hari, justru digunakan sebagai standar dalam surat-menyurat dan komunikasi dengan pemerintah lokal dan pedagang. Yang oleh Klinkert dan Van der Tuuk disebut sebagai "lebih murni, lebih benar, lebih langsung,"⁷ tetapi yang mengalienasi pemiliknya.

Kaum pribumi yang kemudian merdeka, kita-kita ini, melanjutkan dan mengulangi apa yang dikerjakan filolog dan birokrat Kompeni: memilih, melakukan kodifikasi, penetapan tata bahasa, dan segala yang digerakkan semangat membangun dan mengontrol terhadap bahasa Indonesia demi suatu standar bersama, seperti keinginan Sutan Takdir Alisyahbana untuk menciptakan bahasa Indonesia yang sederhana. Kita ingat bagaimana, misalnya, Takdir, dalam suatu semangat berstrategi menciptakan bahasa Indonesia, memperlakukan fonotaktis Indonesia. Ia tidak membolehkan gugus konsonan dalam suku kata. Ia tidak membolehkan pepet pada akhir kata. Itu antara lain. Dan, rancangan ini menghasilkan fonotaktik yang terlalu memaksa sebagai berikut: koda (untuk *code*), elita (*elite*), nasionalisma (*nasionalisme*), bahkan sumbar (untuk sumber) atau nasi rames (*nasi rames*).⁸

Takdir begitu bergairah untuk menstandarkan bahasa Indonesia yang sederhana--suatu dorongan yang sama dengan menyamakan bentuk bangunan SD Inpres dan menyeragamkan baju murid dari Sabang sampai Merauke, tak peduli kebutuhan dan kesediaan lokal. Modernisme Takdir (seperti kecenderungan segala modernisme) adalah semangat standardisasi, semangat mengontrol, semangat mempersatukan. Dalam dorongan-dorongan itulah bahasa Indonesia dibentuk. Di sinilah, ada pergulatan yang acap menempatkan bahasa Indonesia pada posisi tidak bersahabat dengan bahasa "daerah", seperti pemerintah pusat dengan kepentingan daerah. Dengan proses inilah bahasa Indonesia yang tulisan-formal itu menjadi semakin jauh dari yang lisan dan sehari-hari, yang lokal.

Lalu, modernisme dan pendidikan berjalan bersama sejarah Indonesia merdeka. Kita bisa melihat kampanye wajib belajar dan berantas buta huruf di TVRI, sejak televisi swasta belum ada. Saya masih ingat lagunya sampai sekarang, karena begitu seringnya diputar ulang, juga karena diajarkan untuk paduan suara sekolah dasar tempat saya bernyanyi dengan semangat. Tetapi yang juga terjadi dalam kampanye pemberaksaraan ini adalah proses pengalihan dari kecenderungan tradisi lisan menjadi tulisan yang terfokus pada bahasa Indonesia. Pemberaksaraan kita adalah terhadap bahasa Indonesia. Ketika kebanyakan masyarakat di kepulauan kita masih hidup dalam pola tradisi lisan, kecepatan transformasi ke arah tradisi tulisan dalam bahasa lokal menjadi seperti deret hitung berbanding deret ukur dengan bahasa Indonesia. Keberaksaraan menjadi milik bahasa Indonesia. Tentu saja ada persoalan di sini. Modernitas dan pendidikan adalah dalam abece latin. Jauh sebelum kolonialis datang bersama huruf Latinnya, telah hidup aksara Kawi dan Arab, antara lain, yang menjadi tumbuh bersama bahasa tempat ia digunakan. Di beberapa tempat, “bahasa daerah”--begitulah kemudian ia disebut setelah “sang pusat”, yaitu Indonesia diciptakan--diajarkan dengan aksara tersebut. Misalnya, bahasa Jawa atau Sunda di beberapa (tak semua) sekolah. Ajip Rosidi berjasa besar dalam proses pemberaksaraan bahasa Sunda dan Jawa dengan abece. Tetapi, bahasa-bahasa setempat yang kemudian dianggap sekadar varian, bahkan deviasi, dari bahasa Indonesia, seperti Betawi, kehilangan kelayakannya untuk dituliskan. Sekolah di Jakarta tidak menampung bahasa daerah, sebab “tak ada bahasa daerah Jakarta”. Meskipun saya mengerti bahasa Jawa dan Sunda, tetap terasa janggal bagi saya memahami kalimat bahasa itu jika dituliskan dalam alfabet latin. Tentu saja ini soal kebiasaan. Akan tetapi, hampir seluruh pembentukan bahasa adalah perkara kebiasaan pula. Karena tak ada standardisasi ejaan terhadap dialek (yang sebetulnya juga bahasa) daerah--kecuali untuk beberapa bahasa daerah “utama” tadi, yang diajarkan di sekolah--maka mata kita tidak terbiasa dengan penulisan yang mentranskripsikan bunyi bahasa lokal tersebut. Saya selalu tertawa geli, misalnya, jika melihat beberapa papan di sepanjang Jalan Margonda, Depok. Seorang pedagang ikan akuarium menulis *ikan iyas*. Pemilik kapling memasang *dijuwat tanah seluwas* Sebuah mobil bak dipasangi tulisan *disewain*. Bukankah bahasa-bahasa semacam itu tak layak dituliskan, setidaknya bagi kita yang tahu bahasa Indonesia yang baik dan benar? Tapi, di luar bahasa Indonesia yang sah, di jalan-jalan orang bicara dengan bahasa Indonesia yang jadah. Perbedaan antara bahasa tulisan dan lisan kadang menjadi perbedaan antara bahasa Indonesia dan daerah, bahasa Indonesia dan bahasa percakapan.

Di lain pihak, tulisan dan lisan menghasilkan kesadaran, juga memungkinkan pola komunikasi, yang berbeda. Kemudian, penemuan teknologi cetak memungkinkan revolusi kesadaran. Penerbitan secara massal dalam kapitalisme cetak memungkinkan teks terlepas dari sumber dan menghampiri pembacanya sendirian. Ia memungkinkan hubungan yang amat pribadi antara teks dan pembaca--di ruang tidur, di kamar mandi, di tempat yang tak terjamah orang lain. Ia meminimkan, kadang meniadakan, kontak antara penulis dan pembaca. Apa yang terjadi pada seorang penulis akibat pola relasi yang demikian?

Sehubungan dengan ini, Goenawan Mohamad pernah menulis, “kesusastraan kontemporer kita, dalam derajat tertentu, adalah kesusastraan yang *self conscious*.⁹ Hilangnya publik yang intim karena kapitalisme cetak, membuat pengarang mawas diri bahwa karyanya tak lagi dibaca lingkungan terbatas yang ia percaya reaksinya. Karyanya akan menjadi milik khalayak yang tak terbatas, yang tak ia kenal, yang tak bisa ia duga sikapnya. Ia menjadi sadar diri. Namun, karena ini pula pembicaraan tentang seks menjadi gamang.

5. Kesadaran Niridentitas dan Tegangan Identitas

Sebetulnya, ada hal lain juga yang terjadi. Semacam paradoks terhadap yang tadi. Jika ada rasa sadar diri, terjadi pula sesungguhnya kesadaran niridentitas. Dalam percakapan lisan, kita tahu, pola relasi antarmanusia begitu mencengkeram, baik berdasarkan kekuasaan maupun karena kesadaran identitas di tengah keragaman. Dalam masyarakat dengan bahasa yang bertingkat, seperti Jawa, dan beragam, seperti di Jakarta, setiap anak dengan serta merta terbentur dengan persoalan identitas. Sebelum ia bicara, persoalan yang mesti ia pecahkan adalah “siapa diriku?”. Ia harus menaksir dulu posisi dirinya dalam relasi dengan sekelilingnya. Untuk menyebut “aku”, *mbasakke*, menunjuk dirinya sendiri, ia harus lebih dulu tahu identitasnya, yang tak pernah bebas. Saya ingat bagian kota masa kecil saya, Bogor, yang relatif majemuk dibanding kabupaten sekitarnya. Saya mendengar bahasa Jawa (bahasa ibu saya) di rumah, dan bicara bahasa Indonesia dengan logat Sunda Bogor. Di daerah itu cukup banyak anak menyebut dirinya dengan nama panggilan, yang juga saya lakukan di rumah. Belakangan saya bertemu beberapa orang yang menggunakan cara ini hingga dewasa dan berlatar belakang Sunda. Ini sebetulnya berasal dari suatu lingkungan yang akrab, tempat orang-orang lain mengenal si anak. Juga, karena begitulah orang lain lebih dulu memanggilnya, ia panggil dirinya sendiri demikian pula. Di sekolah, anak mulai menanggalkan nama dan menggantinya dengan kata ganti. Kami, pelajar SD di Bogor tahun 1970-an, menggunakan *kita* untuk menyebut diri sendiri dalam pergaulan sehari-hari dengan anak seusia. Saya tidak tahu mengapa *kita* dan bukan *aku* atau *saya*, tetapi kami tahu bahwa keduanya bukan berasal dari kalangan kami. *Aku* hanya diucapkan oleh murid yang baru pindah dari salah satu kota Jawa yang logatnya terdengar menggelikan, dan *saya* cuma dikatakan oleh Tuti, Husin, atau Sudin dalam buku pelajaran *Bahasaku*. Sejak SMP, saya tinggal di Jakarta dan mulai menyebut diri sebagai *gue* dalam pergaulan seusia, serta *saya* pada ibu dan bapak guru. Ketika bekerja saya menemukan lingkungan yang terdiri dari banyak orang Sumatra yang menggunakan pasangan *aku-kau*, juga orang Jawa yang memakai pasangan *aku-kamu*, untuk hubungan seajar, serta pasangan *saya* dengan panggilan lawan bicara dalam hubungan yang tidak sejajar ataupun tidak akrab. *Saya* dan *Mas* atau *saya* dan *Bu*. Percampuran bahasa Indonesia dan Jawa membuat saya tidak mungkin *mbasakke aku* pada orang yang tak mungkin saya sebut sebagai *kamu*. Begitu rumitnya sistem sapa, dan begitu lokalnya, menunjukkan begitu kuatnya persoalan identitas dan pola hubungan membentuk kesadaran manusia.

Saya adalah orang yang merasakan tegangan identitas itu, ketegangan untuk senantiasa *tahu diri*, untuk tidak salah menempatkan diri, yang besar kemungkinan akibat dari ekstrem bahasa yang memaksa kita untuk selalu sadar pada tempat kita di antara lingkungan. Karena itu, menulis menjadi jauh lebih menyenangkan ketimbang bicara di depan umum. Sebab, seorang penulis tak memiliki pembaca di hadapannya. Pembacanya entah di mana, sebuah kumpulan yang imajiner.

Ini juga, saya kira, yang, antara lain, menyebabkan menyempitnya variasi sistem sapa dalam bahasa Indonesia tulisan. Di luar surat menyurat pribadi, kita hanya mengenal varian “aku” dan “saya”, misalnya. Pembaca tak tampak dan penulis tak berada dalam ketegangan untuk merumuskan identitasnya. Akan tetapi, barangkali pula, karena konteks dan relasi yang pudar itu bahasa Indonesia formal-tulisan juga kekurangan kehangatan dan keintiman. Dalam menulis, terutama karya kreatif, saya kerap merasa kurangnya kosakata Indonesia yang spontan dan bergereget. Ia terasa steril dari emosi, dari keriangannya maupun kemarahan yang meluap. Ini mengingatkan saya pada bahasa Jawa *kromo inggil* yang tidak menyediakan pola dan kosakata untuk makian dan ucapan jorok. Untuk marah atau bicara cabul, orang harus menukar bahasanya dengan *ngoko*. Suasana tulis-formal menyebabkan penundaan emosi. Barangkali, ini berhubungan pula dengan banyak sedikitnya suku kata. Bahasa tulis-formal cenderung mengandung lebih banyak suku kata ketimbang bahasa lisan-percakapan. Pada hemat saya, bentuk *alegro* bahasa lisan tidak bisa dipandang semata-mata sebagai penyingkatan bentuk yang sesungguhnya lento, seperti dalam tulisan (hal itu memang terdapat, antara lain, dalam: *pergi* menjadi *gi* dalam bahasa Manado, atau *menyang 'ndi* menjadi *ngendi* atau *ndi* dalam bahasa Jawa, *bukan* menjadi *kan* dalam bahasa kolokial Indonesia). Kita mungkin bisa melihat secara lain, bahkan sebaliknya, karena suasana aksara-formal tadi mengandung penundaan emosi, ia cenderung menghindari spontanitas yang datang dengan lompatan-lompatan pendek. Gelombang itu tidak hadir dengan frekuensi tinggi, tetapi dengan amplitudo yang rendah dan panjang sehingga pengimbuhan yang bertumpuk-tumpuk merupakan suatu kebutuhan akan penundaan emosi. Persoalan ini memang membutuhkan penelitian dan pembuktian lanjut.

6. Bentuk Baru Masyarakat

Namun, setelah itu, tentu saja kesadaran kita kemudian dibentuk suatu teknologi yang begitu efektif mencapai masyarakat: televisi. Juga, telepon, radio, dan elektronik yang merekam gambar dan suara. Teknologi ini memungkinkan suara serta gambar direkam dan melampaui dimensi waktu. Ia memungkinkan penambahan kapasitas memori secara audio-visual. Di sinilah kita berada dalam suatu bentuk baru masyarakat lisan, yang disebut oleh Walter J. Ong sebagai “*secondary orality*”, kelisanan sekunder. Untuk menghindari perbedaan definisi dan penekanan, di sini saya ingin menyebutnya “oralitas kompleks”. Televisi menjamah tak cuma indra dengar kita, tetapi juga indra lihat kita, dengan cara yang berbeda dari sekadar tipografi. Teknologi cetak memang telah memungkinkan tulisan menghampiri kita tak sekadar sebagai tanda dari sebuah konsep yang abstrak, suatu bentuk yang lebih permanen ketimbang lisan. Jika lisan memiliki nada, intonasi dan warna suara, maka sebetulnya aksara mempunyai

tipografi. Keduanya memiliki sesuatu yang fisik. Bukan sekadar konsep yang abstrak dan steril. Para pekerja biro iklan pembuat logo tahu betul bahwa jenis-jenis *font* akan menghasilkan kesan-kesan yang berbeda. Oleh karena itu, tulisan tak lagi sekadar tanda kedua seperti yang dibayangkan Aristoteles atau Ferdinand de Saussure, yang menganggap aksara sebagai tanda dari bunyi, dan bunyi adalah lambang atau wujud dari konsep. Di sini, lebih mirip yang dibayangkan Jaques Derrida dengan *arche-writing*, aksara menempati tempat yang sama dengan bunyi. Akan tetapi, televisi menjamah manusia lebih dahsyat karena menggabungkan semua itu. Ia menyentuh indra dengar, indra lihat, sekaligus mekanisme bahasa kita. Sekaligus, televisi mengatasi keterbatasan ruang dan waktu yang menjadi khas dalam kelisanan.

MTV adalah contoh terbaik, dan buat saya paling menarik, tentang stasiun yang sadar betul akan kelebihan media ini. Berbeda dari cara TVRI, bahkan CNN maupun Discovery, yang cenderung menyampaikan program *feature* secara runut dengan narasi audio (kadang disertai *subtitle* yang berfungsi sebagai pengganti suara, terutama, bagai pemirsa tuna rungu), MTV, serta beberapa stasiun musik dan hiburan semacam Channel V, menyampaikan *feature* dengan meramu gambar, bunyi, dan teks sekaligus. Teks ditampilkan bukan sebagai pengganti suara penyiar, melainkan sebagai tanda yang sama kuat fungsinya dengan kata lisan dan visualisasi. Kerap, narasi lisan dan narasi visual tidak saling menggantikan. Dengan demikian, program ini berbicara sekaligus pada mata kita dan telinga kita, dengan topik yang berbeda. Indra lihat kita dipisahkan dari indra dengar, diperlakukan sebagai makhluk yang berbeda, yang masing-masing bisa diajak bicara pada saat bersamaan. Perpindahan gambar pun begitu cepat sebab sebagian informasi, juga narasi tulisan, disampaikan secara visual.

MTV juga salah satu stasiun yang paling cepat menjalankan desentralisasi. Desentralisasi memang tak terhindarkan karena beberapa alasan. TVRI juga melakukannya dengan alasan persatuan, sementara teknologi mengharuskan dia mempunyai stasiun transmisi untuk menangkap siaran Jakarta. Kapitalisme yang mewajibkan perputaran modal tanpa henti, pada gilirannya, mengadopsi pluralisme pasar. Pun MTV. Berawal di Amerika Serikat, stasiun ini membuka filial di “pusat-pusat” dunia yang lain: MTV Asia, MTV Brazil, MTV Europe, MTV Latino, dan lain-lain, sambil membiarkan masing-masing membikin program “lokal” dengan bahasa campuran.¹⁰ Apa yang dilakukannya sebetulnya sama dengan yang dikerjakan TVRI, dengan alasan dan skala yang berbeda. Cuma, perbedaan alasan ini menimbulkan sikap yang berlainan. TVRI melakukannya untuk persatuan dan untuk menyampaikan suara pemerintah pusat. MTV melakukannya untuk pasar. TVRI melakukannya lebih untuk sentralisasi, MTV lebih untuk desentralisasi. Bagaimanapun, di sini sebetulnya kita bisa melihat dua sisi mata uang: penyatuan dan penyebaran.

Dalam beberapa hal benarlah bahwa, seperti yang dikatakan Ong, bunyi dan suara mempersatukan audien, sementara tulisan memisahkan mereka.¹¹ Televisi dan radio memungkinkan terbentuknya komunitas penonton. Contoh yang paling jelas adalah siaran sepak bola. Pada Piala Dunia yang lalu (dan setiap final Piala Dunia) kita melihat setiap warung mampu menyediakan televisi, dan orang-orang cenderung berkumpul untuk menonton, sering sambil ngemil dan minum. Di sini menonton menjadi

pengalaman komunal. Televisi memungkinkan individu mengikatkan diri baik dengan sesama penonton maupun pada apa yang ada di dalam tabung kaca itu. Memang, penautan diri dengan tontonan bukan khas televisi. Tulisan juga memberi kemungkinan yang sama. Kita tahu, misalnya, pembentukan kesadaran keindonesiaan juga yang ditularkan lewat tulisan. Justru di sinilah televisi mengatasi keterbatasan oralitas pra aksara sekaligus membuyarkan keterpisahan pembaca dalam keberaksaraan cetak.

Seperti TVRI, MTV juga membentuk komunitas bersama yang skalanya jauh lebih luas. Begitu juga stasiun televisi lain. Ia membangun yang disebut McLuhan sebagai desa global. Kesadaran komunal ini bukan cuma membentuk penontonnya, tetapi juga membentuk penciptanya. Begitu berbeda dari penerbitan buku, seluruh produksi program televisi selalu merupakan karya kolaborasi. Tak ada, setidaknya belum pernah ada, sebuah karya yang diciptakan sendirian. Sebuah karya di sini selalu merupakan hasil dari negosiasi dan kesepakatan. Karena itu, ia berada dalam kesadaran komunikasi, kesadaran dialog. Bukan kesadaran soliloqui, yang memungkinkan pengarang berbicara hanya pada dirinya sendiri, yang memungkinkan pengarang bersendirinya tanpa penonton imajiner sekalipun selain bayangannya sendiri.¹²

7. Teks dan Pembaca Imajiner

Dalam bagian ini, saya ingin berbicara tentang teks dengan pembaca imajiner “anak muda”. Tentu saja ini juga sebuah kategori yang problematis. “Kemudahan” di satu pihak merujuk pada usia fisik, dan di pihak lain pada suatu selera, suatu konsep, suatu idealisasi dan ideologi--seperti “perempuan” atau “lelaki” merujuk pada ciri biologis maupun gender. Karena teks cetak ditujukan kepada komunitas pembaca imajiner, kemudahan itu menjadi begitu bergantung pada ideologi sang penulis atau penerbitnya. Bayangan mereka tentang kaum muda--termasuk idealisasinya--bisa berbeda satu sama lain.

Saya di sini tidak memfokuskan diri pada sesi sastra seperti yang ditujukan bagi pelajar oleh jurnal sastra *Horison*. Dalam sisipan “Kaki Langit”, *Horison* melakukan usaha mendekatkan dunia sastra, termasuk sastrawannya, kepada murid sekolah menengah. Suplemen ini juga memberi tempat bagi cerpen dan puisi karya pelajar sekolah, seperti yang pernah dilakukan *Kawanku*. Ini tentu merupakan hal yang baik, dan kewajiban bagi sebagian murid sekolah negeri memilikinya dalam beberapa hal patut dihargai, yang membuat kegiatan sastra menjadi terprogram sementara terlindungi dari pasar bebas yang bisa banal. Tetapi, di luar itu kegiatan bersastra yang lain tumbuh tanpa strategi nyata yang mengekang ataupun mengarahkan. Kehidupannya ditentukan oleh tawar-menawarnya dalam--bukan dengan--“pasar”. Saya di sini tak hendak mengutuk pasar sebagai sebuah kekuatan yang serta merta merendahkan mutu karya--meskipun kita harus mengakui ia punya daya itu. Pasar bebas, kita tahu, juga memberi peran besar pada orang banyak yang tidak homogen. Di dalamnya terkandung demokratisasi selera, desentralisasi nilai, festivalisasi aturan. Dan, dalam hal ini terutama adalah kedekatan “aktor” dan “spektator”, pengarang dan pembaca, bahkan peluruhan keduanya dalam sebuah karnaval, seperti yang dikatakan Mikhail Bakhtin. Tiadanya jarak antara penulis dan pembaca menciptakan bahasa tulis yang akrab, yang diguna-

kan sehari-hari. Di sinilah ada disdiglosia terhadap bahasa Indonesia.

Ada sebuah ilustrasi yang menarik saya: festival kecil film televisi Indonesia di Teater Utan Kayu pertengahan Agustus lalu. Tayangan yang paling mengesankan saya ditulis sekaligus disutradarai oleh Cassandra Massardi, seorang mahasiswa sinematografi Institut Kesenian Jakarta berusia dua puluhan awal: *Tujuh Bulan Sebelum Cinta*, yang bercerita tentang persahabatan empat anak muda dan seorang gadis, salah satu dari mereka, yang hamil di luar nikah.¹³ Dengan warna yang cerah seperti permen, pemotongan adegan yang manis, detil yang diperhatikan, sofa corak kembang, boneka, dan balon penonton sungguh merasakan kesegaran dari adegan yang kaku, juga kebaruan dari stereotip selama ini. Lebih dari itu, berbeda dari empat film cerita lain yang ditampilkan dalam pekan itu, berbeda dari banyak sinetron, Cassandra menyodorkan suatu bahasa yang amat sehari-hari. Bahasa anak muda kelas menengah Jakarta. Ia seperti tanpa pretensi untuk menjelaskan kepada nasion yang luas ini. Justru di sinilah film itu menjadi wajar dan akrab.

Dalam sesi diskusi yang mengakhiri festival film itu, Cassandra mengatakan bahwa keputusan-keputusannya terhadap skenario serta penyutradaraan diambil lantaran ia memang menunjukkan filmnya terutama untuk anak muda. Ada satu (dan satu-satunya) adegan muram menjelang ending: Rox, si gadis yang hamil, akhirnya meninggal setelah menjalani operasi sesar. Setelah adegan yang jadi putih itu, warna kembali seperti kembang gula, dan wajah sahabat-sahabat Rox kembali gembira seraya menimang bayi yang piatu, meski tetap ada melankoli ketika potret almarhumah disorot kembali. Toh tidak ada melodrama ataupun air mata yang dieksploitasi seperti banyak sinetron lain mencari efek. Kehamilan di luar nikah digambarkan dengan optimistis dan perempuan tidak dipotret sebagai makhluk malang yang diperlakukan tak adil oleh masyarakat. Cassandra melakukannya dengan sadar. Ia mengatakan, ia memang menghindarkan sodoran persoalan yang berat dalam filmnya karena alasan tertentu. Belum siap menggarapnya, katanya. Film ini cakep, riang, dan penuh harapan yang implisit, seperti seorang dara atau jaka yang belum terbentur-bentur persoalan yang mematahkan semangat.



8. Komunitas Pembaca Remaja: Novel dan Majalah Remaja

Gejala bahasa yang paralel tampak dalam banyak novel serta cerpen yang diasumsikan untuk anak-anak muda. Yang paling kentara adalah karya-karya Hilman "Lupus" Hariwijaya. Penulis cerita remaja yang paling produktif dan paling populer ini

menggunakan bahasa percakapan kaum muda Jakarta dengan kental. Ia seperti meneruskan apa yang dilakukan paman Cassandra, Yudhistira Massardi, dalam *Arjuna Mencari Cinta*, atau Remy Sylado dalam puisi-puisi mbelingnya. Dalam *Lupus*, *Olga*, dan serial karya Hilman lain--sendiri maupun kolaborasi--bahasa percakapan itu tak lagi terasa sebagai pemberontakan yang bersemangat terhadap bahasa baku, tetapi nampak sebagai sebuah kewajaran. Sebab, memang itulah yang mereka ucapkan sehari-hari. Seperti dalam *Interview with the Nyamuk* ini, Hilman bagai menulis surat pada teman mainnya:

Lupus emang udah jarang main ke HAI lagi, sejak bisnis kue maminya berkembang pesat. Ya, soalnya pulang sekolah sebelum si Lupus ini sempet ngapa-ngapain, langsung aja disuruh ngaduk-ngaduk adonan pake mixer.¹⁴

Ada kesan kuat dalam *Lupus* bahwa penulisnya tidak menulis dalam kesendirian. Tidak juga berbicara pada suatu komunitas asing di luar sana, yang tak terhitung dan tak terduga. Ia berbicara pada komunitas yang akrab; yaitu komunitasnya. Ia seperti mendongeng, seperti menggossip, bukan bersoliloqui kepada pembaca yang ia kenal, setidaknya karakter-karakter khas mereka, kepada pembaca yang memiliki referensi yang setara dengan dirinya. Pembaca itu memiliki banyak kesamaan! remaja sekitar Jakarta. Dan orang kedua itu, yaitu pembaca, hadir secara implisit dalam narasi *Lupus*:

Pengumuman! Boim sakit! [...] Sakitnya Boim cukup keras. Ih, kacian deh. Boim terkapar tanpa daya di ranjangnya yang dekil. Udah kayak mumi yang diawetin. Kulitnya sampe pada gosong. Tapi kulit Boim dari dulu pan emang udah gosong, ya?¹⁵

Suatu komunitas yang akrab juga nampak dari penokohnya. Sahib-sahib Lupus, seperti Gusur, Boim, Deny, dan beberapa yang lain adalah gerombolan main Hilman, sang penulis, sehari-hari. Hilman sendiri sering kali tidak membedakan dirinya dari Lupus. Ia pernah memerankan karakter itu dalam film *Topi-Topi Centil* yang memang diangkat dari seri *Lupus* dengan judul sama. Dalam *Interview with the Nyamuk*, jelaslah bahwa Lupus adalah Hilman sendiri. Buku ini bercerita tentang perjalanan Lupus dan fotografer Denny sebagai wartawan *HAI* mewawancara penyanyi grup Duran Duran, Nick Rhodes, seraya mencantumkan foto Hilman dan Denny yang sedang menginterview si pemusik. Pembaca faham dan tak heran bahwa tokoh Lupus adalah Hilman dalam bentuk lain. Beberapa karya Hilman juga dikerjakan bersama dan diakui sebagai karya kolaborasi. Umumnya kerja bareng Hilman dengan teman-teman yang tadi juga, seperti seri *Lupus Kecil* dan *Lupus ABG* (dengan Boim), seri *Lulu* (dengan Boim dan Gusur), seri *Vanya* (dengan A. Mahendra). Kolaborasi ini tidak sejalan dengan pengagungan individualitas dan orisinalitas dalam seni modernisme. Ia lebih mirip suatu kebersamaan dalam tradisi lisan. Komunitas imajiner yang

akrab juga mengingatkan saya pada tradisi dongeng, mengingat si pelipur lara bercerita pada sekelompok orang yang berinteraksi langsung dengan dia. Ini adalah paradoks dalam tradisi cetak, pembaca umumnya adalah sesuatu yang jauh, yang tidak ada di hadapan penulis, sehingga menulis bukanlah mendongeng pada audien, melainkan lebih mirip yang dikatakan Toni Morrison sebagai “*a private thing for public consumption*”.

Barangkali lantaran sadar berkomunikasi dengan komunitas yang relatif homogen dan akrab, Hilman dengan rileks menggunakan bahasa percakapan remaja. Akan tetapi, barangkali pula, di samping paradoks tadi, ini justru merupakan bagian dari kapitalisme cetak dan elektronik. Sebagian besar penulis novel remaja yang paling terkenal dibesarkan oleh Gramedia, sering kali melalui majalah remajanya *Hai*. Beberapa di antaranya adalah Hilman, Zara Zettira, Gola Gong. Hilman dan Zara kemudian juga menjadi penulis skenario. Hilman dan Gong bekerja di stasiun televisi swasta, dan Zara berkiprah di bidang yang lebih kurang sama: iklan dan program teve. Selain itu, bisa disebut juga nama lain, semisal Adra P. Daniel, yang menulis novel remaja sementara bekerja di Indosiar. Beberapa naskah novel pun diskenariokan dan difilmkan. Pernah pula ada ide dari seorang produser untuk berbuat sebaliknya: menovelkan sinetron. Ini menunjukkan dekatnya dunia sastra dan televisi. Meski dengan kadar berbeda, pengakuan atas bahasa percakapan remaja kini pun nyaris serempak ada pada media itu, juga majalah dan iklan yang ditujukan bagi remaja dan anak-anak, misalnya *Gadis, Hai, Aneka, Bobo, Kawanku, Fantasia*. Pergeseran sikap beberapa di antaranya adalah cerita yang menarik.

Tahun 1970-an, semasa saya sekolah dasar, kami mengenal beberapa majalah anak-anak. Pertama adalah *Si Kuncung*, yang bisa dilanggan lewat sekolah, dengan harga kira-kira Rp 25. Kemudian, *Kawanku, Bobo*, yang dikirim ke rumah dan lebih mahal. Lantas, *Hai*. Baru *Gadis*, untuk anak perempuan yang beranjak remaja. Beberapa orang kemudian menyebut *Si Kuncung* sebagai majalah sastra anak-anak. Majalah ini, berisi cerita untuk anak dengan ragam bahasa Indonesia yang cenderung baku serta ilustrasi sketsa Ipe Ma'ruf, pelan-pelan hilang dengan munculnya media bocah yang lain, yang tak cuma berisi fiksi, tetapi juga komik dan artikel lain, terbit berwarna pula, yang agaknya lebih menarik anak-anak. Media anak mulai menjadi bisnis skala massal. Oplah edisi pertama *Bobo*, tahun 1974, sekitar 50.000 eksemplar, dan mencapai 200.000 belakangan ini. *Kawanku* mencapai 75.000 pada tahun 1975.¹⁶ Mereka pun mulai berada dalam posisi timbal balik dengan konsumennya: mempengaruhi tetapi juga menyesuaikan diri. Dan, para penerbit senantiasa mencari peluang.

Beberapa perubahan terjadi karenanya. Di luar komik dan fiksi, artikel *Bobo* edisi-edisi awal berisi pengetahuan alam maupun sejarah yang dipopulerkan. Pelan-pelan cerita tentang tokoh cilik yang berprestasi mulai ada. Masuknya artikel semacam ini pada gilirannya melahirkan selebriti anak dan remaja, yang tak terlepas dari perkembangan media secara umum. Ketika popularitas menjadi penting (juga bagi pemasaran), maka tokoh-tokoh cilik itu banyak dipasok dari televisi. Kebanyakan adalah penyiar program anak, atau penyanyi cilik.

Namun, perpindahan orientasi yang paling nyata nampak dalam kasus *Kawanku*

dan *Hai*. *Kawanku* (terbit 1970) dalam ingatan masa kecil saya hampir mirip dengan *Si Kunciung*. Kertasnya, ilustrasinya, warnanya, isinya, hanya sedikit lebih besar, kalau saya tidak salah. Tapi barangkali saya salah, sebab pendirinya merencanakannya berbeda dari *Si Kunciung*. Yang agak terang, komposisi terbanyaknya adalah cerita anak-anak, yang menurut Asmara Nababan, salah satu pendirinya, “sering dibilang berkelas sastra”. *Kawanku* juga menyediakan enam halaman untuk karya anak-anak.¹⁷

Majalah *Kawanku* ini sempat populer, namun akhirnya kehabisan nafas. Dengan pengambilalihan oleh Gramedia, tahun 1989 ia terbit lagi dengan nama *Kawanku Stil*. Tapi banyak perubahan terjadi. *Stil* adalah singkatan “Saya Tidak Ingusan Lagi”. *Kawanku* yang baru bukan lagi majalah anak-anak. Ia kini membidik remaja ABG “yang doyan Madonna, New Kids on The Block, Anggun C. Sasmi, rubrik Mode, Kura-kura Ninja” sementara “porsi cerita dan puisi dikurangi”.¹⁸



CATCH

137 menit seru-seruan

Tiga cowok keren Ben, Wayne, dan Toby main ke GADIS. Bareng si Geas Sampul. Mereka mereka lampir di sampul. Selama berada di GADIS, banyak cerita seru. Check it out!

Mode: SEXY BUAT
KE PESTA

PROFIL: BIMODewa

MUSIK: rumahsakit,
naif, warna,
wong, zampa

ASMARAA: COME BACK
kenapa nggak

HOT SHOT: EVAN & JARON

DEKOR: Antoi hari jadi kekasihku

Manisari: NICH CARTER
Backstreet Boys

GADIS DUNIA CEWEK

© 1989 Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced without the prior written permission of Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Tel. (021) 497-0100, 469-9111

Hal yang mirip terjadi pada *Hai*, majalah yang waktu itu tak saya gemari lantaran komiknya terasa terlalu jantan dan biasanya bersambung terus-terusan. Terbit pertama tahun 1978, majalah ini banyak berisi cergam, selain cerita petualangan remaja. Tahun 1984, *Hai* berganti arah dengan mengawinkan diri dengan dinamika perfilman yang ketika itu mulai merajalela. Ia menuliskan sinopsis film silat, memasang pendekarnya sebagai sampul, sementara bisnis rental video sedang marak. Ia juga mengangkat segala perkembangan yang terjadi dalam film, televisi, dan musik. Wajah-wajah aktor dan pemusik pun mulai nampang di kovernya. Tahun 1988, ia menjadi *Hai*, “Majalah Cowok Paten”.¹⁹

Di sini kita sama sekali tidak boleh melupakan Arswendo Atmowiloto. Arswendo adalah orang dibalik reorientasi *Kawanku* dan *Hai* menjadi bergandengan dengan televisi dan film. Ini bisa kita lihat juga dalam karyanya yang lain, tabloid *Monitor* (terbit 1986) dan *Fantasi* (terbit 1993). *Monitor* memang diciptakan sebagai majalah film dan televisi. Isinya terutama sinopsis film serta gosip aktor dan aktris. Tetapi, *Fantasi*, yang diaku sebagai majalah anak-anak, mengasah suksesnya juga dengan melayani pasar anak-anak yang hampir semuanya penonton teve. Arswendo seperti hendak mengulangi kejutan *Monitor* di dunia anak-anak. *Fantasi* awal terbit dengan kertas yang berbau asin dan gambar sampul jagoan film atau *game* yang diakrabi bocah-bocah: Satria Baja Hitam, *Power Ranger*, dan semacamnya. Isinya, antara lain, sinopsis film, resensi *game* mutakhir, artikel tentang selebriti film dan musik anak serta remaja, juga kartun yang kadang terasa kasar. Ia adalah *Monitor*-nya anak-anak. Belakangan, pemusik remaja mulai banyak tampil di sampul dan artikelnya. Saya tidak tahu, apakah *Fantasi* juga akan beranjak akil balig seperti *Kawanku*.

Namun, yang juga perlu kita catat di sini adalah bahwa rubrikasi dan pergeseran itu juga membawa perubahan bahasa, menjadi semakin mendekati ragam percakapan Jakarta. *Gadis* memang sudah sejak awal mempromosikan kata “*ceweq*” dan “*cowoq*” (kini ditulis dengan huruf “*k*” di belakang, “*cewek*” dan “*cowok*”) dalam artikel-artikelnya. Kecenderungan itu terus menguat, baik dalam artikel maupun dalam iklan. Begitu juga iklan novel-novel *Lupus*, *Olga*, dan sejenisnya.

9. Bahasa Lisan TVRI dan Televisi Swasta

Penggunaan bahasa percakapan bisa dimengerti dalam konteks menjawab perkembangan yang berkaitan dengan televisi. Munculnya televisi swasta, mau tak mau, berarti batalnya monopoli TVRI, juga sebagai model bahasa Indonesia. Lambat laun, pemirsa merasakan penyiar TVRI, juga RRI, sebagai konvensional dibanding pembawa acara stasiun lain, kalau bukan mengalienasikan penonton. Tapi, perbedaan ini paling nyata nampak dalam acara remaja dan anak-anak, yang umumnya didominasi oleh program musik dan hiburan. Jika berita--baik TVRI maupun *Seputar Indonesia*, *Liputan 6*, *Buletin Siang*, dan yang sejenisnya--umumnya tetap dibawakan dengan gaya formal meski lebih ramah, penyiar acara remaja, juga program hiburan dan tentang selebriti, membawakannya dengan gurau dan cengar-cengir. Hal yang tak ada di TVRI. RRI menampungnya dengan membuat RRI Program 2, yang juga menerima iklan. Dimungkinkannya wawancara serta program interaktif juga merupakan promosi atas bahasa lisan dan percakapan. Di sini, sekali lagi, kita bisa melihat TVRI sebagai monolog, penyiar seperti pemerintah memberi wejangan kepada rakyat dalam sebuah acara seremonial. Sementara, teve swasta adalah dialog, penonton disapa dan diperhitungkan.

Dalam hal ini, peran MTV mungkin tak bisa diabaikan. Stasiun yang mengutamakan musik ini bisa dianggap sebagai acuan program-program musik di Indonesia, kalau bukan di Asia dan belahan bumi lain juga. MTV menjalankan bisnis desentralisasi, dan memberi tempat pada musik-musik “lokal” disiarkan secara “regional”: lagu Indonesia disiarkan di Asia, diantar oleh penyiar “internasional”; yaitu mereka yang

bercakap bahasa Inggris dan menguasai sedikit bahasa “lokal”. Tapi, itu belum cukup, sebab sebagian besar pemilik televisi di Indonesia tidak memiliki parabola yang memungkinkan mereka menangkap MTV. AN-Teve, stasiun dalam negeri yang membidik penonton remaja, menangkap peluang itu dan bekerja sama dengan MTV. AN-Teve menyiarkan program musik MTV Indonesia lewat stasiunnya sehingga tak perlu dekoder ataupun parabola. Para penyiar MTV ini pun segera melejit. Mereka memberi warna Indonesia pada dunia “internasional” dan memberi bau “internasional” pada Indonesia. Mereka lambang globalisasi, yang mempersatukan selebriti Indonesia dan dunia, dan penampilan mereka menjadi acuan. Mereka adalah “indo”. Kita bisa melihat Nadya Hutagalung dan Mike Kaseem, atau Sarah Sechan dan Jamie Aditya, membawakan acara sembari ngobrol di sebuah *living room* ala serial komedi Amrik--sebuah sofa panjang dan meja kecil menghadap kamera--dengan gaya begitu santai dan wajar. Kesalahan eja, misalnya, tidak menjadi suatu kegagalan, melainkan keseharian. Ketidaktahuan bukanlah kekonyolan yang fatal, melainkan kelucuan yang menyenangkan. Kecentilan dan kecuekan tidaklah menyebalkan, tetapi kekhasan yang membikin geregetan. Semua itu seperti sebuah istirahat dari ketegangan akibat formalitas seremonial yang terus-menerus kita temui. Semua itu membuat para presenter lebih manusiawi. Barangkali di sinilah kita menemukan kembali apa yang disebut Takdir sebagai “kekacauan yang nikmat”. Cara yang mirip kemudian dilakukan oleh penyiar teve swasta dalam negeri: Indra Safera dalam *Kiss*, Lulu Dewayanti dalam *Asli*, dan sejenisnya. Pemirsa pun kini mendengar bahasa lisan, bahasa percakapan mereka sehari-hari (yang di Jakarta, memang).

Telah sering dikatakan para linguist bahwa bahasa adalah kode. Kode tertentu bukanlah cuma untuk strata tertentu, tetapi juga untuk relasi tertentu, konteks tertentu. Ketika konteks yang sama--musik, film, hiburan, selebriti--dari televisi dituliskan dalam media cetak, kode yang sama pun digunakan. Konteks tadi membentuk sebagian besar kesadaran remaja kita, yang nampak dalam porsi media cetak mereka. Karena itu, selain bahasa percakapan, kita menemukan juga kosakata yang berasal dari konteks itu, yang diterjemahkan ke dalam tulisan: *kul* (dari *cool*), *gim* (dari *game*), *ngetren* (dari *trend*). Ketika konteks yang berbeda dibicarakan, misalnya matematika atau profil tokoh sejarah, bahasa semacam itu tidak digunakan.

Dalam soal bahasa, agaknya sebagian penulis, novelis, maupun orang-orang penerbitan memang berada dalam suasana dialog dengan pembacanya sehingga mereka menyesuaikan diri dengan bahasa yang membumi. Ketika menerbitkan *Monitor* yang khas dengan foto “lher” dan gosip artis, Arswendo dengan sengaja menyebutnya “jurnalisme kampung” dengan bahasa yang juga “kampung”:

Bahasa kami memang bahasa masyarakat kampung. Bagus ya bilang bagus; tertarik ya bilang tertarik; jelek tak nanti kami bilang kurang bagus; membo-sankan, tak nanti kami bilang biasa. Suka ya syukur, nggak suka ya jangan ngatur.²⁰

10. Oralitas Sekunder, Oralitas Kompleks

Ketika Ong menggambarkan perkembangan oralitas sekunder, yaitu oralitas yang

dibentuk oleh televisi dan radio, ia lebih banyak bercerita tentang Eropa dan Amerika (untuk tidak menyebut “Barat”) sehingga sementara ini saya lebih suka menyebutnya “oralitas kompleks”. Indonesia tidak pernah mengalami tahap keberaksaraan cetak yang mapan sementara steril dari radio dan televisi. Penerbitan kita berkembang seiring teknologi audio-visual sehingga kesadaran beraksara kita dibentuk bersama kesadaran oralitas kompleks itu. Teknologi ini menciptakan kebersamaan yang khas. Kapitalisme cetak menyebabkan buyarnya komunitas pendengar, memisahkan pembaca satu dengan yang lain, dan menciptakan audiens imajiner bagi pengarang. Akan tetapi, televisi membangun komunitas imajiner yang berinteraksi lewat gambar dan suara. Siaran langsung dan interaktif memungkinkan dialog langsung, juga emosi yang lebih komunal. Meskipun pemirsa tak hadir secara visual, presenter berada dalam kesadaran diri yang kuat. Ia ditonton, ia berhadapan dengan audiens, ia berdialog dengan mereka. Ia bukan penulis yang menyusun pikiran dan kata-katanya dalam kesendirian, dalam keadaan niridentitas. Ia seperti pendongeng. Dalam televisi dan radio yang cenderung terjadi adalah dialog, mengingat peran pemirsa menjadi begitu penting, berbeda dari penulisan dan pencetakannya karena penonton tak sungguh nyata dalam kesadaran pengarang. Secara ekstrem, pekerjaan dalam menulis dan mengarang adalah kata kerja intransitif dan refleksif: ia dilakukan tidak untuk maksud yang jelas ataupun siapa yang jelas. Sementara, pekerjaan dalam siaran adalah kata kerja transitif dan diikuti kasus datif: ia dilakukan untuk maksud tertentu dan orang tertentu.²¹ Di sinilah, saya kira, peran pemirsa dalam proses dan keseluruhan pekerjaan itu menjadi begitu penting. Dalam dialog penonton menjadi subyek.

Namun, agaknya kesadaran akan audiens juga menyebabkan penciutan porsi cerita untuk berita dalam majalah anak dan remaja, seperti pada kasus *Hai* dan *Kawanku*. *Anita Cemerlang* juga sebuah kisah yang sama. Majalah ini semula dikhususkan bagi cerpen remaja, mengikuti suksesnya kumpulan cerita karangan Kurniawan Junaedhie “Ranting-Ranting Cinta” yang diterbitkan *Gadis*.²² Belakangan, majalah ini juga semakin mengurangi cerita sambil menambah artikel selayaknya majalah remaja umum. Terjadi *trend* metamorfosa dari majalah cerita ke majalah berita. Di sini kita bisa melihat bahwa sebenarnya penonton, pasar, sebagai subyek semakin kuat. Mereka mau terlibat. Halaman yang semula diisi cerita, diganti dengan hal-hal yang lebih melibatkan pembaca.

Sementara itu, perlu kita ingat pula bahwa kehidupan kesusastraan Indonesia terutama adalah di media massa yang menyediakan tempat untuk puisi, cerpen, dan cerbung, yang menurut Will Derks merupakan bagian dari tradisi lisan.²³ Kesusastraan Indonesia terutama bukan pada buku dan novel yang lebih individual, melainkan pada pembacaan, karya kreatif di media massa, yang suasana komunalnya tetap penting. Penciutan porsi karya kreatif dalam majalah anak dan remaja merupakan sesuatu yang menyedihkan dari sudut pandang ini. Akan tetapi, pandangan yang pesimistis ini membutuhkan penelitian lebih lanjut. Misalnya, apakah cerita anak dan remaja yang semula memenuhi majalah telah pindah ke buku-buku khusus?

11. Penutup

Kesadaran akan audiens ini pula yang mengangkat bahasa percakapan ke dalam medium bersama yang jauh lebih luas ketimbang sebelumnya. Di sini, lembaga bahasa seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebetulnya beriringan dengan lembaga-lembaga bahasa yang lain: media massa, majalah, dan televisi swasta. Sebuah bahasa persatuan tidak lagi terutama dirancang oleh sebuah lembaga yang membawa semangat orisinalitas maupun politik negara, melainkan tumbuh "alamiah"--yaitu tanpa suatu proyek atau cetak biru--mengikuti tarik-menarik dan tawar-menawar para penggunanya. Tentu saja dalam proses ini ada kekuatan-kekuatan yang menentukan jalannya evolusi tersebut. Akan tetapi, kekuatan itu tetap memperhitungkan "pasar", sebab pada para penggunanyalah ia bergantung. Ia bukan otoritas yang terpusat, utuh, dan tunggal. Otoritas itu telah terdesentralisasi.

Yang menyenangkan bagi saya justru melihat luruhnya diglosia antara bahasa lisan dan tulisan di area ini, di dunia remaja dan anak, juga dunia hiburan. Bagaimanapun anak dan remaja itu tidak akan sepenuhnya meninggalkan bahasanya setelah dewasa. Wilayah ini akan menyumbang bahasa yang lebih spontan, asosiatif, onomatopis, yang kurang dalam bahasa Indonesia formal-tulisan. Tentu saja kita tidak bisa berharap bahwa wilayah ini menjadi kekuatan satu-satunya dan terutama dalam perkembangan bahasa Indonesia. Berpihak hanya kepadanya adalah represi dan pembatalan yang sama dengan sebuah pusat bahasa yang menjauhkan bahasa dari pemakainya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Kajian Bahasa dan Budaya Universitas Atma Jaya, dan lembaga bahasa lain saya kira harus dalam sikap membuka diri dan memperkaya bahasa bekerjasama dengan media massa. Sebab, di sanalah letak dinamika bahasa Indonesia yang "asli"--bukan dalam arti *origin*, muasal, melainkan yang sejatinya digunakan. Kita tidak bisa lagi mencari bahasa Indonesia yang benar seperti Klenkert dan Van der Tuuk mencari Melayu murni di Tanah Deli.

Catatan:

1. Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities* (London: Verso, 1991).
2. Tidak berubahnya kebimbangan perdebatan kesusastraan Indonesia telah ditulis, antara lain, oleh Goenawan Mohammad, dalam "Kesusastraan Indonesia dan Kebbimbangan", dalam *Seks, Sastra, Kita* (Jakarta: Sinar Harapan, 1981), hlm. 15--30. Ketiadaan perdebatan maupun perbantahan antara generasi kesusastraan belakangan ini juga ia tambahkan kemudian sebagai "Sebuah Post Scriptum" pada tulisan tersebut, *ibid.*, hlm 30--37.
3. "Aturan kesopanan" jurnalistik yang penuh bias ini, tentu, bukan cuma khas Indonesia. Pers Inggris, misalnya, memiliki sistem sapa yang menyebut sumber dewasa dengan Mr/s dan nama keluarga, kecuali pada olahragawan dan terpidana. Dua kategori terakhir itu boleh ditulis dengan nama depan saja. Dalam hal ini, terasa ada kesejajaran dalam bersikap dengan pers kita. Cara yang santun menurut kaidah formal diberlakukan hanya pada orang-orang yang dianggap layak, misalnya yang tidak sedang dijatuhi hukuman, atau untuk urusan yang serius, di mana olah raga tidak termasuk.
4. Sekadar contoh yang diambil dari skenario film *Ombak Cinta*. Skrip ini ditulis oleh Nestor

Rico Tambunan. Meski ide cerita diambil dari cerpen saya *Cincin Kawin*, saya tidak ikut campur sama sekali dalam pembuatan skrip tersebut.

5. Lihat H.M.J. Maier, "From Heteroglossia to Polyglossia: The Creation of Malay and Dutch in the Indies" dalam *Jurnal Indonesia*, hlm. 44.
6. *Ibid.*, hlm. 45.
7. *Ibid.*, hlm. 52.
8. C.D.Grijns, *Kajian Bahasa Melayu Betawi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1991), hlm. 114.
9. Goenawan Mohamad, *op.cit.*, "Seks, Sastra, Kita", hlm.2.
10. Sedikit tentang program-program MTV bisa lihat Venen Sp. Wardhana, *Kapitalisme Televisi dan Strategi Budaya Masa Depan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 43.
11. Diulas juga oleh A. Teeuw dalam *Indonesia Antara Kelisanan dan Keberaksaraan* (Jakarta: Pustaka Jaya, 1994), hlm. 19--22.
12. Lebih jauh tentang ini saya tulis dalam "Membantah Mantra, Membantah Subyek", yang disampaikan dalam peluncuran novel *Saman*, 13 Mei 1998. Bagi saya, keadaan tanpa penonton, yaitu keadaan bersoliloqui, membedakan sebuah novel dari tulisan lain yang sifatnya berdialog, seperti berita dan esai. Makalah ini akan diterbitkan dalam edisi ke-12 jurnal *Kalam*.
13. Naskah ini mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 16 penulisan skenario terbaik yang diadakan Departemen Penerangan tahun 1995.
14. Hilman, *Interview with the Nyamuk* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 9.
15. *Ibid.*, hlm. 135.
16. Kurniawan Junaedhie, *Rahasia Dapur Majalah di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 124--126.
17. *Ibid.*, hlm. 124.
18. *Ibid.*, hlm. 125.
19. *Ibid.*, hlm. 107.
20. *Ibid.*, hlm. 253.
21. Ayu Utami, *loc.cit.*
22. Kurniawan Junaedhie, *op.cit.*, hlm.108.
23. Will Derks, "Pengarang Indonesia sebagai Tukang Sastra" dalam jurnal *Kalam*, edisi 10, Jakarta, 1998, hlm. 90--100.

Catatan Penyunting

Makalah ini tidak disajikan karena penulisnya tidak hadir.

PEMBERDAYAAN KOMUNITAS SASTRA INDONESIA DI DAERAH

Suripan Sadi Hutomo
IKIP Surabaya

1. Pendahuluan

Selama ini banyak orang beranggapan bahwa komunitas sastra Indonesia itu hanya ada di Jakarta. Anggapan ini diperkuat oleh kenyataan bahwa buku-buku sejarah sastra Indonesia umumnya hanya berkutat seputar buku-buku sastra yang terbit di Jakarta atau ditulis oleh pengarang-pengarang yang tinggal di Jakarta. Menurut Derks (1998:97), "Para pakar selalu berkiblat ke Jakarta saja". Apakah benar demikian?

2. Sastra Indonesia di Daerah

Kalau kita melihat surat kabar seperti *Haluan* dan *Singgalang* yang terbit di Padang, *Waspada* di Medan, *Riau Post* di Pekanbaru, *Pikiran Rakyat* di Bandung, *Suara Merdeka* di Semarang, *Berita Nasional* dan *Kedaulatan Rakyat* di Yogyakarta, *Surabaya Post* dan *Jawa Post* di Surabaya, *Fajar* di Ujung Pandang, *Banjarmasin Post* di Banjarmasin, *Akcaya* di Pontianak, *Bali Post* di Denpasar, dari *Lampung Post* di Bandar Lampung, kita akan menemukan kenyataan bahwa komunitas sastra Indonesia itu tidak hanya terdapat di Jakarta, tetapi juga terdapat di Padang, Medan, Palembang, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Pontianak, Banjarmasin, Ujung Pandang, Surabaya, Denpasar, dan lain-lain. Hal ini tampak dalam surat-surat kabar itu sebab surat-surat kabar itu memuat karya-karya serta kegiatan-kegiatan sastra di daerah. Karya-karya demikian itu ada yang dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku. Misalnya, dalam buku *Beberapa Paham Angkatan 45* (1952) karya Aoh K. Hadimadja dimuat sajak-sajak penyair dari Sumatera Utara yang pernah dimuat di rubrik kebudayaan *Harian Mimbar Umum* yang diterbitkan di Medan. Contoh lain, cerita-cerita pendek yang pernah dimuat di *Harian Berita Nasional* dipilih dan dikumpulkan dalam buku *Lukisan Matahari* (1993) dan *Candramawa* (1995), dan cerita-cerita pendek yang pernah dimuat di *Surabaya Post Minggu* diterbitkan menjadi buku berjudul *Limau Walikota* (1993).

Di samping karya sastra surat kabar, karya sastra hasil pengarang dari daerah juga muncul dalam bentuk sastra buku. Buku itu ada yang diterbitkan oleh dewan kesenian setempat, penerbit lokal, atau diterbitkan sendiri oleh pengarangnya. Dari Medan, misalnya, pernah terbit *Opstib* (kumpulan cerpen, 1982) oleh Ali Soekardi, *Mawar* (kumpulan sajak, 1983) oleh A. A. Bunga, *25 Cerita Pendek* (1979) suntingan Djohan A. Nasution, *Damiri Mahmud*, N.A.Hadian, Zakaria M. Passe, dan Rusli A. Malem), *Bayonet* (kumpulan sajak, 1989) oleh Zainuddin Tamir Koto, *Tamu Istana* (kumpulan cerpen, 1991) oleh R. Effendi Ks; *Gelombang Karang* (kumpulan sajak, 1995) oleh Zainal Arifin Nas, *Abraham Y. Abraham* (kumpulan cerpen, 1984) oleh Rahim Qahhar, *Nyanyan Laut* (kumpulan sajak, 1984) oleh Rusli A. Malem, *Nun*

(kumpulan sajak, 1981) oleh Rusli A. Malem, dan *Kuala* (antologi puisi terbitan Dewan Kesenian Medan, 1975, suntingan Sabaruddin Ahmad).

Contoh lain, dari Pekanbaru, terbit buku *Hai Ti* (kumpulan sajak, 1981) oleh Ibrahim Satah; dari Lampung, terbit buku *Kota Kembar* (kumpulan sajak, 1988) oleh Syaiful Irba Tanpaka dan Isbedy Stiawan Zs., serta *Cap Jempol* (kumpulan sajak, 1995) oleh Isbedy Setiawan Zs. Dari kota Ujung Pandang pernah terbit novel *Arus* (1976) karya Aspar.

Dari Denpasar, Bali, pernah terbit buku *Peta Lintas Batas* (kumpulan sajak, 1986) oleh Sunaryono Basuki Ks dan Dinullah Rayes, *Sumpah* (novel, 1978) oleh Putu Setia, *Sembilu dalam Taman* (novel, 1986) oleh Ngurah Parsua, *Penyair Bali* (antologi sajak, 1970), *Denpasar dalam Sajak* (kumpulan sajak, 1973) oleh Made Sukada, *Dengarlah Jiwa Kami Meratap* (kumpulan sajak, 1973) oleh I Made Jara Atmaja, dan *Matahari* (kumpulan sajak, 1970) oleh Ngurah Parsua.

Selanjutnya, dari Yogyakarta, terbit majalah kebudayaan *Basis*, yang banyak memuat sajak-sajak dari berbagai daerah di Indonesia, juga memunculkan sastra buku. Misalnya, *Mudik* (antologi cerpen, 1996), *Maling* (antologi cerpen, 1994), *Ambang* (antologi sajak dan cerita pendek, 1992), *Obsesi* (kumpulan sajak, 1982) oleh Faisal Ismail, *Dunia Semata Wayang* (kumpulan sajak, 1996) oleh Iman Budhi Santosa, *Matahari Pagi di Tanahair* (kumpulan sajak, 1967) oleh Rachmat Djoko Pradopo, dan lain-lain.

Dari kota Banjarmasin pernah terbit buku *Gunung dan Laut* (kumpulan sajak, 1985) oleh Arthum Artha, *Surat dari Langit* (kumpulan sajak, 1985) oleh Eza Thabry Husano, dan *Arafah* (kumpulan sajak, 1985) oleh Andi Amrullah. Lebih jauh mengenai buku-buku yang pernah terbit di kota Banjarmasin dan sekitarnya dapat dibaca dalam buku *Sejarah Lokal Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan Selatan 1930–1995* (1995) karya Tajuddin Noor Ganie dan buku *Ensiklopedi Lokal Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan* (1995) oleh Tajuddin Noor Ganie. Dan, bagi yang ingin mengetahui buku-buku yang pernah terbit di kota Surabaya dan Malang mereka dapat membaca buku *Wajah Sastra Indonesia di Surabaya 1856–1994* (1995), *Kronik Sastra Indonesia di Malang* (1994) dan *Melawan Kucuran Keringat* (kumpulan kritik, esai, dan apresiasi sastra, 1992), (lihat Hutomo, 1992, 1994, dan 1995).¹

Di samping surat kabar dan buku di daerah, juga terdapat terbitan majalah budaya atau majalah umum yang menampung karya sastra. Majalah-majalah itu ada yang berusia panjang, tetapi ada juga yang berumur pendek. Majalah-majalah itu ada yang luas peredarannya, tetapi ada pula yang terbatas peredarannya, dan itu ada yang hanya dibaca oleh sesama budayawan. Majalah yang terakhir itu lebih bersifat *buletin budaya* daripada majalah budaya yang sesungguhnya.

Majalah-majalah budaya yang pernah terbit di daerah, misalnya, *Arena* (Yogyakarta, 1946–1948), *Seniman* (Solo, 1947–1948), *Budaya* (Yogyakarta, 1952), *Pusara* (Yogyakarta, 1939), *Basis* (Yogyakarta, 1952–sampai sekarang), *Sasterawan* (Malang, 1946), *Gelora* (Surabaya, 1959), *Brawijaya* (Surabaya, 1950), *Menyimak* (Pekan Baru, 1993), *Bandarmasih* (Banjarmasin, 1994), *Esensi* (Dewan Kesenian Makassar, Ujung Pandang, 1971), *Cak* (Denpasar, 1994/1995), *Buletin DKS* (Surabaya, 1981/

1984), *Kalimas* (Surabaya, 1993), *Iklim* (Malang, 1989), *Kolong* (Magelang), *Diksi* (Palembang), *Trem* (Surabaya, 1977), dan lain-lain. Dari majalah-majalah itu yang kini masih hidup dan beredar luas adalah majalah kebudayaan *Basis* yang terbit di Yogyakarta.

Demikianlah uraian sepintas mengenai 'keberadaan' sastra Indonesia di daerah. Jika kita ingin mengetahui lebih banyak mengenai sastra Indonesia di daerah, yang meliputi nama-nama pengarang, judul-judul buku ciptaannya (baik yang terbit di daerah maupun Jakarta), kegiatan-kegiatannya, kita dapat membacanya dalam sebagian makalah yang pernah disampaikan dalam *Sarasehan Festival Pergelaran Sastra Tingkat Nasional Tahun 1989* di Jakarta. Dalam sarasehan itu banyak utusan dari daerah yang mengungkapkan keadaan sastra Indonesia di daerahnya. Makalah-makalah itu, antara lain (1) "Perkembangan Sastra di Kalimantan Selatan" oleh Tim Kesenian Kalimantan Selatan, (2) "Kehidupan dan Perkembangan Sastra di Kalimantan Barat" oleh A. Muim Ikram, (3) "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Kalimantan Tengah" (tanpa nama Penulis), (4) "Sekilas perkembangan Sastra di Kalimantan Timur" (tanpa nama penulis), (5) "Kesusasteraan Indonesia Modern di Sumatera Utara" oleh Djohan Arifin Nasution, (6) "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Daerah Istimewa Aceh" oleh Mursalan Ardy, (7) "Kehidupan dan Perkembangan Sastra di Sumatera Selatan: Sebuah Laporan Singkat" oleh Zainal Arifin Aliana, (8) "Sekilas Perkembangan Seni Sastra Daerah Jambi" (tanpa nama penulis), (9) "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra, serta Seni Sastra sebagai Seni Pertunjukan di Propinsi Lampung sampai Tahun 1989" oleh M. Said Arifin *et al.*, (10) "Sastra dan Pertunjukan Sastra di Sulawesi Selatan: Sebuah Catatan Sepintas" oleh Fahmi Syariff, serta (11) "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Nusa Tenggara Barat: Tinjauan Sepintas" oleh Max Arifin.

Demikianlah beberapa makalah yang mencoba mengungkapkan keberadaan sastra Indonesia di daerah. Walaupun di antara makalah-makalah itu ada yang dibubuhi kata *sekilas*, *sepintas*, dan lain-lain, sebagai tulisan pemula mengenai sastra Indonesia di daerah tertentu, makalah-makalah itu tetap mempunyai arti penting dalam pengungkapan kegiatan komunitas sastra Indonesia di daerah. Makalah-makalah itu dapat disempurnakan dan dikembangkan menjadi "Sejarah Sastra Lokal" di kemudian hari, asalkan para pakar sastra Indonesia di daerah menaruh minat kepadanya.

Usaha pengungkapan adanya kegiatan sastra Indonesia di daerah, sebenarnya, bukan baru tahun 1989, yakni sejak adanya Festival Pergelaran Sastra di Jakarta, melainkan malah sejak tahun 1972, yakni, sejak Made Sukada (sastrawan dan pakar sastra dari Fakultas Sastra, Universitas Udayana, Denpasar) menerbitkan karangan berjudul *Perkembangan Sastra Nasional di Bali*. Dalam karangan itu Made Sukada mengungkapkan kehidupan sastra Indonesia di Pulau Bali. Akan tetapi, sayang, pada waktu itu, orang belum berminat untuk memperhatikan perkembangan sastra Indonesia di daerah. Walaupun begitu, tulisan Made Sukada itu dapat dipandang sebagai pelopor penulisan sejarah sastra lokal di Indonesia. Dengan demikian, tidak keliru kiranya jika kita menghadiahi julukan "*Bapak Sejarah Sastra Lokal*" di Indonesia untuk Made Sukada.

Pada tahun-tahun berikutnya, setelah orang sadar bahwa di daerah ada kegiatan sastra Indonesia, barulah tulisan Made Sukada di atas mendapat perhatian orang. Dan, tulisan yang berjudul "Masalah Penulisan Sejarah Sastra Lokal di Indonesia" (lihat Hutomo, 1990) juga diilhami oleh tulisan mengenai keadaan sastra Indonesia di daerah, seperti yang dikerjakan oleh Tajuddin Noor Ganie (1983, 1992a, 1992B, 1992c, 1995a, dan 1995b), dan Farida Soemargono (1979). Memang, kita harus mengakui bahwa sastra Indonesia di daerah itu dapat dianggap sebagai suplemen atau pelengkap sastra nasional Indonesia. Sehubungan dengan hal itu, ada benarnya yang dikatakan oleh Derks: "... sastra Indonesia modern, vitalitas, serta kesuburannya sangat besar. Namun, untuk merasakan vitalitasnya, kita harus keluar dari pusat otoritas dan menjelajahi kota-kota besar dan kecil, tempat laskar penyair Indonesia "berkemah" dan "yang tabirnya sampai sekarang belum tersingkap penuh" serta "penjelajahan harus ditujukan ke Tegal, Ngawi, Malang, Solo, Denpasar, Manado, Ujungpandang, Pontianak, Banjarmasin, Kupang, Ambon, Jambi, Palembang, Pekanbaru, Tanjungpinang, Padang, dan sebagainya" (1998:99).

Pembicaraan mengenai komunitas sastra Indonesia di daerah, sebenarnya, dapat dibagi menjadi dua bagian. Pertama, komunitas sastra yang tinggal di ibu kota provinsi dengan vasilitas yang cukup memadai, misalnya dekat dengan media massa yang menampung karya-karya sastrawan setempat. Kedua, komunitas sastra yang tinggal di ibu kota kabupaten. Kelompok ini jauh dari vasilitas penerbitan. Walaupun begitu, kelompok ini tidak kekurangan akal. Mereka menerbitkan buletin stensilan. Misalnya, pada tahun 1960-an, di kota Blora, Jawa Tengah, terbit buletin *Sanggar Budaya* dan *Nada Sastra*. Contoh lain, dari kota Banyuwangi, Jawa Timur, pada tahun 1970-an, terbit buletin *Lontar* (Yekti, 1977). Di samping buletin, komunitas sastra di daerah juga memanfaatkan jasa radio pemerintah daerah. Pemanfaatan ini melahirkan julukan *Sastra Radio*. Kelahiran sastra ini, misalnya, dapat dilihat dalam kehidupan komunitas sastra Indonesia di Kota Tegal, Jawa Tengah, seperti yang diuraikan oleh Yono Daryono dalam sisipan majalah *Horison* (lihat Daryono, 1994).

Dalam perbincangan sastra Indonesia berskala nasional, umumnya komunitas sastra Indonesia di tingkat kabupaten tidak masuk hitungan, kecuali kalau aktivitas di daerah itu menonjol di tingkat nasional, seperti penyair D. Zawawi Imron, dari komunitas sastra Indonesia di Kabupaten Sumenep, Madura. Kasus ini juga membuktikan bahwa sastrawan yang berbobot nasional itu tak harus tinggal di Jakarta. Ia boleh juga tinggal di tanah pedalaman. Bobot sastra tidak perlu dinilai dari tempat tinggal pengarangnya, tetapi harus dinilai dari karya cipta sang pengarang.

3. Hubungan Pusat dan Daerah

Sudah sejak zaman Balai Pustaka dan Pujangga Baru hubungan pusat (Jakarta) dan daerah terlihat sangat mesra. Hal ini tampak dalam majalah *Pandji Poestaka* dan *Pantja Raja* yang diterbitkan oleh Balai Pustaka dan dalam majalah *Poedjangga Baroe* yang diterbitkan oleh Sutan Takdir Alisjahbana. Ketiga majalah itu banyak memuat sumbangan karangan yang berasal dari para pembantunya yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sejak zaman Balai Pustaka dan

Pujangga Baru telah ada komunitas sastra di daerah, yang tentu saja komunitas itu tidak seramai sekarang ini.

Tradisi mengirimkan tulisan ke Jakarta oleh pengarang daerah sampai sekarang masih berjalan walaupun di daerahnya sudah ada tempat untuk mempublikasikan karyanya. Hal itu terjadi karena ada pandangan di daerah bahwa jika karyanya dimuat di media massa Jakarta, misalnya, di majalah *Horison* atau di surat kabar *Kompas*, surat kabar itu dianggap lebih menggembirakan daripada dimuat di media massa yang terbit di daerahnya. Di samping karya dan nama pengarangnya tersebar luas di penjuru tanah air, biasanya, honorarium yang diterimanya juga cukup tinggi jika dibandingkan dengan honorarium di daerahnya walaupun kini di daerah telah ada media massa yang berani membayar tinggi untuk tulisan yang dimuatnya.

Di samping hal di atas, sebenarnya, kalau kita cermati lebih mendalam, ada juga pengarang di daerah yang menyatakan bahwa menulis di media massa di Jakarta itu lebih membanggakan dan bergengsi sebab para pengasuhnya dinilai termasuk orang-orang yang *the right man on the right place* (orang-orang yang tepat pada bidangnya) dan bukan wartawan yang "apa saja bisa" karena perputaran tugas keredaksian. Menurut pengarang di daerah, khususnya mereka yang tergolong senior dan mempunyai reputasi nasional, pemuatan karya di media massa lokal itu umumnya tidak berdasarkan mutu, tetapi lebih berdasarkan kolusi, koncoisme, dan bahkan nepotisme. Itulah sebabnya, tidak mengherankan jika kita sering menjumpai pemuatan karangan orang-orang tertentu saja. Atau, rubrik kebudayaan yang ada di sebuah media massa didominasi para penulis yang berasal dari daerah sang redaktur. Jadi, daerahisme itu terdapat juga dalam komunitas sastra Indonesia di daerah.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa di daerah ada anggapan bahwa kota Jakarta itu merupakan *barometer sastra*. Anggapan ini sejajar dengan anggapan di bidang politik ataupun di bidang lainnya bahwa kota Jakarta itu merupakan barometer segala-galanya. Apa anggapan yang demikian itu dapat diterima seratus persen? Tentu saja tidak sebab dengan munculnya gerakan seperti "revitalisasi sastra pedalaman", yang merupakan reaksi atas dominasi sastra Jakarta (pusat), merupakan satu bukti bahwa daerah (pedalaman) mempunyai hak untuk bersuara dan diperhitungkan.²

Di samping hal di atas, di daerah juga terdapat pengarang yang tidak mau mempublikasikan karyanya di Jakarta atau daerah lain. Mereka cukup puas mempublikasikan karyanya di media massa lokal dan menganggap bahwa Jakarta bukanlah satu-satunya barometer sastra Indonesia. Pengarang yang bersikap demikian itu, misalnya almarhum Krisna Mustadjab dari Surabaya. Dengan demikian, pengarang seperti Krisna Mustadjab tak memerlukan *legitimasi* dari Jakarta (lihat Viddy, 1995).

Hal lain yang tampak dalam hubungan pusat dan daerah adalah adanya media massa di daerah yang tidak hanya memuat karya penulis lokal, tetapi juga memuat karya-karya penulis dari Jakarta, bahkan dari daerah lain yang dinilai telah mempunyai reputasi nasional. Hal ini tentu akan menumbuhkan iklim yang baik dalam perkembangan sastra Indonesia sebab tidak hanya dimonopoli oleh Jakarta. Bagi pengarang (penyair) pemula di daerah, yang tidak sempat mengikuti pertumbuhan dan perkembangan sastra Indonesia di Jakarta, mereka dapat mengikutinya melalui media

massa daerah. Di samping itu, kasus ini dapat memekarkan wawasan apresiasi sastra masyarakat di daerah sebab wawasan para penulis di daerah dianggap kurang memadai. Dengan adanya kenyataan bahwa penulis-penulis yang bereputasi nasional mau menulis di media massa di daerah, dapat dikatakan di sini bahwa pengamat sastra Indonesia, baik dari dalam maupun luar negeri, tidak boleh hanya bertumpu pada kota Jakarta saja. Mengapa begitu? Sebab kasus ini membuka mata kita bahwa akhirnya antara Jakarta pusat dan daerah (*pedalaman*, menurut istilah H.B. Jassin) tidak perlu lagi dibedakan dengan tajam.

Usaha pemuatan karya penulis yang bereputasi nasional di media massa daerah, yang sekarang tampak menggejala di mana-mana dapat ditingkatkan lagi. Peningkatan itu, misalnya, redaksi budaya media massa daerah tidak hanya menunggu kiriman tulisan mereka, tetapi redaksi tersebut perlu "menjemput bola", artinya, menyurati mereka dalam rangka meminta tulisan untuk dimuat di rubrik yang diasuhnya. Dalam hal ini, ada orang berpikir bahwa kemunculan mereka dalam media massa daerah, di samping mempunyai dampak seperti diterangkan di atas, mungkin dapat juga menaikkan oplah terbitan. Misalnya, dengan dimuatnya sajak-sajak reformasi W.S. Rendra di surat kabar *Jawa Post* di Surabaya (19 Mei 1998) dan (31 Mei 1998) surat kabar ini lalu menjadi lebih menarik dan para mahasiswa yang mengikuti sastra banyak yang membelinya secara eceran. Sajak-sajak itu berjudul "Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia", "Megatruh", "Hai", "Ketika Udara Bising", "Doa untuk Anak Cucuku", dan "Paman Dobleng".

Selanjutnya, yang perlu dibicarakan di sini adalah perihal komunitas sastra Indonesia di daerah yang kadang-kadang berfungsi sebagai agen sastrawan dari Jakarta. Melalui dewan kesenian di daerah, atau lewat lembaga-lembaga lain, sastrawan dari pusat kadang-kadang datang memberikan ceramah sastra atau membaca puisi untuk umum atau untuk pelajar dan mahasiswa. Dewan kesenian di daerah dan juga lembaga-lembaga lain yang mempunyai kepedulian kepada sastra, sebagai penyelenggara pertemuan, mengundang guru-guru bahasa dan sastra, mahasiswa, murid-murid sekolah, khalayak umum, dan lain-lain untuk mendengarkan ceramah sastra atau baca puisi ataupun pentas drama dengan disertai diskusi, tentu merupakan hal yang sangat menarik, khususnya dalam hal menumbuhkan gairah dan memperluas wawasan mengenai apresiasi sastra. Keadaan ini akan bertambah nilainya jika kegiatan ini terjadwal secara teratur dan dipublikasikan secara luas. Dan, jika ada anggota komunitas sastra Indonesia di daerah bekerja di radio (baik radio pemerintah maupun radio swasta) anggota itu dapat mengajak sastrawan dari Jakarta berbincang-bincang di radio. Dengan demikian, apresiasi sastra Indonesia itu akan bertambah luas terpancar ke masyarakat. RRI Surabaya, misalnya, aktif melakukan siaran sastra, bukan hanya sastra berbahasa Indonesia, melainkan juga sastra berbahasa Jawa.

4. Hubungan Antardaerah

Kalau kita mengamati perkembangan sastra di daerah, khususnya tahun 1990-an, tampak adanya gejala yang menarik. Gejala itu bukan dalam kasus yang berkaitan dengan sifat "daerahisme" seperti diuraikan di atas, melainkan gejala lain. Gejala ini

entah didorong oleh "over produksi karya" atau "karena kenal redaktornya" ataupun "karena karyanya selalu ditolak oleh media massa berbobot di Jakarta". Gejala itu adalah para penulis dari suatu daerah tertentu mengirimkan tulisannya ke media massa di luar daerahnya, misalnya kasus di Jawa Timur.

Kalau kita perhatikan dengan saksama, tampak bahwa banyak penulis dari Jawa Timur yang mempublikasikan karya mereka di luar Jawa Timur (Surabaya). Hal ini tampak, misalnya, dalam *Mingguan Akcaya* yang terbit di Pontianak, Kalimantan Barat, pada tanggal 22 April 1990, yang memuat cerita pendek karya Adam A. Chevny (pengarang dari Surabaya) dengan iringan ulasan Bung Kholis. Cerita pendek itu berjudul "Idaman Istriku".

Selanjutnya, *Mingguan Akcaya* terbitan tanggal 3 Juni 1990, memuat cerita pendek "Terbelah" karya Ratna Indraswari Ibrahim (pengarang wanita dari Malang, Jawa Timur). Cerita pendek ini juga diulas oleh Bung Kholis.

Di samping cerita pendek, *Mingguan Akcaya* juga memuat sajak-sajak. Misalnya, pada terbitan tanggal 4 Maret 1990, dimuat sajak-sajak Surasono Rashar dari Klakah, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Sajak-sajak itu berjudul "Rembulan Mempelai I", "Dendang Penyair", "Tanda-Tanda", "Keluh", "Warna", "Ikrar", dan "Kelana Ruh".

Surat kabar *Bali Post* yang terbit di Denpasar, pada tanggal 17 Desember 1989, memuat sajak Aming Aminoedhin (penyair dari Surabaya) yang berjudul "Tanah Kapur" dan "Bulan Musim Penghujan"; dan terbitan tanggal 24 Desember 1989 memuat sajak "Tiba-Tiba Malam Itu", "Purnama I", "Purnama II", "Rasa Sungkan", "Akhir Tahun", dan "Penghujung Tahun"; dan terbitan tanggal 11 Februari 1990 memuat "Gentengkali Sianghari", "Di Monumen Pers Nasional I", "Di Bawah Tower", dan "Stasion Wonokromo III". Selanjutnya, terbitan tanggal 8 Juli 1990 memuat sajak Herry Lamongan (penyair dari Lamongan, Jawa Timur) berjudul "Bisikan Sampan" dan "Lambaian Muara". Terbitan tanggal 17 Desember 1989 memuat sajak "Tumpas Hujan". Terbitan tanggal 4 Agustus 1991 memuat sajak "Debur Ombak" dan "Laut Karunia". Selanjutnya terbitan tanggal 18 Februari 1990 memuat sajak-sajak Kusprihyanto Namma (penyair dari Ngawi, Jawa Timur) berjudul "Malam Laut", "Kemarau", "Rel Kereta" dan "Di Teluk".

Surat kabar *Banjarmasin Post* yang terbit di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, terbitan tanggal 30 Desember memuat sajak-sajak Aming Aminoedhin (penyair dari Surabaya). Sajak-sajak itu berjudul "Tiba-tiba Malam itu", "Rasa Sungkan", "Ilusi Saat Maghrib", "Kecewa", "Stasiun Kota Malang I" dan "Stasiun Kota Malang II". Surat kabar *Bina Baru* yang terbit di kota Ujung Pandang, Sulawesi Selatan, terbitan tanggal 11 Februari 1993 memuat sajak Redi Panuju (dari Surabaya) berjudul "Dari Pojok ke Pojok". *Mingguan Fajar*, yang terbit di Ujung Pandang, tanggal 11 Maret 1990 memuat sajak-sajak Herry Lamongan (penyair dari Lamongan, Jawa Timur) berjudul "Ibukota Pagi", "Pulang", "Suara Angin", dan "Lambaian Rumah". Kemudian surat kabar *Lampung Post* di Sumatra Selatan dalam terbitannya tanggal 31 Desember 1995 memuat dua sajak Tjahjono Widarmanto (penyair dari Ngawi, Jawa Timur) yang berjudul "Nisan" dan "Adalah Nyanyianmu".

Kalau kita amati dengan cermat, tampak pula bahwa yang mempublikasikan karya di *Akcaya*, *Banjarmasin Post*, *Bali Post*, *Lampung Post*, dan lain-lain itu bukan hanya pengarang dan penyair dari Jawa Timur, melainkan juga pengarang yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Hal ini tampak, misalnya, *Akcaya* terbitan tanggal 24 Juni 1990 memuat sajak-sajak Soni Farid Maulana dari Bandung dan terbitan tanggal 13 Mei 1990 memuat sajak-sajak Ys. Agus Suseno dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Dari kenyataan di atas dapatlah dinyatakan bahwa hubungan sastrawan antar-daerah itu sangat erat, khususnya, di bidang puisi. Hal ini tidak mengherankan kita sebab mereka sering berkumpul mengadakan acara "baca puisi", misalnya, seperti dalam Festival Puisi Tahunan yang diselenggarakan oleh PPIA Surabaya. Dalam acara itu panitia sering mengundang para penyair dari daerah lain. Dalam pertemuan itu para penyair tidak jarang melakukan tukar-menukar buku kumpulan sajak ciptaannya, dan tidak jarang pula seorang penyair dari daerah tertentu datang ke daerahnya untuk membaca puisi atau berbincang-bincang tentang sastra. Misalnya, penyair D. Zawawi Imron dari Sumenep, Madura, pernah diundang ke Ujung Pandang untuk baca puisi.

Untuk mengikat persaudaraan para penyair yang tersebar di pelosok tanah air, menurut laporan Max Arifin, dalam tulisannya yang berjudul "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Nusa Tenggara Barat" (1989:5) di Mataram, Lombok, pernah lahir HP3N yang diketuai oleh Putu Arya Tirtawirya. Kepanjangan HP3N adalah Himpunan Pengarang, Penyair dan Penulis Nusantara. Himpunan atau kelompok ini berpusat di Mataram, Lombok, dan mempunyai koordinat yang tersebar di daerah lain, yakni 4 di NTB sendiri, 5 di Bali, 3 di Jawa Timur, Cirebon, Jakarta, Belitung, Medan, dan lain-lain, menurut Max Arifin. Kelompok ini menerbitkan buletin stensilan, dan kadang-kadang berupa foto-copy, yang memuat karya-karya anggota kelompok dan diedarkan di antara anggota kelompok yang tersebar di berbagai pelosok tanah air. Akan tetapi, sayang, seperti halnya organisasi sastrawan lainnya, organisasi semacam ini tidak berusia panjang. Demikian juga, misalnya, kelompok sastrawan muda di Malang yang menerbitkan majalah budaya *Iklim* (1989).

Untuk mempererat ikatan antarpensyair daerah, kadang-kadang, organisasi sastrawan di daerah tertentu mengadakan sayembara menulis puisi yang diikuti oleh penyair-penyair daerah lain. Sajak-sajak para pemenang sayembara itu lalu dikumpulkan dan diterbitkan menjadi buku. Hal ini tampak, misalnya, dalam kegiatan organisasi sastrawan yang tinggal di kota kecil Batu, Malang, Jawa Timur.

5. Hubungan dengan Sastra Tetangga

Komunitas sastra Indonesia di daerah, sebenarnya, tidak hanya memperhatikan dan proaktif dalam gerak maju sastra Indonesia di Pusat (Jakarta) atau daerah lain di Indonesia, tetapi juga memperhatikan dan proaktif dalam gerak maju sastra tetangga, khususnya, sastra yang berbahasa Melayu. Hal ini dimungkinkan karena bahasa Melayu, khususnya bahasa Melayu-Malaysia dan bahasa Melayu-Brunei, tidak banyak berbeda dengan bahasa Melayu-Indonesia, lebih-lebih setelah ketiga ejaan bahasa Melayu itu disamakan. Dengan demikian, sastra Melayu-Malaysia dan sastra Melayu-Bru-

nei, melalui komunitas sastra Indonesia di daerah, dapat tersebar luas, khususnya melalui pinjam-meminjam majalah di antara para pengarang.

Kalau kita perhatikan dengan saksama, khususnya di Jawa Timur, mereka yang tidak puas dengan hanya mempublikasikan karyanya di media massa daerahnya, di daerah lain, atau di Jakarta, juga mempublikasikan karyanya di negara lain, khususnya negara yang berbahasa Melayu. Hal ini tampak dalam majalah *Dewan Sastera* dan *Perisa* yang terbit di Kuala Lumpur, Malaysia, dan dalam majalah *Bahana* yang terbit di Bandar Seri Begawan, Brunei. Misalnya, jurnal puisi *Perisa* terbitan No. 3, 1995, memuat sajak-sajak Tjahjono Widarmanto (penyair dari Ngawi, Jawa Timur). Sajak-sajak itu berjudul "Selamat Datang, "Malam", "Jerit-Mu Masih Saja Meraung-raung" dan "Lanskap Cinta". Selanjutnya, terbitan No. 4, 1996, *Perisa* memuat sajak penyair Tjahjono Widijanto (saudara kembar Tjahjono Widarmanto) berjudul "Rotasi Abad-Abad".

Penyair dari daerah lain yang mempublikasikan karyanya di media massa negara tetangga, misalnya, penyair dari Medan, **Zainuddin Tamir Koto**, dalam majalah *Dewan Sastera*. Dalam terbitan Bilangan 2, Jilid 26, Februari 1996, majalah *Dewan Sastera* memuat sajak Zainuddin Tamir Koto berjudul "Aku di Mata Tuhan", kemudian dalam *Perisa* (No. 4, 1996) Zainuddin Tamir Koto menulis sajak berjudul "Ketika Aku Bermimpi".

Contoh lain, Taufik Ikram Jamil, dari Pekanbaru, Riau, menulis sajak "Ratap Pengasingan" dalam *Dewan Sastera* (Bilangan 12, Jilid 25, Desember 1995) dan "Malam Terbengkalai" serta "Sakai" di *Perisa* (No. 1, 1993). Masih dari Pekanbaru, penyair wanita Tien Marni, menulis sajak berjudul "Untuk Semua" dan "Sungai Siak" di *Perisa* (No. 1, 1993).

Hubungan antara komunitas sastra Indonesia di daerah dengan komunitas sastra negara tetangga ternyata begitu mesra, misalnya antara pengarang dan penyair sastra Indonesia di Sumatera Utara dengan pengarang dan penyair sastra Melayu di bagian utara negara Malaysia. Hubungan itu diadakan melalui acara *Dialog Utara*. Hubungan itu telah melahirkan beberapa antologi sastra, misalnya, *Muara Dua* (Firma Maju, Medan, 1989). Buku ini dieditori oleh Drs. Shafwan Hadi Umry, Damiri Mahmud, dan B.Y. Tand. Kemudian, *Rautan* (Yaswina, Medan, 1984, antologi puisi).³

Di sini perlu dicatat pula, pernah diusahakan oleh negara Malaysia pertemuan antara pengarang dari Kalimantan Barat Serawak. Akan tetapi, rupanya, pertemuan itu kandas di tengah jalan, artinya kini tidak ada kelanjutannya. Bagi pengarang Indonesia di daerah yang ingin mengikuti pertemuan sastra di negara tetangga, umumnya, agak berat sebab biayanya terlalu tinggi, lebih-lebih sekarang biaya fiskal saja sebesar satu juta rupiah.

Jika kita memperhatikan kegiatan sastra tetangga, baik itu Malaysia, Singapura maupun Brunei, kita akan tahu sikap dan pandangan sastrawan di negara tersebut. Mereka tidak membedakan sastrawan Indonesia dalam dua kelompok, yakni sastrawan pusat ataupun sastrawan daerah. Siapa saja yang datang dari Indonesia, dari Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Ujung Pandang, Banjarmasin, Pontianak, atau dari daerah lain semuanya dianggap sastrawan Indonesia. Jadi, di

negara tetangga kita itu tidak ada "diskriminasi" terhadap sastrawan Indonesia. Hal ini keadaannya berbeda dengan di Indonesia.

Diskriminasi di Indonesia melahirkan anggapan bahwa karya-karya sastrawan daerah (sastrawan Indonesia di daerah pedalaman) mutunya lebih rendah. Akan tetapi, syukurlah bahwa hal itu tidak berjalan berlarut-larut sebab hal ini terlihat, misalnya, dalam pengiriman sastrawan ke luar negeri. Pengiriman itu tidak lagi dimonopoli oleh sastrawan yang tinggal di Jakarta. Buktinya, misalnya, **Akhudiat** dan **Moch. Khoiri**, keduanya dari Surabaya, pernah dikirim ke Amerika Serikat untuk mengikuti *International Writing Program* di Iowa City. Mudah-mudahan hal ini berlangsung terus.

6. Pemberdayaan Komunitas Sastra

Komunitas sastra Indonesia di daerah seperti diuraikan di atas dapat diberdayakan untuk kepentingan tertentu. Pemberdayaan komunitas sastra Indonesia di daerah itu banyak macamnya. Misalnya, pemberdayaan dalam rangka apresiasi sastra di kalangan masyarakat umum ataupun di lingkungan pendidikan. Pemberdayaan itu dapat dilakukan dari segi pengarang dan dari karya. Pemberdayaan pengarang, antara lain sebagai berikut.

- a) Para pengarang (penyair) dapat diminta untuk membaca (mendeklamasikan) karya mereka di hadapan murid sekolah atau mahasiswa.
- b) Pengarang (penyair) dapat diminta memberi ceramah sastra di hadapan murid atau mahasiswa.
- c) Pengarang (penyair) dapat diajak mengikuti seminar sastra, baik sebagai pemakalah maupun peserta, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di daerah.
- d) Pengarang (penyair) dapat diminta menjadi juri lomba mengarang dan deklamasi (baca puisi) yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, dewan kesenian, atau lembaga-lembaga lain.
- e) Pengarang (penyair) dalam berceramah atau berseminar dapat diminta untuk memperkenalkan sastra tetangga.
- f) Pengarang (penyair) yang tergolong senior dan mempunyai reputasi nasional dapat diminta untuk menulis di rubrik media massa lokal dengan imbalan yang memadai.

Adapun pemberdayaan karya, antara lain, sebagai berikut.

- a. Karya pengarang (penyair) sekali-kali dapat dibicarakan oleh guru dalam kelas dan dikliping oleh murid untuk tambahan bahan bacaan.
- b. Apabila ada lomba deklamasi (baca puisi) karya penyair lokal dapat diikutsertakan sebagai bahan lomba, baik lomba yang diselenggarakan oleh sekolah, perguruan tinggi, maupun oleh lembaga seperti dewan kesenian atau umum.
- c. Dalam upaya untuk memenuhi muatan lokal, sebagaimana dituntut dalam kurikulum karya pengarang (penyair) daerah dapat diambil untuk bahan penyusunan buku pelajaran bahasa dan sastra.
- d. Karya pengarang (penyair) yang sudah dibukukan atau masih tersebar di majalah dan surat kabar dapat dijadikan bahan menulis skripsi, tesis, dan bahkan disertasi.
- e. Karya pengarang (penyair) dapat dibicarakan di majalah atau surat kabar, baik

lokal maupun nasional.

- f. Karya pengarang (penyair) dapat dikumpulkan dan dibuat antologi, seperti buku *Seulawah* (Antologi Sastra Aceh Sekilas Pintas, 1995) susunan L.K.Ara, Taufiq Ismail, dan Hasyim K.S.

Di samping dua hal di atas, pemberdayaan lain yang perlu diperhatikan adalah pemberdayaan yang ada kaitannya dengan penulisan "*Sejarah Sastra Indonesia*". Dalam rangka penyusunan "*Sejarah Sastra Indonesia*" yang lengkap dan menyeluruh, karya sastra Indonesia yang tumbuh dan berkembang di daerah perlu disusun sejarahnya. Sejarah sastra lokal ini dapat memberikan bahan masukan pada penulisan "*Sejarah Sastra Indonesia*" yang bersifat umum dan nasional. Usaha ke arah itu telah dicoba orang. Misalnya, *Sejarah Lokal Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan Selatan 1930--1995* (terbit tahun 1995) karya Tajuddin Noor Ganie. Saya sendiri, telah menulis dua buah buku berjudul *Wajah Sastra Indonesia di Surabaya 1856--1994* (terbit tahun 1995) dan *Kronik Sastra Indonesia di Malang* (terbit tahun 1994). Usaha demikian ini dapat dilaksanakan di tempat lain.

Memberdayakan komunitas sastra Indonesia di daerah tidaklah mudah sebab ada pula kendalanya. Seperti kita ketahui, pengarang (penyair) di daerah itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Pertama, mereka yang tergolong senior dan mempunyai reputasi nasional, dan bahkan, internasional, seperti pengarang A.A Navis (Sumatra Barat) dan Budi Darma (Surabaya, Jawa Timur). Kedua, mereka yang telah mempunyai reputasi nasional, tetapi tergolong junior, seperti penyair D. Zawawi Imron yang tinggal di Desa Batang-batang, Sumenep, Madura. Yang ketiga, kelompok junior yang baru menghadirkan diri pada persada sastra Indonesia di tingkat lokal. Dari ketiga kelompok itu, kelompok pertamalah yang kadang-kadang sulit diajak turun ke sekolah sebab mereka menghargai dirinya terlalu tinggi dan tidak patut berbicara di hadapan murid-murid sekolah atau di hadapan mahasiswa perguruan tinggi di daerah. Hal ini berbeda dengan kelompok kedua dan ketiga. Kedua kelompok ini, tidak segan-segan melakukan "safari sastra" di sekolah-sekolah di daerahnya. Dan, tentu saja dari segi pengalaman, kelompok pertamalah yang banyak makan garam kesusasteraan. Oleh karena itu, harapan kita kelompok pertama itu mau juga mengulurkan tangan ke sekolah dan perguruan tinggi di daerah untuk ikut menumbuhkan apresiasi sastra di kalangan murid dan mahasiswa, apalagi jika nama-nama mereka itu disebut-sebut dalam buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, pelajaran sastra di sekolah atau perguruan tinggi akan lebih hidup dan menarik.

Kendala lain yang tampak menonjol adalah banyak banyak guru bahasa dan sastra Indonesia di daerah yang tidak sensitif terhadap lingkungannya. Mereka tidak menyadari bahwa di daerahnya ada komunitas sastra Indonesia yang dapat dimanfaatkan untuk pengajaran sastra. Walaupun mereka tahu bahwa di daerahnya ada komunitas sastra Indonesia, kadang-kadang mereka cenderung meremehkan komunitas itu. Hal ini berbeda keadaannya jika guru bahasa dan sastra itu termasuk kelompok komunitas sastra Indonesia di daerahnya.

Kendala lain ialah adanya rasa "superior" dalam diri pengarang (penyair), baik dari kelompok pertama, kedua, maupun ketiga. Karena rasa "superior"-nya, seorang

pengarang (penyair) tidak mau berkumpul dengan teman-temannya sederhana, bahkan membaca karya sastra temannya pun juga tidak berminat sebab karya temannya itu dianggap tidak bermutu. Pengarang (penyair) yang demikian itu sulit diajak untuk menumbuhkan apresiasi sastra di daerahnya. Dia hidup menyendiri dengan pongahnya. "Akulah sastrawan besar di negeri ini," katanya.

7. Penutup

Demikianlah perbincangan kita mengenai keadaan sastra Indonesia di daerah. Dari perbincangan itu dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, di berbagai pelosok tanah air Indonesia terdapat komunitas sastra Indonesia. Kedua, komunitas sastra Indonesia di daerah itu hidup dan berkembang serta keberadaannya ditunjang oleh media massa lokal atau penerbit di daerah dan ditopang pula oleh lembaga kesenian, seperti dewan kesenian dan taman budaya. Ketiga, para aktivis komunitas sastra Indonesia di daerah tidak hanya berkulat di daerahnya, tetapi juga mengadakan komunikasi dengan Pusat (Jakarta), daerah lain, dan bahkan, negara tetangga. Yang terakhir, komunitas sastra Indonesia di daerah dapat diberdayakan untuk menumbuhkembangkan apresiasi sastra di masyarakat, baik melalui pendidikan (sekolah dan perguruan tinggi) maupun melalui kegiatan masyarakat itu sendiri.

Catatan:

1. Daftar penerbitan buku-buku di daerah itu dapat diperpanjang lagi, misalnya dari Semarang, Bandung, Solo, Padang, dan Manado. Akan tetapi, untuk menunjukkan bahwa di daerah ada penerbitan buku-buku sastra, sebagaimana ditunjukkan di atas, telah cukup. Contoh ini akan bertambah panjang lagi, seandainya memasukan karya-karya yang dinilai "non sastra" seperti ditunjukkan oleh Dr. R. Roolvink dalam artikelnya "Roman Pitjisan Bahasa Indonesia" (lihat buku *Pokok dan Tokoh II* karya Prof. Dr. A. Teeuw, 1955).
2. Istilah *pedalaman* di bidang sastra mula-mula dipakai oleh H.B. Jassin dalam buku *Gema Tanah Air* untuk menyebut penerbitan di luar Jakarta. Kata Jassin, "Selain dari itu beberapa majalah dari *pedalaman* yang kebetulan sampai ke tangan kami di masa pertikaian Belanda-Indonesia, seperti Gelombang Zaman Garut, Wartawan Mojokerto, Sasterawan Malang" (1959:16).
3. Mengenai *Dialog Utara*, Djohan Arifin Nasution menulis sebagai berikut "Di Medan pernah pula mereka sendiri yang menyelenggarakan pertemuan sastra yang disebut *Dialog Utara*. Yakni forum pertemuan sastrawan daerah Sumatra Utara dengan Malaysia bagian utara (Pulau Pinang, Perlis, Kedah, dan Perak) yang diselenggarakan secara bergilir antara Indonesia dan Malaysia. Sumatra Utara telah menyelenggarakan Dialog Utara II (1984) dan Dialog IV (1989) di Medan, sedangkan Dialog Utara I (1982) dan III (1989) oleh Malaysia diadakan di Pulau Pinang dan Kanger (Perlis). Dari Pertemuan sastra itu telah diterbitkan antologi puisi, cerpen, dan esai dengan judul *Titian Laut* di Malaysia dan *Muara* di Medan. *Muara Dua* diterbitkan dengan bantuan penerbit Maju Medan (1989)" (1989:8).

Daftar Pustaka

Aliana, Zainal Arifin. 1989. "Kehidupan dan Perkembangan Sastra di Sumatra Selatan: Sebuah Laporan Singkat". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.

- Ara, L.K., Taufiq Ismail dan Hasyim K.S. 1995. *Seulawah*. (Antologi Sastra Aceh Sekilas Pintas). Jakarta: Yayasan Nusantara.
- Ardy, Mursalan. 1989. "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Daerah Istimewa Aceh". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Arifin, M. Said, *et al.* 1989. "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra serta Seni Sastra sebagai Seni Pertunjukan di Propinsi Lampung sampai Tahun 1989". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Arifin, Max. 1989. "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Nusa Tenggara Barat". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Daryono, Yono. 1994. "Tentang Sastra Tegal", Sisipan Majalah *Horison*, Agustus Jakarta.
- Derk, Will. 1996. "If Not to Anything Else (Some Reflections on Modern Indonesian Literature) *BKI*, deel 152, 3e Aflevering, 1996. Leiden.
- . 1998. "Pengarang Indonesia sebagai Tukang Sastra", *Kalam*, Edisi 11, 1998, Jakarta.
- Fahrawi, Akhmad. 1990. "Sastra Indonesia di Kalimantan Selatan", I, II, dan III. *Banjarmasin Post*, 9--11 Januari. Banjarmasin.
- Ganie, Tajuddin Noor. 1983. "Penyair Kalsel Garda Depan 1979--1984", *Banjarmasin Post*, 22 Januari 1983. Banjarmasin.
- . 1992a. "Lintasan Sejarah Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan Selatan (1930--1990). *Banjarmasin Post*. 8 Januari.
- . 1992b. "Ihwal Periodisasi Kesusasteraan Kalimantan Selatan". *Swadesi*, 21 Juni 1992 dan 28 Juni. Jakarta.
- . 1992c. "Sastrawan Kalsel Terkemuka Selepas Tahun 1980-an", *Banjarmasin Post*, 15 Oktober. Banjarmasin.
- . 1995a. *Sejarah Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan Selatan 1930--1995*. Banjarmasin: Pusat Pengkajian Masalah Sastra Kalimantan.
- . 1995b. *Ensiklopedi Lokal Kesusasteraan Indonesia di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin.
- Hadimadja, Aoh K. 1952. *Beberapa Paham Angkatan 45*. Jakarta: Tintamas.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1990. "Masalah Penulisan Sejarah Sastra Lokal di Indonesia". *Horison*, No. 9, Tahun XXV, September. Jakarta.
- . 1992. *Melawan Kucuran Keringat* (Kumpulan Kritik, Esai dan Apresiasi Sastra). Surabaya: Hiski Jawa Timur.
- . 1994. *Kronik Sastra Indonesia di Malang*. Surabaya: Pusat Dokumentasi Sastra Suripan Sadi Hutomo.
- . 1995. *Wajah Sastra Indonesia di Surabaya 1856--1994*. Surabaya: Pusat Dokumentasi Sastra, Suripan Sadi Hutomo.
- Ikram, A. Muim. 1989. "Kehidupan dan Perkembangan Sastra di Kalimantan Barat". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Jassin, H.B. 1959. *Gema Tanah Air*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasution, Djohan Arifin. 1989. "Kesusasteraan Indonesia Modern di Sumatera Utara", Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.

- Ondhy S. 1992. "Kampungku yang Sunyi" (Wajah Sastra Kalbar Sepuluh tahun Terakhir), *Banjarmasin Post*, 15 Oktober. Banjarmasin.
- Rampan, Korrie Layun. 1992. "Gema Puisi dari Kalimantan Timur", *Swadesi*, 30 Agustus. Jakarta.
- Setiawan, Lanang. tt. "*Jalan Panjang Teater dan Sastra Tegal*". Tegal: Mimbar Pengajian Seni Budaya Tegal.
- Soemargono, Farida. 1979. "Le Groupe de Yogya: 1945--1960: Les Votes Javanaises d'une Literature Indonesienne". Paris: Association Archipel, Cahier d'Archipelago.
- Sukade, Made. 1972. *Perkembangan Sastra Nasional di Bali*. Denpasar: Lembaga Seminar Indonesia Bali.
- Syariff, Fahmi. 1989. "Sastra dan Pertunjukan Sastra di Sulawesi Selatan" (Sebuah Catatan Sepintas). Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- . 1989a. "Kehidupan dan Perkembangan Seni Sastra di Kalimantan Tengah". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- . 1989b. "Sekilas Perkembangan Sastra di Kalimantan Timur", Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- . 1989c. "Sekilas Perkembangan Seni Sastra Daerah Jambi", Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Tawie, Maman S. 1984. "Penyair-penyair Marabahan dalam Kuala", *Banjarmasin Post*, 28 Desember. Banjarmasin.
- . 1987. "Sastra Profetik di Banjarmasin". *Banjarmasin Post*, 4 Agustus. Banjarmasin.
- Teeuw, A. 1955. *Pokok dan Tokoh II*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Tim Kesenian Kalimantan Selatan. 1989. "Perkembangan Sastra di Kalimantan Selatan". Makalah Festival Pergelaran Sastra. Jakarta.
- Usin, Bandar Sulaiman. 1992. "Kesusasteraan Indonesia di Kalteng 1982-1992". *Banjarmasin Post*, 15 Oktober. Banjarmasin.
- Viddy A.D. 1993. "Pembesaran Isu Revitalisasi Sastra Pedalaman", *Kali Mas* (Majalah Kebudayaan), No. 7 Tahun. III, Januari--Mei 1995. Surabaya.
- Yadi A.M. 1983. "Sastraku Sayang, Penyairku Malang" (Sastra di Samarinda). *Sampe*, 29 April 1985. Samarinda.
- Yekti, Nunuk Sri. 1977. "Mengenang Lontar sebagai Kertas Sastra dan Budayanya Banyuwangi". *Surabaya Post*, 16 Mei. Surabaya.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C2
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 14.20--15.10
Judul Makalah	: Pemberdayaan Komunitas Sastra Indonesia di Daerah
Penyaji	: Suripan Sadi Hutomo
Pemandu	: Yudiono K.S.
Pencatat	: a. Muhammad Fanani b. Sri Sayekti
Peserta	: 70 Orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Eri Iswari, Universitas Hasanuddin

a. Pertanyaan:

- 1) Mengapa artikel, hasil penelitian, dan karya sastra di daerah itu sangat sulit diterbitkan di Jakarta?
- 2) Balai Bahasa Ujung Pandang hendaknya tidak hanya menerbitkan hasil penelitian intern, tetapi perlu menerima hasil penelitian mandiri dari luar Balai Bahasa.

a. Jawaban:

- 1) Hasil penelitian, artikel, dan karya sastra Indonesia di daerah yang sudah diterbitkan berupa buku sebaiknya dikirimkan ke Perpustakaan Nasional, Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar karya-karya itu dapat dibaca orang. Dengan demikian, karya sastra tersebut akan dikenal dan terkenal. Tentu saja, pengarangnya pun akan dikenal orang pula.
- 2) Hasil penelitian, artikel, dan karya-karya sastra Indonesia di daerah sebaiknya juga diterbitkan di daerah yang bersangkutan.

2. Penanya: Paris Kusnadi, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Bagaimana kita menyikapi pengajaran sastra agar kita tidak selalu berorientasi ke karya-karya pengarang yang berada di pusat?

b. Jawaban:

Kita hendaknya memanfaatkan buku pelajaran muatan lokal dan memperkenalkan muatan lokal itu kepada siswa. Siswa jangan dicekoki/diberi informasi dengan bahan ajar sastra dari Jakarta. Kita jangan beranggapan bahwa bahan dari Jakarta itu selalu baik. Hal itu harus disadari oleh guru bahasa Indonesia di daerah. Guru tidak harus selalu berkiblat ke pusat, tetapi harus memanfaatkan karya sastra Indonesia yang ada di daerah.

3. **Penanya:** Sunu Catur, Universitas Udayana, Denpasar

a. **Pertanyaan:**

- 1) Apakah ada keengganan kritikus sastra Indonesia untuk mengkritik sastra Indonesia di daerah dalam melihat perkembangan sastra tersebut?
- 2) Mungkinkah dalam menulis sejarah sastra Indonesia itu kita mengikutsertakan sastra secara etnis atau secara geografis?

b. **Jawaban:**

- 1) Ada anggapan dari kritikus sastra pusat/Jakarta bahwa karya sastra Indonesia di daerah itu nilainya rendah ("kelas kambing") sehingga kritikus sastra Pusat/Jakarta itu enggan mengkritik karya sastra Indonesia di daerah.
- 2) Dalam menulis sejarah sastra Indonesia di daerah, kita tidak dapat mendasari penulisan itu pada sastra Indonesia di daerah secara etnis. Penyusunan itu harus didasarkan pada sastra daerah secara geografis. Sastra yang ada di Surabaya, Jember, dan Blora, misalnya, merupakan sastra yang sangat penting dalam kegiatan penyusunan sejarah sastra. Dengan kata lain, penyusun sejarah sastra Indonesia sebaiknya mengambil bahan atau sumber dari sejarah sastra Indonesia di daerah-daerah. Hal seperti itu dilakukan oleh Negara Malaysia dalam penyusunan sejarah sastra Malaysia. Malaysia telah mempunyai sejarah sastra daerahnya masing-masing, seperti Sejarah Sastra Kelantan.

4. **Penanya:** Nikmah Sunardjo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. **Saran:**

Pengarang daerah/penerbit daerah sebaiknya mengirimkan karyanya ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu mengalami kesulitan untuk memperoleh karya sastra Indonesia yang ditulis oleh sastrawan daerah, terutama untuk kepentingan penilaian dan sebagainya.

b. **Jawaban:**

Sesuai dengan saran yang disampaikan oleh Ibu Nikmah Sunardjo, saya meneruskan saran itu kepada teman-teman yang ada di daerah. Teman-teman sastrawan di daerah diharapkan untuk mengirimkan buku dan karangannya ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

5. **Penanya:** Taufik Abdullah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)

a. **Saran:**

Hampir setiap daerah sebetulnya memiliki dana yang cukup untuk menerbitkan antologi karya sastra Indonesia di daerah. Di Aceh, umpamanya, telah dihimpun antologi sastra Aceh dari zaman Hamzah Fansuri sampai tahun 1990-an. Antologi itu sudah diterbitkan. Hal itu perlu dicontoh dan diikuti oleh daerah-

daerah lain. Kegiatan penghimpunan karya sastra daerah seperti itu dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan gubernur daerah yang bersangkutan.

b. Jawaban:

Saran Bapak saya terima.

KEBIJAKAN PENGHARGAAN SASTRA

Slamet Sukirnantanto
Sastrawan

1. Pendahuluan

Rasanya janggal kita berbicara tentang pentingnya penghargaan dan hadiah sastra di tengah-tengah krisis yang sedang melanda bangsa dewasa ini. Lebih dari sepuluh bulan kita diseret arus kecemasan, ketidakpastian, dan hampir tanpa harapan. Namun, saya sangat antusias menerima undangan dan berpartisipasi dalam *Kongres Bahasa Indonesia VII Tahun 1998* mengingat dewasa ini kita memasuki zaman peralihan. Saya tanggap tentang adanya beberapa hal mendasar yang harus segera diperbincangkan dalam kesempatan sekarang ini. Topik pembicaraan tentang *Penghargaan Sastra* yang dikedepankan di sini adalah suatu ikhwal yang sejak lama diabaikan dalam iklim kehidupan sastra kita. Hal itu tidak pernah tersentuh ataupun dijadikan agenda pokok.

Penyair Isma Sawitri, Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta pada periode 1990--1993, dalam *Pidato Pengukuhan Penyerahan Hadiah Sastra Chairil Anwar kepada Sastrawan Mochtar Lubis*, 15 Agustus 1992, di Graha Bhakti Budaya Taman Ismail Marzuki, menyatakan hal berikut.

"Sudah sejak lama dirasakan, bahwa tanpa penghargaan atas karya sastra, maka ada bidang yang tanpa alasan jelas, dibiarkan tidak tersentuh. Bagaikan satu *black hole* di cakrawala, bidang kosong dalam sastra Indonesia ini bisa merusak pemandangan, dan terutama mengganggu perasaan. Bagi para sastrawan, kenyataan ini mungkin tidak penting benar. Tapi untuk kehidupan sastra dan terutama untuk proyeksi jangka panjang, kami berpendapat titik hitam itu harus hilang, diganti dengan titik cemerlang berupa penghargaan atas karya sastra."

"Kami yakin, hanya dengan cara itu bisa diwujudkan rasa hormat kepada jasa-jasa penyair dan pengarang, satu hal yang toh biasa dilakukan oleh bidang profesi lain kepada orang-orang berprestasi. Mudah-mudahan, hadiah sastra ini menutup rasa kurang yang selama ini menghantui kita di saat-saat misalnya ada sastrawan di Malaysia yang ditasbihkan sebagai *Sastrawan Negara*. Atau, ketika *SEA Write Award* dibagikan, juga belakangan ini ketika Goenawan Mohamad ditetapkan sebagai sastrawan Indonesia pertama menerima *Hadiah Profesor Teeuw*."¹

Perlu dijelaskan di sini, yang dimaksud dengan "penghargaan atas karya sastra" yang menjadi jiwa dari program *Hadiah Sastra Chairil Anwar* adalah bukan sekadar penghargaan hasil karya sastra seorang sastrawan, tetapi lebih dari itu. Penghargaan yang dimaksud adalah penghargaan atas seluruh prestasi kepengarangan dan pengabdian seorang pengarang, perjuangan, dan sepek terjang di bidangnya, serta sikap hidup yang melatarbelakangi kerja kreatifnya. Ini yang menjadi landasan kerja para panitia pemilih yang terdiri dari Abrar Yusra, Leon Agusta, Isma Sawitri, H.B. Jassin, Slamet Sukirnantanto, Amak Baljun, dan Hamsad Rangkuti.

Kriteria tersebut makin jelas dirumuskan dalam program *Anugerah Sastra Chairil Anwar Dewan Kesenian Jakarta 1998*, sebagai berikut.

Anugerah ini diberikan sebagai penghargaan terhadap prestasi hidup (life achievement) seorang sastrawan yang masih hidup. Anugerah ini diberikan baik kepada karya-pengarang maupun kepada diri pengarang tersebut, dengan akibat bahwa pertimbangan yang dilakukan oleh anggota panel adalah berkaitan dengan karya maupun diri pengarang bersangkutan.

Dengan demikian, kriteria yang dipergunakan meliputi kriteria literer-estetik maupun kriteria yang bersifat non-literer-estetik.

Di antara berbagai kriteria yang diusulkan ada empat kriteria penting yang menjadi pegangan panelis yaitu sebagai berikut:

- a) pencapaian literer-estetik dalam karya sastra,
- b) dedikasi dan loyalitas seorang pengarang terhadap dunia kepengarangan,
- c) sikap seorang pengarang dalam menegakkan dan membela hak asasi manusia secara umum dan kebebasan mencipta secara khusus,
- d) pembaharuan yang dibawakan oleh seorang pengarang dan karyanya dalam tradisi kepengarangan baik dengan menerobos situasi lama yang menjadi rutin, ataupun dengan memberikan kemungkinan bagi penemuan suatu dunia partikular baru yang pada masanya belum dikodifikasikan dalam kanon kesusastraan.²

Kriteria di atas adalah hasil penyempurnaan dari ketentuan yang diberikan Dewan Kesenian Jakarta sebagai lembaga penyelenggara kemudian disusun lagi dengan pengurangan dan penambahan oleh para panelis yang terdiri dari Dr. Ignas Kleden, Dr. Faruk, Dr. Riris K. Toha Sarumpaet, Dr. Salim Said, dan Drs. Saini Kosim, sebuah tim ditunjuk dan dipercayakan oleh Dewan Kesenian Jakarta untuk memilih seorang sastrawan yang berhak menerima *Anugerah Sastra Chairil Anwar Dewan Kesenian Jakarta 1998*.

Berbeda dengan panitia pemilih pada program yang sama tahun 1992, yaitu kriteria pemilihan berupa hasil perbincangan dan tidak dirumuskan secara tertulis, sedangkan pemberian hadiah sastra untuk prestasi *karya sastra* (puisi, cerpen, esai, novel/roman, juga antologi puisi, esai, cerpen, novel/roman, naskah drama, dan lain-lain), hingga sekarang cukup banyak. Bermula dari tahun 1960-an, lembaga BMKN (Badan Musyawarah Kebudayaan Nasional) telah memberikan penghargaan karya sastra terhadap karya penyair Toto Sudarto Bachtiar (*Suara*), Ajip Rosidi (*Tahun-Tahun Kematian*), Rendra (*Balada Orang-Orang Tercinta*), dan lain-lain.

Majalah *Sastra* pimpinan H.B. Jassin secara teratur memberi hadiah terhadap karya-karya cerpen terbaik yang dimuat dalam majalah sastra itu, antara lain, cerpen karya Bastari Asnin dan Motinggo Busye. Novel *Merahnya Merah* dan *Ziarah* karya Iwan Simatupang adalah buah karya sastra yang lahir dari sayembara penulisan yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga (Dana Buku).

Dewan Kesenian Jakarta yang didirikan tahun 1968 hingga sekarang mencantumkan program penghargaan dan pemberian hadiah pada karya sastra: antologi puisi, antologi esai, naskah drama, dan secara khusus menyelenggarakan sayembara penu-

lisan roman.

Sejak tahun 1980-an, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyelenggarakan kegiatan pemberian hadiah buku sastra: antologi puisi, cerpen, esai, dan novel (karya sastra terbaik setiap tahun). Para pecinta sastra Fakultas Sastra Universitas Indonesia yang dipelopori penyair Sapardi Djoko Damono (sekarang Dekan Fakultas Sastra Universitas Indonesia) dan para mahasiswa menyelenggarakan sayembara penulisan puisi (antologi). Pemenangnya, antara lain, antologi puisi *Sajak-Sajak Sepanjang Jalan* karya Emha Ainun Nadjib, dan *Boneka Mainan* karya Adri Darmadji Woko. Tahun lalu majalah sastra *Horison* juga memberikan penghargaan dan pemberian hadiah karya sastra (cerpen dan esai).

Sejak tahun 1992 Dewan Kesenian Jakarta menetapkan agenda kegiatan sastra, yaitu pemberian *Hadiah Sastra Chairil Anwar*. Karena sesuatu hal, pemberian hadiah ini baru diadakan lagi tahun 1998, dan diharapkan tradisi yang baik ini diteruskan untuk dua atau tiga tahun sekali dengan penghargaan yang lebih besar lagi. Mengapa hadiah ini dinamakan *Hadiah* atau *Anugerah Sastra Chairil Anwar*? Penyair Isma Sawitri menjelaskan sebagai berikut.

"Chairil Anwar adalah seorang penyair yang telah membuktikan bahwa sastra telah menguakkan dimensi-dimensi itu secara modern dan sekaligus memahkotai dengan estetika puisi yang kuat, menggetarkan dan menyilaukan. Jiwa Chairil adalah jiwa raga yang percaya pada kekuatan kata-kata dan dalam keyakinan itu, ia melakukan sesuatu yang besar bagi bangsanya. Kreativitas Chairil menjelajah ke segala arah kehidupan, kegigihannya menggali makna telah mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa sastra yang diakui di dunia. Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya ini, kami bersepakat untuk menamakan hadiah sastra dari Dewan Kesenian Jakarta sebagai hadiah Sastra Chairil Anwar."³

Secara sadar, pemberian anugerah dan hadiah Sastra (juga bidang kesenian lain) dirintis oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak awal Orde Baru (tahun 1970-an). Baru disusul Dewan Kesenian Jakarta yang menggunakan formulasi yang berbeda. Setahu saya lembaga lain tidak ada yang memberikan hadiah.

Yang menjadi pusat perhatian kita dalam perbincangan ini adalah *black hole* yang diingatkan penyair Isma Sawitri tersebut di atas. Bagaimana caranya kita menghilangkan *black hole* dalam iklim kehidupan sastra yang makin semarak, artinya kita perlu menyadari pentingnya penghargaan kepada kehadiran seorang sastrawan dengan karyanya, pengabdian, sumbangannya pada bangsa, sikap kepengarangan, dan perjuangan kreatif serta intelektualnya.

Penghargaan seni yang diberikan pemerintah (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia) memang yang paling teratur penyelenggaraannya selama ini. Sejak tahun 1970-an, dari tahun ke tahun diberikan penghargaan kepada para seniman yang mumpuni, mulai dari Cokot, Lempad, Nartosabdo, Affandi, sampai pada Subagio Sastrowardojo, Rendra, Goenawan Mohamad, Arifin C. Noer, dan Sutardji Calzoum Bachri. Demikian pula para seniman besar dari semua cabang seni: tari, teater, seni rupa, sastra, film, dan budaya dari yang tradisi sampai yang modern.

Langkah yang diambil pemerintah dalam memberikan perhatian dan penghargaan sudah pada jalur yang benar dan perlu dipuji. Pemberian penghargaan seni ini menunjukkan kesadaran pemerintah tentang peranan dan arti keberadaan seniman dalam masyarakat. Akan tetapi, yang menjadi pertanyaan hingga sekarang adalah masalah kesungguhan dalam memberikan penghargaan tersebut. Kesungguhan itu dimanifestasikan dalam cara memberi nilai pada penghargaan.

Kita bisa membayangkan pergulatan hidup keseniman seorang Cokot, Lempad, Nartosabdo, Affandi, dan Rendra yang pada tahun 1970-an hanya dihargai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Baru kemudian penghargaan itu meningkat menjadi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diberikan kepada penerima penghargaan seni ketika nilai rupiah merosot.

Apa artinya ini semua? Memang benar bahwa Pemerintah tidak hanya memberikan penghargaan seni pada satu atau beberapa seniman, tetapi memberikan penghargaan seni kepada banyak seniman dan dari semua cabang seni dan budaya. Kalau dihitung jumlahnya, dana atau anggaran yang harus disediakan memang terasa sangat besar, tetapi kita melupakan hal lain tentang dampak sosial dan kultural dari penghargaan seni yang diprakarsai pemerintah ini. Ternyata hal itu tidak membekas, baik pada hati penerima maupun kesan yang ditimbulkan dalam masyarakat. Seolah-olah penghargaan seni hanya sekadar program rutin yang harus diadakan, meskipun kurang nilai dan maknanya. Dan, dari masa ke masa, tidak ada usaha mengkaji ulang dan upaya memperbaiki citra yang ingin kita peroleh secara nasional berkenaan dengan arti penting anugerah seni tersebut. Oleh karena itu, *nawaitu* yang baik ini harus segera diselamatkan.

Penghargaan dan hadiah sastra adalah berkaitan dengan kesediaan, kemauan, dan keberanian mengambil keputusan. Sebuah kebijaksanaan menjadikan penghargaan dan hadiah sastra sebagai sebuah *model kegiatan sastra* dan jaringan *mekanisme pembinaan sastra*, yang pada akhirnya bermuara pada pengakuan secara nasional tentang makna dan arti sastra dalam masyarakat dan kehidupan bangsa Indonesia.

Sastra adalah sebuah kehadiran, daya hidup, dan bagian dari dinamika hidup. Pengamatan dan penyerapan nilai-nilai digambarkan secara khas dan jitu lewat karya kreatif. Dan, sastra adalah ruang untuk melihat kembali apa yang terjadi dalam diri kita dan sekitar kita, keadaan yang dulu, sekarang, dan kemungkinan masa depan. Sastra adalah cermin jiwa, pernyataan estetika, dan sublimasi nilai-nilai kehidupan kita sendiri. Maka, tidak dapat dielakkan adanya kenyataan bahwa sastra adalah bagian tidak terpisahkan dari pembangunan bangsa, peradaban, dan peningkatan derajat bangsa yang terhormat.

Kenyataan menunjukkan bahwa semua bangsa yang maju selalu menempatkan kehidupan budaya (kesenian dan ilmu pengetahuan) sebagai bagian sentral dari dinamika kehidupan bangsa itu, seperti yang tampak pada bangsa Jerman, Inggris, dan Prancis. Bidang sastra dan para sastrawan mendapat tempat terhormat di tengah kehidupan bangsa itu. Sastrawan dihargai sangat tinggi. Karyanya dibaca dan diterbitkan dari masa ke masa. Karya sastra menjadi sumber acuan budaya bangsanya. Karya sastra dan pengarang sangat dipedulikan.

Dalam subkultur Jawa, Melayu, Minangkabau, dan Bugis, kedudukan sastra dan sastrawan selalu mendapat tempat terhormat dan mereka mendapat penghargaan masyarakatnya. Para sastrawan tidak hanya mempunyai kedudukan penting, tetapi mereka juga mendapat "*palenggahan*" (posisi penting).

Pada periode awal kebangkitan kesadaran berbangsa, semenjak Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, sejarah menunjukkan bahwa sastra telah dijadikan sarana penting dalam pertumbuhan pembangunan bangsa Indonesia. Sastra Indonesia telah lahir bersamaan dengan lahirnya kesadaran, satu bangsa. Sastra Indonesia berperan dalam memajukan pendidikan, kecerdasan, dan kesadaran memelihara bahasanya.

Dari tahun 1920-an hingga tahun 1950-an (awal tahun 1960-an), sastra bukan sekadar bacaan sastra, tetapi juga menjadi sarana penting generasi baru dalam mengasah dan mempertajam daya intelektualnya serta mengantarkan kemajuan seseorang dalam masyarakat. Dengan kata lain, sastra telah menjadi alat pendidikan seseorang yang berhasrat maju. Sejak awal kehadirannya sastra Indonesia modern tidak lepas dari pertumbuhan kebangunan bangsa.

Sejak semula sastra Indonesia adalah sastra yang terlibat, seperti yang selalu diungkapkan oleh Sutan Takdir Alisyahbana dalam berbagai tulisannya tentang sastra.⁴ Keterlibatan sastra ini di kemudian hari berkembang ke arah lahirnya karya-sastra protes, tetapi sastra sebagai karya kreatif tetap memiliki nuansa dan ruang untuk kebebasan kreatif yang banyak melahirkan kecenderungan sastra sebagai sastra yang sejak tahun 1930-an kehadirannya selalu dikecam dan diragukan oleh Sutan Takdir Alisyahbana.

Penghargaan terhadap karya sastra dalam diri sastrawan bukanlah sebuah sensasi menarik perhatian masyarakat. Agenda ini adalah bagian dari mekanisme dalam menghidupkan iklim. Kegiatan sastra, di samping penciptaan sastra, juga ditunjang oleh kegiatan yang lain dalam satu kesatuan sebagai syarat memajukan kehidupan sastra.

Kegiatan sastra itu meliputi:

- a) kegiatan kreatif: mencipta/berkarya/karya,
- b) kegiatan apresiasi sastra,
- c) kegiatan pembinaan sastra,
- d) kegiatan dokumentasi sastra,
- e) kegiatan perpustakaan sastra,
- f) kegiatan pengajaran dan pendidikan sastra,
- g) kegiatan sanggar-sanggar, bengkel-bengkel sastra,
- h) kegiatan pertunjukan sastra, dan
- i) kegiatan penelitian sastra.

Semua kegiatan ini harus menjadi unsur terpadu dari mekanisme kegiatan sastra untuk menciptakan iklim kehidupan sastra yang sehat dan ideal. Penjabaran kegiatan ini harus dilandasi pemahaman, kesadaran, dan kemauan yang jelas. Ada ideologi dalam kegiatan. Kita mengetahui maksud, arah, dan tujuan kegiatan sastra.

Penghargaan sastra ditujukan pada unsur-unsur berikut:

- a) pencipta/sastrawan/penulis: orang, figur,
- b) karya sastra,

- c) pengabdian,
- d) dedikasi,
- e) kesetiaan,
- f) Sikap: kaitannya dengan pendirian dan kebebasan, dan
- g) lama (jam terbang).

Ihwal penghargaan sastra ini telah dirumuskan dengan baik oleh Tim Panelis yang dibentuk Dewan Kesenian Jakarta Tahun 1998 di atas.

Kini, tiba saatnya kita mengajukan pertanyaan mendasar berikut.

- a) Apakah kita mampu menjadikan penghargaan sastra (juga penghargaan seni pada umumnya) sebagai peristiwa sastra (peristiwa seni) penting, sungguh-sungguh, dan bermakna untuk kemajuan sastra, kemajuan seni, dan untuk peningkatan derajat budaya bangsa?
- b) Apakah kita mampu merancang agenda sastra ini menjadi sesuatu yang lebih berguna dan mempunyai dampak yang luas pada peningkatan apresiasi, pembinaan, perluasan perpustakaan, pentingnya dokumentasi, penelitian di bidang sastra?
- c) Apakah kita dapat menempatkan penghargaan sastra (juga penghargaan seni pada umumnya) tidak sekadar pada tingkat departemen (pemerintah), tetapi pada negara yang diwujudkan dengan pimpinan negara (presiden)?
- d) Apakah kita berani dan sungguh-sungguh menerjemahkan penghargaan itu dalam bentuk angka (penghargaan uang) lebih pantas dan memadai?

2. Peristiwa Sastra

Kalau Hadiah Nobel atau Hadiah Magsaysay bisa menjadi peristiwa budaya yang penting dan dampaknya pada cara membangun peradaban bersama dan meningkatkan kualitas kemanusiaan dan derajat bangsa-bangsa maka pemberian penghargaan sastra (penghargaan seni) bisa menjadi peristiwa sastra (peristiwa seni) yang bermakna lebih besar, agung, megah, dan dampaknya pada bangsa dan negara itu sendiri, bukan sekadar menyenangkan sastrawan, seniman, dan para peminatnya. Penghargaan itu menjadi peristiwa kultural: peristiwa sastra (peristiwa seni) dari bangsa itu.

3. Pengaruhnya pada Mekanisme

Penghargaan sastra (penghargaan seni), apabila diungkapkan dengan benar, akan menyentuh semua unsur kegiatan yang lain dari mekanisme sastra, antara lain, pengaruhnya luas pada penanaman apresiasi sastra dalam masyarakat, dan akan tumbuh kesadaran masyarakat tentang arti dan pentingnya karya sastra dan kehadiran seorang sastrawan. Masyarakat akan lebih dekat dan mencintai serta menggauli karya sastra dan menempatkan sastrawan lebih bermakna.

Pengaruhnya yang luas sangat menguntungkan pembinaan sastra: pembinaan dalam menyebarluaskan karya sastra, pemeliharaan karya sastra dan merangsang minat baca karya sastra, serta merangsang lahirnya para penulis dan peminat. Demikian pula, pengaruhnya pada perluasan dan pendalaman kesungguhan dalam kegiatan penelitian, pendokumentasian, perpustakaan, akan memunculkan gairah dalam lapangan ini. Penelitian lebih digalakkan. Kegiatan dokumentasi lebih bermanfaat dari kondisinya

yang sekarang. Dan, lapangan pengajaran sastra lebih dapat digalakkan di sekolah-sekolah, bengkel-bengkel sastra, dan sanggar-sanggar sastra dapat lebih bergairah dan pengelaran sastra lebih semarak di mana-mana.

Ihwal pembinaan sastra telah dibicarakan secara luas oleh Ajip Rosidi dalam berbagai artikel dan ceramah sastra selama ini⁵; juga oleh Dr. Hasan Alwi (Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan) dalam makalah *Sastra di Indonesia Perlukah Dibina dan Dikembangkan*,⁶ dan makalah *Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sastra di Indonesia*⁷ di samping berbagai perbincangan serupa di berbagai media dan pertemuan.

4. Lembaga Pemberi Penghargaan

Kalau seseorang yang berjasa dalam pelestarian lingkungan hidup, seperti memajukan pertanian, kerajinan, atau dunia usaha, dapat memperoleh hadiah dari negara yang diberikan oleh Presiden RI, mengapa para sastrawan seniman yang tidak kalah pentingnya dan kedudukan dalam masyarakat ini, pemberian hadiahnya tidak dilakukan oleh pimpinan negara tertinggi? Kita mengharapkan hal ini menjadi perhatian yang serius kalau kita ingin meningkatkan bobot penghargaan tersebut. Hal ini tidak menutup kemungkinan lembaga-lembaga dalam masyarakat, swadaya, yang selama ini berpengaruh dapat memberikan penghargaan dengan caranya sendiri, seperti yang telah ditunjukkan Dewan Kesenian Jakarta dan Yayasan Dana Buku selama ini.

5. Menerjemahkan Penghargaan

Menerjemahkan penghargaan dalam wujud sejumlah uang merupakan pertanda sejauh mana kita menghargai sesuatu yang hendak kita hargai dengan uang. Terbatasnya anggaran dan tidak mencukupinya dana yang tersedia sering menjadi alasan untuk memberikan penghargaan uang semampunya saja sebab di samping uang ada sertifikat atau piagam, plakat, yang menurut penyelenggara dianggap sebagai sarana pendukung yang berharga. Sejumlah uang hanya sekadar pelengkap.

Penyair Isma Sawitri (Ketua Komite Sastra Dewan Kesenian Jakarta), yang didukung oleh anggota komite sastra yang lain, membuat trobosan baru dengan menetapkan jumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk Hadiah Sastra Chairil Anwar Tahun 1992. Suatu angka yang besar saat itu. Dengan pengertian demikianlah cara penyelenggara menghargai seorang sastrawan yang sepanjang hidupnya telah berprestasi, berjuang, dan mengabdikan pada sastra. Ini dirasakan belum memadai apabila dibandingkan dengan cara orang mengelu-elukan olahraga dan bidang lain. Semangat itulah yang masih dianut, dalam acara yang sama yang diberikan pada tahun 1998 meskipun nilainya menjadi tidak sepadan dengan kondisi yang sekarang.

Akhirnya, dalam kesempatan ini saya ingin menegaskan pentingnya pemberian anugerah dan hadiah sastra seperti yang dimaksud dalam perbincangan ini. Anugerah dan hadiah sastra adalah model kegiatan sastra yang mempunyai dampak sosial yang luas dan mempunyai pengaruh pada mekanisme kegiatan sastra secara terpadu dan menyeluruh serta merupakan suatu aktivitas yang membanggakan.

Lembaga-lembaga swasta seperti Dewan Kesenian Jakarta, Yayasan Dana Buku,

atau lembaga swasta yang lain yang cukup mempunyai wibawa dalam dunia seni dan sastra telah berani mengambil prakarsa. Lembaga pemerintah seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, sangat pantas melaksanakan agenda ini. Pemerintah (negara) yang lebih pantas melaksanakan kegiatan ini, tetapi tidak dalam kondisinya saat ini yang serba terbatas dan serba apa adanya. Perlu keberanian moral dan berwatak maju untuk memberikan penghargaan atau anugerah sastra (seni) yang lebih pantas dan membanggakan bagi penerimanya dan masyarakat. Sekali lagi: kebijaksanaan!

Sastrawan Danarto pernah menyarankan bahwa untuk kondisi sekarang jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pantas untuk sebuah penghargaan anugerah sastra. Saya katakan sebenarnya jumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih pantas lagi, tetapi apa daya tangan tak sampai.

Saya tidak mengharapkan reaksi penerima *Anugerah Seni Pemerintah RI 1993*, penyair Sutardji Calzoum Bachri, setelah menerima piagam dan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), lembaran piagam itu digulung dan diselipkan di kantong belakang celana. Dan, kejadian ini menarik perhatian beberapa media.

Anugerah sastra (seni) Pemerintah RI seharusnya menjadi peristiwa sastra dan peristiwa agung dalam sastra, dalam seni, dan budaya bangsa, bukan sekadar peristiwa rutin. Acara semacam itu tidak harus diadakan setiap tahun. Diadakan dua atau tiga tahun sekali sangat layak dan membanggakan.

Dewasa ini telah menumpuk para sastrawan yang pantas menerima anugerah sastra ini. Kalau di Malaysia dikenal penobatan Sastrawan Negara. Dasarnya hanya sederhana, yaitu menyusun mata anggaran khusus untuk ini. Saya percaya bahwa negara sangat mampu menerjemahkan penghargaan ini. Semoga.*

Catatan:

1. Abra Yusra, (Ed.), *Penyerahan Hadiah Sastra Chairil Anwar Kepada Sastrawan Mochtar Lubis*, Dewan Kesenian Jakarta, 1992, hal. 12.
2. Slamet Sukirnantono, (Ed.), *Anugerah Sastra Chairil Anwar Dewan Kesenian Jakarta*, Dewan Kesenian Jakarta, 1998, hal. 3.
3. Idem, Hal. 13.
4. Sutan Takdir Alisjahbana, *Perjuangan Tanggung Jawab dalam Kesusastraan*. Pustaka Jaya, Jakarta, 1977; STA, *Seni, dan Sastra; Di Tengah-Tengah Pergolakan Masyarakat dan Kebudayaan*, Dian Rakyat, Jakarta, 1985; STA, *Revolusi Masyarakat dan Kebudayaan di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1988, cet. Kelima.
5. Ajip Rosidi dalam berbagai artikel dan ceramah tentang pengajaran sastra dan pembinaan sastra, berkaitan dengan menumbuhkan apresiasi sastra.
6. Dr. Hasan Alwi, "Sastra Di Indonesia Perlukah Dibina dan Dikembangkan", Bahan ceramah sastra di Taman Ismail Marzuki (TIM), 27 Agustus 1997.
7. Dr. Hasan Alwi, "Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Sastra Di Indonesia" dalam Taufiq Ismail (Ed.), *Panorama Sastra Nusantara*, Balai Pustaka: Jakarta, 1977.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C7
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.10–17.00
Judul Makalah	: Kebijakan Penghargaan Sastra
Penyaji	: H. Slamet Sukirnantanto
Pemandu	: Boen S. Oemarjati
Pencatat	: a. Maryanto b. Maini Trisna Jayawati
Peserta	: 60 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Nazurtti, Universitas Jambi

a. Pertanyaan:

Saya tadi pagi melihat tayangan di televisi bahwa "Paus Sastra" kita kini sedang terbaring tidak berdaya di rumahnya. Saya terharu sekali. Kita harus menyadari bagaimana penghargaan kita terhadap "Paus Sastra" kita itu?

b. Jawaban:

Khususnya terhadap Bapak H.B. Jassin, ketika beliau mengalami *stroke* pertama, perhatian negara, sastrawan, dan masyarakat cukup besar. Hanya saja kondisi beliau itu sangat khusus sehingga bantuan itu tidak cukup. Saya usulkan kepada Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin untuk meminta bantuan kepada Sekretariat Negara. Saya tidak tahu apakah hal itu sudah diurus atau belum?

2. Penanya: Ahmad Samin Siregar, Universitas Sumatera Utara

a. Pertanyaan:

- 1) Mengapa masalah penghargaan sastra itu hanya dibicarakan di Jakarta? Mengapa tidak dimasukkan penghargaan yang diberikan di daerah? Baru-baru ini Dewan Kesenian Jawa Tengah memberikan penghargaan.
- 2) Mengapa hanya dibicarakan penghargaan terhadap sastra Indonesia. Mengapa penghargaan terhadap sastra daerah tidak dibicarakan. Padahal, penghargaan terhadap sastra daerah itu ada, misalnya *Rancage* untuk sastra Sunda.

b. Jawaban:

Saya mencoba mencari fokus pembicaraan yang ada di Pusat saja. Terima kasih atas informasi Anda bahwa makalah ini kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah daerah, khususnya kegiatan penghargaan sastra yang ada di daerah ataupun mengenai sastra daerah. Akan tetapi, sebenarnya kalau berbicara tentang kesusastraan, cakupannya tidak hanya mengenai sastra modern, tetapi juga yang tradisional, tidak hanya yang terdapat di Pusat, tetapi juga yang ada di daerah. Seperti yang dilakukan Saudara Ajip Rosidi, yang memberi peng-

hargaan sastra Sunda, sastra Jawa, dan sastra Bali, hal itu juga merupakan hal yang menarik, tetapi tidak saya cantumkan. Di berbagai daerah, seperti Sumatera Barat, juga ada pemberian penghargaan sastra dan tidak saya cantumkan di sini karena saya hanya mengambil contoh yang saya jadikan sebagai perangsang pembicaraan.

3. Penanya: Abdul Hakim, IKIP Ujung Pandang

a. Saran:

Saya usulkan lewat forum ini dan sebaiknya kita rekomendasikan kepada Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pariwisata, Seni, dan Budaya, supaya didirikan, misalnya, bank asuransi yang khusus untuk seniman agar tidak terdengar lagi berita tentang adanya seniman yang sekarat yang nasibnya sangat memprihatinkan dan tidak ada yang memperhatikan. Kita harapkan juga tidak lagi terdengar berita tentang adanya seniman mati di jalanan. Perlu saya tegaskan bahwa kegiatan itu diadakan untuk membantu kegiatan para seniman. Bagaimana tanggapan Bapak?

b. Tanggapan:

Untuk mendirikan asuransi khusus bagi sastrawan, saya kira, hal itu kurang mendapat perhatian karena sastrawan sendiri tidak pernah memperhatikan nasibnya. Mungkin lembaga-lembaga yang berkaitan dengan kesastraan atau tokoh yang menaruh minat kepada sastra bisa mendirikannya. Sebagai contoh, dalam bidang seni rupa ada Yayasan Seni Rupa Indonesia yang anggotanya terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat meskipun kegiatan yayasan itu hanya sekadar memperkenalkan karya-karya seni rupa kita kepada dunia internasional. Akan tetapi, seandainya ada di dalam masyarakat kita yang akan mengusahakan asuransi ini, alangkah baiknya, tetapi kalau dari kalangan sastrawan, saya yakin tidak ada yang akan melakukannya.

4. Penanya: Wildan, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

a. Pertanyaan:

- 1) Tampaknya pendapat Bapak bernada pesimistis, seolah-olah penghargaan sastra itu bermuara kepada uang. Apakah tidak ada pemikiran lain, misalnya, penghargaan sastra itu diberikan dalam bentuk lain, seperti rumah atau tanah. Kalau sastrawan kita tidak bisa membeli bahan-bahan kepustakaan, apa tidak didirikan saja museum khusus secara kecil-kecilan atau perpustakaan mini?
- 2) Untuk membentuk sebuah badan yang independen dan memiliki kekuatan yang mantap, apakah tidak sebaiknya dibentuk suatu badan yang independen walaupun tidak sebanding dengan Nobel, misalnya, agar kita tidak lagi merengek-rengok kepada Pemerintah dalam hal penghargaan sastra ini?

b. Jawaban:

Mengapa kita memberikan uang, bukan yang lain? Sebenarnya, contoh yang tepat adalah penghargaan Sastrawan Negara, sebagaimana yang dilakukan oleh Malaysia. Mereka yang telah mendapat penghargaan Sastrawan Negara itu mempunyai kedudukan yang penting dalam masyarakat dan negara, mempunyai hak yang istimewa, antara lain, penerbitan buku mereka yang terus-menerus, memperoleh jaminan kesehatan, kalau pergi ke luar negeri, mendapat penghormatan yang sama kedudukannya dengan menteri, mendapat gaji dan pensiun yang memadai sehingga mereka dapat bekerja dengan baik. Kita pun sebaiknya harus bisa memberikan penghargaan yang pantas kepada sastrawan kita. Pujangga-pujangga lama, seperti Ronggowarsito dan Yosodipuro, mendapat *palenggahan* dan pengakuan sebagai ningrat keraton, mendapat hak tanah, dan lain-lain. Mungkin dalam sastra Melayu juga demikian. Akan tetapi, pada zaman modern ini penghargaan sastra itu berbentuk uang. Hadiah Nobel pun berbentuk uang. Mungkin ini hanya sebagai bentuk penerjemahan penghargaan itu. Kalau berbentuk tanah, tampaknya lucu. Dalam bidang olahraga sudah mulai diberikan penghargaan berupa tanah atau rumah. Nilai uang hanya sebagai contoh tinggi rendahnya kita memberikan penghargaan.

Mengenai badan independen, sebenarnya sudah ada, seperti Dewan Kesenian Jakarta atau lembaga lain di daerah. Saudara Ajip Rosidi, misalnya, adalah salah satu ketua badan independen itu. Jadi, hal itu sudah ada. Namun, yang didirikan secara bersama-sama oleh masyarakat memang belum ada. Sementara ini, lembaga yang resmi adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5. Penanya: Herman Waluyo, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta

a. Saran:

Bertalian dengan dua halaman terakhir makalah Anda, saya ingin memberikan masukan. **Pertama**, sastrawan hendaknya diberi penghargaan untuk memperoleh penghasilan langsung dari naskahnya yang diterbitkan sehingga jumlah oplahnya memadai, tidak hanya 1.000--2.000 eksemplar. **Kedua**, tiap tahun kepala-kepala daerah hendaknya mengadakan pesta sastra dan seni. Di Malaysia, misalnya, gubernur-gubernur setiap tahun mengadakan pesta sastra dan seni. Presiden atau Perdana Menteri dengan Menteri Penerangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan juga mengetuai pesta seni dan memberikan hadiah sastra yang cukup memadai karena di sana gubernur dan perdana menternya berbudaya. **Ketiga**, jumlah hadiah sastra sebaiknya tidak hanya Rp1.000.000,00. Ini sangat menyedihkan karena hadiah bulu tangkis saja sampai ratusan juta rupiah. **Keempat**, mengenai Sastrawan Negara, pada kesempatan Kongres Bahasa Indonesia VII ini sebaiknya sudah terpilih seorang sastrawan negara yang dapat diberi hadiah khusus, tidak hanya membonceng hadiah sastra SEA Write Award atau hadiah sastra ASEAN. Saya kira, kita perlu memberikan rekomendasi kepada Pemerintah mengingat kedudukan sastra

kita makin merosot. Akhir-akhir ini banyak pembunuhan sadis akibat makin menipisnya rasa budaya masyarakat.

b. Tanggapan:

Mengenai penghargaan dalam bentuk karya mungkin di luar wewenang kita, tetapi bisa dianjurkan kepada Balai Pustaka yang mempunyai peranan pembinaan, di antaranya pembinaan karya sastra melalui penerbitan karya sastra. Namun, setahu saya, Balai Pustaka juga terpengaruh dengan mekanisme pasar yang selalu memikirkan bahwa karya sastra itu tidak laku dijual. Penerbitan karya sastra sebenarnya disubsidi oleh penerbitan buku lain yang dianggap laku. Pada kesempatan seperti ini sebenarnya kita tidak relevan membicarakan hal itu.

Saya setuju dengan pendapat Anda agar Kongres ini mengusulkan kepada Pemerintah tentang pemberian penghargaan sastra dengan cara menerbitkan karya sastrawan tersebut yang jumlahnya memadai.

Tentang kepala daerah yang berbudaya sebenarnya merupakan bagian dari apresiasi sastra. Sebenarnya, Indonesia tidak ketinggalan dalam hal itu. Pada waktu minat baca di kalangan masyarakat menurun, kami, para sastrawan, mencoba meningkatkan apresiasi masyarakat, antara lain dengan cara lomba, baik penciptaan maupun pengungkapan karya sastra. Selama lima tahun terakhir ini di Monas diadakan *Malam Merah Putih*. Di sana berkumpul para menteri, jenderal, dan sastrawan dengan "disaksikan" bendera merah putih membacakan puisi-puisi perjuangan. Dan, peristiwa itu dicontoh berbagai tempat. Bahkan, belakangan ini seorang komandan koramil terpaksa belajar membaca puisi. Komandan Korem di Solo membaca puisi bersama dengan K.H. Mustafa Bisri. Akan tetapi, yang tidak menarik dari peristiwa ini ialah bahwa maksud kita memberikan apresiasi kepada pejabat supaya pejabat memahami sastra, tetapi dalam kenyataannya, pejabat tidak mengenal karya Rendra, Sutardji, dan lain-lain. Mereka memerintahkan stafnya untuk membuat puisi dan semuanya menjadi penyair. Kalau begitu caranya, apresiasi sastra juga jadi kacau. Mengapa kita membacakan puisi di tengah massa itu? Maksudnya ialah untuk mengingatkan kita kepada semangat *sense of poetic* dalam masyarakat. Pada zaman kejayaan pantun dan syair, baik raja maupun masyarakat, lebih senang mendengarkan pembacaan pantun dan syair di terang bulan daripada membacanya. Hal itu ingin kita tumbuhkan lagi dan hasilnya baik sekali.

IV

Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra

PENINGKATAN PERAN INSTANSI PEMERINTAH DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Wardiman Djojonegoro

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

1. Pendahuluan

Ada dua pertanyaan yang timbul pada diri saya ketika diminta untuk menyusun dan menyajikan makalah dalam Kongres ini. Pertanyaan pertama: apakah saya pantas menerima kehormatan itu? Bukankah ini Kongres Bahasa Indonesia? Para peserta dan pemakalahnya seharusnya adalah para ahli atau pakar bahasa, sedangkan saya hanya seorang penutur, pemakai, atau pengguna bahasa Indonesia. Latar belakang pendidikan dan bidang keahlian saya juga tidak mendukung untuk menerima permintaan itu. Akan tetapi, setelah mengetahui bahwa peserta Kongres bukan hanya para pakar atau ahli bahasa, saya pun memberanikan diri menerima tawaran itu, sekurang-kurangnya sebagai peminat bahasa.

Pertanyaan kedua: apakah saya mampu menyajikan makalah dengan pokok bahasan seperti yang terlihat pada judul di atas? Secara jujur harus saya katakan bahwa tugas ini di luar batas kemampuan saya. Wawasan dan pengetahuan saya mengenai kebahasaan benar-benar amat terbatas. Pengalaman saya selama lima tahun sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Pembangunan VI yang lalu telah mengharuskan saya berkenalan dengan dan memperoleh pemahaman tentang berbagai masalah kebahasaan (termasuk sastranya) di Indonesia. Barangkali itulah satu-satunya modal yang dapat saya andalkan untuk menyusun makalah ini.

Sehubungan dengan judul "Peningkatan Peran Instansi Pemerintah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia", pada makalah ini pertama-tama akan dipaparkan peran bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, secara sepintas akan dilihat bagaimana peran instansi pemerintah dalam hal pembinaan bahasa Indonesia. Akhirnya, akan dikemukakan beberapa saran yang berkenaan dengan upaya meningkatkan peran instansi pemerintah tersebut.

2. Bahasa Indonesia dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara

Butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 merupakan pernyataan politik yang amat penting di bidang kebahasaan, yakni dikukuhkannya bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Pernyataan politik itu sekaligus menggambarkan semangat dan tekad para pemuda pada masa itu untuk menjunjung bahasa persatuan. Dalam konteks ini *menjunjung* tidak hanya bermakna menghormati, tetapi juga memelihara dan mengembangkannya sehingga bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu menjadi lebih mantap untuk digunakan dalam berbagai keperluan komunikasi. Dan, memang bahasa persatuan telah memainkan peranan yang sangat menentukan di dalam sejarah perjuangan

bangsa. Tanpa bahasa persatuan sukar dibayangkan bahasa apa yang seharusnya digunakan dalam teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Sukar pula dibayangkan bahasa apa yang seyogianya digunakan dalam teks atau naskah Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak saja telah berhasil mempersatukan dan menggalang semangat kebangsaan untuk melakukan perjuangan melawan penjajah, tetapi juga telah dimanfaatkan oleh para pendiri dan pejuang bangsa untuk menyusun dan merumuskan pandangan dan dasar pemikiran seperti yang tertera di dalam kedua dokumen yang sangat bersejarah itu (teks Proklamasi dan UUD 1945).

Ketika tujuh belas tahun kemudian dalam Pasal 36 UUD 1945 bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara dan sebagai akibat dari kedudukannya itu bahasa Indonesia antara lain digunakan sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan, dan sebagai sarana penguasaan dan pengembangan berbagai bidang seperti bidang sosial, ekonomi, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, politik, dan iptek. Hal itu berarti bahwa bahasa Indonesia benar-benar sudah berperan atau berfungsi sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dari pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu, ada dua hal penting yang perlu dicatat. Pertama, bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Melayu itu telah berhasil dikembangkan dan dimantapkan sebagai sarana komunikasi yang dapat diandalkan dalam berbagai bidang kehidupan: sosial, ekonomi, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, politik, dan iptek. Untuk itu, tata bahasanya dimantapkan, ejaannya disempurnakan, dan kosakata serta peristilahannya diperkaya. Kedua, bahasa Indonesia telah berhasil mempersatukan dan mengindonesiakan berjuta-juta warga masyarakat yang berasal dari ratusan kelompok etnis di Indonesia yang sejak berabad-abad sudah memiliki adat-istiadat, tradisi budaya, dan bahasa masing-masing. Hal yang disebutkan terakhir ini dengan jelas menggambarkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu tidak dapat dipisahkan dari cita-cita pembinaan kepribadian atau jati diri bangsa yang mampu mengatasi berbagai bentuk primordialisme kesukuan.

Untuk hal yang disebutkan pertama, pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia itu disebabkan oleh adanya kontak bahasa, baik antara bahasa Indonesia dengan bahasa daerah yang jumlahnya ratusan itu maupun antara bahasa Indonesia dengan sejumlah bahasa asing, terutama dengan bahasa Belanda sampai tahun yang 70-an dan dengan bahasa Inggris setelah secara resmi diberlakukan sistem Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan (1972). Kontak bahasa itu sendiri merupakan akibat pula dari terjadinya kontak berbudaya antarbangsa. Pada sisi ini berlaku semacam kaidah, yaitu bahwa bahasa (dan budaya) yang sudah lebih berkembang sering menjadi sumber pemerikayaan kosakata dan peristilahan melalui proses pemungutan kata dan ungkapan yang kemudian diserap dan dipadukan dengan kosakata asli. Kontak budaya dan kontak bahasa seperti ini juga menandai sejarah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia, terhitung sejak masih bernama bahasa Melayu.

Bahasa Melayu yang dipakai oleh berbagai kalangan penduduk sepanjang daerah pantai Selat Malaka dan Kalimantan, kawasan Maluku, Ternate, dan Tidore secara

langsung atau tidak langsung sejak awal tarikh Masehi, ibarat bunga karang menyerap berbagai unsur bahasa asing yang membuat bahasa Melayu menjadi lebih lengkap dan lebih kaya. Kosakata bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sekarang memuat beberapa ribu kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Tamil, Parsi, Portugis, Belanda, Jawa, Sunda, Minang, dan Inggris. Peningkatan yang boleh dikatakan amat cepat dalam perkembangan kosakata bahasa Indonesia dalam hampir semua sektor kehidupan itu telah mampu mempertajam daya ungkap yang pada gilirannya akan memudahkan orang menyatakan pikiran, sesuai dengan tingkat perkembangan berpikir masyarakat kita. Bertambah kayanya kosakata dan peristilahan itu dapat dilihat pada kenyataan bahwa *Kamus Besar Bahasa Indonesia* sekarang memuat lebih dari 50.000 kata tambahan apabila dibandingkan dengan kamus yang diterbitkan tahun yang 50-an.

Kontak bahasa dan kontak budaya itu makin terlihat jelas sosoknya dalam era kesejagatan atau globalisasi sekarang ini. Interaksi budaya nasional dengan budaya global makin tidak terelakkan. Di dalam menghadapinya, kita perlu berpikir dan bertindak secara sadar dan mandiri sehingga interaksi budaya yang akan berdampak besar pada masalah kebahasaan itu berlangsung secara sehat. Interaksi budaya itu sedang dan akan terus berlangsung secara cepat dan pasti akan berpengaruh terhadap perubahan nilai, sikap, perilaku, dan wawasan kita, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok masyarakat atau bangsa. Sekali lagi, interaksi itu akan berdampak pada seluruh unsur budaya, termasuk bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ada tiga peran bahasa Indonesia yang perlu kita perhatikan secara terus-menerus, yaitu

- (1) sebagai alat pemersatu,
- (2) sebagai unsur pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta
- (3) sebagai wahana bangsa menuju kehidupan yang lebih modern dan beradab.

Ketiga peran inilah yang seharusnya menjiwai dan menyemangati ketika bahasa Indonesia kita gunakan sebagai sarana komunikasi, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara.

3. Peran Instansi Pemerintah

Uraian di atas menggambarkan benang merah kesejarahan bahasa Indonesia, yaitu bahwa bahasa Indonesia dibentuk dan pada saat yang sama juga membentuk manusia Indonesia. Pada satu sisi, bahasa Indonesia dibentuk agar berperan sebagai alat pemersatu sehingga pada gilirannya menjadi lambang jati diri dan kemandirian bangsa. Pada sisi yang lain, bahasa Indonesia secara berangsur-angsur dan bertahap membentuk manusia Indonesia yang makin modern dan makin beradab. Dengan perkataan lain, bahasa Indonesia digunakan sebagai sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya perlu dilakukan secara berencana, terpadu, dan terarah upaya-upaya pembinaan dan pengembangan bahasa. Upaya pembinaan bertujuan agar masyarakat memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia, sejalan dengan yang tersurat dan tersirat dalam butir ketiga Sumpah Pemuda 1928 "menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia". Adapun upaya pengembangan dimaksudkan agar bahasa Indonesia sebagai sistem dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sarana komunikasi verbal yang mantap.

Pertanyaan yang patut dijawab ialah siapa yang seharusnya melaksanakan kegiatan atau upaya pembinaan dan pengembangan bahasa itu? Apabila kita sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan lambang jati diri dan kemandirian bangsa, maka jawaban atas pertanyaan itu ialah bahwa secara moral seluruh bangsa Indonesia mempunyai kewajiban yang sama dalam hal pembinaan dan pengembangan bahasa. Di dalam kenyataannya tentu saja perlu ada semacam "pembagian tugas" secara adil, sesuai dengan wawasan, penguasaan, dan keterampilan masing-masing. Wawasan dan penguasaan setiap orang terhadap bahasa Indonesia tidaklah sama. Keterampilannya di dalam menggunakan bahasa Indonesia secara lisan ataupun tertulis juga pasti berbeda. Dengan demikian, pembagian tugas yang adil itu menyiratkan bahwa baik upaya pembinaan maupun pengembangan sepatutnya diserahkan kepada mereka yang secara profesional memenuhi kualifikasi, yaitu kelompok yang dapat disebut para pakar atau ahli bahasa. Mereka yang tidak tergolong kelompok ini diharapkan memiliki sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Sikap positif ini dapat diamati antara lain melalui tingkat kesetiaan dan kebanggaannya terhadap bahasa Indonesia. Seberapa jauh seseorang menaati kaidah-kaidah kebahasaan ketika yang bersangkutan menggunakan bahasa Indonesia juga dapat dijadikan alat ukur untuk mengamati sikap positif tersebut.

Bagaimana dengan peran instansi pemerintah dalam hal pembinaan bahasa Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dengan judul makalah ini? Dengan berpedoman pada pengertian pembinaan seperti yang dikemukakan di atas, peran instansi itu dapat dilihat berdasarkan pemahaman kita terhadap tiga sumber, yaitu Penjelasan Pasal 36 UUD 1945, UU No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan GBHN 1998. Sumber pertama menyebutkan bahwa "Di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri, yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda, dan Madura) bahasa-bahasa itu akan dihormati dan dipelihara oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup". Sumber kedua (Bab XI, Pasal 41 dan 42) menyebutkan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan nasional, bahasa daerah sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan, dan bahasa asing sebagai bahasa pengantar "sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu". Sumber ketiga (yang sifatnya operasional) menyatakan bahwa pengajaran bahasa Indonesia "terus ditingkatkan untuk mempertinggi kualitas pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa nasional dan untuk mengembangkan bahasa Indonesia agar mampu menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi". Pengembangan bahasa Indonesia menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti yang dimaksudkan dalam GBHN itu, jelas menggambarkan upaya pengembangan. Adapun mengenai pembinaan bahasa, GBHN 1998 menggarisbawahi bahwa kegiatan "Pembinaan bahasa Indonesia terus ditingkatkan untuk mempertinggi mutu pemakaian serta sikap positif terhadap bahasa Indonesia, memperluas penerapan serta penggunaannya sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat ...".

Dengan memperhatikan kutipan dari ketiga sumber itu, kita dapat melihat secara jelas peran instansi pemerintah dalam pembinaan bahasa Indonesia. Menurut UUD 1945, peran instansi pemerintah itu tidak saja berhubungan dengan pembinaan bahasa

Indonesia (mengingat kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara), tetapi juga bersangkutan-paut dengan pembinaan bahasa-bahasa daerah yang masih "dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik". Menurut Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, digunakannya bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam dunia pendidikan secara gamblang memperlihatkan betapa besar peran (dan tanggung jawab) instansi pemerintah dalam pembinaan bahasa Indonesia meskipun hanya terbatas dalam lingkungan lembaga-lembaga pendidikan saja. Sasarannya pun juga terbatas pada guru/dosen dan murid/mahasiswa. Adapun menurut GBHN, pembinaan bahasa Indonesia mutlak diperlukan terutama untuk meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia oleh masyarakat penutur. Selain itu, pembinaan yang sarannya para penutur bahasa Indonesia itu perlu diupayakan sedemikian rupa sehingga kegiatan itu dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Kalau instansi pemerintah diartikan sebagai kabinet atau badan/dewan pemerintah yang terdiri atas para menteri (lihat *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi II, halaman 425 dan 756), maka persoalannya ialah departemen apa yang seharusnya bertanggung jawab dalam menangani masalah pembinaan bahasa Indonesia? Jawabannya tidak sulit, pasti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bukankah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, instansi pemerintah yang ditugasi "mengurusi" masalah kebahasaan, berada dalam lingkungan departemen ini? Jawaban seperti itu agak terkesan stereotip meskipun memang benar secara teknis fungsional departemen itulah yang seharusnya mengelola dan melaksanakan tugas pembinaan bahasa. Akan tetapi, kalau kita mencoba membayangkan seberapa banyak atau seberapa luas cakupan kelompok-kelompok sasaran pembinaan yang meliputi bidang sosial, ekonomi, perdagangan, industri, kebudayaan, pariwisata, politik, dan iptek. Apalagi menurut GBHN, pembinaan dalam berbagai bidang itu harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, maka sesungguhnya tugas pembinaan tersebut tidak semata-mata dipercayakan hanya kepada "jajaran" Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saja. Oleh karena itu, upaya pembinaan bahasa Indonesia ini seyogianya dilaksanakan melalui kerja sama atau koordinasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan departemen-departemen lainnya yang sudah pasti sama-sama berkepentingan dengan pemakaian bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun dan terutama secara tertulis. Tentang kerja sama antardepartemen ini dapat dicontohkan kegiatan penertiban penggunaan bahasa asing yang "dicanangkan" oleh Kepala Negara tanggal 20 Mei 1995. Kegiatan itu dilaksanakan oleh suatu tim koordinasi yang keanggotaannya mewakili enam departemen (Departemen Dalam Negeri, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Kehakiman, Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Departemen Penerangan, serta Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat).

Sehubungan dengan seberapa banyak anggota lapisan masyarakat yang seharusnya menjadi sasaran pembinaan, ada baiknya kalau angka-angka berikut diperhatikan. Pada akhir tahun 1920-an penutur bahasa Melayu (belum bernama bahasa Indonesia) hanya berjumlah 4,9 % di antara 57 juta orang penduduk. Jumlah pemakai bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari (menurut Sensus BPS 1990) memperlihatkan kemajuan yang mengesankan, yaitu 15% atau 24 juta orang; yang memahami bahasa

Indonesia tetapi tidak menggunakannya sebagai bahasa sehari-hari ada 68% atau 107 juta orang, dan yang sama sekali tidak atau belum memahami bahasa Indonesia masih 17% atau 27 juta orang. Dalam hubungan itu, BPS memproyeksikan bahwa pada tahun 2010 semua penduduk Indonesia usia lima tahun ke atas (diperkirakan jumlahnya 215 juta orang) sudah akan mampu menggunakan bahasa Indonesia dengan berbagai tingkat kemahiran. Tingkat kemahiran berbahasa Indonesia di antara para penuturnya pastilah sangat beragam karena bersifat amat individual. Faktor penyebabnya pun pasti beragam pula, ada yang subjektif dan ada yang objektif. Yang subjektif tampaknya perlu dikaji dari sisi yang di atas disebut sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Adapun yang objektif, salah satu di antaranya ialah tingkat pendidikan. Menurut sumber yang sama (Sensus BPS 1990), latar belakang pendidikan penduduk Indonesia adalah sebagai berikut: belum pernah sekolah 16,26%, tidak tamat SD 31,46%, SD 30,36%, SLTP 10,72%, SLTA 9,69%, program diploma/ sarjana muda 0,78%, dan sarjana 0,73%.

4. Permasalahan yang Dihadapi

Masalah pembinaan, seperti yang sudah disebutkan, berkaitan erat dengan para penutur atau pemakai bahasa yang pasti akan memperlihatkan perbedaan sekurang-kurangnya dalam tiga hal, yaitu

- (1) penguasaan bahasa dan keterampilan menggunakannya,
- (2) kepentingan si pemakai, serta
- (3) sikap atau apresiasinya terhadap bahasa Indonesia.

Perbedaan penguasaan bahasa Indonesia berikut keterampilan menggunakannya di kalangan para penutur disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satu di antaranya, seperti sudah disebutkan, ialah latar belakang pendidikan. Penguasaan dan keterampilan ini tidak statis. Bagaimana perubahannya, hal itu amat bergantung kepada upaya para penutur yang bersangkutan baik dalam upaya "memperbaiki diri" maupun dalam mengakses ke dalam dunia informasi yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi, misalnya media massa (cetak dan elektronik). Perubahan ini sedikit banyak juga berkorelasi dengan bidang profesi yang dihadapinya. Akan tetapi, buruh pabrik dan petani, misalnya, tentu saja tidak terlalu "berkepentingan" dengan masalah bahasa di dalam melakukan pekerjaannya. Hal itu berbeda dengan, antara lain, wartawan dan konseptor surat yang dituntut benar-benar menguasai pemakaian bahasa Indonesia tulis.

Kepentingan para penutur terhadap bahasa Indonesia juga berbeda. Bagi sebagian besar dari mereka, kepentingannya terhadap bahasa Indonesia terbatas hanya pada lingkup pergaulan, mungkin dengan teman-teman sekantornya atau dengan para tetangga di lingkungan tempat tinggal, apalagi kalau bahasa daerahnya berbeda karena kelompok etnisnya berbeda. Dengan demikian, bagi mereka bahasa Indonesia semata-mata hanya sebagai alat komunikasi untuk keperluan pergaulan dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam pada itu, ada pula kelompok penutur yang memerlukan bahasa Indonesia bukan sekadar untuk pergaulan, melainkan karena mereka juga merasa perlu untuk

memperoleh informasi dan tambahan ilmu pengetahuan. Keperluan akan informasi, sebagaimana yang disajikan lewat media massa cetak (surat kabar dan majalah) dan elektronik (radio dan televisi), dewasa ini makin dirasakan sebagai sesuatu yang tidak kalah pentingnya dari keperluan hidup yang primer seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Kalau tidak, terutama bagi kelompok masyarakat pada strata menengah ke atas, hal itu akan menyebabkan seseorang merasa "ketinggalan zaman". Kelompok masyarakat lainnya bahkan akan merasa belum cukup hanya dengan membaca surat kabar/majalah dan mendengarkan radio atau menonton televisi saja. Kelompok ini juga membaca buku atau artikel khusus pada surat kabar atau majalah untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan, mungkin karena tuntutan profesi yang digelutinya atau mungkin pula ada faktor penyebab yang lain, paling tidak "kepuasan dirinya" sendiri. Dilihat dari kepentingannya terhadap bahasa Indonesia, kelompok yang disebutkan terakhir sangat berbeda jauh dengan buruh pabrik dan petani yang dicontohkan di atas.

Permasalahan terakhir yang perlu disinggung berhubungan dengan unsur kebanggaan dari sikap positif masyarakat penutur terhadap bahasa Indonesia. Unsur kebanggaan ini benar-benar harus disadari oleh semua kelompok dan seluruh lapisan masyarakat karena meskipun sudah ada gerakan mengindonesiakan kata/istilah asing, sampai sekarang masih saja terdapat kalangan yang karena ingin disebut lebih maju, lebih modern, atau lebih terpelajar, mereka tetap saja menggunakan dan mempertahankan kata/istilah asing meskipun sudah ada padanan bahasa Indonesianya. Kalau dibiarkan, hal itu tidak sejalan dengan cita-cita dan pandangan tentang bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan kemandirian bangsa. Adalah kewajiban kita semua untuk menjaga agar cita-cita kemerdekaan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa tetap terjalin lewat rentangan benang merah dengan upaya mengoptimalkan pemakaian bahasa Indonesia sebagai sarana persatuan dan sarana pembangunan bangsa. Masih segar dalam ingatan kita bahwa pada awal pertumbuhannya, bahasa Indonesia merupakan fenomena yang menakjubkan, terutama bagi dunia luar, karena dalam kurun waktu yang relatif amat singkat telah berhasil mempersatukan begitu banyaknya puak atau suku bangsa menjadi satu kesatuan yang bernama bangsa Indonesia. Akan tetapi, ketika bangsa Indonesia boleh dikatakan mulai memperlihatkan keberhasilan dalam hal memberi makna atau mengisi kemerdekaannya, misalnya lewat pembangunan berbagai sarana dan prasarana fisik, mengapa keberhasilan itu menyebabkan kita harus meninggalkan bahasa Indonesia untuk kemudian berpaling kepada bahasa asing, terutama bahasa Inggris? Apabila demikian adanya, maka fenomena yang menakjubkan itu akan berangsur-angsur sirna. Setelah itu, pemertahanan budaya atau kekenyalan budaya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertanyakan karena secara tidak kita sadari kita telah larut dan hanya menjadi sebuah titik yang tidak bertanda dalam dinamika global. Itulah sebabnya unsur kebanggaan tersebut perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dalam upaya pembinaan dan peningkatan sikap positif masyarakat penutur terhadap bahasa Indonesia.

5. Peningkatan Pembinaan: Terkait dan Sepadan (*Link and Match*)

Telah dikemukakan bahwa secara kelembagaan pada dasarnya yang bertanggung jawab dalam kegiatan pembinaan bahasa Indonesia adalah Pemerintah; lebih khusus lagi departemen teknisnya adalah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan memperhatikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan upaya pembinaan, seperti yang telah dipaparkan di atas, dan dengan mempertimbangkan amat terbatasnya tenaga dan dana yang tersedia di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembinaan dalam porsi yang memadai, maka upaya-upaya pembinaan itu seyogianya dilakukan dalam kerangka dan strategi 'terkait dan sepadan' (*link and match*). Untuk itu, di bawah ini disarankan upaya peningkatan pembinaan atas dasar *link and match* baik dengan instansi Pemerintah/departemen lain, dengan organisasi profesi, maupun dengan dunia usaha. Selain itu, akan disinggung pula kelompok sasaran pembinaan yang perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Kelompok pakar berbagai bidang ilmu yang berkepentingan dengan peristilahan (dalam bahasa Indonesia) dan para ahli bahasa itu sendiri perlu mengambil peran dalam upaya pembinaan tersebut.

Kerja sama antara Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan departemen-departemen lain, seperti dengan Departemen Dalam Negeri, Departemen Penerangan, Departemen Kehakiman, Departemen Pariwisata, Seni dan Budaya, serta Kantor Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, dilihat dari gerakan pengindonesiaan kata/istilah asing di tempat umum yang telah disebutkan, merupakan upaya yang sangat strategis. Di lingkungan departemen-departemen tersebut banyak instansi yang di dalam melaksanakan kegiatan sehari-harinya secara langsung berhubungan dengan pemakaian bahasa Indonesia secara lisan ataupun tertulis.

Di bawah Departemen Penerangan, misalnya, ada instansi yang berhubungan dengan media massa cetak dan elektronik yang sama-sama berkepentingan dengan pembinaan dan pengembangan ragam bahasa jurnalistik. Perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang periklanan pasti berkepentingan dengan pemakaian bahasa Indonesia. Ini pun juga "berinduk" kepada Departemen Penerangan.

Pemakaian bahasa Indonesia untuk ragam perundang-undangan menyangkut wewenang Departemen Kehakiman. Oleh karena itu, upaya perapian pemakaian bahasa Indonesia dalam perundang-undangan perlu diprioritaskan sebagai kegiatan kerja sama dengan departemen ini. Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bidang jurnalistik dan perundang-undangan boleh dikatakan paling sering menimbulkan persoalan dalam upaya pembinaan.

Kerja sama dengan Departemen Dalam Negeri sangat membuka kemungkinan dan kesempatan untuk pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia di daerah, baik di lingkungan Pemda Tingkat I maupun Tingkat II. Pemakaian bahasa Indonesia dalam dunia perhotelan dan restoran yang terkesan dinomorduakan (karena bahasa Inggris yang diutamakan) menyebabkan kerja sama dengan Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya harus secara lebih bersungguh-sungguh makin diupayakan dan ditingkatkan.

Nama kompleks permukiman berikut jenis fasilitas yang disediakannya tidak terlalu "gawat" karena kerja sama dengan REI sejak 1995 boleh dikatakan telah mem-

berikan hasil yang menggembirakan. Tentu saja kerja sama dengan Kantor Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, yang bidang tugasnya bersangkut-paut dengan kegiatan REI, masih harus terus dibina dan ditingkatkan.

Yang tidak kalah pentingnya adalah kerja sama dengan Departemen Keuangan serta Departemen Perindustrian dan Perdagangan karena peristilahan dalam bidang keuangan, ekonomi, industri, dan perdagangan perkembangannya amat cepat sehingga kerja sama dengan kedua departemen teknis itu harus terutama ditujukan kepada upaya penyusunan padanan istilah-istilah tersebut dalam bahasa Indonesia.

Dalam melaksanakan kegiatannya, kerja sama antardepartemen ini haruslah melibatkan keikutsertaan secara aktif berbagai organisasi profesi yang berada di bawah naungan atau cakupan tugas pembinaan setiap departemen yang bersangkutan. Contoh: PWI dan PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia) untuk Departemen Penerangan, PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk Departemen Pariwisata Seni dan Budaya, REI untuk Kantor Menteri Negara Urusan Perumahan Rakyat, Kadin untuk Departemen Perindustrian dan Perdagangan, serta Peradin (Persatuan Advokat Indonesia) untuk Departemen Kehakiman.

Telah disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan amanat GBHN 1998 tentang peningkatan upaya pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga mencapai seluruh lapisan masyarakat, perlu disusun urutan prioritas kelompok sasaran dari kegiatan pembinaan yang akan dilakukan. Kalau sasarannya para pegawai negeri, terutama yang bertugas di daerah, para pejabat eselon IV dan V, misalnya, diprioritaskan. Dalam hubungannya dengan para guru, yang perlu dipertimbangkan ialah jenjang lembaga pendidikannya, misalnya guru SLTP dan SMU diprioritaskan. Setelah itu, perlu pula dipikirkan mana yang lebih strategis: guru-guru bahasa Indonesia dulu atau guru-guru nonbahasa Indonesia atau bahkan kedua-duanya memperoleh porsi perhatian yang sama.

Sehubungan dengan penentuan urutan prioritas kegiatan pembinaan ini, ada empat sasaran strategis yang benar-benar perlu dipertimbangkan dan diperhitungkan, yaitu media massa, generasi muda, dunia usaha, dan dunia penerbitan.

Pertama, pembinaan melalui jalur media massa cetak ataupun elektronik ditujukan kepada penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar menurut ragam bahasa jurnalistik. Media massa ini diharapkan dapat menjadi teladan penggunaan bahasa tulis bagi media massa cetak dan teladan penggunaan ragam bahasa lisan bagi media massa elektronik. Kesadaran akan keteladanan penggunaan bahasa Indonesia media massa ini sangat penting mengingat banyak warga masyarakat yang melihat bahwa bahasa Indonesia yang digunakan oleh kedua media itu dianggap sebagai acuan ukuran penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Media massa memang dapat menjadi guru karena kita dapat belajar atau memperoleh informasi dari media massa itu.

Kedua, sasaran lain pembinaan adalah generasi muda. Pelajar dan mahasiswa adalah generasi penerus yang sedang berada di dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, pelajar dan mahasiswa harus menjadi prioritas sasaran pembinaan. Di samping itu, perlu dipikirkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang lebih cocok bagi pelajar dan mahasiswa dalam rangka peningkatan kesadaran akan disiplin atau tertib berbahasa

Indonesia.

Ketiga, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga harus tercermin dalam dunia usaha. Pada saat ini ada kecenderungan yang kuat bahwa bahasa asing lebih dipercaya sebagai alat komunikasi di kalangan dunia usaha serta dianggap lebih menggambarkan jangkauan usaha secara global. Tidak sedikit nama badan usaha dan merek dagang, misalnya, yang masih menggunakan bahasa asing, padahal bahasa Indonesia telah lama menjadi bahasa perniagaan, bahkan sudah sejak lama sebelum kemerdekaan. Jika bisnis dilakukan dan ditujukan kepada masyarakat Indonesia, tentu bahasa Indonesia harus menjadi sarana komunikasi bisnis di negeri ini.

Keempat, penggunaan bahasa yang baik dan benar juga harus tercermin dalam dunia terbitan Indonesia. Buku-buku bacaan dan buku ilmiah populer harus menggunakan bahasa Indonesia yang mengikuti norma atau kaidah bahasa Indonesia tulis. Hal ini seharusnya menjadi pendorong bagi para penerbit untuk menyiapkan betul-betul naskah yang akan diterbitkan setelah mungkin sehingga terhindar dari kesalahan bahasa.

6. Penutup

Jika upaya peningkatan pembinaan itu dikaitkan dengan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka sesungguhnya upaya itu merupakan kegiatan *penyebaran*, yaitu penyebaran atau penyebarluasan informasi. Atas dasar itu, yang paling berperan dalam hal penyebaran ini ialah *media massa*, baik cetak maupun elektronik (terutama televisi).

Bidang pendidikan tentu merupakan sarana yang juga amat strategis dalam penyebaran ini. Seperti sudah disinggung, generasi muda ini merupakan investasi yang tidak ada taranya untuk masa depan bangsa.

Dunia industri dan perdagangan, baik yang menyangkut barang maupun jasa, juga merupakan kelompok sasaran yang perlu diprioritaskan dalam kegiatan penyebaran ini. Dampaknya sangat luas karena boleh dikatakan bahwa dunia industri dan perdagangan ini mempunyai akses ke seluruh lapisan masyarakat.

Sementara itu, kelompok pakar berbagai bidang ilmu harus bekerja sama dengan para ahli bahasa terutama dalam penyusunan istilah-istilah yang diperlukan dalam bahasa Indonesia. Yang penting ialah pertumbuhan dan perkembangan bahasa Indonesia harus seirama dan sesuai dengan tuntutan era globalisasi, tetapi tanpa kehilangan ciri utamanya sebagai lambang jati diri bangsa.

Daftar Pustaka

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Resolutions of Indonesian Language Congresses I–VI*. Jakarta: National Center for Language Development.
- , 1996. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 1996. *Senarai Kata Serapan dalam Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Pem-

binaan dan Pengembangan Bahasa.

-----, 1996. *Panduan Penertiban Penggunaan Bahasa Asing di Tempat Umum*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Djojonegoro, Wardiman. 1998. *Peningkatan Kualitas SDM melalui Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

-----, 1998. "Peran Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan". Dalam Hasan Alwi, Dendy Sugono, S.R.H. Sitanggang (Ed.). *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Risalah Kongres Bahasa Indonesia VI: 47--51. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Ibrahim, Idi Subandy. "Politik Bahasa SARA". *Republika* Edisi 27 Juli 1998 (Halaman 8, Kolom 5--7).

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 8.00--9.00
Judul Makalah	: Peningkatan Peran Instansi Pemerintah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
Penyaji	: Wardiman Djojonegoro
Pemandu	: Syahrudin Kaseng
Pencatat	: a. Widodo b. Alma E. Almanar
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Iis Kristiani, STKIP Suryakencana, Cianjur

a. Pertanyaan:

Dalam rangka peningkatan pembinaan bahasa Indonesia atas dasar *link and match* yang Bapak anjurkan, selain seminar, diskusi, atau temuwicara yang telah dilaksanakan oleh Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), atau departemen itu sendiri, adakah usaha lain yang telah dilakukan oleh setiap departemen dalam rangka pembinaan tersebut? Sebagai contoh, katanya, di Cina setiap calon pegawai dites mengenai sastra termasuk di dalamnya bahasa. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap pegawai yang memiliki kemahiran berbahasa dan bersastra itu dianggap menguasai pengetahuan lain. Kemudian, di Australia, seperti yang disampaikan kemarin oleh Ibu Julia, ada semacam *Test of English as a Foreign Language* (TOEFL) bahasa Indonesia. Dan, begitu juga kita yang akan ke luar negeri harus memiliki sertifikat TOEFL bahasa Inggris. Mengapa tidak kita lakukan tes mengenai kemahiran berbahasa Indonesia bagi calon pegawai di departemen-departemen, seperti di departemen atau sektor-sektor yang Bapak sebutkan?

b. Jawaban:

Pertanyaan tes bahasa Indonesia ini lebih pantas dijawab oleh Pak Hasan Alwi karena Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sering memberikan ceramah tentang bahasa Indonesia di diklat-diklat, juga di instansi-instansi, tetapi mungkin masih dirasakan kurang memadai. Dalam makalah saya, saya ingin menambahkan bahwa selama ini ceramah itu hanya dilakukan pada instansi pemerintah. Oleh karena itu, saya ingin mengemukakan bahwa pembinaan dan pengembangan bahasa ini jangan hanya dilakukan pada instansi pemerintah sebab pelaku-pelaku penutur dan pengembang yang lebih besar dari pemerintah itu ada di luar. Mungkin sekarang mereka masih bayi, tetapi suatu waktu nanti akan besar. Saya ambil contoh yang besar adalah periklanan di televisi. Salah satu pelaku bahasa yang besar adalah pers kita sehingga pertanyaan Sdr. Iis

tadi bisa ditunjukkan kepada pelaku bahasa tersebut. Sampai di manakah para pelaku bahasa Indonesia itu menerapkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Terus terang saja, dua tahun yang lalu saya diundang ke *Kompas*. Harian *Kompas* memberi saya satu buku, yaitu *Bahasa Indonesia yang Baik untuk Pers*. Buku tersebut merupakan buku pegangan bagi wartawan-wartawan kita. Jadi, saya sangat senang.

Saya bertanya, "Bisakah buku ini disebarluaskan untuk masyarakat media lain?" Saya harap buku tersebut dapat disebarluaskan kepada media massa lain. Jadi, *to the point* saja, kita jangan melihat pada pemerintah saja, mungkin pemerintah sudah melakukan tugas itu dengan baik. Mungkin karena mengalami keterbatasan anggaran dan sebagainya, usaha itu belum sepenuhnya dapat dilaksanakan. Akan tetapi, hendaknya kita juga berpikir bagaimana halnya dengan instansi-instansi lain, khususnya swasta, SDM-nya juga ikut ditingkatkan melalui penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Mengenai sastra, saya tidak tahu mengenai Cina, tetapi yang saya ketahui memang benar bahwa di sana tingkat pengenalan sastra lebih tinggi. Hal itu terjadi karena sejak zaman Dinasti Ming dulu, para pejabat tinggi harus mengenal sastra. Memang, suatu saat nanti, kalau di Indonesia tes pengetahuan sastra dapat dimasukkan dalam tes penerimaan pegawai, alangkah baiknya. Tentu, bagi para sastrawan kita, kondisi seperti itu akan menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa.

2. Penanya: Zainuddin, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya belum melihat peran instansi yang maksimum dalam usaha pengembangan bahasa pada saat ini. Salah satu contoh yang konkret yang bisa saya ambil adalah bahwa tidak ada instansi pemerintah yang dalam penentuan penerimaan pegawainya yang memberikan ketentuan, misalnya, harus bisa berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Selama ini ketentuannya harus menguasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris. Barangkali, saya hanya mengutip apa yang Bapak sampaikan tadi bahwa perkembangan bahasa sekarang ini, dalam era globalisasi ini, menyebabkan adanya istilah yang keinggris-inggrisan, seperti yang Bapak katakan tadi. Saya hanya ingin menyarankan bahwa hal tersebut harus dimulai dari lingkungan keluarga. Harus ditanamkan bahwa bahasa Indonesia itu harus bisa kita pahami betul.

b. Jawaban:

Seperti jawaban saya pada penanya terdahulu, mengapa dalam penerimaan pegawai belum ada tes bahasa. Begini, kita juga harus mengetahui bahwa calon pegawai pada suatu instansi biasanya memiliki tingkat pendidikan tertentu. Sekarang calon pegawai yang dibutuhkan harus berpendidikan sarjana atau S-1. Dalam hubungan itu, dianggap bahwa mereka itu telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar sehingga dalam penerimaan pegawai itu

tidak dites bahasa Indonesia lagi. Dan, tentang pegawai negeri sebenarnya kita sudah menetapkan adanya pengembangan nol atau *zero growth*, yang dalam praktiknya tidak menerima pegawai negeri baru.

Masalah istilah asing yang dipakai oleh masyarakat sebenarnya merupakan pengaruh dari luar. Inilah persoalan yang rumit. Kalau keluarga itu selama 24 jam terus-menerus "dibom", dan orang-orang berpendidikan S-1 "dibom" dengan iklan-iklan yang berbau bahasa Inggris, mau tidak mau mereka itu akan terpengaruh. Apalagi, bagi bapak dan ibunya yang dulu memang mungkin penguasaan bahasa Indonesianya kurang sempurna, tentu anaknya bisa terpengaruh karena iklan itu didengar dan dilihatnya tiap malam. Masalahnya adalah bagaimana kita bisa menginsyafkan para pengiklan tersebut? Jadi, pertama adalah bisnis perusahaannya, yang kedua adalah nama rumah produksinya. Akan tetapi, sekarang orang senang memakai PH (*production house*) yang keinggris-inggrisan. Pemakaian istilah *rumah produksi* itu hanya ingin menghindari keinggris-inggrisan agar tidak latah. Saya pernah bertanya pada pengelola rumah produksi (*production house*), "Mengapa Anda pakai bahasa Inggris?" Mereka menjawab, "Pak, kalau pakai bahasa Indonesia tidak enak, maka dipakai bahasa Inggris."

Kemudian, saya mengadakan survei dengan tidak resmi begitu saja. Ternyata waktu itu ada 46 biro iklan. Dari 46 biro iklan itu, sebanyak 25 biro iklan manajernya adalah orang Filipina. Latar belakangnya memang Inggris sehingga hal itu bisa dimengertilah. Lalu, orang Filipina tampaknya ingin keinggris-inggrisan. Akan tetapi, di sini, pemilik bisnis meminta kepada biro iklan agar biro iklan itu berbahasa Indonesia.

Di sini ada dua kepentingan bertumpu. Pertama, kepentingan bisnis yang menginginkan agar barangnya laku dan dengan bahasa yang keinggris-inggrisan ternyata barang itu lebih banyak laku. Atau, yang kedua, dia itu bangga dan cinta akan bahasa Indonesia. Akibatnya, dia kalah bersaing dengan pihak yang keinggris-inggrisan. Karena kita sudah berada dalam era globalisasi, di sini perlu ada sesuatu yang disebut pengimbangan yang halus. Di sinilah Anda harus mempunyai andil yang besar. Jadi, sebagai contoh andil yang besar adalah Himpunan Pembina Bahasa Indonesia ini. Ketuanya Pak Andi Mappi Sammeng, mantan Dirjen Pariwisata. Pak Andi, tolong anggota-anggota Anda itu diperbanyak tidak hanya dari pecinta bahasa dan peduli bahasa, tetapi juga dari instansi pemerintah dan dari kalangan bisnis sehingga Anda melalui organisasi itu dapat menyiapkan "istilah" sebagai lambang kebanggaan dan kesetiaan kepada bahasa Indonesia.

3. **Penanya:** Lonce A. Lamusu, STKIP Gorontalo

a. **Pertanyaan:**

Saya tertarik dengan uraian pada makalah Bapak yang menyatakan, "Apakah saya pantas menerima kehormatan ini? Bukankah ini Kongres Bahasa Indonesia? Para peserta dan pemakalahnya seharusnya adalah para ahli atau pakar

bahasa, sedangkan saya hanya seorang penutur, pemakai, dan pengguna bahasa Indonesia". Dalam pernyataan itu tersirat bahwa yang benar-benar bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia itu hanyalah pakar-pakar bahasa Indonesia. Kemudian, pada halaman 5 Bapak mengungkapkan bahwa penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu dapat ditinjau dari tiga faktor. *Pertama* adalah penggunaan bahasa pada pengajaran bahasa itu sendiri. *Kedua* adalah semangat dan kebanggaan berbahasa Indonesia anak-anak. *Ketiga* adalah penggunaan bahasa Indonesia para petinggi, tokoh-tokoh masyarakat, guru-guru, media massa, bahkan para ilmuwan yang menjadi contoh teladan.

Kesalahan penggunaan bahasa Indonesia para pengajar itu disebabkan oleh adanya ketidakcermatan. Mereka mengetahui hal itu, tetapi tidak cermat. Artinya, hal ini disebabkan oleh adanya ketidaktahuan. Dan, yang ketiga disebabkan oleh adanya ketidakpedulian. Dalam hal ini, saya mengharapkan agar ketiga faktor itu dapat dibicarakan secara terpadu dan dicarikan jalan keluarnya secara tepat dan terkoordinasi seperti yang Bapak katakan pada simpulan. Oleh karena itu, pertanyaan saya, apa yang dimaksud dengan terkoordinasi itu?

b. Jawaban:

Ibu Lonce, pertanyaan Ibu sebetulnya sudah terjawab sebagian pada jawaban penanya terdahulu, tentang yang terkoordinasi itu apa. Anggaplah yang pakar di sini adalah para pembina dan peneliti bahasa dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Yang berkumpul di sini semua pakar bahasa Indonesia. Penguasaannya berbeda antara pakar-pakar itu, yaitu dari penguasaan yang sangat baik dan benar sampai yang mungkin setengah-setengah. Koordinasinya adalah bagaimana Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu dapat datang ke Departemen Penerangan, misalnya? Bagaimana iklan-iklan yang disebarluaskan melalui media elektronik itu bisa memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar? Bagaimana, misalnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa membina kerja sama yang baik dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebab pers adalah salah satu media pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia yang paling besar dan paling berpengaruh? Bagaimana Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu bersama pers mengembangkan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Dan, waktu saya berkumpul bersama redaksi, tidak ada kesukaran yang khas pada masalah iklan. Iklan itu harus pendek dan menarik. Pada pers (surat kabar) kolomnya terbatas sehingga tulisan harus pendek. Akan tetapi, tulisan itu harus benar dan menarik. Bagaimana mereka harus mengaturnya? Kadang-kadang kata kerja itu "telanjang" saja karena harus menghemat tempat. Dapatkah hal itu dibenarkan dalam keadaan demikian? Itulah sebabnya, perlu ada suatu diskusi yang terus-menerus dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sebaliknya, saya minta lembaga ini juga memasukkan pakarnya ke dunia pers.

4. **Penanya:** Endang Lukito Mulyaningrum, SLTP Negeri 252, Jakarta Timur

a. **Pertanyaan:**

Instansi pemerintah harus terkoordinasi dalam pemakaian bahasa Indonesia, sedangkan di sini, dalam kenyataannya, para birokrat atau para pejabat masih menggunakan bahasa daerah untuk mengkromokan bahasa Indonesia. Misalnya *menghaturkan*, atau *matur dengan Bapak*. Bagaimana sikap Bapak dengan *mengkromokan* bahasa?

b. **Jawaban:**

Masalah pemakaian bahasa Indonesia yang dicampuradukkan dengan bahasa daerah oleh para pejabat memang masih terlihat, termasuk juga bahasa yang *dikromokan*. Kita masih ingat waktu Bapak Presiden, Bapak Habibie, mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu ada yang *dikromokan*, bahkan bahasa Indonesia difeodalkan. Jadi, pendapat saya, justru dulu para pendiri kita atau para pemuda kita mengambil bahasa Indonesia karena bahasa Indonesia adalah salah satu bahasa yang tidak mengenal tingkatan. Justru karena itulah bahasa Indonesia dikenal. Akan tetapi, hal itu tidak bisa dihindarkan karena masyarakat kita adalah masyarakat yang majemuk meskipun bahasa Indonesiannya tidak mengenal feodalisme dan tingkatan. Kekuatan budaya itu masih melekat sehingga tercermin dalam bahasanya. Saya ambil contoh ini karena dalam bahasa Jepang hal yang seperti itu yang namanya honorifik, yaitu kata-kata yang sangat menghormati, sangat kuat. *Ansicht*, itunya sendiri tidak apa-apa, dalam suatu bahasa perlu ada suatu penghalusan, tetapi sebaiknya itu jangan dijadikan aturan atau kebiasaan karena itu berlainan atau tidak cocok dengan demokratisasi kita.

5. **Penanya:** Mudjiyanto, IKIP Malang

a. **Pertanyaan:**

Peran instansi pemerintah ternyata sebatas budaya konstitusional, yaitu membuat putusan, membuat keppres, membuat petunjuk, dan menunjukkan adanya realitas yang membudaya sebagai gerakan dan semangat peduli berbahasa Indonesia yang baik dan benar, bahkan sebagai jati diri bangsa yang dapat membangun wacana berbahasa Indonesia dalam segala segi kehidupan. Saya melihat bahwa memberikan alternatif dengan strategi *link and match* masih perlu dipertanyakan. Sedikitnya saya tahu tentang itu. Masalah itu muncul dari suatu paradigma sinergi atau simbiosis antara dunia pendidikan dan dunia usaha yang saat ini sudah sampai pada lonceng kematiannya. Hal ini saya pertanyakan karena anak-anak didik untuk siap pakai, sementara pabriknya belum digarap. Dalam hubungan itu, apakah strategi seperti itu masih Bapak yakini untuk ditawarkan dalam pengembangan dan pembinaan bahasa Indonesia. Kalau kita masih yakin, saya sangat bersyukur, dan tolong berikan ilustrasi yang realistis, yaitu kita memberikan prioritas pada bahasa Indonesia dahulu, baru bahasa asing. Kemudian, bagaimana kebijakan pemerintah ter-

hadap pengembangan bahasa khususnya? Saya melihat bahwa dari sekian banyak seminar, contoh konkretnya Kongres ini, jarang sekali mahasiswa dilibatkan. Kaum muda bukan cuma mahasiswa. Terus terang, saya secara pribadi dan beberapa teman mahasiswa merasa bahwa dalam pengembangan bahasa kami sangat tidak dilibatkan. Karena kami merasa mempunyai andil dalam pengembangan bahasa ini, kami ikut Kongres ini.

b. Jawaban:

Link and match itu adalah suatu wawasan, yaitu bahwa kita dalam dunia pendidikan tidak bisa berdiri sendiri karena tujuan kita meningkatkan sumber daya manusia (SDM). SDM yang masuk dalam pendidikan itu hanya titipan saja, seperti di SD 6 tahun, di SLTP dan SMU 6 tahun, dan mungkin di perguruan tinggi 6 tahun. Ini suatu titipan. Sesudah itu, dia akan terjun ke masyarakat. Oleh sebab itu, apa yang kita ajarkan di sekolah itu harus selalu mengacu ke tempat dia bekerja nanti, entah di mana saja. Yang salah kaprah adalah yang kurang mengerti mengenai *link and match*, seolah-olah *link and match* itu hanya industri saja, padahal *link and match* adalah tempat dia berkecimpung di dunia luar. Jadi, bisa saja dia menjadi budayawan. Akan tetapi, dia harus tahu apa yang harus dipelajarinya jika dia ingin menjadi budayawan yang canggih nanti. Dia boleh bekerja di industri atau pabrik, dia boleh menjadi peneliti, boleh menjadi seorang profesional apa pun, tetapi *link and match* tujuannya, jangan kita berdiri sendiri.

Mengapa dalam kongres-kongres jarang sekali dilibatkan mahasiswa? Saya kira, pertanyaan itu harus ditujukan kepada Pak Hasan Alwi. Kalau saya yang dimintai pendapat, saya setuju saja mengikutsertakan mahasiswa dalam kongres seperti ini.

6. Penanya: Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Sekadar ilustrasi, tadi pembicara mengatakan bahwa banyak orang yang bertanya tentang apa itu bahasa baku. Bahasa baku dapat diartikan 'bahasa serba kaku'. Akan tetapi, mudah-mudahan bukan ini yang kita maksudkan. Sejak saya gagal menjadi presiden, penglihatan saya menjadi rabun, selain rabun, pembicaraan saya *asbun*. Jadi, kalau *asbun* mohon dimaafkan.

Tersirat dari apa yang Bapak katakan tadi, globalisasi mempunyai dampak negatif terhadap bahasa nasional kita. Dalam hal ini, yang dapat saya lihat adalah bahwa kesetiaan kita terhadap bahasa Indonesia dapat menurun karena desakan kecintaan orang kepada bahasa Inggris. Apakah penglihatan saya ini juga dilihat oleh Bapak. Artinya, ada kemungkinan memang, kecintaan kita kepada bahasa nasional menjadi menurun karena globalisasi. Kalau demikian halnya, ini merupakan hal yang amat serius. Kalau memang demikian, kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh bangsa Indonesia, terutama oleh pemimpin-pemimpinnya agar kesetiaan kepada bahasa Indonesia tidak menurun. Kalau

bahasa dilihat sebagai alat saja, barangkali menurunnya kesetiaan tidak apa-apa. Akan tetapi, bahasa Indonesia juga sebagai lambang kepribadian nasional, dan juga yang penting, alat pemersatu. Kalau alat pemersatu sudah menurun, ini mempunyai dampak yang perlu dipikirkan secara matang.

b. Jawaban:

Pak Asim, saya masih yakin bahwa dalam dunia pembangunan Indonesia seperti sekarang justru kita mencari bentuk-bentuk *link and match* agar tindakan kita lebih efektif. Kata *efektif* berpadanan dengan kata *mangkus*. Kemudian, Pak Asim mengatakan apakah pembicara ini setuju dengan pendapat beliau bahwa globalisasi itu mempunyai dampak negatif sehingga kesetiaan dapat menurun. Pendapat beliau sangat tepat. Memang, beliau ini ahli bahasa. Lalu, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan?

Sebenarnya beliau sudah tahu jawabannya. Kita ambil saja contoh pertanyaan peserta dari Universitas Hasanuddin tentang kecintaan terhadap bahasa Indonesia harus kita mulai dari keluarga. Jadi, kalau suatu kata sudah bisa diterima masyarakat, maka hendaknya kata itu kita terima sebagai pengayaan dari bahasa Indonesia. Dalam hal ini, saya sering berdiskusi dengan para pakar bahasa. Saya sering berdiskusi dengan Pak Anton mengenai hal ini. Jawabannya tidak ditemukan. Akan tetapi, pendapat yang dapat saya sampaikan untuk masalah itu memang begitu sebab bahasa Indonesia mempunyai suatu kemampuan untuk menyerap bahasa lain. Kemarin kita dengar ada bahasa Cina di dalam bahasa Indonesia, yang paling banyak bahasa Arab. Empat puluh persen dari kosakata bahasa Indonesia berasal dari bahasa Arab. Akan tetapi, 20 tahun lagi mungkin lima puluh persen bahasa Indonesia adalah bahasa Inggris. Mohon maaf. Kita boleh melihat ke belakang, boleh dongkol dengan kejadiannya, tetapi Kongres ini hendaknya melihat ke depan karena bahasa Indonesia berfungsi sebagai alat pemersatu. Jangan sampai kesetiaan kita luntur sehingga kalau bahasa itu telah menjadi bahasa resmi, maka kita harus setia dan bangga akan bahasa itu. Saya menginginkan adanya wasit dalam bahasa. Di Prancis, yang menjadi wasit adalah *Academic Française*, di sini siapa yang menjadi wasit bahasa Indonesia sehingga kata-kata (kosakata) yang memang sudah bisa diterima masyarakat hendaknya diterima. Saya tidak tahu. Misalnya *sale*, kalau saya membacanya [*sale*], tetapi kalau di televisi namanya *sale*. *Sale* berarti 'obral', 'diskon'. Bagaimana kata itu bisa diterima sebagai bahasa Indonesia? Ini bisa saya lemparkan kembali kepada para pakar sebab dengan demikian, kita tidak melawan arus globalisasi, tetapi justru kita memperkaya bahasa Indonesia.

Bagaimana prosedur pengayaan itu dalam kaidah-kaidah bahasa Indonesia, terserah kepada para pakar. Jadi, apa yang perlu dilakukan di situ oleh pemerintah? Pemerintah adalah salah satu pemakai yang mempunyai kekuasaan pembina. Akan tetapi, yang saya katakan lima sektor tadi, politik, bisnis, ekonomi, sosial budaya, serta iptek itu sama-sama mempunyai kekuasaan atau

mempunyai kemampuan untuk juga mengembangkan serta mengubah bahasa Indonesia. Lima kelompok ini dengan pemerintah bersama-sama dengan pengikut-pengikutnya yang lain melakukan pembinaan itu. Di instansi pemerintah ada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, sedangkan di masyarakat, menurut saya, mungkin ada Himpunan Pembina Bahasa Indonesia atau Masyarakat Linguistik Indonesia, yang secara *cross*, secara lintas sektoral, bisa ke komunikasi massa, bisa ke pers, bisa ke media massa, ataupun bisa ke universitas, dan sebagainya.

PERAN REI (REALESTAT INDONESIA) DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Lukman Purnomosidi
Dewan Pengurus Pusat REI

Dalam hal pembinaan bahasa Indonesia posisi kami sebagai pengembang (*developer*) memang lebih banyak dikritik. Dalam sesi pertama tadi sudah disinggung Pak Yusril tentang nama proyek realestat yang menggunakan bahasa asing. Kalau kita menilai kerancuan bahasa di bidang realestat, pada tahun 1994--1995, kami sering dikritik pakar dan semua lapisan masyarakat. Kami berpendapat bahwa apa salahnya proyek-proyek perumahan atau permukiman menggunakan nama asing karena kita berada dalam proses globalisasi dan internasionalisasi. Sebagai contoh, dahulu digunakan istilah *real estate* sekarang *realestat*, dulu digunakan istilah *developer* sekarang *pengembang*.

Hal itu dapat kita bandingkan dengan kasus seperti Pak Latief, pemandu sidang ini, di dalam kartu tanda penduduknya tercatat nama A. Latief, alamat Raffles Boulevard No. 7, Regency B RT 007 RW 02 Desa Legok, Kecamatan Cibeunying, Kabupaten Bogor. Jadi, di dalam paspor kita atau di KTP kita jati diri kita memang runyem juga. Hal itu dialami REI pada tahun 1994. Sebagai pengembang, salah satu aktivitas REI ialah berkomunikasi dengan masyarakat melalui bahasa iklan. Akan tetapi, kegiatan pengembang tidak terbatas pada pemasaran. Kegiatan kami cukup luas. Mulai pembebasan tanah kami harus berkomunikasi dengan camat, lurah, penduduk setempat, dan calo tanah dengan bahasa Indonesia yang mempunyai konteks kedaerahan. Kami cukup menguasai hal itu. Dan, di dalam perikatan jual beli tanah kami harus menguasai bahasa hukum. Kegiatan kedua, di bidang perencanaan dan pengembangan, kami juga harus bisa berbahasa Indonesia, tetapi lebih dekat dengan terminologi-terminologi teknik. Di bidang keuangan pengembang senantiasa berhubungan dengan lembaga-lembaga keuangan dalam negeri atau luar negeri sehingga kami harus bisa berbahasa asing juga. Di dalam iklan, dalam kegiatan pemasaran bahasanya telah dikemukakan rekan kami, Bu Judy Uway, dari Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), yaitu bagaimana kami harus berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasanya ialah bahasa Indonesia yang dekat dengan bahasa iklan. Itulah, antara lain, aktivitas kami sebagai pengembang di satu sisi. Di sisi lain, kami, sebagai organisasi, juga mempunyai kegiatan-kegiatan komunikasi antarpengembang secara formal. Dalam hal ini tidak ada permasalahan. Dalam melakukan kongres, musyawarah nasional atau musyawarah daerah, rapat kerja, bahkan dalam hal tata cara peraturan organisasi kami dalam setiap kongres, kami mempunyai Hymne REI dan Mars REI yang semuanya ditulis dalam bahasa Indonesia. Di dalam kegiatan-kegiatan tersebut kami tidak mengalami kendala.

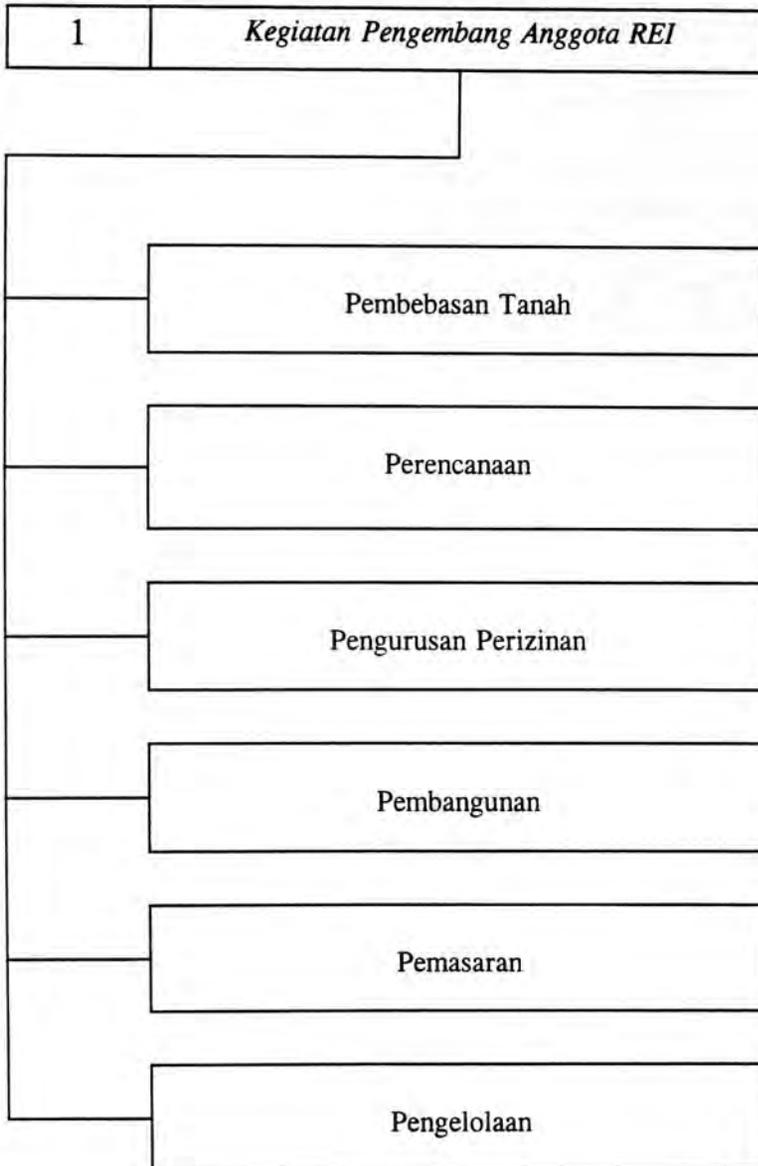
Problematika utama kami adalah masalah penggunaan nama-nama asing. Berdasarkan sejarahnya, nama-nama asing ini memang didorong oleh dua hal pokok, yaitu dorongan yang bersifat internal dan eksternal. Pada awal 1990-an perumahan menengah dan menengah ke atas sedang marak berkembang. Berbeda dengan tahun 1970-an dan 1980-an, yang berkembang adalah rumah sederhana. Akhir tahun 1980--1990 berkembang rumah-rumah menengah dan rumah mewah yang kalau kita lihat di tempat pameran, brosurnya juga amat mewah, *stand-stand* pamerannya juga bersaing semenarik mungkin, yang menjaga *stand*-nya juga demikian. Jadi, memang saat itu ada dorongan historis, dorongan para pengembang karena pasarnya juga memungkinkan untuk menjual rumah mewah dan menengah atas. Pasar rumah mewah dan rumah menengah atas berbeda dengan pasar rumah sederhana dan rumah sangat sederhana karena gaya hidupnya berbeda, daya belinya juga berbeda. Dorongan lain yang secara internal disadari pengembang untuk bisa meraih konsumen sebanyak-banyaknya adalah memahami keinginan, selera, dan harapan konsumen. Untuk keperluan itu, diciptakanlah harapan-harapan dan konsep-konsep oleh pengembang yang mengandung banyak diferensiasi, yang unik, yang mewah, yang lain, yang bergengsi, dan yang berlebih. Mengapa hal itu dilakukan? Karena kita sadari bahwa pada tahun 1980--1990-an perkembangan dunia real estat demikian pesat sehingga di dalam hal pengembang ingin menciptakan sesuatu yang baru, dicarilah sesuatu yang memang sama sekali belum ada di sini dan mulailah membuka berbagai referensi luar negeri. Karena asosiasi pengembang juga ada yang berskala internasional, sudah merupakan suatu hal yang lumrah apabila asosiasi pengembang setahun sekali mengadakan kongres semacam ini untuk mengadakan studi banding. Keadaan ekonomi kita yang mendukung saat itu memunculkan konsep-konsep diferensiasi yang diadopsi dengan mengambil pengalaman dari luar. Biasanya konsultannya pun dari luar. Pada waktu itu dolar masih sekitar Rp1.800,00--Rp2.000,00 sehingga semuanya terasa enteng, tidak seperti sekarang. Sesudah para pengembang merumuskan konsepnya, masuklah babak berikutnya, yaitu bagaimana mengomunikasikannya kepada masyarakat. Dalam hal ini kami bersinggungan dengan biro iklan, dengan profesional-profesional lain yang memang ahli di bidang komunikasi kepada masyarakat. Jadi dorongan-dorongan secara internal itulah yang membuat diadopsinya nama-nama asing supaya mempermudah komunikasi. Kalau di Amerika ada *Bell Air*, di Sentul pun ada *Bell Air*, dan lain-lain. Akhirnya, ada nama pemukiman yang sama sekali diadopsi, seperti *Beverly Tower*, dan ada yang dikombinasi, seperti *Citra Land*. Jadi, di samping adanya dorongan internal, juga dipancing oleh dorongan eksternal yang memungkinkan banyaknya istilah asing yang dipakai dan ternyata diminati masyarakat. Dalam brosur tahun 1970-an gambar rumah biasa-biasa saja, mulai tahun 1980-an brosur-brosur rumah menggunakan kertas yang mewah, fasilitasnya juga mengikuti gaya luar negeri, dan orangnya juga orang luar negeri.

Adanya dorongan internal dan eksternal itu mengakibatkan maraknya istilah asing di bidang real estat, seperti *Legend City*, *Pratama Hills*, *Bogor Lake Side*, dan *Rainbow Hills*. Akhirnya, kami menjadi risau karena makin lama kami merasa *kebablasan* dan kritikan pun datang dari berbagai lapisan masyarakat. Bahkan, kami pun merasakan bahwa kerancuan itu tidak hanya terjadi di kawasan rumah mewah, di rumah sederhana pun demikian juga karena nama rumah sederhana pun memakai bahasa yang *trend* pada saat itu. Akhirnya, kami membahasnya secara internal. Apa yang harus kami lakukan? Kami memandangnya dari kode etik karena kami memiliki kode etik Sapta Brata. Bagaimanapun kami harus melihatnya dari kerangka konstitusi organisasi. Dalam butir 7 kode etik Sapta Brata memang ada pernyataan "memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya" yang kemudian diterjemahkan di dalam peraturan organisasi dengan 'memberikan informasi yang benar, tepat, dan tidak dimanipulasi. Pada saat itu kami membahasnya secara internal dan ada dua pemikiran, yang pro dan yang kontra. Yang pro menyatakan untuk tetap menggunakan istilah asing karena dia sudah kagum akan proyeknya, seperti *Grand City*. Mereka takut kehilangan kekerenannya. Di sisi lain, akhirnya kami membuat tim dan menyepakati untuk mengadakan perubahan. Jadi, nama-nama itu harus diindonesiakan karena makin lama kita makin kehilangan jati diri kita dan suatu hal yang masih dalam perdebatan apakah kalau diganti bahasa Indonesia, gengsinya akan menurun? Pada saat itu sebagian besar konsumen dan produsen meyakini hal itu. Akhirnya, disimpulkan untuk melakukan perubahan. Pada bulan Maret 1995 Dewan Pimpinan Pusat REI bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, membuat deklarasi untuk mengadakan perubahan. Saat itu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyiapkan daftar terjemahan istilah dan REI menyiapkan hal-hal yang masih menjadi catatan yang memang harus diubah, termasuk nama organisasi kami. REI yang merupakan singkatan dari *Realestat Indonesia* (realestat ditulis serangkai), tetapi singkatannya tetap REI, bukan RI; *developer* diubah menjadi *pengembang*. Alhamdulillah momentum pada bulan Maret 1995 ini bisa didukung oleh seluruh jajaran pengurus daerah dan anggota REI sehingga kita sepakat untuk melakukan perubahan itu.

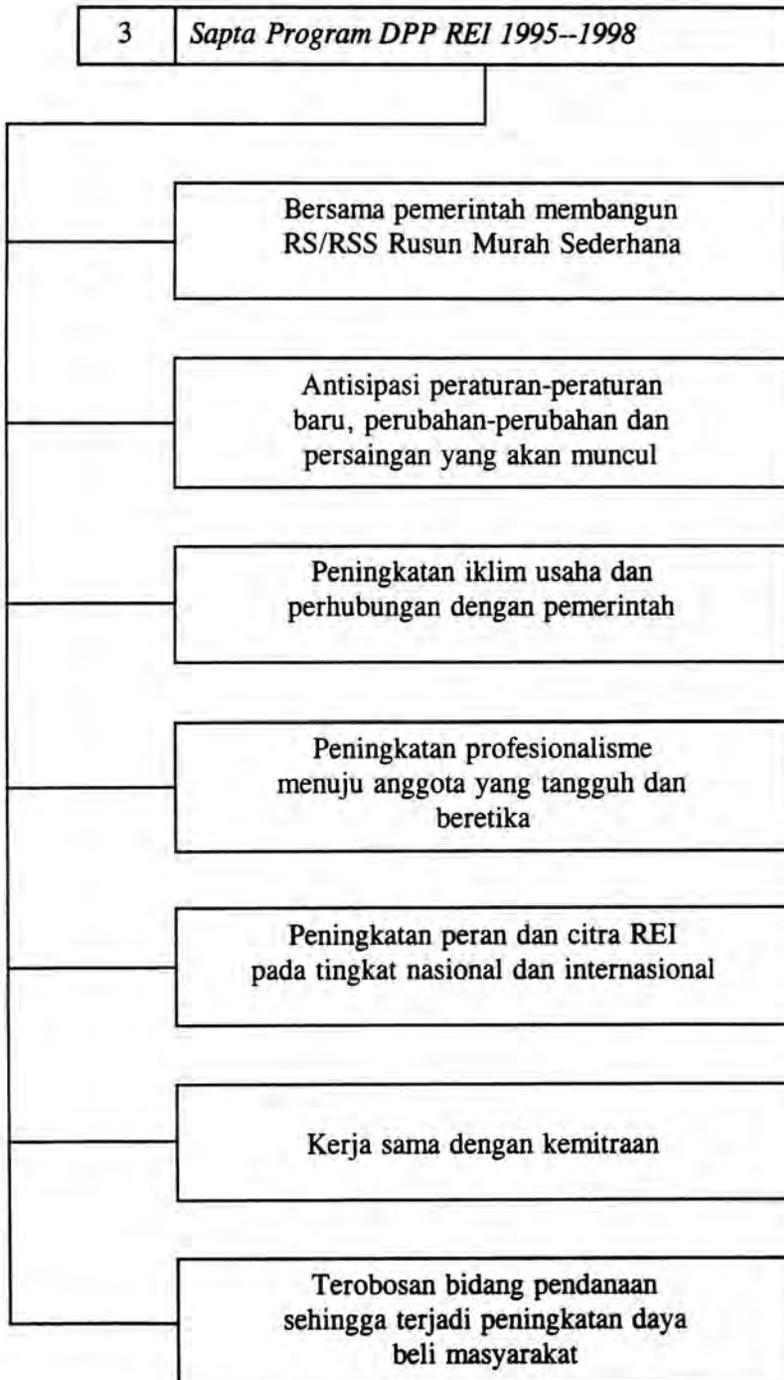
Upaya kedua, pada bulan Maret 1997 REI bekerja sama dengan Balai Pustaka membuat kesepakatan. Biasanya di tiap lokasi perumahan, kami harus menyediakan fasilitas seperti rumah ibadah, lapangan tenis, lapangan basket, kolam renang, ruang serba guna, dan sebagainya, maka saat itu REI diminta untuk menyediakan fasilitas taman bacaan atau ruang pelayanan penjualan buku (*reading corner*) di setiap kawasan perumahan. Hal itu kami sosialisasikan kepada seluruh anggota kami. Alhamdulillah sebagian sudah melaksanakannya, tetapi sebagian lagi masih terkendala beberapa aspek.

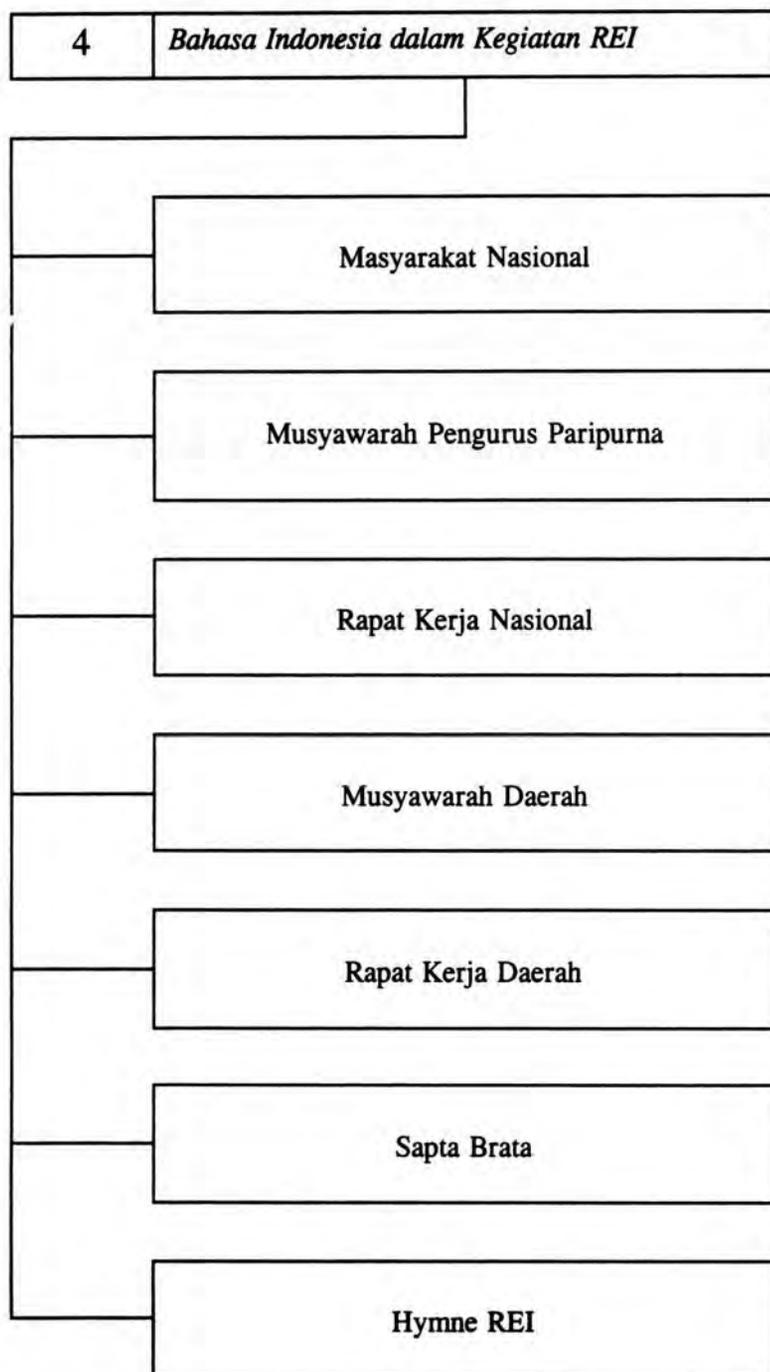
Lampiran

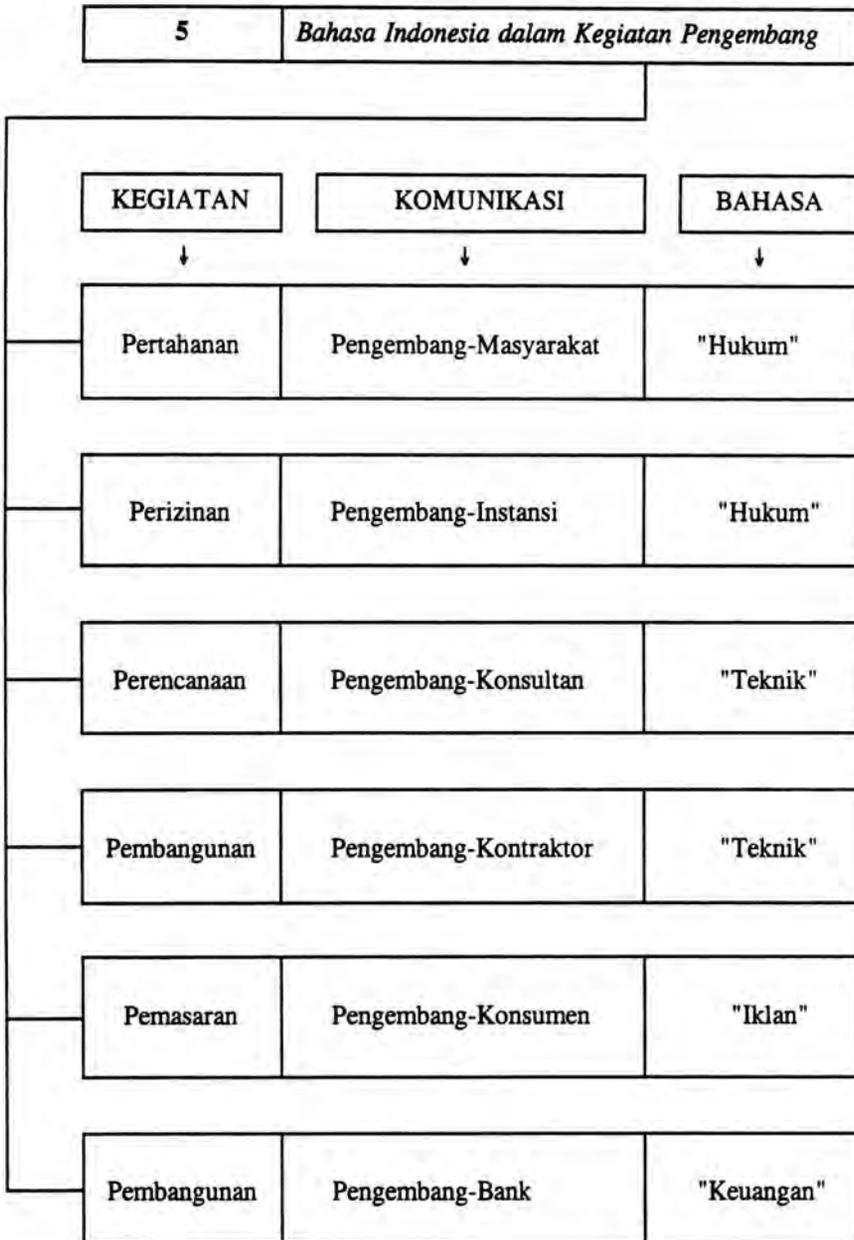
1. Kegiatan Pengembang Anggota REI
2. Kode Etik REI
3. Sapta Program DPP REI 1995--1998
4. Bahasa Indonesia dalam REI
5. Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Pengembang
6. Bahasa Indonesia dalam Kegiatan Pemasaran
7. Upaya REI dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
8. Pengindonesiaan Nama Proyek Real Estat
9. Peningkatan Pembinaan di Masa Mendatang
10. Jumlah Anggota REI yang Mendaftar

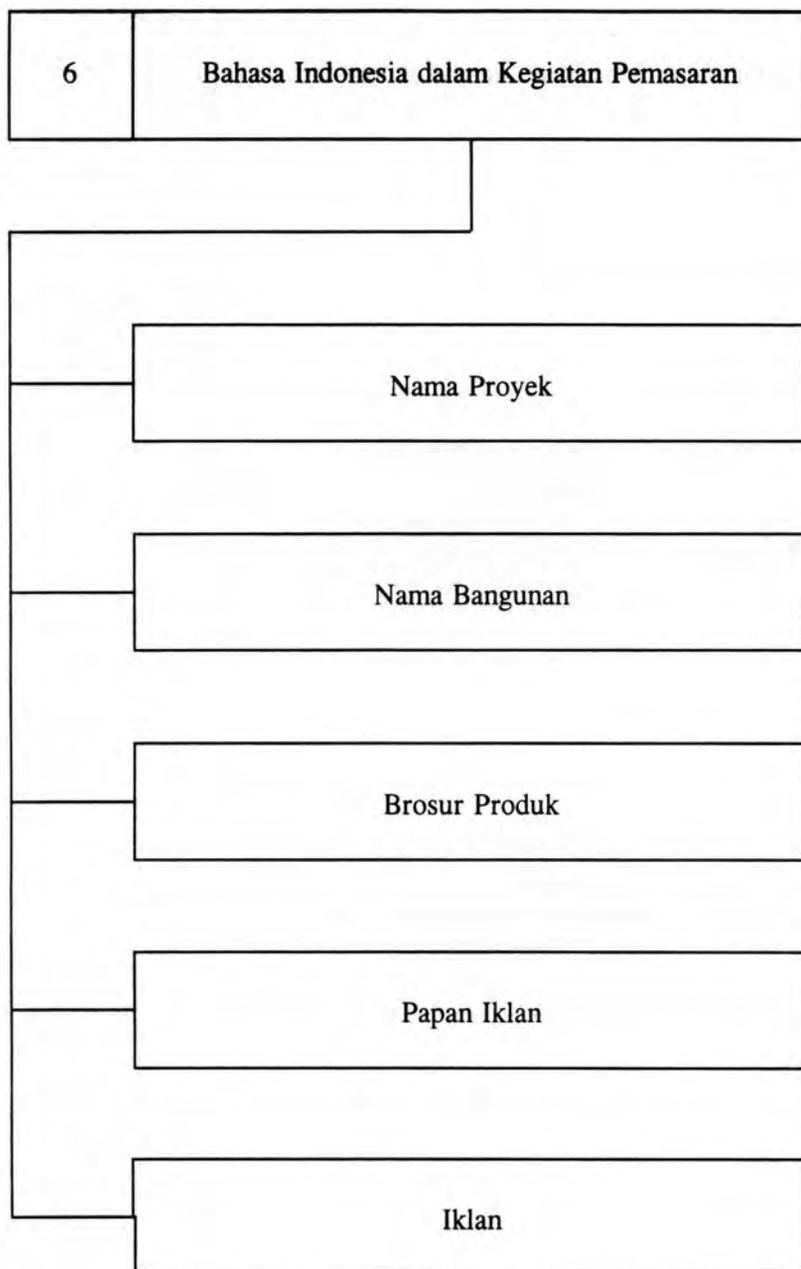


2	Kode Etik Anggota REI
	Berlandaskan Pancasila & UUD 1945
	Menaati Undang-Undang & Peraturan
	Menyelaraskan kepentingan usaha dan kepentingan pembangunan bangsa dan negara
	Bertanggung jawab menghargai profesi, menjunjung tinggi keadilan, kebenaran, dan kejujuran
	Mematuhi AD/ART REI; memegang teguh disiplin dan solidaritas
	Saling menghormati, menghargai, membantu serta menghindarkan persaingan tidak sehat
	Memberikan pelayanan pada masyarakat dengan sebaik mungkin









7

Upaya REI dalam Pembinaan Bahasa Indonesia

Kesepakatan bersama DPP REI
dengan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Tanggal 20 Maret 1995

Kesepakatan bersama DPP REI
dengan
Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka
Tanggal 3 Maret 1997

7A

*Piagam Kesepakatan
Dewan Pengurus Pusat REI dengan
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan*

Kerja sama ini bertujuan *meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar* serta *mengembangkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia* di kalangan pengusaha real estat di seluruh Indonesia yang tergabung dalam organisasi Persatuan Pengusaha Real Estat Indonesia

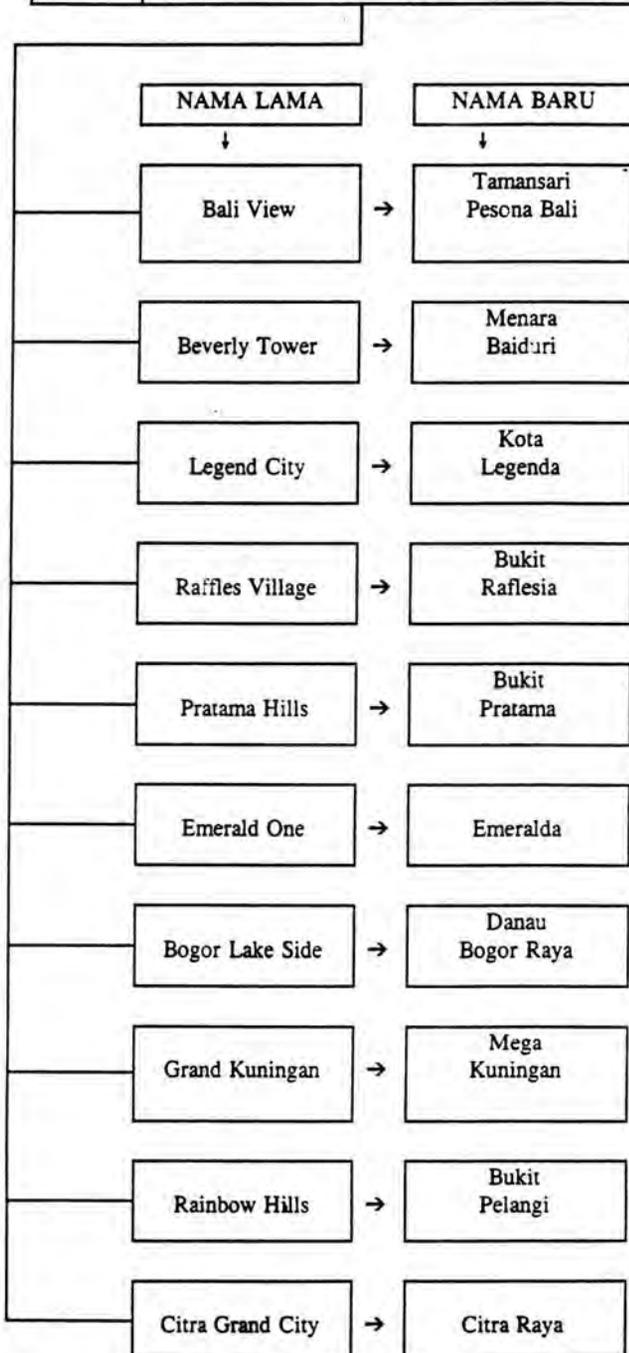
1. Program Kerja:
Meningkatkan *mutu pemakaian bahasa* di kalangan anggota REI
Mengindonesiakan kata dan istilah asing dalam bidang properti seperti yang terdapat pada nama kawasan, gedung, dan badan usaha.

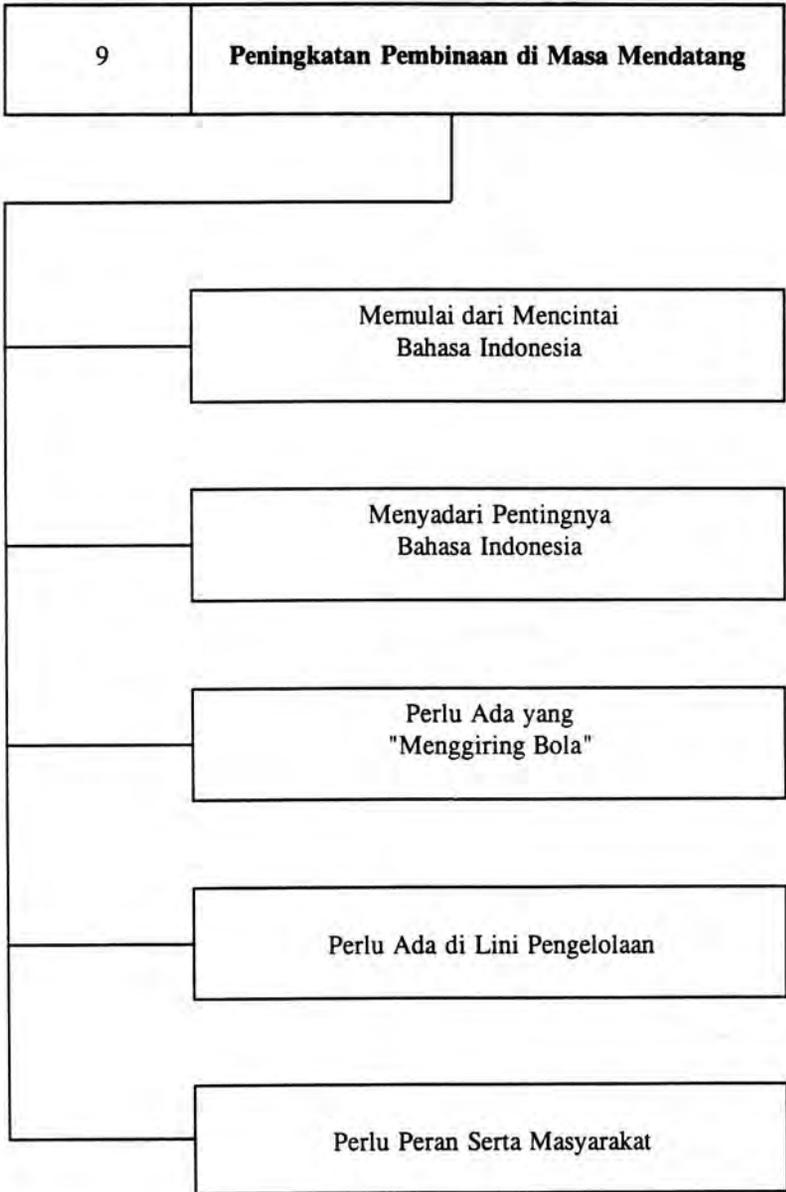
2. Sarana/Prasarana:
DPP REI dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama-sama mengupayakan tersedianya *daftar kata dan istilah* dalam bidang properti.

3. Organisasi:
Kerja sama ini dikelola oleh tim yang anggotanya mewakili REI dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
DPP REI dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membentuk dewan penyalia yang anggotanya sekurang-kurangnya mewakili DPP REI, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dan Kantor Menteri Negara Perumahan Rakyat.

7B	<p style="text-align: center;"><i>Piagam Kesepakatan Dewan Pengurus Pusat REI dengan Penerbit dan Percetakan Balai Pustaka (Persero)</i></p>
	<p>REI dan Balai Pustaka akan berusaha untuk <i>menyukseskan bulan Buku Nasional, bulan Gemar Membaca dan Bulan Bahasa dan Sastra</i> melalui <i>penyebaran buku-buku ilmu pengetahuan dan nilai-nilai luhur budaya bangsa kepada masyarakat luas khususnya melalui lingkungan pemukiman yang dibangun oleh anggota REI</i></p>
	<p>REI dan Balai Pustaka sepakat untuk melakukan koordinasi kerja baik dalam <i>menggerakkan kepedulian pengusaha real estat serta menghimpun, menghimbau, dan mengarahkan para pengembang agar dapat menyediakan taman bacaan dan ruang pelayanan penjualan buku (reading corner)</i> di kawasan perumahan masing-masing.</p>
	<p><i>Balai Pustaka akan mengisi taman bacaan</i> dimaksud dengan buku-buku bermutu baik buku umum maupun buku pelajaran sebagai bahan bacaan termasuk upaya lainnya, yaitu <i>promosi publikasi, kampanye, dan penjualan buku-buku serta penyediaan sarana pendukung dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat Indonesia</i></p>
	<p>Dengan dukungan <i>Perhimpunan Masyarakat Gemar Membaca</i> maka REI bersama-sama Balai Pustaka dapat mengembangkan kerja sama lebih lanjut dengan <i>Perpustakaan Nasional dan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)</i></p>
	<p>REI dan Balai Pustaka sepakat bahwa realisasi dari prinsip-prinsip di atas dan hal-hal lain yang belum diatur akan ditindaklanjuti kemudian oleh REI dan Balai Pustaka dalam petunjuk pelaksanaan tersendiri yang merupakan bagian dari dan menjadi satu kesatuan dengan kesepakatan ini.</p>

8	Pengindonesiaan Nama Proyek Real Estat
---	--





10	Jumlah Anggota Rei yang Mendaftar Per 30 September 1998
----	--

NO.	DPD REI	JUMLAH
1.	Daerah Khusus Ibukota Jakarta	403
2.	Jawa Barat	143
3.	Jawa Tengah	36
4.	Jawa Timur	159
5.	Sumatera Utara	33
6.	Sulawesi Selatan	69
7.	Sumatera Barat	50
8.	Kalimantar Selatan	27
9.	Kalimantan Timur	39
10.	Riau	45
11.	Daerah Istimewa Yogyakarta	37
12.	Sumatera Selatan	36
13.	Lampung	8
14.	Bali	67
15.	Sulawesi Utara	21
16.	Timor Timur	16
17.	Kalimantan Barat	27
18.	Daerah Istimewa Aceh	5
19.	Kalimantan Tengah	16
20.	Nusa Tenggara Barat	18
21.	Sulawesi Tenggara	0
22.	Sulawesi Tengah	5
23.	Irian Jaya	11
24.	Maluku	0
25.	Jambi	25
26.	Bengkulu	0
27.	Nusa Tenggara Timur	5
Jumlah		1.299

PERAN PPPI DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Judy Uway

Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia

1. PPPI dalam Industri Periklanan

Sebagai organisasi profesi, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI) sebenarnya lebih merupakan satu wadah yang menampung aspirasi perusahaan-perusahaan periklanan. PPPI juga berfungsi sebagai penyalaras yang menjaga keharmonisan hubungan kerja masyarakat atau komunitas di industri periklanan dengan segala unsur yang terkait di dalamnya. Hal itu tentu saja tidak lepas dari tujuan makro, yaitu mengambil peran dalam membangun perekonomian bangsa, mencerdaskan bangsa, dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya bangsa.

2. Pemakaian Bahasa Indonesia dalam Iklan

Jika kita berbicara mengenai dunia periklanan yang dikaitkan dengan bahasa Indonesia, akan timbul suatu dilema karena terlihat ada beberapa aspek dan kepentingan yang saling bertentangan. Pengertian *iklan* di sini adalah bentuk komunikasi yang ingin disampaikan kepada sasaran secara luas dan konsumen tertentu dari produk yang diiklankan. Karena bangsa kita tergolong heterogen, seringkali timbul masalah yang kompleks dan tidak bisa disederhanakan begitu saja.

Sasaran tadi dibagi lagi dalam kelompok-kelompok seperti pria, wanita, anak-anak; yang akan dibagi lagi berdasarkan umur, sosio-ekonomi strata, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Target itu masing-masing harus dikomunikasikan dengan cara atau istilahnya disebut 'bahasa yang berbeda-beda'. Misalnya, jika kita mengiklankan produk otomotif seperti mobil, bahasa yang dipakai akan jauh berbeda dengan iklan produk permen untuk anak-anak. Jika dilihat dari penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, iklan mobil tadi mungkin dapat memenuhi kriteria tersebut. Akan tetapi, bagaimana mungkin iklan produk permen untuk anak-anak tadi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar karena dapat dikatakan bahwa bahasa formal tersebut belum dapat dipahami oleh si anak. Bahkan, terkadang produk untuk orang dewasa pun banyak menggunakan "bahasa populer" yang biasa digunakan sehari-hari.

Harus kita akui, bahasa Indonesia memang tidak sefleksibel bahasa Inggris dalam penerapannya untuk membentuk sebuah kalimat. Misalnya, *I* yang berarti 'saya', kepada siapa pun kita berbicara, juga *you* yang hanya memiliki satu arti 'Anda', menunjuk pada orang kedua. Kita lihat bahasa Indonesia, untuk orang pertama ada *saya*, *aku*, atau dengan dialek seperti *gue*, *ane*, *kita*, sedangkan untuk menunjuk orang kedua ada *Anda*, *kamu*, atau dialek daerahnya *elu*, *ente*, *situ*, *ngana*, *sampeyan*, dan masih banyak lagi. Setiap penerapan dalam kalimat harus dilihat dengan siapa kita berbicara, di lingkungan mana, suasana apa, formal atau tidak formal. Bisa dibayangkan kompleksitas yang dihadapi dalam proses pembuatan sebuah iklan. Terjadilah suatu

dilema antara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan menggunakan bahasa iklan yang dapat menjual produk kepada konsumennya.

Seorang kreator iklan yang menciptakan konsep komunikasi keseluruhan biasanya tidak mau dibatasi kreativitasnya dengan memikirkan tata bahasa atau kosakata yang benar. Yang lebih berperan di sini adalah *copy writer* atau penulis naskahnya. Dia akan berusaha semaksimal mungkin menggunakan bahasa Indonesia yang benar, tetapi juga dapat menjual produknya. Dalam praktiknya, terjadilah 'kombinasi bahasa' atau bahkan 'bahasa baru' yang kemudian menjadi populer dan digunakan dalam bahasa sehari-hari. Misalnya, *glek aja langsung* dalam iklan obat batuk Komix tanpa menggunakan kalimat yang panjang, kita dapat memahami bahwa Komix itu praktis, tidak perlu menggunakan sendok dapat diminum langsung. Contoh lain, iklan jamu Tolak Angin memakai istilah *wes-ewes-ewes, bablas engine!*. Istilah-istilah seperti itu menjadi populer dan terkadang dipakai dalam bahasa sehari-hari.

Kompleksitas yang dihadapi seorang kreator iklan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang benar semakin bertambah dengan adanya batasan-batasan 'komersial', seperti hitungan detik untuk iklan televisi (kebanyakan hanya 30 detik) dan iklan radio (60 detik), juga keterbatasan ruang untuk iklan media cetak, seperti koran dan majalah. Bagaimana mungkin dengan hitungan detik tadi kita bisa menyampaikan sekian banyak pesan produk jika harus berpatokan kepada penggunaan bahasa Indonesia yang benar. Sungguh suatu pekerjaan yang sangat sulit!

3. Peran dan Tanggung Jawab PPPI

Sebagai organisasi profesi yang terus mengikuti perkembangan industri periklanan, PPPI merasa ikut bertanggung jawab dalam pembinaan bahasa Indonesia, dalam hal ini, yaitu penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam iklan-iklan yang dikonsumsi masyarakat luas. Apalagi kita melihat kenyataannya, iklan masih merupakan sesuatu yang relatif baru bagi masyarakat kita (dibandingkan dengan negara-negara tetangga) sehingga pengaruh iklan sangatlah besar. Masyarakat menganggap iklan adalah satu hiburan yang informatif dan kerap kali tidak terlalu benar penyerapannya. Masih banyak terlihat iklan yang menggunakan bahasa Indonesia yang terlalu vulgar atau kasar dalam menyampaikan pesan produknya. PPPI seringkali menegur atau mengimbau pembuat iklan untuk meninjau kembali atau bahkan menarik iklan-iklan yang dianggap menyimpang tadi. Akan tetapi, lebih dari itu, PPPI belum bisa bertindak lebih jauh karena memang harus ada satu dasar hukum yang kuat untuk menjatuhkan satu sanksi tertentu, apalagi jika permasalahannya hanya pemakaian bahasa saja. Selama ini yang menjadi patokan adalah tata krama dan tata cara periklanan yang mengatur segala sesuatu tentang kode etik iklan, tetapi tetap hanya sampai batas-batas tertentu.

Melihat permasalahan tersebut, PPPI mencoba mencari solusinya atau setidaknya memberikan satu motivasi kepada industri periklanan untuk tetap menghasilkan karya-karya kreatif dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bentuk konkretnya dapat kita lihat pada Citra Pariwisata. Setiap tahun masyarakat periklanan menyelenggarakan satu ajang pemberian penghargaan terhadap karya-karya iklan terbaik

untuk setiap kategori produk. Selain itu, ada penghargaan-penghargaan khusus untuk iklan-iklan dengan kriteria tertentu. Salah satunya adalah penghargaan untuk iklan berbahasa Indonesia terbaik atau biasa disebut Citra Parikrama. Penilaian yang diberikan terhadap pemenang di Citra Parikrama ini selain dilakukan oleh pakar-pakar kreatif di bidang periklanan, juga selalu menyertakan pakar-pakar bahasa Indonesia dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tanggapan yang masuk selalu sangat baik dan pemenangnya pun beragam dari tahun ke tahun, ada iklan televisi, media cetak, dan radio. Dengan penyelenggaraan Citra Parikrama inilah, PPPI dapat menunjukkan bahwa industri periklanan juga peduli dengan pembinaan bahasa Indonesia.

4. Penutup

Pembinaan bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri bangsa merupakan tanggung jawab nasional, tanggung jawab kita bersama, terutama dalam menghadapi krisis multikompleks yang sedang kita hadapi saat ini, juga menjelang era globalisasi. Peran bahasa Indonesia sebagai salah satu unsur pemersatu dan pembangun bangsa harus lebih dimantapkan lagi. Walaupun tidak dapat dipungkiri, penyelewengan dalam penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari masih sangat kental, tetapi kita jangan terus menutup mata. Mulai dari diri sendiri, lingkungan terdekat, sampai organisasi profesi harus terus meningkatkan upaya dan tekad mempertahankan keutuhan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu di tempat tertinggi, seperti termaktub dalam salah satu butir Sumpah Pemuda, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 11 (Diskusi Panel)
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 9.00--11.00
Topik	: Peran Organisasi Profesi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
Panelis	: a. Judy Uway b. Lukman Purnomosidi
Pemandu	: A. Latief
Pencatat	: a. I Wayan Sudana b. Erlis Nur Mujiningsih
Peserta	: 500 orang

Tanya Jawab

- 1. Penanya:** Iis Ristiani, STKIP Surya Kencana, Cianjur
 - a. Pertanyaan:**

Ibu Judi, mengapa PPPI tidak menyeleksi iklan anak-anak dengan memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar?
 - b. Jawaban:**

Jika iklan permen memakai bahasa Indonesia yang baik, apakah anak-anak paham dan mau membeli permen itu. Ini adalah dilema. Contoh, iklan minyak kayu putih untuk orang dewasa dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik.
- 2. Penanya:** Hamzah Mahmud, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang
 - a. Pertanyaan:**

Mengapa iklan vulgar masih muncul?
 - b. Jawaban:**

Masalah eksploitasi wanita dalam iklan-iklan menjadi perhatian khusus. Kami sudah menegur pembuat iklan yang mengeksploitasi wanita tersebut. Seharusnya, mereka sudah mengubahnya.
- 3. Penanya:** Rostina Thaib, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh
 - a. Pertanyaan:**

Bahasa iklan tidak seluruhnya dipahami masyarakat. Misalnya, kelompok kata *pancen oye* tidak dimengerti orang Aceh.
 - b. Jawaban:**

Contoh penggunaan kelompok kata *pancen oye* itu ialah iklan Oskadon. Iklan ini dimengerti oleh masyarakat karena penyampaiannya cukup baik sehingga iklan ini dapat diterima masyarakat. Apabila ada iklan yang tidak dimengerti arti

harfiahnya, bagi pembuat iklan bukan masalah, yang penting produknya laku.

4. Penanya: I Made Suastika, Universitas Udayana, Bali

a. Pertanyaan:

Ibu Judy, apakah kode etik moral dan sosial digunakan dalam pembuatan iklan? Misalnya, iklan kondom sangat berpengaruh pada anak-anak.

b. Jawaban:

PPPI sudah memiliki tata krama dan tata cara periklanan, tetapi masih banyak pembuat iklan yang melanggar aturan itu. Iklan kondom biasanya dimuat pada majalah dewasa atau ditayangkan di televisi setelah pukul 9.00 malam.

5. Penanya: Mislinatal Sya'diah, SLTP IV Kapanjen, Malang

a. Pertanyaan:

Apakah sensor iklan menunggu reaksi dari masyarakat atau PPPI menyensornya terlebih dahulu?

b. Jawaban:

Iklan, sebelum dipasarkan, harus melewati lembaga sensor. Kalau ada iklan yang tidak memenuhi syarat dapat lulus lembaga sensor, PPPI akan mengambil tindakan.

6. Penanya: Toto Suhardiyanto, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

Mengapa nama perusahaan Anda lafalnya memakai bahasa asing?

b. Jawaban:

Pemda DKI menertibkan bahwa nama perusahaan harus memakai nama Indonesia. Nama perusahaan kami dari segi pelafalan berbeda dengan nama yang terdaftar. JC dan K merupakan singkatan dari Jasa, Cipta, dan Karya.

7. Penanya: Zahra Alwi, Universitas Sriwijaya

a. Pertanyaan:

Bagaimana kalau tujuan akhir tidak hanya untuk undang-undang, tetapi ditambah dengan peningkatan mutu pemakaian bahasa Indonesia. Apakah lembaga sensor memiliki pakar bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Jika undang-undang sebagai salah satu kendala, ini merupakan faktor eksternal yang menghambat pemakaian bahasa yang baik dan benar.

8. **Penanya:** J.S. Badudu, Universitas Padjadjaran, Bandung

a. **Pertanyaan:**

Penamaan *Green Garden* adalah sesuatu yang berbahaya. Penamaan itu seharusnya *Garden Green*, urutannya dibalik. Apakah nama itu dapat diubah menjadi "Taman Hijau"?

b. **Jawaban:**

Kami peduli pada bahasa Indonesia. PPPI telah melakukan hal yang luar biasa. Misalnya, kami memberikan penghargaan Citra Pariwisata untuk iklan terbaik. Kami juga melakukan lokakarya bagi pengembang untuk membina bahasa Indonesia.

9. **Penanya:** Dea Anggraeni, Universitas Airlangga, Surabaya

a. **Pertanyaan:**

Pak Lukman, mengapa penyebaran nama perumahan dalam bahasa Indonesia belum sampai ke tipe-tipe rumah?

b. **Jawaban:**

Penyebaran nama Indonesia untuk tipe rumah menyangkut masalah waktu dan nanti tipe rumah akan memakai nama Indonesia. Yang cukup berat adalah mengganti nama perkantoran karena berhubungan dengan produk hukum.

10. **Penanya:** Fuad Abdul Hamied, IKIP Bandung

a. **Pertanyaan:**

Apakah Real Estat Indonesia merasa tertekan dengan pengubahan nama tersebut dan apakah berpengaruh pada uang? Apakah setelah namanya diubah memakai bahasa Indonesia, mutu kawasan tersebut menjadi rendah?

b. **Jawaban:**

Real Estat Indonesia merasa tertekan karena sudah mengeluarkan ongkos yang banyak. Akan tetapi, konflik tersebut dapat dibahas secara internal. Akhirnya, kami menyetujui mengubah nama-nama asing dengan nama Indonesia. Hal itu justru merupakan peluang yang baik untuk menjual. Pada awalnya ada kekhawatiran soal pemasarannya, tetapi sesudah itu terjadi, tidak berpengaruh pada pemasaran karena harga rumah dilihat berdasarkan mutu bukan nama. Akhirnya, kami ikhlas menerima ajakan itu.

11. **Penanya:** Ajip Rosidi, Sastrawan

a. **Pertanyaan:**

Pengelola perpustakaan miskin ahli bahasa? Mengapa kita takut kata-kata asing?

b. **Jawaban:**

Tidak relevan pertanyaannya.

12. **Penanya:** Ratna, IKIP Bandung

a. **Pertanyaan:**

Real Estat Indonesia dan PPPI tidak menghargai orang bahasa.

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis).

13. **Penanya:** Asim Gunarwan, Universitas Indonesia, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Sejak tadi Pak Purnomosidi tidak memakai kata *saya*, tetapi memakai kata *kami*, maksudnya apa?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis).

PERAN HPBI DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Andi Mappi Sammeng
Ketua Umum HPBI

1. Pengantar

Organisasi profesi merupakan himpunan orang-orang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan minat dalam bidang tertentu. Organisasi profesi, antara lain, mempunyai misi mengamalkan profesinya itu untuk kemaslahatan umat.

Sebagai salah satu organisasi profesi, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) menghimpun orang-orang yang memiliki keahlian, keterampilan, dan minat dalam dunia pembinaan, pengajaran, penelitian, serta penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia. Pembinaan bahasa Indonesia dilakukan agar tercapai pemakaian bahasa yang cermat, tepat, dan efisien dalam komunikasi. Pembinaan bahasa Indonesia sebenarnya tidak hanya menjadi tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi juga menjadi tugas seluruh masyarakat yang peduli terhadap bahasanya. Jika pembinaan hanya menggantungkan diri pada instansi pemerintah, tujuan pembinaan akan kurang bermakna. Sehubungan dengan itu, HPBI merasa berkewajiban turut serta dalam usaha pembinaan bahasa Indonesia. Arah pembinaan bahasa ada dua macam, yaitu secara vertikal dan horizontal. Sasaran arah vertikal adalah generasi muda atau generasi penerus, sedangkan arah horizontal adalah generasi sekarang. Pembinaan terhadap masyarakat sekarang diutamakan pada pembinaan ragam bahasa tulis karena merekalah yang akan mewariskan pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar kepada generasi penerus. Jika generasi sekarang atau para orang tua memiliki pemahaman dan wawasan kebahasaan yang baik, pembinaan terhadap generasi berikutnya akan lebih mudah dilaksanakan. Biasanya generasi muda cenderung melihat bagaimana para orang tua berbahasa. Dia lebih suka meniru sesuatu yang sering didengar dan dilihatnya.

Pemahaman terhadap pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar harus disertai penguasaan seperangkat kaidah yang berupa ejaan, kata/istilah, dan tata bahasa. Setiap penutur mestilah memedomani perangkat pembinaan itu agar tujuan mulia pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat terwujud.

Keprofesionalan HPBI tertantang untuk dapat berperan serta dalam meningkatkan kemampuan dan sikap penutur dalam penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, baik arah vertikal maupun arah horizontal. Berbagai upaya telah dan akan dilakukan untuk mewujudkan pesan-pesan itu. Upaya-upaya yang telah dan akan terus dilakukan itu, antara lain, adalah (1) pertemuan kebahasaan dan kesastraan, (2) gerakan kesadaran tertib berbahasa Indonesia di tempat umum, (3) pemasyarakatan bahasa Indonesia, (4) penyediaan sarana pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan (5) beberapa asumsi yang melandasi pemasyarakatan bahasa.

2. Pertemuan Kebahasaan dan Kesastraan

Peran serta dalam peningkatan kemampuan dan sikap penutur dalam penggunaan

bahasa Indonesia tersebut, antara lain, terwujud melalui penyelenggaraan seminar, diskusi, atau temu wicara. Sejak 1991 HPBI telah menyelenggarakan berbagai seminar, baik yang dilaksanakan oleh Pengurus Pusat maupun Pengurus Cabang. Seminar yang diselenggarakan setiap tahun itu ternyata mendapat sambutan besar dari para peminat bahasa yang datang dari berbagai penjuru daerah. Keantusiasan peminat bahasa tersebut mendorong HPBI untuk menjadikan kegiatan itu sebagai salah satu agenda rutin tahunan. Tema-tema yang diangkat dalam setiap seminar pun selalu disesuaikan dengan permasalahan yang aktual. Sebagai contoh, karena masyarakat Indonesia sedang menyiapkan diri memasuki pasar bebas, tema seminar tahun 1997 di Medan adalah "Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Pasar Bebas" dan karena tahun 1998 ditetapkan oleh Pemerintah sebagai tahun seni dan budaya, tema yang diangkat dalam seminar nasional yang diselenggarakan di Semarang juga disesuaikan, yaitu "Bahasa dan Sastra Indonesia sebagai Pesona Seni dan Budaya dalam Pariwisata Indonesia."

3. Gerakan Kesadaran Tertib Berbahasa Indonesia di Tempat Umum

HPBI sangat peduli terhadap penggunaan bahasa Indonesia, termasuk di tempat-tempat umum. Sebagai perwujudan dari kepedulian itu, anggota HPBI turut serta dalam upaya mengoreksi penggunaan bahasa Indonesia di tempat-tempat umum, seperti papan nama, papan iklan, dan papan petunjuk. Mereka dilibatkan secara aktif bersama tim gabungan dari Pemda DKI dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. HPBI menyadari bahwa tempat umum merupakan wajah dari suatu komunitas sehingga harus mencerminkan budayanya. Merebaknya penggunaan nama dalam bahasa asing, jika tidak dibenahi, akan mempengaruhi nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Oleh karena itu, papan nama, papan reklame, dan papan petunjuk harus mendahulukan bahasa Indonesia di atas bahasa lainnya. Dalam upaya gerakan kesadaran itu, HPBI juga telah melakukan penyuluhan bahasa di kalangan PHRI dan Kanwil Pariwisata di beberapa kota besar, seperti Denpasar, Ujung Pandang, Lampung, dan Semarang.

4. Pemasyarakatan Bahasa Indonesia

a. Pemasangan Poster dan Kain Rentang

Pemasyarakatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat juga dilakukan dengan menggelar poster dan kain rentang yang berisi imbauan, ajakan, dan seruan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Poster dan kain rentang itu dapat dipasang di tempat-tempat yang strategis.

b. Penayangan Slogan tentang Sikap dan Penggunaan Bahasa Indonesia di Media Elektronik

HPBI berpendapat bahwa imbauan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar juga dapat dilakukan melalui media elektronik, seperti televisi dan radio. Dengan media elektronik, segala informasi akan sangat cepat menyebar ke penjuru daerah. Oleh karena itu, media elektronik itu merupakan sarana yang sangat efektif untuk memasyarakatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu. Untuk maksud itu,

HPBI membina kerja sama dengan radio, televisi (baik TVRI maupun TV swasta), dan media cetak untuk meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada ketiga jenis media massa itu.

5. Penyediaan Sarana Pemasarakatan Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar

Dalam upaya mempercepat pemasarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar diperlukan suatu sarana. Sehubungan dengan itu, HPBI berusaha menerbitkan sarana itu, seperti majalah, lembar komunikasi, dan selebaran.

6. Beberapa Asumsi yang Melandasi Pemasarakatan Bahasa

Sebagai organisasi profesi, HPBI menempatkan pemasarakatan bahasa Indonesia itu ke dalam kegiatan yang berkesinambungan. Pemasarakatan itu dilandasi oleh beberapa asumsi, antara lain, seperti berikut ini.

Keyakinan masyarakat bahwa "peningkatan kualitas penggunaan bahasa Indonesia merupakan pendukung citra bangsa" perlu ditegaskan kembali. Di samping itu, pemasarakatan bahasa Indonesia di sekolah dasar sangat strategis. Berkenaan dengan itu, kepercayaan diri serta pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia bagi para guru sekolah dasar perlu ditingkatkan.

Pemasarakatan bahasa melalui jalur sekolah sejak sekolah dasar, sekolah menengah, sampai pendidikan tinggi harus terus dilakukan, sedangkan pemasarakatan bahasa Indonesia melalui jalur luar sekolah dilaksanakan dari lapisan bawah hingga lapisan atas. Di samping itu, surat kabar juga merupakan sarana yang penting untuk pembinaan bahasa.

Dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia itu banyak dijumpai hambatan. Namun, hambatan tersebut harus menjadi tantangan bagi HPBI untuk dapat diatasi dengan baik. Hambatan-hambatan itu, antara lain, adalah (a) keanekaragaman bahasa ibu penutur, (b) tingkat keniraksaraan yang masih tinggi, (c) langkanya penutur anutan, (d) kurangnya motivasi, dan (e) adanya anggapan sementara penutur bahwa bahasa asing lebih bergengsi daripada bahasa Indonesia. Oleh karena itu, HPBI berkeyakinan bahwa pemasarakatan penggunaan bahasa yang baik dan benar akan dapat tercapai jika seluruh komponen masyarakat berperan serta di dalamnya. Tanpa adanya keikutsertaan masyarakat, upaya apa pun untuk menjadikan bahasa Indonesia berada pada tingkat yang terhormat akan mengalami kesulitan. Dengan menyadari perlunya peran serta seluruh komponen masyarakat tersebut, HPBI, sebagai organisasi profesi yang berkaitan langsung dengan masalah kebahasaan, merasa terpanggil. Keterlibatan HPBI dalam pemasarakatan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar akan terus berlanjut sampai kapan pun.

Daftar Pustaka

Ali, Novel. 1998. "Pemasarakatan Bahasa Indonesia dalam Pengembangan Seni dan Pariwisata (lewat Proses Komunikasi di Era Reformasi)." Makalah Seminar

Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia 21--23 Juli 1998 di Semarang.

Jumariam, Meity Taqdir Qodratillah, dan C. Ruddyanto. 1995. *Pedoman Pengindonesiaan Nama dan Kata Asing*. Jakarta: Balai Pustaka.

Sammeng, Andi Mappi. 1997. "Peningkatan Peran Bahasa Indonesia di Dunia Internasional." Makalah Seminar Nasional HPBI 7--9 Juli 1997 di Medan.

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

PEMANFAATAN ORGANISASI PROFESI KEBAHASAAN DALAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BAHASA INDONESIA

Multamia R.M.T. Lauder
Masyarakat Linguistik Indonesia

1. Pembuka

Kebijakan pembinaan dan pengembangan bahasa¹⁾ dalam GBHN diberi garis haluan sebagai berikut.

"Pembinaan dan Pengembangan bahasa Indonesia perlu terus ditingkatkan, serta penggunaannya secara baik, benar, dan penuh kebanggaan perlu makin dimasyarakatkan sehingga menjadi wahana komunikasi sosial dan ilmu pengetahuan yang mampu memperkuat persatuan dan kesatuan serta mendukung pembangunan bangsa. Di samping itu, dalam rangka memperkaya bahasa dan kesusastraan Indonesia perlu dirangsang karya-karya sastra."

"Bahasa daerah perlu terus dibina dan dilestarikan dalam rangka mengembangkan serta memperkaya perbendaharaan bahasa Indonesia dan khazanah kebudayaan nasional sebagai salah satu unsur kebudayaan bangsa. Dalam pada itu, bahasa daerah perlu terus dipelihara agar tetap mampu menjadi ungkapan budaya masyarakat yang mendukung kebinekaan budaya sebagai unsur kreativitas dan sumber kekuatan bangsa. Sejalan dengan itu, perlu ditingkatkan penelitian, pengkajian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah."

Garis haluan untuk bidang kebahasaan itu menyiratkan adanya dua kepentingan nasional yang agaknya bersifat kontradiktif. Program pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, di satu pihak, dan program pelestarian bahasa-bahasa daerah sebagai unsur kebudayaan nasional, di pihak lain. Program itu dianggap kontradiksi karena diperkirakan jika di dalam ruang gerak yang sama suatu bahasa pemersatu dikembangkan, secara tak langsung bahasa itu akan mendesak ruang gerak dan daya hidup bahasa-bahasa daerah (Lauder, 1993).

Perkiraan tersebut sekurang-kurangnya ditunjang oleh data pemakaian bahasa yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik berdasarkan Sensus Penduduk 1980 dan 1990. Sebagai contoh, penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia dalam kesehariannya pada tahun 1990 tercatat 15,07%. Pada tahun 1980, untuk hal yang sama, Biro Pusat Statistik mencatat 11,93%. Hal itu memperlihatkan adanya penyebaran bahasa Indonesia. Dengan demikian, penggunaan bahasa Indonesia, sebagai alat komunikasi sehari-hari di rumah, bertambah banyak. Sementara itu, penduduk Indonesia yang menggunakan bahasa Jawa dalam kesehariannya pada tahun 1980 tercatat 50,44%, sedangkan pada tahun 1990 tercatat 38,08%. Dengan jelas dapat dilihat bahwa pemakaian bahasa Jawa mengalami penurunan.

Kiranya, tidak berlebihan jika angka-angka itu menyiratkan adanya korelasi

antara penurunan pemakaian bahasa daerah dan peningkatan pemakaian bahasa Indonesia. Dengan sendirinya, jika bahasa-bahasa daerah ingin tetap dilestarikan dan bahasa Indonesia harus berdiri kukuh sebagai bahasa persatuan, maka diperlukan informasi dasar mengenai situasi kebahasaan yang menyeluruh di Indonesia.

Memang tidaklah mudah mengelola bahasa Indonesia' dan bahasa daerah pada saat yang sama, ditambah pula dengan adanya kecenderungan gejala penurunan pemakaian bahasa daerah yang berdampingan dengan gejala peningkatan bahasa Indonesia. Barangkali, gejala-gejala ini dapat dianggap sebagai isyarat bagi kita untuk merevungi kembali seberapa jauh bahasa daerah dan bahasa Indonesia dikelola selama ini? Akan dibawa ke manakah pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia? Langkah apakah yang sebaiknya dilakukan, membiarkan bahasa berkembang secara natural atau merencanakan arah perkembangannya?

2. Keputusan Kongres

Perlu rasanya membuka-buka lagi lembaran lama mengenai berbagai keputusan Kongres Bahasa Indonesia. Hal itu perlu dilakukan untuk melihat seberapa jauh langkah-langkah pengelolaan bahasa daerah dan bahasa Indonesia dilaksanakan.

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan berhasil dikukuhkan pada tahun 1972. Dengan demikian, pedoman itu sudah berusia 26 tahun. Agaknya, pedoman ini perlu direvisi mengingat perkembangan bahasa Indonesia begitu pesatnya². Selain itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1988, akhirnya, berhasil menyusun, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Penyusunan kedua buku itu sebetulnya merupakan Keputusan Kongres Bahasa Indonesia I tahun 1938, lima puluh tahun yang lalu.

Penunjang pembakuan bahasa Indonesia, seperti pedoman ejaan, tata bahasa, dan kamus sangat penting untuk pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mengingat pentingnya penyediaan sarana penunjang itu, mungkin ada baiknya jika ditinjau lagi semua keputusan kongres yang lalu. Kiranya perlu membuat inventarisasi tentang keputusan yang telah dilaksanakan dan keputusan-keputusan yang masih relevan dengan kondisi masa kini yang belum sempat dilaksanakan. Ada baiknya menilik lagi catatan Taryadi (1988:171--172):

"Dengan lain perkataan, orang terkesan bahwa banyak putusan kongres-kongres yang terhormat itu menguap begitu saja tanpa meninggalkan bekas. ... Orang akan bertanya bagaimana nasib putusan yang menyangkut hal-hal berikut ini: pengadaan perpustakaan sekolah yang lengkap dan peningkatan peranannya (KBI II dan III); pengindonesiaan istilah asing pada papan nama toko/perusahaan (KBI III dan IV); pendirian jawatan penerjemah negara (KBI II), balai penerjemahan sastra untuk penerjemahan sastra dunia, daerah (KBI II); penggalakan Badan Penerjemahan Nasional demi pencerdasan rakyat (KBI III); penggiatan penerjemahan buku-buku yang bermanfaat bagi berbagai bidang (KBI IV); perundangan-undangan untuk mengatur penggunaan kemahiran berbahasa Indonesia sebagai salah satu prasyarat keprofesian dan kepegawaian (KBI III dan IV); penggalakan penulisan buku keahlian disertai penghargaan (KBI II); penggiatan penulisan buku yang bermanfaat

di pelbagai bidang (KBI IV); pengutamaan keterampilan mengarang (KBI III); penyebarluasan dan pemanfaatan hasil penelitian kebahasaan dan pengajaran (KBI IV). Barangkali bisa disepakati pengamatan bahwa selama ini belum banyak yang dilakukan sesuai dengan putusan-putusan tersebut. Bila kita terbiasa memutuskan sesuatu dan kemudian tidak berbuat apa pun untuk melaksanakannya, maka kebiasaan demikian menjadi suatu tradisi yang tidak sehat, yaitu tradisi tekad yang kendor, sikap setengah-setengah dan keterpukauan terhadap verbalisme."

Saran Taryadi sepuluh tahun yang lalu kelihatannya masih relevan. Daftar yang diajukan oleh Taryadi dapat kita lengkapi dengan berbagai keputusan Kongres Bahasa Indonesia V dan VI yang belum sempat ditangani. Untuk melangkah ke depan dengan pesat ada baiknya beban-beban terdahulu dibereskan. Selalu ada kesempatan untuk memperbaiki kesalahan masa lampau, asalkan dikerjakan dengan sungguh-sungguh.

3. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Pekerjaan rumah bagi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1998 makin menumpuk. Setidaknya, ada tiga jenis pekerjaan yang harus ditangani, yaitu (1) keputusan kongres yang masih relevan dan belum sempat dikerjakan; (2) keputusan kongres yang telah dilaksanakan, tetapi memerlukan penilaian dan perbaikan; dan (3) keputusan kongres saat ini yang belum pernah muncul dalam keputusan kongres sebelumnya.

Semua keputusan kongres yang lalu tentunya dibuat dengan pemikiran yang matang. Dapat dikatakan bahwa hal-hal yang diputuskan dalam kongres dianggap penting untuk dilaksanakan. Dengan demikian, semua keputusan kongres yang masih relevan dengan situasi dan kondisi masa kini dianggap penting. Oleh karena itu, perlu dibuat sebuah perencanaan jangka panjang untuk menyelesaikan hutang-hutang pekerjaan dengan skala prioritas yang jelas dan langkah-langkah kegiatan yang operasional.

Kiranya, tidak mengada-ada jika dikatakan bahwa kami belum melihat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menggelar perencanaan bahasa jangka panjang yang komprehensif dan operasional, dalam hal ini, perencanaan pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia.

Secara sepintas saja, jika kita amati tema yang digelar dari satu kongres ke kongres berikutnya, tampaknya tidak ada kesinambungannya atau penahapannya. Selain itu, keputusan dari satu kongres ke kongres yang berikutnya jika disimak dengan cermat, sebagian hanyalah pengulangan. Pengulangan yang terjadi dimungkinkan karena lupa atau tidak mencermati keputusan kongres sebelumnya atau justru sengaja mengulang karena keputusan yang lalu belum sempat dilaksanakan.

Perlu disampaikan bahwa yang dimaksud dengan perencanaan bahasa di sini adalah sejenis "*blueprint*" yang dengan jelas berorientasi ke masa depan, bukan sekadar tambal sulam untuk menangani masalah masa kini dan juga sebagian untuk keperluan masa depan. Di dalam "*blueprint*" tersebut dengan jelas dijabarkan ke mana arah pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Selain itu, juga dengan jelas dijabarkan bahwa "*blueprint*" itu merupakan program jangka panjang selama 15 tahun, misalnya, kemudian jelas pula tahap-tahap pelaksanaannya, tahun

pertama diharapkan menghasilkan A, lalu tahun kedua diharapkan menghasilkan B, dan seterusnya.

Tentu saja Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa mempunyai rencana, jika tidak, mana mungkin mendapat alokasi dana dari pemerintah. Hanya saja rencana yang dibuat tidak sepenuhnya memperlihatkan adanya kesinambungan dan penahapan yang berorientasi ke masa depan. Hal itu dapat dimaklumi, mengingat tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa demikian banyaknya, tuntutan masyarakat terhadap lembaga itu juga tinggi sehingga tidaklah mengherankan jika ada beberapa kegiatan yang dikerjakan dengan ketergesa-gesaan akibat adanya keperluan mendesak dalam masyarakat.

Seberapa jauh Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah melaksanakan kegiatan yang mengarah ke pembinaan dan pengembangan bahasa daerah? Kesannya, Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah lebih memfokuskan diri pada bahasa Indonesia, sedangkan kegiatan yang berkenaan dengan bahasa daerah dilimpahkan ke berbagai balai bahasa, baik yang terdapat di Yogyakarta, Denpasar, maupun Ujung Pandang. Apakah balai bahasa yang di daerah itu, mempunyai perencanaan masing-masing atau Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah di Jakarta yang membuat rencana? Apabila tiap balai bahasa membuat perencanaan tersendiri, apakah perencanaannya berbeda-beda atau disera-gamkan? Lalu, apakah kegiatannya mencakup semua bahasa daerah yang ada di Indonesia atau lebih terfokus pada bahasa-bahasa daerah tertentu?

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, pekerjaan rumah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menumpuk. Tugas yang terletak di pundak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memang berat. Dalam hal ini, setidaknya, Masyarakat Linguistik Indonesia dapat diajak sebagai mitra kerja, untuk menggarap berbagai hal yang tidak dapat ditangani oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

4. Masyarakat Linguistik Indonesia

Ada anggapan bahwa orang-orang yang berkecimpung di bidang bahasa tidak memberikan sumbangan yang berarti bagi pembangunan bangsa. Anggapan itu muncul karena, dengan sejujurnya, sebagian besar dari anggota Masyarakat Linguistik Indonesia memang disibukkan dengan penelitian-penelitian yang bersifat mikroskopik, yaitu penelitian yang hanya dapat dimengerti dan dimanfaatkan oleh kalangan ahli bahasa saja.

Perkembangan linguistik Indonesia bergantung kepada para linguist di Indonesia. Penelitian-penelitian yang selama ini berjalan secara langsung atau taklangsung nyata-nyata memberi sumbangan bagi perkembangan linguistik Indonesia. Namun, Masyarakat Linguistik Indonesia juga mempunyai kewajiban moral untuk menyumbangkan pengetahuannya bagi kepentingan masyarakat luas bukan hanya bagi kepentingan ilmu semata. Penelitian-penelitian bahasa yang akan dilakukan sebaiknya dirancang sedemikian rupa agar dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat dalam berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia, dan pada saat yang sama dapat memberikan sumbangan bagi kemajuan ilmu. Masyarakat Linguistik Indonesia diharapkan dapat menunjukkan pada masyarakat bahwa sumbangan para anggotanya untuk pembangunan bangsa juga besar.

5. Komunikasi Elektronik

Sebagai catatan, untuk membuat perencanaan bahasa yang baik bukanlah hal yang mudah, mengingat yang harus direncanakan adalah bahasa Indonesia dan bahasa daerah serta struktur masyarakat Indonesia yang sangat majemuk. Ada baiknya, sebelum membuat perencanaan bahasa, para perencana berkomunikasi terlebih dahulu dengan berbagai negara yang sudah pernah menjalankan berbagai kegiatan di bawah payung perencanaan bahasa. Keberhasilan dan kegagalan yang mereka alami merupakan pelajaran yang amat berharga bagi kita.

Saat ini dengan mudah dapat dilakukan melalui internet dengan mengunjungi *websites* yang berkenaan dengan masalah perencanaan bahasa. Sebagai contoh, dapat dilihat beberapa *websites* yang tersedia di internet, bahkan ada beberapa *websites* yang menyediakan bahan-bahan referensi tentang perencanaan bahasa yang dapat disalin ke dalam komputer kita tanpa dipungut biaya, dan juga memungkinkan untuk berdialog dengan pakar perencanaan bahasa di seluruh dunia, tanpa harus meninggalkan Rawa-mangun.

6. Penutup

Salah satu cara untuk memanfaatkan Masyarakat Linguistik Indonesia, barangkali meminta sejumlah anggotanya untuk melakukan penelitian di bidang tertentu. Hasil penelitian itu dapat dipakai sebagai masukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar kaidah-kaidah yang "dibakukan" lebih berpijak pada data. Banyak contoh mengenai itu. Misalnya, kata *derajad* tidak boleh dipakai lagi; seharusnya *derajat*. Alasannya, konsonan akhir pada kata itu dibaca sebagai /t/; karena itu harus dituliskan sebagai /t/. Akan tetapi, rupanya hanya kata itu yang diperhatikan, tanpa melihat kata lain yang sama-sama berakhir dengan huruf *d*. Padahal, ada banyak kasus seperti itu, misalnya sebagaimana terlihat pada kata *Ahad*, *abad*, *abjad*, dan *jilid*. Juga kata-kata yang berakhir dengan bunyi /p/, antara lain, kata *sebab*, *jawab*, *lembab*, dan *bab*. Sebenarnya dalam fonologi dikenal istilah *archiphoneme* untuk menyebut konsonan tak bersuara pada akhir kata.

Andaikata Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kelak sudah membuat sebuah "*blueprint*" untuk pembinaan dan pengembangan bahasa daerah dan bahasa Indonesia, di situlah saatnya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa duduk bersama Masyarakat Linguistik Indonesia sebagai mitra kerja untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sudah jelas tujuan dan jadwalnya.

Catatan:

1. Ketetapan MPR RI No.4, MPR 1988
2. Tim peneliti FSUI-FIKUI menghadapi beberapa aturan EYD khususnya Pedoman Pengemgalan Kata yang tidak tuntas sehingga agak sulit untuk membuat *program komputerisasi pemenggalan kata*. Pada kesempatan ini, Tim FSUI-FIKUI, baru mampu memamerkan *Program Komputerisasi Pemeriksa Ejaan* yang dikemas dalam *SmartSuite 97* oleh *Lotus*.

Daftar Pustaka

- Alieva, N.F. (et al.). 1991. *Bahasa Indonesia: Deskripsi dan Teori*. Jakarta: Kanisius.
- Asmah Haji Omar. 1985. *Perancangan Bahasa dengan Rujukan Khusus kepada Perancangan Bahasa Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pelajaran Malaysia.
- , 1994. "MBIM/MABBIM sebagai Pembawa Teori dan Amalan Perancang Bahasa," dalam *Bahasawan Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono*. Jakarta: FSUI dan Intermasa.
- Bialystok, Ellen (Ed.). 1991. *Language Processing in Bilingual Children*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Edwards, John. 1994. *Multilingualism*. London: The Penguin Group.
- Lauder, Multamia R.M.T. 1993. "Pengembangan Bahasa Indonesia Melalui Penelitian," Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI, Jakarta, 28 Oktober—2 November.
- , 1995. "Komputerisasi Pemenggalan Kata dalam Bahasa Indonesia," dalam *Sewindu PELLBA*, disunting oleh Soenjono Dardjowidjojo. Jakarta: Kanisius dan Lembaga Bahasa Unika Atmajaya.
- , 1996. "Khasanah Fonem Bahasa Indonesia: Menilik Frekuensi dan Fonotaktiknya," dalam *Bahasa Nasional Kita: Dari Sumpah Pemuda ke Pesta Emas Kemerdekaan*. Bandung: Penerbit ITB.
- Masinambow, E.K.M. 1994. "Pendampingan dan Kemajemukan Bahasa di Indonesia," dalam *Bahasawan Cendekia: Seuntai Karangan untuk Anton M. Moeliono*. Jakarta: FSUI dan Intermasa.
- Moeliono, Anton M. 1985. *Pengembangan dan Pembinaan Bahasa: Ancangan Alternatif di dalam Perencanaan Bahasa*. Jakarta: Djambatan.
- Muhadjir. (et al.). 1996. *Frekuensi Kosakata Bahasa Indonesia*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Suhardi, Basuki. 1996. *Sikap Bahasa: Suatu Telaah Eksploratif atas Sekelompok Sarjana dan Mahasiswa di Jakarta*. Depok: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Taryadi, Alfons. 1988. "Upaya Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia: Sarana Penunjang Perlu Ditunjang." Dalam *Kongres Bahasa Indonesia V: Menjunjung Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Persatuan dalam Konteks Pembangunan*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Lampiran:**Websites yang berkaitan dengan language planning**

Hawai'i Council on Language Planning and Policy at Hawaii University

<http://www.ill.hawaii.edu/programs/CSLR/hclpp.html>

Language Planning Agencies and Language Management Organisations at the Dept of English Language & Literature Hong Kong Baptist University

<http://arts.hkbu.edu.hk/~bhjernudd/>

A Bibliography on Language Planning and Language Policy in China (Materials in English) at the Department of English of Lingnan College, Hong Kong.

<http://www.ln.edu.hk/~wwwaeng/bib.htm>

Centre for Bilingualism and Intercultural Studies at Trinity College Cambridge Members of Staff and MA Program

<http://www.trinity-cm.ac.uk/additional/ma/centre2.htm>

Language Planning at Geolinguistics Center of Centre Internationale de Recherche en Aménagement Linguistique, Laval University, Quebec, Canada

<http://www.ciral.ulaval.ca/geo/DEF1.html>

Language Planning at the Linguist List Website at the University of Michigan

<http://www.emich.edu/~linguist/issues/8/8-895.html>

A Brief Introduction to Language Planning with a Short Bibliography at ERIC. ED303051 Dec 88 Language Policy and Planning. ERIC Digest. Author: Robinson, David, ERIC Clearinghouse on Languages and Linguistics, Washington, D.C.

http://www.ed.gov/databases/ERIC_Digests/ed303051.html

Planning Language, Planning Inequality. Website of Berkeley University's TESL English Journal.

<http://www-writing.berkeley.edu/TESL-EJ/ej01/r.2.html>

James Crawford's Language Policy Website. Covers policy in the USA

<http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/>

Language Policy in Canada. Government Website. Office de la Langue Francais. Quebec.

<http://www.olf.gouv.qc.ca/>

Ethnologue at the Summer Institute of Linguistics, A Catalogue of More than 6,700 Languages Spoken in 228 Countries

<http://www.sil.org/ethnologue/>

Stabilizing Indigenous Languages at Northern Arizona University's Center for Excellence in Education Monograph Series. The full text is available on-line with papers by a number of authors.

<http://www.ncbe.gwu.edu/miscpubs/stabilize/>

The Conservation of Endangered Languages. Brief description of this issue at Brisbane University's Department of Philosophy

<http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/CTLL/article.html>

The Foundation for Endangered Languages. Downloadable newsletter as well as

announcements of the Foundation's activities sponsored by the Linguistics Association of Great Britain. Website at Bristol University.

<http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/CTLL/FEL/>

Language International World Directory of Sociolinguistic and Language Planning Organizations. [Book review] Francesc Dominguez, and Nuria Lopez (comps.) This directory gives guidance in the complicated world of sociolinguistic and language planning organizations, giving structural information on regional, national, provincial and community level, both public and private. Each entry gives full details, including full addresses, phone/fax numbers, Director's name, and information on the organization's activities, programs, publications, work in progress and plans for the future. "...it offers the opportunity to systematically study the question at which levels research is undertaken that relates to language planning...this directory opens up new possibilities of investigation and thus makes a genuine contribution to pursuing the unended quest of how - rather than whether - language can be planned." (Florian Coulmas, *Sociolinguistic and Language Planning Organizations*, Preface). *Language International World Directories*, No. 1 xx, 530 pp. Amsterdam: John Benjamins. US & Canada:Hb: 1 55619 740 3 US\$130; Rest of World: 90 272 1951 6 Hfl.220

<http://www.bris.ac.uk/Depts/Philosophy/CTLL/FEL/i3/iatiku34.html>

PERANAN HISKI DALAM REFORMASI SASTRA

Mursal Esten
Ketua Umum Hiski

1. Pengantar

Apakah relevan membicarakan reformasi dalam bidang sastra? "Reformasi" yang di dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) berarti 'perubahan radikal untuk suatu perbaikan', mungkinkah dilakukan dalam bidang sastra? Sedemikian parahkah kehidupan sastra Indonesia sehingga harus dilakukan reformasi, suatu perubahan yang radikal?

Pada hakikatnya kehidupan sastra ditentukan di dalam tiga wilayah. Ketiga wilayah tersebut adalah wilayah penciptaan, wilayah penikmat, dan wilayah kritik dan ilmu. Apa yang terjadi dan berlaku dalam tiga wilayah ini amat menentukan bagaimana kehidupan dan perkembangan sastra. Jika kita berbicara tentang reformasi sastra, reformasi itu akan menyangkut di dalam ketiga wilayah tersebut.

2. Wilayah Penciptaan

Wilayah penciptaan adalah wilayah para pencipta, wilayah para sastrawan. Dalam wilayah itu terjadi pergumulan kreativitas. Kemerdekaan merupakan kondisi yang amat menentukan bagi berlangsungnya proses kreatif. Akan tetapi, di samping faktor kemerdekaan atau kebebasan, faktor daya imajinasi tidak kalah pentingnya. Belum lagi faktor *kepekaan* dan kadar *intelektual*. Faktor-faktor tersebut amat berperan bagi lahirnya karya-karya sastra yang bermutu. Tak jarang karya-karya besar lahir di tengah-tengah kondisi kemerdekaan atau kebebasan (fisik) yang memprihatinkan.

Masalah pelarangan buku dan pelarangan berekspresi (pementasan teater, pembacaan puisi, pertunjukan lagu-lagu, dan lain-lain) jelas akan mengganggu berlangsungnya proses kreativitas. Akan tetapi, kelahiran karya-karya agung dan bermutu sebenarnya tidak banyak ditentukan oleh masalah-masalah seperti itu. Tradisi sastra justru hanya bisa dibentuk oleh jiwa dan batin yang merdeka. Kreativitas hanya bisa berkembang oleh ketajaman kepekaan, kemampuan intelektualitas, dan kekuatan imajinasi.

Sering juga dikeluhkan, mengapa di dalam sastra Indonesia tidak lahir karya-karya besar atau karya-karya bermutu. Sastra Indonesia, katanya, seperti "berjalan di tempat". Benarkah?

Kerinduan terhadap lahirnya karya-karya yang demikian tampaknya memang telah menjadi obsesi. Tatkala munculnya *Saman* karya Ayu Utami, serta merta karya itu mendapat pujian selangit. Padahal, karya tersebut tidaklah luar biasa. *Saman* menjadi "lain" di tengah-tengah obsesi dan kerinduan terhadap hadirnya karya-karya yang bermutu. *Saman* memang menjanjikan di tengah-tengah keluhan dan kerinduan.

Sejauh manakah tradisi dijadikan sebagai sumber penciptaan (kreativitas) oleh para sastrawan? Isu ini mengemuka pada tahun lima puluhan, tujuh puluhan, sampai tahun sembilan puluhan. Beberapa tokohnya, seperti Ajip Rosidi (1950-an) dan Abdul

Hadi W.M. (1970-an) mengaitkannya dengan kelahiran angkatan-angkatan sastra yang baru. Sejumlah sastrawan muda yang berdomisili di luar Jakarta pada awal 1990-an juga menupakan isu tentang *sastra pedalaman*. Isu-isu tersebut, isu akar budaya dan isu sastra pedalaman, cukup menarik dan masuk akal, mengingat para sastrawan Indonesia yang hidup dan dibesarkan dalam lingkungan budaya tradisi dan etnis yang masih cukup kuat. Sayangnya, isu-isu tersebut masih belum mampu melahirkan karya-karya penting dan bermutu.

3. Wilayah Penikmat

Wilayah ini adalah wilayah para apresian, orang-orang yang mampu menikmati karya-karya sastra. Konon wilayah itu hanya terdiri atas 0,01% dari penduduk Indonesia yang boleh ikut pemilu. Sekarang bisa lebih rendah lagi. Setiap kali terbit, penerbit berani menerbitkan karya sastra paling banyak 5.000 eksemplar. Sastra Indonesia menjadi "sastra yang terpencil".

Kondisi yang demikian amat memprihatinkan. Berbagai sebab dicari, berbagai usul diajukan. Salah satu sebab yang sering disorot adalah pengajaran sastra di sekolah-sekolah. Baik materi maupun metodologi pengajaran dianggap tidak mendukung terbentuknya apresiasi. Guru-guru yang mengajarkan sastra juga dianggap tidak becus. Diusulkan agar waktu yang dialokasikan di dalam kurikulum diperbanyak dan guru yang mengajarkan bahasa dan sastra dibedakan.

Kenyataan lain, buku-buku sastra menjadi amat langka. Perpustakaan sekolah hampir-hampir tak punya koleksi karya-karya sastra. Toko-toko buku yang sudah mendapatkan karya-karya sastra, jumlah dan judulnya tidak memadai. Meskipun kurikulum bagus dan guru-guru yang mengajarkan juga bagus, bukankah itu omong kosong tanpa tersedianya karya-karya sastra?

Pembinaan apresiasi sastra di sekolah pada hakikatnya adalah menyiapkan suatu masyarakat sastra di masa depan. Kelas menengah kita sekarang, yang diharapkan sebagai pembaca sastra, adalah kelas menengah yang manjadi produk dari sistem pendidikan yang kurang memberi ruang terhadap nilai budaya dan budi pekerti. Untuk membentuk kelas menengah baru yang tangguh dan berbasis budaya kuat, seyogianya pengajaran sastra untuk semua jurusan di sekolah mendapat aksentuasi.

4. Wilayah Kritik dan Ilmu

Wilayah ini amat penting, tidak saja untuk memberikan penilaian dan pengukuhan terhadap karya-karya sastra yang telah diciptakan, tetapi lebih jauh peran ilmu dan kritik sastra dapat menjembatani wilayah penciptaan dan wilayah penikmat. Kritik dan ilmu sastra bahkan mampu memberi arah terhadap perkembangan sastra.

Kritik dan teori(ilmu) sastra inilah yang juga cukup memprihatinkan di dalam kehidupan sastra Indonesia. Berdasarkan teori dan ilmu yang ada (dulu), yang namanya sastra Indonesia itu dimulai dari sebuah karya saduran dari Belanda, yakni *Si Jamin dan Si Johan*, dalam bidang fiksi, dan puisi-puisi berbentuk *soneta*, suatu bentuk puisi yang berasal dari Itali, melalui Belanda. Tradisi sastra yang demikianlah kemudian yang dilanjutkan di dalam kehidupan sastra modern Indonesia, suatu tradisi

yang membarat. Dengan demikian, sejak semula kritik sastra Indonesia adalah kritik sastra yang *salah kaprah*. Pasti sudah banyak karya yang tidak muncul ke permukaan akibat teori dan kritik yang salah kaprah itu. Atau, sastrawan enggan menulis karena nanti akan dianggap karyanya itu bukan sastra.

Diharapkan di dalam wilayah ini para akademisi sastra bisa lebih banyak berperan. Harapan itu juga muncul sewaktu para dosen sastra dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia memproklamasikan lahirnya kritik sastra *Aliran Rawamangun*. Diharapkan angin segar akan berhembus di dalam kehidupan teori dan kritik sastra di Indonesia. Akan tetapi, ternyata Aliran Rawamangun tidak banyak melahirkan karya-karya kritik. Aliran Rawamangun kemudian tidak terdengar lagi.

Tahun 1988 sepuluh tahun yang lalu, di Universitas Bung Hatta Padang, diselenggarakan seminar dengan topik *Menjelang Teori dan Kritik Susastra yang Relevan*. Sejumlah pakar dan kritikus sastra seperti Subagio Sastrowardoyo, Umar Junus, Umar Kayam, M.S. Hutagalung, Muhammad Haji Saleh (dari Malaysia), Faruk, Riris Sarumpaet, Achadiati Ikram, Budi Darma, dan Rachmat Djoko Pradopo, bicara dalam forum itu. Kelihatannya hampir semua pakar dan kritikus tersebut merasa perlu mencari suatu teori dan kritik sastra yang relevan dengan sastra Indonesia. Akan tetapi, teori dan kritik sastra yang dimaksud tidak juga kunjung terwujud di dalam praktik.

Para akademisi sastra lebih banyak bicara tentang berbagai teori sastra (Barat). Berbagai teori dicoba untuk diterapkan ke dalam karya-karya sastra Indonesia. Malahan, karya-karya dijadikan ajang untuk menguji kebenaran teori, bukan sebaliknya.

Kembali kepada pertanyaan di awal tulisan ini: apakah relevan membicarakan reformasi dalam bidang sastra? Saya kira cukup relevan untuk melihat kembali "kebijakan" yang telah dianut selama ini dalam kehidupan sastra Indonesia. Sebagaimana politik bahasa yang dimiliki bahasa Indonesia, sastra Indonesia juga memerlukan *politik sastra* yang dapat memberi arah terhadap kebijakan dan usaha-usaha yang dilakukan di dalam tiga wilayah kehidupan sastra Indonesia. Kondisi yang terjadi di dalam tiga wilayah sastra, sebagaimana yang telah dikemukakan, mengisyaratkan bahwa reformasi harus dilakukan, suatu perubahan yang radikal. Tentu saja perubahan itu bisa bertahap dan "konstitusional", dalam arti dilakukan secara konseptual, kultural, dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

5. Langkah-Langkah

Langkah-langkah yang dilakukan untuk menyehatkan kehidupan sastra Indonesia adalah sebagai berikut. *Pertama*, disediakannya karya-karya sastra yang bermutu dalam jumlah yang memadai di perpustakaan-perpustakaan, baik perpustakaan sekolah maupun umum. Jika dilakukan sekaligus, hal itu tentu akan memerlukan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, harus dilakukan bertahap. Untuk setiap tahap bisa dipilih dua atau tiga judul dalam jumlah ratusan ribu eksemplar. Pemilihan judul dilakukan oleh sebuah tim (dewan) yang berwibawa.

Kedua, ditetapkannya suatu kebijakan baru bagi pengajaran sastra. Kebijakan itu akan menyangkut kurikulum, metodologi, dan guru-guru. *Ketiga*, disediakannya

buku-buku kritik yang bersifat apresiatif, yang membicarakan karya-karya sastra yang bermutu. Buku-buku kritik yang demikian dapat menjadi arahan dan pegangan dalam menikmati karya-karya sastra yang ada. *Keempat*, dirumuskannya suatu teori dan kritik sastra yang relevan dengan sastra Indonesia. Mungkin harus ada seminar dan sejumlah kegiatan lokakarya dan bengkel untuk membahas dan mengaplikasikannya.

Kelima, lahirnya karya-karya sastra yang agung dan bermutu haruslah tetap dijadikan obsesi. Tanpa kehadiran karya-karya yang demikian, sastra Indonesia tetap akan "jalan di tempat". Sastrawan haruslah menjadi besar dan terkenal oleh karyanya itu, bukan oleh kemampuannya menjadi orator atau aktor.

Keenam, jika bahasa Indonesia telah memiliki politik bahasa nasional, sastra Indonesia seyogianya juga perlu memiliki politik sastra Indonesia, yang berisi visi dan konsep tentang sastra Indonesia.

6. Peranan Hiski

Bagaimana peranan yang bisa diambil oleh Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (HISKI) dalam mewujudkan usaha-usaha dan langkah-langkah yang diupayakan? Kemungkinan peran itu adalah sebagai berikut.

Pertama, sarjana-sarjana kesusastraan seyogianya selalu berupaya merumuskan teori (sastra) yang berakar dari kehidupan sastra Indonesia. Kehadiran teori-teori tersebut akan menyebabkan kehidupan sastra Indonesia menjadi lebih sehat dan sekaligus juga karya-karya yang diciptakan menjadi lebih berakar.

Kedua, sarjana-sarjana kesusastraan harus bersedia dan mampu menjadi jembatan antara wilayah penciptaan dan wilayah penikmat. Hiski hendaknya bisa menyiapkan buku-buku *kritik apresiatif* yang dapat membantu terbinanya apresiasi sastra di kalangan masyarakat. Buku-buku tersebut juga akan amat dirasakan manfaatnya di dalam proses pengajaran di sekolah-sekolah.

Ketiga, Hiski sebagai organisasi profesi dalam bidang sastra seyogianya juga memberi masukan secara ilmiah dan juga bisa dilibatkan dalam setiap kebijakan oleh lembaga-lembaga seperti Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Direktorat Jenderal Dikdasmen, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Pusat Perbukuan, Balai Pustaka, dan lembaga-lembaga lainnya yang berhubungan dengan sastra dan perbukuan.

Keempat, Hiski hendaknya juga berperan mendorong dan menumbuhkan kantong-kantong budaya di berbagai daerah di Nusantara, terutama dalam bidang sastra. Hiski dengan kehadiran anggota-anggotanya di daerah dapat mendorong berlangsungnya proses desentralisasi kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Pleno 9 (Diskusi Panel)
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 12.15--13.30
Topik	: Pemanfaatan Organisasi Profesi Kebahasaan dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia
Panelis	: a. Andi Mappi Sammeng b. Multamia R.M.T. Lauder c. Mursal Esten
Pemandu	: Anton M. Moeliono
Pencatat	: a. Meity T.Q. b. I Nyoman Suarjana
Peserta	: 800 orang

Tanya Jawab

Anton M. Moeliono

Saya ingin menyelenggarakan diskusi panel yang lazim dilakukan secara internasional. Artinya, panellah yang berdiskusi dan nanti saya undang partisipasi khalayak. Oleh karena itu, para anggota panel tidak akan membacakan garis besar makalahnya atau pokok-pokok isinya karena kalau begitu, kita akan menyelenggarakan satu simposium. Padahal, bukan itu maksudnya. Anggota panel akan berdiskusi antara sesamanya tentang pemanfaatan organisasi profesi kebahasaan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Saya akan mengajukan umpan diskusi yang pertama kepada Ibu Multamia. Dalam makalah, Anda menunjukkan sejumlah langkah keterlibatan Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) untuk ikut serta dalam pembinaan bahasa. Menurut Anda, apa saja yang harus Anda lakukan?

Multamia Lauder

Pertanyaan Bapak mungkin bisa dijawab sebagai berikut. Andaikata kita ingin mengoptimalkan MLI, saya rasa itu harus dilihat dari sudut yang lebih luas lagi, bukan hanya sekadar memanfaatkan ahli-ahli linguistik yang ada di MLI untuk turut mengembangkan bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah. Pertama-tama yang saya pikirkan itu adalah kalau kita ingin mengoptimalkan MLI, mungkin ada baiknya kita melakukan kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kerja samanya itu dilihat dari skala nasional. Pertama, saya inginkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu mempunyai perencanaan bahasa. Apakah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa selama ini tidak mempunyai rencana? Tentu saja punya. Yang bisa menjawab "segala persoalan yang ada dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa daerah". Mengapa kita tidak melihat ke negara tetangga kita, seperti Cina yang membuat perencanaan bahasa untuk jangka waktu yang lebih dari 50 tahun dan sekarang ternyata bahwa romanisasi aksara Cina Pigin sudah berjalan, bahasa nasional mereka Puthonghoa juga sudah berjalan. Bahasa Indonesia seharusnya juga mempunyai

perencanaan bahasa jangka panjang, sekurang-kurangnya 20 atau 30 tahun. Saya juga sangat setuju dengan pendapat Pak Anton yang menyatakan bahwa perencanaan bahasa itu harus mencakup perencanaan tentang pemerolehan bahasa, fungsi sosiolinguistik, dan pengembangan korpus bahasa. Andaikata perencanaan bahasa jangka panjang atau rencana induk ini sudah kita miliki di situlah saya rasa MLI bisa ikut serta membantu mewujudkan rencana itu. Misalnya, tahun pertama kita harus mewujudkan rencana A tahun kedua ini, dan seterusnya kita wujudkan rencana B. Di situ MLI bisa dioptimalkan.

Anton M. Moeliono

Bagaimana pendapat Pak Mursal Esten, andaikata kita terima kerangka pikiran Ibu Mia, peranan HISKI di dalam kerangka perencanaan bahasa dan susastra Indonesia itu?

Mursal Esten

Saya kira agak berbeda dengan MLI. Hiski yang sekarang begitu kuat. Di setiap provinsi Hiski diharapkan berperan lebih jauh dalam proses desentralisasi kebudayaan. Kebudayaan kita, khususnya sastra kita, hidup tidak sehat. Ada komunitas sastra di berbagai daerah, ada berbagai kelompok sastra yang tidak puas dengan legitimasi pusat, sentralisme yang berlaku di dalam kehidupan kebudayaan, maka Hiski harus berperan di dalam proses desentralisasi kebudayaan, terutama di bidang sastra untuk pengembangan sastra Indonesia di daerah-daerah dan pasti peran pemerintah daerah amat besar. Kebetulan sekarang ini, asisten-asisten III pemerintah daerah (Pemda) ada di forum ini dan saya mengimbau agar mereka berpartisipasi dalam kegiatan Hiski ini. Mereka sekarang lebih banyak berijazah S2 dan S3 dan diharapkan agar mengalokasikan dananya dalam APBD. Ini penting sekali karena kalau Pemda tidak memberikan sumbangan seperti itu, proses desentralisasi kebudayaan, khususnya proses desentralisasi sastra akan sulit terwujud. Saya kira, sastra sekarang berada di pinggir, tetapi dalam kongres ini agak ke tengah. Oleh karena itu, perlu ada politik sastra di samping politik bahasa.

Anton M. Moeliono

Apakah politik sastra bisa dipadukan dengan politik bahasa sebab pada umumnya, orang yang meneliti dunia susastra selalu merasa dianaktirikan dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Syukurlah sekarang ada lebih banyak keaktifan dalam kesusasteraan. Akan tetapi, andaikata kita yang hidup dalam masa serba terencana, artinya kita tidak mengharapkan dana berkala dari Pemda, tetapi seandainya Hiski sebagai organisasi profesi diminta peran sertanya di dalam pengembangan susastra Indonesia dan daerah secara bertahap dan berencana, Anda selaku Ketua Umum Hiski dapat menyumbangkan berbagai ide atau gagasan Anda supaya ada rencana yang terpadu.

Mursal Esten

Menurut saya, yang salah kaprah itu adalah dasar kebijakan. Kenyataannya yang ke

pinggir itu adalah sastra. Di dalam pengajaran yang ada di sekolah adalah pengajaran bahasa. Hampir tidak ada pengajaran sastra.

Anton M. Moeliono

Supaya tidak menyimpang, Anda seharusnya berbicara sebagai organisasi profesi, tidak sebagai guru.

Mursal Esten

Ingin kami tambahkan juga bahwa di dalam kurikulum diatur sedemikian rupa bahwa pengajaran sastra bukan hanya sebagai pengajaran sastra, tetapi bagian dari pengajaran yang lebih luas, yaitu pengajaran *humanity* atau pengajaran tentang kemanusiaan. Tidak semua guru bahasa Indonesia bisa mengajarkan sastra.

Anton M. Moeliono

Pak Andi, Anda bersedia mengomentari pendapat Bu Mia dan Pak Mursal karena Anda berfungsi sebagai Ketua Umum HPBI?

Andi Mappi Sammeng

Sebagai organisasi profesi, HPBI--melanjutkan keterangan teman-teman tadi--melihat dua hal, yaitu ke dalam dan ke luar. Ke dalam, sebagai organisasi profesi, organisasi ini bekerja keras untuk sungguh-sungguh menjadikan anggotanya *credible* sebagai profesional. Ke luar, kalau kita berbicara tentang pembinaan dan pengembangan bahasa, tentulah yang pertama kita pikirkan adalah siapa yang paling berpengaruh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa ini. Kami melihatnya ada tiga komponen yang berpengaruh:

- 1) aparaturnya pemerintahan, oleh sebab itu, sasaran HPBI adalah secepatnya memberikan atau melakukan komunikasi dengan instansi pemerintah, terutama yang terkait dengan komunikasi di lingkungan aparaturnya pemerintahan, yaitu Departemen Dalam Negeri dan Departemen Penerangan,
- 2) media massa, HPBI dalam memantapkan perannya untuk membina dan mengembangkan bahasa adalah bekerja sama dengan kalangan pers, seperti mengoreksi kesalahan bahasa yang dibuat oleh media massa. Oleh sebab itu, para anggota HPBI di seluruh Indonesia, tugasnya antara lain, setiap hari membaca koran, atau majalah, mendengar radio, dan menonton televisi untuk melihat ekspresi bahasa yang perlu dikoreksi di dalam media massa itu, dan
- 3) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Anton M. Moeliono

Bagaimana Anda melihat kerja sama HPBI dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa?

Andi Mappi Sammeng

Dalam kerangka itu kita harus mempunyai satu instansi, katakanlah yang legal untuk

dijadikan acuan. Dalam hal ini, kami dari HPBI sungguh-sungguh menempatkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai anutan. Oleh karena itu, segala kiprah yang dilakukan oleh HPBI, acuan utamanya adalah langkah-langkah dan standar yang sudah dibakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Akan tetapi, tidak berarti bahwa HPBI akan pasif terhadap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sendiri akan menjadi sasaran HPBI untuk diberi masukan dari anggota HPBI.

Anton M. Moeliono

Ibu Mia, tadi Pak Andi mengatakan bahwa HPBI ingin bekerja sama dan dalam karangan Anda sendiri dikatakan bahwa MLI dapat diajak bekerja sama dalam berbagai penelitian. Saya tahu bahwa dewasa ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sedang menyusun upaya atau mengembangkan pemetaan bahasa. Apakah hal itu juga berlandaskan kerja sama antara MLI dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa? Ataukah Anda diminta membantu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atas dasar perseorangan?

Multamia Lauder

Begini! Saya melihat bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa memiliki kemampuan membuat perencanaan jangka panjang. Contohnya, pemetaan bahasa daerah adalah sebuah proyek 15 tahun dan sampai sekarang berjalan dengan baik. Hanya saja tahun ini karena keadaan ekonomi menurun, kami tidak turun ke lapangan, tetapi bukan berarti proyeknya gagal, hanya ditunda. Kembali kepada perencanaan, tentunya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bisa membuat perencanaan jangka panjang juga untuk bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Saya hanya melihat bahwa rencana jangka panjang antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan kami, yang kebetulan ikut berkecimpung dalam pemetaan bahasa, rasanya dihubungi secara pribadi. Ada baiknya, memberdayakan MLI untuk masa yang akan datang, hal itu atas nama MLI. Kemudian, MLI memberi surat kepada kami. Dengan demikian, organisasinya bisa hidup. Selama ini kami pribadi dihubungi secara langsung sehingga MLI juga tidak hidup.

Anton M. Moeliono

Bagaimana komentar Pak Mursal terhadap yang terakhir ini?

Mursal Esten

Sehubungan dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, saya tahu bahwa di bidang bahasa, lembaga itu telah melahirkan karya-karya yang monumental: ada *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, ada *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Akan tetapi, di bidang sastra belum ada yang lahir. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa belum berperan banyak melahirkan karya-karya besar. Mungkin karena di Bidang Sastra, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tidak ada tokoh sekaliber Anton M. Moeliono dan Amran Halim. Kalau memang begitu, Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa harus berani juga meminta tenaga ke lembaga kami, Hiski, supaya ada juga karya-karya yang monumental, seperti kumpulan puisi, cerpen, atau novel. Itu belum dilahirkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Anton M. Moeliono

Apakah Anda mengharapkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus melahirkan karya sastra? Apakah itu memang tugasnya?

Mursal Esten

Kalau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bisa melahirkan karya monumental, seperti *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, mengapa di bidang sastra tidak?

Anton M. Moeliono

Dalam bentuk apa misalnya?

Mursal Esten

Misalnya antologi dan kritik yang berwibawa. Ada hasil penelitian kecil di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi belum berwibawa.

Anton M. Moeliono

Ada pembela dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, terutama dari Bidang Sastra, yang mengatakan bahwa di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebenarnya sudah diterbitkan antologi? Siapa yang dapat memberikan informasi?

Slamet Riyadi Ali, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Sementara ini, karya sastra yang telah lahir di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang telah diterima masyarakat adalah kumpulan cerita pendek yang disusun oleh almarhum Satyagraha Hoerip. Itu merupakan karya yang agak lumayan bagi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Anton M. Moeliono

Mungkin Pak Sitanggang dapat menjelaskan mengapa banyak orang tidak tahu hasil-hasil yang berkenaan dengan dunia susastra itu.

S.R.H. Sitanggang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Memang ada beberapa kegiatan yang apabila diterbitkan, seperti apa yang dikatakan Pak Mursal, monumental. Sekarang ini sedang disusun "Sejarah Sastra Indonesia Modern" dan sayang tidak dapat selesai tahun ini, tetapi sudah hampir selesai. Barangkali tahun depan sudah selesai. Di samping itu, kita juga sedang menyusun Buku Pintar Sastra Jawa, sebagai contoh untuk mengadakan penelitian yang lebih besar terhadap karya sastra daerah di Indonesia. Tahun depan juga sudah diprogramkan penyusunan sketsa sastra daerah untuk merangkum, meneliti, membahas segala sesuatu yang

berhubungan dengan sastra daerah. Memang kita ketahui bahwa bahasa Indonesia lebih dahulu. Ada satu lagi karya yang sedang digarap, yaitu "Ensiklopedia Sastra Indonesia Modern".

Anton M. Moeliono

Setelah Pak Mursal mendengar kegiatan yang dikembangkan di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, bagaimana reaksi Anda?

Mursal Esten

Saya tidak bisa menilai sesuatu yang *sedang* dan *akan* dikerjakan, tetapi yang sudah ada tidak cukup berwibawa. Yang punya Satyagraha Hoerip itu langkah yang bagus. Setelah itu, tidak ada lagi. Sementara itu, penulisan cerpen jalan terus. Itu berbeda sekali dengan *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia* dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jadi, kami dari bidang sastra dengan segala senang hati jika Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa meminta tenaga kami. Kalau saya sendiri, saya merasa sebagai orang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kami bersedia membantu supaya karya di bidang bahasa dan sastra berimbang.

Anton M. Moeliono

Menurut Bu Mia, apa kelemahan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam kerja samanya dengan masyarakat atau organisasi profesi dalam pemasyarakatan hasil-hasil penelitiannya?

Multamia Lauder

Kelemahan utamanya adalah karena penerbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bertumpu pada proyek. Karena penelitian di lembaga itu begitu banyaknya--sebetulnya kalau kita mau ke Perpustakaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa--banyak hal yang baik, banyak hal yang bermutu. Akan tetapi, karena itu proyek, sekali lagi, hasil penelitian itu ketika diterbitkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa ada catatan di atas "tidak boleh diperdagangkan" atau "tidak boleh diperjualbelikan". Menurut saya, mungkin sekarang waktunya--saya mohon kepada Pak Hasan Alwi--di sini bisa bernegosiasi kembali dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu apakah bisa penelitian yang demikian banyak dan demikian bagus itu jangan hanya tersimpan di gudang. Alangkah baiknya andaikata penelitian itu, baik penelitian bahasa maupun penelitian sastra, bisa dijual kepada masyarakat. Saya menganggap bahwa hal itu merupakan sesuatu yang melanggar peraturan pemerintah karena kita menggunakan uang pemerintah untuk proyek. Saat sudah menjadi hasil, kemudian dijual, lalu uangnya mau ke mana, kembali ke kas negara atau ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa? Itu katanya menjadi masalah. Saya tidak melihat bahwa hal itu menjadi masalah karena saya termasuk pelanggan setia dari Biro Pusat Statistik (BPS). BPS juga melakukan penelitian berdasarkan dana negara, tetapi PBS bisa menjual data yang kami perlukan tersebut dalam bentuk disket, buku, dan dalam bentuk grafik. Mengapa karya sastra ataupun bahasa tidak bisa?

Anton M. Moeliono

Pak Andi, bagaimana pendapat Anda?

Andi Mappi Semmeng

Saya ingin mengiyakan, mendukung Bu Mia itu dengan catatan bahwa sebenarnya perlu kesadaran dua pihak, yaitu produsen (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) dan konsumen (aparatur pemerintahan, organisasi profesi, dan masyarakat luas). Satu contoh, karya monumental yang disebut Bung Mursal itu, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (yang dirintis Prof. Anton M. Moeliono) tidak ada satu pun instansi pemerintah mengetahui bahwa ada *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dalam arti semua instansi pemerintah merasa perlu untuk mendapatkan acuan tersebut. Padahal, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* itu sekarang sudah memuat 73.000 kosakata. Bisakah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau Balai Pustaka secara proaktif mengirim surat rayuan yang manis, yang meyakinkan bahwa ada satu senjata kebahasaan dalam bentuk *Kamus Besar Bahasa Indonesia* yang dapat dimanfaatkan instansi pemerintah, tetapi harus dibayar sekian puluh ribu. Sebaliknya, organisasi profesi mengapa tidak justru membantu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk memasyarakatkan kamus itu. Saya tidak mau menyombongkan HPBI. Terus terang, pengurus HPBI membeli *Kamus Besar Bahasa Indonesia* dari Balai Pustaka dengan potongan harga. Kamus itu kami bagikan ke seluruh cabang HPBI supaya orang HPBI *credible* di dalam menjelaskan kosakata bahasa Indonesia yang sudah ada di dalam kamus. Jadi, perlu dua arah, yaitu satu arah aktif dari kita (masyarakat kebahasaan), di pihak lain, bagaimana kita bersama dengan masyarakat luas itu memanfaatkan hasil penelitian yang sangat mahal dan sangat penuh dengan jerih payah itu.

Anton M. Moeliono

Bagaimana *vox populi*, suara dari rakyat? Pak Parera, asal dalam rambu-rambu pembicaraan.

Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta

Saya ingin menyampaikan kepada ketua Hiski, mungkin saya beri tugas kepada ketua Hiski. Saya bicara di sini sebagai penulis buku untuk sekolah. Mengapa kemarin kami hanya sampai Chairil Anwar karena kalau sudah tahun-tahun ke atas, kami lalu bertanya, sastrawan mana yang harus masuk ke dalam buku sekolah. Saya kira, ini adalah tugas Hiski untuk menyampaikan bahwa inilah sastrawan yang kami anjurkan untuk masuk di sekolah. Sekarang kami tidak punya. Jadi, untuk sastrawan tahun 1960-an atau 1970-an, yang dimuat adalah menurut selera penulis. Sebaiknya, organisasi profesi itulah yang menyampaikan bahwa inilah sastrawan yang karyanya bisa dimuat di dalam buku pelajaran.

Anton M. Moeliono

Silakan yang lain!

Caca Sudarsa (mantan peneliti), Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
Tanggapan dan saran kami tujukan kepada Pak Andi Mappi Sammeng. Kegiatan puncak HPBI adalah kegiatan pertemuan yang selama ini diadakan di Jakarta atau di beberapa ibu kota provinsi. Apa yang dilakukan di dalam setiap pertemuan itu tampaknya agak rancu karena apa yang sebaiknya digarap MLI atau Hiski, digarap juga oleh HPBI. Misalnya, penelitian bahasa daerah dan penelitian sastra daerah, padahal yang menjadi titik berat HPBI adalah bagaimana kita membina para pengajar dan para penyuluh bahasa Indonesia untuk masyarakat sehingga tampaknya porsi untuk sastra dan penelitian bahasa daerah itu tidak kurang jika dibandingkan dengan tujuan utamanya, yaitu penelitian tentang sampai sejauh mana hasil pembinaan bahasa Indonesia, khususnya oleh anggota HPBI untuk masyarakat. Sampai saat ini tampaknya hal itu belum ada. Kemudian, usul pada MLI dan Hiski. Setiap ada pertemuan MLI dan Hiski tolong agak dibuka sedikit pintu untuk profesi yang lain. Jadi, jangan hanya dimonopoli oleh para linguis dan para sastrawan atau para peminatnya. Mudah-mudahan undang-undang monopoli bisa selesai dan dapat diterapkan juga untuk organisasi profesi.

Anton M. Moeliono

Yang Anda maksudkan dengan organisasi profesi yang lain itu siapa saja?

Caca Sudarsa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Profesi, antara lain para sastrawan, para pengajar sastra, para pengajar linguistik, sedangkan profesi lain di luar linguistik dan sastra tampaknya tidak ada yang mendapat kesempatan.

Anton M. Moeliono

Saya kira ini adalah usul yang baik. Bagaimana tanggapan masing-masing? Adakah kesepakatan antara Hiski, MLI, dan HPBI untuk membagi ladang kegiatan supaya tidak terjadi tumpang tindih?

Mursal Esten

Secara organisatoris, hal itu mungkin. Namun, untuk perseorangan, anggota Hiski itu memiliki dua kartu, satu kartu anggota Hiski dan satu lagi HPBI, bahkan mungkin satu lagi kartu MLI. Semua kita beri tempat, tidak ada yang dikatakan bahwa anggota HPBI tidak boleh masuk ke sini. Tidak begitu. Banyak juga anggota HPBI masuk Hiski dan sering menjadi pemakalah di bidang sastra. Itu untuk Pak Caca Sudarsa. Jadi, tidak ada tumpang tindih dan tidak perlu ada pikiran ke arah itu.

Anton M. Moeliono

Akan tetapi, jawab Pak Mursal itu jawaban secara pribadi. Kita di sini berbicara sebagai wakil organisasi profesi. Bahwa saya anggota MLI, HPBI, dan Hiski itu tidak dapat diingkari. Akan tetapi, yang perlu ditanggapi adalah usul Pak Caca. Jadi, benar, saya kira, harus diadakan bagi kerja dan bagi fungsi.

Mursal Esten

Khusus untuk itu, saya kira, kalau kita lakukan justru akan membelenggu, membatasi kegiatan yang bersangkutan. HPBI ini lahannya, Hiski itu lahannya, yang satu tidak boleh masuk ke lahan yang lain. Itu bukan pendapat pribadi, tetapi kenyataan bahwa seorang anggota HPBI bisa saja menjadi pemakalah atau peneliti di bidang sastra. Bukan pendapat Mursal pribadi, Pak.

Anton M. Moeliono

Bu Mia, Anda sependapat?

Multamia Lauder

Ya, tetapi tidak sepenuhnya. Secara pribadi, saya bisa mengajukan makalah di Hiski, misalnya saya menggarap sebuah novel dari melihat, misalnya, kata sapaan yang ada pada novel itu. Jadi, saya menelaahnya dari segi linguistik. Atau, saya menelitinya apakah dalam novel itu digunakan kata yang baku pada saat yang tepat atau pada situasi formal. Terus terang, kalau menjawab pertanyaan Pak Anton, apakah ada kesepakatan atau apakah MLI, sebagai organisasi, sudah pernah bertemu dengan HPBI dan Hiski duduk bersama, lalu membicarakan bagaimana tugas masing-masing sebagai organisasi profesi untuk membantu membina dan mengembangkan bahasa Indonesia? Harus kita akui bahwa hal itu belum pernah. Akan tetapi, bukan berarti kita berhenti di sini. Tentu, sekarang kita harus bisa melakukan itu. Selama ini yang ada di benak kami, hanya secara umum, yaitu Hiski cenderung sastra, sedangkan HPBI cenderung ke masalah pembinaan, dan MLI lebih mengarah ke penelitian. Itu baru secara umum dan terus terang, kami belum pernah membicarakannya bersama.

Anton M. Moeliono

Justru karena Bu Mia mengusulkan kita harus bekerja secara berencana, entah itu 5 tahun, 10 tahun, mungkin Kongres ini boleh merupakan titik awal dalam mengadakan kesepakatan untuk bertemu dalam jangka waktu dekat, antara Hiski, HPBI, dan MLI. Pak Andi, Anda saya beri kesempatan sekarang.

Andi Mappi Semmeng

Sebagai orang yang baru berkecimpung di HPBI, kira-kira lima atau tujuh tahun, saya mendapat penjelasan bahwa organisasi kebahasaan yang tertua adalah HPBI, dimulai dengan nama Ikatan Guru Bahasa Indonesia (1974) lalu menjadi HPBI. Kemudian, muncul MLI dan Hiski. Oleh karena itu, selain mempunyai program tersendiri, HPBI selalu mengaitkan programnya dengan program nasional. Dalam kesempatan Kongres ini, HPBI turut menyelenggarakan Munas HPBI. Tadi malam baru berakhir, dan salah satu rumusan Munas adalah secepatnya mengadakan konsolidasi dengan MLI dan Hiski untuk bersama-sama memperjelas bidang kerja. Kemudian, atas bidang kerja itu, masing-masing menekuni, tetapi tetap berinteraksi. Secara umum, kita melihat dan sepakat, memang HPBI ini lebih banyak mengarah kepada aplikasi, pengajaran, dan pengoreksian penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar, sedangkan MLI lebih

kita harapkan pada segi penelitian sehingga hasil penelitian itu dapat dimasyarakatkan oleh HPBI, begitu juga dengan sastra. Akan tetapi, ini belum resmi dilakukan musyawarah antara ketiga kelompok ini. Khusus Pak Caca, mungkin karena HPBI, tadi disebutkan Pak Alwi Dahlan bahwa bahasa Indonesia mendapat tekanan dari dalam dan dari luar, merasa betul-betul perlu segala macamnya diselesaikan. Mungkin karena begitu tinggi semangatnya lalu seminar yang barangkali Anda ikuti selalu seolah-olah rancu bahwa *kok* HPBI juga menyeminarkan sastra dan linguistik. Bagi kami, yang penting jangan sampai ada sesuatu yang tidak dikerjakan. Bahwa *overlap*, menurut kami, lebih bagus daripada sama sekali tidak ada yang ditangani. Terima kasih atas saran itu, kita akan lebih mengefisienkan organisasi. Sekarang kita mempunyai tiga organisasi, yaitu HPBI, Hiski, dan MLI.

Anton M. Moeliono

Adakah khalayak yang akan mengajukan pendapat?

Mursal Esten

Saya kira, ada. Pak Parera tadi yang khusus ditujukan untuk Hiski. Pak Parera, buku di sekolah yang mengatur ialah Dikrektorat Pendidikan Dasar dan Menengah dan biasanya orang Dikdasmen mencari tokoh yang kenal baik dengan dia yang belum tentu kewibawaannya untuk menulis itu cukup sehingga terjadilah hal yang seperti itu. Jadi, kalau Pak Parera mau mencari siapa yang salah, jangan Hiski yang ditunjuk, melainkan pejabat di Dikdasmen. Kami di Hiski juga sekarang mulai melakukan pembicaraan atau memberikan kritik apresiatif terhadap karya sastra Indonesia yang diterbitkan di daerah. Jadi, bukan terbitan nasional. Kalau untuk tingkat nasional, saya kira hanya perlu dua atau tiga judul setiap tahun, tetapi harus dicetak ratusan ribu. Kita omong kosong belajar sastra, tanpa ada karya sastra di perpustakaan sekolah. Sekarang itulah yang terjadi. Segala macam kerusakan sekarang ini terjadi akibat anak tidak belajar sastra.

Anton M. Moeliono

Rupanya yang diusulkan sidang itu ialah organisasi profesi kebahasaan boleh mengambil contoh pada organisasi profesi kedokteran, misalnya Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Organisasi ini mempunyai cengkeraman yang kuat pada kehidupan pemerintah. Jadi, suara IDI didengar oleh pemerintah dalam hal pendidikan dokter. Apakah mungkin, untuk selanjutnya Hiski lebih terlibat dalam penentuan kurikulum pengajaran susastra sehingga kurikulum tidak hanya ditetapkan oleh birokrat semata-mata atau yang di belakang meja. Demikian juga, MLI dapat melibatkan diri secara lebih aktif (*diminta atau tidak diminta*), kita dapat selalu mengajukan usul kepada direktorat yang bersangkutan bahwa apa yang sebenarnya diperlukan untuk peningkatan keterampilan berbahasa dan peningkatan apresiasi susastra Indonesia. Kita harus mengakui bahwa jika orang Indonesia berbangga memiliki bahasa Indonesia, banyak sekali orang Indonesia yang tidak tahu-menahu soal susastra, sesuatu yang ganjil sebenarnya. Orang Inggris, Prancis, dan Jerman justru bangga menyebut dirinya orang Inggris, Prancis,

dan Jerman karena dapat membanggakan susastranya itu. Jadi, saya setuju sekali dengan Parera bahwa dari organisasi profesi kebahasaan ini justru diharapkan keproaktifan untuk menyarankan kepada pemerintah daripada kita di sini datang ke Kongres Bahasa menyalurkan ketakpuasan kita yang memang tidak berbahaya, bahkan meleagakan, tetapi akan terbentur pada tembok, tidak menghunjam ke dalam sasarannya. Silakan ada tanggapan atau komentar?

Ipon Sukarsih Purawidjaja, Perpustakaan Nasional

Saya tertarik dengan diskusi tentang organisasi profesi kebahasaan dan kesastraan. Tadi disinggung masalah kerja sama. Saya sangat mendukung gagasan, terutama gagasan Pak Andi, tentang perlunya suatu lembaga anutan (lembaga kebahasaan dan kesastraan). Mengapa tidak terpikir adanya pusat jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan. Pusat jaringan ini dapat memiliki anggota jaringan atau unit jaringan yang unit atau anggotanya itu melibatkan kegiatan dengan cirinya masing-masing, apakah itu kebahasaan atau kesastraan. Misalnya, dalam dunia informasi dokumentasi dan perpustakaan itu sudah ada pusat jaringan yang anggotanya terdiri atas berbagai bidang ilmu, seperti ilmu teknologi, sosial, dan pertanian. Mengapa itu tidak dicontoh dalam dunia kebahasaan dan kesastraan. Pusat jaringan juga dapat berfungsi atau berperan sebagai pusat rujukan (*clearing house*). Dalam hal ini mungkin nantinya Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat berperan sebagai pusat rujukan atau pusat acuan. Jadi, jika ada pengguna bahasa atau kesastraan yang mencari informasi yang berkaitan dengan masalahnya masing-masing, pusat jaringan ini dapat merujuk kepada anggota jaringannya. Mengenai hubungan anggota jaringan dan pusat jaringan dapat dijalin dengan sistem jaringan informasi kebahasaan dan kesastraan. Sistem jaringan ini dapat dilakukan dengan bentuk berjenjang dan tidak berjenjang. Berjenjang, misalnya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Secara berjenjang, hubungan ini dapat dilakukan antara pusat dan anggotanya melalui, misalnya, lingkup direktorat jenderal. Untuk yang tidak berjenjang, hubungan ini dapat dilakukan dengan seluruh pihak yang terkait. Ini hanya usulan saja, bukan pertanyaan. Saya sangat mendukung usulan yang berkaitan dengan kerja sama karena kerja sama itu adalah prinsipnya pemanfaatan bersama sumber daya yang dimiliki oleh semua pihak yang terkait. Saya juga sangat setuju dengan usulan Pak Anton tentang terbentuknya badan perencanaan bahasa. Mudah-mudahan usulan ini dapat dimasukkan di dalam usulan Bapak kemarin.

Anton M. Moeliono

Pak Hasan Alwi, silakan.

Hasan Alwi, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Saya merasa bersalah kalau saya tidak memberikan sedikit komentar atau informasi sehubungan dengan pertanyaan Pak Ton, yaitu pernahkah ketiga organisasi profesi itu duduk bersama. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pernah mendudukkan

pimpinan ketiga organisasi profesi ini dalam panitia pengarah. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pernah memanggil ketiga organisasi ini dalam rangka bagaimana mengatur kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Karena Kongres didukung oleh ketiga organisasi profesi, maka tahun 1999 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa kerja sama dengan MLI, tahun 2000 dengan HPBI, dengan demikian tahun 2001 dengan Hiski. Tahun 2002 tidak ada kerja sama dengan ketiga organisasi profesi ini karena akan digunakan untuk mengendapkan apa yang perlu dilakukan sehubungan dengan Kongres Bahasa Indonesia VIII. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pernah mengundang ketiga organisasi profesi ini dalam rangka menentukan siapakah wakil-wakil dari ketiga organisasi profesi ini untuk hadir sebagai peserta undangan yang dibiayai panitia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa menyediakan tempat untuk ketiga organisasi profesi ini dan di situ sebenarnya, kalau dimanfaatkan, kapling yang sudah disediakan itu, komunikasi di antara mereka untuk mengatur batas-batas bidang garapannya. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak mau mencampuri urusan dalam negeri masing-masing. Mereka sudah mempunyai aturan main, yaitu anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya.

Anton M. Moeliono

Ada tanggapan dari panel?

Multamia Lauder

Memang betul Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berusaha untuk merangkul kami semuanya dalam rangka kerja sama. Kemudian, kami dilibatkan dalam panitia pengarah Kongres ini, dan sebagainya. Kami bertiga ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi kerja sama di antara ketiga organisasi itu sendiri, belum dilakukan. Sebetulnya yang dilakukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu sangat baik. Jadi, kita tahu kapan saja kami bisa "mendapat data" dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa supaya kegiatan MLI bisa maju. Terus terang, kerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seharusnya lebih ditingkatkan, tidak hanya sekadar "MLI menyusul kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa" dalam arti kucuran dana. Saya ingin lebih dari itu, kita bisa membantu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk membina dan mengembangkan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Kalau boleh saya tambahkan di sini, masalah bahasa daerah. Saya melihat di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu ada Bidang Bahasa Indonesia dan Daerah, tetapi kegiatannya itu lebih banyak ke bahasa Indonesia. Yang saya pertanyakan itu, bagaimana dengan bahasa daerah? Apakah itu dilimpahkan ke balai bahasa? Jika dilimpahkan ke balai bahasa, apakah antara satu balai bahasa dan balai bahasa yang lain perencanaannya ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, lalu mereka bertindak sebagai pelaksana? Atau, balai bahasa itu mempunyai rencana masing-masing. Ini, saya rasa, juga harus dilihat karena kalau tidak, masalah bahasa daerah akan menjadi repot juga karena bahasa daerah itu menjadi pemasok untuk istilah bahasa Indonesia. Jadi, bahasa daerah itu termasuk yang harus diurus juga. Dalam hal ini saya sangat beruntung karena dilibatkan dalam pemetaan bahasa

daerah, tetapi baru pemetaannya, sedangkan pengembangan bahasa daerahnya, pembinaan bahasa daerahnya, saya tidak tahu.

Anton M. Moeliono

Di kongres ini, tentu ada peserta yang jadi anggota HPBI, Hiski, ataupun MLI. Apakah di antara peserta karena sekarang bersemuka dengan ketua umumnya mau menyumbang saran dalam kerja sama keprofesian dalam pembinaan dan pengembangan bahasa? Apakah anggota HPBI, Hiski, atau MLI dapat memberikan saran kepada ketua umumnya. Sebagai anggota, Anda dapat memberikan sumbangan pikiran, apa yang dapat meningkatkan peranan organisasi itu di dalam pembinaan bahasa. Jadi, saya tidak mengharapkan tanggapan bagaimana harus meningkatkan pengajaran dan sebagainya, tetapi kira-kira sebagai anggota organisasi, MLI, HPBI, dan Hiski, bagaimana upaya pembinaan itu dapat lebih memasyarakat.

Mayong Maman, IKIP Ujung Pandang

Kemarin saya berbincang-bincang dengan Pak Harimurti bahwa majalah *Pembina Bahasa Indonesia* sudah almarhum. Bagaimana kalau majalah itu dihidupkan kembali?

Anton M. Moeliono

Majalah *Pembina Bahasa Indonesia* memang bertahan mungkin sepuluh tahun. Saya menjadi redaktur selama lima tahun, kemudian diikuti oleh pengganti saya lima tahun, Pak Bambang ikut menyuntingnya. Akan tetapi, sesudah itu, mungkin karena ketiadaan dana, majalah itu tidak terbit lagi. Salah satu pengikat tali anggota HPBI itu memang majalah.

Andi Mappi Sammeng

Pak Anton, saya konfirmasi saja bahwa setahun yang lalu sudah dibahas dan sangat kuat tekad HPBI untuk melanjutkan majalah itu dengan mengikutsertakan penerbit dan asuransi. Tiba-tiba terjadi krismon (krisis moneter) yang sangat dahsyat itu. Sekarang kedua pendukung, yaitu penerbit dan asuransi, masih mikir lagi. Akan tetapi, tekadnya ke sana.

Huzaimah Dahlandin, Universitas Sriwijaya

Saya salah seorang anggota MLI yang tidak aktif. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Mia tentang peranan MLI, terutama yang berkaitan dengan penelitian bahasa yang dilakukan, yang salah satu tujuannya adalah agar dapat benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat untuk berbahasa daerah atau berbahasa Indonesia. Pada saat yang sama penelitian MLI memberi sumbangan untuk kemajuan ilmu. Sebagai salah seorang anggota MLI, saya belum melihat bahwa tujuan tersebut belum dipenuhi oleh MLI. Mengapa saya katakan demikian? Karena pada umumnya hasil penelitian itu tidak begitu dimanfaatkan oleh masyarakat linguistik Indonesia itu sendiri. Misalnya, hasil penelitian itu tampaknya hanya untuk konsumsi secara administratif. Kalau telah selesai penelitian itu, dikirim ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,

kemudian stop. Tidak ada tindak lanjutnya, misalnya, diadakan diskusi tentang hasil penelitian itu atau dilaporkan di dalam majalah jurnal yang disebarluaskan secara cuma-cuma ke seluruh perpustakaan, di Indonesia. Jangankan ke luar negeri, di Indonesia saja tidak begitu karena saya sendiri adalah salah seorang ketua perpustakaan di Universitas Sriwijaya. Bagaimana menurut Ibu, operasional, bukan teorinya?

Joko Saryono, IKIP Malang, Wakil Hiski

Untuk meningkatkan peran Hiski, saya mengusulkan agar pertama, Hiski lebih aktif dan proaktif di dalam menjalin kerja sama dengan berbagai organisasi profesi dan organisasi yang lain, misalnya HPBI dan MLI. Jadi, bukan didatangi seperti dikatakan Pak Alwi Dahlan. Sebaiknya, untuk masa yang akan datang, Hiski mendatangi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk minta jatah, misalnya proyek penelitian, seperti menulis ensiklopedia pengarang Indonesia. Saya kira, hal itu juga belum direncanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Itu contoh yang proaktif. Yang kedua, Hiski juga mendatangi Dikdasmen dan Pusat Perbukuan, yang ketiga tentu saja perlu menghidupkan kinerja ilmiah dari Hiski itu. Setiap pertemuan, saya kira sudah bukan masanya lagi membuat makalah kecil yang didasarkan pada pengamatan sepintas, tetapi betul-betul merupakan suatu ringkasan penelitian yang lebih mendalam. Dengan begitu, citra dan kinerja ilmiah Hiski lebih meningkat.

Mursal Esten

Itu usul yang baik. Kita tidak dapat hanya mengandalkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai sentral. Saya juga sudah mendaftar untuk pengurus pusat ini untuk beraudiensi dengan Dirjen Dikdasmen, Dr. Indra Jati Sidi, yang melahirkan buku-buku pelajaran dalam kurikulum sehingga peran kita lebih besar, juga dengan organisasi yang lain.

A. Latief, Pusdiklat Depdikbud

Sehubungan dengan pertanyaan Bu Mia, yaitu apakah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah memiliki perencanaan jangka panjang. Terlepas dari Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah memiliki atau tidak, apakah tidak sebaiknya semua anggota organisasi profesi tersebut mulai dengan menunjukkan programnya kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, bisakah diakomodasikan ke dalam perencanaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Barangkali itu yang dinamakan proaktif. Jadi, tidak menunggu bahwa mana rencana Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Saya akan berterima kasih jika ketiga organisasi profesi tersebut memberikan contoh kalau memang sudah mempunyai rencana kerja.

Andi Mappi Sammeng

Saya terpaksa buka rahasia bahwa semua kegiatan yang dilakukan HPBI selama ini, kurang dari 70% yang dibiayai HPBI sendiri. Jadi, pada umumnya lebih dari 30% dibiayai oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Untuk itu, atas nama masyarakat HPBI, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Hasan Alwi. Akan tetapi, di

sisi lain karena begitu sering kita meminta ke Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ternyata Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa juga tidak punya banyak uang. Jadi, tadi saya indikasikan bahwa untuk melanjutkan majalah, kami tidak ketuk lagi pintu Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tetapi kami mengetuk penerbit dan asuransi untuk turut serta. Semua bangsa ini, kalau kita mengaku bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama, seharusnya semua organisasi, semua lembaga pemerintahan, organisasi swasta, dan perusahaan turut memikirkan bagaimana membina dan mengembangkan bahasa ini dengan bukti memberikan *share*-nya di dalam pembiayaan.

Anton M. Moeliono

Ada anggota HPBI lain yang ingin memberikan saran?

Isa Cahyani, Anggota HPBI

Saya bersimpulan bahwa semua organisasi kebahasaan dan kesastraan diharapkan untuk mewujudkan kegiatan yang konkret untuk para anggota. Di samping itu, organisasi juga harus mempunyai ketentuan yang jelas karena walau bagaimanapun, harus dari tubuh sendiri kemudian memancarkan sinar dan beroperasi dengan anggota sampai ke daerah-daerah se-Nusantara.

Anton M. Moeliono

Bagus, siapa lagi? Pak Zainuddin Taha silakan.

Zainuddin Taha, Anggota MLI, HPBI, anggota Masyarakat Linguistik Amerika

Saya terus terang mengimpikan bagaimana organisasi profesi kita, seperti MLI, HPBI, atau Hiski memiliki disiplin organisasi, kesadaran anggotanya berorganisasi, seperti yang kita lihat pada organisasi Linguistic Society of America. Mereka memiliki jaringan informasi seperti yang dikemukakan tadi, kita bisa mengetahui apa program mereka setahun yang akan datang, kita bisa mengetahui di mana ada pertemuan kebahasaan, dan masalah apa yang dibicarakan dalam pertemuan itu. Kita mengimpikan organisasi kebahasaan kita ini pada suatu ketika dapat seperti itu.

Anton M. Moeliono

Sebenarnya Linguistic Society of America (LSA) itu sedikit berbeda sifatnya dengan MLI karena anggota LSA itu tidak diimbau turut serta di dalam pembinaan bahasa Indonesia, mungkin di dalam pengembangan bahasa Indonesia. Walaupun demikian, saya percaya bahwa kegiatan organisasi profesi kebahasaan akan banyak sumbangannya dan besar mutunya jika melanjutkan penerbitan majalah. Saya menerima suatu majalah kebahasaan yang diterbitkan oleh Unika Atmajaya, Jakarta yang berisi karangan dalam bahasa Inggris. Ini salah satu promosi Indonesia bahwa di Indonesia terdapat kelompok peneliti bahasa yang mengemukakan hasil penelitiannya tentang bahasa Indonesia atau bahasa di Nusantara dalam bahasa Inggris. Mungkin dapat dipertimbangkan oleh ketiga organisasi profesi kebahasaan di dalam rangka memasyarakatkan peranannya dalam pengembangan bahasa, bukan semata-mata bahasa

Indonesia, tetapi juga tentang kelompok bahasa daerah dan asing yang dipakai di Indonesia. Akan tetapi, kuasa dan wibawa suatu majalah yang tercetak memang berlipat ganda jika dibandingkan dengan kuasa dan wibawa uraian yang berupa lisan.

Mursal Esten

Saya ingin bertanya kepada Pak Anton. Mengapa beliau menggunakan organisasi kebahasaan, yang di dalamnya masuk sastra? Mengapa bukan organisasi kesastraan? Di fakultas sastra, linguistik berada di bawah fakultas sastra.

Anton M. Moeliono

Di dalam keluarga, menjadi adat kalau adik atau saudara yang kedua itu selalu merasa dianaktirikan. Kegiatan kesastraan muncul setelah ada kegiatan kebahasaan. Jadi, orang yang bergerak di bidang susastra menuntut selalu disebutkan secara tersendiri. Padahal, orang susastra memakai bahasa. Jadi, saya sama sekali tidak diskriminatif jika saya berkata tentang organisasi kebahasaan adalah orang yang memakai bahasa, entah untuk tujuan seni, seperti sastra, atau untuk tujuan pengajaran seperti MLI. Tidak ada niat, sekali lagi, untuk meminggirkan kaum susastrawan. Jadi, organisasi kebahasaan itu mencakupi, baik linguistik maupun ilmu susastra. Akan tetapi, jika Anda ingin disebut tersendiri, saya akan mengoreksi diri, organisasi kebahasaan dan kesastraan walaupun *it's still a misnomer*, artinya masih belum tepat sebab anggota Hiski bukan seratus persen sastrawan. Akan tetapi, mungkin lebih banyak kritikus sastra. Jadi, kesastraan dalam arti menjadi sasaran pengamatan dan penelitiannya. Akan tetapi, jika Anda ingin disebut secara lengkap, organisasi kebahasaan dan kesastraan ini dalam peranan pemasyarakatan bahasa Indonesia. Kemarin kita mendengar bahwa bahasa Indonesia lebih banyak berperan sebagai pelambang. Kita bangga memiliki bahasa nasional, tetapi kita tidak bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat yang canggih. Saya memperoleh ibarat yang bagus dari seorang peneliti bahasa, katanya, "Anda, orang Indonesia itu bangga terhadap bahasa Indonesia seperti orang Jawa bangga memiliki keris sebab keris itu lambang kepribadiannya, lambang keperkasaannya, tetapi orang Jawa tidak pernah akan memakai keris itu untuk memotong daging, merincis sayur, ataupun untuk alat rumah tangga. Keris menjadi pelambangannya." Mungkin untuk orang Indonesia, bahasa Indonesia berfungsi lebih banyak sebagai simbol keindonesiaan kita, tetapi kita tidak menunjukkan kebanggaan kita dapat mengungkapkannya lewat bahasa Indonesia.

PEMANFAATAN MEDIA RADIO DAN TELEVISI DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

Sumita Tobing
Bagian Pemberitaan SCTV

1. Penggunaan Teknologi Tinggi untuk Penyebaran Informasi yang Sesuai dengan Kebutuhan Rakyat Banyak

Teknologi informasi dan bahasa Indonesia merupakan dua hal yang tidak luput dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari. Keduanya saling tumpang-tindih, tetapi asal-usulnya dan latar belakangnya berbeda. Bahasa Indonesia tumbuh dari dasar bahasa Melayu dengan campuran bahasa asing ataupun bahasa daerah yang ada di bumi Nusantara, sedangkan teknologi informasi murni hasil impor dari negara maju.

Revolusi informasi ini diawali dengan penggunaan satelit pertama, *Early Bird*, buatan Amerika Serikat tahun 1960-an. Penemuan *chips* di lembah Silicon berpadu dengan satelit, menghasilkan teknologi komputer yang selanjutnya menghasilkan multimedia, termasuk di antaranya internet.

Indonesia sebagai negara ketiga pertama yang menggunakan/membeli Satelit Palapa tahun 1970-an, setelah Amerika Serikat dan Kanada, ternyata jauh ketinggalan dengan Singapura yang baru April 1998 memiliki/membeli satelit sendiri, *Singapore Telecom (ST-1)* dengan kapasitas 30 *transponder* berada pada *Ku-Band* dan *C-Band*. Setiap halte bus dan taksi di Singapura, papan jadwalnya (*display*) dihubungkan ke kantor pusat pengendali dengan satelit sehingga para pengguna jasa taksi, bus, tahu persis jam kedatangan dan keberangkatan bus. Supir taksi di Singapura memiliki telepon genggam sebagai kebutuhan pokok. Perusahaan Iridium di Singapura juga sudah menyediakan jasa telepon genggam yang langsung berhubungan dengan satelit *low band* sehingga di laut sekalipun, telepon genggam tersebut dapat berfungsi. Tentunya perbandingan ini memberi makna yang dalam. Telepon genggam tidak termasuk dalam daftar "sembako" supir taksi di Indonesia. Padahal, Indonesia dua puluh tahun lebih dahulu dalam memiliki satelit dibandingkan Singapura. Dengan perbandingan itu, dapatkah kita berharap bahwa teknologi informasi di Indonesia dapat dimiliki/dinikmati secara merata oleh masyarakat sehingga pesan ataupun informasi yang terkandung di dalam teknologi tinggi tersebut juga berperan dalam membina bahasa Indonesia? Sejak awal, adakah direncanakan bahwa pembelian teknologi tinggi, Satelit Palapa, 20 tahun lalu adalah untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan hanya untuk melayani kepentingan perusahaan multinasional? Mendahulukan kepentingan rakyat atau masyarakat banyak adalah cerminan akan adanya rasa kebangsaan yang tinggi. Rasa kebangsaan inilah yang menjadi akar bahasa Indonesia. Apabila hati nurani sudah tidak peka lagi terhadap kepentingan rakyat, rasa bahasa juga akan kabur, terseok-seok tanpa arah. Dalam situasi seperti ini teknologi tinggi di sisi lain akan menimbulkan kesenjangan yang lebar antara si miskin dan si kaya. Yang mampu memperoleh informasi berlebih yang membuat si pemakai tambah mampu menguasai

ekonomi, sedangkan yang tidak mampu karena miskin informasi, akan kalah bersaing karena kurang informasi, kurang pendidikan. Kebijakan politik, sosial, dan ekonomi, khususnya pemerintah akan membawa ke arah mana penggunaan teknologi tinggi ini?

Karena radio, TVRI, televisi swasta adalah pengguna teknologi tinggi, media ini sebagai institusi harus bertanggung jawab atas pencerdasan bangsa. Hal itu terjadi karena siaran media ini gratis ditonton terutama oleh kalangan masyarakat bawah. Adakah institusi ini menyadari tugasnya tersebut? Dalam tugas itu dengan sendirinya tercakup penggunaan bahasa yang benar karena bahasa yang salah tidak akan mampu menyampaikan informasi yang komunikatif.

Masyarakat menengah Indonesia yang porsinya masih lebih kecil dari golongan bawah merupakan pengguna internet atau multimedia. Karena pendidikan dan kemampuan ekonomi yang memadai, mereka mampu melakukan pemilihan dan pemilahan informasi, terlepas dari apa pun yang dimuat di internet tersebut. Jangankan kualitas bahasa Indonesia, keakuratan isi informasi tersebut, mereka mampu memilahnya. Tentunya yang menjadi masalah adalah apa peran sebenarnya dari media massa seperti radio dan televisi di masyarakat Indonesia sebagai negara berkembang yang heterogen apalagi dalam era reformasi seperti sekarang ini. Siaran radio dan televisi yang sifatnya massal berupa suara dan gambar terbuka untuk masyarakat kelas mana pun. Adakah bahasa Indonesia yang digunakan media ini sudah komunikatif, baik, dan benar?

2. Situasi Bahasa Radio dan Pertelevisian Indonesia

Sesuai dengan topik yang diberikan kepada penulis untuk melihat bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pembinaan bahasa Indonesia, maka seperti yang telah diuraikan terdahulu, media radio dan televisi yang harus diutamakan untuk dilihat perannya. Radio Republik Indonesia (RRI) dalam menggunakan bahasa Indonesia telah mempunyai standar sendiri, bahkan juga kualitas vokal, intonasi, dan artikulasi si penyiarnya. Hanya isi pesan yang harus "membumi" (untuk mengambil istilah Menteri Penerangan Muhammad Yunus Yosfiah). Dalam era reformasi seperti sekarang ini haruslah diberikan acungan jempol untuk Bapak Yunus Yosfiah yang mengatakan, "RRI dan TVRI jangan hanya menyiarkan cerita sukses pembangunan, tetapi juga harus mampu mengungkapkan kegagalan-kegagalan pembangunan secara lugas dan objektif." (*Kompas*, 5 Oktober 1998 hlm. 10).

Situasi komunikasi dikatakan berhasil apabila isi/informasi yang disampaikan dapat berguna bagi para penerima yang dituju. Apabila siaran radio ataupun televisi tersebut tidak dapat memotivasi para pendengar dan penonton untuk menjadi manusia Indonesia yang cerdas, intelek, dan jujur, tugas mencerdaskan bangsa yang menjadi tanggung jawab institusi tersebut belum berjalan. Bahasa tidak berdiri sendiri dalam lingkup sebatas gramatika, tetapi harus secara kontekstual memenuhi kebutuhan pencerdasan bangsa tersebut. Untuk mengemban tugas pencerdasan bangsa ini, modal utama adalah profesionalisme. Profesionalisme akan menjawab semua tuntutan yang dibutuhkan suatu siaran yang bermutu secara kontekstual dalam keadaan sekarang ini.

Selain RRI dan TVRI, radio dan televisi swasta sangat memprihatinkan dalam

peran sebagai pembina bahasa Indonesia. Penulis sendiri yang sudah berpengalaman menangani siaran televisi, baik di TVRI maupun di televisi swasta, tahu persis bahwa masalah pembinaan bahasa belum merupakan pekerjaan utama yang harus menjadi modal pokok dalam memproduksi program. Kendala yang dihadapi RRI ataupun TVRI tentunya karena statusnya sebagai stasiun pemerintah, maka karyawan instansi ini merasa bahwa tugas mereka adalah sebagai corong suara pemerintah. Hendaknya dengan seruan Menteri Penerangan seperti telah penulis kutip di atas akan membangunkan karyawan instansi ini. Di pihak lain, radio swasta dan televisi swasta menghadapi kendala sumber daya manusia yang *kagetan*. Istilah *kagetan* dimaksudkan banyak bidang pekerjaan di institusi ini dipegang oleh sumber daya manusia yang masuk ke bidang ini hanya dengan modal coba-coba, tanpa pendidikan yang khusus untuk bidang yang baru dimasukinya tersebut. Akibatnya, tugas pokok untuk memproduksi program sendiri masih terseok-seok, apalagi untuk memikirkan tugas sebagai insan *broadcaster*, yang bertanggung jawab untuk membina bahasa Indonesia.

Pemakai bahasa di media radio dan televisi di negara maju sekalipun mempunyai standar. Bahasa yang dipakai adalah bahasa tutur, tetapi masih dalam standar kaidah bahasa yang benar. Di Amerika Serikat, industri radio dan televisi sangat maju, setiap stasiun, baik radio maupun televisi, mempunyai buku standar penulisan dan pemakaian bahasa di samping standar lainnya untuk membuat stasiun ataupun programnya menjadi stasiun ataupun program yang bergengsi. Masyarakat Amerika Serikat yang sangat kritis tentu ikut punya andil dalam memantau siaran stasiun tersebut. Bahkan, dalam peraturan perizinan yang dikeluarkan FCC, izin siaran diberikan atau diperpanjang (4 tahun sekali) apabila ada rekomendasi dari masyarakat sekitarnya (*community*) yang menyatakan bahwa kehadiran stasiun tersebut memang berguna dan dibutuhkan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, warga wajib juga memantau apa keuntungan warga sekitarnya akan kehadiran stasiun tersebut. Dengan peraturan FCC ini, warga sendiri secara otomatis mendapat pendidikan politik karena warga ikut menentukan mati, tutup, dan hidupnya stasiun siaran tersebut.

Keterlibatan masyarakat untuk menentukan kegunaan stasiun radio dan televisi belum ada di Indonesia, baik secara hukum maupun secara kaidah budaya. Masyarakat belum memantau isi siaran radio ataupun televisi. Yang terjadi adalah stasiun tersebut secara sepihak memberikan program yang menurut kehendaknya sendiri. Visi dan misinya tidak jelas karena kondisi industri informasi, seperti radio ataupun televisi swasta masih sebatas yang demikian. Saya mengusulkan agar pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pemantauan bahasa di radio dan televisi swasta dan memberikan hasil pantauan tersebut, terutama kritikan dan perbaikan atas kesalahan penggunaan bahasa. Bahasa standar siaran memang harus ada. Kalau belum ada, bahasa itu dapat diadakan. Bahasa siaran adalah bahasa tutur yang masih berpijak pada kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita menyadari bahwa nilai dari suatu sistem dapat berubah dari waktu ke waktu. Demikian juga bahasa, dapat menjadi kuno dalam suatu waktu tertentu. Standar yang digunakannya akan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, dengan penelaahan dan analisis, perubahan tersebut tentunya akan berada pada suatu

pijakan yang standar yang memberi nilai tambah pada kualitas kehidupan bangsa.

Pekerjaan memantau dan mengevaluasi adalah prioritas tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena apabila tugas tersebut diserahkan kepada stasiun tersebut, staf pelaksana mereka untuk tugas pokoknya sendiri masih kewalahan, apalagi untuk menyusun kaidah bahasa yang bertumbuh baik. Namun, kalau uluran tangan datang dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, saya yakin pihak radio dan televisi swasta tidak akan keberatan. Harus kita lihat bahwa media radio dan televisi mempunyai potensi yang sangat besar dalam menghasilkan segala sesuatu yang positif untuk bangsa ini. Kini, bergantung kepada sejauh mana kita melihat kesempatan ini dan menggunakannya secara benar dan tepat mengingat heterogenitas dan fragmentasi dari masyarakat itu sendiri.

3. Langkah yang dapat Diambil agar Media Elektronik Berperan Meningkatkan Mutu Bahasa Indonesia

Media radio dan televisi dapat menciptakan agenda publik dengan pesan bahwa kualitas bahasa Indonesia seseorang akan mencerminkan kualitas intelektualnya. Pesan ini harus dapat diketahui dan disetujui oleh masyarakat umum. Jadi, bukan hanya jabatan (apalagi di kantor pemerintah) ataupun kelimpahan materi yang menjadi status simbol. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan status simbol bahwa seseorang itu termasuk kelompok intelektual atau mempunyai ciri-ciri, setidak-tidaknya, seorang intelektual. Dalam hal ini, terkait masalah nilai. Apabila selama ini ukuran nilai status simbol sudah melenceng, dalam era reformasi ini status simbol harus diluruskan dan diarahkan bukan kepada materi lagi, melainkan kepada intelektualitas yang juga dicerminkan dengan kualitas bahasa Indonesianya. Nilai ini tercipta dari kondisi yang ada dan pengalaman sebelumnya. Nilai kualitas atau profesionalisme harus menjadi tolok ukur agar kita mampu bersaing dalam globalisasi sekarang ini. Bahasa Indonesia harus menjadi salah satu indikatornya.

Dalam bahasa tersebut akan tersirat makna yang mencerminkan kejujuran, integritas, dan profesionalisme. Pengelola media massa tentunya harus melakukan pekerjaan rumahnya terlebih dahulu sebelum mengurus masyarakat banyak. Kita masih menaruh harapan kepada media elektronik karena media cetak yang belakangan ini bermunculan sangat banyak (lebih 200 SIUPP sudah diterbitkan) sangat merepotkan kita. Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan media elektronik sangat memungkinkan untuk menentukan standar bahasa siaran yang baik dan benar.

Kerja sama tersebut dapat diwujudkan dalam berbagai program *off-air* ataupun *on-air*. Siaran tersebut harus enak ditonton dan mencerdaskan nalar. Pelajaran bahasa Indonesia seperti yang selama ini kita tonton melalui Televisi Republik Indonesia ataupun Televisi Pendidikan Indonesia tidak memenuhi kaidah hiburan (*entertainment*) sebagai syarat mutlak dari suatu siaran televisi. Apa pun yang ditayangkan di layar kaca tersebut haruslah menghibur sekalipun muatannya merupakan pesan tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar. Harus dikampanyekan bahwa kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat menunjukkan status simbol akan intelektualitas dan profesionalisme seseorang.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A9
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Pemanfaatan Media Radio dan Televisi dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
Penyaji	: Sumita Tobing
Pemandu	: Sugiyono
Pencatat	: a. Cormentyna b. Mustamim Basran
Peserta	: 100 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suhendar, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Saya terkesan akan penyajian bahasa Indonesia yang Ibu sampaikan. Saya, sebagai seorang guru Bahasa Indonesia, di kelas memang mengajarkan Bahasa Indonesia yang baik dan benar amat terbatas. Segera setelah keluar dari kelas, siswa amat terpengaruh oleh gaya-gaya bahasa bebas di luar kelas, di antaranya melalui layar televisi. Seberapa jauh upaya yang lebih serius untuk mencoba bekerja sama dan tidak menghalangi kegiatan para guru untuk mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada siswanya?

b. Jawaban:

Mengenai pertanyaan seberapa serius pengelola televisi bekerja sama, sebenarnya mereka itu serius. Masalahnya adalah bahwa mereka mau terima jadi. Ini kita bagi dulu, tidak usah saya bagi TVRI atau televisi swasta mana. Sebenarnya begini, TVRI sudah berusia 30 tahun sekian, tetapi yang namanya tata bahasa pertelevisian dalam membuat program sebetulnya ada ilmunya. Ilmu cara membuat program itu tidak dikembangkan untuk membuat tontonan yang menghibur, tetapi mendidik karena TVRI sangat sarat memikirkan bagaimana menyuarakan pemerintah. Itu yang jadi pikirannya. Saya boleh mengatakan ini karena forum ini saya kira tertutup, tidak masuk surat kabar. Kemarin saya mengajar di TVRI, pengikutnya, siswa yang ada di kelas itu 20 orang. Saya tanya, "Kamu kerjanya apa?" "Wartawan TVRI." "Sudah berapa tahun?" "Enam belas tahun", yang paling sedikit lima tahun. Lalu, saya tanyakan mata pelajaran yang saya berikan itu adalah kompetisi pertelevisian. Lalu, saya tanya, "Anda kalau mau membuat program, apa yang teringat dalam pikiran Anda?" Ke-20 siswa itu menjawab, "Bagaimana menyampaikan pesan pemerintah dengan baik." "Oh, jadi, Anda tidak pernah memikirkan penonton?" Itu TVRI, tidak pernah memikirkan penonton. Yang penting, bagaimana menyampaikan pesan pemerintah. Nah, pesan pemerintah dari dulu tidak terbilang

supaya berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang ada adalah bagaimana menjaga stabilitas nasional. Jadi, tak sampai selama 36 tahun ini. Nah, sampai sekarang televisi swasta tidak memikirkan itu. Jangankan memikirkan bagaimana membuat orang berbahasa yang baik sebagai suatu gengsi, membuat programnya saja mereka *tidak* bisa. Televisi swasta tidak bisa membuat program karena ketika televisi swasta 8 tahun yang lalu masuk di pasar, ada kejutan. Artinya apa? Diberikan izin stasiun televisi, tetapi sumber daya manusianya belum dipersiapkan. Jadi, tidak mudah. Saya sendiri untuk menyunting gambar, saya masuk di pelatihan selama bulan.

Untuk membuat laporan, saya masuk di pelatihan 3 bulan. Untuk membuat satu program komposisi, komposisi dari kamera itu saja 6 bulan, berbulan-bulan. Akan tetapi untuk televisi swasta diberi izin langsung siaran 18 jam sehari, mau diisi apa? Membeli film Hollywood mahal, akhirnya membeli film India yang lebih murah, dan yang lebih murah lagi film Hongkong. Jadi, mereka tidak bisa membuat sendiri. Nah, film-film cerita yang ada itu dibeli dari rumah-rumah produksi atau *production house*. Rumah produksi juga dalam membuat itu tidak belajar ilmu pertelevisian, ilmu Hollywood yang benar. Jadi, semua itu kejutan. Lima stasiun televisi swasta belum bisa membuat program-program unggulannya, apalagi istilahnya mari bersastra, apalagi mau membuat kampanye tentang bahasa Indonesia. Jadi, saya kira di mana jalan keluarnya? Jalan keluarnya yang paling mudah adalah melalui pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan atau yang bekerja di bidang pembinaan bahasa. Memang sudah ada TVRI dan TPI.

Pelajaran Bahasa Indonesia itu bukan program televisi. Itu acara kelas yang dipindahkan ke televisi, itu acara yang dipindahkan ke studio. Jadi, hal itu berbeda. Program televisi itu gerakannya cepat 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan harus cepat. Jadi, Anda bisa mengajarkan bahasa Indonesia seperti di kelas. "Saudara pemirsa di rumah, sekarang ini kita mulai pembicaraan bagaimana kata kerja itu harus sepadan dengan pokok kalimat", tidak ada yang menonton. Buatlah pesan itu dalam satu keluasan cerita. Mungkin cerita seseorang yang berbahasa Indonesia yang baik digila-gilai oleh anak seorang konglomerat karena bahasa Indonesianya yang baik. Atau, dia berpuisi dengan baik di dalam cerita ini. Saya kira lebih cepat apabila pihak-pihak guru bahasa Indonesia dan pejabat yang di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan itu belajar membuat program televisi. Jadi, berikan program televisi yang sudah jadi dan akan dia siarkan itu. Akan tetapi, kalau mereka disuruh membuat program, mereka tidak akan bisa membuatnya. Televisi swasta membeli dari rumah-rumah produksi. Jadi, di situ masalahnya. Masalahnya bukan televisi swasta juga tidak mau, tetapi dia tidak tahu membuatnya. Bagaimana membuat paket yang menarik supaya kampanye bahasa Indonesia di televisi itu bisa menarik perhatian. Saya menonton film Hollywood, yang main Tom Cruise, judulnya *A Few Good Men*. Di situ ditunjukkan bagaimana keangkuhan seorang jenderal. Ternyata dia memberi perintah yang salah di dalam bahasa

Inggris. Ketika Tom Cruise, sebagai pengacara, itu berdebat dengan si Jenderal peradilan militer, Tom Cruise bertanya kepada Jenderal itu, "Is it clear?" Jawab si Jenderal, "Cristo". Di dalam bahasa Inggris *It is clear* 'saya senang, gitu'. Besoknya balik lagi. Jenderalnya bertanya, "Is it clear too you Cristo?" Pertanyaan itu diulangi lagi. 'Kan manis bahasa begitu. Nah, apakah kita bisa di dalam film cerita televisi itu dibuat bahasa Indonesia yang manis dan dinamik?

2. **Penanya:** Hamzah Mahmud, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Makalah Ibu cukup menarik. Komentar saya begini, Bu. Kalau benar-benar media televisi itu ingin membantu pembinaan dan pengembangan bahasa, mengapa ada penafsiran sinetron-sinetron yang berbahasa asing itu diinggriskan, lalu teksnya dalam bahasa Indonesia. Ini benar-benar tidak menguntungkan. Lalu, bahasa Inggris yang mereka isikan benar-benar bahasa Inggris yang sulit diterima karena bahasanya kadang-kadang kalang kabut.

b. **Jawaban:**

Masalah sulih suara sama-sama, misalnya dibuat dalam bahasa Inggris, bahasa Inggrisnya pun katanya salah, tetapi disulih ke dalam bahasa Indonesia pun juga bukan bahasa Indonesia orang Indonesia. Misalnya, "Ronaldo, apakah engkau sudah makan, Ronaldo?" Tidak ada orang Indonesia yang mengatakan begitu. Saya di mana-mana tidak pernah dengar, "Karim, apakah engkau masih lapar?" Tidak ada yang begitu. Jadi, sama lagi karena hal itu memang tidak kontekstual. Penyulih suara, baik ke bahasa Indonesia maupun ke bahasa Inggris, memang tidak kontekstual. Tidak kontekstual, tidak melihat sebetulnya bahasa Indonesia itu hidup di masyarakat. Jadi, sebenarnya, kita harus memproduksi sendiri, tetapi mampukah kita memproduksi sendiri? Mudah-mudahan dengan televisi yang saya buat nanti, saya akan sekaligus membuat pelatihan sekolahnya. Itu dapat saya capai. Artinya, bagaimana? Nanti kita kerja sama, ke Bandung, ke Medan, juga sampai ke Ujung Pandang. Nah, tadi sudah terjawab sekaligus masalah sulih suara.

3. **Penanya:** Wan Syaifuddin, Universitas Sumatera Utara, Medan

a. **Pertanyaan:**

Memang disadari bahwa salah satu kemodernan adalah gerak teknologi komunikasi yang begitu cepat dan gerakannya itu tidak linear lagi karena cepatnya. Tentu banyak hal yang sangat mempengaruhinya. Banyak istilah yang kita serap, yang kita peroleh dari jaringan-jaringan televisi yang cukup mengglobal. Di sini posisi kita lebih banyak bersifat sebagai konsumen saja, sebagai penerima saja. Jadi, istilah-istilah *valentine day* dan *all and you* itu sangat populer di Indonesia. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana sikap Ibu secara pribadi terhadap istilah-istilah itu ataupun sikap Ibu dalam mengambil

kebijaksanaan terhadap istilah-istilah yang demikian?

b. Jawaban:

Dalam menyikapi istilah, apakah istilah asing atau istilah daerah, haruslah istilah-istilah itu yang kontekstual. Istilah kontekstual artinya yang "sesuai dengan konteks". Kalau memang belum ada padanannya dalam bahasa Indonesia, istilah itu tidak salah dipakai, misalnya *komputer*? Apakah kita harus berseminar mengadakan sidang untuk menyulihbahasakan atau menerjemahkan apa yang dimaksud dengan *komputer*, *telepon*, dan *handphone*. Istilah *telepon genggam* sama maksudnya dengan *handphone*. *Handphone* lebih pendek atau lebih singkat daripada *telepon genggam*, malahan orang mengatakan *HP*. "Nomor *HP*-nya berapa?", bukan "*Telepon genggamnya nomor berapa?*" Jadi, sikap saya adalah bagaimana kita membuat bahasa Indonesia itu secara baik dan benar. Tentu, di dalam baik dan benar itu ada yang dinamakan kontekstual.

Ada beberapa hal lagi. Kalau mau dikatakan istilah, anggap saja istilah, tetapi kalau mau dikatakan akronim, memang akronim. Hal itu sudah tidak "ketulungan" lagi banyaknya. Saya tidak bisa membayangkan seseorang yang belajar bahasa Indonesia di Australia, Jepang, Amerika, Kanada, mungkin juga di Prancis ketika datang ke Jakarta ini. Dia sudah tamat dan membawa ijazah dari sana. Ternyata, setelah dia dengar berita di televisi, banyak kata atau akronim yang tidak dia mengerti. Apakah dia tahu maksud *mendikbud* atau *sembako*? Dia buka kamus, tetapi tidak ada kata itu. Jadi, memang kita memakai akronim-akronim itu sudah keterlaluan dan sejarah akronim itu sudah kita baca di surat kabar dan kita dengar juga di *talk show*, konon katanya diawali oleh pemakai-pemakai istilah. Dalam militer akronim itu sangat banyak karena kalau dipanjangkan sangat susah, lalu dipendekkan oleh pihak militer sendiri. Nah, karena katanya ada unsur *power*, lalu pihak sipil mengambilnya. Nah, itulah yang terjadi.

4. Penanya: Elfrida W.S. Sumampouw, Universitas Tadulako, Palu

a. Pertanyaan:

Saya hanya ingin bertanya kepada Ibu, mengapa Ibu mengatakan *televisi*, tetapi akronimnya *tivi*?

b. Jawaban:

Baik, terima kasih. Kalau kita lihat dalam siaran televisi, misalnya SCTV, TVRI, saya mengucapkan [*tivi*], terima kasih saya diingatkan karena saya pun pada saat tertentu bisa bercampur aduk. Memang untuk belajar televisi ini saya belajar di Barat, 3 tahun ambil master, 6 tahun ambil Ph.D., kemudian juga untuk ilmu-ilmu *skill*, ilmu-ilmu keterampilan. Guru-guru saya orang Jerman. Jadi, segala macam itu juga melekat. Terima kasih. Jadi, kalau nanti ada wawancara di televisi, saya harus mengatakan *teve*.

5. Penanya: (tidak menyebutkan nama)

a. Pertanyaan:

Tidak ada seorang pun yang menyangka betapa besar pengaruh televisi terhadap pembinaan dan pengembangan bahasa. Akan tetapi, dalam kenyataannya penyiar yang demikian banyaknya dinilai oleh para penonton itu ternyata masih belum mampu menyebutkan nama beberapa huruf. Yang paling sederhana saja, misalnya pengucapan a, b, c, d, tampaknya belum/tidak mampu. Ibu sendiri saya dengarkan masih mengucapkan *tivi*, belum *teve*, ini saya kira contoh yang sangat sederhana. Saya kira perlu ada pelatihan bagi beberapa penyiar itu. Nah, yang paling sederhana saja, bagaimana mengucapkan abjad Indonesia.

b. Jawaban:

Mengenai lafal, saya kira lafal penyiar TVRI sudah bagus. Sudah ada standar, tetapi memang penyiar-penyiar yang di televisi swasta sangat susah karena memang di TVRI itu ada *training center*. Penyiar TVRI selama 6 bulan mengikuti pelatihan, sama dengan RRI, sedangkan di televisi swasta tidak ada pelatihan yang demikian karena tidak ada biaya. Jadi, di dalam makalah saya, saya katakan bahwa mungkin dewan pembina bahasa rajin-rajinlah membuat kritikan karena, kalau tidak dikritik, tidak tahu kesalahannya. Televisi itu komunikasi satu arah. Dia berbicara, orang menerima. Masukan itu tidak bisa diterima hari itu juga. Jadi, alangkah baiknya kita semua, terutama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tidak hanya membuat kongres yang demikian, tetapi punya komite kecil yang melakukan analisis isi siaran atau analisis apa-apa untuk disampaikan kepada pihak pengelola televisi tersebut. Jadi, saya terima kritiknya.

6. Penanya: Djoko S. Pasandaran, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Dalam televisi penggunaan bahasa ada dua kategori, kategori hiburan dan kategori berita. Kategori berita menggunakan bahasa formal. Dan, bahasa televisi, baik TVRI maupun televisi swasta, sudah bagus. Artinya, walaupun tidak sempurna benar, bahasa yang dipakai itu sudah dapat digunakan sebagai contoh penggunaan lafal yang mendekati "baku" dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk kategori hiburan alangkah kacau bahasanya. Dan, itu justru yang paling banyak menciptakan kerusakan bahasa di masyarakat yang justru menyulitkan guru-guru dan dosen-dosen. Mohon perhatian Ibu tentang hal ini. Dalam usaha pembinaan bahasa Indonesia di televisi, sebaiknya tidak hanya bahasa dalam acara formal yang diperhatikan, tetapi para pelaku televisi itu ditertibkan juga bahasa hiburannya, apalagi pemainnya banyak sekali yang menggunakan dialek Betawi yang besar sekali pengaruhnya terhadap bahasa anak-anak muda. Kami harap ada usaha untuk mengurangi lafal yang tidak baku itu. Ada satu hal yang perlu dipikirkan. Ketika saya pulang ke sebuah

kota kecil di Palangkaraya beberapa tahun yang lalu, ada tukang becak sedang menonton televisi. Setelah saya perhatikan, ternyata yang mereka tonton itu adalah acara siaran pembinaan bahasa Indonesia oleh Pak Badudu. Namun, kini Pak Badudu tidak membawakan acara itu lagi. Kita perlu belajar tentang mengapa Pak Badudu sangat disenangi sebagai pembawa acara itu.

b. Jawaban:

Ihwal bahasa berita, menurut pengamatan saya, belum sempurna. Saya sendiri ketika masih bertugas di Liputan 6, terkadang tidak mengerti apa yang dimaksudkan wartawan itu. Memang ada kalimat sampai tiga paragraf. Walaupun kata demi kata saya tahu itu bahasa Indonesia, isinya tidak ada. Jadi, dia di awang-awang, *hanging in the sky*, apakah kata, pokok kalimat, predikat, atau objek secara gramatikal sudah ada? Jadi, tolong diperhatikan baik-baik berita televisi swasta itu. Itu dilihat dari sudut gramatikal. Dari segi isi juga saya katakan masih belum baik. Dari segi hiburan, katakanlah sinetron, misalnya, bahasanya sudah baik, tetapi apakah memang demikian? Misalnya, seorang istri berbicara kepada suaminya, "Abang, tidakkah sebaiknya anak kita, si Mona, masuk sekolah keterampilan wanita agar nanti, apabila ia kawin, dapatlah ia" Nah, itu 'kan baik bahasa Indonesianya? Akan tetapi, apakah begitu ibu-ibu berbicara kepada suaminya?

Saya kira, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yang paling banyak tahu tentang bahasa, yang punya pekerjaan rumah karena yang akan memberikan masukan. Kemudian, tentang pengajaran bahasa Indonesia. Kalau, misalnya, Pak Badudu atau Pak Hasan Alwi atau siapa saja ahli bahasa Indonesia yang mau mengajarkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, tetapi dengan cara kelas tidak akan ditonton orang. Saluran yang lain menyiarkan acara/program yang lebih menarik, apakah itu film, tebak-tebakan, akan ditonton daripada melihat Pak Badudu, satu *shot*, satu komposisi, berbicara soal bahasa Indonesia lagi. Namun, ketika dia mengampanyekan bahasa Indonesia, dengan muatan yang memang kontekstual, berhubungan dengan situasi sekarang, dan dia menggelitik intelektual, saya mungkin bisa betah menonton Pak Badudu. Katakanlah ia membahas masalah santet, tetapi dengan bahasa Indonesia yang baik, dan memang dikatakan oleh Pak Badudu, "Saudara penonton, hari ini saya akan mengajarkan bahasa Indonesia, yang pokoknya ialah bagaimana penggunaan begini, tetapi istilah dan cara-cara itu akan saya gunakan di dalam masalah kajian tentang santet. Seperti kita ketahui, santet ..." Dia berbicara soal santet. Jadi, saya tertarik pada isi santet, tetapi ketika dia menerangkan tentang isi santet itu, bahasa Indonesia yang dia pakai itulah yang ingin dia kampanyekan. Jadi, jangan dikatakan "Saudara, seperti kita ketahui, pokok kalimat", tidak ada yang mau nonton. Nah, itulah televisi. Televisi adalah hiburan, apa pun muatannya. Apakah muatannya berita ataupun ilmu pengetahuan populer tetap harus disajikan dalam bentuk hiburan. Gambar dan suara harus dikemas untuk membuat orang di rumah menahan

diri tidak pergi ke peti es atau kulkas. Pada saat orang menelepon kepadanya, ia tidak mau menerima telepon dan bilang, "Tidak ada". Hal itu terjadi karena enaknya menonton televisi. Itulah hukum televisi.

7. Penanya: Adi Sunaryo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Saya menyambut baik keinginan Ibu untuk mendirikan stasiun televisi, tetapi jangan lupa pada pakar bahasa yang benar-benar bergelimang dalam pembinaan bahasa Indonesia. Jadi, jangan sekadar ambil ahli bahasa sembarangan bahasa, tetapi gunakan orang yang benar-benar bergelimang di dalam pembinaan. Itu pesan saya. Dan, pertanyaan saya, apakah tidak mungkin TVRI mengajak kerja sama dengan televisi swasta merelai siaran pembinaan bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Baik, nanti kalau stasiun saya berdiri, saya akan membuka pasangan saya dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk belajar televisi supaya bisa membuat program televisi. Jadi, jangan orangnya datang masuk studio televisi lalu pidato; itu tidak ada yang mendengar. Dan, kemudian merelai siaran. Nah, ini untuk pertama kali saya katakan bahwa saya paling tidak setuju dengan relai siaran karena dengan relai itu tidak ada demokrasi. Orang disuruh menonton pada satu saat seakan-akan orang lain tidak boleh punya pilihan atau orang lain dianggap masih bayi tidak dapat memilih, lalu orang itu dipaksa harus seragam. Sebetulnya saya paling tidak setuju dengan siaran relai. Kalau berani berkompetisi, apa pun yang kita buat, mana lebih bagus Marilyn Monroe, satu perdebatan, *talk show*, tebak-tebakan, atau film cerita? Pak Sunaryo berani *single* ngomong, mana yang lebih menarik, Pak Sunaryo atau Marilyn Monroe-nya?

Penonton akan senang, Pak. Semuanya akan senang terhadap masalah yang disajikan Pak Sunaryo, saya, suami saya, anak saya, negara saya; masalah komunitas saya, tetangga saya, itu akan dibandingkan dengan Marilyn Monroe tadi. Masalahnya adalah mestikah kita membuat program televisi? Jadi, jangan relai karena relai itu adalah pemasangan terhadap demokrasi. Sebaliknya, marilah kita berkompetisi. Saya berani berkompetisi, misalnya, di stasiun lain. Mereka taruh film Hollywood yang sudah wah, yang harganya dibeli 200 juta, dan saya sudah pengalaman dengan Liputan 6. Jadi, artinya apa? Mari kita berkompetisi, jangan relai, apalagi kalau relai bagaimana meningkatkan bahasa Indonesia. Pertama adalah mengertikah para pembuat program televisi itu apa pun muatannya, apakah bahasa Indonesia atau matematika. Sebetulnya apakah sifat televisi? Sifat televisi itu menghibur orang di rumah, sambil duduk-duduk, apalagi televisi sekarang sudah pakai tombol-tombol. Nah, kalau dilihat, stasiun yang lain itu ada 6. Kalau caranya tidak menarik, ia akan pindah stasiun lain, apalagi *compact disk* (CD) sekarang

hanya Rp20 ribu, apakah itu CD bajakan atau bukan, begitu juga sudah berlangganan Indovision, dan ada komputer lagi. Jadi, harus mulai kita pikirkan agar siaran relay ditiadakan karena kita harus berkompetisi dan saya yakin bahwa masalah kita pasti menang jika yang sifatnya dibandingkan dengan masalah-masalah lain. Artinya, kalau saya bikin program, katakan metropolitan saya berusaha membuat orang metropolitan lebih suka nonton itu daripada yang terjadi di Kolombo. Jadi, masalah kedekatan kita itu akan dilihat. Nah, dengan berpijak dari situ, kita kampanyekan apa yang menjadi masalah kita. Saya kira begitu.



PERAN PERS DALAM PEMASYARAKATAN HASIL PEMBAKUAN BAHASA INDONESIA

Parni Hadi

Pemimpin Umum *HU Republik*/
Pemimpin Umum LKBN ANTARA

Bahasa Indonesia mengenal banyak varian. Salah satu varian terpenting adalah "bahasa pers" atau yang dikenal sebagai "bahasa jurnalistik", yakni bahasa yang digunakan para wartawan dalam menulis karya-karya jurnalistik (berita ataupun *feature*), dan dimuat di media massa cetak.

Sebagai media informasi terpenting, pers potensial untuk menjadi sarana pemasyarakatan pembakuan bahasa. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada penelitian sejauh mana media massa cetak sudah dimanfaatkan untuk itu. Namun, selama ini dari kalangan pers sudah melakukan banyak upaya untuk mempraktikkan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Setidaknya, hampir semua media cetak (termasuk *Republika*) sudah memiliki "buku gaya" sebagai acuan untuk mendisiplinkan para wartawan dan redaktornya agar mematuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

Memang pernah ada kritik bahwa bahasa media massa cetak sering memperlihatkan kecenderungan yang kurang mempedulikan kaidah-kaidah tata bahasa. Suatu hasil penelitian menunjukkan bahwa ada lima macam kesalahan yang terdapat pada bahasa pers, yakni *kesalahan morfologis* (tata bentuk kata), *kesalahan sintaksis* (tata kalimat), *kesalahan penyerapan*, *kesalahan ejaan*, dan *kesalahan pemenggalan kata*. Hal itu terjadi semata-mata karena kekurangcermatan *editing* para redaktornya, bukan karena kesengajaan kalangan pers untuk tidak mematuhi kaidah bahasa.

Walaupun tetap berkembang dengan karakternya sendiri, dengan prinsip *singkat, padat, lugas, dan menarik*, seperti pernah dikatakan Rosihan Anwar, bahasa pers tetap terikat pada kaidah-kaidah atau prinsip bahasa Indonesia yang baik dan benar. Prinsip "baik" mengacu pada konteks pemakaiannya, sedangkan prinsip "benar" merujuk pada kesesuaiannya dengan kaidah-kaidah tata bahasa. Misalnya, untuk konteks kutipan dialog langsung bisa saja wartawan/redaktur membiarkan munculnya kata-kata atau dialek khas (*slank*) yang tidak baku demi menghidupkan suasana atau nuansa sosial tertentu, tetapi untuk narasinya sedapat mungkin sang wartawan memakai kata-kata dan kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang baku.

Kalangan pers umumnya menyadari bahwa bahasa yang dipakainya di koran/majalah akan berpengaruh besar terhadap praktik berbahasa masyarakat pembacanya dan pertumbuhan bahasa Indonesia. Sebaliknya, pers sebenarnya juga merupakan cermin atau refleksi praktik berbahasa Indonesia masyarakatnya. Jika bahasa Indonesia masyarakat buruk, buruk pula bahasa Indonesia persnya; jika bahasa Indonesia masyarakat baik, baik pula bahasa persnya. Apalagi jika bahasa Indonesia para pejabat--yang banyak dikutip di pers--buruk, akan buruklah bahasa pers.

Walaupun begitu, pada akhirnya kualitas bahasa pers akan sangat dipengaruhi

oleh tingkat kemampuan berbahasa para jurnalis dan redaktornya. Jika kita teliti, berbagai kelemahan dan kesalahan yang terdapat pada bahasa pers, terutama disebabkan oleh kelemahan sumber daya manusia pers itu. Oleh karena itu, penguasaan bahasa Indonesia merupakan syarat mutlak bagi para jurnalis dan redaktur untuk dapat mewujudkan suatu kondisi bahasa pers yang *baik dan benar*, yang pada gilirannya dapat ikut memasyarakatkan hasil pembakuan bahasa.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A8
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.50--17.40
Judul Makalah	: Peran Media Massa Cetak dalam Pemasarakatan Hasil Pembakuan Bahasa
Penyaji	: Parni Hadi
Pemandu	: Edi D. Subroto
Pencatat	: a. K. Biskoyo b. Marida G. Siregar
Peserta	: 150 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Max Tarungan, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Bagaimana halnya peran pemsarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan media lain, para pejabat dan masyarakat, karena sumber berita itu bukan hanya pejabat, melainkan pula masyarakat, dan pemsarakatan bahasa Indoesia yang baik dan benar harus dilakukan oleh semua orang.

b. Jawaban:

Pendapat Anda mengenai perbaikan pemsarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh semua lapisan dan golongan masyarakat sebagian betul. Akan tetapi, harus diingat bahwa kami, para wartawan, hanya mengutip. Oleh sebab itu, bahasa sumbernya harus dibetulkan dahulu. Sebaiknya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa akan berwibawa jika dapat memberikan penataran kepada para pejabat. Jadi, sumber daya manusianya perlu ditatar. Alangkah baiknya jika bahasa Indonesia menjadi salah satu syarat untuk kenaikan jabatan. Hal ini dapat kita pertegas karena telah dibukanya kesempatan oleh Presiden "hindari eufemisme, hindari bahasa feodal", maka kita harus keluar dengan sebuah resolusi bahwa kemampuan berbahasa Indonesia bagi pejabat adalah mutlak.

2. Penanya: Kosmansyah, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. Pertanyaan:

Saya baru saja mengikuti diklat bahasa pers dan di situ banyak keluhan karena wartawan menggunakan bahasa yang kurang baik dan kurang benar. Apakah kerancuan penggunaan bahasa yang kurang benar berkait dengan pemilihan wartawan yang 10 tahun terakhir tidak berdasarkan latar belakang jurnalistik, tetapi berdasarkan latar belakang keilmuan? Dari kecenderungan di perguruan tinggi, mahasiswa yang tidak berlatar belakang jurnalistik dan bahasa lebih baik bahasa Indonesianya. Demikian juga halnya mahasiswa yang berlatar belakang

non-IPS. Apakah kecenderungan itu ada dalam dunia wartawan?.

b. Jawaban:

Ada hubungan yang erat antara kemampuan berpikir, berbicara, dan menulis. Kini wartawan yang maju ataupun yang top bukan yang berlatar belakang pendidikan publisistik, bukan dari jurusan ilmu komunikasi. Pendidikan publisistik pada umumnya tercatat sebagai pilihan kedua atau ketiga. Mereka yang berlatar *nonengineering* biasanya pemikirannya berputar-putar, tidak logis. Di *Republika*, misalnya, banyak wartawan dari IPB. Kemampuan berpikir tercermin dari penggunaan bahasa. Jadi, sekali lagi kemampuan berbahasa dilatarbelakangi oleh kemampuan berpikir. Yang penting ada hubungan antara kemampuan berpikir dan kemampuan berbahasa, antara ilmu dan pengekspresian dalam kata-kata.

3. Penanya: Ikhwan M. Said, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah ada kaitan antara pertimbangan ekonomis kolom dan kesalahan dalam berbahasa tulis, seperti kesalahan pemenggalan kata?
- 2) Bagaimana latar belakang pendidikan tukang cetak dalam media massa cetak yang barangkali latar pendidikan itu akan mempengaruhi pemahaman mereka terhadap, misalnya, pemenggalan kata yang benar?

b. Jawaban:

- 1) Alasan tentang adanya ekonomi kata, betul. Ekonomi kata membuat orang berpandangan "yang penting sampai tujuan". Pandangan yang demikian itu salah. Lebih sulit menulis pendek atau singkat, padat, dan akurat daripada menulis panjang yang kurang isinya. Jadi, bukan alasan ekonomi kata yang membuat bahasa media massa sebagian jelek, tetapi kemampuan untuk berpikir dan nalar sangat mempengaruhinya. Hal itu dapat juga disebabkan oleh kurang pedulinya para pengasuhnya. Ekonomi kata justru akan mendorong kita ke arah penggunaan bahasa yang baik.
- 2) Dulu memang ada tukang cetak. Sekarang semua pekerjaan dilakukan di komputer. Reporter dan redaktur yang langsung masuk ke percetakan dan tidak melewati *letter setter*. *Letter setter* tidak ada lagi sekarang. Oleh sebab itu, redaktur bahasa harus ada. Redaktur bahasa di media massa terbatas jumlahnya atau tidak ideal sehingga seharusnya ditempuh usaha memungkinkan para redaktur dan reporter untuk menguasai bahasa Indonesia dengan baik.

4. Penanya: Dahlan Abubakar, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Kesalahan berbahasa pada wartawan mungkin harus diakui. Kesalahan itu mungkin disebabkan oleh hasil produk pendidikan yang kurang baik. Bagaimana mengenai hal ini?

b. Jawaban:

Kekurangan atau kesalahan berbahasa pada wartawan memang diakui. Namun, peran media massa dalam membesarkan sastra dan budaya juga harus diakui. Sekarang sudah saatnya saling membantu.

5. Penanya: Bakhrum Yunus, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh**a. Pertanyaan:**

Bahasa dalam media massa adalah berita yang tendensius dan berita yang menarik sesuai dengan, misalnya, kehendak pemimpin surat kabar. Bagaimana tanggapan Bapak?

b. Jawaban:

Anda benar, tetapi surat kabar yang baik bukan surat kabar yang menggunakan bahasa yang sensasional. Jika sudah mengendap, masyarakat akan memilih surat kabar yang bahasanya tidak meledak-ledak, tidak menjual sensasi, dan yang logis. Namun, sekarang ada obral, adu berani. Jika dikatakan bahwa bahasa media massa adalah bahasa yang munafik, tampaknya hal itu benar karena bahasa yang dimuat di media massa adalah bahasa yang sudah terpersepsi oleh redaktur, reporter, pemimpin redaksi, dan pemilik. Informasi atau berita adalah produk yang tidak bebas nilai (*not value free*). Informasi adalah produk yang syarat dengan muatan kepentingan. Pengaruh pasti ada dari pemiliknya, pengasuhnya, dan pendukungnya (pembaca). Pernah dikatakan orang bahwa berita di media massa kita yang benar 30% dan yang bohong 70%, sedangkan di media massa asing yang benar 70% dan yang bohong 30%. Jangan-jangan pers Indonesia banyak bohongnya karena mengutip sumber dari Pemerintah. Jadi, yang bohong bukan wartawan.

6. Penanya: Mansoer Pateda, STKIP Gorontalo**a. Pertanyaan:**

Saya mengikuti pendapat Pak Gazali pada pertemuan Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) di Bandung yang mengatakan bahwa meluruskan para pejabat adalah pekerjaan yang sudah terlambat dan orang yang berusia tua sudah sulit diubah. Oleh sebab itu, lebih baik kita memantapkan pengajaran bahasa Indonesia mulai dari taman kanak-kanak. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini?

b. Jawaban:

Tidak ada kata terlambat, ada kata-kata dalam bahasa Inggris *latter better than never* 'lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali'. Perbaikan itu harus kita mulai, senyampang presiden kita sedang bersemangat untuk memperbaiki bahasa Indonesia. Kita harus mengupayakannya. Bapak bekerja di bidang pendidikan. Saya pernah menemukan buku pelajaran anak saya. Di dalam buku itu ada penggunaan kata *daripada*, yang salah, yaitu "*Ini hadiah daripada ...*".

Mengapa hal itu bisa lulus? Naskah itu seharusnya tidak diterima atau tidak terbit.

7. Penanya: Dea Anggraeni, Universitas Airlangga, Surabaya

a. Pertanyaan:

Kata *sangkal* dan *mangkus* serta *terkait dan sepadan* untuk *link and match* tidak banyak dipakai/dimasyarakatkan oleh pers karena kata-kata itu merupakan produk baru. Bagaimana pers menghadapi tuntutan penguasa (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) tentang hal ini?

b. Jawaban:

Bahasa itu rasa, rasa bisa terbentuk karena terbiasa. Menurut perasaan saya, kata *sangkal* terkesan seperti *kikil* (kulit daging), sedangkan untuk *mangkus*, saya orang Jawa Timur, saya teringat kata *angkus*. Para penguasa tidak boleh memaksakan sebuah istilah untuk dipakai. Sebaiknya, para penguasa tidak memaksa seperti itu. Ini zaman reformasi. Pelan-pelan diyakinkan bahwa kedua kata itu harus digunakan. Baiklah, saya akan memaksakan diri saya memakai kata *sangkal* dan *mangkus*. Bagi saya lebih enak menggunakan *Anda cendekia* daripada *Anda sangkil*.

8. Penanya: Hunggu Tadjudin Usup, IKIP Manado

a. Pertanyaan:

Walaupun tidak enak bagi pendengaran, bagaimana dengan pemakaian kata-kata *sangkal* dan *mangkus* tadi, seperti halnya obat, bukankah pahit rasanya?

b. Jawaban:

Alangkah enaknya kalau hal itu sedikit agak manis. Akan tetapi, saya katakan kepada rekan-rekan wartawan sesuai dengan permintaan teman-teman pakailah *sangkal* dan *mangkus* walaupun itu pahit.

9. Penanya: Nafron Hasjim, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Saya mendengar informasi yang disampaikan oleh Pak Parni bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus berani menatar jenderal. Barangkali Pak Parni lupa bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu adalah lembaga eselon dua. Oleh karena itu, mohon petunjuk apa yang dapat dibantu oleh para wartawan dalam hal meningkatkan status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

b. Jawaban

Setuju, diharapkan para wartawan dapat mendukung agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa berani menatar pejabat dan jenderal.

PERANAN MEDIA MASSA DALAM PEMASYARAKATAN HASIL PEMBAKUAN BAHASA

Abbas Mohd. Shariff

Universiti Teknologi Nanyang, Singapura

1. Pendahuluan

Kita sedang melalui zaman yang sungguh mencabar, iaitu zaman revolusi teknologi maklumat. Kecanggihan teknologi maklumat membuatkan dunia menjadi begitu kecil dan bersepadu. Alvin Toffler menamakan zaman teknologi maklumat ini sebagai gelombang perubahan ketiga. Nenek moyang kita telah melalui dua zaman yang terdahulu, iaitu zaman revolusi pertanian dan revolusi perusahaan.

Sarjana kajian masa depan (*futurists*) seperti John Naisbitt dan Patricia Aburdene (*Megatrends 2000*, 1990) telah meramalkan bahawa "*di hadapan kita ialah dekad yang paling penting dalam sejarah peradaban, satu zaman inovasi teknologi yang hebat, kewujudan peluang ekonomi yang tak terhingga, reformasi politik yang memajukan serta kelahiran kembali budaya agung....*" Sarjana-sarjana lain seperti Samuel Huntington (*Clash of Civilization*, 1997), Paul Kennedy (*Preparing for the 21st Century*, 1993), dan Richard Barnet dan John Cavanagh (*Global Dreams*, 1994), telah meramalkan mengenai tekanan gejala globalisasi yang akan mengancam keperibadian manusia dan ramai akan merasa kehilangan tempat berpijak dan ini akan menjadikan negara-negara bangsa di dunia lebih nasionalistik dan lebih kuat berpegang kepada jati diri budaya masing-masing.

Kecanggihan teknologi maklumat telah membawa perubahan yang begitu menakjubkan dalam media massa. Media massa pula merupakan bidang yang menggunakan ilmu komunikasi. Media massa berbicara dengan jutaan manusia secara serentak dan serempak. Kehebatan Peperangan Teluk yang berlaku pada tahun 1991, rintihan masyarakat Somalia dan Rwanda, kesengsaraan masyarakat Bosnia, pelanggaran bintang Musytari dan peristiwa-peristiwa yang lain dapat ditonton melalui kaca televisyen di seluruh penjuru bumi. Masyarakat hari ini lebih terdedah kepada media massa, dan secara langsung atau tidak langsung maklumat daripada media massa banyak mempengaruhi cara kita berfikir dan cara kita bertindak. Media massa berupaya membentuk nilai dan sikap. Peranan yang dimainkan oleh media massa adalah untuk menyampaikan maklumat untuk membina suatu masyarakat yang berilmu pengetahuan serta bersifat menghibur.

Pelbagai cara digunakan untuk menyampaikan maklumat, iaitu melalui media cetak dan media elektronik dan hampir semua bidang tersebut menerima kesan perkembangan teknologi maklumat. Bidang media massa membawa pulangan pelaburan yang amat menguntungkan dan menjadi sumber pendapatan bagi berjuta-juta orang.

Negara-negara membangun yang sedang menuju kepada taraf negara maju sangat-sangat memerlukan media massa untuk memudahkan dan mempercepatkan penyampaian maklumat serta menyelesaikan berbagai masalah. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju yang telah mengambil masa yang agak lama untuk menikmati ke-

majuan, dengan media massa negara-negara membangun ini dapat meningkatkan masa bagi mencapai kemajuan dan kejayaan yang sebanding dengan negara-negara maju.

Untuk memahami dengan lebih dalam mengenai peranan media massa, kita tinjau secara sepintas lalu mengenai erti maklumat dan kaitannya dengan komunikasi teknologi maklumat, erti komunikasi massa serta peranan media massa dalam masyarakat hasil pembakuan bahasa.

2. Maklumat dalam Era Globalisasi

Dalam dunia yang senantiasa berubah ini, maklumat juga turut berubah dan manusia harus mengemaskinikan maklumat dari semasa ke semasa. Sekarang timbul soalan, apakah maklumat itu dan apakah kaitannya dengan teknologi maklumat? Maklumat ditakrifkan sebagai fakta, data, atau berita. Perkembangan maklumat sungguh pesat sehinggakan kadang-kadang disebut sebagai ledakan maklumat. Toffler (1970:30) menyatakan bahawa pada zaman sebelum 1500, Eropa menghasilkan buku-buku dalam kadar 1.000 tajuk setiap tahun. Ini bererti dalam satu abad 100.000 tajuk dapat dihasilkan. Empat setengah abad kemudian iaitu pada tahun 1950, kadar buku-buku yang dihasilkan meningkat sehingga menjadi 120.000 tajuk setahun. Ini bererti bahawa kalau dahulunya dalam satu abad jumlah buku sebanyak itu dapat dihasilkan, kini dalam 10 bulan sahaja kadar sebanyak itu dapat dihasilkan. Sepuluh tahun kemudian, iaitu pada tahun 1960 usaha penghasilan seabad itu telah dapat dicapai dalam sesingkat waktu tujuh bulan setengah sahaja. Pada 1960-an, sebanyak 1.000 tajuk dapat dihasilkan sehari menurut kadar pengeluaran dunia termasuk Eropa. Perkara ini sungguh menakjubkan dan *trend* ini semakin menyerlah dengan adanya pelbagai jenis teknologi canggih.

Golongan media massa percetakan sungguh bimbang dengan perkembangan yang mencabar ini. Kini alat elektronik berangsur-angsur mengambil alih tugas yang dahulunya hanya dikuasai oleh media percetakan. Jika seseorang inginkan sesuatu maklumat, dengan sentuhan jejari sahaja akan terpaparlah maklumat yang diinginkannya di skrin komputer.

Usaha ke arah mencipta akbar masa depan secara elektronik bukan sahaja menjadi impian malah sedang direalisasikan di beberapa buah negara. Perkembangan ini akan membawa suatu perubahan besar dalam cara kita mendapatkan maklumat dan ini akan membawa perubahan budaya. Mungkin pada masa akan datang, generasi yang akan mengendalikan industri akbar berbeda dengan generasi sekarang. Teknologi moden akan menghasilkan lebih banyak maklumat menerusi sistem elektronik, dan masyarakat ketika itu sudah mahir mendapatkan maklumat melalui sistem itu. Jika ini berlaku, berita melalui 'kertas' akan menjadi satu sejarah.

3. Teknologi Maklumat dan Komunikasi Massa

Perkembangan komunikasi massa bermula sejak perkembangan penggunaan kertas dan ciptaan mesin cetak. Pada mulanya media cetak tersebar di kalangan golongan yang tertentu sahaja, terutamanya golongan agama, elite politik, dan para cendekiawan.

Pada awal kurun ke-16, naskah-naskah buku yang dicetak di atas kertas mulai tersebar dan boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja yang berkebolehan membaca. Pada akhir kurun ke-19, akbar, buku, dan majalah sudah tersebar luas di kalangan masyarakat Barat.

Pada dekad pertama kurun ke-20 media elektronik mulai berkembang. Wayang gambar mula diperkenalkan sebagai media hiburan. Pada tahun 1920-an radio sudah menjadi popular di kalangan masyarakat Barat diikuti dengan televisyen pada tahun 1940-an. Pada pertengahan tahun 1960-an hampir setiap rumah di Amerika mempunyai radio dan televisyen.

Pada tahun 1970-an revolusi mikroelektronik telah menggemparkan dunia perdagangan. Berbagai alatan yang menggunakan kawalan cip-mikropemproses (*micro-processor*) telah membanjiri pasaran, seperti kalkulator, radio, dan alat-alat muzik.

Kebelakangan ini masyarakat moden banyak bergantung kepada komputer yang menggunakan sistem komunikasi maklumat dengan rangkaian sistem telekomunikasi melalui talian telefon dan satelit. Hal tersebut telah menjadikan dunia ini semakin kecil. Perhubungan antara satu negara dengan negara lain bukan sahaja semakin cepat dikendalikan, malah menjadi lebih mudah dan murah.

Berdasarkan perkembangan semasa, komputer juga boleh dianggap sebagai media komunikasi massa. Perkembangan komputer begitu cepat dan pada hari ini para saintis membicarakan komputer yang saiznya kecil, tetapi mempunyai kepantasan kuasa yang luar biasa. Malah sejak tahun 1960-an, usaha ke arah mengecilkan saiz komputer (*miniaturisation*) dengan adanya transistor dan mikropemprosesan telah menghasilkan mikrokomputer yang jauh berbeza dari segi saiz, kekuatan serta kemampuannya jika dibandingkan dengan komputer generasi lama.

Komputer dan mikroelektronik memberi kesan yang nyata dalam bidang media massa. Lebih-lebih lagi dengan bantuan telekomunikasi, maklumat dapat disampaikan sejauh yang dikehendaki dengan tepat dan cepat. Setiap tahun kadar perkembangan makin cepat bererti maklumat dapat dihantar lebih cepat daripada yang biasa. Ceramah yang diadakan di seberang laut boleh diikuti dalam bilik darjah di negara lain. Persidangan dapat dikendalikan dengan telekomunikasi tanpa kehadiran mereka dari luar negeri.

Suatu kesan positif yang terdapat melalui teknologi maklumat ialah pembukaan ruang komunikasi melalui saluran internet. Rangkaian komputer yang dihubungkan dengan komputer yang lain melalui internet dan sistem telekomunikasi satelit membolehkan kita memperolehi pelbagai maklumat dari mana-mana negara yang mempunyai sistem tersebut.

Dengan sistem intranet dan internet pusat pentadbiran pemerintah dapat dihubungkan melalui sistem elektronik untuk mengendalikan berbagai urusan pentadbiran negara seperti yang diusahakan di Kuala Lumpur melalui Koridor Raya Multimedia dan *Singapore One* di Singapura.

Jaringan internet berupaya untuk menampilkan berbagai maklumat untuk tatapan orang ramai dalam dunia yang sudah tiada batasan lagi. Surat kabar harian serta beberapa majalah dan jurnal dimuatkan di dalam internet. Bahan-bahan maklumat dalam bahasa Inggris sudah penuh sesak dan mudah diperolehi. Bahan-bahan dalam bahasa

Melayu/Indonesia boleh diakses melalui internet menurut alamat-alamat tertentu. Menurut Paitoon (1998), di rantau ini ada sekurang-kurangnya tiga-puluh laman berita dalam talian dalam bahasa Melayu/Indonesia dan yang paling banyak menyiarkan berita dalam bahasa Melayu/Indonesia ialah negara Indonesia. Jadual berikut memberikan daftar beberapa media akbar *on-line* yang terdapat di internet.

INDONEIA					
1	Bisnis Indonesia (www.bisnis.com)	8	Suara Kaltim (smd.mega.net.id/suarakaltim)	15	Jawa Pos (www.jawapos.com)
2	Kedaulatan Rakyat (www.kedaulatan-rakyat.com)	9	Pikiran Rakyat (www.pikiran-rakyat.com)	16	Manado Post (mdo.mega.net.id/mdo_pos/page1.html)
3	Kompas (www.kompas.com/kompas-cetak)	10	Suara Merdeka (www.suaramerdeka.com)	17	Republika (www.republika.co.id)
4	Tabloid BOLA (www.bolanews.com)	11	Harian Bernas (www.indonesia.com/bernas/)	18	Suara Pembaruan (www.suarapembaruan.com)
5	Riau Pos Online (www.riapos.co.id)	12	Detik (www.detik.com)	19	Waspada (www.waspada.com)
6	Pos Kupang (www.indonesia.com/posk/)	13	Akcaya (www.ekcaya.Coid)	20	Serambi Indonesia (www.indonesia.Com/Serambi)
7	Surya (www.surya.co.id)	14	Gema Olah Raga (www.go.co.id)	21	Kontan (www.kontan-online.com)

MALAYSIA			
1	Berita Harian Online (www.jaring.my/bharian)	4	Suara Johor Online (www.suara.johor.amum)
2	Harakah Internet Edition (www.jaring/pas/harakah/)	5	Urusan Malaysia Online (www.utusan.com.my/utusan/)
3	Jalanan JARING (www.jalanan-jaringan)		

SINGAPURA	
1.	Berita Harian (web3.asial.comsg/cyBerita/indexes/3newbtml)

BRUNEI

<p>1 Pelita Brunei</p> <p>(www.brunet.bn/news/pelita/pelita1.htm)</p> <p>2 Media Permata</p> <p>(web3.asia1.com.sg/borneo/)</p>

4. Proses Komunikasi Massa

Ada tiga unsur utama dalam komunikasi massa, iaitu (a) khalayak, (b) pengalaman komunikasi, dan (c) penyampai (komunikator).

a. *Khalayak*

Komunikasi massa tidak ditujukan kepada sesuatu sasaran sahaja malah ia terdedah kepada orang ramai atau khalayak yang beraneka ragam. Ini bermaksud bahawa khalayak sasaran komunikasi massa terdiri daripada orang ramai yang berbagai ragam dengan gaya hidup dan budaya mereka yang tertentu.

Tambahan lagi khalayak tidak dikenali secara peribadi oleh pihak tertentu (komunikator), walaupun mereka terpisah dari segi fizikal, tetapi tidak terpisah dari aspek psikologi. Dengan demikian, media massa berupaya membangkitkan perasaan serta mempengaruhi reaksi khalayak. Ini bererti bahawa komunikasi massa berperanan dalam mempengaruhi tingkah laku sosial.

b. *Pengalaman Komunikasi*

Sesuatu utusan dapat disampaikan dengan serta-merta dan secara langsung kepada khalayak, iaitu hampir serentak dengan penyampaiannya. Tambahan lagi utusan yang disampaikan bersifat awam. Pendengar atau pembaca mempunyai hak membantah, menyokong atau diberi kebebasan untuk menilai sesuatu utusan daripada komunikasi massa.

c. *Penyampai (Komunikator)*

Pihak yang menyampaikan sesuatu utusan bukanlah seorang individu, tetapi sebuah organisasi formal seperti organisasi radio, televisyen, dan telekomunikasi. Misalnya, pembaca berita di radio dan televisyen merupakan penyampai utusan, tetapi sumber utusan tersebut adalah milik suatu organisasi. Orang yang bertanggung jawab memilih dan menentukan apa yang perlu disiarkan oleh organisasinya dikenali sebagai pengampang berita. Sebagai contoh, penyunting adalah pengampang berita dalam agensi akbar.

d. Media Khusus dan Khalayak Khusus

Orang ramai sentiasa terdedah kepada utusan yang disampaikan tanpa mempunyai kawalan terhadap penyampaiannya. Namun, kita boleh menentukan apakah utusan yang hendak diterima dan apa yang harus ditolak. Proses memilih dan mengolah ini dikatakan sebagai proses bela diri.

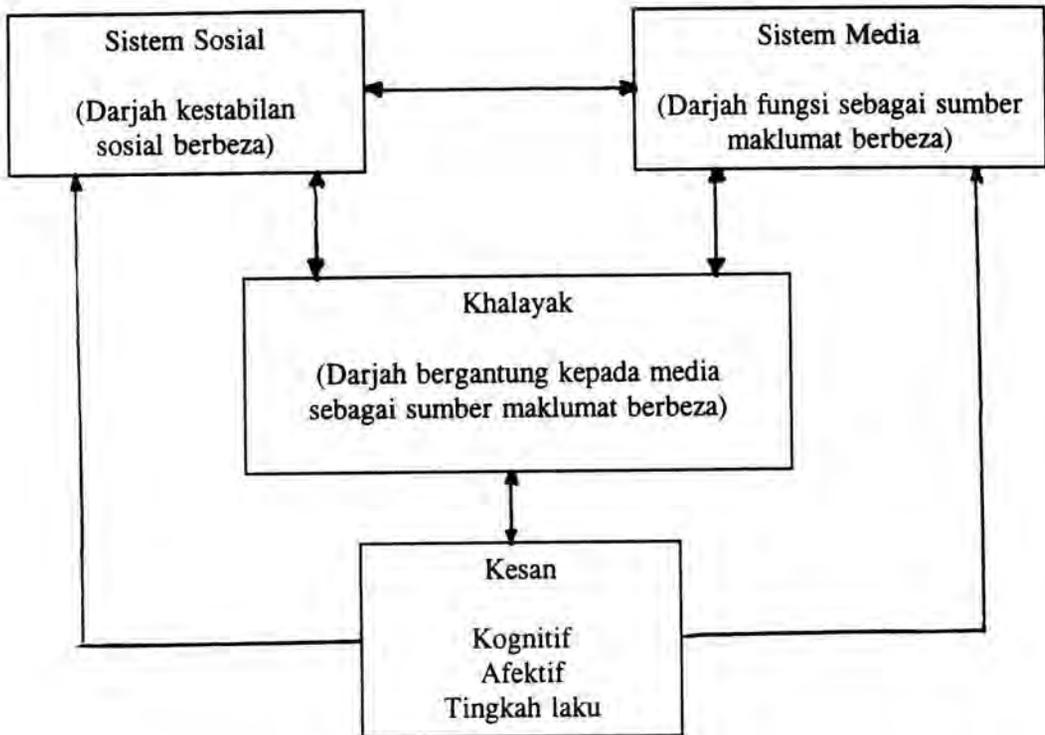
Sebagai individu dalam sesuatu masyarakat kita dibendung dengan nilai sosio-budaya masyarakat kita. Kita dipengaruhi dengan nilai-nilai kekeluargaan, agama, rakan sebaya, alam persekitaran, dan sebagainya. Segala utusan yang diterima melalui media akan dinilai berdasarkan nilai yang sedia ada pada diri kita. Mana yang secocok dengan nilai diri dan kumpulan akan diterima dengan mudah, tetapi jika sebaliknya, nilai itu akan mendapat perhatian yang sewajarnya.

Dalam sesuatu masyarakat ada berbagai jenis individu. Sikap dan personaliti individu juga boleh menjadi benteng bela diri daripada utusan media massa. Individu yang agresif yang suka menentang pendapat orang lain tidak akan mudah dipengaruhi oleh utusan komunikasi massa. Tegasnya sifat individu yang menentukan sesuatu utusan diterima atau tidak.

Di Barat dan juga di negara-negara rantau ini ada media massa cetak yang khusus ditujukan kepada khalayak yang khusus. Misalnya, terdapat majalah yang khas diterbitkan untuk pembaca remaja atau dewasa ataupun mengkhusus kepada bidang tertentu seperti majalah bahasa, majalah kereta, dan majalah komputer. Begitu juga media massa elektronik seperti radio, televisyen, dan komputer yang mempunyai khalayak khusus.

5. Model Komunikasi Massa

Ada berbagai model komunikasi massa yang boleh dijadikan pegangan golongan media massa. Model Ball-Rokeach dan DeFluer (1976) memberi gambaran yang jelas mengenai kesan media massa yang sedikit sebanyak mempengaruhi perubahan tingkah laku sama ada pada peringkat masyarakat, kumpulan, ataupun individu. Model ini menekankan faktor persekitaran, lebih daripada faktor individu yang mempengaruhi proses komunikasi.



Model seperti di atas menunjukkan tiga sistem iaitu sistem sosial, sistem media, dan sistem khalayak. Model ini membayangkan bahawa kesan media terhadap khalayak bergantung kepada sesuatu situasi berlakunya interaksi antara tiga sistem yang akan membawa kesan terhadap khalayak. Kesannya boleh berlaku menurut beberapa peringkat berikut.

- Peringkat kognitif ialah penambahan pengetahuan, perubahan fikiran, atau mendapatkan penjelasan.
- Peringkat afektif ialah merangkumi perasaan yang mewujudkan perasaan takut, bersimpati, ataupun meningkatkan moral.
- Peringkat tingkah laku ialah melakukan perbuatan yang disiarkan oleh media seperti menunjukkan tingkah laku ganas, terbeli untuk membeli barangan yang diiklankan, ataupun melakukan tingkah laku yang kurang sopan.

6. Media Massa dan Pendidikan

Kesan televisyen terhadap kanak-kanak sering menjadi bahan kajian para penyelidik pendidikan. Mereka sedar bahawa banyak faedah yang boleh diperolehi semasa media digunakan dalam proses pendidikan (pengajaran-pembelajaran). Apa yang mereka sungguh khuatir ialah rancangan yang bersifat keganasan yang ditayangkan di televisyen yang ditonton oleh kanak-kanak tanpa bimbingan mungkin akan menimbulkan suatu generasi yang bersifat ganas. Walaupun pihak televisyen komersil sering me-

nantang kritikan tentang keganasan dalam rancangan mereka, kita harus prihatin agar ini tidak meninggalkan kesan pada jiwa kanak-kanak.

Golongan pendidik sedar bahawa dengan menggunakan alat media massa (alat audio-visual), pengalaman luar dapat dibawa ke dalam bilik darjah dalam bentuk yang lebih nyata. Televisyen, filem, dan komputer dapat memberi gambaran serta peristiwa yang sukar dilihat oleh manusia biasa. Sebagai media komunikasi, filem, televisyen, dan komputer dapat "membawa" murid-murid ke mana-mana tempat yang mereka hendak pergi atau menunjukkan sesuatu yang sukar dilihat oleh manusia. Tambahan lagi murid-murid dapat melihat sesuatu yang kita tidak sedari. Ini akan memudahkan tugas mengajar dan belajar dan keberkesanannya boleh membawa ke tahap kecekapan yang tinggi.

Kanak-kanak suka berinteraksi antara satu dengan lain. Dalam keadaan sosial yang demikian rupa, televisyen dan komputer membolehkan kanak-kanak duduk bersama-sama, bergembira bersama-sama kawan-kawan lain serta merasai pengalaman yang mungkin sama yang membolehkan mereka berbincang sesama sendiri.

Di luar sekolah, kanak-kanak suka media bergambar sebagai bahan hiburan. Media bergambar yang berupa media untuk cakera (CD ROM/ DVD) memberikan mereka kepuasan dan melapangkan fikiran daripada tugas-tugas sekolah atau rumah. Dengan media bergambar mereka berada dalam alam fantasi tanpa sebarang masalah dan gangguan.

Secara tidak langsung mereka akan meniru-niru gaya dari pelakon-pelakon melalui media massa. Mereka terikut-ikut dengan gaya percakapan dari media bergambar sebagai sebahagian daripada percakapan mereka. Ringkasnya mereka mudah bertindak balas terhadap media bergambar yang boleh membentuk prilaku watak mereka.

Media massa dapat menyampaikan berbagai maklumat yang boleh mempertingkatkan minda mereka dan banyak yang akan mereka pelajari secara tidak disedari. Misalnya, semasa menonton rancangan kuiz ataupun rancangan kanak-kanak, banyak fakta baru yang mereka perolehi.

Menurut kajian, pada peringkat awal perkembangan kanak-kanak media massa memberi maklumat lebih jauh daripada pengalaman yang mereka terima. Bagi kanak-kanak, gambaran yang mereka terima amat luas dan kompleks. Waktu inilah kanak-kanak terdedah kepada maklumat yang baru. Kesemua ini menambahkan pengetahuan mereka serta memperlihatkan sikap dan nilai yang berbeza daripada keluarga mereka.

Dengan ini jelaslah bahawa kandungan media massa banyak mempengaruhi kanak-kanak. Apabila kita membicarakan tentang kesan yang diperolehi secara langsung atau tidak langsung kita harus kaitkan persoalan ini dengan tindak balas emosi, perubahan sikap, ataupun perubahan dalam pandangan dunia kanak-kanak selepas banyak terdedah kepada beberapa bentuk media.

Kajian yang dijalankan oleh Bandura¹ dan teman-temannya menunjukkan bahawa "kanak-kanak belajar tingkah laku melalui pemerhatian dan peniruan model dan model ini mungkin datang daripada media bergambar serta kehidupan yang sejati." Menurut Berkowitz², kanak-kanak yang terdedah kepada media menonton rancangan-rancangan keganasan akan memperlihatkan kesan tingkah laku yang agresif dalam tiga cara;

“melalui teknik pengajaran tingkah laku agresif, melalui penonjolan tingkah laku agresif yang pernah dipelajari terdahulu, dan melalui penyediaan justifikasi moral untuk tujuan permusuhan.” Kajian yang dilakukan oleh William H. Haines³ yang menemubual 100 orang banduan remaja di Chicago membuat keputusan bahawa televisyen, radio, wayang gambar, dan drama-drama kesusasteraan porno memainkan peranan penentu dalam membentuk tingkah laku antisosial di kalangan remaja yang mudah terpengaruh terutamanya remaja yang mengalami keadaan kecewa dan permusuhan.

7. Media Massa, Masyarakat, dan Pembakuan Bahasa

Dalam pengajaran bahasa ada tiga aspek yang dipentingkan, iaitu pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Melalui proses pendidikan, bahasa kita diwarnai dengan kepelbagaian sifat yang membezakan antara satu golongan dengan golongan yang lain. Suatu hakikat yang nyata ialah bahasa tidak mungkin wujud tanpa masyarakat. Ahli-ahli sosiolinguistik sedar bahawa sesuatu golongan masyarakat dengan berbagai ciri yang dimilikinya tetap akan mempengaruhi bahasa yang digunakan. Lebih tegas, antara bidang-bidang yang diliputi oleh sosiolinguistik termasuklah:

- a) bahasa, dialek, dan idiolek,
- b) kedwibahasaan,
- c) profil sosiolinguistik sesuatu masyarakat bahasa,
- d) etnografi bahasa
- e) sikap bahasa, dan
- f) perancangan bahasa (Nik Safiah: 1998: 2).

Berdasarkan ciri-ciri yang dinyatakan di atas kita dapat lihat berbagai variasi bahasa Melayu yang berpunca daripada induk yang sama. Bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Melayu di Brunei dan Singapura sebenarnya berasal daripada satu bahasa, iaitu bahasa Melayu. Senario politik rantau ini berubah dengan Perjanjian Inggris-Belanda 1824 yang mana pihak Inggris dan Belanda telah menggariskan sempadan masing-masing hingga menjadi wilayah jajahan Inggris (kini Malaysia, Singapura, Brunei) dan wilayah takluk Belanda di Indonesia.

Pengaruh yang diterima oleh masyarakat menentukan variasi yang telah dicorakkan. Ini bererti bahawa pengaruh yang diterima oleh golongan di bawah takluk Belanda berbeza dengan golongan di bawah jajahan Inggeris. Apatah lagi jika komuniti bahasa itu menggunakan beberapa variasi bahasa yang berbeza-beza yang penggunaannya tertakluk kepada sistem yang tertentu melalui kepelbagaian media massa akan kelihatan perbezaannya. Penutur-penutur tidak lari dari garis-garis kasar sifat bahasa Melayu/Indonesia yang digunakan, hanya dialeknya agak berbeza antara satu komuniti bahasa dengan komuniti yang lain.

Bahasa Melayu disemarakkan semula apabila dipilih menjadi bahasa yang dapat menyatupadukan pelbagai etnik di Indonesia dengan berlakunya peristiwa *Sumpah Pemuda* pada 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu yang sudah menjadi *lingua franca* rantau ini ketika itu dijadikan sebagai bahasa nasional dalam pengisytiharan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Ogos 1945. Perkara yang sama berlaku di

Malaysia ketika Malaysia mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957 yang mana bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan yang kemudiannya bertukar menjadi bahasa Malaysia setelah berlakunya suatu reformasi akibat pergolakan politik pada 13 Mei 1969.

Di Brunei bahasa Melayu sudah berkembang sejak zaman dahulu kala sebagai dialek perbualan harian dan bahasa Melayu Standar termaktub dalam Perlembagaan Negara Brunei, 1959 sebagai bahasa rasmi negara.

Di Singapura bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa kebangsaan pada Jun 1959 dan murid-murid sekolah diwajibkan mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Pada tahun 1966, Sistem Pelajaran Kebangsaan Singapura menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantar pelajaran dan bahasa-bahasa lain diajarkan sebagai bahasa kedua. Namun begitu, bahasa Melayu tetap menjadi bahasa kebangsaan negara.

a. Perancangan Bahasa ke Arah Penyatuan

Walaupun setiap negara yang dibicarakan telah mendaulatkan bahasa Melayu, jalan yang dilaluinya berlainan sebab setiap golongan masyarakat mempunyai nilai-nilai tertentu yang mencorakkan bahasa yang digunakan. "Usaha mempengaruhi bahasa supaya berubah dipanggil perancangan bahasa (Abdullah Hassan, 1998:536). Menyedari peri pentingnya bahasa serumpun disatukan semula bagi memastikan kelancaran di rantau ini usaha-usaha perancangan dijalankan seperti berikut.

- 1) Pertemuan antara Jawatankuasa Kerja Sama Bahasa Melayu--Bahasa Indonesia diadakan pada 4--7 Disember 1959 untuk Sistem Ejaan Malindo. Masalah politik menyebabkan pelaksanaannya tertunda yang kemudiannya diteruskan kerja sama sehingga tercapai keputusan untuk mewujudkan Sistem Ejaan Baru pada 27 Jun 1967.
- 2) Berdasarkan pernyataan bersama Indonesia--Malaysia yang disepakati pada 23 Mei 1972, Persidangan antara Panetia Ejaan Bahasa Indonesia dengan Jawatankuasa Tetap Bahasa Melayu Malaysia telah diadakan pada 20--22 Jun 1972 di Jakarta yang kemudian membawa kepada tertubuhnya Majlis Bahasa Indonesia--Malaysia (MBIM) di Kuala Lumpur pada 29 Disember 1972.
- 3) Negara Brunei Darussalam menjadi anggota Majlis Bahasa pada Sidang ke-24 (8 Nov 1985) di Jakarta dan berlaku penukaran nama kepada Majlis Bahasa Brunei Darussalam--Indonesia--Malaysia atau Mabbim.

Dalam tempoh 25 tahun banyak usaha Mabbim yang boleh dibanggakan terutama mengenai penyeragaman ejaan antara negara-negara anggota. Dari segi peristilahan, Mabbim telah berjaya menyelaraskan 52 bidang ilmu yang mencakupi 255 subbidang dan terdiri daripada 109, 633 istilah (Noresah Baharom, 1998).

Kita tidak dapat menafikan bahawa Mabbim sebagai wahana kebahasaan serantau telah berjaya menyatukan bahasa yang asalnya serumpun. Akan tetapi, sejauh manakah kita dapat elakkan daripada bahasa ini bercapah? Penggunaan bahasa Indonesia di media massa di Indonesia berbeza dengan bahasa Melayu di Brunei, Malaysia, dan Singapura dan *trend* ke arah pemisahan sungguh ketara. Lihat sahajalah perbezaan-perbezaan yang berikut yang sukar difahami oleh mereka yang tinggal di Brunei,

Malaysia, dan Singapura.

Berikut diperturunkan beberapa contoh dari aspek kosakata hasil pengaruh Belanda:

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu (Brunei, Malaysia, dan Singapura)

gratis	(<i>gratis</i>)	percuma
dosen	(<i>docent</i>)	pensyarah
kantor	(<i>kantoor</i>)	pejabat
wesel	(<i>wissel</i>)	kiriman wang melalui pos
kartu	(<i>kaart</i>)	kad
nomor	(<i>nummer</i>)	nombor
karcis	(<i>kaartjes</i>)	tiket
sopir	(<i>chauffeur</i>)	rebar
bioskop	(<i>biscoop</i>)	pawagam

Berikut merupakan beberapa perkataan yang diambil daripada bahasa Belanda yang hampir sama dengan bahasa Inggris: nuansa (nuansa), sirkus (sarkis), stasiun (setesen), prioritas (prioritas), studi (studi), dan instruksi (instruksi).

Kata-kata bahasa Indonesia yang berikut membawa makna yang berlainan di Brunei, Malaysia, dan Singapura. Di bawah ini diberi makna persamaannya ialah

Bahasa Indonesia

Bahasa Melayu

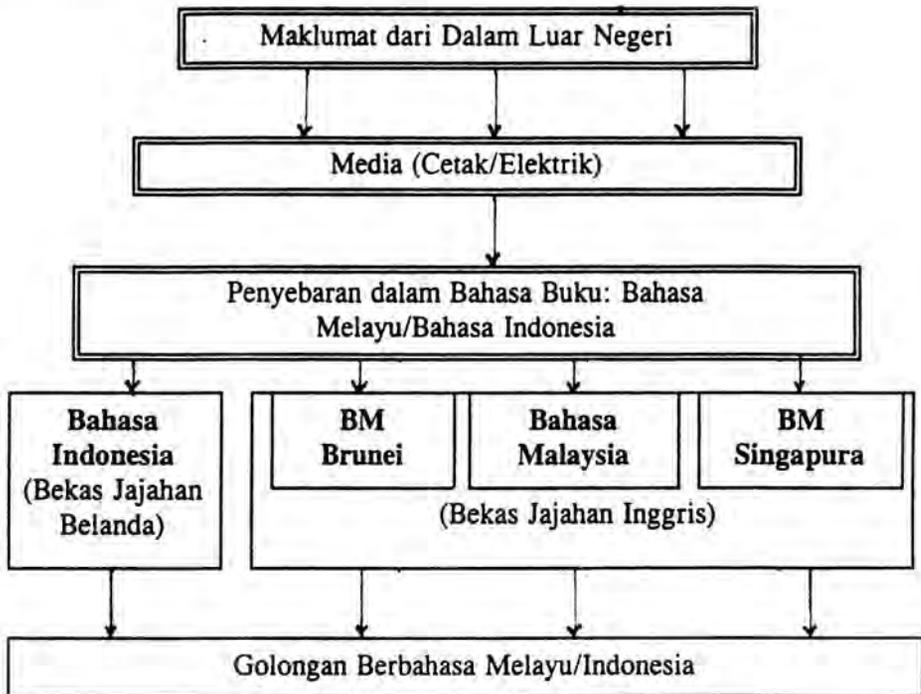
lomba	pertandingan
pemandu	pengerusi majlis
pajak	cukai
lewat	melalui
pengacara	peguam
buntut	ekor
tewas	mati
banci	pondan

Menurut Ajid Che Kob (1998) kecapahan di antara bahasa Malaysia dengan bahasa Indonesia terjadi banyak dalam aspek kosakata dan ini semakin menjarak. Kadang-kadang perbezaan kosakata boleh menimbulkan rasa lucu dan salah pengertian.

b. Ke Arah Penyatuan Bahasa

Berita atau maklumat yang diterima dari luar negeri diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu/Indonesia serta disiarkan melalui media cetak atau elektronik menurut bahasa Melayu baku/bahasa Indonesia negara masing-masing (lihat Rajah 2). Walaupun

maklumatnya sama, perbezaan antara bahasa Melayu (Brunei, Malaysia, Singapura) dengan bahasa Indonesia sungguh ketara.



Rajah 2: Bahasa Melayu/Indonesia dalam Menyalurkan Maklumat Melalui Berbagai Media

Kita tidak dapat menafikan bahawa fenomena meminjam kosakata merupakan satu perkara yang semula jadi, iaitu tanpa dirancang. Sejak zaman berzaman kata-kata Sanskrit, Arab, Cina, Belanda, Portugis, Inggris telah meresap masuk ke dalam bahasa Melayu/Indonesia. Setelah negara-negara berbahasa Melayu berpisah menurut ideologi masing-masing, berlakulah suatu perubahan yang penentuannya tertakluk pada acuan kuasa-kuasa yang menjajahnya. Kini timbulah kesedaran menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai dialek Melayu supra untuk wilayah Melayu besar. Usaha perancangan yang lebih gigih harus dilakukan agar tidak jauh perbezaan antara satu dialek dengan dialek yang lain. Usaha Mabbim dalam perancangan bahasa adalah untuk mengelakkan pertindihan mencipta kosakata dan apa yang disepakati disebarluaskan di kalangan pengguna-pengguna bahasa di rantau ini.

Menurut Abdullah Hassan (1998:42), proses peminjaman dari bahasa Indonesia ke bahasa Melayu lebih aktif berlaku daripada bahasa Melayu ke bahasa Indonesia. Ini menunjukkan bahawa di antara dua buah bahasa itu bahasa Indonesia dianggap

lebih tinggi. Ini menyebabkan bahasa Melayu meminjam daripada bahasa Indonesia. Kamus bertajuk *Dictionary of Comparative Malay-Indonesian synonyms* susunan Leo Suryadinata dan Abdullah Hassan menyenaraikan hampir 4,500 kata Indonesia yang bersinonim dengan kata bahasa Melayu. Ini menunjukkan bahawa banyak kata Indonesia yang telah dipinjam ke bahasa Melayu dan banyak juga yang dimengerti oleh penutur bahasa Melayu walaupun mereka tidak menggunakannya.

8. Penutup

Seperti yang telah dibincangkan pada awal kertas kerja ini, dapat kita lihat bahawa bahan media massa memberi kesan yang sungguh nyata kepada semua golongan masyarakat. Sebagai media yang berfungsi menyampaikan maklumat, banyak faedah yang dapat kita raih daripadanya terutamanya dari segi menambahkan berbagai pengetahuan.

Fungsi media massa sebagai alat hiburan membawa seseorang meninggalkan dunia realiti serta permasalahan hidup; dapat membangkitkan perasaan serta membolehkan seseorang melamun dalam alam fantasi yang penuh dengan khayalan.

Kita tidak dapat menafikan bahawa sebagai alat hiburan ada rancangan yang dipertontonkan bersifat negatif yang bertentangan dengan budaya kita. Bagi orang dewasa mereka dapat membentuk semacam mekanisme membela diri yang mana mereka dapat menolak segala yang bersifat negatif, tetapi ini sukar bagi kanak-kanak.

Dalam usaha pembudayaan bahasa pula, kepekaan terhadap pengawasan amat perlu. Sebarang sumber maklumat yang berupa media cetak mahupun media elektronik harus dipantau perkembangannya. Bagi mencapai manfaat teknologi maklumat terutamanya dalam bidang internet masalah pencapaian harus dihambati secara bersempurna-sungguh.

Kesemua yang dinyatakan merangkumi bidang pendidikan bahasa yang tumpuannya adalah pada pengetahuan, kemahiran, dan nilai. Fungsi bahasa ialah untuk berkomunikasi dan seterusnya membolehkan interaksi, penyebaran maklumat serta bekerjasama antara manusia, komuniti, dan negara. Di sini letaknya peranan media massa dan dalam era teknologi maklumat hala tuju perkembangan bahasa telah membawa beberapa kepastian dan juga ketidakpastian. Kita sedar bahawa bahasa Melayu/Indonesia boleh diantarabangsakan melalui kecanggihan alat media massa sebagai faktor pemboleh (*enabling factor*), tetapi kita belum pasti bentuk baku yang diingini memandangkan wujudnya kecapahan satu bahasa yang mempunyai dialek-dialek yang berbeza. Untuk menggolongkan bahasa itu dalam kategori "bahasa utama di dunia" perlu komitmen yang besar di kalangan semua yang terlibat dalam bidang media massa untuk menepikan soal politik dan menjalankan aktiviti penyatuan bahasa dengan penuh konsisten untuk merealisasikan agenda utama menjadikan bahasa Melayu/Indonesia sebagai bahasa teknologi maklumat untuk menghadapi cabaran dunia digital alaf baru.

Catatan:

1. A. Bandura dan R.H. Waltens, " Social Learning and Personality Develoment Learning", dalam *Advance in Experimental Social Psychology. Jilid 2, (New York: Academic Press, 1965) hlm. 1--55.*
2. *Kertas kerja yang disampaikan dalam Kongress Bahasa Indonesia VII pada 26-30 Oktober 1998 di Jakarta, Indonesia.*

Daftar Pustaka

- Adnan Mohd. Hamdan Adnan dan Zulkarnain Nasution, 1992. *Pengenalan dan Penerapan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Badudu, Jusuf Sjarif. 1992. *Perkembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Malaysia*. Jurnal Dewan Bahasa 36(2) Februari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Baharom, Noresah. 1998. *Dari Meja Setiausaha Mabbim Malaysia*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Chaiyanara, Paitoon M. "Laman (Homepage) Edisi Melayu/Indonesia: Satu Pengenalan Perkembangan Teknologi Makmelkom" Kertas Kerja dalam *Seminar Kebahasaan Mabbim*, Kuala Terengganu, Terangganu Darul Iman, Malaysia, 2--3 Februari 1998.
- Collins, James T. 1995. "Perjuangan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Antarabangsa." *Jurnal Dewan Bahasa* 339(8) Ogos, 683-692. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Hassan, Abdullah. 1998. "Dialek Melayu Supra untuk Melangsungkan Bangsa Melayu" dalam *Pengajian Bahasa Melayu Memasuki Alaf Baru*, Nuwairi Hj. Khaza'ai dan Wong Khek Seng (Ed.). Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu.
- Hawkrige, David. 1983. *New Information Technology in Education*. London & Canberra: Croom Helm.
- Karim, Nik Safiah. 1988. *Sosiolinguistik Bahasa Melayu dan Pengajaran*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- , 1997. "Bahasa Melayu dalam Konteks Globalisasi dan Ledakan Maklumat: Peranan serta Sumbangan Guru-guru Melayu ke Arah Pemantapannya" dalam Nuwairi Hj Khaza'ai & Wong Khek Seng (Ed.). *Pengajian Bahasa Melayu*, Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
- Kob. Ajid Che. 1998. "Kecapahan Bahasa Melayu dengan Bahasa Indonesia: Hambatan dalam Mengantarabangsakannya." *Jurnal Dewan Bahasa* 42 (7) Julai. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rahim, Samsuddin A. 1993. *Komunikasi Asas*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Rakhmat, Jalaluddin. 1993. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Penerbit PT Remaja Rosdakarya.
- Schramm, Wilbur dan Donald F. Roberto. 1993. *Proses dan Kesan Komunikasi*

Massa Jilid II, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Suryadinata, Leo. 1991. *Dictionary of Comparative Malay-Indonesian Synonyms*.
Singapore: Times Books International.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok E9
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Peranan Media Massa dalam Pemasaryakatan Hasil Pembakuan Bahasa
Penyaji	: H. Abbas Mohd. Shariff
Pemandu	: Zainal Abidin Gaffar
Pencatat	: a. Juhriah b. Wayan Tama
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: I Wayan Bawa, Universitas Udayana, Denpasar

a. Pertanyaan:

- 1) Hambatan-hambatan apa yang dialami dalam perkara pembentukan bahasa Melayu Supra?
- 2) Apa yang ditonjolkan untuk jati diri orang Melayu, selain bahasa?

b. Jawaban:

- 1) Hambatan yang pertama adalah masalah lafal, kemudian masalah perbedaan makna untuk kata yang sama. Akan tetapi, perkara itu adalah perkara kecil. Perkara yang lebih berat adalah masalah perbedaan kata dan istilah, antara lain, menyangkut kata tabu untuk budaya tertentu dan tidak tabu pada budaya lain.
- 2) Masalah yang ditonjolkan untuk jati diri orang Melayu adalah kepribadian yang sangat tinggi. Contoh, kata *pemirsa* yang dipakai di Indonesia, yang dinilai baik, lama-lama akan digunakan juga di Malaysia.

2. Penanya: J.S. Badudu, Universitas Padjadjaran, Bandung

a. Pertanyaan:

Antara bahasa Indonesia dan Malaysia terdapat kedekatan makna dan bentuk. Akan tetapi, bahasa percakapan antara dua bahasa itu memang cukup jauh perbedaannya. Malaysia termasuk beruntung sebab dapat memahami bahasa percakapan Indonesia. Kata-kata yang diciptakan di Indonesia bisa dipakai langsung di Malaysia (untuk beberapa kata).

b. Jawaban:

Sebagaimana kita ketahui, bahasa percakapan itu, antara lain, dapat dipelajari melalui karya sastra. Karya sastra di Indonesia, seperti *Sitti Nurbaya* dan *Atheis* dikaji di Malaysia, tetapi buku-buku sastra Malaysia tidak dikaji di Indonesia. Itulah, antara lain, kemudian orang Malaysia dapat memahami bahasa percakapan

orang Indonesia. Untuk itu, saya tawarkan kerja sama antara Indonesia dan Malaysia.

3. **Penanya:** Ipon Sukarsih Purawidjaja, Perpustakaan Nasional, Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Ada kata-kata yang sama antara Indonesia dan Malaysia, tetapi memiliki makna yang berbeda. Hal ini sering menyebabkan komunikasi tidak bersambung. Contoh, kata *dijemput* di Malaysia berarti *diundang*, sedangkan di Indonesia berarti *diajak* atau *dibawa*. Untuk itu, disarankan agar Dewan Bahasa dan Pustaka dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa membuat kamus yang berisikan kata-kata yang sama dengan makna yang berbeda.

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu habis.)

SASTRA KORAN

Djadjat Sudradjat
Media Indonesia

1. Pendahuluan

Dalam rangka menyambut ulang tahunnya yang ke-20, majalah sastra *Horison* Nomor 7 tahun XXI, Juli 1986, memuat hasil wawancara dengan para penanggung jawab rubrik sastra dan budaya beberapa media cetak baik yang berada di Jakarta maupun di daerah. Tercatatlah beberapa media cetak yang dengan gairah menyala membuka rubrik sastra dan budaya, seperti *Sinar Harapan* (kini *Suara Pembaruan*), *Pelita*, *Suara Karya*, *Kompas*, *Berita Buana*, *Berita Yudha*, dan *Sarinah* (Jakarta), *Berita Nasional* (Yogyakarta), *Suara Indonesia* (Malang), *Suara Merdeka* (Semarang), *Surabaya Post* (Surabaya), *Pikiran Rakyat* (Bandung), *Haluan* (Padang), dan *Waspada* (Medan).

Di luar media cetak di atas, masih ada beberapa media lain yang juga memuat sastra dan budaya. Selain itu, ada beberapa lagi yang terbit setelah ulang tahun *Horison* ke-20 dan juga mempunyai rubrik yang sama. Artinya, masih banyak media yang memuat sastra dan budaya yang belum disebutkan *Horison* itu.

Dari wawancara *Horison* itu, saya tahu bahwa sudah sejak 1970-an beberapa koran di atas mempunyai rubrik budaya dan sastra. Pada dekade 1960-an, kata Salim Said dalam *Horison* edisi yang sama, memang ada beberapa koran yang memuat sastra dan budaya terutama koran yang ada di bawah Partai Komunis Indonesia. Selain koran komunis, Mingguan *Pelopor* adalah salah satu koran yang memuat rubrik sastra dan budaya. Rubrik ini diasuh Salim Said yang menyediakan satu halaman koran.

Pada umumnya, pengasuh rubrik sastra dan budaya, termasuk yang diwawancarai *Horison* adalah seniman. Abdul Hadi WM, Linus Suryadi A.G., Korrie Layun Rampan, dan Jurtatap, masing-masing adalah pengasuh rubrik sastra dan budaya *Berita Buana*, *Berita Nasional*, *Sarinah*, dan *Pelita*.

Saya tidak tahu pasti bagaimana asal-muasalnya koran seperti kompak betul dalam memuat sastra. Apakah karena rasa iba, karena memang sastra amat penting, atau memang untuk gengsi? Atau, ada hubungannya dengan meluruhnya majalah *Horison* dan Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian? Agaknya karena para penanggung jawab rubrik sastra tersebut memang seniman yang menganggap sastra dan budaya pada umumnya amat penting bagi kehidupan. Mereka memang harus 'bertempur' untuk meyakinkan betapa seni dan sastra itu penting, termasuk yang saya alami di *Media Indonesia* (MI). Rubrik sastra yang saya pegang sejak 1991 ini juga beberapa kali terancam kena gusur. Setiap saat saya harus siap "bertempur" jika "ancaman" datang. Memang kadang-kadang sulit juga mengatakan betapa sastra sangat penting bagi kehidupan. Bukankah pada zaman pembangunan Orde Baru sesuatu yang penting itu ukurannya sangat materialistis?

Mungkin harian *Kompas* agak berbeda. Dalam suatu kesempatan diskusi di *Media Indonesia*, ketika rezim Orde Baru sedang jaya-jayanya, Pemimpin Umum dan Pemimpin Redaksi *Kompas*, Jakob Oetama mengatakan di masa "sulit" ini seni justru

harus di depan. Selain bisa menjadi oase, tulisan seni juga tidak begitu dicurigai. Memang, koran yang memuat berita tentang praktik penyelenggaraan negara yang *brengsek*, biasanya langsung masuk dalam daftar "binaan" Departemen Penerangan. (Kata-kata *brengsek* di atas dari saya bukan dari pemimpin redaksi *Kompas* yang berpembawaan amat santun itu). Jadi, jika *Kompas* memberi perhatian amat serius terhadap masalah kebudayaan, termasuk sastra, saya kira karena alasan seni bisa leluasa "bicara" apa saja, selain bisa jadi oase. Artinya, keberadaan rubrik seni dan sastra di *Kompas* memang dilandasi oleh kebijakan yang didukung dari atas. Ini agaknya berbeda dengan media pada umumnya, termasuk *Media Indonesia*.

Pada umumnya, setidaknya yang saya alami, posisi penanggung jawab rubrik sastra memang berada dalam posisi sulit. Di dalam harus "bertempur" dengan "orang-orang koran", sedangkan di luar menghadapi "gempuran" dari para pengarang yang karyanya sering ditolak. Bahkan, ada yang berlanjut menjadi meregangnya hubungan persahabatan. Selain itu, mereka juga mendapat kritik pedas dari para akademisi sastra yang "berselera tinggi" yang melihat sastra sangat teoretis, berdasarkan buku-buku yang pernah mereka baca, buku-buku teori yang pada umumnya kurang membumi dengan persoalan sastra modern Indonesia itu sendiri. Setahu saya, belum ada buku yang membicarakan sastra koran atau sastra media massa sebagai referensi kajian sastra di fakultas sastra. Menurut saya, dengan melihat peran koran dalam memasyarakatkan sastra, sudah selayaknya ada buku yang membahas sastra koran atau sastra media massa agar perjalanan sastra modern Indonesia tak mengalami distorsi. Siapa yang berminat?

Memang ada beberapa mahasiswa S1 dan juga S2 yang meneliti tentang rubrik sastra di media massa, tetapi penelitiannya hanya terbatas pada beberapa media dan kurang komprehensif. Mudah-mudahan ini memancing peneliti lain untuk membuat penelitian yang lebih serius dan lebih mendalam, tentu juga lebih komprehensif.

Menurut saya, tugas koran dalam mempublikasikan seni khususnya sastra sungguh luar biasa. Bahkan, sejak pertengahan tahun 1980-an hingga kini koran seperti mengambil alih peran institusi sastra--jika ada--untuk "bertanggung jawab" terhadap eksistensi sastra. Secara diam-diam, entah dari mana datangnya, ada semacam tuntutan bahwa koran harus memuat sastra. Jika tidak, dianggap tak berbudaya. Akan tetapi, menurut saya, tuntutan seperti ini memang boleh juga untuk mempengaruhi "orang-orang koran". Koran sungguh telah melampaui batas-batas tugasnya yang hanya menyampaikan informasi. Ini justru terjadi di dalam era pers industri ketika halaman koran harus begitu berhitung kolom untuk iklan.

Itulah sebabnya sastra koran adalah sastra yang kehadirannya paling teratur, seminggu sekali (di koran hari Minggu), dan tidak mengenal musim. Di tengah meluruhnya penerbitan buku sastra, koran--juga majalah--justru maju berada di garda depan dalam menerbitkan sastra. Sastra koran juga bisa didapat di mana saja, dengan harga murah lagi.

2. Kenapa Koran?

Koran-koran yang memuat sastra biasanya di edisi Minggu, dan sebelum yang lain

(sajak dan esai) yang utama biasanya cerita pendek. Bahkan, koran-koran edisi Minggu di Indonesia seperti seragam. Ada rubrik TTS, kehidupan artis, cerita bergambar, interior, konsultasi kecantikan, dan kesehatan. Dan, cerpen selalu hadir bersama dengan rubrik-rubrik itu. (Afrizal Malna, "Generasi Cerpen di Hari Minggu, Selamat Pagi", *Kompas*, 21-03-1993).

Kenapa koran begitu terbuka untuk cerita pendek? Menurut penyair Afrizal Malna, koran adalah media massa yang isinya dibuat "umum" dan isinya "enak dibaca." "Cerpen adalah, hampir satu-satunya, genre sastra yang memiliki keluwesan untuk bisa memenuhi kategori 'umum' itu dan mengisi hari Minggu setelah hari-hari sibuk di mana wilayah publik telah terbagi-bagi dalam berbagai wilayah kerja dan komunikasi," tulis Afrizal Malna.

Beberapa buku kumpulan cerita pendek karya Umar Kayam, Danarto, Putu Wijaya, Pamusuk Eneste, Seno Gumira Ajidarma, dan beberapa kumpulan cerita pendek pilihan yang diterbitkan *Kompas*, *Surabaya Post*, dan juga *Bernas* adalah lahir dari tradisi hari Minggu itu.

Sesungguhnya pada edisi Minggu itu tidak hanya terbit cerita pendek, tetapi juga esai dan sajak. Artinya, sajak dan esai pastilah tak mempunyai sifat-sifat umum itu. Ini hadir semata-mata karena kebijakan si penanggung jawab rubrik saja, yang kebetulan seniman atau pecinta seni.

3. Pengaruh

Seberapa jauh peran media cetak dalam meningkatkan apresiasi sastra? Sungguh saya tidak tahu pasti. Mungkin ini tugas para akademisi sastra untuk menelitinya. Akan tetapi, dari informasi dengan beberapa pengarang, kini sastra koran (sastra yang dimuat di koran), memang sering menjadi bahasan diskusi yang panjang terutama sekali esainya. *Republika*, *Kompas*, dan juga *Media Indonesia*, misalnya, pernah memberi tempat beberapa edisi untuk polemik, masing-masing tentang topik "Sajak Gelap", "Sastra Pedalaman", dan "Gugatan terhadap Angkatan 66."

Saya punya keyakinan bahwa rubrik sastra di media cetak memang diminati pembaca meskipun mungkin kelompok terbatas. Buktinya adalah membanjirnya naskah sastra di meja redaksi yang membuka rubrik sastra. Saya sendiri di *Media Indonesia* sungguh kewalahan menyeleksi naskah-naskah tersebut yang datang dari seluruh Indonesia (biasanya untuk menyeleksi naskah saya lakukan di rumah, di luar jam kerja saya, sebagai wartawan). Sungguh, antusiasme itu luar biasa, padahal media cetak yang memuat sastra jumlahnya puluhan.

Naskah-naskah itu--setidaknya yang dikirim ke *Media Indonesia*--dikirim dari kota-kota besar hingga pelosok-pelosok kecil di pulau yang jauh seperti Irian Jaya. *Media Indonesia* misalnya pernah beberapa kali menerima sajak yang dikirim seorang guru SD dari pelosok Irian Jaya. Penyair yang guru SD itu akhirnya menghentikan kirimannya, mungkin karena tak pernah dimuat, atau sebab lain? Saya tak pernah tahu. Saya membayangkan bagaimana ia harus "berjuang" untuk menulis sajak--yang belum pernah saya muat itu. Saya begitu tega. Keputusan ini saya ambil setelah berkali-kali karya-karya penyair itu saya baca. Saya memilih tega karena alasan mutu.

Akan tetapi, siapa sebenarnya yang harus menentukan mutu? Sampai sekarang saya masih sering merasa berdosa dengan standar mutu yang saya buat sendiri, yang menyebabkan sekian karya tak bisa dimuat.

Seorang penyair juga pernah mengingatkan saya dalam sebuah suratnya ketika beberapa edisi Minggu *Media Indonesia* memuat karya-karya para pengarang yang sudah mapan. Yang sudah tak perlu lagi pengakuan lewat tulisan di media massa. Yang terpenting, kata penyair itu, adalah membangun korespondensi yang luas agar daerah juga terangkat. Agar terbentuk basis-basis budaya yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Jadi, jangan arogan dengan pertimbangan mutu.

Pemikiran tentang harus lebih mementingkan pemerataan dibandingkan mutu sungguh perlu dibicarakan lebih lanjut. Mungkin ini wilayah yang harus digarap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa atau siapa saja yang punya kepedulian bahwa sastra harus tumbuh dan berkembang.

Terus terang, sejak awal saya tidak punya prestasi untuk mengorbitkan pengarang, yang saya incar adalah karyanya. Menurut saya, nama adalah sesuatu yang otomatis saja mengikuti jejak karyanya. Mungkin karya-karya sastra lama yang anonim itu jauh lebih mandiri karena tak perlu "dibesarkan" oleh hal-hal di luar karya itu sendiri.

Selain seorang penyair yang selalu menekankan pentingnya pemerataan untuk membangun basis budaya yang lebih merata itu, sekian banyak teman saya, yang juga seniman, tetap menyarankan betapa pentingnya mutu. Merekalah yang sering memberi kritik jika karya-karya yang dimuat di *Media Indonesia*, menurut penilaian mereka, di bawah 'standar'.

Dengan bertolak dari pengalaman saya di tempat saya bekerja dan pergaulan dengan para sastrawan, dunia sastra modern Indonesia adalah dunia yang "luar biasa", dunia yang amat mengagumkan, dunia yang amat mandiri dan mau selalu berkorban. Selain membanjirnya naskah di meja redaksi media cetak, penerbitan kumpulan sajak oleh kalangan sendiri luar biasa suburnya. Saya, misalnya, menerima berpuluh-puluh buku kumpulan sajak dari berbagai daerah seperti kota Bandung, Tasikmalaya, Cirebon, Indramayu, Serang, Bogor, Tangerang, Banyumas, Semarang, Bali, Surabaya, Malang, Kudus, Padang, Riau, Lampung, Bengkulu, Palembang, Banjarmasin, Ujung Pandang, Medan, dan Aceh. Mereka menerbitkan dengan biaya sendiri. Alangkah luar biasa minat orang menjadi seniman, menjadi penyair. Dapat apa mereka sesungguhnya dari sastra?

Dunia sastra adalah dunia yang tak pernah silau dengan gemerlapnya profesi-profesi baru yang muncul di dunia yang telah menyatu berkat kecanggihan komunikasi ini, dunia yang terus berjalan didukung atau digencet sekaligus oleh kekuatan negara. Dunia sastra adalah dunia yang tidak pernah kapok dengan kemiskinan materi. Di masa krisis ini ketika uang negara--yang juga uang rakyat--habis dikuras oleh dunia usaha yang macet itu, dunia sastra tetap saja berjalan maju. Dunia sastra memang dunia yang tidak pernah merepotkan pemerintah seperti dunia usaha pemerintahlah yang sering merepotkan dunia sastra: kecurigaan yang biasanya berlanjut dengan pengekangan. Sastra juga merupakan dunia yang amat *cuek*, diperlukan atau tidak, sastra

akan tetap hadir menemui kita.

Apakah antusiasme orang menjadi pengarang karena pengaruh media cetak dengan rubrik sastranya? Saya terlalu subjektif untuk menjawabnya. Saya, secara jujur, ingin menjawab 'ya'. Akan tetapi, jawaban ini, menurut saya, gegabah karena baru berdasarkan asumsi yang belum ada bukti yang valid menurut kaidah-kaidah akademis.

4. Sekadar Saran

Penerbitan sastra di media cetak pada umumnya karena penanggung jawabnya seniman atau mereka yang mempunyai kepedulian terhadap kesenian, bukan karena kebijakan dari para pemilik koran atau pemimpin redaksi. Oleh karena itu, diperlukan perjuangan yang tak pernah mengenal lelah untuk meyakinkan orang-orang koran. Oleh sebab itu, jika media cetak dianggap memiliki fungsi strategis terhadap penyebaran karya sastra, khususnya cerpen, sajak, dan esai, memang perlu keseriusan yang sungguh-sungguh dari para pengelolanya. Setidaknya, media cetak itu harus mempunyai kemampuan menyeleksi yang bagus dan dasarnya tentu pengetahuan sastra yang lumayan dan pemahaman akan dunia penciptaan.

Pada umumnya proses penyeleksian ini dilakukan oleh satu orang. Menurut saya, koran memang tidak mempunyai kewajiban memuat karya sastra, tetapi penting untuk mengangkat dunia alternatif, selain kebenaran yang sudah kita ketahui dan sering dimonopoli oleh penguasa Orde Baru. Seperti yang dikatakan Goenawan Mohamad dalam peluncuran majalah *Tempo* yang baru (Minggu, 04-10-1998), kebenaran itu tidak boleh dimonopoli karena kebenaran tidak hanya satu dan ada di mana-mana. Sastra yang punya kebenaran sendiri juga bisa sebagai "alat" untuk penyadaran tentang adanya pluralitas, adanya pendapat yang berbeda. Sastra bisa melatih orang untuk berdemokrasi.

Dunia akademis--fakultas sastra--adalah dunia yang bebas. Lulusan fakultas sastra, misalnya, bebas meniti profesi apa saja, termasuk menjadi penyanyi atau politisi, tetapi media cetak perlu dilirik juga untuk memperkuat barisan agar bisa memperkuat posisi tawar dengan para pemilik media massa.

Untuk lebih memasyarakatkan sastra lewat media massa tak ada salahnya orang-orang sastra mau sedikit "berkorban". Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, atau Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan, misalnya, sungguh akan kelihatan elok jika mau bertandang ke beberapa pemilik koran atau para petinggi media massa untuk mempromosikan sastra dan budaya pada umumnya. Ini juga upaya untuk mengetuk kesadaran bahwa kesenian itu penting, selain menambah dukungan moral bagi para penanggung jawab rubrik sastra di media cetak. Mudah-mudahan pada zaman reformasi--yang melelahkan dengan eforia politik ini--para birokrat tidak merasa turun martabatnya bertamu kepada orang-orang partikelir.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C11
Hari, Tanggal, Pukul	: Karnis, 29 Oktober 1998, 16.10--16.55
Judul Makalah	: Sastra Koran
Penyaji	: Djadjat Sudradjat
Pemandu	: Muchsin Ahmadi
Pencatat	: a. Isdiarto b. Hani'ah
Peserta	: 52 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Supriatun, Universitas Palangkaraya

a. Pertanyaan:

Bagaimanakah cara memasukkan karya sastra, seperti cerpen dan puisi, agar dapat dimuat ke dalam media massa cetak secara berkesinambungan? Pada tahun 1970 saya memasukkan naskah sastra (cerpen) di media massa cetak sebanyak lima halaman dan dimuat lima kali pula. Sepuluh tahun kemudian (1980) kembali saya memasukkan beberapa cerpen ke surat kabar, tetapi cerpen saya itu tidak satu pun dimuat di dalam surat kabar tersebut?

b. Jawaban:

Saya tidak dapat menjawab secara pasti pertanyaan Ibu. Mungkin jarak waktu sepuluh tahun (1970--1980) ada pengendapan penciptaan sehingga cerpen Ibu kurang baik. Artinya, Ibu mengalami penurunan mutu daya cipta karya sastra.

2. Penanya: Mu'jizah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Saya hanya memberikan masukan tentang perlunya dokumen sastra untuk menciptakan sejarah sastra Indonesia. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah mulai mengumpulkan sastra koran, misalnya, puisi dari surat kabar *Bianglala* (1962). Akan tetapi, pengumpulan dokumen sastra tersebut tidak berdasarkan mutu karya sastra. Bagaimanakah tanggapan Bapak tentang hal itu.

b. Jawaban:

Saya berterima kasih kepada Ibu yang telah memperhatikan sastra koran dengan mengumpulkan dokumen sastra koran untuk sejarah sastra Indonesia. Jika saya diminta membantu kegiatan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tersebut, saya sepenuhnya akan membantu agar sejarah sastra Indonesia terwujud dan saya akan menyerahkan dokumen sastra koran yang saya miliki.

3. **Penanya:** Rahmat Djoko Pradopo, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

a. Pertanyaan:

Apakah redaktur rubrik sastra di dalam surat kabar memiliki peningkatan mutu pemahaman sastra secara baik? Melihat kenyataan yang ada sekarang, banyak rubrik sastra di dalam surat kabar memiliki mutu yang rendah.

b. Jawaban:

Saya mengakui bahwa redaktur rubrik sastra di dalam surat kabar bukan dari sastrawan atau pakar susastra. Mereka kebanyakan dari wartawan reportase yang banyak disibukkan oleh kegiatan memburu berita. Saya mengharapkan mahasiswa lulusan fakultas sastra untuk terlibat di dalam kegiatan rubrik sastra di surat kabar agar sastra koran pada masa mendatang memiliki mutu yang tinggi.

PEMBINAAN MINAT BACA

Jimly Asshiddiqie

Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia

1. Kebutuhan Mengembangkan Minat Baca

Abad ke-21 yang akan tiba kurang dari satu setengah tahun lagi ditandai, antara lain, oleh membanjirnya informasi secara cepat dan mendunia sebagai akibat telah terbangunnya sistem komunikasi *superhighway*. Oleh karena itu, abad yang akan datang disebut juga sebagai abad informatika dan komunikasi. Jaringan internet dan inovasi-inovasi teknologi komunikasi berbasis komputer memungkinkan berbagai globalisasi sehingga dunia semakin terasa kecil. Teknologi digital, komunikasi tanpa kabel, *Integrated Service Digital Network (ISDN)*, *notepad computer*, dan *telephone interface* merupakan contoh hasil kemajuan teknologi komunikasi yang memungkinkan mengirim dan menghimpun data dalam jumlah banyak dengan cepat. Era teknologi canggih dewasa ini berpotensi pula melipatgandakan sampai tingkat penyimpanan data dan informasi serta mengomunikasikannya dalam waktu seketika.

Perkembangan teknologi komunikasi dan teknologi informasi dalam dekade terakhir abad ke-20 ini dapat mengundang pertanyaan, bagaimana peranan media cetak tradisional pada abad ke-21 yang akan datang? Apakah media cetak, dalam bentuknya seperti sekarang masih akan bertahan dan berkembang sebagai media informasi untuk ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni atau hiburan? Bukankah media elektronik yang semakin canggih dan praktis dapat menggantikan fungsi media cetak secara lebih lengkap dan menarik? Pertanyaan itu dapat berkelanjutan. Apakah kemampuan, minat, dan kebiasaan membaca masih perlu dikembangkan apabila informasi telah dapat diperoleh dengan lebih cepat melalui media elektronik dan optik?

Di tengah-tengah hiruk-pikuknya kemajuan teknologi elektronik dan optik, ternyata media cetak, seperti buku, masih merupakan media unggulan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi untuk keperluan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, ataupun untuk hiburan. *Superhighway of information* dan teknologi komunikasi komputer *interface* tidak mampu memisahkan buku dari kehidupan manusia. Sudah sekian lama buku itu menjadi teman setia manusia. Buku dapat disentuh, dipegang, dan dirasakan bentuk dan penampilannya. Wajah dan halaman-halamannya menggugah rasa ingin tahu dan di dalamnya ditemukan alam dan suasana baru, cerita atau pengetahuan yang terukir dalam huruf, kata, dan gambar yang mengalir di depan mata sebagai air jernih bening, sejuk, dan menyegarkan. Tidak jarang kandungan isi buku memuat buah pikiran yang menarik untuk ditelaah dan direnungkan serta dapat pula memberikan inspirasi atau merupakan embrio gagasan untuk suatu penemuan baru. Buku tidak hanya teman setia yang mudah dan praktis diajak ke mana saja dan menuturkan cerita dengan gaya tersendiri sebagai teman pengantar tidur yang nyenyak, tetapi bagi banyak orang buku merupakan pacar dengan biaya rendah (*low cost*), tetapi memiliki nilai tinggi (*high value*) sehingga sulit atau bahkan tidak terpisahkan lagi. Ciri khas

buku yang demikian ternyata tidak dimiliki oleh media elektronik.

Sampai penghujung abad ke-20 ini, buku masih menjadi sumber dan pusat untuk memperoleh informasi, hiburan, analisis, dan pendidikan untuk jutaan manusia. Usaha penerbitan berkembang hampir di semua negara dan media cetak menyebar sampai ke pelosok-pelosok dunia. Di daerah yang belum terjangkau media elektronik, media cetak, khususnya buku, menjadi sumber utama dan terutama, di samping guru, dalam proses pembelajaran dan pendidikan. Berdasarkan data UNESCO, pada tahun 1991 terdapat 863.000 judul terbitan baru dan setidaknya-tidaknya 20.000 jurnal ilmiah di seluruh dunia. Dalam kurun waktu tujuh tahun belakangan ini jumlah tersebut semakin bertambah selaras dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, kemajuan pendidikan, serta meningkatnya kebutuhan akan informasi melalui media cetak. Ilmu pengetahuan senantiasa tumbuh dan berkembang semakin cepat dan perubahan terjadi secara terus-menerus, masyarakat senantiasa mengalami transformasi dan para pakar mencatat dan membahas semuanya itu dalam buku. Dengan demikian, orang yang tidak membiasakan membaca dan terus membaca secara cepat akan ketinggalan informasi sehingga memiliki cakrawala berpikir yang semakin sempit dan fanatik. Oleh karena itu, tidak berlebihan kalau Thomas Carlyle mengatakan bahwa perguruan tinggi yang sebenarnya untuk zaman sekarang adalah kumpulan buku. Fakta sejarah juga menunjukkan bahwa sejumlah tokoh menjadi besar dari hasil membaca buku. Mahatma Gandhi, misalnya, dapat mengembangkan dan mempraktikkan ajaran Ahimsa setelah membaca secara intensif buku-buku karangan Tolstoy dan membaca biografi pengarang Rusia itu. Gandhi juga terkenal rajin membaca kitab Bhagawad Gita.

Melalui membaca, orang dapat memperoleh pengalaman baru menjelajahi batas ruang dan waktu. Segala peristiwa yang terjadi di tempat lain pada masa lampau atau pada masa sekarang atau kemungkinan kejadian pada masa yang akan datang dapat diketahui dan dicermati melalui membaca. Untuk menjadi pembaca fungsional sehingga dapat memperoleh dengan cepat dan akurat dalam jumlah yang banyak serta menikmati informasi itu, diperlukan kemampuan, keterampilan, dan kiat membaca. Kenikmatan atau manfaat yang diperoleh melalui membaca itu akan berkembang menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Kebiasaan individu yang menyatu menjadi kebiasaan kelompok merupakan perwujudan dari *reading society* yang merupakan ciri *learning society* yang diperlukan dalam *knowledge society*.

Masyarakat Indonesia pada hakikatnya telah mengenal kegiatan membaca sejak lama sungguhpun masih terbatas pada kalangan tertentu dan jumlahnya masih terbatas. Di kalangan tokoh-tokoh agama, membaca kitab suci merupakan keharusan dan pekerjaan rutin yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Kebiasaan itu diajarkan dan ditularkan kepada pengikut-pengikutnya. Di langgar-langgar atau musala dan masjid, anak-anak belajar mengaji, di lingkungan keraton para bangsawan membaca serat-serat berupa puisi dan ajaran hidup. Kegiatan dan kebiasaan membaca itu berkembang lebih meluas setelah dibukanya lembaga-lembaga pendidikan formal. Dewasa ini kemajuan di bidang pendidikan telah berhasil membebaskan hampir 84 persen penduduk Indonesia yang buta huruf sehingga mampu memperoleh informasi melalui media cetak.

Masyarakat di negara-negara yang sudah maju lebih dahulu, seperti Eropa, Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Korea Selatan, memperlihatkan bahwa kegiatan membaca sebagai salah satu kebiasaan dan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari sehingga menjadi salah satu unsur kebudayaan mereka, berbeda halnya dengan masyarakat di negara-negara yang relatif baru berkembang, termasuk Indonesia, yang masih dalam tahap menumbuhkan dan mengembangkan minat dan kegemaran membaca. *Book and Reading Development Study* (1992), yang dilaporkan oleh Bank Dunia, menunjukkan bahwa kebiasaan membaca belum terjadi pada siswa SD dan SLTP. Hasil studi ini juga menunjukkan adanya korelasi antara tingkat pendapatan per kapita dengan prestasi membaca siswa di sekolah serta mengungkapkan adanya korelasi antara mutu pendidikan secara keseluruhan dan waktu yang tersedia untuk membaca dan ketersediaan bahan bacaan.

Dengan demikian, belum dimilikinya kebiasaan membaca oleh siswa cenderung memberikan dampak negatif terhadap mutu pendidikan SD dan SLTP secara nasional. Pada tahun yang bersamaan hasil penelitian IEA mengungkapkan bahwa kemampuan membaca siswa Indonesia berada pada peringkat ke-26 dari 27 negara yang diteliti. Rendahnya kemampuan membaca itu dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal sekolah. Keluhan tentang rendahnya minat dan kemampuan membaca juga terdengar di kalangan pendidikan tinggi. Tidak tercapainya target kuantitas dan kualitas hasil belajar serta waktu penyelesaian kuliah di perguruan tinggi, antara lain, disebabkan oleh rendahnya kegiatan membaca mahasiswa.

Memang harus diakui bahwa minat, kegemaran, dan kebiasaan membaca terlihat nyata di lingkungan dan lapisan masyarakat tertentu seperti kalangan cendekiawan, tokoh-tokoh masyarakat, atau mereka yang karena tugas dan kedudukannya dituntut untuk banyak membaca. Rupanya budaya membaca belum berpihak kepada semua kalangan masyarakat. Masyarakat umum tampaknya belum merasakan membaca sebagai suatu kebutuhan. Waktu senggang lebih banyak dimanfaatkan untuk menikmati siaran televisi, ngobrol, atau melamun. Peranan keluarga dan masyarakat untuk menciptakan keluarga atau masyarakat membaca juga masih belum seperti yang diharapkan. Masih sangat sedikit jumlah keluarga yang memiliki perpustakaan atau koleksi buku di rumah. Masih sangat terbatas jumlah orang tua yang mendorong dan membimbing anaknya untuk gemar dan terbiasa membaca. Peran serta dan dukungan masyarakat terhadap pengembangan perpustakaan desa, perpustakaan masjid, atau taman bacaan masih belum seperti yang dicita-citakan. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh masih kuatnya budaya lisan serta adanya lompatan dari budaya lisan ke budaya pandang dengar (*audio visual*) tanpa melalui budaya baca yang mapan.

Dengan latar belakang seperti yang diuraikan di atas, makalah ini mencoba membahas masalah pembinaan minat baca masyarakat sehingga dapat tumbuh dan berkembang menjadi kegemaran, kebiasaan, dan pada gilirannya menjadi salah satu unsur kebudayaan masyarakat Indonesia. Luas dan kompleksnya masalah tersebut mengakibatkan inti persoalan tidak dapat dibahas secara rinci dan mendalam. Sungguhpun demikian, diharapkan dapat diungkapkan pokok-pokok pikiran yang bermanfaat dalam pembinaan minat baca masyarakat dalam lingkup upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa yang menjadi salah satu cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia sebagaimana dimuat dalam Pembukaan UUD 1945.

2. Visi Pengembangan Masyarakat Belajar

Di masa depan perwujudan visi bangsa kita untuk membangun kebijakan kolektif (*collective virtues*) telah ditegaskan dengan jelas dalam Pembukaan UUD 1945 berupa rumusan empat cita-cita nasional kita, yaitu meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan turutserta dalam pergaulan dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa itu, sesuai dengan amanat Pasal 31 UUD 1945, kita telah memiliki UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Lebih dari itu, bangsa kita pun telah menyelenggarakan berbagai kegiatan pendidikan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Semakin tinggi tingkat atau jenjang pendidikan semakin besar pula peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan ini. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dalam jumlah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan perguruan tinggi swasta (PTS) yang jumlahnya jauh lebih banyak dibandingkan dengan SLTA dan perguruan tinggi negeri (PTN).

Selama 53 tahun sejak Indonesia merdeka, dapat dicatat peningkatan yang sangat tajam dalam keberhasilan sistem pendidikan nasional dalam meningkatkan angka partisipasi pendidikan di tanah air, mulai dari tingkat SD/ibtidaiyah sampai ke perguruan tinggi. Sebelum krisis ekonomi terjadi, angka partisipasi murni tingkat sekolah dasar telah mencapai lebih dari 90 persen dan tingkat SLTP lebih dari 70 persen. Jumlah sarjana yang diluluskan setiap tahun mencapai rata-rata 300-an ribu lebih. Belum lagi jumlah kursus-kursus dalam berbagai bidang keterampilan yang tersebar di berbagai daerah di seluruh Indonesia. Semuanya telah menyumbang secara nyata upaya bangsa kita untuk terus-menerus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memasuki arena persaingan antarbangsa yang makin ketat dan terbuka.

Semua itu, jika dibandingkan dengan keadaan ketika bangsa kita baru merdeka, dapat dikatakan merupakan keberhasilan luar biasa dalam mendorong proses mobilitas vertikal masyarakat kita menjadi masyarakat yang makin sejahtera lahir dan batin. Angka buta huruf yang tercatat mencapai sekitar 95 persen lebih menjelang bangsa kita merdeka; pada tahun 1995 tercatat tinggal sekitar 13 persen lagi dengan jumlah penduduk sudah mencapai 200 juta jiwa. Artinya, dalam waktu setengah abad bangsa kita telah berkembang dari *illiterate society* menjadi *literate society*.

Demikian pula perkembangan pendidikan dalam arti formal, pertumbuhan masyarakat kita sejak kemerdekaan telah meningkat sangat tajam. Dari masyarakat buta huruf yang belum mengenal sistem persekolahan dalam arti modern, dalam waktu 53 tahun kemudian berubah menjadi masyarakat dengan tingkat partisipasi pendidikan yang cukup tinggi mulai dari tingkat taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi. Menurut data tahun 1995, lembaga-lembaga pendidikan kita setiap tahun telah berhasil meluluskan sebanyak 3.575.264 murid SD, 1.740.106 murid SLTP, 1.145.866 murid SLTA, dan 300.330 orang sarjana dan diploma.

Dengan kata lain, masyarakat kita sudah meningkat dari *unschooling society* men-

jadi *schooling society*. Namun, baik kualitas sebagai *literate society* maupun kualitas sebagai *schooling society* saja belum cukup untuk membangun suatu kehidupan bangsa yang cerdas seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945. Kualitas masyarakat yang mampu membaca (*literate society*) itu masih harus dikembangkan menjadi masyarakat yang benar-benar memanfaatkan kemampuan membaca itu dengan benar-benar membaca. Demikian pula masyarakat yang bersekolah (*schooling society*) itu masih harus dikembangkan agar benar-benar menjadi masyarakat belajar yang memiliki gairah dan kegandrungan untuk benar-benar dan terus-menerus belajar sesuai dengan prinsip *long-life learning*. Dengan kata lain, *literate and schooling society* itu masih harus dikembangkan menjadi masyarakat yang gemar membaca dan gandrung belajar (*reading and learning society*).

Bangsa kita adalah bangsa yang memiliki sejarah peradaban yang panjang dan terpancang pada masa lalu dan harus terus membangun diri menjadi bangsa yang terhormat pada masa yang akan datang. Dari segi jumlah penduduknya dan luas wilayahnya, Indonesia tergolong negara terbesar keempat di dunia, tetapi sumbangannya terhadap kemanusiaan dan peradaban umat manusia di dunia masih tergolong kurang diperhitungkan. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan bahkan peningkatan kualitas manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya, dalam arti yang lebih mendalam, mutlak dilakukan guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas seperti yang dicita-citakan dalam konstitusi.

Hanya dengan mempertinggi kualitas kehidupan yang cerdas itulah, kita dapat membangun peradaban Indonesia modern yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan. Untuk itu, masyarakat kita harus tumbuh menjadi masyarakat yang gandrung dan bergairah untuk belajar dan terus-menerus belajar melalui berbagai jaringan belajar (*learning web*) yang produktif. Ciri penting dari masyarakat belajar (*learning society*) itu tidak lain ialah kegemaran dan kebiasaan untuk membaca (*reading society*). Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali segera membangkitkan kebiasaan masyarakat untuk membaca ini. Membaca harus dijadikan kebutuhan sehari-hari.

Lagi pula, dalam era reformasi sekarang ini kita telah mencanangkan cita-cita mewujudkan kualitas bangsa kita pada masa mendatang sebagai masyarakat madani. Idealitas peradaban masyarakat madani yang kita bayangkan pada masa depan haruslah bertumpu pada tingkat kecerdasan kolektif bangsa kita yang ditopang oleh kualitas individu setiap warga negara yang otonom dan mandiri dalam satu bangunan hukum negara Republik Indonesia yang kuat, demokratis, dan partisipatoris dengan ikatan sistem hukum yang fungsional, transparan, dan berkeadilan. Kehidupan masyarakat madani itu ditopang pula oleh ekonomi pasar yang memberikan kemakmuran yang adil dan merata dengan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keseimbangan spiritualitas-materialitas dan dimensi-dimensi lahiriah-batiniah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Perikehidupan masyarakat seperti itu tidak dapat tidak haruslah bertumpu pada kualitas tiap-tiap individu warga negara yang cerdas dan terus menerus terlibat dalam perkembangan arus informasi yang meningkat makin tajam setiap waktu. Keterlibatan tiap-tiap warga masyarakat menuntut keakraban mereka ter-

hadap berbagai media dan sumber-sumber informasi yang terus meningkat kuantitas dan kualitasnya dari waktu ke waktu.

Tak dapat dimungkiri bahwa media informasi elektronik makin meningkat peranannya pada masa-masa mendatang. Namun, seperti dikemukakan di atas, buku dan media cetak lainnya tetap tidak akan tergantikan fungsinya sebagai sumber dan media informasi yang memiliki daya tahan lama dan terpercaya. Lagi pula, tingkat ketajaman pemikiran yang diperlukan dalam memanfaatkan buku, sebagai media dan sumber informasi, tidak dapat digantikan oleh media lain yang bersifat elektronis. Oleh karena itu, meskipun media elektronis makin penting peranannya, gairah membaca buku tetaplah menjadi tulang punggung yang utama dalam upaya membangun kebudayaan belajar yang fungsional pada masa depan. Apalagi, pengertian buku itu sendiri pun dapat pula dikembangkan mencakup pengertian bentuk-bentuk multimedia lainnya yang sama-sama sebagai sumber dan media informasi dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, sekali lagi, tidak ada jalan lain bagi kita kecuali sungguh-sungguh meningkatkan gerakan kolektif menuju masyarakat gemar membaca dan gemar belajar (*reading and learning society*) pada masa mendatang.

3. Pengembangan Minat Baca

Minat atau motivasi membaca terkait dengan kemampuan membaca, kebutuhan, lingkungan, dan tersedianya bahan bacaan. Dengan menyadari pentingnya menumbuhkembangkan minat baca menjadi kegemaran dan kebiasaan membaca, selama ini terlihat berbagai upaya yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah secara sendiri-sendiri atau bersama-sama.

a. Kemampuan Membaca

Kemampuan dan keterampilan membaca diberikan sedini mungkin ketika anak memasuki lembaga pendidikan jalur sekolah serta dikembangkan melalui berbagai pendekatan dan metode sehingga mereka terampil membaca. Untuk memahirkan keterampilan membaca serta untuk mendorong siswa terbiasa membaca, tiap-tiap lembaga pendidikan dilengkapi dengan perpustakaan sekolah dengan berbagai jenis koleksi. Mereka yang belum memperoleh kesempatan untuk mengikuti pendidikan melalui jalur pendidikan sekolah ditampung dalam kegiatan pendidikan di jalur luar sekolah dengan berbagai jenis program, seperti program paket A dan B untuk pendidikan dasar (SD dan SLTP). Program paket A juga terbuka untuk orang dewasa yang berumur di atas usia sekolah.

b. Kebutuhan Membaca

Pendidikan pada hakikatnya berlangsung secara terus-menerus sepanjang hidup manusia (*life long education*). Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang begitu pesat serta menyebar dalam berbagai jenis informasi yang melimpah dalam arus yang begitu dahsyat melanda kehidupan sehari-hari masyarakat. Sementara itu, abad ke-21 yang semakin dekat menuntut keahlian dan pengetahuan yang harus dimiliki setiap orang dan perlu dilandasi informasi (*information based skills and knowledge*) dan ber-

akar pada nilai-nilai kebudayaan masing-masing. Situasi dan tuntutan yang demikian memacu lembaga-lembaga pendidikan dan tokoh-tokoh masyarakat berupaya menanamkan dan menumbuhkan kebutuhan (*demand*) untuk memperoleh informasi dan belajar secara terus-menerus melalui membaca sehingga dapat bertahan dan hidup serasi dalam terpaan gelombang informasi yang membawa perubahan zaman.

c. Lingkungan

Minat membaca pada awalnya muncul atau tumbuh dari dalam diri tiap-tiap pribadi. Minat membaca akan berkembang dengan baik apabila didukung oleh keadaan lingkungan yang kondusif dalam keluarga, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Berbagai imbauan telah disampaikan agar tiap-tiap keluarga memiliki perpustakaan keluarga dan orang tua meluangkan waktu untuk membaca bersama serta membiasakan memberikan penghargaan atau hadiah dalam bentuk buku. Sementara itu, masyarakat didorong untuk mewujudkan masyarakat membaca (*reading society*) dan mendayagunakan serta mengembangkan taman-taman dan klub-klub bacaan. Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan desa dan perpustakaan masjid merupakan langkah positif yang dilakukan dalam mewujudkan lingkungan yang mendorong tumbuh dan berkembangnya minat baca.

Beberapa pemerintah daerah telah pula menerapkan jam wajib belajar mulai dari pukul 19.00 sampai pukul 21.00. Dalam dua jam tersebut diharapkan masyarakat khususnya para pelajar dan mahasiswa dapat menggunakan waktunya untuk membaca dan belajar serta televisi dimatikan. Di sejumlah sekolah telah pula dirintis jam wajib baca selama setengah jam setiap hari atau lima sampai sepuluh menit sebelum setiap mata pelajaran dimulai. Kegiatan-kegiatan itu dilakukan untuk menciptakan suatu lingkungan yang mendorong dilakukannya kegiatan membaca secara intensif dan efektif.

d. Bahan Bacaan

Pengembangan secara kuantitatif dan kualitatif berbagai jenis perpustakaan dan taman bacaan merupakan upaya nyata dalam melayani kebutuhan pembaca akan bahan bacaan. Pemerintah dan masyarakat memperkaya koleksi perpustakaan dan taman bacaan dengan berbagai jenis bacaan. Di samping itu, produksi buku yang dilakukan penerbit tampak semakin maju, sebelum krisis moneter melanda masyarakat Indonesia, dan penyaluran buku semakin menyebar melalui toko-toko buku, perpustakaan, dan taman-taman bacaan. Sangat disayangkan bahwa krisis moneter berkepanjangan yang terjadi sejak setahun terakhir ini juga turut mempengaruhi perkembangan dunia perbukuan di tanah air kita sehingga dapat menghambat upaya pembinaan dan pengembangan minat dan kegemaran membaca masyarakat. Sementara itu, dilihat dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang memerlukan bahan bacaan jika dibandingkan dengan produksi buku dan media cetak lainnya, masih tidak sebanding dalam arti bahan bacaan yang dihasilkan jauh lebih sedikit dari kebutuhan secara kuantitatif dan kualitatif.

Di samping hasil-hasil positif yang diperoleh melalui upaya penumbuhan dan pengembangan minat baca masyarakat selama ini, masih dihadapi berbagai kendala

dan masalah yang perlu dicarikan jalan keluarnya. Kurangnya jumlah pengarang profesional, yang terlihat dari organisasi penulis/pengarang dengan anggota secara keseluruhan tidak lebih dari 200 orang dalam organisasi Ikatan Wanita Pengarang Indonesia, Perhimpunan Pengarang AKSARA, dan Ikatan Pengarang Indonesia, serta kurangnya penghargaan terhadap pengarang merupakan salah satu penyebab kurangnya naskah baru yang dapat diterbitkan. Dalam kurun lima tahun terakhir ini jumlah naskah terbitan baru di Indonesia hanya berkisar 6.000 judul (tidak termasuk terbitan pemerintah). Jumlah tersebut termasuk rendah dibandingkan dengan jumlah terbitan buku Malaysia yang sudah mencapai 8.000, Singapura 12.000, Jepang 60.000 judul baru.

Jumlah tiras buku dan bahan bacaan lainnya juga belum seimbang dengan kebutuhan masyarakat pembaca. Sebagai contoh, rata-rata tiras buku yang diterbitkan berkisar 5.000 eksemplar untuk setiap judul, yang berarti hanya berjumlah 30 juta setiap tahun dibandingkan dengan jumlah masyarakat pembaca fungsional yang berkisar 60% dari seluruh jumlah penduduk atau sekitar 120 juta orang, sedangkan rasio tiras surat kabar dengan jumlah penduduk sekitar 1:55 yang berarti masih rendah jika dibandingkan dengan di Malaysia yang mencapai rasio 1:3. Jumlah tiras buku dan surat kabar itu berkaitan dengan kebutuhan (*demand*) pembaca sehingga dapat juga dijadikan sebagai indikator minat dan kegemaran membaca masyarakat.

Harga buku dan bahan bacaan lainnya belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh daya beli semua lapisan masyarakat. Berbagai faktor dianggap sebagai penyebab mahalnya harga buku seperti pajak ganda, biaya distribusi, serta lambannya pemasaran buku. Di pihak lain, banyak informasi dan hiburan dapat diperoleh masyarakat secara lebih murah atau gratis melalui siaran televisi yang disajikan secara lebih menarik daripada membaca. Keadaan yang demikian ini sudah barang tentu menghambat perkembangan minat baca.

4. Pembinaan Minat Baca

Seperti telah diutarakan sebelumnya, kegiatan membaca sudah lama dikenal di Indonesia walaupun masih di lingkungan atau kalangan tertentu saja. Akan tetapi, kegiatan itu telah berkembang pesat di seluruh lapisan masyarakat berkat kemajuan yang diperoleh di bidang pendidikan jalur sekolah dan di luar jalur sekolah. Berbagai upaya pula telah dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah untuk menumbuhkembangkan minat baca agar menjadi kegemaran dan kebiasaan positif dan hasilnya dapat dilihat secara nyata sungguhpun masih belum dapat disejajarkan dengan masyarakat lain yang sudah terlebih dahulu maju. Program dan kegiatan orang tua, masyarakat, dan pemerintah dalam memasyarakatkan kegemaran, kebiasaan, dan kebutuhan membaca selama ini perlu dikembangkan pada masa yang akan datang melalui berbagai jalur.

a. Jalur Pendidikan Keluarga

- 1) Mendorong tumbuhnya budaya baca dalam keluarga melalui pemberian motivasi kepada orang tua dan anak melalui jalur PKK, penyuluhan lapangan, dan tokoh-tokoh informal.

- 2) Memberikan rangsangan berupa anugerah atau bentuk lain kepada *keluarga membaca* dan dijadikan model yang dapat diteladani keluarga lain.
- 3) Mengembangkan budaya cinta buku pada keluarga dengan mengaitkan suatu peristiwa dengan buku (misalnya perkawinan, ulang tahun, dan prestasi).

b. Jalur Masyarakat

- 1) Meningkatkan jumlah dan mutu sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan penyediaan bahan bacaan mulai dari penulis, penerjemah, ilustrator, perancang buku, pengelola percetakan, dan toko buku sehingga buku yang bermutu dapat mudah diperoleh oleh masyarakat.
- 2) Mendekatkan buku dan bahan bacaan lainnya kepada masyarakat secara lebih meluas. Dekat dalam arti keterjangkauan secara fisik, harga, dan kemampuan intelektual serta alam pikirnya.
- 3) Meningkatkan fungsi jaringan distribusi buku sehingga dapat menjangkau semua kelompok masyarakat melalui pengembangan toko buku, perpustakaan, dan taman bacaan masyarakat atau sarana distribusi buku lainnya.
- 4) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan membaca anggota masyarakat dengan menyelenggarakan berbagai lomba yang berkaitan dengan kegiatan membaca, khususnya pada peringatan peristiwa-peristiwa nasional atau regional dan lokal. Kegiatan ini difungsikan dari unit masyarakat terkecil sampai keluarga.
- 5) Meningkatkan hibah buku dari masyarakat dan untuk masyarakat.
- 6) Membentuk atau mengembangkan kelompok membaca dan menulis serta meningkatkan peranan Perhimpunan untuk Masyarakat Gemar Membaca (PMGM) dalam mengembangkan minat dan gemar membaca.

c. Jalur Pendidikan Sekolah

- 1) Meningkatkan kuantitas dan kualitas perpustakaan di setiap lembaga pendidikan. Upaya ini termasuk peningkatan pelayanan petugas dan sarana perpustakaan kepada pengunjung.
- 2) Mengembangkan secara intensif dan efektif jam wajib kunjung perpustakaan atau jam wajib membaca siswa dan mahasiswa.
- 3) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan membaca siswa dan mahasiswa sedini mungkin. Kemampuan dan keterampilan membaca efektif siswa hendaknya dilakukan melalui pendekatan dan metode yang tepat sejak siswa mulai mengikuti pendidikan. Untuk mahasiswa perlu diberikan teknik membaca cepat dengan menyediakan “klinik membaca” yang dapat memberikan bimbingan dan latihan khusus kepada mahasiswa.
- 4) Menyelenggarakan lomba yang berkaitan dengan membaca, seperti membaca cepat, membuat sinopsis, dan kritik buku, serta mengarang antarsiswa dan antarsekolah, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.

d. Jalur Pendidikan Luar Sekolah

- 1) Mengembangkan Kejar Paket A yang dipadukan dengan pendidikan mata pencaharian.
- 2) Meningkatkan fungsi Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan melengkapinya dengan bahan-bahan bacaan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitarnya.

5. Penutup

Meningkatkan minat baca masyarakat adalah salah satu usaha yang sangat penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan membaca, seseorang memperoleh berbagai informasi yang penting, baik berupa pengetahuan, keterampilan, maupun pengalaman yang sangat bermanfaat bagi pengembangan diri, sikap, dan wataknya sebab membaca tidak hanya terarah pada aspek kognitif, tetapi juga pada aspek afektif ataupun psikomotorik.

Usaha-usaha yang telah dan akan diupayakan oleh Pemerintah dalam mendorong minat baca masyarakat hendaknya disambut dan didukung oleh semua pihak. Peningkatan minat baca haruslah menjadi gerakan seluruh masyarakat Indonesia sehingga budaya baca dan kebutuhan membaca dapat diwujudkan dengan baik.

Budaya baca tentunya didukung oleh tersedianya buku dan bahan bacaan lain. Buku dan bahan bacaan lain memiliki peran yang strategis dalam pembangunan bangsa. Bukulah yang membantu orang memperoleh pengetahuan dengan segala perkembangannya. Tanpa buku, yang memungkinkan tulisan dalam bentuk kuantitas yang besar disatukan dan disimpan, pengetahuan tidak akan mungkin berkembang. Dengan daya jangkau dan daya tahan yang lebih, buku berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memberdayakan masyarakat menjadi manusia yang berkualitas. Peranan strategis buku tertuang dalam mukadimah Piagam UNESCO 1971, yaitu "Yakinlah bahwa buku tetap menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarkan khazanah dunia ilmu pengetahuan. Percaya bahwa peranan buku dapat diperkuat dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ditujukan untuk mendorong penggunaan kata-kata tercetak seluas-luasnya" (*Kompas*, 19 Oktober 1997).

Sekalipun buku memegang peranan penting dalam meningkatkan minat baca masyarakat, harus diakui bahwa pengadaan buku, baik dalam segi kuantitas maupun kualitas, belum memadai sebagaimana yang diharapkan. Mereka bagaikan wajah yang bergelombang rasa di balik tangis yang tertahan sehingga dibutuhkan kemauan yang besar untuk menjadikannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan proses pembangunan yang sedang digalakkan sekarang ini. Usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemerintah dan pihak-pihak lain yang memiliki kepedulian terhadap minat baca, sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu hendaknya tetap didukung dan dikembangkan.

Peningkatan minat baca masyarakat pertama-tama dan terutama dimulai dari dan oleh keluarga agar membaca menjadi suatu kebutuhan yang penting di samping sandang, pangan, dan papan. Di sekolah pun membaca dapat dibiasakan dengan mewajibkan siswa untuk masuk perpustakaan (ada jam khusus) sehingga cinta membaca

tumbuh dengan sendirinya melalui pembiasaan tersebut. Selain itu, sangat dituntut peranan media massa, pameran buku, dan lain-lain agar masyarakat Indonesia akrab dengan bahan bacaan sehingga memiliki minat baca yang tinggi.

Daftar Pustaka

- Adnan, Hamed M. 1996. *Penerbitan dan Pemasaran Buku di Malaysia*. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaya.
- Altbach, Philip G. dan Damtew Teferra (Ed.). 1998. *Publishing and Development: A Book of Readings*. Chestnut Hill, Massachusetts USA: Bellagio Publishing Network.
- Dewan Bahasa. 1997. *Book for All*. Kuala Lumpur.
- Pusat Perbukuan. 1995. *Kongres Perbukuan Nasional I*. Jakarta.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D11
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 16.00--16.50
Judul Makalah	: Pembinaan Minat Baca
Penyaji	: Jimly Asshiddiqie
Pemandu	: Abdul Gaffar Ruskhan
Pencatat	: a. Meity Taqdir Qodratillah b. I Nyoman Suarjana
Peserta	: 90 orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** Durdje Durasid, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. **Pertanyaan:**

Apa yang menyebabkan minat baca masyarakat di negara lain tinggi?

b. **Jawaban:**

Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain faktor kultural, sistem pendidikan, sosial politik, dan faktor ekonomi. Kalau kita ingin menjadikan masyarakat kita cerdas, beberapa faktor di atas perlu diperhatikan.

2. **Penanya:** Rusdi, IKIP Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Bagaimana cara memupuk minat baca anak-anak dalam keluarga saat ini? Saya melihat pengaruh teknologi media massa sangat kuat.

b. **Jawaban:**

Memang saat ini teknologi media massa sangat canggih. Saya tidak tahu bagaimana cara memecahkan masalah ini. Saya melihat ada usaha ke arah itu yang telah dilakukan masyarakat. Misalnya, memberlakukan jam membaca. Peranan keluarga sangat penting dan perlu strategi dalam menyikapi hal itu.

3. **Penanya:** Yoseph, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. **Pertanyaan:**

Bagaimana cara menyediakan buku-buku yang diperlukan?

b. **Jawaban:**

Salah satu cara mungkin dengan pemberian hadiah buku pada waktu acara pernikahan, ulang tahun, dan lain-lain.

4. Penanya: Taufiq Ismail, Penyair, Jakarta

a. Pertanyaan:

Pada hemat saya, untuk menarik minat baca masyarakat adalah dengan cara menciptakan kondisi senang dan bergairah untuk membaca. Hal itu dapat dimulai dari gemar membaca karya yang indah-indah, yaitu karya sastra. Membaca karya sastra bukan menjadikan mereka sastrawan. Membaca karya sastra merupakan dasar atau lintasan untuk gemar membaca bacaan lain, seperti sosiologi, antropologi, arsitektur, dan teknologi. Tugas pembaca adalah membaca sampai tamat, menganalisis, dan menulis. Dengan cara seperti itu, masyarakat akan gemar membaca dan makin lama makin cerdas.

b. Tanggapan:

Saya setuju dengan pernyataan Pak Taufiq. Tugas pendidikan adalah memberi fasilitas dan menciptakan gairah belajar/membaca, membantu, mendorong, memberi arah sebagaimana tercantum dalam kurikulum. Akan tetapi, kurikulum sekarang ini perlu direformasi karena pelajaran bahasa ditekankan pada tata bahasa yang menyebabkan pola pikir anak menjadi kaku. Saya sering melihat seorang mahasiswa mengajukan pertanyaan. Isi pertanyaan itu sangat mudah, tetapi disampaikan dengan emosi yang meletup-letup. Hal itu merupakan suatu ciri bahwa pendidikan rohani mereka kurang terarah atau mungkin juga karena pengetahuan sastranya kurang.

PEMBINAAN BAHASA INDONESIA MELALUI MEDIA MASSA

Toeti Adhitama
Majalah *Eksekutif*

1. Pengantar

Salah seorang cendekiawan humanis sejati yang pernah dimiliki Indonesia, Soedjatmoko (alm.), pernah mengatakan bahwa kebudayaan meliputi seluruh pengetahuan, ilmu, kecakapan, alat, adat kebiasaan, lembaga, pengalaman, dan perasaan yang telah menjelma menjadi suatu cara hidup tertentu yang diwariskan secara turun-menurun. Maka, menurut Soedjatmoko, seperti yang terungkap dalam buku *Pemikiran Soedjatmoko tentang Kebebasan*, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia yang menyangkut perkembangan politik dan ekonomi merupakan masalah kebudayaan karena persoalan itu berakar dari dan ikut menentukan cara hidup suatu bangsa.

Dari pernyataan Soedjatmoko tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa berbagai perkembangan politik-ekonomi, seperti kegawatan luar biasa yang kita hadapi sekarang, merupakan masalah kebudayaan. Fakta bahwa masalah politik dan ekonomi adalah masalah kebudayaan jarang disinggung pada waktu kita membuat analisis-analisis politik atau ekonomi sekarang ini. Kita jarang mempersoalkan apa pengaruh kebudayaan terhadap perkembangan politik dan ekonomi, sekalipun ketiga hal itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam kehidupan suatu bangsa.

Dalam kebudayaan, kata Soedjatmoko, ada unsur-unsur positif dan negatif yang berkaitan dengan usaha mencapai cita-cita suatu bangsa. Selain itu, kebudayaan juga memiliki daya pendorong dan daya penentang perubahan. Padahal, daya pendorong perubahan atau daya ke arah pembaruan merupakan faktor yang terus-menerus menyesuaikan kebudayaan itu dengan berbagai masalah dan tantangan baru. Daya penentang perubahan berusaha menolak unsur-unsur yang datang dari luar yang dapat mengubah sifat dan pribadinya. Untuk menanggulangnya, selalu ada usaha untuk mempertahankan jati diri.

Gejala ini--yakni adanya daya pendorong dan daya penentang--dapat jelas kita rasakan dalam perkembangan bahasa kita. Mengapa demikian? Karena, seperti kata Anton M. Moeliono, bahasa merupakan bagian kebudayaan, bahkan merupakan syarat mutlak kebudayaan karena kita hanya dapat mengenal kebudayaan lewat bahasa. Menurut Anton M. Moeliono, fungsi umum bahasa di dalam kebudayaan dapat dirumuskan sebagai berikut: 1) perekam ciri-ciri kebudayaan, 2) sarana pengembang kebudayaan, dan 3) jalur penerus kebudayaan.

Kertas kerja ini bermaksud meneropong ketiga fungsi tersebut, khususnya fungsi bahasa atau kebudayaan yang terwujud dalam media mass, agar kita dapat mengirangira apa jawaban atas pertanyaan: bagaimana kita bisa membina bahasa dalam perkembangan budaya kita? Yang saya maksud dengan *bahasa* bukanlah sekadar pembinaan sarana ekspresi dalam bentuk lisan dan tulisan, tetapi mencakup pula kebudayaan yang diejawantahkan dalam bahasa. Selain itu, juga akan saya sampaikan

pengamatan terhadap dinamika bahasa Indonesia sebagai suatu entitas.

2. Perekaman Ciri-Ciri Kebudayaan

Dalam pemakaian bahasa Indonesia sehari-hari, khususnya dalam hubungan antar-pribadi dengan orang-orang sekitar, kita memakai kata-kata ganti seperti *bapak, ibu, adik, kakak* dalam berhubungan dengan orang-orang yang bukan anggota keluarga. Ini sudah tentu warisan tradisi lama yang kemudian mewujud dalam kehidupan modern. Kebiasaan menggunakan kata-kata ganti yang bersifat kekeluargaan, sepanjang yang saya ketahui, banyak berlaku di negara-negara Asia, tetapi sama sekali tidak umum di negara-negara Barat. Hal itu mencirikan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, orang-orang Asia lebih bersifat kekeluargaan daripada masyarakat Barat.

Sifat kekeluargaan ini tercermin pula dalam kehidupan politik dan bisnis/ ekonomi. Kita mengenal manajemen gaya Asia yang dibedakan dengan manajemen gaya Barat atau gaya modern. Manajemen Asia yang bersifat kekeluargaan lebih menekankan kebersamaan, berlandaskan pada asas musyawarah dan mufakat. Orang Barat lebih formal dan *zakelijk*, serta lebih menekankan legalitas atau mengacu pada aspek hukum. Mereka selalu mengatakan bahwa hukum di atas segala-galanya. Masing-masing lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki hak dan kewajiban yang jelas dan tegas batasan-batasannya. Indonesia, yang sejak awal berdirinya sudah menacitakan pentingnya asas musyawarah dan mufakat, seperti tersimpul dalam falsafah negara, kelihatannya sejauh ini merancukan, kalau bukan malahan tidak mengenali, batas-batas hak dan kewajiban masing-masing badan tersebut.

Dalam kertas kerja ini sebenarnya saya cenderung mengenakan tanda petik pada kata *musyawarah*, sebab seperti yang telah kita alami dan kita jalani selama ini, yang disebut musyawarah pada akhirnya bisa menghasilkan mufakat yang memenangkan pihak elite. Sebenarnya, ilmu komunikasi sendiri sudah mengisyaratkan dan menyarankan, baik dalam diskusi besar maupun kecil, elite yang memiliki pengaruh hendaknya memberi kesempatan kepada yang lain-lain untuk mengemukakan pendapat demi tercapainya mufakat sebagai hasil musyawarah murni. Mengapa? Karena yang lain-lain, *the silent majority*, cenderung membiarkan elite yang memiliki pengaruh/ kekuasaan--apa pun bentuknya: apakah posisi, kekayaan, atau kepintaran--mendominasi forum, lebih-lebih dalam suasana yang feodalistis. Dalam skala nasional, perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini membuktikan kebenaran teori tersebut. Akibat dari sikap membiarkan dominansi elite kekuasaan, dalam sejarah perjalanan bangsa, kita menjadi terpuruk karena kelemahan-kelemahan sifat manusia seperti yang tercermin dalam ungkapan *power tends to corrupt*--yang sudah diantisipasi masyarakat maju dengan membangun hukum untuk membentenginya--pada kita mendapat toleransi yang cukup tinggi.

Di kalangan masyarakat Jawa, yang umumnya feodalismenya kuat, gejala itu dapat dijelaskan oleh bahasa. Bahasa Jawa memiliki tingkatan-tingkatan sesuai dengan siapa pemberi dan siapa penerima ujaran. Dalam menyebut pembantu gender wanita, misalnya, banyak dipakai istilah *mbok* yang artinya *ibu*, tetapi umumnya dikenakan terhadap wanita kalangan bawah. Memang kalangan bawah Jawa umumnya memanggil

ibu mereka *mbok*. Apa yang disiratkan oleh istilah tersebut? Masyarakat yang feodalistis sebenarnya mengenal asas kekeluargaan dalam pergaulan dengan masyarakat sekitar. Pengertian *noblesse oblige* diharapkan sudah mengakar dalam sikap dan perilaku kalangan priyayi. Melindungi *kawulo* atau bawahan merupakan kewajiban kalangan priyayi. Maka, sebagai imbangannya, para *kawulo* yang merasa dilindungi itu tidak pernah mempersoalkan atau mempertanyakan kebijaksanaan atau sikap atasan terhadap para *kawulo*. Toleransi terhadap sikap dan perilaku para *ndoro* cukup tinggi. Tradisi seperti itu terbawa sampai sekarang sekalipun kita menyebut diri sebagai negara republik merdeka. Itu pula barangkali yang menyebabkan kata *anda*--yang kedengaran lebih demokratis, sepadan dengan kata *you*--belum sepenuhnya lulus untuk menggantikan sebutan *bapak* atau *ibu* kalau kita ingin menyapa orang yang kita hormati; walaupun menurut Rosihan Anwar, dalam makalahnya di Kongres Bahasa Indonesia III tahun 1978, kata *anda* berarti 'yang mulia' atau 'yang terhormat'. Misalnya, tak terbayangkan oleh saya, yang orang Jawa, jika saya harus menyapa Pak Soeharto atau Pak Wiranto--yang dua-duanya orang Jawa--dengan kata *anda*. Mereka pun, seandainya saya sapa dengan sebutan itu, dalam hati akan mengatakan. Mentang-mentang zaman reformasi, maka boleh sembarangan memanggil orang.

Perhatikan pemakaian kata *anda* dalam siaran-siaran wawancara televisi kita: umumnya sebutan *anda* hanya dipakai terhadap orang-orang muda atau yang dianggap setara.

Bahasa sebagai perekam ciri-ciri kebudayaan juga dapat dibaca dalam bahasa jurnalistik kita. Menurut teori, bahasa jurnalistik sebaiknya ringkas, jelas, dan lugas. Pengalaman saya selama 20 tahun menekuni bidang ini menyatakan lain. Karena transparansi seakan-akan ditabukan sampai sebelum masa reformasi, kami terpaksa mengekspresikan apa yang ingin kami sampaikan dengan cara terselubung. Kadang-kadang selubung itu begitu rapi dan rapatnya sehingga hanya mereka yang teliti atau yang mempunyai ketajaman berpikir yang mampu menangkap isinya.

Untuk menghindari kelugasan yang bisa mengganggu perasaan masyarakat, maka bermunculan istilah-istilah baru yang bertujuan melunakkan arti atau memperindah bunyi, seperti: *WTS* sebagai pengganti *pelacur* yang kedengaran kasar; *lembaga masyarakat* sebagai pengganti kata *penjara* yang kedengaran kejam; *karyawan* sebagai pengganti *buruh* yang berkonotasi pihak yang dieksploitasi; dan *pramuniaga* sebagai pengganti istilah *pelayan toko* yang kedengaran kurang terhormat.

Dalam pemakaian kata-kata, selain terjadi pembaharuan-pembaharuan istilah tersebut, juga telah terjadi erosi makna, khususnya sebagai akibat propaganda politik/ekonomi oleh elite kekuasaan. Sebagai contoh, kata *banpres*, singkatan *bantuan presiden*, mengesankan bahwa bantuan itu datang dari pribadi presiden walaupun kalangan terdidik tahu bahwa kenyataannya tidak demikian. Namun, bagi rakyat jelata, istilah tersebut menyiratkan kemurahan hati presiden.

Pemaparan tadi hanya sekadar beberapa contoh kasus tentang bahasa sebagai perekam ciri-ciri kebudayaan. Tentu kita bisa mencari contoh lain jika ditinjau dari sisi lain, tetapi saya sengaja memilih kasus-kasus tadi untuk menjelaskan pengaruh politik-ekonomi terhadap kebudayaan umumnya, dan bahasa khususnya.

3. Sarana Pengembangan Kebudayaan

Sebagai alat komunikasi, bahasa bukan sekadar berbentuk pesan statis yang dikirimkan dan diterima, tetapi juga berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran pihak-pihak yang mengadakan pembicaraan. Hal itu berarti bahwa bahasa menjadi sarana untuk mengolah pikiran bersama, mengatasi masalah bersama, membuat keputusan bersama. Singkat kata, bahasa adalah sarana untuk mengembangkan kebudayaan.

Khusus mengenai bahasa dalam kaitannya dengan media massa, saya ingin menegaskan bahwa media massa ikut banyak menentukan pengembangan bahasa. Di zaman ketika media massa belum kita kenal, pengembangan bahasa tentunya tidak secepat seperti yang kita alami sekarang.

Di Indonesia, kemajuan teknologi komunikasi yang melahirkan jenis media massa pertama, yakni media cetak, baru mulai kita kenal sejak orang-orang Belanda mendirikan perusahaan percetakan di Indonesia pada abad ke-17. Di bidang telekomunikasi, kita mulai mengenalnya pada tahun 1855 dengan dibukanya jalur telegraf yang pertama antara Batavia dan Buitenzorg; saluran telepon mulai tahun 1882 dengan dibukanya hubungan antara Gambir-Tanjung Priok; radio--sistem transmisi tanpa kawat--kita kenal di awal-awal abad ke-20. Baru dua generasi setelah mengenal radio, kita di Indonesia mulai mengenal televisi, dan sekarang komputer, yang dengan cepat disusul oleh sistem internet dan multimedia.

Sulit bagi kita untuk membayangkan bagaimana keadaan dan perkembangan bahasa kita sebelum ada teknologi maju. Sebagai bahasa lisan, bahasa Indonesia tidak mudah disebarkan karena langkanya catatan; tidak mudah melakukan penyebaran karena prosesnya hanya dilakukan dari orang ke orang; tidak mudah dikembangkan karena bahasa sebagai hasil musyawarah masyarakat relatif berjalan lambat.

Dari tesis tersebut, menjadi jelas bahwa kemajuan media massa membantu pesatnya pengembangan kebudayaan umumnya, dan bahasa khususnya. Sebagai sarana komunikasi, bahasa pada saat ini berlalu-lintas jauh lebih cepat daripada masa pramedia massa. Selain itu, jenis-jenis teknologi komunikasi ikut menentukan kadar kecepatan pengembangan bahasa. Dalam penyebaran dan pengembangan bahasa di Indonesia, radio dan televisi, misalnya, mempunyai dampak lebih besar daripada media cetak.

Bahwa dampak media elektronik lebih besar terhadap pengembangan bahasa, dapat saya ambil sebagai contoh keadaan di negara kita sekarang ini.

Seperti yang sering saya sampaikan dalam berbagai seminar, kita sedang berada dalam masa transisi, dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Mayoritas masyarakat kita adalah tradisi kaum tani yang hidup di pedesaan. Budaya baca-tulis bukan budaya masyarakat pedesaan. Keakraban dan solidaritas secara alamiah terjalin di kalangan penduduk desa karena kecilnya masyarakat memungkinkan hal itu. Mereka memiliki tradisi lisan. Membudayakan baca-tulis pada masyarakat yang demikian tentu sangat tidak mudah.

Perubahan diharapkan secara berangsur terjadi setelah mereka pindah ke kota. Saya katakan "berangsur" karena gelombang urbanisasi terjadi sesuai dengan lajunya modernisasi kehidupan. Namun, perpindahan ke daerah kota tidak menjamin terjadinya perubahan dalam sikap. Mayoritas masih membawa tradisi desa ke ke-

hidupan kota. Ini untuk menghindari rasa terasing hidup di daerah perkotaan yang penduduknya tidak akrab, kalau bukan malahan tidak kenal satu sama lain. Untuk menumbuhkan keakraban, mereka, misalnya, lalu menciptakan berbagai paguyuban untuk saling mendekatkan diri dan mencegah rasa kesepian. Bukan budaya mereka untuk menghalau kesepian dengan menumbuhkan kebiasaan membaca. Dengan demikian, tidak mengherankan kalau produksi buku bacaan kita tergolong amat kecil. Menurut laporan Masyarakat Perbukuan Indonesia (MPI), tahun 1995 hanya muncul 3.500 judul buku dengan jumlah terbitan maksimal 12 juta eksemplar satu tahun--itu untuk penduduk yang jumlahnya sekitar 200 juta. Jadi sekitar 18 judul untuk tiap satu juta orang, setiap tahun. Jenis buku-buku yang diterbitkan juga patut membuat kita cemas: 60% terbitan itu berupa buku pelajaran TK sampai SMU, untuk perguruan tinggi 15%, buku agama 10%, dan sisanya--15%--buku umum. Pada saat ini produksi buku Indonesia paling rendah di Asia; jauh tertinggal dari produksi Malaysia, yang dengan penduduk hanya sepersepuluh penduduk kita, mampu menerbitkan 11.000 judul satu tahun; atau sekitar 550 judul untuk tiap satu juta penduduk.

Maka ketika televisi datang ke Indonesia, disambut dengan hangat karena selain budaya baca-tulis belum membudaya, tontonan televisi--suatu bentuk budaya lisan--membuat mereka merasa nyaman; berbeda keadaannya dengan di negara-negara maju, di mana media eletronik datang setelah masyarakatnya akrab dengan budaya baca-tulis. Ada tahapan yang hilang dalam proses modernisasi masyarakat Indonesia, yakni proses membiasakan diri dengan budaya baca-tulis yang sebenarnya amat penting untuk pematangan pikiran dan penalaran.

Dalam kaitan dengan pengembangan bahasa lewat media massa, menonjolnya peran media elektronik, khususnya televisi, sebagai alat komunikasi, menjadikan beban pengembangan tersebut bergeser lebih besar pada siaran-siaran televisi.

Dalam Kongres Bahasa Indonesia III, saya menyampaikan tesis bahwa lama kelamaan bahasa atau dialek Jakarta--yang dipakai atau dikenal oleh sekitar 10 juta penduduk--bisa menjadi bahasa resmi kita. Alasannya, televisi menyebarluaskannya--misalnya, lewat sinetron, seperti "Si Doel Anak Sekolahan" yang sangat digandrungi oleh masyarakat banyak. Dialek Jakarta dirasakan oleh pemirsanya sebagai bahasa yang lebih komunikatif. Oleh karena itu, masyarakat Jakarta--kota pusat kegiatan politik, ekonomi, ataupun kebudayaan--cenderung memilih dialek Jakarta sebagai bahasa percakapan sehari-hari. Dialek tersebut bukannya tidak mungkin secara berangsur-angsur mempengaruhi bahasa resmi. Kapan akhirnya dialek Jakarta akan unggul bergantung pada penyebarannya dan pemakaiannya oleh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat elitnya, karena bahasa adalah sarana komunikasi yang dilembagakan oleh masyarakat, sebagai hasil musyawarah masyarakat. Bahasa adalah hasil perkembangan dan perubahan secara berangsur-angsur selama berabad-abad di tangan banyak generasi yang memakainya.

Dalam abad ini kita telah menyaksikan serangkaian revolusi dalam bidang ilmu bahasa, sebagian akibat perkembangan politik--seperti halnya di Indonesia yang memproklamasikan bahasa Indonesia 70 tahun yang lalu--dan sebagian lagi mungkin sebagai akibat peledakan penduduk, urbanisasi, atau kemajuan teknologi. Seperti

terungkap tadi, sebuah dialek yang dalam skala nasional dianggap tidak menonjol, tetapi karena dipakai oleh masyarakat di pusat kegiatan politik/ekonomi/budaya, kemudian menjadi dialek yang penting karena penyebarannya meluas dan didukung oleh teknologi media massa yang maju.

Pemaparan di atas membuktikan kait-mengaitnya bahasa, media massa, dan pengembangan kebudayaan. Kemajuan kebudayaan yang mengarah pada globalisasi, yang dipercepat oleh kemajuan teknologi komunikasi massa, akan selalu mengandalkan bahasa sebagai wahananya.

4. Jalur Penerus Kebudayaan

Di antara sekian banyak peninggalan sejarah masa lampau, rasanya tidak ada yang nilainya setinggi bahasa sebagai alat penerus kebudayaan. Dapat kita bayangkan betapa terhambatnya perkembangan peradaban manusia seandainya tidak ada buku sejarah, tidak ada buku agama, tidak ada catatan penemuan berbagai ilmu-pengetahuan, tidak ada buku-buku sastra dan budaya, tidak ada alat komunikasi modern--yang semuanya mengandalkan bahasa sebagai sarananya.

Mengenai perannya dalam media massa, sebagai penerus kebudayaan, peran bahasa itu tidak akan berperan sehebat sekarang andaikata tanpa dukungan teknologi maju media massa.

Jika kita berbicara tentang teknologi maju media massa, televisi dunia telah menjadi bisnis besar dan akan semakin besar. Contohnya: CNN, HBO, dan STAR TV. Saya hanya menyebut beberapa. Kita melihat film-film ataupun video asing--Amerika, Australia, Hongkong, India, dan beberapa lainnya--diputar di Indonesia.

Dari sisi positifnya, kita melihat bahwa penerusan atau penyebaran budaya lewat film-film tersebut membangun semacam penyesuaian nilai-nilai universal antarbangsa yang akan banyak pengaruhnya terhadap usaha menggalang saling pengertian dan, pada gilirannya, juga menggalang perdamaian dunia. Semakin kita mengenal pandangan, perilaku, dan nilai-nilai seseorang, suatu masyarakat, atau suatu bangsa, semakin besar pula toleransi kita dalam menghadapi mereka. Selain itu, tayangan tentang kehidupan yang asing bagi pemirsa mau tidak mau akan ikut merombak pengetahuan dan jalan pikiran pemirsa sebab pemirsa kemudian akan tahu bahwa di luar lingkup kecil kehidupan yang dikenalnya, ada dunia yang lebih maju, atau sebaliknya, yang lebih sengsara. Hal ini akan memperkaya pengalaman batinnya.

Berapa besar pengaruhnya terhadap budaya kita? Untuk itu, kita bisa menulis kertas kerja sendiri, tetapi yang jelas, pengaruhnya cukup besar terhadap pemakaian bahasa Indonesia. Coba kita amati bagaimana cara penyiar kita membawakan acara-acara di televisi kita. Bukan hanya penampilannya yang berciri global, cara membawakan bahasanya pun cenderung bermuatan asing yang sering melanggar aturan-aturan bahasa kita, termasuk intonasinya, fonologinya, morfologinya, atau mungkin juga sintaksisnya, jika kita cermat menelitinya. Saya tidak tahu apakah sudah diadakan penelitian khusus mengenai hal ini.

Dampak positifnya, bahasa Indonesia diperkaya dengan berbagai konsep baru dari luar yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, atau jika kita menemukan

kesulitan, kata-kata asing yang mengandung konsep baru itu kita ambil alih dan kita sesuaikan dengan bahasa kita.

Jelas, siaran-siaran televisi memperluas cakrawala masyarakat, termasuk cakrawala di bidang budaya, politik, dan ekonomi. Peran itulah yang dilakukannya sebagai sarana penerus kebudayaan, dengan menggunakan bahasa sebagai alat komunikasinya. Peningkatan pendidikan, pengetahuan, dan komunikasi membangkitkan kesadaran yang lebih besar tentang apa yang sedang terjadi di dunia umumnya, dan di negeri sendiri khususnya. Jumlah orang yang semakin peduli menjadi bertambah besar, sesuai dengan kemajuan tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Pada gilirannya, keinginan untuk berpartisipasi mengatur keadaan yang berpengaruh terhadap kehidupan dan nasibnya juga membengkak.

Proses tersebut tidak selalu nyaman. Benturan-benturan sosial bisa terjadi, dari yang berkadar kecil sampai pada yang bisa membahayakan stabilitas nasional. Muncul gagasan-gagasan utopis yang kedengarannya enak, tetapi muskil--sulit dilaksanakan. Masalahnya, dalam rangka modernisasi kehidupan, kita umumnya menghendaki semuanya bergerak serempak, yang tidak mungkin dilaksanakan, baik karena alasan dana maupun tenaga. Maka, semakin ramai orang melontarkan gagasan, semakin kelihatan betapa kompleks permasalahannya. Dalam rangka proses modernisasi, beban tugas pemerintah negara-negara berkembang jelas lebih berat dan lebih rumit daripada negara-negara maju yang struktur politik-ekonominya sudah lebih mapan.

Debat tentang proses modernisasi tidak akan kunjung henti. Di sinilah letak pentingnya sistem komunikasi politik yang bisa menjamin interaksi positif antara berbagai kelompok politik. Maka, dalam percaturan politik, menjadi keharusan bagi pihak-pihak yang bersangkutan menguasai apa yang disebut bahasa politik agar tidak terjadi kesimpangsiuran pengertian. Bahasa politik mengandalkan kecanggihan penggunaan bahasa yang dipakai sebagai alat komunikasinya. Dari tesis ini, kita bisa melihat betapa pentingnya fungsi bahasa sebagai jalur penerus kebudayaan, seperti yang diartikan oleh ahli pikir Soedjatmoko.

5. Dinamika Bahasa Indonesia

Bagaimana peta situasi bahasa Indonesia pada waktu ini? Secara ringkas, dapat dijawab: berkembang sangat pesat dengan proses yang tidak rapi. Mengapa demikian? Dinamika perkembangannya demikian pesat sehingga peraturan-peraturannya tertinggal: artinya, baru dibuat sebagai tanggapan atas perubahan yang sudah terjadi. Hal itu, antara lain, yang menjelaskan mengapa dalam proses perkembangannya terjadi penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan telah terjadi dalam strukturnya--sintaksis, morfologi, fonologi--dan dalam ragam bahasa, kosakata, dan maknanya.

Pengertian tidak rapi tidak harus berkonotasi negatif sebab perkembangan bahasa bukanlah hasil peraturan atau pengaturan, melainkan hasil musyawarah para penuturnya. Sebagai contoh, kalau para penuturnya ingin mengadopsi sebuah kata asing, misalnya kata *oke*, masuklah kata itu dalam kosakata yang dipakai dalam percakapan sehari-hari walaupun mungkin belum diterima oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Sebaliknya, banyak kata baru yang ditetapkan oleh lembaga bahasa

tersebut sampai sekarang tidak populer karena para penutur belum menerimanya.

Proses seperti itu terjadi terus-menerus, selama berabad-abad, dan akan terus berlangsung dalam abad-abad mendatang. Bahasa merupakan sistem yang amat kompleks dan menjalankan berbagai fungsi yang amat rumit pula. Selain menjalankan fungsi umum seperti yang saya paparkan tadi, bahasa juga harus mampu menyampaikan pesan sebagai hasil pengamatan, hasil pemikiran, dan hasil perkembangan perasaan penutur. Bahasa mencerminkan kepribadian, emosi yang sedang berkecamuk, juga latar belakang kehidupan dan penghidupan penutur. Bahasa dipakai sebagai alat komunikasi penutur yang masing-masing mempunyai bawaan sendiri-sendiri.

Yang kita alami, bahasa terus-menerus berubah sesuai dengan tuntutan baru: tuntutan penutur, masyarakat, dan zamannya. Tidak ada bahasa yang berjalan di tempat. Kosakata dan maknanya serta pola-pola pemakaiannya terus bergulir. Bahasa mau tidak mau harus membuka diri terhadap kata-kata baru dan struktur baru. Dengan demikian, bahasa harus terus-menerus membaharui diri karena begitulah keadaan penutur-penuturnya. Namun, hal itu tidak berarti bahwa bahasa boleh berkembang secara liar. Masyarakat yang beradab dan berbudaya menghendaki keteraturan dalam segala hal, termasuk dalam bahasanya. Bahasa diusahakan ditata dengan aturan-aturan sehingga tidak mengurangi kejelasan arti dan tingkat estetikanya yang pada gilirannya bisa mengganggu perannya sebagai alat komunikasi.

Itu sebabnya kita selalu dianjurkan untuk memakai bahasa yang baik dan benar: "baik" dalam pemilihan kata-kata, dan "benar" dalam penataan kata-kata dan ucapannya. Di situlah letak dilemanya: di satu pihak, bahasa berubah dan berkembang dengan dinamikanya sendiri; di lain pihak, selalu ada usaha agar perubahan dan perkembangan itu terkendali. Seperti kata Soedjatmoko, dalam perkembangan kebudayaan selalu ada daya pendorong perubahan dan daya penolak perubahan.

Idealnya, masyarakat penutur sendiri mencegah terjadinya perkembangan yang liar, sedangkan yang bertanggung jawab mengenai pengaturan dan pengajarannya adalah kebijaksanaan nasional mengenai kebahasaan. Kenyataan yang ada sekarang: masyarakat penutur pada waktu ini kurang mencermati bahasa yang dipakainya. Tidak ada sikap bahasa yang kuat. Di lain pihak, kebijaksanaan nasional mengenai hal ini, dan hal-hal lain yang berkaitan, agaknya tidak berjalan sejajar dengan kebijaksanaan pembangunan nasional kita pada umumnya. Keadaan ini berbeda dengan waktu Indonesia baru merdeka, ketika fokus perhatian kita terutama tertuju pada usaha membangun rasa kebangsaan. Maka, bisa dimengerti bahwa pada waktu ini masalah-masalah bahasa dan sastra menjadi kurang diminati.

Kalau kita berbicara tentang masyarakat penutur bahasa Indonesia, kita bukannya berbicara tentang penduduk yang jumlahnya sekitar 200 juta orang. Menurut sinyallemen Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dewasa ini yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu jumlahnya hanya sekitar 30% dari seluruh penduduk Indonesia. Jumlah itu kira-kira sama dengan jumlah penduduk yang diperkirakan tinggal di daerah-daerah perkotaan sekarang ini.

Ini, antara lain, menjelaskan mengapa taraf pendidikan anak-anak di sekolah-sekolah di daerah pedesaan lebih rendah daripada anak-anak di sekolah-sekolah di

daerah perkotaan. Anak-anak di daerah-daerah pedesaan atau daerah-daerah terpencil lebih sulit menyerap isi buku pelajaran, atau bahan bacaan lain, yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Dari segi pendidikan formal, lewat sekolah, memang perlu dicari strategi agar bahasa nasional ini dapat dikuasai oleh seluruh masyarakat Indonesia, sekalipun sebagian besar *toh* tidak akan memakainya sebagai bahasa ibu.

Bagaimana dengan pemanfaatan media massa untuk pembinaan bahasa Indonesia yang baik dan benar? Memang, jika melihat sejarah pertumbuhan media massa di Indonesia, kita sudah cukup lama mengenal media massa. Jika kita melihat pemanfaatannya, karena media massa adalah budaya yang kita ambil dari luar, budaya asing, sementara ini, kita mungkin belum mampu memanfaatkan sepenuhnya sesuai dengan yang kita harapkan. Kita barangkali baru dalam proses memikirkan dan mencari-cari: bagaimana memanfaatkan media massa demi kemajuan kita di segala bidang. Coba kita bandingkan kemajuan kita itu, misalnya, dengan kemajuan Amerika yang telah mampu memanfaatkan media massanya untuk program "PR"-nya ke seluruh dunia.

Untuk pemanfaatan media massa kita, khususnya media elektronik, jelas kita memerlukan berbagai keahlian, yang barangkali memang masih langka. Keahlian yang diperlukan termasuk di antaranya: keahlian untuk memanfaatkannya bagi tumbuh-kembangnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di media elektronik, misalnya, sebenarnya kita, antara lain, dapat menyelenggarakan acara-acara pengembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk anak-anak; juga acara-acara yang dimaksudkan menyimak perkembangan kosakata bahasa Indonesia yang ditinjau dari ragam bahasa: apakah baku, daerah, sosial, atau fungsional. Selain itu, mungkin juga perlu dilakukan pembenahan pemakaian bahasa Indonesia oleh para penutur bahasa lewat media elektronik.

Sejalan dengan itu, hal serupa dapat dilakukan di media cetak dengan penyelenggaraan ruang-ruang pembinaan bahasa dan peningkatan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar di kalangan wartawan atau pengelola media cetak.

6. Penutup

Masalah kebahasaan, seperti halnya masalah politik, masalah ekonomi, atau masalah kebudayaan adalah masalah bersama. Karena bahasa mencerminkan sikap, perilaku, dan kemajuan suatu bangsa, maka kita--orang-orang yang mencermati perkembangan bahasa--seyogianya bisa mengerti bahwa perkembangan bahasa Indonesia belum sesuai dengan yang kita harapkan. Yang penting adalah: bagaimana komitmen kita untuk selalu memberikan perhatian agar perkembangan positif bahasa kita tidak tertinggal dari perkembangan positif unsur-unsur lain dalam kebudayaan kita.

Daftar Pustaka

Anwar, Rosihan. 1978. "Peranan Bahasa Indonesia dalam Pertumbuhan Bahasa Indonesia". Dalam *Kongres Bahasa Indonesia III*, Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

- Chester, Garrison & Willis. 1963. *Television and Radio*. New York, USA: Appleton-Century-Crofts, Educational Division, Meredith Corp.
- Fuller, Jack. 1996. *News Values, Ideas for an Information Age*. Chicago, USA: The University of Chicago Press.
- Gerbner, George. 1977. *Mass Media Policies in Changing Cultures*. New York, USA: John Wiley & Sons.
- Hoermann, Hans. 1979. *Psycholinguistics*. New York, USA: Verlag Springer.
- Hohenberg, John. 1978. *The Professional Journalist*. New York, USA: Holt, Rinehart, and Winston.
- Labov, William. 1981. *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia, USA: University of Pennsylvania Press.
- Myers, David G. 1983. *Social Psychology*. Auckland, Selandia Baru: McGraw-Hill International Book Co.
- Putra, Nusa. 1993. *Pemikiran Soedjatmoko tentang Kebebasan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tylor, Rosegrant, Meyer, Samples. 1980. *Communicating*. Englewood Cliffs, N.J. USA: Prentice-Hall, Inc.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D8
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 17.00--17.50
Judul Makalah	: Pembinaan Bahasa Indonesia melalui Media Massa
Penyaji	: Toeti Adhitama
Pemandu	: Husein Abbas
Pencatat	: a. I Nengah Sukayana b. Sri Winarti
Peserta	: 25 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Juniar, IKIP Jakarta

a. Pertanyaan:

Para penyiar sering mengemukakan kalimat mengambang, bahasanya tidak sesuai dengan aturan. Di samping itu, televisi sering memakai kata-kata seperti *lu* atau *gua*. Langkah apa yang harus dilakukan agar hal itu tidak terjadi?

b. Jawaban:

Hal itu menunjukkan bahwa sikap bahasa kita sangat lemah. Seorang penyiar hendaknya mempersiapkan diri, baik penampilan maupun bahasanya. Penggunaan kata *lu* dan *gua* semestinya dihindarkan dalam bahasa resmi.

2. Penanya: Suherli, STKIP Galuh, Ciamis

a. Saran:

Judul makalah sebaiknya "Pemerayaan Bahasa Indonesia melalui Media Massa".

3. Penanya: Mayong, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

- 1) Bahasa Indonesia mengalami revolusi karena adanya televisi. Mengapa hal itu terjadi?
- 2) Pada setiap media massa disarankan agar ada editor bahasa.

b. Jawaban:

Di mana-mana terjadi hal seperti itu. Kita tidak perlu menyalahkan siapa-siapa karena bahasa Indonesia sedang mengalami proses perkembangan. Saran Anda perlu dipertimbangkan.

4. Penanya: Ipon Sukarsih Purawijaya, Perpustakaan Nasional

a. Pertanyaan:

Mengapa kata *proaktif* digunakan, padahal sudah ada kata *aktif* yang menyatakan aktivitas.

b. Jawaban:

Kata *proaktif* itu memang ada, yang bermakna 'melakukan terlebih dulu sebelum disuruh'.

5. Penanya: Suhendar, IKIP Padang**a. Pertanyaan:**

Mengapa Ibu berubah haluan, padahal Ibu dulu sangat fanatik terhadap pengaruh asing?

b. Jawaban:

Sebenarnya saya tidak berubah-ubah, tetapi saya menyadari bahwa bahasa itu merupakan hasil atau produk masyarakat yang tidak dapat dipaksakan.

**MENKAKJI ULANG PEMBELAJARAN SASTRA
DI SMU BERDASAR KURIKULUM 1994
STUDI KASUS BUKU
TERAMPIL BERBAHASA INDONESIA JILID 1**

B. Rahmanto

Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

1. Pendahuluan

Sejak Kurikulum 1994 diberlakukan dan disosialisasikan, salah satu kritikan yang segera muncul ialah bahwa kurikulum ini hanya cocok untuk anak yang pandai. Kurikulum itu bentuknya lebih sederhana jika dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya, tetapi materi yang dikandungnya sarat dengan bahan pengetahuan yang harus diajarkan. Drost (1998) memprediksi bahwa Kurikulum 1994 untuk SMU hanya cocok untuk anak-anak pintar yang jumlahnya hanya sekitar 30 persen. Yang lemah studinya pada tahun kedua masih harus berjuang keras untuk tidak tinggal kelas. Tahun ketiga barulah diadakan penjurusan, yaitu eksakta dan sosial-budaya. Mestinya, untuk 70 persen sisanya disediakan pengajaran yang tidak mengutamakan persiapan masuk perguruan tinggi melainkan menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja. Sayangnya itu tidak pernah terjadi.

Sementara itu, *gerundelan* dari siswa, guru, orang tua, dan pakar kurikulum semakin *santer* dilontarkan. Pro dan kontra pun tidak dapat dihindari sehingga isi kurikulumnya diganti, dipertahankan, atau direformasi di sana sini. Yang menarik adalah adanya keinginan untuk mengubah kurikulum secara total yang menyangkut susunan, sistematika, jumlah mata pelajaran, dan substansi materi pelajaran yang diberikan justru datang dari Kepala Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (*Kompas*, 23 Juli 1998). Apalagi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah sepakat pula untuk meninjau kembali kurikulum itu meskipun dengan catatan agar tidak terburu-buru (*Kompas*, 25 Juli 1998).

Ketakterburu-buruan ini diingatkan oleh Ketua Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) dan Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI) dalam *Kompas*, 30 Juli 1998, yang mengemukakan bahwa langkah pembaruan, khususnya dalam pengajaran bahasa Indonesia, tidak cukup hanya dengan mengubah atau merombak kurikulum tanpa diikuti penanganan yang sungguh-sungguh terhadap guru, perubahan dan/atau pengembangan terhadap materi berikut strategi pengajarannya. Kedua pakar itu mengeluh dan mengatakan bahwa guru lebih banyak mengajar tentang bahasa, dan sulit untuk diajak meninggalkan pola dan pendekatan lama serta memahami kurikulum secara sangat tekstual. Alhasil, pengajaran bahasa menjadi cenderung padat dengan kegiatan yang lebih menuntut siswa menghafal sehingga membosankan, alias tidak menarik.

Dalam pada itu, pemberlakuan Kurikulum 1994 belum ada lima tahun (bandingkan dengan adanya perubahan tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, dan 1994).

Namun, sebagaimana halnya “nasib” Rencana Pelajaran Terurai 1964, Kurikulum 1994 rezim pendukungnya tumbang dengan buntut krisis moneter yang berkepanjangan. Pertanyaannya, dari kurikulum yang satu ke kurikulum yang lain, yang biasanya selalu diwarnai bias politik, masihkah Kurikulum 1994 ini dibiarkan terus bertahan tanpa reformasi?

Makalah ini mencoba mengkaji kembali Kurikulum SMU 1994 khusus pengajaran sastranya. Dengan bertolak dari kajian ini, akan dilihat sejauh mana bahan pembelajaran sastra dijabarkan dalam buku paket yang berjudul *Terampil Berbahasa Indonesia* (sebagai sampel hanya akan diambil Jilid 1) yang memang penyusunannya dikerjakan berdasarkan Kurikulum SMU 1994 (Syafi'ie dan Imam Subana, 1993:vii). Dari kajian sederhana ini ingin dikemukakan alternatif reformasi pembelajaran sastra di SMU dengan Kurikulum SMU 1994.

2. Pembelajaran Sastra di SMU Berdasar Kurikulum 1994

Secara garis besar, Garis-Garis Besar Program Pelajaran (GBPP) Kurikulum SMU 1994 (1995:1--6) terdiri atas Pendahuluan, Program Pengajaran, dan Lampiran. Berikut akan dipaparkan berturut-turut minus Program Bahasa (bagian ini tidak dibicarakan hanya karena keterbatasan waktu dan tempat), dan Lampiran (bagian ini ada dua, lampiran pertama berisi ihwal kebahasaan di SMU, sedangkan lampiran kedua berisi tema-tema yang dipergunakan untuk melakukan kegiatan berbahasa karena bagian ini sedikit banyak tidak secara eksplisit membicarakan bahan pembelajaran sastra, maka tidak akan dibicarakan dalam makalah ini).

a. Bagian Pendahuluan

Bagian pendahuluan dirinci menjadi pengertian, fungsi, tujuan pengajaran, ruang lingkup, dan rambu-rambu. Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia diartikan oleh kurikulum sebagai program untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap Bahasa Indonesia. Sementara itu, fungsi mata pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah sebagai sarana untuk: (1) pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (2) peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya, (3) peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) penyebaran pemakaian bahasa Indonesia yang baik untuk berbagai keperluan menyangkut berbagai masalah, dan (5) pengembangan penalaran (1995:1).

Jika dilihat dari pengertian dan fungsinya saja, jelaslah bahwa pengajaran sastra hanyalah berfungsi *sebagai alat* untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan berbahasa, dan sikap positif terhadap bahasa Indonesia (bukan terhadap *sastra Indonesia*). Dengan kata lain, pengajaran sastra merupakan bagian dari pengajaran bahasa, atau pengajaran sastra “diabdikan” untuk keperluan pengajaran bahasa. Satu-satunya yang agak dekat dengan sastra hanyalah fungsi ketiga, yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan *seni* (meskipun seni sastra hanyalah bagian kecil dari seni-seni yang lain).

Tujuan pengajaran sastra dirumuskan dalam tujuan umum dan khusus. Dalam tujuan umum tertera pada tujuan nomor empat yang berbunyi, "Siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa" (1995:1). Tujuan itu sangat mulia dan berdaya jangkau luas, yaitu menikmati, menghayati, memahami, memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian, memperluas wawasan kehidupan, dan meningkatkan pengetahuan serta kemampuan berbahasa. Tujuan seperti itu hanya dimungkinkan jika bahan untuk membaca dan menikmati karya sastra begitu beragam dan alokasi waktu sangat cukup. Jika tidak demikian, tujuan memanfaatkan karya sastra untuk mengembangkan kepribadian dan memperluas wawasan kehidupan hanya akan tinggal menjadi semboyan yang muluk belaka.

Tujuan khusus kurikulum ditebar dalam kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan. Kebahasaan mengandung *sebelas* tujuan khusus, salah satu di antaranya (nomor 11) berkaitan dengan pengetahuan sastra, yaitu, "Siswa menguasai ciri-ciri pembentuk puisi, prosa, drama, kritik, dan esai" (1995:2). Pemahaman terbagi dalam *tujuh* tujuan khusus, *satu* di antaranya (nomor 6) berkaitan dengan apresiasi sastra, yaitu, "Siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra" (1995:2). Sementara itu, penggunaan terdiri atas *enam* tujuan khusus, *dua* di antaranya (nomor 3 dan 5) ada kaitannya dengan ekspresi sastra, yaitu (3) "Siswa mampu mengungkapkan perasaan dalam berbagai bentuk, cara, gaya, sesuai dengan konteks dan situasi" (1995: 2), dan (5) "Siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan secara kreatif sesuai dengan konteks dan situasi" (1995:2). Dengan demikian, dari dua puluh empat tujuan khusus pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia, hanya ada empat tujuan khusus yang ada kaitannya dengan pengajaran sastra, alias *seperenamnya* saja.

Dalam pada itu, untuk membandingkan betapa luasnya tujuan khusus yang terdapat dalam pengajaran bahasa yang tertebat dalam 24 tujuan khusus itu (yang mengakibatkan para siswa merasa jenuh karena dijejali bahan yang melimpah, khususnya yang dijabarkan dalam pembelajarannya sejak kelas satu sampai tiga) dapat dikutipkan secara ringkas sebagai berikut. *Kebahasaan*, siswa menguasai aturan ejaan, tanda baca, intonasi kalimat, macam-macam bentuk, makna, fungsi imbuhan, penggunaan kata penghubung dan kata tugas; ciri-ciri frasa, ciri-ciri penggabungan-penambahan kalimat; ciri-ciri paragraf dan pengembangannya; ciri-ciri esai; perkembangan dan perubahan makna; macam-macam majas, ungkapan, dan peribahasa. *Pemahaman*, siswa mampu membaca teks; menyerap informasi lisan, tertulis, dan menanggapi serta memanfaatkannya; menjalin hubungan dengan lisan ataupun tertulis; menyerap ungkapan perasaan dan memberikan tanggapan; memperoleh kepuasan, kesenangan, dan merasakan manfaat mendengarkan dan membaca untuk meningkatkan ilmu pengetahuan. *Penggunaan*, siswa mampu mengungkapkan informasi secara jelas, logis, sistematis sesuai dengan konteks dan situasi dalam berbagai bentuk dan ragam bahasa;

mengungkapkan gagasan, pendapat, pengalaman, dan pesan; berinteraksi dalam berbagai situasi; dan gemar menulis dan berbicara untuk keperluan sehari-hari dan meningkatkan ilmu pengetahuan (1995:1--2).

Kembali pada tujuan khusus pengajaran sastra, tampak jelas tujuan pengajaran yang mau dicapai, ialah agar siswa memperoleh pengetahuan sastra, pengalaman berapresiasi sastra, dan pengalaman berekspresi sastra. Pengetahuan sastra diwadahi dalam tujuan khusus nomor 11 (siswa menguasai ciri-ciri pembentuk puisi, prosa, drama, kritik, dan esai); pengalaman berapresiasi sastra diwadahi dalam tujuan khusus nomor 6 (siswa mampu menikmati, menghayati, memahami, dan menarik manfaat membaca karya-karya sastra); dan memperoleh pengalaman berekspresi sastra lewat tujuan khusus nomor 5 (siswa peka terhadap lingkungan dan mampu mengungkapkan secara kreatif sesuai dengan konteks dan situasi). Suatu tujuan pengajaran sastra yang ringkas dan menyeluruh di sela-sela sempit renik dan rincinya tujuan pengajaran bahasa yang dominan. Persoalannya, bagaimana porsi *literary experience* dibandingkan dengan *literary knowledge*-nya.

Dalam pada itu, agar pengajaran sastra pembelajarannya terasa tidak sedikit, atau *diomprengkan* pada pembelajaran bahasa (Oemarjati, 1983:202) seperti dalam Kurikulum 1975 dan 1984, dalam rambu-rambu diberilah hal-hal yang perlu diperhatikan, misalnya seperti rambu-rambu nomor 3 dan 11 (1995:3-4) yang berbunyi, antara lain: dalam pelaksanaan pembelajaran, komponen kebahasaan, pemahaman, dan penggunaan disajikan secara terpadu, dan perbandingan bobot pembelajaran bahasa dan sastra sebaiknya (*bukan seharusnya*) seimbang dan dapat disajikan secara terpadu, misalnya bacaan sastra dapat sekaligus dipakai sebagai bahan pembelajaran bahasa. Benarkah dalam praktik pelaksanaan kurikulum di lapangan yang dijabarkan dalam buku-buku paket disajikan secara seimbang dan terpadu (apa bukan hanya terbatas pada kata-kata saja mengingat hanya seperenam seperti tersebut di muka), akan dipaparkan dalam bagian tiga dari makalah ini.

Hal penting lain dalam pengajaran sastra diuraikan secara ringkas dalam rambu-rambu nomor 1, 10, 11, 13, 14, 17, 19, dan 24. Rambu-rambu nomor 1, antara lain, menegaskan bahwa khusus untuk SMU ditambah dengan dasar-dasar kesusastraan. Rambu-rambu terpenting agaknya termuat dalam nomor 10 (1995:4) yang, antara lain, menegaskan kembali bahwa pembelajaran sastra dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan siswa mengapresiasi karya sastra. Kegiatannya berkaitan erat dengan latihan mempertajam perasaan, penalaran, daya khayal, dan peka terhadap masyarakat, budaya, dan lingkungan hidup. Kemudian kegiatan itu ditekankan untuk memahami dan menghayati karya sastra, siswa *diharapkan* (*bukan diharuskan*) langsung membaca karya sastra, bukan membaca ringkasannya.

Rambu-rambu nomor 13 (1995:4) lengkapnya berbunyi, "Pemilihan bahan untuk pembelajaran sastra sedapat mungkin dikaitkan dengan tema pembelajaran". Frasa *menggantung sedapat mungkin*, diperjelas dalam Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar (1994:66) sebagai berikut: "Penjabaran kurikulum dilaksanakan secara luwes, sehingga tema-tema yang ada dapat saja ditambah atau dikurangi asal tidak menyimpang dari tujuan yang terdapat dalam isi GBPP." Hal ini sebenarnya amat sulit

untuk dilakukan jika dikaitkan dengan pembelajaran sastra seperti puisi, misalnya. Betapa susahnya mencari atau menyuruh anak membuat puisi dengan tema Iptek, Hankamnas, energi, kesadaran hukum, kependudukan misalnya, mengingat karya sastra khususnya puisi kebanyakan bersifat sangat personal.

Rambu-rambu nomor 14 (1995:4) sebenarnya menyangkut pembelajaran kosakata, tetapi juga mengimbas ke pembelajaran sastra. Bunyinya, antara lain, bahwa dalam pembelajaran kosakata disajikan di dalam konteks wacana, dipadukan dengan kegiatan pembelajaran seperti percakapan, membaca, menulis, dan pembelajaran sastra. Dengan demikian, apabila teks karya sastra tertentu baik berbentuk cerpen, penggalan novel, maupun puisi dijadikan materi bacaan, pembelajarannya *tidak usah* atau boleh tidak diarahkan pada menikmati, memahami, atau menghayati karya sastra itu, tetapi dimanfaatkan untuk pelatihan bahasa dengan menggunakan karya sastra. Secara logika hal itu memang benar, tetapi praktiknya sangat menyakitkan pembelajaran sastra (hal ini akan dibahas dalam bagian ketiga).

Rambu-rambu nomor 17 (1995:5) menyangkut bahan pelajaran pemahaman yang dapat diambil dari karya sastra Indonesia asli dan terjemahan, tidak begitu menimbulkan persoalan. Akan tetapi, rambu-rambu nomor 19 (1995:5) yang lengkapnya berbunyi, "Bahan pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia *dapat pula* (lagi-lagi ketidakjelasan) dipadukan atau dikaitkan dengan mata pelajaran lain", menimbulkan pertanyaan sehubungan dengan nama mata pelajaran lain itu. Memang dalam teori sastra di perguruan tinggi, ada hubungan sastra dan sejarah, sastra dan psikologi, sastra dan sosiologi, sastra dan filsafat, sastra dan antropologi; tetapi di sekolah menengah umum, bagaimana menghubungkan pelajaran sastra dan matematika, geografi, biologi, atau ekonomi misalnya?

Akhirnya, rambu-rambu nomor 24 (1995:6) menyangkut sumber belajar siswa. Ada tujuh macam sumber belajar, yaitu (1) buku yang terdiri atas buku pelajaran yang diwajibkan, buku pelajaran yang pernah dipakai yang masih sesuai, buku pelengkap, buku bacaan, bunga rampai, kamus, ensiklopedi, (2) media cetak: surat kabar, majalah, (3) media elektronik: radio, kaset, televisi, video, (4) lingkungan: alam, sosial, budaya, (5) nara sumber, (6) pengalaman dan minat anak, serta (7) hasil karya siswa. Sumber belajar yang sangat ideal, sangat pluralistik, dan demokratis ini agaknya mendahului zamannya. Di masa lalu, tidak ada buku pelajaran yang pernah dipakai yang masih sesuai sebab bukankah ganti kurikulum artinya ganti pula buku pelajaran baru? Demikian juga sumber belajar nomor (6) dan (7). Barangkali cukup sulit dijumpai sekolah-sekolah yang pengajarnya memakai nomor-nomor tersebut sebagai bahan pembelajaran. Khusus untuk pembelajaran sastra, apabila sumber belajarnya disesuaikan dengan minat anak jelas sangat demokratis dan cocok untuk zaman reformasi ini.

b. Program Pengajarannya

Bagian Program Pengajaran dibagi-bagi ke dalam kelas I, II, dan III. Pada setiap kelas program pengajaran selalu didahului dengan tujuan dan diikuti oleh pembelajaran caturwulan 1, 2, dan 3. Kelas I pada caturwulan 1 ada 60 jam pelajaran, pada caturwulan 2 ada 60 jam pelajaran, dan pada caturwulan 3 ada 50 jam pelajaran. Di kelas

II pada caturwulan 1 dan 2 masing-masing ada 60 jam pelajaran dan pada caturwulan 3 ada 50 jam pelajaran. Di kelas III pada caturwulan 1 dan 2 masing-masing ada 36 jam pelajaran, dan pada caturwulan 3 ada 24 jam pelajaran. Jika dijumlah, alokasi waktunya ada 436 jam pelajaran dan butir pembelajarannya ada 168 buah (sedangkan yang berkaitan dengan butir pembelajaran sastra ada 32 buah, alias hanya ada 19%). Dengan begitu, masihkah kita berharap banyak terhadap kemungkinan untuk dapat membaca karya sastra secara langsung? Oleh karena itu, kita sama-sama maklum mengapa tamatan AMS, SMU gaya lama zaman sebelum perang, menamatkan buku sastra 5–10 judul, sedangkan SMU kita kini nol judul (Ismail, 1997:5). Sementara itu, alokasi untuk pembelajaran sastra jika pemaduan tidak terwujud maka seperenamnya menjadi kurang lebih 73 jam pelajaran. Apa saja yang dilakukan selama tujuh puluh tiga jam pelajaran itu? Berikut kita lacak terlebih dahulu lewat tujuan program pengajaran sejak kelas I sampai dengan kelas III.

Pada kelas I, tujuan pengajarannya ialah siswa mampu memahami, menghayati karya sastra, dan menggali nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan serta mampu menulis prosa, puisi, dan drama (1995:7). Hal ini berarti bahwa dalam pembelajaran sastra, *literary knowledge* diberikan terlebih dahulu, baru kemudian disusul pemberian *literary experience*-nya. Pengetahuan sastranya mulai diberikan pada caturwulan pertama, kedua, dan ketiga.

Pengetahuan sastra diwadahi dalam pembelajaran mendiskusikan *amanat* yang terdapat dalam cerpen, novel, dan drama; membahas *konflik* (pembahasan ini taksa karena pembahasan konflik berarti membahas persoalan alur, di pihak lain juga dimungkinkan pembahasan konflik antargenerasi yang mewakili adat lama versus baru seperti misalnya dalam novel *Sitti Nurbaya* dan *Salah Asuhan*) yang terdapat dalam cerpen, novel, atau drama; membaca dan mendiskusikan *alur* dan *tokoh* cerpen, novel, atau drama; membahas *nilai-nilai* dalam karya sastra; membahas *tema* dan *latar* yang terdapat dalam cerpen, novel, atau drama; membahas nilai-nilai yang terkandung dalam karya sastra Melayu klasik (tidak dijelaskan apakah yang berbentuk lirik atau epik) atau cerita daerah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia); mendiskusikan *cara pengungkapan* dan *tema* puisi, dan hal-hal yang menarik (ini juga taksa) dalam puisi; serta menafsirkan *makna* puisi.

Pada akhir caturwulan kedua kelas satu, pengalaman sastra siswa dimulai dengan menulis puisi, cerpen, atau drama (akan lebih tepat jika mengubah bentuk cerpen menjadi drama daripada siswa diminta menulis drama); dan pada caturwulan ketiga siswa melisankan dengan intonasi yang tepat naskah drama dan mendiskusikannya. Dengan demikian, kelas satu secara keseluruhan dipadati dengan bahan pengetahuan sastra (analisis unsur intrinsik prosa cerita dan puisi yang lebih mengarah pada pendekatan struktural). Anehnya, pengalaman sastranya bukan dimulai dari yang lebih mudah, misalnya, membaca puisi atau mendeklamasikan puisi, tetapi melisankan naskah drama dengan intonasi yang tepat (alias kerja awal dalam rangka pementasan naskah drama yang lebih sukar daripada melisankan puisi).

Pada kelas II, tujuan pengajarannya ada dua macam, pertama siswa mampu menggali nilai-nilai moral, sosial, dan budaya dalam sastra Indonesia dan terjemahan;

kedua siswa mampu menulis kreatif dan mampu membuat tanggapan terhadap tulisan kreatif (1995: 10). Agaknya, yang akan disasar dalam pembelajaran sastra kelas dua ini adalah kemampuan siswa menganalisis faktor-faktor di luar karya sastra (ekstrinsik) dan penulisan kreatif, serta membuat resensi terhadap karya-karya kreatif.

Pengetahuan menganalisis faktor-faktor ekstrinsik (moral, sosial, budaya) cukup mendominasi pembelajaran sastra kelas dua. Caturwulan kedua dan ketiga diawali dengan tugas mengumpulkan cerpen dari berbagai sumber berdasarkan tema tertentu, kemudian membahas kaitan tema dan amanat dalam puisi atau novel dengan masalah sosial dan budaya; mendiskusikan pesan dan informasi budaya dari cerpen atau novel terjemahan; membaca karya sastra dan mendiskusikan nilai-nilai budayanya, serta membaca karya sastra Melayu klasik atau terjemahan sastra asing dan membahas nilai-nilai moral yang terkandung di dalamnya; serta membahas drama.

Yang menarik adalah pembelajaran menulis karangan yang berisi tanggapan terhadap karya sastra, menulis bahasan atas karya sastra, dan menulis resensi novel. Sebenarnya pembelajaran ini sudah mengarah pada kritik sastra meskipun masih bersifat impresionistik. Dengan demikian, pembelajaran ini lebih mendukung aspek agar siswa memperoleh *literary knowledge* terlebih dahulu sebelum mereka melakukan tanggapan terhadap karya sastra. Sementara itu, pembelajaran melisankan drama dan memerankan fragmen drama, mengakhiri pembelajaran sastra caturwulan ketiga.

Pada kelas III, tujuan pengajaran sastranya adalah siswa mampu menghayati karya sastra dan memahami kritik dan esai sastra (1995:14). Pengajaran esai dan kritik sastra itu diwadahi dalam pembelajaran membicarakan tema karya sastra dan mengaitkannya dengan kehidupan saat ini; menyusun resensi novel; membuat sinopsis cerpen, novel, atau drama; membandingkan nilai-nilai budaya cerpen, novel, atau drama terjemahan dengan nilai budaya Indonesia; mendeskripsikan perbedaan watak para pelaku cerita; dan membahas karya sastra Indonesia yang telah mendapatkan penghargaan.

Demikianlah deskripsi pembelajaran sastra seperti yang terdapat dalam program pengajarannya. Secara garis besar pembelajaran sastra diklasifikasikan menjadi tiga bagian: (1) bacaan berwujud teks karya sastra prosa, puisi, dan drama, (2) pengetahuan sastra yang berupa unsur pembangun intrinsik dan ekstrinsik karya sastra, serta (3) apresiasi yang ditekankan pada pengamatan, penganalisisan, pencarian nilai-nilai, perbandingan, penyimpulan, dan pelaporan hasil lewat tanggapan (kritik), atau resensi, serta kreatif dalam bentuk tulisan dan pementasan. Hal ini merupakan suatu deskripsi pembelajaran sastra yang cukup menyeluruh dan baik. Masalahnya kembali ke persoalan awal, cukupkah alokasi waktu yang tersedia sebanyak seperenam atau 19% untuk mewadahnya? Untuk itu, selanjutnya kita lihat bagaimana program pengajaran ini dijabarkan oleh buku paket.

3. Pembelajaran Sastra di SMU dalam Buku *Terampil Berbahasa Indonesia*

Jilid 1

Perlu dipaparkan terlebih dahulu bahwa uraian berikut sama sekali tidak bermaksud untuk menakar buku *Terampil Berbahasa Indonesia*, tetapi hanya akan menunjukkan

bagaimana buku paket ini (dibatasi jilid 1 agar tidak terlalu panjang) menerjemahkan Kurikulum 1994, khususnya dalam pembelajaran sastra untuk siswa kelas satu. Di samping itu, jika ada pertanyaan mengapa buku itu yang dipilih, jawabannya adalah karena buku tersebut diterbitkan oleh Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, disusun berdasarkan Kurikulum Sekolah Menengah Umum 1994, dan ditulis oleh pakar ilmu dan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang terkenal.

Seperti telah dipaparkan dalam bagian kedua dari makalah ini, pada bahan pembelajaran sastra untuk kelas satu caturwulan 1, 2, dan 3 menurut Kurikulum 1994 pembelajaran sastranya berturut-turut diawali dengan mendiskusikan pesan atau amanat, konflik, alur, dan tokoh dalam cerita pendek, novel, atau drama; membahas nilai-nilai yang terdapat dalam karya sastra (termasuk sastra Melayu klasik atau cerita daerah yang sudah diterjemahkan); menafsirkan makna puisi; menulis puisi, cerita pendek, atau drama untuk dipublikasikan; dan melisankan naskah drama dengan intonasi yang tepat.

Sementara itu, dalam rambu-rambu GBPP Kurikulum 1994 pada butir 21 (1995:5) dikemukakan, antara lain, bahwa butir-butir pembelajaran merupakan bahan yang disarankan. Pembelajaran yang tercantum dimungkinkan untuk ditambah, digabungkan, atau dikembangkan. Butir-butir pembelajaran dapat diulang untuk meningkatkan keterampilan berbahasa. Batas caturwulan bukan merupakan garis pemisah yang ketat. Butir-butir pembelajaran dalam satu kelas dapat dipindahkan antaraturwulan.

Dengan mengacu pada rambu-rambu itu, bahan pembelajaran sastra yang dipaparkan dalam buku *Terampil Berbahasa Indonesia 1* berturut-turut adalah seperti berikut ini. Buku ini terdiri atas empat belas pelajaran. Setiap pelajaran disatukan ke dalam tema tertentu. Pada pelajaran 1 dikutipkan cuplikan novel *Salah Asuhan* sepanjang empat halaman dengan pertanyaan pada tokoh, penokohan, dan amanatnya. Dari enam pertanyaan yang diberikan, satu di antaranya tidak menyangkut pemahaman atas cuplikan novel itu. Pertanyaan itu terdapat pada Latihan 4 nomor 5 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut.

“Sekiranya Hanafi bukan anak kandungku, tentu kunasihati engkau, lebih baik kauminta talak tiga saja....”

Apakah maksud talak tiga dalam kalimat itu? (1993:10)

Pertanyaan ini benar-benar memadukan pembelajaran sastra dengan bahasa, tetapi dari sudut pembelajaran sastra yang hanya seperenamnya, jelas pertanyaan semacam ini sangat tidak menguntungkan pembelajaran sastranya. Dalam buku jilid 2 dan 3 pertanyaan sejenis ini cukup banyak (sayang karena tempat dan waktu tidak dapat dipaparkan di sini).

Sementara itu, pertanyaan terakhir (pertanyaan nomor 6) berbunyi: bacalah novel *Salah Asuhan* di perpustakaan. Kutiplah jalan hidup Hanafi serta sikap dan perwatakannya, terutama yang berhubungan dengan orang tua, istri, anak, dan teman-temannya (1993: 10). Pertanyaan ini tipikal pertanyaan guru sekolah yang terlalu

banyak pekerjaan mengajar di beberapa sekolah, (mohon maaf) tidak ditunjukkan pada halaman berapa dari novel tersebut, alasannya bukankah para siswa dapat mencari sendiri? Tidak juga diperhitungkan berapa tebal novel *Salah Asuhan* itu? Berapa jumlah novel tersebut di perpustakaan sekolah? Tersediakah waktu yang cukup untuk membacanya? Dan sebagainya. Dan seterusnya.

Latihan berikutnya benar-benar memanfaatkan karya sastra untuk maksud lain. Latihan itu persis di bawah Latihan 4, yaitu Latihan 5. Untuk jelasnya dikutipkan secara lengkap seperti berikut ini.

Jelaskan maksud kalimat-kalimat yang digunakan dalam novel *Salah Asuhan* berikut!

1. Rumah itu kelihatan sebagai rumah tinggal, seolah-olah seisi rumah pergi tamasya.
2. Kereta kecil berisi Syafei ditolak si Buyung setiap pagi dan petang.
3. Ahli rumah yang lain hanya berguna buat menyediakan hidangan belaka.
4. Tidak puas hati Ibu, jika makananmu kurang sepertinya.
5. Selama ayah Syafei masih di perjalanan, tak akan rumpangnya aku berpuasa sunat hari Senin dan Kamis.
6. Wajib benar bagimu memelihara kewarasan tubuhmu.
7. Rupamu tinggal kulit pemalut tulang, Rapiah.
8. Bukan perceraian ini yang aku rusuhkan, Ibu.
9. Rupanya atas diri ayah Syafei sudah timbul bencana, Bu.
10. Selama ini sanggulmu selesai saja dari pagi sampai malam.
11. Di masa yang akhir ini rupanya kauharamkan benar cermin dan sisir.
12. Perkara sanggul terlepas itu janganlah engkau cemaskan.

(1993:11)

Dengan soal seperti tersebut di atas, menjadi jelas bahwa teks karya sastra memang menjadi bahan berlimpah untuk pembelajaran bahasa. Akan tetapi, dengan soal semacam itu, di samping tidak menguntungkan dari segi pembelajaran sastra, secara tidak langsung akan membuat para siswa semakin tidak acuh dan tidak akrab lagi dengan karya sastra karena dipilhkan teks yang asing dan sulit bagi remaja masa kini, dan yang lebih menyedihkan mengutip teks secara acak tanpa konteks lengkap dalam paragraf benar-benar dapat berakibat runyam. Membaca sastra bukan membaca kalimat per kalimat, tetapi membaca secara keseluruhan baik dalam taraf *satellite*, *carnal*, maupun *sequence*. Dalam teks sastra, setiap bagian membentuk satuan makna yang berbentuk rangkaian makna (Chatman, 1980:53--54). Dengan latihan itu, benar-benar sastra dan bahasa dipadukan, tetapi jelas bahasa yang beruntung (bukan sebaliknya seperti yang dikehendaki rambu-rambu).

Pada Pelajaran 3 dikutipkan sajak "Rendezvous" karya Taufiq Ismail. Puisi yang berlatar belakang pergolakan mahasiswa pada tahun 1966 ini dipergunakan sebagai bahan membaca puisi secara nyaring dan bagaimana mengapresiasikannya. Walaupun pertanyaan-pertanyaannya di seputar apa tema, amanat, nada, dan perasaan penyairnya berkesan cukup analitis, itu masih dapat diterima sebagai suatu cara mengapresiasi

puisi. Akan tetapi, latihan 6 mengulang kembali pemanfaatan karya sastra, kali ini memanfaatkan puisi. Berikut dapat dibaca bentuk soalnya.

Untuk lebih memantapkan pemahaman puisi berjudul *Rendezvous*, terangkanlah kata-kata dari puisi tersebut yang dalam kalimat-kalimat berikut dicetak miring!

1. Dalam perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, kami *singgah* di Tegal.
 - a. Sudah beberapa hari ia tidak *menegur* saya.
 - b. Jika anaknya bersalah, Sueb tidak segan-segan *menegurnya*.
2. a. Ketika aku datang orang itu sedang berdiri di *ambang pintu*.
b. Lanjutkanlah perjuangan ini! Kita sudah ada di *ambang pintu kemenangan*.
3. a. Dalam menghadapi masalah kecurangan itu kamu harus segera *mengambil langkah* yang tegas.
b. Agar pengusutan perkara itu berhasil dengan baik, kita harus menelusuri masalah itu *langkah demi langkah*.(1993:30)

Dengan soal macam itu, faktor diksi, konotasi-denotasi yang begitu berperan dalam sebuah puisi dikacau-balaukan. Pilihan kata dalam larik-larik puisi jelas berbeda dengan pilihan kata dalam kalimat biasa. Sejarah telah *singgah/ke* kemah kami/, jelas sangat berbeda dengan kami *singgah* di Tegal. Pilihan kata *singgah* dalam *sejarah telah singgah ke kemah kami* sukar untuk digantikan dengan kata lain yang searti dengan kata *singgah*. Sementara dalam frasa *kami singgah di Tegal*, dengan enak saja diganti dengan kami *mampir di Tegal* misalnya.

Selanjutnya, masih dalam pelajaran itu pembelajaran puisi dikutipkan puisi berjudul "Pembaringan" karya Cahaya Sadar dengan tugas membubuhkan tanda-tanda sebagai rambu-rambu pembacaan dan iramanya berkaitan dengan pembacaan puisi secara nyaring, mencari tema, menafsirkan puisi, menemukan pesan/amanatnya, dan menuliskan puisi tersebut dengan kata-katanya sendiri. Suatu pertanyaan yang benar-benar holistik, meskipun perlu diperhatikan waktu pelaksanaannya apakah mencukupi.

Pada Pelajaran 5 dikutipkan petikan novel *Layar Terkembang* karya Sutan Takdir Alisjahbana yang dipergunakan sebagai bahan bacaan dengan pertanyaan yang sebagian besar (empat dari tujuh buah pertanyaan) tidak ada sangkut pautnya dengan sastra. Pertanyaan itu terdapat pada nomor 4, 5, 6, dan 7 seperti ini.

4. Kemukakanlah pendapatmu tentang sikap dan kedudukan wanita yang ideal:
 - di rumah
 - di masyarakat
 - di tempat bekerja (kantor)
5. Pada tahun 30-an terjadi emansipasi wanita di Indonesia. Emansipasi ini pasti terjadi oleh adanya diskriminasi, yaitu pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara. Jelaskan beberapa jenis diskriminasi berikut, kemudian berikan contoh daerah/negara yang melakukan diskriminasi kelamin, diskriminasi ras, diskriminasi rasial, dan diskriminasi sosial.
6. Pada tahun 30-an kata "perempuan" lazim dipakai. Sekarang orang tidak suka menggunakan kata itu. Kata yang sekarang lazim digunakan ialah Kira-kira apa yang menyebabkan?

7. Terangkan maksud kata *jantan* dan *betina* dalam kalimat di bawah ini:
 - a. Jika kamu benar-benar *jantan*, pasti akan menerima tantanganku.
 - b. Peternak sapi itu mendatangkan beberapa *pejantan* dari luar negeri.
 - d. Membedakan bunga *jantan* dan bunga *betina* tidaklah sulit. (1993:49)

Para siswa bersusah payah membaca novel *Layar Terkembang*, tetapi bukan diajak bagaimana memahami dan mencari nilai-nilai yang ada di dalamnya. Dan, itu semuanya karena karya sastra boleh dipergunakan sebagai wahana. Selanjutnya, pada bagian akhir dari pelajaran tersebut dikutipkan puisi berjudul "Permintaan" karya Muhammad Yamin dengan tugas siswa mencari data-data Muhammad Yamin, mengubahnya menjadi bentuk prosa, mencari persamaan bunyi, dan membandingkannya dengan saduran bentuk prosa yang dibuat siswa.

Pada Pelajaran 8 siswa membaca cerpen berjudul "Warung Bu Sally" (dikutip lengkap sepanjang tiga belas halaman) karangan Nh. Dini, dengan tugas menganalisis tokoh utama, tokoh tambahan, perwatakan tokoh-tokohnya, dan pengalurannya. Di samping itu, juga dilanjutkan dengan tugas menulis resensi cerpen, mendiskusikan isi cerpen, dan melisankan dialog dalam cerpen karya Nh. Dini tersebut. Seluruh pelajaran 8 terfokus pada pelajaran sastra dengan memanfaatkan teori formalisme/ strukturalisme dalam menganalisis unsur intrinsik cerita pendek (terutama dalam latihan 1, 2, 3, dan 4).

Pada Pelajaran 9 dikutipkan penggalan novel *Harimau! Harimau!* karya Mochtar Lubis sepanjang dua halaman dengan lima buah pertanyaan yang beraneka ragam (1993:111). Pertanyaan nomor 1 berbunyi: *Harimau! Harimau!* adalah judul sebuah novel karangan Mochtar Lubis, suatu ciptaan fiksi, bukan cerita faktual. Apakah maksud kalimat ini? Pertanyaan itu sukar pula digolongkan ke dalam pertanyaan pemahaman terhadap cipta sastra. Pertanyaan nomor 3 berbunyi "apakah maksud kalimat ... itu, dan gaya bahasa apakah itu...." Pertanyaan nomor 2 berbunyi teori sosiologi sastra, "Mengapa pembaca novel perlu mempunyai pengetahuan tentang keadaan masyarakat pada zaman terjadinya cerita itu?" Pertanyaan yang berbunyi sosiologi sastra juga dipaparkan dalam pertanyaan nomor lima yang meminta siswa menemukan data-data tentang Mochtar Lubis, sedangkan pertanyaan nomor empat menugasi siswa untuk membuat catatan tentang alur, perwatakan pelaku, dan tema novel tersebut.

Pada Pelajaran 10 siswa diminta mencari tema sajak "Doa" karya Chairil Anwar, merasakan keindahan bentuk pantun, menemukan perbedaan bentuk pantun dan syair, membandingkannya dengan bentuk sajak Chairil Anwar, dan mendeklamasikan sajak-sajak berjudul "Gerilya" karya Rendra, "Pahlawan Tak Dikenal" karya Toto Sudarto Bachtiar, dan "Krawang-Bekasi" karya Chairil Anwar. Dari urutan itu tampak jelas bahwa untuk dapat membaca dan mendeklamasikan puisi para siswa diberi tahu terlebih dahulu bagaimana mencari tema puisi, keindahan puisi yang dibangun dengan unsur bunyi, susunan kata/letak kata, larik dan bait, serta membandingkan bentuk puisi baru dan lama (pantun dan syair). Artinya, pengetahuan sastra diberikan terlebih dahulu, baru menyusul bagaimana menikmati dan menghayatinya.

Pada Pelajaran 13 siswa membaca karya sastra lama jenis cerita rakyat berjudul

“Landorundun” dari Tana Toraja dengan tugas mencari tokoh utama, perwatakannya, dan manfaat yang diperoleh dari membaca cerita rakyat tersebut. Kemampuan menganalisis unsur intrinsik prosa cerita kembali dilatihkan.

Terakhir, pada Pelajaran 14 siswa membaca puisi secara nyaring berjudul “Sebab Dikau” karya Amir Hamzah, mendiskusikan pesan puisi tersebut, mencari keindahan bahasa puisinya, persamaan bunyinya. Pembelajaran ini merupakan kelanjutan dari Pelajaran 10, dan ditambah dengan pengetahuan bahwa setiap puisi selalu mengandung pesan atau amanat. Baru sesudah itu, anak kembali diminta untuk menikmati puisi Subagio Sastrowardoyo yang berjudul “Jika Hari Rembang Petang”. Pada akhir Pelajaran 14 para siswa diminta untuk membaca cerpen yang berjudul “Angin dari Gunung” karya A.A. Navis. Sesudah anak membaca cerpen tersebut dan merasakan keterlibatan perasaan dan pikiran dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya sepanjang lima setengah halaman, anak-anak diminta untuk mengungkapkan pengalaman-pengalamannya ke dalam bentuk cerita pendek atau puisi.

Demikianlah secara selintas bahan pembelajaran sastra yang terdapat dalam buku satu. Bahan pembelajarannya merupakan penjabaran apa yang terdapat dalam kurikulum, minus naskah drama. Bahan novel dikutip penggalan dari *Salah Asuhan*, *Layar Terkembang*, dan *Harimau! Harimau!* Bahan cerpen dikutip secara lengkap karya Nh. Dini berjudul “Warung Bu Sally”, dan karya A.A. Navis berjudul “Angin dari Gunung”. Cerita rakyat dikutip secara lengkap berjudul “Landorundun”. Bahan puisi dikutip secara lengkap karya penyair-penyair seperti Taufiq Ismail, Chairil Anwar, W.S. Rendra, Toto Sudarto Bachtiar, Muhammad Yamin, Amir Hamzah, dan Subagio Sastrowardoyo.

Buku ini memang setia dengan kurikulum. Termasuk di dalamnya usaha pemanfaatan teks sastra sebagai bahan pembelajaran bahasa seperti yang dikehendaki kurikulum. Tujuannya memang mulia: memperkenalkan teks sastra secara langsung kepada anak didik agar tumbuh kesenangan untuk menikmati, memahami, dan menghayati karya sastra; di samping juga untuk mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sayangnya, teks sastra diperlakukan sebatas sebagai bahan bacaan, terbukti dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya. Dengan pertanyaan-pertanyaan semacam yang telah dikutipkan di depan, dapatkah dibangun kecintaan terhadap karya sastra bangsanya sendiri? Apalagi dalam bentuk mengutipkan kalimat bergaya masa lalu yang sulit dan cukup menggelikan untuk pelajar masa kini, makin terpupuklah rasa kebosanan dan keengganan membaca lanjutan karya sastra tertentu tersebut. Akibatnya, semakin terpuruklah pembelajaran sastra yang seperenam bagian itu.

4. Beberapa Gagasan Perubahan

Dengan bertolak dari kurikulum dan buku paket seperti yang telah dipaparkan di depan, agar informasi itu lengkap, seharusnya diteliti pula bagaimana guru sebagai pelaksana di lapangan (sayang karena keterbatasan waktu ini belum sempat dilakukan). Faktor guru hanya akan disinggung sebatas yang dapat dilacak di surat-surat kabar dan majalah seperti yang telah dikemukakan pada awal makalah ini.

Dalam perbincangan dengan *Kompas* (30 Juli 1998) Bambang Kaswanti Purwo

mengeluh bahwa sulit mengajak para guru bahasa untuk meninggalkan pola lama dan pendekatan lama. Pemahaman guru terhadap Kurikulum 1994 bersifat sangat tekstual, kaku, sulit menerima pembaruan. Pengajaran bahasanya cenderung padat dengan kegiatan yang bersifat deduktif, lebih menuntut siswa menghafal, dan sebagai akibatnya pengajaran bahasa Indonesia menjadi membosankan. Pendapat semacam itu diperkuat oleh Dendy Sugono (Ibid) bahwa di lapangan guru lebih suka mengajarkan bahasa sebagai ilmu, dan ini diperparah oleh buku-buku paket yang kebanyakan masih menggunakan pendekatan struktural sehingga orientasi pendekatan komunikatif seperti yang dikehendaki oleh Kurikulum 1994 sangat terabaikan.

Apa yang dikeluhkan oleh ketua MLI (Masyarakat Linguistik Indonesia) dan ketua HPBI (Himpunan Pembina Bahasa Indonesia) tersebut di atas agaknya memang benar. Ruh pengajaran bahasa yang dikehendaki oleh Kurikulum 1994 ialah meningkatkan keterampilan siswa dalam berkomunikasi, baik secara lisan maupun tulis. Siswa bukan sekadar belajar bahasa, melainkan belajar berkomunikasi, dalam arti siswa mampu menangkap makna dan pesan, termasuk menafsirkan dan menilai, serta kemampuan untuk mengekspresikan diri dengan bahasa sehingga siswa dipertajam kepekaan perasaan dan ditingkatkan kemampuan berpikir dan bernalarnya (Kaswanti Purwo, 1997:13--14).

Tujuan yang sangat bagus itu, ternyata masih baru di atas kertas. Mengapa guru bahasa Indonesia berkecenderungan seperti yang dikeluhkan oleh kedua pakar itu? Toenggoel P. Siagian dalam *Basis* (Januari-Februari 1998) melabrak Kurikulum 1994 sebagai "biang keroknya". Kurikulum 1994 berkeinginan untuk mengarah pada *highly academic school* semacam gymnasium di Jerman atau Belanda. Baginya apabila kurikulum itu dijalankan dengan ketat, berarti 70% siswa harus dikeluarkan. Banyak sekolah yang tidak sanggup melaksanakan karena kekurangan sarana dan prasarannya. Khususnya, Kurikulum 1994 membutuhkan guru yang sangat berpengalaman, di samping sarana buku dan perpustakaan yang memadai.

Apabila difokuskan pada pembelajaran sastra, salah satu akibat dari keterpaduan guru pun memegang peran yang penting. Seperti kita ketahui salah satu akibat dari pamaduan pengajaran sastra dan pengajaran bahasa adalah bahwa guru harus memiliki kualifikasi pengajar bahasa dan sekaligus pengajar sastra Indonesia. Di perguruan tinggi keguruan, baik FKIP maupun IKIP dikenal bidang studi bahasa (linguistik) dan bidang studi sastra. Kedua bidang tersebut memang cukup dekat hubungannya, tetapi untuk menekuninya lebih lanjut masing-masing membutuhkan minat tersendiri. Di samping itu, baik pengajaran bahasa di satu pihak maupun pengajaran sastra di pihak lain masing-masing memiliki visi dan misi tersendiri. Secara umum fungsi bahasa adalah untuk memberikan acuan pada pengalaman-pengalaman pemakainya, sementara sastra adalah pengungkapan yang kompleks dan menyeluruh dari dunia pengarang dan pembacanya.

Apabila kita meminjam teori semiotik, bahasa adalah sistem tanda tingkat pertama yang sudah memiliki arti. Dalam karya sastra arti bahasa itu ditingkatkan menjadi makna sebagai sistem tanda tingkat kedua. Itu artinya bahwa untuk memecahkan apa makna suatu teks sastra diperlukan pengetahuan tentang konvensi bahasa ditambah

dengan konvensi sastra. Jadi, makna sastra itu bukan semata-mata digali dari arti bahasanya saja, tetapi terlebih-lebih didukung oleh konvensi tambahan itu (Preminger, 1974:981). Pendek kata, dua bidang itu membutuhkan ketekunan guru bidang studi sendiri-sendiri. Alhasil, keterpaduan dua bidang pengajaran itu sejak Kurikulum 1975, 1984, dan 1994 memunculkan keluhan guru dan pakar. Oleh karena itu, agar masalah seperti tersebut di atas tidak selalu berulang setiap tahunnya, agaknya usaha mengeluarkan kembali pengajaran sastra dari pengajaran bahasa perlu dipikirkan lebih lanjut. Kembalikan mata pelajaran sastra berdiri sendiri (istilahnya diberi otonomi) agar dimungkinkan untuk membaca penggalan novel lebih luas dan bervariasi; agar guru sastra dapat berkisah pula mengajak murid-muridnya untuk dapat membaca puisi, mendeklamasikannya, menikmatinya, menghayatinya, memahaminya, dan mengkreasi-kreasi; agar guru sastra dapat mengajak muridnya untuk membaca cerpen, novel secara lebih leluasa, memahaminya, dan mencari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta kemungkinan untuk tertarik mencoba menulis cerpen berdasar pengalaman batinnya; agar guru sastra dapat berdialog dengan para siswanya dalam membaca drama secara lebih suntut sehingga dapat mementaskannya dalam kegiatan ekstrakurikuler, misalnya.

Dari kajian Kurikulum 1994 dan satu buku paket yang representatif seperti telah dipaparkan pada bagian dua dan tiga tampak jelas bahwa memadukan pembelajaran bahasa dan sastra berakibat timpang dan memberatkan baik dari segi alokasi waktu (hanya seperenam) maupun dari segi pengajar yang menuntut adanya kualifikasi guru bahasa sekaligus guru sastra, padahal di SMU jelas bukan lagi guru kelas seperti di sekolah dasar, tetapi guru bidang studi. Di samping itu, pembelajaran sastra yang begitu banyak membutuhkan keaktifan dari pihak guru untuk ikut juga membaca karya-karya sastra tertentu, menjadi sangat runyam apabila guru tidak lagi memiliki waktu untuk membaca lagi novel tertentu yang pernah dibacanya. Kemungkinan untuk bergantung kepada sinopsis yang jelas-jelas sudah dilarang oleh rambu-rambu nomor sepuluh tidak lagi dapat dihindarkan.

Rambu-rambu nomor (11) perlu ditinjau kembali. Penyajian secara terpadu, misalnya bacaan sastra yang dapat sekaligus dipakai sebagai bahan pembelajaran bahasa, terbukti sangat mengganggu. Dalam bagian ketiga dari makalah ini banyak diberikan contoh akibat rambu-rambu nomor sebelas ini, khususnya lewat buku *Terampil Berbahasa Indonesia Jilid 1* perihal bagaimana teks sastra dimanfaatkan sebagai pembelajaran kalimat dan kosa kata. Kuda kurus yang bernama sastra itu menjadi keledai linglung yang ditarik-tarik ujung telinganya, dikorek-korek sembari dicibir dan diketawakan sebagai binatang aneh yang tak berguna dan sulit dipahami apa maunya.

5. Penutup

Demikianlah kajian sederhana terhadap Kurikulum SMU 1994 berikut buku paket *Terampil Berbahasa Indonesia 1*, khususnya yang berkaitan dengan pengajaran sastra. Beberapa hal yang perlu ditekankan sekali lagi, antara lain, ialah (1) perlu dibuat kurikulum bahasa Indonesia dan sastra Indonesia sendiri-sendiri, artinya pembelajaran bahasa harus dipisahkan dengan pembelajaran sastra; (2) fungsi mata pelajaran Bahasa

dan Sastra Indonesia perlu diperbaiki sebab hanya bertolak pada kedudukan Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sehingga kedudukan sastra Indonesia tidak terwakili; (3) dalam program pengajaran, porsi untuk berapresiasi dan berekspreasi sastra hendaknya lebih banyak jika dibandingkan dengan porsi pengetahuan sastranya agar buku paket (jika ini masih akan dilanjutkan) yang dibuat berdasarkan kurikulum tidak berkutat pada analisis intrinsik-ekstrinsik karya sastra yang memungkinkan guru asyik memberikan pengetahuan intrinsik-ekstrinsik sastra sehingga pembelajaran menjadi sangat didominasi hafalan; (4) untuk mengaktifkan guru bahasa dan guru sastra Indonesia model buku paket yang siap pakai sesuai dengan kurikulum ini dan itu, perlu ditinjau lagi, (5) kembalikan sumber belajar siswa ke buku pelengkap, buku bacaan, bunga rampai, kamus, ensiklopedi agar ganti kurikulum ganti buku tidak lagi dijumpai.

Daftar Pustaka

- Chatman, Seymour. 1980. *Story and Discourse. Narrative Structure in Fiction and Film*. Ithaca and London: Cornell University Press.
- Damono, Sapardi Djoko. 1998. "Nasib Sastra di Sekolah". *Basis*. No.1--2, Tahun ke-47, Januari-Februari.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum: Garis-Garis Besar Program Pengajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1994. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum: Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Drost, J.I.G.M. 1998. *Sekolah: Mengajar Atau Mendidik?* Yogyakarta: Kanisius-Universitas Sanata Dharma.
- Ismail, Taufiq. 1997. "Menyampaikan Sastra ke Sekolah-Sekolah Kita". *Horison*. Th.XXXI, No. 5, Mei.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1991. *Bulir-Bulir Sastra & Bahasa*. Yogyakarta: Kanisius.
- , 1997. *Pokok-Pokok Pengajaran Bahasa dan Kurikulum 1994*. Jakarta: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ken. 1998. "Pengajaran Bahasa Indonesia Cenderung tak Komunikatif". *Kompas*. 30 Juli.
- Preminger, Alex *et al.* 1974. *Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics*. Princeton: Princeton University Press.
- Syafi'ie, Imam dan Imam Subana. 1993. *Terampil Berbahasa Indonesia 1, untuk Sekolah Menengah Umum Kelas 1*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Oemarjati, Boen S. 1983. "Pengajaran Sastra Indonesia dan Pembinaan Apresiasi Sastra". *Kongres Bahasa Indonesia III*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Wis. 1998. "Kurikulum 1994 Perlu Dibedah Total". *Kompas*. 23 Juli.

Wis dan Sal. 1998. "Kurikulum Mesti Cantik dan Ramping". *Kompas*. 25 Juli.



LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C4
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 16.45–17.35
Judul Makalah	: Mengkaji Ulang Pembelajaran Sastra di SMU Berdasarkan Kurikulum 1994: Studi Kasus Buku <i>Terampil Berbahasa Indonesia</i> Jilid 1
Penyaji	: B. Rahmanto
Pemandu	: S.R.H. Sitanggang
Pencatat	: a. Puji Santosa b. Ebah Suhaebah
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta

a. Pertanyaan:

Pedas juga kritik Pak Rahmanto ini. Pertama, saya terlibat dalam penyusunan Kurikulum Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 1994. Setelah Kurikulum selesai disusun tidak ada satu pun yang bersedia menulis buku paket pelajaran sebagai penjabaran dari Kurikulum tersebut. Kami sebagai penyusun Kurikulum akhirnya diminta untuk menyusun buku paket pelajaran tersebut sebagai model. Saya mendapat bagian menyusun buku SLTP dan dinilai oleh Pak Rahmanto, yaitu buku *Pintar Berbahasa Indonesia*. Buku *Terampil Berbahasa Indonesia I* sekarang sedang direvisi oleh Pak Imam Syafei karena Pak Imam Syafei menyadari kekurangan-kekurangan buku tersebut. Yang perlu diingat adalah bahwa jangan sampai terulang hal yang sama dengan hal pada Kurikulum 1984. Sampai masa pakai kurikulum itu habis, tidak ada satu pun buku paket yang terbit. Oleh karena itu, begitu Kurikulum 1994 berjalan, buku harus ada, apapun wujudnya. Kami menyadari buku ini banyak kekurangan dan akan kami revisi. Apakah Pak Rahmanto sudah membaca buku pendampingnya, yaitu buku *Petunjuk Guru*? Dalam *Petunjuk Guru* ada bagian umum dan ada bagian khusus. Mungkin Bapak tidak membaca bagian khusus ini. Dalam buku tersebut pada setiap unit dijelaskan apa maksud dan tujuan pembelajaran bab tersebut. Apakah Bapak lupa membaca buku *Petunjuk Guru*-nya? Bapak langsung mengkritik buku murid sehingga tidak melihat buku petunjuk guru? Saya mohon Bapak membaca buku petunjuk itu agar tidak terjadi salah paham. Dalam Kurikulum 1994 tidak ada tujuan khusus dan yang ada hanya tujuan kelas. Tidak ada kesastraan, yang ada hanya kebahasaan. Pembelajaran kesastraan hanya ada dalam pemahaman.

b. Jawaban:

Saya sudah membaca buku siswa dan buku guru. Memang itu pekerjaan saya.

Saya tidak tahu tentang buku khusus. Apa buku khusus itu, Pak Parera? Buku Petunjuk Guru tentang petunjuk khusus sudah saya baca. Yang masih saya pertanyakan adalah ihwal kebahasaan dan pemahaman itu sendiri. Kebahasaan itu padanannya ya kesusastraan, bukan pemahaman. Ini zamannya reformasi. Perlu juga pengajaran kebahasaan ini direformasi. Masalah pemahaman juga bisa dilakukan di dalam kebahasaan. Pemahaman tidak harus berada dalam kesusastraan. Jadi, mengapa kebahasaan itu berdiri di situ? Setelah saya telaah, ternyata tujuan pengajarannya hanya sebagai alat untuk pengajaran bahasa. Mau apa lagi? Hal itulah yang saya mintakan kepada Pak Parera agar jika buku itu direvisi, dalam rangka reformasi, hal itu perlu keseimbangan.

2. **Penanya:** Nur Salim, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah penyusunan buku paket Pelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia telah melibatkan jumlah penulis yang seimbang antara ahli bahasa dan ahli sastra?
- 2) Apakah mungkin dipisahkan antara guru bahasa dan guru sastra?
- 3) Apakah pada saat kurikulum itu disusun sudah dilibatkan pakar-pakar sastra yang seimbang dengan pakar bahasa?

b. Jawaban:

- 1) Apakah mungkin guru bahasa dan guru sastra itu dipisahkan? Untuk menjawab pertanyaan Pak Nur Salim ini, saya bingung juga. Jika kita menengok di FKIP, di sana yang diajarkan program studi bahasa dan sastra. Ketika mahasiswa menulis skripsi, mahasiswa boleh memilih antara skripsi kebahasaan, skripsi kesastraan, dan skripsi pengajaran kebahasaan dan kesusastraan. Jadi, ada tiga yang ahli pengajarannya, yaitu ahli pengajaran kebahasaan, ahli pengajaran kesusastraan, dan ahli pengajaran kebahasaan dan kesusastraan. Kecuali bagi mereka yang tanpa skripsi, saya tidak dapat komentar apa-apa. Dalam kurikulum nasional terdapat program pengkajian kesusastraan dan pengkajian kebahasaan. Semua itu terprogram sehingga sulit untuk memisahkan antara guru bahasa dan guru sastra.
- 2) Masalah keseimbangan antara pakar bahasa dan sastra di dalam penyusunan kurikulum, itu saya tidak tahu karena saya tidak terlibat di dalamnya. Hal itu Bapak tanyakan saja kepada Pak Parera. Memang ketika penyusunan kurikulum dilaksanakan, saya juga diundang bersama Pak Sapardi Djoko Damono, tetapi bukan untuk masalah ini. Saya pun berteriak secara keras dan ditanggapi secara demokratis oleh Pak Badudu. Waktu itu hal tersebut belum saya pelajari lebih lanjut. Setelah ada buku paketnya seperti itu, hal itu perlu dikaji kembali.

3. **Penanya:** Martono, Universitas Tanjungpura, Pontianak

a. Pertanyaan:

- 1) Materi sastra sangat sedikit dalam buku paket pelajaran bahasa Indonesia. Guru pun malas mengajarkan sastra dan kadang-kadang pelajaran sastra sering dilewatinya. Bagaimana jalan pemecahannya agar guru tidak malas mengajarkan sastra kepada siswanya?
- 2) Apakah boleh guru diberi kebebasan dalam memilih tema dalam memberi pelajaran sastra kepada siswanya?
- 3) Apakah tidak dibolehkan bahwa pengajaran bahasa Indonesia memberikan penekanan pada kosakata dan kalimat yang ada dalam karya sastra?

b. Jawaban:

- 1) Bahwa ada materi sastra yang dilewati oleh guru-guru saya tidak tahu. Jika materi yang sulit dalam buku paket dilewati akan mengakibatkan gurunya semakin tidak tahu sastra dan muridnya pun semakin tidak suka sastra. Saya pun sering dikritik oleh Pak Parera, tentang bagaimana mengajarkan puisi yang sulit kepada siswa? Saya harap para guru tidak membuang puisi yang sulit itu karena materi sastra hanya sedikit. Kalau begitu, siswa mendapat apa?
- 2) Guru diperbolehkan mengajarkan kalimat atau kosakata bahasa Indonesia yang sumbernya atau bahannya dari kesusastraan. Silakan guru membuat soal dari teks karya sastra. Buatlah hal itu sebanyak-banyaknya. Akan tetapi, kalau itu sudah dipakai sebagai pengajaran sastra, jangan dipakai untuk pengajaran kosakata atau kalimat sebab nanti dapat mengganggu. Kalau siswa sudah payah-payah membaca dan mengapresiasi novel *Sitti Nurbaya*, tiba-tiba guru hanya bertanya tentang apa arti *kawin paksa* itu? Arti kata itu dapat diketahui dari kamus, kita tidak usah membaca novel *Sitti Nurbaya*. Pembicara sebelumnya, Pak Suripan, sangat merindukan buku-buku lama dan mencari kata-kata majemuk, kosakata dari teks karya sastra. Itu bagus sekali. Hal itu dilakukan oleh penulis buku tata bahasa pada masa dahulu. Buku itu menerangkan tata bahasa dengan menggunakan novel *Layar Terkembang*, *Salah Asuhan*, sampai pada puisi Chairil Anwar "Kalau Sampai Waktuku/ Kumau tak seorang kan merayu".
- 3) Mengenai kebebasan memilih tema dalam pengajaran sastra, dalam makalah saya, halaman 6 sudah saya singgung, yaitu rambu-rambu nomor 13 tentang luasnya muatan tema itu. Pemilihan bahan untuk pembelajaran sastra *sedapat mungkin* dikaitkan dengan tema pembelajaran. Frasa *sedapat mungkin* diperjelas kembali dalam buku *Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar Mengajar* (1994:66), yaitu "Penjabaran Kurikulum dilaksanakan secara luwes sehingga tema-tema dapat saja ditambah atau dikurangi asal tidak menyimpang dari tujuan yang terdapat dalam isi GBPP". Jadi, pemilihan tema sangat luwes dan dapat disesuaikan dengan keadaan siswa atau kelas. Masalah tema ini akan dikaji kembali agar sesuai dengan tujuan

pembelajaran sastra, seperti disesuaikan dengan butir-butir pembelajaran.

4. **Penanya:** Pudiant Suryadikara, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. **Pertanyaan:**

Pengajaran sastra di lapangan bergantung kepada gurunya. Ada guru yang senang pada sastra dan ada pula guru yang senang mengajar bahasa. Kasus di Banjarmasin guru yang seharusnya mengajar bahasa ternyata banyak mengajarkan sastra sehingga banyak diprotes guru lain. Mengapa guru itu mengajarkan hal yang aneh seperti itu? FKIP sebagai produsen guru memberikan materi kesusastraan dan kebahasaan cukup banyak. Hanya di lapangan mereka berbeda. Apakah mereka membaca kurikulum atau bahkan mungkin mereka tidak memiliki kurikulum? Apakah guru yang menyuruh siswanya menulis cerita rakyat dari daerahnya untuk kelas satu SMU itu sudah sesuai dengan kurikulum? Siswa SMU kelas dua disuruh membaca novel-novel seperti *Salah Asuhan*, *Layar Terkembang*, *Siti Nurbaya*, dan *Atheis*. Dalam novel-novel itu terkandung ajaran nasionalisme, adat istiadat, tentang kewanitaan, tentang keindonesiaan, dan jangan hanya menjadi pegawai negeri saja. Apakah tugas itu tidak terlalu berat bagi siswa?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu habis.)

TENTANG CARA MENJADI BANGSA RABUN SASTRA DAN LUMPUH MENULIS PULA SEHINGGA JELAS DI DUNIA KITA PAKAR TERKEMUKA

Taufiq Ismail
Sastrawan

1. Pendahuluan

Dalam menghadapi alaf atau tahun-ribuan baru, yang tinggal 26 bulan lagi, seluruh dunia sudah sekitar 5 tahun belakangan ini demam Mabuk Abad 21. Pesatnya penerapan ilmu teknik pada umumnya, teknologi *chip* dan teknologi hayati pada khususnya, berkembangnya isu-isu universal dan pencarian kekuatan transendental atau metafisik, di sisi menetapnya pikiran sekular-ateistik, semuanya berbarengan dengan penyejagatan atau globalisasi yang memacu perubahan yang sangat cepat di bidang politik, ekonomi, perdagangan, pertahanan-keamanan, sosial, pendidikan, juga seni-budaya.

Di depan layar monitor internet, kita saksikan orang-orang dari kelas terpelajar dan mampu, dengan menekan sejumlah tombol bisa mengakses hampir segala referensi dan ensiklopedi, buku teks dan makalah, berita dan desas-desus, analisis dan pergunjangan, yang melesat berlentingan dari bom informasi yang tak habis-habisnya meledak. Perolehan berita dari media massa konvensional tiba-tiba menjadi ketinggalan dan kuno. Revolusi telekomunikasi adalah tenaga penggerak yang kencang luar biasa. Dia menggencarkan perhubungan di angkasa, perubahan di atas tanah, dan gerakan di bawah tanah. Dia tidak bergerak dengan kecepatan, tapi dengan percepatan. Dan, percepatan ini mengatasi semuanya. Yang lamban, yang terlambat, yang lengah akan tergeser, dan kemudian tersungkur di pinggir jalan raya peradaban.

2. Bahasa, Sastra, dan Kita

Ketika kita setuju dengan perumpamaan bahwa air bagi ikan, dan bahasa bagi manusia, maka tak ada pula yang membantah paralelisme bahwa bila oksigen bagi ikan, maka sastra bagi manusia. Akan tetapi, kini bahasa tidak lagi menunjukkan bangsa, sastra tidak pula menambah kearifan dalam kehidupan kita. Dari dalam, bahasa kita didesak oleh kolokialisme (dialek Betawi yang makin berpengaruh terutama dalam bahasa bertutur), dan dari luar, diserang oleh dominasi bahasa Inggris.

Kelebihan kosakata Indonesia dari bahasa lain, misalnya perbendaharaan kata *kami* dan *kita*, tidak dimanfaatkan dalam penggunaan dan tidak diajarkan di sekolah dengan tepat. Salah pakai kata *kami* dan *kita* ini berantakan luar biasa. Mungkin gejala ini merupakan gambaran yang setia saja dari konsep pemilikan harta benda yang kacau di masyarakat kita hari ini, dalam makna cara perolehan serta asal-usul halal dan haramnya.

Berbahasa dengan tertib, baik bertutur maupun menulis, bukan saja tidak dirasakan sebagai sesuatu yang memberikan kenikmatan, tetapi pula tidak lagi terasa diperlukan, seperti juga berpikir dengan tertib. Karena berpikir sudah tidak memerlukan ketertiban, kita pun sering bertindak tanpa ketertiban pula. Kaidah dan logika dalam

berbahasa bukan menjadi kepedulian amat-sangat, seperti juga tegaknya hukum dan akal waras bukan pula masalah yang urgensinya tertinggi hari ini di masyarakat kita.

Sastra tidak menambah kearifan manusia Indonesia karena dalam kehidupan bangsa, dia memang seperti duduk mencangkung menyendiri, tidak tampak kepalanya di tepi kerumunan masyarakat ramai yang tak habis-habisnya bersibuk diri. Sementara itu, sepanjang masa 3--4 dekade persoalan yang dihadapi sastra kita *berulang berpusu-pusu terbentur-bentur dari itu ke itu juga* dalam monoton yang konsistensinya menakjubkan. Sebutlah suatu problema sastra negeri ini, dia mesti akan termasuk ke dalam salah satu butir senarai 21 masalah sastra Indonesia mutakhir berikut ini:

- 1) merosotnya minat masyarakat untuk membaca karya sastra,
 - 2) rendahnya tiras buku sastra,
 - 3) susutnya mutu karya sastra,
 - 4) sepihnya ulasan dan kritik sastra,
 - 5) kurang menaikinya jumlah pengulas dan kritikus sastra,
 - 6) susahinya menarik minat studi sastra Indonesia di perguruan tinggi,
 - 7) seretnya pertambahan S-3 ilmu sastra jika dibandingkan dengan S-3 ilmu eksakta/sains dan ilmu ekonomi/sosial,
 - 8) cuma satunya majalah bulanan sastra,
 - 9) masih adanya pelarangan karya sastra,
 - 10) lambatnya proses desentralisasi kegiatan sastra,
 - 11) sangat kurangnya diadakan sayembara-sayembara sastra,
 - 12) jaranginya penghargaan pada karya sastra dan sastrawannya,
 - 13) sunyi dan lesunya lalu-lintas pikiran di antara kalangan sastra (pengarang, kritikus, akademik, guru, penerbit, pembaca),
 - 14) sedikit sekali dikenalnya sastra Indonesia di luar negeri melalui terjemahan bahasa asing,
 - 15) anemisnya ide atau tema berikut penggarapannya di dalam karya-karya sastra,
 - 16) salah-bebannya sastra yang dianggap bertugas merubah ketimpangan sosial-politik,
 - 17) kurangnya perhatian pada karya sastra Melayu klasik, sastra daerah klasik, dan karya sastra daerah kontemporer,
 - 18) lemahnya sastrawan Indonesia dalam berorganisasi,
 - 19) kurang terdedahnya sastrawan Indonesia pada pergaulan sastra-tetangga apalagi sastra-dunia, terutama dalam bacaan dan juga kontak serta pertemuan,
 - 20) tidak adanya acara sastra dan pembicaraan buku sastra di media elektronik, dan
 - 21) tercecernya pengajaran sastra dan mengarang di sekolah.
- [Taufiq Ismail, "Potret Layar Lebar Persoalan yang Dihadapi Sastra Kita", 1998]

Salah satu etiologi yang menjadi sumber utama anomali terbesar, yang menyebabkan pertumbuhan sastra kita menjadi abnormal begini adalah tercecernya pengajaran sastra

dan mengarang di sekolah-sekolah kita.

Mari kita *sigi* atau kita soroti masalah di nomor 21 bersangkutan, yang terutama merujuk pada keadaan sebelum penerapan *Kurikulum 1994* di SMU kita. Hal ini perlu dicatat karena pertama-tama kurikulum ini baru diaplikasikan dan belum cukup waktu untuk dinilai hasilnya, kemudian kedua, artikel ini memang mengarah kepada dampak dari pengajaran pra-kurikulum tersebut. Garis besar keadaan yang dimaksud, tak lebih-tak kurang seperti berikut.

- a. Dalam mengajar, sastra cuma ditumpangkan pada tata bahasa,
- b. Sastra diajarkan sangat sedikit. Tata bahasa berbanding Sastra = 5:1,
- c. Yang mengajar di SMU masih guru bahasa, belum guru sastra,
- d. Buku sastra anemik di perpustakaan sekolah,
- e. Pengajaran sastra "Nol Buku", artinya tidak ada buku sastra yang diwajibkan dibaca sampai tamat, dan dibahas tuntas,
- f. Bimbingan mengarang *sangat-sangat-sangat* terlantar.

3. Sastra dan Mengarang di 13 SMU Negara Lain

Pada bulan Juli sampai dengan Oktober 1997 saya mewawancarai 13 orang tamatan SMU dari 13 negara, yaitu SMU Singapura, Malaysia, Thailand Selatan, Brunei Darussalam, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Jerman, Swis, Rusia, Prancis, Belanda, dan Hindia Belanda. Responden 7 orang tinggal di Jakarta, dan 6 berturut-turut tinggal di Singapura, Kuala Lumpur, Bandar Sri Begawan, Bonn, Binghamton (New York), dan Toronto. Selama di SMU, data yang dapat dikumpulkan adalah jumlah buku yang wajib **tamat dibaca** di rumah dan **dibahas** siswa di sekolah:

- 1) SMU Singapura: 6 judul,
- 2) SMU Malaysia: 6 judul,
- 3) SMU Thailand Selatan: 5 judul,
- 4) SMU Brunei Darussalam: 7 judul,
- 5) SMU Jepang: 15 judul,
- 6) SMU Kanada: 13 judul,
- 7) SMU Amerika Serikat: 32 judul,
- 8) SMU Jerman: 22 judul,
- 9) SMU Internasional, Swiss: 15 judul,
- 10) SMU Rusia: 12 judul,
- 11) SMU Perancis: 20-30 judul,
- 12) SMU Belanda: 30 judul,
- 13) AMS Hindia Belanda: 25 judul,
- ⊗ SMU Indonesia: 0 judul.

Perlu diketahui bahwa jumlah buku sastra yang dibaca di SMU responden, belum tentu serupa dengan jumlah bacaan sastra SMU-SMU selebihnya di negara yang sama dan belum tentu pula berlaku secara nasional, pada tahun-tahun responden bersekolah di sana. Akan tetapi, angka tersebut paling tidak memberikan suatu indikasi tertentu bagi kita sebagai pengamat, yang sangat berharga sebagai bahan perbandingan untuk

perbaiki sistem kita di Indonesia. Dengan demikian, urutan dari yang paling sedikit (5 buku) ke paling banyak (32 buku) adalah Thailand Selatan, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Rusia, Kanada, Jepang, Swiss, Jerman, Prancis, Hindia Belanda, Belanda dan Amerika Serikat. Berikut ini petikan tiga contoh kasus dari Rusia, Prancis dan Hindia Belanda:

SMU Rusia

Yang menarik mengenai SMU Ufa, Rusia adalah keterangan responden Elvira Karimova Vernon bahwa karya besar Leo Tolstoy *Voina I Mir (Perang dan Damai)*, wajib dibaca dan dibahas siswa di seluruh SMU Rusia. Tebal novel itu 981 halaman, dalam terjemahan Inggris. Saya tidak tahu berapa tebalnya dalam bahasa aslinya, tetapi ini tidak relevan. Setelah ditambah dengan 11 judul buku lagi yang harus dibaca di SMU Ufa itu, seperti karya-karya agung Dostoyevski, Chekhov, Pushkin dan Gogol, repotlah saya untuk membayangkan betapa kayanya perbendaharaan batin tamatan SMU itu. Apakah karena itu Elvira menjadi sastrawan? Tidak. Elvira tidak menjadi sastrawan setamat SMU Ufa. Dia menjadi insinyur teknik dan dia suka psikologi. Manfaat yang diperolehnya dari pendidikan SMU-nya itu adalah kenikmatan membaca sastra. Di Kanada, tempat bermukimnya yang baru, dia melahap novel-novel Hemingway, Steinbeck, dan lain-lain.

SMU Prancis

Mari kita perhatikan pengalaman Anda Djoehana Wiradikarta, kelahiran Paris. Putra dari pianis-penari Tati Widari Soewandi alumna Trinity Music College London dan penyair Aki Djoehana, teman seangkatan Chairil Anwar yang belajar di Universitas Sorbonne (1948), Paris, praktis seluruh pendidikannya diperolehnya di Prancis kecuali kelas 2 dan 3 SD di Jakarta (1959--1961). Di SMU-nya siswa wajib membaca antara 20--30 judul karya sastra. Di luar tugas sekolah, karena ingin tahu, ketika di SMP dia menamatkan terjemahan novel Rusia Leo Tolstoy *Perang dan Damai*, buku koleksi ayahnya, selesai dalam waktu seminggu. Anda Djoehana, seperti Elvira Karimova Vernon, bergelar insinyur sipil dan kemudian meraih S-2 insinyur perminyakan. Apa makna bacaan sastra bagi Anda Djoehana? "Udara segar bagi akal dan jiwa," jawabnya.

AMS Hindia Belanda

Sastrawan dan wartawan terkenal Rosihan Anwar, yang di usia beliau yang 75 tahun ini setiap minggu masih rutin menamatkan dua judul buku, dalam wawancaranya memberikan fakta yang mengejutkan. Alumnus MULO Padang (1939) dan AMS-A Yogya (1942) ini menjelaskan bahwa tamatan AMS-A wajib menamatkan 25 novel selama 3 tahun sekolah, mengulas dan mendiskusikannya di kelas. **Dua puluh lima novel!** Itu kejutan pertama buat kita. Kejutan kedua adalah bahwa 25 novel itu dalam **4 bahasa**, yaitu 10 novel bahasa Belanda, 5 novel bahasa Inggris, 5 novel bahasa Jerman, dan 5 novel bahasa Prancis!

SMU Kita: Sastra Nol Buku

Dengan demikian, tampak luar biasa merosotnya mutu SMU kita. Sebelum

Perang Dunia II, mutu pengajaran sastra dan mengarang AMS-A setanding dengan pengajaran sastra dan mengarang SMU-SMU dunia masa kini, malahan sangat-sangat menonjol dalam penguasaan banyak-bahasanya. Kini, di SMU kita, literatur wajib membaca karya sastra dalam praktiknya adalah "Nol Buku". Kekecualian tentu ada, tetapi sangat sedikit, cuma terdapat pada SMU-SMU istimewa, yang mempunyai guru bahasa dan sastra istimewa pula. Penguasaan bahasa asing, satu saja, ambillah bahasa Inggris di SMU atau bahasa Arab di Madrasah Aliyah, mutunya jauh di bawah standar.

Tujuan penugasan membaca buku sastra di SMU bukan untuk menjadikan siswa sastrawan. Kita ingin menginjeksikan serum budaya membaca pada siswa-siswa kita. Kita berharap pengalaman rohani bangsa ini, suka-duka dan pahit-manisnya, kegagalan dan suksesnya, kecerdasan dan kejahilannya, yang dipadatkan secara estetis dalam puisi, cerpen, novel dan drama Indonesia, dapat mulai memperkaya batin siswa-siswa kita sejak umur belasan tahun. Kelak ketika mereka dewasa, diharapkan cakrawala kearifan dan pandangan mereka akan luas sebagai orang terpelajar negeri ini. Akan tetapi, karena siswa kita **tidak diwajibkan** dan **tidak dikontrol** dalam penugasan membaca buku, maka dia tidak terbiasa membaca buku. Guru sebagai panutan juga belum tentu memberi teladan membaca buku. Karena tidak terbiasa membaca buku dan tidak pernah mengalami membaca sebagai suatu kenikmatan dan keperluan, maka mana mungkin dia mencintai buku. Kalau dia tidak mencintai buku mulai pada waktu umur 15--19 tahun itu, akan susah tertanam apresiasi sastranya. Kalau pun ada, apresiasinya tipis.

Hal ini juga berlaku untuk tipisnya budaya membaca di dalam disiplin ilmu apa saja, bukan cuma sastra. Periksalah daftar hadir di perpustakaan kampus mana pun di Indonesia, bandingkan dengan populasi mahasiswanya. Angka kehadiran tidak akan melebihi 2 digit setiap harinya. Sepi. Lihatlah pekarangan kampus sebuah universitas di Jakarta, yang mahasiswanya anak-anak orang kaya. Mobil mereka, pilihan kemeja dan gaya menyandang ransel, merek arloji, sepatu dan kacamata, serta *fashion* blus dan rok, mirip *setting* sebuah kampus di Miami, Florida. Yang membedakannya adalah bahwa jika di Florida mahasiswanya di bawah pohon pelataran kampus tenang membaca buku, mahasiswa kita berteriak-teriak bermain *gagle*, berjudi lagi.

Seorang rektor bercerita bahwa ketika mahasiswa ditugaskannya membaca buku dengan judul tertentu, mahasiswa itu ogah-ogahan dan berkata, "Pak, kalau saya membaca buku lebih dari seratus halaman, kepala saya pusing." Sebuah SMU Negeri di Padang punya guru bahasa dan sastra yang inovatif. Karena kesal murid-muridnya banyak yang mangkir melakukan tugas membaca novel, dibuatnya peraturan, yaitu yang mangkir didenda Rp1.000,00 untuk satu judul novel. Jumlah novel yang dibaca tiga judul setahun. Tiga tahun berturut-turut, setiap akhir tahun ajaran *seluruh murid* di kelasnya setia membayar denda itu, tunai tanpa menunggak. Mereka memilih membayar denda walau mengurangi uang jajan, daripada membaca buku. Begitulah malasnya anak-anak kita itu membaca buku.

Kalau dikumpulkan catatan peristiwa anti-buku semacam di atas ini, yang berlangsung di SMU dan kampus-kampus kita, dalam waktu singkat akan bisa dikum-

pulkan anekdot berjilid-jilid sebanyak *Tafsir Al-Azhar* karangan Buya Hamka. Lahan luas tempat disemaikannya bibit cinta membaca buku, sudah gersang kering-kerontang, tidak cukup mendapat air dan tidak "diinjeksi" dengan pupuk penyubur tanah, sejak awal kita merdeka. Ikhtiar mulia Masyarakat Gemar Membaca Buku sekarang ini, ibarat menyiram-nyiramkan air di atas lahan yang sudah berpuluh tahun gersang buku. Misalkan pengobatan, yang kita lakukan ini terapi simptomatis, belum lagi terapi kausalis. Baru meredam gejala yang tampak, belum lagi membunuh bakteri penyebab penyakit. Sasaran utama adalah anak-anak didik kita, dan artikel ini memberikan perhatian pertama pada SMU-SMU kita.

Tamatan SMA dan SMU kita ini, sejak 1950, jumlahnya sudah meliputi jutaan orang, yang di masyarakat memasuki papan atas sampai papan bawah, dari Menteri sampai ke Satpam, dari pengonsep GBHN sampai tukang ojek. Mereka adalah produksi SMA yang menerima pelajaran sastra sebagai tumpangan 20 % pada pelajaran tata bahasa. Mereka lebih banyak menerima pelajaran ilmu bumi dan olahraga ketimbang sastra. Jadi, tidak mengherankan apabila mereka asing pada sastra, apabila di GBHN porsi sastra dan seni umumnya di bawah 10 % jika dibandingkan dengan olahraga, apabila sastra tidak dikenal bangsanya sendiri. Situasi memang belum tiba pada buta sastra, tapi sudah sampai pada rabun sastra.

4. Pelajaran Mengarang

Kita diberi informasi oleh ketiga belas responden itu bahwa pelajaran mengarang di SMU Malaysia, Thailand Selatan, Jepang, Kanada, Amerika Serikat, Swiss, Uni Soviet, Perancis, Belanda dan Hindia Belanda, diberikan setiap minggu, diperiksa guru, diberi angka, dikembalikan kepada murid dan didiskusikan. Di SMU Indonesia hari ini tugas mengarang diberikan pada murid, diperiksa guru dan mendapat angka, tetapi tidak dikembalikan pada murid, dan tidak didiskusikan.

Di banyak sekali SMU kita, pelajaran mengarang cuma ditugaskan *dua atau tiga kali setahun*, jika dibandingkan dengan tugas mengarang yang *antara 36--72 kali setahun di SMU negara lain*. Jauh sekali perbedaan frekuensi latihan mengarang di SMU kita dengan semua SMU responden. Mungkin sebabnya murid di kelas kita terlalu banyak, menjadi tugas guru memeriksa karangan menjadi sangat berat. Murid di kelas SMU kita 40--50 orang, guru kita memegang kelas paralel 2-3 buah, mungkin merangkap pula mengajar di luar. Kekecualian tentu ada, yang melaksanakan seperti SMU kesepuluh negara itu, tetapi diperkirakan sangat sedikit jumlahnya.

Di SMU Malaysia, Thailand, dan Kanada, *pelajaran bahasa dipisah dari pelajaran sastra*. Di SMU Kanada, Amerika Serikat, Rusia, Prancis dan Belanda, *tatabahasa tidak diajarkan lagi*. Tata bahasa yang diajarkan di SD dan SMP sudah dianggap cukup, dan tidak perlu diulang-ulang lagi, yang membosankan siswa dan juga menjemukan guru. Kemampuan siswa mengaplikasikan tata bahasa diperiksa dalam karangan siswa.

Selama 3--4 tahun SMU, pelajaran mereka *fokuskan sepenuhnya pada membaca karya sastra dan latihan mengarang saja* sehingga siswa mempunyai waktu membaca 12--32 judul buku sampai selesai sekolah (SMU Rusia, SMU Kanada, SMU Jepang,

SMU Swiss, SMU Prancis, SMU Belanda, dan SMU AS) dan terampil sekali mengarang. Tamatan SMU ini tidak canggung menghadapi tugas-tugas menulis di perguruan tinggi (jika melanjutkan kuliah), dan lancar melaksanakan tugas-tugas mengarang di kantor seperti menulis dan membalas surat, membuat notulen rapat, mendisain perencanaan, merancang usulan kerja dan menggarap laporan rutin (jika bekerja). Bahwa di belakang hari ada siswa yang mampu menulis kreatif dan menjadi sastrawan, itu bonus untuk siswa tersebut, yang bagi sekolah bukan merupakan prioritas primer.

Tujuan pelajaran mengarang bukan untuk melatih siswa menjadi penyair, penulis cerita pendek, novelis atau dramawan. Seorang tamatan SMU harus mampu menuangkan sebuah ide menjadi bentuk tertulis yang logis, jelas, ringkas, bertata-bahasa betul dan berguna bagi tugas atau pekerjaannya, di mana pun kelak. Itulah tujuan mengarang di SMU. Dan, sekali lagi: *kemampuan menulis diperlukan untuk segala macam karier dan pekerjaan, yang menggunakan kursi dan meja.*

Di AMS Yogya, tempat Rosihan Anwar belajar pada tahun 1939–1942, ditekankan betul agar siswa menulis ringkas dan padat, langsung pada persoalan, dengan gaya *zakelijk*. Bimbingan gurunya itu membekas pada Rosihan seumur hidup, sampai sekarang ini. Lihatlah struktur artikel-artikel Rosihan Anwar, yang jauh dari kemubaziran kata-kata.

Siswa Sekolah Internasional Swiss (1991–1994), Bramono Brotodiningrat, digembleng tiga tahun terus-menerus dalam mengarang esai, esai, esai, sekali lagi esai. Begitu dia melanjutkan kuliah, sudah enteng saja tanpa beban dia menyelesaikan tugas kertas kerja macam apa pun di perguruan tinggi.

Saifuddin Abdullah, siswa *Malay College Kuala Kangsar*, Malaysia tujuh tahun berturut-turut di tingkat SMP dan SMA dibimbing dan dilatih setiap minggu untuk mengarang, dimulai dari 350 kata, naik menjadi 500, terus 1.000 (untuk 3 mata pelajaran), dan lalu ada lagi latihan membaca grafik 350 kata. Begitu dia masuk Universitas Malaya, tanpa beban dia meluncur menuliskan tugas apa pun.

Tamatan SMU kita, apabila meneruskan studi di perguruan tinggi, merasa tugas menulis yang diberikan dosen menjadi beban yang berat baginya. Mereka tidak lancar mengarang karena tidak cukup dilatih di SMU, bahkan mungkin tidak pernah dilatih sama sekali. Menulis skripsi menjadi beban mental yang traumatis. Mereka benci pada tugas menulis, dan tentu saja kalau bisa, selalu berusaha mengelakkannya. Dosen yang memeriksa tugas mengarang mahasiswa juga sudah muak melihat tulisan mahasiswanya yang *amburadul*, tidak menguasai logika kalimat, punctuation, tanda baca, anak kalimat dan tekek-bengek penulisan yang mestinya sudah beres di SMU beberapa tahun sebelumnya.

Apabila kita bertanya pada bagian personalia perusahaan, surat kabar, televisi atau departemen mana pun, mengenai pengalaman mereka menyeleksi calon pegawai atau aspiran wartawan, akan dijawab bahwa kelemahan terbesar calon-calon itu adalah ketidakmampuan mereka dalam menulis. Padahal, calon karyawan itu berkualifikasi S-1.

PENGAJARAN MENGARANG
COLLEGE MELAYU KUALA KANGSAR (1974-1980)

SMP	JUMLAH KATA	PER MINGGU	KELAS BAHASA	KELAS SEJARAH	KL. GEOGRAFI	KL. KOMERSIAL	BACA STATISTIK
KL. 1	350	1 X	V	-	-	-	-
KL. 2	350	1 X	V	-	-	-	-
KL. 3	350	1 X	V	-	-	-	-

SMU	JUMLAH KATA	PER MINGGU	KELAS BAHASA	KELAS SEJARAH	KL. GEOGRAFI	KL. KOMERSIAL	BACA STATISTIK
KL. 1	500	4 X	V	V	V	V	-
KL. 2	500	4 X	V	V	V	V	-
KL. 3	1.000	2 X	V	-	-	-	V (350, 1 X)
KL. 4	1.000	2 X	V	-	-	-	V (350, 1 X)

Catatan: ♦ tamatan SMP CMKK mendapat 126 jam-pelajaran latihan mengarang dalam masa 3 tahun belajar, tamatan SMA-nya (4 tahun) 588 j-p, total SMP-SMA (7 tahun) 714 j-p. ♦ Tun Razak, Anwar Ibrahim dan k.I. seperdua anggota kabinet Mahathir tamatan sekolah ini ♦ tamatan SMP dan SMU kita kini, perkiraan kasar saya, melalui pengamatan acak pada beberapa SMP dan SMU, mendapat cuma 15% pengajaran mengarang dibandingkan tamatan SMP-SMU CMKK, malah mungkin di bawah itu. Tapi perkiraan ini, untuk yang terpukau pada *academic curiosity*, tentu masih harus dibuktikan. Tapi apa itu urgen? Yang tak bisa dibantah adalah bahwa kondisi ini telah begitu kronisnya, sangat parahinya, dan sudah 47 tahun menghambat kemampuan bangsa kita menulis. Dan yang sangat urgen adalah *tindakan segera* memperbaikinya.

Yang mampu menulis cuma mereka yang gigih berlatih sendiri, bukan dibimbing di SMU. Apabila ada SMU yang betul-betul memberikan bimbingan menulis, itu adalah karena adanya guru bahasa hebat di SMU itu yang merupakan perkecualian sangat-sangat kecil. Padahal, kemampuan menulis yang standar (bukan menulis kreatif) cuma merupakan keterampilan plus-plus saja, beberapa derajat di atas keterampilan mengemudi kendaraan bermesin beroda empat. Mayoritas mutlak anak-anak kita, tamatan SMU, tidak punya SIM itu karena *kita tidak cukup melatih mereka langsung menyetir di jalan raya*. Yang selalu kita jejakkan kepada mereka adalah peraturan lalu-lintas dan hafalan bentuk rambu-rambu di tepi jalan.

SMA atau SMU kita, tempat dilatihnya calon orang terpelajar Indonesia menulis, dan sebagian kecil dari itu kelak diharapkan menjadi penulis kreatif, bukannya berjalan terpincang-pincang, tetapi lumpuh. Telah lama mereka lumpuh, sebagai bangsa kita lumpuh menulis.

5. Merosot 47 Tahun

Dengan perbandingan di atas maka tampaklah gawatnya situasi pengajaran sastra dan pengajaran mengarang kita yang mutunya sangat jauh di bawah standar, apabila dibandingkan dengan sampel dari beberapa negara di dunia, dalam 13 wawancara sebelum artikel ini, dan beberapa kali dikutip di atas. Padahal AMS di zaman Belanda dulu sudah mencapai standar tinggi, dan sangat disayangkan sekali standar itu tidak diestafetkan ke SMT/SMA di zaman merdeka.

Hal ini sudah berlangsung 47 tahun lamanya. Saya tidak menghitung tahun-tahun 1945-1949 karena di masa itu revolusi sedang berlangsung. Saya mengukur waktu mulai dari 1 Januari 1950, selepas penyerahan kedaulatan, ketika administrasi pemerintahan negara kita sudah sepenuhnya dijalankan orang Indonesia, betapa pun belum sempurna pada awalnya.

Hal ini tak dapat dibiarkan berlanjut lebih lama lagi. Adalah tugas bersama komunitas bahasa dan sastra kita, yaitu mahasiswa, sastrawan, guru bahasa dan sastra di SLTA, penyusun kurikulum, pencinta sastra di masyarakat, akademisi di Fakultas Sastra seluruh Universitas, FPBS seluruh IKIP, HISKI (Himpunan Sarjana Kesastraan Indonesia), HPBI (Himpunan Pembina Bahasa Indonesia), MLI (Masyarakat Linguistik Indonesia), Forum Komunikasi Nasional Mahasiswa Sastra Indonesia, agar berikhtiar keras untuk merubah keadaan ini.

Majalah sastra *Horison* secara kecil-kecilan memberi kontribusinya mengatasi masalah ini dengan menerbitkan sisipan *Kakilangit* yang ditujukan khusus pada siswa-siswa SLTA untuk meningkatkan apresiasi sastra dan latihan menulis bagi mereka. Dalam hal ini majalah *Horison* pun sudah terlambat 30 tahun lamanya.

Penyusunan langkah bersama untuk meyakinkan pengambil keputusan, penting sekali. Kita tentu tidak ingin kemerosotan kecendekiaan ini berlanjut-lanjut lebih parah lagi berkepanjangan, yang sudah mendekati setengah abad lamanya.

6. Tiga Pilihan

Bekal bangsa terpenting menghadapi masa kesejagatan (globalisasi) yang sudah sangat dekat jaraknya dan tampak-tampak di seberang pekarangan rumah kita adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. SDM yang diharapkan adalah yang

- (1) menguasai ilmu dalam bidang masing-masing, memiliki kearifan kehidupan dan kecendekiaan dalam wawasan, serta
- (2) sejak sedini siswa sekolah dasar sudah harus
 - (a) dilatih membaca buku sehingga mencintai buku dan merasakan bahwa kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari buku, dan
 - (b) dibimbing mengarang secara intensif, seperti yang dilakukan bangsa-bangsa lain sebagaimana tergambar dalam 13 wawancara terdahulu.

Sastra adalah wahana penting menuju kearifan dan kecendekiaan tersebut. Format kurikulum SMU kita dewasa ini tidak secara total mendukungnya. Jalan ke luar perlu direnungkan bersama, dan dalam hal ini diajukan tiga pilihan (A), (B) dan (C):

- a. **Pemisahan pelajaran sastra dari bahasa sejak kelas 1 sampai dengan 3 SMU, sehingga**
- 1) sastra diajarkan sama banyak dengan tata bahasa; ini memungkinkan penugasan membaca minimum 9 judul karya sastra dalam masa 3 tahun itu (lihat butir B.1 berikut);
 - 2) pelajaran tata bahasa separuhnya diisi dengan bimbingan menulis. Ini memberi siswa kesempatan berlatih menulis secara intensif (lihat butir B2);
 - 3) untuk pelajaran ilmu sosial, seperti sejarah dan ekonomi, siswa dilatih menulis esai-esai ringkas dan ulasan tentang grafik dan tabel di kelas 3, sesudah di kelas 1 dan 2 mendapat latihan mengarang dalam pelajaran bahasa.
- b. **Kaidah tata bahasa tidak perlu lagi diajarkan di SMU, dan sebagai gantinya**
- 1) sastra diajarkan sama banyak dengan tata bahasa. Ini memungkinkan penugasan membaca minimum sembilan judul karya sastra dalam masa tiga tahun itu (lihat butir B.1 berikut).
 - 2) siswa dilatih mengarang berbagai bentuk tulisan selama tiga tahun yang akan berguna baginya kelak dalam pekerjaan (seperti korespondensi kantor, menyusun notulen rapat, membuat usulan kegiatan atau *proposal*, rencana kerja dan laporan kerja), dan menyiapkannya untuk tugas di perguruan tinggi apabila dia melanjutkan kuliah (seperti menulis esai pendek, kertas kerja sederhana, menafsirkan grafik dan tabel, meringkas artikel populer dan artikel ilmiah serta meringkas karya sastra). Agar lebih personal dan menarik, siswa diwajibkan menulis buku harian pribadi yang dilaporkan secara berkala. Yang suka menulis kreatif dan jurnalistik, diberi kesempatan pula menulis sajak, cerpen dan laporan pandangan mata, yang dimuat di majalah sekolah atau dipasang di majalah dinding.

Untuk menghaluskan rasa bahasa dan melanjutkan tradisi agung pantun, sepanjang minimum 3 caturwulan siswa dibimbing mengarang pantun secara kreatif, menghafal pantun-pantun klasik dan mempraktikkannya secara kompetitif dalam berbagai lomba. Penyair-penyair terkemuka Indonesia seperti Chairil Anwar, Rendra, Sapardi Djoko Damono dll, setelah mengeksplorasi berbagai bentuk puisi, menemukan pengucapan yang sangat indah dalam format pantun dalam puisi mereka. Hendaknya tradisi budaya yang sekaya ini diwarisi terus dari generasi ke generasi.

*Yang kurik kundi,
yang merah saga.
Yang baik budi,
yang indah bahasa.*

- 3) Untuk pelajaran ilmu sosial, seperti sejarah dan ekonomi, siswa dilatih menulis esai-esai ringkas dan ulasan tentang grafik dan tabel di kelas 3, sesudah

di kelas 1 dan 2 mendapat latihan mengarang dalam pelajaran bahasa.

- 4) Kaidah tata bahasa, yang sudah diajarkan di SD dan SMP, tidak lagi diulang-ulangi, tetapi implementasi praktisnya, dicek melalui karangan yang ditugaskan pada siswa.

Untuk melaksanakan butir (A), langkah yang harus ditempuh adalah

- 1) penyediaan guru sastra Indonesia, sebanyak guru bahasa Indonesia yang ada sekarang,
- 2) penyediaan latihan calon guru sastra Indonesia di seluruh IKIP yang ada,
- 3) penyediaan dosen yang akan melatih guru sastra Indonesia di IKIP,
- 4) penyediaan buku-buku sastra terkait di perpustakaan SMU,
- 5) keyakinan bagi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Keuangan dan Menteri Aparatur Negara dan Bappenas tentang pentingnya penambahan guru sastra ini,
- 6) pemuatan ide ini ke GBHN.

Untuk melaksanakan butir (B), langkah yang mesti ditempuh:

- 1) pedoman penatar guru bahasa Indonesia yang ada sekarang agar mereka lebih mampu mengajar sastra dan membimbing siswa mengarang,
- 2) penyediaan buku-buku sastra terkait di perpustakaan SMU.

Ide (A) sangat besar biayanya, berat melobinya, susah meyakinkan pengambil keputusan dan makan waktu lama.

Ide (B) tidak semahal (A), tidak perlu menambah jumlah guru, berat juga melobinya, tetapi lebih mungkin melaksanakannya walaupun tetap makan waktu lama.

Sementara ide (A) dan (B) belum dicobakan, maka saran ketiga yang bersifat darurat adalah sebagai berikut.

c. Kegiatan membaca dan bimbingan menulis yang dilakukan di luar jam sekolah.

Ini memerlukan idealisme dan dedikasi-ekstra guru bahasa dan sastra Indonesia bersangkutan. Yang mengharukan adalah kenyataan bahwa masih ada guru-guru idealis yang tetap gigih melakukan ini, terdorong oleh kecintaan mereka pada sastra, tetapi mereka minoritas mutlak. Di kota-kota yang ada sastrawannya yang peduli, baik sekali dilakukan kerja sama antara guru dan sastrawan untuk membantu dunia pendidikan sastra dalam hal ini. Akan tetapi, kegiatan ini hanya akan dapat dilakukan di kelas 1 dan 2 saja. Di kelas 3, SMU kita berubah menjadi pabrik yang memproduksi mesin yang terampil menjawab soal-soal pilihan ganda. Orang tua murid akan marah jika mereka tahu anak-anak mereka diganggu dengan ini--itu kegiatan intelektual yang merusak konsentrasi menghadapi UMPTN.

Walaupun tindakan (C) ini cuma berupa aksi tambal-sulam, mungkin napasnyanya pendek dan tersengal-sengal pula, toh lebih baik daripada tiada ikhtiar sama sekali.

7. Rabun dan Lumpuh

Bagaimana cara menjadi bangsa yang rabun sastra dan lumpuh menulis? Tidak susah. Caranya adalah dengan tidak berbuat apa-apa dan berkulit badak terhadap fenomena rendahnya mutu pengajaran sastra dan pengajaran menulis di SLTA kita. Diam-diam kita sudah sepakat bersama-sama tidak berbuat apa-apa selama ini.

Bagaimana cara menjadi bangsa yang lebih rabun sastra dan lebih lagi lumpuh menulis? Ialah dengan *tetap tidak berbuat apa-apa dan terus bersikap insensitif* terhadap fenomena yang sangat merisaukan dan menyedihkan ini.

Kelambanan kolektif kita akan diterjang tanpa ampun oleh kencang lajunya peradaban alaf atau milenium yang akan datang, ketika batas-batas geografi dan berbagai sekat peraturan sudah diangkat orang. Kita yang terkenal lambat, lamban, lembam, lalai dan lengah akan tergeser, tergusur, tergasak dan kemudian tergeletak di pinggir jalan raya peradaban dunia.

Catatan:

Penguasaan 4 bahasa asing di AMS-A dimungkinkan, karena ketika 7 tahun di HIS (padanan SD kini) bahasa pengantar yang dipergunakan adalah bahasa Belanda, kemudian 3 tahun berikutnya di MULO (padanan SMP kini) ditambah dengan bahasa Inggris. Meningkatkan ke AMS, dengan dua bekal bahasa Eropa itu, penambahan bahasa Jerman dan Perancis nampaknya tidak merupakan kesukaran yang berat bagi siswa.

Catatan Mutakhir:

■ Beberapa hari saja sebelum saya mereproduksi revisi makalah ini, saya mendapat kabar dari Bappenas dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bahwa telah disetujui untuk melaksanakan alternatif butir B 1 di atas. Pendekatan dan lobi selama ini, alhamdulillah, mulai membuahkan hasil awal. ●

^{*)} penggalan dari laporan pengamatan "Pengajaran Sastra dan Bimbingan Menulis--Wawancara dengan 13 Alumni dan Alumnae SMA 13 Negara" yang dimuat Harian *Republika*, 24 Oktober 1997 berturut-turut 2 minggu, kemudian dibacakan di Pertemuan Sastrawan Nusantara (PSN) IX & Pertemuan Sastrawan Indonesia (PERSI) 1997, Sumatera Barat 6--11 Desember 1997, dan dimuat di dalam kumpulan makalah *Panorama Sastra Nusantara*, berjudul "Pengajaran Sastra: Pengalaman Indonesia", terbitan Balai Pustaka, 1997, dengan sejumlah revisi di sana-sini.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C8
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.50--17.40
Judul Makalah	: Tentang Cara Menjadi Bangsa Rabun Sastra dan Lumpuh Menulis Pula sehingga Jelas di Dunia Kita Pakar Terkemuka
Penyaji	: Taufiq Ismail
Pemandu	: Aminuddin
Pencatat	: a. I Nyoman Suarjana b. Meity Taqdir Qodratillah
Peserta	: 180 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Mujianto, IKIP Malang

a. Pertanyaan

Jika melihat penampilan Anda dan judul makalah yang Anda tulis, saya berpikir bahwa Anda akan banyak berbicara mengenai sastra dan kepenyairan. Makalah Anda diungkapkan seperti sebuah puisi. Berdasarkan uraian Anda, saya mengusulkan, kalau boleh, judulnya menjadi "Kebijakan Sastra Nasional". Seharusnya yang Anda sampaikan itu diketahui oleh pengambil kebijakan, atau berkaitan erat dengan pengambil kebijakan. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa tudingan terhadap guru bahasa Indonesia sebagai penyebab kurangnya apresiasi sastra tidak sepenuhnya benar. Sehubungan dengan hal itu, izinkan saya mengungkapkan pendapat saya secara puitis. Kalau seorang sastrawan melahirkan karya sastra, guru adalah bidan yang melahirkan sastrawan itu. Sastrawan seharusnya berterima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu guru karena guru itulah yang menjadi bidan pengasuhnya. Saya memberikan solusi agar guru bahasa Indonesia dipisahkan dengan guru sastra. Bagaimana menurut Bapak?

b. Jawaban:

Tolong Bapak tunjukkan pada makalah ini yang menunjukkan bahwa saya menuding kesalahan guru, saya sama sekali tidak menuding guru. Saya ini seorang guru, ayah saya guru, ibu saya guru. Saya tidak menyalahkan guru, saya sangat bersimpati kepada mereka. Saya menyalahkan sistem dan sistem ini juga akibat dari kesalahan kita semua selama 47 tahun. Kalau saya menyalah-nyalahkan guru, itu berarti saya tidak berterima kasih atas jasa mereka. Kemudian, saya ingin menanggapi saran Bapak tentang judul. Judul yang Bapak kemukakan itu tepat sekali, tetapi tidak menarik perhatian orang. Kalau saya menulis judul "Kebijakan Sastra", hal itu terlalu biasa kedengarannya. Saya berterima kasih atas perhatian Bapak.

2. **Penanya:** Sunu Catur B., Universitas Udayana, Denpasar

a. **Pertanyaan:**

Saya mulai dari kasus SD di suatu kecamatan di Surabaya. Hampir 80% SD di sana tidak memiliki perpustakaan. Ketika saya mengadakan wawancara kepada pengajar, hampir 70% mereka itu tidak memiliki buku yang berkaitan dengan bahasa Indonesia, apalagi sastra. Yang menjadi persoalan sekarang, buku sastra dalam masyarakat kita sangat berharga, sulit didapatkan, sulit dicari, dan jumlahnya sedikit. Bagaimana tanggapan Bapak? Kemudian, isu yang Bapak sampaikan dalam makalah ini adalah isu yang sudah lama. Gugatan ini juga sudah digulirkan sejak dahulu, tetapi tidak ada gemanya. Strategi apa yang Bapak lakukan agar isu itu dapat ditindaklanjuti oleh pengambil kebijakan saat ini?

b. **Jawaban:**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional setuju melaksanakan alternatif yang kita bicarakan itu, yaitu sastra diajarkan sama banyaknya dengan tata bahasa. Hal ini menunjukkan bahwa guru harus menugasi siswa untuk membaca minimum sembilan judul karya sastra dalam masa tiga tahun. Untuk melaksanakan alternatif itu, langkah yang mesti ditempuh adalah

- 1) menatar guru bahasa Indonesia yang ada sekarang agar guru lebih mampu mengajar sastra dan membimbing siswa dalam mengarang;
- 2) menyediakan buku-buku sastra yang telah dipilih oleh guru itu di perpustakaan SMU.

3. **Penanya:** J.D. Parera, IKIP Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Pak Taufiq, dalam Kongres ini banyak dilontarkan masalah kurikulum bahasa, perbukuan, tetapi orang-orang Pusat Perbukuan tidak diundang sama sekali. Saya adalah salah seorang penyusun kurikulum. Ketika Anton M. Moeliono menyinggung kurikulum, darah saya langsung naik. Nah, ketika kami menyusun kurikulum, orang-orang sastra itu kami undang. Kami bertanya kepada sastrawan tentang letak kekurangan sastra itu dalam kurikulum itu dan tentang jalan keluar yang harus dilakukan. Sebenarnya sudah ada keterbukaan dari kurikulum. Karena Kurikulum 94 sudah ditulis, diterbitkan, dan dipakai, Bapak Taufiq kami undang, kami bertemu di Jakarta, Semarang, Kaliurang, kami kumpulkan semua sastrawan dan semua dosen sastra. Kami meminta judul karya-karya sastra yang perlu dibeli oleh pemerintah. Sampai hari ini hanya daftarnya yang ada, tetapi tidak ditentukan karya sastra yang mana yang diwajibkan.

b. **Jawaban:**

Perlu diketahui oleh Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian bahwa Bapak Parera

bertugas di kurikulum. Saya yakin tugas itu telah dilaksanakan dengan baik. Akan tetapi, masalahnya adalah "Kalau Pak Parera menyatakan wajib, itu berarti buku itu harus dibeli". Saya tidak menyalahkan pemerintah. Perlu diketahui bahwa pembangunan di Indonesia terlalu diarahkan kepada pembangunan ekonomi, fisik, jalan raya, tetapi tidak diarahkan kepada pembangunan intelektualitas terutama yang sifatnya rohaniah (sastra, kesenian). *Budget* yang ada sekarang ini harus dinaikkan menjadi 30% supaya dapat memenuhi pembangunan intelektualitas itu. Saya mengatakan, ini prakiraan, bahwa buku yang wajib dibaca oleh siswa itu sembilan judul buku dalam waktu tiga tahun (seperti karya Amir Hamzah, Chairil, Sutan Takdir, Rendra, dan Abdul Muis) kira-kira begitu. Angka sembilan itu saya sesuaikan dengan jumlah caturwulan yang ada di SMU.

MUTU PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI SEKOLAH

Suparno
IKIP Malang

1. Pendahuluan

Dalam konteks pendidikan dan pembangunan bangsa, mata pelajaran Bahasa Indonesia memiliki fungsi yang strategis. Ada lima fungsi penting mata pelajaran Bahasa Indonesia, yakni sebagai (1) sarana pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa, (2) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam rangka pelestarian dan pengembangan budaya nasional, (3) sarana peningkatan pengetahuan dan keterampilan berbahasa Indonesia untuk meraih dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, (4) sarana penyebarluasan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta (5) sarana pengembangan penalaran (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993a, 1993b, 1993c).

Berdasarkan fungsi mata pelajaran Bahasa Indonesia, pengajaran bahasa Indonesia memiliki fungsi yang strategis berkaitan dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Pengajaran bahasa Indonesia di sekolah merupakan jalur formal upaya pembinaan bahasa Indonesia. Melalui jalur itulah, pembinaan bahasa Indonesia dapat dilaksanakan secara programatis. Penggunaan jalur itu sangat tepat karena sasaran pembinaan ini adalah siswa yang masih dalam proses belajar, termasuk masih dalam proses belajar bahasa Indonesia. Dengan pengajaran bahasa Indonesia itu upaya menciptakan insan Indonesia yang mampu berbahasa Indonesia yang baik dan benar dapat dilaksanakan sejak dini.

Strategisnya pengajaran bahasa Indonesia dapat dilihat pula dalam konteks upaya peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Bahasa Indonesia bukan sekadar alat komunikasi masyarakat Indonesia, melainkan juga sebagai alat berpikir dan bernalar. Kualitas penguasaan bahasa Indonesia merupakan salah satu faktor penentu kualitas insan Indonesia. Pada gilirannya, kualitas penguasaan bahasa Indonesia itu berdampak luas pada pembangunan bangsa karena bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi pembangunan.

Pengajaran bahasa Indonesia memiliki fungsi strategis dilihat dari segi fungsi bahasa Indonesia sebagai alat pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Fungsi itu dapat terwujud dengan baik jika bahasa Indonesia dikuasai oleh masyarakat ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengajaran bahasa Indonesia.

Sebagai salah satu program pendidikan, pengajaran bahasa Indonesia senantiasa mengalami pembaruan bersama-sama dengan pembaruan bidang pendidikan yang lain. Pembaruan yang sedang dilaksanakan adalah pengajaran bahasa Indonesia berdasarkan Kurikulum 1994. Hal-hal yang dipaparkan berikut berada dalam konteks implementasi Kurikulum 1994 mata pelajaran di sekolah dengan porsi besar SLTP dan SMU. Isi uraian mencakup butir-butir berikut: (1) profil bahasa Indonesia dalam Kurikulum 1994, (2) jumlah siswa per kelas dan implikasinya pada proses belajar-mengajar, (3)

kondisi guru Bahasa Indonesia, (4) buku ajar, dan (5) evaluasi dan prestasi hasil belajar. Hal-hal yang bersifat kritik difungsikan semata-mata untuk menampakkan kondisi yang terjadi dalam upaya memahami mutu pengajaran bahasa Indonesia, tidak untuk memberikan kualifikasi mutu dan tidak untuk menyalahkan pihak tertentu, khususnya para guru.

2. Profil Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 1994

Bahasa Indonesia dalam pengajaran berkedudukan sebagai objek atau substansi yang diajarkan. Sebagai substansi yang diajarkan, bahasa Indonesia itu tampak dalam kurikulum, yang secara khusus tampak pada Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Berdasarkan isi GBPP itu, Bahasa Indonesia dalam Kurikulum 1994 diprofilkan sebagai berikut.

- a. Bahasa Indonesia diberi pengertian sebagai sarana komunikasi, berpikir dan bernalar. Bahasa Indonesia diberi pengertian sosial (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995:4) atau alat komunikasi masyarakat.
- b. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi berarti penggunaan unsur-unsur bahasa dalam kondisi sosial (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1955:4).
- c. Penggunaan bahasa Indonesia yang ditargetkan dari pengajaran bahasa Indonesia adalah penggunaan dalam aspek keterampilan reseptif (menyimak dan membaca) dan aspek keterampilan produktif (berbicara dan menulis).
- d. Bertolak dari fungsi bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, lingkup pembelajaran bahasa Indonesia adalah (1) penguasaan kebahasaan, (2) kemampuan memahami bahasa Indonesia, (3) kemampuan menggunakan bahasa Indonesia, dan (4) kemampuan mengapresiasi karya sastra Indonesia.
- e. Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tentang suatu tema berunsur struktur dan kosakata dalam konteks wacana dan tema tertentu. Unsur-unsur itu dibinakan kepada siswa. Oleh karena itu, peta pengembangan kosakata, peta struktur, dan peta tema dilampirkan dalam GBPP sebagai bagian tak terpisahkan dari substansi alat komunikasi bahasa Indonesia. Isi peta itu dipertimbangkan dapat dipelajari siswa secara integratif dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Di samping dicantumkan kata-kata akar, pada peta kosakata dicantumkan juga kata-kata bentukan.

3. Jumlah Siswa Per Kelas dan Implikasinya pada Pengelolaan Kelas

Pada umumnya jumlah siswa per kelas tergolong besar. Hal itu terjadi pada semua jenjang pendidikan. Pada sekolah dasar ditemukan kenyataan bahwa jumlah siswa per kelas rata-rata 35 orang pada sekolah favorit dan 30 siswa pada sekolah kurang/tidak favorit. Kondisi demikian itu terjadi di kota ataupun di daerah.

Dari hasil survei Suparno *et al.* (1997) pada 16 sekolah menengah lanjutan pertama diperoleh catatan bahwa jumlah siswa per kelas di atas 40 siswa. Bahkan, ada sekolah yang jumlah siswa per kelasnya lebih dari 50 orang. Hanya ada satu sekolah terencil yang siswanya kurang dari 40 siswa. Di sekolah itu rata-rata jumlah siswa

per kelas pada tahun 1996 adalah 32 orang. Kondisi yang tidak jauh berbeda terdapat juga pada jenjang sekolah menengah umum. Di sebuah sekolah favorit di Malang, misalnya, jumlah siswa per kelas rata-rata di atas 45 orang.

Besarnya jumlah siswa per kelas tersebut sangat berpengaruh pada pengelolaan kelas mata pelajaran Bahasa Indonesia. Hal yang terjadi adalah kesulitan mengelola kelas pembelajaran keterampilan berbahasa, sebagaimana diungkapkan oleh 50 guru responden yang sedang mengikuti Program S1 Penyetaraan Pendidikan Bahasa Indonesia di IKIP Malang dan 39 guru SLTP tempat survei nasional Suparno *et al.* (1997). Kesulitan-kesulitan teknik pembelajaran kemahiran yang terjadi adalah sebagai berikut.

- a. Pembelajaran keterampilan berbahasa reseptif secara individual terlaksana dengan baik pada tahap dengar dan baca. Pada tahap itu siswa secara individual melakukan aktivitas mendengarkan dan membaca dalam waktu tertentu yang diprogramkan guru. Akan tetapi, pada tahap pascadengar dan pascabaca pelacakan kualitas hasil mendengarkan dan membaca secara individual dalam proses pembelajaran di kelas, dalam rangka pembentukan dan peningkatan kualitas hasil mendengarkan dan membaca tidak dapat dilaksanakan secara intensif. Besarnya jumlah siswa menyulitkan guru untuk melacak hasil mendengarkan dan membaca itu secara individual pada jam pelajaran yang tersedia. Dengan kata lain, pembelajaran keterampilan reseptif pada tahap pascadengar dan pascabaca secara individual tidak dapat dilaksanakan guru secara intensif. Pemberian giliran untuk mengungkapkan hasil mendengarkan dan membaca di kelas hanya menjangkau sebagian siswa. Keterbatasan itu lebih tidak menguntungkan lagi jika diukur dari kemahiran reseptif yang seharusnya dibinakan kepada siswa dengan fokus-fokus khusus pada setiap pembelajaran kemahiran itu.

Salah satu upaya yang dilakukan guru adalah memeriksa hasil kerja siswa pada lembar tugas yang terdapat pada LKS. Ada kondisi penggunaan LKS yang perlu dikomentari. Pertama, penggunaan LKS itu lebih dominan pada aspek pembelajaran membaca dan menulis. Kedua, penggunaan LKS sebagai instrumen pembelajaran kurang mendapatkan penekanan karena balikan yang diberikan oleh guru adalah skor (nilai), bukan catatan atau komentar guru terhadap hasil tugas.

- b. Pembelajaran kemahiran berbahasa produktif lebih tidak intensif lagi. Dengan jumlah siswa yang besar giliran berlatih yang diterima siswa sangat terbatas. Kenyataan-kenyataan berikut menampakkan lebih rumitnya pengelolaan kelas pembelajaran bahasa produktif. Aktivitas jumlah siswa di kelas ditentukan oleh faktor kemampuan, keberanian, dan kemauan yang berbeda-beda. Pada umumnya, jumlah siswa yang aktif lebih sedikit daripada jumlah siswa yang kurang aktif.

Sebagai akibatnya, giliran berlatih di kelas cenderung didominasi oleh siswa aktif yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang kurang/tidak aktif. Kondisi itu berlangsung terus-menerus selama guru yang mengikuti dinamika kelas tidak menciptakan dinamika kelas. Siswa yang aktif untuk melakukan pelatihan (ditandai dengan angkat tangan ketika ada tawaran berlatih dari guru) adalah siswa yang mendapatkan kesempatan ini. Makin aktif seorang individu untuk mendapatkan kesempatan berlatih, makin besar dan sering mendapatkan peluang untuk berlatih.

Dari hasil survei Suparno *et al.* (1997) tercatat bahwa jumlah guru yang memiliki teknik mengajar mengikuti dinamika kelas jauh lebih besar daripada yang menciptakan dinamika kelas. Bahkan, ada guru yang memberikan kesempatan kepada siswa yang duduk di bagian depan.

- c. Kondisi kelas dengan jumlah siswa yang besar menyulitkan pengendalian kegaduhan. Semakin besar jumlah siswa dalam satu kelas, semakin besar pula kesulitan pengendalian yang dilakukan guru. Kondisi demikian itu sering terjadi pada saat salah seorang siswa mendapatkan kesempatan berlatih. Dua akibat dapat ditimbulkan. Pertama, siswa yang sedang berlatih terganggu konsentrasinya sehingga intensitas aktivitas belatirahnya berkurang. Hal itu akan berakibat pada berkurangnya kualitas hasil belajar. Kedua, kegaduhan itu menyebabkan perolehan pengalaman belajar dari teman berkurang. Ketika seorang siswa melakukan kegiatan belajar di kelas, siswa yang lain seharusnya dapat memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar dari teman yang sedang belajar.

4. Kondisi Guru Bahasa Indonesia

Di SD berlaku guru kelas. Pada umumnya, guru SD sudah memenuhi persyaratan kualifikasi. Sebelum diberlakukan persyaratan lulusan Program D2 Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD), persyaratan kualifikasi yang berlaku bagi guru SD adalah lulusan SPG. Dengan peningkatan persyaratan kualifikasi guru SD, persyaratan yang berlaku adalah lulusan D2 PGSD. Dari persyaratan kualifikasi itu, sebenarnya semua guru di SD sudah memenuhi persyaratan kualifikasi. Upaya peningkatan kualifikasi dari lulusan SPG ke lulusan Program D2 PGSD dilakukan dengan Program Penyetaraan D2 PGSD oleh Universitas Terbuka atau Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan. Di samping itu, ada upaya peningkatan kualifikasi atas usaha guru ke Program S1. Sekarang sudah banyak guru SD di kota dan daerah tertentu yang lulusan Program S1.

Di SLTP dan SMU/SMK berlaku guru mata pelajaran atau guru bidang studi. Dari hasil survei Suparno *et al.* (1997) pada 16 SLTP di empat provinsi (Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Timur) terungkap bahwa kualifikasi sebagian besar guru SLTP sudah memadai. Dari 39 guru yang menjadi responden survei, dapat dikemukakan kondisi kualifikasi berikut: 1 orang (2,56%) berpendidikan SGA, 7 orang (17,94%) berpendidikan PGSLP, 3 orang (7,69%) berpendidikan Program D1, 9 orang (23%) berpendidikan Progrm D2, 5 orang (12,82%) berpendidikan Program D3, dan 14 orang (35,89%) berpendidikan Program S1. Dari survei itu ditemukan kasus, yakni seorang guru yang berlatar belakang pendidikan Biologi dan seorang guru yang berlatar belakang pendidikan Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan mengajarkan bahasa Indonesia karena ada kekurangan guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di sekolah tempat mereka mengajar.

Kondisi kualifikasi guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMU sangat menggembirakan. Berdasarkan informasi dari tujuh SMU Negeri di Jawa Timur (tiga SMU di Kodya Malang, 1 SMU di Probolinggo, 1 SMU di Tulungagung, 1 SMU di Trenggalek, dan 1 SMU di Pare) diperoleh informasi bahwa semua guru mata pela-

jaran Bahasa Indonesia adalah lulusan Program S1. Hal itu tidak berarti bahwa semua guru SMU sudah berkualifikasi S1. Sekarang ini masih ada guru SLTP dan SMU yang mengikuti Program S1 Penyetaraan Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK.

Upaya peningkatan kualifikasi guru senantiasa dilakukan. Program-program penyetaraan dilaksanakan dalam rangka peningkatan kualifikasi tersebut. Target program penyetaraan itu adalah terpenuhinya persyaratan kualifikasi yang berdampak pada kinerja guru dalam rangka meningkatkan prestasi hasil belajar.

Upaya peningkatan kemampuan guru tidak cukup dengan peningkatan kualifikasi. Di samping peningkatan kualifikasi, juga ada upaya peningkatan kemampuan guru dengan penataran dan pelatihan programatis. Salah satu penataran dan pelatihan itu adalah Program Pemantapan Kerja Guru (PKG) atau Sistem Pemantapan Kerja Guru (SPKG) yang masih terlaksana sampai sekarang. Dari hasil evaluasi Program PKG/SPKG Mata Pelajaran Bahasa Indonesia yang dilaporkan oleh Hasan dan Suparno (1995) terungkap bahwa Program PKG/SPKG tersebut telah berdampak positif pada guru, yakni meningkatnya kemampuan profesional guru dan meningkatnya prestasi belajar siswa berdasarkan evaluasi guru. Akan tetapi, dampak positif tersebut ternyata belum tampak pada prestasi hasil ebtanas.

Walaupun kualifikasi sudah terpenuhi, masih ada aspek-aspek tertentu dari kinerja guru yang perlu mendapatkan perhatian. Dari penelitian Sukino (1997) terungkap bahwa masih ada guru yang kurang paham dengan pendekatan integratif. Salah satu akibatnya adalah kurang mampunya guru dalam mengelola kelas pembelajaran bahasa Indonesia. Informasi itu sejalan dengan informasi yang dikemukakan Suparno *et al.* (1997) berikut.

- a. Masih cukup banyak guru yang diobservasi yang secara dominan memberikan penjelasan tentang bahasa dan penggunaan bahasa, bukan pelatihan keterampilan berbahasa secara integratif.
- b. Sebagian besar guru belum/tidak memiliki penguasaan yang memadai tentang taksonomi kemahiran berbahasa Indonesia. Hal itu berdampak pada pembelajaran kemahiran berbahasa Indonesia dan pada evaluasi hasil belajar. Pembentukan keterampilan secara aspektual terinci tidak mendapatkan fokus atau penekanan.
- c. Dalam pengelolaan kelas pembelajaran keterampilan berbahasa Indonesia, sebagaimana terungkap di depan, guru yang mengikuti dinamika kelas lebih banyak daripada guru yang menciptakan dinamika kelas, khususnya pada upaya guru dalam memberikan giliran pembelajaran individual.
- d. Dalam mengajarkan keterampilan menyimak, semua guru memanfaatkan teks wacana dalam buku ajar. Sebagian kecil membuat variasi dengan teks dari sumber lain. Penggunaan teks dari buku ajar menyebabkan motivasi untuk berlatih menyimak rendah karena teks bisa jadi sudah dibaca sebelumnya oleh siswa. Satu catatan perlu ditambahkan bahwa perhatian guru terhadap menyimak tidak sebesar perhatiannya pada aspek kemahiran berbahasa yang lain dengan alasan bahwa kemahiran menyimak itu tidak diebtanakan. Bahkan, di beberapa sekolah tempat survei, pembelajaran keterampilan menyimak sudah tidak dilaksanakan di kelas 3.
- e. Masih banyak guru yang kebakuan bahasanya kurang ideal. Di samping ada war-

na dialek yang menonjol, kesalahan berbahasa juga sering dilakukan oleh guru. Dalam kondisi demikian, persyaratan guru sebagai model penutur bahasa Indonesia, yang diharapkan menjadi teladan bagi siswa (Djojonegoro, 1993) tidak terpenuhi. Berdasarkan kenyataan itu, perlu dilacak pula kebakuan bahasa Indonesia guru mata pelajaran lain.

Dengan target menerampilkannya siswa, tugas guru Bahasa Indonesia memang berat. Banyaknya jumlah siswa (periksa uraian pada butir berikut) dan banyaknya beban jam mengajar guru (pada umumnya 20 jam ke atas per minggu) mengakibatkan tugas-tugas pembelajaran individual tidak terjangkau oleh energi guru yang terbatas. Makin besar dan banyak beban guru, makin kecil peluang guru untuk memberikan pelatihan individual.

Berdasarkan keterbatasan kemampuan guru, Direktorat Pendidikan Menengah Umum telah menyediakan perangkat pembelajaran hasil kerja Tim Pengembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di SLTP dan SMU (Syafi'ie, 1996). Wujud perangkat pembelajaran hasil kerja tim itu adalah (1) Analisis Materi Pelajaran (AMP), (2) Program Satuan Pelajaran (PSP), dan (3) Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Perangkat pembelajaran itu berfungsi ganda: sebagai perangkat yang diterapkan langsung oleh guru dan sebagai model yang digunakan guru untuk menyusun perangkat pembelajaran. Berdasarkan informasi terakhir (tanggal 6 September 1998), perangkat pembelajaran itu sudah tersebar sampai di daerah terpencil, misalnya di Bengkalis.

5. Buku Ajar: Kondisi Kuantitatif dan Implikasinya pada Proses Belajar-Mengajar

Buku ajar dapat dipilah atas dua kategori, yakni buku paket dan buku pelengkap. Buku paket mengacu pada buku ajar yang diwajibkan penggunaannya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan pada mata pelajaran tertentu dalam rangka implementasi Kurikulum 1994. Buku paket itu diterbitkan oleh lembaga resmi pemerintah, seperti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, atau oleh penerbit yang ditunjuk oleh lembaga pemerintah, seperti PN Balai Pustaka. Buku pelengkap dimaksudkan sebagai pelengkap buku paket. Buku pelengkap lazim diterbitkan oleh lembaga-lembaga penerbit swasta. Di samping itu, masih terdapat bahan ajar yang lazim dikemas dengan nama Lembar Kegiatan Siswa (LKS).

Berdasarkan fakta di lapangan, ditemukan informasi kuantitatif serta penggunaan buku paket dan LKS sebagai berikut.

- a. Dibandingkan dengan jumlah siswa, jumlah buku paket tidak memadai. Dari hasil survei Suparno *et al.* (1997) terungkap bahwa satu buku paket digunakan oleh dua atau tiga siswa dalam satu kali pembelajaran. Hal itu berarti bahwa perbandingan antara jumlah buku paket dan jumlah siswa dalam kelas adalah 1 : 2 atau 1 : 3. Jika dalam satu sekolah ada 4 kelas saja, perbandingan itu berubah menjadi 1 : 8 atau 1 : 12. Perbandingan 1 : 8 berarti peluang untuk meminjam buku adalah satu kali (baca satu hari) dalam delapan hari.

Kondisi tersebut pernah pula terungkap dalam acara "Nuansa Pagi", tanggal 15 Juli 1998, RCTI. Pada acara tersebut diungkapkan bahwa perbandingan jumlah

buku dan siswa di Lampung adalah 1 : 6 sampai dengan 1 : 10. Pada acara tersebut ditambahkan pula informasi bahwa buku bahan pelengkap semua mata pelajaran menghilang dari pasaran. Kondisi tersebut tentu berdampak tidak menguntungkan bagi proses belajar-mengajar, khususnya bagi siswa. Proses belajar-mengajar tidak dapat berlangsung lancar karena kesiapan dan kenyamanan siswa dalam menggunakan buku paket terganggu. Karakteristik individu dalam memanfaatkan buku di kelas pembelajaran bahasa Indonesia tidak dapat terakomodasi dengan baik. Di samping itu, siswa jarang mendapatkan peluang untuk belajar sendiri dengan fasilitas pinjaman buku. Padahal, pengulangan, penguatan, dan pengayaan pengalaman dengan belajar sendiri merupakan strategi belajar yang tepat. Besarnya peluang mendapatkan pinjaman itu bergantung kepada perbandingan jumlah buku dan jumlah siswa.

- b. Sejauh buku paket digunakan, ada kecenderungan bahwa proses belajar-mengajar yang dilaksanakan guru di kelas mengikuti skenario pembelajaran dalam buku paket. Hal itu tampak dari materi dan langkah-langkah kegiatan yang secara urut mengikuti isi buku paket. Materi dan variasi kegiatan yang keluar dari isi buku paket beserta skenario pembelajarannya relatif kecil. Kecenderungan itu memiliki sisi baik dan buruk.

Bagi pencapaian target materi buku paket kecenderungan tersebut tidak berisiko apa-apa. Perolehan pengalaman belajar sudah cukup dengan materi dan kegiatan belajar-mengajar yang dikemukakan dalam buku paket.

Bagi upaya variasi kecenderungan tersebut tidak menguntungkan karena hal-hal berikut: (1) situasi pembelajaran kurang dinamis dan variatif sesuai dengan situasi kelas, (2) prinsip pembelajaran yang mengikuti kebutuhan siswa tidak sepenuhnya terpenuhi, dan (3) buku paket belum tentu memenuhi semua kebutuhan siswa diukur dari lingkungannya. Ada buku pelengkap yang disarankan, bahkan diwajibkan di sekolah tertentu, berlaku di suatu provinsi, tetapi kandungan informasi dalam buku itu tidak akrab dengan budaya dan alam di provinsi pengguna buku tersebut. Jika keadaan diungkapkan harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa, pengayaan oleh guru sangat diperlukan. Di samping itu, tantangan belajar bagi siswa juga tidak tampak dominan. Kebergantungan kepada buku ajar itu juga berdampak negatif pada pemenuhan target kurikulum jika ada kekurangan pada buku ajar. Dalam salah satu buku ajar yang tampaknya diciptakan dalam situasi krisis ekonomi dan diberlakukan di suatu kotamadya terungkap tidak adanya materi dan saran kegiatan menyimak. Kebergantungan pada buku tersebut berakibat pada tidak adanya pembelajaran menyimak. Padahal, keterampilan menyimak merupakan salah satu target kurikulum.

- c. Di samping terikat pada skenario buku paket, pembelajaran Bahasa Indonesia juga bergantung pada LKS. LKS itu lazim digunakan sebagai pemandu teknis kegiatan belajar yang dilakukan oleh siswa dengan buku paket. Hal itu memperkokoh kenyataan bahwa pembelajaran yang dilakukan guru cenderung bergantung kepada pembelajaran yang diskenarioikan dalam buku paket. Tentang penggunaan LKS sebagai media pembelajaran, ada catatan penting yang perlu diungkapkan. Peng-

gunaan LKS sebagai media pembelajaran tidak secara ketat dimanfaatkan sebagai media proses belajar. Hal itu tampak pada minimnya balikan yang diberikan oleh guru pada LKS yang telah dikerjakan siswa. Pada umumnya, balikan yang diberikan guru pada LKS yang telah dikerjakan siswa adalah skor (nilai). Akan tetapi, perlu segera dimaklumi beratnya tugas guru memberikan balikan terinci, yang berupa catatan pada LKS. Dengan beban 24 jam pelajaran, misalnya, guru kelas 1 SLTP harus mengajar pada empat kelas. Dengan rata-rata jumlah siswa per kelas 40 saja, guru memiliki beban memeriksa 160 hasil kerja siswa setiap kali memberikan tugas dengan LKS. Jadi, kegiatan memberikan balikan yang terinci kepada siswa pada LKS sulit diharapkan karena di luar batas kemampuan guru. Satu hal yang dapat dikerjakan guru adalah memberikan catatan secara purposif pada tugas tertentu kepada siswa tertentu dengan harapan balikan demikian itu dapat dimanfaatkan siswa yang bersangkutan dalam mengerjakan tugas-tugas yang lain.

6. Evaluasi dan Prestasi Hasil Belajar

Sesuai dengan pendekatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar yang diberlakukan adalah evaluasi keterampilan menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Dengan menyebutkan evaluasi komunikatif, Syafi'ie (1993) mengajukan 6 kriteria tes dalam evaluasi komunikatif itu. Tiga kriteria yang sangat bergayut dengan pendekatan komunikatif adalah (1) lebih mengutamakan kompetensi komunikatif daripada kompetensi gramatikal, (2) mampu mempertemukan kebutuhan bahasa, dan (3) mampu melaksanakan pengtesan performansi dalam situasi komunikasi.

Agar tugas-tugas evaluasi dapat dilaksanakan guru dengan baik, Direktorat Pendidikan Menengah Umum, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan petunjuk bagi guru yang berjudul *Petunjuk Pelaksanaan Penilaian*. Buku tersebut berisi petunjuk yang bersifat umum, yakni petunjuk yang berlaku untuk semua mata pelajaran.

Ada kesulitan dan kelemahan dalam evaluasi keterampilan berbahasa Indonesia. Pada umumnya, sebagaimana dikemukakan oleh 33 orang (66%) guru yang sedang mengikuti Program Penyetaraan S1 Pendidikan Bahasa Indonesia IKIP Malang, guru mengalami kesulitan dalam mengevaluasi keterampilan berbahasa Indonesia, terutama keterampilan menyimak dan berbicara. Dalam laporan survei nasional yang dilakukan Suparno *et al.* 1997 terungkap hal-hal berikut.

- a. Cara yang digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar bervariasi: 36,66% responden menggunakan cara tes, 33,33% responden menggunakan cara pemberian tugas, 17,77% responden memberikan catatan praktik berbahasa Indonesia, dan 11,11% responden menggunakan cara lain-lain.
- b. Belum tentu setiap aspek keterampilan berbahasa dievaluasi oleh responden secara khusus: 20,86% responden melakukan evaluasi keterampilan menyimak, 15,65% responden melakukan evaluasi keterampilan berbicara, 16,52% responden melakukan evaluasi keterampilan membaca, dan 18,26% responden melakukan evaluasi keterampilan menulis. Selebihnya (28,71%) tidak melaksanakan evaluasi setiap aspek keterampilan berbahasa.
- c. Para guru tidak mengetahui kriteria yang bersifat teknis dan terinci untuk meng-

evaluasi setiap aspek keterampilan berbahasa.

Kesulitan tersebut dapat diatasi dengan penerbitan petunjuk teknis evaluasi keterampilan berbahasa Indonesia. Jika dibandingkan dengan penataran, upaya tersebut dipandang lebih praktis dan lebih ekonomis. Jangkauan sasaran secara massal dalam jumlah besar dapat dicapai dalam waktu yang singkat.

Sebagian informasi prestasi hasil belajar siswa diungkapkan di sini. Suparno *et al.* (1997) mengungkapkan informasi belum tercapainya target ideal prestasi hasil belajar siswa SLTP, sebagaimana terinci berikut ini (pada nomor (1), (2), dan (3) berlaku 5 rentangan kualifikasi, sedangkan pada (4) dan (5) berlaku 3 rentangan kualifikasi).

- 1) Keterampilan menyimak: sangat kurang (22,85%), kurang (42,89%), sedang (19,36%), baik (0,55%), sangat baik (13,96%).
- 2) Keterampilan berbicara: sangat kurang (0,63%), kurang (18,35%), sedang (44,93%), baik (33,54%), dan sangat baik (2,53%).
- 3) Keterampilan membaca: sangat kurang (38,55%), kurang (41,5%), sedang (16,6%), baik (3,4%), sangat baik (0%).
- 4) Keterampilan menyusun paragraf: kurang (60,78%), sedang (19,61%), baik (19,61%).
- 5) Keterampilan mengembangkan gagasan: kurang (50,26%), sedang (44,48%), baik (5,26%).

Informasi tersebut didasarkan pada hasil tes. Berdasarkan pengakuan 50 guru SLTP dan SMU yang sedang mengikuti Program Penyetaraan SI di IKIP Malang, terungkap kualifikasi keterampilan siswa dalam berbahasa Indonesia sebagai berikut (persentase mengacu kepada jumlah guru): sangat kurang (16%), kurang (14%), sedang/cukup (26%), baik (2%), dan sangat baik (0%).

7. Simpulan

Berdasarkan kondisi guru, siswa, buku ajar, dan evaluasi hasil belajar dapat dikemukakan simpulan-simpulan berikut.

- a. Dengan target keterampilan berbahasa Indonesia, baik reseptif maupun produktif, tugas guru bahasa Indonesia adalah tugas yang berat. Persyaratan kualifikasi guru sudah memadai, tetapi kemampuan melaksanakan tugas pembelajaran dan evaluasi dalam rangka peningkatan prestasi hasil belajar masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan pertimbangan penghematan, upaya untuk peningkatan kemampuan guru dapat dilakukan dengan menerbitkan pedoman teknis pembelajaran dan pedoman teknis evaluasi khusus mata pelajaran Bahasa Indonesia. Di samping itu, penataran model PKG masih dapat diteruskan dengan orientasi kebutuhan nyata para guru.
- b. Jumlah siswa per kelas pada umumnya besar (di atas 40 orang). Hal itu berdampak negatif pada proses belajar-mengajar dan menambah beratnya tugas guru dalam pengelolaan kelas pembelajaran. Pembelajaran individual tidak dapat dilaksanakan secara intensif. Dalam rangka mengaktifkan pelatihan, pembelajaran di luar kelas secara terprogram seyogianya ditingkatkan.
- c. Jumlah buku ajar yang tersedia di sekolah tidak seimbang dengan jumlah siswa.

Sebagai akibatnya, pelaksanaan proses belajar-mengajar di kelas kurang intensif. Di samping itu, siswa tidak memiliki peluang yang cukup untuk belajar sendiri. Dalam kondisi buku ajar terbatas, dapat diwujudkan buku ajar sederhana yang sekaligus sudah berisi LKS sebagai buku ajar pelengkap.

- d. Pelatihan yang terfokus pada aspek keterampilan berbahasa Indonesia, khususnya menyimak dan berbicara, belum terlaksana dengan baik. Hal itu terjadi karena kurangnya pengetahuan taksonomi keterampilan berbahasa pada guru. Sebagai akibatnya, evaluasi yang berfokus pada setiap aspek keterampilan berbahasa juga tidak dapat dilaksanakan. Pedoman teknis pembelajaran bahasa Indonesia beserta pedoman evaluasinya dipandang sangat mendesak pengadaannya.

Daftar Pustaka

- Davis, Evelyn C. 1989. *An Integrated Skills Approach: Developing Listening Proficiency and Improving Speaking Ability*. Ujung Pandang: Unhas-SIL Cooperative Program.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993a. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP)*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1993b. *Kurikulum Pendidikan Dasar: Garis-garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1993c. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU): Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1994. *Kurikulum Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SLTP): Petunjuk Pelaksanaan Penilaian*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1996a. *Kurikulum Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP): Petunjuk Teknis Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- , 1996b. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU): Petunjuk Pelaksanaan Proses Belajar-Mengajar*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Djojonegoro, Wardiman. 1993. "Peran Bahasa Indonesia dalam Penyelenggaraan Pendidikan." Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta pada tanggal 28 Oktober--2 November 1993.
- Hasan, M. Zaini dan Suparno. 1995. *Laporan Hasil Evaluasi PKG/SPKG Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Joni, T. Raka. 1990. "Pembentukan Kemahirwacanaan: Tantangan bagi Pendidikan Dasar Menyongsong Abad Informasi." Makalah dalam Seminar Nasional Pengajaran Bahasa dan Sastra di Indonesia di Malang pada tanggal 5--6 November 1990.
- Sukino. 1997. "Implementasi Pendekatan Integratif dalam Pembelajaran Bahasa dan

- Sastra Indonesia di SMU Negeri 3 Kodya Malang." Malang: Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Malang, Tesis Program Pascasarjana IKIP Malang.
- Suparno *et al.* 1997. *Survei Diagnostik Mata Pelajaran Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sutarno. 1993. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah." Makalah dalam Kongres Bahasa Indonesia VI di Jakarta pada tanggal 28 Oktober--2 November 1993.
- Syafi'ie, Imam. 1993. "Pembaruan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dalam Kurikulum 1994 di SD, SMTP, dan SMTA." Makalah Seminar Kegiatan Bulan Bahasa, Depdikbud Kabupaten Nganjuk, pada tanggal 6 November.
- . 1996. "Usulan Penelitian Pengembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di SMP dan SMA." Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D5
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Mutu Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah
Penyaji	: Suparno
Pemandu	: Jos Daniel Parera
Pencatat	: a. Erlis Nur Mujiningsih b. I Wayan Sudana
Peserta	: 85 orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** Paris Kusnadi, SMUN I Pangkajene, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan

a. **Pertanyaan:**

Bagaimana tanggapan pemakalah terhadap masalah yang dikembangkan? Pembelajaran dalam GBPP saat ini terlalu mengglobal sehingga banyak kesulitan yang dihadapi guru dalam penerapan yang sistematis. Padahal, semestinya pembelajaran dalam GBPP dirumuskan sehingga ada kesamaan untuk mencapai tujuan pengajaran.

b. **Jawaban:**

Saya sangat mendukung pemikiran bahwa guru merupakan faktor yang sangat menentukan. Sekarang yang kita hadapi adalah keadaan yang dilematis. Dari pelacakan saya ke daerah, banyak guru yang tidak membaca GBPP. Mereka benar-benar tidak memiliki *skill*/skemata dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu. Mereka hanya menganut apa yang ada dalam buku ajar dan lembar kerja siswa (LKS). Skenario pembelajaran lebih banyak ditentukan oleh buku ajar dan LKS. Dalam menggunakan LKS, guru hanya memberikan bahan. Bagaimana pekerjaan itu dilakukan tidak ada catatan. Dapat dibayangkan jika seorang guru bahasa Indonesia mengajar 4 kelas, dengan 40 siswa per kelas, jumlahnya sudah 160 siswa. Jika dalam 2 hari saja diberikan tugas, apakah cukup energinya untuk melihat itu. Jadi, memang dilematis. Oleh sebab itu, perlu ada pemikiran yang sifatnya programatis dalam memecahkan masalah dan di pihak lain mencari alternatif dalam memecahkan masalah, yaitu mengurangi beban guru. LKS dapat digunakan, tetapi masukan diberikan dengan teknik purposif, artinya dengan tujuan tertentu, yaitu menunjukkan kelemahan. Hal itu dapat dilaksanakan. Di sekolah yang kaya, pengajaran bahasa Indonesia dapat diberikan lewat sistem komputer. Siapa tahu ada pengajaran ejaan dengan sistem komputer sehingga siswa dapat membaca tulisannya salah atau benar melalui program pemeriksaan ejaan.

2. Penanya: Rozali, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

a. Pertanyaan:

Bagaimana mengantisipasi mutu guru dalam mengajarkan bahasa di sekolah? Apakah memungkinkan apabila Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) memberikan penyuluhan untuk meningkatkan mutu guru bahasa Indonesia? Ada pernyataan bahwa bahasa Indonesia harus diajarkan oleh orang yang berlatar belakang bahasa Indonesia.

b. Jawaban:

Kondisi ini sangat mengganggu kualitas guru. Ada yang akan saya singgung, tetapi sensitif, yakni pendidikan perguruan tinggi swasta. Kualitas pendidikan tinggi swasta tidak sejalan dengan kualitas yang ditargetkan pendidikan tinggi negeri. Perguruan tinggi swasta sangat bangga apabila memasang pengumuman lulus ujian negara 80%--90%. Hal ini juga berpengaruh pada produk guru. Apabila dilacak lebih lanjut, masukan calon guru bahasa Indonesia dan guru SD sebenarnya adalah benih-benih SDM kelas ke-1 atau ke-5. Mengapa demikian? Sekarang semua dosen dapat melihat bagaimana beratnya kita membina kemampuan akademik mahasiswa kita di IKIP jika dibandingkan tahun 1970. Makin maju zamannya ternyata bibit yang akan menjadi guru bahasa Indonesia makin tersingkir, makin mundur.

3. Penanya: Heriyanto, SD Bojong, Yogyakarta

a. Pertanyaan:

Ada kelemahan mendasar pada sistem evaluasi bahasa Indonesia sehingga keempat aspek kemampuan berbahasa itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, di samping adanya kelemahan pada guru, yaitu adanya sistem pengujian dengan ujian negara. Di dalam ebtanas yang diujikan hanya aspek pengetahuan dan sedikit kemampuan menulis. Bagaimana kita dapat menguji kemampuan menyimak dan bagaimana kita menguji kemampuan berbicara apabila sistem evaluasinya semacam itu? Hal itulah yang perlu dibenahi saat ini.

b. Jawaban:

Ebtanas menjadi hambatan. Di Kalimantan, misalnya, tidak ada pembelajaran menyimak karena adanya alasan guru bahwa menyimak tidak akan diujikan. Apabila saya melihat tes tertulis, sebenarnya hasilnya sudah memadai.

4. Penanya: Etiswari, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Saya kemukakan ilustrasi di daerah tingkat II di Sulawesi Selatan. Ada pernyataan bahwa anak SD sangat minim pengetahuannya tentang bahasa Indonesia sehingga untuk mengerti soal ujian saja, apalagi soal ebtanas, sangat sulit, apalagi untuk mengerjakannya. Hal ini menjadikan kualitas pendidikan di daerah tingkat II, khususnya, dan Sulawesi Selatan pada umumnya rendah. Ada aspek

tenaga pengajar yang tidak terlalu andal karena bukan spesialisasi bahasa Indonesia, tetapi "main caplok". Jadi, guru hanya mempunyai pengetahuan secara umum bukan pengetahuan spesifik.

Bagaimana klasifikasi mutu siswa berdasarkan evaluasi dan prestasi hasil belajar yang sudah diteliti? Apakah memang klasifikasi itu sudah baik atau memang masih buruk?

b. Jawaban:

Pertanyaan Bu Etiswari mengenai masalah minimnya pengetahuan bahasa anak SD, sebenarnya bukan hanya di Sulawesi Selatan, di Jawa juga masih banyak yang begitu. Ada lulusan SD yang belum mampu berbahasa Indonesia. Bagaimana dia akan mampu belajar? Dia datang terlambat dan di kelas tidur di kolong bangku.

5. Penanya: Sumarsono, STKIP Singaraja

a. Pertanyaan:

Mengapa "penyakit" pengajaran bahasa Indonesia itu bisa terjadi? Saya melihat bahwa penyakit itu sudah terlalu kompleks. Guru SD sudah sekian lama tampaknya terabaikan. Di samping itu, guru SD dianggap sebagai manusia luar biasa oleh pemerintah, sebagai guru kelas dan dituntut menyelesaikan tugas administrasi sekian banyak. Guru SD, buku pegangan, dan kurikulum adalah tiga serangkai. Misalnya, buku pegangan sudah mematok dan mematikan sehingga guru memiliki rutinitas yang tinggi. Mulai dari susunan satuan pelajaran (SP) sampai dengan sistem evaluasinya ada di situ. Menurut survei saya, tampaknya *crash program* diploma yang dimulai tahun 1979 sampai dengan 1985 menjadi bumerang sekarang. Survei membuktikan bahwa mereka tidak pernah membawa rambu-rambu kurikulum. Yang dibaca langsung GBPP-nya, materinya. Jadi, masih materialistis. Di dalam teks tertulis ada "penyakit" EYD, antara *ke* dan *di*, yang makin lama makin jelek. Guru-guru bahasa Indonesia itu dapat mengajarkan menulis, tetapi tidak bisa menulis.

b. Jawaban:

Pertama, secara akademik, setelah saya telusuri, sebagian jawaban saya sudah terungkap pada tayangan tadi bahwa kualifikasi sudah terpenuhi secara formal. Guru sudah berpendidikan S1, D3, atau D2. Namun, kinerja akademiknya dalam melaksanakan tugas belajar-mengajar lemah. Mengapa demikian? Karena barangkali hal itu terjadi pada saat proses pendidikan. Kualifikasi akademiknya tidak mendukung proses itu.

Kedua, saya melihat kelemahan yang sangat mencolok adalah pada guru-guru mata pelajaran Bahasa Indonesia hasil pendidikan *crash program*. Kualifikasi ditingkatkan dengan model penyetaraan yang didanai proyek. Proyek tidak mau rugi. Volume anggaran diukur dengan keluaran dalam jangka tertentu. Pernah saya tidak meluluskan seorang mahasiswa, tetapi saya disalahkan.

Hal ini terjadi karena peranan proyek. Hal ini tidak benar. Jawaban saya, "Silakan dibina, tetapi saya tidak akan mengubah angka tidak lulus menjadi lulus." Bahkan, sekarang ini ada mahasiswa korban sikap akademik saya, termasuk memenuhi pesanan itu. Saat ini saya sedang diteror oleh mahasiswa itu.

PENGEMBANGAN BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA: PENDEKATAN KOMUNIKATIF

Bambang Kaswanti Purwo
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

1. Pengantar

Sekurang-kurangnya ada satu hal yang membuat guru bahasa Inggris atau biologi di sekolah menengah "lebih beruntung" dibandingkan dengan guru bahasa Indonesia. Siswa merasa lebih tertarik dan karena itu dapat lebih bersemangat mengikuti pelajaran yang baru bagi mereka. Mereka menghadapi bahan baru atau sedikit-tidaknya merasa kurang tahu tentang bahan itu sehingga berharap akan dapat memperoleh tambahan pengetahuan atau keterampilan baru dari mata pelajaran itu. Akan tetapi, apa yang dihadapi oleh guru Bahasa Indonesia? Siswa sudah dapat berbahasa Indonesia sebelum mengikuti mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena merasa sudah mampu berbahasa Indonesia, mereka cenderung mengambil sikap "untuk apa belajar bahasa Indonesia?" Akibatnya, pelajaran Bahasa Indonesia mereka jalani tidak dengan sepenuh hati, tidak dengan bersemangat.

Benarkah tidak ada yang dapat mereka peroleh dari mata pelajaran Bahasa Indonesia? Atau, jika mereka merasa sudah dapat berbahasa Indonesia, sudah memadaikah kemampuan itu dalam keperluan hidup mereka? Yang jelas, mereka sudah dapat membaca teks dalam bahasa Indonesia, entah itu dalam buku, surat kabar, atau majalah, dan ini dapat menjadi salah satu alasan mereka mempertanyakan untuk apa belajar membaca di kelas. Akan tetapi, ada satu sisi kekurangan yang pasti akan mereka sadari seandainya mereka disodori pertanyaan ini. "Pernahkah mereka ketinggalan pada waktu membaca teks Bahasa Indonesia, terjemahan dari dialog film, entah di layar lebar ataupun di layar kaca, apalagi apabila teksnya sangat panjang?" Seandainya mereka tahu bahwa kemampuan membaca cepat itu dapat ditingkatkan di sekolah, mereka pasti akan meminati pelajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, sudahkah pelajaran Bahasa Indonesia selama ini dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan seperti itu? Memang belum, tetapi bagaimana mengembangkan bahan ajar bahasa Indonesia supaya dapat memenuhi kebutuhan seperti itu? Segi ini yang akan dipaparkan pada makalah ini, dengan sorotan khusus pada membaca, bagaimana mengembangkan bahan ajar membaca. Bahan ajar yang dikembangkan di sini dilandasi pendekatan komunikatif. Pemaparannya disertai dengan contoh-contoh yang siap saji di depan kelas.

Pengembangan bahan seperti ini tidak hanya akan membuat siswa merasakan relevansi belajar bahasa Indonesia, tetapi juga akan membuat siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Lebih dari itu, bahan ajar hasil kemasannya seperti ini akan membuat siswa asyik melakukan kegiatan berbahasa.

2. Bagaimana Pengertian Pendekatan Komunikatif?

Pengertian "pendekatan komunikatif" lebih mudah dibayangkan apabila itu dikaitkan

dengan pengajaran bahasa lisan. Konteks komunikasi ada beraneka ragam dan itu tergantung pada beberapa hal, misalnya dengan siapa kita berbicara dan pada situasi apa pembicaraan dilakukan. Konteks komunikasi yang beraneka ragam itu menuntut seseorang untuk tidak hanya menguasai satu cara untuk mengungkapkan sesuatu. Misalnya, ada lebih dari satu kemungkinan kalimat pembuka untuk mengajukan pertanyaan, seperti pada contoh (1). Isi yang disampaikan kurang lebih sama, tetapi itu diungkapkan dengan kalimat yang berbeda, tidak hanya dalam hal kata, tetapi juga dalam hal struktur (dalam contoh ini: interogatif dan deklaratif).

- (1) a. Numpang tanya, Pak.
- b. Mau tanya, Pak.
- c. Boleh bertanya, Pak?
- d. Saya mau tanya, Pak.
- e. Saya ada pertanyaan, Pak.

Contoh lain ialah bagaimana menyatakan perintah "mengambil kapur". Perintah itu dapat diutarakan dengan kalimat deklaratif (seperti pada [2a]), atau kalimat interogatif (kalimat [b] dan [c]), atau kalimat perintah (kalimat [d] dan [e]). Kontekslah yang menentukan kalimat mana yang sesuai untuk diucapkan; salah satu pertimbangannya ialah kepada siapa perintah itu disampaikan.

- (2) a. Kapurnya habis.
- b. Ada yang bisa mengambilkan saya kapur?
- c. Ke mana kita bisa meminta kapur lagi?
- d. Tolong carikan kapur.
- e. Ambilkan kapur.

Pengajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif mengaitkan kalimat dengan pemakaiannya dalam konteks. Dalam komunikasi, konteks yang beraneka ragam itu dapat memunculkan bentuk kalimat yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pengajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif diarahkan pada bagaimana dapat membuat siswa mampu menghasilkan pelbagai macam bentuk kalimat. Namun, kegiatan tidak berhenti pada penguasaan bermacam-macam kalimat. Siswa juga dilatih supaya dapat memilih yang mana di antara berbagai kemungkinan kalimat itu yang paling tepat untuk konteks komunikasi tertentu.

Contoh penerapan pendekatan komunikatif dapat dilihat pada pengembangan bahan ajar tata bahasa berikut ini. Pengajaran tata bahasa tidak hanya demi penguasaan kaidah tata bahasa itu sendiri, tidak berhenti pada kemampuan siswa membuat kalimat yang benar secara gramatikal, tetapi sampai pada kemampuan siswa menggunakan kalimat dengan mempertimbangkan konteksnya. Pengajaran tata bahasa dapat dilanjutkan, misalnya, menjadi kegiatan merangkai kalimat, lebih dari sekadar kalimat yang lepas-lepas, tetapi kalimat yang mengait pada suatu paragraf. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengetahui berbagai cara menuliskan kalimat, tetapi juga dapat memilih

di antara berbagai kemungkinan kalimat itu yang manakah yang sesuai untuk dipilih pada waktu menghadapi suatu konteks tertentu. Perhatikanlah contoh pengembangan bahan ajar menyangkut kalimat dengan klausa *yang*. Siswa disodori dua kalimat, lalu diminta untuk merangkaikan kedua kalimat itu sehingga menjadi satu kalimat.

- (3) a. Rumah mungilnya terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan.
b. Rumah mungilnya kelihatan asri dan hijau.

Dengan memakai konjungsi *yang*, kalimat (3a) dan (3b) itu dapat dirangkaikan menjadi satu kalimat. Tidak hanya satu kemungkinan saja yang dapat mereka buat. Siswa di sini menghadapi pilihan: menerapkan konjungsi *yang* pada kalimat (3a) atau pada kalimat (3b). Dengan demikian, ada dua kemungkinan hasil penggabungan yang dapat mereka buat, yakni kalimat (4a) dan (4b).

- (4) a. Rumah mungilnya, yang terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan, kelihatan asri dan hijau.
b. Rumah mungilnya, yang kelihatan asri dan hijau, terletak di Kabupaten Bantul, tak jauh dari desa gerabah Kasongan.

Jika pengembangan bahan ajar berhenti sampai di situ, yaitu melatih siswa terampil menyusun lebih dari satu kemungkinan kalimat, itu belum sampai pada kegiatan "komunikatif". Keterampilan siswa untuk menghasilkan kalimat lebih dari satu kemungkinan itu dapat ditingkatkan lagi ke penguasaan yang lebih tinggi lagi, di atas tataran kalimat, yakni penguasaan mengenai bagaimana kalimat dipakai pada konteks.

Pada tataran kalimat, tidak kelihatan perbedaan antara kalimat (4a) dan (4b). Akan tetapi, jika itu diamati pemakaiannya pada penulisan sebuah paragraf, akan tampak jelas perbedaannya. Apabila dipakai sebagai kalimat pertama sebuah paragraf, kalimat (4a) akan menghasilkan pengembangan paragraf yang berbeda dengan kalimat (4b).

Cermatilah paragraf (5) berikut, lalu tentukanlah mana kalimat yang lebih cocok untuk mengawali paragraf (5): (4a) atau (4b).

- (5) _____ . Tempatnya mudah dicapai, di pinggir jalan besar. Dari arah Yogyakarta, letak rumah itu di sebelah kiri jalan, kira-kira satu setengah kilometer dari desa gerabah. Di sepanjang satu setengah kilometer itu hanya rumah itulah yang berpekarangan luas dengan pepohonan yang tertata rapi.

Bandungkanlah dengan paragraf (6) berikut. Kalimat mana yang lebih sesuai menjadi kalimat awal pada paragraf ini: (4a) atau (4b)?

- (6) _____ . Cukup kontras jika dibandingkan dengan peman-

dangan bukit kapur kecil yang gersang di sekitarnya. Sebatang pohon mangga di depan rumahnya sedang berbuah lebat, sementara tanaman-tanaman bunga di sekelilingnya sedang berkembang meriah.

Dengan kegiatan seperti pada (5) dan (6) itu, siswa akan merasakan apa manfaat latihan membuat kalimat seperti pada contoh (3) dan (4) itu, yang lazimnya dilatihkan pada pelajaran tata bahasa. Pengajaran bahasa dengan pendekatan komunikatif dapat membuat pengajaran tata bahasa lebih bermakna bagi siswa.

3. Bagaimana Mengajarkan Membaca secara Komunikatif?

Bagaimana pengertian "komunikatif" pada pengajaran membaca? Di dalam konteks komunikasi lisan, penentuan kalimat mana yang dipilih untuk diucapkan bergantung kepada siapa yang kita hadapi dan bagaimana konteks pembicaraannya. Misalnya, kalimat (1a) di atas dapat dipakai pada waktu kita mendekati penjual rokok dan akan menanyakan di mana Jalan Teluk Bayur. Kalimat seperti itu tidak akan diucapkan di kelas pada waktu akan menanyakan sesuatu kepada guru. Untuk konteks komunikasi seperti ini lebih sesuai dipakai kalimat seperti pada (1e).

Inti dari ini semua adalah bahwa di dalam kegiatan berbahasa, sebagaimana yang tampak jelas pada konteks pemakaian bahasa lisan, kita dihadapkan pada keanekaragaman konteks. Karena konteks yang beraneka ragam ini, siswa perlu memahami perbedaan antara konteks yang satu dan yang lain: konteks bertanya di jalan untuk menanyakan arah jalan dan konteks di kelas untuk menanyakan bahan pelajaran. Lalu, siswa perlu memiliki kemampuan untuk memilih strategi mana yang tepat pada waktu menghadapi suatu konteks tertentu.

Ihwal seperti ini juga terdapat pada kegiatan membaca. Ada pelbagai jenis teks yang kita hadapi pada waktu membaca. Ada teks iklan, pengumuman, kamus, buku pelajaran, surat kabar, cerita silat, terjemahan dialog pada waktu kita menonton film berbahasa Inggris dan yang lain lagi. Sebagaimana halnya konteks yang berbeda menuntut pemilihan kalimat yang berbeda, teks yang berbeda jenis menuntut kita untuk menghadapinya secara berbeda pula.

Teks yang beraneka ragam itu juga berkaitan dengan tujuan membaca yang berbeda-beda. Meskipun membaca teks jenis apa pun itu bertujuan mencari atau menggali informasi, tingkat penelusurannya berbeda-beda. Ada membaca untuk mendalami dan ada pula membaca untuk menangkap isi selengkap-lengkapnyanya dan serinci-rincinya, misalnya membaca buku pelajaran dalam rangka mempersiapkan ujian. Ini kegiatan membaca seluruh teks secara lengkap dan mendalam. Ada pula membaca untuk menangkap isi secara umum, secara garis besarnya saja, misalnya membaca guntingan berita pada surat kabar. Ini kegiatan membaca seluruh teks secara lengkap, tetapi tidak secara mendalam. Ada membaca untuk menemukan informasi khusus tertentu saja. Caranya tidak seluruh teks dibaca secara lengkap, mata hanya menatap bagian tertentu saja, yang diperlukan untuk mendapatkan informasi khusus itu tadi. Ini, misalnya, terjadi pada waktu buku pelajaran yang sudah beberapa kali dibaca dan perlu diulang lagi sekadar untuk membaca kembali bagian informasi yang sulit di-

pahami saja. Atau, dapat pula ini terjadi pada kegiatan membaca kamus atau iklan.

Pada waktu kita membaca teks--teks jenis apa pun--mata kita secara aktif melakukan gerakan melahap dari kata atau rentetan kata yang satu ke yang lain. Untuk teks berbahasa Indonesia, lazimnya gerakan mata dari kiri ke kanan, tetapi tidak demikian halnya dengan teks berbahasa Arab, Jepang, atau Cina. Pada waktu kita membaca buku pelajaran untuk keperluan mendalami isi secara lengkap dan rinci, yang terjadi ialah gerakan mata setapak demi setapak, dari kiri ke kanan sampai lariknya habis, turun ke larik berikutnya, lalu gerakan dari kiri ke kanan lagi, turun ke larik lanjutannya, dan begitu seterusnya. Laju kecepatan gerakan mata akan berbeda pada waktu kita membaca media guntingan berita pada surat kabar. Mata dipacu untuk bergerak lebih cepat lagi pada waktu kita membaca terjemahan dialog pada film berbahasa Inggris; kalau kurang cepet, kita akan terlambat mengikutinya.

Pada waktu kita membaca teks iklan atau kamus, arah gerakan mata akan lain lagi. Mata bergerak tidak setapak demi setapak seperti pada waktu kita membaca buku pelajaran, tetapi melompat-lompat, ke kanan atau kembali ke kiri lagi, ke bawah atau kembali ke atas lagi. Ada kata atau rentetan kata yang harus dilewati, tetapi ada kata atau rentetan kata yang harus ditatapi, bahkan sampai berlama-lama, kemudian ditinggalkan sebentar, mencari yang lain, lalu kembali lagi pada bagian yang dibaca berlama-lama tadi. Jadi, teks juga ada beraneka ragam jenisnya; tidak hanya jenis teks (surat kabar atau kamus), tetapi juga jenis tujuan membaca. Antara jenis teks yang satu dan yang lain, jenis tujuan membaca yang satu dan yang lain, menuntut strategi yang berbeda, menuntut pemilihan gerakan mata yang berbeda dibandingkan dengan jenis yang lain. Ini aspek "komunikatif" dari kegiatan membaca. Siswa perlu dipersiapkan dan dilatih untuk menguasai keterampilan yang diperlukan dalam menghadapi konteks membaca yang beraneka ragam itu.

4. Bagaimana Keadaan Pengajaran Membaca Selama Ini?

Pada buku pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dan menengah selama ini aspek "komunikatif" dari kegiatan membaca itu tidak diberi peluang pengembangan. Teks bacaan yang dipaparkan bukan teks yang beraneka ragam. Teks yang ditawarkan bukan pula untuk kegiatan membaca dengan tujuan yang beraneka jenis. Teks yang disodorkan hanya satu jenis teks saja, yakni teks yang panjang, bahkan ada yang sampai berpanjang-panjang. Di bawah teks seperti itu selalu ditampilkan daftar pertanyaan untuk menguji pemahaman. Itu saja yang dilatihkan dari pelajaran yang satu ke pelajaran berikutnya.

Dengan pelatihan seperti ini siswa hanya dibekali dengan satu "jurus" saja dalam membaca. Mereka bagaikan calon pendekar silat yang hanya menguasai jurus memukul dengan tangan mengepal dan mengarah ke depan saja. Padahal, lawan tidak senantiasa berada dalam posisi berhadap-hadapan; kadang kala di samping, di bawah, atau di berbagai posisi yang lain. Dengan berbekalkan jurus membaca yang satu itu saja, tidak mustahil siswa akan membaca kamus dengan cara yang sama dengan membaca buku pelajaran untuk mendalami isinya. Mereka akan boros waktu dan ketinggalan dalam mengejar informasi.

Jurus membaca yang dikembangkan di sekolah selama ini, yakni jurus membaca "mendalami" (secara intensif), memang penting, tetapi itu baru satu jurus saja. Masih ada jurus-jurus penting yang lain, misalnya, jurus "meluas" (secara ekstensif), jurus "memindai" (*scanning*), jurus "melintang" (*skimming*). Selain ketiga jurus yang kurang atau bahkan belum diajarkan di sekolah itu, masih ada satu jurus penting lagi, yakni jurus "melaju" atau yang lazim dikenal sebagai "membaca cepat" (*speed reading*).

Seorang atlet pelari dapat berlatih--berkali-kali berlatih--sehingga dapat makin meningkatkan laju kecepatan larinya dari sekian kilometer per detik sampai sekian kilometer per detik. Laju kecepatan membaca teks pun juga dapat dilatih dan setiap kali ditingkatkan dari sekian kata per menit menjadi sekian kata per menit. Sebagaimana atlet pelari tadi, setiap ia meningkatkan laju kecepatan memerlukan program latihan secara khusus. Namun, dengan banyak melakukan kegiatan berlari pun, yang akan meningkatkan daya tahan, laju kecepatan juga dapat ikut naik. Demikian juga halnya dengan laju kecepatan membaca. Hal itu dapat naik dengan meningkatkan "sekian ribu jam terbang" dalam membaca teks. Akan tetapi, jam pelajaran di kelas sangatlah terbatas. Bagaimana mungkin guru ada waktu untuk mengajarkan sekian jurus membaca itu, apalagi sekaligus juga dituntut melatih kegiatan membaca berkali-kali supaya jurus-jurus itu dapat dikuasai? Ditambah dengan keterbatasan guru yang hanya dapat memantau kegiatan siswa selama di sekolah, bagaimana kegiatan membaca "meluas" (ekstensif) itu dapat dilatihkan dan benar-benar dijalankan oleh siswa pada waktu di luar jam sekolah?

5. Bagaimana Mengembangkan Bahan Ajar Membaca secara Komunikatif?

Salah satu ciri pengembangan bahan ajar secara komunikatif, sebagaimana yang dicoba diuraikan di atas, ialah pengembangan bahan dengan mempertimbangkan keanekaragaman. Dalam hal pengembangan bahan ajar membaca, keanekaragaman itu menyangkut dua hal, yakni teks atau "bahan mentah" yang dikembangkan untuk kegiatan membaca dan tujuan kegiatan membaca itu sendiri.

Ada berbagai macam jenis teks: surat kabar, buku pelajaran, kamus, ensiklopedia, tabel, dan iklan. Ada pelbagai macam tujuan membaca: untuk mendalami isi secara rinci, untuk sekadar menangkap pokok-pokoknya atau garis besarnya saja, dan untuk mencari informasi tertentu (sehingga tidak perlu membaca teks seluruhnya).

Kegiatan berbahasa yang dikembangkan untuk memenuhi tujuan membaca itu pun juga dapat dibuat beraneka ragam. Kegiatan memahami bacaan (pada jenis membaca "mendalami"), misalnya, dapat dilakukan tidak hanya dengan menyodori siswa sejumlah pertanyaan, lalu meminta mereka untuk menjawabnya. Menguji pemahaman siswa terhadap suatu teks bacaan tidak hanya dapat ditempuh dengan "guru bertanya" dan "siswa menjawab", tetapi dapat pula dengan kegiatan "siswa bertanya" dan "siswa lain menjawab". Siswa baru dapat membuat pertanyaan tentang isi bacaan jika mereka telah benar-benar memahami isi teksnya. Jadi, membuat pertanyaan dapat dipakai sebagai alat uji pemahaman.

Ada sejumlah kegiatan lain lagi yang dapat dikembangkan. Kegiatan-kegiatan

ini memiliki ciri yang sama. Siswa tidak hanya dipacu untuk membaca teks dan memahami isinya, tetapi juga melakukan kegiatan-kegiatan ini secara aktif dan dengan penuh keasyikan.

- (1) Judul suatu bacaan dihilangkan, lalu siswa diminta memikirkan judul yang sesuai. Tentu saja akan ada lebih dari satu kemungkinan, tetapi keanekaragaman judul ini justru dapat menghidupkan kegiatan berbahasa. Judul-judul itu dapat didaftar di papan tulis, lalu mereka diminta untuk membandingkan judul-judul itu dalam berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, dilakukan pemungutan suara seluruh kelas: judul mana yang paling banyak dipilih dan mana yang paling sedikit dipilih? Atau, si pembuat judul diminta mengajukan alasan mengapa memilih judul itu. Atau, siswa diminta mengelompok-ngelompokkan judul yang didaftar di papan tulis itu: mana yang kurang lebih sama isinya, tetapi hanya berbeda cara mengatakannya?
- (2) Siswa diminta menuliskan kembali isi teks bacaan. Ini bisa dilakukan dalam beberapa kemungkinan. Mereka diminta menuliskan kembali isi teks dalam satu kalimat saja, atau dalam beberapa kalimat, atau dalam satu paragraf. Tentu saja, cara seperti pada nomor (1) akan ada lebih dari satu kemungkinan jawaban. Lalu, cara itu dapat dikembangkan dengan kegiatan saling membandingkan seperti pada (1). Dapat pula ditambahkan kegiatan lain, misalnya mereka diminta saling membenahi pengungkapan kalimat yang kurang "kena" atau kurang sesuai dengan isi teks. Selain itu, mereka dapat membenahi penggabungan antarkalimat. Atau, mereka dapat memperbaiki kalimat atau paragraf yang belum jelas maksudnya.
- (3) Kalimat-kalimat dari suatu paragraf diacak urutannya, lalu siswa diminta untuk menata kembali urutannya. Hal yang sama dapat dilakukan untuk teks yang terdiri atas beberapa paragraf. Urutan paragraf diacak, lalu siswa diminta mengurutkan kembali.
- (4) Konjungsi-kunjungsi pada suatu teks bacaan dihilangkan, lalu siswa diminta mengisi kembali konjungsi yang kosong itu. Jika terdapat perbedaan di antara mereka, kesempatan ini dapat dipakai untuk saling mengajukan alasan mengapa memilih konjungsi yang seperti itu.

6. Bagaimana Contoh Pengembangan Bahan Ajar secara Komunikatif?

Berikut ini ditampilkan beberapa contoh bahan ajar membaca yang dikembangkan secara komunikatif. Contoh-contohnya terdapat pada lampiran dengan nomor rujukan 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini diuraikan tujuan pengembangan bahan seperti itu.

a. Siswa Membaca secara Aktif

Bahan-bahan ini dikembangkan untuk membuat siswa berpikir secara aktif dalam kegiatan membaca. Secara tidak langsung ini akan menyadarkan siswa bahwa kegiatan membaca bukanlah kegiatan yang pasif. Salah satu cara untuk memacu siswa untuk berpikir aktif dalam membaca ialah dengan meminta mereka melakukan tebakan-tebakan sebelum atau pada waktu membaca teks.

Contoh-contoh bahan ajar pada *Lampiran 1* mengajak siswa untuk melakukan

tebakan. Siswa tidak hanya melakukan tebakan saja, tetapi juga diminta untuk menunjukkan bukti dari teks mengapa mereka sampai pada tebakan yang seperti itu.

Contoh bahan ajar pada *Lampiran 2* mengajak siswa untuk melakukan tebakan sebelum mereka mulai membaca teks. Mereka disodori beberapa pertanyaan prabacaan dan setelah selesai menuliskan tebakannya, mereka baru diminta memulai membaca. Setelah membaca teks, mereka diminta membandingkan tebakan mereka dengan apa yang mereka tangkap dari teks.

b. Siswa Menangkap Pokok-Pokok dari Teks Bacaan

Menangkap inti atau pokok-pokok suatu teks bacaan bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh siswa. Kegiatan ini diawali bukan dengan kegiatan membaca teks yang panjang. Teks yang panjang itu dipotong per kalimat, tetapi dipilih kalimat yang panjang, kalimat majemuk yang rumit strukturnya. Contoh bahan seperti ini dapat dilihat pada *Lampiran 3*.

Jika siswa mengalami kesulitan menangkap inti sarinya, mereka dipandu dengan diminta mengidentifikasi mana di dalam kalimat itu yang merupakan "klausa induk". Inti sari kalimat terungkap melalui subjek dan predikat pada klausa induk. Melalui kegiatan seperti ini mereka disadarkan akan pentingnya belajar mengenai struktur kalimat majemuk: mana klausa induk, mana klausa anak.

Jika siswa sudah terampil menangkap intisari kalimat majemuk yang panjang dan rumit strukturnya, kegiatan dapat ditingkatkan ke teks yang terdiri atas lebih dari satu kalimat. Contoh bahan seperti ini terdapat pada *Lampiran 4*. Jika keterampilan di tahap ini telah dikuasai, kegiatan dapat dilanjutkan ke tingkat paragraf. Lihat *Lampiran 5* dan *6*.

c. Siswa Membaca Berulang-ulang

Semakin berulang kali mata diajak menelusuri rentetan kata pada suatu teks, semakin cepat dan lincah gerakannya. Dengan demikian, semakin cepat pula proses pemahaman terhadap isi teks. Untuk mencapai tujuan itu, apakah hal itu hanya dapat ditempuh dengan memberi siswa bacaan yang panjang-panjang dan menugaskan siswa untuk banyak membaca di luar jam kelas? Tugas seperti ini berat untuk dilakukan oleh siswa dan sulit dipantau guru. Akan tetapi, dengan teks yang pendek pun kegiatan membaca berulang-ulang dapat pula dilakukan siswa. Tentu saja, apabila guru menyuruh siswa membaca teks tiga kali, mustahil itu dilakukan siswa, dan sulit bagi guru untuk memantau apakah mereka benar-benar membaca lebih dari satu kali. Namun, melalui pemberian tugas tertentu, tanpa disuruh mereka akan "terpaksa" membaca teks yang sama lebih dari satu kali. Tanpa melakukan itu, mereka tidak akan dapat mengerjakan tugas yang disodorkan. Kegiatan seperti ini dapat dilihat pada *Lampiran 7*.

Pertama-tama, siswa diminta membaca teks pendek tentang W.S. Rendra ini. Lalu, siswa membaca soal 1. Untuk dapat menjawab soal 1 itu, siswa terpaksa harus membaca teks yang tadi meskipun tidak perlu membaca seluruh teks. Membaca satu

kali lagi saja pun belum cukup untuk dapat menjawab soal 1 itu. Untuk dapat mengerjakan soal 2, mereka terpaksa harus membaca lagi teks yang sama itu.

Tugas ini tidak terasakan sebagai tugas yang berat karena teksnya pendek. Namun, dengan bahan teks yang sependek ini siswa--tanpa mereka sadari--telah melakukan kegiatan membaca berulang-ulang. Dua jenis tujuan membaca pun telah mereka lakukan. Mereka tidak hanya membaca "mendalami", tetapi juga membaca "memindai" (*scanning*), yakni pada waktu mereka harus menemukan di mana kalimat yang diapit tanda petik.

d. Siswa Membaca Berbagai Jenis Teks

Siswa tidak hanya dilatih membaca teks seperti yang mereka temukan pada majalah, surat kabar, atau buku pelajaran, tetapi juga teks pada kamus, ensiklopedia, dan juga tabel. Akan tetapi, bagaimana kalau di sekolah tidak ada kamus atau ensiklopedia? Cuplikan atau guntingannya pun memadailah. Yang penting ialah mereka mengalami sendiri bagaimana menghadapi teks seperti itu, yang setakat ini kurang diberi tempat di pendidikan dasar dan menengah.

Lampiran 8 memuat penggalan dari **ensiklopedia**. Melalui kegiatan yang dikembangkan pada lampiran ini, siswa tidak hanya diperkenalkan pada bagaimana wujud teks pada ensiklopedia, tetapi juga mengalami membaca teks jenis itu. Supaya benar-benar membaca teks seperti itu, mereka perlu diberi tugas yang--untuk dapat mengerjakannya--harus mereka baca teksnya. Tugas dibuat sedemikian rupa sehingga untuk mengerjakannya mereka terpaksa harus membaca teks ensiklopedia itu berkali-kali.

Pada waktu menjalani kegiatan pada *Lampiran 8* itu, meskipun hanya menghadapi sepenggal ensiklopedia, mereka harus benar-benar mengalami apa yang sebenarnya harus mereka lakukan pada waktu membaca ensiklopedia: kata-kata yang menjadi lema disusun secara alfabetis. Setiap kali membaca, mereka harus memperhitungkan lema atau entri yang bercetak tebal yang disusun secara alfabetis. Jika tidak memahami sistem alfabetis ini, mereka akan membaca satu per satu dan itu akan memakan waktu lebih lama. Kegiatan seperti ini juga melatih siswa supaya cekatan atau lincah memaknai matanya untuk menemukan informasi yang ditugaskan untuk mereka cari. Kegiatan membaca yang dikembangkan ini adalah membaca "memindai" dan ini mereka lakukan secara berkali-kali tanpa mereka sadari.

Lampiran 9 memuat guntingan **kamus**. Meskipun di kelas tidak ada kamus, melalui cuplikan kamus pada *Lampiran 9*, siswa benar-benar mengalami bagaimana membaca kamus, yang--seperti pada eksiklopedia--lemanya juga disusun secara alfabetis. Melalui kegiatan ini siswa tidak hanya mengenal bagaimana teks pada kamus, tetapi juga apa manfaat kamus. Melalui kamus, penguasaan kosakata mereka makin diperkaya. Mereka juga disadarkan bahwa ada sejumlah kata, meskipun itu kata dari bahasa sendiri, yang belum tentu mereka ketahui maknanya.

Lampiran 10 menyodorkan kegiatan membaca tabel. Tabel bukanlah teks yang cukup sekali baca lalu selesai, sebagaimana, misalnya, kita membaca berita pada surat kabar. Tabel memuat hasil pemadatan informasi, ringkas dan singkat, serta mudah dan cepat dirujuk kembali setiap kali kita memerlukannya. Supaya tidak hanya tahu

bagaimana cara memahami kamus, tetapi juga terbiasa membaca tabel, siswa perlu diajak melakukan kegiatan yang sebenarnya dilakukan oleh orang yang memanfaatkan informasi melalui tabel.

Yang dipentingkan kegiatan pada *Lampiran 10* itu bukan hasil atau jawaban atas pertanyaan yang diberikan, melainkan kegiatan agar siswa mengalami sendiri membaca tabel, tidak hanya sekali, tetapi berkali-kali. Pada kegiatan ini siswa perlu lincah menggerakkan mata, baik dengan arah membujur maupun melintang. Untuk menjawab pertanyaan (a) saja, siswa harus menggerakkan mata secara cepat dengan arah dari kiri ke kanan ke kiri lagi dan dari atas ke bawah kembali ke atas lagi. Hal yang sama harus mereka lakukan untuk dapat mengerjakan tugas-tugas berikutnya pada *Lampiran 10* itu.

e. Siswa Menguasai Berbagai Jurus Membaca

Siswa tidak hanya perlu mengenal berbagai jenis teks, tetapi juga perlu mengetahui bahwa jenis-jenis membaca juga beraneka ragam: "memindai" (*scanning*), "melintang" (*skimming*), "mendalami" (intensif), dan "meluas" (ekstensif). Karena tiap-tiap jenis membaca ini menuntut gerakan mata yang berbeda-beda, mereka perlu dilatih dan mengalami sendiri berbagai macam gerakan itu.

Pada kegiatan yang dikembangkan pada *Lampiran 7* s.d. 9, siswa dilatih dan diajak untuk mengalami sendiri bagaimana membaca "memindai". Mata bergerak cepat dengan arah membujur dan melintang. Mata diajak untuk bergerak melompat-lompat. Tidak setiap kata atau lambang ditatap setapak demi setapak. Ada bagian yang harus dilompati, yakni bagian yang tidak perlu dibaca. Ada bagian yang meminta mata untuk berhenti sejenak karena di tempat ini ada hal yang secara khusus perlu digali informasinya.

Contoh lain dari kegiatan membaca "memindai" dapat dilihat pada *Lampiran 11*. Dalam menghadapi guntingan kamus tentang lema *naik* ini, siswa dapat diminta, misalnya, untuk menemukan di kolom mana dan di baris ke berapa ada keterangan mengenai *naik daun*. Supaya mereka terpacu untuk melakukan kegiatan ini dengan cepat, kegiatan seperti ini dapat dilombakan: siapa yang paling cepat menemukannya.

Perhatikan latihan-latihan yang dikembangkan dari (a) s.d. (f). Untuk mengerjakan latihan-latihan itu, siswa dituntut untuk melakukan kegiatan membaca "lompat henti" tadi.

Lampiran 12 memperlihatkan contoh kegiatan membaca "melintang". Siswa diminta untuk merumuskan judul yang tepat bagi sebuah teks bacaan. Untuk memenuhi tugas itu, siswa tidak dituntut untuk mengetahui isi teks bacaan secara mendalam dan rinci, tetapi cukup menangkap pokok-pokok atau garis besarnya saja. Siswa tidak dituntut untuk membaca secara membujur, setapak demi setapak dari rentetan kata yang kiri ke yang kanan. Mata diajak untuk bergerak lebih secara melintang (dari atas ke bawah) daripada secara membujur supaya siswa dipacu untuk melakukan gerakan melintang itu. Kegiatan ini juga dapat dilombakan: siapa yang paling cepat dapat menyusun judulnya.

Lampiran 13 menampilkan contoh pengembangan kegiatan membaca "menda-

lami". Kegiatan membaca jenis ini adalah kegiatan yang sudah banyak dilakukan di sekolah dan merupakan satu-satunya kegiatan membaca yang diajarkan selama ini. Akan tetapi, lazimnya kegiatan membaca seperti ini disodorkan kepada siswa dalam wujud teks yang panjang dan di bawahnya disusul dengan daftar pertanyaan. Pada *Lampiran 13* ini ditawarkan penyajian bahan dengan cara yang lain: teks yang panjang itu dipenggal-penggal. Siswa diajak mengikuti teks sepenggal demi sepenggal. Setiap selesai membaca sepenggal, siswa berhenti membaca dan harus menjawab pertanyaan yang diberikan. Setelah selesai menuliskan jawaban, siswa baru melanjutkan membaca lagi, berhenti lagi untuk menjawab pertanyaan, lalu melanjutkan lagi membaca, dan seterusnya.

Dengan cara seperti ini siswa tidak merasa gamang karena tidak menghadapi teks yang panjang. Dengan teks yang tampil pendek itu mereka diarahkan untuk membaca pelan-pelan, menggerakkan mata setapak demi setapak dari rentetan kata yang satu ke yang berikutnya. Jika dirasa perlu, misalnya karena belum dapat menemukan jawaban pertanyaan, mereka dapat mengulang membaca lagi teks yang sudah langsung tersedia di atas pertanyaan. Mereka tidak perlu mencari-cari lagi di rentetan kalimat yang mana terdapat jawabannya. Ini contoh kegiatan yang dikembangkan hanya untuk latihan membaca "mendalami" saja.

Dalam kenyataannya, pada kegiatan membaca yang sesungguhnya sebenarnya dapat terjadi gabungan antara membaca memindai, melintang, dan mendalami. Namun, untuk keperluan pengajaran, supaya kelihatan tajam perbedaan antara jurus-jurus membaca yang berbeda-beda itu, kegiatan pada *Lampiran 13* ini sengaja dibuat khusus untuk mengasah jurus "mendalami".

Bagaimana dengan pengembangan bahan untuk kegiatan membaca "meluas"? Ini sulit dipantau oleh guru karena kegiatan ini dilakukan di luar jam pelajaran, di luar sekolah. Salah satu cara untuk memantau kegiatan membaca seperti ini ialah menugasi siswa untuk membuat laporan sebagai bukti bahwa mereka memang benar-benar melakukan kegiatan "membaca tambahan" itu tadi.

Yang lazim dilakukan oleh para guru ialah meminta siswa untuk membaca artikel atau buku, lalu mereka diminta untuk menuliskan ringkasannya. Akan tetapi, kegiatan seperti ini dapat dirasakan sebagai hal yang memberatkan, baik bagi siswa maupun guru. Siswa harus meluangkan waktu untuk membaca teks bacaan yang panjang dan kemudian harus menuliskan ringkasannya. Guru pun terbebani karena harus membaca hasil ringkasan mereka; kalau tidak, siswa tidak termotivasi untuk melakukan tugas itu.

Kegiatan yang dikembangkan, sebagaimana yang terpapar pada *Lampiran 14*, mencoba meringankan baik beban siswa maupun beban guru. Teks yang dibaca oleh siswa hanya pendek, yakni "surat pembaca" pada surat kabar atau majalah. Selain pendek, teksnya juga mudah ditemukan oleh siswa. Tugas terasa ringan karena mereka hanya harus membaca dua surat pembaca saja. Laporan yang mereka buat pun mudah menuliskannya, seperti yang terlihat pada contoh. Guru juga ringan memeriksanya.

Tugas yang kelihatan ringan ini sebenarnya tidaklah sangat ringan. Untuk dapat menemukan dua surat pembaca yang berisikan keluhan, tidaklah cukup bagi mereka

untuk membaca dua surat saja karena tidak setiap surat pembaca berisikan keluhan. Maka, tercapailah kegiatan membaca "meluas": siswa--demi tugas yang di-PR-kan itu--banyak membaca, meskipun hanya sependek surat pembaca.

Ada cara lain lagi untuk mendorong siswa melakukan kegiatan membaca "meluas". Misalnya, siswa ditugaskan untuk mengumpulkan satu guntingan artikel (surat kabar atau majalah) yang mengupas tentang "lingkungan hidup" atau tentang "kesehatan". Setelah terkumpul, artikel tiap-tiap siswa itu ditempelkan di papan di kelas. Siswa diminta untuk membaca tiap artikel yang terkumpul itu, lalu menentukan pilihannya. Akhirnya, ditentukan mana artikel yang paling banyak dipilih untuk dijadikan bahan untuk pelajaran Bahasa Indonesia di kelas. Untuk melakukan tugas ini, siswa terpaksa harus membaca sekian artikel.

Tugas yang mirip ini dapat dilakukan pula untuk kegiatan membaca sastra. Misalnya, siswa diminta untuk mengumpulkan satu puisi (dari majalah atau surat kabar) yang isinya tentang keindahan alam atau keagungan Tuhan. Untuk dapat menemukan puisi dengan isi yang ditugaskan itu, siswa harus membaca sekian puisi lebih dahulu dari berbagai surat kabar atau majalah.

7. Penutup

Di antara sekian jenis kegiatan membaca itu tidak semuanya dapat diujikan sehingga tidak mungkin ditampilkan di ebtanas. Yang pasti dapat dan yang hingga kini diujikan ialah membaca "mendalami". Lalu, untuk apa jurus-jurus yang lain itu dilatihkan di kelas? Pertanyaan seperti ini dapat ditanggapi dengan pertanyaan singkat ini: siswa belajar untuk nilai atau untuk kehidupan?

Meskipun demikian, siswa memang perlu mengetahui juga "keuntungan jangka pendek" yang akan dapat mereka nikmati apabila mereka menguasai berbagai macam jurus membaca itu. Memang benar bahwa tidak ada soal nomor tertentu pada ebtanas yang menguji secara langsung penguasaan siswa terhadap jurus "memindai" atau "melintang". Namun, penguasaan jurus membaca tersebut secara tidak langsung dapat membantu siswa dalam mengerjakan seluruh soal ebtanas. Semakin cekatan gerakan mata siswa dalam melahap rentetan kata, semakin cepat pula siswa dapat memahami ihwal yang ditanyakan dalam teks ujian, dan semakin cekatan pula siswa dapat melakukan gerak mata "lompat henti" untuk melewati soal-soal yang sukar dan mengerjakan soal yang mudah terlebih dahulu.

Daftar Pustaka

- Cross, David. 1991. *A Practical Handbook of Language Teaching*. London: Cassell.
- Harmer, Jeremy. 1991. *The Practice of English Language Teaching*. London: Longman.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1997. *Pokok-Pokok Pengajaran Bahasa dan Kurikulum 1994: Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Kaswanti Purwo, Bambang. 1997. *Titian Kemahiran Bahasa: Sekolah Lanjutan*

Pertama. Panduan Guru Jilid 1, 2, dan 3. Jakarta: Widya Utama.

Kaswanti Purwo, Bambang dan Boen S. Oemarjati. 1994. *Titian Kemahiran Berbahasa: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama*. Buku Siswa Jilid 1, 2, dan 3. Jakarta: Widya Utama.

E**Menyimpan [...]**

[...] tidak hanya dipakai sebagai campuran sambal. Tidak jarang ampas udang ini kita masukkan ke dalam masakan untuk menambah sedap. Agar [...] dapat disimpan lebih lama, caranya mudah. Gongseng [...] di dalam wajan dengan api yang kecil. Setelah kering, angkatlah dari wajan, lalu aduk-aduk hingga benar-benar dingin. Siapkanlah botol kaca yang kering dan bersih. Masukkanlah [...] gongseng tadi. Tutuplah botol rapat-rapat. Dengan cara ini [...] dapat tahan lebih lama.

Dwi Ratih (Jln. Masjid Al-Hasanah 44, Depok)
(Kartini 25 Mei s.d. 4 Juni 1996; Konsultasi, hlm. 16)

F**Membersihkan Lantai dari [...]**

Kita sering dibuat kesal karena [...] sering berkeliaran di lantai. Padahal, setiap han lantai selalu kita pel. Coba lakukan cara berikut. Sebelum mulai mengepel, campur beberapa tetes minyak tanah ke dalam air pel. Lakukan ini sampai dua hari berturut-turut, niscaya serangga yang gemar rasa manis ini tidak lagi berkeliaran di lantai.

Christine (Jln. Pekayon 4, Jakarta Selatan)
(Karbni 15 s.d. 24 Juli 1996; Konsultasi, hlm. 16)

a Bagian yang hilang pada teks [A] _____, teks [B] _____, teks [C] _____, teks [D] _____, teks [E] _____, dan teks [F] _____.

b Apa yang membuatmu berpendapat begitu? Carilah pada masing-masing teks itu kata-kata mana yang membuatmu merasa yakin bahwa jawaban yang kaupilih adalah benar. Lingkarilah kata-kata itu pada teks.

c Daftarkanlah kalimat majemuk yang terdapat pada keenam teks itu. Sebutkanlah apakah itu kalimat majemuk setara atau bertingkat. Lingkarilah konjungsinya.

d Pada teks nama terdapat kalimat majemuk campuran? Konjungsi apa yang terdapat di situ?

E Mengenyam Cerpen

1 Berikut ini adalah bagian awal dari cerita pendek karangan Moinigo Boesje, berjudul "Air Mata Tua". Cerpen itu dimuat dalam sebuah buku kumpulan cerpen yang berjudul "Cerita Pendek Indonesia 3" oleh Satyagraha Hoerip, terbitan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada bagian awal cerpen ini tampil dua tokoh, yaitu penjaga kuburan dan nenek. Penjaga kuburan itu mendekati nenek yang sedang menangis. Coba sekarang tebaklah: apa kira-kira yang menyebabkan nenek itu menangis di kuburan? Tuliskanlah tebakannya itu di bawah ini.

- (a) _____
 (b) _____
 (c) _____

Masing-masing siswa membacakan tebakannya. Mereka yang tebakannya kebetulan sama dan sudah dibacakan oleh siswa lain tidak usah mendapat giliran. Yang mendapat giliran berikutnya hanya mereka yang mempunyai tebakan yang berbeda dengan yang sudah dibacakan.

Sekarang bacalah cuplikan pertama ini.

CUPLIKAN 1

Penjaga kuburan mendekannya dan bertanya: "Kenapa Nenek menangis?"

Diangkatnya kepalanya pelan-pelan, dipandangnya penjaga kuburan itu agak lama, dan suaranya yang gemetar dan tua itu berkata: "Kalaulah cucuku dapat bertanya seperti engkau itu." Dia berhenti sebentar, dihapusnya air matanya. "Engkau sendiri bekerja di sini?" tanyanya kemudian.

"Ya."

"Sepantasnya engkau masuk surga, Nak."

1. Apakah pertanyaan "Kenapa Nenek menangis?" itu dijawab secara langsung oleh nenek?
2. Setelah kamu membaca cuplikan pertama ini, coba ingat-ingatlah alasan yang dibacakan sebelum membaca tadi. Adakah di antara alasan-alasan itu yang cocok dengan isi bacaan penggalan pertama itu? Kalau ada, sebutkanlah.

6. Sutan Sjahrir, Perdana Menteri RI pada awal revolusi fisik bersenjata (1945—1947), yang meninggal dunia di Zurich (Swiss) dalam status sebagai tahanan politik, dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada tanggal 19 April 1966 sebagai Pahlawan Nasional.

- a. Sutan Sjahrir adalah Perdana Menteri RI pada awal revolusi fisik bersenjata.
- b. Sutan Sjahrir sebelum meninggal adalah tahanan politik.
- c. Sutan Sjahrir dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata sebagai Pahlawan Nasional pada tanggal 19 April 1966.

7. Sebelum menjadi Perdana Menteri, yaitu dalam usia 36 tahun, Sutan Sjahrir pada pertengahan Oktober 1945 menulis pamflet "Perdjoeangan Kita".

- a. Sutan Sjahrir menjadi Perdana Menteri pada usia 36 tahun.
- b. Sutan Sjahrir menulis pamflet "Perdjoeangan Kita" pada usia 36 tahun.
- c. Sutan Sjahrir menulis pamflet "Perdjoeangan Kita" pada pertengahan Oktober 1945.

8. Sutan Sjahrir, di dalam pamflet yang diterbitkan 10 November 1945 oleh Kementerian Penerangan RI, memilah-milah dua jenis pemuda, yaitu "pemoeda manusia berideologi" dan "pemoeda binatang berkelahi".

- a. Sutan Sjahrir membedakan dua jenis pemuda: "manusia berideologi" dan "binatang berkelahi".
- b. Pamflet Sutan Sjahrir diterbitkan tanggal 10 November 1945.
- c. Kementerian Penerangan RI memprakarsai penerbitan pamflet Sjahrir.



C Apa Intinya?

Ikutilah cerita pengalaman menarik berikut ini (dikutip dari *Femina* 14 s.d. 20 November 1996, 16—20) setapak demi setapak. Kalian harus berhenti pada setiap penggalan untuk merangkum isi pokoknya. Di antara tiga rangkuman yang tersedia, lingkarilah yang benar: (a), (b), atau (c).

1 Desa Galis di Bangkalan Madura bukanlah desa yang makmur. Kondisi tanahnya yang kering membuat para petani harus berjuang keras agar bisa menuai panen yang lumayan. Tak banyak mata pencaharian lain, di samping bertani, yang bisa dilakukan penduduk Desa Galis.

- Desa Galis adalah desa yang — supaya makmur — penduduknya harus bekerja keras.
- Panen di Desa Galis lumayan meskipun tanahnya kering.
- Kebanyakan penduduk di Desa Galis hanya bisa mencari nafkah dengan bekerja keras sebagai petani.

2 Ayahku hanya memiliki sebidang tanah sempit. Dengan hasil panen yang jauh dari lumayan jelas ayah sangat kesulitan menghidupi istri dan empat anak-anaknya.

- Tidak mudah bagi ayah untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga karena tanah garapannya sempit.
- Karena tanahnya sempit, ayah bekerja keras dan hasilnya lumayan juga dapat mencukupi kebutuhan hidup keluarga.
- Untuk menghidupi istri dan anak-anaknya, jauh dari lumayanlah hasil panen dari sebidang tanah garapan yang sempit.

2 Kutipan berikut merupakan kelanjutan dari cerita pengalaman mengesankan yang diambil dari *Femina* 14 s.d. 20 November 1996, 16—20. Kalian harus berhenti pada setiap penggalan untuk merangkum isi pokoknya. Di antara tiga rangkuman yang tersedia, lingkarilah yang benar: (1), (2), atau (3).

a Ayah, selain mengandalkan hasil ladang, juga berinisiatif menjadi kuli angkut. Mengangkut beras atau barang-barang bangunan adalah pekerjaan rutinnnya setiap hari.

- (1) Pekerjaan rutin ayah setiap hari adalah mengangkut beras dan barang-barang bangunan.
- (2) Untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga, ayah tidak hanya mengandalkan pekerjaan di ladang.
- (3) Ayah tidak berkeberatan untuk bekerja sebagai petani atau sebagai kuli angkut.

b Membayangkan ayah dalam keadaan bekerja keras sampai sekarang masih membekas di mataku. Saat itu aku masih kecil, tetapi sudah bisa merasakan betapa kerasnya perjuangan yang harus ia jalani untuk hasil yang pas-pasan.



- (1) Aku masih ingat betapa kerasnya ayah bekerja dan hasilnya tidak dapat membuat keluarga hidup berkecukupan.
- (2) Aku masih terbayang ayah yang bekerja keras untuk mendapatkan hasil yang lumayan.
- (3) Aku tak bisa melupakan perjuangan keras ayah untuk menghidupi keluarga.

Siapakah Orang Yang Suka Bertanya?

- (1) Ada anggapan bahwa orang yang bertanya adalah orang yang bodoh.
- (2) Orang yang suka bertanya sebenarnya tidak bodoh; contohnya adalah anak kecil.
- (3) Anak kecil suka bertanya karena dorongan ingin tahu.
- (4) Dorongan ingin tahu adalah bekal penting untuk pengembangan ilmu.
- (5) Orang bertanya justru supaya menjadi lebih tahu.
- (6) Hanya orang berpengetahuan yang dapat bertanya.



a Bertanya – karena ingin tahu (seperti pada anak-anak itu) adalah modal dasar bagi seorang ilmuwan. Seperti halnya seorang anak yang selalu mengejar hal baru, para ilmuwan senantiasa bertanya dan bertanya terus. Di benak mereka bada habisnya bermunculan pelbagai macam pertanyaan. Bertolak dan pertanyaan yang membanjir itu mereka berpikir terus, bekerja terus sampai jawaban dapat ditemukan. Tanpa pertanyaan, manusia tidak tergugah untuk menemukan suatu hal yang baru. Tanpa pertanyaan, kehidupan dan peradaban manusia tidak mengalami kemajuan. Tanpa pertanyaan, kita sekarang tidak akan mengenal listrik, mesin, atau komputer.

b Coba kita baca sebuah teks atau kita dengarkan suatu pembicaraan. Kalau isi teks atau pembicaraan itu tidak kita tangkap sama sekali, bagaimana kita dapat bertanya. Supaya dapat bertanya, kita harus terlebih dahulu memahami isi atau pokok yang dibahas. Jika tidak, kita tidak akan dapat bertanya apa-apa. Orang yang banyak bertanya justru menandakan bahwa ia seorang yang aktif, cerdas, dan kreatif.

c Banyak orang beranggapan bahwa suka bertanya adalah tanda suatu kebodohan. Hanya orang bodohlah yang suka bertanya. Orang yang bodoh bertanya kepada orang yang pandai, dan tidak sebaliknya. Benarkah anggapan itu? Bukankah bertanya itu sendiri kadang-kadang kita rasakan sulit? Kita sering mengalami kesulitan dalam menyusun pertanyaan. Kita ingin bertanya sesuatu, tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya.

e Justru ini yang sebetulnya perlu ditanyakan: mengapa anak-anak usia itu suka bertanya terus? Di dalam diri mereka terdapat rasa ingin tahu! Mereka terpukau oleh segala macam benda baru di sekitar mereka. Mereka menginginkan penjelasan mengenai itu semua. Sebelum memperoleh jawaban yang memuaskan, mereka akan mengejar terus. Mereka akan menyerbu orang dewasa di sekitar mereka dengan tunda hentinya bertanya. Setelah terpenuhi rasa ingin tahu mereka, setelah mereka peroleh apa yang mereka cari, barulah mereka berhenti bertanya.

[Ditulis kembali, dengan perubahan, dari "Seandainya kita tidak punya pertanyaan". Kawanku April 1992, hlm. 29]

d Orang bertanya karena mencan tahu. Orang yang tidak tahu apa-apa sama sekali malahan mengalami kesulitan jika diharuskan bertanya. Orang dapat bertanya justru karena ia sudah tahu, tetapi ia ingin tahu lebih banyak lagi, ia ingin tahu lebih dalam lagi. Ia ingin menemukan hal-hal yang baru, ia ingin memecahkan rahasia dari segala hal yang ada di dunia ini.

f Apakah sungguh bodoh orang yang suka bertanya itu? Coba lihatlah adik kita, anak yang baru saja mulai fasih berbicara! Ia sangat rajin bertanya. Usia mungkin baru tiga atau empat tahun, tetapi pertanyaan yang meluncur dari mulutnya bagaikan rentelan senapan. Kita sering dibuat kesal menghadapi pertanyaan yang bertubi-tubi itu. Anak-anak kecil itu tidak juga kehabisan bahan untuk bertanya dan tidak lelah-lelahnya bertanya. Apakah itu perbuatan yang bodoh?

Lampiran 6a

Menata Urutan Kegiatan

Berikut ini adalah cara membuat kecap kedelai, yang dikutip (dengan perubahan) dari buku *Kecap dan Tauco Kedelai* karangan Hieronymus Budi Santoso (Kanisius, Yogyakarta, 1994, hlm. 24—30). Ada sepuluh tahap atau proses yang harus dilakukan. Akan tetapi, kegiatan yang disebutkan di sini belum urut. Urutkanlah itu.

A Biji kedelai dipindahkan ke dalam tapisan untuk ditiriskan dan didamkan hingga menjadi dingin (sekitar setengah sampai satu jam).

B Setelah proses penggaraman selesai, rendaman kedelai itu disaring dengan kado. Hasil utama penyaringan berupa filtrat (untuk dijadikan kecap), sedangkan hasil samping berupa ampas (untuk pakan ternak).

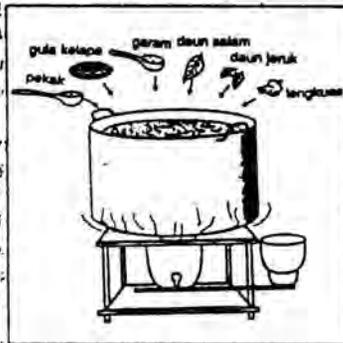
C Biji yang terpilih itu dicuci dan dibilas dengan air bersih supaya kotoran yang masih melekat pada biji dapat hilang.

D Slapkan botol untuk menyimpan kecap. Cucilah botol sampai bersih dan, jika perlu, diuap supaya steril. Cairan hasil saringan dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapat.

E Siapkan biji kedelai hitam yang tua. Letakkan biji-biji itu pada tampah, lalu ditampi supaya biji-biji yang baik dapat dipilih. Biji-biji yang baik adalah biji-biji yang sudah berkecambah.

G Biji kedelai yang sudah dingin siap untuk diolah secara fermentasi dengan cendawan jenis *Rhizopus* sp. Jamur ini diperoleh dari laru: ada laru daun, ada laru tempe. (Tahap penjamuran ini sangat menentukan keberhasilan membuat kecap kedelai. Jika biji kedelai belum benar-benar dingin, jamur akan mati.) Satu kilogram kedelai dicampur dengan satu kilogram laru, diaduk sampai benar-benar rata, diangin-angin sebentar, lalu disimpan sekitar empat sampai lima hari. Pada akhir proses penjamuran ini biji kedelai akan penuh ditumbuhi jamur yang berwarna putih merata (jika dicampur laru tempe) atau berwarna kehijau-hijauan (jika dicampur laru daun).

H Siapkan gula kelapa yang dicairkan (dengan air bersih) dan dicampur dengan bumbu-bumbu penyedap. Satu liter filtrat memerlukan dua kilogram gula kelapa yang telah dilarutkan ke dalam setengah liter air. Adapun bumbu penyedap yang lazimnya dipilih (tergantung selera) adalah daun sereh, salam, daun jeruk, lengkuas, peka, kemiri, bawang putih, biji adas, wijen, dan sebagainya. Semua bumbu itu, kecuali daun salam dan sereh, sebelum dicampurkan ke dalam filtrat, disangrai terlebih dahulu, kemudian digiling sampai halus. Urut-urutan pembuatannya adalah sebagai berikut. Masukkan air bersih ke dalam filtrat, dengan perbandingan satu berbanding satu, lalu direbus sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan larutan gula kelapa dan bumbu penyedap. Selama proses perebusan, larutan sering diaduk-aduk. Perebusan dapat dihentikan apabila sudah tidak terbentuk buih-buih lagi.



I Biji kedelai dimasukkan ke dalam panci, lalu direbus selama dua jam, sampai menjadi lunak. Banyaknya air yang digunakan 2,5 kali volume kedelai; seluruh biji kedelai harus terendam air.

J Siapkan larutan garam 20%; maksudnya, jika airnya satu liter, masukkan 200 gram garam. Imbangannya, jika biji kedelai (kering) satu liter, diperlukan empat liter larutan garam 20%. Biji kedelai yang telah berjamur itu kemudian dimasukkan ke dalam larutan garam 20% dan dibiarkan terendam selama satu sampai dua bulan. Selama proses penggaraman, setiap pagi rendaman kedelai ini perlu dijemur di panas matahari sambil diaduk-aduk. Sore harinya ditutup dan dimasukkan ke dalam rumah lagi.

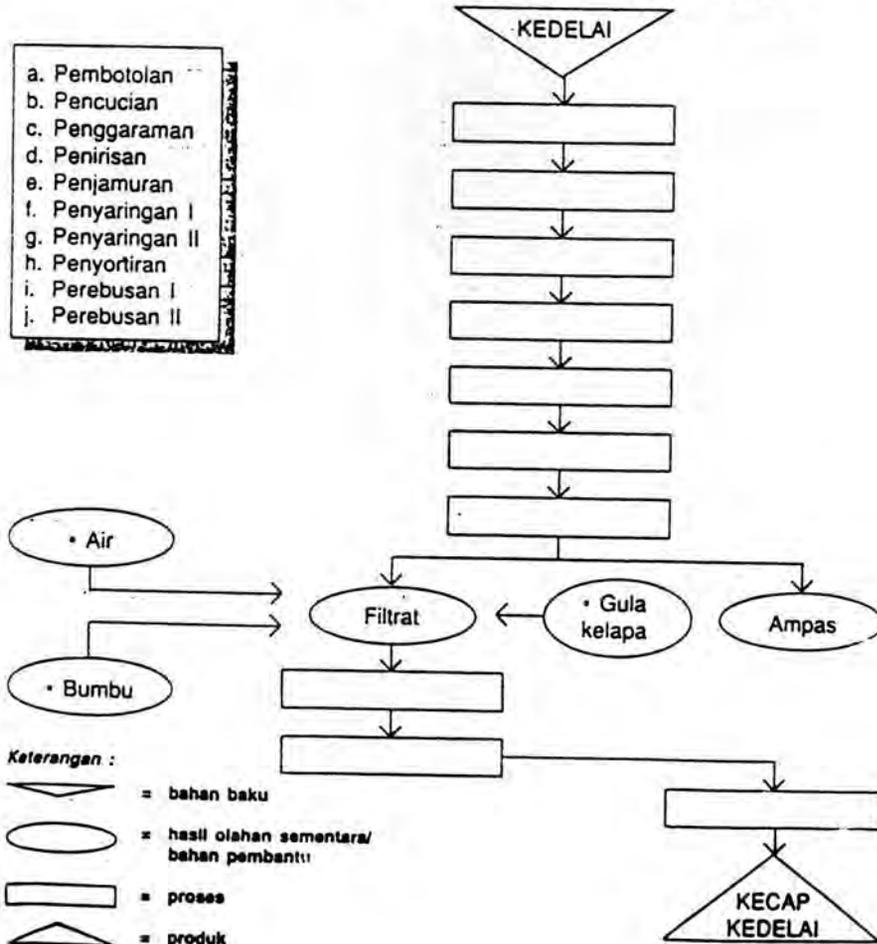
Kerjakan ini sebagai PR. Uraikanlah secara tertulis cara membuat tahu, manisan buah, atau _____ (pilihlah sendiri). Carilah keterangan dari sumber bacaan atau dari wawancara.

Uji Terampil Unit 11

1 Bacalah bagan di bawah ini. Bagan ini menggambarkan proses pembuatan kecap kedelai. Pada bacaan di atas dapat kamu ikuti sepuluh tahap yang harus dilakukan. Isikanlah sepuluh tahap itu (yang tercetak sebagai a, b, c, dst. ini) ke dalam kotak-kotak yang kosong pada bagan.

PROSES PEMBUATAN KECAP KEDELAI

- a. Pembotolan
- b. Pencucian
- c. Penggaraman
- d. Penirisan
- e. Penjamuran
- f. Penyaringan I
- g. Penyaringan II
- h. Penyortiran
- i. Perebusan I
- j. Perebusan II



D Menyusun Pertanyaan untuk Wawancara

Bacalah kedua teks ini (yang dikutip dari *Merdeka* 25 November 1996). Tugas kalian ialah membuat daftar pertanyaan untuk mewawancarai W.S. Rendra [A] dan Bu Kasur [B].

A

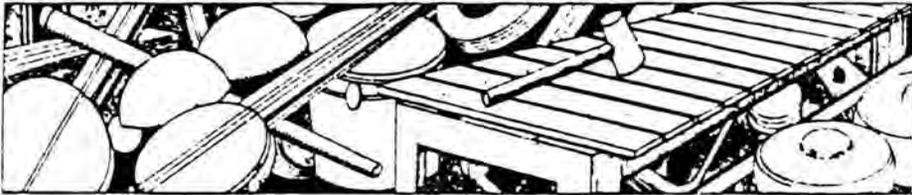
W.S. Rendra, yang dikabarkan sakit beberapa waktu lalu, kini tampak makin bugar dan lebih langsing. "Wah, saya berpuasa dan *tirakatan* terus," katanya berseloroh sewaktu ditanya wartawan *Merdeka*. Dengan penampilan baru itu Si Burung Merak tampak lebih gagah dan sisa-sisa kegantengannya pada masa mudanya kembali tampil. Ketika ditemui wartawan *Merdeka*, penyair kelahiran Surakarta 7 November 1935 itu mengenakan jeans hitam dan baju warna serupa. Dengan kancing baju yang tidak semuanya dikancingkan dan rambut yang sedikit panjang, gerak-gerik komandan Bengkel Teater itu masih menyiratkan keperkasaan pada masa lalu. Suaranya pun masih kedengaran "khas", suara yang mempesonakan banyak orang manakala ia tampil membacakan puisi di atas panggung.



1 Cermatilah kalimat yang diapit tanda petik pada Teks A. Apa pertanyaan yang diajukan oleh wartawan sehingga W.S. Rendra menjawab seperti itu? Lingkarilah pertanyaan yang sesuai.

- Apakah Anda berseloroh?
- Mengapa Anda sekarang kelihatan langsing?
- Apakah Anda berpuasa dan tirakatan terus?

2 Berdasarkan Teks A, coba susunlah sekurang-kurangnya dua pertanyaan yang dapat kamu buat untuk mewawancarai W.S. Rendra.



Kenong alat musik tabuh yang dimainkan dalam gamelan Jawa. Alat ini terbuat dari logam dan diletakkan di atas sebuah rancangan atau peti khusus. (EM)

Kentrung alat musik berdawai dengan stem yang mirip dengan ukulele, tetapi ruang resonansi berbentuk bulat mirip banjo. Alat ini dapat dilihat antara lain dalam samrah atau orkes Melayu tahun 1940-an. (EM)

Kolintang alat musik dari Minahasa yang berupa bilah-bilah kayu berjumlah 14 sampai 21 buah; panjangnya 30 sampai 100 sentimeter. Alat yang menyerupai gambang dan berlaras diatonis (seperti umumnya xylofon di Barat) itu mulai berkembang ke seluruh Indonesia sejak tahun 1948. Sebelum orang mengenal kolintang dalam bentuk yang sekarang ini, sebetulnya kolintang Minahasa yang asli terbuat dari kuningan atau tembaga, dan berbentuk seperti bonang dengan pencon, seperti yang masih dikenal di Filipina sampai sekarang. (EM)

Kolipang alat tiup semacam peluit, terbuat dari kayu. Alat ini terdapat di pesisir selatan Kalimantan. (EI)

Malah adalah sejenis alat musik di Maluku Selatan yang sepintas menyerupai terompet. Namun, ini bukan alat tiup karena memang tidak ada lubang untuk ditiup. Untuk menghasilkan bunyi, alat ini dipukul dengan tongkat kecil. (EM)

Rebab adalah alat gesek tradisional di Indonesia yang baru dikenal setelah terjadi akulturasi dengan Arab. Alat ini terbuat dari kayu yang ditutupi kulit, dan mempunyai dua dawai. Alat ini dapat dijumpai sebagai salah satu alat yang dimainkan pada gamelan. (EM)

Rendo sejenis alat gesek yang terdapat di daerah Banten Selatan. Alat ini dimainkan bersama suling. (EM)

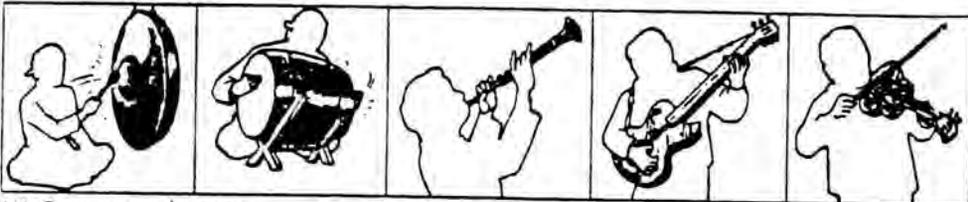
Sacole alat musik di Sulawesi Utara yang terbuat dari dua tempurung dari buah kelapa yang dibelah sama besar. Alat ini dipukul dengan sebuah tongkat kecil bercabang dua (mirip dengan cabang katapel) dan di ujungnya dipasang kenan. Cara memainkannya adalah dengan memutar pangkal cabang tersebut. (EM)

Taler semacam semprian dengan satu lubang yang dapat menghasilkan tiga nada. Perubahan nada dapat dilakukan dengan cara meniup: kuat, setengah kuat, atau lemah. Alat ini ditemukan di Lampung. (EM)

Titam semacam tambur kecil dan pipih yang digantungkan di dada. Tambur ini ditemukan di pulau-pulau kecil Nila Serua (Banda). (EM)

Bacalah secara sepintas kutipan dari ensiklopedi itu, dan isikanlah tempat-tempat kosong pada kotak-kotak di bawah ini nama-nama alat musik yang sesuai.

Pada Kotak A, daftarliah nama-nama alat musik berdasarkan kesamaan cara memainkannya: memukul/menabuh, meniup, memetik, atau menggesek.



(A) Cara memainkannya:

memukul	menabuh	meniup	memetik	menggesek
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Pada Kotak B, daftarliah nama-nama alat musik berdasarkan nama tempat asalnya. Isikanlah sendiri nama tempat asal itu berdasarkan keterangan dari kutipan ensiklopedi di atas.

(B) Nama tempat asal:

Jawa	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Pada Kotak C, daftarliah nama-nama alat musik berdasarkan bahan yang dipakai untuk membuatnya.

(C) Terbuat dari:

logam	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

- 1. Mananam bijan ke tasik.
- 2. Bunga dipetik, perdu ditentang.
- 3. Karena bunga setangkai, dibuang bunga seceper.
- 4. Membuang bunga ke jirat.
- 5. Di mana kembang yang kembang, di situ kumbang yang banyak.

a. Berbuat baik kepada orang yang tak tahu membalas budi.
 b. Di mana ada pesta, di situ ada banyak orang.
 c. Karena kasih pada seseorang, anggota keluarga yang banyak diabaikan.
 d. Pekerjaan yang sia-sia.
 e. Di mana ada gadis-gadis cantik, di sana banyak pemuda berkumpul.
 f. Karena nasib orang lain-lain, terimalah saja apa yang ada.
 g. Irti, dikasih, tetapi mertua, dimusuhi atau dibenci.

bijan, tanaman yg tingginya sampai semeter, daunnya spt daun bayam, petak-petak dan penuh dng biji kecil-kecil, hiasan warnanya (*sesamun indicum*); dr bijinya itu diperoleh minyak - atau *minyak lenga*;
ceper /cèpèr/, datar dan dangkal biasa ditatakan kpd piring yg tidak dalam, yg datar dan rendah pinggirnya
jirat, (Ar) ziarat; 1 tempat berziarah; 2 kubur orang-orang besar yg ditembok dng batu bata atau batu pualam

perdu. Bot 1 rumpun: - *hambu*, - *tebu*, dsb; 2 tanaman perdu, tanaman yg agak rendah batangnya, bercabang-cabang; bangsa semak
putik: bakal buah; buah yg masih kecil terbagi atas *asal buah*, *tandan*, dan *kepala putik*; kepala putik bergetah agar tepung serbuk (sari) yg jatuh bersatu dng kepala putik itu lalu terjadi buah.
 Sumber: Kamus Umum Bahasa Indonesia



Bacalah tabel berikut, yang diambil dari buku *Vademecum Buah-buahan* (Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, Direktorat Bina Produksi Hortikultura, Jakarta, 1992, hlm. 81 dan 82). Di antara 44 jenis buah yang terdapat pada tabel hanya 25 yang dicetak di sini.

a Buah apa saja yang dapat dipetik setiap bulan sepanjang tahun?

b Andaikanlah bahwa kamu akan mengadakan pesta buah di sekolah. Berdasarkan keterangan pada tabel di atas, pada bulan-bulan apa kamu dapat mendapatkan jenis buah yang paling banyak? Pada bulan-bulan apa saja hanya ada sedikit sekali jenis buah yang dapat dipetik?

c Buah apa yang banyak terdapat di daerah tempat tinggalmu? Cocokkah masa petik buah-buah itu dengan yang dituliskan pada tabel di atas?

d Di antara buah-buah yang lazim dipakai untuk membuat rujak, mana yang terdapat pada tabel di atas dan mana yang tidak? Buatlah daftarnya.

IKHTISAR TENTANG MUSIM BERBUAHNYA
BERBAGAI MACAM TANAMAN BUAH-BUAHAN

No. Macam tanaman	Bulan											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	'0	11	12
1. Alpukat	0	0	-	-	x	x	-	-	-	-	-	0
2. Bacang	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	-
3. Blimbing manis	x	x	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-
4. Cempedak	x	x	x	x	x	x	x	0	0	0	0	0
5. Delima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
6. Duku	-	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Durian	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
8. Gandaria	0	0	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0
9. Jambu air	-	-	-	-	-	-	0	x	x	0	x	x
10. Jeruk limau	0	0	x	x	x	-	x	x	x	x	x	0
11. Kemang	0	0	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0
12. Kesemek	-	-	-	-	0	0	0	-	-	-	-	-
13. Mangga	-	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-
14. Manggis	0	0	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
15. Menteng	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16. Mundu	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-
17. Nangka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Nenas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Pepaya	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Pisang	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Rambutan	x	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
22. Salak	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
23. Sawo	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0
24. Srikaya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25. Sirsak	-	-	-	-	-	-	-	x	0	-	-	-

Keterangan: - tidak berbuah
o berbuah lebat
x berbuah biasa

g Amanda mendapat ide untuk mengoleksi buku cerita sejak duduk di kelas 1 SD.
(ciri, gagasan, pikiran)

5 Berikut ini adalah kutipan sebagian dari kamus untuk kata *naik*. Berdasarkan informasi dari kutipan ini, jawablah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan.

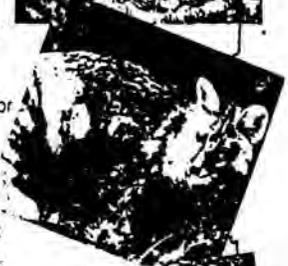
<p><i>naik</i> v 1 bergerak dari bawah ke atas: <i>anaknya segera - ke tempat tidur; layang-layangku tidak dapat -</i>; 2 timbul (tentang matahari): <i>matahari -</i>; 3 mendaki; menaik; memanjat: <i>olahraga - gunung; jalan ini - terus; - pohon jambu</i>; 4 masuk rumah (dengan melalui tangga); masuk ke kendaraan (angkutan, tumpangan, dsb): <i>silakan -!</i>; <i>dng ramah sopir mempersilakan penumpangnya -</i>; 5 mengendarai; menonggang; menumpang (kapal, pesawat, dsb); <i>ia tidak - sepeda; - unta; - pesawat terbang</i>; 6 bertambah tinggi (mahal, besar, banyak, dsb); <i>meningkat: harga barang-barang terus -; gaji pegawai belum juga -</i>; <i>hasil padi tahun ini - dibandingkan dengan hasil tahun lalu; pangkatnya - setingkat</i>; 7 menjadi: <i>tidak ada seorang pun yang mau - saksi</i>; - apel (banding) minis banding kpd pengadilan yang lebih tinggi (seperti banding dari pengadilan negeri ke pengadilan tinggi) atas putusan pengadilan yang lebih rendah; - benang mendapat angin; mendapat hati; mendapat kesempatan berkembang: <i>ketika pamannya menjadi ketua, partainya - be-</i></p>	<p><i>naik</i>; - darah (menjadi) marah: - <i>darahnya karena pengharapannya tidak terpenuhi</i>; - <i>daun 1 selalu menang atau selalu mendatangkan untung (dalam permainan kartu, usaha, dsb): hasil laut yang kini lagi - daun sebagai komoditi ekspor ialah rumput laut</i>; 2 menjadi terkenal (terang bintangnya): <i>kemampuannya memainkan kecapi membawa namanya - daun</i>; 3 menaik mengembang; - <i>derajat menjadi lebih tinggi derajat atau kedudukannya; - geram bangkit marah; timbul marah; - haji menunaikan rukun Islam yang kelima; menjalankan ibadah haji; - hati menjadi gembira (sombong dsb); - kuda hijau ki mabuk; - marak ki 1 mulai bercahaya; 2 sedang memuncak keelokannya (kecantukannya); 3 mulai mendapat nama baik (masyhur); - pitam 1 (menjadi) marah sekali (panas hati): siapa yang tidak - pitam melihat kekurangajaran seperti itu; 2 menjadi pusing, menjadi pening; - raja menjadi raja; - saksi menjadi saksi dalam suatu perkara atau peristiwa; - takhta (dinobatkan) menjadi raja: setelah ayahnya wafat, pangeran muda itu - takhta;</i></p>
--	--

- Apakah arti *naik daun* pada kutipan teks di atas: "Oppie memang lagi naik daun"?
- Apakah arti *naik* pada kalimat *Kamu naik apa tadi ke sini?*
- Apa arti kata *naik* pada kalimat *Jangan naik tinggi-tinggi. Nanti jatuh.*
- Carilah ungkapan dengan *naik* yang berarti 'marah'.
- Ungkapan apakah dengan *naik* yang berarti 'menjadi raja'?
- "Bertes seringkali minum sampai mabuk." Temukanlah ungkapan dengan kata *naik* yang berarti 'mabuk'.

A Menangkap Intisari Teks

Berikut ini adalah tiga teks yang menguraikan macam-macam perંગai binatang. Bacalah satu per satu teks ini, lalu berikanlah judul yang tepat bagi tiap-tiap teks.

- [A] _____
 [B] _____
 [C] _____



[A]

Burung hantu berdentut. Rubah menyalak. Jangkrik mengerik. Angsa menguak. Bajing tanah lorek mengoceh.

Bunyi binatang bukanlah kata-kata. Binatang tidak dapat berbicara seperti manusia. Namun, pelbagai bunyi yang dibuat oleh binatang memang sungguh-sungguh mengatakan sesuatu.

Beberapa bunyi binatang merupakan peringatan. Pada musim semi seekor burung hitam sayap merah yang jantan mengeluarkan bunyi "kuu-ke-ruu". Bunyi tersebut merupakan peringatan bagi burung hitam jantan yang lain. Artinya ialah, "Ini tempatku. Jangan mendekat. Kalau nekat, aku hajar engkau!"

Beberapa bunyi binatang merupakan undangan. Kodok kecil yang disebut pengintip, pada musim semi mengeluarkan bunyi yang mirip lonceng eretan. Bunyi tersebut dibuat oleh kodok jantan untuk mengundang kodok betina agar datang mendekatnya.

Beberapa bunyi merupakan seruan minta tolong. Lumba-lumba yang luka atau menghadapi kesulitan mengeluarkan siulan nyaring. Maka lumba-lumba lain akan datang menolongnya.

Ada bunyi yang berarti "Bahaya!". Apabila emprit merah melihat elang di angkasa, emprit itu akan berbunyi "Cii! Cii!". Emprit merah lain cepat-cepat bersembunyi di antara pepohonan dan semak belukar sehingga tidak terlihat oleh elang tadi.

Dunia Binatang. Hastakarya Anak-anak
 Jakarta: Tira Pustaka, 1984. hlm. 176.
 dikutip dengan perubahan.

(B)

Apa yang dilakukan oleh penguin, yang hidup di Kutub Selatan, pada waktu badai salju bertiup ke arah daratan? Penguin dewasa tergopoh-gopoh mengumpulkan semua anaknya. Anak-anak penguin itu mereka dorong-dorong ke tengah. Kemudian penguin yang dewasa berkerumun membentuk lingkaran ketat mengelilingi anak-anak mereka.

Di Afrika, amatilah sekelompok gajah yang sedang berjalan menyeberangi dataran yang luas. Dari cara berjalan kelihatan bahwa induk gajah akan menjaga anak-anak gajah dengan mengapit mereka di antara tungkai. Apabila melihat seekor binatang yang mungkin merupakan musuh mereka, induk gajah akan mengangkat belalai. Ia lalu mengeluarkan lengkingan nyaring. Ini merupakan peringatan bagi anak-anak mereka agar waspada.

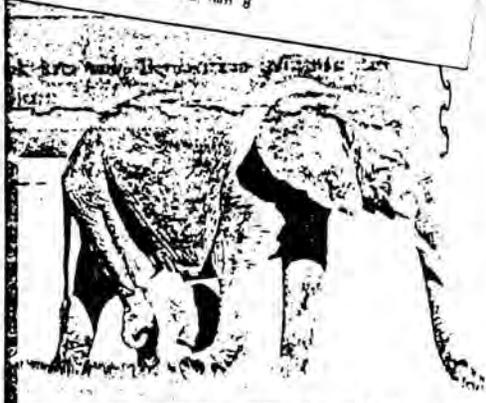
Induk burung cangak di Amerika Utara, pada waktu anaknya baru menetas, berdiri mengipasi anak-anaknya dengan sayap. Anak-anak burung itu akan mati apabila tidak dikipasi karena mereka kepanasan. Oleh karena itu, induk cangak itu berusaha agar anak-anaknya tetap sejuk oleh kipasan sayapnya.

Dunia Binatang: Hاستakanya Anak-anak
Jakarta: Tira Pustaka, 1984
hlm. 175 ditulis kembali

(C)

Binatang dapat membedakan anaknya sendiri dari anak binatang lain yang sejenis dengan penciumannya. Pada waktu anaknya lahir, induk binatang mencium anaknya sambil mengingat-ingat baunya. Jika pada suatu saat ia mencari anaknya di antara anak-anak binatang lain yang sejenis, ia tinggal mencium anak binatang itu satu per satu sampai ia menemukan anaknya sendiri.

Boba 2 Desember 1993 hlm. 8



A Menghadapi Peristiwa dan Mengambil Sikap



Nama Steffi Graf tentunya tidak asing bagi kalian. Kalian pasti pernah melihat wajahnya di surat kabar atau majalah, bahkan gerakannya dalam bermain tenis di layar televisi. Bacalah teks bacaan di bawah ini tahap demi tahap untuk mengikuti peristiwa yang dialaminya dan sikap yang diambilnya pada waktu menghadapi peristiwa itu. Bacaan ini ditulis kembali berdasarkan artikel di *Bisnis Indonesia* 4 Agustus 1995.

1. Petenis putri nomor satu dunia, Steffi Graf (Jerman), yang tengah mempersiapkan diri untuk menghadapi "US Open" 28 Agustus 1995, tanggal 3 Agustus yang lalu bertekad mengundurkan diri. Tekad ini diumumkan sehari setelah ayahnya, Peter Graf, dimasukkan ke dalam penjara karena dituduh menggelapkan pajak.

Lingkarkanlah jawaban yang benar, menurut perkiraanmu.

- (1) Ia mengundurkan diri
- karena ia sangat terpuak oleh peristiwa itu dan merasa malu.
 - sebagai protes karena ia tidak percaya atas tuduhan itu.
 - karena ingin mendampingi sang ayah, yang sangat ia cintai.
- (2) Menurut perkiraanmu, apa reaksi pelatihnya mengenai niat pengunduran diri Steffi Graf?
- melarang Steffi Graf untuk mengundurkan diri.
 - menyetujui dan memahami sikap Steffi Graf.
 - mencoba membujuk supaya jangan mengundurkan diri.

Jaksa Penuntut Umum bagian selatan kota Mannheim, Peter Wechsung, telah melakukan penyelidikan terhadap Graf dan keluarganya sejak April lalu. Pendapatan Graf dari hasil bermain tenis selama ini diperkirakan mencapai 72 juta dolar AS. Oleh ayahnya, yang mendidik Steffi bermain tenis sejak usia tiga tahun, uang itu diputar dalam berbagai bentuk bisnis. Ia antara lain mendirikan perusahaan alat-alat olahraga di Belanda 1987. Secara keseluruhan, Peter Graf, yang menjadi pengelola keuangan keluarga Graf, memperoleh pendapatan bersih sekitar 35 juta dolar AS. Dengan jumlah tersebut, Graf seharusnya membayar pajak sebesar 12 juta dolar AS. Namun, ia hanya mengeluarkan pajak 5 juta dolar AS per tahun.

(3) Apa yang dimaksudkan dengan "menggelapkan pajak"?

Orang yang menggelapkan pajak ialah orang yang _____

(4) Berapa jumlah pajak yang digelapkan dari 1987 s.d. 1995?

Berdasarkan undang-undang Jerman, seliap orang yang dituduh menggelapkan pajak lebih dari 2,9 juta dolar AS sudah pasti masuk penjara. Untuk menghindari pajak yang tinggi di Jerman, petenis putra Boris Becker dan pembalap Michael Schumacher memilih *hengkang* dari negaranya dan mendirikan rumah di Monte Carlo, sebuah kota di Monaco. Di sana berlaku pembebasan pajak untuk periode tertentu. Steffi Graf memang pernah dibujuk ayahnya agar pindah dan Jerman, tetapi ia ingin tetap tinggal di Jerman. Sikapnya yang seperti ini membuatnya makin tenar di mata masyarakat dan kalangan pemerintah.

(5) Apa arti kata *hengkang*? Kata Indonesia apa yang dapat dipakai untuk menggantikannya? Tuliskan kemungkinannya lebih dari satu.

(6) Tuliskan pendapatmu tentang sikap Steffi Graf itu.

Menurut Klaus Hofsaeess, satu-satunya yang dapat membujuk Graf saat ini agar kembali main tenis ialah pers. Oleh karena itu, ia tak segan-segan meminta pers agar menuliskan kembali prestasi Graf dan mengimbaunya kembali ke lapangan tenis. Dari *Cologne Daily Express* terlihat judul benta yang berbunyi "Steffi, please keep playing". Belum diketahui bagaimana tanggapan Steffi Graf atas imbauan pers ini.

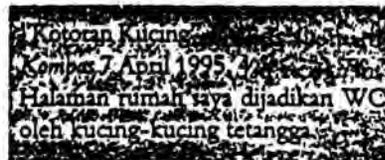
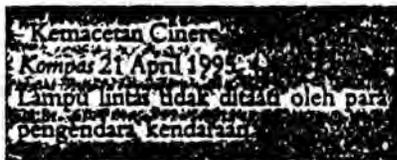
(7) Bacalah kembali jawabanmu pada nomor (1) dan (2) di atas. Setelah membaca bagian terakhir dari bacaan ini, perbaikilah jawabanmu jika tidak sesuai dengan isi bacaan.

(8) Jika kamu harus menuliskan judul berita itu di dalam bahasa Indonesia, bagaimana bunyinya? Jangan menerjemahkan judul bahasa Inggris itu. Tangkaplah kira-kira maksudnya, lalu susunlah kalimat sendiri secara bebas. Buatlah supaya kalimatmu itu menarik untuk dibaca, terutama menarik untuk Steffi.

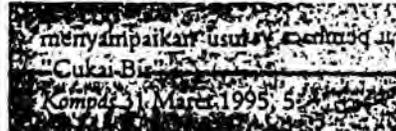
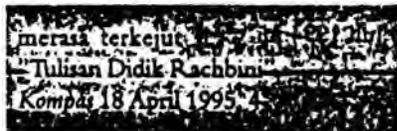
(9) Seandainya kamu adalah Steffi Graf, bagaimana tanggapanmu setelah membaca imbauan pers itu. Setujukah kamu dengan imbauan itu? Apa alasannya? Tuliskanlah dalam beberapa kata.

5 Ia menulis surat itu untuk tujuan positif. Apa yang ia harapkan dapat ia capai dengan menulis surat itu? Tuliskanlah harapannya itu ke dalam satu atau dua kalimat.

6 Kerjakan ini sebagai PR. Bacalah rubrik "surat pembaca" dari surat kabar apa pun dan carilah dua surat yang mengungkapkan keluhan. Tuliskanlah judul surat itu, apa yang dikeluhkan, nama surat kabarnya, serta tanggal dan halamannya. Iktuilah contoh berikut.



7 Kerjakan ini sebagai PR. Selain berisi keluhan, surat pembaca berisi apa saja? Sebutkanlah macam-macam isi surat pembaca. Ikuti contoh berikut.



8 Tulislah sebuah surat pembaca. Surat itu dapat juga merupakan tanggapanmu terhadap surat pembaca yang ditulis orang lain.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D7
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 16.00--16.50
Judul Makalah	: Pengembangan Bahan Ajar Bahasa Indonesia: Pendekatan Komunikatif
Penyaji	: Bambang Kaswanti Purwo
Pemandu	: Maidar Arsyad
Pencatat	: a. Widada b. Alma Evita Almanar
Peserta	: 120 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Ratna, Institut Teknologi Bandung

a. Pertanyaan:

Bagaimana cara membedakan mengeja, membaca, dan menguji pengetahuan?

b. Jawaban:

Dalam membaca ensiklopedi, saya carikan nama "alat" musik yang belum dikenal siswa. Seandainya sudah dikenal pun, belum tentu siswa hafal mengenai nama alat-alat musik itu. Adapun sumbernya dapat berupa *Ensiklopedi Musik Indonesia*.

2. Penanya: Sutarto, SLTP 246, Jakarta

a. Pertanyaan:

Bagaimana mengevaluasi hasil akhir ulangan cawu dan ebtanas dengan soal model pilihan ganda sehubungan dengan pendekatan komunikatif.

b. Jawaban:

Soal pilihan ganda dalam ebta tidak menguji pembelajaran dengan pendekatan komunikatif. Selama ini, ujian tentang kalimat majemuk kepada siswa berupa kalimat setara atau bertingkat. Ini hanya sekadar pengetahuan mengenai kalimat majemuk, baru pada pendefinisian, belum sampai pada komunikasinya atau belum sampai pada pemakaian dalam suatu karangan. Jika ini dapat diarahkan ke sana, kita perlu memberi teks seperti ini. *Lalat selalu menginjak-injak makannannya sebelum melahapnya*. Kemudian, kalimat yang tepat untuk melanjutkan kalimat itu bisa ditarik pilihan a, b, atau c. Maka, kita lalu berpikir mengenai konteks-konteks yang sesuai dengan kalimat itu. Inilah contoh yang dapat kita kembangkan. Dengan teks sependek itu pun kita dapat menguji kemampuan membaca dan juga menguji pemakaian kalimat majemuk dalam konteks tersebut.

3. Penanya: Lance A. Kamusu, STKIP Gorontalo

a. Pertanyaan:

Pendekatan komunikatif mudah diterapkan apabila dikaitkan dengan ragam bahasa lisan, bagaimana bila dikaitkan dengan ragam bahasa tulis?

b. Jawaban:

Pengertian komunikasi itu sekarang ini agak leluasa, agak luas, yang kita kenal sekarang untuk bahasa lisan. Jika saya bertemu Pak Anton Moeliono dan berkata, "Numpang tanya, Pak Ton," dia akan marah karena pertanyaan itu kurang sesuai. Akan tetapi, apabila kita bertanya kepada tukang ojek dengan mengatakan, "Boleh saya bertanya, Pak, di mana Hotel Indonesia itu?" Pertanyaan itu akan ditertawakan oleh tukang ojek. Jadi, kita harus dapat membedakan dengan siapa kita berbicara dan dengan bentuk kalimat seperti apa. Contoh seperti itu tadi bisa saya alihkan ke bentuk teks. Kalau menghadapi teks, kita bereaksi dengan mata dan bagaimana reaksinya terhadap teks ini. Teks iklan lain dengan teks pada buku pelajaran, kamus berbeda dengan cerita silat. Komunikasi di sini berarti bagaimana mata mereaksi terhadap teks, tergantung pada jenis teks itu.

4. Penanya: Endang Nilla P., Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

a. Pertanyaan:

- 1) Kiat-kiat apa saja yang harus dilakukan agar pengajaran membaca secara komunikatif itu dapat berhasil?
- 2) Dalam buku *Titian Bahasa* yang disusun oleh Bapak terdapat masalah homonimi dengan ungkapan. Itu sangat tidak jelas atau membingungkan. Mohon penjelasan!

b. Jawaban:

Bagaimana kalau kita beri pertanyaan kepada siswa? Apa tidak boleh membaca lagi? Kalau mereka membaca lagi, ia berarti melatih kecepatan lagi, asalkan tidak seenaknya, malah lebih tercapai tujuan kita. Ketika meminta mereka banyak membaca, saya kira, yang bagus adalah lewat pertanyaan itu, kita meminta siswa membaca berkali-kali. Jadi, nanti siswa semakin lancar menggerakkan mata untuk menangkap informasi pada teks itu. Mengenai homonimi dengan ungkapan, masalahnya agak teknis. Nanti dapat dibicarakan secara pribadi saja.

5. Penanggap: Julia Read, University of New England

a. Tanggapan:

Saya menanggapi buku Pak Bambang tentang pendekatan komunikatif. Buku tersebut saya gunakan untuk mengajar mahasiswa saya di Australia. Keunggulan pendekatan komunikatif memang dalam komunikasi lisan dalam komunikasi supaya kemahiran berbicara dan mendengar lebih baik. Akan tetapi, tidak hanya dalam kegiatan lisan, membaca juga bisa, tidak hanya membaca huruf, tetapi

juga membaca makna tulisan. Jadi, sebenarnya penulis berkonsentrasi dengan pembacaannya, berarti hal itu juga kegiatan komunikatif.

b. Jawaban:

Terima kasih Ibu Julia yang telah memberikan penjelasan pendekatan komunikatif yang belum sempat saya jawab. Namanya apa, komunikatif atau apa saja, yang penting adalah adanya bahan yang bisa kita kembangkan membuat siswa itu aktif. Siswa lebih menikmati pelajaran Bahasa Indonesia.

6. Penanya: Siti Maryam, STKIP Cianjur

a. Pertanyaan:

Apakah saya dianggap plagiator apabila menjiplak teknik-teknik pengajaran seperti itu, dan apakah teknik tersebut cocok digunakan pada tingkatan dari SD sampai SMU.

b. Jawaban:

Hampir semua buku Kurikulum 1994 sama wajahnya. Akan tetapi, Kurikulum 1994 itu tidak mungkin sama karena guru dituntut berkreasi. Mengenai plagiat buku, saya membuat buku untuk dijiplak, silakan ditiru, karena saya juga meniru dari sumber lain. Saya mengambil teks bahasa Inggris untuk penyusunan buku saya. Saya mengambil kerangka isi bahasa Indonesianya, saya pikir untuk SMP. Saya menjiplak dari sumber yang lain, modelnya bisa kita jiplak, sedangkan isinya (dagingnya) siapa pun dapat berkreasi di situ.

7. Penanya: Mulyono, IKIP Surabaya

a. Pertanyaan:

Apakah pendekatan komunikatif dengan unsur kreatif itu dapat memberikan angin segar pada pengajaran bahasa Indonesia di sekolah. Akan tetapi, rasanya sudah lama pendekatan ini diterapkan dan sudah beberapa pendekatan lain dilakukan, tetapi hasilnya tetap masih kurang berhasil. Mohon penjelasan apa kelebihan cara komunikatif yang ditampilkan oleh Bapak itu.

b. Jawaban

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

8. Penanya: Arif Kusnadi, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Bagaimana menyikapi adanya buku ajar yang kurang komunikatif di daerah tertentu? Karena adanya otoritas, buku tersebut tetap digunakan!

b. Jawaban:

(Pertanyaan tidak terjawab karena waktu telah habis.)

PENGAJARAN BAHASA DAERAH DI SEKOLAH

T. Fatimah Djajasudarma
Universitas Padjadjaran

1. Pendahuluan

Bahasa daerah (BD) digunakan sebagai alat komunikasi baik lisan maupun tulis (terutama bagi masyarakat desa yang monolingual). BD di seluruh Nusantara digunakan sebagai alat pengawet budaya masing-masing. Sebagai pengawet budaya, BD terbukti berfungsi dalam penyelenggaraan upacara-upacara adat atau seni. BD dalam pemakaian sehari-hari di pusat-pusat kota mengalami frekuensi pemakaian yang menurun (apabila dipertimbangkan dari kosakata yang muncul). Kosakata baru, terutama bagi produk budaya baru, akan menjadi kosakata BD dengan penyesuaian lafal dengan lingkungan fonetik yang dimiliki BD masing-masing. Di kota-kota besar lintas bahasa tidak hanya terjadi antara BD dan bahasa Indonesia (BI), tetapi terjadi antara BD-BI dan bahasa Asing (BA).

Frekuensi pemakaian ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan apabila dipertimbangkan dari sudut kepentingan akan kosakata baru karena perkembangan kehidupan yang dinamis antaretnis dan antarbangsa, serta dipertimbangkan dari jumlah pemakai BD. Berdasarkan hasil sensus tahun 1990 tercatat sebanyak 27.055.488 orang (17,13 %) penduduk Indonesia yang berusia lima tahun ke atas belum dapat berbahasa Indonesia, mereka menggunakan bahasa daerah. Hal itu berarti bahwa mereka tergolong ke dalam masyarakat yang monolingual. Sementara itu, sebanyak 23.802.520 orang (15,07%) sehari-hari telah menggunakan BI, dan sebanyak 107.066.316 orang (67,80%) dapat ber-BI di samping menguasai salah satu BD. Mereka tergolong masyarakat bilingual. Sebagian kelompok masyarakat selain menguasai BD dan BI, menguasai salah satu BA. Kelompok terakhir ini tergolong masyarakat penutur yang multilingual (Biro Pusat Statistik, 1990; Alwi, 1997).

Kondisi pengajaran BD di sekolah harus dipertimbangkan dari berbagai segi, antara lain, dari segi sumber daya manusia (SDM), guru BD; materi BD (yang diatur di dalam Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) oleh Depdikbud di setiap provinsi; dan minat siswa untuk mempelajari BD. Ketergantungan akan SDM yang dapat mengajarkan BD dengan baik dan menarik bagi siswa sampai saat ini masih merupakan tantangan yang masih menjadi pemikiran bersama agar BD tetap diminati siswa. BD masih digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah pada kelas I sampai dengan kelas III SD (bahkan di daerah yang masih monolingual/bilingual BD sebagai bahasa pengantar digunakan di kelas berikutnya sebagai alat untuk memperjelas mata pelajaran lain yang menggunakan BI sebagai pengantar, misalnya matematika). Baik di SD maupun di SLTP, BD dijadikan mata pelajaran, bahkan ada pula di SMU (yang memiliki visi dan misi kebudayaan daerah) diajarkan pula sebagai mata pelajaran.

Berdasarkan pegangan pada GBPP 1994, BD termasuk muatan lokal. Muatan lokal merupakan mata pelajaran yang sesuai dengan lingkungan alam, sosial, ekonomi, dan budaya, serta kebutuhan pembangunan daerah. Mata pelajaran muatan lokal mem-

beri peluang untuk mengembangkan kemampuan siswa yang dianggap perlu di daerah masing-masing (lihat pula GBPP, 1994). Muatan lokal terdiri atas muatan lokal wajib dan pilihan. Di setiap provinsi muatan lokal wajib adalah BD yang bersangkutan, sedangkan muatan lokal pilihan dapat berupa kelompok: (1) keterampilan; (2) kesenian daerah; dan (3) bahasa (antara lain, bahasa Inggris).

Ketentuan GBPP tersebut diikuti oleh sekolah yang terkait dengan menyesuaikan diri pada prasarana dan sarana yang tersedia. Untuk muatan lokal wajib BD kelas I dan kelas II SD masing-masing mendapat alokasi waktu 2 jam/minggu; kelas III 4 jam/minggu; kelas IV 5 jam/minggu; dan kelas 5 dan 6 masing-masing 7 jam/minggu. Untuk SLTP kelas 1 s.d. kelas III sebanyak 6 jam/minggu. Dengan alokasi waktu yang seimbang antara muatan lokal wajib dan muatan pilihan, BD diajarkan sesuai dengan proporsi yang diharapkan dan hasil yang maksimum untuk kemahiran berbahasa termasuk apresiasi sastra. Kondisi yang sekarang menuntut penyajian materi yang menarik dan seimbang dengan alat komunikasi modern sebagai sarana kehidupan dunia modern masa kini. Penyesuaian pembelajaran BD dengan lingkungan, baik sosial, ekonomi, budaya maupun pembangunan daerah, masih harus dipertimbangkan secara realistis dalam lintas bahasa yang ada dan pembelajaran BD diberi proporsi berdasarkan kepentingan masyarakatnya (monolingual, bilingual, multilingual).

Sekarang dalam menangani BD di sekolah, misalnya di Jawa Barat, BD diajarkan tidak hanya di SD dan SLTP, tetapi di SMU tertentu (antara lain, SMU Pasundan dan SMU YAS - Yayasan Atikan Sunda) sebanyak 2 jam/minggu. GBPP untuk SMU diatur oleh sekolah masing-masing (diatur sesuai dengan mata pelajaran kebahasaan lain, BI dan atau bahasa Inggris). Materi yang diajarkan termasuk pelajaran "Atikan Sunda" (ke dalam mata pelajaran tersebut dimasukkan materi etika berbudaya (Sunda).

Kondisi lingkungan sekolah sangat mempengaruhi pemakaian BD ragam lisan dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat mempraktikkan BD lisan dalam pergaulannya sebagai hasil pendidikan informal. Kecenderungan pengaruh kosakata dapat dipertimbangkan sebagai pengaruh pergaulan modern yang dinamis (terutama di pusat-pusat kota). Campur kode dan interferensi secara sosiolinguistik dapat dipahami sebagai produk lintas bahasa ke arah penyerapan unsur-unsur baru yang memang belum ada di dalam budaya penyerap. Kosakata yang termasuk istilah keilmuan diserap BD dari/melalui BI. Kosakata yang diserap utuh terutama yang menyangkut istilah belum didapatkan karena memang unsur budaya itu tidak ada sebelumnya. Kondisi pengajaran BD di sekolah pun demikian juga. Kosakata yang diserap utuh seperti pada alat-alat elektronik (*komputer, televisi*) atau yang lainnya (seperti *konglomerat, negosiasi, rudal*) dan kosakata yang telah diserap untuk menjadi milik BD dari BI adalah *Posyandu* dan *Puskesmas*.

Jika ditinjau dari segi SDM (guru), bagi siswa SD masih banyak guru inpres yang ber-BD lain sehingga disadari bahwa dalam mengajarkan BD setempat mereka harus mempelajari terlebih dahulu BD tersebut. Hal ini menjadi masalah pula karena SDM tersebut sebagian belum/tidak mendalami BD dalam hubungannya dengan budaya (tingkah laku atau etika berbahasa) sehingga baru sampai berbahasa sebagai alat komunikasi. Demikian juga SDM yang ada di SLTP dan SLTA, mengingat guru

belum tentu memahami BD (termasuk etika berbahasa).

Jika ditinjau dari segi pengajaran pun, terdapat masalah yang menyangkut belum tersedianya buku-buku yang memadai (bahan ajar) yang sesuai dengan tuntutan GBPP. Guru menggunakan beberapa bahan ajar yang disusun oleh pengarang-pengarang daerah. Materi pengajaran yang disesuaikan dengan GBPP dan waktu yang ditempuh dalam setiap kuartal hendaknya ditentukan oleh pakar yang memang mendalami bidang tersebut. Materi yang disusun disesuaikan dengan tingkat sekolah sehingga menarik perhatian siswa. Pada tingkat SD pengenalan kosakata melalui "dangding" atau nyanyian, untuk pengenalan kosakata dan struktur BD akan lebih menarik perhatian siswa. Materi BD sebagai pelajaran hendaknya dibedakan dari materi BD sebagai muatan lokal.

2. Kondisi yang Diharapkan

Upaya pelestarian BD bertujuan agar BD tetap hidup dan dipakai oleh masyarakat. Upaya tersebut dilaksanakan secara formal di sekolah, secara informal dilakukan melalui pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah oleh lembaga-lembaga swasta, dan melalui penerbitan-penerbitan berupa surat kabar dan majalah. Dari kenyataan tersebut pembinaan dan pengembangannya didasarkan pada kesadaran akan perwujudan penjelasan pasal 36 UUD 1945. Pelestarian BD melalui pembinaan dan pengembangan ini dalam rangka pengembangan BI dan khasanah kebudayaan nasional yang telah ditetapkan dalam GBHN 1978 dan GBHN 1983. Pelestarian dalam arti pengembangan BD ditetapkan dalam GBHN 1988 dan GBHN 1993, bahkan peningkatan penelitian, pengkajian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu disertai dengan penyebarannya melalui berbagai media (lihat Alwi, 1997).

Jika dipertimbangkan dari pihak pemerintah, pembinaan dan pengembangan bahasa, baik BI maupun BD, tetap diperhatikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembinaan dan pengembangan BD dilakukan secara formal (melalui mata pelajaran dan sebagai muatan lokal wajib) dan informal (seperti dinyatakan terdahulu). Kongres BI tahun 1954 di Medan menggarisbawahi perlunya mimbar kuliah yang tidak hanya berbahasa dengan bahasa Indonesia, tetapi juga dengan bahasa daerah, dan secara khusus dicontohkan bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bali, Bugis, Minangkabau, Aceh, dan beberapa daerah Tapanuli, bahkan bahasa Melayu pun dimasukkan ke dalam kelompok ini (lihat pula Alwi 1997). Kongres Bahasa Indonesia III 1978 di Jakarta menyepakati tiga hal yang berkenaan dengan bahasa daerah, yaitu (1) bahasa daerah masih digunakan sebagai bahasa pengantar di kelas I sampai dengan kelas III SD di daerah yang masih memerlukannya, (2) bahasa daerah dapat diajarkan sebagai salah satu mata pelajaran, dan (3) karya-karya sastra daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing. Kongres Bahasa Indonesia IV 1983 di Jakarta mencatat dua hal penting, yaitu (1) penulisan kamus besar bahasa daerah sebagai sumber pemerdayaan bahasa Indonesia perlu digiatkan, (2) pendidikan dalam suasana kedwibahasaan yang strategis yang bertujuan menjamin hak hidup bahasa dan kebudayaan bahasa daerah hendaknya memiliki nilai positif.

Kongres Bahasa Indonesia dalam keputusannya selalu mempertimbangkan baik

BI maupun BD karena keduanya berfungsi sebagai aset bangsa dan sebagai jati diri bangsa yang bernaung di bawah Bhineka Tunggal Ika (binekanya adalah bahasa-bahasa daerah, dan ikanya adalah BI). BI sebagai bahasa persatuan ini menjadi identitas nasional yang didukung oleh BD dalam pembinaan dan pengembangannya. BI dan BD kehadirannya mutlak karena kondisi dan hakikat bahasa-bahasa di Indonesia. Hubungan BI-BD tidak berdasarkan minoritas, tetapi berdasarkan kepentingan bersama akan persatuan dan kesatuan bangsa (demi satu alat komunikasi bagi masyarakat dwi-bahasa). Kongres BD di setiap daerah sebagai bukti BD dipelihara, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakatnya. Kongres BD ini menghasilkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan pembinaan dan pengajaran BD. Harapan agar pemerintah daerah tetap mendukung sarana dan prasarana pembinaan dan pengembangan BD, selalu menjadi keputusan yang tidak kalah pentingnya daripada pembinaan dan pengembangan bahasa itu sendiri sebagai pengawet budaya daerah. Kondisi yang diharapkan sehubungan dengan pengajaran BD ini berhubungan dengan (1) pengadaan materi (bahan pelajaran) yang mutakhir dan menarik minat siswa (materi disesuaikan dengan unsur yang diminati siswa pada jenjang pendidikan tertentu); (2) SDM (guru) yang mampu memahami BD dengan segala etikanya (termasuk pembinaan mental dalam etika berbahasa); (3) meningkatkan minat siswa dalam mempelajari BD melalui hubungannya dengan aset pariwisata bagi setiap daerah.

Upaya pelestarian BD (seperti bahasa Sunda) sudah dilakukan sejak zaman penjajahan Belanda (awal abad XIX). Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan oleh pemiliknya hendaknya menjadi lebih bermutu (dalam arti memiliki bobot baik dari segi pemakaian BD yang baik dan benar sesuai dengan tuntutan BD itu sendiri). Apabila dipertimbangkan bahwa pembinaan dan pengembangan BD dilakukan sejak zaman penjajahan demi kepentingan pemahaman budaya agar mereka dengan mudah melumpuhkan manusia melalui budaya bahasanya. Pembinaan sekarang hendaknya diarahkan pada pemahaman BD dalam membina budaya sebagai jati diri bangsa dan sebagai pemer kaya BI. Bangsa yang besar akan selalu memelihara budayanya melalui bahasanya, "Bahasa cermin bangsa" harus dipahami secara luas dan nuansa pemahaman dari segi jati diri bangsa. Faktor yang menghambat dalam pembelajaran BD ini menyangkut tiga hal yang dikemukakan di atas. Di samping itu, BD tidak menjadi bahan ujian negara sehingga dianggap mata pelajaran sampingan oleh para siswa, padahal mata pelajaran ini yang akan membina siswa dari segi etika (etika sangat diperlukan bagi masyarakat global).

3. Strategi yang Perlu Ditempuh

Strategi yang perlu ditempuh menyangkut arah kebijakan kebahasaan yang ditetapkan dalam GBHN dan langkah-langkah pelaksanaannya yang dirumuskan baik di dalam kongres BD maupun dalam kongres BI. Arahan dan keputusan kongres tersebut harus dijadikan pedoman dalam merencanakan berbagai kegiatan pelestarian dan strategi yang ditempuh. Strategi yang ditempuh dapat pula dilakukan dengan menggarisbawahi arahan yang diungkapkan Alwi (1997) bahwa, "Setiap kegiatan pembinaan dan pengembangan BD hendaknya bermuara pada (1) kemantapan bahasa daerah yang ber-

sangkutan sebagai alat komunikasi, (2) peningkatan mutu penggunaan bahasa daerah, (3) peningkatan peran bahasa daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan daerah, (4) peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, dan (5) peningkatan peran bahasa dalam pemerayaan kosakata bahasa Indonesia" (hlm. 52).

Berdasarkan arahan tersebut dapat kita pertimbangkan strategi dengan tujuan yang penting itu, yaitu pemantapan BD yang bersangkutan sebagai alat komunikasi menyangkut strategi dari pengadaan sarana dan prasarana, serta peran pemerintah dalam menunjang usaha tersebut. Di dalam hal kemantapan BD sebagai alat komunikasi dapat dipertimbangkan peningkatan kompetensi komunikatif, gramatikal, dan pragmatik. Ketiganya berhubungan dengan SDM, materi pengajaran, dan siswa itu sendiri untuk pendidikan formal. Di dalam pendidikan formal ini yang menyangkut tingkat keformalan mata pelajaran yang diujikan atau tidak) merupakan kendala dalam peningkatan mutu belajar BD yang dihadapi siswa sekarang ini;

Arahan kedua peningkatan mutu penggunaan BD menyangkut pemakaian BD secara lisan dan tulis. Secara lisan peningkatan mutu penggunaan BD dalam jangkauan komunikatif dapat dicapai, tetapi secara tulis dalam peningkatan mutu melalui kompetensi gramatikal dan pragmatik harus ditunjang oleh sarana dan prasarana karena secara formal ragam tulis ini hanya dapat digunakan di sekolah-sekolah. Strategi yang ditempuh dalam peningkatan mutu hendaknya diupayakan agar sarana yang menyangkut bahan pembelajaran BD sesuai dengan klasifikasi masyarakat monolingual dan bilingual sehingga sasaran yang bermutu dapat dicapai melalui arahan tersebut. Pengadaan kamus BD-BD bagi masyarakat monolingual akan sangat membantu peningkatan mutu pembelajaran BD. Kamus BD-BI dapat pula digunakan bagi masyarakat monolingual yang akan memahami BI. Baik kamus umum maupun kamus budaya akan sangat bermanfaat bagi pelajaran BD di sekolah. Di samping kamus itu, juga pengadaan tata bahasa BD akan berguna bagi pengembangan mutu tersebut (tata bahasa BD dengan bahasa pengantar BD akan bermanfaat bagi masyarakat monolingual, dan tata bahasa BD dengan pengantar BI akan berguna bagi masyarakat bilingual). Di samping itu, dapat pula disusun tata bahasa kontrastif BD-BD dan sebaliknya BI-BD bila memungkinkan.

Arahan ketiga peningkatan peran BD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kebudayaan daerah menyangkut unsur-unsur budaya (pembelajar, pengamat, penikmat). Unsur budaya yang dikembangkan sebagai upaya pengembangan wilayah budaya (pembelajar, pengamat, penikmat). Unsur budaya yang dikembangkan, antara lain, aset wisata daerah, seperti folklor atau legenda daerah yang dapat diterjemahkan ke dalam BI dan atau BA sebagai pengembangan wilayah budaya (lihat Djajasudarma, 1998). Untuk hal tersebut dapat ditempuh strategi kerja sama lembaga kebahasaan dengan lembaga pariwisata dalam mengemas dan menyebarluaskan aset wisata tersebut.

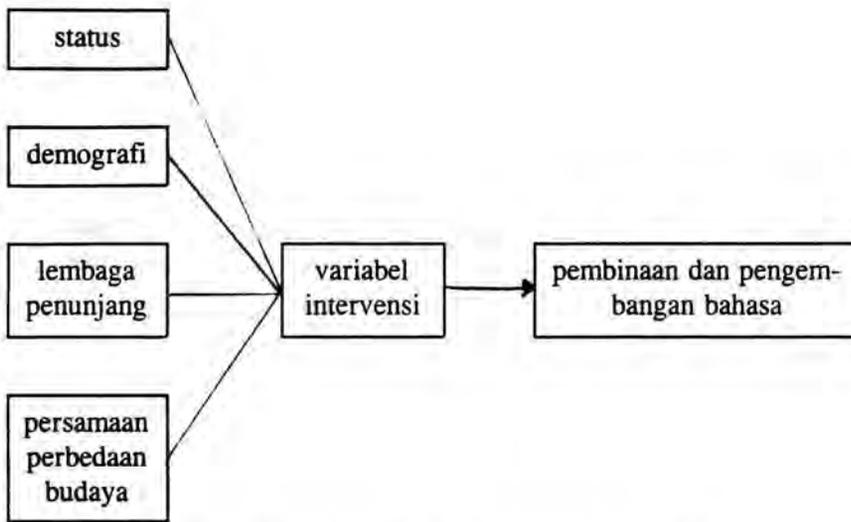
Arahan keempat peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, dan peningkatan peran bahasa daerah dalam pemerayaan kosakata bahasa Indonesia. Peningkatan kegiatan penelitian ini harus disertai peningkatan pemanfaatan hasil penelitian untuk peningkatan mutu penggunaan BD melalui peny-

sunan bahan pembelajaran. Bahan tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengembangan bahasa dan sastra daerah. Dalam hal peningkatan peran BD dalam pemerikayaan kosakata BI, strategi yang perlu ditempuh adalah penerbitan kamus bilingual BD-BI dan atau BI-BD, serta penyebarluasan kamus tersebut, yang setakat ini menjadi kendala karena prasarana yang belum memadai. Dalam hal pemerikayaan harus dipertimbangkan pula bahwa setiap bahasa baik, BD, BI maupun BA (tertentu), masing-masing memiliki fungsi kemasyarakatan, yakni (1) fungsi bahasa resmi pada taraf negara dan daerah, (2) fungsi bahasa perhubungan luas, (3) fungsi bahasa pendidikan formal, (4) fungsi bahasa kesenian, dan (5) fungsi bahasa keilmuan dan keteknologian. Fungsi BI-BD sudah diatur di dalam Politik Bahasa Nasional (Halim (Ed), 1984). Sumbangan BD sebagai pemerikaya kosakata BI dan hubungan BI-BD dikembangkan ke arah pembagian tugas yang saling melengkapi. Hubungan BI-BA dianggap sebagai pemanfaatan sumbangan BA untuk mengembangkan bahasa nasional (BI). Sumbangan BA dianggap sebagai sumbangan yang lumrah, dan strategi yang kita pegang adalah pakailah BA dengan baik dan benar pada saat diperlukan di dalam berbahasa Indonesia atau bagi kosakata yang sulit dipahami (demi kejelasan pemahaman). Kendala bahwa pemakaian BA ini bergantung pada sikap bahasa (*language attitude*) demikian pula kendala bagi pemakai BD. Jika dipertimbangkan dari segi kendala bahwa ber-BD menyangkut keunikan eufemisme (etika berbahasa melalui undak-usuk), dapat dipahami sebagai hal kendala mempelajari BD. Akan tetapi, kenyataan menunjukkan bahwa BD dapat difungsikan sebagai alat komunikasi dalam mencari padanan kosakata BA (bagi kosakata yang tidak ditemukan padannya di dalam BI). Oleh karena itu, strategi bahwa BD harus tetap diajarkan tidak hanya semata-mata arahan (4) akan tetapi demi pemanfaatan padanan kosakata BA-BD bila BI tidak memiliki padanan kosakata yang diperlukan. Sebagai bukti, dapat diambil contoh BD (Sunda) dengan bahasa Jepang (lihat Djajasudarma, 1997).

Kosakata:

Bahasa Jepang	BD(Sunda)		BI:
<i>nasaru</i> (honorifik dari <i>suru</i>)	<i>nasaru</i> 'ngadamel' <i>suru</i> 'migawe'	-H(alus) -K(asar)	bekerja
<i>kudasaru</i> (honorifik dari <i>Kureru</i>)	<i>kudasaru</i> 'masihan', 'maparin' <i>kureru</i> 'mere'	-H -K	memberi
<i>ossharu</i> (honorifik dari <i>iu</i>)	<i>ossharu</i> 'nyarios (pers.2/3) 'nyanggem' (pers. 1) <i>iu</i> 'ngomong'	-H -H -K	berkata

Faktor yang dapat dipertimbangkan dalam strategi pembinaan dan pengembangan BD dan merupakan faktor yang mempengaruhi pembinaan dan pengembangan bahasa pada umumnya dapat digambarkan melalui bagan berikut.



(lihat Appel & Peter Muysken, 1987; Djajasudarma, 1996)

Daftar Pustaka

- Alwi, Hasan. 1997. "Pelestarian Bahasa Daerah dalam Pembinaan Bahasa Indonesia". Di dalam *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam Menghadapi Pasar Bebas*. Seminar Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, 7--9 Juli 1997. Halaman 48--52. Medan: Himpunan Pembina Bahasa Indonesia.
- Appel, Rene and Peter Muysken. 1987. *Language Contact and Bilingualism*. Great Britain: Edward Arnold. A Division of Hodder & Stoughton.
- Djajasudarma, T. Fatimah. 1996. "Menyikapi Kosakata Asing dalam Berbahasa Indonesia". Di dalam T. Fatimah Djajasudarma dan Wilson Nadeak (Ed.) *Bahasa dan Sastra Indonesia*. Seminar Nasional VI Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), 10--12 Desember 1996. Halaman 25--35. Bandung: HPBI dan Yayasan Pustaka Wina.
- , 1997. "Linguistik dan Pengajaran Bahasa: Satu Ancangan Tata Bahasa Kontrasif dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada Pasar Bebas 2003". Di dalam *Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dalam menghadapi Pasar Bebas*. Seminar Nasional VII Bahasa dan Sastra Indonesia, 7--9 Juli 1997. Halaman 221--234. Medan: Himpunan Pembina Bahasa Indonesia.
- , 1998. "Bahasa Indonesia sebagai Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aset Wisata Daerah: Studi Kasus Penerjemahan Legenda Daerah Jawa Barat". Di dalam *Bahasa dan Sastra Indonesia Sebagai Pesona Seni dan Budaya dalam Pariwisata Indonesia*. Seminar Nasional VIII, 21--23 Juli 1998. Halaman 164--173. Semarang: Himpunan Pembina Bahasa Indonesia.
- Garis-Garis Besar Program Pengajaran (GBPP). 1994. *Muatan Lokal Bahasa dan*

Sastra Sunda. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Barat.

Halim, Amran. (Ed.) 1984. *Politik Bahasa Nasional*. (Jilid 1 dan 2). Jakarta: Balai Pustaka.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D3
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 15.30--16.20
Judul Makalah	: Pengajaran Bahasa Daerah di Sekolah
Penyaji	: T. Fatimah Djajasudarma
Pemandu	: Kamarudin
Pencatat	: a. Hari Sulastri b. Adnan Usmar
Peserta	: 60 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suparno, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Idealnya, pengajaran bahasa di Indonesia itu dilaksanakan dengan target tertentu, yakni kemahiran berbahasa yang memadai baik Indonesia maupun daerah. Dalam kondisi yang demikian itu tidak ada yang terkalahkan. Akan tetapi, dalam kenyataannya kemahiran berbahasa daerah cenderung tergeser oleh kemahiran berbahasa Indonesia. Hal itu disebabkan oleh perluasan penggunaan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Akibatnya, anak-anak juga tidak begitu menguasai bahasa daerah sekarang. Bagaimana strategi yang paling tepat dilakukan agar bahasa daerah tetap bertahan dan bahasa Indonesia dapat berkembang dengan baik.

b. Jawaban:

Ternyata masih banyak orang atau pakar yang memikirkan bahasa daerah ini. Memang ini Kongres Bahasa Indonesia, tetapi bahasa daerah adalah salah satu sumber pemer kaya bahasa Indonesia. Oleh karena itu, makalah saya ini hanya membahas kondisi pengajaran bahasa daerah di sekolah. Kondisi pengajaran bahasa daerah di sekolah memang idealnya sama dengan pengajaran bahasa Indonesia. Akan tetapi, untuk idealnya hal itu sulit sekali. Menurut kenyataan, ada pergeseran fungsi bahwa bahasa daerah itu lebih cenderung ke arah budaya karena adat-istiadat dipertahankan dalam bahasa daerahnya. Kalau dilihat dari kosakatanya, kata-kata emosional masih tetap ada dalam bahasa daerah. Sebagai contoh, kita lihat saja istilah yang menyangkut strategi, yaitu *mengentaskan*. Mengapa kita harus memakai *mengentaskan* padahal artinya dalam bahasa Indonesia 'mengangkat' sehingga kosakata *mengentaskan kemiskinan* sebenarnya berdampak terhadap perubahan sosial. Padahal, kata *mengentaskan* berasal dari bahasa Jawa, *entas* artinya 'mengangkat'. Karena kita lupa memakai kata *dari*, dampaknya adalah kita sengsara karena *mengentaskan kemiskinan* berarti 'mengangkat kemiskinan', seharusnya *mengentaskan*

masyarakat dari kemiskinan. Karena ada pemakaian istilah *mengentaskan kemiskinan*, kita menjadi miskin sekarang.

Bahasa Indonesia lebih cenderung ke arah iptek, tetapi kalau kita menuntut kecanggihan kosakata yang ada, misalnya pada tahun 1920-an, kecenderungan itu tidak mungkin dapat terwujud karena kosakata kita lebih banyak kosakata budaya. Istilah yang komunikatif di dalam bahasa daerah masing-masing kalau dilihat dari kosakata pemakai bahasa daerah itu, mungkin hal itu menurun karena kosakata bahasa daerah yang lama sudah tidak dikenal lagi. Memang, ada beberapa kosakata yang sudah tidak dikenal lagi. Kosakata itu bisa lahir, berkembang terus, bisa mati, menjadi usang, atau arkais. Jadi, kosakata tidak bisa bertahan tetap. Kosakata yang ada itu terdesak oleh kebutuhan dalam fungsinya untuk menyatakan sesuatu dalam budaya tertentu, budaya baru. Jadi, strategi yang paling tepat untuk keduanya harus kita pikirkan bersama, barangkali.

2. Penanya: Nangsari Ahmad, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. Pertanyaan:

Saya ingin bertanya mengenai pengajaran bahasa daerah, terutama bahasa daerah dialek Melayu. Saya melihat adanya kecenderungan bahwa di Sumatra Selatan, yang diajarkan lebih banyak linguistiknya, seperti pengajaran bahasa Indonesia. Apa arti pengembangan pengajaran bahasa daerah untuk daerah semacam itu sebab bahasa Indonesia itu sendiri sebenarnya bahasa Melayu. Apakah cara pengembangan bahasa daerah itu sama dengan cara pengembangan bahasa Indonesia yang kemudian menjadi bahasa Melayu tinggi. Apakah kita tidak kembali ke belakang? Hal itu banyak terjadi di daerah-daerah. Begitu bersemangatnya pemerintah daerah untuk mengajarkan bahasa daerah, sampai-sampai pejabat kantor wilayah pun tidak tahu apa yang akan dilakukan.

b. Jawaban:

Kalau kita bingung untuk mengajarkan bahasa daerah mana yang strategis, bisa terjadi pembagian bahasa-bahasa, seperti yang terjadi di Tapanuli. Di Tapanuli ada lima bahasa daerah yang diajarkan, yaitu Batak, Fak-Fak, Mandailing, Toba, dan Karo. Jadi, pengajaran bahasa daerah bergantung kepada pemerintah daerah setempat, asalkan pemerintah daerah tidak otoriter. Hendaknya ahli-ahli bahasa itu memiliki mental intelektual. Di Jawa Barat ada suatu daerah yang menggunakan bahasa Melayu, bahasa Sunda, dan bahasa Jawa. Mereka, masing-masing, mempertahankan bahasanya, tetapi saling mengerti. Mungkin dapat dipertimbangkan bahwa di pusat kota, biasanya pusat kebudayaan, bahasa itu akan menjadi besar dan mungkin yang akan menjadi bahasa standar. Bahasa Sunda, misalnya, bahasa Priangan yang diangkat menjadi bahasa resmi bahasa Sunda. Jadi, di Jawa Barat pada tahun 1912 bahasa Sunda telah diresmikan oleh pemerintah Belanda. Dan, ini mungkin salah satu

bahasa daerah yang perawatannya lebih berkelanjutan dan berkembang. Sampai saat ini kongres yang akan datang itu adalah Kongres Bahasa Sunda VII, menyamai kongres bahasa Indonesia. Memang, bahasa Sunda lahir lebih dahulu jika dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Seharusnya bahasa Sunda sudah menuju ke arah kesempurnaan karena sudah mempunyai tata bahasa Sunda. Bahasa Indonesia dapat digunakan di daerah perbatasan. Jadi, ada tata bahasa Sunda yang pengantarnya bahasa Indonesia. Hanya mungkin dituntut satu jenis lagi, yaitu tata bahasa Sunda dalam bahasa Inggris.

3. **Penanya:** Sudrajat, Universitas Lampung, Bandar Lampung

a. **Pertanyaan:**

Bahasa apakah yang harus kita ajarkan dan strategi apa yang dapat digunakan di daerah? Hal ini ditujukan terutama pada daerah yang mempunyai bahasa daerah yang tidak hanya satu, seperti di daerah Lampung. Banyaknya dialek dan bahasa daerah di Lampung ini akan membingungkan pihak Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Lampung. Menurut Ibu, apa yang harus dikerjakan?

b. **Jawaban:**

Dalam menentukan bahasa mana yang diajarkan, dapat dilihat dari jumlah pemakainya. Berdasarkan prinsip dialektologi, bahasa yang jumlah pemakainya terbesar, seperti bahasa Jawa, dulu, jumlah pemakainya terbesar di Indonesia. Kemungkinan tahun berikutnya tingkat jumlah itu akan tergeser oleh bahasa Melayu dialek Jakarta. Kita melihat bahwa bahasa Melayu dialek Jakarta ini seolah-olah akan menjadi bahasa Indonesia ragam lisan sebab bahasa Indonesia yang baik dan benar terdapat dalam ragam tulis dan berkembang di sekolah-sekolah. Jadi, kalau diadakan sensus, mungkin bahasa Jawa tidak lagi nomor satu di Indonesia. Akan tetapi, pemakai bahasa Jawa sekarang lebih cenderung memakai bahasa Melayu dialek Jakarta. Untuk mempertahankan bahasa daerah supaya bahasa daerah tetap hidup, kegiatan dapat diawali dengan pembelajaran pendidikan bahasa daerah secara informal. Di rumah atau dalam keluarga pada usia prasekolah anak dapat diajari bahasa daerah, tetapi sesudah bersekolah, anak dapat berbahasa Indonesia atau berbahasa Inggris. Jadi, strategi yang ditempuh, tetapi juga tidak ada yang mengharuskannya, adalah bahwa pada saat prasekolah anak diharapkan berbahasa daerah.

4. **Penanya:** Frans Rumbrawer, Universitas Cenderawasih, Jayapura

a. **Pertanyaan:**

Sama seperti persoalan bahasa daerah yang dikemukakan oleh teman dari Bandar Lampung, persoalan bahasa daerah di Irian Jaya sama seperti itu. Di Irian Jaya ada 253 bahasa daerah dan kami merasa susah sekali. Yang lebih bingung ialah pemerintah daerah dalam menentukan bahasa daerah mana yang

perlu diajarkan.

Ada satu kenangan di masa lampau ketika saya masih kecil pada zaman Belanda. Zaman Belanda dulu bahasa Biak sudah diajarkan sebagai bahasa muatan lokal untuk mengajarkan Matematika dan hal-hal yang bersifat eksak. Hal itu dimengerti oleh orang Biak, lalu orang Biak bisa menjadi guru untuk suku-suku yang lain di Irian Jaya. Sesudah berintegrasi, pemerintah sengaja melupakannya. Sekarang hal itu mulai marak untuk diangkat. Saya kira, kita tertinggal jauh untuk melakukan hal itu karena sebetulnya orang luar sudah membuatnya, tetapi sengaja kita lupakan atau mungkin sengaja dilupakan. Orang luar sudah berusaha membuat atau meneliti bahasa daerah sehingga bisa diberlakukan atau diajarkan di Irian Jaya. Lalu, ada faktor "x" sehingga masalah itu sengaja ditarik dari Bumi Cenderawasih. Hal itu merupakan sesuatu yang merugikan Indonesia, seperti *Summer Institute of Linguistic (SIL)*.

Untuk daerah yang banyak bahasa daerahnya, terutama di Irian Jaya, dapat diproyekkan penelitiannya. Bahasa Sunda, umpamanya, sangat diminati oleh peneliti asing. Kebetulan di sini ada Pak Anderson. Beliau membuat *Spoken English* di samping *Spoken Sundanisch* dan di Amerika sudah ada disertasi tentang fonologi bahasa Sunda.

b. Jawaban:

Ditariknya SIL, proyek sebagai penelitian bahasa di Irian Jaya, mungkin karena ada program khusus dan mungkin proyek itu sudah selesai kontraknya sehingga ahli-ahli ditarik. Seharusnya, sebelum mereka ditarik, proyek itu sudah menghasilkan ahli kita yang andal dan terampil dalam penelitian itu. Jadi, memang lembaga yang baik adalah lembaga tempat kita menjadi pemimpin. Dalam beberapa *termen*, menurut aturan, kita sudah bisa menghasilkan tangan kanan kita yang persis sama dengan kita. Jadi, jangan seperti "Ligna" kalau sudah duduk lupa berdiri.

SIL ditarik karena mungkin programnya sudah selesai. SIL dan penelitiannya harus diteruskan oleh Universitas Cenderawasih, perlu ada jurusan bahasa daerah atau bahasa Nusantara yang meneliti bahasa di Irian.

5. Penanya: Fuad Abdul Hamied, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Ibu Fatimah menyebutkan bahwa usaha penelitian itu merupakan bagian yang penting dalam pengajaran pengembangan bahasa daerah. Saya mengamati bahwa ada ketidakadilan dalam pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu, terutama jika dikaitkan dengan kajian-kajian yang berkenaan dengan interferensi. Banyak orang yang menyatakan bahwa rusaknya bahasa Indonesia oleh bahasa daerah lebih banyak daripada rusaknya bahasa daerah oleh bahasa Indonesia karena kita memang harus bejalar bahasa Indonesia. Menurut Ibu, bagaimana sebaiknya sikap kita dalam rangka melaksanakan Pasal 36 UUD 1945.

b. Jawaban:

Mengenai interferensi, bahasa Indonesia dirusak oleh bahasa daerah, barangkali pemahamannya tidak demikian, yang jelas adalah saling meminjam dan/atau saling menerima, saling menyerap dan saling memberi dalam rangka proses pembinaan dan pengembangan bahasa. Jadi, bahasa Indonesia dapat mengembangkan kosakata bahasa daerah atau bahasa daerah dapat memperkaya bahasa Indonesia dan bahasa daerah hanya berfungsi sebagai aset untuk pengembangan kosakata bahasa Indonesia. Bahasa daerah diserap oleh bahasa Indonesia dan bahasa Indonesia juga diserap oleh bahasa daerah. Untuk istilah ilmu tertentu, terutama iptek, bahasa daerah menyerap bahasa Indonesia demi kedinamisan.

6. Penanya: Akhlan Husen, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Pada tahun 1975, menjelang Kongres Bahasa Indonesia, mulai dipersoalkan bahasa daerah dan bahasa nasional. Ada tulisan yang menggegerkan Indonesia pada waktu itu, yang menyatakan, "Tunggu bahwa bahasa daerah akan menjadi bom waktu bagi bahasa Indonesia." Ketika pernyataan itu dilontarkan, hampir seluruh orang yang memelihara bahasa daerah memprotes keras. Alhamdulillah, dari tahun 1975 sampai sekarang bahasa daerah mendapat perhatian, baik dari pemerintah daerah setempat maupun dari pemerintah pusat, dan minimal di sekolah dasar (SD) dan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) bahasa daerah menjadi muatan lokal. Kebijakan muatan lokal itu untuk beberapa propinsi ternyata berbeda. Di Jawa Barat, misalnya, ada muatan lokal wajib bahasa Sunda, sedangkan di situ diajarkan juga bahasa Indramayu atau bahasa Cirebon karena mereka memilih di samping muatan wajib bahasa Sunda, ada muatan lokal wajib daerahnya itu sendiri. Terbayang oleh saya bagaimana para siswa menerima itu semua, alih-alih ada pikiran diajarkan bahasa Inggris. Oleh karena itu, hendaknya kita melihat persoalan itu secara arif bahwa bahasa daerah yang sudah memiliki fungsi yang jelas dalam politik bahasa nasional, seperti sudah dikatakan, mari kita serahkan ke daerahnya masing-masing sebab undang-undang mengatakan bahwa hanya mereka yang memelihara dan menghormati bahasanya akan dilindungi oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita sangat hormat kepada Kongres Bahasa Indonesia VII ini yang masih memberi porsi pembicaraan tentang bahasa daerah. Meskipun demikian, dari semangat kongres ini, dengan tidak mempersoalkan situasi seperti di Irian Jaya dan Lampung, bahasa daerah mana yang akan diajarkan di sana, itu sangat bergantung kepada pemerintah daerah. Di Lampung ada pendatang berbahasa Jawa atau Sunda. Kepada pendatang itu bahasa apa yang akan diajarkan di sana, yang akan dijadikan muatan lokal di sana, diserahkan kepada pemerintah daerah. Saya pikir, hal itu bisa diterima. Ada beberapa faktor yang menentukan berhasilnya pembelajaran. Bagaimana pendapat Ibu tentang bahan pelajaran di SD yang sangat gandrung dengan kosakata

lama. Cucu saya, pelajar kelas II SD, mengeluh karena ditanya tentang istilah nama anak-anak binatang dalam bahasa Sunda. Dia menangis karena tidak tahu. Saya pikir, memberikan bahan yang demikian tidak adil dan tidak arif dari segi mana pun.

b. Jawaban:

Dinyatakan dalam mulok (muatan lokal) itu bahwa bahasa daerah yang diajarkan adalah bahasa daerah masing-masing. Oleh sebab itu, muncullah di Jawa Barat itu bahasa Sunda dialek Indramayu yang diajarkan di Indramayu, bahasa Sunda dialek Cirebon yang diajarkan di Cirebon. Sebenarnya kalau mau dipilih, bahasa yang ada di pusat kota itulah yang dipilih. Dengan memakai prinsip *Gumpers and Trudgill*, dalam *dialektologi* kita melihat mana bahasa *mutual intelligibility* yang saling dimengerti, antara bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia yang bisa berkembang, kita lihat Malaysia dan Indonesia sama-sama Melayu. Malaysia mempunyai nama bahasa Melayu Malaysia. Kita mempunyai nama bahasa Indonesia dari rumpun yang sama sehingga ada sisa-sisa yang dipertahankan atau ada yang berkembang. Dari sisi geografi dan politik atau karena kebudayaan yang berbeda, bahasa itu pun berbeda. Kata *kelamin* di Malaysia berarti 'keluarga' sehingga kalau dikatakan, "Kelamin encik besar", orang Indonesia akan menanggapinya lain, "Dia kok tahu milik saya."

Dalam hal fungsi bahasa daerah, apakah ada kecenderungan bahasa daerah menjadi "bom waktu". Kita sudah mempunyai Politik Bahasa Nasional dan bahasa daerah mempunyai fungsi masing-masing. Oleh sebab itu, bahasa daerah itu lebih berfungsi ke arah budaya sebab adat-istiadat tiap-tiap daerah belum tentu sama atau berpadanan dengan bahasa Indonesia. Misalnya, istilah-istilah dalam upacara perkawinan. Semodern-modernnya bangsa Indonesia, kalau menikah tentu memakai blangkon. Di Irian Jaya atau Manado juga dipakai pakaian adat. Jadi, itu tetap saja dipertahankan. Kalau itu tidak dipertahankan, *Bhinneka Tunggal Ika* ini tidak bisa kita pertahankan, yang *bhinneka* itu bahasa dan budaya, sedangkan yang *ika* bahasa Indonesia.

Di dalam bahasa daerah yang mempunyai tingkat tutur, bahasa Indonesia dapat dipakai sebagai penetral untuk menyatakan kosakata yang terlalu halus bagi seorang anak, atau terlalu kasar bagi seseorang yang harus kita hormati yang statusnya lebih tinggi. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa yang mengamankan si anak dari tingkat tutur. Jadi, pelariannya ke bahasa Indonesia.

Kalau dikatakan tidak adil, juga tidak tepat, karena kita hidup ini tidak cukup hanya mempertahankan milik kita. Tanpa saling memberi tentu tidak akan ada kehidupan yang harmonis. Jadi, bahasa daerah biasanya menyerap kata yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dari bahasa Indonesia. Di daerah-daerah yang masih bersifat monolingual, bahasa daerah digunakan untuk menjelaskan mata pelajaran yang ditulis di dalam bahasa Indonesia. Hal itu berfungsi untuk mengangkat kembali fungsi bahasa daerah. Bahasa daerah

digunakan sebagai alat untuk menerjemahkan kosakata yang tidak ada di dalam bahasa Indonesia, tetapi kosakata itu terikat pada tingkat tutur. Kita perlu mengadakan seminar untuk bahasa-bahasa yang memiliki tingkat tutur, seperti bahasa Sunda, Bali, Jawa, dan Madura.

PENGAJARAN BAHASA ASING DI SEKOLAH

Fuad Abdul Hamied
IKIP Bandung

1. Pendahuluan

Pengajaran bahasa asing memperoleh perhatian yang meningkat di semua negara terutama setelah ada kesadaran yang lebih tajam tentang gejala yang ditandai, antara lain, dengan tersedianya akses terhadap informasi secara terbuka dan mendunia. Untuk itu, kajian-kajian serius tentang pengajaran bahasa asing terjadi dalam beraneka bentuknya. Pengajaran bahasa asing di sekolah, misalnya, telah dikaji dari berbagai sisi terutama, antara lain, melalui apa yang terjadi di ruang kelas dalam lingkup kajian pemerolehan dan pembelajaran bahasa formal.

Dalam kaitan dengan pengajaran bahasa kedua atau asing dalam konteks pembelajaran formal, berbagai studi di berbagai belahan dunia telah dilakukan. Misalnya, Long (1988) melaporkan berbagai penelitian yang dilakukan, antara lain, oleh Felix, Wode, Pica, dan Pienemann. Felix melaporkan adanya hasil yang serupa antara pembelajaran formal persekolahan dan pemerolehan alami, sedangkan Wode menemukan keserupaan dalam struktur perkembangan dan alur perkembangan pada semua jenis pemerolehan itu dengan menggambarkan kemampuan pemrosesan universal dan strategi pembelajaran bahasa bawaan. Penelitian yang dilakukan oleh Pica mengkaji tiga konteks pemerolehan yang berbeda, yaitu alami, diajar, dan campuran. Kesimpulan yang diketengakkannya adalah adanya kemiripan pada ketiga konteks itu yang mendukung gagasan bahwa porsi besar pemerolehan B2 itu tergantung pada siswa dan bukan pada faktor lingkungan atau kontekstual. Dalam penelitian lain, Pienemann sampai pada kesimpulan bahwa siswa berhasil melalui pengajaran hanya jika mereka secara psikolinguistik siap untuk itu dan bahwa pengajaran dapat mempercepat kemajuan pemerolehan bahasa melalui alur-alur pembelajaran.

Pengamatan yang beraneka sering melahirkan cara pengajaran yang berbeda. Oleh karena itu, dalam kenyataan sering teramati penggunaan metode mengajar bahasa asing yang berbeda, tetapi tampil serupa karena perbedaan kondisi pengajaran dan/atau perbedaan kemampuan guru dalam kegiatannya di ruang kelas. Sebaliknya, tampilan proses belajar-mengajar bisa tampak sangat beraneka padahal guru yang bersangkutan masih mengadopsi, atau mungkin lebih tepat lagi mengakui mengadopsi, metode yang berlabel sama. Dalam hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Bloomfield (1933:503) bahwa

the various "methods" which have been elaborated differ greatly in the mere exposition, but far less in actual classroom practice. The result depends very little upon the theoretical basis of presentation, and very much upon the conditions of teaching and on the competence of the teacher.

Dengan melihat pengamatan-pengamatan di atas dan didorong oleh tema kongres kali ini, makalah ini mencoba memaparkan kondisi pengajaran, beberapa harapan, dan strategi yang perlu dikembangkan dalam kerangka perbaikan pengajaran bahasa asing di sekolah kita. Bahasan makalah ini difokuskan pada fenomena pengajaran bahasa Inggris.

2. Kondisi Pengajaran

Kondisi pengajaran dapat diamati dari berbagai sudut pandang yang menyentuh proses ataupun hasil pembelajaran. Dalam konteks ini, Hamied (1993) melakukan kajian tentang pengajaran bahasa Inggris yang berskala nasional. Kajian ini telah berumur setengah dekade, tetapi berdasarkan pengamatan dan interaksi dengan persekolahan dan personalia terkait informasi yang dikandungnya masih terasa relevan. Data yang ditampilkan di sini dikumpulkan dari 26 provinsi di Indonesia yang diwakili oleh 358 SMU Negeri. Variabel belajar-mengajar dikaji dengan melihat aspek pelaksanaan program pengajaran, kegiatan belajar mengajar, kemampuan guru, ketersediaan dan penggunaan buku, dan ketersediaan dan penggunaan lab dan sumber belajar lainnya, sedangkan hasil pembelajaran dikaji dengan menggunakan berbagai instrumen seperti ebtanas nilai murni, tes sumatif, dan tes bahasa Inggris yang dikembangkan khusus untuk penelitian ini.

a. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pengajaran diamati dengan menggunakan indikator keterpahaman dan penggunaan tujuan, keteraturan tes formatif, keterliputan dan keterserapan materi GBPP, penyiapan satuan pelajaran, proporsi tuturan guru-siswa, dan kemudahan bahan ajar. Dalam hal pelaksanaan program pengajaran bahasa Inggris ditemukan proporsi yang cukup besar (38,5%) jumlah sekolah yang masuk dalam kategori memerlukan perbaikan dengan kategori sedang, kurang, dan kurang sekali. Cukup besar jumlah sekolah yang teridentifikasi berada pada kriteria baik (57,0%), sedangkan hanya 4,5% sekolah yang mutu pelaksanaan program pengajarannya baik sekali.

Tatkala mutu pelaksanaan program pengajaran ini dilihat dari sisi kategori sekolah, yaitu kurang, sedang, dan baik ditemukan perbedaan-perbedaan yang menarik. Perbedaan yang menonjol dalam hubungannya dengan pelaksanaan program pengajaran hanya terletak antara kelompok sekolah dengan kategori kurang dan sedang saja, sedangkan antara kelompok sekolah berkategori sedang dan baik perbedaannya tidak begitu menonjol. Dalam hal jumlah persentase yang mutu pelaksanaan program pengajarannya baik sekali, terlihat kenyataan menarik. Kelompok sekolah berkategori sedang lebih baik dari kelompok baik dengan perbandingan antara 5,1% terhadap 3,7%. Kondisi seperti ini dapat terpahami manakala kita melihat sekolah yang berkategori sedang masih berupaya terus untuk mencapai posisi yang lebih baik lagi dalam pelaksanaan program pengajarannya, sedangkan kelompok sekolah yang sudah mendapat predikat baik, kemungkinan cenderung mandeg. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan tabulasi lintas antara kategori sekolah dan mutu pelaksanaan program pengajarannya.

TABEL 1
KATEGORI SEKOLAH DAN MUTU
PELAKSANAAN PROGRAM PENGAJARAN

Kategori Sekolah	Jml. % Brs % Klm % TU	Kurang Sekali	Kurang	Sedang	Baik	Baik Sekali	Row Total
Kurang			6	44	38	4	92
			6.5	47.8	41.3	4.3	25.7
			54.5	35.5	18.6	25.0	
			1.7	12.3	10.6	1.2	
Sedang		1	3	50	95	8	157
		.6	1.9	31.8	60.5	5.1	43.9
		33.3	27.3	40.3	46.6	50.0	
		.3	.8	14.0	26.5	2.2	
Baik		2	2	30	71	4	109
		1.8	1.8	27.5	65.1	3.7	30.4
		66.7	18.2	24.2	34.8	25.0	
		.6	.6	8.4	19.8	1.1	
	Total Kolom	3	11	124	204	16	358
		.8	3.1	34.6	57.0	4.5	100.0

b. Kegiatan Belajar-Mengajar

Aspek kegiatan belajar-mengajar (KBM) berindikasikan penjabaran TIK dari TIU, kesesuaian materi ajar dan latihan, pengelompokan siswa, interaksi guru-siswa, penciptaan suasana kondusif, pemberian balikan, pemantauan, dan perangkuman pelajaran. Secara nasional terlihat bahwa sekolah-sekolah yang ditelaah itu hanya 0,6% saja yang bermutu KBM kurang sekali. Yang mutu KBM-nya kurang ada 5,9%, sedangkan yang mutu KBM-nya sedang terdapat 30,4%. Apabila ditaksir dari segi perlunya perbaikan, mutu sedang, kurang, dan kurang sekali membentuk persentase yang cukup tinggi, yaitu 36,9%. Berdasarkan kriteria penilaian KBM, ditemukan 43% sekolah yang baik mutu KBM-nya dan hanya 20,1% saja yang mutu KBM-nya baik sekali.

Tatkala mutu KBM diamati berdasarkan mutu sekolah sebagaimana ditunjukkan oleh pengelola, dalam hal ini Kanwil, ternyata banyak hal yang menarik. Dalam kategori mutu KBM yang baik sekali terlihat jelas perbedaan antara sekolah baik, sedang, dan kurang itu dengan urutan persentase 29,4%, 19,1%, dan 10,9%, tetapi tatkala kategori mutu KBM itu pada kategori baik, justru kelompok sekolah kurang hampir menyamai sekolah yang baik dengan persentase yang hanya kecil sekali bedanya, 45,7% dan 45,9%. Hal inipun tampaknya masih merupakan penanda adanya dinamika pada kategori sekolah yang mendapat posisi papan bawah untuk bergerak ke atas, dan

adanya stagnasi pada sekolah-sekolah yang telah berpredikat lebih baik. Gambaran tabulasi lintas antara kategori sekolah dengan mutu kegiatan belajar- mengajar itu terlihat jelas pada tabel di bawah ini.

TABEL 2
KATEGORI SEKOLAH DAN MUTU
KEGIATAN BELAJAR-MENGAJAR

Kategori Sekolah	Jml. Baris Kolom %Ttl	1	2	3	4	5	Total Baris
Kurang		1	8	31	42	10	92
		1.1	8.7	33.1	45.7	10.9	25.7
		50.0	38.1	28.4	27.3	13.9	
		.3	2.2	8.7	11.7	2.8	
Sedang			3	54	62	30	157
			1.9	34.4	39.5	19.1	43.9
			27.3	49.5	40.3	41.7	
			.8	15.1	17.3	8.4	
Baik		1	11	24	50	32	109
		.9	7.0	22.0	45.9	29.4	30.4
		50.0	52.4	22.0	32.5	44.4	
		.3	3.1	6.7	14.0	8.9	
	Total Kolom	2	2	109	154	72	358
		.6	1.8	30.4	43.0	20.1	100.0

c. Kemampuan Guru

Kemampuan guru dikaji dengan mengamati penguasaan bahasa Inggrisnya, kekerapan pemakaian bahasa Inggris di kelas, dan persepsi siswa terhadapnya. Secara nasional, terdapat 9,8% sekolah yang kemampuan gurunya kurang sekali. Guru yang berkemampuan kurang dalam bahasa Inggrisnya mencakup 4,2%. Yang masuk kategori cukup persentasenya sebesar 17%. Apabila dikelompokkan kategori cukup, kurang, dan kurang sekali ini, yang masih perlu diperbaiki, dapat dilihat bahwa persentasenya cukup besar, yaitu 31%. Dalam kategori baik terdapat 39,4%, sedangkan sekolah yang mempunyai kemampuan guru baik sekali hanyalah 29,6%.

Teramati juga adanya gejala dinamis serta upaya gigih dalam hal meningkatkan mutu kemampuan guru pada sekolah yang berkategori kurang baik. Bila digabung antara kategori mutu guru yang baik dan baik sekali menjadi satu, maka urutan persentase mutu kemampuan guru sekolah kurang, sedang, dan baik itu dengan urutan yang sama adalah 71,7%, 63,0%, dan 75,2%. Gejala ini adalah gejala yang positif dalam konteks perbaikan mutu pengajaran, kendatipun hal ini bisa dijadikan pula petunjuk adanya kemandegan pada sekolah-sekolah yang telah baik. Gambaran kaitan

antara variabel mutu kemampuan guru dan kategori sekolah itu terlihat pada tabulasi lintas pada Tabel 3 berikut.

TABEL 3
KATEGORI SEKOLAH DAN MUTU KEMAMPUAN GURU

KATEG. SEKOLAH	Jml. Baris Kolom %Ttl	1	2	3	4	5	Total Baris
Kurang		2	4	20	43	23	92
		2.2	4.3	21.7	46.7	25.0	25.7
		5.7	26.7	32.8	30.5	21.7	
		.6	1.1	5.6	12.0	6.4	
Sedang		25	8	25	52	47	157
		15.9	5.1	15.9	33.1	29.9	43.9
		71.4	53.3	41.0	36.9	44.3	
		7.0	2.2	7.0	14.5	13.1	
Baik		8	3	16	46	36	109
		7.3	2.8	14.7	42.2	33.0	30.4
		22.9	20.0	26.2	32.6	34.0	
		2.2	.8	4.5	12.8	10.1	
	Total Kolom	35	15	61	141	106	358
		9.8	4.2	17.0	39.4	29.6	100.0

d. Penggunaan Buku

Dengan menggunakan kriteria pemakaian, ketersediaan serta proporsi pemakaian buku wajib dan buku penunjang, secara nasional dapatlah dikatakan bahwa dalam hal penggunaan buku, masih terdapat proporsi sekolah yang cukup besar (24,1%) dalam kondisi yang perlu perbaikan, yaitu terletak pada kategori cukup, kurang, dan kurang sekali.

Mutu penggunaan buku wajib dan penunjang ini, bila diamati secara lintas provinsi, akan terlihat cukup bervariasi. Bila dilihat dari kacamata perlunya perbaikan, Kalimantan Barat menduduki posisi yang terendah dengan 50% dari sekolah yang diteliti terletak pada kategori cukup dan kurang dalam hal mutu penggunaan buku wajib dan penunjangnya. Posisi berikutnya diduduki oleh Lampung dengan kenyataan adanya 41,7% dari sekolahnya yang ada dalam kategori cukup saja dalam hal penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Setelah itu, Sulawesi Selatan, Bengkulu, dan Maluku masing-masing dengan 33,3% sekolahnya masih memerlukan perhatian dalam penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Provinsi berikutnya yang memerlukan perhatian adalah Bali yang menunjukkan adanya 30,8% sekolahnya berada pada kategori cukup dan kurang dalam hal mutu penggunaan buku wajib dan buku penunjangnya. Pada posisi berikutnya adalah Sulawesi Tengah (27,3%) dan Kali-

mantan Tengah dan Sulawesi Tengah dengan masing-masing ada dalam kondisi memerlukan perhatian dalam hal penggunaan buku wajib dan buku penunjang dengan 25% di antara sekolahnya berada dalam kategori cukup saja.

e. Sumber Belajar dan Laboratorium Bahasa

Dari sudut variabel keberadaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasa, bila dilihat sebagai satu kesatuan utuh akan tampak kondisi nasional yang masih bertumpuk (44,4%) pada posisi kurang sekali. Bila persentase ini digabung dengan yang masuk dalam kategori kurang (11,5%) dan kategori cukup (15,1%), dengan pertimbangan perlunya upaya perbaikan, maka persentase yang memerlukan perhatian ini cukup besar (71%). Sisanya 22,9% dalam kondisi mutu penggunaan lab dan sumber belajar yang baik sekali.

Apabila dilihat gambaran nasional dari perspektif provinsi secara melintas, akan tampaklah gambaran yang bervariasi. Ada provinsi yang 100% masuk dalam kategori kurang sekali dalam hal ketersediaan dan penggunaan sumber belajar dan laboratorium bahasanya, yaitu provinsi Kaltim. Posisi ini disusul oleh Sulawesi Selatan yang mutu ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya tergambar pada posisi kurang sekali dengan 95% jumlah sekolahnya. Provinsi Nusa Tenggara Timur menduduki posisi berikutnya, dengan 81,8% jumlah sekolahnya berada pada kategori mutu ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasa yang kurang sekali. Selain itu, terdapat pula provinsi yang antara 50--75% jumlah sekolahnya bermutu kurang sekali dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya. Sumatera Utara, Riau, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Sulawesi Utara menunjukkan keberadaan 58,3% sekolahnya bermutu kurang sekali dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya. Posisi ini disusul oleh Bali dengan 53,8% sekolahnya bermutu kurang sekali, dan kemudian Kalimantan Tengah dengan 50% sekolahnya berada pada kategori bermutu kurang sekali dalam hal ketersediaan dan pemakaian sumber belajar dan laboratorium bahasanya itu.

f. Ebtanas

Data yang diperoleh secara nasional dalam hal nilai Ebtanas murni itu dibagi dalam dua kategori untuk setiap provinsi. Kategori pertama nilai terendah selama 5 tahun terakhir, dan kategori kedua nilai tertinggi selama 5 tahun terakhir. Dari kedua kategori ini, data terperoleh menunjukkan bahwa nilai tertinggi pada kategori nilai ebtanas terendah ialah 6,44, sedangkan nilai tertinggi pada kategori nilai ebtanas tertinggi ialah 9,60.

Secara keseluruhan nilai ebtanas masih memprihatinkan. Nilai di bawah 6,00 dalam skala 0-10 masih berproporsi besar, yaitu 66,7%. Hal ini menunjukkan perlunya pembenahan di kedua jihat, baik proses belajar-mengajar maupun dalam pengembangan alat ukur yang dijadikan alat ukur dalam ebtanas itu sendiri. Kenyataan memprihatinkan ini terlihat dalam data terdahulu, yaitu dengan dikelompokkan $\leq 1,90$ sebagai kategori 1; 1,91-3,80 sebagai kategori 2; 3,81-5,70 sebagai kategori 3;

5,71-7,60 sebagai kategori 4; dan $\geq 7,61$ sebagai kategori 5, pada NEM provinsi tertinggi terdapat 26,8% kategori 1, 0% kategori 2, 39,9% kategori 3, 26,8% kategori 4, dan 6,5% kategori 5.

g. Kemampuan Bahasa Inggris Siswa

Berdasarkan perolehan nilai tes bahasa Inggris pada penelitian ini, kemampuan siswa itu masih relatif rendah. Nilai di bawah 6,00 dalam skala 0-10 masih dipunyai oleh 31% dari sekolah yang ditelaah, sebuah kenyataan yang masih memerlukan perhatian cukup serius dalam upaya perbaikan mutu hasil belajar itu. Data secara terinci menunjukkan bahwa setelah nilai-nilai rata-rata sekolah dikategorisasikan, yaitu $\leq 1,90$ sebagai kategori 1; 1,91-3,80 sebagai kategori 2; 3,81-5,70 sebagai kategori 3; 5,71-7,60 sebagai kategori 4; dan $\geq 7,61$ sebagai kategori 5, secara nasional 4,5% masuk kategori 2, 12,0% masuk kategori 3, 59,2% masuk kategori 4; dan sisanya 22,6% masuk kategori 5.

h. Keterkaitan Hasil Belajar dengan Variabel yang Diamati

Dalam penelitian ini hasil belajar diamati dengan empat alat ukur yang berdiri sendiri: NEM tertinggi (1) dan NEM terendah (2), dan hasil tes sumatif (3), dan tes kemampuan bahasa Inggris (4). Semua jenis alat ukur hasil belajar ini satu sama lain berkorelasi positif dan signifikan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4 di bawah ini.

TABEL 4
KORELASI ANTARALAT UKUR HASIL BELAJAR

	NEM Tertinggi	NEM Terendah	Tes Sumatif
Tes Bhs. Inggris	0,1946 p=0,000	0,1534 p=0,002	0,4817 p=0,000
Tes Sumatif	0,2504 p=0,000	0,1799 p=0,000	
NEM Terendah	0,7071 p=0,000		

Tatkala hasil belajar dibatasi dengan nilai tes bahasa Inggris yang dikembangkan dalam penelitian ini, ditemukan beberapa korelasi yang positif dan signifikan. Dalam hal yang bertema dengan hasil tes kemampuan berbahasa Inggris tersebut, hanya variabel kegiatan belajar-mengajar dan kemampuan guru saja yang berkorelasi positif dan signifikan. Hal ini menunjukkan kepada kita betapa signifikan aspek kegiatan belajar-mengajar di kelas yang di dalamnya kemampuan guru turut tercerminkan guna memberi kontribusi pada hasil belajar. Program pelaksanaan pengajaran, penggunaan buku, ketersediaan sumber belajar, dan pemakaian laboratorium bahasa malahan ber-

korelasi negatif dengan hasil tes tersebut, tetapi begitu koefisien korelasinya pun tidak signifikan. Gambaran korelasi antarvariabel ini terlihat jelas dalam tabel di bawah ini.

TABEL 5
KORELASI ANTARVARIABEL

	1	2	3	4	5
6	-0,0418 p=0,215	0,1339 p =0,006	0,1318 p=0,006	-0,0242 p=0,324	-0,0274 p=0,002
5	0,2389 p=0,000	0,0623 p=0,120	0,0672 p=0,102	0,1502 p=0,002	
4	0,1409 p=0,004	0,0429 p=0,209	0,0103 p=0,423		
3	-0,0383 p=0,235	0,2245 p=0,000			
2	0,0233 p=0,330				

Keterangan: 1. Pelaksanaan Program Pengajaran
2. Kegiatan Belajar-Mengajar
3. Kemampuan Guru
4. Ketersediaan dan Penggunaan Buku
5. Ketersediaan dan Penggunaan Lab. & Sumber Belajar Lainnya
6. Hasil Tes Bahasa Inggris

Dalam tabel di atas terlihat pula bahwa ketersediaan dan penggunaan buku pegangan serta ketersediaan dan pemakaian laboratorium bahasa dan sumber belajar lainnya berkorelasi positif dan signifikan dengan pelaksanaan program pengajaran. Selain itu, terlihat pula hubungan erat antara kemampuan guru dengan kegiatan belajar-mengajar yang ditandai korelasi yang positif dan signifikan. Begitu juga variabel ketersediaan dan penggunaan buku pegangan yang juga merupakan sumber belajar berkorelasi positif dan signifikan dengan ketersediaan dan penggunaan sumber belajar serta laboratorium bahasa.

Temuan-temuan ini, antara lain, memperkokoh pendapat bahwa faktor guru dengan segala kiprahnya di kelas akan menjadi penentu paling depan dalam menciptakan hasil belajar itu.

i. Faktor Pembelajaran

Tatkala pemerolehan bahasa dilihat dengan berdasarkan pada produk kebahasaan, tingkat profisiensi biasanya digunakan sebagai takarannya. Berbagai studi telah dila-

kukan dalam konteks pembelajaran bahasa di Indonesia. Hamied (1993), misalnya, mencoba mengkaji faktor pembelajaran bahasa dan kontribusinya terhadap tingkat pemerolehan bahasa sebagaimana digambarkan oleh keadaan profisiensi bahasa sasaran. Penelitian dilaksanakan untuk (1) memperoleh data dasar tentang profisiensi bahasa Inggris siswa SMU di Jawa Barat; (2) mengkaji kontribusi berbagai variabel pembelajaran bahasa seperti variabel konteks, ciri pembelajaran, kondisi belajar, dan proses pembelajaran terhadap profisiensi bahasa Inggris siswa SMU di Jawa Barat; dan (3) memberikan masukan kepada para pembuat keputusan dan para pelaku proses pembelajaran bahasa Inggris.

Populasi penelitian ini adalah siswa SMU di Jawa Barat. Pengambilan sampel dilakukan secara acak, gunduk, dan terstrata. Sembilan sekolah ditetapkan untuk mewakili populasi dalam penelitian ini. Dari daerah barat sampel diwakili oleh dua SMU Negeri di Kodya Bogor dan dua SMU Negeri di Kabupaten Bogor. Dari daerah timur sampel diwakili oleh dua SMU Negeri di Kabupaten Garut. Dari daerah tengah, sampel diwakili oleh satu SMU Negeri dari Kodya Bandung dan dua SMU Negeri yang berlokasi di utara dan selatan Kabupaten Bandung. Sebanyak 852 siswa diukur profisiensinya dan dijadikan sampel untuk mengkaji variabel-variabel terkait lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor kontekstual yang diduga memberi kontribusi kepada profisiensi siswa dalam belajar bahasa Inggris di Jawa Barat ini ternyata relatif ada pada kondisi yang kondusif. Orang tua siswa, misalnya, mayoritas berpendidikan SMU, sedangkan tingkat sosial ekonomi mereka relatif homogen.

Ditemukan pula bahwa secara kriteria, mayoritas siswa (87,5%) berada pada profisiensi bahasa Inggris di bawah 50% dari yang diharapkan, sedangkan siswa yang menunjukkan profisiensi pada dan di atas 60% hanya mencakupi 3,1% saja. Profisiensi di atas 80% hanya dicapai oleh kelompok siswa dengan persentase yang sangat kecil (0,1%).

Semua faktor yang diduga berpengaruh pada pembelajaran, kecuali persepsi siswa terhadap gurunya, berkorelasi signifikan dengan profisiensi bahasa Inggris secara keseluruhan. Ditemukan pula korelasi negatif antara persepsi siswa terhadap lingkungan sekolahnya dengan profisiensi bahasa Inggris mereka yang menunjukkan bahwa makin positif sikap siswa tentang sekolahnya, makin kurang profisiensinya. Hal ini dapat melahirkan kesimpulan bahwa sekolah telah mampu mengembangkan kepercayaan kepada siswanya tentang kebaikan sekolah itu, tetapi tidak diikuti dengan kemampuan sekolah itu untuk memberikan pelayanan akademis yang memadai kepada siswanya atau tidak diikuti dengan upaya siswa itu dalam memanfaatkan keunggulan yang dimiliki sekolah itu.

Nilai Ebtanas Bahasa Inggris SMP, tidak seperti aspek lain yang dikorelasikan, berkorelasi positif dan signifikan secara konsisten dengan setiap aspek profisiensi bahasa Inggris yang diukur. Dapatlah disimpulkan bahwa karakteristik tingkat masukan peserta didik lebih cenderung menentukan keberhasilan ketimbang proses itu sendiri. Bila dilihat dari sisi lain, dapatlah dikatakan bahwa proses belajar-mengajar belum mampu memberikan kontribusi yang sekurang-kurangnya sejajar dengan

kualitas bawaan siswa itu sendiri.

Faktor pendidikan orang tua, letak geografis sekolah, tingkat kelas, bahasa di rumah, keikutsertaan dalam kursus bahasa Inggris di luar sekolah merupakan faktor yang dapat dijadikan acuan dalam melihat perbedaan profisiensi bahasa Inggris para siswa.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, disarankan agar pengembangan kurikulum bahasa Inggris 1994 serta implementasinya memperhatikan kelemahan kemampuan membaca para siswa dengan memperhitungkan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh guru dan sekolah yang tampaknya belum dimanfaatkan secara maksimal.

3. Kondisi yang Diharapkan

Berdasarkan beberapa temuan di atas, kondisi yang diharapkan berpusat pada beberapa faktor yang satu sama lainnya saling menunjang. Apabila ditilik dari hasil belajar, faktor kompetensi guru dan proses kegiatan belajar-mengajar merupakan dua hal yang patut memperoleh perhatian serius. Namun, sebagaimana ditunjukkan dalam temuan-temuan di atas, dukungan terhadap kedua faktor tersebut tetap diperlukan dari sisi fasilitas pembelajaran. Fasilitas ini mencakupi bukan hanya fasilitas perangkat-perangkat keras seperti buku, perpustakaan, laboratorium bahasa dan realia lainnya, tetapi juga fasilitas perangkat lunak seperti atmosfer belajar-mengajar yang secara bersama-sama diciptakan guru dan didukung oleh pimpinan sekolahnya dan kegiatan pembelajaran lintas-kurikuler yang dikembangkan di antara para guru itu sendiri.

a. Kualifikasi Tenaga Pengajar

Salah satu temuan kajian di atas menunjukkan pentingnya variabel guru dalam meningkatkan mutu hasil pengajaran bahasa Inggris. Tuntutan ini diperkokoh lagi oleh kedudukan bahasa Inggris itu sendiri dalam percaturan global dan pengembangan peran negara dan bangsa Indonesia untuk mampu bertahan dan bersaing pada ajang pertarungan internasional yang sangat kompetitif ini. Dalam kaitan dengan ini, upaya pengembangan pribadi dan pertumbuhan profesional guru dan calon guru bahasa Inggris menuntut pengembangan kompetensi yang utuh dalam kategori-kategori kompetensi yang mencakupi sikap, pemahaman, keterampilan, dan kebiasaan.

Sekaitan dengan sikap, guru bahasa Inggris perlu berkeyakinan bahwa tersebarinya bahasa Inggris secara menjagat dapat diupayakan untuk melahirkan komunikasi lintas-budaya dan antarkelompok dan akhirnya menciptakan dunia yang lebih stabil dan beradab. Selain itu, guru bahasa Inggris hendaknya percaya bahwa ia harus mengembangkan minat terhadap bahasa dan budaya siswanya dan dengan demikian dia bukan hanya akan memahami permasalahan pembelajaran, tetapi juga memotivasi siswa untuk mengikuti contoh dari guru itu sekaitan dengan bahasa Inggris. Di sisi lain, guru bahasa Inggris perlu pula berkeyakinan bahwa bahasa dan budaya siswanya patut dihormati, bahwa siswanya harus didorong untuk *me-mumule*-nya (memelihara), dan bahwa tingkah laku berbahasa yang baru harus diajarkan sebagai satu cara untuk memperluas komunikasi, pengalaman, dan pencapaiannya dan bukan sebagai cara untuk menghilangkan tingkah laku kebahasaan sebelumnya. Sikap lain yang perlu

dikembangkan oleh guru bahasa Inggris ialah kepercayaan bahwa penggunaan imajinasi dari teknologi komunikasi dalam memperluas dan menganekekakan interaksi lintas budaya merupakan bidang yang potensial untuk digunakan oleh guru dalam mengajar.

Dalam hubungannya dengan kompetensi pemahaman, seorang guru bahasa Inggris diharapkan memahami bahwa salah satu perbedaan penting antara penutur nonasli dan penutur asli yang belajar bahasa Inggris ialah bahwa penutur nonasli menyiapkan dirinya terutama untuk komunikasi lintas budaya, sedangkan penutur asli berupaya untuk meningkatkan kompetensinya dalam berkomunikasi dengan anggota budayanya sendiri. Selain itu, guru bahasa Inggris perlu memahami bahwa kode linguistik hanyalah satu di antara sistem pesan yang digunakan dalam komunikasi insani; bahwa budaya merupakan kumpulan sistem pesan yang mensyaratkan pemiliknnya untuk berbagi ciri-ciri pandangan dan tingkah laku tertentu; dan bahwa cara pandang dan tingkah laku yang lazim ini akan membuat anggota satu budaya berinteraksi dengan ciri budaya lain dengan cara yang khas. Selain itu, guru bahasa Inggris diharapkan memahami bahwa jenis tata bahasa tertentu atau sistem memerikan suatu bahasa berfokus pada perangkat fenomena atau tingkah laku bahasa yang khas dan bahwa satu jenis tatabahasa sebagai akibatnya akan berfungsi lebih baik dari yang lainnya sebagai landasan untuk pengajaran kompetensi dalam satu jenis tingkah laku bahasa tertentu. Begitu pula, guru bahasa Inggris diharapkan memahami bahwa model teori komunikasi lebih cocok untuk mengajarkan kompetensi dalam komunikasi lintas budaya ketimbang tata bahasa tradisional, struktural, dan/atau transformasi generatif; dan memahami bahwa mengarahkan siswa ke situasi interaksi lintas budaya yang bermakna sedini mungkin merupakan hal yang penting guna memotivasi mereka agar belajar dan menjadikan mereka komunikator lintas budaya yang baik.

Berkenaan dengan kompetensi keterampilan, guru bahasa Inggris diharapkan mampu menemukan dan menggunakan analisis kontrastif bagi bahasa siswa dan bahasa Inggris untuk penyiapan bahan pengajaran yang dirancang guna membantu siswanya dalam mengatasi masalah pembelajarannya. Selain itu, ia diharapkan mampu menggunakan analisis sosiolinguistik tentang ragam bahasa yang digunakan dalam situasi interaksi lintas budaya dalam bahasa sasaran agar bisa mengidentifikasi situasi yang mungkin akan dihadapi siswanya. Begitu juga, guru bahasa Inggris diharapkan mampu memilih bahan teks untuk pengajarannya, yang bisa membantu siswanya dalam memperoleh kemahiran pada bahasa sasarannya; mampu membandingkan ciri-ciri bahasa dan budaya siswanya dengan apa yang ada dalam bahasa Inggris dan budayanya dan mengidentifikasi situasi interaksi lintas budaya yang signifikan; serta mampu memilih dan mengajari siswanya untuk berinteraksi dengan teks susastra yang cocok dengan tingkat kemampuan bahasa siswanya, yang akan memberikan wawasan kepada mereka berkenaan dengan masalah interaksi pemilik budaya bahasa ibu dan budaya bahasa sasarannya. Masih berkaitan dengan keterampilan lintas budaya, guru bahasa Inggris diharapkan mampu melibatkan siswanya dalam permainan atau permainan peran interaksi lintas budaya dan membuat siswanya sadar akan aspek struktural dari situasi-situasi yang harus mereka kuasai agar menjadi kompeten dalam tingkah laku

yang harus dimilikinya; mampu memilih dan mengorganisasikan kegiatan interaksi lintas budaya yang cocok untuk latar belakang dan kebutuhan siswanya yang akan melengkapi kegiatan kelasnya dan melibatkan siswanya dalam komunikasi lintas budaya yang sungguh-sungguh; dan mampu mengukur dan mengevaluasi kemahiran, kemajuan, dan bakat siswanya dalam keterampilan komunikasi lintas budaya dan mampu memberikan umpan balik dari hasil evaluasinya terhadap kegiatan pengajarannya.

Kompetensi lain yang diharapkan dimiliki oleh guru bahasa Inggris sebagai bahasa asing adalah kompetensi yang bersengkabut dengan kebiasaan. Dalam hal ini, guru bahasa Inggris diharapkan menggunakan setiap kesempatan yang tepat untuk berinteraksi sedapat mungkin dalam bahasa dan budaya siswanya sehingga mereka akan melihat berdasarkan contoh tersebut bahwa guru itu menghargai budaya mereka dan dengan demikian mereka akan termotivasi untuk berinteraksi dalam bahasa sasaran sebanyak mungkin. Selain itu, ia hendaknya mengamati dan menyimpan dalam benaknya serta dalam buku catatannya ciri-ciri tingkah laku interaksi lintas budaya yang bisa digunakannya dalam memberikan kompetensi tertentu pada situasi-situasi tertentu pula. Begitu juga guru bahasa Inggris diharapkan tetap mencari situasi interaksi lintas budaya yang mutakhir dari bacaannya yang akan memperdalam pemahamannya berkenaan dengan apa yang dilakukan siswanya dalam beraneka interaksi lintas budaya.

b. Kondisi Pembelajaran

Harapan formal kurikuler pengajaran bahasa Inggris masih tetap berat, yaitu agar pada akhir SMU siswa memiliki keterampilan membaca, menyimak, berbicara, dan menulis dalam bahasa Inggris melalui tema yang dipilih berdasarkan tingkat perkembangan dan minat mereka, tingkat penguasaan kosakata (2500 untuk IPA/IPS, 3000 untuk Bahasa), dan tatabahasa yang sesuai. Kondisi yang diharapkan dari sisi tujuan ini untuk dipertahankan dengan catatan harus diupayakan adanya dukungan-dukungan strategis pembelajarannya sehingga ruang lingkup pembelajaran yang meliputi keterampilan berbahasa Inggris dan pengetahuan kebahasaannya akan bisa terealisasikan secara baik.

Prinsip pembelajaran diharapkan betul-betul dipegang oleh guru dan dinyatakan dalam langkah-langkah konkret dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas. Secara formal kurikuler, prinsip pembelajaran yang pertama adalah *tahu apa yang dilakukan*. Proses belajar-mengajar diharapkan akan efisien dan efektif jika guru dan siswa tahu apa yang mereka lakukan. Dengan prinsip *keseluruhan itu tidak hanya kumpulan bagian-bagiannya*, kegiatan belajar-mengajar di kelas diharapkan memberi penekanan pada pentingnya konteks yang luas bukan hanya pada unsur-unsur yang membentuk konteks itu. Untuk itu, bahan pelajaran yang disuguhkan tidak disuguhkan masing-masingnya secara terisolasi.

Begitu juga bahan yang diajarkan itu hendaknya ditempatkan dan dimanfaatkan dalam kegiatan berkomunikasi karena prinsip yang harus dikembangkan ialah bahwa *proses sama pentingnya dengan bentuk*. Kegiatan berkomunikasi dengan menggunakan bentuk-bentuk bahasa yang telah dipelajari itu dapat diciptakan dengan adanya kesenjangan informasi, sikap, dan/atau pendapat. Hal ini berkaitan pula dengan prinsip

belajar sesuatu dengan melakukannya. Dengan prinsip ini, siswa harus didorong untuk melakukan kegiatan berbahasa itu--membaca, menyimak, berbicara, dan menulis. Tatkala sampai kepada produk dari proses pembelajaran itu, guru diharapkan melihat kesalahan yang dibuat siswa dari berbagai sisi. *Kesalahan tidak selalu merupakan kesalahan*, artinya kesalahan itu mungkin kesalahan kompetensi, mungkin juga kesalahan performansi. Dari segi lain, kesalahan itu bisa merupakan kesalahan yang mengganggu proses komunikasi, bisa juga tidak.

Strategi pembelajaran yang dikembangkan oleh guru diharapkan menggunakan strategi serta variasi kegiatan dan interaksi yang semuanya lebih banyak mengikutsertakan dan melibatkan siswa. Keterlibatan siswa secara keseluruhan dalam kegiatan mempelajari dan menggunakan bahasa Inggris ini merupakan kondisi yang sangat diharapkan terjadi pada kegiatan kelas. Salah satu kendala yang ada ialah motivasi belajar. Dalam pengembangan kurikulum 1994 dinyatakan bahwa motivasi belajar siswa akan tinggi bila materi ajar bermakna bagi siswa, ada pengetahuan dan keterampilan untuk mendukung pembelajaran materi baru, ikut memutuskan pembelajaran, dapat mengamati model, memperoleh latihan sedikit tetapi berkali-kali, diberi tugas dan latihan yang relevan, kegiatan belajar yang berbeda, bantuan dikurangi sedikit demi sedikit untuk mengembangkan kemandirian, perasaan dan harga diri tak terlukai, serta fasilitas belajar-mengajar dibuat enak.

Pendekatan kebermaknaan dalam pengajaran bahasa Inggris hendaknya dipahami dan diterapkan secara tepat dalam konteks kegiatan belajar-mengajar itu. Dalam penerapannya, pendekatan kebermaknaan ini harus ditunjang oleh prinsip pembelajaran yang diketengahkan di atas. Konsep yang mendasari pendekatan kebermaknaan perlu digenggam erat oleh guru bahasa Inggris. Di antara konsep-konsep tersebut ialah bahasa mengungkap makna melalui struktur, makna ditentukan lingkup bahasa dan situasi, makna dapat diwujudkan dengan kalimat berbeda, belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi, motivasi menentukan keberhasilan, makna meningkat karena relevansi dengan kebutuhan, siswa adalah subjek utama, dan guru adalah fasilitator.

c. Fasilitas Pengajaran

Esensi dasar dalam hal fasilitas pengajaran itu ialah perlunya pemanfaatan potensi yang dimiliki secara efektif. Fasilitas itu terdiri atas fasilitas insani dan non-insani atau fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras. Dalam hasil penelitian yang diketengahkan terdahulu terlihat ada gejala di beberapa sekolah munculnya ketidakber-sengkarutan antara fasilitas yang ada dengan upaya-upaya pembelajaran yang terjadi. Sekolah yang dikategorikan baik tidak selalu lebih baik performansinya dibandingkan dengan sekolah berkategori sedang. Dari sini diduga ada pemanfaatan yang tidak maksimal dari potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh sekolah itu. Jadi, ada dua hal yang diharapkan terjadi sekaitan dengan fasilitas pengajaran ini: pengadaan dan pemanfaatan. Untuk sekolah-sekolah tertentu, prioritas perlu terjadi pada upaya pengadaan, sedangkan di sekolah-sekolah lainnya yang perlu diprioritaskan adalah pemanfaatan fasilitas yang ada. Sebagaimana diutarakan terdahulu, fasilitas ini mencakupi bukan hanya fasilitas perangkat-perangkat keras seperti buku, perpustakaan,

dan laboratorium bahasa, melainkan juga fasilitas perangkat lunak seperti atmosfer belajar-mengajar yang secara bersama-sama diciptakan guru dan didukung oleh pimpinan sekolahnya dan kegiatan pembelajaran lintas-kurikuler yang dikembangkan di antara para guru itu sendiri. Berdasarkan pengamatan, pemanfaatan dan pemaksimalan fasilitas perangkat lunaklah yang justru cenderung kurang diperhatikan.

4. Strategi yang Perlu Ditempuh

Strategi yang perlu ditempuh dalam upaya perbaikan pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris sebagai bahasa asing, dapat dikaitkan dengan berbagai variabel terkait, baik dengan pembelajaran maupun pemerolehan bahasa. Dengan mengacu ke kondisi pengajaran yang telah diberikan dan kondisi yang diharapkan di atas, rumusan strategis di bawah ini diformulasikan hanya dalam nuansa kontekstual terpilih saja. Formulasi ini diketengahkan tentu saja tidak dengan mempredugakan adanya kekomprehensifan hasil pengamatan di sini.

Strategi 1: Pertimbangkan secara apik faktor sosial dalam pemerolehan bahasa, yaitu usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan identitas etnis beserta variabel yang terkait erat dengan masing-masingnya. [Isu terkait--pengajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini; perhatian sosial akan peran *gender*; kepedulian akan kelas sosial; dan perbedaan latar belakang bahasa etnis].

Ellis (1994:201-211) mengetengahkan temuan sekaitan dengan usia, yaitu bahwa pembelajar bahasa yang masih muda pada umumnya lebih berhasil ketimbang pembelajar yang lebih tua. Salah satu kemungkinan penyebabnya ialah identitas pembelajar yang lebih muda tidak begitu terancam oleh norma bahasa sasaran. Berkenaan dengan jenis kelamin, pembelajar wanita pada umumnya mengungguli pembelajar pria di kelas bahasa dan mereka cenderung mempunyai sikap yang lebih positif. Akan tetapi, pembelajar pria lebih baik dalam menyimak kosakata. Dampak dari kelas sosial secara khusus tergantung pada tatanannya. Di kelas bahasa yang menekankan pembelajaran bahasa formal, anak-anak kelas pekerja keseringannya kurang berhasil dibandingkan dengan anak-anak dari kelas menengah, sedangkan di kelas *ancruban* (*immersion*) terdapat bukti yang menunjukkan bahwa anak-anak kelas pekerja itu memperlihatkan keberhasilan yang sama dengan anak-anak kelas menengah.

Sekaitan dengan identitas etnis, dampak 'jarak kultural' terhadap pembelajaran B2 diyakini sebagai sesuatu yang penting diperhatikan. Pembelajar yang dekat dengan budaya bahasa sasaran kemungkinan akan mengungguli pembelajar yang jauh dari budaya sasaran. Pada umumnya, pembelajar yang mempunyai sikap positif terhadap identitas etnisnya sendiri dan terhadap budaya sasaran dapat diharapkan bisa mengembangkan motivasi yang kuat dan tingkat kemahiran B2 yang tinggi sembari mempertahankan B1-nya sendiri. Pembelajaran B2 bisa juga berhasil bagi pembelajar yang mempunyai sikap non-integratif terhadap budaya sasaran.

Hubungan antara keempat faktor sosial di atas dengan pembelajaran bahasa bersifat sungguh musykil. Ellis (1994:211) mengingatkan bahwa

... it is not age, sex, social class, or ethnic identity that determine L2 proficiency, but rather the social conditions and attitudes associated with these variables. Also, the factors interact among themselves, and their effect on learning depends to a large extent on the setting.

Terlihat dalam pernyataan ini bahwa di lingkungan faktor sosial yang empat itu, segala kondisi serta sikap sosial akan menentukan kemahiran B2 baik dari sisi setiap variabel itu maupun dari hasil interaksi antarvariabel itu sendiri.

Strategi 2: Perhatikan faktor masukan bahasa sasaran dan intensitas interaksi dalam proses pembelajaran dengan tetap menempatkan posisi pembelajar sebagai variabel penentu keberhasilan. [Isu terkait--profisiensi guru; kemampuan metodologis; konkurensi dalam pendidikan guru; strategi belajar siswa; dan kefasihan versus kecermatan]

Tatkala berbicara tentang masukan dan interaksi dalam konteks pemerolehan dan pembelajaran bahasa, Chomsky (1965:33) memberikan penegasan beberapa hal, antara lain,

(the learner's) knowledge of the language, ..., goes far beyond the presented primary linguistic data and is in no sense an "inductive generalization" from these data. ... certain kinds of data and experience may be required in order to set the language-acquisition device into operation, ..., it would not be at all surprising to find that normal language learning requires use of language in real-life situations, in some way. But this, if true, would not be sufficient to show that information regarding situational context (...) plays any role in determining how language is acquired, once the mechanism is put to work and the task of language learning is undertaken by the child.

Sekurang-kurangnya ada empat hal penting yang bisa dipetik dari paparan di atas. *Pertama*, pengetahuan bahasa itu tidak sekadar hasil generalisasi induktif dari data kebahasaan saja. *Kedua*, data dan pengalaman tertentu diperlukan untuk memicu pemerolehan bahasa. *Ketiga*, penggunaan bahasa dalam situasi nyata diperlukan. *Keempat*, peran pembelajar sangat menentukan pemerolehan itu.

Kerangka teoretis yang diketengahkan di atas memberikan penegasan tentang kedudukan masukan dan interaksi dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa yang tidak lebih kokoh ketimbang si pembelajar itu sendiri. Pembelajar bahasa mempunyai potensi yang merambah jauh melintasi sekadar jumlah masukan yang diperolehnya. Masukan dan interaksi yang terjadi berperan dalam berbagai sisi untuk memicu *language-acquisition device*. Interaksi dipandang tidak memadai dalam memberikan penjelasan tentang bagaimana bahasa itu diperoleh. Pada akhirnya tugas pembelajaran bahasa itu ada di tangan pembelajar bahasa itu sendiri.

Strategi 3: Perhitungkan manfaat transfer positif dan kaji cara penghindaran interferensi. [Isu terkait--pendekatan alami; interferensi versus kemusykilan bahasa sasaran]

Istilah transfer digunakan secara meluas pada belahap pertama dari abad kedua puluh ini. Istilah ini digunakan secara meluas di dalam aliran behavioris dengan merujuk ke proses psikologis yang di dalam proses ini pembelajaran terdahulu dialihkan ke situasi pembelajaran yang baru. Tatkala seseorang telah rampung belajar tentang suatu tugas, maka pembelajaran ini akan berpengaruh terhadap pembelajaran berikutnya. Proses ini melahirkan perbezaan yang biasa dikenal dengan transfer positif dan transfer negatif. Transfer positif dikenal pula dengan istilah fasilitasi, sedangkan transfer negatif sering disebut dengan istilah yang lebih dikenal dengan interferensi. Pada pokoknya kedua istilah ini dipakai dalam kaitan dengan akibat dari transfer itu sendiri: apakah melahirkan sesuatu yang betul atau yang salah.

Transfer adalah suatu proses. Akan tetapi, dalam melihat kedua jenis transfer di atas ada semacam percampuradukan antara proses transfer itu sendiri dengan hasil dari transfer itu dalam bentuk produk yang salah atau yang benar. Sekaitan dengan kekisruhan ini, Gass dan Selinker (1994:56) memperingatkan agar kita hati-hati tatkala menggunakan kedua kategori transfer itu karena "*the terminology suggests a confusion between product and process.*"

Interferensi terbagi atas dua jenis, yaitu hambatan retroaktif (*retroactive inhibition*) dan hambatan proaktif (*proactive inhibition*). Hambatan retroaktif merujuk pada situasi pembelajaran baru yang berdampak negatif terhadap apa yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam hal pembelajaran bahasa, hambatan ini akan mengakibatkan pupusnya atau rusaknya bahasa yang telah dimiliki. Kondisi ini dapat dilihat secara empiris pada situasi terganggunya bahasa daerah anak-anak sebagai akibat dari belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa keduanya. Jenis interferensi ini termasuk yang langka dipelajari maupun diteliti, sedangkan hambatan proaktif merupakan jenis interferensi yang paling sering dikaji. Pada situasi pembelajaran bahasa kedua, interferensi ini merujuk ke pengaruh negatif dari bahasa ibu ke bahasa sasaran.

Menurut Dulay, Burt, dan Krashen (1982:98-99) istilah interferensi itu telah dipakai untuk merujuk pada dua fenomena kebahasaan yang berbeda. Fenomena pertama pada dasarnya bersifat psikologis, sedangkan yang lainnya bersifat sosiolinguistik. Fenomena psikologis merujuk ke pengaruh dari kebiasaan lama terhadap kebiasaan baru yang sedang dipelajari, sedangkan fenomena sosiolinguistik merujuk ke interaksi bahasa seperti pinjaman dan pengalihan bahasa yang terjadi manakala terjadi sentuhan antara dua masyarakat bahasa. Fenomena sosiolinguistik sebagaimana yang ditemukan oleh Weinreich (1953) dan Haugen (1953) digunakan secara tidak tepat oleh para pendukung analisis kontrastif sebagai dukungan empiris terhadap fenomena psikologis dari transfer negatif. Weinreich (1953) sebagaimana dikutip Dulay, Burt, dan Krashen (1982) memberikan definisi interferensi sebagai akibat dari "*familiarity with more than one language,*" sedangkan Haugen (1953) tatkala berbicara tentang pinjaman bahasa menegaskan "*it is the language of the learner that is influenced, not the language he learns.*" Pandangan ini bersilang dengan hipotesis

analisis kontrastif yang menyatakan bahwa interferensi itu disebabkan oleh ketidak-kenalan terhadap B2 dan bahwa interferensi itu dimanifestasikan di dalam bahasa yang dipelajari, bukan B1 pembelajar bahasa itu.

Strategi 4: Manfaatkan semaksimal mungkin daya kognitif serta tingkat kreativitas pembelajar bahasa. [Isu terkait--kebermaknaan isi dan interaksi; pengajaran bahasa Inggris intensif versus ekstensif; peluang pemanfaatan bahasa sasaran]

Ellis (1994) berpandangan bahwa teori pemerolehan bahasa itu dilandasi oleh asumsi mengenai penguasaan bahasa yang bersifat bertahap (*gradable*) dan terkait unsur mengetahui (*knowing*). Oleh karena itu, dalam pengertian inilah teori-teori tersebut bersifat kognitif. Kerangka teoretis yang didukung Ellis (1994: 349) dengan sedikit tambahan adalah yang diketengahkan oleh Gass. Perkembangan pemerolehan bahasa itu meliputi (1) masukan teramati (*noticed input*), (2) masukan terpahami (*comprehended input*), (3) pungutan (*intake*), dan (4) integrasi (*integration*). Masukan teramati yang merupakan tahap pertama dari pemerolehan terdiri atas berbagai bentuk masukan bahasa dengan sifat dan karakteristik yang mudah dicerna karena keebrehannya (*saliency*) dan juga karena pengetahuan yang telah dimiliki oleh pembelajar bahasa itu sendiri. Tidak semua masukan teramati akan otomatis menjadi masukan terpahami. Demikian juga selanjutnya, tidak semua masukan terpahami otomatis menjadi pungutan, yaitu proses yang menjembatani masukan bahasa sasaran dengan perangkat kaidah yang diinternalisasi oleh pembelajar bahasa. Sebelum diintegrasikan, pungutan itu belum menjadi bagian dari pengetahuan implisit dari pembelajar bahasa itu, pengetahuan yang dikenal dengan sebutan sistem bahasa-antara (*interlanguage*) sebagaimana diperkenalkan oleh Selinker di awal tahun 1970-an.

Selinker, sebagaimana dikutip Ellis (1994:351), mengidentifikasi lima proses kognitif yang utama dan bersengkarut terhadap pemerolehan bahasa kedua, yaitu sebagai berikut.

- a. Transfer bahasa--beberapa tetapi tentu saja tidak semua butir, kaidah dan subsistem Bahasa-Antara bisa ditransfer dari bahasa pertama.
- b. Transfer pelatihan--beberapa unsur Bahasa-Antara bisa berasal dari cara pengajaran terhadap pembelajar.
- c. Strategi pembelajaran bahasa kedua--pendekatan pembelajar terhadap bahan yang dipelajari berkontribusi terhadap pemerolehan itu sendiri.
- d. Strategi komunikasi bahasa kedua--pendekatan pembelajar terhadap komunikasi dengan penutur asli dalam bahasa sasaran.
- e. Overgeneralisasi bahan bahasa sasaran--beberapa unsur bahasa-antara jelas-jelas merupakan hasil dari overgeneralisasi dari kaidah bahasa sasaran dan sifat-sifat semantiknya.

Bahasa-antara yang dihipotesiskan oleh Selinker ini pada dasarnya merujuk ke pergeseran gradual dari bahasa ibu ke bahasa sasaran melalui serangkaian bahasa-

bahasa-antara. Sebagaimana dikutip Beebe dan Zuengler (1983), Corder (1971) menyebut bahasa-antara itu dialek transisional (*transitional dialects*), sedangkan Nemser (1971) menggunakan istilah sistem aproksimatif (*approximative systems*). Hipotesis Selinker ini sejalan dengan hipotesis dari Dulay, Burt, dan Krashen (1982) yang dikenal dengan sebutan hipotesis konstruksi kreatif. Konstruksi kreatif merujuk ke proses bawah sadar yang dengan proses itu pembelajar bahasa secara bertahap mengorganisasikan bahasa yang didengarnya menurut "*rules that they construct to generate sentences*" (hlm. 11). Dirumuskan dalam hipotesis ini bahwa pemerolehan bahasa kedua itu sebagai reformulasi kognitif yang bersifat gradual dari hipotesis ke-bahasaan yang dibuktikan oleh tuturan pembelajar bahasa sasaran itu.

Pemerolehan bahasa pada anak, dan sering dianalogikan bagi pemerolehan orang dewasa, ditandai dengan tarik-menariknya antara kreativitas dan imitasi. Dalam hal ini, tatkala mencoba melihat pandangan romantis dan realis, Jakobson (1968:13-14) melihat cercah butir kebenaran pada keduanya dengan mengatakan

on the one hand, the creativity of the child is obviously not pure creativity, or invention out of nothingness; on the other hand, however, neither is his imitation a mechanical and involuntary adoption. The child creates as he borrows.

Strategi 5: Manfaatkan bahasa ibu secara efektif dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. [Isu terkait--pengembangan bahasa Inggris Indonesia; pengajaran B2 bagi pembelajar dewasa]

Dalam kaitan dengan sejauh mana peran bahasa ibu dalam belajar bahasa kedua atau asing, Jespersen (1922:148) sejak lama telah mengetengahkan sudut pandang yang lain tatkala ia berkata berikut

... the child in question hardly learns either of the two languages as perfectly as he would have done if he had limited himself to one Secondly the brain effort required to master two languages instead of one certainly diminishes the child's power of learning other things.

Setelah mengkaji berbagai hipotesis serta temuan penelitian, Larsen-Freeman dan Long (1991:106-107) berkesimpulan bahwa peran B1 dalam pemerolehan B2 itu jauh lebih musykil dan tidak senegatif sebagaimana diduga semula oleh para pendukung hipotesis analisis kontrastif. Sebagaimana disentuh terdahulu, hipotesis analisis kontrastif itu mengemukakan bahwa tatkala dua bahasa itu serupa, transfer positif akan terjadi; manakala berbeda, transfer negatif atau interferensi akan muncul. Perbedaan antara B1 dan B2 belum tentu berarti kesulitan bagi pembelajar B2 itu. Bahkan kesamaan antara B1 dan B2 cenderung memunculkan banyak masalah dalam pembelajaran. Begitu juga, identitas struktural yang mirip dalam kedua bahasa itu tidak selalu berbuntut tumbuhnya transfer positif.

Temuan Larsen-Freeman dan Long di atas merupakan penguatan terhadap apa

yang telah dirumuskan kira-kira satu dekade sebelumnya oleh Dulay, Burt, dan Krashen (1982:97). Rumusannya, antara lain,

- a. mayoritas kesalahan gramatis tidak menggambarkan bahasa ibu, baik pada anak-anak maupun dewasa,
- b. pembelajar B2--membuat banyak kesalahan dalam bidang gramatika yang terbandingkan di B1 dan B2--kesalahan yang semestinya tidak dibuat bila transfer positif berjalan,
- c. penentuan kebenaran gramatis B2 oleh pembelajar B2 lebih bertembali dengan jenis kalimat B2 ketimbang dengan struktur B1-nya sendiri, dan
- d. kesalahan fonologis memperlihatkan pengaruh B1 secara lebih kuat ketimbang kesalahan gramatis, meskipun jumlah yang cukup besar dari kesalahan fonologis B2 mirip dengan kesalahan yang dibuat oleh pembelajar B1 monolingual, dan hanya sejumlah kecil kesalahan fonologis dalam membaca dapat diusut sampai ke B1 pembelajar.

5. Penutup

Berbagai aspek pengajaran bahasa asing, khususnya bahasa Inggris, dalam sistem persekolahan kita memerlukan perhatian dan perbaikan yang sangat *daria* (serius). Keperluan upaya perbaikan ini dikokohkan, antara lain, dengan indikator nilai evaluasi belajar tahap akhir nasional, tes sumatif, dan pengujian lainnya. Aspek-aspek untuk diperhatikan dan diperbaiki tersebut mencakupi pelaksanaan program pengajaran, kegiatan belajar-mengajar, kemampuan guru, ketersediaan dan penggunaan buku, serta ketersediaan dan penggunaan *lab* dan sumber belajar lainnya.

Terdapat beberapa strategi yang perlu dikembangkan dalam menanggapi kondisi-kondisi tersebut. *Pertama*, perlu dilakukan pengkajian yang cermat terhadap faktor-faktor sosial dalam pemerolehan bahasa, yaitu usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan identitas etnis beserta variabel yang terkait erat dengan masing-masingnya. Hal ini terkait dengan berbagai isu yang perlu dituntaskan berkenaan dengan pengajaran bahasa Inggris bagi anak usia dini; perhatian sosial akan peran *gender*; kepedulian akan kelas sosial; dan perbedaan latar belakang bahasa etnis. *Kedua*, perlu dikembangkan perhatian atas faktor masukan bahasa sasaran dan intensitas interaksi dalam proses pembelajaran dengan tetap menempatkan posisi pembelajar sebagai variabel penentu keberhasilan. Faktor masukan bahasa sasaran akan mensyaratkan guru yang berprofisiensi bahasa sasaran memadai dan berkemampuan metodologis yang terandal. Pada gilirannya, hal ini akan terkait dengan isu konkurensi dalam pendidikan guru dan pilihan penekanan pengajaran pada kefasihan atau kecermatan.

Strategi ketiga berkenaan dengan perlunya perhitungan manfaat transfer positif dan pengkajian cara penghindaran interferensi. Strategi ini perlu dikembangkan karena pembelajaran bahasa Inggris dalam persekolahan kita, khususnya SMU, terjadi dengan melibatkan pembelajar dewasa. Dalam hal itu muncul berbagai isu terkait seperti persoalan pendekatan alami dan masalah interferensi yang diperhadapkan dengan kemusykilan bahasa sasaran. Strategi keempat lebih bersifat psikologis-pedagogis, yaitu

perlunya pemanfaatan **semaksimal** mungkin daya kognitif serta tingkat kreativitas pembelajar bahasa. Karena pembelajar bahasa Inggris itu adalah pembelajar dewasa, pertimbangan pemanfaatan daya kognitif dan daya kreatif itu menjadi sangat relevan. Upaya ini tentu saja akan **menyentuh** berbagai isu terkait seperti masalah kebermaknaan isi dan interaksi, **pengajaran** bahasa Inggris intensif versus ekstensif dan peluang pemanfaatan bahasa sasaran. Bertemali dengan strategi ini adalah strategi pemanfaatan bahasa ibu **secara** efektif dalam pemerolehan dan pembelajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Dalam konteks ini muncul pendapat perlunya pengembangan bahasa Inggris ala Indonesia, seperti halnya muncul berbagai ragam bahasa Inggris di berbagai penjuru bumi ini.

Akhirnya, dengan semangat reformasi tak diragukan lagi bahwa pembaharuan dan pemberian kebebasan yang lebih besar perlu terjadi pada tingkat pengajaran dan pembelajaran yang paling dasar, yaitu kelas pengajaran bahasa asing itu sendiri termasuk guru dan siswanya. Namun begitulah, pembaharuan dan kebebasan itu selalu tidak tanpa syarat.

Daftar Pustaka

- Beebe, L.M. (penyunting). 1988. *Issues in Second Language Acquisition*. New York: Newbury House Publisher.
- Beebe, L.M. & Zuengler, J. 1983. "Accommodation Theory: An Explanation for Style Shifting in Second Language Dialects". Dalam N. Wolfson & E. Judd (penyunting), *Sociolinguistics and Language Acquisition*. Rowley: Newbury House Publishers, Inc.
- Bloomfield, L. 1933. *Language*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Chomsky, N. 1965. *Aspects of The Theory of Syntax*. Cambridge, Massachusetts: The M.I.T. Press.
- Depdikbud. 1993. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum Landasan, Program dan Pengembangan*. Jakarta.
- Depdikbud. 1993. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum GBPP Mata Pelajaran Bahasa Inggris*. Jakarta.
- Ditdikmenum Ditjendikdasmen Depdikbud. 1995. *Kurikulum Sekolah Menengah Umum (SMU) Petunjuk Teknis Mata Pelajaran Bahasa Inggris*. Jakarta.
- Dulay, H., M., Burt, & S. Krashen. 1982. *Language Two*. New York: Oxford University Press.
- Ellis, R. 1994. *The Study of Second Language Acquisition*. Oxford: Oxford University Press.
- Gass, S.M., & L. Selinker. 1994. *Second Language Acquisition: An Introductory Course*. Hillsdale, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers.
- Hamied, F.A. 1993. "Faktor Pembelajaran Bahasa dan Status Profisiensi Bahasa Inggris Siswa SMA di Jawa Barat." Mimeo. Laporan Penelitian Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

- Hamied, F.A. 1993. "Laporan Nasional Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Tema Pengajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri." Mimeo. Jakarta: Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Jakobson, R. 1968. *Child Language Aphasia and Phonological Universals*. The Hague: Mouton & Co. N.V., Publishers.
- Jespersen, O. 1922. *Language its Nature, Development and Origin*. London: George & Unwin LTD.
- Larsen-Freeman, D. & M.H. Long. 1991. In *Introduction to Second Language Acquisition Research*. London: Longman.
- Long, M.H. 1988. "Instructed Interlanguage Development". Dalam L.M. Beebe (penyunting). *Issues in Second Language Acquisition*. New York: Newbury House Publishers.
- Wolfson, N.E. & Judd. (penyunting). 1983. *Sociolinguistics and Language Acquisition*. Rowley: Newbury House Publishers, Inc.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D2
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 14.20--15.10
Judul Makalah	: Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah
Penyaji	: Fuad Abdul Hamied
Pemandu	: Juniar Z. Adji
Pencatat	: a. Juhriah b. I Wayan Tama
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Ferry Rita, Universitas Tadulako, Palu

a. Pertanyaan:

- 1) Apa yang dimaksud pembelajaran bahasa Inggris ala Indonesia? Apakah dileknya atau sosioleknya?
- 2) Pembelajar bahasa Inggris di Jakarta berbeda dengan daerah lain. Tentang kultur, motivasi pemerolehan, dan ketersediaan sarana mutakhir, apakah hal ini disesuaikan?

b. Jawaban:

- 1) Bahasa Inggris ala Indonesia kita gambarkan seperti apa yang terlihat di negara tetangga kita. Kita mencoba memperhatikan bahasa Inggris di Filipina. Mereka mempunyai bahasa Inggris yang tidak sebagus penutur asli. Di Indonesia banyak yang bahasa Inggrisnya mendekati penutur asli, tetapi mayoritas tidak dapat berbahasa Inggris. Terkait dengan isu lain, apakah ini termasuk kecermatan berbahasa atau kefasihan berbahasa. Kecermatan jauh lebih besar ketimbang kefasihan berbahasa. Di situ, kalau kita perhatikan, ada hambatan-hambatan. Tentu kita bedakan pembelajaran bahasa Inggris untuk calon guru dengan untuk bukan calon guru. Untuk calon guru keduanya harus diperhatikan kecermatan dan kefasihan. Kalau kita mendidik anak untuk tujuan *integrated* atau instrumental sebaiknya mencoba ke arah kefasihan berbahasa.
- 2) Persoalan pengajaran bahasa Inggris yang berbeda-beda di daerah, sebenarnya risiko dari reformasi dan kemandirian masing-masing di daerah. Saya yakin kalau ini dikaji, tiap-tiap provinsi memiliki kebutuhan yang beraneka. Sekarang yang menjadi persoalan ialah anak-anak kita dipaksa untuk mencapai tingkat tertentu. Padahal, potensi Indonesia tidak sama. Kita harus memberi peluang yang sama kepada yang membutuhkan itu. Sekarang yang menjadi persoalan apakah kita memberi peluang kepada semuanya, termasuk yang tidak membutuhkan. Akhirnya, timbul efisiensi bahan

pengajaran bahasa asing yang dikembangkan secara tetap sesuai dengan kebutuhan setempat.

2. Penanya: Marjusman Maksan, IKIP Padang

a. Pertanyaan:

- 1) Saya kurang setuju dengan kesimpulan Pienemann bahwa pembelajaran dapat mempercepat pemerolehan bahasa.
- 2) Variabel ketersediaan dan penggunaan buku belum menjamin siswa belajar.

b. Jawaban:

- 1) Hal itu bergantung kepada cara kita melihat apa yang dimaksud dengan pemerolehan itu sendiri. Kalau saya tidak melalui proses pemerolehan, mungkin saya tidak bisa berbahasa Inggris. Pengajaran itu bisa menggeser posisi satu kemampuan ke kemampuan yang lain.
- 2) Masalah ketersediaan dan penggunaan, saya sepakat. Masalah penggunaan lebih bersifat normatif dalam arti kata menjawab pertanyaan-pertanyaan.

3. Penanya: Junaiyah H.M., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

Apakah pendidikan bahasa Inggris di rumah mempertimbangkan kemampuan anak sebelum sekolah?

b. Jawaban:

Kemampuan anak dibuktikan oleh satu penelitian lain yang dilakukan khusus di Jawa Barat. Ada temuan bahwa ternyata yang berpengaruh terhadap kemampuan anak-anak di SMU itu dapat dilihat dari nilai ebtanas murni SLTP daripada faktor-faktor pembelajaran yang ada di sekolah itu sendiri.

4. Penanya: Didik Santoso, IKIP Padang

a. Pertanyaan:

Tujuan belajar bahasa asing adalah *integrated* dan *instrumental*. Di Indonesia tujuan mana yang ditekankan?

b. Jawaban:

Persoalan *integrated* dan *instrumental* ini tujuannya adalah kemampuan bahasa Inggris itu lebih dibatasi dalam kemampuan membaca. Jadi, kemampuan berbahasa Inggris tujuan instrumentalnya, ialah kemampuan membaca.

5. Penanya: R. Eko Juniarto, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Mengapa sampel yang digunakan hanya sekolah negeri saja, padahal judul makalah "Pengajaran Bahasa Asing di Sekolah".
- 2) Bagaimana pendapat Bapak mengenai cara meningkatkan kemampuan guru.

b. Jawaban:

- 1) Penelitian itu memang untuk mengkaji SMU Negeri. Penelitian itu pesan khusus dari Inspektorat Jenderal, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- 2) Saya selalu mengatakan apa pun yang kita lakukan mempunyai tujuan yang jelas dan mempunyai manfaat, seperti penataran. Yang penting, dalam hal ini, penataran dapat melahirkan guru yang bermutu.

6. Penanya: Djoko Nurkamto, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta**a. Pertanyaan:**

Bagaimana pengaruh pendekatan komunikatif, bagus atau tidak?

b. Jawaban:

Pendekatan komunikatif yang dipakai dalam penelitian itu cocok dengan hasil temuan yang saya kaji di Indonesia. Saya tidak mengutip Bloomfield, tetapi hasilnya cocok. Pendekatan komunikatif lebih cocok diterapkan kepada guru di dalam kelas. Hasilnya bisa sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan yang ada.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PEMBELAJAR ASING

A. Chaedar Alwasilah
IKIP Bandung

1. Pengantar

Ihwal pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing (BIPA) merupakan isu penting bagi perencanaan bahasa di Indonesia. Pada Kongres Bahasa Indonesia VI (28 Oktober--2 November 1993) tercatat bahwa paling tidak ada sembilan makalah dengan topik itu. Dalam kurun waktu empat tahun di Indonesia ada tiga konferensi internasional tentang BIPA, yaitu Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (KIPBIPA) I di Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga (20--23 Januari 1994), Kongres Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing di Universitas Indonesia (28--30 Agustus 1995), KIPBIPA II di IKIP Padang (1996), dan KIPBIPA III akan diselenggarakan di IKIP Bandung (11--13 Oktober 1999). Dari semua makalah yang disajikan pada kedua KIPBIPA dan sembilan makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI, 1993 teramati hal-hal sebagai berikut.

- a. Di luar negeri (khususnya Amerika Serikat, Jerman, Australia, Rusia, dan Korea) pengajaran BIPA memperlihatkan keragaman dalam motivasi sosial dan politik sebagaimana tampak dalam keterlibatan pemerintah, lembaga swasta, universitas, kerja sama internasional, orientasi pengajaran, penyediaan materi ajar, dan manajemen pelatihan.
- b. Di dalam negeri persoalan pengajaran BIPA tampaknya jauh lebih kompleks daripada yang terungkap di atas, misalnya karena terkait dengan urusan imigrasi, kerja sama antarlembaga, beasiswa, jumlah dan kelompok siswa, motivasi belajar, lembaga penyelenggara, materi ajar dan evaluasi, instruktur, dan sertifikasi.

Kepedulian dan keseriusan akademik kita tentang BIPA sangat jelas tergambar dalam kualitas serta topik-topik kajian pada makalah-makalah yang ditampilkan pada KIPBIPA I dan II. Tabel 1 di bawah ini memperlihatkan sebaran topik tersebut. Dari tabel tersebut dapat disarikan hal-hal berikut ini.

- a. Secara keseluruhan kepedulian kita terhadap BIPA baru sebatas analisis teoretis, yang memang dapat dilakukan oleh siapa saja, dan tidak mensyaratkan pengalaman mengajar atau belajar BIPA, atau penelitian. Kelemahan semua ini adalah bahwa kita terperangkap oleh lalu lintas asumsi dan spekulasi teoretis yang kurang membumi. Memang ada positifnya, kita semakin kaya dengan sudut pandang yang berbagai-bagai.

TABEL 1
SEBARAN TOPIK MASALAH KIPBIPA I DAN II

Kategori Kajian	Jumlah Makalah	Topik Makalah	Jumlah Makalah
<i>Analisis Teoretis</i>	15 + 23 (54,28%)	Sosiolinguistik & Budaya Apa & Bagaimana mengajar BIPA Sastra, Grammar, ISP Keterampilan Berbahasa Evaluasi	5 + 7 9 + 14 1 + 0 3 1
<i>Pengalaman Pengajar & Pengelola</i>	17 + 12 (41,43%)	Materi & Metode Ajar Program Pelatihan Ragam Bahasa	7 + 9 5 + 2 1
<i>Pengalaman Pembelajar</i>	0 + 2 (2,86%)	Strategi Belajar	2
<i>Penelitian</i>	2 + 4 (8,57%)	Sosialisasi Kultural Analisis Kesilapan Materi Ajar	1 1 + 2 1 + 1
Total	29 + 41 = 70		

Catatan: Ada makalah dan topik yang masuk ke dalam lebih dari satu kategori.

- b. Belum banyak dari para pemerhati BIPA yang memiliki pengalaman mengajar BIPA (terutama di luar negeri). Terlihat bahwa pengalaman empirik para pengelola dan pengajar program BIPA memunculkan serpihan-serpihan empirik yang sulit untuk digeneralisasi karena pada umumnya mereka bertumpu pada kasus-kasus yang sangat beragam dan dalam skala kecil. Walaupun demikian, semua ini mempertajam pemahaman kita akan persoalan yang muncul di lapangan.
- c. Sangat sedikit pemahaman kita akan pengalaman pembelajar asing dalam mempelajari BIPA. Bisa jadi, kesimpulan kita selama ini sangat berpihak (bias) kepada kita sebagai penutur asli bahasa Indonesia dan sebagai pengajar atau pengelola program BIPA. Ketidakseimbangan sudut pandang ini bagaimanapun juga merupakan satu kelemahan yang mesti kita akui.
- d. Sedikit sekali penelitian (yang dipublikasikan dan diseminarkan) ihwal BIPA, padahal penelitian adalah barometer keilmuan dan kecendekiaan. Apa yang kita simpulkan ihwal BIPA selama ini pada umumnya masih bersifat spekulatif karena belum banyak bukti penelitian yang menopang kebenarannya.
- e. Dari pengamatan atas semua makalah, khususnya makalah teoretis dan analisis, yang disajikan pada KIPBIPA I dan II, hampir 100% berangkat dari paradigma pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing atau *Teaching English as a Foreign Language (TEFL)*. Mereka yang telaten mencermati perkembangan TEFL,

tidak akan menemukan hal baru dalam perbincangan BIPA. Ini menyiratkan dua hal bahwa (a) bidang BIPA belum memiliki landasan akademik yang mandiri atau (b) adanya universal dalam pengajaran bahasa asing sehingga apa yang diyakini benar dalam TEFL berlaku juga dalam pengajaran BIPA.

Makalah ini menyoroti permasalahan pengajaran BIPA yang diselenggarakan dalam negeri, sedangkan pengalaman dan praktik pengajaran BIPA di luar negeri dijadikan rujukan perbandingan. Makalah ini melaporkan hasil survei terhadap tiga kelompok responden yang terlibat langsung dalam pengajaran BIPA di IKIP Bandung, yaitu (1) lima orang dosen yang pernah mengajar BIPA di Deakin University, Melbourne Australia, (2) tiga belas orang dosen BIPA di Balai Bahasa IKIP Bandung, dan (3) enam orang pengelola BIPA di IKIP Bandung.

Studi ini merupakan studi pendahuluan ihwal pengajaran BIPA di Indonesia dan bertujuan untuk

- a. mendeskripsikan pengajaran BIPA di Australia sebagaimana dipersepsi oleh para pengajar Indonesia yang pernah mengajar di sana;
- b. mendeskripsikan pengajaran BIPA di Balai Bahasa IKIP Bandung sebagaimana dipersepsi oleh para pengajar dan pengelola pengajaran BIPA di lembaga tersebut;
- c. membandingkan kedua program pengajaran BIPA di atas sehingga diketahui persamaan dan perbedaannya;
- e. mengajukan jawaban sementara akan tiga persoalan besar, yaitu
 - 1) bagaimana kondisi pengajaran BIPA di Indonesia?
 - 2) kondisi apa yang diharapkan sehubungan dengan butir a) itu?
 - 3) strategi yang bagaimana yang perlu ditempuh untuk mencapai kondisi yang diharapkan.

Jawaban-jawaban sementara itu akan disederhanakan dengan fokus pada:

- a. motivasi pembelajar BIPA;
- b. dasar pengelolaan (kerjasama kelembagaan); dan
- c. ketersediaan dan mutu bahan ajar.

2. Temuan Survei

a. *Pengajaran BIPA di Deakin University, Melbourne, Australia*

Pengajaran BIPA di Deakin University, Australia, dapat dianggap mewakili program serupa di universitas-universitas Australia. Dalam persepsi kelima pengajar BIPA di Dekan University, para mahasiswa memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari BIPA sebagai mata kuliah pilihan, dengan tujuan untuk (1) bekerja di bidang bisnis atau pemerintahan, atau (2) menjadi guru bahasa Indonesia di Australia. Diketahui pula bahwa keterampilan berbahasa Indonesia pada sebagian besar mahasiswa merupakan prioritas utama. Kebijakan pemerintah Australia di balik program BIPA adalah demi kepentingan bisnis dan studi tentang Indonesia.

Mereka merasa dirinya sebagai dosen mandiri yang mengembangkan silabus berdasarkan kurikulum yang sudah ada, dengan konsentrasi pada keempat keterampilan berbahasa secara integratif. Secara keseluruhan keterampilan yang paling sulit

dikuasai pembelajar adalah menyimak dan berbicara; sedangkan aspek bahasa yang paling sulit dikuasai adalah pembentukan kata (afiksasi) dan tata kalimat. Untuk itu, para instruktur memilih materi ajar berdasarkan tujuan kurikuler yang ditetapkan dan berdasarkan minat siswa. Materi yang paling banyak dipergunakan adalah surat kabar, majalah, atau materi sejenis yang harus dikembangkan oleh mereka sendiri, dan cukup tersedia di kampus. Diketahui pula bahwa topik yang paling disukai oleh siswa adalah kehidupan sehari-hari di Indonesia, sedangkan ragam bahasa yang diajarkan adalah ragam bahasa formal.

Para pengajar pada umumnya mengidentifikasi dirinya sebagai pendukung *eclectic method* dan pendekatan komunikatif, dan teknik yang paling sering mereka gunakan adalah (1) diskusi kelompok, (2) presentasi di depan kelas, (3) tugas tulis mandiri, dan (4) penggunaan alat bantu elektronik (televisi, video, dsb.). Dua teknik pertama itu merupakan teknik yang paling disukai siswa. Ihwal koreksi kesalahan, siswa mengharapkan untuk menanggukkan koreksi kesalahan kecuali pada kegiatan menulis. Sementara itu, evaluasi yang diterapkan merupakan hasil olahan sendiri atau kerja sama dengan dosen Australia, dan mencakup kedua bentuk tes, objektif dan esei. Pada umumnya kemampuan para siswa BIPA dikategorikan pada tingkat *intermediate* atau *advanced*, dan dengan keterampilan ini mereka akan mampu untuk (1) berkomunikasi sederhana sebagai turis di Indonesia, (2) membaca surat kabar berbahasa Indonesia, (3) menyimak siaran radio dan televisi Indonesia, dan (4) mengikuti perkuliahan S-1 di Indonesia.

Para pengajar BIPA di Australia melaporkan sejumlah kesulitan yang dialami sebagai berikut:

- 1) langkanya bahan audiovisual tentang Indonesia;
- 2) sikap liberal pembelajar muda;
- 3) kurangnya minat siswa untuk mempelajari bahasa Indonesia baku;
- 4) lemahnya keterampilan menyimak dan kesulitan menguasai afiksasi bahasa Indonesia;
- 5) belum adanya buku teks yang memadai;
- 6) belum optimalnya pemanfaatan media; dan
- 7) tidak memadainya latihan berbicara.

Para pengajar yang akan mengajar di Australia sebaiknya dipersiapkan secara profesional, antara lain, sebagai berikut (Urutan butir-butir menunjukkan derajat relevansinya dalam persepsi responden):

- 1) penguasaan bahasa Inggris yang baik;
- 2) penguasaan tentang budaya, seni, dan politik Indonesia;
- 3) penguasaan metode dan teknik mengajar;
- 4) pemahaman struktur bahasa Indonesia, khususnya afiksasi;
- 5) pemahaman budaya pembelajar;
- 6) kemampuan mengembangkan materi ajar; dan
- 7) kesiapan psikologis.

Ihwal penyebaran BIPA, para pengajar menyarankan hal-hal sebagai berikut:

- 1) tersedianya materi ajar otentik seperti rekaman ihwal seni budaya Indonesia;
- 2) peningkatan kualitas pengajaran dalam hal materi, guru, dsb.;
- 3) peningkatan motivasi belajar mereka, antara lain, dengan tugas-tugas seperti *interpreting*, dan tugas-tugas lain yang menantang;
- 4) penyusunan materi ajar BIPA yang khusus untuk pembelajar negara tertentu dan yang secara integratif menyajikan ragam bahasa formal ataupun informal;
- 5) peningkatan *exchange program*;
- 6) menyiapkan buku teks yang tepat; dan
- 7) peningkatan efektivitas dan efisiensi metode.

b. Pengajaran BIPA di IKIP Bandung

Sejak 1960-an Balai Bahasa IKIP Bandung telah melatih tidak kurang dari 100 siswa asing, dan sejak 1990-an jumlah pembelajar BIPA semakin meningkat terutama berkat adanya kerja sama dengan beberapa universitas di Australia seperti Deakin University dan La Trobe University. Selain siswa yang datang dalam kelompok, banyak juga yang datang secara mandiri. Dari survei terhadap 13 pengajar BIPA diketahui hal-hal sebagai berikut.

1) Motivasi Belajar

Mereka pada umumnya memiliki motivasi tinggi untuk mempelajari BIPA demi dua kepentingan terbesar, yaitu (1) wisata dan kebudayaan secara keseluruhan dan (2) bisnis. Untuk itu, mereka ingin terampil dalam BI, dan ada juga yang mempelajarinya sebagai bidang kajian akademik. Mereka datang ke IKIP Bandung melalui (1) kerja sama lembaga, (2) informasi dari mulut ke mulut, dan (3) iklan.

2) Status Pengajar

Para pengajar yang sebagian besar sudah mengajar lebih dari 10 orang siswa asing itu berlatar belakang pendidikan bahasa Indonesia, atau bahasa Inggris, atau bahasa asing lainnya. Menurut mereka instruktur BIPA sebaiknya memiliki tiga hal, yaitu (1) menguasai bahasa Inggris, (2) menguasai bahasa ibu dan kebudayaan si pembelajar. Para instruktur merasa bahwa mereka diminta untuk mengajar karena mereka mampu mengajar BIPA atau karena mampu berbahasa Inggris. Mereka mengakui bahwa sebelum mereka mengajar BIPA, tidak ada persiapan khusus yang ditempuhnya.

3) Kurikulum dan Materi Ajar

Pada umumnya kurikulum dan silabus dikembangkan oleh pengajar sendiri atau berdasarkan kurikulum yang telah disiapkan oleh lembaga. Keterampilan yang paling banyak diajarkan berurutan sebagai berikut: (1) berbicara, (2) membaca, (3) menyimak, dan (4) menulis. Menurut persepsi para pengajar, keterampilan yang paling sulit untuk dikuasai siswa adalah menulis, menyimak, dan berbicara. Sementara itu, aspek bahasa yang paling sulit untuk dikuasai mereka adalah tata kalimat, pembentukan kata, dan kosakata.

Para pengajar memilih materi ajar berdasarkan (1) tujuan kurikuler, (2) minat siswa, dan (3) usul siswa; sedangkan materi yang paling banyak dipakai adalah (1) surat kabar, majalah, atau *leaflet*; (2) buku teks, dan (3) berita radio dan televisi. Materi ajar pada umumnya harus dicari dan dikembangkan sendiri oleh pengajar. Topik yang paling disukai oleh siswa adalah ihwal (1) kehidupan sehari-hari di Indonesia dan (2) sosial politik Indonesia. Ihwal ragam bahasa yang paling banyak diajarkan adalah ragam formal, bukan ragam informal.

4) Pendekatan dan Metode Mengajar

Diketahui bahwa sebagian besar pengajar BIPA menerapkan pendekatan komunikatif dan *eclectic method*. Mengenai teknik mengajar, berikut ini urutan teknik dari yang paling banyak digunakan sampai yang paling jarang digunakan: (1) diskusi kelompok, (2) menerjemahkan, (3) simulasi, dan (4) mengunjungi objek di luar kampus. Teknik mengajar yang paling disukai siswa dalam persepsi instruktur adalah (1) diskusi kelompok dan (2) *individual report* secara tertulis. Para siswa pada umumnya mengharapkan instruktur untuk mengoreksi kesalahan berbahasa secara langsung.

5) Evaluasi dan Prestasi Siswa

Keterampilan siswa pada umumnya ada dalam kategori (1) *intermediate* dan *elementary*. Dengan keterampilan ini mereka akan mampu untuk (1) berkomunikasi akademik dengan mahasiswa Indonesia, (2) membaca surat kabar bahasa Indonesia, dan (3) berkomunikasi sederhana sebagai turis di Indonesia. Bentuk tes yang dipakai adalah bentuk campuran esei dan tes objektif dan pada umumnya merupakan hasil olahan sendiri.

Para pengajar mengakui bahwa hal-hal berikut merupakan kesulitan yang dihadapi dalam mengajarkan BIPA (Urutan menunjukkan tingkat relevansi sebagaimana dipersepsi para responden):

- 1) bervariasinya kemampuan dan minat pembelajar dalam satu kelas BIPA;
- 2) bahan-bahan belum matang untuk semua kebutuhan pembelajar yang heterogen;
- 3) keterbatasan bahan ajar, khususnya untuk melatih kemahiran menyimak.
- 4) penjelasan gramatik bahasa Indonesia tidak mudah dengan latar belakang bahasa ibu si pembelajar;
- 5) sangat sulit mencari buku-buku yang berkaitan dengan metodologi pengajaran BIPA;
- 6) pengaturan jadwal belajar siswa yang cukup padat;
- 7) penentuan metode yang paling sesuai;
- 8) tidak adanya kurikulum yang baku dan buku sumber yang memadai; dan
- 9) jadwal pengajaran BIPA bersamaan dengan perkuliahan kelas reguler.

Menurut mereka, sebelum program BIPA dimulai, sebaiknya dilakukan hal-hal berikut (Urutan menunjukkan derajat relevansi dalam persepsi responden):

- 1) pemilihan dan penyiapan silabus yang sesuai dengan tujuan pembelajar serta penyiapan bahan-bahan ajarnya;

katkan prestise lembaga di mata bangsa asing. Cara yang sebaiknya ditempuh dengan negara lain yang belum menjalin kerja sama adalah dengan memanfaatkan KBRI setempat. Para pengelola melihat bahwa selama ini kendala terbesar dari pelaksanaan BIPA adalah (1) pelayanan imigrasi yang kurang mendukung dan (2) kurang jelasnya program yang diinginkan pihak asing.

Mereka mampu menerima siswa asing dalam satu semester antara 10 sampai dengan 20 orang. Secara keseluruhan kesulitan pengelola dalam penyelenggaraan BIPA adalah (1) belum tersedianya materi ajar, tes, dan fasilitas pendukungnya, (2) kurangnya staf pengajar yang khusus menangani BIPA, dan (3) dana yang tidak mencukupi. Yang paling mendesak untuk dilakukan adalah (1) membantu mempromosikan BIPA di luar negeri, (2) menyusun kurikulum BIPA dan menyediakan fasilitas pendukungnya, dan (3) memberdayakan unit yang langsung menangani BIPA seperti Balai Bahasa atau Pusat Bahasa.

Untuk mempersiapkan SDM yang mantap, unit yang paling tepat mengadakan pelatihan persiapan pengajar BIPA adalah jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Secara nasional, kelemahan kita dalam menangani program BIPA adalah sebagai berikut:

- 1) belum tersedianya materi ajar, tes, dan fasilitas pendukungnya;
- 2) kurangnya staf pengajar yang khusus menangani BIPA;
- 3) belum maksimalnya promosi lembaga; dan
- 4) tidak mencukupinya dana.

Untuk pengembangan BIPA, para pengelola program BIPA menyarankan hal-hal berikut:

- 1) pembentukan organisasi profesi pengajar BIPA;
- 2) pengembangan bahan ajar cetak, elektronik, dan multimedia;
- 3) penyusunan materi ajar dan tes yang berdasarkan penelitian dan materi yang berdasarkan kebutuhan siswa;
- 4) pelengkapan fasilitas pendukung PBM;
- 5) penyiapan staf pengajar yang profesional dalam BIPA melalui pelatihan profesional;
- 6) pengadaan penelitian secara sinambung untuk mengetahui kebutuhan siswa; dan
- 7) penanganan pengajaran khusus bagi orang asing dan tidak digabung dengan kelas umum.

3. Pembahasan

Dari pengalaman empirik para pengajar BIPA di Melbourne, Australia, dan di IKIP Bandung diketahui sejumlah persamaan, yaitu sebagai berikut.

- a. Para pembelajar BIPA memiliki motivasi yang tinggi.
- b. Aspek bahasa yang paling sulit untuk dikuasai pembelajar BIPA adalah afiksasi dan tata kalimat.
- c. Materi ajar disusun berdasarkan tujuan kurikuler dan minat pembelajar serta diambil dari koran, majalah atau materi sejenis. Sementara itu, topik yang paling

- diminati pembelajar adalah kehidupan sehari-hari di Indonesia.
- d. Para pengajar BIPA menerapkan pendekatan komunikatif dan metode eklektik dengan teknik diskusi kelompok. Di Australia, dua teknik yang paling disenangi pembelajar adalah diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas, sedangkan di IKIP Bandung adalah diskusi kelompok dan *individual report* secara tertulis.
- e. Para pengajar BIPA pada umumnya mengolah sendiri materi tes BIPA.

Sementara itu, perbedaan pengajaran BIPA pada dua latar yang berbeda itu tergambar dalam tabel-tabel sebagai berikut.

TABEL 2
PERBEDAAN PENGAJARAN BIPA
DI AUSTRALIA DAN INDONESIA

Aspek	Indonesia	Australia
<i>Koreksi kesalahan Kesulitan terbesar</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengoreksi kesalahan secara langsung. ▪ Bervariasinya kemampuan dan minat pembelajar. ▪ Bahan-bahan belum cocok untuk siswa yang heterogen. ▪ Keterbatasan materi ajar, khususnya untuk menyimak. ▪ <i>Intermediate</i> atau <i>elementary</i> 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menanggihkan koreksi kecuali pada latihan menulis. ▪ Langkanya bahan audiovisual tentang Indonesia. ▪ Pembelajar yang sangat liberal. ▪ Kurang berminat mempelajari bahasa baku. ▪ <i>Intermediate</i> dan <i>advanced</i>.
<i>Tingkat pembelajar</i>		

TABEL 3
PERSIAPAN YANG MESTI DILAKUKAN INSTRUKTUR BIPA DAN
SARAN UNTUK PENYEBARAN BIPA

Aspek	Indonesia	Australia
<i>Persiapan yang perlu dilakukan</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Memilih dan menyiapkan silabus yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. ▪ Memilih materi ajar yang menarik bagi siswa. ▪ Merancang program pengajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penguasaan bahasa Inggris dengan baik. ▪ Penguasaan budaya, seni, dan politik Indonesia. ▪ Penguasaan metode dan teknik mengajar.
<i>Penyebaran BIPA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Promosi secara gencar dalam berbagai media kepada lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri. ▪ Membuka program BIPA pada tingkat universitas. ▪ Mengoptimalkan peran KBRI. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tersedianya materi ajar otentik seperti rekaman ihwal budaya Indonesia. ▪ Peningkatan kualitas materi, guru, dsb ▪ Meningkatkan motivasi belajar siswa.

TABEL 4
PERSIAPAN DAN PERBEDAAN PERSEPSI PENGAJAR DAN PENGELOLA
DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM BIPA

Aspek	Pengajar BIPA	Pengelola BIPA
<i>Kesulitan dalam program pengajaran BIPA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bervariasinya kemampuan minat pembelajar dalam satu kelas BIPA. ▪ Bahan-bahan belum matang untuk semua kebutuhan pembelajar. ▪ Keterbatasan bahan ajar, khususnya untuk pengajaran menyimak. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pelayanan imigrasi yang tidak mendukung program BIPA. ▪ Kurang jelasnya program yang diinginkan pihak asing. ▪ Belum tersedianya materi ajar BIPA. ▪ Kurangnya staf pengajar yang khusus menangani BIPA. ▪ Dana yang tidak mencukupi.
<i>Upaya penyebaran BIPA</i>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Penyebaran informasi dan promosi kepada lembaga-lembaga dalam dan luar negeri. ▪ Membuka program BIPA pada universitas. ▪ Mengoptimalkan peran KBRI. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mempromosikan BIPA di luar negeri. ▪ Menyusun kurikulum BIPA dan menyediakan fasilitas pendukungnya. ▪ Memberdayakan unit yang menangani PBIPA.

Merencanakan pengajaran BIPA adalah bagian dari politik bahasa nasional yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Dengan memperhatikan tiga tabel di atas, dapatlah dikemukakan hal-hal sebagai berikut.

Latar

Perencanaan BIPA tidak dapat dipisahkan dari konteks sosialnya. Pengajaran BIPA di luar negeri dan dalam negeri memerlukan penanganan yang berbeda dalam lingkup kebijakan, motivasi dan tujuan pembelajaran, tingkatan pembelajar, metode mengajar sampai dengan teknik mengajar. Pada umumnya para pembelajar yang datang ke Indonesia tinggal dalam waktu yang relatif singkat, baik perorangan maupun kelompok kecil. Walaupun pada umumnya motivasi belajar mereka tinggi dan memperlihatkan kesamaan dalam prioritas perolehan keterampilan berbicara, pengelolaan kelas-kelas BIPA masih belum efektif karena dua kendala terbesar, yaitu (1) bervariasinya minat dan kemampuan siap (*entry behavior*) pembelajar dan (2) belum adanya bahan-bahan yang dapat mengakomodasi variasi tersebut. Kelas-kelas kecil dan kurang reguler atau musiman juga relatif mahal dalam pengelolaannya sehingga hampir tidak ada persiapan

profesional yang dilakukan sebelum program-program BIPA dimulai.

4. Pengembangan Bahan Ajar

Terkait dengan karakteristik kelas yang musiman, heterogen, dan kecil seperti disebutkan di atas, pengembangan bahan ajar BIPA menjadi tersendat-sendat. Oleh karena itu, tidak mengherankan bila materi ajar BIPA di luar negeri, khususnya di Australia dan AS lebih berkembang dan lebih profesional daripada di Indonesia. Pengembangan bahan ajar ini harus menjadi agenda penting dan diprioritaskan oleh penyelenggara program BIPA. Rambu-rambu pengembangan bahan ajar BIPA itu antara lain sebagai berikut.

- a. Materi disiapkan untuk pembelajar asing tingkat *elementary* atau *intermediate*. Artinya, harus ada kriteria materi untuk kedua tingkatan itu.
- b. Materi mendukung perolehan semua keterampilan berbahasa, terutama keterampilan menyimak yang masih sangat langka.
- c. Materi didesain untuk mengakomodasi minat pembelajar yang beragam dan sejalan dengan pendekatan komunikatif, khususnya yang mendukung teknik-teknik seperti diskusi kelas, simulasi, dan tugas tertulis mandiri. Selain itu, materi ajar seyogianya didesain dengan memperhatikan strategi belajar siswa. Penelitian Lengkawati (1977) menunjukkan bahwa strategi yang paling sering dipakai pembelajar BIPA di Australia adalah menggunakan buku rujukan/kamus, mempelajari budaya bahasa target, menerka gagasan pokok dari konteks, mencatat pelajaran dalam bahasa target, memenggal kata ke dalam suku kata yang dipahami, membaca cerita atau percakapan secara berulang hingga memahaminya, meminta lawan bicara untuk berbicara agak lambat atau untuk mengulangi perkataan, atau menggunakan ungkapan lain untuk menyatakan gagasan.
- d. Tema-tema materi ajar dipilih beragam dalam menampilkan kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.
- e. Materi ajar disajikan secara populer yang ditandai oleh keseimbangan antara bahasa ragam baku dan nonbaku dan dengan memasukkan nuansa-nuansa pemahaman silang budaya (*cross-cultural understanding*).
- f. Kaji ulang atas materi ajar BIPA yang beredar selama ini harus terus dilakukan untuk memperkaya wawasan kita dalam mengembangkan bahan ajar BIPA.
- g. Materi ajar yang dipilih harus bersesuaian dengan minat pembelajar. Oleh karena itu, perlu disiapkan juga seperangkat instrumen untuk melakukan analisis kebutuhan pembelajar (*needs analysis*) BIPA.

5. Bahasa Indonesia 'Go International'

Upaya penyebaran BIPA tidak akan berhasil kecuali bila didukung oleh berbagai pihak seperti pejabat pemerintah, elit politik, pelaku dan peminat bahasa, serta profesi lainnya secara sinambung. Para pengelola program BIPA menyadari betul bahwa selama ini birokrasi di Depdikbud dan Kantor Imigrasi sedikit banyak telah mengurangi antusias pembelajar asing untuk belajar BIPA di Indonesia. Sementara itu, perwakilan Indonesia di luar negeri belum banyak membantu penyebaran dan promosi

BIPA secara maksimal. Badan-badan seperti Kadin, biro perjalanan, dan lembaga promosi pendidikan internasional seyogianya diajak berpartisipasi dalam promosi BIPA ini.

Upaya di atas bagaimanapun gencarnya tidak akan membuahkan hasil bila tidak dibarengi profesionalisasi para pelakunya. Profesionalisasi, ini antara lain, dapat dikembangkan melalui program atau jurusan Pengajaran BIPA (analog dengan jurusan TEFL di universitas AS) pada Program Pascasarjana untuk mempersiapkan para pengajar dan pengelola BIPA. Para pengajar dan pengelola ini juga seyogianya dihimpun dalam sebuah organisasi profesi pengajar BIPA yang berkoordinasi dengan Pusat pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Pada lingkup universitas unit yang menangani program BIPA seperti Balai Bahasa perlu diberdayakan sehingga memiliki keleluasaan 'istimewa' dalam mengelola program BIPA.

6. Akhir Wacana

Perencanaan bahasa seperti dirangkum oleh Cooper (1989) merujuk pada

"...systematic, theory-based, rational, and organized societal attention to language problems...involves decisions concerning the teaching and use of language, and their careful formulation by those empowered to do so, for the guidance of others" (1989:31).

Dalam makalah ini penulis telah mencoba mendeskripsi singkat, atau setidaknya mengidentifikasi, sejumlah variabel penting sebagaimana dimunculkan dalam kutipan di atas. Variabel-variabel penting itu adalah sebagai berikut.

a. *Problem bahasa*

Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing beserta ragam bahasa yang melekat padanya.

b. *Minat masyarakat*

Pemerintah Indonesia, pemerintah asing, universitas, dan peminat bahasa Indonesia memiliki perhatian dalam penyebaran BIPA.

c. *Problem pengajaran*

Problem pengajaran meliputi tingkatan pembelajar, materi ajar, metode, dan teknik mengajar BIPA.

d. *Lembaga yang diberdayakan*

Balai Bahasa atau unit sejenisnya yang seyogianya diberi kewenangan menyelenggarakan program BIPA; juga organisasi profesi yang mewadahi pengajar dan pengelola program BIPA.

Masih banyak variabel penting yang belum diketahui untuk pengembangan program BIPA. Saya khawatir bahwa selama ini perbincangan kita ihwal BIPA ini tidak berdasarkan hasil-hasil penelitian intensif, dan cenderung mengabaikan variabel pengalaman empirik para pembelajar BIPA sehingga teori-teori dan kebijakan yang kita dengungkan akan tetap kurang bernas. Seyogianyalah semua pihak memberikan

perhatian khusus pada penelitian-penelitian ihwal BIPA yang memang masih sangat langka.

Daftar Pustaka

- Alwasilah, A. Chaedar. 1997. *Politik Bahasa dan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- , 1995. *Pemasyarakatan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Pedesaan*. Makalah disajikan pada Seminar Mabbim VI di Malaysia.
- , 1995. "Bahasa Indonesia 'Go International'". *Media Indonesia*, 8 Juli.
- Collins, James T. 1993. *Kemajuan Penelitian Bahasa Indonesia di Amerika Serikat*. Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta.
- Cooper, Robert L. 1989. *Language Planning and Social Change*. New York: Cambridge University Press.
- Lengkanawati, Nenden Sri. 1977. *Kontribusi Strategi Belajar Bahasa terhadap Tingkat Kemahiran Berbahasa: Studi tentang Perbedaan antara Strategi Belajar Bahasa Pembelajar Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing dengan Strategi Belajar Bahasa Pembelajar Bahasa Inggris sebagai Bahasa Asing*. Disertasi PPS IKIP Bandung.
- Nothofer, Bernd. 1993. *Perkembangan Pengajaran Bahasa Indonesia di Jerman*. Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta, 1993.
- Sneddon, James. 1993. *Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia*. Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta, 1993.
- Young-rhim, Chung. 1993. *Keadaan Pengajaran Bahasa Indonesia di Korea*. Makalah pada Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta, 1993.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D6
Hari, Tanggal, Pukul	: Rabu, 28 Oktober 1998, 14.50--1540
Judul Makalah	: Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing
Penyaji	: A. Chaedar Alwasilah
Pemandu	: Sabarti Akhadiah M.K.
Pencatat	: a. Sri Sayekti b. Mohamad Fanani
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Suherli, Universitas Galuh, Ciamis, Jawa Barat

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah dalam pembelajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing (BIPA) kita harus lebih banyak mencermati sociolinguistik dan psikolinguistik sebagai dasar pengajaran yang harus kita kaitkan?
- 2) Teori pembelajaran apa yang dipakai BIPA?

b. Jawaban:

- 1) Apabila ada sekelompok pembelajar asing datang ke Indonesia, sebelumnya perlu diketahui dalam rangka apa mereka berada di Indonesia. Apabila yang datang ke Indonesia seorang dosen, yang perlu diberikan adalah bahan ajar bahasa Indonesia baku. Jadi, dilihat profesi yang berbeda dasar pengajaran disesuaikan.
- 2) Sampai saat ini belum banyak penelitian tentang materi pembelajar BIPA. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada teori yang dipakai dalam BIPA. Baru ada disertasi Ibu Nenden yang membicarakan hal itu. Menurut pengamatan, materi yang disenangi dalam BIPA adalah teknik bermain peran daripada tentang teknologi Indonesia. Tema bahan ajar yang disenangi adalah kehidupan variatif sehari-hari, seperti bagaimana menggunakan/memilih kosakata dalam berbelanja di pasar.

2. Penanya: Suhendar, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Bagaimana pendapat Bapak terhadap pernyataan orang asing yang belajar bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa belajar berbahasa Indonesia merasa mudah setelah belajar selama enam bulan, tetapi merasa sulit setelah belajar selama enam tahun.

b. Jawaban:

Perlu adanya kriteria dalam rangka apa mereka ke Indonesia sehingga pengajar dapat menyesuaikan pembelajar BIPA. Misalnya, apabila pembelajar BIPA akan lama tinggal di Indonesia, bahan ajarnya bahasa Indonesia baku. Seandainya pembelajar BIPA hanya sebentar berada di Indonesia, bahan ajarnya kita berikan bahasa Indonesia nonbaku. Jadi, bahan ajar tersebut kita sesuaikan dengan pembelajar BIPA. Apabila dibandingkan dengan negara Australia dalam memilih materi bahan ajar pembelajar BIPA, Indonesia masih ketinggalan. Para pengajar Australia lebih profesional dalam memilih bahan ajar.

3. Penanya: Suparno, IKIP Malang**a. Pertanyaan:**

Berdasarkan lemahnya penelitian BIPA ini, apakah IKIP Bandung sudah mengadakan penelitian tentang hal itu? Jika sudah, bagaimana hasilnya?

b. Jawaban:

Penelitian tentang BIPA di IKIP Bandung baru dilakukan Ibu Nenden. Penelitian ini berdasarkan pengajaran BIPA di Australia. Sebetulnya penelitian BIPA ini merupakan lahan yang sangat subur bagi mahasiswa S-2 dan S-3. Selain itu, sampai sekarang baru penelitian kecil-kecil yang berdasarkan analisis teoretis saja.

4. Penanya: Widodo, Balai Penelitian Bahasa, Yogyakarta**a. Pertanyaan:**

Bagaimana pendapat Bapak berkaitan dengan materi BIPA? Misalnya, pembelajar BIPA seorang pengusaha dengan mahasiswa/dosen, apakah materinya sama atau tidak?

b. Jawaban:

Materi bahan ajar sampai saat ini belum banyak. Jika dibandingkan dengan pengajar BIPA di Australia, kita kalah karena BIPA Australia lebih pintar atau lebih profesional dalam memilih materi daripada kita. Jadi, dalam memilih materi bahan ajar untuk pembelajar BIPA kita sesuaikan dengan profesi pembelajarnya atau disesuaikan dengan kebutuhan.

5. Penanya: Sondang Nauli, ABA Pertiwi**a. Pertanyaan:**

Pengajaran kemampuan berbicara dengan kemampuan gramatik atau kosakata adalah suatu teknik pengajaran. Teknik mana yang didahulukan agar pembelajar BIPA berkemampuan berbahasa Indonesia. Apakah kosakatanya terlebih dahulu atau strukturnya?

b. Jawaban:

Pengajaran BIPA di Australia yang paling sulit dilaksanakan adalah berbicara dan menulis. Cara mengajarnya yang baik adalah secara informal, bukan di dalam kelas. Bisa kita mulai dari kosakata atau tema. Dari tema ini bisa kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan pembelajar. Misalnya, pembelajar BIPA kita ajak ke lapangan, seperti ke tempat perbelanjaan, menyaksikan acara televisi, mendengarkan radio, atau mengunjungi penerbit. Di lapangan ini mereka kita ajak berkomunikasi. Akan tetapi, cara seperti ini mahal biayanya karena kita harus berkeliling.

6. Penanya: Suroso, IKIP Yogyakarta**a. Pertanyaan:**

Bagaimana mengembangkan pengajaran BIPA di luar kelas?

b. Jawaban:

Ternyata berdasarkan penelitian, pembelajar BIPA di Australia lebih senang pengajaran secara informal daripada formal. Pengajaran di kelas itu membosankan. Jadi, kita harus bisa mengembangkan model pengajaran BIPA tidak hanya ceramah, tetapi diajak mengenal situasi di lapangan. Kita belum profesional dalam pengajaran BIPA ini.

7. Penanya: Aep Saeful Bachrie, IKIP Bandung**a. Pertanyaan:**

Jika kita mau mengembangkan penelitian pengajaran BIPA, lahannya sangat luas. Sehubungan dengan itu, langkah-langkah apa saja yang akan dan telah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk mengembangkan materi bahasa Indonesia dan metodologi penggunaannya? Selain bermain peran, metode apa saja yang cocok untuk pengajaran BIPA?

b. Jawaban:

Sampai saat ini secara khusus materi pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing belum ada. Begitu pula metodenya, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menyelenggarakan seminar-seminar tentang BIPA ini. Yang kita perlukan saat ini sistematika perencanaan bahasa, yaitu pengadaan bahan ajar BIPA, bukan pelatihan guru-guru. Hal ini bisa bekerja sama dengan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

8. Penanya: Maryanto, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**a. Pertanyaan:**

Saya ingin mengacu pada perkataan pemakalah bahwa pengajaran bahasa Inggris sebagai bahasa asing dekade 1950-an dikomandoi oleh *British Council*. Apakah pengajaran BIPA ini perlu dikomandoi oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa? Kalau memang perlu, dalam hal apa saja yang perlu di-

komandoi oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa itu?

b. Jawaban:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tidak mengomandoi pengajaran BIPA, tetapi berperan dalam meningkatkan profesionalisme pengajaran BIPA.

9. Penanya: Mulyono, IKIP Surabaya

a. Pertanyaan:

Apakah pendekatan analisis kontrastif dapat dikembangkan sebagai acuan untuk pengajaran bahasa Indonesia untuk orang asing?

b. Jawaban:

Sampai sekarang kita belum profesional dalam mempersiapkan pengajar BIPA. Sebaiknya kita perlu membuka program BIPA di universitas. Sebagai contoh, di Amerika sudah ada program BIPA ini. Ini suatu bukti bahwa kita belum profesional dalam memilih metode, bahan ajar, dan psikologi lintas budaya.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PEMBELAJAR ASING DI BELANDA

H. Steinhauer

Universitas Leiden, Universitas Katolik Nijmegen

1. Pengantar¹

Tanggal 28 Oktober tahun 1998 adalah Hari Ulang Tahun ke-70 pengajaran bahasa Indonesia di Belanda. Begitu Sumpah Pemuda diikrarkan, sejarah pengajaran itu mulai. Tinggal perubahan nama bahasa saja karena yang diajarkan tetap disebut bahasa Melayu sampai dengan kemerdekaan. Perubahan nama itu baru terjadi setelah kemerdekaan.

Sebagaimana diketahui, apa yang disebut bahasa Melayu sudah menarik dan menyita perhatian orang Belanda sejak awal penjajahan. Pedagang dan penyebar agama Kristen Protestan menulis kajian mengenai bahasa tersebut, dan sumbangan mereka dalam hal penyebarannya tidak dapat diremehkan. Sukar dibayangkan nasib bahasa Indonesia sekarang ini khususnya di Indonesia bagian timur apabila tanpa landasan yang diletakkan berkat usaha dan upaya berbagai generasi pendeta dan guru SD.²

Paruh kedua abad yang lalu penjajahan oleh negara-negara Eropa di seluruh dunia meningkat dan lebih intensif. Belanda pun mengintensifkan penjajahannya. Akibatnya, hubungan antarpemjajah dan pemjajah menjadi lebih intensif juga, lebih langsung, dan lebih beragam. Tanpa tenaga dari Indonesia sendiri sudah menjadi mustahil bagi Belanda menjalankan pemerintahannya sehingga sejak pertengahan abad kesembilan belas itu pendidikan menjadi urusan pemerintah.

Tentunya, apa yang diajarkan itu sesuai dengan kebutuhan penguasa. Orde Penjajahan tidak mengizinkan rakyat mengetahui politik dan ulah penguasa itu. Pengajaran bahasa Belanda dan pengetahuan "modern" yang terjangkau melalui tulisan Belandanya, dikhawatirkan akan "meresahkan" masyarakat. Maka, dipilihlah sebagai bahasa pengantar di kebanyakan sekolah negeri bahasa yang dari dulu menjadi bahasa kontak utama antara orang Belanda dan penduduk Nusantara, yaitu bahasa Melayu. Putusan itu pula yang menyumbangkan sukses bahasa Indonesia di kemudian hari.

Karena pentingnya peranan bahasa Melayu dalam sistem penjajahan, maka pegawai dan tentara Belanda yang dikirim ke Indonesia wajib belajar bahasa itu. Sehubungan dengan politik bahasa dan perguruan itu, sejumlah kajian yang boleh dikatakan klasik diterbitkan sebelum perang dunia pertama: *De Hollander* (1845), *Gerth van Wijk* (1889), *Spat* (1900--1), *Tendeloo* (1901), dan *Van Ophuijsen* (1910).³ Politik bahasa itu juga menyebabkan bahasa Indonesia sampai hari ini pun diajarkan di Belanda pada tingkat universitas. Soalnya, universitaslah yang mendapat tugas untuk mendidik calon pegawai kolonial.

Ini bukan tempatnya untuk membicarakan sejarah pengajaran bahasa Melayu/Indonesia di negeri Belanda. Yang penting, pengajaran itu akhirnya terpusat di Leiden

pada tingkat universitas. Informasi ini harus saya tambahkan, karena jumlah kursus bahasa Indonesia dalam berbagai bentuk sangat besar di Belanda itu. Pada pokoknya itulah kesan saya: data statistik sepengetahuan saya belum ada. Maka, dalam makalah ini akan saya bahas secara singkat saja apa kiranya sifat dan tujuan kursus nongelar tersebut, untuk kemudian dengan lebih panjang-lebar membicarakan apa isi studi bahasa Indonesia pada Universitas Leiden itu.

2. Pembelajar

Jika dibandingkan dengan orang asing lainnya, orang Belanda yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai hubungan dengan pengajar bahasa dan merasa tertarik atau terikat dengan Indonesia itu cukup besar jumlahnya. Yang ingin belajar bahasa Indonesia di antara mereka dapat dipilah menjadi tujuh kategori.

Jumlah orang yang secara aktif berpartisipasi dalam penajajaran semakin menurun, tetapi keturunan mereka yang mungkin lahir di Indonesia tetapi besar di Belanda, atau yang hanya kenal Indonesia dari cerita orangtua atau nenek-nenek, tidak berkurang. Dan, dalam kalangan merekalah tersebar kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak tentang negara idaman itu. Salah satu jalan untuk menemukan kembali apa yang seakan-akan sudah menjadi bagian jati diri mereka, ialah belajar bahasa. Maka, sebagian dari peserta kursus bahasa Indonesia berasal dari golongan itu. Ini kategori pembelajar yang pertama.

Kategori kedua adalah generasi kedua atau ketiga, keturunan orang Indonesia asli atau peranakan yang sekitar tahun 1950 pindah ke Belanda. Motivasi mereka untuk belajar bahasa Indonesia sebenarnya tidak berbeda dengan motivasi kelompok yang pertama, mungkin bercampur dengan harapan dapat bergaul dengan sanak saudara yang masih tinggal di Indonesia.

Kategori yang ketiga adalah orang yang secara profesional berhubungan dengan Indonesia. Termasuk di antaranya diplomat yang diutus ke Indonesia, pegawai perusahaan Belanda yang ada cabangnya di Indonesia, orang Belanda yang ditempatkan di Indonesia dalam rangka proyek kerja sama pembangunan, dan sebagainya. Ada di antara mereka yang sungguh-sungguh mempersiapkan diri dengan belajar bahasa Indonesia. Tidak jarang mereka mengikuti kursus "akulturasi", artinya kursus yang bertujuan mengurangi kekagetan budaya (*culture shock*). Kursus pengantar mengenai bahasa biasanya menjadi bagian kursus akulturasi itu apabila waktunya cukup (biasanya orang yang dikirim ke Indonesia itu mempunyai masa persiapan yang cukup sempit).

Kategori pembelajar yang keempat adalah calon peneliti. Berbagai universitas di Belanda mempunyai jurusan yang menyajikan kuliah dan mengadakan penelitian tentang alam dan insan Nusantara karena sudah menjadi tradisi universitas, atau karena memang dibebani tugas demikian oleh pemerintah. Dapat disebutkan jurusan antropologi, sejarah, ilmu purbakala, pertanian, kehutanan, biologi, geologi, ilmu sosial, politikologi, dan hukum (daftar ini barangkali tidak lengkap). Jika (calon) peneliti tersebut memang akan mengadakan penelitiannya di tempat, artinya di Indonesia, atau jika mereka menggunakan sumber yang berbahasa Indonesia, mereka itu

diharapkan lebih dahulu mempelajari bahasanya dengan cukup.

Kategori pembelajar yang kelima adalah wisatawan yang terpesona oleh citra Indonesia serta penduduknya, seperti yang dipropagandakan oleh biro perjalanan "alam yang indah", "iklim yang menakjubkan", "harga yang merakyat" (paling sedikit untuk rakyat yang bervaluta asing), "kebudayaan yang tinggi dan beragam", "*rijsttafel*", "jiwa seniman", "pantai yang putih", dan "bangsa yang paling lembut di dunia". Warta berita mengenai Indonesia tahun terakhir ini agaknya menebalkan nuansa citra itu, tetapi dapat diduga bahwa gejala itu hanya bersifat sementara. Peristiwa Malari, Tanjung Priok, Lampung, Aceh, dan Dili pun tidak berdampak tetap atas perkembangan kepariwisataan itu. Pokoknya, selalu saja ada wisatawan yang ingin belajar bahasa Indonesia, biarpun sedikit. Maka, mereka menjadi peserta kursus kelompok dan kursus perorangan yang diadakan di banyak tempat. Begitu pula yang terjadi pada mantan wisatawan yang dihinggapi kerinduan ingin kembali ke Indonesia.

Siaran televisi di Belanda tentang Indonesia tidak terbatas pada warta berita mengenai kebengisan orang, kerusuhan politik, dan kebakaran hutan dan pertokoan saja; ditayangkan juga film dokumenter mengenai mengha-rubirukannya nasib orang utan, upacara tradisional, membakar sate, dan seni masak makanan Indonesia lainnya, dsb. Itu pulalah yang mengembangkan perhatian positif terhadap Indonesia, yang kemudian dapat disusul dengan keinginan mengetahui lebih banyak tentang negara itu, seperti melalui kursus bahasa Indonesia. Cukup banyak orang pensiunan dan ibu rumah tangga yang tidak mau berleha-leha di rumah sepanjang hari, karena anaknya sudah dewasa atau tinggal mandiri. Mereka mengikuti kursus bahasa Indonesia yang diadakan di *Volksuniversiteit*, universitas rakyat, yaitu lembaga pengurus kursus nongelar yang tujuan utamanya ialah membuka cakrawala wawasan pesertanya. Inilah kategori yang keenam.

Kategori ketujuh, akhirnya, merupakan kelompok orang yang bermotivasi untuk mengenali nusa dan bangsa Indonesia itu sedemikian kuatnya sehingga mereka tidak puas dengan kursus bahasa selama sebulan ataupun setahun, melainkan rela mengorbankan empat lima tahun kehidupan mereka untuk studi bahasa Indonesia di Universitas Leiden.

3. Kursus untuk Pembelajar Nonakademis

Sebelum menguraikan wujud dan tujuan studi bahasa Indonesia untuk pembelajar asing dengan agak lebih mendalam, akan saya sampaikan terlebih dahulu sepatah dua kata mengenai kursus-kursus bahasa Indonesia yang nonakademis itu. Sebagian besar guru dan dosen dari kursus-kursus tersebut adalah tamatan Universitas Leiden itu. Bahan kuliah yang mereka peroleh selama studi mereka, mereka sesuaikan, dan mereka pakai kembali. Ada juga kursus dan bahan baru yang mereka kembangkan.

Lembaga terpenting yang mengadakan kursus akulturasi adalah Lembaga Diraja untuk Wilayah Tropis (*Koninklijk Instituut voor de Tropen*, KIT) di Amsterdam, dan InterConsultancy Bureau (ICB) di Leiden yang menjadi bagian dari Universitas Leiden. Khususnya biro dari Universitas Leiden ini menyelenggarakan kursus sesuai dengan kebutuhan pelanggannya, baik perusahaan maupun perorangan. Buku pelajaran

bahasa Indonesia yang digunakan oleh ICB adalah buku pelajaran yang dikembangkan sendiri.

Di Leiden juga terdapat *Instituut voor Indonesische Cursussen* (Lembaga untuk Kursus-kursus bahasa Indonesia, IIC) yang mengadakan kursus tidak hanya di Leiden, tetapi juga di berbagai tempat lainnya di Belanda untuk peserta dari kategori nonprofesional. IIC ini juga mempunyai toko buku, khusus untuk buku mengenai Indonesia serta buku dalam bahasa Indonesia. Selain itu, IIC telah mengembangkan bahan pelajaran, a.l. buku pelajaran bahasa Indonesia dalam dua jilid, yang juga dijual di Indonesia: *Selamat Datang* (Jung et al. 1988, 1989). Sesuai dengan kebutuhan dan latar belakang peserta kursus mereka, buku itu menitikberatkan materinya pada situasi sehari-hari. Maka, bahasa yang diajarkan adalah bahasa Indonesia baku yang sangat dipengaruhi oleh unsur bahasa percakapan. Pembicaraan tentang tata bahasa pun tidak rinci, dan hanya menyangkut yang dasar-dasar.

Sudah saya sebutkan sebelumnya tentang adanya lembaga *Volksuniversiteit*. Di berbagai tempat lembaga itu menawarkan kursus bahasa Indonesia juga, dan tidak jarang buku *Selamat Datang* dari IIC yang dipakai sebagai bahan pelajaran utama.

Lagi-lagi di Leiden--tetapi ini hanya kebetulan--terdapat kantor pusat dari organisasi pengurusan kursus jarak jauh: *Leidse Onderwijs Instellingen* (Institut Pendidikan Kotamadya Leiden, LOI). Salah satu kursus bahasa yang ditawarkan adalah kursus bahasa Indonesia yang dikembangkan oleh tim dari institut ini yang meliputi seorang tamatan jurusan Sastra Belanda di UI dan Jack Prentice, almarhum dosen dari jurusan bahasa Indonesia di Universitas Leiden, dan saya sebagai penasihat. Bahan kursus dapat dikatakan cukup banyak (sekitar 250 halaman), pembahasan tata bahasanya lumayan mendalam, dan bahasa yang diajarkan adalah bahasa baku, diwarnai di sana sini dengan unsur kejakartaan.

Kursus jarak jauh yang paling menonjol adalah kursus bahasa Indonesia yang ditayangkan di televisi nasional. Unsur yang menonjol dalam kursus itu ialah upaya menyeimbangkan informasi mengenai kebudayaan, cara hidup, dsb., dan informasi kebahasaan. Kursus itu pun disusun oleh sejumlah tamatan jurusan bahasa Indonesia di Universitas Leiden, dalam kerja sama dengan tamatan sastra Belanda di FSUI. Pertama kali kursus itu ditayangkan lima tahun yang lalu. Dan, atas permintaan orang banyak, baru-baru ini kursus itu disiarkan kembali untuk ketiga kalinya. Kursus tersebut, tentunya, dilengkapi juga dengan buku pegangannya.

Semua kursus yang saya sebutkan di atas merupakan kursus untuk orang dewasa. Ternyata ada juga kursus untuk murid SD. Dalam rangka program "pengajaran budaya sendiri" dikembangkan juga bahan pengajaran bahasa asing untuk sekolah dasar yang jumlah "murid asingnya" cukup besar. Program itu dimaksudkan untuk murid yang berasal dari luar Eropa Barat, khususnya dari Turki, Maroko, dan Maluku. Orang Turki dan Maroko didatangkan sebagai "buruh tamu" pada tahun 1960-an karena perkembangan industri pada zaman praotomatisasi itu membutuhkan lebih banyak tenaga kerja kasar daripada yang tersedia. Dan, sebagaimana diketahui, orang Maluku di Belanda itu adalah keturunan prajurit dari tentara KNIL yang dibawa (atau terbawa) ke Belanda pada tahun 1950. Masyarakat Maluku itu tidak melebihi 45.000 orang

sekarang. Namun, mereka sering masih tinggal terkonsentrasi di sejumlah kota dan desa sehingga terdapat sekolah yang mempunyai kebijaksanaan untuk mengadakan "pengajaran budaya sendiri", mengingat jumlah muridnya yang dari kalangan Maluku itu cukup besar. Pengajaran seperti itu mungkin sedikit mirip dengan "muatan lokal" di Indonesia. Bahan pengajaran yang dikembangkan, di SPG di kota Assen dan di Badan Musyawarah Orang Maluku di Utrecht, didasarkan atas cerita rakyat dari Maluku yang disesuaikan untuk anak-anak. Namun, bahasanya tidak menentu: ada unsur bahasa Indonesia yang baku, ada yang lebih mirip bahasa Melayu klasik, dan ada unsur bahasa Melayu Ambon juga. Saya sebenarnya merasa ragu-ragu untuk dapat mengatakan bahwa pengajaran bahasa dengan bahan seperti itu tergolong pengajaran bahasa Indonesia.

Setahu saya ada sekelompok kecil anak-anak SD di kota Den Helder, yang mendapat pengajaran bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan bahan yang khusus dikembangkan oleh guru mereka, yaitu seorang mahasiswa jurusan bahasa Indonesia di Universitas Leiden.

4. Bahasa Indonesia itu Apa?

Dalam uraian di atas sudah tersirat bahwa pengajar bahasa Indonesia di Belanda juga tidak luput dari masalah yang menantang setiap pengajar bahasa Indonesia untuk pembelajar asing. Masalahnya; apa saja yang termasuk bahasa Indonesia? Setiap penyusun kursus bahasa Indonesia dihadapkan pada sejumlah pilihan. Beberapa di antaranya bersifat umum. Yang lain khas untuk bahasa Indonesia.

Sebagaimana pernah dirumuskan oleh C.D. Grijns dalam judul makalahnya untuk *European Colloquium on Indonesian and Malay Studies* yang kelima (Sintra 1984), masalahnya ialah "Does Indonesian exist?" Jawabannya tidak sederhana. Pertanyaan yang sejenis memang dapat diajukan untuk banyak bahasa. Adakah bahasa Inggris? Bukankah ada majalah dan buku-buku mengenai "the Englishes of the world"? Adakah bahasa Melayu? Istilah "bahasa Melayu" dipakai untuk bahasa dari semua naskah Melayu klasik, untuk bahasa Malaysia sebelum Malaysia menjadi merdeka dan sesudah itu sejak beberapa tahun ini lagi, dan untuk bahasa Indonesia sebelum Sumpah Pemuda. Belum lagi berbagai varietas bahasa daerah yang sekarang dapat disebut/dianggap dialek bahasa Indonesia, yaitu bahasa Melayu Larantuka, bahasa Melayu Manado, dan sebagainya. Dalam sensus tahun 1990 penutur bahasa Melayu Manado dihitung sebagai penutur bahasa Indonesia, misalnya.

Sebagian masalah dari semua ini tentunya bersifat peristilahan. Soalnya, istilah bahasa itu lazim dipakai untuk tiga gejala yang berbeda. Pertama, kata *bahasa* itu dapat merujuk kepada *sistem komunikasi kebahasaan* yang berlaku dalam masyarakat tertentu. Tersurat dalam definisi itu ialah bahwa masyarakat itu dapat ditentukan anggotanya, terlepas dari sistem komunikasi kebahasaan mereka. Biasanya definisinya bersifat geografis, seperti di wilayah X bahasa A yang dipakai, di wilayah sekelilingnya bahasa B. Tentunya, masyarakat yang sehomogen itu dalam era urbanisasi dan globalisasi ini semakin jarang ditemukan, atau semakin terancam. Makin kompleks masyarakat setempat, makin banyak variasi dalam sistem komunikasi kebahasaan yang

dapat dinantikan. Dan, belum tentu semua variasi itu dikuasai secara aktif atau pun pasif oleh semua anggota masyarakat tersebut. Bagaimana relasi antara sistem bahasa, variasinya, dan masyarakat dalam wilayah tertentu, khususnya wilayah kota, adalah tugas sosiolinguistik untuk menentukannya.

Di bawah ini, bahasa dalam arti sistem komunikasi kebahasaan itu akan saya sebutkan sebagai *bahasa I*. Bahasa Melayu kota Manado, bahasa Minangkabau seperti dituturkan di Bukittinggi, bahasa Banjar kota Banjarmasin, dan sebagainya, merupakan bahasa dalam batasan arti yang saya berikan ini.

Istilah *bahasa* dalam arti yang kedua dipakai untuk *sekelompok bahasa I yang masing-masing mempunyai tingkat kesamaan tertentu dengan anggota-anggota lainnya dari kelompok itu*. Selanjutnya, bahasa dalam arti itu akan saya sebutkan sebagai *bahasa II*. Masing-masing *bahasa I* yang menjadi anggota *bahasa II* itu lazimnya disebut "dialek bahasa II".⁴ Sistem-sistem komunikasi kebahasaan setempat, seperti yang digunakan, misalnya, di Padang, Tapan, dan Rao di provinsi Sumatra Barat, semuanya, masing-masing merupakan *bahasa I*, tetapi sekaligus menjadi anggota kelompok sistem komunikasi yang disebut bahasa Minang. Dalam peristilahan ini "bahasa Minang" bukanlah berarti sistem komunikasi, melainkan kelompok sistem komunikasi dengan bahasa-bahasa anggotanya sebagai dialeknya.

Istilah *bahasa* dalam arti ketiga digunakan untuk setiap dialek (dalam arti tadi) yang telah memperoleh gengsi tertentu (apa pun sebabnya) sehingga dianggap layak ditiru dalam suasana resmi oleh penutur sejumlah atau semua dialek yang serumpun. *Bahasa I* yang berstatus khusus ini selanjutnya disebutkan *bahasa III*. Dengan demikian, dialek yang serumpun itu menjadi "dialek bahasa III".⁵ "Bahasa Minang" dalam peristilahan ini adalah bahasa III: dialek dari "bahasa Minang" (dalam arti bahasa II).

Bahasa Melayu Manado (*bahasa I*) sebelum Sumpah Pemuda dapat digolongkan sebagai dialek varietas bahasa Melayu Klasik yang menjadi anutan baik untuk masyarakat Malaysia maupun Indonesia, katakanlah bahasa *Sejarah Melayu*, padahal sekarang bahasa Melayu Manado itu menjadi dialek bahasa Indonesia saja. Asal tingkat kesamaannya dinilai cukup tinggi. Jika tidak, bahasa Melayu Manado itu harus kita anggap berdiri sendiri, atau termasuk bahasa II yang berbeda.

Bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa dalam arti ketiga, dan dengan demikian dalam arti pertama. Jika orang Manado dalam cacah penduduk dilaporkan mengaku berbahasa Indonesia sehari-hari, itu perlu diragukan: pencacah mungkin mengartikan "bahasa Indonesia" sebagai bahasa dalam arti kedua. Akan tetapi, jika bahasa Indonesia adalah bahasa dalam arti pertama, siapa saja yang termasuk masyarakat bahasanya? Tidak ada *masyarakat* yang dapat diidentifikasi berdasarkan ciri tertentu, selain kenyataan bahwa anggotanya berbahasa Indonesia. Saya tidak tahu jawabannya. Yang kurang lebih dapat saya lakukan adalah membedakan apa yang dimaksudkan oleh penuturnya sebagai bahasa Indonesia yang baku dan apa yang bukan.

Secara luas tersebar pendapat bahwa bahasa Indonesia yang baku adalah bahasa buatan yang kosakatanya terbatas dan yang tidak mampu mengungkapkan emosi dan perasaan. Tuduhan semacam itu biasanya dilontarkan oleh orang yang tidak mengenal bahasa Indonesia sama sekali.

Ada suatu tanggapan yang, antara lain, datang dari orang yang pernah menjadi pembelajar bahasa Indonesia yang baku, yaitu bahwa bahasa itu sebenarnya tidak pernah dipakai karena bahasa Indonesia "yang sebenarnya" berbeda sekali dengan bahasa yang dipakai sekarang. Mereka merasa tertipu: yang disangka bekal pengetahuan, ternyata malah beban yang tidak berguna. Tanggapan seperti itu biasanya terdengar dari orang yang memang sempat bergaul dengan orang Indonesia, tetapi hanya dengan tukang becak di jalan, pelayan di hotel, dan penjual arloji di pantai Kuta.

Namun, bagi pembelajar yang pergaulannya lebih luas dan pengamatannya lebih cermat, kesan mengenai bahasa Indonesia yang baku ternyata juga belum tentu lebih positif. Masalahnya, pemakaian bahasa Indonesia yang "seolah-olah" baku karena digunakan dalam pidato-pidato resmi, seperti yang menonjol dalam orde Soeharto, rata-rata kurang menyumbang citra bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi yang lincah dan indah. Pidato-pidato pejabat cenderung bersifat latah: begitu muncul semboyan atau mantra yang ternyata dibenarkan oleh eselon tertinggi, semua tukang pidato langsung melompat berdiri dan mulai membeo. Pidato-pidato itu biasanya hampa isi: kalau tidak ada isi, tidak ada kesalahan juga. Contoh yang khas adalah kutipan dari majalah bulanan *Pancasila Abadi* (bulan Oktober tahun 1993, halaman 7) yang dibagikan kepada peserta upacara peringatan Sumpah Pemuda pada Hari Sumpah Pemuda di tahun itu,

"Status KNPI sebagai wadah berhimpun merupakan wadah penampungan dan penyaluran kader-kader bangsa melalui dunia kepemudaan yang telah siap melepaskan ikatan-ikatan formalnya dengan kelompok kesukuan, keagamaan dan fanatisme kedaerahan untuk selanjutnya bermodalkan kepercayaan OKP-nya melepas dan menugaskan di KNPI dengan wawasan berpikir dan bertindak untuk kepentingan bangsa dan masyarakat dan bukan lagi kepada kubu atau basis sebagai tempat dia dikaderkan, di mana nantinya dengan unsur-unsur di atasnya merupakan ciri penonjolan kemampuan dan keahliannya di dalam bertugas di KNPI tersebut. "

Saya kira ada seninya juga, tetapi kritik--bahwa bahasa Indonesia yang baku bukanlah alat komunikasi yang memadai--dapat dimengerti: dipakai terlalu sering secara tidak komunikatif.

Pendek kata, suara-suara sumbang dari masyarakat tentang bahasa Indonesia tidak menguntungkan pengajaran bahasa Indonesia yang baku. Itulah sebabnya, berbagai kursus bahasa Indonesia yang tadi saya bicarakan banyak mencantumkan unsur nonbaku/percakapan/sehari-hari atau apa pun capnya, di samping atau alih-alih bahasa Indonesia yang baku. Sepengetahuan saya, memang belum ada kursus yang mengajarkan bahasa Indonesia yang semata-mata nonbaku. Unsur nonbaku tersebar luas, tetapi bahasa percakapan berbeda di mana-mana, dan betapa pun sukarnya menentukan masyarakat bahasa Indonesia baku, jelaslah bahwa masyarakat varietas-varietas nonbaku itu tidak akan sama. Dengan perkataan lain, jika bahasa percakapan menjadi sasaran pengajaran, harus dipilih salah satu bentuknya: varietas Sabangkah, varietas Meraukekah, atau yang lain lagi.

Di Universitas Leiden, tempat diselenggarakan pengajaran bahasa Indonesia bagi pembelajar profesional diputuskan menentang desakan dari masyarakat seperti yang tadi saya ungkapkan: yang diajarkan adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5. Program Studi Bahasa Indonesia di Universitas Leiden

Jurusan tempat saya bekerja pada Universitas Leiden biasa disebut *Opleiding Indonisch* (dahulu *Vakgroep Indonisch*, jurusan bahasa Indonesia), nama resminya adalah *Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost-Azië en Oceanië* (Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Asia Tenggara dan Oseania). Walaupun begitu, program studi yang disajikan terfokus kepada Indonesia. Bahasa Indonesia, dengan demikian, menjadi mata pelajaran yang sangat penting. Akan tetapi, bahasa Indonesia ini bukan satu-satunya yang menjadi perhatian mahasiswa: dari dulu bahasa Jawa dianggap sebagai bahasa yang hampir tidak kurang pentingnya daripada bahasa Indonesia itu sendiri—karena jumlah penuturnya, sejarah tertulisnya, serta kesusastraannya yang mencakup se-kurang-kurangnya 10 abad.

Tiga dasawarsa yang lalu kebanyakan studi di universitas masih bersifat akademis murni: mahasiswa pun kurang mengharapkan karier di perusahaan atau *business*. Inti studi di jurusan kami adalah bahasa dan sastra, dengan ilmu bahasa dan ilmu sastra sebagai penunjang. Lama studinya, seingat saya, enam tujuh tahun. Jumlah mahasiswa pada waktu itu relatif sedikit. Akan tetapi, sejak itu jiwa zaman berubah. Universitas dianggap menara gading yang terbuka untuk kalangan elite saja, sedangkan ilmu dan pengetahuan semestinya terjangkau untuk setiap orang yang mampu menyelesaikan sekolah menengah. Ilmu pun sering dianggap terlalu esoteris, tanpa guna yang nyata untuk masyarakat yang lebih luas. Itulah sebabnya timbul studi yang lebih praktis: di jurusan kami diciptakan studi Indonesiologi (*Indonesiëkunde*), yang memadukan studi bahasa dengan kuliah mengenai sejarah, kebudayaan, ekonomi, dsb., semuanya mengenai Indonesia.

Sementara itu, jumlah mahasiswa meningkat di mana-mana dengan pesat, terutama berkat sistem tersedianya beasiswa secara umum. Namun, dengan sistem itu ongkos yang dikeluarkan pemerintah menjadi terlalu tinggi sehingga lama studi akhirnya dibatasi sampai empat tahun. Demikianlah keadaannya sekarang. Di samping itu, diadakan berbagai reorganisasi yang menyebabkan bahwa jurusan kami diperluas/diperkuat dengan pakar sejarah dan kebudayaan Nusantara. Perkembangan itu, tentu saja, juga ada dampaknya pada mata kuliah yang diberikan. Perkembangan itu pun kebetulan sejalan dengan anggapan yang meluas pada waktu itu, yaitu bahwa masyarakat tidak membutuhkan pakar-pakar dengan pengetahuan yang mendalam dalam bidang ilmu X atau Y, melainkan orang yang mempunyai pengetahuan luas mengenai wilayah geografis Z. Itulah sebabnya timbul program studi "Indonesiologi".

Akhirnya, ada pengaruh mode yang lain lagi. Dari dulu profesi profesor paling terhormat di mata orang banyak, sekarang citranya telah memudar. Sang Manajer menggantikannya sebagai "pahlawan zaman" kita, menantu idaman, dan idola setiap pemuda. Dengan demikian, diharapkan universitas menjadi lembaga yang menetaskan jenis insan idaman seperti itu, dan harapan itu terwujud dalam pemrograman studi

kami.

Akibat semua itu, program studi di jurusan kami sekarang ada tiga. Dua di antaranya mencakup Indonesiologi, masing-masing dengan dan tanpa spesialisasi manajemen, sedangkan yang ketiga, "program bahasa-bahasa dan kebudayaan Indonesia", merupakan versi kontemporer dari studi yang lebih bersifat akademis. Dalam tabel berikut dapat diamati mata kuliah yang disajikan dalam ketiga program tersebut.

Program Umum (tahun 1):

<i>Bahasa Indonesia:</i>	Tata Bahasa	12 SKS
	Membaca	4 SKS
	Mendengarkan/Berbicara	2 SKS
	Sejarah dan Fungsi	1 SKS
	Pengantar Sastra	1 SKS
Tata Bahasa Jawa:	Pengantar Tata Bahasa	6 SKS
	Sejarah Sastra	3 SKS
Sejarah Indonesia 1945-1998		3 SKS
Ilmu bahasa umum dan perbandingan		3 SKS
Pengantar linguistik Austronesia		3 SKS
Pengantar studi kebudayaan Indonesia		3 SKS

Program Indonesiologi (tahun 2--4) Nonmanajemen		Manajemen	
<i>Bahasa Indonesia:</i>	Membaca	9 SKS	9 SKS
	Mendengarkan/ Berbicara	3 SKS	6 SKS
	Linguistik	6 SKS	6 SKS
	Menerjemahkan	5 SKS	5 SKS
Semiotik Bahasa Indonesia		6 SKS	6 SKS
Bahasa Melayu Klasik		2 SKS	2 SKS
Sejarah Indonesia		18 SKS	18 SKS
Sejarah Asia Tenggara		3 SKS	3 SKS
Hukum dan Pemerintahan Indonesia		6 SKS	6 atau 12 SKS
Studi Kebudayaan Indonesia		5 SKS	15 atau 9 SKS
Skripsi		12 SKS	12 SKS
Pilihan		42 SKS	

Manajemen:	Keuangan, Sumber Daya Manusia, Pemasaran, dan lain-lain	22 SKS
Ekonomi		3 SKS
Diagnosis Perusahaan		4 SKS
Magang		10 SKS

Program Bahasa dan Kebudayaan Indonesia (tahun 2--4)

<i>Bahasa Indonesia:</i>	Membaca	5 SKS
	Mendengarkan/Berbicara	3 SKS
	Linguistik	6 SKS

	Menerjemahkan	3 SKS
Bahasa Melayu Klasik		2 SKS
Bahasa Jawa:	Membaca	12 SKS
	Aksara Jawa	3 SKS
	Mendengarkan/Berbicara	2 SKS
	Ilmu Bahasa	3 SKS
Bahasa Jawa Kuno		3 SKS
Kebudayaan Jawa		6 SKS
Sejarah Indonesia		3 SKS
Studi Kebudayaan Indonesia		9 SKS
Ilmu Sastra: Umum dan Terapan (Sastra Indonesia)		6 SKS
Skripsi		12 SKS
Pilihan		51 SKS

Yang diharapkan dari mahasiswa setelah penyelesaian program studi yang wajib adalah

- memiliki kemampuan memahami dengan baik teks, ceramah, dan pembicaraan dalam bahasa Indonesia mengenai bidang studi yang dipelajarinya;
- memiliki kemampuan mengadakan ceramah, melakukan pembicaraan, dan menulis uraian atau skripsi dalam bahasa Indonesia yang baik, cukup lancar, dan cukup bervariasi, tanpa kesalahan gramatikal atau leksikal yang berarti.

Dalam waktu yang terbatas, dan dengan program yang padat dan beragam, harapan itu tidak selalu dapat diwujudkan. Oleh karena itu, sangat dianjurkan supaya mahasiswa mengikuti penataran bahasa Indonesia yang diadakan khusus untuk mereka di salah satu lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Biasanya kursus itu berlangsung selama 7 minggu: 4 minggu dalam kelas, 2 minggu untuk latihan penelitian/penulisan skripsi kecil, dan 1 minggu untuk melokakaryakan hasilnya.

Perlu saya tambahkan bahwa mahasiswa dari berbagai jurusan lain sering memilih bahasa Indonesia sebagai mata kuliah pilihan mereka. Untuk mahasiswa itu, jurusan kami mengadakan kursus khusus senilai 8 SKS dan selama dua semester. Jumlah pesertanya yang datang dari semua universitas di Belanda rata-rata 40--50 orang pada awal semester pertama, dan sekitar 20 orang pada akhir semester kedua.

Jumlah mahasiswa penuh yang masuk dalam jurusan kami tiap tahun bervariasi antara 15 dan 25 orang. Seperti halnya juga dalam berbagai studi lainnya di Fakultas Sastra, pada umumnya hampir separuh dari mereka ternyata tidak berhasil menyelesaikan studinya.

Staf pengajar untuk bahasa dan sastra Indonesia/Melayu di Universitas Leiden terdiri atas 5 tenaga tetap: 1 guru besar bahasa dan sastra Indonesia dan Melayu; 1 dosen untuk bidang linguistik dan untuk varietas bahasa Melayu, khususnya di Indonesia bagian timur; 3 dosen untuk pemerolehan bahasa. Di antara yang terakhir itu selalu ada 1 penutur asli bahasa Indonesia yang "masih segar". Penutur asli ini adalah dosen tamu dari Indonesia yang mengajar di tempat kami selama lebih-kurang 3 tahun. Kecuali dosen tamu itu, semua anggota stafnya adalah lulusan Studi Bahasa Indonesia

di Universitas Leiden.

6. Bahan Pelajaran

Seperti diuraikan di atas, fungsi bahasa Indonesia yang baku, yaitu alat komunikasi (atau nonkomunikasi) dalam suasana resmi, telah menimbulkan sikap pembelajar dan pengajar yang agaknya kurang kondusif. Banyaknya ragam bahasa Melayu (bahasa Melayu pasar, bahasa-bahasa Melayu setempat, bahasa Melayu klasik, yang semuanya bervariasi sendiri-sendiri) dari dulu menimbulkan kesan bahwa kaidah tata bahasanya mubazir: apa saja boleh. Kesan itu juga ada terhadap bahasa Indonesia. Hal itu diperkuat lagi oleh kecenderungan orang Indonesia untuk mengagumi setiap usaha orang asing mengungkapkan sesuatu dalam bahasa Indonesia, betapa pun miringnya. Pendek kata, bahasa Indonesia seolah-olah gampang diremehkan. Dan, hal itu tercermin dalam buku pelajaran yang tersedia. Pengamatan "bisa juga" terlalu sering mengganti analisis semantis yang lebih mendalam. Namun, untuk studi bahasa pada tingkat universitas, ancangan seharusnya berpijak benar-benar pada prinsip bahwa *setiap pilihan dalam bahasa selalu beralasan*. Tata bahasa tidak mungkin mempunyai kaidah "hantam saja, asal jadi".

Ketika berhadapan dengan kenyataan kurang memadainya bahan pelajaran yang tersedia, almarhum Jack Prentice, saya, dan beberapa rekan sejurusan memutuskan menyusun buku pelajaran bahasa Indonesia yang baru. Secara bergiliran, Pak Prentice dan saya menulis satu bab, yang kemudian dibicarakan bersama dengan rekan-rekan tersebut. Awal kerja sama kami dimulai pada akhir tahun 1987. Akan tetapi, sesudah tiga bab, saya ditugaskan ke Jakarta untuk bekerja di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena proyek ILDEP II dimulai, dan buku pelajaran itu untuk sementara menjadi kenangan saja. Baru setelah beberapa tahun bekerja di bawah bimbingan Pak Anton M. Moeliono, saya mengambil keputusan untuk meneruskan penulisan secara mandiri. Waktu saya kembali ke Belanda, tahun 1994, enam belas bab dalam versi kedua telah selesai. Sebagian kritik dan masukan dari Leiden pada enam belas bab ini sudah sempat saya olah, dan dalam bab-bab yang ada saya gunakan latihan yang disusun oleh asisten mahasiswa di Leiden itu. Setelah sejumlah versi yang menyusuli versi kedua itu siap, buku pelajaran akhirnya berhasil diselesaikan dua minggu yang lalu. Susunannya sekarang sebagai berikut: bab pengantar, dua puluh bab pelajaran, dan lima lampiran. Lampiran itu masing-masing merupakan garis besar tata bahasa, catatan mengenai variasi bahasa (gaya subbaku dan nonbaku, bahasa pejabat, interferensi bahasa daerah, dan sebagainya), daftar kata bahasa Indonesia-bahasa Belanda dan sebaliknya, dan indeks.

Selain bab pengantar dan bab pertama (pelafalan dan struktur fonem), setiap bab terdiri atas kosakata baru, yang disusun berdasarkan kelas katanya, pembicaraan unsur-unsur tata bahasa yang diselingi latihan-latihan, dan akhirnya sepotong teks bacaan. Dalam bab-bab awal jumlah kata baru tidak melebihi tujuh puluh kata per bab. Jumlah itu ditingkatkan kemudian, berkat kemungkinan menerapkan proses pembentukan kata pada dasar kata yang sudah diketahui. Saya juga memasukkan kata serapan dari bahasa Belanda serta kata internasional dengan jumlah yang mungkin

agak kurang proporsional jika dibandingkan dengan daftar frekuensi kata. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan bahwa kata itu gampang dihafal, sehingga memudahkan pemerolehan perbendaharaan kata yang agak luas, yang pada gilirannya dapat merangsang semangat pembelajar.

Perlu saya tekankan bahwa buku pelajaran itu ditulis dalam bahasa Belanda, dan ditujukan kepada mahasiswa yang pada umumnya berbahasa Belanda. Kosakata yang asli Nusantara bagi mereka benar-benar asing, dan, saya rasa, tidak ada kegiatan dalam belajar bahasa asing yang lebih membosankan daripada pemerolehan kosakata hanya dengan menghafalnya.

Namun, karena kursus ditulis untuk orang dewasa, ancangan disesuaikan dengan kesadaran dan kemampuan orang dewasa dalam belajar bahasa asing yang baru: tanpa usaha secara sadar untuk menghafal kata dan pola pembentukan kata, ia tidak akan berhasil. Untuk kebutuhan pembelajaran ini, morfologi, makna, dan fungsi kata tugas dibahas secara mendalam. Sedapat mungkin disajikan contoh pemakaiannya dalam bentuk kalimat. Sedapat mungkin pula, saya berusaha agar kalimat itu tidak terlalu membosankan dan tidak juga membangkitkan kantuk alih-alih pikiran.

Jika dibandingkan dengan pembicaraan morfologi dan kata tugas itu, pola sintaktis hanya disinggung secara sepintas. Masalahnya, seorang pembelajar dengan mudah akan mengenali kata dengan afiks tertentu daripada bagian kalimat yang tidak bermarkah. Untuk merumuskan kaidah sintaksis, harus diciptakan istilah untuk subkelas, sub-subkelas kata, dan kategori gabungan kata, sedangkan ciri pembedanya sering hanya sintaktis. Jadi, menjelaskan kaidahnya sukar, menghafal dan menerapkannya lebih sukar lagi. Pola urutan kata dalam kalimat hanya dapat dikuasai dengan mendengar dan membaca bahasa Indonesia secara teratur. Oleh karena itu, disajikan kaset yang melengkapi buku dan setiap bab diakhiri teks bacaan.

Sering kita lihat teks-teks bacaan dalam buku-buku pelajaran bahasa tidak berkesinambungan. Kalaupun berkesinambungan, isinya jarang mengundang rasa untuk membaca terus. Karena kosakata terbatas, isi teks bacaan terbatas pula, sampai-sampai dengan keterbatasan ini orang dewasa dihadapkan dengan kalimat dan situasi yang lebih tepat dalam buku SD atau taman kanak-kanak. "Robert dan Maria kakak adik. Mereka pergi berlibur ke Indonesia. Di sana mereka dijemput oleh Bambang, teman mereka. Mereka sangat gembira bertemu kembali. Kemudian, mereka diantar ke rumah orang tua Bambang. Ayah Bambang bekerja di bank. Ibunya bekerja di dapur. Neneknya, yang juga tinggal di situ, masih tahu berbahasa Belanda", dan seterusnya.

Teks bacaan, selain memberi ilustrasi gejala gramatikal yang telah dibahas, sebaiknya juga mampu merangsang mahasiswa untuk membaca cerita sambungan dalam teks bacaan berikutnya. Cerita detektif yang disajikan sebagai cerita bersambung dalam buku pelajaran kami harapkan memenuhi fungsi itu. Berbagai situasi yang digambarkan di dalam teks-teks bacaan itu boleh dikatakan seram dan/atau khas untuk orde Soeharto. Akan tetapi, akhir cerita lebih romantis: kedua tokoh utama menyatakan cinta mereka dalam suasana seperti yang biasa digambarkan oleh biro perjalanan. "Sambil dipenuhi dengan bunga-bunga emosi asmara, mereka berdua mendengarkan alunan merdu gamelan, sedangkan tiupan angin sepoi membawa harumnya

bunga tropis dari kebun yang indah di dalam kota yang bersih dan mempesona"

7. Kekurangan dan Harapan

Sebagaimana dikatakan di atas, pola sintaktis bahasa Indonesia tidak dapat dikuasai hanya berdasarkan penghafalan kaidahnya dalam tata bahasa. Di sini diperlukan pendedahan dan pelatihan praktis. Terlebih lagi hal itu berlaku untuk segi etno-linguistiknya. Kemampuan menerapkan tata bahasa tidak sama dengan kemampuan bergaul dalam masyarakat pemakai bahasa itu.

Mahasiswa dan dosen bahasa Indonesia gagal jika mereka hanya berkuat di Belanda. Buku, surat kabar, majalah, dan rekaman kaset dan video memang membantu, tetapi tetap menjadi surogat. Diharapkan kesempatan mengunjungi Indonesia dan belajar di sana tidak akan berkurang. Diharapkan pula supaya pakar Indonesia lebih mendapat kesempatan untuk mengunjungi Leiden, sebagai peneliti atau dosen tamu, seperti yang saya rasakan pada zaman ILDEP dahulu.

Menggunakan bahasa Indonesia secara aktif dan pasif tidak mungkin dilakukan tanpa menggunakan kamus yang modern. Untuk bahasa Indonesia--Belanda, kamus Teeuw (1990, ²1997) yang paling unggul jika dibandingkan dengan semua kamus sebelumnya. Akan tetapi, untuk kamus produksi, bahasa Belanda--Indonesia, saat ini tidak ada kamus yang dapat diandalkan. Dalam kamus-kamus yang ada bahasa Belandanya sering aneh, lucu, atau malah mengerikan, bahasa Indonesia pun tidak baku atau ketinggalan zaman. Namun, sejak satu tahun yang lalu dilaksanakan proyek perkamusian DIDIC (Dutch-Indonesian Dictionary) di Universitas Leiden, yang diharapkan akan menghasilkan kamus modern yang lebih memadai dalam waktu tiga empat tahun. Proyek itu merupakan kerja sama antara Universitas Leiden, Universitas Indonesia, dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Di atas sudah saya jelaskan bahwa dalam meneliti dan mengajarkan bahasa Indonesia kami berpedoman pada pendapat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa betul. Itu berarti bahwa bentuk yang berbeda tidak dapat dikesampingkan sebagai tingkah penutur atau ketidaksempurnaan bahasa. Jika terdapat pilihan bentuk, pasti terdapat pilihan semantis juga. Tugas kita ialah menentukan apa perbedaan makna itu.

Dalam mengajarkan bahasa Indonesia untuk pembelajar asing ancangan kontrasitif tentunya wajar. Akan tetapi, itu sering menimbulkan pengamatan yang negatif, seperti "bahasa Indonesia tidak mempunyai kategori tunggal-jamak", atau "dalam bahasa Indonesia tidak ada kata sandang, tetapi untuk mengungkapkan ketakrifan dipakai kata *itu* atau sufiks *-nya*". Banyaknya pengamatan seperti itu membanjiri pengamatan dari sudut pandang bahasa Indonesia, yang paling sedikit sama pentingnya. Kesan yang timbul dan tentu saja tidak tepat itu ialah bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang miskin dan kurang sempurna. Padahal, bahasa Indonesia pun mampu mengungkapkan perbedaan dan nuansa semantis yang sukar diungkapkan dalam bahasa lain.

Dalam buku pelajaran kami ditemukan hal-hal seperti itu terus-menerus. Masih ada banyak yang belum dipecahkan. Yang jelas, pendapat sementara orang bahwa bahasa Indonesia dalam era globalisasi ini semakin mirip dengan bahasa Barat seperti Inggris dan Belanda tidak dapat dibenarkan dan perlu diluruskan.

Catatan:

1. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Susi Moeimam atas sarannya.
2. Sampai pertengahan abad yang lalu pendidikan menjadi urusan gereja saja, khususnya gereja Kristen Protestan. Akibat perang kemerdekaan Belanda dengan Spanyol yang beragama Katolik itu, maka sebagian besar Belanda menjadi Protestan dan agama Katolik dinomorduakan selama lebih dari dua abad. Baru sejak akhir abad ke-19 orang Katolik diperbolehkan berorganisasi politik dan bergiat dalam misi.
3. Selain *Tendeloo* semua kajian ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan dalam seri ILDEP. Penerjemahan *Tendeloo* itu direncanakan, tetapi tidak dapat diwujudkan karena proyek ILDEP, yang dibiayai sebagian besarnya oleh pemerintah Belanda, dibubarkan pada tahun 1992 akibat kevakalan menteri Belanda dalam menuntut reformasi sebelum waktunya.
4. Kriteria untuk menentukan tingkat kesamaan itu cukup arbitrer. Kesamaan dan perbedaan dalam kosakata masih dapat diukur, tetapi kurang jelas bagaimana harus diukur dan ditimbang kesamaan dan perbedaan dalam struktur gramatikal, dan bagaimana relasi antara tingkat kesamaan leksikal dengan tingkat kesamaan gramatikal.
5. Untuk tujuan makalah ini, pendapat bahwa istilah "bahasa" juga dapat dipakai untuk manifestasi setiap *bahasa I*, dan untuk kemampuan manusia berkomunikasi melalui *bahasa I*, saya anggap kurang relevan.

Daftar Pustaka

- Gerth van Wijk, D. 1889. *Spraakleer der Maleische Taal*. Batavia: G. Kolff. Edisi Ketiga 1909. Terjemahan T.W. Kamil. *Tata Bahasa Melayu*. 1985. Jakarta: Djambatan.
- Hollander, J.J. de. 1849. *Handleiding bij de Beoefening der Maleische Taal en Letterkunde*. Breda: Broese & Comp. Edisi keenam 1993. Terjemahan T.W. Kamil. *Pedoman Bahasa dan Sastra Melayu*. 1984. Jakarta: Balai Pustaka.
- Jung, J.I., Th.C. van der Meij, H.W.B. van Rijk. 1988. *Selamat Datang. Deel I Indonesisch voor Beginners*. Edisi Ketiga 1995. Leiden.
- Jung, J.I., Th.C. van der Meij, H.W.B. van Rijk. 1989. *Selamat Datang. Deel II Indonesisch voor Beginners*. Edisi Ketiga 1996. Leiden.
- Ophuijsen, Ch. A. van. 1910. *Maleische Spraakkunst*. Leiden: S.C. van Doesburg. Edisi Kedua 1915. Terjemahan T.W. Kamil. *Tata Bahasa Melayu*. 1983. Jakarta: Djambatan (Seri ILDEP).
- Spat, C. 1900–1901. *Maleische Taal. Eerste Stuk: Overzicht der Grammatica (met Voorb)*. Tweede Struk: Lees en Vertaal oefeningen. Breda. Edisi Kelima 1931. Terjemahan Achadiati Ikram. *Tata Bahasa Selayang Pandang*. 1989. Jakarta: Balai Pustaka.

- Steinhauer, H. 1998. *Leerboek Indonesisch. Voorlopige Uitgave*. Leiden: Opleiding Talen en Culturen van Zuidoost Azië en Oceanië.
- Teeuw, A. 1990. *Indonesisch-Nederlands Woordenboek*. Dordrecht. (Edisi Kedua yang diperluas, Leiden 1997).
- Tendeloo, H.J.E. 1901. *Maleische Grammatica*. Leiden: Brill.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok E3
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 15.30--16.20
Judul Makalah	: Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Belanda
Penyaji	: Hein Steinhauer
Pemandu	: Jawasi Naibaho
Pencatat	: a. Isdiarto b. Hani'ah
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: I Gusti Bagus Ngurah Ardjana, Balai Bahasa, Denpasar

a. Pertanyaan:

- 1) Apakah kalangan peminat belajar bahasa Indonesia dari generasi penerus mewarisi pelajaran bahasa Indonesia dari orang tuanya?
- 2) Seberapa jauh perhatian pemerintah Indonesia terhadap pembelajaran bahasa Indonesia di Belanda?
- 3) Apakah perubahan EYD yang ada di Indonesia dipelajari pula dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Belanda?

b. Jawaban:

- 1) Saya kira untuk menjawab pertanyaan itu perlu penelitian sosiolinguistik. Orang tua dahulu memakai bahasa Indonesia secara asal-asalan, tidak memperhatikan kaidah sehingga mereka tidak memperhatikan sama sekali pelajaran bahasa Indonesia terhadap generasi penerus.
- 2) Keadaan krisis moneter seperti sekarang tidak memungkinkan adanya kerja sama antara Indonesia dan Belanda dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Belanda. Pada akhir tahun 1987 Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan Belanda dalam proyek ILDEP pernah membuat buku pelajaran bahasa Indonesia.
- 3) Perubahan EYD di Indonesia dipelajari pula dalam pembelajaran bahasa Indonesia di Belanda.

2. Penanya: Didik Santoso, IKIP Padang

a. Pertanyaan:

Usaha-usaha apa yang perlu dilakukan agar masyarakat Belanda belajar bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Masyarakat Belanda tidak perlu dirangsang untuk belajar bahasa Indonesia. Mereka dapat mengikuti program kursus bahasa dan kebudayaan Indonesia yang disiarkan melalui televisi selama dua puluh minggu secara berulang-ulang.

3. Penanya: Nurulyati, IAIN Sunan Gunung Jati, Bandung**a. Pertanyaan:**

- 1) Apa tujuan masyarakat Belanda mempelajari bahasa Indonesia?
- 2) Apakah pelajaran bahasa Indonesia di Belanda diberikan dari tingkat SD sampai dengan universitas (perguruan tinggi)?
- 3) Dapatkah hasil-hasil kebudayaan Indonesia yang ada di Belanda dikembalikan ke Indonesia?

b. Jawaban:

- 1) Tujuan masyarakat Belanda belajar bahasa Indonesia untuk mencari pekerjaan di Indonesia, menjadi wisatawan, dan memperluas cakrawala tentang Indonesia melalui kursus-kursus bahasa Indonesia yang ada di Belanda. Kelompok terakhir ini adalah ibu-ibu rumah tangga dan orang pensiunan.
- 2) Pelajaran bahasa Indonesia secara akademik hanya dipelajari di universitas. Ada pelajaran bahasa Indonesia di tingkat SD, tetapi itu hanya terbatas pada masyarakat Maluku yang ada di Belanda. Mereka belajar bahasa Melayu Ambon, sedangkan bahasa Indonesia tidak dipelajari secara penuh.
- 3) Orang Indonesia tidak berminat untuk meneliti bahasanya sendiri. Mereka takut melakukan penelitian di daerah yang belum mereka kenal, misalnya mereka takut disantet atau terkena guna-guna.

4. Penanya: Indiyah Imron, Universitas Trisakti, Jakarta**a. Pertanyaan:**

Apakah penutur bahasa Belanda mendapat kesulitan dalam mempelajari afiks derivasional bahasa Indonesia? Bagaimana cara Pak Hein Steinhauer mengatasinya?

b. Jawaban:

Memang ada kesulitan bagi penutur bahasa Belanda dalam mempelajari afiks derivasional bahasa Indonesia. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, saya se-dapat mungkin menerangkan pengertian afiks derivasional bahasa Indonesia. Setiap bahasa memiliki ketidakseimbangan dalam afiks. Yang terpenting bagaimana pola umumnya, apa fungsi dan makna afiks di dalam suatu bahasa.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA ASING DI PRANCIS

Henri Chambert-Loir

Ecole Francaise d'Extreme-Orient, Jakarta

1. Asal dan Perkembangan

Pengajaran bahasa Indonesia (mula-mula bahasa Melayu) di Prancis sangat panjang sejarahnya, bahkan boleh dikatakan luar biasa panjang, karena kuliah bahasa Melayu yang dibuka di Paris pada tahun 1840-an merupakan kuliah umum bahasa Melayu yang pertama di Eropa. Sejarah itu erat hubungannya dengan pendirian dan perkembangan sebuah lembaga pendidikan tinggi yang unik di Eropa, yakni Sekolah Nasional Bahasa-Bahasa Timur Modern (*Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes*: ENLOV).

Lembaga tersebut didirikan pada tahun 1795, di tengah-tengah pergolakan Revolusi Prancis untuk memenuhi kepentingan politik, perdagangan, dan ilmiah nasional. Dalam piagam pendiriannya disebutkan bahwa keempat bahasa utama yang akan diajarkan adalah bahasa Arab, Turki, Persia, dan Melayu. Keempat bahasa tersebut ternyata merupakan bahasa terpenting di dunia Islam, sedangkan bahasa Hindi, Cina, atau Jepang tidak disebut-sebut. Jadi, pada akhir abad ke-18, bahasa Melayu telah dianggap sebagai salah satu bahasa Timur yang terpenting karena merupakan bahasa komunikasi di seluruh Asia Tenggara.

Keutamaan bahasa Melayu itu disadari penuh, tetapi belum ada dosen yang mampu mengajarkannya. Baru pada tahun 1841 Edouard Dulaurier (1807--1881) membuka kuliah tersebut sebagai hasil sebuah persengketaan akademis dan birokratis yang cukup sengit. Pada asalnya Dulaurier adalah ahli bahasa Arab, bahasa Mesir kuno, dan bahasa Koptik¹ (dan kemudian bahasa Armenia). Waktu berkunjung ke London untuk meneliti naskah-naskah di bidang keahliannya itu, dia melihat naskah-naskah Melayu koleksi Raffles² dan begitu tertarik sehingga ia mulai belajar bahasa Melayu. Setibanya di Prancis, Dulaurier berusaha meyakinkan lembaga ENLOV serta pemerintah atas keperluan membuka sebuah kuliah bahasa Melayu, tetapi upayanya itu ditentang oleh beberapa rekan akademisnya, yang menganggap bahasa Melayu sebagai suatu "dialek" yang mudah dimengerti oleh siapa pun yang menguasai bahasa Arab atau Persia. Apabila akhirnya Dulaurier diberi kesempatan untuk mengajar bahasa Melayu di ENLOV pada tahun 1841, baru ada satu kuliah serupa di Eropa (tetapi bukan kuliah umum), yaitu pengajaran Prof. Roorda van Eysinga di Akademi Militer di Breda. Tiga tahun kemudian (1844) kuliah di ENLOV itu dinyatakan sebagai kuliah tetap dan Dulaurier diangkat sebagai guru besar.

Waktu berjuang untuk penciptaan kuliah tersebut, Dulaurier menggarisbawahi kepentingan bahasa Melayu demi politik dan perdagangan Prancis. Dasar pemikiran itu terbaca juga dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar, yang berjudul "Bahasa dan Sastra Kepulauan Nusantara Dipandang dari Sudut Politik dan Per-

dagangan". Namun, Dulaurier pada dasarnya seorang filolog: selama dua puluh tahun mengajar bahasa Melayu di ENLOV (1841--1862), dia menghasilkan sejumlah besar suntingan dan terjemahan naskah Melayu yang bermutu tinggi.³

Kita tidak tahu banyak tentang mahasiswa yang ikut kuliah bahasa Melayu itu. Jumlahnya sangat sedikit, tetapi bersemangat tinggi. Menurut Dulaurier, "Tiga di antara mereka sedang mempersiapkan diri: satu sebagai botanikus, yang lain sebagai dokter, dan yang ketiga sebagai juru gambar, untuk menjelajahi dunia Timur dan Lautan Polinesia."⁴ Di antara muridnya itu tercatat nama A. Marre dan A. Tugault, yang akan mengajar bahasa Melayu juga di kemudian hari.

Pada tahun 1862 Dulaurier diganti sebagai profesor oleh Pierre Favre, yang pernah bermukim sekitar lima belas tahun di Malaka sebagai misionaris. Pierre Favre (1812--1887) seorang pastor, tetapi sekembalinya di Prancis pada tahun 1857, setelah lama bertugas di Asia, dia menjadi seorang akademikus yang terpandang. Favre sebenarnya ditugaskan mengajar bahasa Melayu dan bahasa Jawa. Bahasa Melayu sudah dikuasainya karena ia telah lama bermukim di Malaka. Bahasa Jawa langsung dipelajarinya di Inggris dan di Prancis pada tahun 1862--1863, dan prestasinya begitu baik sehingga beberapa tahun kemudian dia mampu menyusun *Tata Bahasa Jawa* (1866) dan *Kamus Jawa-Prancis* (1870)⁵. Selanjutnya Favre menyusun *Kamus Melayu-Prancis* (1875), *Tata Bahasa Melayu* (1876), dan *Kamus Prancis-Melayu* (1880).⁶

Dengan demikian, buku-buku pegangan utama yang diperlukan untuk belajar bahasa Melayu dan bahasa Jawa sudah tersedia dalam bahasa Prancis pada akhir abad yang lalu. Pierre Favre mengabdikan hampir dua puluh tahun kerja untuk menyusun buku tersebut berdasarkan anggapan bahwa orang belajar sama halnya dengan orang berjalan: cepatnya sampai lebih bergantung pada cara yang ditempuh daripada jauhnya tujuan. (Kata Pengantar dalam *Kamus Jawa-Prancis*).

Kamus Melayu-Prancis tersebut tidak terkenal, bahkan boleh dikatakan tidak diketahui oleh ahli bahasa Melayu lama sekalipun. Selain tersusun dalam bahasa Prancis, kamus itu sukar digunakan karena susunan alfabetisnya, dan kini sudah ketinggalan zaman dibandingkan *Kamus Melayu-Belanda* oleh H.C. Klinkert (1893) dan *Kamus Melayu-Inggris* oleh R.J. Wilkinson (1932)⁷. Meskipun demikian, kamus Favre itu patut dikomentari lebih lanjut karena merupakan sebuah monumen yang hebat dalam perkembangan penelitian bahasa Melayu di luar negeri. Kamus yang tebalnya sekitar 1.900 halaman itu mempunyai keistimewaan dalam bidang etimologi: kata-kata serapan disebut kata asalnya dalam bahasa *dan dalam aksara* Arab, Sanskerta dan Tionghoa; tambahan lagi disebut juga kata-kata kerabat dalam bahasa dan dalam aksara Jawa, Batak, Makasar, dan Tagalog. Untuk mencapai hasil itu, percetakan kerajaan di Vienne (Austria) harus membuat —di bawah pengawasan Favre sendiri— aksara-aksara dari timah dalam semua bahasa tersebut. Setelah 120 tahun, kita harus mengakui bahwa usaha sejenis itu belum pernah dilakukan lagi.

Favre juga menulis beberapa artikel di bidang linguistik dan etnografi. Perhatiannya kepada perbandingan bahasa-bahasa dari seluruh kawasan Nusantara dan Pasifik sangat besar. Dengan tujuan itu, dia mengumpulkan sebuah perpustakaan yang merupakan "koleksi pribadi tentang dunia Melayu yang terbesar di Prancis pada masa itu."⁸

Pada tahun 1885 jabatan pengajaran bahasa Melayu diambil alih oleh Aristide Marre (1823--1918), yang pada waktu itu sudah berumur 62 tahun dan sudah mempunyai nama sebagai seorang orientalis ahli linguistik, sastra, dan matematika. Seperti Dulaurier dan Favre sebelumnya, Marre mempunyai perhatian khusus kepada bahasa-bahasa Nusantara dari segi komparatif. Atas usulnya, kuliah bahasa Melayu dan Jawa diubah menjadi kuliah bahasa Melayu dan Malagasi. Marre menerbitkan berbagai karangan tentang bahasa Melayu, Jawa, Malagasi, dan Tagalog; dia juga menerjemahkan beberapa karangan Melayu⁹. Karya-karyanya yang besar jumlahnya itu tidak sepenting karya kedua pendahulunya (Dulaurier dan Favre), tetapi jelas sealiran, yakni menitikberatkan ilmu filologi.

Tradisi yang sudah mantap tersebut dilanjutkan lagi oleh pengganti Marre, yaitu Alfred Tugault (1825--1912) yang menjadi dosen bahasa Melayu pada tahun 1899. Tugault waktu itu sudah sangat lanjut usia (dia berumur 74 tahun) dan sakit hati karena dua kali ditolak ketika melamar jabatan dosen di ENLOV itu. Oleh karena itulah, dia bercekcok dengan rekan-rekannya dan dia menulis artikel yang sangat pedas tentang mereka (antara lain Favre dan Marre). Namun, dia juga menyusun sebuah *Kamus Melayu-Prancis* yang sangat menarik, yang dicetak berupa reproduksi dari tulisan tangannya sendiri, dan yang sekarang ini sudah amat langka.¹⁰

Tugault baru pensiun pada umur 81 tahun (1906) dan diganti oleh salah seorang muridnya, yaitu Antoine Cabaton (1863--1942). Cabaton mempunyai pendidikan dan pengalaman yang luas. Karyanya tentang bahasa dan kebudayaan Cam (di Vietnam) masih menjadi bahan rujukan sampai sekarang ini. Dalam bidang studi Melayu, Cabaton terutama terkenal karena menulis berbagai karangan tentang keadaan di Indonesia pada masanya. Bukunya berjudul *Hindia Belanda (Les Indes Néerlandaises)*, 1910, 390 hlm.) mendapat sambutan yang sangat baik dan langsung diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Dia juga menulis serangkaian artikel dalam *Majalah Dunia Islam (Revue du Monde Musulman)*, yang menitikberatkan pentingnya peradaban Islam dan gerakan nasionalis di Indonesia pada waktu itu.

Ketika Cabaton pensiun, tahun 1933, pengajaran bahasa Melayu seolah-olah mengalami periode kemerosotan, barangkali karena fokus perhatian orang Prancis pada masa itu lebih terpusat pada bahasa-bahasa Indocina. Dua orang dosen mengajar pada tahun 1933--1938, disusul oleh Ibu Véra Sokoloff (1905--1977), yang memegang jabatan tersebut selama tidak kurang dari 32 tahun. Dalam makalah ini patut dicatat bahwa Véra Sokoloff menghadiri Kongres Bahasa Indonesia kedua di Medan pada tahun 1954.¹¹ Pada masa itulah, persisnya pada tahun 1958, dibuka sebuah jabatan baru buat seorang penutur asli, yang mendampingi sang dosen dengan tugas khusus mengajar bahasa percakapan dan melatih mahasiswa supaya memperoleh lafal yang baik. Yang pertama mengisi jabatan tersebut adalah Bapak Akbar Djoehana, disusul oleh Bapak Boer Mauna, yang kemudian menjadi duta besar RI. Pada masa itu juga kuliah di ENLOV diubah namanya menjadi "kuliah bahasa Melayu-Indonesia", dan beberapa tahun kemudian, nama itu pun dijadikan "kuliah bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia".

Setelah Véra Sokoloff pensiun, tahun 1970, jabatannya diisi oleh dua orang ahli

linguistik yang berasal dari Indonesia, yaitu Ibu Alice Cartier dan Prof. Benny Hoed, dan selanjutnya pada tahun 1973, oleh Pierre Labrousse, yang sekarang ini masih menjadi guru besar di ENLOV itu, didampingi oleh istrinya Farida Soemargono. Pada masa itulah kurikulum pengajaran diperluas, sedangkan Pierre Labrousse dan Farida Soemargono menyusun seperangkat buku pelajaran baru yang membuka sebuah babak baru dalam perkembangan penelitian dan pengajaran bahasa Indonesia di Prancis.

2. Kurikulum dan Bahan Pengajaran

Selama tiga puluh tahun, kuliah di ENLOV memang mengalami perkembangan yang pesat sekali. Namanya diganti menjadi Lembaga Bahasa dan Budaya Timur (*Institut National des Langues et Civilisations Orientales, INALCO*), sedangkan statusnya diangkat ke tingkat universitas. Dengan demikian, jenjang pengajaran terbagi atas tiga peringkat (*cyrclle*).¹²

Peringkat pertama mencakup tiga tahun. Para mahasiswa diberi pelajaran bahasa selama tujuh setengah jam seminggu; pelajaran itu terdiri atas empat unsur, yakni tata bahasa; bahasa percakapan berdasarkan buku *Metode* oleh P. Labrousse (1997); latihan percakapan di laboratorium bahasa; dan pembacaan artikel surat kabar dan majalah (dan selanjutnya buku sastra dan buku tentang sosial budaya). Buku *Metode* selesai dipelajari pada tahun kedua, dan disusul dengan pembahasan bahan video (film cerita dan dokumenter). Pada tahun terakhir, mahasiswa mengikuti kuliah tentang ke-sastraan modern dan kuliah pengantar bahasa Jawa. Di samping pelajaran bahasa dan kebudayaan tersebut, mahasiswa diwajibkan juga mengikuti kuliah (yang umum untuk Asia Tenggara) tentang sejarah, ilmu bumi, agama Islam, dan ekonomi. Jika lulus peringkat pertama itu, mahasiswa menerima sebuah diploma khusus INALCO.

Pada peringkat kedua mahasiswa dapat memperoleh ijazah S1 dan S2. Selama tahun-tahun pelajaran untuk memperoleh S1, pelajaran bahasa dilanjutkan sebanyak empat setengah jam seminggu, antara lain, membahas dan menerjemahkan teks tentang sosial budaya dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Prancis dan sebaliknya. Untuk memperoleh ijazah S2, mahasiswa harus menulis skripsi. Peringkat ketiga tersedia untuk memperoleh gelar doktor, tetapi selama ini belum ada mahasiswa yang mencapai tingkat tersebut.

Kini jumlah mahasiswa sudah bertambah banyak jika dibandingkan dengan tiga puluh tahun yang lalu. Namun, banyak mahasiswa berhenti (*drop out*) setelah satu atau dua tahun. Rata-rata terhitung 40 mahasiswa pada tahun pertama, 25 mahasiswa pada tahun kedua, 15 mahasiswa pada tahun ketiga, dan sekitar 6 saja pada tahun selanjutnya (peringkat kedua). Dosennya berjumlah 4 orang: 1 orang Prancis dan 3 orang penutur asli (1 orang dosen tetap dan 2 orang dosen tidak tetap).

Bahan pelajaran utama tentang bahasa Indonesia sudah tersedia dalam bahasa Prancis, terdiri atas dua buku *metode*, satu *tata bahasa*, dan dua *kamus*.

Buku *Metode* (Labrousse, 1997) terbagi atas dua puluh percakapan yang diuraikan dan dipelajari masing-masing selama enam jam (yakni satu minggu kuliah). Percakapan itu berlangsung di dalam satu keluarga, yaitu antara ke-12 anggota keluarga itu beserta dua pembantu dan dua tamu dari Prancis. Setiap percakapan diter-

jemahkan dan dibahas dari segi semantik dan sintaksis. Selain itu, setiap percakapan itu menjadi dasar uraian tentang satu atau dua topik pokok, misalnya "kata dasar", "afiksasi dengan awala me-", atau "pengulangan".

Buku kedua (Soemargono, 1994) berisi latihan-latihan struktural untuk laboratorium bahasa, yang juga dipergunakan dengan panduan seorang dosen. Buku *Tata Bahasa* (Lombard, 1991) berisi sebuah deskripsi linguistik bahasa Indonesia yang sangat sistematis dan sederhana, dilengkapi dengan sebuah pengantar tentang sejarah bahasa Melayu dan Indonesia dan satu bibliografi. Terdapat juga dua indeks (imbuhan dan kata tugas) sehingga buku itu dapat dengan mudah digunakan sebagai buku referensi.

Kamus Indonesia-Prancis (Labrousse, 1985) merupakan hasil penelitian khusus yang dilakukan selama sekitar dua puluh tahun. Kamus itu cukup lengkap dan sangat berguna untuk orang Prancis yang ingin belajar bahasa Indonesia atau menerjemahkan teks Indonesia. Lebih dari itu, kamus tersebut mengandung keterangan yang langka, yaitu sinonim setiap kata sehingga dapat pula dijadikan sumber inspirasi apabila menulis dalam bahasa Indonesia. *Kamus Prancis-Indonesia* (Soemargono & Arifin 1991, setebal sekitar 1.180 halaman) adalah terjemahan dari sebuah kamus ekabahasa Prancis yang terkenal. Kamus itu pun tentu saja sangat berguna, bukan saja untuk orang Prancis yang belajar bahasa Indonesia, melainkan juga untuk orang Indonesia yang mau membaca teks Prancis.

3. Bahasa Indonesia untuk Penutur Bahasa Prancis

Setiap orang yang belajar satu bahasa asing menghadapi kesulitan khusus yang erat berhubungan dengan perbedaan linguistik antara bahasa aslinya dan bahasa yang dipelajarinya itu. Orang Jawa, misalnya, tidak terlalu sulit belajar bahasa Sunda karena kedua bahasa itu serumpun dan cukup dekat. Orang Prancis lebih mudah belajar bahasa Italia atau Spanyol (yang sama-sama termasuk bahasa Roman) daripada bahasa Jerman atau Inggris (yang termasuk bahasa Jermanik), apalagi bahasa Indonesia yang dari segi linguistik sama sekali berlainan. Oleh karena itu, juga kesulitan yang dihadapi oleh orang Prancis apabila belajar bahasa Indonesia, berlainan dengan kesulitan yang dihadapi oleh orang Eropa dari bangsa lain, apalagi orang India atau Jepang. Kesulitan yang "khas Prancis" itu dapat dibagi dalam beberapa kategori.¹³⁾

a. Fonologi dan Lafal

Kategori ini tidak menimbulkan banyak masalah karena fonem bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan fonem Prancis. Fonem yang agak sukar adalah /r/, /ng/ (*bunga* cenderung diucapkan /bungga/), dan letupan glotal /ʔ/ (*rakyat* dan *makna* cenderung diucapkan /rakyat/ dan /makna/ daripada /raʔyat/ dan /maʔna/). Beberapa gugus konsonan juga sukar diucapkan, seperti /cl/ dalam kata *clurit*.

Ejaan juga tidak menimbulkan masalah khusus karena ejaan bahasa Indonesia sangat mudah jika dibandingkan dengan ejaan bahasa Prancis atau Inggris. Namun, mahasiswa perlu membiasakan diri dengan berbagai sistem ejaan yang pernah digunakan di Indonesia dan harus memperhatikan apakah teks yang dipelajarinya ditulis

sebelum atau sesudah penyempurnaan ejaan.

Kesulitan yang terbesar dalam hal pelafalan adalah intonasi (pola perubahan nada) karena intonasi itu menyangkut pembagian wacana sesuai dengan artikulasi semantik, tetapi menyangkut juga konotasi (akrab, sopan, ironis, ragu-ragu, dan lain-lain) yang diberikan kepada wacana.

b. Kosakata

Kalau orang Prancis belajar bahasa Eropa yang lain, banyak ditemukan kata-kata yang mudah dihafal karena terdapat kata kerabatnya dalam bahasa Prancis. Jelas tidak demikian halnya dengan bahasa Indonesia sehingga seluruh kosakatanya harus dihafal tanpa merujuk kepada kata-kata yang sudah dikenal. Ada sebenarnya sejumlah kata serapan yang telah diketahui oleh orang berbahasa Prancis, umpamanya kata yang berasal dari bahasa Arab (misalnya Ind. *haram*, Pr. *hareem*), atau dari bahasa Sanskerta (misalnya Ind. *kepala*, Pr. *céphalée*), apalagi dari bahasa-bahasa Eropa (misalnya *demokrasi*, *revolusi*, dan lain-lain), tetapi jumlahnya relatif sedikit.

Banyaknya kata serapan dalam bahasa Indonesia, yang berasal dari bahasa yang berlainan, menimbulkan tiga jenis kesulitan lain. Pertama, perbedaan struktur fonetis dan morfologis antara kata khas Nusantara dan kata serapan (misalnya *biru* dibandingkan *khazanah* dan *kompleks*). Kedua, adanya kata-kata searti yang berasal dari bahasa yang berbeda (misalnya *kabar*, *berita*, *info*). Ketiga,—dan itulah yang paling sukar—perbedaan konotasi antara kata-kata yang berasal dari bahasa yang berlainan (mis. konotasi 'Islam' suatu wacana karena banyaknya kata-kata yang berasal dari bahasa Arab).

Kesulitan yang serupa muncul dari konotasi kedaerahan yang terletak dalam lafal atau kosakata seorang penutur asli. Hal ini seringkali dijadikan bahan gurauan di Indonesia: banyak lelucon berdasarkan kesalahpahaman antarsuku disebabkan pemakaian kata, sedangkan lafal mantan Presiden Soeharto sudah beribu-ribu kali ditiru secara ironis. Hal demikian sukar ditangkap oleh seorang mahasiswa, yang belum mempunyai lafal ataupun kosakata yang mantap, dan belum dapat merasakan unsur kedaerahan dalam suatu wacana lisan.

Kesulitan khas lain adalah kata ganti orang (pronomina), karena terdapat variasi yang asing buat orang Prancis (*saya/aku*, *kamu/engkau/Anda*, *kami/kita*). Pronomina yang paling sulit adalah kata ganti orang kedua sebab sistem Prancis ('*tu*' akrab dan '*vous*' sopan) tidak mempunyai padanan yang tepat dalam bahasa Indonesia, dan sebaliknya berbagai kemungkinan yang ada dalam bahasa Indonesia (*kamu*, *engkau*, *lu*, *Saudara*, *Anda*, *Bapak*, *Ibu*, dan lain-lain) sukar sekali diterjemahkan dalam bahasa Prancis. Kata panggilan (*Bapak*, *Ibu*, dan lain-lain) juga sukar dengan alasan yang sama. Demikian juga nama orang karena terdapat di Indonesia berbagai sistem yang berlainan (sistem Batak, Jawa, Bali, Islam, dan lain-lain), yang hampir semuanya berbeda dari sistem Prancis, yaitu bahwa setiap orang mempunyai satu nama diri dan satu nama keluarga.

Terdapat dalam bahasa Prancis beberapa kata singkatan (yang pada umumnya hanya berupa serangkaian huruf saja), tetapi jumlahnya sangat sedikit jika diban-

dingkan dengan bahasa Indonesia sehingga singkatan Indonesia (dan artinya serta konotasinya) sukar dihafal.

Kesulitan lainnya berada pada berbagai tingkat bahasa (lisan/tulisan, akrab/sopan, dan lain-lain). Ini suatu ciri yang terdapat dalam semua bahasa, tetapi variasinya berbeda dari satu bahasa ke bahasa yang lain.

Kesulitan lain lagi adalah kata penggolong bilangan (misalnya *buah, orang, ekor*) sebab tidak terdapat dalam bahasa Prancis.

Orang Prancis juga sukar memahami adanya kata-kata yang dapat berfungsi sebagai kata benda dan kata kerja sekaligus (misalnya *tutup* dalam *tutup botol* dan *tutup pintu*).

c. Morfologi

Salah satu kesulitan terbesar adalah sistem imbuhan (afiksasi). Terdapat sebenarnya banyak awalan dan akhiran dalam bahasa Prancis (misalnya *classer, déclasser, surclasser, classement, classification*), tetapi sistem itu sudah beku dan boleh dikatakan tidak produktif lagi. Oleh sebab itu, kekayaan bahasa Indonesia atas imbuhan serta berbagai kombinasinya sukar dikuasai, apalagi karena fenomena sengau kadang-kadang menjadikan kata dasarnya sulit dikenali (misalnya *korek, mengorek; sewa, menyewa*). Lebih khusus, mahasiswa sukar membedakan fungsi imbuhan *me-*, *me--kan*, dan *me--i* (mis. *mengajar, mengajarkan, mengajari*), dan sukar juga mengetahui kata mana yang dapat atau tidak dapat memakai imbuhan.

Sebaliknya, kekayaan bahasa Prancis yang sangat besar dan rumit akan variasi morfologis (konjugasi serta perbedaan antara bentuk tunggal/jamak, atau jantan/betina) tidak terdapat dalam bahasa Indonesia sehingga harus diterjemahkan sebagai variasi sintaksis.

d. Sintaksis

Salah satu ciri bahasa Indonesia ialah banyaknya bentuk elipsis, yakni kata atau satuan makna yang tidak diucapkan, tetapi dapat diartikan berdasarkan konteks kalimat. Elipsis kata ganti orang (misalnya '*Sudah makan?*'; '*Habis kerja, langsung pulang ke rumah*'); elipsis preposisi komparatif (misalnya '*mahal yang itu*'); apalagi elipsis kopula, yakni kata kerja bantu yang menghubungkan subjek dengan predikat (misalnya '*orang itu temanku*', '*saya orang Prancis*'). Dalam hal ini lafal sangat penting karena pengucapan subjek dan predikat itu harus diselingi sebuah jeda dan intonasi harus turun pada kata terakhir. Semua elipsis itu sukar dipahami dan dikuasai.

Dalam hal predikat mahasiswa juga sukar menempatkan pronomina demonstratif (*ini, itu*) yang menandai predikat itu, sebab tempatnya dalam bahasa Prancis lain. (Kalimat Prancis '*Ce livre, que j'ai lu il y a dix ans*' yang sama dengan bahasa Inggris '*This book, that I read ten years ago*', dengan '*Buku itu, yang saya baca 10 tahun lalu*' daripada '*Buku yang saya baca 10 tahun lalu itu*').

Suatu ciri lain yang mudah dimengerti, tetapi sulit dikuasai secara aktif ialah kecenderungan bahasa Indonesia untuk memakai bentuk pasif.

Mahasiswa juga terbentur pada bentuk jamak. Dalam bahasa Prancis, bentuk

jamak diungkapkan dengan menambah sebuah akhiran pada kata benda dasar (umumnya huruf 's' saja) atau pada kata kerja (umumnya huruf 'nt'). Sistem bahasa Indonesia sama sekali lain dan mahasiswa cenderung menganggap bahwa bentuk jamak diungkapkan oleh reduplikasi saja, dan bahwa reduplikasi selalu mengungkapkan bentuk jamak.

Selain itu, masih ada beberapa ciri bahasa Indonesia yang terasa asing buat mahasiswa Prancis, seperti:

- 1) kalimat bertopik, yaitu kemungkinan menitikberatkan satu unsur kalimat dengan menempatkannya di awal kalimat (misalnya "*Arif, anaknya berapa?*", "*Anak Arif berapa?*", "*Berapa anaknya Arif?*");
- 2) cara mengungkapkan aspek verba, dengan kata bantu seperti *sudah, pernah, belum, sedang, masih, lagi, baru, akan*, dan lain-lain. (Dalam bahasa Prancis, aspek itu diungkapkan terutama melalui konjugasi);
- 3) cara mengungkapkan pengandaian (hipotesis, protasis) dengan kata bantu seperti *kalau, jika, umpama, asal, andaikata*, dan lain-lain; apalagi cara mengungkapkan hipotesis yang mustahil atau tidak terjadi (*irreal*);
- 4) cara mengungkapkan pengingkaran, yakni perbedaan antara *tidak, bukan, belum, dan jangan*;
- 5) kata interjeksi seperti *deh, toh, sih, kan, dan lho*.

Demikianlah beberapa kesulitan khusus yang dihadapi orang Prancis apabila belajar bahasa Indonesia. Daftar itu jelas perlu dilengkapi dan diperinci. Sebenarnya masalah tersebut patut digali lebih lanjut dengan mewawancarai langsung mahasiswa yang bersangkutan serta dosennya dan dengan memperbandingkan kesulitan yang khas Prancis itu dengan kesulitan yang dihadapi penutur asing lain dari Eropa atau dari luar Eropa.

Uraian singkat ini berfokus pada pelajaran bahasa Indonesia di lembaga INALCO. Oleh karena itu, perlu dilengkapi catatan bahwa sejumlah pelajar bahasa Indonesia itu selanjutnya beralih ke bidang yang sama sekali lain dan boleh dikatakan jarang atau sama sekali tidak memakai bahasa Indonesia di kemudian hari, sedangkan di pihak lain sejumlah orang Prancis lain belajar bahasa Indonesia di luar lembaga pendidikan tersebut. Dengan kata lain, penggambaran situasi pengajaran bahasa Indonesia di INALCO tidak mencerminkan keadaan minat orang Prancis terhadap Indonesia ataupun keadaan penelitian Indonesia di Prancis. Minat tentang Indonesia dan penelitian tersebut cukup subur, seperti tampak dari jumlah buku yang tahun demi tahun terbit di Prancis dan jumlahnya mencapai lebih dari seratus judul selama tiga puluh tahun terakhir ini.

Catatan:

1. Bahasa Koptik adalah bahasa keturunan bahasa Mesir kuno, yang sampai sekarang dipakai oleh orang Mesir beragama Kristen.
2. Naskah-naskah tersebut dikumpulkan oleh Raffles pada masa pemerintahannya di Jawa. Kebanyakan berasal dari awal abad ke-19 dan terdapat di antaranya versi yang bagus dari

- Bustan us-Salatin, Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Pandawa*, dll.
3. Dulaurier menerjemahkan *Hikayat Jauhar Manikam, Silsilah Aceh, dan Kisah Pelayaran Abdullah* (lih. Chamber-Loir, 1975); dia juga menyunting naskah *Undang-Undang Laut Malaka, Hikayat Raja-Raja Pasai, dan Sejarah Melayu* (lih. Damais, 1968); dia bahkan menerjemahkan naskah *Undang-Undang Laut Bugis*, dan menerbitkan teks aslinya dalam aksara Bugis yang khusus dibuat oleh Percetakan Kerajaan di Paris pada tahun 1845.
 4. Dikutip oleh Bonneff 1991:486.
 5. *Grammaire javanaise accompagnée de fac-simile et d'exercices de lecture*, Paris, Imprimerie Impériale, 1866; *Dictionnaire javanais-français*, Vienne, Imprimerie Impériale et Royale, 1870. Kamus Jawa tersebut sebenarnya untuk sebagian besar merupakan saduran dari Kamus Jawa-Belanda (*Javaansch-Nedertuisch Woordenboek*) susunan J.F.C. Gericke yang diedit oleh T. Roorda, yang telah terbit di Amsterdam pada tahun 1847 (lih. Lombard 1976).
 6. *Dictionnaire malais-français*, Vienne, 1876; *Grammaire de la langue malaise*, Wenen, 1876; *Dictionnaire français-malais*, Vienne, 1880.
 7. Dalam Kata Pengantar kamusnya, Wilkinson mengungkapkan kekagumannya terhadap kamus Favre: "His methods made a great impression upon me at the time and guided me in all my early work." Tentang kedudukan kamus Favre dalam perkembangan lexicografi Melayu, lih. Labrousse 1976.
 8. Labrousse 1995: 235. Daftar judul koleksi tersebut diterbitkan sesudah Favre meninggal, dengan judul: *Bibliothèque de M. l=abbé Favre: Linguistique et histoire de l=Océanie*, Paris, Maisonneuve et Leclerc, 1888 (dicetak ulang oleh Maisonneuve et Larose, Paris, 1974).
 9. Yaitu *Sejarah Melayu, Hikayat Raja-Raja Pasai, Taj us-Salatin, Hikayat Jauhar Manikam, Kisah Nakhoda Muda, dan Kitab Faraid* (lih. Chambert-Loir 1975).
 10. *Dictionnaire malais-français*, Paris, 1898, 527 hlm.
 11. Lih. Chambert-Loir 1978.
 12. Uraian berikut berdasarkan artikel Labrousse 1998 dan Soemargono-Labrousse 1998, serta informasi yang diterima dari Prof. P. Labrousse.
 13. Catatan di bawah ini berdasarkan pengalaman pribadi penulis serta pengamatan bahan pelajaran yang tersedia (Labrousse 1997, Soemargono 1994, Lombard 1991), kesulitan khas yang menonjol karena dibahas dengan panjang lebar. Kami juga mendapat masukan yang berharga dari Prof. P. Labrousse; atas masukan tersebut kami mengucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

- Bonneff, Marcel. 1991. "Pengetahuan mengenai Jawa dan Bahasa Jawa di Perancis". *Kongres Bahasa Jawa*. Buku IV. Surakarta: Harapan Massa.
- Chambert-Loir, Henri. 1975. "Bibliographie de la Littérature Malaise en Traduction", *BEFEO* LXII.
- , 1978. "Véra Sokoloff (1905--1977)", *Archipel* 16.
- Damais, Louis-Charles. 1968. "The Contribution of French Scholars to the Knowledge of Indonesian History". *Majalah Ilmu-Ilmu Sastra Indonesia*, No.3.

- Labrousse, Pierre. 1976. "Histoire des Dictionnaires du Malais et de l'Indonésien". *Archipel* 12.
- , 1985. *Kamus Umum Indonesia-Prancis*. Paris-Jakarta: Association Archipel & Gramedia.
- , (Ed.) 1995. *Langues'O 1795--1995: Deux Siècles d'Histoire de l'Ecole des Langues Orientales*. Paris: Edition Hervas.
- , 1997. *Méthode d'indonésien*, Paris: L'Asiathèque.
- , 1998. "Sejarah Pengajaran Bahasa Melayu, Jawa, Indonesia, Malaysia di Lembaga Bahasa dan Budaya Timur". Dalam Ch. Pelras (Ed.) *Dialog Prancis-Nusantara*. Jakarta: CNRS-Lasema/Yayasan Obor.
- Lombard, Denys. 1976. "En Mémoire de l'Abbé P. Favre". *Archipel* 12.
- , 1983. "Un grand précuseur: Antoine Cabaton (1863--1942)". *Archipel* 26.
- , 1991. *Introduction à l'indonésien*. Paris: Cahier d'Archipel 1.
- Soemargono, Farida. 1994. *Exercices Structuraux d'Indonésien pour Laboratoire de Langue*. Paris: L'Asiathèque.
- Soemargono-Labrousse, Farida. 1998. "Pengajaran bahasa Nusantara di Lembaga Bahasa dan Budaya Timur". Dalam Ch. Pelras (Ed.). *Dialog Prancis-Nusantara*. Jakarta: CNRS-Lasema/Yayasan Obor.
- Soemargono, Farida & Winarsih, Arifin. 1991. *Dictionnaire Français- Indonésien*. Paris-Jakarta: Association Archipel & Gramedia.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PEMBELAJAR ASING DI ITALIA

S. Faizah Soenoto Rivai
Istituto Universitario Orientale, Italia

1. Pendahuluan

Ketika Marco Polo (1254--1323) kembali dari pelayarannya ke Asia Timur, dia membawa pulang cerita-cerita yang mengagumkan tentang dua buah pulau yang disebutnya *Giava Maggiore* dan *Giava Minore*. Berita tentang kekagumannya akan pulau yang menjadi bagian dari sebuah kepulauan yang paling besar di dunia itu telah mendapat perhatian yang cukup besar pula di Italia. Sesudah Marco Polo, sederetan nama pelayar, pelaut, pedagang, dan ilmuwan Italia menyusul. Sebenarnya, jauh sebelum Marco Polo, seorang Italia lainnya, Plinio (23--79), dari kota Como di Italia Utara, pernah pula menyebutkan sebuah pulau yang disebutnya *Tapobrana*, yang sampai sekarang masih dipersoalkan identitasnya, antara Sri Lanka dan Sumatra.

Demikianlah, deretan nama eksplorasi dan pelayar ulung Italia lainnya telah membawa laporan perjalanan mereka, masing-masing sesuai dengan bidang yang diminati. Kebanyakan dari mereka ialah pedagang atau pelaut. Akan tetapi, tidak sedikit di antara mereka yang juga memberikan perhatian terhadap peradaban dan kebudayaan setempat. Secara tidak langsung merekalah yang turut berjasa menyebarkan dan memperkenalkan Indonesia di Italia. Di antara beberapa nama itu, antara lain, adalah Giovanni da Empoli (1480?--1524)¹. Dialah yang mengirimkan surat dan menceritakan pengalamannya di pulau-pulau di Indonesia².

Sangat menarik tulisan dan komentar yang dibuat oleh seorang yang bergerak di luar bidang kebudayaan dan terutama di luar bidang bahasa, seperti Odoardo Beccari (1843--1920), yang lebih dikenal sebagai naturalis. Beccari berjasa di bidang ilmu tumbuh-tumbuhan dan alam setelah melakukan penelitian di Indonesia, terutama di Kalimantan. Ia mengabadikan kisah pengalamannya waktu bermukim selama kurang lebih tiga tahun di pulau Kalimantan (1865--1868)³. Beccari juga sempat mengunjungi Irian (1871 dan 1875), pulau Aru dan Kei (1873), Sulawesi Timur (1874), dan Sumatra (1877)⁴. Beccari mengamati dengan tekun lingkungan hidup di tempat-tempat yang dikunjunginya. Yang diamati tidak saja alamnya, tetapi juga kebudayaan dan manusianya. Ia memberikan pendapat dan komentar yang menarik tentang kebudayaan setempat. Menurut Beccari, "bahasa setempat" itu *per la dolcezza l'italiano dell'Estremo Oriente*⁵, artinya bahasa setempat itu manis dan merdu bagaikan bahasa Italia untuk Timur Jauh. "Bahasa setempat" yang dimaksudkan Beccari itu tidak lain adalah bahasa Melayu.

Sementara itu, Emilio Modigliani dengan tulisannya *Un Viaggio a Nias* (1890), *Fra i Batacchi Indipendenti* (1890), dan *Isole delle Donne* (1894) memusatkan perhatiannya pada daerah Toba⁶, pulau-pulau Nias⁷, Mentawai, dan Enggano⁸. Pulau yang terakhir inilah yang dijulukinya sebagai *isole delle donne* (pulau wanita)⁹. Tulisan-

tulisan tersebut menambah fantasi mereka tentang kepulauan yang eksotik itu. Modigliani sempat juga memberikan perhatian dan mengomentari kesusastraan setempat, seperti, *pantun Melayu*.

Tiap-tiap pelayar, penjelajah, peneliti alam, dan pedagang membawa pulang berita dan hasil perdagangan atau penemuan baru mereka ke tanah air. Sebagian besar pengetahuan dan penemuan baru itu menjadi sumber atau pedoman dan bahan penelitian bagi bangsa lainnya di Eropa.

Puncak berita yang sangat penting dan berhubungan langsung dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu-Indonesia ialah catatan perjalanan Antonio Pigafetta (1480--1524). Bangsawan dari kota Vicenza mengikuti pelayaran Magelhaens dari Spanyol untuk mengelilingi dunia. Dalam pelayaran yang bersejarah inilah Pigafetta membuat daftar kata-kata Melayu, *Vocaboli de Questi Popoli Mori* (Perbendaharaan Kata Orang Islam). Walaupun di Italia Antonio Pigafetta lebih dikenal sebagai pelayar yang mengikuti pelayaran pertama mengelilingi dunia¹⁰, bagi bidang studi Melayu-Indonesia tokoh Italia itu sangat penting. Daftar kata Pigafetta dianggap sebagai benih sebuah kamus Melayu ke salah satu bahasa Eropa. Naskah tersebut telah berkali-kali dijadikan bahan penelitian para pakar studi Melayu-Indonesia. Semua sepakat bahwa bahasa "*popoli mori*" itu ialah bahasa Melayu (*moro* artinya 'hitam' dan istilah ini sering dipakai juga untuk menyebut orang Islam). Daftar kata yang terdiri atas 400 (tepatnya 426) ini menambah sejumlah bukti yang telah ada tentang bahasa Melayu yang pada abad itu sudah menjadi *lingua franca* di Nusantara. Daftar kata itu merupakan benih pertama kamus Italia-Indonesia di masa mendatang.

Lama sesudah itu, kira-kira tiga ratus tahun kemudian, barulah muncul lagi karya yang berhubungan dengan bahasa. Seorang saudagar, G. Gaggino (1846--1918), yang bermukim di Singapura menerbitkan sebuah kamus *Dizionario Italiano e Malese, Preceduto da un Manuale Pratico di Conversazione*, yaitu sebuah kamus bahasa Italia dan bahasa Melayu yang didahului dengan lembaran "percakapan praktis". Kamus itu diterbitkan dalam tulisan Jawi dan transkripsi bahasa Italianya dalam tulisan Latin.

Pada tahun-tahun terakhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, seorang Italia lainnya, Emilio Salgari (1862--1911) secara tidak langsung telah turut menyebarluaskan berita dan cerita tentang "Tanah Melayu". Dengan seri roman perompak Melayunya, Salgari telah mengisi dunia bacaan remaja pada awal abad ke-20 sampai sekarang¹¹. Walaupun Emilio Salgari tidak pernah diakui baik sebagai pelayar maupun sebagai pengarang, sastra, kehadirannya dalam dunia bacaan hampir sepanjang zaman, tidak dapat disangkal lagi. Sebenarnya, Salgari bukanlah seorang pelayar karena ia tidak pernah berlayar lebih jauh dari pesisir Italia Selatan. Semua seri kisah pelayaran ke segala penjuru dunia ditulisnya dalam kamar kerjanya, tanpa pernah menginjakkan kaki ke tempat-tempat yang eksotik itu. Bahan dan data diperolehnya dari naskah-naskah yang dibacanya, baik naskah laporan perjalanan atau pelayaran orang-orang Italia maupun oleh bangsa Eropa lainnya. Kalau para ilmuwan yang menjelajah Nusantara berjasa dengan penemuan-penemuan baru mereka, Salgari mungkin berjasa melalui angan-angannya dalam memperkenalkan hasil penemuan para ilmuwan itu kepada khalayak ramai, melalui buku-buku cerita karangan. Tidak semua orang mem-

baca hasil dan laporan pelayaran Beccari, Giovanni da Empoli, Pigafetta, dan yang lain. Hasilnya, orang Italia mengenal kata-kata, seperti *durian*, *terasi*, *keris*, *orang-utan*, dan *babirusa*. Kata-kata itu melekat dan tinggal dalam perbendaharaan kata mereka dan tercantum dalam kamus-kamus bahasa Italia baku¹².

Sebenarnya, ada sebuah naskah lagi yang tersimpan di Perpustakaan Vatikan. Naskah itu dikenal dengan judul *Lexicon Malaicum*; tercantum dalam berkas Perpustakaan Vatikan yang diterbitkan di Roma tahun 1831 sebagai *Lexicon Malaicum cum Grammatica*¹³. Ternyata, naskah yang selama ini dianggap sebagai sebuah leksikon Melayu disertai dengan gramatiknya itu tidak berisi tata bahasa Melayu dan kamus Melayu sebab sebenarnya judul lengkap naskah itu ialah *Lexicon Malaicum cum Grammatica Araba*, yaitu sebuah kamus Melayu-Latin-Belanda dengan tata bahasa Arab.

Pada abad ke-20 seorang Italia lainnya, Giacomo Prampolini, dianggap sebagai seorang peneliti yang nonakademis. Perhatian Prampolini yang besar terhadap bentuk puisi Melayu--*pantun*--telah menghasilkan sebuah karangan tentang kesusastraan Melayu-Indonesia¹⁴. Prampolini juga menerbitkan sebuah buku kecil yang berisi lima puluh pantun yang diterjemahkan ke dalam bahasa Italia¹⁵.

Kalau kita bandingkan minat dan perhatian dengan studi dunia Asia lainnya, bidang studi Indonesia boleh dikatakan sangat sedikit. Oleh karena itu, patut kita hargai ketekunan dan ketegaran segelintir ilmuwan Italia yang menjadi penerus para pelopor, yang telah merintis jalan berabad-abad yang lalu karena memang pada periode tersebut sebenarnya studi Melayu-Indonesia makin menjauh dari lingkup kawasan minat Italia.

Maka tibalah kita pada tahun 1964, ketika Prof. Alessandro Bausani, orientalis yang termashur dan fasih berbahasa Melayu-Indonesia itu berhasil memperjuangkan dan memasukkan bahasa dan sastra Indonesia ke dalam kurikulum Fakultas Sastra dan Filsafat, *Istituto Universitario Orientale*, di kota Napoli. Universitas itu, merupakan pusat studi oriental di Italia. Prof. A. Bausani, pakar Islamologi dan studi Persia banyak menulis sastra Melayu dan Indonesia. Beliau pulalah yang berjasa, untuk memperkenalkan tulisan-tulisan ataupun laporan perjalanan dan pelayaran orang Italia di masa lalu dengan menerbitkan seri *Laporan Perjalanan Pelayar Italia ke Indonesia*¹⁶. Karangan lain yang terkenal ialah tentang struktur hikayat Melayu¹⁷. Beliauah dosen pertama bahasa dan sastra Indonesia di universitas di Napoli.

Ketika Prof. A. Bausani pindah ke Roma, beliau digantikan oleh Prof. L. Santa Maria yang dikenal di kalangan ilmuwan dengan karyanya tentang kata-kata pinjaman bahasa Portugis dalam bahasa Indonesia¹⁸. Minat beliau tidak terbatas pada bahasa, tetapi juga pada sastra, sejarah, dan politik¹⁹. Prof. Santa Maria banyak menulis artikel, baik tentang sastra Melayu klasik²⁰ maupun sastra Indonesia modern²¹. Minat terhadap bidang etimologi telah diwujudkankannya dalam kerja sama dengan C.D. Grijns dan J.W. Vries²². Kemudian, kerja sama itu dilanjutkan dalam bidang leksikografi, yaitu dengan, menyusun kamus bahasa Indonesia-Italia yang akan terbit tahun ini²³.

2. Sejarah Pengajaran Bahasa Indonesia di Italia

Pada tahun 1950 *IsMEO*, sebuah lembaga Italia untuk Asia Tengah dan Asia Timur Jauh di Roma, untuk pertama kalinya membuka kursus bahasa Indonesia. Selain kursus bahasa dan kebudayaan, mereka juga mempunyai “Ruangan Bahasa Indonesia” di Radio Italiana, dengan acara “Warta Berita” dan “Serba Serbi Kebudayaan Indonesia”. Sayang, sejak tahun 1964 acara ini sudah berhenti, sedangkan kursus bahasanya berakhir pada tahun 1970. Pada tahun 1997 lembaga ini telah berganti nama dengan *IsAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente)*. Lembaga ini sebenarnya selalu memberikan peluang untuk kursus bahasa Indonesia. Hanya sayangnya sudah bertahun-tahun kursus ini tidak dapat dilaksanakan karena kurang peminatnya. Sementara itu, syarat yang harus dipenuhi untuk melaksanakan kursus itu adalah paling sedikit ada lima orang yang mendaftarkan diri. *IsMeo* yang ada di kota Milano di Italia Utara itu juga pernah mengadakan kursus bahasa Indonesia. Kursus bahasa Indonesia di sini pun diadakan jika ada permintaan dan memenuhi syarat minimal.

Para peminat yang serius itulah yang kemudian terpaksa mencari saluran lain, misalnya, melalui sekolah bahasa swasta atau secara perseorangan. Akhirnya, pada tahun yang bersejarah, 1964, Prof. Alessandro Bausani di *Istituto Universitario Orientale*, Napoli--universitas yang merupakan pusat studi Asia dan Afrika di Italia membuka kesempatan bagi bahasa Indonesia. Pada tahun inilah secara resmi dibuka kursus/mata kuliah baru Bahasa dan Sastra Indonesia, di Universitas Negeri Italia.

3. Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Italia

Pembelajar asing bahasa Indonesia di Italia dapat digolongkan dalam beberapa kategori. Latar belakang pembelajar dan peminat ini bermacam-macam. Mereka datang dari berbagai lapisan dan lingkungan masyarakat sehingga mempunyai motivasi yang berbeda-beda, seperti tampak pada hal yang berikut.

1. Mahasiswa yang secara resmi mengikuti kuliah di universitas harus memenuhi syarat dan menaati peraturan. Mereka adalah mahasiswa yang belajar di universitas/fakultas yang mempunyai mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dalam kurikulumnya, seperti di *Istituto Universitario Orientale* di Napoli.
2. Mahasiswa yang berminat, tetapi tidak (bisa) mengikuti kuliah karena universitasnya tidak mempunyai mata kuliah sehingga berusaha mengikuti kursus bahasa atau belajar sendiri.
3. Peminat umum, karena kebutuhan, yang datang dari berbagai latar adalah pedagang, pelajar, mahasiswa, pengusaha, dokter, insinyur, atase pertahanan, dan diplomat. Bagi mereka, bahasa Indonesia adalah penunjang untuk studi Indonesia (mahasiswa) atau sebagai penunjang dalam tugas dan pekerjaan (pengusaha, diplomat). Kiranya perlu ditambahkan bahwa tidak sedikit pula peminat yang belajar hanya dengan alasan hobi.

4. Motivasi Pembelajar Asing Mempelajari Bahasa Indonesia

Sesuai dengan jenis pembelajar yang disebutkan di atas, selain motivasi ilmiah, ada

juga motivasi praktis. Harus diakui bahwa motivasi pembelajar asing Italia kadang-kadang memberi kesan dangkal. Karena tidak adanya pengetahuan dasar tentang Indonesia, dapat dianggap bahwa kebanyakan dari mereka tidak mengenal Indonesia atau tidak mengenal sebagaimana seharusnya. Hal itu mungkin disebabkan oleh tradisi kurikulum dalam pendidikan sekolah yang tidak memberikan informasi yang layak dan semestinya tentang Indonesia. Sebagai contoh, dalam program pelajaran sekolah dasar, sampai sekolah menengah pertama dan atas, informasi tentang Indonesia sangat sedikit dan sangat dangkal. Demikian pula media massa, media cetak, sangat kurang. Kalau pun ada, tidak jarang media itu memuat informasi yang sudah kadaluwarsa. Oleh karena itu, kebanyakan peminat dan pembelajar itu belajar bahasa Indonesia dengan dasar rasa ingin tahu. Tentunya tidak mengecualikan mereka yang benar-benar serius dan memilih dengan penuh keyakinan dan beralasan ilmiah. Mereka inilah yang menjadi harapan kita. Merekalah penerus dan penyebar pengetahuan tentang kebudayaan Indonesia di Italia. Jadi, secara garis besar dapat dikatakan bahwa sebagian besar dari pembelajar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat penunjang untuk studi Indonesia atau untuk berkomunikasi, jadi dengan motivasi praktis.

5. Tempat Belajar

Tempat belajar bahasa Indonesia di Italia terdiri atas lembaga resmi, swasta, dan perorangan. Hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a. Universitas sebagai lembaga yang mempunyai mata kuliah Bahasa Indonesia dalam kurikulumnya, seperti *Istituto Universitario Orientale*. Dapat ditambahkan bahwa sebenarnya ada universitas yang mempunyai mata kuliah Bahasa Indonesia, tetapi hanya tercantum dalam Surat Keputusan Pemerintah, yang biasanya disebut dengan istilah mata kuliah yang "tidak diaktifkan".
- b. Lembaga ilmiah yang mengelola kursus-kursus bahasa dan mengadakan kegiatan ilmiah studi Indonesia, seperti *IsMEO/IsAO* di Roma dan Milano. Lembaga ini mempunyai program kursus bahasa Indonesia, dengan syarat peminat yang mendaftar paling sedikit lima orang.
- c. Universitas sebagai lembaga yang memberikan peluang untuk studi Indonesia. Jadi, secara resmi tidak tercantum dalam kurikulum, tetapi memberikan kesempatan kepada dosen-dosen dan para penelitiannya untuk memasukkan studi Indonesia ke dalam program penelitian dan pengajaran mereka. Prof. G. Soravia di *Universita' degli Studi di*, Bologna, di jurusan linguistik, mengadakan beberapa penelitian tentang linguistik Indonesia, khususnya, bahasa Aceh. Di Milano penelitian antropologi-sosiologi dilakukan oleh Dr. P. Scarduelli, seorang antropolog yang banyak menulis tentang kepulauan di Indonesia Timur, sedang di Universitas Siena, Dr. V. Di Bernardi melakukan penelitian dan menulis tentang teater klasik Bali dan Jawa dan juga tentang teater modern Indonesia. Di Universitas *La Sapienza*, Roma Dr. G. Giuriati, seorang musikolog Asia Tenggara, secara tidak langsung memasukkan gamelan dalam program kuliahnya.
- d. Lembaga Kebudayaan atau Asosiasi yang memberikan peluang kepada berbagai kegiatan kebudayaan, misalnya *Istituto per l'Oriente* di Roma, *CELSO* (*Centro*

Lombardia Studi Orientale) di Genova, melalui penyelenggaraan ceramah-ceramah, mengundang para dosen dari berbagai pusat studi oriental dan juga mengadakan kegiatan kebudayaan seperti seni tari, seni musik, seni lukis, dan seni rupa.

- e. Lembaga Pendidikan Tinggi Keagamaan milik Vatikan (*Pontificia Universita Gregoriana*). Di tempat ini kursus bahasa Indonesia dan/atau pengetahuan tentang budaya/keagamaan/kepercayaan di Indonesia diberikan sesuai dengan kepentingan, misalnya dalam persiapan pengiriman misi agama ke Indonesia.
- f. Sekolah-sekolah bahasa kadang-kadang meminta agar diberi penerangan atau kursus sesuai dengan permintaan. Beberapa sekolah bahasa swasta, yang biasanya mempunyai program standar seperti bahasa-bahasa Inggris, Italia, dan Prancis tidak jarang menerima permintaan untuk bahasa Indonesia. Jadi, semacam kursus privat, tetapi dikelola oleh sekolah bahasa. Permintaan yang ada, misalnya, dari berbagai lembaga pemerintah, seperti Departemen Luar Negeri dan Departemen Pertahanan.
- g. Kursus privat/pribadi diadakan sesuai dengan permintaan, misalnya, melalui Kedutaan Indonesia yang menyalurkan kepada pengajar yang bersedia memberikan kursus perorangan.
- h. *Amitido (Associazione d'amicizia Italia-Indonesia)*, sebuah perhimpunan persahabatan antara Italia dan Indonesia yang ada sejak tahun 1981, tetapi sudah tidak mempunyai kegiatan lagi sejak tahun 1990. Perhimpunan ini sering mengadakan kegiatan kebudayaan, termasuk ceramah-ceramah ilmiah.

6. Istituto Universitario Orientale Napoli

Istituto Universitario Orientale di kota Napoli termasuk salah satu Universitas yang tertua di Italia. Didirikan tahun 1732 oleh seorang Pendeta Katolik, Matteo Ripa. Mula-mula bernama *Colleggio de' Cinesi*, sebuah lembaga pendidikan untuk mempersiapkan misionaris yang akan dikirim ke Cina. Universitas ini mempunyai Fakultas Sastra dan Filsafat, Fakultas Bahasa, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, dan Fakultas Studi Islam. Bahasa dan Sastra Indonesia menjadi bagian dari Departemen Studi Asia dalam Fakultas Sastra dan Filsafat. Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan salah satu dari 35 bahasa dan sastra lainnya yang termasuk dalam disiplin yang ada di Fakultas Sastra dan Filsafat, di samping disiplin humaniora lainnya. Jadi, universitas ini adalah satu-satunya lembaga resmi Italia yang mempunyai mata kuliah Bahasa dan Kesusastraan Indonesia. Tahun-tahun yang lalu, ada dua mata kuliah, Bahasa Indonesia serta Bahasa dan Sastra Indonesia. Namun, tahun-tahun terakhir ini hanya ada mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia. Sampai saat ini belum ada materi penunjang lainnya, seperti linguistik Indonesia, filologi, dan sejarah politik/kebudayaan Indonesia. Apalagi Bahasa dan Sastra Indonesia merupakan satu-satunya disiplin Asia Tenggara yang ada. Padahal, sebenarnya bidang antropologi kebudayaan, etnologi, dan sosiologi sangat banyak diminati, terutama beberapa tahun terakhir ini. Kesarjanaan dalam bidang bahasa dan sastra Indonesia dapat diperoleh setelah menempuh empat tahun kuliah, sebagaimana jurusan sosial budaya lainnya. Dalam pelaksanaan-

nya, Bahasa dan Sastra Indonesia dibagi dalam dua program. Program *quadriennale* yang ditempuh dalam empat tahun dan program *biennale* yang ditempuh dalam dua tahun. Hanya mereka yang mengikuti program *quadriennale* untuk bahasa dan sastra Indonesia saja yang dapat memperoleh keserjanaannya di bidang bahasa dan sastra Indonesia setelah mengajukan dan mempertahankan skripsi keserjanaannya. Bagi mereka yang mengikuti program ini, selain harus memenuhi syarat yang sudah digariskan bagi setiap jurusan dan kejuruan, mereka harus memilih bahasa dan materi penunjang lainnya yang ada hubungan dengan bahasa dan sastra Indonesia, seperti bahasa Arab, Sanskerta, Tamil dan Belanda, Linguistik Umum, Sejarah Asia (dengan program khusus Asia Tenggara), Antropologi Budaya, Etnologi, dan lain-lain.

7. Tenaga Pengajar

Sejak Bahasa dan Sastra Indonesia dibuka, di *Istituto Universitario Orientale* terdapat tenaga pengajar asing (Prof. A. Bausani dan Prof. L. Santa Maria), seorang staf pengajar atau dosen berbahasa ibu (pembawa makalah ini), dan sejak tahun 1985 ditambah dengan seorang pelatih bahasa (saudara Zainal Muttaqien, S.S. dari FSUI Jakarta) yang disebut juga sebagai kolaborator linguistik.

8. Kondisi Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Italia

Sebagaimana dikatakan di atas, *Istituto Universitario Orientale* lahir hampir tiga abad yang lalu, sebagai sebuah lembaga pendidikan untuk para calon misionaris ke Cina. Sejak itu berbagai materi utama yang menjadi andalan mereka sesuai dengan kebutuhan misi menjadi sarana yang terpenting di *Istituto Universitario Orientale*. Sejak didirikan sampai sekarang institut ini telah berkembang dan memperluas kawasan studinya menjadi studi oriental. Kalau semula yang dijadikan bahan pertimbangan ialah kebutuhan sebagai alat penunjang, dalam perkembangan waktu dan zaman, pengaruh yang besar adalah hubungan dagang dan politik. Oleh karena itu, jurusan Sinologi, Yamatologi, dan jurusan studi Afrika dan Arab merupakan jurusan yang penting dan besar, sebagaimana juga jurusan India yang telah lama menjadi tradisi dalam studi oriental di Italia. Pola tradisional ini secara tidak langsung sangat mempengaruhi perkembangan studi disiplin lainnya.

9. Kerja Sama dengan Lembaga Lain

Kerja sama antara *Istituto Universitario Orientale* dan lembaga lain, terutama dengan lembaga pengelola BIPA, dapat dikatakan cukup intensif. Ada berbagai kegiatan dan hubungan kerja, seperti tampak pada yang berikut.

- a. Kerja sama ilmiah dalam bentuk kuliah atau ceramah. Misalnya, antarjurusan dengan bertukar dosen/mahasiswa. Kadang-kadang juga antar fakultas, antar-universitas, atau antar lembaga/institusi ilmiah seperti dengan universitas di Roma, Milano atau dengan *IsMEO/IsAO*, *CELSO*, atau kursus-kursus bahasa.
- b. Kerja sama ilmiah dalam bentuk penelitian. Kerja sama ini dilakukan dengan fakultas, universitas, lembaga ilmiah di Italia dan di luar Italia, terutama dengan negara-negara Pasaran Bersama Eropa, melalui pertukaran mahasiswa dan dosen

(SOAS di London, State University Leiden, University of Hull). Kerja sama ilmiah antarnegara, seperti yang dilakukan dalam bidang etimologi antara Universitas di Leiden, Paris, dan Napoli²⁴). Sejak tahun yang lalu *Istituto Universitario Orientale* mulai merintis kerja sama dengan pusat-pusat studi di Italia dan dengan beberapa negara Eropa dan Asia (Cina dan Korea). Tahun ini kami berusaha untuk melibatkan juga Indonesia dan Malaysia dalam sebuah proyek penelitian tentang *Emotions in history and literature. An interdisciplinary research on emotions and states of mind* di bawah pimpinan Prof. P. Santangelo. Penelitian ini mempunyai tujuan akhir untuk menyusun dan menerbitkan sebuah seri glosari lengkap yang memuat istilah dan kutipan, disertai terjemahan dan catatan karya pilihan.

- c. Kerja sama melalui pertemuan ilmiah atau lokakarya yang diadakan setiap satu, dua, atau tiga tahun secara bergiliran di pusat studi/institusi/universitas di Eropa. Tujuannya adalah untuk saling bertukar informasi mengenai penelitian di tempat masing-masing (*ECIMS-European Colloquium of Indonesian and Malay Studies*).

10. Usaha Peningkatan Mutu Pengajaran BIPA: Faktor Penghambat dan Penunjang serta Upaya Penanggulangannya

Sarana pengajaran ataupun infrastruktur setempat, yang tidak selalu memberikan peluang secara luas dan jelas sering menjadi faktor penghambat dalam peningkatan mutu pengajaran. Antara lain mempengaruhi ketersediaan dan penyediaan bahan ajar (buku teks, bacaan, dan kamus, serta kesempatan belajar dengan beasiswa, mengundang dosen tamu). Bahasa Indonesia secara tradisional bukan bahasa unggulan yang berprioritas nomor satu dalam kurikulum *Istituto Universitario Orientale*. Faktor lain yang cukup menghambat juga, seperti telah disinggung di atas, adalah betapa kurang dikenalnya Indonesia di Italia. Sebagian besar waktu dalam pengajaran dipakai untuk mengisi pengetahuan dasar di bidang geografi, sejarah, dan kebudayaan. (Sebagai contoh agen perusahaan penerbangan Garuda di Italia mempergunakan pepatah *Tak kenal maka tak sayang* dan *Pulau Bali terletak di Indonesia, bukan Indonesia di Bali* untuk motto dalam promosi turisme).

Studi Indonesia masih ditekuni oleh segelintir peneliti atau peminat sehingga hanya menjadi keahlian para ilmuwan yang penuh gairah dan eksklusif saja. Oleh karena itu, studi Indonesia memberikan kesan seolah-olah milik pribadi para peneliti, pencinta dan peminat yang menekuninya sehingga bidang yang tidak diminati pengajar asing tidak mudah berkembang. Malahan mungkin akan lenyap begitu saja jika yang berkepentingan tidak memperoleh peluang lagi, misalnya karena selesai tugas.

Pada tanggal 20 Oktober 1997, dalam rangka kunjungan Perdana Menteri Italia Prodi ke Indonesia telah ditandatangani Perjanjian Kebudayaan antara Italia dan Indonesia. Jadi, bahasa dan sastra Indonesia telah didirikan jauh sebelum lahirnya perjanjian kebudayaan tersebut. Mungkin karena itulah keberadaan Italia, sebagai salah satu anggota BIPA terkesan kurang dikenal sehingga sering tidak dilibatkan atau tidak ikut terliput. Masih selalu ada keheranan mendengar bahwa bahasa Indonesia juga dipelajari di Italia, malah di universitas. Besar harapan kami terwujudnya Perjanjian

Kebudayaan yang telah lama dinanti-nantikan itu akan membawa titik terang bagi peningkatan mutu dan pengajaran BIPA di Italia. Maka, sepatutnyalah diberikan penghargaan kepada kedua perintis pengajaran BIPA di Italia, Prof. Alessandro Bausani yang mendirikan jurusan sastra dan bahasa Indonesia untuk pertama kalinya di Universitas Italia dan Prof. Santa Maria yang meneruskan usaha beliau. Jadi, segala sesuatu yang dicapai sampai kini dapat dikatakan sebagian hanya merupakan kegairah dan usaha pribadi. Di samping itu, semangat dan minat pembelajar pun merupakan penunjang utama keberhasilan pengajaran bahasa Indonesia di Italia. Upaya penanggulangan yang bersifat pribadi/perseorangan dari pihak para pengajar yang disesuaikan dengan kebutuhan pembelajar, situasi, dan lingkungan merupakan sarana peningkatan mutu pengajaran BIPA.

Beberapa saran akan dapat membantu peningkatan pengajaran BIPA, misalnya, dengan menempuh beberapa strategi yang mantap dan dengan memberikan garis haluan kebahasaan kepada pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing. Perlu pula diberikan kesempatan bagi pembelajaran untuk bertemu dan berbagi pengalaman, dan kalau perlu sambil menerima semacam penataran pada waktu-waktu tertentu, seperti yang telah dilakukan pada tahun 1993, pada Kongres BIPA, dengan program yang lebih terarah. Di samping itu, perlu diberikan lebih banyak kesempatan bagi pembelajar asing untuk belajar di lapangan, baik dengan darmasiswa atau beasiswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang, misalnya, darmasiswa untuk tiga bulan, selain yang sembilan bulan yang telah ada sekarang. Pada Kongres Bahasa yang lalu pernah diusulkan oleh para pengajar bahasa, sastra, dan studi Indonesia lainnya dari luar Indonesia agar dibentuk semacam lembaga kebudayaan Indonesia di luar negeri, dengan harapan bahwa lembaga ini dapat menjadi semacam pusat pelaksanaan BIPA di luar Indonesia.

11. Simpulan

Walaupun pusat studi di Italia sangat kecil jika dibandingkan dengan beberapa pusat studi Indonesia di Eropa lainnya, pusat studi itu sampai sekarang masih bertahan. Di samping itu, karya ilmiah di bidang studi Indonesia yang dihasilkan oleh para pakarnya telah memberikan andil yang sangat bermutu yang dikenal dan diakui di mana-mana.

Semoga benih yang ditabur Antonio Pigafetta hampir 500 tahun yang lalu itu akan terus berkembang subur di Italia sebagai penunjang sarana guna memperkuat kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia demi pemantapan peran bahasa sebagai sarana pembangunan bangsa dalam era globalisasi.

Catatan:

1. Frate Odorico (1265-1331), Nicolo' dei Conti (1395-1469), Ludovico De Varthema (1505-1507), Filippo Sassetti (1520-1588), C. Federici (1563-1581), G. Balbi (1579-1588)
2. Lih. A. Bausani, *Lettera di Giovanni Da Empoli, IsMeo*, Roma, 1970
3. A. Beccari, *Nelle foreste di Borneo* (1902)

4. A. Beccari menulis dua buku lainnya, *Malesia (1877-1890)*, *Nuova Guinea, Celebes e Molucche* (1924)
5. Dikatakannya pula bahwa bahasa setempat itu: "Grammatikanya sangat sederhana dan ucapannya sangat mudah, demikian mudahnya untuk menangkap arti dan bunyi yang tepat dari setiap kata Melayu bagi telinga siapapun, sehingga semua orang dapat mempelajari bahasa ini dalam waktu yang singkat dan semua dapat mengucapkannya dengan cukup tepat Untuk orang Italia bahasa Melayu juga lebih mudah daripada untuk bangsa lainnya, karena ... bahasa Melayu dapat dituliskan, sangat mirip ucapannya seperti ucapan vokal dan konsonan bahasa Italia" (*Nelle foreste di Borneo*)
6. Emilio Modigliani, *Fra I Batacchi Indipendenti* (1890)
7. Emilio Modigliani, *Un viaggio a Nias* (1890)
8. Emilio Modigliani, *Isole delle donne* (1894)
9. Lih. *PERSEMBAHAN*, studi in onore di Luigi Santa Maria, Sitti Faizah Soenoto Rivai editor, 1998
10. A. Bausani, *L'Indonesia nella Relazione di Viaggio di Antonio Pigafetta*, IsMeo, Roma, 1972
11. Lih. S. Faizah Soenoto, *Il mondo malese di Salgari, un accenno alle parole malesi*, *PERSEMBAHAN*, Napoli, IUO, Series Minor LIII, 1998
12. S. Faizah Soenoto, 'Kata-kata Melayu dalam Kamus Bahasa Italia', sebuah catatan, *World Congress on Malay Language: Vision and Convictions*, Kuala Lumpur, August 1995.
13. L. Santa Maria, *Keadaan Naskah-naskah Melayu Kuno di Perpustakaan Itali. Khususnya Sebuah Kamus Melayu-Latin-Belanda di Biblioteca Vaticana*. Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, 1987.
14. G. Prampolini, *Storia Universale delle Letterature*, III ed. 1959-1961
15. G. Prampolini, *Pantun dwibahasa Melayu-Italia*, Roma, 1953.
16. A. Bausani, *L'Indonesia nella Relazione di Viaggio di Antonio Pigafetta*, IsMeo, Roma, 1972 dan *Lettera di Giovanni Da Empoli*, IsMeo, Roma, 1970
17. A. Bausani, *Note sulla struttura della hikayat classica malese*, AIUON, XII, Napoli, 1962
18. L. Santa Maria, *I Prestiti Portughesi nel Malese-Indonesiano*, IUO, Napoli, 1967.
19. Lih. *PERSEMBAHAN*, S. Faizah Soenoto Rivai (editor), IUO, Napoli, 1998
20. L. Santa Maria, "Smontaggio di un racconto della 'Beast Epic' Malese", *ANNALI IUO*, vol. 35 (NS XXV), Napoli, 1975.
21. L. Santa Maria, "Il racconto breve nella Moderna Letteratura Indonesiana", *ANNALI IUO*, NS vol.XIII, Napoli, 1963
22. *European Loan- Words in Indonesian - A check-list of words of European Origin in Bahasa Indonesia and Traditional Malay*, compiled by C.D. Grijns, J.W. Vries and L. Santa Maria, Leiden, 1983
23. Lih. daftar tulisan karya L. Santa Maria dalam *PERSEMBAHAN*
24. Lih. catatan kaki n. 20

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok E1
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 13.30--14.20
Judul Makalah	: a. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Prancis b. Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Italia
Penyaji	: a. Henri Chambert-Loir b. Faizah Soenoto Rivai
Pemandu	: Nangsari Ahmad
Pencatat	: a. Dameria Nainggolan b. Farida Dahlan
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Jawasi Naibaho, IKIP Medan

a. Pertanyaan:

- 1) Pada makalah Ibu dinyatakan bahwa yang pertama-tama belajar adalah orang yang berminat secara resmi, baru kemudian diperhatikan peminat umum, apa yang dimaksudkan itu?
- 2) Bapak Hendri Chambert-Loir telah menguraikan secara panjang lebar tentang pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Satu hal yang menarik perhatian saya adalah bahwa bahasa Melayu telah begitu lama dicoba diajarkan di Prancis. Sesudah kembali menjadi pengajaran bahasa Indonesia apakah metode pengajarannya juga berubah? Saya hanya tertarik akan metode pengajaran agar kami di Indonesia tahu perbedaan pengajaran bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, sebagai bahasa kedua, dan sebagai bahasa asing?

b. Jawaban:

- 1) Faizah Soenoto Rivai
Barangkali ini kesalahan saya karena waktu saya menuliskan pembagian ini, kriteria pembagian itu bagi saya kurang jelas. Saya hanya membaginya berdasarkan kategori mahasiswa. Untuk yang lain, peminat umum, saya katakan tadi, mereka hanya mencari sendiri. Saya hanya membagi kategori berdasarkan kepentingan minat belajar para mahasiswa. Sedapat mungkin saya menyempatkan diri dengan buku teks BIPA terbitan yang mutakhir. Akan tetapi, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan negara dan pembelajar Italia. Saya tidak bisa memakai buku BIPA sebagai buku pegangan sepenuhnya. Jadi, saya mengkombinasikannya dengan catatan dari saya pribadi yang disesuaikan dengan tradisi belajar bahasa Italia.

2) Henri Chambert Loir

Perbedaan mengenai pengajaran bahasa Melayu dan bahasa Indonesia memang perbedaan itu diatur penuh oleh para dosen/pengajar. Pada abad yang lalu ada tata bahasa Melayu, seperti *Kamus Melayu-Prancis*. Perangkat alat pelajaran itu sudah ada. Sekarang ini pun ada setelah seratus tahun, tetapi sangat berbeda. Yang marik ialah alat-alat pelajaran itu disusun oleh orang Prancis sendiri untuk dapat memperhatikan kesulitan yang khas yang dihadapi oleh orang Prancis. Jadi, misalnya ada beberapa buku yang memakai metode yang menggunakan 20 percakapan yang dilakukan oleh penutur asli Indonesia yang kemudian percakapan itu dibahas dari berbagai sudut pandang. Pokok bahasan adalah tata bahasa Indonesia. Dari situ tampak mana pokok bahasan tata bahasa yang paling sulit untuk orang Prancis. Andaikata digunakan sebuah metode yang disusun untuk mahasiswa yang berbahasa Inggris atau yang berbahasa Indonesia, tentu metode yang digunakan akan berbeda. Jadi, metode yang digunakan difokuskan pada kesulitan yang dihadapi oleh orang Prancis sendiri.

2. Penanya: Widodo H.S., IKIP Malang

a. **Pertanyaan:**

Sebagian besar informasi tadi hanya mengenai sejarah munculnya program bahasa Indonesia di Italia dan di Prancis. Keterbatasan waktu informasi mengenai proses pengajaran itu sendiri kurang kami peroleh secara cukup. Oleh karena itu, kami ingin menanyakan hal-hal lain yang terdapat pada kedua program tersebut, terutama dilihat dari segi pembelajar atau perilaku pembelajar. Saya melihat bahwa program yang sama, yaitu pengajaran bahasa Indonesia, dengan sarasannya berbeda, yaitu murid dari Italia dan Prancis. Mungkin yang cukup memberikan pembeda adalah bagaimana karakteristik perilaku pembelajarannya dalam hal proses belajar, bukan perilaku orang Prancis bagaimana, orang Italia bagaimana. Kemudian, karena masalah ini adalah masalah pengajaran yang akan berkaitan dengan pengembangan program itu sendiri, adakah dari kedua lembaga itu upaya pengembangan atau prospek program pengajaran bahasa Indonesia, baik di Italia maupun di Prancis karena saya melihat akhir-akhir ini terjadi perubahan penyikap terhadap Indonesia. Tidak bisa tidak implikasinya ada terhadap bertambah atau berkurangnya jumlah atau minat pembelajar asing di Italia dan Prancis terhadap bahasa Indonesia?

b. **Jawaban:**

1) Faizah Soenoto Rivai

Saya akui memang isi makalah saya disesuaikan dengan tema kongres bahasa ini. Jadi, kebanyakan yang saya bicarakan adalah yang berkaitan dengan sejarah dan secara umum mengenai pembelajar, tempat belajar,

dan motivasinya. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam undangan yang kami terima, yaitu persyaratan isi penulisan makalah. Mengenai metode yang lebih terperinci sudah pernah saya bawakan pada kongres yang diadakan oleh BIPA. Saya kira kongres BIPA merupakan tempat yang lebih tepat untuk membicarakan masalah ini. Kemudian, mengenai segi perilaku, memang ada akibat yang kami peroleh dari perkembangan keadaan politik yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, tetapi tidak seburuk apa yang kami duga karena pada umumnya entah karena kebetulan atau tidak, mereka yang belajar bahasa dan sastra Indonesia itu betul-betul menghayati dan mencintai pelajaran bahasa Indonesia. Jadi, dapat kami katakan bahwa waktu memulai pengajaran banyak waktu dihabiskan untuk memberikan pelajaran sejarah, geografi, kebudayaan Indonesia. Kami berikan pengetahuan ini karena pengetahuan siswa nol. Jadi, saya juga harus memulai pengajaran dengan memberikan sejarah linguistik, kebudayaan, dan bahasa. Karena siswa ingin tahu lebih mendalam, mereka akhirnya ingin mempelajari bahasa Indonesia. Saya akui bahwa tahun ini ketika Indonesia dilanda peristiwa yang kurang menyenangkan, tetapi peristiwa yang terjadi itu justru menambah jumlah mahasiswa saya.

2) **Henri Chambert-Loir**

Saya sekarang tidak dapat melihat perkembangan di Prancis karena kami berada di Jakarta. Pada mahasiswa yang bekerja di Prancis, selain diajarkan bahasa Indonesia, mereka juga diajarkan sastra Indonesia, sejarah, agama islam, ilmu bumi, dan lain-lain. Itu berarti bahwa minat mereka tidak terbatas pada bahasa Indonesia. Mereka sangat perhatian terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Mereka dapat bereaksi, berdemonstrasi, unjuk rasa ke jalan, tetapi tidak pernah mere berhenti belajar bahasa Indonesia. Jadi, hal itu tidak berpengaruh langsung terhadap pelajaran bahasa.

3. **Penanya: I Wayan Bawa, Universitas Udayana, Denpasar**

a. **Pertanyaan:**

Saya ingin mengetahui motivasi mahasiswa untuk belajar bahasa Indonesia. Apakah ingin mengetahui politik, kebudayaan Indonesia atau memang ingin tahu bahasa Indonesia?

b. **Jawaban:**

1) **Faizah Soenoto Rivai**

Sesuai dengan jenis pembelajaran mahasiswa, mereka mempunyai motivasi ilmiah dan motivasi praktik. Mahasiswa jurusan sosial politik mempelajari bahasa Indonesia untuk keperluan studinya. Secara umum harus saya akui bahwa mereka ingin mempelajari bahasa Indonesia karena mereka menganggap bahwa bahasa Indonesia itu mudah dipelajari jika dibandingkan dengan mempelajari bahasa Cina atau Jepang.

2) Henri Chambert-Loir

Motivasi mahasiswa yang ingin mempelajari bahasa Indonesia sangat beragam. Ada yang 'superfisial', yaitu mereka pernah berkunjung ke Indonesia sebagai wisatawan, jatuh cinta kepada keindahan alam Indonesia ataupun jatuh cinta kepada Indonesia. Hal ini membuat mereka ingin belajar lebih banyak tentang Indonesia. Tetapi, ada juga yang mempunyai pandangan atau visi masa depan yang lebih luas yang betul-betul ingin mempelajari bahasa Indonesia untuk penelitian ataupun untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang bahasa Indonesia. Jadi, tidak ada motivasi tunggal, tetapi ada bermacam-macam maksud dan alasan.

4. Penanya: Yohanes Karmin, Universitas Sanata Darma, Yogyakarta

a. Pertanyaan:

Apa kesulitan yang dialami dalam menerapkan kurikulum pembelajaran bahasa Indonesia bahan pengajaran atau evaluasinya?

Saya membayangkan bahwa orang asing yang mempelajari bahasa Indonesia tidak kesulitan karena bahasa Indonesia begitu sederhana tidak mengalami perubahan kata kerja, kata benda, dan kata yang lainnya. Tetapi, Bapak mengatakan pembelajar Prancis mengalami kesulitan dalam afiksasi bahasa Indonesia. Saya mohon keterangan selain afiksasi juga konstruksi kalimat.

b. Jawaban:

1) Faizah Soenoto Rivai

Kesulitan itu pada umumnya tidak ada kecuali dalam pelafalan gugus konsonan *ng* pada awal kalimat, misalnya *nga-nga*, dan konsonan *h* yang tidak dilafalkan, misalnya *Hadi* dilafalkan /adi/. Mengenai kalimat, karena kalimat itu tampak sederhana, mereka mengalami kesulitan untuk memahaminya, misalnya dalam kalimat *Saya mau ke Roma* yang tak mempunyai verba *pergi*. Mereka bingung dengan konstruksi kalimat tidak baku ini. Mereka sudah mempelajari dari kecil struktur kalimat yang teratur.

2) Henri Chambert-Loir

Bahasa Indonesia tidak dapat dikatakan bahasa yang mudah dipelajari. Itu tidak benar karena bahasa Indonesia sama mudah atau sulitnya dengan bahasa-bahasa lainnya. Memang, kalau baru belajar permulaan mudah, tetapi kalau sudah belajar lebih lanjut tidak mudah lagi, sama sulitnya dengan mempelajari bahasa lainnya. Kesulitan mempelajari afiksasi, dalam bahasa Prancis juga ada awalan pada kata kerja bisa didefinisi seperti pada kata kerja bahasa Indonesia. Namun, sistem derivasi ini telah beku. Oleh karena itu, mereka sudah tidak terbiasa dengan bentuk awalan dan akhiran atau menciptakan kata baru dari kata dasar.

5. Penanya: Eko Djuniarto, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa, Jakarta

a. Pertanyaan:

Saya amati di Indonesia pengajaran bahasa Prancis telah menggunakan berbagai metode dan berbagai buku pelajaran. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sistem pengajaran bahasa Indonesia di Prancis. Apakah orang-orang Indonesia juga menciptakan metode pengajaran yang lebih bervariasi atau orang Prancis itu sendiri yang menciptakan metode mereka. Lalu, memang kalau kita lihat persepsi, kemampuan, motivasi saling terkait. Bagaimana kemampuan pembelajar Prancis yang mempelajari bahasa Indonesia dibandingkan dengan pembelajaran Indonesia yang mempelajari bahasa Prancis. Siapa yang lebih cepat menguasai kemampuan berbahasa itu?

b. Jawaban:

Mengenai buku-buku teks yang disusun di sana dalam bahasa Prancis disusun oleh orang Prancis dan orang Indonesia. Ternyata yang menjadi dosen utama adalah pasangan suami istri Pierre Labrousse dan Farida Soemargono. Mereka menyusun seperangkat buku pelajaran, yaitu dua buku Metode, satu Tata Bahasa, dan dua Kamus, Prancis-Indonesia, Indonesia-Prancis. Mengenai perbandingan orang Indonesia yang belajar bahasa Prancis dengan orang Prancis yang belajar bahasa Indonesia relatif ada yang cepat menguasai dan ada yang kurang cepat, baik itu orang Prancis maupun orang Indonesia.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA UNTUK PEMBELAJAR ASING DI THAILAND

Sumalee Nimmanupap

Universitas Ramkhamhaeng, Bangkok, Thailand

1. Pendahuluan

Universitas di Thailand terdiri atas dua jenis, yaitu universitas negeri dan universitas swasta. Saat ini terdapat 23 universitas negeri, ada satu lagi yang masih di dalam proses pembukaan untuk tahun akademik 1999, dan 24 universitas swasta. Universitas negeri dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu universitas biasa yang mewajibkan adanya ujian masuk/ujian saringan setelah tamat tingkatan enam (setingkat SMA) dan universitas terbuka. Universitas terbuka ialah universitas yang dapat menerima semua calon mahasiswa yang sudah lulus tingkatan enam.

Dari sejumlah 24 buah universitas negeri ini, terdapat dua buah universitas terbuka, yaitu Universitas Ramkhamhaeng (UR) dan Universitas Sukhothai-thanmathirat. Kondisi dua buah universitas terbuka ini berlainan, yakni Universitas Ramkhamhaeng yang dibangun terlebih dahulu merupakan universitas biasa yang menyelenggarakan pengajaran bermacam-macam program mata kuliah di dalam kelas yang berkapasitas antara 40--1.000 orang mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa Universitas Ramkhamhaeng bebas untuk menghadiri waktu perkuliahan di kelas ataupun tidak, tetapi mereka diwajibkan mengambil ujian pada ujung semester. Tugas para dosen adalah sekurang-kurangnya menyediakan catatan, membuat buku teks, mengajar, membuat naskah soal ujian, mengawasi ujian, mengoreksi, dan memberi penilaian. Selain membuat buku teks, dosen-dosen juga harus melakukan penelitian ilmiah dalam bahasa bidangnya masing-masing.

Adapun satu universitas terbuka yang lain lagi adalah Universitas Sukhothai-thanmathirat yang merupakan universitas korespondensi; tidak ada proses belajar di kelas secara langsung. Oleh karena itu, pekerjaan dan tugas dosen di antara dua buah universitas ini berlainan sekali.

2. Bahasa Malaysia (Melayu)/Bahasa Indonesia

Dalam pandangan orang Thai, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia (BI) adalah bahasa yang sama. Dalam sastra Thai, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu (BM) dikenali sebagai bahasa *Jawa* dan biasanya ditulis seperti bahasa Jawa-Melayu. Pada zaman Ayudhaya kira-kira tahun 1750, terdapat sastra Jawa yang masuk dan disukai orang Thai ialah cerita Panji yang mempunyai beberapa versi. Cerita-cerita Panji yang diserap menjadi sastra Thai yang penting adalah versi Cerita Dalang dan Cerita Inau. Kedua versi ini digunakan untuk berlakon yang asalnya dari dalam istana dan semua pelakornya wanita. Namun, versi cerita Inaulah yang lebih populer dan masih dimainkan hingga sekarang.

Dari cerita Panji tersebut daftar kata panji diserapkan dalam bahasa Thai, seperti *bulan, bunga, bungarampai, burung, ratu, raden, sataman (setaman), dan tunangan*. Daftar kata tersebut telah dimasukkan dalam *Kamus Rajabandittayasathan* yang merupakan bahan rujukan utama. Daftar kata bahasa Melayu tersebut juga diterangkan sebagai kata pinjaman dari bahasa Jawa. Hal ini berarti bahwa bahasa Jawa ialah bahasa Indonesia yang sama dengan bahasa Melayu dan bahasa Malaysia bagi orang Thai umum, bukan istilah dalam bidang akademik atau bidang linguistik. Setengah orang juga berpendapat bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempunyai kebudayaan tinggi. Oleh karena itu, semua pengajaran bahasa Melayu yang sudah ditawarkan di negara Thai, digunakan baik bahasa Melayu, bahasa Malaysia, maupun bahasa Malay. Hal ini karena sudah direncanakan sejak awal untuk menawarkan bahasa negara tetangga untuk mahasiswa Thai yang berminat sebagai pengajaran bahasa asing, bahasa minor, dan mata pelajaran pokok. Negara tetangga yang berbatasan dengan negara Thai sebelah selatan, memang negara Malaysia. Inilah diwujudkan bahasa Malaysia dan bahasa Melayu dalam silabus Thai. Sampai saat ini belum ada universitas yang menawarkan pengajaran bahasa Indonesia, tetapi kelihatannya akan segera dibuka di universitas Mahidol sebagai bahasa asing dalam program sarjana bahasa.

Universitas Ramkhamhaeng sendiri sudah mencoba memperkenalkan bahasa Indonesia kepada mahasiswa kami dengan cara menyampaikan sebutan bahasa Melayu baku dan memberikan keduanya, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia dalam daftar kata yang mempunyai persamaan arti, seperti *lapan/delapan, bilik/kamar, polis/polisi, kurusi/kursi* dan menyuruh mereka menonton video yang diperoleh dari kedutaan, atau dari parabola. Itu pun dilakukan jika waktu memungkinkan. Dengan cara ini mereka bisa memperhatikan dan mengetahui perbedaan pengucapan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, beserta kosakatanya. Keuntungan besar juga pada dua tahun ini pihak Universitas Ramkhamhaeng memberi anggaran belanja untuk mengundang seorang dosen dari Universitas Gadjah Mada membantu saya mengajar. Inilah secara langsung untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada para mahasiswa kami.

Simpulannya ialah bahwa pada saat ini di negara Thai tidak dipisahkan antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa Melayu dalam makalah ini akan dimaksud bahasa Indonesia pula.

3. Universitas yang Menawarkan Kursus Bahasa Melayu/Bahasa Indonesia

Bisa dikatakan bahwa hanya 5 universitas negeri saja yang menawarkan program studi bahasa Melayu, yaitu Universitas Chulalongkorn, Universitas Mahidol, Universitas Thaksin, Universitas Prince Songkklanakharin, dan Universitas Ramkhamhaeng. Cara menawarkan program studi ini, biasanya, berperingkat dari program studi bahasa asing, program studi jurusan minor, jurusan mayor, dan sebagai mata kuliah pilihan. Dewasa ini hanya dua universitas di selatan saja yang menawarkan program studi bahasa Melayu sehingga menjadi jurusan mayor, yakni Universitas Thaksin di wilayah Songkhla, dalam bidang bahasa dan sastra, dan di Universitas Prince Songkklanakharin di kampus wilayah Pattani yang menawarkan dua jurusan, yaitu Bahasa Melayu

dan Pengajian Melayu. Selain itu, Universitas Mahidol hanya menawarkan dua mata kuliah untuk pengetahuan bahasa Melayu dasar di bawah program Master Bahasa, sedangkan Universitas Chulalongkorn dan Universitas Ramkhamhaeng menawarkan sebagai program studi bahasa asing, program mata kuliah pilihan dan program studi minor. Bagi mahasiswa Universitas Chulalongkorn, Fakultas Kemanusiaan, diwajibkan mengambil sekira-kiranya 30 kredit dalam bahasa, sastra, dan budaya. Bagaimanapun juga cara menyelenggarakan kelas agak berlainan jika dibandingkan dengan universitas yang lain. Ini karena kondisi Universitas Chulalongkorn berlainan yang akan diterangkan seterusnya.

4. Sejarah Universitas Ramkhamhaeng

Sebelum Universitas Ramkhamhaeng didirikan pada 1971, Thailand sudah lama menderita krisis karena tidak cukupnya tempat belajar selepas tingkatan enam (*grade 12*). Pada masa itu, hanya terdapat 12 buah universitas saja. Akhirnya, dengan usaha yang sungguh berat para pejabat yang berwenang mengizinkan dan mengesahkan akta pendirian Universitas Chulalongkorn. Sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut didirikanlah Universitas Chulalongkorn sebagai '*Pasar Akademik*' atau '*Universitas untuk Massa*' yang bertujuan: tidak membatasi jumlah pemohon yang bisa memenuhi syarat, tidak ada ujian saringan masuk, kehadirannya di dalam kelas tidak diwajibkan dan biaya rendah sekali. Peluang penerimaan masuk ini dibuka, baik untuk para mahasiswa yang ingin ijazah sarjana muda maupun melanjutkan pendidikan mereka saja tanpa ijazah.

Nama universitas sendiri diambil dari nama Raja Ramkhamhaeng Agung (raja yang ketiga zaman Sukhothai). Baginda juga menciptakan abjad Thai yang digunakan hingga kini. Universitas Chulalongkorn terletak di Huamark (Bangkok sebelah timur) dalam ukuran 125 ukuran tanah/ekar dan kampus kedua yang terletak di pinggiran Bangkok sebelah timur laut. Kampus kedua ini untuk mahasiswa tahun pertama saja.

5. Kondisi Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing (BIPA) di Thailand

Pada umumnya, kondisi pengajaran bahasa Melayu/bahasa Indonesia untuk pembelajar asing di Thailand dapat dibagi ke dalam dua kondisi, yaitu di Selatan Thailand (Songkhla dan Pattani) dan di Bangkok (ibu kota). Di Selatan memang agak banyak pembelajar dan semuanya berketurunan Melayu yang kebanyakan bertutur bahasa Melayu dialek di rumah. Sebagian daripada pembelajar sudah mahir dalam bahasa Melayu, dan semuanya belajar bahasa Melayu dengan sungguh-sungguh. Ada juga pembelajar yang sudah tamat tingkat tertinggi dari sekolah pondok/sekolah agama Islam swasta, mahir dalam bahasa Melayu standar, tetapi pengucapannya masih belum baku. Ini disebabkan bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa pengantar dan juga sebagai suatu mata pelajaran. Pembelajar tersebut akan lebih pandai dan cepat menerima ilmu pengetahuan. Yang menggemirakan bahwa hampir semua pembelajar yang tamat tingkat sarjana muda bahasa Melayu dapat pekerjaan dengan gaji lumayan; lebih tinggi daripada bekerja sebagai pegawai/pemerintah kerajaan.

Akan dibicarakan juga kondisi pengajaran di Bangkok di antara universitas negeri biasa, yaitu Universitas Chulalongkorn dan Universitas Mahidol tidak sama dengan kondisi Universitas Terbuka seperti di Universitas Ramkhamhaeng. Kewajiban untuk menghadiri waktu perkuliahan di dalam kelas menyebabkan dosen dan mahasiswa dapat melakukan tugasnya masing-masing.

Universitas Ramkhamhaeng sendiri menawarkan program studi bahasa Melayu sejak tahun 1991 sebagai bahasa asing dan program studi jurusan minor. Akan tetapi, kondisi di Universitas Ramkhamhaeng lain daripada universitas negeri tersebut karena mahasiswa-mahasiswa bebas untuk menghadiri waktu perkuliahan, yakni jumlah mahasiswa di dalam kelas tidak pernah tentu, sebagai contoh untuk mata kuliah ML 101 (Bahasa Malaysia Dasar I) yang mempunyai 78 orang mahasiswa, jadwalnya seminggu sekali dalam 3 jam. Adapun yang hadir di dalam kelas paling banyak ialah 12 orang mahasiswa, dan yang paling sedikit ialah seorang. Meskipun begitu pernah terjadi juga, tidak ada seorang mahasiswa pun yang hadir. Kadang-kadang dalam kehadiran, tiap kesempatan berlainan orang yang hadir. Kondisi seperti ini dianggap hal biasa untuk dosen Ramkhamhaeng sendiri, tetapi dianggap aneh dan berat bagi dosen tamu.

Kondisi di dalam kelas bahasa Melayu di Universitas Ramkhamhaeng yang seperti tersebut di atas menyukarkan dosen yang merencanakan mengajar dengan bahan ajar seperti alat video atau parabola, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, memanglah kondisi dan filsafat sebagai Universitas Terbuka yang unik dan memberi peluang untuk melanjutkan pengajaran mereka hingga tingkat ijazah sarjana muda. Oleh karena itu, para dosen harus sabar, berupaya dan bersemangat; tidaklah berpikir berapa jumlah mahasiswa. Namun, kami tetaplah bimbang juga karena walau bagaimanapun juga, dasar ilmu pengetahuan mereka tidak akan sama jika dibandingkan dengan yang sering datang ke kelas.

6. Kondisi yang Bagaimana yang Diharapkan

Untuk Universitas Thaksin dan Universitas Prince Songkklanakharin, kelihatan kondisi pengajaran bahasa Melayu lebih baik dan mempunyai lebih keuntungan, yaitu sebagai berikut.

- a. Terdapat satu kebijakan Kementerian Hal Ehwal Universitas yang mengutamakan program studi bahasa Melayu di Selatan karena lokasinya dekat dengan sumber bahasa Melayu sehingga memberi anggaran belanja penuh ke sana.
- b. Tenaga pengajarnya cukup dan lebih banyak karena banyak orang setempat yang pandai dalam bahasa Melayu standar walaupun tidak mempunyai ijazah. Jika mau, mengundang dosen penutur asli dari Malaysia juga hal yang mudah. Untuk itu, masalah kekurangan tenaga pengajar tidak dialaminya.
- c. Kebanyakan dosennya adalah orang setempat yang bahasa ibunya bahasa Melayu, dan berpendidikan yang sesuai, berlayak/berijazah dan beragama Islam.

Universitas-universitas di Bangkok kelihatannya mengalami satu masalah yang sama, yaitu kekurangan tenaga pengajar yang layak. Ini karena adanya peraturan untuk mendapatkan seorang pegawai atau pengajar adalah mesti berijazah dalam program studi tertentu yang sesuai dengan tugasnya. Pembelajar yang lulus dari

Universitas Selatan masih belum cukup, kebanyakan mereka bekerja dengan pihak swasta, sebagian lagi pergi ke luar negeri, ataupun bekerja di Selatan sendiri. Berikut ini suatu contoh masalah yang dihadapi oleh Universitas Chulalongkorn hanya mempunyai seorang dosen yang lulus Ph.D. dalam jurusan bahasa Arab, tetapi beliau kebetulan adalah seorang anak Melayu dari Selatan Thai. Untuk itu, beliau ditugaskan mengajar bahasa Melayu sebagai jurusan minor, dan baru-baru ini saja, Universitas Chulalongkorn mendapat salah seorang dosen muda (anak Melayu) yang sedang dikirim untuk belajar Master Bahasa Melayu di Universiti Malaya, Malaysia.

Adapun di Universitas Mahidol, terdapat seorang dosen yang lulus Ph.D. dalam bidang Linguistik Melayu dari Universitas Malaya dan seorang lagi yang lulus Master di tempatnya sendiri dan sedang belajar Ph.D. di Universitas Chulalongkorn. Namun, di Universitas Mahidol hanya menawarkan dua mata kuliah saja maka tidak mengalami masalah seperti di Universitas yang lain.

Sementara di Universitas Chulalongkorn, saya seorang diri yang menyelenggarakan program studi bahasa Melayu sebagai satu bahasa asing dan jurusan minor. Namun, sejak tahun akademi yang lalu, kami mendapat seorang dosen tamu dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta untuk membantu saya mengajar. Ini memberi peluang yang baik untuk pembelajar kami untuk mempelajari dengan penutur asli, terutama bahasa Indonesia. Namun, sayang sekali anggaran belanja untuk mengundang penutur asli bukanlah suatu anggaran tetap, tetapi sementara waktu saja.

Simpulannya di Universitas Chulalongkorn masih kurang tenaga pengajar dan anggaran belanja, bagi mutu bahan ajar seperti, laboratorium bahasa dan alat-alat peraga termasuk parabola dianggap modern dan cukup. Namun, yang dirasakan paling kurang ialah bahan bacaan. Ada beberapa kamus, itu pun sumbangan dari saya pribadi. Selain itu, buku-buku dan makalah-makalah rujukan adalah kepunyaan saya pribadi.

7. Strategi yang Bagaimana yang Perlu Ditempuh

Motivasi pembelajar asing mempelajari bahasa Melayu/bahasa Indonesia di Universitas Terbuka seperti Universitas Chulalongkorn agak sulit. Akan tetapi, masih bisa digerakkan juga, seperti memberi markah 20% bagi pembelajar yang menghadiri penuh masa untuk mata kuliah yang sulit, memberi peluang kepada mereka untuk belajar dengan penutur asli di dalam kelas, dan di laboratorium bahasa. Adapun kerja sama dengan Kedutaan Indonesia di Bangkok yang telah dilakukan adalah untuk mendapat bahan ajar. Untuk kualifikasi tenaga pengajar pula, saat ini sedang mengajukan usulan untuk mendapatkan dosen baru untuk dikirim ke luar negeri agar membuat Master/S2 dalam bidang bahasa Melayu maupun bahasa Indonesia. Selain itu, kami perlu juga bantuan dari badan-badan luar negeri dalam bentuk pembiayaan untuk pembelajar Thai mempelajari bahasa Melayu ataupun bahasa Indonesia di negara-negara bahasa-bahasa itu berada. Selain itu, untuk mengembangkan bahasa Indonesia di Thailand, Universitas Chulalongkorn bekerja sama dengan Organisasi Kepariwisatawan di Thailand menyelenggarakan kursus pemandu wisatawan dalam bahasa Indonesia. Angkatan pertama sedang dijalankan pada semester I ini.

8. Penutup

Pengajaran bahasa Indonesia untuk pembelajar asing di Thailand kelihatannya menarik perhatian pihak pemerintah walaupun secara perlahan-lahan. Ini mungkin karena sistem birokrasi dan juga masalah anggaran belanja. Namun, kami mencoba semampunya untuk membuka program studi khusus, yang bukan reguler ditujukan untuk umum yang berminat dalam bahasa Melayu/bahasa Indonesia dengan biaya yang memang lebih tinggi jika dibandingkan dengan kursus reguler. Hal ini memang sukar sekali untuk saya seorang diri sebagai dosen tetap di Universitas Chulalongkorn. Oleh karena itu, segala sumbangan dari Kongres Bahasa yang agung di sini akan memperpanjangkan semangat saya untuk memperkembangkan bahasa Melayu yang kita cintai bersama.

Daftar Pustaka

- International Relations Sub-Division, Planning Division Ramkhamhaeng University.
 Ramkhamhaeng University: The University for the Mass. Bangkok: 1997.
 -----, *Ramkhamhaeng University Catalog 1997-1998*. 1997. Bangkok.
 The Ministry of the University Affairs. 1998. *News Letter for January 1998*.
 Bangkok.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok E2
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 14.20--15.10
Judul Makalah	: Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Thailand
Penyaji	: Sumalee Nimmanupap
Pemandu	: Elfrida W.S. Sumampouw
Pencatat	: a. I Wayan Sudana b. Erlis Nur Mujiningsih
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Widodo, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

- 1) Ragam bahasa yang Ibu gunakan adalah bahasa Melayu standar.
- 2) Apakah ragam bahasa yang Ibu gunakan itu bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Dengan kata lain, apakah condong ke bahasa Melayu atau bahasa Indonesia?
- 3) Apabila ada hubungan kerja Ibu dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI), program yang Ibu buat akan lebih mudah dilaksanakan. Bahan ajar akan Ibu peroleh di sana, minimal informasi mengenai Indonesia.

b. Jawaban:

- 1) Yang dipakai adalah ragam bahasa Melayu karena kami bertetangga dengan Malaysia.
- 2) Orang di sana tidak membedakan bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia. Orang linguistik sajalah yang membedakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Di dalam silabus, bahasa yang ada hanya bahasa Melayu. Bahasa Melayu di selatan disebut juga sebagai bahasa Malaysia. Orang-orang di selatan memang menganggap bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Malaysia dan juga bahasa Indonesia. Hanya pada waktu akhir-akhir ini saja orang-orang yang berpendidikan, seperti dosen-dosen yang belajar bahasa Inggris, mempelajari bahasa Indonesia. Kami memiliki dosen tamu dari Universitas Gadjah Mada.
- 3) Kami sedang memproses untuk membuka Jurusan Bahasa Indonesia. Kami memperoleh bantuan dari berbagai pihak. Hal ini kami lakukan perlahan-lahan karena kondisi negara kami juga dalam kondisi krisis. Saya mencoba sekuat tenaga untuk dapat membukanya, tetapi waktu dan usia saya terbatas.

2. Penanya: Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

a. Pertanyaan:

- 1) Saya tertarik dengan penjelasan Ibu. Tampaknya di sana, bahasa yang lebih populer adalah bahasa Melayu karena Thailand bertetangga dengan Malaysia.
- 2) Saya tidak sependapat dengan Ibu kalau bahasa Indonesia disamakan dengan bahasa Malaysia. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia serumpun, tetapi tidak sama. Contohnya, saya mengalami kesulitan pada saat mengoreksi terjemahan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia yang dikerjakan oleh orang Malaysia yang menggunakan bahasa Melayu. Pilihan kata bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia berbeda.
- 3) Saya mengharapakan sekali nanti di Thailand yang diajarkan adalah bahasa Indonesia dan bukan bahasa Malaysia. Dengan adanya tenaga dari UGM, informasi tentang perbedaan antara bahasa Indonesia dan Malaysia dapat diperoleh lebih jelas.
- 4) Saya sangat sedih ketika melihat keadaan mahasiswa di sana karena mahasiswa yang hadir dalam perkuliahan hanya satu atau dua orang. Kami sebagai pengajar membuat aturan bahwa mahasiswa yang tidak hadir akan mendapat sanksi.

b. Jawaban:

Mahasiswa di tempat saya mengajar tidak dapat diperlakukan seperti itu karena universitas kami bersifat terbuka. Mereka dapat belajar di rumah atau di tempat lain (universitas lain) dan tidak ada masalah. Di UR mahasiswa tidak dapat diperlakukan secara kejam.

3. Penanya: Amir Hakim Usman, IKIP Padang

a. Pertanyaan:

- 1) Saya belum mendengar Ibu menjelaskan kerja sama antara universitas di Thailand dan universitas di Indonesia. Ibu baru mengatakan bahwa Ibu sedang mengembangkan program tersebut. Untuk itu, baik sekali apabila diadakan kerja sama antara Thailand dan Indonesia. Sebagai contoh, Universitas Andalas sudah melakukan kerja sama dengan Universitas Leiden. Setiap tahun Universitas Leiden mengirimkan mahasiswanya ke Universitas Andalas minimum 10 orang. Di sana ada kursus reguler yang benar-benar mengambil Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ada kursus yang tidak reguler dan diikuti oleh mahasiswa Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, FISIP, dan sebagainya. Mereka diberi motivasi oleh dosennya agar tertarik untuk mendalami masalah Indonesia. Oleh sebab itu, setiap tahun dengan dikoordinasi oleh Universitas Leiden, mereka yang tertarik mendalami bahasa Indonesia, baik penelitian tentang Indonesia, hukum, maupun ekonomi, dikirim ke Indonesia. Lalu, diadakan kerja sama yang resmi dengan Universitas Andalas. Setiap tahun mulai 1987, kami melaksanakan pendidikan

untuk mereka dalam dua bentuk. Yang pertama adalah kursus intensif bahasa Indonesia karena mereka di sana sudah mendapat pengetahuan dasar tentang bahasa Indonesia. Jadi, tinggal mengintensifkan. Hal ini akan berguna untuk dapat mempermudah mereka dalam membaca bahasa pustaka Indonesia.

- 2) Apakah ada ide Ibu untuk mengadakan kerja sama seperti itu? Kalau memang ada, tidak ada salahnya kerja sama itu dilakukan dengan Universitas Andalas.

b. Jawaban:

Kerja sama saat ini dalam bentuk sepihak. Kerja sama akan menjadi dua belah pihak apabila UGM membuka Jurusan Bahasa Thai. Saat ini yang kami perlukan adalah dosen tamu yang dapat mengajarkan Bahasa Indonesia. Kami mengundangnya dengan bayaran penuh. Bayaran ini bukan dari kerajaan, kementerian, melainkan dari universitas. Jadi, anggarannya tidak tetap. Jadi, kerja sama baru dilakukan sepihak sebab belum ada universitas di sini yang membuka jurusan Thai atau Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa membuka bahasa Thai.

4. Penanya: Darmansyah, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

a. Pertanyaan:

- 1) Bahasa Indonesia dan Thai adalah bahasa yang tidak serumpun. Sudah tentu ada perbedaan dalam hal struktur dan yang saya ketahui ada perbedaan antara kata yang bernada dan tidak bernada. Yang saya tanyakan, adakah kesukaran dalam mengajarkan bahasa Indonesia?
- 2) Apakah kehadiran yang minim itu karena adanya anggapan bahwa belajar bahasa Melayu itu mudah dan saya ingin tahu bagaimana hasilnya?

b. Jawaban:

- 1) Bahasa Indonesia dan Thai memang tidak serumpun. Kesulitan dalam bahasa Thai agak banyak juga. Ada kesulitan bunyi /ks/ dalam daftar bahasa Arab. Dalam bahasa Thai /ks/ dibunyikan /k/ yang tidak kuat, dan juga /js/. Bunyi /r/ tidak kuat. Mengenai tata bahasa, terutama aturan susunan kata tidak ada kesulitan. Susunannya adalah *menerangkan-diterangkan* (MD). Aturan itu tidak sama dengan aturan bahasa Inggris. *Baju merah* bukan *merah baju*. Kesulitan-nya terletak pada afiksasi atau pengimbuhan. Bahasa Thai adalah bahasa kata-tunggal. Jadi, bahasa Thai tidak mengenal imbuhan.
- 2) Yang kedua, tentang kehadiran mahasiswa. Pada awal semester kelas penuh. Setelah itu, mahasiswa berangsur-angsur hilang. Mereka datang lagi setelah dua minggu menjelang ujian. Alasan ketidakhadiran mereka adalah menolong orang tua di rumah. Mahasiswa kebanyakan datang dari Thailand Selatan. Mereka keturunan Melayu dan sudah belajar bahasa Melayu di pondok. Mereka tinggal di rumah dan datang ke Bangkok untuk ujian. Ejaan mereka masih mengikuti dialek Jawi.

PENGAJARAN BAHASA INDONESIA DI AUSTRALIA

Julia Read

University of New England
New South Wales, Australia

1. Pendahuluan

Tujuan penulisan makalah ini adalah memberikan gambaran kepada para peserta kongres, tenaga ahli bahasa, dan masyarakat Indonesia tentang keadaan dan perkembangan pengajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing (BIPA) di Australia.

Pengajaran BIPA di Australia selalu pasang surut, kadang banyak peminat, kadang lesu. Hal ini mencerminkan keadaan di dalam kedua negara dan juga hubungan di antara keduanya, suatu hal yang tidak mengherankan mengingat kedua negara itu adalah tetangga. Kalau dilihat dari jumlah pembelajar, tidak dapat disangkal bahwa pengajaran BIPA di Australia dewasa ini sedang mengalami 'masa jayanya'. Namun, ada beberapa hal yang mencemaskan.

2. Sejarah Pengajaran BIPA di Australia

Untuk memulai pembahasan ini, sejarah pengajaran BIPA di Australia akan diringkas dengan singkat. *Royal Australian Air Force School of Languages* mungkin pertama menyelenggarakan kursus BIPA pada tahun 1950. BIPA mulai diajarkan di beberapa sekolah menengah sekitar tahun 1955 (di negara bagian Victoria), dan mulai diajarkan di perguruan tinggi pada tahun 1957 di Universitas Sydney, Universitas Melbourne, dan Canberra University College (yang kemudian menjadi Australian National University). Dalam periode pertama ini pemerintahlah yang mendorong usaha mengajarkan BIPA di universitas-universitas tersebut dengan janji untuk membiayainya. Konon ada kesadaran bahwa negara Australia memerlukan sejumlah orang yang mengerti bahasa dan kebudayaan negara tetangga guna menjalin saling pengertian dan hubungan baik. Akan tetapi, dalam periode pertama ini jumlah pembelajar belum banyak.

Mulai sekitar tahun 1964 masyarakat Australia tertarik perhatiannya terhadap Indonesia karena masalah Irian Jaya dan konfrontasi. Pada waktu itu ada persepsi dalam masyarakat Australia bahwa Indonesia merupakan sebuah negara ekspansionis. Sebagai akibat yang tidak terduga, jumlah pembelajar bahasa ataupun sejarah dan politik Indonesia meningkat. Akan tetapi, minat belajar tentang Indonesia itu justru kempes setelah pembentukan pemerintahan Orde Baru menyebabkan keadaan politik semakin tenang.

Sejak tahun 1975 sampai tahun 1988 minat terhadap bahasa Indonesia semakin lesu, seiring dengan penurunan pelajaran bahasa asing lain pula. Periode ini merupakan masa yang paling buruk untuk ahli bahasa di Australia. Gengsi pelajaran bahasa merosot terus. Setiap tahun jumlah murid yang belajar bahasa asing di sekolah menengah dan universitas berkurang.

Pada pertengahan tahun 1980-an Pemerintah Australia memacu pelajaran bahasa asing dengan pelbagai kebijakan dan kiat, mulai dengan gagasan-gagasan dari *Asian Studies Council*. Berbagai studi dan laporan berangsur-angsur menyarankan masyarakat Australia menjadi *Asia-literate* supaya tidak ketinggalan dalam pertumbuhan ekonomi kawasan Asia-Pacific. Pelajaran bahasa-bahasa Asia menerima dorongan luar biasa pada periode ini. Sayangnya, pengajaran BIPA berkembang lebih pelan daripada bahasa Jepang dan Cina. Mengapa demikian? Kasarnya, Indonesia masih dianggap negara miskin yang tidak mampu menjadi pasaran untuk barang-barang ekspor Australia. Jadi, motivasi untuk menguasai bahasa Indonesia pun agak lemah. Sejarah yang diuraikan di atas dapat dibaca lebih mendetil dalam Sneddon, (1993) dan NLLIA, (1993).

Pada pertengahan tahun 1990-an popularitas bahasa Indonesia mulai meningkat. Ternyata semakin makmur keadaan ekonomi Indonesia, semakin tertarik masyarakat Australia untuk lebih mengenalnya. Kecenderungan tersebut dibantu oleh Kirkpatrick, seorang pakar yang mengusulkan dalam tulisannya di beberapa jurnal supaya bahasa Indonesia menjadi bahasa Asia terpilih dalam pendidikan sekolah seluruh Australia, menggantikan bahasa Cina dan Jepang (Kirkpatrick 1995a, 1995b). Argumentasi Kirkpatrick berdasarkan beberapa pokok berikut.

- a. Bahasa Cina dan Jepang lebih sulit dipelajari dengan akibat murid sekolah tidak mungkin mencapai prestasi yang memadai.
- b. Indonesia sudah merupakan mitra perdagangan Australia yang ke-10 besarnya dan diperkirakan akan menjadi pasaran yang ke-5 atau ke-6 dalam waktu dekat.
- c. Dari segi kebudayaan, melalui pelajaran Bahasa Indonesia murid-murid Australia dapat mengenal agama lain, bukan hanya agama Islam, tetapi empat agama lain yang terbesar di dunia, suatu pengalaman yang sangat bernilai.
- d. Keanekaragaman budaya Indonesia juga merupakan kesempatan untuk belajar berbagai kebudayaan sekaligus dan juga mempelajari toleransi, yang merupakan ciri khas masyarakat Indonesia itu.
- e. Musik, seni rupa, dan drama Indonesia (misalnya wayang, batik, dan gamelan) bersifat hidup dan menarik bagi pembelajar muda.
- f. Tulisan bahasa Indonesia memakai huruf yang sama dengan bahasa Inggris, ejaannya fonetik, dan pengucapannya juga tidak terlalu sulit bagi penutur bahasa Inggris.
- g. Karena kebanyakan orang Indonesia juga belajar bahasa Indonesia sebagai bahasa kedua, mereka terbiasa berinteraksi dengan pembicara yang belum fasih dan bersikap ramah serta bertoleransi terhadap pembelajar. Hal ini berarti pembelajar Australia bisa berkomunikasi dengan penutur bahasa Indonesia dengan lebih mudah dan lebih sukses dibandingkan dengan bahasa Asia lainnya. Hal ini biasanya meningkatkan motivasi pembelajar.

Belum tentu semua argumentasi Kirkpatrick di atas benar, tetapi dalam Read (1996) saya mengemukakan pendapat bahwa argumentasinya akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan pengajaran BIPA di persekolahan Australia. Sejak waktu itu, jumlah pelajar di sekolah dan juga di perguruan tinggi meningkat terus. Sebagai

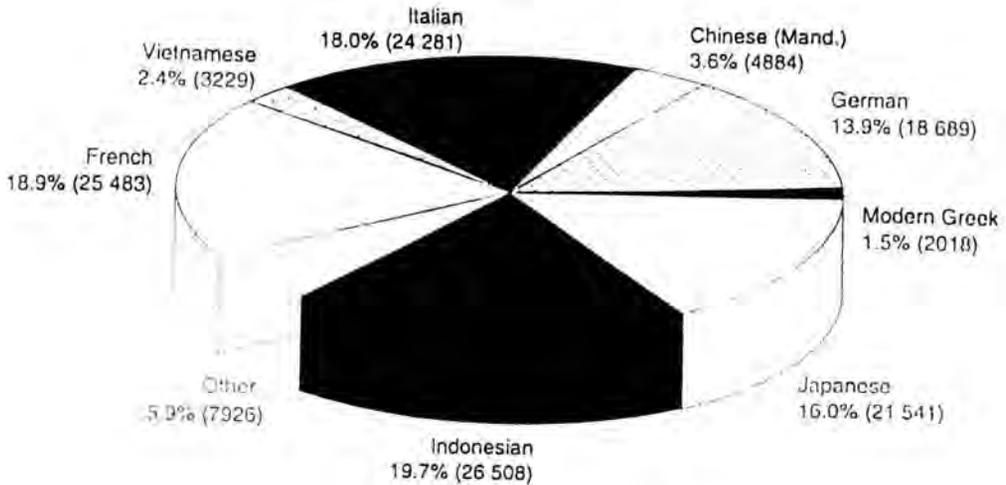
contoh, di negara bagian Victoria, pada akhir tahun 1997, hampir 100.000 murid belajar BIPA di sekolah dasar dan menengah. Ini merupakan jumlah terbesar jika dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. BIPA diajarkan di 530 sekolah dasar pemerintah di Victoria pada tahun 1997. Jumlah muridnya 73.000 (Tabel 1). Dalam sekolah menengah pemerintah di Victoria jumlah sekolah tempat BIPA diajarkan 171, dan muridnya berjumlah 26.500, sebagai diperlihatkan pada Gambar 1 (*Department of Education, 1998*).

TABEL 1
JUMLAH MURID YANG BELAJAR BAHASA ASING DI
SEKOLAH DASAR PEMERINTAH, NEGARA BAGIAN
VICTORIA, 1997

	Prep	Year 1	Year 2	Year 3	Year 4	Year 5	Year 6	Total
Indonesian	7765	8299	8275	11495	11843	12559	12814	73050
Italian	8973	9326	9140	10967	11589	11035	11270	72300
Japanese	6957	7038	6946	8688	8945	9050	9028	56652
German	2690	2907	2831	3693	3622	3751	3538	23032
French	1597	1648	1336	2019	2320	2427	2404	13951
Chinese (Mandarin)	763	732	861	914	919	868	897	5954
Modern Greek	400	443	363	385	384	392	417	2784
Spanish	186	238	280	318	336	363	360	2081
Auslan	215	291	293	244	227	210	233	1713
Vietnamese	174	268	140	169	214	206	234	1405
Turkish	112	116	121	97	146	141	120	853
Arabic	63	64	59	74	63	61	59	443
Macedonian (Slavonic)	49	32	27	69	53	45	122	397
Korean	43	44	32	26	45	33	28	251
Croatian	0	12	10	16	12	21	21	92
Koorielanguages	6	6	6	6	6	7	9	46
Hebrew	1	4	7	3	6	11	11	43
Total enrolments	29994	31468	30927	39183	40730	41180	41565	255047

Sumber: Department of Education, 1998

GAMBAR 1
PEMBAGIAN PENDAFTARAN PEMBELAJAR BAHASA DI SEKOLAH
MENENGAH DI NEGARA BAGIAN VICTORIA, 1997



Sumber: Departemen of Education, 1998

Di Northern Territory, bahasa Indonesia sudah lama diajarkan sebagai bahasa kedua, mencerminkan lokasinya yang dekat dengan Indonesia dan eratnya hubungan kedua wilayah itu. Di keseluruhan Australia, bahasa Indonesia sudah mencapai posisi keempat, setelah bahasa Jepang, Perancis, dan Jerman. Sangat disayangkan, saya tidak sempat mengumpulkan statistik dari perguruan tinggi untuk makalah ini, tetapi jumlah mahasiswa yang menempuh kursus BIPA juga diperkirakan menempatkan posisi keempat.

Sebab-sebab pembelajar Australia di perguruan tinggi berminat akan bahasa Indonesia adalah hal yang menarik bagi saya karena saya sedang menjalankan riset mengenai pengajaran BIPA di Australia, dengan topik khusus program TIFL (*Teaching Indonesian as a Foreign Language*), hasil sebuah proyek yang telah dilaporkan dalam Sneddon 1993, Reeve 1994, dan Reeve 1995. Data saya belum tersusun semuanya, tetapi dari puluhan wawancara dengan mahasiswa-mahasiswa dari beberapa universitas, saya berkesimpulan bahwa sebagian besar dari mereka berkeinginan dapat bergaul dengan orang Indonesia. Ini merupakan motivasi utamanya. Minat terhadap antropologi, bisnis, kesusastraan, lingkungan, linguistik, politik, atau sejarah Indonesia juga ada, tetapi tidak merupakan pendorong utama. Pemuda ingin bergaul dengan pemuda seberang. Suatu perasaan tulus dan naluriah yang dapat dimaklumi dan rupanya dibalas oleh sesamanya.

Hal ini ada implikasi untuk pengajaran bahasa. Kesan saya, mahasiswa

mempunyai banyak alasan--terkadang yang aneh-aneh--untuk mulai mempelajari bahasa Indonesia, tetapi mereka cenderung meneruskan pelajaran itu kalau pengajarannya terasa relevan dan hidup, dan cenderung menjauhi kuliah yang terlalu menekankan sastra kuno atau tata bahasa yang bertele-tele, ataupun yang berorientasi semata terhadap masalah ekonomi dan politik.

3. Pengajaran BIPA di Sekolah Dasar dan Menengah

Dari keterangan di atas jelaslah bahwa keunggulan pengajaran BIPA di Australia adalah penerapannya di segala tingkat pendidikan. Dalam hal ini Australia tidak ada saingannya. Ini dapat dilihat dari banyaknya dan aneka ragamnya bahan kurikulum untuk pengajaran BIPA di sekolah dari penerbit-penerbit Australia, yang belakangan ini mencurah di mana-mana. Sebuah daftar dari toko buku spesialis Nusantara Indonesian Bookshop di Melbourne terlampir pada makalah ini sebagai bukti kekayaan bahan pelajaran BIPA untuk anak-anak yang tersedia di pasaran.

Sebagai contoh, Gambar 2 memperlihatkan sebuah halaman dari buku teks *Wombi di Restoran* (aslinya berwarna). Wombi adalah seekor wombat, yaitu sejenis binatang asli Australia, yang menjadi tokoh utama dalam kursus pelajaran BIPA yang cukup populer dengan anak-anak SD. Kursus ini terdiri dari tiga buku teks, tiga buah kaset dan tiga buku pedoman guru yang (menurut guru-guru) sangat berguna. Contoh satu lagi, Gambar 3 dan Gambar 4 memperlihatkan sepasang kartu dari paket *masa kecil*

Wombi suka makan
nasi goreng.

Apakah kamu suka
makan nasi goreng?



GAMBAR 3
KARTU CERITA DARI PAKET 'MASA KECIL'



Istirahat

Murid sekolah dasar ini sedang beristirahat.

Para murid tidak beristirahat di luar tetapi mereka beristirahat di dalam kelas. Mengapa?

Beberapa murid duduk di bangku dan beberapa murid berdiri di belakangnya. Mereka semua kelihatan gembira.

registrasi to take a break
mandi to bathe
murid to student
sekolah to school
sekolah dasar to primary school
waktu to time
istirahat to rest

Kata-kata baru

di dalam to inside
kelas to class
mengapa to why
beberapa to several
bangku to bench
berdiri to stand

di belakang to behind
gembira to happy
tetapi to but
duduk to sit
para to group
kelihatan to appear to be
di luar to outside

GAMBAR 4
KARTU LEMBARAN KERJA DARI PAKET 'MASA KECIL'

Activity Worksheet: Istirahat.

Aktivitas pertama: Number task.

Draw ('gambarlah!'): enam anak
empat bangku
sembilan buku
beberapa kursi
lima tas

Aktivitas kedua: Writing task.

Draw a picture of yourself and your friends at lunchtime at school. Write two or three sentences in Indonesian telling us what you are doing.

Aktivitas ketiga: Wordfun task.

Practise using 'tetapi' ('but') in sentences like the one following. Make up five of your own:

Saya suka coklat, **tetapi** saya tidak suka durian.

Aktivitas keempat: Drawing task.

These words are called 'prepositions' and tell us the place of things.

di luar : outside
di dalam: in, inside
di belakang: behind
di atas: on top

Draw a picture that shows four different things which are clearly illustrating these four positions and label it in Indonesian.

Aktivitas kelima: Wordgap task.

Read the story carefully, then fill in the missing English words in this translation so that it makes sense.

Students from this _____ school are having recess. The groups of _____ are not having a break outside _____ they are having a break inside the class. _____?
_____ students sit at the _____ and several students _____ behind them. They all appear to be _____.

Useful Information:

'lah' is frequently used on the end of a command in written Indonesian. It is often used with "tolong" to make it a more polite request. It could loosely be translated as 'please'. e.g. 'Tolonglah duduk' means 'please sit'.

yang diciptakan sebagai bahan pelajaran tambahan guna dipakai secara mandiri oleh murid kelas SD (aslinya berwarna). Murid yang masih kecil hanya membaca kalimat pertama dan mengerjakan tugas pertama. Kemudian, yang sedikit maju membaca kalimat kedua dan mengerjakan tugasnya. Yang paling pintar membaca kalimat yang ketiga dan mengerjakan tugas-tugas berikutnya.

Untuk melanjutkan pelajaran BIPA selama sekolah menengah, sudah ada tiga paket pelajaran yang memadai, yaitu *Kenalilah, Ayo!*, dan *Bahasa Tetanggaku*. Ketiga buku teks tercetak dengan warna. *Kenalilah* ditujukan kepada sekitar kelas 4 sampai kelas 8, sedangkan *Ayo!* untuk sekitar kelas 7 sampai 9. *Bahasa Tetanggaku* cocok untuk kelas 8 sampai 12, bahkan dipakai di beberapa universitas. *Kenalilah* dan *Ayo!* mempunyai pedoman guru dan kaset. *Ayo!* dan *Bahasa Tetanggaku* dilengkapi dengan *workbook* (buku latihan yang ditulisi oleh siswa).

4. Proyek TIFL

Sektor perguruan tinggi masih mengalami kekurangan bahan pengajaran yang memadai walaupun kehadiran produk-produk dari proyek TIFL (yang tersebut tadi) mulai membantu. Proyek TIFL adalah sebuah proyek besar yang berjalan tahun 1992--1994 dan telah menghasilkan beberapa produk, antara lain, sebagai berikut.

- a. *Indonesian Reference Grammar* karya James Sneddon (1995) merupakan referensi tata bahasa Indonesia dalam bahasa Inggris yang mutakhir.
- b. *International Second Language Proficiency Ratings (ISLPR)* untuk bahasa Indonesia (umum) dan untuk guru bahasa Indonesia. Geoff Woollams dari Griffith University mengembangkan versi bahasa Indonesia dari versi bahasa Inggris yang disusun oleh David Ingram dan Elaine Wylie dari Griffith University. ISLPR dapat digunakan untuk menilai kemahiran penutur dan pembelajar BIPA dengan lebih akurat dan menambah perbekalan tenaga ahli bahasa Indonesia.
- c. *TIFL Tertiary Curriculum Materials* adalah bahan-bahan pengajaran untuk pembelajar dewasa tingkat awal dan lanjut, diciptakan dan dibuat di University of New South Wales, di bawah pimpinan Professor David Reeve. Bahan pengajaran tersebut terdiri dari
 - 1) buku-buku kerja mahasiswa,
 - 2) buku-buku pedoman guru,
 - 3) catatan kebudayaan,
 - 4) catatan tata bahasa,
 - 5) kaset audio (berisi ratusan percakapan), dan
 - 6) video wawancara (berisi ratusan wawancara).

Bahan-bahan ini disusun dalam tema. Karena yang ditargetkan adalah pembelajar dewasa yang ingin bepergian atau tinggal di Indonesia berhubungan dengan studi atau pekerjaannya, tema tersebut mulai dengan kebutuhan sehari-hari (kepentingan pelancong) dan dilanjutkan dalam tingkat lanjut dengan tema yang membahas aspek-aspek masyarakat dan kebudayaan Indonesia yang kiranya perlu diketahui mahasiswa atau *expatriate* yang akan tinggal lebih lama di Indonesia, seperti hubungan pribadi,

pendidikan, politik, kebudayaan populer, agama, turisme, hubungan buruh-majikan, kebinekaan, hubungan Australia-Indonesia, dan lain-lain. Ini berbeda sekali dengan buku pelajaran lama yang berisi bab-bab dengan judul seperti '*The me- prefix*' atau 'Bentuk pasif'. Jelas lebih hidup dan relevan.

Dari segi teori pengajaran bahasa, pendekatan TIFL mungkin tidak terlalu baru, tetapi di bidang BIPA bahan pengajaran TIFL itu merupakan prakarsa yang paling inovatif, sebuah prakarsa yang amat sangat diperlukan. Sebagai digambarkan oleh beberapa penulis (antara lain NLLIA, 1993; Sneddon, 1993; Reeve, 1995), generasi pertama buku teks BIPA untuk tingkat universitas diterbitkan pada tahun 1960-an, kemudian ada sedikit lagi yang terbit sekitar tahun 1975. Setelah 1975 nyaris tidak ada penerbitan buku pelajaran BIPA yang pantas dipakai di universitas. Bahkan, buku tahun 1960-an, seperti *Learn Indonesian* (McGarry dan Soemaryono) atau buku sekolah seperti *Bahasa Tetanggaku* (Ian White) masih dipakai di beberapa universitas karena belum ada bahan pengajaran yang lebih baik.

Pendekatan bahan pengajaran TIFL adalah pendekatan komunikatif, yang mulai diterima di kalangan pengajar bahasa Indonesia di perguruan tinggi setelah lama dipakai dalam pengajaran TESOL dan juga dalam pengajaran bahasa di persekolahan. Dewasa ini pendekatan komunikatif diterima sebagai pendekatan yang paling sesuai untuk pembelajar BIPA di Australia sebab mayoritas berencana berkunjung ke Indonesia dan ingin dapat bergaul dengan orang Indonesia.

Kalau kita melihat asas-asas dari *Australian Language Levels Guidelines* yang dipakai dalam pengajaran bahasa asing di persekolahan se-Australia, tidak dapat disangkal bahwa asas tersebut juga bermanfaat bagi pembelajar dewasa (Tabel 2).

Unsur-unsur pendekatan komunikatif yang diterapkan dalam bahan pengajaran TIFL, antara lain, sebagai berikut.

- a. Pembelajar melakukan kegiatan lisan dalam pasangan atau kelompok kecil supaya dapat mempraktikkan berbicara, dan juga supaya berkesempatan interaksi dan negosiasi [*negotiate meaning*]. Sebaliknya, dalam pelajaran yang terpusat pada guru, pembelajar biasanya hanya menjawab pertanyaan guru dan jarang memulai percakapan.
- b. Pelajaran cenderung terpusat pada makna, tidak pada tata bahasa. Kalau guru selalu menitikberatkan tata bahasa, pembelajar cenderung segan berbicara. Hal ini tidak berarti bahwa perhatian tidak diberikan kepada tata bahasa pada waktu tertentu.

TABEL 2
ASAS-ASAS PENGAJARAN DAN PELAJARAN BAHASA YANG EFEKTIF

-
- 1) Pembelajar perlu diperlakukan sebagai orang individual dengan keperluan, kepentingan, kemampuan, dan pengalamannya tersendiri.
 - 2) Pembelajar perlu dilibatkan dalam penggunaan bahasa aktual untuk tujuan aktual.
 - 3) Pembelajar perlu diberi kesempatan mengatur pelajarannya sendiri.
 - 4) Pembelajar perlu mengalami kebudayaan bahasa target dan memperoleh informasi tentang kebudayaan itu.
 - 5) Pembelajar perlu menyimak bahasa yang dapat dimengerti dalam konteks yang relevan.
 - 6) Pembelajar perlu memperhatikan karakteristik bahasa target, meningkatkan keterampilannya dalam pemakaian bahasa, dan belajar strategi komunikasi.
 - 7) Pembelajar bereaksi positif kalau diberi laporan [*feedback*] yang sesuai, secara berkala, tentang kemajuannya dalam studi.
 - 8) Pembelajar perlu ditantang dalam pelajarannya dan didukung dalam percobaannya [*risk-taking*].
-

Sumber: Australian Language Levels Guidelines

- c. Pendekatan komunikatif cenderung menggunakan sebanyak mungkin bahan aktual atau asli daripada bahan buatan yang disusun khususnya untuk pelajaran.
- d. Dalam pendekatan komunikatif, bahasa target dipakai sebanyak mungkin daripada bahasa pengantar. Juga diusahakan supaya pembelajar berbicara lebih lama, tidak hanya beberapa patah kata atau sebuah kalimat.
- e. Dalam pendekatan komunikatif, guru jarang mengajukan pertanyaan kepada murid yang jawabannya sudah diketahui [*display questions*], melainkan berusaha bertanya tentang hal aktual. Jadi, tidak ada jawaban yang *benar* tetapi hendaknya terjadi percakapan yang bersifat sungguh. Juga dalam pasangan atau kelompok pembelajar biasanya dilakukan kegiatan yang bersifat *information gap*, yaitu kegiatan yang disusun sedemikian rupa agar mereka harus saling mencari dan memberi keterangan.

Bahan-bahan TIFL telah diedarkan kepada semua universitas tempat BIPA diajarkan di Australia sehingga sekarang sudah mulai dipakai di mana-mana walau tidak secara utuh. Biasanya bahan-bahan terpilih dicampurkan pada program pengajaran yang sudah berjalan, dengan beraneka ragam hasil.

5. ACICIS

ACICIS atau *Australian Consortium for In-Country Studies* yang disebutkan dalam Adelaar (1995) merupakan prakarsa yang praktis dan berguna. ACICIS adalah suatu organisasi induk dengan keanggotaan terbentuk dari universitas-universitas yang

mengajarkan BIPA. Tugas ACICIS adalah memudahkan proses pendaftaran dan permohonan visa untuk mahasiswa yang ingin belajar di Indonesia, dan menyelenggarakan pelajaran di Indonesia. Tergantung dari kemampuannya, mahasiswa dapat mengikuti kursus intensif BIPA ataupun kurikulum biasa di UGM. Mereka juga mengadakan penelitian lapangan di Universitas Muhammadiyah di Malang. Tentu saja kesempatan belajar bahasa Indonesia di Indonesia sangat bermanfaat bagi pembelajar dan juga bagi guru-guru BIPA di Indonesia. Semoga ACICIS akan terus belajar baik dan menjadi lambang kerja sama akademis antara Indonesia dan Australia.

6. ASILE

ASILE atau *Australian Society of Indonesian Language Educators* adalah organisasi guru BIPA dari segala lapisan pendidikan, hal yang menunjukkan keramahan dan demokratisasi kami, dan mungkin juga mencerminkan peranan besar kalangan persekolahan dalam mengembangkan pengajaran BIPA di Australia. ASILE mengadakan konferensi setiap dua tahun, dan konferensi tahun 1999 akan diadakan di Canberra pada liburan Paska. Kalau ada yang berminat, boleh hubungi Professor Virginia Hooker di Australian National University. ASILE mempunyai sebuah jurnal elektronik berjudul *Wacana*, yang redaksinya Philip Mahnkan di Universitas Tasmania. Sayang, setelah Philip berpindah ke Sunshine Coast University College di Queensland dia belum sempat memasang kembali jurnal kami pada Jaringan Internet, tetapi menurut rencananya, tidak lama lagi *Wacana* akan hidup lagi.

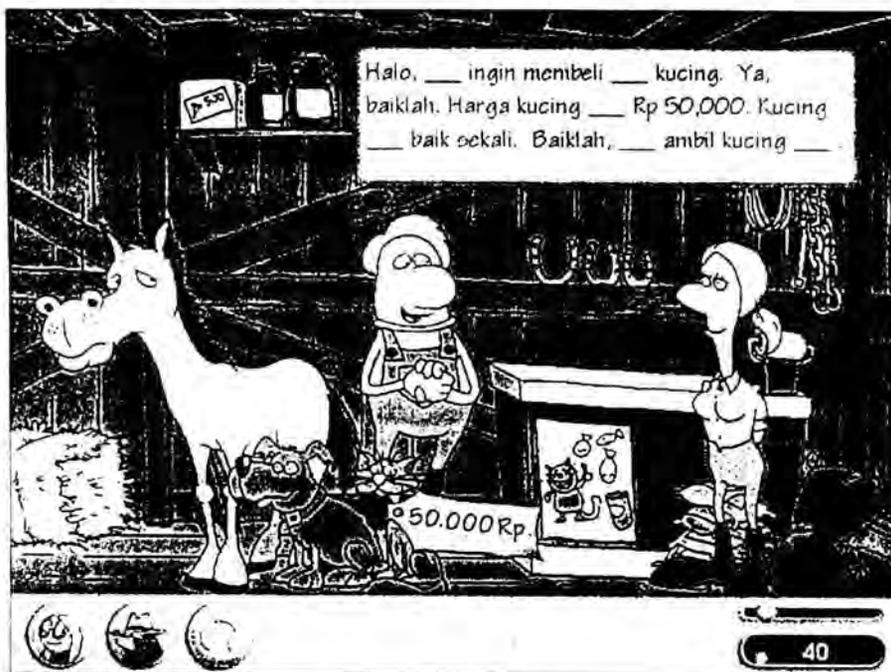
7. NALSAS Indonesian Language Project

NALSAS (*National Australian Languages and Studies in Australian Schools*) Taskforce adalah suatu badan yang didirikan pada tahun 1994 sesudah pemerintah Australia diperingati dalam sebuah laporan (Rudd, 1994) bahwa suplai guru bahasa Asia perlu dijamin, terutama guru bahasa Indonesia dan Jepang. Kekurangan guru BIPA yang bermutu sudah lama menjadi masalah (lihat Worsley, 1994; Adelaar, 1995). Hal ini disebabkan sifat pasang-surut profesi pengajaran BIPA di Australia selama ini. Maka sebuah proyek untuk membuat kurikulum BIPA dalam bentuk jarak jauh sedang dilaksanakan oleh Griffith University bersama University of New South Wales. Tujuan kurikulum jarak jauh ini adalah meningkatkan kemahiran guru BIPA.

8. CALL untuk BIPA

Jika dibandingkan bahasa lain, BIPA terbelakang dalam hal CALL (*computer assisted language learning*), tetapi ada beberapa gagasan di Australia di bidang ini yang cukup mengagumkan.

Pasar bahasa (*the language market*) adalah sebuah program canggih untuk anak sekolah yang tersedia dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Program ini bersifat interaktif, bertahap, luas, dan tersusun dengan baik. Ditayangkan dalam bentuk kartun hidup yang berwarna dan bersuara. Bahasa ditemukan dalam situasi-situasi realistik yang menarik dan lucu, supaya pembelajar dapat langsung menerapkannya dalam pembicaraan, pembacaan, atau penulisan (Gambar 5).



Gambar 5: Sebuah jendela dari *The Language Market*

Debra Hoven di University of Queensland tengah menyusun bahan pelajaran CALL multimedia yang canggih untuk pembelajar BIPA dewasa. Keistimewaan programnya adalah sistem klasifikasi tugas yang dipakai. Di dalam program tersebut pembelajar dapat mengkaji adegan-adegan dari film dan televisi Indonesia seperti iklan, sinetron, drama, dan berita, dengan cara mengerjakan pelbagai tugas. Tugas-tugas ini dipilih oleh pembelajar dari rangkaian tugas, yang diterangkan tujuan pendidikannya. Rangkaian itu mencakup bermacam-macam tugas, dari yang sederhana, seperti ingatan akan hal atau proses, sampai yang memerlukan imajinasi atau kesimpulan. Jadi, pembelajar boleh mengikuti pelajaran bertahap yang ditentukan, atau boleh belajar secara mandiri dengan mengatur pelajaran sendiri menurut selera dan keperluan dirinya. Sebuah contoh dari sistem klasifikasi tugas tercantum di bawah ini.

Jenis Tugas

Jenis tugas yang dimaksudkan itu adalah menerjemahkan, menjelaskan, meramal, memperhitungkan, mengenal, membedakan, menafsirkan, mengambil kesimpulan (tidak harus mengerti keseluruhannya)

Contoh Tugas:

- 1) Memindahkan (dari satu konteks atau jalur kepada yang lain)
- 2) Menyalin (menulis, menerjemahkan, mendiktekan)
- 3) Mengatakan dengan cara lain (misalnya dari informal ke formal, halus ke kasar)
- 4) Mengatur gambar atau diagram supaya berurut-urutan sambil mendengar cerita

- 5) Mencocokkan informasi dari pemasukan yang berbeda (misalnya gambar dengan deskripsi lisan)
- 6) Menduga sifat seorang pembicara dari apa yang dikatakannya
- 7) Menduga hubungan di antara pembicara dari apa yang dikatakannya

Berdasarkan sistem klasifikasi tahap-tahap pengertian ini, program CALL telah disusun dengan sangat efektif sebagai bahan pengajaran tambahan. Mudah-mudahan cepat selesai supaya dapat diedarkan di pasaran.

9. Simpulan

Masalah-masalah yang dihadapi pengajar dan pembelajar bahasa Indonesia di Australia masih sama dengan yang dulu.

"Walaupun pengajaran bahasa Indonesia sudah lama sekali dilaksanakan di Australia, dan jumlah mahasiswa kadang-kadang tinggi, pengajaran bahasa ini masih selalu bersifat *ad hoc*. Sejak bahasa Indonesia mulai diajarkan, tetap ada kekurangan guru yang berijazah dan bahan pelajaran yang cocok." (Adelaar, 1995)

Namun, ada kemajuan sehingga Australia boleh dikatakan berperan sebagai pusat BIPA.

Daftar Pustaka

- Adelaar, Sander. 1995. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia--Laporan dari Konferensi BIPA se-Australia yang Kedua". Makalah Kongres Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA). Universitas Indonesia, Depok.
- Department of Education. 1998. *Languages Other than English in Government Schools, 1997*. State of Victoria, Department of Education.
- Kirkpatrick, Andy. 1995a. "Learning Asian languages in Australia-which languages and when?" *Babel* 30,1:4-11, 26-29.
- Kirkpatrick, Andy. 1995b. "The teaching and learning of the Four Priority Asian Languages". Dalam Andy Kirkpatrick, Yong Zhang and Helen Kirkpatrick (Eds.). *The Hard Work Entertainment Continuum: Teaching Asian Language in Australia*. Australian Review of Applied Linguistics Series S, No. 12,17-34. Juga di *MLTA Bulletin* August 1995:3-10.
- NLLIA .1993. *Languages at the Crossroads*. Melbourne: National Languages and Literacy Institute of Australia.
- Read, Julia. 1996. "Increased demand for Indonesian teachers: A dilemma for Indonesian departments?". Dalam *Asian Studies Review* 19(3): 79-85. Juga dalam *Australian Federation of Modern Language Teachers' Associations Inc. Information Bulletin*, Autumn 1997.

- Reeve, David. 1994. "The TIFL project -- Communicative Materials for Australian Universities". Makalah Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Universitas Satya Wacana, Salatiga.
- Reeve, David. 1995. "Proyek TIFL dan lanjutannya". Makalah Kongres Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA) 1995. Universitas Indonesia, Depok.
- Rudd, K.M. 1994. *Asian Languages and Australia's Economic Future. A Report Prepared for the Council of Australia's Governments on a Proposed National Asian Languages Studies Strategy for Australian Schools*. Canberra: National Languages and Literacy Institute of Australia.
- Sneddon, James. 1993. "Pengajaran Bahasa Indonesia di Australia". Makalah Kongres Bahasa Indonesia VI. Jakarta, 28 Oktober - 2 November 1993.
- Sneddon, James. 1996. *Indonesian Reference Grammar*. Sydney: Allen & Unwin.
- Soemarmo, Marmo. 1988. "Keadaan dan Perkembangan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia di Amerika Serikat". Makalah Kongres Bahasa Indonesia V.
- Worsley, Peter J. 1994. "The Learning and Teaching of Indonesian/Malay in Australian Education 1986-1992". Makalah Konferensi Internasional Pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing. Universitas Satya Wacana, Salatiga.



INDONESIAN BOOKSHOP
Nusantara

TOP 70 SCHOOL RESOURCES

PRIMARY RESOURCES



Kamus Situasi

Popular thematic dictionary, suitable across primary level. Ideal for class-set purchase. Full-colour.

**Retail price \$16.95
Nusantara price \$15.25**

1000 Kata dan Gambar

Thematic picture dictionary for more senior primary students.

**Retail price \$16.95
Nusantara price \$15.25**



500 Kata yang Pertama

Thematic picture dictionary for junior primary students.

**Retail price \$15.95
Nusantara price \$14.35**



Renyi Picture Dictionary

Comprehensive thematic picture dictionary for upper primary and early secondary students.

**Retail price \$24.95
Nusantara price \$22.45**



Indonesian Activity Book

Blackline master book for mid-level primary students.

**Retail price \$14.95
Nusantara price \$13.45**



Bali: Life and Legends

Photocopy-free blackline master book for upper primary/early secondary level. Focus on Bali.

**Retail price \$19.95
Nusantara price \$17.95**



Indonesia (Lisa Hill)

Value-for-money library reference for mid-upper primary.

**Retail price \$6.95
Nusantara price \$6.25**

**BUDI TEACHES
INDONESIAN**



Popular CD-ROM program for primary levels. Includes comprehensive teacher kit with blackline masters.

**Retail price \$69.95
Nusantara price \$65.00**

VIDEO: A Look at Indonesia

Includes resource sheets, ideal across primary.

Nusantara price \$45.00 Nett

**Games & Activities for
Junior Indonesian**

**Retail price \$12.95
Nusantara price \$11.65**

**Sudah Bisa Berbahasa
Indonesia**

Activities for Indonesian at upper primary and early secondary level.

**Retail price now \$11.95
Nusantara price \$10.75**

Festivals of the World: Indonesia

Colourful, hardcover library reference for mid-upper primary.

**Retail price now \$24.95
Nusantara price \$22.95**

World Focus: Indonesia

Hardcover library reference for upper primary level. "Currently reprinting"

**Retail price now \$26.95
Nusantara price \$24.25**

Road Atlas of Indonesia

An informative look at Indonesia's provinces. Upper primary/early sec.

**Retail price now \$16.95
Nusantara price \$15.25**

Indonesian Colouring Book

A-Z colouring book featuring Indonesian themes. Lower primary.

**Retail price \$12.95
Nusantara price \$11.65**



SEE OCTOBER '98 CATALOGUE FOR LATEST RESOURCES

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok E4
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 16.20--17.10
Judul Makalah	: Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Pembelajar Asing di Australia
Penyaji	: Julia Read
Pemandu	: H.K.M.A.M. Usop
Pencatat	: a. Nantje Harijatiwidjaja b. I Made Purwa
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Iis Ristriani, Mahasiswa IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

- 1) Pengajaran bahasa Indonesia di Australia mulai diberikan pada tingkat sekolah apa: apakah tingkat sekolah dasar, tingkat sekolah menengah, atau tingkat perguruan tinggi? Apakah bahasa Indonesia sudah menjadi bahan masukan dalam kurikulum pendidikan tersebut?
- 2) Selain bahasa Indonesia, apakah sastra Indonesia dan sejarah Indonesia juga diberikan dalam sistem pendidikan di Australia?

b. Jawaban:

- 1) Sudah banyak program bahasa Indonesia di tingkat sekolah dasar dan taman kanak-kanak. Akan tetapi, bahasa Indonesia kebanyakan mulai diberikan pada kelas 3 sekolah dasar. Di negara bagian Victoria ada 350 sekolah dasar yang mengajarkan bahasa Indonesia. Sistem pengajaran di sekolah dasar mengikuti prinsip pengajaran yang berlaku umum di semua kelas pada tingkat dasar. Jadi, tidak menekankan tata bahasa.
- 2) Di Australia ada kecenderungan pengajaran dengan pendekatan komunikatif. Pengajaran sastra, atau fonologi, serta linguistik ditunda sampai tingkat ketiga. Untuk tingkat pertama dan kedua biasanya terfokus pada komunikasi yang menekankan proses percakapan. Setiap percakapan harus dilihat konteksnya, baik itu formal maupun informal.

2. Penanya: Prana, Program Pascasarjana IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Pertanyaan saya berkenaan dengan program pengajaran bahasa Indonesia sehari-hari, bukan bahasa baku. Setiap pengajaran itu harus mengandung pengetahuan tentang fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik sebagai bahan pendukung. Apakah hal-hal seperti itu memang diperlukan. Kemudian, baga-

mana mengajarkan bahasa yang baik sehingga dapat dihindari pengajaran bahasa yang rancu atau tidak baik?

b. Jawaban:

Saya melihat program pengajaran bahasa Indonesia di Australia dari awal dimulai dengan cara menerangkan atau menjelaskan dengan metode formal dan nonformal. Mengenai pengajaran fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik, menurut pendapat saya, hal itu diperlukan bagi dosen. Belum mungkin diajarkan aspek mendalam itu pada mahasiswa, apalagi pada tahap permulaan. Jadi, aspek-aspek tersebut tidak menjadi masalah besar. Yang terpenting adalah pendalaman cara pengucapan bahasa Indonesia.

3. Penanya: Y. Karmin, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta

a. Pertanyaan:

Dengan adanya pengajaran bahasa Indonesia di Australia mulai tingkat sekolah dasar, apakah ada sistem evaluasi atau tes? Kalau bahasa Inggris ada TOEFL, tetapi pengajaran bahasa Indonesia di Australia memakai model apa?

b. Jawaban:

Pertama-tama, kita mengadakan wawancara selama 20 menit. Dalam wawancara itu kita mencoba menafsir untuk mengetahui seberapa jauh kemahiran pembelajar itu. Bahan bacaan lisan biasanya menggunakan kaset. Di samping itu, ada tugas-tugas menulis untuk mengetes kemahiran perorangan. Di sekolah menengah dan universitas, di setiap negara bagian memiliki cara tes tersendiri.

4. Penanya: I Nyoman Riasa, *Indonesian Australian Language Foundation (IALF)*, Bali, Denpasar

a. Pertanyaan:

Faktor-faktor apa yang menyebabkan pasang surutnya jumlah mahasiswa Australia yang belajar bahasa Indonesia?

b. Jawaban:

Saya kira ada hubungannya dengan kebijakan pemerintah. Sekarang partai Liberal yang berkuasa. Akibatnya, dana untuk pengajaran di universitas dikurangi sehingga masalah pengajaran bahasa memprihatinkan. Dan pemerintah sekarang tidak mendukung pengajaran bahasa. Berbeda dengan saat Partai Buruh berkuasa di Australia, program pengajaran bahasa meningkat serta jumlah mahasiswa yang belajar bahasa pun meningkat. Di samping itu, adanya sistem pemerintahan di Australia yang setiap tiga tahun berganti-ganti, mempengaruhi keseluruhan sektor pengajaran.

5. **Penanya:** Ngurah Ardjana, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Bali, Denpasar

a. Pertanyaan:

Saya memang mengetahui bahwa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan memiliki program pengiriman siswa dan guru. Sebenarnya tenaga itu bisa dimanfaatkan untuk menghindari hambatan pengajaran bahasa di Australia. Seberapa jauh pemanfaatan SDM di Australia dalam rangka pembelajaran bahasa Indonesia? Apakah keengganan orang Australia belajar bahasa Indonesia dilatarbelakangi hal-hal tertentu?

b. Jawaban:

Sebenarnya banyak tenaga dari Indonesia yang dimanfaatkan untuk pengajaran bahasa Indonesia. Di antaranya ada yang menjadi dosen, asisten dosen, dan guru. Bahkan, mahasiswa Indonesia yang ada di Australia juga saya manfaatkan tenaganya. Keengganan orang Australia belajar bahasa Indonesia disebabkan oleh adanya rasa malas, hanya sifat malas, tidak ada masalah lain. Di Australia bukan bahasa Indonesia saja yang digunakan melainkan ada bahasa lain sebagai bahasa pergaulan sehari-hari. Bahkan orang Australia yang datang ke Bali misalnya, kadang-kadang sudah bisa berbahasa Indonesia.

6. **Penanya:** Miftahuddin Martha, SLTPN 11 Bandung

a. Pertanyaan:

saya mengetahui adanya pertukaran guru dan siswa ke Australia untuk mempebanyak jumlah pembelajar/peminat bahasa Indonesia. Ada hal yang saya kurang mengerti kenapa yang dikirim ke Australia itu, guru nonbahasa Indonesia, yakni guru bahasa Inggris. Bahkan, guru-guru bahasa Indonesia merasa gagal karena tidak menguasai bahasa Inggris. Apakah ada syarat yang lebih ringan agar guru bahasa Indonesia yang dikirim itu tidak mutlak bisa berbahasa Inggris? Saya yakin orang Indonesia yang diperlukan oleh orang Australia adalah yang pandai berbahasa Indonesia.

b. Jawaban:

Persoalan itu merupakan persoalan kebijakan Pemerintah Australia. Saya tidak mengetahuinya dan tentu saja saya tidak dapat menjawabnya.

7. **Penanya:** Suhartono, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Menurut uraian Anda, jumlah pembelajar bahasa Indonesia di Australia mengalami pasang surut, bahkan sekarang lebih banyak surutnya. Dapatkah hal itu dilengkapi dengan data dan penyebab terjadinya hal seperti itu. Hal ini sangat berlawanan dengan jumlah pembelajar di BIPA Universitas Gajah Mada, yang menunjukkan peningkatannya terus-menerus.
- 2) Daerah mana yang mengalami pasang surut itu?

b. Jawaban:

- 1) Saya tidak mengatakann bahwa kini terjadi keadaan surut, malahan sekarang sedang naik. Akan tetapi, memang sering terjadi pasang dan surutnya pembelajar itu.
- 2) Memang, penelitian saya dilakukan di Daerah Victoria. Daerah-daerah yang lain keadaannya hampir sama. Daerah Victoria ini dianggap cocok untuk penelitian karena di daerah ini kedudukan bahasa Indonesia sudah berada pada posisi keempat atau kelima.

PENERJEMAHAN UNTUK PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA

Rahayu S. Hidayat
Universitas Indonesia

1. Pendahuluan

Masyarakat pembaca di kota-kota besar Indonesia sejak lama akrab dengan karya terjemahan, baik dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia maupun dari bahasa asing ke bahasa Indonesia. Karya terjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia masih kecil jumlahnya dan kebanyakan terjemahan dari bahasa Jawa; sedangkan dari bahasa-bahasa lain sangat sedikit yang dapat dicapai oleh masyarakat luas.¹ Adapun karya terjemahan dari bahasa asing jauh lebih besar jumlahnya dan tidak terbatas pada karya fiksi, tetapi sangat beragam, mulai dari bacaan anak-anak sampai bacaan orang dewasa, dari pengetahuan populer sampai ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh bacaan anak-anak adalah terjemahan cerita Jepang yang kebanyakan berbentuk komik², terjemahan kisah kepahlawanan anak-anak Inggris atau Prancis dalam bentuk novel, dan berbagai ensiklopedi anak-anak. Sementara itu, bacaan orang dewasa lebih beragam lagi: karya fiksi, pengetahuan populer (khususnya psikologi, pendidikan, dan kesehatan), berbagai ensiklopedi (manajemen, perdagangan, agama), dan buku tentang ilmu keras, ilmu lunak, dan teknologi.

Kenyataan tersebut memperlihatkan bahwa masyarakat penutur bahasa Indonesia sangat terbuka pada berbagai pengetahuan yang datang dari luar. Kita semua mengetahui bahwa masyarakat penutur bahasa Indonesia bersifat multikultural: keberadaan lebih dari 400 bahasa daerah merupakan bukti yang meyakinkan. Hidup dalam multibudaya membuat orang Indonesia terbuka pada hal-hal yang berbeda dan pengetahuan baru. Dengan penggunaan bahasa Indonesia untuk menerjemahkan berbagai karya yang berbahasa daerah, masyarakat penutur bahasa yang berbeda-beda dapat bertukar pengetahuan tentang kebudayaan sehingga wawasannya meluas dan mendalam. Perluasan wawasan terjadi juga melalui pembacaan karya-karya terjemahan dari berbagai bahasa asing. Dengan membaca karya terjemahan, selain kemampuan berbahasa nasional orang Indonesia akan makin kuat, pengetahuan dan kemahirannya pun tidak ketinggalan zaman. Oleh karena itu, dipandang dari sudut peningkatan sumber daya manusia, penerjemahan merupakan salah satu sarana yang cukup efektif, asalkan hasilnya bermutu tinggi, terjangkau oleh masyarakat luas—terdapat di mana-mana dengan harga terjangkau—dan publik yang disasar memiliki kemahiran serta minat membaca yang memadai.

Tanpa mengecilkan peranan penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia, dalam makalah ini, pembahasan akan dipusatkan pada penerjemahan dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan hanya penerjemahan karya ilmu pengetahuan. Alasannya adalah bahwa peningkatan sumber daya manusia di sini diartikan sebagai peningkatan berbagai potensi yang dimiliki manusia Indonesia yang memang

diperlukan pada masa globalisasi³. Alasan lain dari pembatasan di atas adalah bahwa penerjemahan karya ilmu pengetahuan masih mengandung banyak masalah: mutu terjemahan rendah, penerjemah berkualifikasi langka, dan penyebaran karya terjemahan tidak merata.

2. Kondisi Penerjemahan pada Saat Ini

Di atas telah disebutkan bahwa di kota-kota besar karya terjemahan pada umumnya mudah ditemukan di toko buku. Khusus mengenai terjemahan karya ilmiah, peranannya cukup besar dalam membantu para mahasiswa mendalami ilmu karena tidak banyak karya ilmiah yang ditulis oleh ilmuwan Indonesia. Sebenarnya jumlah tulisan ahli Indonesia cukup banyak mengingat program pascasarjana dan program penelitian yang didanai pemerintah telah berlangsung cukup lama. Namun, penyebaran karya tersebut mendapat hambatan yang hingga kini belum ada tanda-tanda dapat ditanggulangi. Di satu pihak, penerbit kurang berminat untuk menerbitkannya karena publik pembacanya sangat terbatas sehingga tidak seimbang dengan biaya penerbitan. Di pihak lain, perpustakaan universitas dan lembaga penelitian⁴ tidak mampu meluaskan koleksinya dengan memfotokopi karya-karya tersebut.

Meskipun semua pihak yang terlibat dalam pendidikan tingkat tinggi menyadari besarnya peranan karya terjemahan itu, jumlah karya yang diterjemahkan tidak sebanding dengan luasnya suatu bidang ilmu dan kemajuan zaman. Akibatnya, mahasiswa dari jenjang S1 sampai S3 terpaksa mengeluarkan tenaga tambahan untuk membaca karya ilmiah yang berbahasa Inggris. Bahkan, untuk dapat membaca rujukan itu, mereka yang kurang mampu berbahasa Inggris terpaksa belajar lagi. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa bahasa Inggris tidak diperlukan. Bahasa Inggris saat ini telah menjadi *lingua franca* yang utama sehingga ilmuwan yang bukan penutur bahasa Inggris pun harus menulis—atau karyanya diterjemahkan—dalam bahasa Inggris demi penyebaran pengetahuan dan pengakuan dunia akan kepakarannya. Namun, alangkah baiknya jika calon ilmuwan Indonesia dapat mendalami ilmu dengan lebih “nyaman” dan lebih mantap karena sumber rujukan ditulis dalam bahasa Indonesia dan sekaligus mampu berbahasa Inggris agar sebagai ilmuwan, ia dapat menyampaikan berbagai temuannya ke seluruh dunia.

Keterbatasan jumlah karya ilmiah terjemahan seperti yang dikemukakan itu sebenarnya berkontradiksi dengan berbagai upaya yang selama ini dilakukan, khususnya oleh pemerintah. Sebagai contoh, lebih dari sepuluh tahun lamanya para dosen perguruan tinggi secara bergiliran mendapat pelatihan menerjemahkan buku ajar (*text-book*), tetapi hasilnya hampir tidak mungkin diperoleh di toko buku. Meskipun syarat untuk mengikuti pelatihan itu adalah rencana menerjemahkan buku tertentu, kebanyakan peserta pelatihan tidak menyelesaikan karyanya karena tidak ada jaminan bahwa terjemahannya akan diterbitkan (baca: dibayar). Sejak tahun lalu, saya mendengar bahwa dalam program pelatihan tersebut tersedia juga dana untuk penerjemahan dan penerbitan sehingga peserta terdorong untuk menyelesaikan penerjemahannya seusaia pelatihan. Sebagian peserta tidak berhasil menguasai kemahiran menerjemahkan dalam waktu terbatas karena kurangnya kemampuan membaca dalam

bahasa asing dan kemampuan menulis dalam bahasa Indonesia. Usaha yang tampaknya lebih menjanjikan adalah proyek penerjemahan yang dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sejak tahun 1980-an. Hasilnya cukup banyak dan bidangnya pun beragam. Penerbitan memang dilakukan, tetapi karena adanya undang-undang yang melarang lembaga pemerintah berjualan, lembaga itu hanya menerbitkan secara terbatas dan sering kali pihak yang membutuhkan karya tertentu malahan tidak mendapat informasi, apalagi memperolehnya. Akhir-akhir ini ada usaha untuk menerbitkan karya terjemahan tersebut melalui penerbit Balai Pustaka, tetapi saya tidak sempat meneliti hasilnya karena keterbatasan waktu.

Perlu disebutkan juga upaya dari beberapa negara maju untuk memperkenalkan gagasan dan kemajuan teknologinya di Indonesia. Misalnya, sejak akhir tahun 1980-an, Pemerintah Prancis menyediakan dana khusus untuk penerjemahan karya pengarang dan pakar Prancis. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penerjemahan: karena dibayar secara manusiawi penerjemah menghasilkan karya yang bermutu. Namun, jika diperlukan, dana digunakan juga untuk membiayai pencetakan karya terjemahan sehingga penerbit tidak dirugikan apabila karya itu tidak laku. tampaknya karya ilmiah yang laku jual menghadapi hambatan yang lebih kecil dalam penerbitannya. Artinya adalah bahwa penerbit dengan senang hati akan menerbitkan dan menyebarkanluaskannya. Kita dapat melihat buktinya di toko buku: karya tentang manajemen, bisnis, dan teknologi tinggi dicetak ulang. Namun, secara umum, penerbit enggan menerbitkan karya ilmiah karena terbatasnya publik pembaca.

Jika penerjemahan diharapkan mampu meningkatkan sumber daya manusia, hasilnya harus bermutu tinggi. Berbicara tentang mutu terjemahan sama dengan mempermasalahakan penerjemah, penyunting, dan korektor. Kita semua tahu bahwa salah terjemah dapat berakibat fatal. Kalaupun tidak berakibat fatal, memberi gambaran yang keliru sama dengan menipu. Kesalahpahaman pembaca sering kali tidak hanya karena salah terjemah, tetapi juga karena penyampaian makna tidak menggunakan bahasa yang terpahami oleh pembaca.

Pada saat ini penerjemah yang bermutu memang belum banyak karena, pertama, masyarakat masih menganggap bahwa "mampu berbahasa asing = mampu menerjemahkan". Akibatnya, orang yang tidak memiliki kemahiran (pengalaman) menerjemahkan diminta untuk menerjemahkan walaupun hasilnya tidak memuaskan atau bahkan mengalami kegagalan.⁵ Kedua, penghargaan kepada penerjemah sangat rendah karena masyarakat menganggap penerjemahan sekadar mengganti kata-kata asing dengan kata-kata Indonesia atau karena penerbit tidak mau merugi. Penghargaan begitu rendahnya sampai profesi penerjemah tidak ada dalam daftar pekerjaan di Departemen Tenaga Kerja dan karya terjemahan tidak mendapat hak cipta.

Mutu penerjemah dapat terpelihara jika baginya tersedia alat bantu yang memadai. Seorang penerjemah tidak perlu menjadi ahli bidang tertentu, yang diperlukannya adalah pengetahuan ensiklopedis tentang berbagai bidang. Oleh karena itu, ketika menghadapi karya ilmiah tentang bidang tertentu, ia berkewajiban memahami bidang itu lebih dahulu. Caranya adalah dengan membaca berbagai tulisan dalam bahasa

Indonesia yang dilatari bidang tersebut. Ia juga dapat membaca ensiklopedi khusus serta kamus istilah ekabahasa dan dwibahasa. Cara lain adalah meminta penjelasan kepada ahlinya meskipun cara ini sering kali tidak mungkin dilaksanakan. Dengan demikian, ia tidak hanya memperoleh latar tematis, tetapi juga pengetahuan tentang bagaimana mengungkapkan gagasan (*how to say it*) dalam bidang tertentu. Singkatnya, seorang penerjemah harus melakukan “penelitian dokumen” untuk memahami karya yang akan diterjemahkannya dan bukan sekadar membuka kamus istilah dwibahasa. Namun, dengan upah yang begitu rendah, penelitian jelas tidak mungkin dilakukan. Selain itu, jika dokumen masih dapat ditemukan di perpustakaan khusus, ensiklopedi khusus dan kamus istilah hanya mencakupi beberapa bidang ilmu. Akibatnya, penerjemah hanya mengalihkan bahasa bukan memahami teks asli dan mengungkapkan kembali pemahamannya dalam bahasa Indonesia.

Selain penerjemah, peranan penyunting pun tidak dapat diabaikan. Mengenai penyunting perlu dikemukakan kenyataan yang berikut. Seorang penerjemah yang baik adalah yang memiliki kemampuan menerjemahkan dan sekaligus menyunting. Namun, karena kurangnya pengalaman menulis dalam bahasa Indonesia, hanya sedikit penerjemah yang sekaligus mampu berfungsi sebagai penyunting karyanya sendiri. Tidak sedikit yang memahami dengan baik teks asli, tetapi tidak berhasil menulis teks berbahasa Indonesia yang terbaca. Kenyataan lain ialah bahwa sejumlah penerjemah mampu menulis dalam bahasa Indonesia, tetapi kebiasaan menunda pekerjaan dan sifat tidak cermat membuat mereka tidak memeriksa kembali tulisannya. Akibatnya, penyuntingan diserahkan kepada penerbit yang sering kali tidak memiliki penyunting yang mampu berbahasa asing lain, kecuali Inggris. Dengan demikian, salah terjemah di dalam terjemahan karya non-Inggris tidak dapat dideteksi. Selain itu, penyunting yang mampu berfungsi sebagai pembaca kritis juga langka, sementara penerjemah tidak mampu membayar penyunting. Terakhir, penerbit pada umumnya tidak menyediakan dana untuk pembacaan kembali oleh pakar bidang, sedangkan upah penerjemah terlalu kecil untuk dibagi-bagi.

Terakhir, peranan korektor dalam penerbitan juga penting. Memang pada saat ini peralatan penerbitan sudah canggih sehingga kesalahan cetak dapat dibatasi seminimal mungkin. Misalnya, sekarang penerjemah dapat mengirim terjemahan ke penerbit melalui ratron (*E-mail*) atau setidaknya dalam disket. Meskipun demikian, kecanggihian (“kerewelan”) korektor tetap diperlukan karena sering kali antara naskah dan buku ada perbedaan tipografi. Biasanya naskah yang berformat kuarto diubah menjadi format buku yang lebih kecil. Perubahan tersebut sering berakibat pada tulisan. Misalnya, sering terjadi pemotongan kata Indonesia yang salah, atau terdapat kata terpotong dua yang terletak di tengah teks. Hanya kecermatan korektor yang menjamin perwajahan yang bagus. Pengetahuan bahasa Indonesia seorang korektor juga menentukan “nasib” terbitan karya terjemahan. Pernah terjadi seorang penerjemah yang sangat teliti menyerahkan naskah yang sebenarnya tidak perlu dikoreksi lagi oleh penerbit. Namun, gara-gara dikoreksi, banyak ejaan baku yang dipatuhinya, malahan diganti dengan ejaan tidak baku (*sekadar* diganti **sekedar*, *orang tua* diganti **orangtua*, *dibebastugaskan* diganti **dibebas tugaskan* atau *dibebas-tugaskan*, *bekerja*

*sama diganti *bekerjasama...).*

Sebenarnya peluang untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui penerjemahan karya ilmiah masih sangat besar mengingat jumlah karya rujukan begitu terbatas. Jadi, ada lahan yang subur bagi penerjemah ataupun penerbit. Pertanyaannya adalah bagaimana kita meningkatkan kinerja segala pihak yang terlibat dalam penerjemahan agar kita dapat mengisi peluang yang ada? Bagaimana pula mendorong calon ilmuwan dan ilmuwan Indonesia untuk memanfaatkan bacaan dalam memperdalam ilmu?

3. Peningkatan Penerjemahan

Sesuai dengan bahasan terdahulu, pada bagian ini akan dibahas berbagai upaya untuk mengembangkan bidang penerjemahan. Upaya tersebut menyangkut penerjemah, penunjang penerjemahan, penerbitan, dan penyebarluasan karya terjemahan.

a. Peningkatan Kemampuan Penerjemah

Sejak empat tahun yang lalu, Fakultas Sastra Universitas Indonesia menyelenggarakan Program Spesialis 1 Penerjemahan yang setara dengan program magister, tetapi bersifat profesional.⁶ Selama empat tahun mengajar pada program tersebut, saya mengamati bahwa kelemahan utama para calon penerjemah adalah dalam membaca teks. Para calon cenderung membaca kata dan kalimat, padahal seorang penerjemah harus memiliki kemampuan merangkum informasi, artinya menemukan alur pikir penulis, menelusuri informasi untuk membedakan yang pokok dari rincian, dan menemukan sudut pandang "penceritaan". Jika tidak menguasai kemahiran membaca secara aktif, penerjemah cenderung menerjemahkan kalimat-kalimat tanpa melihat hubungan masing-masing dalam membentuk konteks. Misalnya, pernah terjadi bahwa mahasiswa menerjemahkan "*l'affaire du golf*" dengan *pertandingan golf* karena tidak berusaha memahami teks asli secara utuh untuk mengerti bahwa yang dibahas adalah konflik Teluk Persia. Diperlukan waktu yang cukup lama untuk melatih mahasiswa berani mengambil jarak dengan teks (tidak merekam kata dan kalimat) untuk dapat menyarikan pesannya. Padahal, sebenarnya, penerjemahan dan komunikasi sehari-hari yang menggunakan bahasa tidak banyak bedanya. Manusia selalu menyintesis informasi—yang diperoleh dari luar atau dari dalam otaknya—untuk dapat menyampai-kannya kepada orang lain. Jika dari sekolah dasar sampai sekolah menengah peserta didik dilatih untuk memahami dan bukan membeo, mudah-mudahan di masa depan akan hadir penerjemah yang unggul dan mahasiswa program sarjana sekalipun tidak perlu lagi diajari membaca, apalagi mahasiswa program pascasarjana.

Kelemahan kedua adalah sedikitnya pengalaman mahasiswa membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia. Padahal, makin sering membaca, makin luas pengetahuan umum seseorang—dan dengan sendirinya kosakata—dan makin banyak pola teks yang terdapat dalam ingatan jangka panjangnya. Berbagai pengetahuan tersebut sangat berguna untuk menulis walaupun hanya untuk menuliskan pemahaman yang diperoleh dari teks berbahasa asing. Sering terdengar keluhan mahasiswa, "*Saya memahami maksud penulis ini, tetapi tidak tahu bagaimana mengungkapkannya dalam bahasa*

Indonesia”, atau lebih gawat lagi prasangka calon penerjemah, “*Bahasa Indonesia tidak sekaya bahasa Inggris, jadi sulit menemukan padanan.*” Padahal, setiap bahasa mempunyai sarana khas untuk mengungkapkan gagasan. Jadi, selama penerjemah mampu menangkap gagasan penulis, pastilah ia dapat menyampaikannya kembali dalam bahasa Indonesia yang dikuasainya dengan baik.

Mengingat keadaan tersebut, seleksi calon peserta pelatihan jangka pendek perlu diperketat dengan mensyaratkan kemampuan menyintesis teks berbahasa asing dan teks berbahasa Indonesia. Dengan demikian, waktu yang pendek dapat dimanfaatkan untuk melatih kemahiran menerjemahkan. Perlu dicatat bahwa menerjemahkan dengan cara yang tepat tidaklah mudah karena kebanyakan peserta terbiasa untuk langsung menerjemahkan sebelum membaca teks secara menyeluruh, langsung mencari arti kata sukar dalam kamus dwibahasa. Padahal, prinsip penerjemahan adalah mengungkapkan kembali ke bahasa Indonesia makna yang ditangkap dalam bahasa asing. Bagaimana akan memahami jika pada tahap pemahaman, penerjemah tidak membaca seluruh teks atau mengganggu pikirannya dengan kata-kata Indonesia yang diperolehnya dari kamus dwibahasa. Selain itu, pelatihan sebaiknya dilaksanakan secara berjenjang sehingga kemampuan peserta dapat dipantau dan ditingkatkan. Saya masih ingat komentar Bapak Harsya Bachtiar (almarhum) dalam suatu pembicaraan mengenai peranan bahasa Prancis di Indonesia. Katanya, “Kita tidak memerlukan banyak orang yang mampu berbahasa Prancis, cukup beberapa orang yang benar-benar menguasai bahasa itu dan mampu menerjemahkan.” Perlu diingat bahwa terjemahan yang baik adalah yang bersumber dari karya asli, bukan pada karya terjemahan ke bahasa Inggris. Sebagai contoh, terdapat perbedaan makna yang cukup besar antara *Kontrak Sosial* (Dian Rakyat, 1989) yang bersumber pada karya asli Rousseau dan *Kontrak Sosial* (Erlangga, 1986) yang bersumber pada terjemahan karya pengarang yang sama dalam bahasa Inggris.

Pengendalian mutu juga diperlukan agar karya terjemahan yang ada di pasar memuaskan pembacanya. Tentu saja upaya ini memprasyaratkan kehadiran tiga unsur penunjang: pertama, pembaca ahli. Jika penerbit siap untuk memasukkan biaya pembaca ahli dalam biaya produksi, saya yakin terjemahan karya ilmiah akan meningkat mutunya. Kedua, penyunting yang berkualifikasi dan berkemauan untuk bekerja sama dengan penerjemah pada saat penyuntingan. Dengan demikian, setiap perubahan pada teks terjemahan merupakan tanggung jawab penerjemah juga. Ketiga, penilai yang cangih di berbagai penerbit. Untuk menilai secara objektif, diperlukan kriteria yang tegas untuk mengukur terjemahan yang baik sehingga penerbit dapat “memaksa” penerjemah untuk berprestasi. Pemberian hadiah “terjemahan terbaik” kiranya tidak berlebihan untuk mendorong penerjemah menghasilkan karya yang sebagus mungkin. Di Prancis, misalnya, mahasiswa sekolah penerjemahan pun mempunyai peluang untuk memperoleh hadiah dari penerbit karena mereka diizinkan untuk menerima tugas penerjemahan selama pendidikan. Untuk menjamin penghargaan kepada penerjemah, asosiasi penerjemah perlu dihidupkan kembali dengan visi dan misi baru. Hanya dengan asosiasi yang kuat kewajiban penerjemah terpantau dan hak penerjemah terlindungi.

b. Alat Bantu Penerjemahan

Dalam hal ini, Indonesia agak terbelakang. Mungkin karena belum ada kebiasaan menggunakan kamus dan ensiklopedi untuk mencari informasi—kemelitan juga rendah sekali atau menunggu suapan informasi dari orang lain, penerbitan kamus dan ensiklopedi sulit digalakkan. Selain itu, tidak seperti di negeri lain, Indonesia belum memanfaatkan komputer untuk membantu penerjemahan. Padahal, untuk menerjemahkan karya ilmiah, bantuan komputer sangat diperlukan jika kita ingin memperoleh hasil yang prima dalam waktu relatif singkat dan dengan tenaga sedikit. Upaya ke arah ini harus didorong karena sudah tersedia berbagai kamus bahasa Indonesia, baik kamus umum maupun kamus istilah. Apalagi, dengan otomatisasi penerjemahan, pastilah jumlah kamus istilah akan meningkat. Dalam kesempatan ini saya menyambut hangat upaya beberapa dosen Fakultas Sastra, Universitas Indonesia untuk bergiat dalam pusat leksikografi, dan berharap bahwa suatu saat ada juga upaya untuk membentuk bank istilah. Jika karya terjemahan diharapkan berperan dalam peningkatan sumber daya manusia, upaya mengungkapkan konsep-konsep baru dengan istilah yang disepakati bersama oleh berbagai lembaga keilmuan merupakan tiang utamanya.⁷ Perlu dicatat pula bahwa alat bantu penerjemahan yang sebenarnya, seperti telah dikemukakan di atas, adalah tulisan dalam berbagai bidang ilmu. Tampaknya tulisan dalam bidang ilmu yang sangat maju masih sedikit, dan keadaan ini tidak membantu penerjemahan. Oleh karena itu, kemauan para pakar dari berbagai ilmu untuk menulis juga perlu didorong terus.

c. Penerbitan dan Penyebarluasan Karya Terjemahan

Bukan rahasia lagi bahwa sejumlah penerbit bertahan hidup karena menerbitkan dan menyebarluaskan karya terjemahan, khususnya fiksi. Dalam kenyataannya, biaya produksi karya terjemahan jauh lebih rendah daripada biaya produksi karya asli. Dari segi peningkatan sumber daya manusia, penerbitan karya fiksi tersebut memang berperan menyediakan media informasi. Namun, alangkah baiknya apabila lebih banyak terjemahan karya ilmiah yang diterbitkan. Dengan demikian, karya para dosen yang telah mengikuti pelatihan penerjemahan tidak hanya tersimpan dalam lacinya.

Jelas bahwa karya ilmiah tidak selaku karya hiburan sehingga terpaksa diterbitkan dalam jumlah yang terbatas yang berakibat pada tingginya biaya produksi. Agar harganya terjangkau oleh mahasiswa, perlu diupayakan subsidi secara silang oleh penerbit ataupun subsidi dari luar. Selain itu, kerja sama dengan berbagai perguruan tinggi yang tersebar di seluruh Indonesia kiranya perlu digalang agar terbentuk pasar "akademik" bagi terbitan karya ilmiah itu. Kenyataannya adalah bahwa penerbit mengeluh karena terbitannya tidak laku, tetapi mahasiswa di luar Jawa mengeluh karena tidak ada sumber rujukan yang memadai. Kiranya harus ada pihak yang mau memutus lingkaran setan ini. Selain itu, jika kuliah dengan sistem satuan kredit semester (SKS) dilaksanakan secara taat asas—artinya satu SKS sama dengan satu jam tatap muka ditambah dua jam kerja mandiri, baik terstruktur maupun tidak terstruktur,

terjemahan karya ilmiah tidak akan kekurangan pembaca.

Dalam makalah ini saya ingin mengemukakan juga masalah bacaan anak-anak. Belakangan ini ada upaya pemerintah untuk mengisi kekosongan bacaan anak-anak dengan jalan mendorong penerjemahan karya pengetahuan untuk anak-anak. Langkah itu tepat sekali karena pada dasarnya peningkatan sumber daya manusia harus dimulai ketika anak-anak berusia dini. Saya juga telah melihat gaungnya pada beberapa majalah anak-anak. Namun, menurut pendapat saya, adaptasi akan lebih bermanfaat daripada sekadar penerjemahan. Sebagai contoh, sebuah majalah anak-anak mengisi rubrik pengetahuannya dengan memperkenalkan tanaman kentang. Dalam penjelasannya, contoh dataran tinggi, tempat yang cocok untuk habitat kentang, adalah yang terdapat di Amerika--karena teks asli dari sana--padahal Lembang dan Dieng merupakan daerah penghasil kentang. Jika kita ingin membangun manusia Indonesia seutuhnya, cobalah perhatikan hal yang tampaknya remeh ini demi membekali anak-anak kita dengan pengetahuan tentang negerinya sendiri.

Terakhir, perlu dikemukakan juga upaya untuk mendidik manusia Indonesia dari jarak jauh. Upaya itu tentunya juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Universitas Terbuka telah berusia lebih dari dua puluh tahun, sedangkan SMP terbuka sudah cukup lama berfungsi di daerah terpencil. Upaya tersebut sekarang mendapat dukungan dari teknologi informasi dan komunikasi. Komunikasi yang pada zaman dahulu hanya dimungkinkan melalui pos, radio, dan televisi, tidak lama lagi dapat dilakukan melalui satelit sehingga memungkinkan pengajaran jarak jauh yang interaktif dan multimedia.⁸ Mengingat keadaan geografis Indonesia, pengajaran jarak jauh juga merupakan sarana yang cocok untuk meningkatkan sumber daya manusia. Jika pengajaran jarak jauh terlaksana dengan baik, pemerataan pendidikan pasti tercapai. Perlu dicatat bahwa pengajaran jarak jauh merupakan peluang bagi penerjemah dan produsen program multimedia karena banyak sekali program ilmu pengetahuan yang dapat diadaptasi untuk kebutuhan Indonesia. Dalam adaptasi itu jelas ada tahap penerjemahan. Tentu saja diperlukan kemahiran tambahan bagi penerjemah untuk dapat menerjemahkan program multimedia, seperti kemahiran membuat bahan sulih suara dan kemahiran membuat subtitel; singkatnya menerjemahkan dalam ruang yang terbatas.

Sebagai simpulan dan sekaligus penutup, dapat saya katakan bahwa penerjemahan merupakan salah satu sarana penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Agar manusia Indonesia pada masa yang akan datang mempunyai jati diri, di samping mempunyai kepandaian, penerjemahan dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia perlu digalakkan dan hasilnya disebarluaskan. Perlu diwaspadai bahwa pada masa depan, komunikasi antarbangsa akan makin lancar, informasi akan datang makin banyak berkat penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, pasar Indonesia sebentar lagi akan terbuka untuk persaingan bebas. Oleh karena itu, pengetahuan dan kemampuan orang Indonesia harus setara dengan rekannya di negara lain agar hubungan antarbangsa setara juga. Untuk menjaminkannya, penerjemahan merupakan sarana alternatif yang tidak dapat diabaikan.

Catatan:

1. Banyak karya daerah yang telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia dalam rangka penelitian dan penyusunan tesis atau disertasi, tetapi karya itu “tersembunyi” di perpustakaan khusus yang terdapat di perguruan tinggi dan di lembaga penelitian.
2. Sangat disayangkan bahwa komik, baik yang asli maupun yang terjemahan dikategorikan oleh lembaga yang berwenang sebagai bacaan anak-anak, padahal sebagian besar komik terjemahan adalah untuk publik remaja dan dewasa.
3. Syukurlah bahwa di bidang ilmu pengetahuan karya yang diterjemahkan tidak hanya berasal dari negara-negara adidaya (Jepang, Amerika) sehingga globalisasi yang mengarah ke Amerikanisasi atau Niponisasi dapat dihindari.
4. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan beberapa universitas besar berusaha menyebarkan informasi mengenai karya-karya tersebut dengan memasukkan judul dan abstraknya dalam CD-ROM ataupun *home-page*. Pertanyaannya berapa persen mahasiswa Indonesia yang berpeluang untuk memanfaatkan informasi elektronik?
5. Sebuah pemerintah asing pernah menawarkan bantuan kepada sebuah perguruan tinggi untuk penerjemahan karya di bidang teknologi. Proyek dilaksanakan dengan mengundang dosen lulusan dari berbagai universitas di negara yang bersangkutan untuk memilih karya yang perlu diterjemahkan dan ia mampu menerjemahkannya. Pada tahap penawaran, banyak calon dan judul karya. Setelah diseleksi berdasarkan uji coba penerjemahan, jumlahnya berkurang, tetapi pada akhir masa pelaksanaan proyek tidak satu karya pun diserahkan.
6. Saat ini hanya terdapat satu jurusan, yaitu Penerjemahan Prancis-Indonesia, padahal penerjemahan Inggris-Indonesia lebih diperlukan. Semoga ada upaya untuk mempercepat pembukaan jurusan ini.
7. Dengan demikian, kita boleh berharap bahwa kamus istilah berbagai bidang ilmu yang tersedia di pasar akan mencantumkan istilah Indonesia, bukan sekadar mengutip istilah Inggris dan memberi definisinya.
8. Pada tanggal 1 November 1998 saluran pendidikan 24 jam/hari oleh Cakra Winaya Budaya mulai berfungsi.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D9
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.00--14.50
Judul Makalah	: Penerjemahan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia
Penyaji	: Rahayu S. Hidayat
Pemandu	: Bakhrum Yunus
Pencatat	: a. Nantje Harijatiwidjaja b. I Made Purwa
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: H. Hobir Abdullah, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Mohon penjelasan Ibu tentang cara kita memberikan dasar-dasar atau materi untuk melatih mahasiswa agar mereka mampu menerjemahkan.

b. Jawaban:

Sebenarnya ada prinsip atau teori penerjemahan bahwa orang yang bisa menerjemahkan adalah mereka yang sudah menguasai dua bahasa, yaitu bahasa ibunya (bahasa pertama) dan bahasa Indonesia (bahasa nasional) atau bahasa asing. Masalahnya sekarang kalau berhadapan dengan mahasiswa. Tingkat penguasaan mereka atas bahasa asing itu seberapa jauh. Misalnya, seorang mahasiswa arkeologi, apabila akan menerjemahkan, harus menguasai bahasa Belanda dan bisa belajar selama empat semester. Yang terpenting adalah memahami teks asli dan meningkatkan kemampuan membaca, terutama kata dan kalimat untuk menyintesis teks tersebut. Tidak berarti bahwa peningkatan membaca di sini berarti membaca kata demi kata, tetapi memahami isi bacaan. Artinya adalah bahwa mahasiswa harus terbiasa menulis dengan bahasa Indonesia yang disertai atau dilengkapi dengan penguasaan bahasa asing. Di samping itu, apabila penerjemahan itu tentang perbankan, ia harus mengetahui pengetahuan tentang bank, pajak, atau yang lainnya.

2. Penanya: Satibi Al Faroek, Institut Bankir Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Bagaimana kiat menerjemahkan karya-karya ilmu pengetahuan?
- 2) Materi apa saja dalam pelatihan penerjemahan yang diberikan kepada peserta?

b. Jawaban:

- 1) Jawaban pertanyaan kedua masih ada hubungannya dengan jawaban pertanyaan pertama. Umpamanya, seorang bankir, apabila hendak menerjemahkan, setidaknya-tidaknya harus memiliki pengetahuan tentang seluk-beluk bank atau perpajakan. Dalam hal ini, ia perlu berkonsultasi dengan konsultan perbankan. Selanjutnya, diperlukan pembaca ahli untuk lebih memahami isi materi yang akan diterjemahkan.
- 2) Materi pelatihan yang diperlukan adalah teknik penerjemahan (pengetahuan penerjemahan), kemudian peserta dibedakan antara yang bodoh dan yang pandai atau mereka yang mampu untuk menerjemahkan. Di samping itu, juga diperlukan kelengkapan bahan-bahan berupa buku referensi, kamus istilah, dan lain-lain. Jadi, untuk bahan pelatihan diperlukan kamus dwi-bahasa.

3. Penanya: Anto, Universitas Indonesia, Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Adakah lembaga yang berwenang untuk menentukan buku-buku yang akan diterjemahkan?
- 2) Kalau ada, apakah perguruan tinggi negeri dilibatkan dalam penentuan kriteria buku ajar yang akan diterjemahkan? Adakah buku lain yang diperlukan untuk perguruan tinggi?

b. Jawaban:

Saya tidak tahu lembaga yang menangani penerjemahan di luar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Selama ini, di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang menanganinya adalah Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena lembaga itulah yang mendapat dana khusus untuk menerjemahkan buku-buku asing. Pemilihan bukunya harus dikonsultasikan dengan instansi lainnya supaya bermanfaat. Masalah lainnya adalah penyebarluasan hasil penerjemahan yang masih terbatas pada instansi tertentu. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya penerbitan. Sebenarnya, setiap tahun harus ada informasi tentang buku-buku apa yang sudah diterjemahkan dan diterbitkan. Jadi, lembaga pemerintah tidak boleh menerbitkan buku. Lembaga swasta juga ragu-ragu untuk menerbitkan karya terjemahan karena takut tidak laku dijual.

4. Penanya: I Nyoman Riasa, IALF Bali

a. Pertanyaan:

Selain melalui membaca, cara-cara apa yang paling efektif untuk meningkatkan pengetahuan ensiklopedis?

b. Jawaban:

Cara lain yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan ensiklopedis adalah dengan peningkatan pengetahuan membaca teks atau temuan baru dalam surat

kar. Itulah salah satu cara untuk meningkatkan pemahaman membaca untuk mengetahui pengetahuan khusus. Di samping itu, juga dilakukan diskusi dengan membahas materi yang berupa dokumentasi penting. Penerjemah harus mau berbagi pengetahuan tentang istilah-istilah yang lengkap dengan definisi. Adanya ensiklopedi ilmu yang lengkap akan dapat menolong penerjemahan.

5. Penanya: Prana Dwija Iswara, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Bagaimana cara mengevaluasi hasil penerjemahan karena kadang-kadang si penerjemah ragu-ragu terhadap hasil kerjanya?

b. Jawaban:

Evaluasi terjemahan harus dilakukan oleh pembaca ahli di bidang-bidang tertentu. Akan tetapi, kalau menyangkut linguistik, selama seminggu atau dua minggu terjemahan itu harus disimpan dahulu, kemudian baru dibaca lagi sebab penerbitan tidak akan pernah lepas dari proses penyuntingan. Untuk penerjemahan yang menyangkut beberapa bahasa asing, perlu ada ahli yang memahami beberapa bahasa asing.

6. Penanya: Chaedar Alwasilah, IKIP Bandung

a. Pertanyaan:

Bagaimana cara mengembangkan bidang spesialisasi terjemahan? Mohon diberikan gambaran tentang kurikulum yang dikembangkan di Universitas Indonesia dengan yang dijelaskan itu.

b. Jawaban:

Mengenai sekolah terjemahan, ada sejenis sekolah atau spesialis terjemahan setingkat S2. Untuk mengetahui kurikulum penggabungan spesialisasi terjemahan, Anda dapat menghubungi Fakultas Sastra, Universitas Indonesia yang lengkap dengan panduan. Penyaringan mahasiswa dilakukan dengan cara bahwa peserta harus mahir membaca, menguasai bahasa asing, dan menuliskan esai dalam bahasa Indonesia.

7. Penanya: Wilda Siregar, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa, Jakarta

a. Pertanyaan:

Apa kira-kira usaha untuk menarik minat baca hasil terjemahan yang sudah ada? Saya usulkan agar hasil terjemahan yang sudah ada itu disalurkan ke instansi yang bersangkutan.

b. Jawaban:

Mengenai minat baca, dapat diperhatikan pada televisi, internet, dan lain-lain. Minat anak-anak dalam hal baca-membaca harus ditingkatkan serta lebih memahami isi bacaannya. Kemudian, mengenai bahan yang sudah diterjemah-

kan, Anda dapat menghubungi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang telah banyak menerbitkan buku terjemahan.

PENGEMBANGAN PERBUKUAN SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN MUTU KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Ajip Rosidi
Sastrawan

1. Perbukuan di Indonesia

Dimulai pada abad ke-19 untuk pencetakan buku-buku agama Kristen, kemudian pencetakan buku-buku pelajaran sekolah pribumi yang didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan tenaga murah buat eksploitasi kolonialnya, didatangkanlah mesin cetak ke Indonesia. Karena Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu tampaknya ingin melestarikan berbagai kebudayaan yang terdapat di Indonesia, *matrijs* mesin-mesin cetak itu tidak hanya berhuruf Latin, tetapi juga berhuruf Arab dan huruf-huruf daerah yang ada di Indonesia, seperti huruf Jawa (termasuk *Cacarakan* yang dipakai untuk mencetak bahasa Sunda), huruf Bugis, dan huruf Bali. Di samping buku pelajaran dan berbagai buku dan brosur pemerintah (berbahasa Belanda atau bahasa orang pribumi), Percetakan Pemerintah (*Landsdrukkerij*) juga menerbitkan buku-buku bacaan dalam bahasa Melayu dan bahasa daerah untuk memelihara kemelekhurufan orang-orang yang sudah bersekolah, di samping memelihara mentalnya supaya setia dan patuh kepada Pemerintah dengan menyediakan bacaan yang penuh dengan nasihat dan contoh untuk menjadi orang yang baik (tentu saja menurut kriteria pemerintah kolonial).

Dengan berkembangnya penerbitan pers yang banyak diusahakan oleh swasta (terutama orang-orang Belanda dan Cina), timbul pula usaha penerbitan buku, baik buku pelajaran, buku agama, kebatinan, penuntun pertanian, ataupun bacaan populer. Hikayat-hikayat banyak diterbitkan, terjemahan (bebas) maupun saduran dari cerita-cerita klasik Cina, Eropa, Islam, India, dan lain-lain, seperti *Samkok* (1883), *Liatkok* (1883), *Hikayat Robinson Crusoe* (1875), *Graaf de Monte Cristo* (1894-9), *Hikayat Fileas Fogg atawa Mengulilingi Bumi dalem 80 Hari Lamanya* (1890), *1001 Malam* (1886), *Rubaiyat* (1938), dan *Bhagavad Gita* (1935). Di samping itu, diterbitkan pula buku-buku cerita karya asli para pengarang Indo seperti F. Wiggers dan G. Francis; pengarang keturunan Cina seperti Lie Kim Hok, Gouw Peng Liang, dan Tio Ie Soei yang menulis dalam bahasa yang dikenal sebagai Melayu Cina (Melayu pasar). Namun, yang menulis dalam bahasa tersebut tidak hanya orang Indo atau peranakan Cina, orang pribumi pun kemudian ikut aktif di dalamnya. Muncullah nama-nama seperti Raden Mas Thirto Adisoerjo, Mas Marco, Semaoen, R.M.H.J.S. Kartawinata, Moehammad Hoessen, dan F.D.J. Pangemanan. Buku dalam bahasa Melayu pasar itu agaknya menjadi santapan orang-orang kota yang pernah duduk di bangku sekolah.

Agaknya buku-buku (dan surat kabar serta majalah) yang banyak diterbitkan oleh swasta itu dianggap atau dikuatirkan mempunyai pengaruh jelek kepada para pembacanya sehingga Pemerintah Hindia Belanda merasa perlu mendirikan badan

penerbit untuk menyediakan buku bacaan yang dapat mengimbangi pengaruh buruk itu. Badan penerbit yang semula bernama *Commissie voor de Volkslectuur* (Komisi Bacaan Rakyat) yang didirikan tahun 1908 itu pada tahun 1917 atas saran H. Agoes Salim namanya menjadi Balai Pustaka. Tugasnya adalah menyediakan buku-buku bacaan yang baik, yang penulisan naskahnya sesuai dengan petunjuk pemimpin lembaga penerbitan itu (yang selalu orang Belanda). Kalau ada naskah yang baik, tetapi isinya dianggap tidak sesuai dengan kebijaksanaan politik pemerintah atau dianggap dapat merendahkan martabat bangsa penjajah seperti terjadi dengan naskah *Salah Asuhan* karya Abdoel Moeis, maka dilakukan bongkar pasang: Corrie yang konon asalnya berakhir hidup sebagai pelacur diubah menjadi relawan sosial karena kalau seorang Indo (walaupun ayahnya bukan Belanda, tetapi Prancis) menjadi pelacur dalam sebuah buku cerita niscaya merendahkan martabat bangsa penjajah kendatipun dalam kenyataan sehari-hari hal semacam itu tak dapat dicegah.

Penerbitan buku bahasa Melayu oleh Balai Pustaka tidak hanya memberikan arahan pendidikan moral dan etika sesuai dengan yang diinginkan oleh penguasa, tetapi juga memberikan contoh pemakaian bahasa Melayu yang disebut Melayu tinggi. Berlainan dengan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar yang berpangkal dari bahasa percakapan sehari-hari (*lingua franca*), bahasa Melayu tinggi berpangkal pada bahasa Melayu Riau seperti yang terdapat dalam naskah-naskah yang dimodifikasi oleh orang-orang Belanda yang dianggap ahli bahasa Melayu, seperti van Ophuijsen (yang menyusun ejaan dengan huruf Latin), kemudian diajarkan di sekolah-sekolah sebagai bahasa baku. Guru-guru yang berasal dari Sumatera yang memperlihatkan bakat dan kepandaian mengarang, direkrut untuk menjadi redaktur Balai Pustaka. Tugasnya tidak mempertimbangkan naskah-naskah yang masuk saja (yang mungkin jumlahnya tidak banyak), tetapi terutama mengarang sendiri sesuai dengan petunjuk pemimpin Balai Pustaka, baik karya asli, saduran, maupun terjemahan. Bahasa mereka menjadi bahasa baku yang menjadi contoh bagi mereka yang mau mengarang untuk Balai Pustaka. Karena kebanyakan redaktur Balai Pustaka waktu itu berasal dari Minangkabau, seperti Nur Sutan Iskandar dan Aman Dt. Madjoindo, tak dapat tidak bahasa Melayu pada buku-buku Melayu Balai Pustaka sangat terpengaruh bahasa Minangkabau, termasuk buku-buku yang (aslinya) ditulis oleh bukan orang Minangkabau, seperti Paulus Supit, Wairata, bahkan Nyoman Pandji Tisna.

Namun, Balai Pustaka tidak hanya menerbitkan buku-buku dalam bahasa Melayu saja. Buku dalam bahasa Jawa, Sunda, Madura, Bugis, dan lain-lain pun diterbitkan. Pola kebijakannya sama: yang diangkat sebagai redaktur untuk tiap bahasa itu umumnya adalah guru-guru yang berbakat mengarang dan dengan demikian, bahasa yang mereka gunakan menjadi contoh yang baku untuk setiap bahasa tersebut. Sebagai redaktur bahasa Sunda, umpamanya, mula-mula diangkat D.K. Ardiwinata, guru Sekolah Menak (OSVIA) Bandung, kemudian R. Poeradiredja, R. Satjadibrata, dan Moh. Ambri. Hanya R. Memed Sastrahadiprawira yang tadinya bukan guru, dia camat lulusan OSVIA, tetapi bahasanya dianggap baik sekali, sesuai dengan bahasa baku yang dikehendaki Balai Pustaka, bahkan kemudian menjadi contoh yang utama.

Balai Pustaka menyalurkan bukunya tidak hanya melalui toko-toko buku atau

agen-agen untuk penjualan bebas, tetapi terutama melalui perpustakaan-perpustakaan yang dititipkan di tiap sekolah kelas II. Seorang guru ditugaskan untuk meminjamkan buku-buku itu kepada para murid seminggu sekali dengan bayaran yang relatif rendah. Melalui perpustakaan-perpustakaan sekolah inilah, minat dan kecintaan terhadap buku dan karya sastra dibina dan dikembangkan. Tidak puas dengan buku-buku yang terdapat dalam perpustakaan sekolah, murid-murid dapat menjadi pelanggan perpustakaan swasta yang banyak bertebaran, tidak hanya di kota-kota besar. Koleksi buku perpustakaan swasta itu kebanyakan buku-buku keluaran para penerbit swasta yang banyak bertebaran meskipun buku-buku Balai Pustaka pun biasanya tersedia.

Usaha dalam bidang penerbitan buku, kecuali penerbitan buku pelajaran sekolah yang terutama dikangkangi oleh penerbit-penerbit besar Belanda, seperti J.B. Wolters, Noordhoofd Kolff, dan Kolff, kebanyakan di tangan orang Cina dan Arab. Hanya sedikit yang di tangan orang pribumi. Orang peranakan Cina banyak menerbitkan buku cerita serial yang terbit tiap bulan, setengah bulan, bahkan tiap minggu. Kebanyakan berupa cerita silat, tetapi ada yang khusus menerbitkan roman atau cerita pendek, di antaranya *Boelan Poernama* (bulanan), *Goedang Tjerita* (bulanan), *Hiboerankoe* (bulanan), *Moestika Panorama* (bulanan), *Pelita Penghidoepan* (bulanan), *Penghidoepan*, *Tjerita Roman* (bulanan), *Boe Hiap* (tengah bulanan kemudian tiga kali sebulan), *Kiam Hiap* (bulanan), dan *Buku Mingguan*, *Buku Rupa-Rupa Cerita* (mingguan). Setiap terbit biasanya dengan ukuran (format) dan jumlah halaman yang tetap sehingga orang dapat berlangganan seperti majalah atau surat kabar. Penerbitan seperti itu kemudian diikuti oleh para pengusaha pribumi di Padang dan Medan pada tahun 1930-an dan 1940-an dengan menerbitkan cerita-cerita yang kemudian dikenal dengan sebutan "cerita picisan," antara lain karya Merayu Suksma dan Yousouf Sou'yb. Sebaiknya para penerbit Arab lebih memusatkan perhatian kepada penerbitan buku-buku agama, baik mencetak ulang buku-buku klasik yang dikenal sebagai "kitab kuning", di samping *Al-Quran*, maupun terjemahan karya para ulama terkemuka, umumnya tentang fikih dan tarikh.

Tampaknya tiap-tiap penerbit mempunyai jenis buku khusus yang diusahakannya dan ditujukan kepada lapisan pembaca yang khusus pula. Para penerbit buku Melayu Cina mempunyai segmen pasar sendiri yang tidak mengganggu usaha penerbit pribumi atau Arab. Hal itu tampak juga dalam bidang pers: ada pers "putih" (Belanda), ada pers "kuning" (Cina), dan ada pers nasional (pribumi) yang masing-masing mempunyai lingkungan pembaca sendiri. Pembaca buku Balai Pustaka tidak mau membaca buku dalam bahasa Melayu Cina yang dianggap bahasanya buruk, bahkan rusak. Sebaliknya, para pembaca buku Melayu Cina, meskipun tidak mustahil membaca buku terbitan Balai Pustaka, lebih setia kepada bacaannya sendiri. Bukan hanya, mungkin dianggap, bahasanya terlalu kaku, melainkan juga ceritanya umumnya bukan tentang dunia yang akrab dengan hidupnya (misalnya karena kebanyakan tokohnya orang Islam yang menghadapi persoalan adat yang tidak dikenal dalam dunianya).

Keadaan seperti itu berlangsung sampai kedatangan bala tentara Jepang. Dengan masuknya bala tentara Jepang menggantikan Belanda sebagai tuan, boleh dikatakan semua usaha penerbitan terhenti. Balai Pustaka juga, meskipun masih berdiri, hanya

menerbitkan buku-buku pelajaran yang jumlahnya tidak seberapa. Penerbitan buku dalam bahasa daerah dihentikan. Penerbitan buku dalam bahasa Indonesia juga terbatas sekali. Selama pendudukan Jepang hanya ada satu-dua judul buku cerita yang terbit di Balai Pustaka, termasuk terjemahan dari bahasa Jepang (melalui bahasa Jerman), sedangkan penerbitan swasta berhenti sama sekali. Karya sastra hanya ditampung dalam surat kabar dan majalah yang jumlahnya terbatas dan selalu diawasi sensor. Buku menjadi langka karena kertas menjadi barang mewah.

Menjelang akhir revolusi dan tahun-tahun awal sesudahnya tampak usaha menghidupkan kembali usaha penerbitan buku. Balai Pustaka aktif kembali, begitu juga para penerbit swasta Belanda yang khusus menerbitkan buku pelajaran. Penerbit baru yang bergerak dalam usaha penerbitan umum pun bermunculan seperti Pembangunan (*Opbouw*), Djembatan (*de Brug*), dan Gapura. Dengan Balai Pustaka mereka berlomba menerbitkan buku-buku yang baik, termasuk buku-buku karya sastra, baik asli maupun terjemahan, seperti karya-karya Pramoedya Ananta Toer, Chairil Anwar, Mochtar Lubis, Achdiat K. Mihadja, Utuy T. Sontani, dan Usmar Ismail. Karya-karya lama pun banyak yang dicetak ulang sehingga dibaca juga oleh para pemuda generasi sesudah perang.

Menjelang pertengahan tahun 1950-an, Pemerintah Indonesia tidak tahu hendak berbuat apa dengan Balai Pustaka sehingga fungsinya bertukar-tukar setiap ganti Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan (PP dan K) karena pertukaran kabinet. Pernah fungsinya hanya sebagai percetakan saja yang tugas utamanya mencetak bahan ujian. Meskipun kemudian fungsinya sebagai penerbit buku dikembalikan lagi kepada Balai Pustaka, sampai sekarang Pemerintah tampaknya masih kebingungan juga dengan Balai Pustaka, apalagi karena Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sendiri, melalui berbagai proyek yang dibentuknya, melakukan fungsi sebagai penerbit juga. Begitu juga lembaga-lembaga yang ada di bawahnya banyak yang berfungsi seperti penerbit. Karena proyek-proyek itu merupakan kebijakan Orde Baru untuk memberi kesempatan memperoleh penghasilan tambahan bagi para pegawainya yang sengaja diberi gaji kecil, uang yang disediakan untuk proyek-proyek itu tidak dapat diberikan kepada Balai Pustaka supaya dapat menjalankan fungsinya sebagai penerbit dengan baik. Arang habis besi binasa, uang proyek habis, bukunya entah ke mana karena sesuai dengan peraturan, buku hasil proyek tak dapat diperjual-belikan di toko buku. (Namun, ada beberapa toko buku antik di luar negeri yang menawarkan buku-buku penerbitan proyek-proyek itu dengan harga yang fantastis mahalnya, entah dari mana mereka memperoleh buku-buku yang ditawarkannya itu).

Jumlah sekolah dan universitas sejak Indonesia merdeka bertambah dengan pesatnya, tetapi tidak demikian dengan perpustakaan. Perpustakaan Sekolah yang dahulu diselenggarakan oleh Balai Pustaka tidak dilanjutkan. Pembentukan perpustakaan masyarakat tidak berlanjut. Kota-kota tidak dipacu agar mendirikan perpustakaan, apalagi desa-desa. Maka akibatnya, minat dan kebiasaan membaca pun tidak dipupuk. Usaha pemberantasan buta huruf hanya kosmetik belaka karena setelah melek huruf tidak disediakan bahan bacaannya. Sastra yang diajarkan di sekolah-sekolah menjadi verbal karena murid-murid tidak diberi kesempatan untuk bertemu dan

berakraban dengan buku karya sastra. Karena tidak ada perpustakaan, para penerbit menjadi enggan menerbitkan buku-buku karya sastra atau buku-buku yang tidak digemari pembaca. Dengan demikian, para penerbit berlomba-lomba menjadi penerbit buku pelajaran karena buku pelajaranlah yang jelas segmen pasarnya. Karena buku pelajaran ditentukan dan "disahkan" oleh para pejabat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, terjadilah kolusi dalam penerbitan buku pelajaran. Agar disahkan, si pejabat diminta menyusun buku pelajaran atau namanya dicantumkan dalam setiap buku pelajaran (mata pelajaran apa pun juga, karena orang Indonesia semuanya *superman*). Dan, karena pejabat sering bertukar, buku yang disahkan pun sering bertukar pula sehingga menjadi beban yang memberatkan orang tua murid. Keadaan itu oleh Pemerintah Orde Baru hendak diatasi dengan menyediakan buku pelajaran secara cuma-cuma. Para penerbit yang waspada segera memindahkan usahanya menjadi pencetak dan dengan mengadakan kolusi dengan pejabat yang bersangkutan mendapat monopoli order mencetak buku-buku pelajaran yang tirasnya jutaan eksemplar. Ketika akhirnya dana dari Bank Dunia untuk menyediakan buku pelajaran habis dan Pemerintah tidak mampu lagi menyediakan semua buku pelajaran, penyediaan buku pelajaran diserahkan kembali kepada penerbit swasta, kecuali buku-buku mata pelajaran pokok. Akhirnya, terjadi lagi kolusi antara penerbit dengan para pejabat dalam penyusunan dan pengesahan buku untuk dipakai di sekolah. Lebih hebat lagi karena sekarang para penerbit diperbolehkan langsung menjual buku ke sekolah (waktu saya menjadi Ketua Ikapi, pernah secara khusus kami minta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar pembelian buku, termasuk pembelian buku untuk Inpres Perpustakaan, dilakukan melalui toko buku dan permintaan itu dipenuhi, tetapi tampaknya diabaikan oleh pejabat yang kemudian). Guru-guru yang gajinya tidak cukup ditawari televisi, motor, dan lain-lain, asal mau menjualkan buku mereka kepada murid-muridnya.

Inpres Perpustakaan Sekolah Dasar lahir sebagai hasil pembicaraan saya, sebagai Ketua Ikapi, dengan Dirjen Pendidikan pada waktu itu (1974), Prof. Dr. M. Makagiansar, tentang perlunya sekolah-sekolah mempunyai perpustakaan. Persoalan tersebut dibawa oleh beliau ke sidang kabinet yang kebetulan sedang membicarakan hendak diapakan kelebihan hasil penjualan minyak bumi yang mengalami pelonjakan harga dengan adanya krisis energi (1973). Inpres Perpustakaan Sekolah Dasar itu pada dasarnya hendak menyediakan buku-buku perpustakaan bagi sekolah dasar di seluruh Indonesia. Setiap tahun setiap sekolah akan diberi kira-kira 100 judul buku. Dengan demikian, dalam waktu sepuluh tahun diharapkan sudah tersedia 1.000 judul buku. Namun, sejak awal proyek ini tidak disiapkan dengan matang sehingga tidak saja tidak pernah jelas kebijakan pemilihan buku yang dibelinya, tetapi juga tidak ditopang oleh penyediaan ruangan khusus untuk perpustakaan di setiap sekolah dan penataran guru atau penyediaan tenaga yang hendak mengurus perpustakaan itu.

Karena tidak ada perpustakaan yang dapat menunjang para penerbit dengan membeli buku-buku yang mereka terbitkan, orientasi para penerbit, kecuali terhadap usaha penerbitan buku-buku yang akan dipesan Pemerintah secara besar-besaran, adalah menerbitkan buku-buku yang sedang menjadi tumpuan minat orang banyak

seperti tentang manajemen, komputer, masak-masakan, berbagai macam “buku pintar”, cerita pop, atau buku-buku biografi yang dananya disediakan oleh tokoh yang dituliskan biografinya atau oleh keluarganya. Hanya penerbit-penerbit buku agama yang dapat bertahan karena buku yang diterbitkannya boleh dikatakan selalu disambut oleh para pembaca (dan pembeli). Jelas kiranya bahwa buku-buku sastra, umumnya, bukanlah buku yang ditunggu-tunggu para pembaca sehingga para penerbit enggan menerbitkannya.

Dengan tidak terlaksananya pendidikan apresiasi sastra dengan baik, karena anak-anak tidak sejak dini dibiasakan membaca karya sastra, minat masyarakat terhadap sastra pun rendah. Motivasi untuk itu pun tidak ada. Kalau membeli dan membaca buku tentang manajemen, komputer, atau ilmu yang lain menjanjikan peningkatan kemampuan yang segera akan terasa manfaatnya, membaca buku sastra tidaklah menjanjikan apa-apa. Orang bisa mengatakan bahwa membaca sastra itu memperkaya rohani kita, membuat kita menjadi lebih maklum tentang hidup atau semacamnya, tetapi hal-hal demikian itu sangat abstrak dan tidak dapat diukur dengan kriteria yang dapat diterima oleh semua orang, yaitu uang. Bangsa Indonesia yang sejak kecil melalui pendidikan dan lingkungan dididik supaya praktis dan pragmatis menganggap bahwa membaca buku itu secara umum tidak memberikan manfaat apa-apa kepadanya, buang waktu.

2. Kondisi yang Diharapkan

Tentu saja kita tidak mengharapkan dan tidak menghendaki bangsa kita menjadi bangsa yang tidak tahu menghargai buku, menjadi bangsa yang tidak membaca, yang menganggap bahwa pertemuan dengan buku sudah selesai begitu kita keluar sekolah atau selesai menulis skripsi. Kita ingin bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju dan tidak ada bangsa yang maju yang tidak membaca. Bangsa yang maju ternyata semuanya memiliki industri perbukuan yang maju. Namun, mereka yang berusia di atas 50 tahun, niscaya dapat membandingkan kegemaran dan kebiasaan membaca bangsa kita 30--40 tahun yang lalu dengan sekarang. Dan, kalau dia jujur, niscaya harus mengakui bahwa dalam soal kebiasaan dan kegemaran membaca, apalagi membaca karya sastra dan buku bacaan umum, bangsa kita mengalami kemunduran yang luar biasa. Secara statistik hal itu dengan mudah dapat dilihat jika kita membandingkan jumlah buku yang terbit dan dikonsumsi masyarakat dengan jumlah penduduk tiap-tiap zaman. Kian lama bangsa kita tidak kian gemar dan butuh membaca, tetapi sebaliknya. Padahal, jumlah sekolah dan universitas berlipat-lipat naiknya. Jangankan dengan negara maju, dengan sesama negara berkembang pun kita kalah dalam soal peningkatan kegemaran membaca dan industri perbukuan. Malaysia, umpamanya memperlihatkan kemajuan yang mengesankan dalam bidang penerbitan buku dan pembinaan perpustakaan yang secara terus-menerus didorong oleh Pemerintah dan para sastrawan serta kaum cendekiawannya, terutama sejak tahun 1971. Sebelum merdeka, Persekutuan Tanah Melayu (yang kemudian menjadi Malaysia) merasa perlu mengirim orang-orangnya untuk mempelajari organisasi Balai Pustaka yang dianggapnya patut dicontoh untuk pengembangan perbukuan mereka. Setelah merdeka, mereka mendirikan Dewan Bahasa dan Pustaka yang

menjadi tulang punggung dan motor pembinaan dan pengembangan perbukuan, apresiasi sastra, dan perpustakaan mereka. Sementara lembaga yang dicontohnya kian terpuruk, Dewan Bahasa dan Pustaka setiap tahun menerbitkan ratusan judul buku, termasuk buku-buku karya dan telaah sastra, baik yang lama maupun yang baru. Karena selama tiga puluh tahun perpustakaan sudah melembaga, penerbitan karya sastra tidaklah menjadi proyek rugi karena setiap judul baru akan dapat ditampung. Kegiatan itu pun diikuti oleh para penerbit swasta yang semula hanya milik orang putih dan Cina.

Karena kegemaran membaca sudah tinggi, minat untuk mempunyai buku sendiri juga meningkat, termasuk buku-buku karya sastra. Dan, kebutuhan untuk itu dipenuhi melalui toko-toko buku yang peranannya sebagai perantara antara produsen dan konsumen tetap dijaga dan dihormati oleh penerbit. Dengan demikian, mata rantai penerbit-toko buku-perpustakaan menjadi kukuh. Dan, hanya jika mata rantai ketiga komponen itu kukuh sajalah, pembinaan dan pengembangan perbukuan akan sehat. Kukuhnya mata rantai ketiga komponen itu akan menumbuhkan iklim yang baik pula bagi dua komponen lainnya, yaitu pengarang dan percetakan. Oleh karena itu, tiap-tiap komponen harus saling menjaga dan saling memelihara dan bukannya saling potong atau saling bunuh demi keuntungan sendiri sebab keuntungan yang diperoleh itu akan bersifat sementara yang dalam jangka panjang akan membunuh dirinya sendiri juga. Penerbit yang langsung berhubungan dengan guru-guru agar bukunya dipakai di sekolah-sekolah telah membunuh toko-toko buku. Dan, dalam jangka panjang dia akan terbunuh juga, yaitu kalau muncul penerbit lain yang dapat memberikan potongan lebih besar kepada guru-guru itu. Karena guru-guru itu bukan pengusaha, tidak mustahil apabila mereka tidak membayarkan uang hasil penjualannya dengan tepat. Dan, kalau terjadi hal seperti itu, sang penerbit tidak akan dapat berbuat apa-apa. Jika pengusaha ingin mengadukan sang guru kepada atasannya, berarti ada pengeluaran ekstra lagi dan tidak menjamin bahwa uang yang tidak dibayarkan akan masuk. Sebagai guru, mereka tidak mempunyai dan tidak mengenal etika kehormatan pedagang buku.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu ditumbuhkan kembali organisasi pedagang buku, seperti pada tahun 1950-an ada Persatuan Toko Buku Indonesia (PTBI), sebagai partner organisasi para penerbit (Ikapi). Mungkin saja ada perusahaan penerbit yang mempunyai juga toko buku, tetapi sebenarnya manajemen toko buku berlainan dengan penerbit sehingga memerlukan penanganan tersendiri.

Tentu saja terbentuknya perpustakaan yang baik di sekolah-sekolah atau di tempat-tempat lain, misalnya di tiap kota kabupaten, lebih ideal kalau di tiap kota kecamatan harus disertai dengan pembinaan kegemaran dan kebiasaan membaca. Seperti pernah saya katakan bahwa kegemaran dan kebiasaan membaca bukanlah bakat yang diturunkan oleh Tuhan kepada orang-orang tertentu, melainkan kebiasaan yang harus dididikkan sejak kecil, sebaiknya sejak dini di rumah oleh orangtuanya masing-masing. Namun, karena kebanyakan orang tua kita sendiri tidak akrab dengan buku, kegemaran dan kebiasaan itu harus dimulai di sekolah. Celakanya, di sekolah, selain tidak ada perpustakaan yang baik, gurunya pun sudah telanjur tidak suka membaca.

Oleh karena itu, seperti pernah saya sarankan kira-kira seperempat abad yang lalu, perbaikan harus dimulai di sekolah yang menghasilkan guru, yaitu IKIP. Para mahasiswa IKIP harus dibiasakan supaya gemar membaca dan akrab bergaul dengan buku supaya mereka dapat menularkan kegemaran dan kebiasaannya itu kepada murid-muridnya kelak. Mudah-mudahan berita bahwa IKIP akan dihapus dan dijadikan universitas tidak jadi dilaksanakan karena bahkan negara-negara maju pun menganggap perlu mempunyai lembaga khusus untuk mendidik guru. Saya kira IKIP dan universitas itu mempunyai fungsi dan tujuan yang berbeda, yang keduanya sama-sama diperlukan dalam sebuah negara.

3. Strategi yang Perlu Ditempuh

Dari uraian tadi akan jelas kiranya bahwa kita di Indonesia harus mulai dengan menata kembali dasar-dasar pembinaan dan pengembangan perbukuan yang selama hampir setengah abad ini hancur. Padahal, dunia yang kita hadapi sekarang penuh dengan tantangan-tantangan baru yang gencar, baik berupa kemajuan teknologi maupun hilangnya batas antarnegara dalam era globalisasi. Jika kita mulai menanamkan kegemaran membaca dalam zaman teknologi elektronika sudah demikian canggih, hal itu terasa ironis. Mengapa anak-anak Indonesia tidak langsung saja meloncat dari abad batu ke abad elektronika, tanpa melalui dulu peradaban buku? Tentu saja bisa dan telah terjadi sebenarnya. Anak-anak telah terampil mengoperasikan komputer walaupun tidak suka membaca buku.

Masalahnya, seperti diakui oleh para ahli sendiri, walaupun penemuan teknologi informasi telah demikian canggih, ternyata buku masih diperlukan. Buku ternyata masih mempunyai peranan yang penting dalam peradaban teknologi canggih. Uraian yang bersifat filsafat dan yang memerlukan pemikiran yang mendalam masih juga harus disampaikan secara tertulis, yang umumnya berbentuk buku. Meskipun sekarang diproduksi juga secara besar-besaran kaset audio yang berupa pembacaan karya-karya sastra utama oleh para aktor piawai, tetap saja kita butuh membaca karya tersebut secara langsung dari bukunya. Kalau kita hanya mendengarkan suara orang yang membacakannya, hal itu tak ubahnya dengan menyaksikan pertunjukan lakon Shakespeare di atas pentas. Kita masih merasa butuh membacanya sendiri. Membaca karya sastra masih merupakan pertemuan langsung seseorang secara personal. Dan, itu hanya dapat dilaksanakan dengan membaca bukunya sendiri. Di samping itu, meski relatif mahal bagi umumnya bangsa kita, buku masih lebih murah dan praktis daripada alat-alat elektronik seperti televisi dan alat perekam meskipun sekarang banyak yang mudah dibawa ke mana-mana (*portable*).

Melalui buku-buku di perpustakaan anak-anak sejak kecil harus sudah diperkenalkan dengan karya-karya sastra utama, baik yang merupakan kekayaan tradisi bangsa kita yang terdapat dalam bahasa-bahasa daerah, kekayaan sastra modern kita yang ditulis dalam bahasa nasional dan bahasa-bahasa daerah tertentu, maupun kekayaan sastra dunia yang berasal dari delapan penjuru mata angin. Namun, di samping karya-karya sastra, perpustakaan pun harus menyediakan buku-buku lain yang akan memperluas cakrawala pemikiran dan imajinasi serta mengasah kehalusan perasaan para pembaca muda seperti buku-buku biografi orang-orang besar, buku-

buku karya para pendiri negara (*founding fathers*), seperti H.O.S. Tjokroaminoto, H. Agus Salim, Soekarno, M. Hatta, Ki Hadjar Dewantara, St. Sjahrir, M. Natsir, dan Sjafruddin Prawiranegara, buku-buku kisah petualangan menjelajah bumi dan angkasa, kisah penemuan-penemuan besar, dan kisah perjuangan bangsa-bangsa. Buku petunjuk tentang bagaimana membetulkan televisi atau bagaimana menanam durian atau membuat tempe juga boleh disediakan, tetapi yang utama harus disediakan adalah buku-buku yang dapat merangsang rasa penasaran anak-anak yang membacanya untuk mengetahui lebih banyak (dan dengan demikian membaca lebih banyak), untuk mengembangkan imajinasi lebih luas, untuk berpikir lebih mendalam, untuk melakukan percobaan-percobaan sendiri. Dengan demikian, melalui buku-buku yang dibacanya, anak-anak kita akan menjadi manusia yang cerdas dan penuh inisiatif, percaya diri, berani melakukan penjelajahan ke daerah-daerah baru yang tidak dikenal atau hal-hal yang sebelumnya tidak diketahui.

Untuk menyediakan buku-buku demikian diperlukan penulisan secara profesional sehingga jangan sampai terjadi lagi para pengarang menjadi pabrikan naskah untuk mengejar Proyek Inpres. Akibatnya, buku-buku yang dihasilkannya banyak yang asal-jadi, apalagi tanpa melalui proses penyuntingan yang baik. Tenaga penyunting profesional kita memang kurang. Para penerbit banyak yang tidak menganggap penting penyunting sehingga tidak merasa perlu mempunyai penyunting. Dan, banyak penyunting (yang walaupun sekarang mencantumkan namanya dalam buku tersebut--suatu kebiasaan yang kita tiru dari Australia) tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Dia tidak saja tidak berusaha membuat naskah yang disuntingnya menjadi buku yang menarik dan enak dibaca, tetapi bahkan kalimat-kalimat rancu yang terdapat dalam naskah itu pun tidak sempat diperbaikinya.

Tugas penyunting tidak hanya memperbaiki bahasa naskah sehingga jangan sampai mengandung kalimat-kalimat rancu, tetapi terutama mengemas naskah pengarang menjadi santapan yang enak setelah menjadi buku, bahkan kalau perlu membimbing pengarang agar menyusun naskah sesuai dengan harapan penyunting. Dengan kata lain, penyunting berperan sebagai orang yang mewakili kepentingan pembaca supaya mereka jangan merasa rugi mengeluarkan uang untuk membeli buku.

Sudah terang bagaikan siang agaknya bahwa untuk melaksanakan pengembangan perbukuan di negara kita, yang pertama-tama diperlukan adalah adanya kehendak politik (*political will*) dari Pemerintah. Untuk sampai pada tumbuhnya kehendak politik itu, Pemerintah harus sadar akan pentingnya buku sebagai sarana pencerdasan bangsa dan pengembangan kebudayaan. Industri perbukuan bukan hanya kegiatan bisnis semata, bahkan terutama bukan kegiatan bisnis, melainkan suatu kegiatan budaya. Meskipun produknya dijual seperti sepatu, buku bukanlah sepatu. Kalau sepatu hanya menjaga supaya kaki kita jangan kotor atau terinjak duri, buku mempunyai peranan yang penting bagi perkembangan jiwa dan kecerdasan yang membacanya.

Hanya dengan adanya kehendak politik sajalah perkembangan perbukuan kita akan menemukan relnya yang benar. Karena tanpa kehendak politik, banyak hambatan yang sekarang (sebenarnya sudah puluhan tahun) menghadang, akan tetap tidak

tergeser. Sampai sekarang Pemerintah tidak pernah menunjukkan kehendak politik untuk mengembangkan perbukuan di Indonesia secara fundamental dan konsisten. Yang sering disampaikan hanya sekedar *lip service* belaka yang tidak diikuti oleh adanya kebijakan yang berencana. Kalau kita memperhatikan tuntutan Ikapi sekarang, misalnya, isinya sama saja dengan tuntutan yang pernah saya perjuangkan ketika menjadi Ketua Ikapi. Padahal, saya sudah berhenti dua puluh tahun yang lalu: soal kertas, soal pajak penjualan, soal pajak pengarang, soal ongkos kirim, dan sebagainya. Banyak profesor menjadi menteri, tetapi tidak ada juga yang memahami bahwa pemungutan pajak pengarang yang disamakan dengan honorarium komisaris perusahaan itu, tidak saja tidak adil karena bagi si pengarang merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk menopang hidupnya, tetapi juga dapat membunuh minat pengarang untuk menjadi kreatif. Lagi pula walaupun pajak pengarang itu dihapuskan, negara tidak akan rugi karena jumlah honorarium pengarang di seluruh Indonesia ini setiap tahunnya tidak akan seberapa mengingat jumlah buku yang terbit dan terjualnya pun tidak seberapa. Paling hanya 2--3 ratus juta rupiah saja setahun. Jumlah yang tak ada artinya bagi Pemerintah, tetapi besar manfaatnya untuk merangsang hidup kreatif pengarang.

Balai Pustaka yang pernah mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan budaya kita sebagai bangsa hendaknya diberi peranan itu kembali, yaitu menyediakan buku-buku bacaan yang baik, termasuk karya-karya sastra, yang penggunaan bahasanya dapat menjadi contoh penggunaan bahasa "yang baik dan benar" dengan mendudukan para sastrawan dan ahli bahasa terkemuka di dalamnya. Kalau ada perpustakaan-perpustakaan sekolah yang akan membeli buku-buku yang baik, niscaya tak perlu ada subsidi tahunan untuk Balai Pustaka karena bersama dengan para penerbit lain, ia harus berlomba menerbitkan buku-buku bermutu untuk ditawarkan kepada perpustakaan-perpustakaan itu. Yang penting, tentu saja, dalam memilih buku untuk mengisi perpustakaan itu harus bebas dari kolusi, berdasarkan kriteria yang jelas merangsang kehidupan intelektual dan kreativitas para pembaca muda, serta memperluas cakrawala pengetahuan dan perasaannya. Meskipun di tingkat nasional atau provinsi dapat dibuat daftar buku yang direkomendasikan untuk mengisi perpustakaan, hendaknya ada juga kebebasan bagi penyelenggara perpustakaan itu untuk memilih buku yang dianggapnya tepat untuk bacaan para anggotanya.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok D1
Hari, Tanggal, Pukul	: Selasa, 27 Oktober 1998, 13.30--14.20
Judul Makalah	: Pengembangan Perbukuan sebagai Upaya Peningkatan Mutu Kebahasaan dan Kesastraan
Penyaji	: Ajip Rosidi
Pemandu	: Harahap
Pencatat	: a. Junaiyah H.M. b. Buha Aritonang
Peserta	: 50 orang

Tanya Jawab

1. **Penanya:** Kholid Havas, IKIP Bandung

a. **Pertanyaan:**

Menurut pendapat saya, dalam era reformasi ini fungsi Balai Pustaka harus dikembalikan seperti pada fungsi awalnya, yaitu untuk menumbuhkan minat baca sehingga untuk tujuan itu bacaan anak-anak harus dibenahi. Bagaimana pendapat Bapak?

b. **Jawaban:**

Ketika masih menjadi Ketua Ikapi, saya sudah mengharapkan agar pihak Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan buku bacaan yang disenangi anak-anak. Akan tetapi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada waktu itu, Daoed Joesoef, menginginkan buku yang dapat memberikan ilmu kepada anak-anak. Saya katakan pada waktu itu bahwa anak-anak akan mendapatkan ilmu dari buku yang lain, yakni buku pelajaran.

2. **Penanya:** Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta

a. **Pertanyaan:**

Orang Ikapi berbicara tentang "proyeknya" dan penulis berbicara tentang isi buku. Isi buku sudah lolos, tetapi Ikapi dan penulis buku "berkelahi" tentang uang. Untuk itu, saya harap Ikapi membedakan kedua hal tersebut sehingga honor pengarang harus dinaikkan dan pajak pengarang dihapuskan. Mengapa minat baca di negara kita menurun?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak dijawab karena waktu penyajian telah habis.)

3. **Penanya:** Suroso, IKIP Yogyakarta

a. **Pertanyaan:**

Apakah Bapak masih mempunyai *power* untuk memberikan tekanan kepada DPR/MPR dan pihak eksekutif agar menyediakan sarana baca untuk men-
cerdaskan kehidupan bangsa?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak dijawab karena waktu penyajian telah habis.)

4. **Penanya:** Sugirah Wahid, IKIP Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Saya ingin sekali agar Bapak mengutarakan apa saja yang harus kita minta dari Pemerintah dan upaya apa saja yang harus dilakukan untuk meningkatkan minat baca, baik minat baca guru maupun minat baca anak didik, serta upaya apa saja yang dilakukan untuk penyediaan buku.

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak dijawab karena waktu penyajian telah habis.)

5. **Penanya:** Subagiyono, Universitas Sriwijaya, Palembang

a. **Pertanyaan:**

Saya mohon penjelasan mengenai kondisi masa lalu sehingga masyarakat pada masa itu memiliki minat baca yang tinggi?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak dijawab karena waktu penyajian telah habis.)

6. **Penanya:** Eni Suwanti, Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang

a. **Pertanyaan:**

Setelah mencermati kurikulum, ternyata pengajaran sastra berorientasi pada sastra lama, misalnya sastra karya Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, dan itu yang diajarkan kepada siswa. Akan tetapi, untuk sastra karya Angkatan '80 hampir tidak ada yang diajarkan di sekolah. Apakah hal itu karena tidak ada buku sastra yang terbit pada tahun 80-an ataukah karena buku-buku itu tidak layak diajarkan di sekolah? Sementara itu, siswa SLTP biasanya suka sekali membaca buku novel atau cerpen, tetapi mereka dilarang membaca buku seperti itu. Apakah itu tidak "membunuh" minat baca siswa?

b. **Jawaban:**

(Pertanyaan tidak dijawab karena waktu penyajian telah habis.)

PENINGKATAN MUTU TENAGA KEBAHASAAN DALAM PEMBINAAN BAHASA INDONESIA

S. Effendi

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pendahuluan

Panitia Kongres Bahasa Indonesia VII meminta saya menulis makalah tentang peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan. Permintaan itu mengisyaratkan bahwa pembahasan topik itu tidak hanya berkaitan dengan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, tetapi juga dengan pembinaan bahasa dan sastra daerah. Topik itu mencakup masalah yang cukup luas dan pelik. Informasi mengenai topik itu amat terbatas. Karena itu, makalah ini membahas topik itu hanya dalam kaitannya dengan pembinaan bahasa Indonesia. Karena itu pula, makalah ini akan mengungkapkan lebih dulu secara selintas konsepsi pembinaan, termasuk pengembangan, bahasa Indonesia dan apa yang dimaksud dengan tenaga kebahasaan serta peranannya dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Pembinaan bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia, baik lisan maupun tertulis, dan memantapkan sikap bahasa yang positif di kalangan masyarakat luas. Pemakaian bahasa Indonesia yang bermutu dalam berkomunikasi adalah pemakaian bahasa Indonesia yang cocok dengan maksud pemakaiannya dan bagi lawan bicara/pembaca, jelas dalam menyampaikan maksud (tidak menimbulkan tafsiran ganda), cermat dalam mengungkapkan pikiran (tidak rancu), dan hemat dalam menggunakan kata sehingga pemakaian bahasa itu efektif. Sikap bahasa yang positif adalah reaksi positif orang seorang terhadap suatu bahasa, dalam hal ini bahasa Indonesia, yaitu reaksi orang seorang yang menunjukkan kesetiiaannya menggunakan bahasa Indonesia dan memeliharanya dari pengaruh buruk bahasa lain, kebanggaannya memiliki dan bergairah menggunakan bahasa Indonesia, dan kesadarannya akan adanya aturan bahasa yang perlu ditaati dalam berbahasa Indonesia.

Pengembangan bahasa Indonesia bertujuan meningkatkan mutu bahasa Indonesia, baik struktur maupun fungsinya, dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia yang bermutu adalah bahasa Indonesia yang strukturnya mantap (minimum dalam variasi bentuk), tetapi luwes demi pemekaran fungsinya (maksimum dalam variasi fungsi), seperti fungsi sebagai bahasa filsafat, bahasa ilmu dan teknologi, bahasa bisnis, bahasa administrasi, bahasa hukum, bahasa jurnalistik, dan bahasa sastra.

Salah satu faktor penting yang dapat menentukan berhasil tidaknya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia mencapai tujuannya adalah tenaga kebahasaan. Tenaga kebahasaan adalah orang seorang atau sekelompok orang yang secara sadar ikut serta melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia. Mereka terutama adalah

- (1) guru bahasa Indonesia sekolah dasar dan menengah,
- (2) penyuluh bahasa Indonesia,
- (3) penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia (kamus, buku pelajaran, buku panduan, tata bahasa, dan sarana lain),
- (4) penyunting bahasa Indonesia, dan
- (5) peneliti bahasa dan sastra Indonesia.

Guru bahasa Indonesia sekolah dasar dan sekolah menengah adalah pelaksana utama pembinaan bahasa Indonesia secara berencana, bertahap, dan berkelanjutan dalam jangka panjang melalui pengajaran bahasa dan sastra Indonesia. Penyuluh bahasa Indonesia adalah pelaksana penunjang pembinaan bahasa Indonesia yang bersifat sementara, selama mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat pada umumnya dianggap rendah, melalui penyuluhan bahasa Indonesia umum dan bahasa Indonesia untuk berbagai maksud khusus. Penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia adalah juga pelaksana utama pembinaan bahasa Indonesia melalui penyediaan bahan rujukan dan panduan dalam berbagai bentuk terbitan bagi pemakai dan pembelajar bahasa Indonesia. Penyunting bahasa Indonesia adalah penunjang pembinaan bahasa Indonesia melalui penerapan kaidah bahasa hasil pembakuan dalam penyuntingan naskah bahasa Indonesia untuk berbagai maksud. Peneliti bahasa dan sastra Indonesia berperan penting dalam pembinaan bahasa Indonesia melalui penyediaan informasi kebahasaan dan kesastraan Indonesia untuk pengembangan teori dan untuk keperluan praktis seperti pembukuan, pengajaran, dan penyuluhan. Guru, penyuluh, penyusun, penyunting, dan peneliti itu merupakan kelompok strategis, kelompok yang dapat mempercepat tercapainya tujuan pembinaan bahasa Indonesia asalkan mutu mereka dapat diandalkan dalam melihat peluang dan menghadapi tantangannya dalam era informasi dan globalisasi.

Makalah ini akan mengungkap masalah mutu tenaga kebahasaan secara garis besar dalam hubungan dengan empat pertanyaan berikut.

- (1) Bagaimana mutu tenaga kebahasaan itu pada saat ini, baik kekuatan maupun kelemahannya?
- (2) Bagaimana mutu tenaga kebahasaan yang dicita-citakan pada masa mendatang, baik peluang maupun tantangannya?
- (3) Bagaimana strategi peningkatan mutu tenaga kebahasaan itu, termasuk pemrioritas dan asas pengelolaannya?
- (4) Upaya apa saja yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai tujuan peningkatan mutu tenaga kebahasaan itu?

Pengungkapan masalah mutu itu dilakukan berdasarkan pengalaman pribadi dan pengamatan berbagai kegiatan penataran, penyuluhan, pengajaran, dan penyuntingan, serta sejumlah karya laporan penelitian bahasa dan sastra Indonesia sejak tahun tujuh puluhan. Sehubungan dengan masalah mutu guru, makalah ini tidak akan menyinggung bagaimana upaya peningkatannya karena keterbatasan informasi.

2. Mutu Tenaga Kebahasaan Saat Ini

Apakah yang dimaksud dengan mutu? Mutu sesuatu adalah taraf atau derajat atau kadar sesuatu, terutama kadar yang positif, dan bermanfaat bagi sesuatu yang lain. Kita dapat mengatakan bahwa sesuatu, misalnya buku, isinya baik (tidak buruk), cara penyajiannya teratur (tidak berbelit-belit), dan bahasanya mudah (tidak sukar). Sifat baik, teratur, dan mudah adalah kadar positif (tinggi) atau mutu tinggi buku itu. Buku yang bermutu seperti itu bermanfaat bagi pembacanya. Kita juga dapat mengatakan bahwa buku itu isinya buruk, cara penyajiannya berbelit-belit, dan bahasanya sukar. Sifat buruk, berbelit-belit, dan sukar adalah kadar negatif (rendah) atau mutu rendah buku itu. Buku yang bermutu rendah tidak atau kurang bermanfaat bagi pembacanya. Dengan kata lain, bermutu atau tidaknya sesuatu (barang atau orang) berkaitan dengan bermanfaat tidaknya sesuatu itu bagi sesuatu yang lain.

Bagaimana mutu tenaga kebahasaan kita dalam pembinaan bahasa Indonesia saat ini? Mengukur atau menilai mutu seseorang bukanlah pekerjaan mudah. Penilaian mutu seseorang dapat dipercaya dan sah apabila berdasarkan hasil telaah dan penelitian yang saksama. Penilaian mutu tenaga kebahasaan yang dikemukakan berikut ini tidak berdasarkan hasil telaah dan penelitian yang saksama, tetapi berdasarkan:

- a. hasil telaah dan pengamatan (1) seratus naskah laporan penelitian bahasa dan sastra dari para peneliti pusat dan daerah, (2) seratus karya tulis guru sekolah menengah dari berbagai daerah (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sumatera Utara, DI Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara), (3) beberapa buku sarana pembinaan bahasa Indonesia terbitan swasta, (4) makalah bahan penyuluhan bahasa Indonesia dari para penyuluh, (5) hasil suntingan beberapa buku terbitan Pusat Bahasa, (6) hasil tes sederhana bahasa Indonesia empat ratus guru sekolah dasar di lima wilayah DKI (Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat) dan
- b. pertimbangan pribadi berkat pengalaman sebagai penatar dalam penataran penyuluh, penyunting, dan peneliti sejak tahun tujuh puluhan dan sebagai guru bahasa dan sastra Indonesia sejak tahun lima puluhan.

Hasil telaah dan pengamatan menunjukkan bahwa naskah laporan penelitian, karya tulis guru sekolah menengah, buku sarana pembinaan bahasa Indonesia, dan makalah bahan penyuluhan bahasa Indonesia pada umumnya bermutu rendah dalam hal isi, cara penyajian, dan bahasanya; dan bahwa pemakaian bahasa Indonesia buku hasil penyuntingan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada umumnya juga bermutu rendah dalam hal kecocokan atau kepatutan bagi pembaca, kejelasan pengungkapan maksud, kecermatan pikiran, dan kehematan pemakaian kata. Hasil tes pemakaian bahasa Indonesia guru sekolah dasar juga menunjukkan bahwa kemampuan mereka menggunakan bahasa Indonesia baku pada umumnya rendah, bernilai rata-rata 50.

Hasil telaah dan pengamatan itu mengisyaratkan bahwa pada umumnya mutu tenaga kebahasaan (guru bahasa dan sastra Indonesia, penyuluh bahasa Indonesia, penyunting bahasa, penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia, dan peneliti bahasa

dan sastra) dalam pembinaan bahasa Indonesia rendah dalam arti bahwa mereka

- (1) memiliki pengetahuan dan wawasan yang tidak memadai tentang bahasa dan sastra Indonesia dan tentang tugas dan fungsinya;
- (2) memiliki kemampuan yang tidak memadai untuk menerapkan pengetahuan dan wawasan itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- (3) kurang berinisiatif, kritis, dan kreatif mengembangkan tugas dan fungsinya serta kurang terbuka menerima gagasan pembaharuan, layaknya perilaku sebuah mesin.

Keluhan mengenai rendahnya mutu lulusan sekolah dasar dan menengah dan lulusan strata satu bidang bahasa dan sastra Indonesia lembaga pendidikan tinggi dari beberapa pakar dan pemakai lulusan itu juga mengisyaratkan rendahnya mutu guru dan mutu tenaga kebahasaan (penyuluh, penyusun, penyunting, dan peneliti). Akan tetapi, pada umumnya mereka, terutama guru sekolah dasar dan menengah, memiliki rasa tanggung jawab dan pengabdian yang memadai dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya meskipun standar gaji mereka rendah, atau sangat rendah jika dibandingkan dengan standar gaji mereka seprofesi, misalnya, di Malaysia.

Mengapa mutu mereka pada umumnya rendah? Mereka yang berprofesi sebagai penyuluh bahasa Indonesia, penyunting bahasa Indonesia, dan peneliti bahasa dan sastra pada umumnya adalah lulusan perguruan tinggi dan sebagian dari mereka telah mendapat penataran khusus, antara lain penataran yang diselenggarakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Penataran itu diselenggarakan tentulah dengan tujuan meningkatkan mutu mereka. Akan tetapi, pengamatan menunjukkan bahwa mutu lulusan penataran itu pada umumnya belum mencapai taraf yang diharapkan. Meningkatkan mutu seseorang bukanlah pekerjaan yang mudah. Mutu seseorang tidak tercipta seketika, tetapi tercipta dalam suatu proses yang panjang.

Ada beberapa kendala yang menyebabkan tujuan penataran tidak tercapai. Salah satu di antaranya yang penting berkaitan dengan iklim belajar-mengajar. Penataran yang pernah diselenggarakan cenderung menciptakan iklim belajar-mengajar yang tidak mengembangkan kreativitas dan kemampuan belajar sendiri para petatar karena penataran lebih mementingkan tumbuhnya keseragaman berpikir.

3. Mutu Tenaga Kebahasaan yang Dicitakan

Mutu yang dicita-citakan atau yang diharapkan dimiliki tenaga kebahasaan pada waktu mendatang harus sejalan dengan tujuan pembinaan, termasuk pengembangan, bahasa Indonesia. Tujuan pembinaan bahasa Indonesia harus selaras dengan visi kita tentang bahasa Indonesia dan pembinaannya pada abad mendatang, abad informasi global, abad yang dikuasai ilmu dan teknologi tinggi.

Beberapa puluh tahun mendatang, bahkan sampai akhir abad ke-21, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara akan makin mantap, tidak akan tergoyahkan oleh bahasa daerah atau bahasa asing mana pun. Mengapa? Dalam sejarah perkembangannya, bahasa Indonesia telah membuktikan dirinya dalam waktu yang relatif singkat mampu berfungsi sebagai lambang jati diri bangsa Indonesia dan alat pemersatu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, bahasa, adat-istiadat, dan agama. Fungsi itu akan makin mantap pada abad mendatang. Lenyapnya fungsi itu

berarti lenyapnya bangsa Indonesia. Juga dalam waktu yang relatif singkat, bahkan amat cepat jika dibandingkan dengan perkembangan bahasa lain, bahasa Indonesia mampu berfungsi sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan, bahasa kenegaraan dan administrasi pemerintahan, dan bahasa ilmu dan teknologi. Fungsi-fungsi itu juga akan makin mantap, tidak akan diambil alih oleh bahasa daerah atau bahasa asing mana pun. Merosotnya fungsi-fungsi itu berarti merosotnya kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara.

Bahasa Indonesia adalah bahasa hidup, baik struktur maupun fungsinya, terus berkembang. Pada abad mendatang strukturnya akan makin mantap (stabil) dan mampu mengungkapkan kecendekiaan (kecermatan pikiran dan nalar), tetapi tetap luwes (fleksibel) demi pemekaran fungsinya sebagai sarana komunikasi. Dengan kata lain, variasi bentuknya dalam mengungkapkan kecendekiaan makin sedikit (minimum) sehingga relatif seragam, tetapi bentuk itu, baik berupa kata maupun gaya, terus berkembang bertambah kaya sehingga variasi fungsinya sebagai sarana komunikasi juga semakin kaya (maksimum). Perkembangan itu dimungkinkan karena bahasa Indonesia bersifat terbuka dalam menerima pengaruh bahasa lain, bahasa daerah, dan bahasa asing, dan apabila ada upaya pembakuan yang tepat. Pembakuan yang menghambat pemekaran fungsi bahasa Indonesia akan melahirkan bahasa Indonesia yang beku alih-alih baku, bahasa yang tidak menumbuhkan kebanggaan bangsa. Pembakuan yang memekarkan fungsi bahasa Indonesia akan mengangkat bahasa Indonesia sebagai bahasa baku yang andal, yang berwibawa, wibawa yang menumbuhkan kebanggaan bangsa dan memungkinkan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk komunikasi lebih luas, bahasa antarbangsa, sekurang-kurangnya bahasa antarbangsa rumpun Melayu di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Philipina, Madagaskar, Afrika Selatan, dan Suriname.

Gambaran peluang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia pada masa mendatang beserta tantangannya seperti dikemukakan di atas mengisyaratkan bagaimana seharusnya tujuan pembinaan, termasuk pengembangan, bahasa Indonesia, yaitu memantapkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara dengan meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia dan meningkatkan suatu bahasa Indonesia seperti dijelaskan pada awal tulisan ini. Lalu, bagaimana mutu yang diharapkan dimiliki tenaga kebahasaan dalam pembinaan bahasa Indonesia dengan tujuan seperti itu?

Tenaga kebahasaan (guru bahasa Indonesia, penyuluh bahasa Indonesia, penyunting bahasa Indonesia, penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia, dan peneliti bahasa dan sastra) dalam pembinaan bahasa Indonesia hendaklah mereka yang

- (1) memiliki pengetahuan dan wawasan yang memadai tentang bahasa dan sastra, khususnya bahasa dan sastra Indonesia dan tentang tugas dan fungsinya;
- (2) memiliki kemampuan yang memadai untuk menerapkan pengetahuan dan wawasan itu dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- (3) peka dan responsif terhadap lingkungan, penuh inisiatif, kritis, dan kreatif mengembangkan tugas dan fungsinya, terbuka, bertanggung jawab, dan berakhlak baik.

Ketiga segi mutu itu, yaitu segi kognitif (pengetahuan dan wawasan), keterampilan (kemampuan menerapkannya), dan sikap dan nilai (seperti peka, kritis, terbuka) merupakan satu kesatuan. Tenaga kebahasaan yang hanya memiliki banyak pengetahuan dan dalam wawasannya, tetapi tidak dapat menerapkan pengetahuan dan wawasan itu dalam praktik dan tidak bersikap positif seperti peka, responsif, dan kritis adalah tenaga kebahasaan yang tidak bermutu.

4. Strategi Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan

Seperti telah dikemukakan bahwa mutu seseorang atau sekelompok orang tidak tercipta seketika, tetapi tercipta dalam suatu proses yang panjang atau melalui serangkaian upaya yang bertahap dan berkelanjutan dengan strategi tertentu. Berikut ini dikemukakan strategi peningkatan mutu tenaga kebahasaan agar mutu tenaga sebagaimana diharapkan atau dicita-citakan dapat tercapai seoptimum mungkin.

Pertama, melakukan pemrioritasan yang tajam dan tepat sasaran, baik tenaga maupun mutu, dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut pendapat saya, urutan prioritas tenaga kebahasaan dalam upaya peningkatan mutunya untuk berperan aktif dalam upaya mencapai tujuan pembinaan bahasa Indonesia (mutu pemakaian bahasa Indonesia dan mutu bahasa Indonesia) dan untuk mengantisipasi tantangan era globalisasi adalah sebagai berikut: (1) guru bahasa Indonesia sekolah dasar dan menengah, (2) penyusun sarana pembinaan bahasa Indonesia, (3) peneliti bahasa dan sastra Indonesia, (4) penyunting bahasa Indonesia, dan (5) penyuluh bahasa Indonesia.

Guru sekolah dasar dan menengah adalah ujung tombak pembinaan bahasa Indonesia. Apabila rendah mutu guru, rendah pula daya untuk mencapai tujuan pengajaran dalam pembinaan bahasa Indonesia, yaitu mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan siswa.

Penyusun buku pelajaran bahasa Indonesia adalah penunjang utama terseleenggaranya pengajaran bahasa Indonesia. Apabila rendah mutu penyusun, rendah pula hasil susunannya dan juga rendah daya dukung proses belajar-mengajar mencapai tujuannya.

Penyusun kamus umum bahasa Indonesia, kamus istilah, dan kamus ungkapan atau idiom adalah penyedia utama sarana pemekaran fungsi bahasa Indonesia dalam mengungkapkan berbagai maksud atau keperluan pemakai bahasa Indonesia. Apabila rendah mutu penyusun kamus itu, rendah pula mutu kamus dan juga rendah daya dukung pemekaran fungsi bahasa Indonesia.

Penyusun buku tata bahasa Indonesia sekolah atau umum adalah penyedia sarana acuan aturan baku bahasa Indonesia. Apabila rendah mutu penyusunnya, tentulah rendah pula mutu susunannya dan juga rendah daya dukung upaya pembakuan bahasa mencapai kemantapan struktur bahasa Indonesia. Begitu pula halnya dengan penyusun sarana lain untuk pembinaan bahasa Indonesia seperti buku panduan pemakaian bahasa Indonesia untuk berbagai keperluan dan bahan penyuluhan bahasa Indonesia untuk masyarakat.

Peneliti adalah penyedia seluk-beluk informasi kebahasaan dan kesastraan hasil telaah dan penelitian yang dapat menunjang para penyusun dalam menyusun berbagai

sarana pembinaan dan para pengambil keputusan dalam menentukan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra, dan para peneliti dalam mengembangkan teori kebahasaan dan kesastraan di Indonesia. Apabila rendah mutu peneliti, rendah pula mutu dan manfaat hasil telaah dan penelitiannya bagi pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

Penyunting adalah penyiap karangan orang lain, dengan menyunting, antara lain, pemakaian bahasanya berdasarkan kaidah baku, untuk diterbitkan di media massa cetak atau elektronik atau sebagai buku. Apabila rendah mutu penyunting, rendah pula mutu suntingan dan juga rendah sumbangannya dalam memberikan teladan berbahasa Indonesia dengan baik kepada masyarakat luas pembacanya.

Penyuluh adalah penyampai informasi tentang pemakaian bahasa Indonesia yang baik kepada masyarakat, selama mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat dianggap rendah dan selama masyarakat memerlukannya (jadi bersifat sementara), dengan membujuk atau mengajak, bukan mengindoktrinasi atau memaksa agar masyarakat itu berbahasa Indonesia dengan baik. Apabila mutu penyuluh rendah, penyuluhan tentulah tidak efektif meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia di kalangan masyarakat.

Gambaran umum kedudukan dan peran serta mutu tenaga kebahasaan itu diharapkan dapat menjelaskan alasan penentuan urutan prioritas seperti dikemukakan di atas.

Kedua, memanfaatkan seoptimum mungkin (1) hasil teknologi maju dalam media cetak, media elektronik, dan multimedia dan (2) sumber daya manusia (seperti pakar, ilmuwan, cendekiawan, budayawan, pengarang, wartawan, dan sastrawan) yang terkait dan yang ada di pusat, badan, lembaga, atau organisasi profesi, dalam dan luar negeri, dalam suatu koordinasi fungsional untuk mencapai efisiensi dan efektifnya peningkatan mutu tenaga kebahasaan dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Ketiga, menerapkan asas bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan dalam upaya peningkatan mutu tenaga kebahasaan dan asas manfaat, baik bagi upaya peningkatan mutu tenaga kebahasaan maupun bagi lulusan upaya itu dalam pembinaan bahasa Indonesia.

Keempat, berorientasi kepada tujuan yang hendak dicapai oleh peserta, bukan oleh penatar, dalam upaya peningkatan mutu tenaga kebahasaan dalam rangka peningkatan mutu pelaksanaan pembinaan bahasa Indonesia.

5. Upaya Peningkatan Mutu Tenaga Kebahasaan

Dengan strategi seperti dikemukakan pada seksi 4, upaya peningkatan mutu tenaga kebahasaan berikut dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan dalam rangka pembinaan bahasa Indonesia.

Jangka Pendek

- 1) Pelatihan penyuluhan bahasa Indonesia untuk maksud khusus:
 - a. Bahasa Indonesia Bisnis
 - b. Bahasa Indonesia Administrasi
 - c. Bahasa Indonesia Hukum

- d. Bahasa Indonesia Jurnalistik
 - e. Bahasa Indonesia Sastra dan Film
 - f. Bahasa Indonesia Ilmiah
 - g. Bahasa Indonesia Teknologi
- 2) Pelatihan penyunting bahasa Indonesia
 - a. naskah kesekretariatan
 - b. naskah laporan bisnis
 - c. naskah jurnalistik
 - d. naskah perundang-undangan
 - e. naskah laporan penelitian
 - f. naskah buku pelajaran
 - 3) Pelatihan penyusun bahan penyuluhan bahasa Indonesia untuk berbagai maksud khusus (lihat nomor 1)
 - 4) Penataran penyusun buku pelajaran bahasa dan sastra Indonesia
 - a. sekolah dasar
 - b. sekolah menengah
 - 5) Penataran penyusun kamus bahasa Indonesia
 - a. kamus umum
 - b. kamus khusus (istilah, sinonim-antonim, idiom)
 - 6) Penataran peneliti
 - a. bahasa Indonesia
 - b. sastra Indonesia
 - c. pengajaran bahasa Indonesia
 - d. pengajaran sastra Indonesia

Jangka Panjang

- 1) Pendidikan pascasarjana strata dua
 - a. bidang linguistik umum
 - b. bidang linguistik terapan
 - c. bidang kesastraan
- 2) Pendidikan pascasarjana strata tiga
 - a. bidang linguistik
 - b. bidang linguistik terapan
 - c. bidang kesastraan

Pelatihan dilakukan di dalam negeri, penataran dilakukan di dalam dan/atau di luar negeri, dan pendidikan dilakukan di dalam dan/atau di luar negeri. Setelah pelatihan, penataran, dan pendidikan, lulusan diharapkan merupakan tenaga kebahasaan yang andal, profesional, dan menjunjung “kode etik” tenaga kebahasaan dalam pembinaan bahasa Indonesia.

6. Penutup

Mutu tenaga kebahasaan adalah taraf atau derajat atau kadar, terutama yang positif,

baik mengenai pengetahuan dan wawasan, kemampuan (keterampilan), maupun sikap yang dimiliki tenaga kebahasaan dan bermanfaat bagi pembinaan bahasa Indonesia.

Berdasarkan pertimbangan pengalaman pribadi dan pengamatan beberapa naskah laporan penelitian, karya tulis guru, buku sarana pembinaan bahasa Indonesia, hasil suntingan dan hasil tes sederhana guru sekolah dasar dan menengah, mutu tenaga kebahasaan saat ini rendah. Rendahnya mutu mencerminkan kelemahan sistem pelatihan dan penataran, antara lain, iklim belajar-mengajar yang cenderung mementingkan tumbuhnya keseragaman berpikir yang menghambat perkembangan kreativitas dan kemampuan belajar sendiri para peserta pelatihan dan penataran.

Pada masa mendatang tenaga kebahasaan hendaknya lebih bermutu baik dalam segi pengetahuan dan wawasan, segi kemampuan menerapkannya dalam praktik maupun dalam segi sikap agar mampu menghadapi tantangan era informasi dan globalisasi.

Untuk meningkatkan mutu tenaga kebahasaan itu, diperlukan strategi yang mementingkan (1) pemrioritasan sasaran, (2) pemanfaatan potensi hasil teknologi maju dan sumber daya manusia yang terkait dengan pembinaan bahasa dalam koordinasi fungsional demi efisiensi dan efektifnya peningkatan mutu tenaga kebahasaan, (3) asas bertahap, berkesinambungan, dan berkelanjutan, dan (4) asas manfaat.

Dengan strategi tersebut, upaya pelatihan penataran, dan pendidikan khusus, seperti pelatihan penyuluh dan penyusun bahan penyuluhan bahasa Indonesia untuk maksud khusus pelatihan penyuntingan bahasa Indonesia, penataran penyusun buku pelajaran bahasa Indonesia, penataran penyusun kamus umum dan khusus, penataran peneliti bahasa dan sastra, dan pendidikan pascasarjana bahasa dan sastra Indonesia.

Daftar Pustaka

- Cobarrubias, Juan dan Joshua A. Fishman (Ed.). 1983. *Progress in Language Planning*. Berlin, New York, Amsterdam: Moutton.
- Eastman, Carol M. 1983. *Language Planning: An Introduction*. San Francisco: Chandler & Sharp Publishers, Inc.
- Effendi, S. 1976. "Beberapa Pokok Pikiran tentang Pembinaan dan Pengembangan Bahasa." Makalah Lokakarya Politik Bahasa Nasional di Jakarta.
- Effendi, S. 1978. "Penelitian Bahasa dalam Hubungan dengan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa." Makalah Kongres Bahasa Indonesia III di Jakarta.
- Effendi, S. 1990. "Tiga Tuntutan Mendesak dalam Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia." Makalah Seminar Pengembangan Bahasa Nusantara melalui Sumbangan Ilmu-Ilmu Sastra. Universitas Padjadjaran, Bandung.
- Effendi, S. 1996. "Peningkatan Mutu Pemakaian Bahasa Indonesia." Makalah Seminar Nasional XI Bahasa dan Sastra Indonesia dan Pengajarannya di Medan, 7--9 November 1996.
- Halim, Amran. 1977. "Sikap Bahasa dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Bahasa." Dalam Amran Halim, *Pembina Bahasa Nasional*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pe-

ngembangan Bahasa.

Haugen, Einar. 1983. "The Implementation of Corpus Planning: Theory and Practice." Dalam Juan Cobarrubias dan Joshua A. Fishman (Ed.). *Progress in Language Planning*. Berlin, New York, Amsterdam: Moutton.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok A11
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 16.00–16.50
Judul Makalah	: Peningkatan Tenaga Kebahasaan dalam Pembinaan Bahasa Indonesia
Penyaji	: S. Effendi
Pemandu	: Amir Hakim Usman
Pencatat	: a. Erlis Nur Mujiningsih b. I Wayan Sudana
Peserta	: 40 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Syukri Hamzah, Universitas Bengkulu

a. Pertanyaan:

Strategi yang diusulkan dalam peningkatan mutu tenaga penyuluh adalah pembinaan sumber daya manusia. Kegiatan itu sudah dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa di daerah. Sehubungan dengan itu, kami mengusulkan agar penyuluhan di daerah dilaksanakan oleh orang daerah karena selama ini kegiatan tersebut dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang datang ke daerah. Hal ini tidak efisien.

b. Jawaban:

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah melakukan penataran penyuluh bahasa Indonesia untuk tenaga dari daerah. Selama ini ada kebijaksanaan penyuluhan dari pusat ke daerah yang dilakukan oleh beberapa orang. Saya menyetujui usul yang baik itu, yaitu agar penyuluhan dilakukan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya. Biaya penyuluhan akan lebih hemat apabila penyuluhan didanai oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

2. Penanya: I Made Suastika, Universitas Udayana, Denpasar

a. Pertanyaan:

Apakah tenaga penyuluh yang ada sudah memadai? Misalnya, dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

b. Jawaban:

Saya tidak mencantumkan jumlah penyuluh di dalam makalah ini, tetapi jumlah konkretnya ada di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Akan tetapi, mutu para penyuluh tersebut belum memadai karena kecenderungan penyuluh kita sifatnya mengindoktrinasi. Hal itu tidak boleh terjadi. Belum ada rencana

penambahan jumlah penyuluh yang ada. Penyuluhan bersifat sementara. Apabila masyarakat Indonesia sudah dianggap mampu, penyuluhan itu akan dihentikan. Untuk program jangka panjang tujuan pembinaan adalah guru. Penyuluhan hanyalah program jangka pendek. Sebagai pengganti penyuluhan, harus disediakan bahan penyuluhan yang dapat dilihat oleh masyarakat setiap saat. Apabila ada seorang sekretaris ingin memakai bahasa yang benar, ada bahan panduan bahasa yang benar untuk sekretaris. Apabila dilakukan seperti Penataran P4, penyuluhan tidak akan selesai. Informasi kebahasaan dapat disebarakan melalui internet dan sarana lain.

3. Penanya: Nasruddin, IKIP Ujung Pandang

a. Pertanyaan:

Pertanyaan saya berkaitan dengan materi bahasa Indonesia itu sendiri karena kaidah bahasa Indonesia belum standar, contohnya penggunaan kata *analisa* atau *analisis*. Hal itu akan menyulitkan penyuluh sehingga penyuluh tidak punya pegangan yang pasti. Saya mengusulkan agar unsur asing tidak perlu diubah seluruhnya. Kata yang diambil dari bahasa Belanda tetap digunakan, seperti *subyek* dan *obyek* tidak perlu diubah menjadi *subjek* atau *objek*.

b. Jawaban:

Ada hal yang sangat penting berkaitan dengan bahan penyuluhan. Bahan penyuluhan harus mantap agar dapat dipakai oleh penyuluh, misalnya, kamus harus yang baik. Saya setuju dengan usul yang Bapak ajukan. Perlu diingat bahwa penataran di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa belum cukup. Oleh karena itu, penyuluh, setelah lulus, bukan orang yang berhenti belajar, melainkan orang yang harus terus belajar.

PENINGKATAN KERJA SAMA KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Nafron Hasjim

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

1. Pendahuluan

Berbagai kalangan telah menyadari bahwa upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia merupakan tanggung jawab seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tanggung jawab ahli bahasa. Hal seperti itu, bahkan, diucapkan oleh Presiden Republik Indonesia dalam sambutannya pada upacara pembukaan Kongres KNPI VII dan Kongres Bahasa Indonesia VI, tanggal 28 Oktober 1993: "... pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab ahli bahasa." Karena masalah bahasa Indonesia memang merupakan salah satu persoalan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, pada tanggal 20 Mei 1995, Kepala Negara--dalam rangka pencahangan Gerakan Disiplin Nasional--menyatakan pula bahwa pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar merupakan bagian dari gerakan tersebut. Selain itu, ada lagi dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah yang berkaitan langsung dengan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia, antara lain, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 dan beberapa peraturan daerah yang diterbitkan oleh gubernur/kepala daerah tingkat I. Semua itu merupakan upaya agar kehidupan dan fungsi bahasa Indonesia terjaga dari masuknya anasir-anasir yang merugikan, antara lain, bahasa asing yang telah mempengaruhi sikap masyarakat terhadap bahasa Indonesia. Campur tangan pemerintah dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa, menurut Moeliono (di dalam Hooker, 1996:56) merupakan suatu keharusan dan langkah yang tepat.

Uraian di atas memperlihatkan pandangan dari pihak pemerintah yang bermaksud mengangkat harkat bahasa Indonesia ke tempat yang terhormat. Untuk merealisasikan pernyataan, ajakan, dan anjuran itu, lembaga yang diberi tugas melakukan pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra melaksanakan berbagai kegiatan: pertemuan, seminar, bulan bahasa, konferensi, bahkan kongres bahasa Indonesia. Terhadap upaya seperti itu, ada perseorangan atau kelompok yang menganggap bahwa kegiatan-kegiatan itu melecehkan bahasa Indonesia (Heryanto, 1996:97) karena yang hadir dan berbicara dalam pertemuan-pertemuan seperti itu banyak dari kalangan birokrat. Anggapan seperti itu mungkin ada benarnya jika titik tolak berpikir hanya semata-mata masalah bahasa dan/atau sastra *ansich*. Akan tetapi, seandainya kita bersedia menyisihkan waktu sejenak untuk memikirkan strategi dan konsep-konsep dasar perencanaan mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa nasional kita itu, pemikiran, pendapat, dan argumentasi para birokrat itu tidak sedikit manfaatnya. Sehubungan dengan hal itu, yang penting bagi kita adalah apa yang dibicarakan orang itu, bukan siapa yang berbicara.

Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar belum terealisasi secara opti-

mal karena sikap pemakai bahasa itu sendiri (Anas, 1998:13). Dari sisi lain, Pabotinggi (1996:220) berpendapat bahwa pembinaan dan pemeliharaan bahasa nasional kita tak mungkin mencapai hasil yang berarti jika kita melarikan diri pada upacara-upacara, termasuk kongres bahasa Indonesia. Otoritas bahasa Indonesia hanya dapat ditegakkan jika otoritas bangsa pendukungnya di bidang politik, ekonomi, dan kultural kembali ditegakkan dengan jalan mayoritas rakyat secara sungguh-sungguh menentukan pengelolaan ketiga bidang itu. Sejalan dengan itu, Kartasasmita (1998:21) menyatakan bahwa kita harus berusaha agar secara teknis bahasa Indonesia mampu mengangkat harkat manusia Indonesia secara ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, baik ahli bahasa maupun ahli bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, harus sadar dan berusaha terus-menerus agar bahasa Indonesia adalah yang digunakan dalam mengomunikasikan ketiga hal itu.

Pada dasarnya, pendapat-pendapat di atas menghendaki agar dalam mengelola masalah kebahasaan (dan kesastraan), instansi yang dibebani tugas untuk itu harus melibatkan berbagai lapisan masyarakat di luarnya. Dengan kata lain, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa harus bermitra kerja dengan badan, lembaga, organisasi, dan kelompok masyarakat yang merupakan pendukung masalah politik, ekonomi, dan kultural bangsa. Hal itu pulalah yang dirumuskan dalam *Putusan Kongres Bahasa Indonesia IV* yang menyatakan bahwa Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina kerja sama yang luas dengan berbagai lembaga. Kerja sama yang dimaksudkan memang perlu dilakukan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa karena baik status kelembagaannya maupun mutu dan jumlah tenaga yang ada belum seimbang dengan ruang lingkup tugasnya yang bersifat nasional, bahkan internasional itu.

2. Kerja Sama yang Telah Dilakukan

Sebenarnya kerja sama dengan pihak lain sudah dilaksanakan sejak lama, bahkan, sebelum lembaga ini diubah namanya menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa pada tahun 1975. Kerja sama itu dilakukan tidak hanya terbatas pada instansi pemerintah dan lembaga swasta di dalam negeri, tetapi dilakukan juga dengan lembaga/yayasan di luar negeri. Pada dasarnya, kerja sama tersebut dilakukan dengan tujuan meningkatkan upaya pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra di Indonesia.

a. Kerja Sama dalam Negeri

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa telah menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga/yayasan yang relevan, organisasi profesi, dan pihak swasta. Rincian kerja sama tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

1) Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah

a) Departemen Penerangan

Kerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) dan Radio Republik Indoneeia (RRI) sudah sejak lama dilakukan. Kerja sama dengan TVRI yang

direalisasikan dalam bentuk siaran pembinaan bahasa Indonesia telah berlangsung sejak tahun 1960-an, bukan mulai 1977 seperti yang dinyatakan Hooker (1996:58). Melalui RRI, selain siaran pembinaan bahasa Indonesia yang berfrekuensi sekali seminggu, sejak beberapa tahun lalu telah pula dibentuk program *Aku Cinta Bahasa Indonesia* (AÇBI) dengan frekuensi dua kali siaran dalam seminggu.

b) *Departemen Perindustrian*

Kerja sama dengan Departemen Pendidikan berupa kegiatan penyusunan *Standar Industri Indonesia* (SII) dalam peristilahan bidang perindustrian.

c) *Departemen Perhubungan*

Kerja sama dilakukan dalam bentuk kegiatan penyusunan *Kamus Hidrometeorologi* dan *Kamus Meteorologi Perhubungan*.

d) *Departemen Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi*

Bersama lembaga ini, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melaksanakan kegiatan penyusunan *Kamus Istilah Pariwisata*. Instansi ini telah dipecah menjadi tiga lembaga, yaitu Departemen Pariwisata, Seni, dan Budaya, PT Pos Indonesia, dan PT Telkom Indonesia. Saat ini tetap dilakukan kerja sama dengan ketiganya, terutama dalam bidang peristilahan.

e) *Departemen Pertambangan, Minyak, dan Gas Bumi*

Kerja sama terjadi dalam bentuk pengupayaan pembakuan istilah untuk SII bidang tambang, minyak, dan gas bumi.

f) *Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora)*

Kerja sama dengan Menpora terjalin sejak ditetapkan bulan Oktober sebagai Bulan Bahasa pada tahun 1980. Penyelenggaraan kegiatan Bulan Bahasa merupakan subkegiatan Peringatan Sumpah Pemuda/Hari Pemuda yang berlangsung sebulan penuh selama bulan Oktober.

g) *Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi (BPPT)*

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bersama BPPT bekerja sama dalam menggarap istilah komputer.

h) *Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)*

Bersama BPHN, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa melaksanakan penyusunan *Kamus Hukum Pidana*.

i) *Perusahaan Umum Listrik Negara*

Kerja sama dilaksanakan dalam bentuk penyusunan istilah kelistrikan.

j) *Pemerintah Daerah*

Kerja sama dengan pemerintah daerah dirintis mulai dari kerja sama dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, yang penandatanganan piagam kerja samanya dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 1989. Kerja sama itu mendorong terbitnya berbagai putusan dan instruksi Gubernur/Kepala Daerah Khusus Ibu kota Jakarta mengenai ketentuan pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas di wilayah DKI Jakarta. Hal itu dilakukan dengan tujuan meningkatkan citra keindonesiaan di wilayah DKI Jakarta sebagai ibukota Republik Indonesia. Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ini akhirnya melahirkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1992 Tanggal 13 Januari 1992.

Kerja sama dengan Pemerintah DKI Jakarta ditindaklanjuti dengan melakukan pendekatan terhadap Departemen Dalam Negeri. Pendekatan itu melahirkan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 1991 yang memuat instruksi kepada seluruh gubernur/kepala daerah dan jajarannya sampai ke tingkat kecamatan untuk melaksanakan pembinaan bahasa Indonesia di wilayah masing-masing. Berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dapat melakukan kerja sama kebahasaan dengan 26 gubernur/kepala daerah yang lain. Pada dasarnya, kerja sama dengan pemerintah daerah itu dilaksanakan dalam hal (1) penertiban pemakaian bahasa pada papan nama, papan reklame, dan rambu lalu lintas, (b) peningkatan kemampuan berbahasa pejabat dan karyawan di lingkungan Pemda, dan (c) pemberian bantuan kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pendirian balai bahasa di daerah.

Selain Pemerintah Daerah DKI Jakarta, penandatanganan piagam kerja sama antara pemerintah daerah dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa secara kronologis dilaksanakan sebagai berikut.

1993: Sumatra Barat, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Timur.

1994: DI Aceh, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, Sumatera Selatan, Lampung, dan Riau.

1995: Kalimantan Tengah, Jambi, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Timur, Bali, dan Maluku.

1996: Bengkulu dan Kalimantan Barat.

1997: Irian Jaya dan Timor Timur.

k) *Dewan Kesenian Jakarta (DKJ)*

Kerja sama dengan DKJ dilaksanakan dalam bentuk penyelenggaraan bersama pertemuan kebahasaan dan kesastraan.

l) *Berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia*

Kerja sama dengan instansi pendidikan tinggi ini meliputi berbagai kegiatan,

antara lain

- (1) penelitian kebahasaan Indonesia dan daerah,
- (2) penyelenggaraan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, seperti pertemuan dan Bulan Bahasa.
- (3) pembinaan tenaga peneliti/pengajar kebahasaan, dan
- (4) penyusunan daftar dan kamus istilah dalam Panitia Kerja Sama Kebahasaan (Pakersa).

Secara khusus, kerja sama dengan Politeknik Institut Teknologi Bandung (ITB) dilakukan dalam rangka komputerisasi kegiatan pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Piagam kerja samanya ditandatangani pada tanggal 5 September 1995.

2) *Kerja Sama dengan Organisasi Profesi Kebahasaan dan Kesastraan*

Kerja sama dengan Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI), Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI), dan Himpunan Sarjana-Kesusastraan Indonesia (Hiski) dilakukan dalam bentuk penyelenggaraan berbagai pertemuan kebahasaan dan kesastraan.

3) *Kerja Sama dengan Lembaga, Yayasan, dan Perseorangan*

1) Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional

Penandatanganan piagam kerja sama dengan Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional (Wanhankamnas) di Jakarta dilaksanakan pada tanggal 7 November 1989. Kerja sama itu bertujuan meningkatkan pemasyarakatan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar di lingkungan pemerintah secara umum.

2) Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) H.B. Jassin

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bekerja sama dengan PDS H.B. Jassin dalam bentuk bantuan dana yang diberikan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk pengelolaan instansi itu.

3) Berbagai Instansi dan Perseorangan

Kerja sama dilaksanakan atas dasar permintaan, berupa tenaga penyuluh bahasa dan tenaga teknis kebahasaan lain sebagai penyuluh, penilai, atau konsultan bahasa. Kerja sama dengan perseorangan dilakukan dalam hubungan dengan upaya pengembangan bahasa, antara lain, dalam pengembangan kosakata dan istilah, pengembangan bahasa dalam pemrograman perangkat lunak komputer, seperti perangkat lunak untuk kegiatan pemetaan bahasa-bahasa daerah di Indonesia.

4) Organisasi Pengusaha

Kerja sama dengan organisasi pengusaha, antara lain, dijalin dengan *Real Estat Indonesia* (REI), *Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia* (PPPI),

dan *Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia* (PHRI). Kerja sama dengan REI--penandatanganan piagam kerja samanya dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 1995--bertujuan menertibkan nama-nama kompleks perumahan yang dibangun oleh anggota REI. Nama-nama kompleks perumahan yang menggunakan bahasa asing diubah menjadi nama-nama yang berbahasa Indonesia. Kerja sama dengan P3I bertujuan menertibkan pemakaian bahasa dalam dunia periklanan baik iklan di media massa cetak dan elektronik maupun iklan di papan-papan reklame atau luar ruang. Kerja sama dengan PHRI bertujuan menertibkan pemakaian bahasa di lingkungan hotel dan restoran.

5) *Perusahaan Swasta*

a) PT Elnusa Yellow Pages

Kerja sama dilaksanakan berupa bantuan tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam penyusunan istilah untuk lembar kuning *Buku Petunjuk Telepon*.

b) Grup LIPPO

Kerja sama ini dilakukan dengan tujuan membantu penertiban pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan perusahaan tersebut.

b. *Kerja Sama Luar Negeri*

Kerja sama dengan pihak luar negeri dilakukan dalam rangka peningkatan mutu ketenagaan, pengembangan masalah kebahasaan dan kesastraan, serta bantuan dana. Kerja sama luar negeri yang telah terjalin selama ini adalah sebagai berikut.

1) Negeri Belanda

Dengan negara ini, yang diwakili oleh Universitas Kerajaan di Leiden, telah terjalin kerja sama yang terwujud dalam suatu proyek bersama, yaitu Proyek Pengembangan Ilmu Bahasa Indonesia. Sejak tahun 1975 hingga 1991 telah dilaksanakan dua kali penandatanganan proyek kerja sama, yaitu Proyek ILDEP I (1977--1985) dan Proyek ILDEP II (1988--1994).

Baik Proyek ILDEP I maupun proyek ILDEP II mempunyai tujuan, antara lain

- a) memperkuat infrastruktur pelaksanaan garis besar kebahasaan Indonesia, baik di bidang ketenagaan maupun di bidang perlengkapan;
- b) melaksanakan pertukaran tenaga ahli, pemberian beasiswa, dan keperluan kebahasaan lain yang dianggap perlu.

Program yang dikembangkan meliputi kegiatan seperti berikut:

- a) pendidikan pascasarjana,
- b) pembentukan pangkalan data kepustakaan kebahasaan,
- c) pembentukan pangkalan data perkamus,
- d) penataran tenaga profesional dalam rangka pendirian balai bahasa, dan
- e) pengembangan kepustakaan kebahasaan melalui upaya penerjemahan

dan penerbitan.

2) Malaysia dan Brunei Darussalam

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, mewakili Pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, mewakili Pemerintah Malaysia, membentuk *Majelis Bahasa Indonesia-Malaysia* (MBIM) pada tahun 1972. Tujuan majelis, antara lain, mengupayakan adanya titik temu di antara kedua bahasa dalam hal peristilahan. Upaya tersebut ditunjang oleh pertemuan rutin, yang dikenal dengan sebutan *Persidangan Majelis*, diselenggarakan dua kali setahun secara bergiliran di kedua negara.

Kerja sama kebahasaan antara kedua bangsa serumpun itu kemudian meluas, setelah Brunei Darussalam secara resmi diterima sebagai anggota majelis pada tahun 1985, dan Singapura diterima sebagai pemerhati. Nama Mabbim sejak saat itu berubah menjadi Majelis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (Mabbim).

Majelis itu hingga saat ini telah melaksanakan persidangan sebanyak 38 kali dan berhasil mengolah istilah dalam 104 bidang ilmu. Jumlah istilah yang dihasilkan, lebih kurang 197.078 istilah. Selain itu, persidangan majelis juga membahas empat seri kamus ilmu dasar, yaitu matematika, fisika, kimia, dan biologi.

Sejak 12 Agustus 1996, kerja sama ini telah mengembangkan diri dengan membentuk *Majelis Sastra Asia Tenggara* (Mastera). Untuk sementara Majelis ini beranggotakan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, sedangkan negara-negara yang termasuk lingkup Asia Tenggara yang lain--Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Kamboja, Laos, dan Myanmar--diharapkan bergabung pada waktu yang akan datang. Majelis ini secara khusus menggarap masalah kesastraan.

3) SEAMEO-Regional Language Centre (RELC), Singapura

Kerja sama kebahasaan antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan RELC dilaksanakan dengan tujuan seperti berikut:

- a) peningkatan mutu dan kemampuan tenaga pengajar bahasa Inggris di SLTA dan perguruan tinggi;
- b) penyebaran dan pertukaran terbitan, dan
- c) penerjemahan.

Yang duduk sebagai anggota *governing board*, mewakili Indonesia, antara lain, Prof. Dr. Amran Halim (1975--1983), Prof. Dr. Anton M. Moeliono (1983--1989), Prof. Dr. Retmono (1988/1989--1995/1996), dan Dr. Nuril Huda, M.A. (1996/1997--sekarang).

4) Pusat Kebudayaan Prancis

Kerja sama kebahasaan dengan instansi ini berbentuk bantuan tenaga ahli

dalam bidang pengajaran bahasa Prancis.

- 5) Ford Foundation
 Dalam kerja sama ini *Ford Foundation* menyediakan bantuan dana untuk pengembangan profesionalisme tenaga kebahasaan di lingkungan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Bantuan itu telah dimanfaatkan, antara lain, berupa
 - a) pemberian beasiswa untuk belajar di luar negeri,
 - b) peningkatan mutu tenaga teknis,
 - c) kesertaan dalam pertemuan kebahasaan di kawasan Asia Tenggara,
 - d) pengadaan buku dan bahan pustaka lain dalam bidang kebahasaan, dan
 - e) pengundangan pakar kebahasaan Amerika Serikat untuk kepentingan penataran kebahasaan.

- 6) Summer Institute of Linguistic (SIL)
 Kerja sama dengan *SIL* terlaksana dalam bentuk penyelenggaraan ceramah dan seminar di Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Kerja sama juga terjadi dalam bentuk kegiatan "tukar-menukar" terbitan.

- 7) Goethe Institut (Pusat Kebudayaan Jerman)
 Jalanan kerja sama antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan *Goethe Institut* terjadi dalam bentuk
 - a) penyelenggaraan simposium penerjemahan (9--10 Desember 1985),
 - b) penyelenggaraan simposium bahasa keilmuan (15--16 September 1986),
 - c) bantuan tenaga ahli kebahasaan Jerman sebagai konsultan dan pembimbing akademik untuk peneliti Pusat Bahasa, dan
 - d) pemberian beasiswa ke Jerman.

- 8) Bristish Council
 Kerja sama dengan *British Council* terjadi dalam pemberian bantuan beasiswa kepada tenaga teknis, terutama tenaga teknis bidang sastra.

- 9) School of Oriental and African Studies (SOAS)
 Kerja sama antara SOAS dan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa terlaksana dalam bentuk pemberian fasilitas pendidikan serta penelitian kebahasaan dan kesastraan untuk tenaga teknis dan tenaga peneliti Pusat Bahasa, terutama tenaga peneliti bidang sastra. Selain itu, kerja sama juga berupa pemberian bantuan tenaga ahli kesastraan, antara lain, dalam kegiatan penyusunan buku sejarah sastra Indonesia modern.

- 10) Unesco
 Kerja sama dengan *Unesco* dilaksanakan dalam bentuk penerbitan *Kamus Hidrologi* dan *Kamus Hidrogeologi*.

3. Hambatan yang Dihadapi

Dalam merintis dan melaksanakan kerja sama dengan berbagai pihak itu tentulah ditemukan hambatan-hambatan. Hambatan pertama yang perlu dikemukakan adalah status Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sebagai instansi yang bereselon II. Hambatan ini sangat dirasakan manakala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa bermaksud mengadakan kerja sama dengan pihak departemen. Dalam keadaan seperti itu, pastilah harus ditempuh jalur birokrasi yang cukup panjang.

Kendala lain yang justru merupakan hambatan terberat adalah masalah sikap instansi, lembaga, atau badan, baik pemerintah maupun swasta, terhadap bahasa Indonesia. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan, sangat dirasakan bahwa pihak-pihak tertentu belum memperlihatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia. Mungkin sekali hal itu disebabkan oleh pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang belum sepenuhnya mampu meyakinkan pihak lain tentang fungsi strategis yang diemban oleh bahasa nasional itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekurangmampuan tersebut juga mungkin menjadi salah satu kendala dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kerja sama yang telah dilakukan itu.

Berkaitan dengan sikap yang kurang positif terhadap bahasa Indonesia, sebagian pihak yang telah diajak kerja sama tampaknya melimpahkan tanggung jawab pengisian kerja sama itu kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Gejala seperti itu terutama terlihat pada kerja sama yang dilakukan secara tidak formal, dalam arti tidak tertuang secara tertulis dalam bentuk piagam kerja sama. Hal itu merupakan hambatan lain pula dalam pelaksanaan kerja sama.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, seperti melakukan penyuluhan langsung secara proaktif terhadap berbagai instansi, menyebarkan terbitan mengenai pemakaian bahasa Indonesia, membuka jalur konsultasi kebahasaan melalui telepon, dan melakukan penyuluhan secara tak langsung melalui media massa elektronik dan cetak, serta melalui surat. Akan tetapi, usaha tersebut masih belum mencapai hasil yang optimal.

4. Langkah ke Depan

Pengaruh arus globalisasi sudah mulai terasa. Dibukanya kesempatan bagi perguruan tinggi dari luar negeri untuk beroperasi di Indonesia merupakan "ancaman" bagi upaya pembinaan bahasa Indonesia di tanah air. Bukan tidak mungkin hal itu menyebabkan sebagian masyarakat Indonesia memandang bahasa Indonesia sebagai sesuatu yang tidak bermanfaat. Jika hal itu terjadi, upaya pembinaan dan pengembangan bahasa akan menghadapi kendala yang baru lagi. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, baik hambatan yang sudah dialami maupun hambatan yang mungkin muncul, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu melakukan tindakan-tindakan yang konstruktif, antara lain, melalui peningkatan aktivitas pengisian kerja sama yang telah dijalin dan menjalin kerja sama baru dengan berbagai pihak yang selama ini belum terjangkau.

a. Peningkatan Mutu dan Aktivitas Pengisian Kerja Sama

Seperti telah dinyatakan bahwa sebagian dari kerja sama yang telah dilakukan masih belum bersifat formal. Hal tersebut menimbulkan ketidakseriusan dalam pengisian kerja sama itu. Untuk mengefektifkan kerja sama yang baru bersifat rintisan itu, harus segera dilakukan tindakan yang memformalkannya, misalnya dengan menerbitkan piagam kerja sama yang ditindaklanjuti dengan menyusun program kerja yang terencana dan terarah.

Kerja sama yang telah dijalin secara formal perlu ditinjau ulang, terutama hal-hal yang berkenaan dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang pernah disusun perlu dipertajam dan diperluas agar pencapaian target dapat dilakukan secara optimal. Penajaman dan perluasan program itu harus dilakukan baik oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa maupun oleh pihak mitra kerja sama. Pihak Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, dalam hal penyuluhan bahasa dan sastra, misalnya, harus mempersiapkan bahan penyuluhan yang sesuai dengan keperluan masyarakat dan tenaga penyuluh yang betul-betul andal. Pihak mitra kerja sama, misalnya harus memprogramkan sasaran penyuluhan secara bergradasi sesuai dengan keperluan dan menyediakan perangkat lain yang mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama. Masalah yang penting yang perlu mendapat perhatian--hal ini tidak jarang terlupakan dalam menjalankan kerja sama--adalah faktor pengelolaan (manajemen) kerja sama. Fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, dan pengawasan hendaknya dijalankan secara cermat agar tujuan kerja sama dapat dicapai semaksimal mungkin. Hal itu merupakan upaya untuk meningkatkan mutu kerja sama.

b. Pengembangan Kerja Sama

Jika diamati mitra kerja sama yang telah dijalin selama ini terlihat masih banyak badan/instansi/lembaga, baik pemerintah maupun swasta, yang belum dijangkau. Oleh karena itu, pada masa yang akan datang Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu mengembangkan kerja sama dengan pihak-pihak yang relevan. Pihak-pihak yang perlu dijadikan mitra kerja sama secara formal itu, antara lain, adalah sebagai berikut.

1) Lembaga Pemerintah

Semua departemen dan lembaga nondepartemen yang belum dijadikan mitra kerja sama perlu diajak untuk kerja sama. Hal itu penting dilakukan untuk meningkatkan sikap dan kemampuan penggunaan bahasa Indonesia di kalangan pegawai negeri secara lebih merata.

2) Organisasi Profesi

Selama ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah sering berhubungan dengan berbagai organisasi profesi. Akan tetapi, hubungan itu baru bersifat sporadis. Oleh karena itu, dalam waktu yang akan datang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu mengadakan kerja sama secara resmi dengan organisasi-organisasi profesi, seperti Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan

Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), Persatuan Insinyur Indonesia (PII), Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (Persahi), Ikatan Penyunting Indonesia (Ikapindo), Persatuan Penerjemah Indonesia, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Kerja sama secara formal dengan organisasi-organisasi profesi itu penting dibentuk agar dapat disusun program dan kegiatan yang patut dilakukan. Tanpa kerja sama yang formal, kegiatan yang dapat dilaksanakan hanya bersifat acak dan sporadis.

3) Organisasi Pengusaha dan Perusahaan Swasta

Dewasa ini banyak bermunculan organisasi pengusaha. Mengadakan kerja sama dengan pihak organisasi itu, terutama dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia, merupakan langkah yang sangat strategis. Salah satu organisasi pengusaha yang secara langsung berhubungan dengan masalah kebahasaan adalah Ikatan Penerbit Indonesia (Ikapi). Selama ini Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sudah banyak berhubungan dengan organisasi itu. Sewajarnya jika hubungan yang telah ada itu diformalkan dalam bentuk kerja sama. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi) merupakan organisasi pengusaha yang patut diperhitungkan dalam upaya pembinaan bahasa Indonesia.

Jika kerja sama dengan organisasi pengusaha itu sudah terjalin, kerja sama dengan perusahaan-perusahaan anggotanya dapat dengan mudah dicapai. Hal seperti itu dilakukan sebagai upaya lebih mempertajam dan mengefektifkan kerja sama dengan pihak swasta tersebut.

4) Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Selama ini kerja sama dengan perguruan tinggi sudah dilaksanakan dalam bentuk penggunaan tenaga yang diperlukan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Tenaga-tenaga itu terutama diperlukan dalam penyusunan daftar dan kamus istilah bidang-bidang ilmu dan tenaga konsultan. Kerja sama dengan perguruan tinggi seperti itu perlu ditingkatkan baik mutu maupun jumlahnya.

Perguruan tinggi swasta di Jakarta banyak yang menggunakan tenaga Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam hal mengajarkan mata kuliah Bahasa Indonesia. Pemanfaatan tenaga pengajar itu masih bersifat perseorangan. Dalam keadaan seperti itu cukup sulit bagi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa untuk melakukan evaluasi terhadap mutu pengajaran bahasa Indonesia yang disajikan oleh tenaga-tenaga tersebut. Oleh karena itu, kerja sama secara resmi antara Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan perguruan tinggi swasta itu perlu diformalkan dalam bentuk piagam kerja sama. Kerja sama secara resmi seperti itu akan memudahkan kedua belah pihak dalam melakukan evaluasi dan kontrol.

Seperti telah dikemukakan di atas, besar kemungkinan perguruan tinggi swasta asing akan beroperasi di Indonesia. Untuk mengantisipasi kemungkinan sikap yang kurang menguntungkan terhadap bahasa Indonesia di perguruan tinggi yang bersangkutan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu membina

kerja sama dalam hal pemakaian dan pengajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi itu. Perintisan kerja sama dapat ditempuh melalui jalur pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

5) Organisasi Pemuda

Organisasi pemuda merupakan kelompok yang sangat potensial untuk diajak kerja sama dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa. Karena mempunyai sikap dinamis, kritis, dan kreatif, mereka perlu diimbau untuk bersama-sama mengolah masalah kebahasaan dan kesastraan. Melalui mereka dapat dilakukan berbagai kegiatan, baik langsung maupun tidak langsung, yang berkaitan dengan pembinaan bahasa dan apresiasi sastra, misalnya dengan melaksanakan diskusi, pertemuan, seminar, dan kursus-kursus kilat.

6) Televisi dan Radio Swasta

Kerja sama dengan TVRI dan RRI sudah lama dijalin dan sampai saat ini terus berlangsung siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui kedua media itu. Televisi dan radio swasta dewasa ini sangat digemari oleh masyarakat. Oleh karena itu, kerja sama dengan media elektronik swasta tersebut perlu dilakukan. Jika siaran pembinaan bahasa Indonesia melalui TVRI dan RRI dilaksanakan satu kali dalam seminggu, melalui media elektronik swasta itu, untuk sementara, cukup satu atau dua bulan sekali. Bentuk siarannya pun harus dikemas secara khusus.

7) Kerja Sama Luar Negeri

Kerja sama dengan pihak luar negeri tetap perlu dikembangkan. Kerja sama seperti itu dilakukan, terutama dalam usaha peningkatan mutu ketenagaan. Untuk kepentingan itu, perlu dirintis dan dijajaki kemungkinan pemberian beasiswa, baik dari yayasan maupun dari negara donor.

8. Penutup

Seluruh uraian di atas menggambarkan kerja sama yang telah dilaksanakan dan kemungkinan pengembangan kerja sama pada masa yang akan datang. Dalam pelaksanaan kerja sama yang telah dilakukan terlihat berbagai kekurangan yang perlu diperbaiki dan hambatan yang perlu diatasi. Bagaimanapun semua itu merupakan pengalaman yang berharga yang dapat dimanfaatkan dalam melakukan kerja sama selanjutnya.

Mengingat ruang lingkup tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa sangat luas, pengembangan kerja sama sangat perlu dilakukan, dalam arti meningkatkan mutu kerja sama yang sudah dijalin dan memperbanyak jumlah mitra kerja sama. Dalam hal memperbanyak mitra kerja sama ternyata masih banyak badan/lembaga/yayasan pemerintah dan swasta yang belum dijangkau. Ke arah itulah pengembangan kuantitas mitra kerja sama ditujukan.

Daftar Pustaka

- Anas, Azwar. 1998. "Peranan Bahasa Indonesia dalam Pembangunan Bangsa". Dalam Sitanggang, S.R.H. dkk. (Ed.) *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Heryanto, Ariel. 1996. "Bahasa dan Kuasa: Tatapan Posmodernisme". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. (Ed.) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Hooker, Virginia Matheson. 1996. "Bahasa dan Pergeseran Kekuasaan di Indonesia: Sorotan terhadap Pembakuan Bahasa Orde Baru". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. (Ed.) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Kartasmita, Ginanjar. 1998. "Bahasa Indonesia dalam Perencanaan Pembangunan". Dalam Sitanggang, S.R.H. et al (Ed.) *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Latif, Yudi dan Idi Subandy Ibrahim. 1996. (Ed.). *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Pabotinggi, Mochtar. 1996. "Bahasa, Politik, dan Otosentrisitas". Dalam Yudi Latif dan Idi Subandy Ibrahim. (Ed.) *Bahasa dan Kekuasaan: Politik Wacana di Panggung Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Pabotinggi, Mochtar. 1998. "Bahasa Indonesia, Politik, dan Otoritas". Dalam Sitanggang, S.R.H. et al (Ed.). *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sitanggang, S.R.H. dkk. 1998. (Ed.) *Bahasa Indonesia Menjelang Tahun 2000*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Tim Perumus. 1993. *Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

LAPORAN SIDANG

Sidang	: Kelompok C10
Hari, Tanggal, Pukul	: Kamis, 29 Oktober 1998, 14.50--15.40
Judul Makalah	: Peningkatan Kerja Sama Kebahasaan dan Kesusastraan
Penyaji	: Nafron Hasjim
Pemandu	: Nani Tuloli
Pencatat	: a. Sri Winarti b. I Nengah Sukayana
Jumlah Peserta	: 112 orang

Tanya Jawab

1. Penanya: Zulfahnur, IKIP Jakarta

a. Pertanyaan:

- 1) Topik makalah ini sangat menarik jika dibawakan dalam sidang pleno.
- 2) Apa pun yang dikeluhkan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa tentang informasi mengenai kondisi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa merupakan hambatan bagi pengembangan bahasa.
- 3) Barangkali kerja sama dengan ketiga organisasi profesi (HPBI, Hiski, MLI) perlu dilanjutkan.
- 4) *Lembar Komunikasi* (LK) perlu disebarakan ke masyarakat luas agar perhatian orang bertambah besar terhadap Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

b. Jawaban:

Saya berterima kasih atas tanggapan yang disampaikan oleh Ibu Zulfahnur. Kita akan mempertimbangkan kerja sama dengan tiga organisasi profesi itu untuk kegiatan kongres yang akan datang. Penyebaran *Lembar Komunikasi* (LK) kurang merata. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah. Salah satu masalah itu adalah jumlah tirasnya yang sangat terbatas. Untuk mengatasi itu, kami (Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa) hanya mengirimbkan LK itu ke instansi tertentu dengan memberikan catatan bahwa jika perlu LK boleh difotokopi.

2. Penanya: Diah, IKIP Malang

a. Pertanyaan:

Saya setuju dengan tanggapan Ibu Zulfahnur. Dalam era globalisasi ini apakah ada celah untuk meningkatkan kerja sama antarinstansi?

b. Jawaban:

Pertanyaan Ibu Diah apakah ada celah untuk kerja sama antarinstansi. Dalam

Kongres Bahasa Indonesia VI yang lalu, IDI, ISEI, dan organisasi profesi yang lain ikut berpartisipasi. Akan tetapi, kelanjutannya dengan organisasi profesi itu belum ada. Kalau orang-orang dalam organisasi profesi itu didekati, kemungkinan mereka akan memberi bantuan yang lebih besar.

3. Penanya: Ahmad Samin Siregar, Universitas Sumatera Utara, Medan

a. Pertanyaan:

- 1) Dalam Kongres Bahasa Indonesia VI pernah diusulkan agar Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dipindahkan ke lembaga nondepartemen (Sekretariat Negara) supaya lebih indenpenden
Bagaimana realisasinya?
- 2) Saya akan mengemukakan tiga saran atau komentar sebagai berikut.
 - (1) Dalam acara Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI, perlu adanya keseimbangan antara bahasa dan sastra.
 - (2) Selama ini cara penyampaian materi Siaran Pembinaan Bahasa Indonesia di TVRI itu kurang menarik.
 - (3) Dalam kegiatan pembinaan bahasa dan sastra Indonesia, kerja sama dengan pemerintahan daerah yang ada di seluruh Indonesia tidak berjalan dengan baik. Untuk itu, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu meninjau kembali kebijakan itu. Kalau bisa dalam pertemuan Mastra orang-orang dari daerah tolong dilibatkan.

b. Jawaban:

Pertanyaan Pak Samin mengenai Pembinaan Bahasa di TVRI berkenaan dengan keseimbangan antara penyiaran bahasa dan sastra sebenarnya sudah dilakukan Pusat Bahasa dengan memberikan perimbangan 2 kali siaran untuk sastra dan 3 kali siaran untuk bahasa dalam 1 bulan.

Penjajagan kerja sama dengan televisi swasta sudah kami lakukan, tetapi terhambat dengan masalah biaya. Acara TVRI kurang diminati orang.

Usul Pak Samin akan dipertimbangkan agar orang-orang daerah dapat dilibatkan dalam Mastra.

**PUTUSAN
KONGRES BAHASA INDONESIA VII
JAKARTA, 26—30 OKTOBER 1998**

I. BAGIAN UMUM

Bahasa Indonesia sudah berkedudukan sebagai bahasa persatuan selama 70 tahun, sejak diikrarkannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Selama kurun waktu itu (1928—1998), bahasa Indonesia mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Di samping sebagai bahasa persatuan, bahasa Indonesia berkedudukan juga sebagai bahasa negara sejak Proklamasi Kemerdekaan pada tahun 1945. Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana komunikasi resmi, sarana pendukung kebudayaan nasional, serta sarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk menghadapi tuntutan dan tantangan perkembangan kehidupan sosial dan budaya, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kehidupan berbangsa dalam era globalisasi, dan teknologi informasi masa kini serta masa yang akan datang dalam milenium ketiga, mutu bahasa Indonesia perlu ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya perlu dikembangkan. Untuk itu, buku tata bahasa, kamus, serta berbagai pedoman penggunaan bahasa perlu dikembangkan lebih lanjut untuk meningkatkan pemberdayaan manusia Indonesia. Di samping itu, sesuai dengan tuntutan pembangunan bangsa, penutur bahasa Indonesia, terutama pejabat dan tokoh masyarakat harus memiliki kemampuan dan perilaku berbahasa yang baik sehingga bahasa Indonesia yang digunakannya dapat dijadikan anutan oleh masyarakat umum.

Kesadaran berbahasa merupakan modal penting dalam mewujudkan sikap berbahasa yang positif yang selanjutnya akan memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai lambang jati diri dan pendukung nilai-nilai luhur budaya bangsa. Untuk itu, penggunaan bahasa Indonesia, baik sebagai bahasa persatuan maupun sebagai bahasa negara, perlu dibina lebih lanjut untuk menghadapi tantangan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, yang penggunaannya makin meluas di Indonesia. Sementara itu, kemampuan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, sesuai dengan kebutuhan, perlu pula ditingkatkan.

Sastra merupakan salah satu unsur kebudayaan dan sarana ekspresi estetis yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan budaya serta menggambarkan kekayaan batiniah bangsa. Sesuai dengan penjelasan Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945, pengembangan sastra sebagai unsur kebudayaan ditujukan kepada kemajuan adab dan persatuan bangsa. Oleh karena itu, apresiasi dan sikap yang positif masyarakat terhadap sastra Indonesia perlu ditingkatkan melalui berbagai cara, terutama pengajaran, pemasyarakatan, dan penelitian karya sastra.

Peranan Indonesia di dalam pergaulan masyarakat bangsa-bangsa di dunia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bahasa yang dipandang penting sehingga sekarang diajarkan di banyak negara. Dengan demikian, pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing perlu dikembangkan secara terencana dan terarah. Salah satu upaya

yang perlu segera dilaksanakan adalah pengembangan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, baik di dalam maupun di luar negeri.

Bahasa daerah di Indonesia dijamin hak hidupnya sesuai dengan penjelasan Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pelestarian dan pengembangan bahasa daerah, yang merupakan aset budaya nasional, harus dilaksanakan agar bahasa dan sastra daerah dapat berkembang dengan baik sehingga dapat dimanfaatkan, baik sebagai sarana penunjang komunikasi maupun sebagai salah satu sumber pemerdayaan bahasa dan sastra Indonesia. Untuk itu, rencana terpadu mengenai pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra daerah perlu segera disusun secara terarah.

II. BAGIAN KHUSUS

A. Memperkukuh Kedudukan Bahasa dalam Era Globalisasi

Era globalisasi ditandai, antara lain, oleh meningkatnya kontak budaya dan komunikasi antarbangsa, terutama dengan menggunakan bahasa Inggris. Dalam hubungan itu, kedudukan dan fungsi bahasa-bahasa yang digunakan di Indonesia perlu dikukuhkan.

Bahasa Indonesia ditempatkan sebagai alat pemersatu, pembentuk jati diri dan kemandirian bangsa, serta wahana komunikasi ke arah kehidupan yang lebih modern dan beradab. Bahasa daerah merupakan sarana pembinaan dan pengembangan budaya, seni, dan tradisi daerah yang dapat memperkuat jati diri bangsa. Bahasa asing merupakan sarana komunikasi antarbangsa dan sarana alih iptek modern.

Untuk memperkukuh kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia dan bahasa daerah, serta memperjelas kedudukan bahasa asing di Indonesia dalam era globalisasi, tindak lanjut yang terpadu dan terarah perlu dipersiapkan dan dilakukan.

Tindak Lanjut

a. Bahasa Indonesia

1. Bahasa Indonesia perlu dibina tidak hanya oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tetapi juga oleh departemen/instansi lain, organisasi profesi, dan dunia usaha.
2. Pengindonesiaan nama dan kata asing di tempat umum perlu diperluas dan dilaksanakan di seluruh Indonesia.
3. Pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang dipersiapkan dan/atau diterbitkan, antara lain, oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
4. Kemampuan berbahasa Indonesia para guru semua bidang studi di semua jenis dan jenjang pendidikan perlu ditingkatkan secara terarah dan terpadu.
5. Kemampuan berbahasa Indonesia para pejabat dan tokoh masyarakat perlu ditingkatkan agar dapat memberikan teladan berbahasa yang baik.
6. Pemasyarakatan bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu makin ditingkatkan sehingga dapat menjangkau segenap lapisan masyarakat, termasuk

kelompok masyarakat yang masih buta bahasa Indonesia, antara lain dengan mencantulkannya di dalam GBHN.

7. Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia.

b. Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

1. Pengajaran dan pemasyarakatan BIPA perlu ditingkatkan baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Perguruan tinggi dan/atau lembaga yang menyelenggarakan pengajaran BIPA perlu mengembangkan program dan bahan BIPA, termasuk metodologi pengajarannya, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.
3. Kantor perwakilan RI di luar negeri perlu lebih berperan dalam mendukung program pemasyarakatan BIPA di luar negeri.

c. Bahasa Daerah

1. Pembinaan dan pengembangan bahasa daerah sebagai bagian kebudayaan Indonesia yang hidup perlu dilaksanakan secara lebih terencana.
2. Penerbitan buku, surat kabar, dan majalah dalam bahasa daerah perlu di giatkan dan didorong.
3. Pengembangan bahan ajar bahasa daerah perlu dilakukan dengan memanfaatkan sumber-sumber rujukan yang telah diterbitkan oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dan/atau lembaga lain di daerah yang bersangkutan.
4. Pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa daerah.

d. Bahasa Asing

1. Kemampuan peserta didik dalam berbahasa asing, terutama bahasa Inggris, perlu ditingkatkan melalui pengembangan program, bahan ajar, dan metodologi pengajaran, sesuai dengan perkembangan pengajaran bahasa asing.
2. Pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, melalui jalur luar sekolah perlu ditingkatkan mutunya dengan menyediakan berbagai kemudahan.
3. Sarana, prasarana, dan sumber daya manusia untuk pengajaran bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di perguruan tinggi perlu dikembangkan.
4. Penerjemahan bahan pustaka sebagai sumber informasi ilmu pengetahuan dan teknologi dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia perlu digalakkan.

e. Organisasi Profesi

1. Organisasi profesi, termasuk organisasi profesi kebahasaan, dan dunia usaha perlu melibatkan diri secara lebih aktif dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia di bidangnya masing-masing.
2. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa perlu terus meningkatkan

kerja sama dengan organisasi profesi.

3. Organisasi profesi dalam bidang pengajaran bahasa, baik bahasa Indonesia, bahasa daerah, maupun bahasa asing, perlu dikembangkan.
4. Kerja sama Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan organisasi profesi kewartawanan perlu ditingkatkan untuk menyebarkan pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar, termasuk pemasyarakatan kata dan istilah baru.

f. Pemerintah Daerah

1. Pemerintah daerah perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dan bahasa daerah, antara lain, dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
2. Para ahli bahasa di daerah perlu dilibatkan dalam meningkatkan mutu pemakaian bahasa Indonesia di lingkungan pemerintah daerah, terutama dalam dokumen resmi.
3. Pemerintah daerah perlu membuka peluang kerja yang lebih luas bagi sarjana bahasa, terutama jurusan bahasa daerah.

B. Meningkatkan Mutu Bahasa sebagai Sarana Komunikasi

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan teknologi informasi, dan tantangan kehidupan dalam era globalisasi menuntut agar kualitas bahasa Indonesia ditingkatkan dan kemampuan daya ungkapnya dikembangkan. Untuk itu, unsur-unsur bahasa seperti sintaksis dan kosakata, termasuk peristilahan, perlu diperkaya. Selain itu, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi di segala bidang perlu lebih dimantapkan untuk menghadapi kenyataan makin meluasnya penggunaan bahasa asing, terutama bahasa Inggris, di Indonesia.

Tindak lanjut

1. Pengembangan peristilahan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi perlu diprioritaskan dan pengembangan kosakata perlu ditingkatkan, antara lain, dengan penyerapan kata dari bahasa lain melalui kaidah penyerapan yang lebih mantap.
2. Penggunaan eufemisme secara berlebihan dengan maksud menutup-nutupi kenyataan yang negatif harus dihindarkan, sedangkan eufemisme yang berkaitan dengan kesopansantunan berbahasa serta adat-istiadat perlu dilestarikan.
3. Mutu pengajaran bahasa dan sastra perlu ditingkatkan dengan menekankan keterampilan berbahasa serta kemampuan mengapresiasi sastra.
4. Penyusunan buku ajar dan instrumen evaluasi berbagai bidang ilmu perlu lebih memperhatikan kaidah-kaidah bahasa baku.
5. Penguasaan bahasa Indonesia baku perlu dijadikan salah satu syarat utama dalam ihwal kepegawaian, seperti penerimaan, penempatan, dan kenaikan pangkat.

6. Di samping buku tata bahasa baku dan kamus yang sudah ada, perlu pula disusun dan diterbitkan buku tata bahasa dan kamus sekolah yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.
7. Penelitian berbagai laras bahasa Indonesia perlu ditingkatkan untuk keperluan penyusunan buku panduan penggunaan laras bahasa Indonesia.
8. Bahasa Indonesia dalam iklan, selain harus mengutamakan dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, juga perlu berpedoman pada norma-norma sosial budaya bangsa sehingga kata-kata yang berkonotasi vulgar tidak digunakan.
9. Buku-buku terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa yang merupakan pedoman pemakaian bahasa Indonesia yang baik dan benar perlu dikaji ulang agar dapat lebih memenuhi tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam era globalisasi.

C. Meningkatkan Apresiasi dan Daya Cipta Sastra

Karya sastra Indonesia dan daerah pada umumnya bersumber pada budaya Indonesia dan nilai-nilai budaya asing yang sudah diramu ke dalam budaya Indonesia dan daerah. Kemampuan memadukan nilai-nilai budaya sendiri dengan nilai-nilai budaya asing ke dalam karya sastra itu merupakan modal dasar daya cipta untuk meningkatkan kualitas kehidupan sastra, yang selanjutnya merangsang perkembangan apresiasi sastra.

Apresiasi sastra dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah memperkaya kehidupan batiniah masyarakat Indonesia. Selain memperkuat jati diri masyarakat Indonesia, kekayaan batiniah juga memberikan peluang kepada masyarakat Indonesia untuk menjadi warga dunia yang terhormat. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya peningkatan apresiasi dan kreativitas dalam sastra Indonesia dan daerah berdasarkan kebijaksanaan yang terpadu.

Tindak Lanjut

a. Meningkatkan Apresiasi Sastra

Untuk meningkatkan apresiasi sastra ditempuh usaha-usaha berikut.

1. Mutu pengajaran sastra perlu ditingkatkan dengan
 - a) menjadikan mata pelajaran sastra sebagai mata pelajaran yang otonom;
 - b) memperbanyak kegiatan membaca dan membahas karya-karya sastra serta memperbanyak latihan menulis karya sastra di sekolah menengah umum;
 - c) menyediakan sarana belajar yang lebih lengkap, baik berupa buku asli, terjemahan, maupun saduran.
2. Penerbitan buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu didukung dan di-giatkan.
3. Perpustakaan yang memiliki buku-buku sastra Indonesia dan daerah perlu diperbanyak sampai ke pelosok tanah air.
4. Komunitas sastra Indonesia dan daerah perlu dibina dan dikembangkan de-

ngan melibatkan para sastrawan dalam berbagai kegiatan.

5. Penulisan kritik sastra Indonesia dan daerah perlu didorong untuk menjembatani karya sastra dengan pembacanya.

b. Meningkatkan Daya Cipta Sastra

Daya cipta sastra perlu ditingkatkan melalui usaha-usaha berikut.

1. Kemudahan untuk memperluas wawasan sastrawan perlu disediakan sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam forum internasional.
2. Hambatan-hambatan terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan menyebarkan karya sastra perlu diupayakan untuk dihilangkan.
3. Hak cipta karya sastra perlu dilindungi secara penuh.
4. Pemerintah perlu memberi penghargaan kepada tokoh-tokoh sastra yang telah berjasa besar dalam pembinaan dan pengembangan sastra Indonesia.
5. Karya-karya sastra terpilih dari komunitas sastra di berbagai daerah perlu diterbitkan.
6. Karya-karya sastra yang terbit dalam media massa cetak, terutama surat kabar, perlu dikembangkan lebih lanjut, misalnya, melalui penilaian dan penerbitan (dalam bentuk antologi).
7. Karya sastra Indonesia dan daerah perlu lebih diperkenalkan di forum internasional, antara lain, melalui penerjemahan.
8. Karya sastra daerah perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan, kalau perlu, ke dalam bahasa asing.

D. Rekomendasi

Putusan Kongres Bahasa Indonesia VI sebagian sudah dilaksanakan, sebagian sedang dalam pelaksanaan, dan sebagian lagi belum terlaksana. Untuk melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum terselesaikan dan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII, direkomendasikan hal-hal sebagai berikut.

1. Melaksanakan putusan Kongres Bahasa Indonesia VI yang belum terlaksana atau belum tuntas.
2. Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk mengembangkan hasil Seminar Politik Bahasa Nasional tahun 1975 dalam rangka menyusun kebijaksanaan nasional yang lebih mutakhir dan menyeluruh dalam bidang bahasa dan sastra.
3. Menyelenggarakan pertemuan nasional untuk menyusun strategi pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah.
4. Mengembangkan lebih lanjut terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa seperti *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan*, *Pedoman Umum Pembentukan Istilah*, *Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia*, dan *Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
5. Mengupayakan penyebarluasan terbitan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa agar dapat diperoleh di pasar bebas.

Untuk menopang pelaksanaan rekomendasi di atas, Kongres Bahasa Indonesia VII mengusulkan pembentukan *Badan Pertimbangan Bahasa* sebagai mitra Pusat

Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Keanggotaan Badan Pertimbangan Bahasa terdiri atas pakar bahasa dan sastra, tokoh masyarakat, dan pakar bidang lain yang mempunyai minat dan perhatian terhadap bahasa dan sastra.
2. Tugas Badan Pertimbangan Bahasa ialah:
 - a. mengupayakan peningkatan status kelembagaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa;
 - b. memberikan nasihat, diminta atau tidak diminta, kepada Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa dalam pelaksanaan tugas Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, termasuk pelaksanaan putusan Kongres Bahasa Indonesia VII;
 - c. melanjutkan pelaksanaan tugas Panitia Kerja Kongres Bahasa Indonesia VI.

Jakarta, 30 Oktober 1998

Tim Perumus

1. Hasan Alwi (Ketua merangkap anggota)
2. Dendy Sugono (Sekretaris merangkap anggota)
3. A. Latief (anggota)
4. Amran Halim (anggota)
5. Soenjono Dardjowidjojo (anggota)
6. Yus Rusyana (anggota)
7. Budi Darma (anggota)
8. Fuad Abdul Hamied (anggota)
9. T.A. Ridwan (anggota)
10. Zainuddin Taha (anggota)

**SAMBUTAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PADA ACARA PENUTUPAN KONGRES BAHASA INDONESIA VII
TANGGAL 30 OKTOBER 1998
DI HOTEL INDONESIA, JAKARTA**

Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh,

Saudara-Saudara peserta Kongres Bahasa Indonesia VII yang berbahagia,

Dalam keadaan kelelahan seperti sekarang ini kita tidak boleh lupa menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT. Kelelahan seperti yang Saudara-Saudara alami saat ini juga merupakan karunia-Nya, merupakan salah satu bentuk nikmat yang dilimpahkan-Nya kepada kita. Saya katakan seperti itu karena kelelahan yang Saudara-Saudara alami bukanlah disebabkan oleh pekerjaan yang sia-sia, melainkan karena tugas-tugas berat yang memeras pikiran, nalar, dan rasio. Itu semua Saudara-Saudara lakukan demi masa depan bangsa dan negara sesuai dengan tema Kongres, yaitu "Pemantapan Peran Bahasa sebagai Sarana Pembangunan Bangsa dalam Era Globalisasi".

Saudara-Saudara, Presiden dalam Pidato Pembukaan Kongres ini pada tanggal 26 Oktober 1998 telah menyampaikan kepada kita bahwa masalah kebahasaan di tanah air kita ini merupakan salah satu masalah strategis yang perlu diperhatikan, diolah, dan dibahas. Bahasa bukan hanya sekadar masalah alat komunikasi, tetapi juga merupakan sikap dan cara berpikir masyarakat.

Di dalam Kongres ini telah dibahas tujuh puluh buah makalah yang berbobot yang disajikan oleh para pakar dari berbagai bidang ilmu, baik pakar dari Indonesia maupun dari luar negeri. Makalah-makalah itu dibahas, diperbincangkan, bahkan diperdebatkan. Hasil pembahasan, perbincangan, dan perdebatan itu bermuara pada satu titik, yaitu suatu tekad untuk tetap memelihara dan mempertahankan bahasa Indonesia pada kedudukannya yang terhormat sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Kesepakatan tersebut tentulah disemangati oleh jiwa Sumpah Pemuda 1928 dan didasari oleh Pasal 36 UUD 1945.

Selain masalah kebahasaan, dalam Kongres ini telah pula diperbincangkan masalah kesastraan. Sastra, sebagai salah satu bentuk seni yang mampu menyentuh perasaan, memperluas wawasan, bahkan dapat menjadikan kita berbuat lebih bijaksana, harus kita perhatikan secara lebih mendalam. Saya merasa sangat bergembira atas telah terselenggaranya pentas sastra dalam rangkaian acara Kongres ini. Dalam kesempatan ini, secara khusus, ingin saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada rekan-rekan sastrawan yang telah berpartisipasi untuk menyemarakkan Kongres ini. Saya berharap kehidupan sastra di tanah air kita, yang selama ini terasa suram dan membungkam, dapat bangkit, muncul, dan berkembang kembali ke permukaan.

Saudara-Saudara, putusan-putusan penting yang telah disepakati di dalam Kongres ini pastilah merupakan masukan yang berharga bagi Pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bangsa dan negara, terutama dalam bidang kebahasaan.

an dan kesastraan, sebagai salah satu unsur kebudayaan. Oleh karena itu, putusan-putusan itu hendaknya segera ditindaklanjuti dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita dewasa ini. Kesempatan ini saya gunakan pula untuk menyatakan terima kasih dan penghargaan saya terhadap jerih payah Panitia, sumbangan pemikiran para pemakalah, dan partisipasi para peserta. Khusus kepada peserta dari luar negeri, saya sampaikan rasa simpati atas kehadiran dan sumbangan pikiran yang Saudara berikan dalam Kongres ini. Saya berharap melalui kerja sama kebahasaan dan kesastraan, kita dapat membina persahabatan yang lebih mesra.

Akhirnya, dengan ucapan *Alhamdulillah rabbil 'alamin* saya nyatakan Kongres Bahasa Indonesia VII ditutup secara resmi.

Wassalamu 'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Juwono Sudarsono

**PEMAKALAH
KONGRES BAHASA INDONESIA VII**

Pemakalah Dalam Negeri

1. Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
2. H.R. Agung Laksono, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga
3. Prof. Dr. Edi Sedyawati, Direktur Jenderal Kebudayaan
4. Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Universitas Indonesia/Sekretariat Negara
5. Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
6. Dr. Hasan Alwi, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
7. Letjen. TNI Agum Gumelar, Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas)
8. Dr. Alwi Dahlan, Kepala BP7
9. Mely G. Tan, Ph.D., Universitas Katolik Atmajaya
10. Prof. Dr. H. T.A. Ridwan, Universitas Sumatera Utara, Medan
11. Ir. Lukman Purnomosidi, M.B.A., Real Estat Indonesia (REI)
12. Judy Uway, Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
13. Drs. Andi Mappi Sammeng, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia (HPBI) Pusat
14. Dr. Multamia R.M.T. Lauder, Masyarakat Linguistik Indonesia (MLI)
15. Prof. Dr. Mursal Esten, Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia (Hiski) Pusat
16. Prof. Ajip Rosidi, Sastrawan
17. Dr. Ignas Kleden, LP3ES
18. Dr. Taufik Abdullah, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
19. Parakitri T. Simbolon, Harian Umum *Kompas*
20. Prof. Dr. Anton M. Moeliono, Universitas Indonesia, Jakarta
21. Ir. Haryanto R. Putro, M.S. dan Dr. A.M. Tohari, Institut Pertanian Bogor
22. Ayu Utami, Sastrawan
23. Dr. Asim Gunarwan, Ph.D., Universitas Indonesia/Sekretariat Negara
24. Prof. Soenjono Dardjowidjojo, Ph.D., Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta
25. Sumita Tobing, Ph.D., Surya Citra Televisi Indonesia (SCTV)
26. Drs. Parni Hadi, Harian Umum *Republika*
27. Hans E. Kawulusan, Dewan Pertahanan dan Keamanan Nasional
28. Prof. Dr. Zainuddin Taha, IKIP Ujung Pandang
29. H.M. Husni Muadz, Ph.D., Universitas Mataram
30. Drs. Jan Hoesada, M.M., Akuntan Publik Drs. Jan Hoesada
31. Miftah Thoha, M.P.A., Ph.D., Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
32. Muradi Juti, S.H., Staf Ahli Menteri Dalam Negeri
33. Prof. Dr. Harimurti Kridalaksana, Universitas Indonesia, Jakarta
34. Dr. Dendy Sugono, S.Pd., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
35. A. Latief, M.A., Widyaiswara Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Depdikbud
36. H.A.S. Natabaya, S.H., L.L.M., Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman

37. Prof. Dr. Amran Halim, Universitas Sriwijaya, Palembang
38. Dr. Komaruddin Hidayat, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta
39. Dr. S. Effendi, Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa
40. Atmakusumah Astraatmadja, Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta
41. Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
42. Felicia N. Utorodewo, S.S., M.Si., Universitas Indonesia, Jakarta
43. Dr. Faruk, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta
44. Prof. Dr. Suripan Sadi Hutomo, IKIP Surabaya
45. Prof. Dr. Achadiati Ikram, Universitas Indonesia, Jakarta
46. Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono, Universitas Indonesia, Jakarta
47. Prof. Dr. Budi Darma, IKIP Surabaya
48. H. Slamet Sukirnantanto, Sastrawan, Jakarta
49. Taufiq Ismail, Sastrawan, Jakarta
50. Ikranagara, Sastrawan, Jakarta
51. Dr. Nafron Hasjim, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
52. B. Rachmanto, M.Hum., IKIP Sanata Dharma, Yogyakarta
53. Drs. Djadjat Sudrajat, Harian Umum *Media Indonesia*
54. Drs. Adi Sunaryo, M.Hum. dan Dr. Sri Sukeksi Adiwimarta, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
55. Dr. Fuad Abdul Hamied, M.A., IKIP Bandung
56. Prof. Dr. Hj. Fatimah Djajasudarma, Universitas Padjadjaran, Bandung
57. Dr. H. Suparno, IKIP Malang
58. Dr. H.A. Chaedar Alwasilah, M.A., IKIP Bandung
59. Dr. Bambang Kaswanti Purwo, Lembaga Bahasa Universitas Katolik, Jakarta Atmajaya
60. Toeti Adhitama, M.A., Redaksi Majalah *Eksekutif*
61. Dr. Rahayu S. Hidayat, Universitas Indonesia, Jakarta
62. Dr. Yayah B. Lumintang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
63. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., Asisten Wakil Presiden RI Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pemakalah Luar Negeri

1. Prof. Dr. Sumalee Nimmanuppap, Ramkhamhaeng University Bangkok, Thailand
2. Evelyn Tan Cullamar, Ateneo de Manila University Philipina
3. Dr. Hein Steinhauer, Universitas Leiden, Belanda
4. Dr. Henri Chambertloir, *Ecole Francaise d'Extreme-Orient*, Jakarta
5. Prof. S. Faizah Sunoto Rivai, Instituto Universitario Orientali-Piazza, Italia
6. Hj. Abbas Mohd. Shariff, Institut Pendidikan Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura
7. Dr. Julia Read, University of New England Australia

PESERTA

DALAM NEGERI

DAERAH ISTIMEWA ACEH

1. Drs. H. Mahmud Ch. Aly, Pemda Tk. I Propinsi DI Aceh
2. Dr. Bakhrum Yunus, Universitas Syiah Kuala
3. Dr. Abdul Djunaidi, M.S., Universitas Syiah Kuala
4. Drs. Yusri Yusuf, M.Pd., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
5. Drs. H. Abdullah Faridan, Universitas Syiah Kuala
6. Drs. Wildan, M.Pd., Universitas Syiah Kuala
7. Drs. Saifudin Mahmud, M.Pd., Universitas Syiah Kuala
8. Drs. Razali, M.Pd., Universitas Syiah Kuala
9. Dra. Nuriah TA., Universitas Syiah Kuala
10. Rositina Taib, M.Hum., Universitas Syiah Kuala
11. Dra. Saadiyah, M.Pd., Universitas Syiah Kuala
12. Drs. M. Amin Yunus, Guru SMU Safiatuddin Banda Aceh
13. Zulkifli, S.Pd., Guru SMU Safiatuddin Banda Aceh
14. Drs. Marhaban Desky, Guru SLTP Taman Siswa PT Arun

SUMATERA UTARA

15. Drs. Amansyah Nasution, Pemda Tk. I Propinsi Sumatera Utara
16. Drs. Abu Bakar, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
17. Prof. Dr. Maruli Butar Butar, IKIP Medan
18. Prof. Dr. Jawasi Naibaho, IKIP Medan
19. Drs. Mutsyuhito Solihin, M.Pd., IKIP Medan
20. Dra. Rosmaini, M.Pd., IKIP Medan
21. Prof. Dra. Yusmaniar Noor, IKIP Medan
22. Dra. Novi Rasmini, M.Pd., IKIP Medan
23. Dr. Khairil Ansari, IKIP Medan
24. Drs. Wan Syaifuddin, M.A., Universitas Sumatera Utara
25. Drs. H. Jumino Suhadi, M.A., Universitas Sumatera Utara
26. Drs. H. Purwanto Siswa, M.A., Universitas Sumatera Utara
27. Prof. H. Ahmad Samin Siregar, S.S., Universitas Sumatera Utara
28. Dra. Rosmawati Harahap, M.Pd., Univesitas Muslim Nusantara Medan

SUMATERA BARAT

29. Drs. H. Armyn A.N., Pemda Tk. I Propinsi Sumatera Barat
30. Prof. Drs. Rizanur Gani, IKIP Padang
31. Drs. Hasanuddin W.S., M.Hum., IKIP Padang
32. Dr. H. Agustiar Syah Nur, M.A., IKIP Padang
33. Prof. Dr. Amir Hakim Usman, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
34. Drs. Halipami Rasyad, IKIP Padang
35. Dra. Asni Ayub, IKIP Padang

36. Dra. Yuslina Kasim, IKIP Padang
37. Anilawati, S.Pd., IKIP Padang
38. Armanto, IKIP Padang
39. Drs. Didik Santoso, IKIP Padang
40. Dirneti, S.Pd., IKIP Padang
41. Dra. Hetti Waluati Triana, IKIP Padang
42. Dra. Ineng Naini, IKIP Padang
43. Drs. Indra Jaya, IKIP Padang
44. Melinda Roza, S.Pd., IKIP Padang
45. Drs. Mustafa Kamil, IKIP Padang
46. Dra. Nurhaida Nuri, IKIP Padang
47. Rita Bur, IKIP Padang
48. Sorta Hutahean, IKIP Padang
49. Drs. Suhardi, IKIP Padang
50. Veridiana Somanto, IKIP Padang
51. Drs. Zulkarnaini, IKIP Padang
52. Rosidah, S.Pd., IKIP Padang
53. Nenri Gusni, IKIP Padang
54. Ramadhona Walis, IKIP Padang
55. Zuraida Chairani, IKIP Padang
56. Hj. Asnani, IKIP Padang
57. Drs. Irwan Wijaya, IKIP Padang
58. Drs. Marah Rusmali, IKIP Padang
59. Drs. Syamsudin Udin, IKIP Padang
60. Dra. Agustina, M.Hum., IKIP Padang
61. Dra. Syahlina Kasim, IKIP Padang
62. Dra. Emidar, IKIP Padang
63. Dra. Syahlinar Udin, IKIP Padang
64. Drs. Syahrul R., M.Pd., IKIP Padang
65. Drs. Yusran Khatib, M.Pd., IKIP Padang
66. Drs. Andria Catri Tamsin, IKIP Padang
67. Drs. Yasnur Asri, M.Pd., IKIP Padang
68. Nasir, S.Pd., IKIP Padang
69. Amrin Tanjung, IKIP Padang
70. Man Hakim, IKIP Padang
71. Dra. Ellya Ratna, IKIP Padang
72. Drs. Irfani Basri, IKIP Padang
73. Drs. Herris Effendi Toha, IKIP Padang
74. Dr. Marjusman Maksun, IKIP Padang
75. Mawadah, IKIP Padang
76. Dr. Nadra, M.S., Universitas Andalas
77. Dra. Aslinda, Universitas Andalas
78. Drs. Syafruddin Sulaiman, Universitas Andalas
79. Drs. Hermawan, M.Hum, Universitas Bung Hatta
80. Drs. Endut Ahadiat, M. Hum., Universitas Bung Hatta

81. Christian LY, Universitas Bung Hatta
82. Drs. Mac Aditiawarman, M. Hum., Universitas Bung Hatta
83. Dra. Irnawati, M.Hum., Universitas Bung Hatta
84. Dra. Yusrita Yanti, M.Hum., Universitas Bung Hatta
85. Drs. Yulizal Yunus Dt. Rajo Bagindo, IAIN Imam Bonjol
86. Drs. Zulfahmi HB, M.Hum., IAIN Imam Bonjol
87. Amir Tanjung, YYI Semen Padang
88. Drs. Ariyanto Thaib, YYI Semen Padang
89. Dra. Yulianelly, M.Pd., STIA LPPN
90. Dra. Yarnelli, M.Pd., STIA LPPN
91. Drs. Zulhelmi, SMP Negeri 3 Solok

RIAU

92. Drs. H.A. Djalil Rasdjid, Pemda Tk. I Propinsi Riau
93. Dr. M. Diah, M.Ed., Universitas Riau
94. Drs. Ruswan, Universitas Riau
95. Drs. Dasri Al Mubari, M.S., Universitas Riau
96. Dra. Hasnah Faizah AR, Universitas Riau
97. Drs. Auzar, M.S., Universitas Riau
98. Dra. Hj. Saidat Dahlan, Universitas Riau
99. Drs. Al Azhar, M.A., Universitas Islam Riau

BENGGULU

100. Drs. A. Rifai Fattah, Pemda Tk. I Propinsi Bengkulu
101. Drs. Sarwit Sarwono, M.Hum., Universitas Bengkulu
102. Drs. Syukri Hamzah, M.Si., Universitas Bengkulu
103. Drs. Susetyo, M.Pd., Universitas Bengkulu
104. Drs. Amril Canrhas, M.S., Universitas Bengkulu
105. Drs. Muh. Arifin, M.Pd., Universitas Bengkulu
106. Dra. Emy Agustina, M.Hum., Universitas Bengkulu
107. Drs. Suhartono, M.Pd., Universitas Bengkulu
108. Drs. Didi Yulistio, M.Pd., Universitas Bengkulu

JAMBI

109. Drs. H. Hasmi Muhtar, Dipl. I.D., Pemda Tk. I Propinsi Jambi
110. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo, M.A., Universitas Jambi
111. Drs. Yon Adlis, M.A., Universitas Jambi
112. Drs. Maizar Karim, M.Hum., Universitas Jambi
113. Dra. Yulisma, Universitas Jambi
114. Dra. Nazurty, Universitas Jambi
115. Drs. Wawan Gunawan, Universitas Jambi
116. Drs. Karomani, Universitas Jambi
117. Larlen, Universitas Jambi
118. Dra. Warni Makmur, M.Hum., Universitas Jambi
119. Dra. Indyah Prana, M. Hum., Universitas Jambi

120. Drs. Maryono, Universitas Jambi
121. Drs. Ahmad Ridha, M.A., Universitas Jambi

SUMATERA SELATAN

122. Ir. H.M. Idris Musa, Pemda Tk. I Propinsi Sumatera Selatan
123. Nangsari Ahmad, Ph.D., Universitas Sriwijaya
124. Dr. Diemroh Ichsan, Universitas Sriwijaya
125. Drs. H. Zainal Abidin Gaffar, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
126. Dr. Mulyadi Eko Purnomo, Universitas Sriwijaya
127. Drs. Kosmansyah, Universitas Sriwijaya
128. Drs. Supriyadi, M.Pd., Universitas Sriwijaya
129. Dra. Hj. Kusmiarti, Universitas Sriwijaya
130. Dra. Hj. Nurbaya, Universitas Sriwijaya
131. Dra. Srirarasati Mulyani, Universitas Sriwijaya
132. Dra. Zahra Alwi, M.Pd., Universitas Sriwijaya
133. Dra. Sri Indrawati, M.Pd., Universitas Sriwijaya
134. Drs. Surip Suwandi. M.Hum., Universitas Sriwijaya
135. Drs. Zainal Abidin Naning, M.A., Universitas Sriwijaya
136. Drs. Sungkowo Soetopo. M.Pd., Universitas Sriwijaya
137. Drs. Yosef Barus, M.A., Universitas Sriwijaya
138. Dra. Sakdiah Wati, M.Pd., Universitas Sriwijaya
139. Chuzaimah Dahlan Diem, M.L.S., Universitas Sriwijaya
140. Drs. Zainal Arifin Aliana, Universitas Sriwijaya
141. Dra. Ratu Wardarita, M.Pd., STKIP PGRI Palembang

LAMPUNG

142. Akmal Jahidi, S.H., Pemda Tk. Propinsi Lampung
143. Dra. Warnidah Akhyar, Universitas Lampung
144. Drs. Wawan Hermawan, M.Pd., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
145. Drs. C. Sutarsyah, Dip.Tesl., M.A., Universitas Lampung
146. Drs. Sudradjat, M.Pd., Universitas Lampung
147. Dra. Wini Tarmimi, M.Hum., Universitas Lampung
148. Dra. Farida Ariyani, M.Pd., Universitas Lampung
149. Drs. Ni Nyoman Wetty, Universitas Lampung
150. Dra. Diana Anisami, Universitas Lampung

DKI JAKARTA

151. Dr. H. Muchsin, S.H., Komisi VII DPR RI
152. H. Muhammad Fikri, Komisi VII DPR RI
153. Prof. Dr. H. Engkoswara, M.Ed., Komisi VII DPR RI
154. Bambang Mintoko M.P., Komisi VII DPR RI
155. R. Bagus Suharyono, S.I.P., S.H., Pemda DKI Jakarta
156. Prof. Dr. Fuad Hassan, Universitas Indonesia
157. Dr. Basuki Suhardi, M.A., Universitas Indonesia
158. Prof. Dr. Ayatrohaedi, Universitas Indonesia

159. Dr. Oke K.S. Zaimar, Universitas Indonesia
160. Dr. Riris K. Toha Sarumpaet, Universitas Indonesia
161. Prof. Dr. Benny H. Hoed, Universitas Indonesia
162. N. Jenny M.T. Hardjatno, S.S., MA., Universitas Indonesia
163. Prof. Dr. Muhadjir, Universitas Indonesia
164. Prof. Dr. Maurits Simatupang, Universitas Indonesia
165. Dra. Agustin Reni Susilowati, Universitas Indonesia
166. Lamria Manulang, Universitas Indonesia
167. Dewaki K. Nugardjito, S.S., M.Hum., Universitas Indonesia
168. Dien Rovita, Universitas Indonesia
169. Djoko Kentjono, M.A., Universitas Indonesia
170. Edwina Satmoko Tanojo, Universitas Indonesia
171. Frans Asisi Datang, Universitas Indonesia
172. B. Kushartanti Widodo, Universitas Indonesia
173. Liberty P. Sihombing, Universitas Indonesia
174. Lita Pamela Kawira, Universitas Indonesia
175. Muhammad Hamidi, S.S., M.A., Universitas Indonesia
176. Miftahuddin Martha, S.Pd., Universitas Indonesia
177. Nitrasattri Handayani, Universitas Indonesia
178. Rasjid Sartuni, S.S., M.A., Universitas Indonesia
179. Tito W. Wojowasito, Universitas Indonesia
180. Sri Munawarah, Universitas Indonesia
181. Sri Murniati Dewayani, Universitas Indonesia
182. Totok Suhardiyanto, Universitas Indonesia
183. Lucy R.ML, Universitas Indonesia
184. Maman S. Mahayana, S.S., M.A., Universitas Indonesia
185. Yusniati Galingging, Universitas Indonesia
186. Aah Hilyati, Universitas Indonesia
187. Dra. Sri Eko Lestari Ninggarawati, Universitas Indonesia
188. Munadi Patmadiwiria, Universitas Indonesia
189. Dr. Boen S. Oemarjati, Universitas Indonesia
190. Maria Indra Rukmi, S.S., M.A., Universitas Indonesia
191. Sawati Suwarso, Universitas Indonesia
192. M.S. Hutagalung, S.S., Universitas Indonesia
193. Gusti Ayu Agung Mas Triadnyani, Universitas Indonesia
194. Dwi Puspitorini, Universitas Indonesia
195. Savitri Elis, Universitas Indonesia
196. Fahrizal, Universitas Indonesia
197. Maria Yosefina Mantik, S.S., M.Hum., Universitas Indonesia
198. Dr. Djati Kerami, Universitas Indonesia
199. Prof. Dr. Sabarti Akhadiah, IKIP Jakarta
200. Drs. Jos Daniel Parera, IKIP Jakarta
201. Dr. H. Achmad H.P., IKIP Jakarta
202. Dr. Juniar Z. Adji, M.Pd., IKIP Jakarta
203. Dr. Kinayati Djojuroto, IKIP Jakarta

204. Dra. Suhertuti, M.Pd., IKIP Jakarta
205. Dra. M.M.Yamilah, IKIP Jakarta
206. Drs. Lukman, IKIP Jakarta
207. Drs. Mukti Umar Sidik, IKIP Jakarta
208. Sintowati Rini Utami, IKIP Jakarta
209. Dra. Rosmid Rosa, IKIP Jakarta
210. Dra. Liliana Muliastuti, IKIP Jakarta
211. Dra. Zulfahnur Z.F., IKIP Jakarta
212. Dra. Sakura H. Ridwan, M.Pd., IKIP Jakarta
213. Hamzah Busrah, IKIP Jakarta
214. Drs. Emzir, M.Pd., IKIP Jakarta
215. Dra. Fathiaty Murtadho, IKIP Jakarta
216. Asep Supriyana, S.S., IKIP Jakarta
217. Dra. Maidar Arsyad, M.Pd., IKIP Jakarta
218. Dra. Tri Wahyuni M., IKIP Jakarta
219. Drs. Zainuddin, IKIP Jakarta
220. Dra. Ratu Badriah, IKIP Jakarta
221. Dra. Titi Djakaria, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
222. Drs. Walija, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
223. Drs. Nawawi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
224. Drs. Ade Hikmat, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
225. Drs. Ummul Qura, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
226. Dra. Prima Gusti Yanti, M.Hum, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
227. Dra. Nani Solihati, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
228. Dra. Nini Ibrahim, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
229. Nur Salim, S.Pd., Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
230. Yamin, S.Pd., Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
231. Dra. Hj. Suhartini Hartono, M.Pd., Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
232. Drs. Edi Sukardi, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka
233. Kresno Yulanto, M.A., Universitas Nasional
234. Dra. Nana Yuliana, M.A., Universitas Nasional
235. Somadi, S.S., Universitas Nasional
236. Dra. M.A. Inez Saptanno, Universitas Nasional
237. Dra. Syahfitri Purnama, Universitas Nasional
238. Dr. Romlah Suhadi, Universitas Nasional
239. Dra. Dwi Sondari, Lembaga Bahasa Hankam
240. Dra. Haslinda Erlina, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
241. Drs. H. Zaidan Hendy, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
242. Drs. Andi St. Rosmaladewi, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
243. Dra. D.W. Siregar, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
244. Dra. Elina Syarif, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
245. Dra. Farida Ariani, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
246. Dra. Supraptiningsih, M.Ed., Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
247. Drs. Mudini, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
248. Dra. Elita Burhanuddin, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa

249. Drs. Eko Djuniarto, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
250. Drs. Endang Nilla P., Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
251. Drs. Nuhung Ruis, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
252. Drs. Basri Syamsu, M.Ed., Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
253. Dra. Enny Angraeni, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
254. Drs. W. Samsudin, Pusat Pengembangan Penataran Guru Bahasa
255. Prof. Dr. Panuti Sudjiman, STIE Perbanas Jakarta
256. Dra. Yeni Suciati, Biro Tata Usaha Sekretariat Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
257. Lamboch V. Nahattands, Sekretariat Negara RI
258. Dra. Hj. R. Kumalaningrum, Direktorat Pendidikan Menengah Umum
259. Drs. Asrom, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
260. Helen Miehle, Konsultan Pengembangan Kurikulum
261. Dr. Ignas Kleden, LP3ES
262. Drs. Arselan Harahap, LP3ES
263. Dra. Lia Angela S. Sofyan, Lembaga Bahasa Atma Jaya
264. Siti Komariah, Lembaga Bahasa Atma Jaya
265. Prof. Dr. J.W.M. Verhaar, Lembaga Bahasa Atma Jaya
266. Drs. Endo Senggono, PDS H.B. Jassin
267. Dra. Ariany Isnamurti, PDS H.B. Jassin
268. Drs. Soejatno Gondowidjojo, PTIK Jakarta
269. Mayor Pol. Sri Umiahi, S.H., PTIK Jakarta
270. Prof. Dr. Indiyah Imron, Universitas Trisakti
271. Prof. P.W.J. Nababan, Ph.D., Universitas Kritis Indonesia
272. Dra. Sundang Nauli Pulungan, ABA Jakarta
273. Erlinda Nilagusti, Universitas Krisna Dwipayana
274. Subagio S. Waluyo, Universitas Krisna Dwipayana
275. Dr. Arief Rachman, M.Pd., SMU IKIP Jakarta
276. Dra Siswasih, M.Hum., SMK 47 Jakarta
277. Dra. Sumarsidah, SMU Negeri 92 Jakarta
278. Dra. Sri Widayati, SMU Negeri 29 Jakarta
279. Dra. Yurni Karim, SMU Negeri 103 Jakarta
280. Dra. Chritina Sumarni, M.B.A., SMU Negeri 6 Jakarta
281. Yusni Harum, SMU Negeri 24 Jakarta
282. Maria E. Susilowati, SMU Fons Vitas 1 Jakarta
283. Dra. Dewi Susilowati, Perguruan Rakyat 1 Srengseng
284. Drs. Sutiyatmi, SMU Perguruan 2 Pondok Kelapa
285. Dra. Agustin Reni Susilowati, SLTP BKUI Jakarta
286. H. Max Mulyadi Supangkat, Majelis Sekolah Kejuruan SMK
287. Dra. Siswasih, M.Hum., Majelis Sekolah Kejuruan SMK
288. Libe Anita R. Malau, SMA Yayasan Sosial
289. Drs. Sutarto, SLTP Negeri 246 Jakarta
290. Dewi Iriani, SLTP Negeri 194 Jakarta
291. Sofya Laadi, SLTP Negeri 194 Jakarta
292. Suparman, S.Pd., SLTP Negeri 21 Jakarta

293. Hj. Titin Dasril, SLTP Negeri 25 Jakarta
294. Dra. Ister F. Barzach, SLTP Negeri 25 Jakarta
295. Drs. Yusuf Soleh, SMTP Negeri 76 Jakarta
296. Ny. F.L. Leinussa L. SLTP PSKD
297. Haryadi, SLTP Negeri 12 Jakarta
298. Sri Yanti, SLTP Negeri 180 Jakarta
299. Wikani Kapti, SMPN 158 Jakarta
300. Drs. Sunarti, SLTP Negeri 256 Jakarta
301. Drs. Nurdin Bedjo, SLTP Negeri 30 Jakarta
302. Dra. Kissumi Dwiyananingsih, SLTP Negeri 123 Jakarta
303. Drs. Supratman A.S., SLTP Negeri 74 Jakarta
304. Dra. Dongsina Napitupulu, M.Pd., SLTP Negeri 74 Jakarta
305. Titin Zainatin, SLTP Negeri 13 Jakarta
306. Tiodora Batuara, SLTP Negeri 13 Jakarta
307. Detya Djafar, SLTP Negeri 97 Jakarta
308. Dra. Ajisarni LZ, SLTP Negeri 232 Jakarta
309. Endang Lukito M., SLTP Negeri 252 Jakarta
310. Ermawati Z., SLTP Negeri 252 Jakarta
311. Sri Endang Handayaningsih, SD Kedaung
312. Drs. Buha Aritonang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
313. Drs. Muhamad Fanani, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
314. Dra. Nikmah Sunardjo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
315. Dra. Sri Winarti, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
316. Dra. Sri Sayekti, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
317. Drs. K. Biskoyo, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
318. Dra. Non Martis, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
319. Dra. Ebah Suhaebah, M.Hum., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
320. Dra. Nantje Harijatiwidjaja, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
321. Dra. Wati Kurniawati, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
322. Dra. Farida Dahlan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
323. Dra. Junaiyah H.M., M.Hum., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
324. Dra. Erlis Nur Mujiningsih, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
325. Dra. Juhriah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
326. Dra. Maini Trisna Jayawati, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
327. Drs. Puji Santosa, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
328. Dra. Marida Gahara Siregar, M.Hum., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
329. Dra. Anita K. Rustapa, M.A., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
330. Dra. Hani'ah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
331. Dra. Dameria Nainggolan, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
332. Dra. Meity Takdir Qodratillah, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
333. Drs. Amran Purba, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
334. Dra. Cormentya Sitanggang, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
335. Dra. Hari Sulastri, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
336. Dra. Alma E. Almanar, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
337. Maryanto, S.Pd., M.Hum., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

- 338. Drs. Isdiarto, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 339. Dra. Atika Sya'rani, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 340. Dra. Sri Timur Suratman, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 341. Dra. Erwina Burhanuddin, M.Hum., Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 342. Drs. A. Patoni, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 343. Drs. Caca Sudarsa, (mantan peneliti) Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
- 344. Dra. Hj. Ipon Sukarsih, Perpustakaan Nasional
- 345. dr. Fasli Djalal, Ph.D., Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 346. Aris Subiyono, S.H., Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- 347. Drs. Roswan, Departemen Keuangan
- 348. Rizal Abbas, S.H., Departemen Keuangan
- 349. Anandi Wati, M.A., Departemen Keuangan
- 350. Drs. Umroni Effendi, Departemen Keuangan
- 351. Satibi al-Faroek, Diklat Profesional Perbankan IBI

Perseorangan

- 352. Drs. Frans M. Parera, PT Gramedia
- 353. Tini Martini, S.H., M.Soc.Sci., Kantor Menteri Koordinator Wasbangpan
- 354. Dra. Trisiati S. Solichin, Pusat Penerjemahan Jakarta
- 355. Sali Endah Warai, M.A., Pusat Penerjemahan Jakarta
- 356. Dra. Sri Indrastuti, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
- 357. Dr. Machi Suhadi, Majalah *Kebudayaan*
- 358. Drs. Soimun, Majalah *Kebudayaan*
- 359. Sri Endang Handayaningsih
- 360. Prof. Dr. Koesnadi Hardjasumantri, Universitas Indonesia
- 361. Prof. Dr. Muljanto Sumardi, Universitas Indonesia
- 362. Dra. Ruth Hutagalung
- 363. PDT Winata Sairin, MTA.

Sastrawan

- 364. Hamid Jabbar
- 365. Leon Agusta
- 366. Sutardji Chalzoum Bachri
- 367. Adi Kurdi
- 368. Putu Wijaya
- 369. Prof. Dr. Tuti Herati Noerhadi
- 370. H. Rosihan Anwar
- 371. Renny Djajoesman
- 372. Rendra
- 373. Gunawan Mohammad
- 374. Mochtar Lubis
- 375. Drs. H. Asrul Sani
- 376. Titiek W.S.

Wartawan

- 377. Rita Sri Hastuti
- 378. Asri Aditya, Majalah *Femina*
- 379. Wisaksono Noeradi, Majalah *Cakram*, Jakarta
- 380. M. Kabul Budiono, Bagian Siaran RRI
- 381. Dra. Siti Komariah, Bagian Siaran RRI
- 382. Yuki Takaoka, Taman Pulo Gebang

JAWA BARAT

- 383. Prof. Mien A. Rifai, M.Sc., Ph.D., APU, Kantor Menteri Riset dan Teknologi
- 384. Drs. Muadz, Pemda Tk. I Propinsi Jawa Barat
- 385. Prof. Dr. J.S. Badudu, Universitas Padjadjaran
- 386. Prof. Dr. H. Moh. Tadjuddin, M.A., Universitas Padjadjaran
- 387. Drs. A. Marzuki, Universitas Padjadjaran
- 388. Tinny Risniwati Male, Universitas Padjadjaran
- 389. Riza Lupi Ardiati, Universitas Padjadjaran
- 390. Dra. Ypsi Soeria S., Universitas Padjadjaran
- 391. Drs. Martius, Universitas Padjadjaran
- 392. Drs. Syamsuddin R. Koida, Universitas Padjadjaran
- 393. Drs. Aep Saeful Bachri, Universitas Padjadjaran
- 394. Prof. Eizo Tajiri, Universitas Padjadjaran
- 395. Drs. Ade surahmat, M.A., Universitas Padjadjaran
- 396. Dra. Neneng Sutiati, Universitas Padjadjaran
- 397. Dra. Titen Rostini, Universitas Padjadjaran
- 398. Dra. Susie Muharam, Universitas Padjadjaran
- 399. Ullly Sutawi kasa, Universitas Padjadjaran
- 400. Hera Hagamoda Lyra, S.S., Universitas Padjadjaran
- 401. Drs. Idot Abdulmuthalib, Universitas Padjadjaran
- 402. Drs. Wanny Tiswaya, Universitas Padjadjaran
- 403. Dra. Maulia Ludrayani, Universitas Padjadjaran
- 404. Dra. Titin Nurhayati Mamua, Universitas Padjadjaran
- 405. Dra. Urlina, Universitas Padjadjaran
- 406. Dra. Susi Malida Lena, Universitas Padjadjaran
- 407. Drs. Dadang Suganda, M.Hum., Universitas Padjadjaran
- 408. Muhammd Nisar, Universitas Padjadjaran
- 409. Drs. Cece Suberna, M.Hum., Universitas Padjadjaran
- 410. Prof. Dr. Yus Rusyana, IKIP Bandung
- 411. Dr. H. Kosadi Hidayat S., M.Pd., IKIP Bandung
- 412. Drs. Andoyo Sastromiharjo, M.Pd., IKIP Bandung
- 413. Prof. Dr. H. Syamsudin A.R., M.S., IKIP Bandung
- 414. Drs. H. Yoyo Mulyana, M.Ed., IKIP Bandung
- 415. Drs. H. Ma'mur Soddie, M. Pd., IKIP Bandung
- 416. Dr. Hj. E. Suryatin, M.Pd., IKIP Bandung
- 417. Atang Ganda Wijaya, S.Pd., IKIP Bandung
- 418. Drs. Kholid A. Harras, IKIP Bandung

419. Dra. Hj. Ice Sutari K.Y., IKIP Bandung
420. Dra. Nunny Sulistiany Idris, IKIP Bandung
421. Dra. Yeti Mulyati, M.Pd., IKIP Bandung
422. Dra. Isah Cahyani, IKIP Bandung
423. Dra. Hj. Uun Unayah, IKIP Bandung
424. Dra. Lilis Siti Sulistianingsih, IKIP Bandung
425. Dra. Noerhayati Soedibyoy, IKIP Bandung
426. Drs. H. Badrun, IKIP Bandung
427. Dra. Nunung Sitarseni, IKIP Bandung
428. Dra. Hj Yoce Aliah Darma, M.Pd., IKIP Bandung
429. Dra. Hj Vismaia Sabariah D, M.Pd., IKIP Bandung
430. Drs. H. Hobin Abdullah, M.Pd., IKIP Bandung
431. Drs. Rudiyo, IKIP Bandung
432. Drs. Usep Kuswari, M.Pd., IKIP Bandung
433. Drs. Akhlan Husen, IKIP Bandung
434. Drs. Iim Rahmina, M.Pd., IKIP Bandung
435. Drs. H.M. Idris Suryana K.W., IKIP Bandung
436. Drs. Aceng Ruhandi, IKIP Bandung
437. Drs. Sutedja Sumadipura, IKIP Bandung
438. Drs. Djago Tarigan, IKIP Bandung
439. Dra. Molly, IKIP Bandung
440. Dra. Nunung Saptiah, IKIP Bandung
441. Dra. Hj. Tiem Kartini, IKIP Bandung
442. Drs. H. Alam Sutawijaya, IKIP Bandung
443. Drs. H.M.E. Suhendar, M.Pd., IKIP Bandung
444. Drs. Wigino Hamid Hamdani, IKIP Bandung
445. Dra. Yeni Yuliani, IKIP Bandung
446. Kardiman, S.Pd., IKIP Bandung
447. Iis Ristiani, S.Pd., IKIP Bandung
448. Drs. Agus Supriatna, IKIP Bandung
449. Drs. Wawan Danasasmita, M.Ed., IKIP Bandung
450. Drs. Encep Kusumah, IKIP Bandung
451. Dra. Hj. R. Kumalaningrum, IKIP Bandung
452. Dra. E. Nuraeni, IKIP Bandung
453. Deni Suswanto, S.Pd., IKIP Bandung
454. Dra. H. Endang K. Rukiati, IKIP Bandung
455. Drs. H. Ukun Suryaman, Universitas Parahiyangan
456. Drs. Subagio S. Waluyo, Unkris, Pondok Gede, Bekasi
457. A. Hadyana Pudjaatmaka, Ph.D., Universitas Pakuan
458. Dra. Ratna D. Bandono, M.Hum., Institut Teknologi Bandung
459. Dra. Hj. Nur Zisri A. Nozar, M.S., Institut Teknologi Bandung
460. Dra. R. Ika Mustika, STKIP Cianjur
461. Dra. Hesti Mustika Ati, STKIP Cianjur
462. Dra. Siti Maryam, M.Pd., STKIP Cianjur
463. Dra. Nyai Umsari, SMU Negeri I Balaraja Tangerang

464. Dra. Ety Rochayati S., M.Hum., Watrawati SKJ Galura Bandung
465. Ny. Kurnia Abung, SLTP Negeri 2 Cikampek
466. Miftahuddin Martha, S.Pd., SLTP Negeri 11 Bandung
467. Dra. Lilik Chaulijah, SLTP Negeri 1 Ciamis
468. Drs. Wawan, SD Majakerta I
469. Ms. Annette Dupont, Lembaga Bahasa Pramita Lippo Karawaci
470. Dra. E. Nuraeni, PPPG Tertulis Bandung

Perseorangan

471. Deni Suswanto, S.Pd.
472. Dra. H. Enung K. Rukiati
473. Dra. Hj. R. Dewi Aminah

JAWA TENGAH

474. Drs. M. Susigit Kusbandrijo, Pemda Tk. I Propinsi Jawa Tengah
475. Dr. B. Karno Ekowardono, IKIP Semarang
476. Dr. Soenardji, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
477. Drs. Rustono, M.Hum., IKIP Semarang
478. Drs. Suroso, M.Pd., IKIP Semarang
479. Drs. Sudaryanto, M.Pd., IKIP Semarang
480. Drs. Zamzani, M.Pd., IKIP Semarang
481. Dr. Suharti, M.Pd., IKIP Semarang
482. Drs. Sutrisna Wibawa, M.Pd., IKIP Semarang
483. Abdullah Fakhri, IKIP Semarang
484. Prof. Hj. Raminah Baribin, IKIP Semarang
485. Prof. Dr. H.D. Edi Subroto, Universitas Sebelas Maret
486. Drs. Djoko Nurkamto, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
487. Drs. Soediro Satoto, Universitas Sebelas Maret
488. Drs. Sarwiji Suwandi, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
489. Drs. Amir, Universitas Sebelas Maret
490. Drs. Edy Suryanto, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
491. Drs. Purwadi, Universitas Sebelas Maret
492. Drs. Budhi Setiawan, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
493. Dra. Retno Winarni, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
494. Drs. Suwandono, Universitas Sebelas Maret
495. Prof. Dra. Juliana Agussalim, Universitas Sebelas Maret
496. Drs. St. Y. Slamet, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
497. Drs. Kunardi Hardjoprawiro, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
498. Waloyo, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
499. Prof. Dr. Herman Yosep Waluyo, M.Pd., Universitas Sebelas Maret
500. Marwoto, Universitas Sebelas Maret
501. Prof. Dr. Soedjarwo, Universitas Diponegoro
502. Dr. Th. Sri Rahayu Prihatmi, M.A., Universitas Diponegoro
503. Drs. Yoediono K.S., S.U., Universitas Diponegoro
504. Ary Setiyadi, M.S., Universitas Diponegoro

- 505. Dra. Sri Mulyati, Universitas Pancasakti Tegal
- 506. Prof. Dr. H. Sardanto Tjokrominoto, Universitas veteran Sukoharjo
- 507. Dra. Esti Iswati, M.Pd., Universitas Widya Dharma Klaten
- 508. Drs. Sajid Iskandar S., IAIN Walisongo

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- 509. Drs. K.M.T. Putronegoro, Pemda Tk. I Propinsi DI Yogyakarta
- 510. Drs. Suminto A. Sayuti, Universitas Gajah Mada
- 511. Prof. Dr. Rachmat Djoko Pradopo, Universitas Gajah Mada
- 512. Drs. Suhandano, Universitas Gajah Mada
- 513. Drs. Suharsono, Universitas Gajah Mada
- 514. Dr. Daiso Nitta, Universitas Gajah Mada
- 515. Prof. A. David Reeve, Universitas Gajah Mada
- 516. Drs. Haryadi, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 517. Drs. Suroso, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 518. Drs. Sudaryanto, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 519. Drs. Zamzani, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 520. Dr. Suharti, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 521. Drs. Sutrisna Wibawa, M.Pd., IKIP Yogyakarta
- 522. Jabrohim, Universitas Achmad Dahlan
- 523. Drs. Y. Karmin, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
- 524. Drs. Suwadji, Balai Penelitian Bahasa
- 525. Drs. Slamet Riyadi, Balai Penelitian Bahasa
- 526. Drs. Adi Triyono, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
- 527. Drs. Widada, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
- 528. Drs. Syamsul Arifin, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
- 529. Drs. Umar Sidik, S.I.P., Balai Penelitian Bahasa
- 530. Drs. Imam Budi Utomo, Balai Penelitian Bahasa
- 531. Drs. Sumadi, Balai Penelitian Bahasa
- 532. Drs. Sri Haryanto, Balai Penelitian Bahasa
- 533. Heriyanto, SD Muh. Bojong Pleret Bantul
- 534. Lindsay Neil Balbin, Linguistik/Rusear of Yoyakarta
- 535. Prof. David Riceve, Linguistik/Rusear of Yoyakarta

JAWA TIMUR

- 536. H. Suparjono, S.H., M.Si., Pemda Tk. I Propinsi Jawa Timur
- 537. Drs. Mulyono, M.Hum., IKIP Surabaya
- 538. Drs. Soerono Martorahardjo, IKIP Surabaya
- 539. Drs. Murdiyanto, IKIP Surabaya
- 540. Nur Indrayani, SLTP Surabaya
- 541. Dra. Mislinatal Solediyah, SLTP Malang
- 542. Dra. Iis Hikayati, SLTP Malang
- 543. Mulyono G.S., SDN Mojokerto
- 544. Dr. H. Nuril Huda, M.A., IKIP Malang
- 545. Dr. Aminuddin, M.Pd., IKIP Malang

- 546. Drs. Muchsin Ahmadi, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
- 547. Dr. Djoko Saryono, IKIP Malang
- 548. Drs. Mujianto, IKIP Malang
- 549. Drs. Widodo H.S., IKIP Malang
- 550. Drs. A. Fuad Effendy, IKIP Malang
- 551. Mahana Gipayana, M.Pd., IKIP Malang
- 552. Drs. Syukur Ghazali, IKIP Malang
- 553. Prof. Dr. H. Soeseno Kartomihardjo, M.A., IKIP Malang
- 554. Dr. Abdul Wahab, M.A., IKIP Malang
- 555. Drs. S. Soeharsono, IKIP Madiun
- 556. Dra. Trisna Kumala Satya Dewi, M.S., Universitas Air Langga
- 557. Dra. Sutji Hartiningsih, Universitas Air Langga
- 558. Bea Tanggraeni, Universitas Air Langga
- 559. Dra. Dwi Handayani, Universitas Air Langga
- 560. Dra. Sartini, Universitas Budi Utomo
- 561. Drs. Soegiatanto, Universitas Jember

KALIMANTAN BARAT

- 562. H. Ibrahim Salim, Pemda Tk. I Propinsi Kalimantan Barat
- 563. Drs. Martono, Universitas Tanjung Pura
- 564. Drs. Totok Priyadi, M.Pd., Universitas Tanjung Pura
- 565. Prof. Dra. Suryati B. Azharie, Universitas Tanjung Pura
- 566. Drs. Abdussamad, Universitas Tanjung Pura
- 567. Drs. Sukamto, M.Pd., Universitas Tanjung Pura
- 568. Drs. Chairil Effendy, M.S., Universitas Tanjung Pura
- 569. Drs. Ahadi Sulis Sutiawan, Universitas Tanjung Pura
- 570. Drs. Syawalid M.Y., HKBI Cabang Ketapang Kalbar
- 571. Dra. Darsita, SMU Negeri I Pontianak

KALIMANTAN TENGAH

- 572. Ir. Patris L. Sera, Pemda Tk. I Propinsi Kalimantan Tengah
- 573. Prof. K.M.A.M. Usop, M.A., Universitas Palangkaraya
- 574. Drs. Max Turangan, Universitas Palangkaraya
- 575. J. Djoko S. Passandaran, Universitas Palangkaraya
- 576. Dra. Supriatun, BPG Palangkaraya
- 577. Drs. Riyadi Panela Putra, Pimbagpro Kalimantan Tengah

KALIMANTAN SELATAN

- 578. Drs. H. Raymullan, Pemda Tk. I Propinsi Kalimantan Selatan
- 579. Dr. Djantera Kawi, Universitas Lambung Mangkurat
- 580. Dr. Darmansyah, Universitas Lambung Mangkurat
- 581. Prof. Dr. Durdje Durasid, Universitas Lambung Mangkurat
- 582. Drs. Abdurachman Ismail, Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
- 583. Prof. Dr. Fudiat Suryadikara, M.A., Universitas Lambung Mangkurat
- 584. Prof. H.M. Nansi Mirharnuddin, Universitas Lambung Mangkurat

- 585. Drs. H. Rustam Effendi, Universitas Lambung Mangkurat
- 586. Drs. Zainuddin Hanafi, Universitas Lambung Mangkurat
- 587. Dra. Zahkiah Agus Kusasi, Universitas Lambung Mangkurat
- 588. Dra. Nirmala Sari, M.A., Universitas Lambung Mangkurat
- 589. Drs. Zulfaisal Putera, SMU Negeri 10 Banjarmasin
- 590. Drs. H. Anang Kamberani, SMU Negeri 6 Banjarmasin

KALIMANTAN TIMUR

- 591. Drs. H.A. Waris Husain, Pemda Tk. I Propinsi Kalimantan Timur
- 592. Drs. Mursalim, M.Hum., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
- 593. Drs. Masman Hatuwe, M.Pd., Universitas Mulawarman
- 594. Drs. Syafruddin Pernyata, M.Hum., Universitas Mulawarman
- 595. Dr. M. Jafar Haruna, M.S., Universitas Mulawarman

SULAWESI UTARA

- 596. Dra. Joyce W. Biran, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Utara
- 597. Prof. Dr. H. Hunggu Tadjuddin Usup, IKIP Manado
- 598. Prof. Dr. J. Akun Danie, IKIP Manado
- 599. Dr. George Bawole, IKIP Manado
- 600. Prof. Dr. Mansoer Pateda, STKIP Gorontalo
- 601. Prof. Dr. Nani Tuloli, STKIP Gorontalo
- 602. Dra. Sayama Malabar, M.Pd., STKIP Gorontalo
- 603. Dra. Ha. Sofia Tuloli B., STKIP Gorontalo
- 604. Drs. Husain Junus, STKIP Gorontalo

SULAWESI TENGAH

- 605. Abdurrajjid Korompot, S.H., Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Tengah
- 606. Prof. Dr. Elfriada W.S. Sumampouw, Universitas Tadulako
- 607. Drs. Amir Kadir, Universitas Tadulako
- 608. Drs. A. Gani Hali, M.A., Universitas Tadulako
- 609. Dra. H. Nurhayati Ponule, M.S., Universitas Tadulako
- 610. Drs. Abdillah Abdul Rahim, M.S., HPBI Cabang Palu
- 611. Drs. Sabaruddin, SLTP Negeri 15

SULAWESI SELATAN

- 612. Drs. A. Tjoneng Mallombasang, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 613. Dra. Hamsiah, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 614. Basri, S.S., Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 615. Faisal Jaffar, S.Ag., Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 616. Drs. Akumal Hamsah, M.P.A., Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 617. Drs. A. Badiahwan, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 618. Drs. Masri, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 619. Dra. Naslailah Ibrahim, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Selatan
- 620. Prof. Dr. Kamaruddin, M.A., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
- 621. Prof. Dr. H. Syahrudin Kaseng, IKIP Ujung Pandang

622. Prof. Dr. Husen Abas, M.A., IKIP Ujung Pandang
623. Dra. Syamsudduha, IKIP Ujung Pandang
624. Drs. Ansahari, IKIP Ujung Pandang
625. Drs. Achmad Tolla, M.Pd., IKIP Ujung Pandang
626. Drs. Salam, M.Pd., IKIP Ujung Pandang
627. Ahmad Abdillah, M.S., IKIP Ujung Pandang
628. Paris Kusnadi, S.Pd., IKIP Ujung Pandang
629. Muh. Asdan, S.Pd., IKIP Ujung Pandang
630. Dahlia Patiung, S.Ag., IKIP Ujung Pandang
631. A. Hartanas, S.Pd., IKIP Ujung Pandang
632. Drs. Risdi Room, IKIP Ujung Pandang
633. Syahluddin, S.Pd., IKIP Ujung Pandang
634. Abdul Kadir, S.Pd., IKIP Ujung Pandang
635. Prof. Dr. Hj. Sugira Wahid, M.S., IKIP Ujung Pandang
636. Dra. Muminah Sulaiman, IKIP Ujung Pandang
637. Dra. Suhermi, IKIP Ujung Pandang
638. Drs. Filmar, IKIP Ujung Pandang
639. Sukirman, S.S., IKIP Ujung Pandang
640. Ahlal Hakim, IKIP Ujung Pandang
641. Muslimin, IKIP Ujung Pandang
642. Abdul Anzuar, IKIP Ujung Pandang
643. Dr. Hamzah A. Machmoed, M.A., Universitas Hasanuddin
644. Prof. Dr. Fahrudin Ambo Ewre, Universitas Hasanuddin
645. Dra. Ery Iswary, M.Hum., Universitas Hasanuddin
646. Dra. Nurhayati, M.Hum., Universitas Hasanuddin
647. Drs. Ikhwan M. Said, Universitas Hasanuddin
648. Dra. Kamsinah, Universitas Hasanuddin
649. Muhammad Taufik, Universitas Hasanuddin
650. Prof. Dr. H.M. Ide Said D.M., M.Pd., Universitas Hasanuddin
651. Mustafa Makkah, Universitas Hasanuddin
652. Zainuddin, Universitas Hasanuddin
653. Lollong Manting, Universitas Hasanuddin
654. Sudirman, Universitas Hasanuddin
655. Andi Hasanuddin, Universitas Hasanuddin
656. Arifin Usman, Universitas Hasanuddin
657. Supirman, Universitas Hasanuddin
658. Darmawan, Universitas Hasanuddin
659. Nur Alam, Universitas Hasanuddin
660. Drs. Nurdin Langgole, M.S., Universitas Hasanuddin
661. Dra. Nun Taqiza Amin, Universitas Hasanuddin
662. Sri Diharti, S.S., Universitas Hasanuddin
663. Dra. Nursiah Rauf, Universitas Hasanuddin
664. Drs. Mayong Maman, M.Pd., Universitas Hasanuddin
665. Drs. Rusdi, Universitas Hasanuddin
666. Drs. Arifin Zaidin, Universitas Hasanuddin

- 667. Syafluddin, Universitas Hasanuddin
- 668. Drs. Tamunse, Universitas Hasanuddin
- 669. Drs. Junia Jarila, Universitas Hasanuddin
- 670. Hasmanati, S.Pd., Universitas Hasanuddin
- 671. Sitti Sapiah, S.S., Universitas Hasanuddin
- 672. Drs. Ferry Rita, Universitas Hasanuddin
- 673. Dra. Mantasiah, Universitas Hasanuddin
- 674. Drs. Muslimin, M.T., Universitas Hasanuddin
- 675. Dra Joha Amin, Universitas Hasanuddin
- 676. Dra. Sainec Lantusa, Universitas Hasanuddin
- 677. Wahida, S.S., Universitas Hasanuddin
- 678. Dra. Syahrial Madjid, Universitas Hasanuddin
- 679. Dra. Salugati, Universitas Hasanuddin
- 680. Dra. Nuzah Sjam, Universitas Hasanuddin
- 681. Drs. Fahmi Syam, Universitas Hasanuddin
- 682. Neni Suliati, S.Pd., Universitas Hasanuddin
- 683. Drs. H.M. Dahlan Abubakar, Universitas Hasanuddin
- 684. Drs. Muliadi, Universitas Hasanuddin
- 685. Dra. Mahmudah, M.Hum., Unismuh Makasar
- 686. Dr. Ny. Hj Masrurah Mohtar, M.S., Universitas Muslim Indonesia
- 687. Dra. Sitti Rabiah, Universitas Muslim Indonesia
- 688. Drs. Zainuddin Hakim, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 689. Drs. Adnan Usmar, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 690. Drs. Mustamin Basran, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 691. Dra. Sarbiah, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 692. Dra. Jenniati, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 693. Drs. Abdul Rasjid, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 694. Dra. Mahmudah, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 695. Dra. Murmahyati, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 696. Drs. Adri, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 697. Dra. Salman Djirong, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 698. Drs. Jemain, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 699. Drs. David Gustaf Manuputy, Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang
- 700. Dra. Zainab, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa Ujung Pandang

SULAWESI TENGGARA

- 701. Drs. H. Mitjtjo Tahir, Pemda Tk. I Propinsi Sulawesi Tenggara
- 702. H.A. Karim Aburaera, S.H., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
- 703. Drs. Zalili Sailan, Universitas Haluoleo
- 704. Drs. La ode Balawa, Universitas Haluoleo
- 705. Drs. Hann, Universitas Haluoleo

BALI

- 706. Drs. I Gusti Agung Mayun Eman, Pemda Tk. I Propinsi Bali
- 707. Prof. Dr. I Wayan Bawa, Universitas Udayana

708. Dr. Aron Meko Mbete, Universitas Udayana
 709. Dr. I Made Suastika, S.U., Universitas Udayana
 710. Nyoman Riasa, Universitas Udayana
 711. Drs. I Nyoman Sedeng, Universitas Udayana
 712. Drs. I Nengah Mileh, Universitas Udayana
 713. Drs. Sigit Haryanto, Universitas Udayana
 714. Drs. F.X. Sawardi, Universitas Udayana
 715. Drs. I Wayan Japa, Dip.Appl.Ling. Universitas Udayana
 716. Drs. I Ketut Redjasa, B.A., Universitas Udayana
 717. Drs. Edy Jauhari, Universitas Udayana
 718. Drs. I Wayan Sudiarta, Universitas Udayana
 719. Drs. Zulfian Elfiando, Universitas Udayana
 720. I Kade Wilaga, S.S., Universitas Udayana
 721. Drs. Sunu Catur B., Universitas Udayana
 722. Drs. Murdiyanto, Universitas Udayana
 723. Dra. Ni Made Darwati J., Universitas Udayana
 724. Drs. Ida Bagus Putrayasa, M.Pd., Universitas Udayana
 725. Prof. Dr. Sumarsono, M.Ed., STKIP Singaraja
 726. Drs. I Gusti Bagus Ngurah Ardjana, B.A., Balai Penelitian Bahasa
 727. Drs. I Wayan Tama, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
 728. Drs. I Made Purwa, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
 729. Drs. I Nengah Sukayana, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
 730. I Nyoman Suarjana, M.Hum., Balai Penelitian Bahasa
 731. Dra. Ni Wayan Aryani, Balai Penelitian Bahasa
 732. Dra. Ni Wayan Sudiati, Balai Penelitian Bahasa
 733. Drs. I Ketut Mandala Putra, Balai Penelitian Bahasa
 734. Drs. I Nengah Semeta S., Balai Penelitian Bahasa

NUSA TENGGARA BARAT

735. Drs. Syahri Suwandi, Pemda Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Barat
 736. Drs. Ahmad Badrun, M.Hum., Universitas Mataram
 737. Drs. Lalu Ahmad Muhidin, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

NUSA TENGGARA TIMUR

738. Asisten Kesejahteraan Sosial, Pemda Tk. I Propinsi Nusa Tenggara Timur
 739. Dr. Threes Yosephine Kumanireng, Universitas Nusa Cendana
 740. Drs. Abraham Gampar, Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

MALUKU

741. Drs. John L.E. Rahantoknam, Pemda Tk. I Propinsi Maluku
 742. Drs. Zainuddin, Universitas Pattimura
 743. Drs. Abdul Latief Rengur, Universitas Pattimura
 744. Drs. Gufron Ali Ibrahim, M.S., Himpunan Pembina Bahasa Indonesia
 745. Dra. Rainanur Latif, M.Hum., Universitas Chairun Ternate
 746. Drs. H.M. Jusuf Abdulrahman, Universitas Chairun Ternate

IRIAN JAYA

- 747. Drs. H.A.S. Soepardi, Pemda Tk. I Propinsi Irian Jaya
- 748. Soewarto Handoko, S.H., Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
- 749. Drs. Christ Fautngil, Universitas Cendrawasih
- 750. Drs. Theodorus T. Purba, M.Sc., Universitas Cendrawasih
- 751. Drs. Frans Rumbrawer, M.Si., Universitas Cendrawasih

TIMOR TIMUR

- 752. Gabriel Bria, B.A., Pemda Tk. I Propinsi Timor Timur
- 753. Drs. Yoseph Yapi Taum, M.Hum., Universitas Timor Timur

LUAR NEGERI**Malaysia**

- 754. Puan Hajah Noresah binti Baharom, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur
- 755. Encik Zubaidi Abas, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur
- 756. Dayang Faridah, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kuala Lumpur
- 757. Awang Hanafiah bin Aw. Hj. Zaini, Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan

Jepang

- 758. Shigeru Morisuanta
- 759. Prof. Jato Masanoli
- 760. Prof. Darlid Riceve

Hongkong

- 761. Dr. Edmun A. Anderson

**PANITIA
KONGRES BAHASA INDONESIA VII**

I. Pelindung

1. Prof. Dr. H. Haryono Suyono, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan
2. Prof. Dr. Juwono Sudarsono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. H.R. Agung Laksono, Menteri Negara Pemuda dan Olahraga

II. Panitia Pengarah

- | | |
|---|-------------|
| 1) Prof. Dr. Edi Sedyawati
Direktur Jenderal Kebudayaan | Ketua |
| 2) Prof. Dr. Amran Halim
Universitas Sriwijaya | Wakil Ketua |
| 3) Dr. Hasan Alwi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Sekretaris |
| 4) Prof. Dr. Anton M. Moeliono
Universitas Indonesia | Anggota |
| 5) Prof. Dr. Saparinah Sadli
Universitas Indonesia | Anggota |
| 6) Ilen Surianegara
Budayawan | Anggota |
| 7) Basyumi Suriamiharja
Pengurus PGRI | Anggota |
| 8) Hans E. Kawulusan
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional | Anggota |
| 9) Prof. Dr. Mien A. Rifai
Staf Ahli Menteri Riset dan Teknologi | Anggota |
| 10) Prahastoeti Adhitama, M.A.
Majalah <i>Eksekutif</i> | Anggota |
| 11) Prof. Dr. Sapardi Djoko Damono
Universitas Indonesia | Anggota |
| 12) Dr. Bambang Kaswanti Purwo
Masyarakat Linguistik Indonesia | Anggota |
| 13) Drs. Andi Mappi Sammeng
Himpunan Pembina Bahasa Indonesia Pusat | Anggota |
| 14) Prof. Dr. Mursal Esten
Himpunan Sarjana Kesusastraan Indonesia Pusat | Anggota |
| 15) Dr. Hans Lapoliwa, M.Phil.
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa | Anggota |

III. Panitia Penyelenggara

- | | | |
|-------------|---|-------------------|
| Ketua | : | Dr. Hasan Alwi |
| Wakil Ketua | : | Dr. Nafron Hasjim |

Tim Teknis:

1. Drs. Lukman Ali
Universitas Indonesia
2. A. Latief, M.A.
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
3. Dr. S. Effendi
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa
4. Dr. Sri Sukesi Adiwimarta
Universitas Indonesia
5. Drs. Nunus Supardi
Direktorat Jenderal Kebudayaan
6. Dr. Edwar Djamaris
Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa

Bidang

1. **Sekretariat** : Drs. Hasjmi Dini (Ketua)
Seksi:
 - 1) **Persuratan**

Ketua	: Drs. M. Nurhanandi
Anggota	: Sarwono Warno Dian Pitaloka, S.E. Siti Darini, S.Sos. Warku Ahmad Lesteluhu Munjari Siti Sapurah Dedeh Ipah Syarifah Asman A.S. Hamidah
 - 2) **Pendaftaran dan Perjalanan**

Ketua	: Drs. Amir Mahmud
Anggota	: Drs. Sutaryo Wahyu Hidayat, S.H. Abdul Rachman Idris Untoro Rachmanto
 - 3) **Keuangan**

Ketua	: Drs. Suhadi
Anggota	: Sri Sutarti Warkim Harnaedi Nasim

Endang Sulistiyanti
Murtiyati
Rifman
Tukiyar
Samijati

4) Penggandaan

Ketua : Drs. Djamari
Anggota : Radiyo
Sunarko
Dede Supriadi
Sri Kanti Widada
Sunarto Rudy
Kartiyah
Sutini

5) Perlengkapan

Ketua : Drs. E. Asmad
Anggota : Drs. Rapendi
Sujitno
Arman
Medrawati
Edi Suyanto
Sukardi

Pembantu : Drs. Kadirman Saragih
Tutug Istanto
Ansori
Purwanto
Syarif
Nunung Mulyadi
Sutrisno
Yusrizal
Suhayat
Rudi
Mujiman
Saiful Hadi
Ramidi
Slamet

6) Protokol

Ketua : Dra. Elly Wahyuni
Anggota : Thonny Songjanan, S.Sos.
Supriyanto
Mahmud, S.M.Hk.

Woro Juliah
Sutinari

- 2. Persidangan** : Dr. Dendy Sugono, S.Pd. (Ketua)
- Seksi:
- 1) Permakalahan
- Ketua : Drs. Mustakim, M.Hum.
- Anggota : Drs. Haryanto
Drs. Suryo Handono
Drs. M. Muis
Dra. Rini Adiati Ekoputronti
Dra. Ovi Soviaty Rivai
- Pembantu : Surahman
Supar
Dasmu
Yusuf
- 2) Persidangan
- Ketua : Drs. Abdul Gafar Ruskhan, M.Hum.
- Anggota : Drs. Saksono Prijanto, M.Hum.
Drs. S.S.T. Wisnu Sasangka
Drs. Fairul Zabadi
Drs. Martin
Drs. Suladi
Drs. Sutejo
- Pembantu : Susilowati
Endang Suprihatin
Lilik Dwi Yuliati
- 3) Pelaporan
- Ketua : Drs. Abdul Rozak Zaidan, M.Hum.
- Anggota : Drs. S. Amran Tasai, M.Hum.
Drs. Moh. Abdul Khak, M.Hum.
Dra. Siti Zahra Yundiafi, M.Hum.
Drs. Dedi Puryadi
Drs. Sriyanto
- Pembantu : Ishak
Sukadi
Endang Siswanti
Ibrahim Abubakar
Budiyono
Sujatmo

3. **Logistik** : Drs. S.R.H. Sitanggang, M.A. (Ketua)

Seksi:

1) Akomodasi/Konsumsi

Ketua : Sartiman
 Anggota : Hartatik
 Faridah
 Erwin Subagio
 Ciptodigiyarto
 Zainuddin Wahab
 Sumijati
 Retno Bertha

Pembantu : Taesih
 Zubaedah
 Lince Siagian
 Endang Woro Retnowati

2) Keamanan

Ketua : Drs. Margono
 Anggota : Suraji
 Gunawan
 Sumanto
 Baridin
 Arkhan
 Rachmat
 Dedi Setiadi
 Darmo

3) Transportasi

Ketua : Sartono, S.Sos.
 Anggota : Sarnata
 Suprpto
 Suwardi
 Ayip Syarifuddin
 Nano Sumarno

4) Kesehatan

Ketua : dr. Julianto
 Anggota : dr. Fanggawati
 Siti Hasanah
 Neneng Yuwara
 Sri Purwoningsih
 Ngatim Gultom

- Pembantu : Erlin
Reksi
- 4. Penerangan** : Drs. Adi Sunaryo, M.Hum. (Ketua)
Seksi:
- 1) Informasi
- Ketua : Drs. B. Trisman, M.Hum.
Anggota : Budi Iswanto, S.H.
Dra. Siti Aisyah
Dra. Lustantini Septiningsih
Dra. Wiwiek Dwi Astuti
Drs. Syamsarul
Dra. Lien Sutini
Dra. Neswita
Drs. Syahidin Badru
Drs. Teguh Dewabrata
- 2) Dokumentasi
- Ketua : Drs. Slamet Riyadi Ali
Anggota : Drs. Muhammad Jaruki
Drs. Suharna
Budiono Isas, B.A.
- 5. Pustaka dan Seni** : Dr. Yayah B. Lumintintang (Ketua)
Seksi:
- 1) Pameran
- Ketua : Dra. Jumariam, M.Ed.
Anggota : Dra. Aloysia Indrastuti
Drs. Sukasdi
Dra. Mariamah
Drs. Kasno
Dra. Eem Suhaemi
Agnes Santi, B.Sc.
Anwar May
Susiaty M.P.
- Pembantu : Dra. Rr. Dwiantari
Dra. Ani Mariani
Dra. Tri Iryani Hastuti
Drs. Hidayatul Astar
Dra. Rubikem
Drs. R.B. Chrismanto
Sri Sudharti
Sagimin



Dwi Pujiastuti
Edi Bambang S.

2) Pentas Sastra

Ketua : Drs. Agus Sri Danardana
Anggota : Dra. Nurweni Saptawuryandari
Drs. Widodo Djati
Dra. Dwi Pratiwi
Dra. Mumun Siti Murdinah

PERPUSTAKAAN PUSAT BAHASA

Tgl. Kembali	Tgl. Kembali	Tgl. Kembali
26-10-2007		

PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA

